



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI
OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES (OCTs)
PERANCIS DAN BELANDA BERDASARKAN *ARTICLE 198*
TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION
2007**

SKRIPSI

**WAHYU DEFERY SETIAWAN
0806343411**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI
OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES (OCTs)
PERANCIS DAN BELANDA BERDASARKAN *ARTICLE 198*
TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION
2007**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**WAHYU DEFRI SETIAWAN
0806343411**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wahyu Defry Setiawan

NPM : 0806343411

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

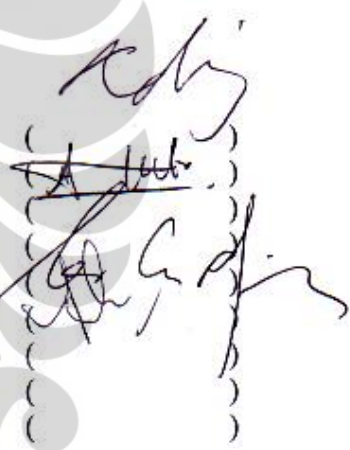
Nama : Wahyu Defry Setiawan
NPM : 0806343411
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

“Tinjauan Hukum Internasional mengenai *Overseas Countries and Territories (OCTs)* Perancis dan Belanda berdasarkan *Article 198 Treaty on the Functioning of the European Union 2007*”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M
Pembimbing II : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M
Penguji : Prof. Dr. R.D. Sidik Suraputra, SH
Penguji : Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, SH.,MH
Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D
Penguji : Prof. A. Zen Umar Purba, SH., LL.M
Penguji : Adolf Warouw, SH., LL.M
Penguji : Emmy Juhassarie Ruru, SH., LL.M
Penguji : Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M., Ph.D



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Learn to stand in the other's shoes, each side can see the world through the other's eyes. That's what we should be encouraging. That's what we should be promoting.
(President Obama's Address to the UN General Assembly 2011)

Tiada pelajaran yang paling berharga dalam hidup ini melainkan sebuah pengalaman. Tanpa perlu melihat apakah itu pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pelajaran yang didapat dari pengalaman-pengalaman tersebut kemudian menjadi ramuan yang meracuni Penulis untuk berani mengukir mimpi besar. Mimpi yang kemudian diaktualisasikan dengan kerja-kerja besar untuk kebaikan dan peradaban umat manusia.

Penulis bersyukur bahwa penulisan skripsi ini adalah salahsatu langkah aktualisasi dari kerja besar untuk mimpi tersebut. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan pernah menjadi sebuah 'hidangan akademis' tanpa peran dari banyak pihak yang telah bermanfaat bagi Penulis. Semangat, motivasi, nasehat, mimpi dan energi-energi positif lainnya yang dengan ikhlas ditularkan kepada Penulis. Untuk itu, izinkan Penulis untuk merangkai ungkapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, dzat yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi umat manusia atas limpahan nikmat kesehatan, kekuatan dan kemudahan jalan bagi Penulis selama penulisan skripsi ini yang sarat dengan rintangan dan tantangan namun penuh berkah.
2. Kedua orang tua Penulis, Papi Perry Syafnats Amir dan Mami Hardeffi Harun, yang telah dengan susah payah berjuang dan berkorban dalam merawat, membesarkan dan mendidik Penulis dari balita yang '*mangincah aia pipis*' hingga menempuh pendidikan sampai skripsi ini diselesaikan. Ijinkan *Korea* mempersembahkan karya ini kepada Papi dan Mami sebagai unjuk bukti dari bakti seorang anak kepada orangtuanya.
3. Uda Mhd. Hanafi 'Han' Kurniawan, kakak Penulis satu-satunya yang tidak pernah berhenti memompa semangat, mengajarkan dan mengarahkan Penulis dalam mengukir mimpi, dari sekedar '*main kalereng*' hingga Penulis mampu menginjakkan kaki di berbagai negara di dunia. Penulis haturkan terima kasih juga kepada Uni Feli yang hadir menjadi Uni yang

sangat menyayangi Penulis dan memberikan motivasi dalam perjuangan menyelesaikan tulisan ini. Untuk ananda Hannah Lily Hafelin, ‘anak’ ku yang pertama, hadirmu adalah kabar bahagia bagi Pak Etek dalam perjuangan ini.

4. Adik Penulis satu-satunya, Nadya Fitri Rahmawati yang selalu mendoakan Penulis dalam setiap kesempatan, tiada pernah henti mengabarkan prestasi yang selalu memotivasi Penulis di kala lelah. *I believe you can reach higher mountain than me, piak.*
5. Permata kiriman Tuhan, Elsa Marliana. Kehadiran engkau di kala biduk mimpi ini kehilangan arah, lalu menyelamatkannya dari hantaman karang, adalah sebuah rencana rahasia dari-Nya. Bahagia, tawa dan canda mu adalah mozaik inspirasi dan motivasi bagi ku dalam skripsi ini. Biarlah Tuhan selalu memelihara kita berdua, dan waktu menjadi saksi di akhir hayat.
6. Nenek Ijah *aka* haji keneN yang sangat sangat menyayangi Penulis sedari kecil, Nenek Ima yang memberi motivasi dengan kisah-kisah hidup hingga Penulis tiada pernah menyerah dalam berjuang.
7. Mak Dang, Mak Tek, (almh) Uwo Nis, (alm) Angku Tuo, Uwo Dar, Mak Man, Uwo Nelly dan Tek Rahmi yang telah menjadi *urang tuo* kedua Penulis di rumah dan di *rantau* ini. Pak Tuo Tinus, Pak Tuo Wil serta Mak Tuo As dan Mak Tuo Nita yang mengizinkan Penulis menjadi anak di rumah masing-masing.
8. Sepupu-sepupu Penulis yang luar biasa banyaknya dari yang selalu memberikan canda tawa dan keceriaan dikala lelah menerpa, terkhusus kepada Uan kembar Ijan dan Iit, Uni Yessi, Uan Iir, Uan Didi, Uni Riri, Willy, Pipi dan Pina, Uda Saldi, Kak Uci dan Dedek, semoga kesuksesan beserta kita semua.
9. Saudara-saudara ‘*sepertekosusuan*’ Penulis, Aspa generasi ‘*Urwatul Wutsqa*’, Ahmad Fauzi, Muhammad Fitra, Zaki Arif, Riski Raisa Putra, Rido Prama Eled, Ahmad Fadhlán, Zakiyus Shadicky, Fajri Ihsan, Indra Hardianto, Defitra Nanda, Sugeng Widodo, Alfariko Adma, Ridho Arisyadi, M Iqbal Amri, Satria Hidayat, Prasetya F Idris, mari lihat dunia

tercengang dengan kehadiran kita. Saudara seperjuangan Dori Gusva Wijaya, Rakhmat Hidayat, Afriko Rinaldo, dan teman-teman Angkatan Emas Smansa Papa. Bang Guswindra C. Koto yang hadir sebagai kakak bagi keluguan kami, anak-anak muda dari *kampung* yang tersesat di kampus UI.

10. Uda Miftah Nur Sabri, St. Mangkudun. *Uda kanduang* yang terus membimbing Penulis dari sejak *basarawa pendek merah*, membakar semangat dalam mengejar mimpi, mengenalkan penulis pada Indonesia serta inspirasi tanpa henti dari dulu hingga tulisan ini selesai dan ke depannya. Semoga mimpi *amai-amai di pasa Padangpanjang* untuk kita segera berwujud nyata.
11. Uda-Uda Penulis di IMAMI UI, da Romi, da Andri, da Andre, da Haris, da Hafiz 'Reben', da Afdhal, da Arie Putra, da Fadri Cupaik, da Nanda 'nanduik', da Puji, da Jahen serta uda-uda dan uni-uni di Imami yang telah menjadi saudara di rantau urang. Tidak lupa kepada da Akhyar Salmi, da Arman Nefi, da Andrinof Chaniago, da Indra J Piliang atas didikannya, serta Uda ES Ito dengan imajinasinya yang luar biasa dan menjadi panutan bagi Penulis.
12. Teman-teman Penulis di Ikatan Mahasiswa Minang di UI, teman-teman IA Smansa Papa UI, teman-teman gen '*Urwatul Wutsqa* di seluruh dunia, rekan-rekan di Pusgerak BEM UI 2011, teman-teman HMI Komisariat FHUI, semoga ikatan diantara kita terus terjaga untuk Indonesia.
13. Syahzami 'Aad' Putra, SH. *dunsanak kanduang*, kakak sekaligus teman yang sama-sama memulai dengan 0 di kampus FHUI. Menjadi saudara Penulis yang selalu memberi solusi di kala susah, semoga lelah keringat perjuangan kita berbuah kesuksesan di masa depan.
14. Arifuddin Hamid, Partner diskusi Penulis yang terus mengajak berdialektika dan mengasah logika sebagai seorang calon *jurist*.
15. Aldamayo Panadjam Panjaitan, sahabat dan kini saudara bagi Penulis, tempat berbagi mimpi dan imajinasi, penyelamat di kala duka, dan *partner* sejati dalam mengejar mimpi. Masih ada 4 Benua lagi yang harus kita kunjungi.

16. Gede Aditya 'bichun' Pratama, Marganda Hasudungan, Valeska Liviani Valdano Paulo Ruru, pemikiran kalian sangat unik dan sangat berarti bagi Penulis dalam menghadapi setiap tantangan.
17. Rekan-rekan seperjuangan di Program Kekhususan Hukum mengenai Hubungan Transnasional aka Hukum Internasional, Anggo, Aida, Tami, Tito, Destya, John, Manky, Jumel, Huda, Atok, Quina, Subi, Nay, Sisil, Reza, Sea, Dhina, Titan, Putra, T.J. aka Trisnajaya, Anto Ginting, Vicky, Wuri, Fajar, Tota, Agata, Widia, semoga kita selalu menjadi orang-orang yang terbuka dan berfikir global serta bermanfaat bagi peradaban Abad 21.
18. Sahabat dan keluarga satu atap Raynaldo Gracia Sembiring dan Benny Hopman, serta Santri Satria. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga sampai kelak.
19. Teman-teman yang menjadi sahabat Penulis sejak menginjakkan kaki di FHUI, Namira, Fathan, Radian, Agung, Fadil, Fadhil, Agi, Kiki, Aditmuriza, Liza, Anto, Aming, Opung, Ronal, Reza, Raymond, Ama, Tiana, Riko, Sherly, Della, Nabil, Ryan, Rieya, Toni, Femi, Endah, Jojo, Alfi, Anandito Utomo, Patra, Umar, Faisal, Desta, Ira, Simon, Sokhib, Ria, Iwan, Kartini, Kris, Anggra, Meidi, aldi Cimot, Devina, Ihsan Baga, Icus, Dio, Fendi, Feri, Domas, Aming, Agus, Moses, Seno, Obet, Hegar, Aso, Tatay, Oyong, Ario, serta seluruh teman-teman Penulis angkatan 2008 yang menjadi teman diskusi di kantin, rekan kerja di lobby dan partner bermain di lapangan. Semoga kesuksesan bagi kita semua dan kebanggaan bagi Almamater kita.
20. Pembimbing Penulis Bapak Adijaya Yusuf, dan Bang Hadi Rahmat Purnama yang membimbing Penulis dalam penulisan ini layaknya kakak kandung sendiri. Kepada para pengajar di PK6, terkhusus kepada Prof. Hikmahanto Juwana yang selalu memberi inspirasi dalam setiap kuliah, Bang Yu Un Opusunggu dengan logika dan kata penyemangat di setiap diskusi, Mba Tiurma Pitta Allagan yang cerdas dan disiplin bagai seorang kakak mendidik adiknya, Bang Aji Suleiman yang selalu terbuka untuk diskusi dan berbagi wawasan. Juga kepada bang Togi Pangaribuan yang memicu Penulis untuk mengejar mimpi-mimpi selanjutnya.

21. Bapak Jonimar Ritonga dan Ibu yang telah bersedia menjadi orangtua Penulis selama menghuni Pondok Arnanda, dan selalu mengingatkan Penulis setiap pagi kuliah layaknya anak sendiri. Semoga Tuhan membalas kebaikan dan melimpahkan karunia untuk Bapak dan keluarga.
22. Kepada *Amai-amai* yang berjualan di *Pasa* Padangpanjang, dan seluruh pedagang yang rela membayar retribusi kepada pemerintah, agar penulis dan seluruh mahasiswa bisa bersekolah dan menempuh pendidikan sebaik-baiknya, terima kasih atas pengorbanan kalian semua. Adalah keniscayaan bagi kami pembawa harapanmu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan bagi tulisan-tulisan Penulis ke depannya.

Akhir kata, Penulis ucapkan selamat membaca, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan di bidang Hukum Internasional, khususnya bagi pembahasan mengenai Kedaulatan Negara menurut Hukum Internasional, dan menambah khazanah literatur ilmiah untuk pendidikan.

Depok, Juli 2012

Wahyu Defry Setiawan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Defry Setiawan
NPM : 0806343411
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tinjauan Hukum Internasional mengenai *Overseas Countries and Territories (OCTs)* Perancis dan Belanda berdasarkan *Article 198 Treaty on the Functioning of the European Union 2007*”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang menyatakan



(Wahyu Defry Setiawan)

ABSTRAK

Nama : Wahyu Defry Setiawan
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **“Tinjauan Hukum Internasional mengenai *Overseas Countries and Territories (OCTs)* Perancis dan Belanda berdasarkan *Article 198 Treaty on the Functioning of the European Union 2007*”**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana kedaulatan dari suatu negara atas wilayah yang berada di luar negeri, dengan mengambil contoh negara Perancis dan Belanda sebagai anggota Uni Eropa yang menguasai wilayah di luar negeri. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kolonialisasi tidak lagi diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, penguasaan oleh suatu negara terhadap wilayah yang terletak di luar negeri ternyata tidak bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini ditegaskan dengan disepakatinya konsep *non-self governing territories* di dalam Piagam PBB serta dibentuknya *Association of Overseas Countries and Territories (OCTs)* oleh Uni Eropa di dalam Traktat Lisbon. Adanya kedaulatan dari Perancis dan Belanda atas wilayah-wilayah di luar negeri (OCTs) diakui oleh negara-negara anggota Uni Eropa sebagaimana diatur dengan ketentuan *Article 198 Treaty on the Functioning of European Union (TFEU)*.

Kata kunci:

Negara, Kedaulatan Wilayah, Wilayah di luar Negeri, Article 198 TFEU.

ABSTRACT

Name : Wahyu Defry Setiawan

Study Program: Law

Title : **“Overseas Countries and Territories of France and Netherlands based on Article 198 Treaty on the Functioning of European Union 2007 in International Law Perspective.**

This research aimed to describe and to analyze the territorial sovereignty of a State over its overseas territories, by taking examples from France and Kingdom of Netherlands as Member States of European Union that possess overseas territories. Author use juridical-normative research method with literature studies. The research shows that although colonization is no longer recognized by all of nations, possession of a State over a territory which located overseas of its main territory is not contradictory to international law. It was acknowledged by the United Nations which agree upon Non-Self Governing Territories as stated in the UN Charter, and by European Union which establishing Association of Overseas Countries and Territories as stated in Lisbon Treaty. The sovereignty of France and the Kingdom of Netherlands upon their overseas territories was acknowledged by Member States of European Union as regulated by Article 198 Treaty on the Functioning of European Union (TFEU).

Key words:

State, Territorial Sovereignty, overseas territory, Article 198 TFEU.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kerangka Konseptual	11
1.5. Metode Penelitian.....	14
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis	16
1.7. Sistematika Penulisan	16
BAB II	
Wilayah Negara menurut Hukum Internasional	18
2.1. Negara sebagai Subjek Hukum Internasional	18
2.1.1. Tinjauan Historis tentang Terjadinya Negara	19
2.1.2. Bentuk Negara dan Kedaulatan.....	25
2.1.3. Unsur-Unsur Suatu Negara	29
2.2. Penguasaan atas <i>Territory</i> dan <i>Territorial Sovereignty</i>	32
2.2.1. Terjadinya penguasaan terhadap suatu <i>Territory</i>	33
2.2.2. <i>Territorial Sovereignty</i>	37
BAB III	
Wilayah suatu Negara di Luar Negeri berdasarkan Hukum Internasional	46
3.1. <i>Non-Self Governing Territory</i> berdasarkan <i>Chapter XI UN Charter</i> dan <i>General Assembly Resolutions</i> 1514.....	46
3.1.1. Wilayah-wilayah yang diakui secara Internasional	47
3.1.2. <i>General Assembly Resolution</i> (Resolusi Majelis Umum) 1514 sebagai instrumen Dekolonialisasi	48
3.1.3. Dekolonialisasi dan Pelaksanaan Kedaulatan di suatu wilayah di luar negeri	50
3.2. <i>Overseas Countries and Territories</i> dari Uni Eropa.....	52
3.2.1. Uni Eropa sebagai <i>sui generis</i> dalam Organisasi Internasional.....	52
3.2.2. Pelaksanaan Hukum Uni Eropa	57
3.2.2.1. Bentuk-Bentuk Hukum Uni Eropa	57
3.2.2.2. <i>Law-Making Institution</i> dari Uni Eropa.....	63

3.2.3. Wilayah-wilayah yang diakui sebagai sebagai <i>Overseas Countries and Territories</i> menurut Uni Eropa.....	66
---	----

BAB IV

Analisis terhadap <i>Overseas Countries and Territories (OCTs)</i> Perancis dan Belanda.....	68
4.1. Pengaturan <i>Overseas Countries and Territories</i> di dalam Bagian IV Traktat Lisbon	68
4.2. Analisis Wilayah OCTs dari Perancis.....	73
4.2.1. <i>New Caledonia and Dependencies (Nouvelle-Calédonie)</i>	73
4.2.1.1. Status wilayah <i>New Caledonia</i> sebagai OCTs Uni Eropa dari Perancis	75
4.2.2. <i>French Polynesia</i>	77
4.2.2.1. Status wilayah <i>French Polynesia</i> sebagai OCTs Uni Eropa dari Perancis	80
4.2.3. <i>French Southern and Antarctic Territories</i>	82
4.2.3.1. Status wilayah TAAF sebagai OCTs Uni Eropa dari Perancis	84
4.2.4. <i>Wallis and Futuna Islands</i>	85
4.2.4.1. Status wilayah Wallis and Futuna Islands sebagai OCTs Uni Eropa dari Perancis.....	88
4.2.5. Mayotte	90
4.2.5.1. Status <i>Mayotte</i> sebagai OCTs Uni Eropa dari Perancis	92
4.2.6. <i>Saint Pierre and Miquelon</i>	93
4.2.6.1. Status wilayah <i>Saint Pieere and Miquelon</i> sebagai OCTs Uni Eropa dari Perancis.....	95
4.3. Analisis Wilayah OCTs dari Belanda	96
4.3.1. Aruba.....	96
4.3.1.1. Status Aruba sebagai wilayah OCTs Uni Eropa dari Belanda	98
4.3.2. Netherlands Antilles.....	100
4.3.2.1. Status wilayah <i>Netherlands Antilles</i> sebagai OCTs Uni Eropa dari Belanda.....	101
4.4. Hubungan Uni Eropa dengan OCTs sebagai bentuk pengakuan terhadap wilayah suatu negara di luar negeri	103

BAB V

Penutup.....	106
5.1. Kesimpulan	106

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Wilayah OCTs dalam Peta Dunia	70
Gambar 4.2. Letak New Caledonia	74
Gambar 4.3. Peta New Caledonia	74
Gambar 4.4. Letak French Polynesia	78
Gambar 4.5. Peta French Polynesia	78
Gambar 4.6. Peta TAAF.....	83
Gambar 4.7. Lokasi Wallis and Futuna Islands	86
Gambar 4.8. Peta Wallis and Futuna Islands	87
Gambar 4.9. Lokasi Mayotte.....	91
Gambar 4.10.Peta Mayotte.....	91
Gambar 4.11.Lokasi Saint Pierre and Miquelon	94
Gambar 4.12.Peta Saint Pierre and Miquelon.....	94
Gambar 4.13.Lokasi Aruba.....	96
Gambar 4.14.Peta Aruba.....	97
Gambar 4.15.Netherlands Antilles.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Treaty on the Functioning of European Union	66
-----------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. *Charter for the Kingdom of Netherlands.*
2. *Council Decision 2001/822/EC of 27 November 2001 on the association of the overseas countries and territories with the European Community (Overseas Association Decision).*
3. *Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.*
4. *Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton. (Terjemahan Bahasa Inggris).*
5. *Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.*
6. *Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. (Terjemahan Bahasa Inggris).*
7. *Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.*
8. *Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. (Terjemahan Bahasa Inggris).*
9. *Noumea Accord.*
10. *Noumea Accord. (Terjemahan Bahasa Inggris).*
11. *The French National Assembly. English Official Text of Constitution of October 4, 1958.*
12. *Treaty of Lisbon, Article 198 of Treaty on the Functioning of European Union.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Negara merupakan bagian utama yang tidak dapat dipisahkan dari hukum internasional. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional.¹ Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antarnegara².

Meskipun banyak yang mencoba mengemukakan definisi umum mengenai negara, gambaran yang cukup tepat mengenai negara dapat ditemukan dalam Konvensi Montevideo³. Dalam *Convention on Rights and Duties of States* dinyatakan bahwa “*The state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states*”.⁴

Negara tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya, dalam arti bahwa suatu negara menjadi ada karena ada kehendak untuk membentuknya. Kehendak tersebut lahir dari kehendak manusia. Karena negara merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia, yaitu rakyat dari negara itu, dan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 98.

² *Ibid.*

³ Nandasiri Jasentuliyana, *Perspective on International Law*, (Kluwer Law International, 1995) hal 20

⁴ *Article 1 Convention on Rights And Duties of States*, ditandatangani di Montevideo, Uruguay, 26 Desember 1933

berdasarkan kemauan bersama dari sekumpulan manusia, yang menjadi rakyat dari negara itu sesudah lahir.⁵

Dalam teori kenegaraan, masalah terjadinya negara dapat dilihat dari dua sudut peninjauan, yaitu terjadinya negara secara primer (*Primaire Staats Wording*) dan terjadinya negara secara sekunder (*Secundaire Staats Wording*). Proses terjadinya suatu negara secara primer adalah melalui empat tahap, yaitu dimulai dari bentuknya yang sederhana kemudian berkembang menjadi lebih besar hingga mencapai bentuk organisasi negara yang modern.⁶

Setelah terjadinya suatu negara melalui tahap-tahap tersebut, maka dapat diidentifikasi bagaimana bentuk negara yang telah terbentuk. Menurut Machiavelli bentuk negara hanya ada dua yaitu Republik (*Respublica*) dan

⁵ Prof. Mr.M. Nasroen, *Asal Mula Negara*,(Jakarta:Aksara Baru,1986), hal 12.

⁶ Tahap **Gemeinschaft** (*Genootschap*). Pada tahap ini orang-orang mempunyai persamaan kepentingan, persamaan nasib dan kebudayaan menggabungkan diri membentuk suatu kelompok. Pemimpin kelompok ini dipilih atas dasar *primus inter pares*, sehingga kewibawaan pemimpin masih bersifat kharismatis atau magis. Seluruh kegiatan dalam kelompok ini dilaksanakan dengan cara gotong royong dan tolong menolong karena lapisan masyarakat masih sama/homogen. Sebagai tahap awal dari negara, maka hal penting yang dijumpai pada tahap ini adalah unsur rakyat.

Tahap **Reich/Rijk**. Kelompok dalam tahap *gemeinschaft* di atas kemudian mengadakan pemilikan bersama atas benda, dalam hal ini tanah, dan benda-benda kekayaan lainnya. Pada tahap ini ditemukan aspek baru yaitu kekayaan (*reich/rijk*) yang umumnya berupa pemilikan atas tanah. Bahkan seolah-olah ada anggapan tidak akan terbentuk suatu kelompok/negara apabila tidak memiliki kekayaan/tanah. Dengan demikian, aspek yang penting dalam tahap ini adalah unsur kekuasaan yang terdapat pada satu wilayah tetapi belum terpusat. Pada tahap *Reich/Rijk* dapat dikatakan unsur-unsur suatu negara sudah terpenuhi yakni unsur rakyat, unsure penguasa dan wilayah. Akan tetapi karena kekuasaan belum terpusat, maka belum dapat diartikan sebagai suatu negara, dan tetap disebut *Reich/Rijk*.

Tahap **Staat**. Pada tahap ini, sudah terdapat suatu kekuasaan bahkan kewibawaan/*gezag* yang bulat dan berdaulat. Dalam hal ini, unsur-unsur klasik untuk adanya suatu negara telah terpenuhi, yaitu unsure wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat bukan lagi kekuasaan yang terbagi-bagi.

Dalam perkembangannya, tahap *Staat* ternyata bukan merupakan tahap terakhir ditinjau dari terjadinya negara secara primer. Perkembangan lebih lanjut yang berkaitan dengan salah satu unsur negara yaitu unsur bangsa. Ia berkembang menjadi *natie* yaitu bangsa yang sadar bernegara, juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Tahapan ini dikenal dengan tahap *Democratische Natie*. Sebagian sarjana mengemukakan bahwa ada satu tahap perkembangan lain dari terjadinya negara secara primer yakni tahap *Diktatuur* yang menekankan pada unsur kekuasaan dan berada pada satu pimpinan atau sekelompok penguasa.

Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, (Depok:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008) hal. 34-35.

Monarki (*Principati*).⁷ Negara dalam hal ini merupakan hal yang pokok (genus) dan spesiesnya adalah Republik dan Monarki.⁸

Jellinek menyatakan bahwa ukuran untuk menentukan bentuk suatu negara Monarkhi atau Republik berdasar pada terjadinya kehendak negara (*staatswill*).⁹ Duguit menggunakan ukuran cara pengangkatan kepala negara untuk membedakan bentuk negara Monarkhi dan Republik.¹⁰ Otto Koellreuter menggunakan ukuran berdasarkan asas kesamaan dan ketidaksamaan untuk membedakan bentuk negara Monarkhi dan Republik.¹¹ Selain itu, karena Otto Koellreuter berasal dari Jerman maka ia menambahkan satu bentuk negara lagi yaitu *Autoritaren Fuhrer Staats* yang merupakan suatu bentuk negara diktatur seperti Jerman pada masa Hitler.¹²

Berdirinya suatu negara diikuti dengan timbulnya berbagai kepentingan dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan negara. Demi terpenuhinya hal tersebut, suatu negara perlu melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Sebagaimana Aristoteles menyatakan bahwa manusia selalu ingin hidup bermasyarakat (*zoon politicon*), maka pada

⁷ Prof. Mr. R. Kranenburg dan Mr.Tk.B.Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, cet.11, (Jakarta: PT. PRADNYA PARAMITA, 1989), hal. 79.

⁸ Padmo Wahjono, S. H., *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara*, cet.1, (Jakarta: Ind-Hill-Co,1966), hal. 127.

⁹ Apabila *staatswill*/kehendak negara terjadi secara wajar melalui satu orang saja, maka bentuk negaranya adalah Monarkhi. Akan tetapi, apabila *staatswill*/kehendak negara terjadi secara yuridis melalui suatu majelis atau melalui suatu dewan, maka bentuk negaranya adalah Republik. *Ibid*,hal.128

¹⁰ Apabila kepala negara diangkat secara turun temurun maka bentuk negara adalah Monarkhi. Sedangkan apabila kepala negara diangkat dengan cara dipilih, maka bentuk negara adalah Republik. *Ibid*.

¹¹ Asas kesamaan adalah setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negara setelah memenuhi beberapa persyaratan. Sedangkan asas ketidaksamaan artinya tidak setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negara, karena kesempatan hanya ada pada warga berdasar garis keturunan tertentu. Dengan demikian, apabila kepala negara ditentukan secara turun temurun (asas ketidaksamaan) maka bentuk negara adalah Monarkhi. Sedangkan apabila kesempatan menjadi kepala negara terbuka bagi setiap warga (asas kesamaan), bentuk negara adalah Republik.

Max Boli Sabon, S. H., *Ilmu Negara*, cet.1, (Jakarta:Gramedia Utama,1992), hal. 151-152.

¹² *Ibid*.

umumnya setiap negara juga mempunyai kecenderungan untuk mengadakan kerjasama.¹³ Dalam perkembangannya, ada kalanya beberapa negara kemudian menggabungkan diri dalam suatu ikatan demi tercapainya suatu kepentingan tertentu. Kondisi ini menimbulkan suatu bangunan baru yang dapat berupa suatu negara atau perserikatan negara.

Perserikatan Negara (*Staatenbund*) atau *Confederation of States*¹⁴ secara historis dapat dilihat bahwa ada kalanya beberapa negara yang merdeka penuh bergabung dalam dalam suatu ikatan untuk mengurus beberapa hal tertentu yang menjadi kepentingan bersama.¹⁵ Perserikatan negara ini kemudian diwujudkan dalam suatu institusi yang dikenal sebagai Organisasi Internasional. Istilah organisasi internasional (*international organization*) biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian antara dua atau lebih negara.¹⁶

Sejumlah sarjana mengemukakan karakteristik dari organisasi internasional¹⁷ yakni,

*a. its membership must be composed of states and/or other international organizations;*¹⁸

¹³ Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 148.

¹⁴ Menurut L. Oppenheim suatu *confederation of states* terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warganegara dari negara-negara itu.

Lihat Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet.14, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 139.

¹⁵ Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 150.

¹⁶ H.G. Schermers, *International Institutional Law*, 3rd Edition, 1995. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa, *it is different from the term 'non-governmental organization' (NGO) which is set up by individuals or groups of individuals (such as Amnesty International or Greenpeace), although some non-governmental organizations are entrusted with certain function by states; the outstanding example is the International Committee of the Red Cross, which plays an important role in supervising the application of the Geneva Convention to the laws of war.*

¹⁷ Philippe Sands, Pierre Klein, *Bowett's Law of International Institutions*, (London: Sweet and Maxwell Ltd, 2001), hal. 16.

¹⁸ Felice Morgenstern, *Legal Problems of International Organizations*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), hal.19.

- b. *it must be established by treaty;*¹⁹
- c. *it must have an autonomous will distinct from that of its members and be vested with legal personality;*²⁰ and
- d. *it must be capable of adopting norms addressed to its members*²¹

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini.²² Keberadaan organisasi internasional dipandang baik dari segi kompetensi, kepentingan dan keanggotaannya.²³ Sebagai contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi yang beranggotakan hampir seluruh negara yang ada di muka bumi (*universal*), sementara Uni Eropa adalah organisasi yang bersifat regional.

Munculnya berbagai organisasi internasional pasca perang dunia kedua menunjukkan bahwa ada sejumlah kepentingan yang sama-sama dimiliki oleh negara-negara di dunia. PBB muncul sebagai jawaban atas kepentingan tercapainya perdamaian dunia²⁴ dalam bentuk organisasi yang bersifat universal. Begitu juga dengan *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) berdiri untuk mewadahi kepentingan negara-negara di bagian tenggara benua Asia dalam bentuk organisasi yang bersifat regional.

¹⁹ *Ibid*, hal. 23.

²⁰ Chittharanjan Félix Amerasinghe, *Principles of the Institutional Law of International Organization*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal. 9.

²¹ *Ibid*.

²² Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 101.

²³ Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, (London: Sweet&Maxwell, 1992), hal. 67.

²⁴ Pasal 1 paragraf 1 Piagam PBB menyatakan bahwa tujuan PBB adalah *To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;*

Organisasi Internasional lainnya yang penulis bahas dalam tulisan ini adalah Uni Eropa.²⁵

Uni Eropa dibentuk pada tanggal 1 November 1993²⁶, terbentuk dari beberapa *Treaty. Treaties* ini menciptakan apa yang dikenal dengan *acquis communautaire*.²⁷ Ada 2 perjanjian yang terpenting dalam *acquis communautaire* yaitu *Treaty of the European Union* (TEU) atau dikenal juga dengan *Maastricht Treaty*, dan *Treaty establishing the European Community* (TEC) atau dikenal juga dengan *Treaty of Rome*. Pada tanggal 2 Oktober 1997, kedua *treaty* tersebut diamandemen melalui *Treaty of Amsterdam*²⁸ yang mulai berlaku pada 1 Mei 1999. Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 2001, ditandatangani *Treaty of Nice*²⁹, yang pada pokoknya melakukan amandemen terhadap *Treaty of Amsterdam* dan memuat ketentuan baru yang belum berhasil disepakati pada saat perumusan *Treaty of Amsterdam*.

Pondasi bangunan Uni Eropa dapat dikatakan semakin kokoh sejak disepakatinya *Treaty of Lisbon* pada tanggal 13 Desember 2007 dan berlaku sejak 1 Januari 2009³⁰. Traktat ini merupakan amandemen atas dua traktat

²⁵ Sejarah Eropa telah mencatat bahwa sejak beberapa dasawarsa yang lalu, belahan dunia bagian eropa telah menjadi pusat kebudayaan dan sekaligus menjadi tempat berlangsungnya kedua perang dunia. Peristiwa penting yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II adalah terbentuknya beberapa organisasi internasional di region Eropa. Masa kejayaan beberapa bangsa yang sebagian besar devisa negaranya diperoleh dari daerah koloni/jajahannya telah berakhir dengan adanya Perang Dunia II. Eropa berusaha bangkit untuk membangun kebalikan dari reruntuhan perang dan berusaha mencegah terjadi lagi perang dengan jalan antara lain mempersatukan bangsa-bangsa Eropa dalam satu wadah.

Lihat Syahmin A.K, S. H., *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hal.93.

²⁶ *Treaty of European Union* atau *Treaty of Maastrich* ditandatangani pada tanggal 2 Februari 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1993.

²⁷ *Common foundation of rights and obligations which binds together the Member States of the European Union*.
<http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=request&uri=http://eurovoc.europa.eu/210682>, diakses pada 12 Maret 2012 pukul 13.52 WIB.

²⁸ Nama resmi dari traktat ini adalah *the Treaty of Amsterdam amending the Treaty of the European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts*.

²⁹ Nama resmi dari traktat ini adalah *Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts*. Berlaku pada 1 Februari 2003.

³⁰ *Article 6(2) Treaty Lisbon This Treaty shall enter into force on 1 January 2009, provided that all the instruments of ratification have been deposited, or, failing that, on the first*

yang telah disepakati sebelumnya sebagaimana yang diubah oleh *Treaty of Nice*. *Treaty* ini digambarkan sebagai “*to complete the process started by the Treaty of Amsterdam [1997] and by the Treaty of Nice [2001] with a view to enhancing the efficiency and democratic legitimacy of the Union and to improving the coherence of its action*”³¹. *Treaty of Lisbon* juga melakukan perubahan nama terhadap *Treaty of Rome* yang sebelumnya bernama *Treaty establishing the European Community* menjadi *Treaty on the Functioning of European Union*.³²

Salah satu unsur negara yang masih jadi perbincangan dalam perkembangan hukum internasional adalah unsur *a defined territory* (wilayah). Hal ini karena suatu *territory* merupakan tempat di mana suatu negara memiliki kedaulatan³³ untuk dapat melaksanakan yurisdiksinya. Lord Macmillan mengemukakan prinsip ini,

*“It is an essential attribute of the sovereignty of this realm, as of all sovereign independent States, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes civil and criminal arising within this limits”*³⁴

day of the month following the deposit of the instrument of ratification by the last signatory State to take this step. Negara terakhir yang mendaftarkan instrument ratifikasinya adalah Republik Ceko pada tanggal 13 November 2009.

³¹ *Preamble Treaty of Lisbon.*

³² Article 2 Treaty of Lisbon menyatakan *The Treaty establishing the European Community shall be amended in accordance with the provisions of this Article,*

1) *The title of the Treaty shall be replaced by ‘Treaty on the Functioning of the European Union’*

³³ Prof. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa penertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu (1) Kekuasaan itu terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu; dan (2) Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai.

Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, hal. 18.

³⁴ Lihat *Compania Naviera Vascongado v Cristina S.S.*, (1938) A.C. 485 dalam J.G.Starke, *An Introduction to International Law*, (London:Butterworth&Co Ltd. 1958), hal. 177.

Saat ini terdapat sejumlah negara-negara di dunia yang memiliki wilayah yang terpisah dari wilayah utama negaranya. Keberadaan wilayah-wilayah ini tidak terlepas dari fakta sejarah bahwa wilayah tersebut pernah menjadi wilayah jajahan (*colonial*) atas suatu negara yang berdaulat. Meskipun saat ini kolonialisasi atau penjajahan tidak lagi diakui oleh masyarakat dunia, adanya kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara terhadap wilayah yang berada di luar negeri memunculkan anggapan tentang terjadinya suatu bentuk kolonialisasi modern.

Dalam Piagam PBB diakui adanya suatu konsep *Non-Self Governing Territory*³⁵. Konsep ini didasarkan atas kondisi suatu negara yang belum mampu untuk membentuk atau menjalankan pemerintahan yang efektif secara mandiri sebagai akibat dari kolonialisasi yang pernah terjadi. Untuk itu, wilayah tersebut dalam hal-hal tertentu, khususnya dalam hal menjalankan pemerintahan, berada di bawah kekuasaan negara lain. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, wilayah-wilayah tersebut secara perlahan berhasil membentuk suatu pemerintahan baru yang efektif dan akhirnya bisa melepaskan diri kekuasaan negara induknya dan menjadi negara yang berdaulat secara mandiri.

³⁵ Article 73 Piagam PBB menyatakan sebagai berikut:

Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end:

a) to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses;

b) to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement;

c) to further international peace and security;

to promote constructive measures of development, to encourage research, and to cooperate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article; and to transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.

Upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut diwujudkan oleh PBB diantaranya dengan mengeluarkan *General Assembly Resolution 1514* tentang *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*. Dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasib (*rights of self-determination*) serta kolonialisasi harus diakhiri secara secepat mungkin. Bahkan Majelis Umum PBB membentuk *Special Committee on Decolonization*³⁶ untuk memonitor implementasi dari deklarasi tersebut dan memberikan rekomendasi dalam hal pelaksanaannya.

Penguasaan terhadap suatu wilayah di luar negeri juga terjadi pada negara-negara anggota Uni Eropa. Sejumlah negara anggota Uni Eropa menguasai beberapa wilayah yang terletak beratus-ratus kilometer dari daratan Eropa. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Belanda, Denmark, Inggris dan Perancis.³⁷ Walaupun secara geografis berada jauh di seberang samudera, wilayah tersebut tidak terlepas dari pengaruh Uni Eropa³⁸ karena negara yang menguasainya merupakan anggota Uni Eropa. Wilayah-wilayah ini juga termasuk dalam daftar *Non-Self Governing Territory* sebagaimana dinyatakan oleh PBB.

Pertanyaan-pertanyaan kemudian muncul tentang bagaimana persoalan kedaulatan dari negara yang menguasai wilayah di luar negeri di dalam hukum internasional. Bagaimana pula status wilayah tersebut menurut hukum Uni Eropa. Disamping itu, bentuk pelaksanaan hukum Uni Eropa di wilayah tersebut juga menjadi penting karena negara yang menguasai wilayah tersebut merupakan anggota dari Uni Eropa.

³⁶ Pernah diketuai Menteri Luar Negeri RI saat ini, R.M. Marty M. Natalegawa.

³⁷ Europa, Summaries of EU Legislation. http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/index_en.htm . diakses pada tanggal 8 Maret 2012, pukul 16.03 WIB

³⁸ Wilayah-wilayah tersebut yakni Greenland (Denmark); New Caledonia and Dependencies, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Wallis and Futuna Islands, Mayotte, Saint Pierre and Miquelon (Perancis); Aruba, Netherlands Antilles: Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, (Belanda); Anguilla, Cayman Islands, Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena and Dependencies, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, Turks and Caicos Islands, British Virgin Islands, Bermuda (Inggris). Lihat Annex II TFEU.

Wilayah-wilayah ini memiliki status hukum yang mengatur mengenai posisi mereka di dalam hukum Uni Eropa. Akan tetapi terdapat suatu kesamaan yang jelas bahwa hukum Uni Eropa yang berlaku di sana berbeda pelaksanaannya jika dibandingkan dengan pelaksanaannya di negara-negara Eropa. Wilayah-wilayah dari negara tersebut di dalam hukum Uni Eropa dikenal sebagai *Overseas Countries and Territories*.

Treaty on the Functioning of European Union (TFEU) sebagai salah satu perjanjian yang menjadi dasar dari Uni Eropa mengatur sendiri mengenai persoalan diatas.³⁹ Di dalam traktat ini diatur persoalan bagaimana hubungan Uni Eropa dengan *overseas countries and territories* tersebut. Penulis mencoba membahas bagaimana pelaksanaan ketentuan dalam *article 198* dari traktat tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap *overseas countries and territories* dari negara anggota Uni Eropa yakni Perancis dan Belanda. Penulis memilih untuk membahas Perancis dan Belanda karena kedua negara tersebut memiliki bentuk negara yang berbeda yakni Republik dan Monarki dengan harapan didapat dua gambaran yang berbeda.

1.2. Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai persoalan wilayah suatu negara –dalam hal ini negara anggota Uni Eropa- yang berada di luar negeri. Dari pokok permasalahan tersebut, penulis menuangkannya dalam tiga pertanyaan yaitu:

1. Bagaimanakah persoalan penguasaan atas *territory* menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah persoalan *territorial sovereignty* oleh suatu negara terhadap wilayah yang berada di luar negeri menurut Hukum Internasional?
3. Bagaimanakah penerapan *Article 198* TFEU terhadap *Overseas Countries and Territories (OCTs)* Perancis dan Belanda?

³⁹ Lihat *Part IV Treaty on the Functioning of the European Union*.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep *territorial sovereignty* terhadap wilayah suatu negara yang berada di luar negeri menurut hukum internasional. Sementara tujuan khusus dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *territory* dari negara Perancis dan Belanda yang berada terpisah dari daratan benua Eropa. Hal ini kemudian dikaitkan dengan konsep *territorial sovereignty* yang dipelajari dalam hukum internasional.
2. Memahami konsep pengaturan *overseas countries and territories (OCTs)* dalam *Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)* sebagai bagian dari Traktat Lisbon.
3. Mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan article 198 TFEU terhadap wilayah OCTs negara Perancis dan Belanda.

1.4. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang berasal dari bahan bacaan yang digunakan dalam penelitian antara lain:

1. **Negara:** pengertian negara dalam tulisan ini adalah pengertian yang paling umum diakui berdasarkan bunyi dari pasal 1 dari Konvensi Montevideo yakni “negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi yakni a) penduduk tetap; b) wilayah yang jelas; c) pemerintah; dan d) kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain.
2. **Uni Eropa:** Uni Eropa adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan berdasarkan Traktat Uni Eropa atau yang dikenal sebagai *Maastricht Treaty* pada tahun 1991. Perjanjian ini memperluas integrasi ekonomi serta politik dari negara anggota yang sudah didirikan berdasarkan perjanjian-perjanjian sebelumnya seperti *Treaty of Rome*. Kekuasaan lebih banyak diberikan kepada institusi Uni Eropa seperti Parlemen Eropa. Uni Eropa saat ini merupakan sebuah adidaya ekonomi yang didalamnya terdapat sebuah pasar terintegrasi (*single market*) yang

terdiri dari 27 negara anggota. Negara-negara tersebut adalah Perancis, Italia, Inggris, Jerman, Spanyol, Polandia, Belanda, Belgia, Rumania, Republik Ceko, Yunani, Hungaria, Portugal, Bulgaria, Swedia, Denmark, Austria, Finlandia, Irlandia, Slovakia, Latvia, Lituania, Estonia, Slovenia, Luxemburg, Malta dan Siprus. Meskipun sedang terjadi proses integrasi negara-negara anggota Uni Eropa tetapi masing-masing negara tetap memegang kuat kedaulatan mereka. Uni Eropa merupakan organisasi yang berkarakter supranasional dan antar-pemerintah ditinjau dari cara kerjanya dan merupakan sebuah organisasi yang dikategorikan sebagai *sui generis*.⁴⁰

3. **Hukum Komunitas Uni Eropa (Droit communautaire/community law):** Seperangkat peraturan hukum yang terdiri dari hak-hak, wewenang dan sanksi yang diciptakan oleh dan dibawah perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar pendirian dari tiga komunitas internasional yakni Komunitas Batu Bara dan Besi Eropa, Euratom dan Komunitas Ekonomi Uni Eropa. Hukum Komunitas Uni Eropa adalah seperangkat hukum yang diciptakan berdasarkan sebuah perjanjian internasional. Sistem hukum yang independen ini didukung efektivitasnya oleh institusi Uni Eropa, pengakuan dalam sistem hukum nasional masing-masing negara anggota dan perkembangannya melalui putusan-putusan Pengadilan Eropa (*European Court*). Dalam prakteknya hukum komunitas Uni Eropa dan hukum nasional negara anggota saling bertabrakan. Namun hukum Uni Eropa dianggap lebih tinggi dan membatasi kedaulatan negara anggota.⁴¹
4. **Treaty (Traktat):** Sebuah perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara dalam bentuk tertulis dan tunduk kepada hukum internasional baik yang tertera dalam satu instrument hukum atau dalam

⁴⁰ Alistair Jones, *A Glossary of the European Union*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008), hal. 66.

⁴¹ Lawrence Collins, *European Community Law in the United Kingdom*, (London: Biddles Ltd, 1990), hal. 1.

dua atau lebih instrument hukum yang saling berhubungan apapun penamaan yang diberikan kepadanya.⁴²

5. **Territorial Sovereignty:** konsep ini berarti bahwa dalam suatu territorial, negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap orang dan *property* di wilayah tersebut dengan mengesampingkan negara-negara lain.⁴³
6. **Organisasi Internasional:** Sebuah organisasi yang dibentuk antar pemerintah yang memiliki sebuah organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu, keanggotaan sukarela dari pihak-pihak yang memenuhi syarat, sebuah instrument dasar yang memuat tujuan, struktur dan metode kerja, sebuah organ konsultatif dan konferensi yang direpresentasikan secara luas, sebuah sekretariat permanen untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif, penelitian dan pemberian informasi.⁴⁴
7. **Sumber Hukum (*Source de Droit*):** Sesuatu hal (seperti sebuah konstitusi, sebuah traktat, sebuah piagam (*statute*) atau kebiasaan) yang memberikan kewenangan legislasi dan putusan judicial; sebuah titik untuk analisis hukum, biasanya diberikan terminology *fons juris*.⁴⁵
8. **Hukum Nasional:** Hukum yang diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam sebuah negara.
9. **Hukum Internasional (Publik):** adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional yang bukan bersifat perdata).⁴⁶

⁴² Article 2 paragraph 1a Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

⁴³ J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Edisi ke-4 (London: Butterworth & Co.Ltd, 1958), hal.133.

⁴⁴ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Depok: Penerbit Universitas Indonesia), hal. 5.

⁴⁵ Lawrence Collins, *European Community Law in the United Kingdom*, (London: Biddles Ltd, 1990), hal. 1429.

⁴⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 1.

10. **Acquis Communautaire:** Seperangkat hak dan kewajiban yang mengikat semua negara anggota di dalam Uni Eropa yang senantiasa berkembang.

Termasuk di dalamnya:

- 1) isi, prinsip-prinsip serta tujuan politik dari perjanjian-perjanjian Uni Eropa;
- 2) Legislasi atau peraturan hukum yang diadopsi dalam rangka melaksanakan perjanjian-perjanjian dan yurisprudensi mahkamah Uni Eropa;
- 3) Langkah-langkah berhubungan dengan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama;
- 4) Langkah-langkah yang berhubungan dengan keadilan dan urusan dalam negeri;
- 5) Perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditanda tangani oleh komunitas negara-negara anggota diantara mereka dalam bidang aktivitas komunitas Uni Eropa.

Negara-negara Eropa yang hendak bergabung dengan Uni Eropa harus menerima *acquis communautaire* ini dan mengembangkannya lebih lanjut. Penerimaan dilakukan dengan proses transposisi (*transposition*) *acquis* ke dalam hukum nasional negara dan melaksanakannya sejak penandatanganan.⁴⁷

11. **Sovereign Right:** suatu hak unik yang dimiliki oleh negara atau agen dari negara yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam rangka kepentingan umum.⁴⁸

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data-data sekunder.⁴⁹ Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa studi

⁴⁷ *European Union*, http://europa.eu/schadplus/glossary/community_acquis_en.htm. diakses pada 12 Maret 2012 pukul 17.05 WIB.

⁴⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-8 (USA: Thomson West Publishings, 2004), hal. 1430.

⁴⁹ Sri Mamudji et. Al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 13.

dokumen, antara lain data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa traktat-traktat dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel yang berasal dari majalah, jurnal, surat kabar dan internet. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana penulis mencoba menjabarkan bagaimana konsep *territorial sovereignty* dikaitkan dengan keberadaan *overseas countries and territories* dari negara anggota Uni Eropa yang dalam hal ini adalah Perancis dan Belanda.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data adalah metode kualitatif karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan⁵⁰ yang menggunakan data-data sekunder. Metode kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer adalah traktat dan hukum-hukum Uni Eropa, termasuk Yurisprudensi dari Mahkamah Uni Eropa. Kemudian bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum dan jurnal. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa abstrak, kamus, buku pegangan, dan buku petunjuk.

⁵⁰*Ibid*, hal.21.

1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis

Kegunaan teoritis dilakukannya penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep penguasaan dan kedaulatan atas *territory* dari suatu negara, khususnya *territory* yang berada di luar negeri dari negara anggota Uni Eropa. Adapun kegunaan praktis dilakukannya penelitian ini adalah dapat menjadi pedoman dan acuan bagi penelitian-penelitian lainnya yang berhubungan dengan konsep *territory* sebagai unsur suatu negara.

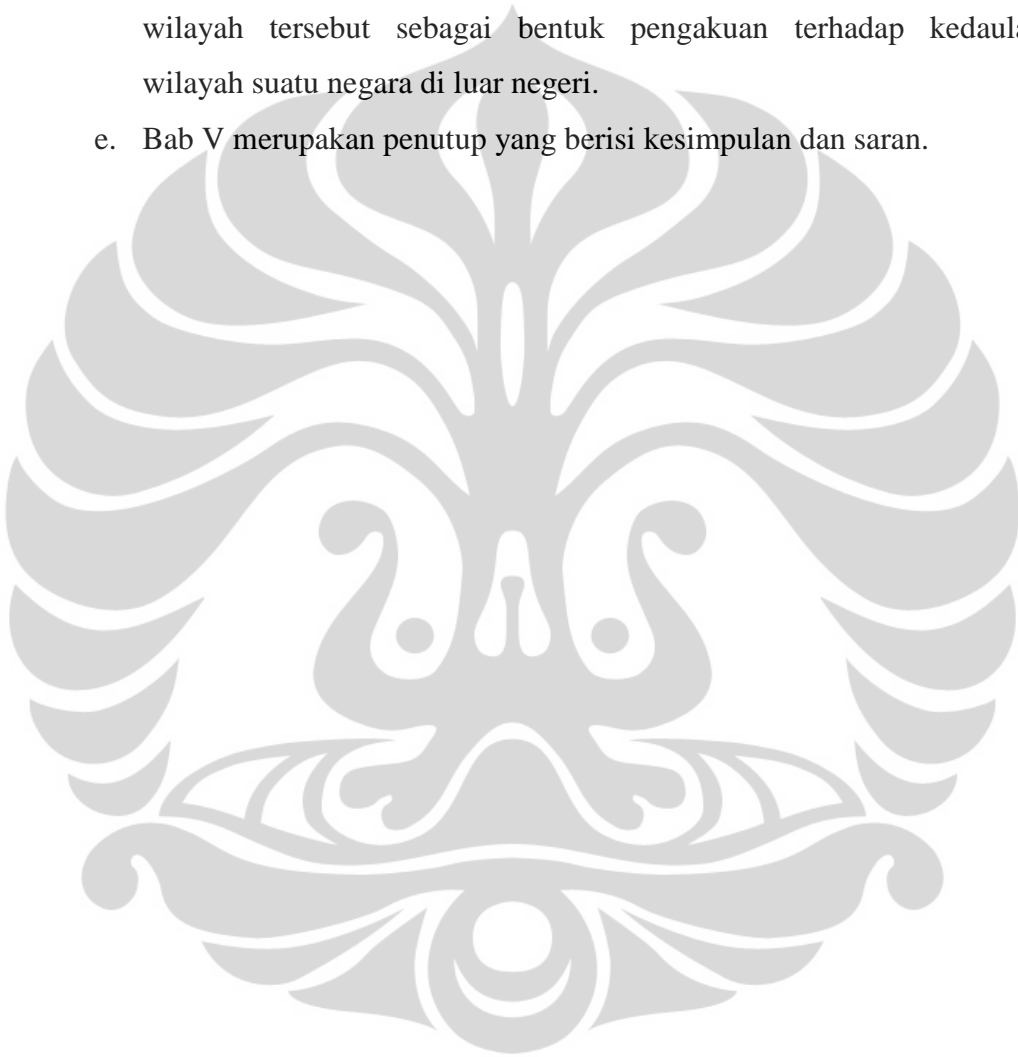
1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II membahas mengenai persoalan wilayah negara dalam Hukum Internasional. Pembahasan dalam bab ini dipecah menjadi beberapa sub-bab, yakni: Negara sebagai subjek hukum internasional; penguasaan atas suatu *territory* dan konsep *territorial sovereignty* oleh suatu negara.
- c. Bab III membahas mengenai Wilayah suatu negara di luar negeri berdasarkan hukum internasional. Pembahasan ini dimulai dengan konsep *Non-Self Governing Territory* berdasarkan *Chapter XI UN Charter dan General Assembly Resolutions 1514*. Kemudian juga akan dibahas bagaimana kedaulatan suatu negara terhadap wilayah yang berada di luar negeri. Selanjutnya, penulis membahas mengenai Pelaksanaan Hukum Uni Eropa di mana di dalamnya juga akan dibahas mengenai institusi dari Uni Eropa yang berwenang untuk mengeluarkan hukum (*law making institution*).
- d. Bab IV membahas bagaimana ketentuan dari *Article 198 Treaty on the Functioning of European Union* terhadap *overseas countries and territories (OCTs)* Perancis dan Belanda. Pembahasan dimulai dengan membahas ketentuan *article 198 TFEU* yang mengatur mengenai

OCTs. Kemudian akan dilihat bagaimana status dan penguasaan terhadap masing-masing wilayah OCTs dari Perancis (yang mencakup *New Caledonia and Dependencies, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Wallis and Futuna Islands, Mayotte dan Saint Pierre and Miquelon*) dan Belanda (yang mencakup Aruba dan Netherland Antilles) serta bagaimana hubungan Uni Eropa dengan wilayah tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap kedaulatan wilayah suatu negara di luar negeri.

- e. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

Wilayah Negara menurut Hukum Internasional

5.1 Negara sebagai Subjek Hukum Internasional

Dalam teori hukum yang umum, dikenal mengenai adanya penyanggah hak dan kewajiban hukum yang disebut sebagai subjek hukum⁵¹. Oleh karena itu, subjek hukum internasional⁵² adalah bagian dari hubungan internasional yang diberikan hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

Negara merupakan bagian utama yang tidak dapat dipisahkan dari hukum internasional. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional.⁵³ Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antarnegara⁵⁴. Negara pun menjadi pelaku utama dalam hubungan internasional karena

⁵¹ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. H. menyatakan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban itu disebut kewenangan hukum.

Lihat Prof. Sudikno Mertokusumo, S. H., *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), hal.74.

⁵² Konsep 'subjek' dalam hukum internasional pada waktu dahulu hanya merupakan suatu doktrin yang dipegang secara terus menerus. Namun demikian, pasca Perang Dunia II, 'subjek' di dalam hukum internasional telah dimasukkan di dalam sejumlah instrumen hukum internasional -konvensi yang bersifat universal. Sebagaimana misalnya yang terdapat di dalam *Article 3 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, The fact that the present Convention does not apply to international agreements concluded between States and other subjects of international law or between such other subjects of international law, or to international agreements not in written form ...*

⁵³ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 98.

⁵⁴ *Ibid.*

mereka perlu berinteraksi satu sama lain dan dengan subjek hukum internasional lainnya. Lauterpacht menyatakan bahwa *'the orthodox positivist doctrine has been explicit in the affirmation that only states are subjects of international law'*⁵⁵. Hukum internasional itu sendiri merupakan produk utama dari hubungan antar-negara yang membentuk hukum kebiasaan internasional (*Customary International Law*) ataupun suatu perjanjian internasional.⁵⁶ Bahkan hanya negara yang dapat menjadi para pihak di Mahkamah Internasional sebagaimana dinyatakan *"only states can be parties in cases before the Court"*.⁵⁷

Biasanya, sesuatu dapat disebut sebagai negara karena memiliki kemerdekaan (*independence*) dan kedaulatan (*sovereignty*) terhadap dirinya sendiri, termasuk segala macam persoalannya dalam batas teritorial.⁵⁸ Menurut J. G. Starke, kedaulatan dapat berarti *residium of power* dari kewenangan-kewenangan yang tidak diatur dan dibatasi oleh hukum internasional. Dalam pengertian sederhana, kedaulatan dapat berarti kewenangan penuh yang dimiliki terhadap diri sendiri (tanpa adanya campur tangan negara lain). Sementara kemerdekaan dapat diartikan bahwa terhadap suatu negara diberikan sejumlah hak, kewenangan dan keistimewaan di dalam hukum internasional.⁵⁹

Oleh karena kedudukan negara yang sangat utama dalam hukum internasional, maka perlu dibahas beberapa aspek mengenai negara.

2.1.1. Tinjauan Historis tentang Terjadinya Negara

Pengetahuan mengenai negara tidak terlepas dari apa arti dari negara dan bagaimana terjadinya atau wujud dari negara tersebut.

⁵⁵ Lauterpacht, *International Law*, hal.489.

⁵⁶ Wallace, *International Law*, hal.59.

⁵⁷ *Article 34(1) Statute of the International Court of Justice.*

⁵⁸ J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Edisi ke-4 (London: Butterworth & Co.Ltd, 1958), hal. 82.

⁵⁹ Starke lebih lanjut menyatakan bahwa *'correlative to these rights, there are duties and obligations binding other States who enter into relation with it. These rights and the correlative duties are the very substance of state independence.*

Jika dilakukan peninjauan secara historis, maka ditemukan bahwa penyebutan negara berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan zamannya. Pada zaman Yunani, negara disebut dengan *Polis (city state)* atau disebut juga dengan negara kota. Pada masa itu, luas wilayahnya hanya sebatas sebuah kota dan ditandai dengan adanya sistem demokrasi langsung. Rakyat secara langsung terlibat dalam kegiatan kenegaraan. Seiring dengan berjalannya waktu, pengertian *Polis* tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kriteria suatu negara. Negara kemudian berkembang menjadi suatu *country state* dengan wilayah yang amat luas dan kegiatan kenegaraan dilaksanakan dengan sistem demokrasi perwakilan. Memasuki abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan termasuk pengetahuan mengenai negara amat dipengaruhi oleh ajaran agama seiring dengan timbul dan berkembangnya ajaran agama Nasrani. Pada masa ini, negara diartikan sebagai suatu masyarakat atau *Civitas*. Seorang sarjana bernama Agustinus menyatakan bahwa *Civitas* itu terbagi menjadi dua yaitu *Civitas Dei* yang merupakan masyarakat keagamaan dimana kegiatan negara diatur oleh ketentuan-ketentuan agama; dan *Civitas Terrena* yang merupakan masyarakat keduniaan, dan agar masyarakat dunia ini dapat berjalan dengan baik maka harus selalu mendekati diri ke *Civitas Dei*.⁶⁰ Pada awal abad modern, negara diartikan sebagai benda dalam arti kepemilikan atas tanah tersebut menimbulkan kewenangan kenegaraan. Pengertian ini kemudian berkembang bahwa tanah juga menimbulkan kemakmuran sehingga diartikan sebagai *Rijk* atau *Reich* yaitu kekayaan milik suatu dinasti atau imperium yang bersifat turun temurun.

Negara kemudian memiliki beberapa kewenangan seperti memungut pajak, menyatakan perang/damai, memberikan hukuman kepada rakyat, melakukan hubungan dengan negara-negara lain dan sebagainya. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa

⁶⁰ Padmo Wahjono, SH., *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara, cet-1 (Jakarta: Indo-Hill-Co, 1996), hal. 46.*

negara dapat mempunyai kekuasaan yang begitu besar. Untuk menjawab pertanyaan mengenai pembenaran negara tersebut, dapat dilihat dari teori pembenaran negara secara yuridis.

Negara berdasarkan teori hukum publik merupakan hasil perjanjian seluruh rakyat dengan satu tujuan/satu kepentingan yaitu membentuk negara yang dalam bahasa Jerman disebut dengan *Gesami Akt*.⁶¹ Perjanjian ini kemudian bertujuan untuk memilih siapa yang akan menjadi penguasa dan hal apa yang menjadi dasar untuk membenarkan tindakan-tindakannya. Terdapat sejumlah teori yang mengemukakan tentang perjanjian masyarakat. Teori tersebut diantaranya teori dari golongan Caesarismus yang dikemukakan oleh Ulpianus; teori dari golongan *Monarchomachen*; dan teori yang dikemukakan oleh tokoh perjanjian masyarakat pada zaman modern.

1. Teori Ulpianus

Ulpianus yang merupakan bagian dari golongan Caesarismus mengemukakan teori perjanjian masyarakat untuk membenarkan kekuasaan romawi yang absolut, dengan mengambil dasar teori kedaulatan rakyat yang dikenal di Yunani. Menurut Ulpianus, rakyat Romawi telah mengadakan perjanjian penyerahan kekuasaan pada kaisar, kemudian dicantumkan dalam *Lex Regia*, yaitu undang-undang untuk memerintah. Ulpianus telah memberikan suatu teori perjanjian, meskipun bukan teori perjanjian masyarakat melainkan teori penyerahan kekuasaan.⁶² Adanya penyerahan kekuasaan ini berarti bahwa Kaisar sebagai penguasa yang diberikan kekuasaan memiliki kekuasaan yang besar dan absolut sehingga tidak perlu khawatir untuk dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyatnya. Hal ini kemudian menimbulkan istilah *The King can do no wrong*.

⁶¹ *Ibid*, hal. 60.

⁶² *Ibid*, hal. 82-83.

2. Teori dari golongan *Monarchomachen*

Golongan *Monarchomachen* mencoba melanjutkan teori Ulpianus, tetapi dengan tujuan yang berbeda yaitu meniadakan kekuasaan yang absolut dari penguasa. Konstruksinya adalah pertama, rakyat mengadakan perjanjian masyarakat untuk membentuk negara yang disebut *Pactum Unionis*. Selanjutnya rakyat mengadakan perjanjian penyerahan kekuasaan pada penguasa, disebut *Pactum Subyektionis*. Tetapi penyerahan kekuasaan tersebut disertai syarat-syarat tertentu yang dicantumkan dalam suatu naskah yang disebut *Legez Fundamentalis*. Dengan adanya syarat-syarat tercantum dalam *Legez Fundamentalis*, maka kekuasaan raja menjadi terbatas. Apabila raja melanggar syarat-syarat tersebut, maka rakyat berhak menghukum, atau menggantikan dengan yang lain, atau mengadakan pemberontakan untuk menurunkan raja dari tahta.⁶³

3. Teori dari zaman Modern

Terdapat tiga tokoh terkemuka yang memiliki titik tolak yang sama dalam mengemukakan teori perjanjian masyarakat. Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau sama-sama beranjak dari manusia dengan *status naturalis* yang kemudian dengan dilakukannya suatu perjanjian masyarakat, terjadi peralihan status menjadi *status civilis*. Perbedaannya terdapat pada isi serta akibat yang timbul dari perjanjian masyarakat tersebut.

a. Thomas Hobbes (1588-1679)

Pangkal tolak teori perjanjian yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes berawal dari sifat manusia yang kurang baik pada waktu berada dalam keadaan *status naturalis*. Manusia bersifat egois, selalu mengutamakan kepentingan sendiri, saling mencurigai dan hidup seperti serigala satu dengan yang lain (*Homo Homini Lupus*). Bila keadaan ini dibiarkan, maka

⁶³ *Ibid*, hal 89.

akan menimbulkan perang semesta (*Bellum Omnium Contra Omnes*) dan manusia akan punah seperti binatang pada zaman *paleolithicum*.⁶⁴ Kondisi ini kemudian menimbulkan rasa tidak aman dan rasa takut sehingga mengakibatkan timbulnya keinginan dari tiap orang untuk mulai mengatur dirinya sendiri. Untuk itu, rakyat kemudian mengadakan perjanjian bersama (perjanjian masyarakat) untuk membentuk negara. Dengan perjanjian tersebut maka terjadi perubahan status yaitu dari *status naturalis* menjadi *status civilis*, dan perjanjiannya dapat diartikan sebagai *pactum unionis*. Ternyata setelah negara terbentuk, rasa takut dan tidak aman belum hilang, sehingga rakyat memerlukan suatu kekuasaan yang lebih besar untuk menghilangkan rasa takut tersebut. Oleh karena itu menurut Thomas Hobbes, yang penting adalah *pactum subyectionis* yaitu penyerahan kekuasaan kepada penguasa yang mampu member rasa aman kepada rakyat. Akibatnya, wewenang penguasa menjadi tidak terbatas karena rakyat telah menyerahkan kekuasaannya tanpa syarat apapun kepada penguasa. Uraian Hobbes itu suatu hipotesa belaka, karena tak dapat dibuktikan kapan dan di mana kenyataan keadaan liar dan kacau itu.

b. John Locke (1632 – 1704)

Menurut John Locke, manusia dalam keadaan *status naturalis* pada dasarnya merupakan makhluk yang baik dan berakal (*homo sapiens*). Setiap manusia sejak lahir telah memiliki hak-hak yang mendasar yaitu hak atas kehidupan (*life*), hak atas kemerdekaan (*liberty*) dan hak atas hak milik/kekayaan (*property*). Jadi manusia baru bersikap seperti binatang bila hak-hak dasarnya dilanggar. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak dasarnya, rakyat mengadakan perjanjian membentuk negara (*pactum unionis*). Setelah itu mengadakan

⁶⁴ Samijo SH, *Ilmu Negara*, cet.4, (Bandung: CV. Armico), hal 83.

perjanjian penyerahan kekuasaan kepada negara (*pactum subyectionis*), yang harus mampu memberi jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyatnya. Dengan demikian, kekuasaan penguasa menjadi terbatas yaitu tidak boleh melanggar hak-hak dasar rakyat. Agar negara dan pemerintahan berjalan dengan baik, maka menurut Locke kekuasaannya perlu dibagi tiga yaitu (i) kekuasaan legislatif; (ii) kekuasaan eksekutif; dan (iii) kekuasaan federatif yang mengurus hubungan-hubungan dengan negara lain.

c. J.J. Rousseau (1712-1778)

Rousseau berpendapat bahwa manusia dalam keadaan *status naturalis* lahir sebagai manusia yang merdeka dan memiliki hak asasi. Akan tetapi dalam kenyataan hidupnya manusia juga sekaligus terikat oleh unsur hukum, kebudayaan, tradisi dan lain-lainnya. Selanjutnya, manusia dalam keadaan *status naturalis* manusia atas kehendak sendiri, tanpa paksaan mengadakan perjanjian masyarakat membentuk *kolektivitas*. Rousseau menyebut perjanjian masyarakat ini bukan dengan istilah *pactum unionis*, tetapi dengan sebutan *volunte de tous*, ia juga berpendapat bahwa dengan terbentuknya kolektivitas berarti terdapat kebebasan dari rakyat (*vrij will*) serta keinginan untuk tunduk pada kolektivitas. Hal ini karena apabila rakyat tunduk pada kolektivitas sama artinya rakyat tunduk pada kehendaknya sendiri. Selanjutnya setelah kolektivitas terbentuk, maka kegiatan kenegaraan tidak lagi berdasar pada kehendak sendiri tetapi harus berdasar pada kepentingan umum. Mekanismenya adalah dengan menggunakan sistem suara terbanyak atau *volunte generale*. Dengan demikian, dalam teori perjanjian masyarakat Rousseau, setelah *pactum unionis* (*volunte de tous*) tidak ada perjanjian penyerahan kekuasaan (*pactum subyectionis*) pada

penguasa. Rakyat dalam hal ini tetap memegang kekuasaan melalui kolektivitas.

2.1.2. Bentuk Negara dan Kedaulatan

Persoalan mengenai bentuk negara seringkali dicampuradukkan dengan bentuk pemerintahan. Namun demikian, hal tersebut didasarkan dari sudut pandang para ahli yang mengemukakan bentuk negara tersebut. Machiavelli misalnya mengemukakan bahwa bentuk negara adalah Monarkhi dan Republik. Sementara Aristoteles mengemukakan bentuk negara berdasarkan jumlah orang yang memerintah, yakni Monarkhi, Aristokrasi dan Politeia.

Dalam membahas bentuk-bentuk negara berdasarkan hukum internasional fokus bahasannya hanya tertuju pada bentuk-bentuk di bawah ini :

- a. Negara Kesatuan
 - b. *Dependent States*
 - c. Negara Federal
 - d. *Associated States* / Negara-negara Persemakmuran (Commonwealth)
 - e. Negara Netral.⁶⁵
- a. Negara Kesatuan (*Unitary States*)

Negara kesatuan berarti bahwa suatu negara memiliki suatu pemerintah yang bertanggung jawab mengatur seluruh wilayahnya.⁶⁶ Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat adalah yang paling utama/kuat dan sementara pemerintah daerah hanya dapat memiliki kekuasaan terhadap kewenangan-kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.⁶⁷

⁶⁵ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), hal. 15.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Reference.com <http://www.reference.com/browse/unitary+state>. diakses pada Senin, 19 Maret 2012 pukul 19.00 WIB.

b. *Dependent States*

Dependent States adalah negara-negara yang bergantung kepada negara-negara lain baik karena adanya pengawasan dari negara lainnya, adanya perjanjian, adanya persetujuan untuk menyerahkan hubungan luar negeri kepada negara lain atau karena adanya pendudukan sebagai akibat perang.⁶⁸ Ian Brownlie menyatakan bahwa

“the term ‘dependent’ is used to indicate the existence of one or more of the following distinct situation : (a) the absence of statehood, where the entity concerned is subordinated to a state so completely as to be within its control and the origin of the subordination does not establish agency or representation; (b) a state which has made concessions to another state in matters of jurisdiction and administration to such an extent that it has in some sense ceased to be sovereign; (c) a state which have legally conferred wide powers of agency and representation in foreign affairs on another states; (d) a state, which in fact suffer interference from another state and may be a ‘client’ state politically, but which quantitatively is not under the complete and permanent control of the ‘patron’; (e) a legal person of a special type, appearing on the international plane for certain purposes only, as in the case of mandated and trust territories and some protectorates; (f) a state which fails to qualify as an ‘independent’ state for the purposes of a particular instrument;”⁶⁹

c. Negara Federal

Bentuk dasar dari negara federal ini yaitu bahwa wewenang terhadap urusan dalam negeri dibagi menurut konstitusi antara pejabat-pejabat federal dan anggota-anggota federasi. Sedangkan urusan luar negerinya biasanya dipegang oleh pemerintah federal. Bilamana suatu negara anggota federasi (*in case*: negara bagian atau propinsi) melakukan perbuatan melanggar kewajiban-kewajiban sebagai suatu negara bagian, maka yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah

⁶⁸ Adolf, ... *Negara ... Hukum Internasional*, hal. 15.

⁶⁹ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, (New York: Oxford University Press: 2008), hal. 73.

negara federal. Karena hukum internasional hanya menyinggung negara-negara yang mampu melaksanakan hubungan-hubungan internasional, karenanya negara federal dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional.⁷⁰

d. *Associated States*/Negara-negara Persemakmuran (*Commonwealth*)

Bentuk negara ini dilatar belakangi oleh adanya proses dekolonisasi pada negara-negara tersebut. Proses dekolonisasi tersebut dapat terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, negara tersebut merdeka penuh, berdaulat dan terpisah dari negara yang pernah mendudukinya; kedua, negara tersebut terpaksa tergantung kepada negara yang mendudukinya karena negara tersebut kecil atau terbelakang (miskin), sehingga memberikan kemerdekaan bukanlah jalan yang terbaik. Untuk negara-negara ini kekuasaan untuk mengatur urusan dalam negeri tetap berada pada kekuasaannya. Namun urusan-urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada negara induknya.⁷¹ Negara-negara dengan bentuk seperti ini yang akan menjadi objek pembahasan di dalam tulisan ini.

e. Negara Netral

Menurut Starke, yang dimaksud dengan negara netral adalah suatu negara yang kemerdekaan, politik dan wilayahnya dengan kokoh dijamin oleh suatu perjanjian bersama negara-negara besar (*the Great Powers*). Negara-negara ini tidak akan pernah berperang melawan negara lain, kecuali untuk pertahanan diri, dan tidak akan pernah mengadakan perjanjian aliansi yang dapat menimbulkan peperangan.⁷² Tujuan netralisasi ini adalah untuk memelihara perdamaian dengan cara (a) melindungi

⁷⁰ Huala Adolf, ... *Negara ... Hukum Internasional*, hal.23-24.

⁷¹ Broderic, *Associated Statehood- a New Form Decolonisation*, I.C.L.Q. Vol 17 (1968), hal. 8.

⁷² Adolf, ... *Negara ... Hukum Internasional*, hal.28.

negara-negara kecil dari negara-negara kuat yang berdekatan dengannya; (b) melindungi dan menjaga kemerdekaan negara netral ini di antara negara-negara kuat.⁷³

Menurut D.P. O'Connell, kewajiban negara netral ini adalah (a) Negara netral harus terlepas dari tindakan-tindakan ofensif dan dari aliansi-aliansi ofensif atau defensif, kecuali dalam hal adanya tindakan agresi dari pihak lain; (b) Negara netral harus bertindak tidak memihak terhadap negara-negara besar (*Powers*) dalam tindakan politiknya.⁷⁴

Disamping kewajiban dari negara netral, adapun kewajiban bagi negara yang memberikan netralisasi adalah : (a) Tidak menyerang atau mengancam wilayah negara netral; (b) Melakukan intervensi dengan kekuatan militer apabila negara netral ini diserang oleh negara lainnya dan negara-negara penjamin ini diminta pertolongannya.⁷⁵

Ketika suatu negara telah terbentuk dan diberikan kekuasaan tertentu, maka timbul pembahasan mengenai bagaimana kekuasaan tersebut. Jika kekuasaan dikonstruksikan dalam kerangka yuridis, maka kekuasaan disebut sebagai kedaulatan.⁷⁶ Hal ini berarti bahwa kedaulatan tersebut adalah kekuasaan dalam perspektif yuridis.

Dari segi perkembangan logis historis, teori kedaulatan dapat diklasifikasikan ke dalam lima teori dengan pendekatan absolut, yaitu (1) Teori Kedaulatan Negara; (2) Teori Kedaulatan Raja; (3) Teori Kedaulatan Rakyat; (4) Teori Kedaulatan Negara; (5) Teori Kedaulatan Hukum.⁷⁷

⁷³ *Ibid*, hal. 29.

⁷⁴ *Ibid*.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 30.

⁷⁶ Soehini, S. H., *Ilmu Negara*, cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 79.

2.1.3. Unsur-Unsur Suatu Negara

Penjabaran unsur-unsur suatu negara menjadi penting untuk kemudian menemukan definisi dari negara. Hal ini menjadi penting karena negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional.⁷⁸

Karena hukum internasional pada hakikatnya mengatur mengenai hak dan kewajiban dari negara-negara, maka perlu didapatkan gambaran dan definisi yang jelas dari 'negara' menurut hukum internasional.⁷⁹ Meskipun banyak para sarjana yang mencoba untuk mengemukakan arti dari negara dalam hukum internasional, namun pengertian yang telah umum diterima adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh *Montevideo Convention on*

⁷⁷ *Teori Kedaulatan Tuhan* berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu seluruh perintah-perintah negara haruslah merupakan implementasi dari kehendak-kehendak Tuhan.

Teori Kedaulatan Raja timbul karena Raja memiliki kekuatan kepercayaan kharismatik, kewibawaan, kesucian keturunan, maupun sebagai representasi dari kekuasaan Tuhan yang secara turun temurun diberikan oleh keluarganya. Hal tersebut menjadi bagian dari kepercayaan rakyat yang sebagian tumbuh secara sukarela dan lainnya karena adanya pemaksaan untuk percaya bahwa keluarga raja inilah yang terbaik untuk memimpin negara.

Teori Kedaulatan Rakyat berangkat dari pemikiran bapak teori kedaulatan rakyat J.J. Rousseau tentang adanya Kontrak Sosial. Ia menyatakan bahwa dalam teori kedaulatan rakyat, kekuasaan rakyat dilaksanakan melalui perwakilan berdasarkan suara terbanyak (*general will* / *volunte generale*). *Volunte Generale* harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Jadi apabila hanya kepentingan satu golongan yang diutamakan, walaupun mendapat suara terbanyak (*general*), maka bukan menjadi apa yang disebut kepentingan umum. (lihat Padmo Wahjono, SH, *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara*, cet.1 (Jakarta:Ind-Hill-Co,1966) hal.163.

Teori Kedaulatan Negara sebenarnya melanggengkan dan melangsungkan teori kedaulatan raja. Disini negara berdaulat karena rakyat, selanjutnya kedaulatan itu dimiliki oleh negara yang dimanifestasikan pada diri raja. Sehingga pada hakikatnya ajaran teori ini sama dengan teori kedaulatan raja.

Teori Kedaulatan Hukum timbul sebagai penyangkalan terhadap teori kedaulatan negara. Dalam ajaran kedaulatan negara, hukum didudukkan lebih rendah dari negara, artinya bahwa negara tidak tunduk pada hukum karena hukum diartikan sebagai perintah dari negara itu sendiri. Hal ini dianggap timpang karena apabila dikaitkan dengan hak asasi rakyat, negara sudah semestinya tidak melanggarnya. Kalaupun hendak mengadakan suatu perubahan harus dengan persetujuan rakyat. Oleh sebab itu hak-hak asasi yang bersumberkan kepada 'kesadaran hukum rakyat' menunjukkan lebih tingginya kedudukan hukum daripada negara. Jadi Hukumlah yang berdaulat. Lihat Padmo Wahjono S. H., *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara*, cet-1 (Jakarta: Indo-Hill-Co, 1996), hal. 163.

Tim, *Ilmu Negara*, hal.86.

⁷⁸ Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, hal. 98.

⁷⁹ Akehurst, *Modern ... International Law*, hal.75.

Rights and Duties of States yang diadopsi dalam *Seventh International Conference of American States* (Amerika Serikat dan 15 Negara Latin). Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa “*The state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states*”.⁸⁰

a. Permanent population

Kriteria dari *permanent population* ini dihubungkan dengan keberadaan *territory* yang kemudian menjadi dasar dari keberadaan fisik dari suatu negara.⁸¹ Hal ini menjadi penting karena menurut Ian Brownlie “...*since in the absence of the physical basis for an organized community, it will be difficult to establish the existence of a state.*”⁸²

Tidak ada ketentuan yang *rigid* mengenai besarnya jumlah populasi sehingga bisa disebut sebagai negara. Dalam hal ini, yang dilihat adalah bukan besarnya jumlah populasi, tetapi adanya suatu populasi yang tetap (*permanent*). Siapa yang termasuk ke dalam *permanent population* ini diserahkan kepada hukum nasional masing-masing negara, dimana hukum internasional mengakui kewenangan tersebut, kecuali terhadap beberapa ketentuan-ketentuan tertentu.⁸³

b. Defined Territory

Territory atau wilayah adalah tempat di mana penduduk yang menetap itu berada. *Territory* ini perlu didefinisikan secara jelas berdasarkan geografis untuk memisahkannya dari wilayah negara

⁸⁰ *Article 1 Convention on Rights and Duties of States*, ditandatangani di Montevideo, Uruguay, 26 Desember 1933.

⁸¹ Brownlie, *Principle of Public ...* , hal 73.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Akehurst, *Modern ... International Law*, hal.76.

lain dan disatukan dalam satu hukum yang sama.⁸⁴ *Territory* ini termasuk ruang yang ada di atas permukaan tanah, kandungan dalam tanah sampai ke pusat bumi dan laut yang berjarak 12 mil dari garis pantai.⁸⁵ Persoalan *territory* ini menjadi hangat sejak kasus *the Island of Palmas case* (sengketa pulau Miangas) antara Amerika Serikat dan Belanda di tahun 1928.⁸⁶ Meskipun *territory* merupakan unsur yang sangat penting, tetapi besar kecilnya ukuran suatu *territory* tidak menjadi persoalan.⁸⁷ Unsur *territory* ini dapat dipenuhi meskipun terdapat dimana kondisi dimana terjadi sengketa perbatasan dengan wilayah negara lain.⁸⁸

c. *Government*

Keberadaan suatu negara harus dibuktikan dengan adanya suatu pemerintahan yang efektif dimana terdapat pemisahan kekuasaan antara satu dan yang lainnya dan memiliki kewenangan dibidang eksekutif dan legislatif.⁸⁹ Penguasaan yang efektif oleh suatu pemerintahan terhadap suatu wilayah dan masyarakat adalah unsur ketiga yang penting, yang menggabungkan dua unsur sebelumnya, bagi negara dalam hukum internasional.⁹⁰

Dalam salahsatu tulisannya, Lauterpacht menyatakan bahwa adanya unsur ini, yaitu pemerintah, merupakan syarat utama untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata kemudian secara hukum atau secara faktanya menjadi

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Scott, Hague Court Reports 2d 83 (1932), (Perm. Ct. Arb. 1928), 2 U.N. Rep. Intl. Arb. Awards 829.*

⁸⁷ Wallace, *International Law*, hal 61.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Akehurst, *Modern ... International Law*, hal.77.

negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara.⁹¹

d. Capacity to enter into relations with the other states

Unsur terakhir di dalam konvensi Montevideo ini adalah salahsatu unsur yang penting dalam kenegaraan, meskipun pelaksanaannya bergantung pada respon dari aktor-aktor internasional.⁹² Keberadaan tiga unsur sebelumnya merupakan hal yang faktual, sementara unsur yang keempat ini harus berdasarkan pengakuan dari negara lain. Dalam kata lain, suatu entitas mungkin dapat memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, tetapi negara-negara lain tersebut juga mungkin untuk menolak mengakui atau mengadakan hubungan dengan entitas tersebut sehingga tidak dapat melaksanakan kapasitasnya untuk mengadakan hubungan luar negeri.⁹³

5.2 Penguasaan atas *Territory* dan *Territorial Sovereignty*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *a defined territory* adalah salahsatu karakteristik fisik dari adanya negara selain *permanent population*. Di dalam suatu *territory* tersebut, negara dapat menjalankan kekuasaannya yang tertinggi terhadap rakyatnya. Kekuasaan tertinggi tersebut dalam konteks yuridis dikenal dengan istilah kedaulatan atau *sovereignty*.

Pembahasan teoritis mengenai persoalan *territory* dan kedaulatan terhadap suatu wilayah merupakan salah satu bagian penting dalam hukum internasional. D.P.O'Connell berpendapat, karena pelaksanaan kedaulatan didasarkan pada wilayah, maka wilayah adalah konsep fundamental

⁹¹ Lauterpacht sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, ... *Negara ... Hukum Internasional*, hal.5.

⁹² Wallace, *International Law*, hal.62.

⁹³ *Ibid.*

hukum internasional.⁹⁴ Bahkan Malcolm N. Shaw menyatakan bahwa “*since such fundamental legal concepts as sovereignty and jurisdiction can only be comprehended in relation to territory, it follows that the legal nature of territory becomes a vital part in any study of International Law.*”⁹⁵ Hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu hukum internasional yang telah dibuat dapat dilaksanakan di suatu negara. Untuk itu, penulis akan mengemukakan mengenai persoalan tersebut.

2.2.1. Terjadinya penguasaan terhadap suatu *territory*

*State territory is that defined portion of the surface of the globe which is subjected to the sovereignty of the state. A state without a territory is not possible although the necessary territory may be small... the importance of State territory lies in the fact that it is the space within which the state exercise its supreme authority.*⁹⁶

Pernyataan yang dikemukakan oleh Oppenheim di atas tersebut menunjukkan bagaimana unsur *territory* menjadi penting dari keberadaan suatu negara karena pada wilayah tersebutlah negara dapat melaksanakan kekuasaan tertingginya. Ada dua prinsip yang dikenal untuk menentukan bagaimana suatu wilayah dapat menjadi bagian dari suatu negara yaitu Prinsip Efektivitas⁹⁷ (*effectiveness*)

⁹⁴ D.P.O’Connell, *International Law*, (London: Stevens and Sons, 1970), hal. 403.

⁹⁵ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 5th edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hal. 409.

⁹⁶ L.L. Oppenheim, *International Law*, Vol.1 “Peace” (1955) hal. 451-452.

⁹⁷ Prinsip efektifitas dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai *the principle of effectiveness*. Prinsip ini berarti bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Indikator untuk menentukan apakah suatu peraturan efektif adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan hukum nasional di suatu wilayah. Di sini terlihat bahwa Hans Kelsen secara konsisten menggunakan pendekatan hukum sebagai ukuran efektivitas kepemilikan suatu wilayah.

Lihat Adolf, ... *Negara ... Hukum Internasional*, hal.115-116.

dan Prinsip *Uti Possidetis*.⁹⁸ Adapun cara suatu negara mendapatkan suatu *territory* adalah sebagai berikut :

a. *Occupation* (Pendudukan)

Occupation berarti bahwa pendudukan dilakukan terhadap suatu wilayah *terra nullius*, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi.⁹⁹ Namun demikian, suatu wilayah yang dihuni oleh penduduk asli (*indigenous people*)¹⁰⁰ tidak dapat dilakukan

⁹⁸ Prinsip *Uti Possidetis* berarti bahwa *pada prinsipnya* batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya. Dinyatakan pada prinsipnya karena dalam kenyataannya batas-batas wilayah suatu negara (yang lama dan baru) dapat saja berubah. Dalam sengketa the Land, Island and Maritime Frontire Dispute case antara El Savador dan Honduras tahun 1992, Mahkamah berpendirian bahwa batas wilayah suatu negara pada waktu negara tersebut memperoleh kemerdekaan dapat saja berubah. Perubahan dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan yang memutuskan sengketa perbatasan atau adanya tindakan para pihak yang berpengaruh terhadap perbatasan negaranya. Misalnya para pihak membuat perjanjian perbatasan. Lihat D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law* (1991) dalam Huala Adolf, , ... *Negara ... Hukum Internasional*, hal 15.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 118.

¹⁰⁰ Jose R. Martinez Cobo, *the Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* PBB mengemukakan soal *indigenous people* dalam studinya yang berjudul *Study on the Problem of Discrimination against Indigenous Populations* bahwa *Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing on those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal system.*

“This historical continuity may consist of the continuation, for an extended period reaching into the present of one or more of the following factors:

- a) *Occupation of ancestral lands, or at least of part of them;*
- b) *Common ancestry with the original occupants of these lands;*
- c) *Culture in general, or in specific manifestations (such as religion, living under a tribal system, membership of an indigenous community, dress, means of livelihood, lifestyle, etc.);*
- d) *Language (whether used as the only language, as mother-tongue, as the habitual means of communication at home or in the family, or as the main, preferred, habitual, general or normal language);*
- e) *Residence on certain parts of the country, or in certain regions of the world;*
- f) *Other relevant factors.*

“On an individual basis, an indigenous person is one who belongs to these indigenous populations through self-identification as indigenous (group consciousness) and is recognized and accepted by these populations as one of its members (acceptance by the group).

“This preserves for these communities the sovereign right and power to decide who belongs to them, without external interference”

Background paper prepared by Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues, Division for Social Policy and Development, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND

occupation. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh putusan Mahkamah Internasional dalam *Western Sahara Case*.¹⁰¹

Occupation mengandung dua unsur pokok, yaitu penemuan (*discovery*) dan pengaturan efektif (*effective control*). Adanya penemuan saja tidak cukup untuk memberikan hak kepada pihak yang menemukan wilayah tersebut. Penemuan tersebut harus diikuti dengan adanya pengaturan yang efektif di wilayah tersebut.¹⁰²

b. *Conquest* (Penaklukan) atau *Annexation*

Annexation adalah suatu cara pemilikan suatu wilayah dengan cara kekerasan. Namun hal ini tidak lagi diakui pasca Perang Dunia II dan setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan pada tahun 1970 dalam *Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States* dinyatakan bahwa "... *The territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognised as legal*".¹⁰³ Hal ini berarti bahwa dalam hukum internasional kontemporer tidak lagi diakui adanya *annexation*.

c. *Accretion and Avulsion*

Accretion atau pertambahan adalah suatu cara perolehan suatu wilayah baru melalui proses geografis (secara alami). Melalui proses ini suatu tanah (wilayah) baru terbentuk dan menjadi

SOCIAL AFFAIRS, UNITED NATIONS untuk Workshop on Data Collection and Disaggregation For Indigenous Peoples, New York, 19-21 Januari 2004).

¹⁰¹ *Advisory Opinion* dari Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) terhadap permohonan dari Majelis Umum PBB terhadap status dari Western Sahara yang sebelumnya diduduki oleh Spanyol dan kemudian menjadi wilayah dari Kerajaan Maroko.

<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=323&code=sa&p1=3&p2=4&case=61&k=69&p3=5>, diakses pada Jumat, 23 Maret 2012 pukul 14.14 WIB.

¹⁰² Akehurst, *Modern ... International Law*, hal.143.

¹⁰³ Paragraph X *Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*.

bagian dari wilayah yang sudah ada. Misalnya, pembentukan pulau di mulut sungai atau perubahan arah suatu sungai yang menyebabkan tanah menjadi kering yang sebelumnya dilalui oleh air.¹⁰⁴ Dalam hal ini ditekankan bahwa proses tersebut terjadi benar-benar karena proses alam, sehingga adanya rekayasa dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara tidak dapat dibenarkan.

d. *Prescription*

Dalam hukum internasional, yang dimaksud dengan preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan pemiliknya.¹⁰⁵ *Prescription* dilakukan dengan cara yang melakukan penguasaan yang damai dan terus menerus terhadap suatu wilayah tertentu.¹⁰⁶ *Prescription* berbeda dengan *occupation*. Dalam *occupation* terhadap suatu *terra nullius* tidak membutuhkan jangka waktu tertentu untuk beralihnya hak kepada negara yang melakukan *occupation* karena memang tidak ada kekuasaan yang berlaku di sana. Sementara dalam *prescription*, wilayah tersebut telah diduduki dalam waktu yang relatif lama dan tidak mendapat perlawanan atau protes dari penduduk aslinya.

e. *Cessie*

Cessie berarti pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara kepada negara lain dan seringkali terjadi dalam rangka suatu perjanjian (*treaty*) yang dilakukan setelah berlangsungnya perang. *Cessie* ini merupakan bentuk yang paling umum digunakan dalam hal pemberian hak atas suatu wilayah kepada

¹⁰⁴ Shaw, *International Law*, hal. 419-420.

¹⁰⁵ Adolf, ... *Negara ... Hukum Internasional*, hal. 126.

¹⁰⁶ Wallace, *International Law*, hal.93.

suatu negara.¹⁰⁷ Dalam *Cessie* ini berarti bahwa kedaulatan dari suatu negara terhadap wilayah tertentu diserahkan kepada negara lain dalam arti suatu negara melaksanakan kedaulatannya di wilayah itu dan negara yang lain melepaskan kedaulatannya dan mengakui kedaulatan negara yang baru.

2.2.2. Territorial Sovereignty

Territorial Sovereignty atau Kedaulatan atas wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif¹⁰⁸ di wilayahnya. Dalam wilayah tersebut negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya.¹⁰⁹ Hal ini berarti bahwa semua orang yang berada di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk pada hukum dari negara yang menguasai wilayah tersebut. Dalam hal ini berlakulah adagium "*Qui in territorio meo est, etiam meus subditus est*" yang artinya adalah "jika seseorang berada di wilayah saya, maka ia juga tunduk pada saya".¹¹⁰

Suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Pada prinsipnya suatu negara hanya dapat melaksanakan secara eksklusif dan penuh di dalam wilayahnya saja. Karena itu pula suatu negara yang tidak memiliki wilayah, tidaklah mungkin menjadi suatu negara.¹¹¹

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 96.

¹⁰⁸ Terhadap penggunaan istilah yurisdiksi dalam hukum internasional sering kali diperdebatkan dengan istilah sovereignty atau kedaulatan. Bahkan seringkali ada kerancuan yang digunakan oleh para praktisi hukum dalam penggunaan istilah keduanya. Ian Brownlie menyatakan bahwa "... in brief, 'sovereignty' is legal shorthand for legal personality of a certain kind, that of statehood; 'jurisdiction' refers to particular aspects of the substance, especially rights (or claim), liberties and powers."

¹⁰⁹ Hans Kelsen, *Principle of International Law*, (New York: Rinehart & Co., 1956), hal.212.

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 216.

¹¹¹ Huala Adolf, ... *Negara ... Hukum Internasional*, hal.112.

Suatu *territorial sovereignty* juga dapat hilang sebagaimana cara perolehan suatu *territory* tersebut.

Disamping kedaulatan atas *territory* yang didapat melalui cara-cara yang telah dijelaskan di atas, suatu negara juga memiliki kedaulatan terhadap wilayah-wilayah tertentu yang diakui oleh hukum internasional. Kedaulatan tersebut meliputi wilayah sebagai berikut

a. Boundaries

Wilayah perbatasan (*boundaries*) merupakan masalah yang cukup penting dalam hal kedaulatan negara. Hal ini karena daerah perbatasan berkaitan dengan tempat berlakunya kedaulatan suatu negara dan berakhirnya kedaulatan dari negara lain atau sebaliknya. Dalam persoalan perbatasan, terdapat perbedaan terminologi antara '*natural*' dan '*artificial*' boundaries. *Natural boundaries* meliputi gunung, sungai, pantai, hutan, danau atau gurun yang memisahkan dua atau lebih negara. Sementara *artificial boundaries* meliputi simbol-simbol atau legenda yang menunjukkan garis perbatasan dalam garis lintang dan garis bujur.¹¹²

b. River

Wilayah kedaulatan negara mencakup darat, laut dan udara. Pengertian dari wilayah darat berarti termasuk sungai yang memotong wilayah tersebut dan danau-danau yang dikelilingi oleh daratan. Hal ini berarti bahwa negara memiliki kedaulatan penuh atas sungai-sungai yang berada di dalam wilayahnya. Persoalan kemudian timbul kemudian mengenai hak dari negara di tepi sungai dan negara-negara lain untuk melintas di sungai tersebut. Menurut Starke, yang paling tepat dan masuk akal adalah bahwa hanya negara-negara yang dilewati sungai itu sajalah yang memiliki hak lintas. Hal ini karena negara-negara

¹¹² J.G. Starke, ... *Introduction ... International Law*, hal.152.

yang berada di bagian hulu sungai seyogyanya tidak boleh dihalangi untuk melewati sungai itu menuju laut.¹¹³

c. *Territorial Water*

Ketika melakukan pembahasan mengenai persoalan laut sebagai wilayah kedaulatan suatu negara, maka pembahasannya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut.

Internal water (Perairan Pedalaman) adalah perairan yang berada pada sisi dalam dari garis pangkal. Kedaulatan negara terhadap wilayah ini sama derajatnya dengan kedaulatan atas daratan. *Laut Teritorial* adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Meskipun negara pantai memiliki kedaulatan di laut territorial, namun di wilayah ini masing dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai, yaitu hak setiap negara untuk melewati laut ini. *Strait* (Selat) adalah selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Negara-negara yang berada di tepi selat juga memiliki kedaulatan di atasnya. *Contiguous Zone* (Jalur Tambahan) adalah suatu zona tambahan dan berada di laut territorial di mana suatu negara mempunyai kekuasaan terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan. Hal ini berarti bahwa kedaulatan negara di wilayah tersebut hanya terbatas kepada keempat hal tersebut aja. *Continental Shelf* (Landas Kontinen) suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Sehubungan dengan wilayah ini, dikenal adanya istilah baru yakni *sovereign rights* (hak-hak berdaulat). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu

¹¹³ *Ibid*, hal. 184.

zona selebar tidak lebih dari 200 mil dari garis pangkal di mana negara pantai memiliki hak-hak eksklusif dan yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi yang dimiliki negara pantai atas ZEE-nya yakni (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; (ii) riset ilmiah kelautan; (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. *High Seas* (Laut Lepas) pada prinsipnya tidak tunduk pada kedaulatan suatu negara. Laut Lepas merupakan suatu *res communis* yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi semua negara. Namun demikian, suatu negara masih memiliki suatu hak yang dikenal dengan (*the right of hot pursuit*).

d. Sovereignty over the Air

Wilayah kedaulatan suatu negara mencakup pula ruang udara di atas wilayahnya. Wilayah tersebut sudah sejak lama dibahas, terutama tampak pada sebuah dalil Hukum Romawi yang berbunyi “*cujus est solum, ejus est usque ad coelum*” yang berarti bahwa “*barangsiapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala sesuatu yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah.*”¹¹⁴

Sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat terbang, wilayah udara belum diperhitungkan dalam masyarakat internasional. Seiring dengan berjalannya waktu, wilayah ruang udara mulai diperhitungkan dan dipersoalkan seiring dengan meletusnya Perang Dunia I. Pada saat tersebut, pesawat-pesawat dengan teknologi yang lebih canggih sudah dapat melakukan pengeboman dan melakukan spionase sehingga telah menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara. Oleh karena itu, sebagian negara mulai menerapkan kedaulatannya di ruang udara di atas wilayahnya. Tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya ditegaskan dalam *Paris Convention* 1919 yang memberikan suatu

¹¹⁴ Priyatna Abdurrajjid, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, (Jakarta:Pusat Penelitian Hukum Angkasa,1989) hal.49.

‘kedaulatan lengkap dan eksklusif’ kepada negara terhadap wilayah yang ada di atasnya. Konvensi ini kemudian diganti dengan *Chicago Convention 1944 (Convention on International Civil Aviation)*.

Meskipun negara memiliki kedaulatan atas wilayah udaranya, namun dalam *Chicago Convention* diatur mengenai adanya hak lintas damai (*right of innocent passage*).¹¹⁵ Di dalam konferensi Chicago, beberapa negara mengusulkan disepakatinya *Five Freedom of the Air* atau ‘lima kebebasan udara’. Karena tidak semua negara mendukung usul tersebut sehingga pada konferensi tersebut disepakati dua perjanjian di hari yang sama. *Five Freedom of the Air* itu adalah (a) *fly across foreign territory without landing*; (b) *land for non traffic purpose*; (c) *disembark in a foreign country traffic originating in the state of origin of the aircraft*; (d) *pick-up in a foreign country traffic destined for the state of origin of the aircraft*; (e) *carry traffic between two foreign countries*.¹¹⁶

e. *Upper Strata of Atmosphere and Outer Space*

Persoalan kedaulatan terhadap ruang angkasa mulai dibicarakan sejak mulai dilakukannya eksplorasi ruang angkasa. Seiring perkembangan teknologi, wilayah ruang angkasa mulai dimanfaatkan diantaranya untuk kepentingan komunikasi,

¹¹⁵ Article 5 dari *Chicago Convention on International Civil Aviation* menyatakan berbunyi sebagai berikut:

Each contracting State agrees that all aircraft of the other contracting States, being aircraft not engaged in scheduled international air services shall have the right, subject to the observance of the terms of this Convention, to make flights into or in transit non-stop across its territory and to make stops for non-traffic purposes without the necessity of obtaining prior permission, and subject to the right of the State flown over to require landing. Each contracting State nevertheless reserves the right, for reasons of safety of flight, to require aircraft desiring to proceed over regions which are inaccessible or without adequate air navigation facilities to follow prescribed routes, or to obtain special permission for such flights.

Such aircraft, if engaged in the carriage of passengers, cargo, or mail for remuneration or hire on other than scheduled international air services, shall also, subject to the provisions of Article 7, have the privilege of taking on or discharging passengers, cargo, or mail, subject to the right of any State where such embarkation or discharge takes place to impose such regulations, conditions or limitations as it may consider desirable.

¹¹⁶ *International Air Transport Agreement Article 1 section.*

teknologi hingga militer. PBB sebagai badan yang berkepentingan dan memiliki peran yang besar dalam perkembangan hukum angkasa telah berhasil mewujudkan suatu kesepakatan bersama tentang adanya wilayah yang dimiliki oleh semua umat manusia (*common heritage of mankind*) di mana wilayah di ruang angkasa merupakan milik bersama dari umat manusia.

f. Servitude and Acquired Rights

Dalam konsep *territory* menurut hukum internasional, dikenal adanya *international servitude* dan *Acquired Rights*. *Servitude* adalah adanya wilayah suatu negara yang dalam ketentuan dan batas-batas tertentu dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan dari negara lain¹¹⁷. *Servitude* ini harus dilaksanakan dengan suatu hak *in rem* (*rights in rem*)¹¹⁸ yang melekat pada wilayah tersebut dan meliputi hal-hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan terhadap wilayah tersebut¹¹⁹, misalnya hak untuk menangkap ikan di daerah perbatasan laut, hak menggunakan pelabuhan atau sungai. Sementara *acquired rights* berarti bahwa adanya pengakuan hak-hak negara-negara bukan pantai (*non-coastal states*) terhadap wilayah laut yang selama ini didominasi oleh negara pantai (*coastal states*)¹²⁰. Hal ini berarti bahwa adanya pengakuan yang sama terhadap *coastal states* dan *non-coastal states* sehingga *non-coastal states* memiliki sejumlah kewenangan terhadap wilayah lautan.

Pasca Perang Dunia II, terjadi perubahan secara besar-besaran dalam sejarah peradaban umat manusia. Salah satu hal yang kemudian menjadi kesepakatan

¹¹⁷ Starke, ... *Introduction ... International Law*, hal.173.

¹¹⁸ *Rights in rem* adalah terminologi di dalam ilmu hukum dimana hak yang dapat dikenakan kepada seluruh subjek hukum bukan personal.

¹¹⁹ Starke, ... *Introduction ... International Law*, *Ibid*.

¹²⁰ *Ibid*.

seluruh bangsa-bangsa di dunia adalah dihapuskannya penjajahan, tidak hanya oleh suatu negara terhadap negara lain (*exploitation de nation par nation*), tetapi juga oleh manusia terhadap manusia lain (*exploitation de l'homme par l'homme*). Semangat untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi ini diwujudkan dengan membentuk suatu organisasi yang bersifat universal demi terciptanya keamanan dan perdamaian dunia sehingga tidak ada lagi suatu bangsa lebih berkuasa dari bangsa lain.

Usaha-usaha untuk menghapuskan penjajahan dari muka bumi terlihat pasca didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi yang menghimpun seluruh negara-negara dunia. Hal tersebut ditunjukkan dengan fakta bahwa lebih dari 80 negara telah merdeka dan melepaskan diri dari kekuasaan negara lain. Kemerdekaan negara-negara tersebut diakui secara universal dan didukung dengan keikutsertaan negara-negara tersebut di dalam organisasi PBB. Namun demikian, terdapat sejumlah kondisi dimana beberapa wilayah belum ingin merdeka dan menjadi negara yang berdaulat sendiri sehingga masih menjadi bagian dari negara yang sebelumnya menjadi penjajah wilayah tersebut. Hal ini biasanya dikarenakan belum adanya kesiapan untuk menjadi negara yang mandiri seperti belum adanya pemerintahan mandiri hingga ketergantungan dalam hal urusan luar negeri dan perdagangan. Karena kolonialisasi tidak lagi diakui oleh bangsa-bangsa di dunia sementara terdapat wilayah-wilayah jajahan yang belum ingin merdeka dan tunduk kepada negara yang menjajahnya, maka PBB mengemukakan suatu konsep *Non-Self Governing Territory* untuk persoalan wilayah dengan kondisi tersebut.

Karena begitu pentingnya unsur wilayah bagi suatu negara dalam hukum internasional, disamping untuk menyelesaikan persoalan wilayah pasca kolonialisasi, konsep *Non-Self Governing Territories* ini dijadikan sebagai salah poin penting dalam Piagam PBB. Hal ini dituangkan dalam Bab XI dari Piagam PBB tentang *Declaration Regarding Non-Self-Governing Territories* yang berbunyi sebagai berikut

Article 73

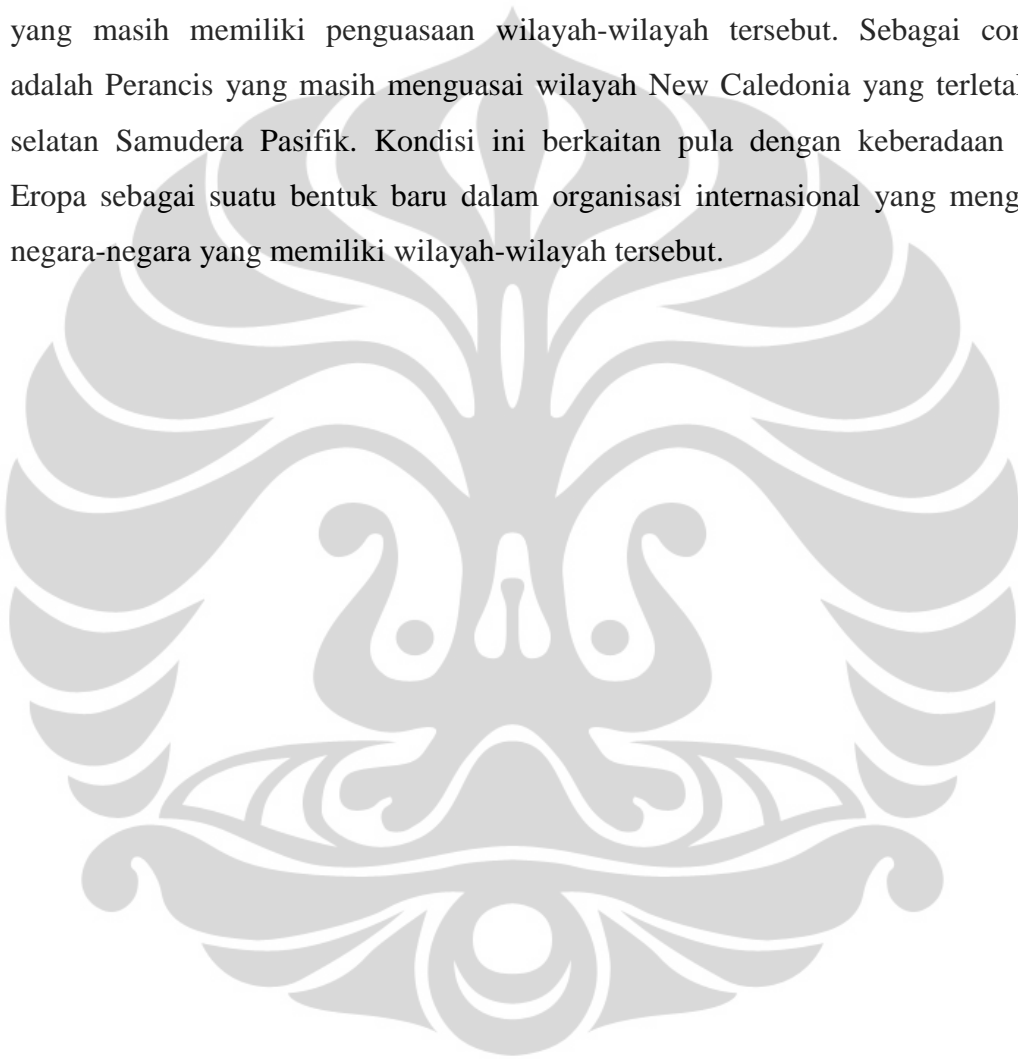
Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have

not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end:

- a. to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses;*
- b. to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement;*
- c. to further international peace and security;*
- d. to promote constructive measures of development, to encourage research, and to co-operate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article; and*
- e. to transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.*

Ketentuan pasal diatas memberikan kewajiban bagi negara-negara untuk mengakui keberadaan dari wilayah-wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri dan melakukan usaha-usaha dengan cara damai untuk menuju negara yang berdaulat dan berdiri sendiri. Kewajiban ini pada umumnya diberikan kepada negara-negara yang sebelumnya menguasai suatu wilayah dengan kolonisasi dan bertanggung jawab terhadap persoalan administrasi dan pemerintahan di wilayah tersebut. Hal inilah yang kemudian memunculkan adanya wilayah-wilayah yang sampai hari ini masih menundukkan diri kepada negara-negara yang dulu menjajah wilayah tersebut. Sebagai akibatnya, negara-negara yang telah merdeka dan berdaulat, memiliki wilayah-wilayah yang secara geografis terletak beribu-ribu kilometer dari wilayah utama negara tersebut. Hal ini juga berakibat adanya hukum dari suatu negara diterapkan di wilayah yang terletak di seberang samudera tersebut. Wilayah-wilayah ini dikenal dengan istilah seperti *overseas*

territory atau *dependent area*. Hal ini masih menjadi perdebatan di dalam hukum internasional karena penguasaan suatu negara terhadap wilayah yang berada di luar negeri bagi sebagian kalangan dianggap sebagai bentuk penjajahan atau kolonisasi cara modern sementara kalangan lain beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah suatu bentuk penjajahan. Negara-negara Eropa Baratlah –yang pada zamannya melakukan penjajahan di wilayah-wilayah di luar benua Eropa– yang masih memiliki penguasaan wilayah-wilayah tersebut. Sebagai contoh adalah Perancis yang masih menguasai wilayah New Caledonia yang terletak di selatan Samudera Pasifik. Kondisi ini berkaitan pula dengan keberadaan Uni Eropa sebagai suatu bentuk baru dalam organisasi internasional yang mengikat negara-negara yang memiliki wilayah-wilayah tersebut.



BAB III

Wilayah suatu Negara di luar negeri berdasarkan Hukum Internasional

3.1 *Non-Self Governing Territory* berdasarkan *Chapter XI UN Charter* dan *General Assembly Resolutions 1514*

Salahsatu yang menjadi semangat didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya ditulis PBB) adalah penghapusan penjajahan (*colonialism*) dari muka bumi.¹²¹ Pada saat PBB didirikan, terdapat lebih dari 750 juta jiwa umat manusia (sepertiga dari total populasi manusia di bumi pada saat itu) yang hidup di wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri dan bergantung kepada kekuasaan dari negara penjajah.

Bab XI Piagam PBB menyatakan adanya prinsip-prinsip yang diakui oleh PBB usaha melakukan penghapusan kolonialisasi –termasuk didalamnya prinsip *self-determination*- dengan *Declaration Regarding Non-Self Governing Territories*¹²². Disamping itu, PBB juga menciptakan suatu Sistem Perwakilan Internasional (*International Trusteeship System*) sebagaimana yang diatur di dalam *article 75-85* dan Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*)¹²³ dalam *article 86-91* dari Piagam PBB. Hal tersebut

¹²¹ “...to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors, and to unite our strength to maintain international peace and security....”

¹²² Bab XI, Pasal 73 dan Pasal 74 Piagam PBB.

¹²³ Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*) telah mengakhiri tugasnya pada tanggal 1 November 1994 dengan diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 956 tahun 1994 tentang pelepasan status dari Palau sebagai *Trust Territory*. Palau adalah wilayah *Trust Territory* terakhir yang meraih kemerdekaan setelah sebelumnya berada di bawah *mandate* yang diberikan kepada Amerika Serikat. Meskipun Dewan Perwalian tidak lagi menjalankan tugas dalam hal perwalian wilayah, tetapi Dewan ini telah menyepakati bahwa tidak menutup kemungkinan apabila dikemudian hari diadakan pertemuan Dewan Perwalian atas permintaan mayoritas dari anggota Majelis Umum PBB atau dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

dibentuk dengan tujuan untuk memantau dan mengawasi wilayah-wilayah yang dikenal sebagai '*Trust Territory*'. Wilayah-wilayah ini –tunduk pada perjanjian pemisahan dari pemerintahan suatu negara- merupakan wilayah yang secara formal berada di bawah mandat dari Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*), atau wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang kalah pada Perang Dunia II, atau wilayah-wilayah yang secara sukarela menundukkan diri pada negara yang menjalankan pemerintahan di wilayah tersebut. Terdapat sebelas negara yang mengelola *Trust Territory*.¹²⁴

3.1.1. Wilayah-wilayah yang diakui secara Internasional

Sejak berdirinya PBB, lebih dari 80 wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah koloni mendapatkan kemerdekaan.¹²⁵ Negara-negara tersebut sebelumnya merupakan wilayah kolonisasi yang setelah didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa menyanggah status *Trust Territory* dan *Non-Self Governing Territory*.

Pada tahun 1946, delapan anggota PBB yakni Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Perancis dan Selandia Baru mengemukakan sebanyak 72 wilayah yang berada di bawah pemerintahannya yang dikategorikan sebagai *Non-Self Governing Territory*. Dari jumlah tersebut, sebanyak delapan wilayah merdeka sebelum tahun 1959.

Pada tahun 1963, Majelis Umum PBB menyetujui perubahan jumlah *non-self governing territory* menjadi sebanyak 64 wilayah. Dari jumlah tersebut termasuk di dalamnya dua wilayah yang merupakan "*Trust Territory*" pada saat itu yakni Nauru dan *Trust*

¹²⁴ Kesebelas negara tersebut adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Italia, Portugal, Prancis, Spanyol.

¹²⁵ The United Nations and Decolonization, <http://www.un.org/en/decolonization/selfdet.shtml> diakses pada Kamis, 3 Mei 2012 pukul.14.30 WIB.

Territory of the Pacific Island. Terhadap wilayah-wilayah tersebut diterapkan ketentuan dari Resolusi Majelis Umum PBB 1514.¹²⁶

Sejak tahun 1960 hingga tahun 2002, sebanyak 54 *non-self governing territories* pada akhirnya mampu memiliki pemerintahan sendiri dan berdaulat layaknya negara-negara lain yang ada di dunia. Pada saat ini masih terdapat sebanyak 16 *non-self governing territory* yang masih diusahakan untuk kemudian dapat memiliki pemerintahan sendiri dalam beberapa tahun yang akan datang.

Adapun wilayah-wilayah *trust territory* dan *non-self governing territories* yang diakui berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB dapat ditemukan di dalam lampiran tulisan ini.

3.1.2. General Assembly Resolution (Resolusi Majelis Umum) 1514 sebagai instrumen Dekolonialisasi

Pada tanggal 1 Desember 1960, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 1514 tentang Deklarasi mengenai Jaminan Kemerdekaan bagi Wilayah dan Masyarakat Kolonial (*Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples*). Adanya deklarasi ini menjadi tonggak semangat untuk mempercepat proses dekolonialisasi bagi wilayah-wilayah di muka bumi yang masih berada di bawah penguasaan negara lain. Resolusi ini pula yang kemudian menjadi latar belakang dari Majelis Umum untuk membentuk Komite Khusus Dekolonialisasi (*Special Committee on Decolonization*) yang bertugas mengawasi pelaksanaan dari Resolusi tersebut.

Dalam Resolusi 1514 diakui adanya persamaan antara semua bangsa dan negara baik negara besar dan kecil. Selanjutnya, resolusi ini juga menegaskan betapa pentingnya peran dari PBB dalam usaha-usaha dekolonialisasi dengan mewujudkan kemerdekaan dari *Non-Self Governing Territory* dan *Trust Territory* sebagai bentuk penolakan dari seluruh umat manusia terhadap kolonialisasi. Kemerdekaan dari

¹²⁶ General Assembly Resolution 1514, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*. Resolusi ini dikenal juga dengan istilah Deklarasi Dekolonialisasi.

wilayah-wilayah yang belum mampu mencapai kemerdekaan dan membentuk pemerintahan yang mandiri adalah hal yang sangat-sangat diharapkan oleh resolusi tersebut.¹²⁷

Resolusi 1514 memuat sebanyak enam deklarasi yang berkaitan dengan upaya dekolonialisasi yakni :

1. Penundukkan masyarakat terhadap eksploitasi dari kekuatan asing yang mengenyampingkan hak azasi manusia yang paling fundamental bertentangan dengan Piagam PBB dan merupakan halangan demi tercapainya perdamaian dunia.
2. Setiap orang memiliki hak menentukan nasib sendiri yang dengan hak itu ia dapat dengan bebas menentukan status politik dan mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
3. Ketidacapaian secara politik, ekonomi, sosial dan kesiapan pendidikan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda kemerdekaan dari suatu wilayah.
4. Semua tindakan militer terhadap wilayah yang masih memiliki ketergantungan harus dihentikan agar wilayah tersebut dapat secara damai dan bebas mengusahakan kemerdekaannya serta integritas wilayah tersebut harus dihormati.
5. Perlu diambil tindakan yang cepat terhadap *Trust Territory* dan *Non-self Governing Territory* dan wilayah-wilayah lain yang belum memperoleh kemerdekaan untuk menyerahkan kekuasaan kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Semua tindakan yang bertujuan untuk menciptakan perpecahan terhadap integritas dari suatu wilayah adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip dari Piagam PBB.¹²⁸

¹²⁷ Konsiderans dari *UN General Assembly Resolutions 1514 on Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*.

¹²⁸ *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, UNGA Resolution 1514.

3.1.3. Dekolonialisasi dan Pelaksanaan Kedaulatan di suatu wilayah di luar negeri

Adanya dekolonialisasi di muka bumi berangkat dari hak yang paling utama dan mendasar bagi setiap manusia untuk menentukan nasibnya sendiri (*right of self-determination*)¹²⁹. Adanya hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut kemudian melahirkan prinsip pemerintahan berdasarkan kesepakatan (*government by consent*).

Rights of self-determination telah menjadi salahsatu pilar dalam tatanan dunia internasional baru yang didasarkan atas prinsip atau azas tertentu dan bukan didasarkan pada kekuatan; didasarkan pada aturan hukum dan bukan didasarkan atas kepentingan sebagian golongan. Sejak berdirinya, Perserikatan Bangsa-Bangsa selalu mendasarkan ketentuan-ketentuan di dalam pasal dari konvensi-konvensi yang disepakati dan mengakui adanya *right of self-determination* dari seluruh umat manusia untuk mengembangkan pemerintahannya sendiri; secara bebas membangun tatanan politiknya sendiri dan mengatur secara mandiri hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya. *Right of self-determination* adalah hak yang paling fundamental yang tanpa keberadaannya mustahil untuk dapat menikmati hak-hak asasi manusia yang lain.

Pengertian dari *self-determination* menurut hukum internasional dapat ditemukan di dalam dua konvensi internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip universal mengenai hak azasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). yakni Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convention on Civil and Political Rights*) dan Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International*

¹²⁹ *Right of self-determination* atau hak menentukan nasib sendiri merupakan salah satu prinsip utama dalam Hukum Internasional. hak ini terbentuk dan berkembang seiring dengan proses dekolonialisasi yang terjadi pasca Perang Dunia II. *Self-determination* dapat diartikan sebagai hak dari semua orang untuk menentukan masa depan secara politik dan secara bebas menentukan sendiri perkembangan politik, sosial dan budaya mereka. Dalam hukum internasional, pengertian dari *self-determination* dapat ditemukan di dalam pasal 1 dari dua konvensi internasional yang menjadi *instrument* bagi pelaksanaan Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Convention on Economic, Social and Cultural Rights). Pasal 1 dari kedua konvensi tersebut menyatakan sebagai berikut

1. *All peoples have the right of **self-determination**. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*
2. *All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.*
3. *The States Parties to the present Covenant, **including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.***¹³⁰

Dengan diakuinya *right of self-determination* sebagai prinsip fundamental kemudian memunculkan adanya hak untuk dekolonialisasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi dasar hukum dari dekolonialisasi dapat ditemukan di dalam Pasal 73 dari Piagam PBB dan resolusi 1514 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB.

Salah satu poin penting yang dinyatakan di dalam Pasal 1 tersebut adanya keharusan bagi negara-negara yang memiliki *non-self governing territory* untuk dapat mengusahakan pelaksanaan dari *rights of self-determination* di wilayah tersebut. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari adanya penguasaan dari suatu negara terhadap *non-self governing territory* yakni mengusahakan wilayah-wilayah tersebut untuk kemudian dapat memiliki pemerintahan yang berdaulat dan mandiri.

¹³⁰ *Article 1 International Convention on Civil and Political Rights* dan *Article 1 International Convention on Economic, Social and Cultural Rights*.

Adanya kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*) dari suatu negara terhadap wilayah tertentu yang terletak di luar negeri menjadi perdebatan di kalangan para sarjana dan praktisi hukum internasional. Hal ini tidak terlepas dari adanya anggapan bahwa kondisi tersebut merupakan bentuk kolonialisasi dengan cara yang lebih modern. Pada hakikatnya, terdapat suatu wilayah yang dikuasai oleh suatu negara yang secara geografis terletak jauh dari wilayah tersebut. Namun demikian, sebagian kalangan yang lain berpendapat bahwa kondisi ini merupakan jalan terbaik yang menguntungkan bagi wilayah-wilayah tersebut sebelum kemudian bisa menjadi suatu negara yang merdeka atau memiliki pemerintahan yang berdaulat dan mandiri.

Wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan negara tertentu tersebut memiliki sebutan yang berbeda pada masing-masingnya. Sebagai contoh, Greenland dan Kepulauan Faroe disebut sebagai *self-governing overseas administration division of Denmark*; British Virgin Island disebut sebagai *unincorporated territory of the United States*; New Caledonia disebut sebagai *overseas territory of France*. Bagaimanapun penyebutannya, wilayah-wilayah tersebut tetap merupakan wilayah yang masih berada di bawah penguasaan dari negara lain.

3.2. Overseas Countries and Territories dari Uni Eropa

3.2.1. Uni Eropa sebagai *sui generis* dalam Organisasi Internasional

Proses integrasi dari Eropa pada dasarnya menimbulkan berbagai kesulitan teoritis yang besar dalam menentukan sifat hukum maupun politis dari entitas yang telah dibentuk. Terdapat berbagai macam pendapat yang dikemukakan mengenai hal tersebut yang pada akhirnya mengerucut pada tiga jawaban yang berbeda. Para pendukung tesis dari hukum internasional berpendapat bahwa Uni Eropa adalah suatu *Confederation of States*, atau semacam organisasi Internasional. Sementara pihak lain yang berlawanan menyatakan bahwa Uni Eropa merupakan suatu Negara Federal atau suatu bentuk lainnya yang

menyerupai suatu negara Federal. Namun demikian, tidak ada satupun dari kedua pendapat ini yang mendapat dukungan mayoritas yang pada akhirnya memunculkan suatu pemahaman baru tentang Uni Eropa sebagai *sui generis*¹³¹, yaitu suatu bentuk baru dan unik baik secara politis maupun hukum.

Meskipun pemahaman Uni Eropa sebagai suatu *sui generis* ini masih dalam perkembangan, yang menyatakan bahwa Uni Eropa adalah suatu bentuk yang baru dan berbeda dari organisasi-organisasi internasional yang sudah ada, hal tersebut belum bisa memberikan penjelasan yang tepat mengenai apa sesungguhnya Uni Eropa tersebut. Namun demikian, pemahaman tentang *sui generis* ini telah menunjukkan adanya suatu langkah yang besar dalam mendefinisikan bangunan Uni Eropa¹³². Konsep ini memandang bahwa keunikan dari proses integrasi menuju Uni Eropa dapat dilihat dalam *constitutional form*¹³³ dari Uni Eropa¹³⁴. Hal inilah kemudian yang memunculkan adanya Teori Uni Eropa (*Theory of European Union*). Teori Uni Eropa berusaha untuk menemukan gambaran dan penjelasan yang jelas tentang fungsi internal dan eksternal dari Uni Eropa. Teori ini menunjukkan bahwa negara-negara yang berdaulat, bahkan dalam kondisinya tidak adanya kesamaan, dapat membangun suatu entitas fungsional dan operasional demi mencapai kepentingan bersama di

¹³¹ J.H.H. Weiler, *The Constitution for Europe*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hal. 7-26.

¹³² Matej Avbelj, *Theory of European Union*, European Law Review 2011, (Sweet & Maxwell and its Contributors, 2012), hal. 2.

¹³³ Matej Avbelj dalam *Theory of European Union*. menyatakan “*Constitutional form is taken here in a neutral sense, responding to a question how a particular legal and political entity is constituted. It does not say anything about the pedigree of this entity, be it constitutional or international, or about the philosophy that it should follow. Whether the constitutional form of a union lends itself to be filled with the language of constitutionalism, international law or pluralism is therefore a special question that lies beyond the scope of the present article*”.

¹³⁴ Avbelj, *Theory ... European Union*, hal.2-3

antara mereka, dan saat bersamaan dapat mempertahankan keberadaan negaranya.¹³⁵

Suatu *Union* lebih merupakan suatu entitas bukan negara (*non-State entity*) yang disusun untuk suatu periode yang tidak terbatas¹³⁶. Ia muncul sebagai akibat adanya perjanjian bebas (*free agreement*) diantara negara-negara peserta¹³⁷. Perjanjian ini memiliki status hukum yang khusus, yang bukan merupakan suatu perjanjian maupun suatu konstitusi tetapi menggabungkan keduanya. Namun demikian, ada kalanya perjanjian tersebut dikenal sebagai *constitutional treaty*¹³⁸. Keberadaannya bermula dari kewenangan pembuatan suatu konstitusi yang dimiliki oleh masing-masing negara peserta. Akan tetapi, apabila perjanjian yang dibuat telah diadopsi, maka ia telah menjadi suatu *constitutional charter* yang kemudian menimbulkan suatu hukum yang bersifat *supranational*. Hukum yang *supranational* ini akan mempengaruhi tata perundang-undangan dari negara-negara anggota¹³⁹ dan *Union* secara keseluruhan.

Dalam hal struktural, *Union* mengakibatkan terjadinya pluralisme entitas politik dan hukum. Pluralisme tersebut berkaitan dengan eksistensi kedaulatan dari negara-negara anggota sebagai suatu negara dan kesetaraan negara-negara tersebut dihadapan *supranational*. Hal ini berarti bahwa negara-negara anggota tidak kehilangan kedaulatannya pada saat bergabung dengan *Union*¹⁴⁰, baik secara politik maupun secara hukum, tetapi tetap memiliki kedaulatan terhadap hal-hal yang belum diserahkan kewenangannya kepada

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ O. Beaud, *Fédéralisme et souveraineté. Notes pour une théorie constitutionnelle de la Fédération*, (1998), hal. 114.

¹³⁸ E. Stein, *Toward Supremacy of Treaty Constitution by Judicial Fiat: on the Margin of the Costa Case*, (Michigan Law Review 63, 1964), hal. 491.

¹³⁹ Schmitt, *Verfassungslehre*, 1993, hal. 368.

¹⁴⁰ N. Walker, "Late Sovereignty in the European Union" in *Sovereignty in Transition*, (Oxford: Hart, 2003), hal. 18.

Union. Hal ini berarti bahwa kedaulatan tetap ada terhadap hal-hal tertentu yang diberikan kedaulatan kepadanya.

Dalam konteks fungsi internal dan eksternal, suatu *Union* mensyaratkan adanya perubahan secara signifikan, baik secara politik dan hukum, pada negara-negara anggotanya¹⁴¹. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan¹⁴² dari *Union* yakni menciptakan perdamaian abadi¹⁴³. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan cara tetap menjaga kedaulatan dari negara-negara anggota sebagai jaminan dalam menghadapi timbulnya penyeragaman¹⁴⁴ sosial dan budaya¹⁴⁵.

Suatu integrasi jelas bukan merupakan suatu *Union*. integrasi adalah suatu proses secara hukum internasional yang melibatkan enam¹⁴⁶ negara. Kedaulatan dari negara-negara pendiri tersebut diakui baik internal maupun eksternal, baik secara hukum maupun secara politik. Masing-masing negara tersebut memiliki sistem hukum masing-masing yang bersumber dari konstitusi masing-masing negara sebagai sumber hukum tertinggi. Aturan hukum nasional mengatur secara menyeluruh mengenai hubungan dari individu-individu maupun

¹⁴¹ Schmitt menyatakan bahwa *as it follows from the classics of the theory of union, a membership in the union usually requires a change in the participating States' constitutions. After all, they must allow a supranational legal and political intervention and oversight over their territories. Simultaneously they must waive a right to self-help against the other Member States and must submit all their conflicts to a peaceful resolution on the basis of the judicial mechanisms provided for in the founding act of a union. The Member States thus lose their internal ius belli, whereas externally they can keep it alongside with a union that must have its own capacity to wage war too. Finally, while each Member State is free to enter a union, they can neither renounce it individually nor at will. The union, on the other hand, has a duty to defend an independent political existence of all the participating States against the external as well as the internal destabilising forces.* Schmitt, *Ibid*, hal 366.

¹⁴² tujuan dari Uni Eropa sebagaimana coba dikemukakan oleh Schmitt yakni *establishing a lasting peace within a viable unionist common whole; securing the autonomous and functional supranational level; and preserving the distinctiveness of the participating States as a means of protecting the freedom of an individual as part of her communitarian self.*

¹⁴³ *Ibid*.

¹⁴⁴ J. Habermas, *The Divided West*, (Cambridge: Polity, 2006), hal. 128.

¹⁴⁵ Adanya penyeragaman ini dikhawatirkan dapat menyulitkan kebebasan beretika dari warga negara yang telah dijamin kemerdekaannya.

¹⁴⁶ Ke-enam negara tersebut adalah Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luxemburg dan Perancis.

kelompok dalam lingkungan sosial politik negara tersebut yang berasal dari suatu proses politik mandiri dari institusi politik dari negara tersebut. Negara-negara pendiri tersebut juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan aturan-aturan di negaranya di dalam batas-batas wilayah negaranya dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan kekuasaannya tersebut dari luar.

Integrasi dari Uni Eropa terjadi di antara negara-negara yang berdaulat dengan cara menyetujui perjanjian-perjanjian menurut hukum internasional yang beberapa diantaranya berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan¹⁴⁷. Untuk dapat menjadi suatu *Union*, proses integrasi secara politik dan hukum harus dijalankan dengan transformasi secara besar-besaran.

Transformasi secara hukum Uni Eropa salah satunya dipicu oleh beberapa putusan terkenal (*landmark decisions*) dari Mahkamah Uni Eropa (selanjutnya disebut sebagai Mahkamah). Setidaknya terdapat dua putusan yakni *Van Gend*¹⁴⁸ dan *Costa*¹⁴⁹ yang menyatakan bahwa Uni Eropa membentuk suatu sistem hukum baru sehingga memiliki sumber hukumnya sendiri yang khusus, dan terlepas baik dari hukum internasional maupun dari hukum-hukum nasional. Mahkamah secara efektif telah memberikan klaim adanya suatu hukum tertinggi yang berdaulat dalam lingkup Uni Eropa. Hal ini berarti bahwa putusan tersebut telah membedakan Uni Eropa dengan organisasi-organisasi

¹⁴⁷ Selanjutnya Matej Avbelj menyatakan bahwa “*The goal of integration had been made clear before in the Schuman Declaration: to make the war between the integrating states not merely unthinkable, but materially impossible. The integration has therefore been put into service of a lasting peace. Its objective coalesced with the paramount objective of a union, and so has the fact that it was established for an unlimited period of time, voluntarily by the independent states, which could exit the process, not unilaterally, but only by following a clearly prescribed procedure. Yet the founding acts of the integration were international law treaties and such was its overall legal and political character too.*”

¹⁴⁸ Putusan Mahkamah Uni Eropa, *Van Gend and Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen* (26/62) [1963] E.C.R. 1; [1963] C.M.L.R. 105.

¹⁴⁹ Putusan Mahkamah Uni Eropa, *Costa v ENEL* (6/64) [1964] E.C.R. 585; [1964] C.M.L.R., hal.425.

internasional lainnya yang tidak memiliki klaim tersebut dan lebih kepada suatu bentuk konstitusi yang statis¹⁵⁰.

Demi mencapai transformasi tersebut, Mahkamah juga melakukan perubahan terhadap sifat dari aturan-aturan pendirian Uni Eropa. Mahkamah berpendapat bahwa traktat-traktat tidak hanya memberikan kewajiban diantara negara-negara peserta, tetapi juga terkait langsung dengan rakyat sebagai pemegang hak dan kewajiban di dalam hukum Uni Eropa. Traktat-traktat tersebut kemudian disebutkan sebagai sebuah Piagam Konstitusional¹⁵¹ dari Uni Eropa, sebuah Traktat Konstitusi¹⁵². Sifat hukum internasional dari traktat tersebut telah di-konstitusional-kan¹⁵³.

3.2.2 Pelaksanaan Hukum Uni Eropa

3.2.2.1. Bentuk-Bentuk Hukum Uni Eropa

Di dalam sistem hukum komunitas Uni Eropa, terdapat *Treaties* (perjanjian-perjanjian) yang berperan sebagai perencana pembangunan Eropa serta fondasi dari organisasi Uni Eropa itu sendiri. *Treaties* ini menciptakan apa yang dikenal dengan *acquis communautaire*.¹⁵⁴ Ada 2 perjanjian yang terpenting dalam *acquis communautaire* yaitu *Treaty of the European Union* (TEU) atau dikenal juga dengan *Maastricht Treaty*, dan *Treaty establishing the European Community* (TEC) atau dikenal juga dengan *Treaty of Rome*. Pada tanggal 2 Oktober 1997, kedua *treaty* tersebut diamandemen melalui *Treaty of*

¹⁵⁰ J.H.H. Weiler, *The Transformation of Europe*, Yale Law Journal 2407 (1991), hal.100.

¹⁵¹ Putusan Mahkamah Uni Eropa, *Les Verts v European Parliament* (294/83) [1986] E.C.R. 1339; [1987] 2 C.M.L.R., hal. 343.

¹⁵² E. Stein, *Lawyers, Judges and the Making of Transnational Constitution*, American Journal of International Law 1 (1981) hal. 75.

¹⁵³ K. Lenaerts, *Constitutionalism and the Many Faces of Federalism*, 38 *American Journal of Comparative Law* (1990) 210.

¹⁵⁴ *Common foundation of rights and obligations which binds together the Member States of the European Union*.
<http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=request&uri=http://eurovoc.europa.eu/210682>, diakses pada 12 Maret 2012 pukul 13.52 WIB.

*Amsterdam*¹⁵⁵ yang mulai berlaku pada 1 Mei 1999. Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 2001, ditandatangani *Treaty of Nice*,¹⁵⁶ yang pada pokoknya melakukan amandemen terhadap *Treaty of Amsterdam* dan memuat ketentuan baru yang belum berhasil disepakati pada saat perumusan *Treaty of Amsterdam*.

Pondasi bangunan Uni Eropa semakin kokoh sejak disepakatinya *Treaty of Lisbon* pada tanggal 13 Desember 2007 dan berlaku sejak 1 Desember 2009.¹⁵⁷ Traktat ini merupakan amandemen atas dua traktat yang telah disepakati sebelumnya sebagaimana yang diubah oleh *Treaty of Nice*. *Treaty* ini digambarkan sebagai “to complete the process started by the *Treaty of Amsterdam* [1997] and by the *Treaty of Nice* [2001] with a view to enhancing the efficiency and democratic legitimacy of the Union and to improving the coherence of its action.”¹⁵⁸ *Treaty of Lisbon* juga melakukan perubahan nama terhadap *Treaty of Rome* yang sebelumnya bernama *Treaty establishing the European Community* menjadi *Treaty on the Functioning of European Union*.¹⁵⁹

Perjanjian-perjanjian tersebut sejak perjanjian terdahulu sampai perjanjian terkini (*Treaty of Lisbon* 2009) menghimpun berbagai peraturan dan asas yang selain mengatur mengenai pembentukan sebuah *economical regionalism* turut membentuk sebuah struktur

¹⁵⁵ Nama resmi dari traktat ini adalah *the Treaty of Amsterdam amending the Treaty of the European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts*

¹⁵⁶ Nama resmi dari traktat ini adalah *Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts*. Berlaku pada 1 Februari 2003.

¹⁵⁷ Article 6(2) *Treaty Lisbon* *This Treaty shall enter into force on 1 January 2009, provided that all the instruments of ratification have been deposited, or, failing that, on the first day of the month following the deposit of the instrument of ratification by the last signatory State to take this step*. Negara terakhir yang mendaftarkan instrument ratifikasinya adalah Republik Ceko pada tanggal 13 November 2009.

¹⁵⁸ *Preamble Treaty of Lisbon*.

¹⁵⁹ Article 2 *Treaty of Lisbon* menyatakan *The Treaty establishing the European Community shall be amended in accordance with the provisions of this Article*,

- 1) *The title of the Treaty shall be replaced by ‘Treaty on the Functioning of the European Union’*
- 2)

institusional dan sistem hukum *sui generis*.¹⁶⁰ Institusi-institusi tersebut bertugas untuk menegakkan dan melaksanakan substansi dari perjanjian-perjanjian Uni Eropa yang membentuk suatu sistem hukum (sistem hukum regional Uni Eropa). Institusi-institusi dari Uni Eropa ini berbeda dari institusi dari organisasi internasional lainnya karena Uni Eropa memiliki wewenang penuh untuk mengatur pelaksanaan dari perjanjian Uni Eropa terlepas dari kehendak dari negara-negara anggota. Dengan kata lain bahwa organ-organ Uni Eropa melaksanakan kewenangan dalam kerangka pikir dan kerja komunitas Uni Eropa sebagai satu komunitas dan bukan sebagai suatu forum antar negara. Hal ini sebagaimana filosofi dasar dari keberlakuan institusional Uni Eropa yakni, organ-organ Uni Eropa telah menerima limpahan kedaulatan dari negara-negara anggota yang berdasarkan berbagai perjanjian (*treaties*) Uni Eropa melepaskan sebagian kedaulatan mereka dalam regulasi beberapa bidang.¹⁶¹

Uni Eropa memiliki berbagai macam organ namun hanya terdapat lima organ utama yang mendapatkan terminologi *institutions* dalam traktat Uni Eropa. Kelima organ tersebut adalah *The Council of the European Union*, *European Parliament*, *European Commission*, *European Court of Justice* dan *European Court of Auditors*.¹⁶² Tiga institusi yang pertama menjalankan fungsi *legislative* dalam hal pembuat peraturan perundang-undangan (*law making process*).

Dalam menjalankan wewenangnya masing-masing, institusi-institusi tersebut memiliki 5 bentuk produk hukum yang dihasilkan. Masing-masing produk hukum memiliki efek yang berbeda terhadap sistem hukum negara-negara anggota. Beberapa dari produk hukum tersebut dapat berlaku secara langsung sebagai undang-undang terhadap

¹⁶⁰ Dalam bahasa Inggris disebut juga "*of its own kind*" yang berarti suatu istilah yang digunakan dalam terminology hukum untuk menggambarkan suatu rejim hukum lain (Black's Law Dictionary, 8th edition), hal. 1475

¹⁶¹ Klaus-Dieter Borchardt, *L'ABC du Droit Communautaire*, (Luxembourg: Commission Europeene, 2000), hal. 80.

¹⁶² Lihat *PART SIX chapter I* dari *Treaty on the Functioning of European Union. Mengenai Institutions*.

ketentuan-ketentuan komunitas Uni Eropa. Bentuk-bentuk produk hukum tersebut adalah *Regulations*, *Directives*, *Decisions*, *Recommendations* dan *Opinions*.¹⁶³

i. Regulations

Regulations memiliki cakupan yang umum, semua elemennya mengikat negara anggota dan berlaku secara langsung terhadap setiap negara anggota setelah ditetapkan. Sebagaimana hukum nasional, *Regulations* member hak dan kewajiban yang berlaku secara langsung terhadap penduduk Uni Eropa. *Regulations* mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, atau jika tidak ditentukan, maka *Regulations* mulai berlaku pada hari ke-20 setelah dipublikasikan dalam *Official Journal of European Union*¹⁶⁴ (Selanjutnya disebut Jurnal Resmi Uni Eropa). *Regulations* pada tingkat Uni eropa menggantikan hukum nasional negara-negara anggota dan merupakan *instrument* hukum yang paling efektif yang disediakan oleh *Treaty*¹⁶⁵.

ii. Directives

Directive mengikat negara-negara anggota yang disebutkan dalam *Directive* (selanjutnya disebut *addressee*). *Directive* berbicara mengenai suatu tujuan yang hendak dicapai dengan meninggalkan yurisdiksi dari kewenangan nasional. Sementara bentuk dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah berupa suatu kerangka hukum komunitas yang menempatkan dirinya secara harmonis diantara hukum-hukum yang lainnya.

¹⁶³ Dalam Article 288 dari Treaty on the Functioning of the European Union (*TFEU*) dinyatakan bahwa “*To exercise the Union’s competences, the institutions shall adopt regulations, directives, decisions, recommendations and opinions*”.

¹⁶⁴ Lihat Article 254 Treaty on the Functioning of European Union

¹⁶⁵ Nicholas Noussis, *Access to European Union – Institutions and Policies*, (Brussels: EDIR-EUR, 1995), hal. 40.

Karakter khas dari sumber hukum ini adalah jenis kewajiban yang dibebankan kepada *Addressee*-nya¹⁶⁶. *Directives* membebaskan kewajiban hasil (*obligation of result*) bukan kewajiban menyesuaikan ketentuan (*obligation of conduct*). Namun demikian, apabila dilihat dari daya lakunya, negara-negara tetap berkewajiban penuh untuk menerapkan isi dari *directives* dengan kebebasan dalam menentukan sendiri cara yang ditempuh demi tercapainya tujuan yang ditentukan dalam *Directives* tersebut. Substansi dari *Directives* itu sendiri adalah menentukan serangkaian tujuan yang hendak dicapai. Negara-negara memiliki kebebasan penuh dalam memilih tata cara untuk meng-implementasi-kan *directives* baik melalui diundangkannya suatu peraturan (*enacting of law*) atau memodifikasi suatu peraturan yang sudah ada agar sesuai dengan ketentuan dari *Directives*.

Walaupun secara umum *Directives* dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa, *Directives* berlaku dengan sendirinya ketika sudah diumumkan ke *addressee* di dalam *Directives* tersebut. *Addressee* yang bersangkutan kemudian wajib untuk mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Hal ini penting untuk implementasi *Directives* dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika tidak dilakukan berarti negara yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap *Directive* tersebut¹⁶⁷.

iii. Decision

Decision mengikat terhadap negara-negara anggota yang disebutkan dalam *Decision* tersebut (para *Addressee*). *Decision* mengindikasikan 'siapa'; 'siapa' bisa satu, beberapa atau bahkan bisa seluruh negara anggota Uni Eropa atau satu atau lebih subjek hukum orang (*naturlijk persoon*) atau badan hukum (*legal persoon*). Berbagai macam subjek hukum ini, dipasangkan dengan

¹⁶⁶ Josephine Shaw, *European Community Law*, (Macmillan: Hampshire), hal. 112.

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 41.

beragam topik yang menjadi lingkup bahasan dari isi *Decisions*, yang bisa berupa *quasi legislation* atau *quasi directive* sampai ke *administrative decision*. Decision berlaku terhadap Addressee, melalui komunikasi antar anggota daripada publikasi yang dilakukan di Jurnal Resmi Uni Eropa.¹⁶⁸

iv. *Recommendation dan Opinions*

Disamping produk hukum yang telah dijelaskan di atas, produk berikutnya adalah *Recommendation* dan *Opinions*. Akan tetapi, *Recommendation* dan *Opinions* tidak mengikat¹⁶⁹ karena tidak ada kewajiban hukum yang diimban oleh Addressee dalam *Recommendation* maupun *Opinions* (baik negara anggotanya maupun penduduknya). Kedua hukum ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam menentukan orientasi dan prosedur tindakan dan legislasi dari Uni Eropa. *Opinions* mengandung pendapat dari Komisi kepada perusahaan-perusahaan atau negara-negara sedangkan *Recommendations* berisikan undangan dari komisi dan dewan untuk mengadopsi beberapa bentuk *directives* yang tidak wajib namun berguna dalam melakukan harmonisasi dan pendekatan antar sistem hukum nasional masing-masing negara anggota. Meskipun tidak memiliki daya laku mengikat, namun hakim nasional negara-negara anggota tetap diwajibkan untuk memperhatikan penafsiran terhadap *Recommendations* dan *Opinions* dalam penerapannya, atau dalam menafsirkan hukum lain yang bersifat memaksa apabila *Recommendations* dan *Opinions* bersifat melengkapi.

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 41.

¹⁶⁹ Article 288 TFEU paragraph 5 stated “*Recommendations and opinions shall have no binding force.*”

3.2.2.2. *Law-Making Institution* dari Uni Eropa

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 5 organ dari Uni Eropa yang memiliki terminologi *institutions*. Dari kelima organ tersebut, hanya terdapat tiga institusi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan (*law-making process*). Adapun ketiga institusi tersebut adalah sebagai berikut.

i. **European Parliament**¹⁷⁰

Dalam *Treaty of Lisbon* bagian pertama (*Treaty of the European Union*) ditentukan bahwa Parlemen Eropa dipilih dari warga negara anggota Uni Eropa. Kursi minimal dari setiap negara anggota adalah sebanyak 6 kursi dan maksimal sebanyak 96 kursi. Selain itu, juga ditentukan bahwa jumlah maksimal dari anggota Parlemen adalah sebanyak 750 kursi ditambah satu orang Presiden yang dipilih dari anggotanya. Anggota dari Parlemen dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun dan dalam pemilihannya harus dengan prinsip *Degressively Proportional*.

European Parliament bersama-sama dengan *The Council* menjalankan fungsi-fungsi legislasi dan anggaran. Disamping itu, Parlemen menjalankan fungsi kontrol politik dan konsultasi sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian. Parlemen juga berwenang untuk memilih Presiden dari Komis Uni Eropa.¹⁷¹

ii. **The Council**¹⁷²

The Council atau Dewan Uni Eropa memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah inisiatif terlepas dari kemauan dan kepentingan negara-negara anggota. Dewan bersama-sama dengan Parlemen membuat peraturan dan mengambil inisiatif atas dan untuk

¹⁷⁰ *Article 14 Treaty of European Union* (bagian pertama dari *Treaty of Lisbon*).

¹⁷¹ *Article 14 paragraph 1 Treaty of European Union*.

¹⁷² *Article 16 Treaty of European Union* (bagian pertama dari *Treaty of Lisbon*).

kepentingan dari Uni Eropa itu sendiri¹⁷³. Dewan merupakan institusi Uni Eropa yang menghimpun perwakilan dari negara-negara anggota setingkat Menteri yang memiliki wewenang untuk mewakili negaranya. Menteri yang dimaksud biasanya diwakili oleh Menteri Luar Negeri, namun kadang dihadiri pula oleh menteri-menteri dari bidang khusus. Konfigurasi dari pertemuan *The Council* dari *General Affairs Council* dan *Foreign Affair Council* serta konfigurasi lain sebagaimana yang diatur dalam article 236 TFEU¹⁷⁴. Kepemimpinan Dewan Uni Eropa dilakukan oleh seorang Presiden Dewan yang kedudukannya digilir diantara setiap negara anggota per enam bulan dengan urutan yang ditentukan Dewan dengan suatu keputusan mutlak (*unanimity*).

Dalam mengambil keputusan, Dewan memiliki tiga metode yakni :

- (1) *Simple Majority* (Mayoritas Biasa)
- (2) *Qualified Majority* (Mayoritas Bersyarat)
- (3) *Unanimity* (Suara Bulat)

Pengambilan keputusan berdasarkan *simple majority* dalam mekanisme pengambilan keputusan dewan hanya diperuntukkan dalam keadaan tertentu¹⁷⁵. Metode *qualified majority* adalah metode utama dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan metode ini, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan bobot yang diberikan kepada masing-masing negara. Bobot tersebut ditentukan berdasarkan kriteria umum demografis, kekuatan politik dan ekonomi. Batas kesepakatan ditentukan sebesar 2/3 dari *qualified majority*. Seiring dengan perkembangan Uni Eropa yakni bertambahnya jumlah anggota hingga mencapai sebanyak 27 negara, metode tersebut tidak dapat lagi dipertahankan karena negara-negara

¹⁷³ Philip Thody, *An historical Introduction to the European Union*, (London: Routledge, 1997), hal. 27.

¹⁷⁴ Article 16 paragraph 6 Treaty of European Union.

¹⁷⁵ Article 241 Treaty on The Functioning of European Union.

besar seperti Perancis dan Jerman akan kehilangan kekuatan dalam mengambil keputusan. Untuk itu negara-negara besar pelopor meminta adanya perubahan opsi penambahan bobot suara mereka atau dimasukkannya kriteria yang dikenal dengan *double majority* yang kemudian dimasukkan dalam *Treaty of Lisbon*.

Metode¹⁷⁶ ini menentukan kriteria kesepakatan yang terdiri dari 55% dari negara-negara anggota (yakni 15 dari 27 negara anggota) dan 65% dari total penduduk Uni Eropa. Dalam metode ini juga diakui konsep *blocking minority* yang memungkinkan negara-negara minoritas untuk mengajukan revisi atau penolakan atas keputusan dengan penerapan *qualified majority (double majority)* dengan batas minimal sebanyak 4 (empat) negara¹⁷⁷.

iii. The Commission

Komisi Uni Eropa merupakan organ eksekutif dari Uni Eropa terdiri dari 27 orang komisioner yang berasal dari tiap-tiap negara. Meskipun setiap komisioner dipilih satu orang dari tiap negara, mereka tidak merepresentasikan negara mereka di dalam komisi tersebut. Tiap-tiap komisioner diserahkan tugas terkait kebijakan-kebijakan tertentu yang ditentukan oleh Presiden dari Komisi. Pemilihan Komisioner, termasuk Presiden dari komisi, harus dengan persetujuan dari Parlemen Eropa. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Komisi bertanggung jawab kepada Parlemen sebagai satu-satunya yang memiliki hak untuk membubarkan Komisi. Para anggota komisi dipilih dari warga negara dari negara-negara anggota berdasarkan sistem rotasi yang sangat ketat antar sesama negara

¹⁷⁷ Article 16 paragraph 4 Treaty of the European Union menyatakan :
 “As from 1 November 2014, a qualified majority shall be defined as **at least 55 % of the members of the Council, comprising at least fifteen of them and representing Member States comprising at least 65 % of the population of the Union.**
A blocking minority must include at least four Council members, failing which the qualified majority shall be deemed attained”.

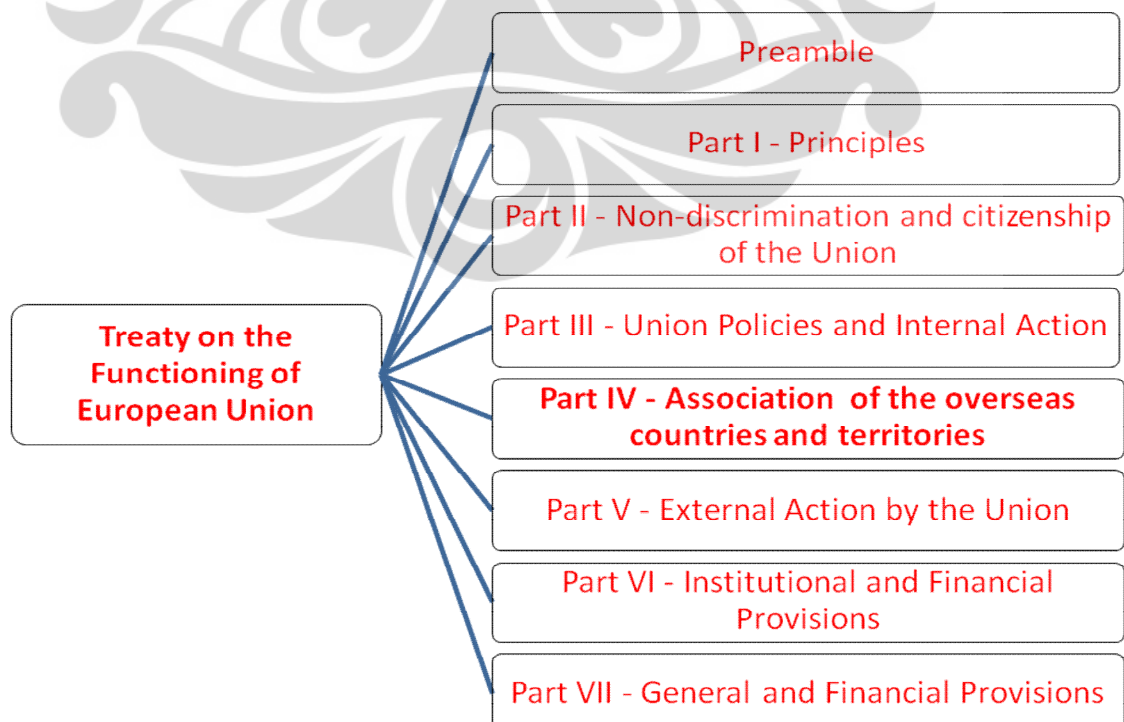
anggota, yang mencerminkan rentang demografis dan geografis dari negara-negara anggota.

3.2.3. Wilayah –wilayah yang diakui sebagai sebagai *Overseas Countries and Territories* menurut Uni Eropa

Pengaturan mengenai wilayah-wilayah di luar negeri yang berada di bawah kekuasaan negara anggota Uni Eropa dapat ditemukan di dalam *Treaty of Lisbon* sebagai konstitusi dari Uni Eropa. Hal ini karena Uni Eropa mengakui keberadaan dari wilayah-wilayah tersebut dan penguasaannya oleh negara anggotanya. Bahkan Uni Eropa pun menyepakati untuk menjalin hubungan dengan wilayah-wilayah tersebut dan menjadikannya wilayah yang tidak terpisahkan dari Uni Eropa secara keseluruhan.

Dalam *Treaty of Lisbon*, wilayah-wilayah tersebut disebut sebagai *Overseas Countries and Territories* (OCTs). Begitu pentingnya hubungan antara Uni Eropa dengan OCTs terlihat dari struktur *Treaty of Lisbon*, dengan menempatkan satu bab dalam *Treaty on the Functioning of European Union* (TFEU) tentang *Association of the Overseas Countries and Territories*.

TABEL 3.1



Dalam bab tersebut dapat ditemukan ketentuan mengenai persoalan antara Uni Eropa dengan *overseas territory* dari negara-negara anggotanya. Dalam bab tersebut diatur bahwa negara-negara anggota Uni Eropa menyepakati adanya asosiasi antara Uni Eropa dengan wilayah-wilayah yang memiliki hubungan khusus dengan negara anggota Uni Eropa.

Pengaturan mengenai rezim asosiasi antara Uni Eropa dengan OCTs saat ini diatur dengan *Council Decision* 2001/822/EC. *Council Decision* ini merupakan *implementing regulation* dari pasal 182 *Treaty establishing the European Community* yang saat ini menjadi bunyi pasal 198 *Treaty on the Functioning of European Union* (TFEU) dalam Traktat Lisbon. *Council Decision* tersebut mengatur secara teknis bagaimana pelaksanaan hubungan antara Uni Eropa dengan masing-masing wilayah *Overseas Countries and Territories* (OCTs) tersebut.

Negara-negara yang dimaksud memiliki hubungan khusus dengan wilayah-wilayah tersebut adalah Belanda, Denmark, Perancis dan Inggris. Sementara wilayah-wilayah yang memiliki hubungan dengan negara tersebut dan kemudian membentuk asosiasi dengan Uni Eropa ditentukan di dalam Annex II dari TFEU yakni *Greenland (Denmark)*; *New Caledonia and Dependencies, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Wallis and Futuna Islands, Mayotte, Saint Pierre and Miquelon (Perancis)*; *Aruba, Netherlands Antilles: Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, (Belanda)*; *Anguilla, Cayman Islands, Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena and Dependencies, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, Turks and Caicos Islands, British Virgin Islands, Bermuda (Inggris)*.

BAB IV

Analisis terhadap *Overseas Countries and Territories (OCTs)* Perancis dan Belanda

4.1 Pengaturan *Overseas Countries and Territories* di dalam Bagian IV Traktat Lisbon

Persoalan wilayah (*territory*) selalu menjadi bagian dari pembahasan ketika berbicara mengenai Uni Eropa. Hal yang jelas adalah ketentuan hukum Uni Eropa berlaku di wilayah dengan luas 4.324.782 km². Sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 52(1) Traktat Uni Eropa, hukum Uni Eropa berlaku di seluruh wilayah negara anggota.¹⁷⁸

Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union And the Treaty Establishing the European Community (selanjutnya disebut sebagai Traktat Lisbon) disepakati pada 13 Desember 2007 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Traktat ini melakukan perubahan terhadap 2 traktat yang sebelumnya sudah ada yaitu Traktat Uni Eropa (*Treaty of European Union*) dan Traktat Komunitas Eropa (*Treaty Establishing the European Community*). Traktat Komunitas Eropa kemudian diganti nama menjadi *Treaty on the Functioning of European Union* (TFEU). Traktat Lisbon ini oleh disebut sebagai *constitutional treaty* dari Uni Eropa karena traktat ini

¹⁷⁸ Pasal 52(1) menyatakan:

“The Treaties shall apply to the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.”

menyempurnakan traktat-traktat¹⁷⁹ yang sebelumnya telah ada dan menjadi dasar bagi keberlangsungan Uni Eropa.

Pengaturan mengenai *Overseas Countries and Territories* (OCTs) ini di dalam Traktat Lisbon terdapat di dalam TFEU. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, TFEU mengatur persoalan OCTs di dalam satu bab tersendiri yakni bab IV mengenai '*Association of the Overseas Countries and Territories*'.

Bab IV dari TFEU ini kemudian menjadi ketentuan yang paling mendasar dalam melihat hubungan antara Uni Eropa dengan wilayah-wilayah OCTs. Dalam *pasal* 198 TFEU (sebelumnya merupakan *pasal* 182 Traktat Uni Eropa) dinyatakan bahwa

“The Member States agree to associate with the Union the non-European countries and territories which have special relations with Denmark, France, the Netherlands and the United Kingdom. These countries and territories (hereinafter called the ‘countries and territories’) are listed in Annex II.”

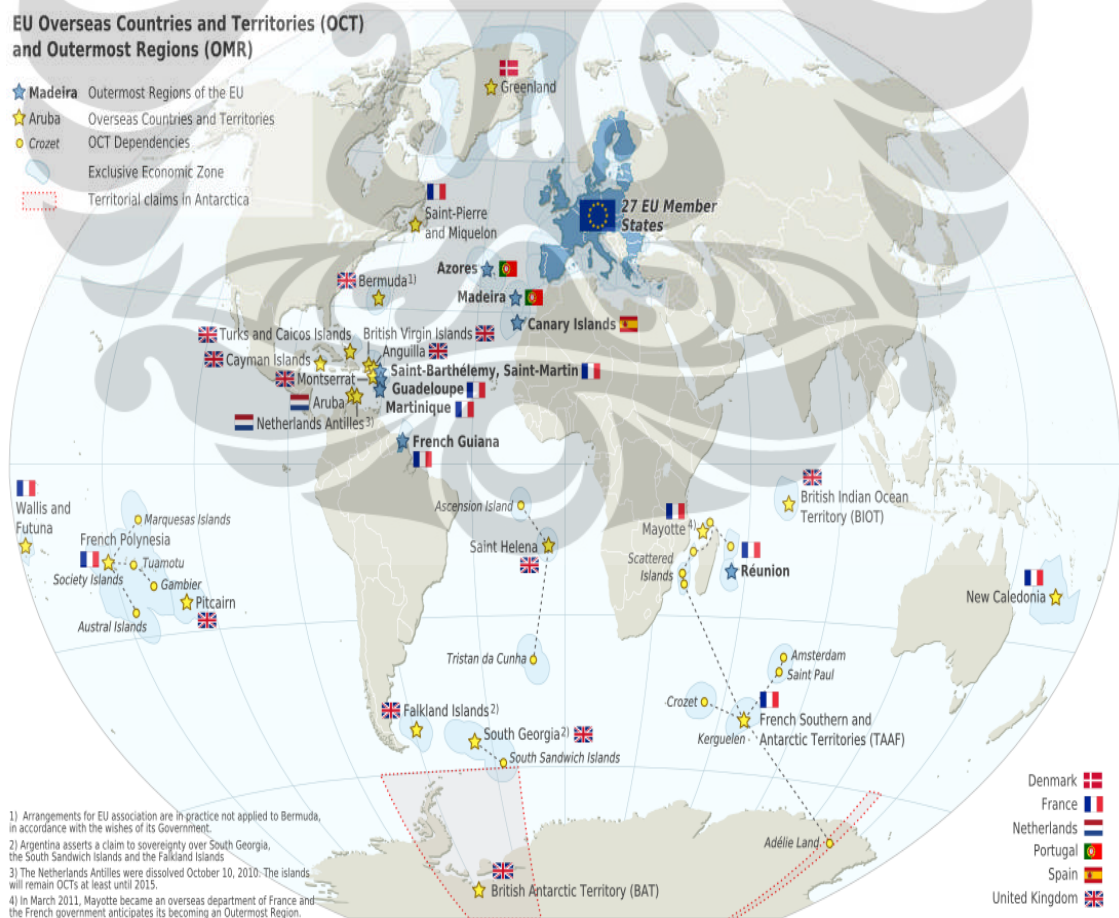
Dalam pasal tersebut di atas dinyatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa sepakat untuk menjalin hubungan dengan wilayah-wilayah yang bukan berada di Uni Eropa namun memiliki hubungan yang khusus dengan negara Belanda, Denmark, Inggris dan Perancis. Negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang diakui secara internasional mengelola wilayah yang disebut sebagai *Trust Territories* dan *Non-Self Governing Territories*¹⁸⁰ oleh Piagam PBB dan diawasi oleh Komite Khusus Dekolonialisasi (*Special Committee on Decolonization*). Pada bab sebelumnya telah dinyatakan negara-negara yang mengelola wilayah *Non-Self Governing Territories* yang di dalamnya termasuk negara Belanda, Denmark, Inggris dan Perancis.

¹⁷⁹ Dalam konsiderans dari Traktat Lisbon dinyatakan bahwa “*..desiring to complete the process started by the Treaty of Amsterdam [1997] and by the Treaty of Nice [2001] with a view to enhancing the efficiency and democratic legitimacy of the Union and to improving the coherence of its action.*”

¹⁸⁰ Lihat Bab XI dari Piagam PBB.

Pasal 198 juga menyatakan bahwa OCTs yang diakui oleh negara anggota untuk memiliki hubungan dengan Uni Eropa dinyatakan di dalam *Annex II* dari TFEU. Hal ini berarti bahwa ‘*overseas countries and territories*’ itu hanya terbatas kepada wilayah-wilayah yang disebutkan di dalam *annex II* tersebut. OCTs tersebut adalah Greenland (**Denmark**); *New Caledonia and Dependencies, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Wallis and Futuna Islands, Mayotte, Saint Pierre and Miquelon* (**Perancis**); *Aruba, Netherlands Antilles: Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten*, (**Belanda**); *Anguilla, Cayman Islands, Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena and Dependencies, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, Turks and Caicos Islands, British Virgin Islands, Bermuda* (**Inggris**).

GAMBAR 4.1
Wilayah OCTs dalam Peta Dunia



Paragraf berikutnya dari *pasal* 198 menyatakan bahwa,

“The purpose of association shall be to promote the economic and social development of the countries and territories and to establish close economic relations between them and the Union as a whole”

“In accordance with the principles set out in the preamble to this Treaty, association shall serve primarily to further the interests and prosperity of the inhabitants of these countries and territories in order to lead them to the economic, social and cultural development to which they aspire¹⁸¹”

Ketentuan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari adanya hubungan antara Uni Eropa dengan OCTs tersebut adalah untuk memajukan perekonomian dan perkembangan sosial dari wilayah-wilayah tersebut serta mengupayakan hubungan ekonomi yang kuat antara wilayah tersebut dengan negara-negara anggota Uni Eropa secara keseluruhan. Disamping itu, adanya hubungan antara Uni Eropa dengan wilayah-wilayah tersebut bertujuan untuk mengusahakan kepentingan dan kebutuhan kesejahteraan dari OCTs demi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan keinginan dari masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan semangat dekolonisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh *Declaration Regarding Non-Self Governing Territories*¹⁸² dalam Piagam PBB.

Pengaturan mengenai rezim asosiasi dengan OCTs saat ini diatur dengan *Council Decision* 2001/822/EC serta *Commission Regulation* 1424/2007.

Bagian IV dari TFEU memberikan sejumlah prinsip penting bagi Uni Eropa dalam menjalin hubungan dengan wilayah OCTs. Hubungan yang tidak simetris (*asymmetric relationship*) antara Uni Eropa dengan OCTs yang

¹⁸¹ Pasal 198 paragraf 2 and 3 TFEU.

¹⁸² Salahsatu poin penting yang ditekankan di dalam Pasal 73 Piagam PBB adalah
“Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end:

- a. *to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses;*
- b.

menjadi elemen kunci dalam pengaturan Bagian IV TFEU. Hubungan antara Uni Eropa dengan OCTs sangat tidak sejajar sehingga preferensi selalu diberikan kepada OCTs. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah contoh mulai dari *free movement of person* dan *free movement of goods*.

Dalam hal hubungan perdagangan, negara anggota Uni Eropa harus menerapkan perlakuan yang sama dengan OCTs sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada negara-negara anggota lainnya.¹⁸³ Sementara wilayah OCTs dalam melakukan hubungan perdagangan dengan seluruh negara-negara anggota Uni Eropa dapat menerapkan perlakuan yang sama sebagaimana perlakuan terhadap negara yang menguasai wilayah OCTs tersebut.¹⁸⁴ Sebagai akibatnya, barang-barang yang berasal dari OCTs tidak dikenakan bea masuk ke dalam negara-negara anggota Uni Eropa sebagaimana tidak dikenakannya bea masuk antara negara-negara Uni Eropa.¹⁸⁵ Begitu juga dengan barang-barang yang berasal dari Uni Eropa maupun dari OCTs lainnya tidak dikenakan bea masuk ke suatu wilayah OCTs.¹⁸⁶

Aturan mengenai *Overseas Countries and Territories* di dalam Traktat Lisbon menunjukkan bahwa adanya pengakuan mengenai wilayah suatu negara di luar negeri. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah yang berada di bawah penguasaan dari suatu negara. Penguasaan terhadap wilayah yang berada di luar negeri mengakibatkan suatu negara memiliki kedaulatan atas wilayah-wilayah tersebut. Adanya kedaulatan tersebut mengakibatkan bahwa wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah dari suatu negara yang menguasainya menurut hukum internasional.

¹⁸³ Pasal 199(1) TFEU menyatakan “*Member States shall apply to their trade with the countries and territories the same treatment as they accord each other pursuant to the Treaties*”.

¹⁸⁴ Pasal 199(2) TFEU menyatakan “*Each country or territory shall apply to its trade with Member States and with the other countries and territories the same treatment as that which it applies to the European State with which it has special relations.*”

¹⁸⁵ Pasal 200(1) TFEU menyatakan “*Customs duties on imports into the Member States of goods originating in the countries and territories shall be prohibited in conformity with the prohibition of customs duties between Member States in accordance with the provisions of the Treaties.*”

¹⁸⁶ Pasal 200(2) TFEU menyatakan “*Customs duties on imports into each country or territory from Member States or from the other countries or territories shall be prohibited in accordance with the provisions of Pasal 30*”.

Negara Perancis dan Belanda merupakan contoh dari negara yang menguasai wilayah di luar negeri. Karena Perancis dan Belanda merupakan anggota dari Uni Eropa, maka Uni Eropa pun kemudian menjalin hubungan dengan wilayah-wilayah tersebut sebagaimana yang diatur di dalam pasal 198 TFEU. Untuk melihat bagaimana status OCTs yang diakui oleh Uni Eropa tersebut, maka perlu dilihat hubungan antara Perancis dan Belanda dengan masing-masing OCTs yang dikuasai.

4.2 Analisis Wilayah OCTs dari Perancis

Untuk melihat bagaimana status dari wilayah *Overseas Countries and Territories* (OCTs) Uni Eropa yang merupakan bagian dari Perancis, maka perlu dilakukan pembahasan terhadap masing-masing wilayah tersebut sebagai berikut.

4.2.1. *New Caledonia and Dependencies (Nouvelle-Calédonie)*

New Caledonia (nama resmi *Territoire des Nouvelle-Calédonie et Dépendances*) merupakan suatu daerah kolektifitas Perancis di Barat Daya Samudera Pasifik¹⁸⁷, sekitar 1.500 km timur Australia. Wilayah ini mencakup pulau *New Caledonia (the Grande Terre* atau *Mainland*) yang merupakan tempat di mana ibukota *Nouméa* berada, *Loyalty Islands*, *Bélep Islands* dan *the Île des Pins*. Wilayah-wilayah tersebut membentuk lebih dari 99% dari total wilayah dari *New Caledonia*. Pulau utama *New Caledonia* memiliki penduduk¹⁸⁸ dengan jumlah terbesar (90% dari total populasi). Luas wilayah dari *New Caledonia* adalah sebesar 18.576 km².

¹⁸⁷ New Caledonia berada pada 18° - 23° Lintang Selatan dan 163° - 169° Bujur Timur.

¹⁸⁸ Pada Tahun 2009, total penduduk New Caledonia adalah sebanyak 245.580 jiwa. Sumber *institute de la statistique et des etudes économiques Nouvelle Calédonie*. <http://www.isee.nc/population/telecharxls/pop-com-56-09.xls> diunduh Minggu 20 Mei 2012

Gambar 4.2
Letak New Caledonia¹⁸⁹



Gambar 4.3
Peta New Caledonia¹⁹⁰



New Caledonia termasuk di dalam wilayah yang diakui oleh Uni Eropa sebagai OCTs. *New Caledonia* juga merupakan wilayah yang diakui oleh PBB sebagai *non-self governing territories*. Wilayah ini

¹⁸⁹ Gambar diunduh dari <http://www.sunspotsintl.com/images/pacificmap.gif> pada hari Minggu 20 Mei 2012 pukul. 11.56 WIB.

¹⁹⁰ Gambar diunduh dari <http://media-1.web.britannica.com/eb-media/93/3293-004-8AA31F9B.gif> pada hari Minggu 20 Mei 2012 pukul. 11.57 WIB.

menjadi bagian *integral* dari Perancis yang merupakan negara anggota Uni Eropa.

New Caledonia dianeksasi oleh Perancis pada tahun 1853¹⁹¹. Pada tahun 1946, *New Caledonia* menjadi *overseas territory* dari Perancis. Antara tahun 1885 hingga 1956, masyarakat memilih Majelis Umum yang dan memberikan saran kepada Gubernur mengenai urusan-urusan di dalam wilayah serta menyepakati anggaran lokal. Pada tahun 1953, seluruh penduduk *New Caledonia* memperoleh kewarganegaraan Perancis. Di tahun 1957, suatu langkah besar menuju pemerintahan sendiri (*self-governing*) terjadi ketika Majelis Territorial dibentuk di bawah pimpinan seorang *High Commissioner* dengan tugas memilih eksekutif di wilayah di *New Caledonia*.

Presiden dari Perancis merupakan kepala negara (*Head of State*) dari *New Caledonia* yang berarti bahwa *New Caledonia* merupakan bagian dari negara Perancis. Kepala negara Perancis menunjuk seorang *High Commissioner* yang bertugas untuk mewakili tugas dan tanggung jawabnya di wilayah *New Caledonia*.

4.2.1.1. Status wilayah *New Caledonia* sebagai OCTs Uni Eropa dari Perancis

Perdebatan mengenai status hukum dari *New Caledonia* telah muncul sejak berakhirnya Perang Dunia II. Masyarakat di wilayah *New Caledonia* sendiri terbagi menjadi dua yakni mereka yang mendukung untuk tetap menjadi bagian dari Perancis yang tergabung di dalam *Rassemblement pour la Calédonie dans la République* (RPCR) serta mereka yang menolak untuk menjadi bagian dari Perancis dan menghendaki pemerintahan yang mandiri yang tergabung dalam *Front de Libération Nationale Kanake et Socialiste* (FLNKS). Puncaknya terjadi pada tahun 1988 ditandatangani

¹⁹¹ Pada tanggal 24 September 1853, Napoleon III memerintahkan Laksamana Febvrier Despointe untuk mengambil kekuasaan secara formil di wilayah *New Caledonia*. *New Caledonia* kemudian dijadikan sebagai tempat pembuangan para tahanan politik dan penjahat lainnya di Perancis.

Matignon Agreement antara Pemerintah Perancis, RPCR dan FLNKS. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa sepuluh tahun setelah penandatanganan *Matignon Agreement* akan dibicarakan mengenai kemerdekaan dari *New Caledonia*.

Pada Tahun 1998, disepakati *Nouméa Accord* yang kemudian menjadi dasar dari status keberadaan *New Caledonia* saat ini¹⁹². *Nouméa Accord* memberikan gambaran yang jelas mengenai proses transfer kekuasaan dari Perancis kepada *New Caledonia* sepenuhnya sehingga memiliki pemerintahan yang berdaulat¹⁹³. Disamping itu, juga disepakati bahwa akan dilaksanakan referendum setelah berakhirnya 20 tahun masa transisi pada tahun 2018 sebagaimana dinyatakan

“Au terme d’une période de vingt années, le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l’accès à un statut international de pleine responsabilité et l’organisation de la citoyenneté en nationalité seront proposées au vote des populations intéressées. Leur approbation équivaudrait à la pleine souveraineté de la Nouvelle- Calédonie.”

Terjemahan oleh penulis adalah sebagai berikut

“setelah jangka waktu selama 20 tahun, penyerahan kekuasaan kepada New Caledonia, pencapaian status penuh tanggung jawab internasional dan perubahan kewarganegaraan menjadi kebangsaan, akan

¹⁹² Preamble dari *Noumea Accord* “*Cette solution définit pour vingt années l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son émancipation*”
Terjemahannya adalah: “Perjanjian ini menentukan organisasi politik dari New Caledonia dan kemandiriannya selama 20 tahun.”

¹⁹³ *Le partage des compétences entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée. Il sera progressif. Des compétences seront transférées dès la mise en oeuvre de la nouvelle organisation. D’autres le seront selon un calendrier défini, modulable par le Congrès, selon le principe d’autoorganisation. Les compétences transférées ne pourront revenir à l’Etat, ce qui traduira le principe d’irréversibilité de cette organisation.*

Terjemahannya adalah: “Pembagian tanggung jawab antara Negara Perancis dengan New Caledonia menunjukkan adanya kedaulatan bersama. Hal ini akan menjadi proses yang bertahap. Beberapa kekuasaan akan diserahkan segera setelah pengaturan yang baru dimulai. Kekuasaan lainnya akan ditransfer sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yang dapat diubah oleh Kongres sesuai dengan prinsip *self-organization*. Kekuasaan yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kembali negara yang mencerminkan prinsip *irreversibility* dari perjanjian ini.

dipilih oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Persetujuan mengenai hal tersebut merupakan kedaulatan penuh bagi New Caledonia”.

Meskipun pada saat ini *New Caledonia* sudah memiliki pemerintahan yang bersifat otonom, namun negara Perancis masih tetap memegang kedaulatan di bidang hukum, pertahanan dan keamanan termasuk mata uang.

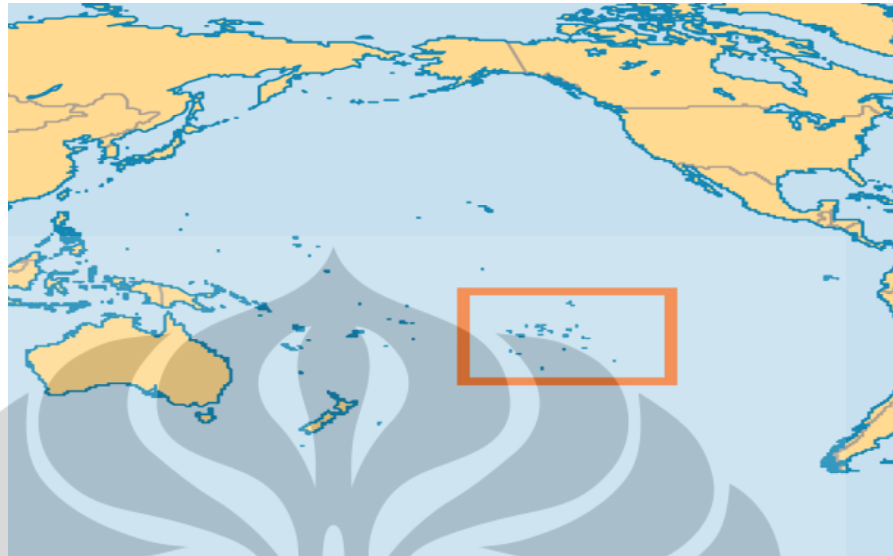
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa *New Caledonia* merupakan wilayah yang integral dengan Perancis. Saat ini, *New Caledonia* masih berada di dalam negara Perancis sehingga negara Perancis memiliki kedaulatan di wilayah ini. *New Caledonia* ini juga menjadi wilayah yang diakui di dalam Traktat Lisbon (di dalam *Treaty on the Functioning of European Union*) sebagai wilayah *overseas countries and territories* sehingga memiliki hubungan dengan Uni Eropa. Hal ini berarti bahwa masih diakuiinya kedaulatan Perancis di *New Caledonia* sebagai wilayah negara yang berada di luar negeri. Kondisi ini tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kolonialisasi dari Perancis terhadap *New Caledonia* karena adanya *Nouméa Accord* yang di dalamnya diatur mengenai sejauh mana kewenangan dari Perancis. Disamping itu, keberadaan *Nouméa Accord* menunjukkan adanya semangat dekolonialisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PBB. *Nouméa Accord* memastikan bahwa adanya penentuan nasib sendiri oleh rakyat *New Caledonia* (*self determination*) setelah masa transisi untuk kemudian memutuskan menjadi suatu wilayah yang merdeka atau tetap menjadi bagian dari Perancis.

4.2.2. French Polynesia

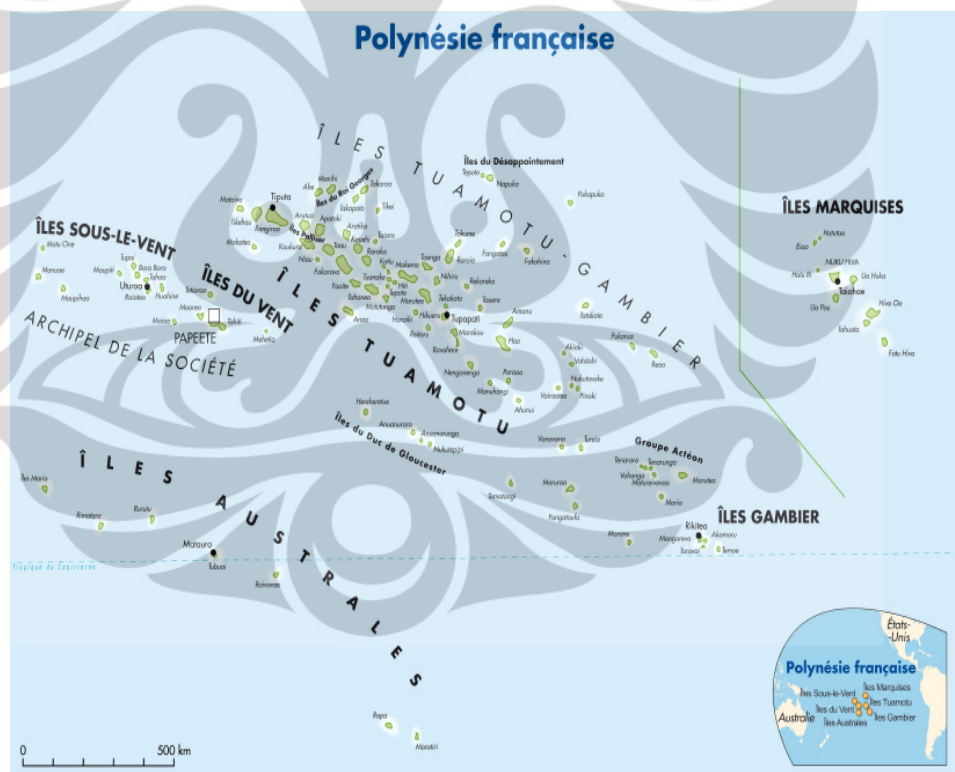
French Polynesia (nama resmi *Pays d’Outre-Mer de la Polynésie française*) merupakan *overseas country* dari Perancis. *French Polynesia* terletak di tengah Samudera Pasifik bagian Selatan¹⁹⁴, sekitar 6000 km sebelah timur Australia atau 7500 km sebelah Barat Chile.

¹⁹⁴ *French Polynesia* terletak pada 7° - 27° Lintang Selatan dan 134° - 155° Bujur Barat.

Gambar 4.4
Letak French Polynesia¹⁹⁵



Gambar 4.5
Peta French Polynesia¹⁹⁶



¹⁹⁵ Gambar diunduh dari <http://www.operationworld.org/files/ow/maps/lginset/frep-LMAP-md.png> pada Minggu 20 Mei 2012 pukul 18.52 WIB.

¹⁹⁶ Gambar diunduh dari <http://www.outre-mer.gouv.fr/IMG/pdf/polynesie.pdf> pada Minggu 20 Mei 2012 pukul. 16.55 WIB.

French Polynesia terdiri dari *Windward Islands*, *Leeward Islands*, ((keduanya disebut juga sebagai *Society Islands*), *Windward Islands Tuamotu*, *Gambier Islands*, *the Marquesas and Austral Islands*. Mayoritas penduduk¹⁹⁷ dari *French Polynesia* berada di pulau *Tahiti* yang merupakan tempat dimana Ibukota *Papeete* berada.

French Polynesia termasuk di dalam *territory* yang diakui oleh Uni Eropa sebagai OCTs. Status wilayah ini sebagai *overseas territory* dari Perancis mengakibatkan Perancis masih memiliki kedaulatan di dalam wilayah ini, walaupun *French Polynesia* juga memiliki pemerintahan sendiri.

Keberadaan *French Polynesia* tidak dapat dipisahkan dari keberadaan *Tahiti* yang merupakan wilayah protektorat dari Perancis pada tahun 1842 dan kemudian dianeksasi pada tahun 1880. Sementara wilayah *Gambier Islands* dianeksasi pada tahun 1881. Selanjutnya, pulau-pulau kecil yang terdapat di sekitar pulau *Tahiti* dijadikan sebagai *Dependencies of Tahiti* yang dianeksasi pada tahun 1847 dan menjadi daerah jajahan pada tahun 1880. Puncak dari *occupation* yang dilakukan oleh Perancis terjadi pada tahun 1842 dimana pasukan militer Perancis memasuki wilayah ini dengan kapal-kapal perang¹⁹⁸ dan pada akhirnya para pemimpin di wilayah tersebut menyerahkan kedaulatan kepada Perancis¹⁹⁹.

¹⁹⁷ Pada Tahun 2010, jumlah penduduk di *French Polynesia* adalah sebanyak 217.000 jiwa.

World Bank (2010), <http://data.worldbank.org/country/french-polynesia> diunduh pada Minggu 20 Mei 2012 pukul 18.39 WIB.

¹⁹⁸ Ensiklopedi *Britannica* <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/219285/French-Polynesia/54080/History> diunduh pada Minggu, 20 Mei 2012 pukul 18.25 WIB.

¹⁹⁹ Wilayah-wilayah tersebut kemudian berada di bawah Pemerintahan Kolonial Perancis di Oceania. Pemerintahan tersebut diperintah oleh angkatan laut sampai tahun 1855, ketika dikeluarkannya dekret yang diberikan kepada Gubernur Perancis, Dewan Penasehat Raja dan Dewan Umum yang mewakili wilayah pulau, yang memiliki kontrol terhadap kebijakan fiskal. Kewenangan dari Dewan Umum dipotong kembali pada tahun 1899 dan pada tahun 1903 keberadaannya digantikan oleh Dewan Penasehat yang murni menjalankan fungsi administratif. Pada tahun 1940, para pemilih di wilayah pulau-pulau memutuskan untuk menjadi bagian dari pemerintahan Charles De Gaulle dan banyak diantara mereka yang kemudian ikut berjuang di dalam Perang Dunia II.

4.2.2.1. Status wilayah *French Polynesia* sebagai OCTs Uni Eropa dari Perancis

French Polynesia berubah status menjadi *overseas territory* Perancis pada tahun 1946.²⁰⁰ Pemerintah di wilayah French Polynesia diberikan kewenangan eksekutif di banyak bidang seperti perekonomian dan keuangan daerah, bea cukai, pajak, pariwisata, transportasi, pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan urusan-urusan internal lainnya. Pada tahun 1996, French Polynesia diberikan status otonomi dengan kewenangan yang semakin luas termasuk kontrol terhadap ZEE, transportasi laut dan udara, telekomunikasi dan keamanan. Bahkan *French Polynesia* diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian dan kerjasama regional dengan negara-negara di kawasan Pasifik.²⁰¹

Amandemen terhadap konstitusi Perancis pada tahun 2003 mengenai desentralisasi kekuasaan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada *French Polynesia* untuk urusan-urusan lokal. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 74 dari konstitusi Perancis hasil amandemen. Ketentuan dari Pasal 74 kemudian dituangkan dalam *LOI organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française* atau Undang-Undang 2004-192 tentang Status Otonomi *French Polynesia* tanggal 27 Februari 2004.

LOI organique n° 2004-192 kemudian menjadi dasar dari status *French Polynesia* sebagaimana ketentuan Pasal 74. Paragraf kedua dari Pasal 1 *LOI organique n° 2004-192* menyatakan:

“Pays d’outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d’outre-mer dont l’autonomie est régie par l’article 74 de la Constitution.”

Terjemahan oleh penulis adalah sebagai berikut

²⁰⁰ Status ini kemudian berubah-ubah hingga lahirnya Organic Law tahun 2004.

²⁰¹ Ensiklopedi Britannica, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/219285/French-Polynesia/54080/History>, diunduh pada Senin, 21 Mei 2012 pukul 13.41 WIB.

“Wilayah Republik di luar negeri, French Polynesia, adalah kelompok wilayah otonom yang diatur di dalam Pasal 74 dari Konstitusi.”

Selanjutnya, di dalam pasal yang sama, diatur mengenai sifat otonomi²⁰² dari *French Polynesia*. Negara Perancis bertanggung jawab untuk memberikan bantuan demi terlaksananya pembangunan di wilayah *French Polynesia*²⁰³.

Walaupun *French Polynesia* sudah diberikan otonomi khusus, pemerintah Perancis masih memiliki sejumlah kekuasaan seperti peradilan dan kepolisian, kebijakan moneter, imigrasi, pertahanan keamanan dan urusan luar negeri. Keberadaan dari pemerintah Republik di wilayah *French Polynesia* diwakili oleh seorang Komisararis Utama sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 *LOI organique n° 2004-192* bahwa,

“Le haut-commissaire de la République, représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif.”

Terjemahan oleh penulis sebagai berikut

“Komisi Utama dari Republik, perwakilan Negara, perwakilan

²⁰² Paragraph keempat menyatakan

La République garantit l’autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l’évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de l’identité de sa population,

Terjemahannya adalah:

Republik menjamin otonomi dari *French Polynesia*, mempromosikan pengembangan otonomi tersebut untuk mendorong pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang berkelanjutan di *French Polynesia* sesuai dengan kepentingan, identitas rakyatnya dan kondisi geografis.

²⁰³ Pasal 2 dari *LOI organique n° 2004-192* menyatakan bahwa

L’Etat et la Polynésie française veillent au développement de ce pays d’outre-mer. Ils apportent leur concours aux communes pour l’exercice des compétences qui leur sont dévolues.

Terjemahannya adalah:

Republik dan *French Polynesia* menjamin terselenggaranya pembangunan di wilayah ini. Keduanya wajib memberikan bantuan kepada pemerintah daerah lokal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing.

dari setiap anggota pemerintahan, adalah pemegang kekuasaan dari Republik. Mereka bertanggung jawab terhadap kepentingan nasional, sesuai dengan hukum dan kesepakatan internasional, ketertiban umum dan kontrol administratif”

Ketentuan dalam konstitusi Republik Perancis dan *LOI organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française* sebagai aturan pelaksana menunjukkan bahwa *French Polynesia* merupakan wilayah Perancis yang berada di luar negeri. Eksistensi dari wilayah ini diakui di dalam hukum internasional sebagaimana Uni Eropa mengakui wilayah tersebut dan mengaturnya di dalam Traktat Lisbon (di dalam *Treaty on the Functioning of European Union*) sebagai wilayah *overseas countries and territories* sehingga memiliki hubungan dengan Uni Eropa.

LOI organique n° 2004-192 merupakan landasan bagi Perancis untuk dapat melaksanakan kedaulatannya di wilayah *French Polynesia*. Pelaksanaan kedaulatan di sana bukanlah suatu tindakan yang bertentangan karena hukum internasional mengakui hal tersebut. Namun demikian, negara Perancis tidak sepenuhnya memiliki kewenangan di wilayah *French Polynesia*. Hal-hal yang bersifat internal telah diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah (desentralisasi kekuasaan). Sementara hal-hal yang sifatnya lebih besar dan luas, seperti pertahanan dan keamanan serta hubungan luar negeri, tetap berada pada pemerintah Perancis.

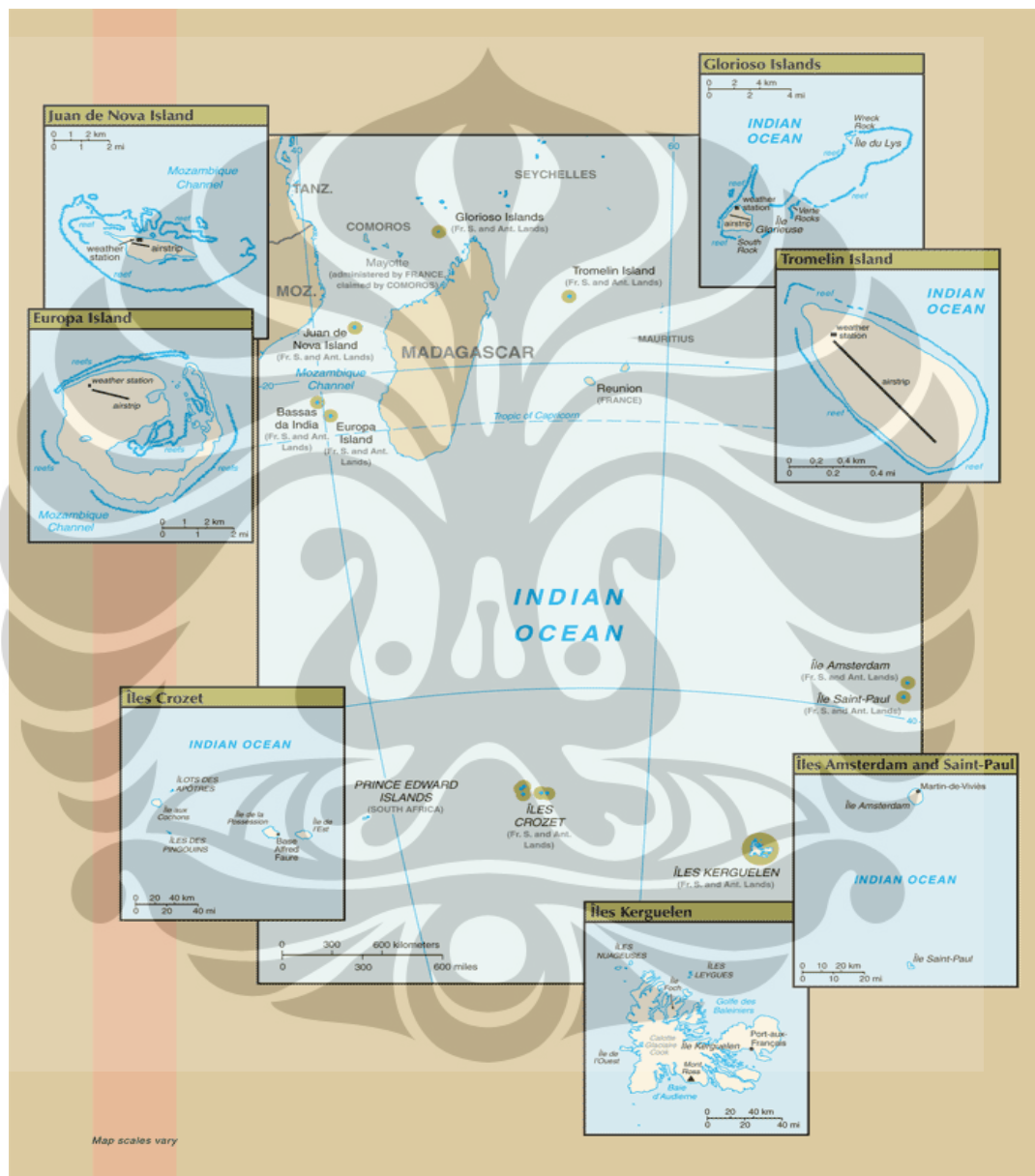
4.2.3. French Southern and Antarctic Territories

French Southern and Antarctic Territories (nama resmi *Les Terres australes et antarctiques françaises* selanjutnya ditulis TAAF) merupakan *overseas territory* dari Perancis. TAAF terletak di bagian selatan Samudera Hindia²⁰⁴, dengan luas 439.781 km². TAAF terdiri dari *St. Paul Island, Amsterdam Island, Crozet Archipelago, Kerguelen*

²⁰⁴ TAAF terletak pada koordinat 43° Lintang Selatan dan 67° Bujur Timur.

Archipelago, Adelié²⁰⁵ Land dan Scattered Islands (the islands Bassas da India, Europa, Glorioso, Juan da Nova dan Tromelin).

Gambar 4.6
Peta TAAF²⁰⁶



²⁰⁵ Sejumlah negara tidak mengakui wilayah ini sebagai bagian dari *overseas territory* Perancis, diantaranya adalah Amerika Serikat. Hal ini didasarkan pada Traktat Antartika tahun 1959 dimana adanya kesepakatan untuk tidak melakukan klaim atas wilayah di Samudera Antartika.

²⁰⁶ Gambar diunduh dari http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/TAAF-CIA_WFB_Map.png pada Senin, 21 Mei 2012 pukul 20.30 WIB.

Penduduk di wilayah ini hanya sebesar 140²⁰⁷ jiwa dan mayoritas merupakan ilmuwan dan peneliti yang melakukan *research* di wilayah TAAF ini. *Port-aux-Français*²⁰⁸ merupakan daerah yang dijadikan sebagai pusat ibukota dari TAAF dan terletak di *Kerguelen Islands*.

Keberadaan TAAF sebagai bagian dari wilayah Perancis merupakan suatu hal yang menarik. Berbeda dengan wilayah-wilayah *territoire d'outre-mer* atau *overseas territory* dari Perancis lainnya, yang penguasaannya dilakukan dengan cara aneksasi, wilayah TAAF ini dikuasai dengan cara *effective occupation*. Pada tahun 1774, Perancis menguasai wilayah kepulauan Kerguelen melalui sebuah ekspedisi. Selanjutnya di tahun 1892, Perancis melakukan penguasaan terhadap wilayah kepulauan Glorioso²⁰⁹ dan di pada oktober tahun 1897 menguasai wilayah *islands Bassas da India, Europa, Glorioso, Juan da Nova*²¹⁰. Pada tahun 1924, wilayah-wilayah tersebut tergabung di bawah suatu pemerintahan khusus di wilayah Madagascar.²¹¹

4.2.3.1 Status wilayah TAAF sebagai OCTs Uni Eropa dari Perancis

Status dari TAAF menjadi *overseas territory* pada tahun 1955 dengan dikeluarkannya *Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut*

²⁰⁷ Angka ini dapat berubah-ubah. Jumlah penduduk di wilayah TAAF tergantung dengan musim yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

²⁰⁸ *Port-aux-Français* dijadikan semacam 'ibukota' di wilayah TAAF. Kontrol terhadap TAAF secara keseluruhan berada di Paris. Namun sejak tahun 2004, pusat administrasi dari TAAF berada di *Saint-Pierre* di *Reunion Islands*.

²⁰⁹ *L'acte du 23 août 1892 portant prise de possession, au nom de la France, des îles Glorieuses* atau Undang-Undang tahun 1892 tentang Penguasaan dari Perancis terhadap wilayah Glorioso.

²¹⁰ Penguasaan Perancis terhadap wilayah tersebut ditemukan di dalam *Decret n° 60-555 du 1^{er} avril 1960 relatif a la situation administrative de certaines îles relevant de la souverainete de la France* (Dekrit Presiden 60-555 pada tahun 1960 tentang status administratif dari wilayah yang berada di bawah Perancis).

²¹¹ Hal tersebut diatur di dalam *décret du 21 novembre 1924 rattachant les îles saint-paul et amsterdam, les archipels kerguelen et crozet et la terre adelie au gouvernement general de Madagascar* (Dekrit 21 November 1924 tentang penyatuan pulau Saint Paul Amsterdam, kepulauan Kerguelen dan Crozet dan Adalie Land dengan pusat pemerintahan di Madagascar).

*des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton*²¹². Pasal 1 dari *Loi* tersebut menyatakan bahwa

L'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin forment un territoire d'outre-mer doté de la personnalité morale et possédant l'autonomie administrative et financière.

Ce territoire prend le nom de Terres australes et antarctiques françaises.

Terjemahan oleh penulis adalah sebagai berikut

The St. Paul Island, Amsterdam Island, Crozet Archipelago, Kerguelen Archipelago, Adélie Land and the islands Bassas da India, Europa, Glorioso, Juan da Nova and Tromelin membentuk *overseas territory* dengan kepribadian hukum dan memiliki otonomi administrasi dan keuangan. Wilayah ini disebut dengan *French Southern and Antarctic*.

Adanya ketentuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam dekrit tersebut menunjukkan bahwa wilayah *French Sothern and Antarctic* (TAAF) merupakan wilayah dari Perancis yang berada di luar negeri. Keberadaan hal tersebut diakui oleh Uni Eropa dengan memasukkan TAAF ke dalam wilayah yang tergabung dalam OCTs dan memiliki hubungan dengan Uni Eropa. Penguasaan wilayah tersebut dengan cara *effective occupation* tidak menunjukkan adanya bentuk kolonisasi terhadap wilayah tersebut, meskipun sejumlah negara menolak pendudukan terhadap *Adélie Land*. Dengan dikuasainya TAAF di bawah kekuasaan Perancis, maka Perancis dapat melaksanakan kedaulatannya di wilayah tersebut.

4.2.4. Wallis and Futuna Islands

Wallis and Futuna Islands (nama resmi *Territoire des îles Wallis et Futuna*) saat ini menyandang status sebagai *overseas territory* dari Perancis. *Wallis and Futuna Islands* terletak di wilayah Selatan

²¹² Undang-Undang no 55-1052 tanggal 6 Agustus 1955 tentang status dari *French Southern Antarctic* dan Pulau *Clipperton*.

Samudera Pasifik, diantara Fiji dan Samoa. *Wallis and Futuna Islands* terdiri dari dua kelompok kepulauan yakni *Wallis Islands*²¹³, yang oleh sebagian besar penduduk aslinya disebut dengan *Uvea* dan *Island Futuna* dan Alofi.²¹⁴ Hanya *Wallis Islands* dan *Futuna Islands* yang dihuni oleh penduduk. *Wallis and Futuna Islands* merupakan *overseas territory* dari Perancis yang terletak di Samudera Pasifik bersama-sama dengan *French Polynesia* dan *New Caledonia*.

Wilayah *Wallis and Futuna Islands* saat ini dihuni oleh sekitar 15.453 jiwa²¹⁵ dengan mayoritas penduduk menghuni *Mata Utu (on Ile Uvea)* yang merupakan ibukota dari wilayah ini.

Gambar 4.7
Lokasi *Wallis and Futuna Islands*²¹⁶



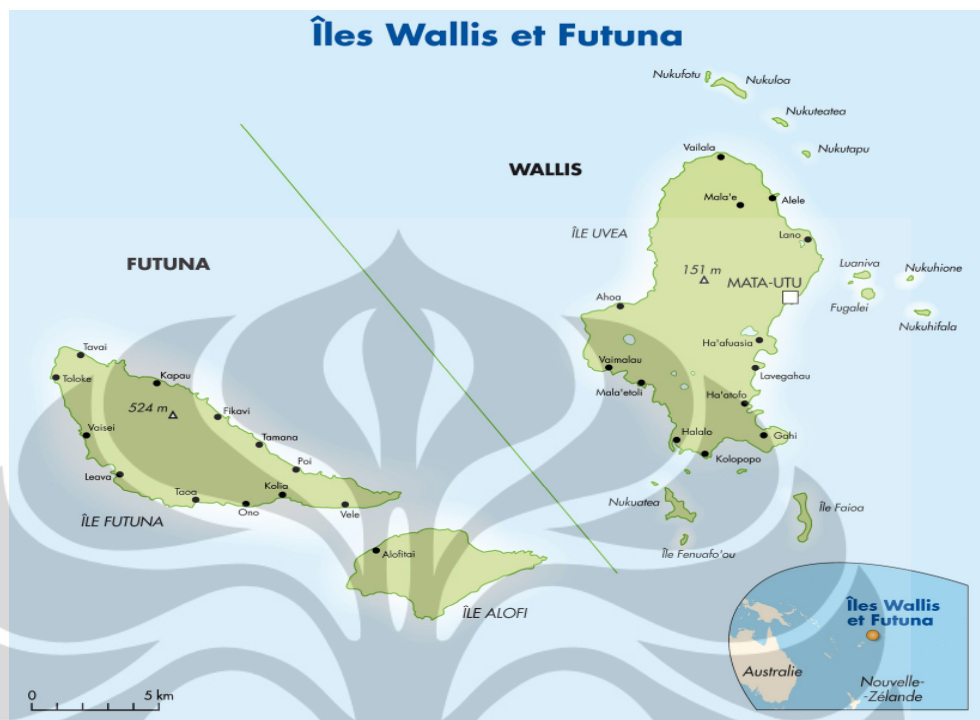
²¹³ Dengan luas wilayah 77,5km² ditambah pulau-pulau kecil yang mengelilinginya dengan luas sekitar 88,1 km².

²¹⁴ Luas wilayah Futuna adalah sebesar 64 km² dan Alofi seluas 51 km². Keduanya dipisahkan oleh Canal sejauh 2 km.

²¹⁵ Data berdasarkan Data Intelijen Amerika CIA di unduh dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wf.html> hari Jumat, 1 Juni 2012.

²¹⁶ Gambar diunduh dari <http://www.operationworld.org/files/ow/maps/lginset/wall-LMAP-md.png> pada hari Kamis, 31 Mei 2012 pukul 16.00 WIB.

Gambar 4.8
Peta Wallis and Futuna Island²¹⁷



Keberadaan dari *Wallis and Futuna Islands* sebagai bagian dari *overseas territory* dari Perancis memiliki catatan sejarah yang unik. Sebelum menjadi bagian dari wilayah Perancis, *Wallis and Futuna Islands* pernah menjadi bagian dari Belanda dan Inggris. Pada tahun 1616, sebuah ekspedisi dari Belanda di bawah pimpinan Jacob Le Maire dan William Cornelius Schouten mendarat di Futuna dan Alofi.²¹⁸ Kemudian pada bulan Juni 1767, seorang pelaut dari Inggris, Samuel Wallis melakukan penaklukan terhadap wilayah *French Polynesia* atas nama Raja Inggris. Pada bulan Agustus di tahun yang

²¹⁷ Gambar diunduh dari <http://www.outre-mer.gouv.fr/IMG/pdf/wallis.pdf> pada hari Kamis, 31 Mei 2012, pukul 15.49 WIB.

²¹⁸ Diakses dari <http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/pacifique/wallis-futuna.htm> pada hari Sabtu, 2 Juni 2012 pukul 11.02 WIB. Mereka menamakan pulau tersebut sebagai *Horn Islands*. Namun demikian, keberadaan Belanda hanya di seputar pulau Futuna dan keberadaan di wilayah tersebut tidak bertahan lama.

sama, Wallis sampai di Pulau Uvea yang kemudian oleh para pengikutnya diberi nama Wallis Island²¹⁹.

Kedatangan *missionaries* Katolik dari Perancis pada tahun 1837 di wilayah Wallis and Futuna Islands merupakan awal dari keberadaan kekuasaan Perancis di wilayah tersebut²²⁰. Selanjutnya, pada saat Perang Dunia II, *Wallis Islands* dijadikan sebagai pangkalan militer dari Amerika Serikat.²²¹

4.2.4.1 Status wilayah Wallis and Futuna Islands sebagai OCTs Uni Eropa dari Perancis

Pada tahun 1959, tepatnya pada tanggal 27 Desember diadakan referendum di wilayah *Wallis and Futuna Islands* yang kemudian menghasilkan keputusan untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari *overseas territory* dari negara Perancis. Hasil referendum tersebut dikukuhkan satu setengah tahun kemudian yakni pada 29 Juli 1961, dikeluarkan *Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer* (Undang-Undang 61-814 tentang pemberian status *overseas territory* kepada *Wallis dan Futuna Islands*, tanggal 29 Juli 1961). Undang-Undang ini yang kemudian menjadi dasar dari Perancis untuk memiliki kekuasaan

²¹⁹ Wilayah tersebut kemudian dibatasi penggunaannya hanya sebatas untuk distribusi makanan dan kebutuhan pangan lainnya. Riwayat penemuan oleh Captain Wallis tidak lagi ditemukan setelah penguasaan wilayah tersebut.

²²⁰ Pada bulan April 1841, salah seorang *missionaries* yang datang dari Perancis terbunuh sehingga menimbulkan konflik diantara kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut. Pada April 1842, otoritas dari masyarakat tradisional di wilayah tersebut mengajukan permohonan perlindungan kepada pemerintah Perancis yang diikuti oleh kerajaan Sigalo Ave beberapa bulan berikutnya. Permohonan tersebut tidak dikabulkan sampai pada akhirnya di tahun 1887, di bawah perintah dari Ratu Amelia. Adanya perjanjian yang disepakati antara pemerintah Perancis dengan kerajaan-kerajaan yang terdapat di wilayah Wallis and Futuna Islands mengukuhkan keberadaan Perancis di wilayah Pasifik sebagai negara Protektorat dari wilayah-wilayah tersebut. Perancis menjamin terciptanya keamanan dan stabilitas di wilayah Wallis and Futuna Islands serta memastikan wilayah tersebut terhindar dari konflik. Namun demikian, pemerintahan di wilayah Wallis and Futuna Islands dikelola dari New Caledonia.

²²¹ Amerika Serikat menjadikan wilayah Wallis sebagai salahsatu pangkalan militer yang sangat strategis pada 28 Mei 1942 dengan nama "Navy 207". Sebanyak 6000 tentara ditempatkan di wilayah tersebut dengan dipersenjatai dengan peralatan tempur paling mutakhir di jamannya.

terhadap wilayah *Wallis and Futuna Islands*. Dalam pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan

“Les îles Wallis, Futuna, Alofi et les îlots qui en dépendent constituent, sous la dénomination de “Territoire des îles Wallis et Futuna “, un territoire d’outre-mer doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.”

Terjemahan oleh penulis adalah sebagai berikut

“Pulau Wallis, Futuna, Alofi dan Pulau-pulau yang terdapat disekitarnya diberi nama “Wilayah Wallis and Futuna Islands”, sebuah *overseas territory* yang diberikan kepribadian hukum dan otonomi dibidang pemerintahan dan keuangan.”

Selanjutnya, di dalam Pasal 4 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara Perancis juga berlaku di wilayah tersebut. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan

“Le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais régi :

a) Par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l’ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d’outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ;”

Terjemahan oleh penulis adalah sebagai berikut

“Wilayah Wallis dan Futuna Islands saat ini diatur dengan:

a. Undang-Undang dari Republik Perancis dan keputusan-keputusan yang terkait, karena wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah nasional, dan pada saat pengumumannya, Undang-undang, Keputusan dan peraturan-peraturan menteri dapat secara bebas untuk menyatakan keberlakukannya terhadap wilayah Wallis and Futuna Islands.”

Pengaturan sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya kedaulatan yang dimiliki oleh Perancis terhadap wilayah *Wallis and Futuna Islands*. Keberadaan wilayah tersebut sebagai bagian dari Perancis tidak terlepas dari fakta bahwa Perancis merupakan negara Protektorat dari

wilayah *Wallis and Futuna Islands*. Hal tersebut juga ditegaskan di dalam salah satu pasal yang menentukan bahwa hukum dari Perancis berlaku di wilayah tersebut.

Adanya kedaulatan yang dimiliki oleh Perancis terhadap wilayah *Wallis and Futuna Islands* sebagai wilayah Perancis yang berada di luar negeri diakui oleh Uni Eropa. Hal ini ditunjukkan dengan memasukkan *Wallis and Futuna Islands* sebagai wilayah *overseas countries and territories* yang karenanya memiliki hubungan dengan Uni Eropa.

4.2.5. *Mayotte*

Mayotte merupakan wilayah dari Perancis yang berada di Samudera Hindia. *Mayotte* terletak pada kepulauan Comoro, di sekitar *Canal Mozambique* di Samudera Hindia, sekitar 310 km barat laut Madagaskar²²². *Mayotte* terdiri dari dua pulau utama yakni *Grande Tere* dan *Petite Tere* serta beberapa pulau kecil seperti *Mtsamboro*, *Mbouzi* dan *Bandrélé*. Ibukota Mamoudzou terletak di pantai timur pulau *Grande Tere* menghadap ke pulau *Petite Tere*. Jumlah penduduk dari *Mayotte* berdasarkan laporan PBB tahun 2010 adalah sebanyak 204.000 jiwa²²³. Dengan luas wilayah 374.2 km², *Mayotte* mayoritas dihuni oleh penduduk beragama Islam. Hal ini menjadikan *Mayotte* sebagai satu-satunya wilayah *overseas territory* dari Perancis dengan populasi umat Islam terbesar.

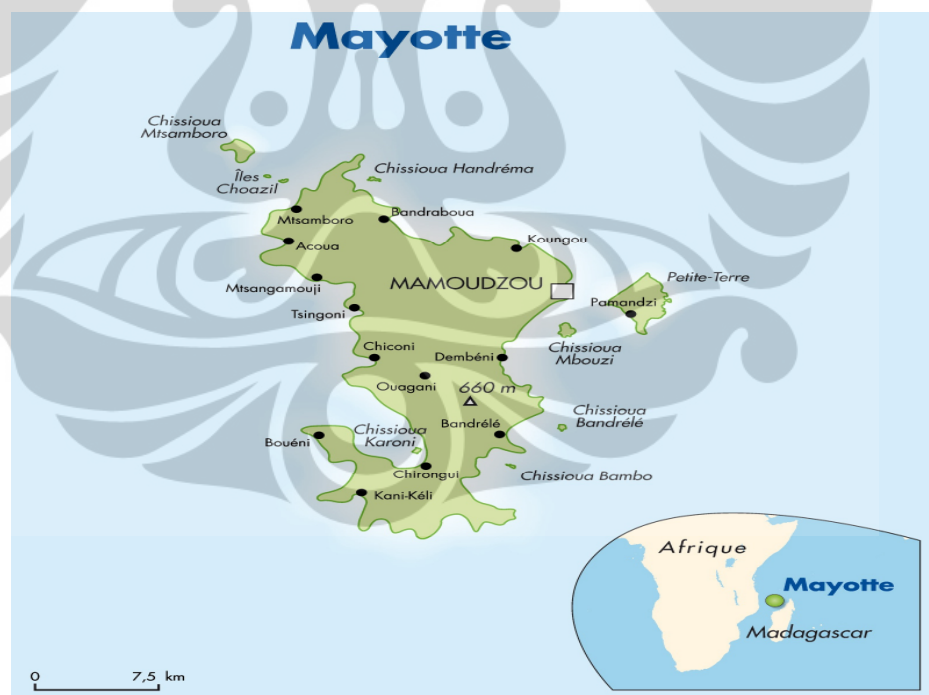
²²² *Mayotte* terletak pada koordinat 12° – 50° LS dan 45° – 10° BT.

²²³ United Nations, Department of Economic and Social Affairs <http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/p2k0data.asp> diakses pada Sabtu, 2 Juni 2012 pukul 16.21 WIB.

Gambar 4.9
Lokasi Mayotte²²⁴



Gambar 4.10
Peta Mayotte²²⁵



²²⁴ Gambar diunduh dari <http://blog.mr-bricolage.com/wp-content/uploads/2012/02/mayotte-afrique-madagascar-la-reunion-ile-maurice.png> pada Sabtu, 2 Juni 2012 pukul 16.00 WIB.

²²⁵ Gambar diunduh dari <http://www.outre-mer.gouv.fr/IMG/pdf/mayotte.pdf> pada Sabtu, 2 Juni 2012 pukul 16.44 WIB.

4.2.5.1 Status wilayah Mayotte sebagai OCTs Uni Eropa dari Perancis

Mayotte saat ini menyangang status sebagai *overseas département* dari Perancis. Pada 25 Agustus 1972, Komite Khusus Dekolonialisasi PBB (*United Nations Special Committee on Decolonization*) memasukkan wilayah di Kepulauan Comoro ke dalam daftar wilayah *Non-Self Governing Territories* yang akan segera mendapatkan *right on self-determination*²²⁶. Sejak tahun 1976 hingga pada awal tahun 2000, *Mayotte* memiliki status sebagai *collectivité territoriale*, status yang dianggap sebagai perantara antara *overseas territory* dengan *overseas département*. Status dari *Mayotte* sebagai bagian dari wilayah Perancis menimbulkan persoalan bagi Comoros, yang mengklaim *Mayotte* sebagai bagian dari wilayah negar tersebut yang memerdekakan diri dari Perancis pada tahun 1975.²²⁷

Pada tahun 2001, status dari *Mayotte* berubah menjadi *collectivité départementale* dan kemudian pada tahun 2011 memiliki status sebagai *overseas department*. Pengaturan mengenai *Mayotte* saat ini terdapat di dalam *LOI organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer* (Undang-Undang nomor 2007-223 tanggal 21 Februari 2007, tentang Kelembagaan dan Wilayah Luar Negeri).

Pengaturan terhadap wilayah *Mayotte* menunjukkan bahwa adanya kedaulatan dari Perancis terhadap wilayah tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Mayotte* merupakan salahsatu

²²⁶ Pada 15 Juni 1973, Perancis dan Comoros menandatangani perjanjian tentang akan dilaksanakannya penyerahan kemerdekaan. Pada 22 Desember 1974, Perancis merancang pelaksanaan referendum di Comoros mengenai kemerdekaan wilayah tersebut. Sekitar 90% dari menyatakan keinginan merdeka, sehingga penguasaan terhadap wilayah Mayotte dipisahkan dari Comoros dan berada di bawah pemerintahan Perancis. Adanya perpecahan di internal Mayotte menyebabkan pemerintah Perancis tidak mau mengesahkan hasil referendum yang telah dilakukan dan bermaksud untuk melakukan referendum ulang. Namun demikian, Comoros pada akhirnya mengumumkan kemerdekaan secara unilateral (sepihak tanpa kesepakatan dari pihak Perancis). Sementara Mayotte tetap berada di bawah pemerintahan Perancis. Pemerintah Comoros menolak hal tersebut karena berkaitan dengan integritas wilayah Comoros yang baru Merdeka.

²²⁷ Encyclopedia Britannica, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/371085/Mayotte> . Diakses pada Sabtu, 2 Juni 2012 pukul 20.50 WIB.

wilayah yang termasuk dalam daftar *non-self governing territories* oleh Komite Khusus Dekolonialisasi dari PBB. Penguasaan dari Perancis terhadap wilayah tersebut diakui oleh Uni Eropa. Di dalam *Treaty on the Functioning of European Union* (TFEU) dinyatakan bahwa *Mayotte* termasuk ke dalam wilayah-wilayah yang diakui sebagai *overseas countries and territories*.

4.2.6. *Saint Pierre and Miquelon*

Saint Pierre and Miquelon (nama resmi *Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon*) adalah bekas wilayah kolonial Perancis di Amerika Utara yang saat ini masih berada di bawah kekuasaan Perancis. *Saint Pierre and Miquelon* terletak di Samudera Atlantik Utara, sekitar 25 km sebelah selatan dari pantai *Newfoundland*, Canada²²⁸. Total luas wilayah adalah sebesar 242 km², yang terdiri dari 215 km² wilayah *Miquelon* dan 26 km² *Saint Pierre*. Wilayah *Miquelon* terbagi menjadi *Grande Miquelon* dan *Petite Miquelon* (*Langlade*) yang dihubungkan oleh hamparan pasir *Langlade*. *Saint Pierre* meskipun memiliki wilayah yang lebih kecil, namun hampir 90% dari total populasi²²⁹ *Saint Pierre and Miquelon* tinggal di wilayah tersebut.

Wilayah *Saint Pierre and Miquelon* pertama kali ditemukan oleh bangsa Portugis pada tahun 1520. Pada tahun 1536, wilayah ini dikuasai oleh Perancis melalui penguasaan oleh Jacques Carter atas nama Raja Perancis. Namun demikian, wilayah *Saint Pierre and Miquelon* ini sempat berada di bawah penguasaan Inggris²³⁰. Pada

²²⁸ Terletak pada 46° – 50° Lintang Utara dan 56° – 20° Bujur Barat.

²²⁹ Berdasarkan laporan Badan Statistik Perancis tahun 2009, jumlah penduduk di *Saint Pierre and Miquelon* adalah sebanyak 6.082 jiwa. <http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-departements.asp?annee=2009> diakses pada minggu 3 Juni 2012 pukul 12.17 WIB.

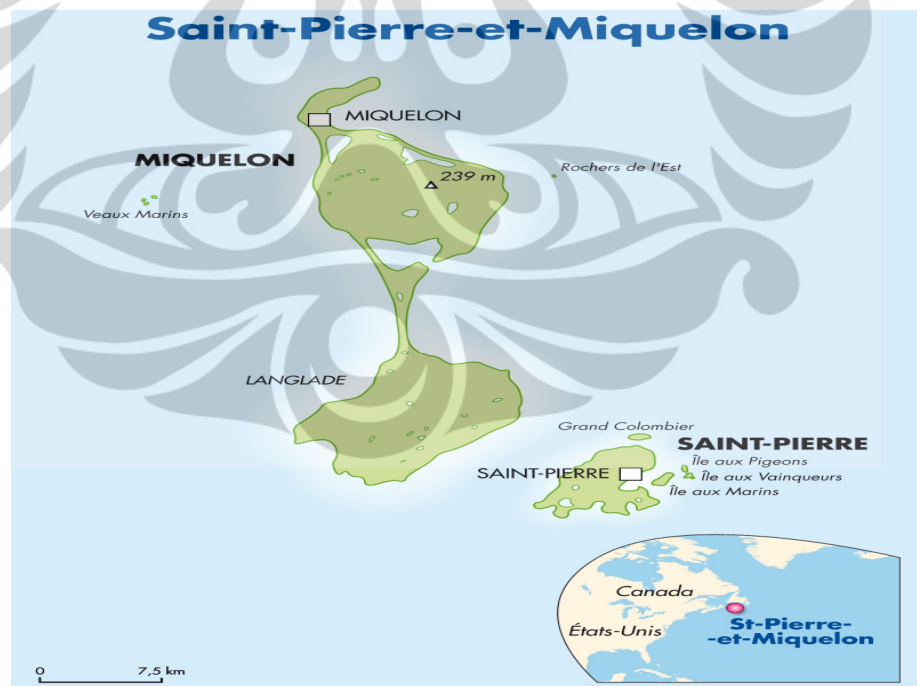
²³⁰ Pada tahun 1713, wilayah *Saint Pierre and Miquelon* diserahkan kepada Inggris melalui *Treaty of Utrecht*, yang mengakhiri Perang *Spanish Succession*. Meskipun wilayah tersebut telah diserahkan kepada Inggris, para Pelaut Perancis masih sering mengunjungi wilayah tersebut untuk melaut sehubungan dengan adanya wilayah Perancis di Pantai *Newfoundland*.

Tahun 1814, melalui *Treaty of Paris*, wilayah tersebut diserahkan kembali oleh Inggris kepada Perancis.

Gambar 4.11
Lokasi Saint Pierre and Miquelon²³¹



Gambar 4.12
Peta Saint Pierre and Miquelon²³²



²³¹ Gambar diunduh dari <http://www.operationworld.org/files/ow/maps/lginset/saip-LMAP-md.png> pada Minggu, 3 Juni 2012 pukul 12.15 WIB.

²³² Gambar diunduh dari <http://www.outre-mer.gouv.fr/IMG/pdf/saint-pierre.pdf> pada Minggu, 3 Juni 2012 pukul 12.30 WIB.

4.2.6.1 Status wilayah *Saint Pieere and Miquelon* sebagai OCTs Uni Eropa dari Perancis

Pasca Perang Dunia II, wilayah *Saint Pierre and Miquelon* yang pada awalnya merupakan wilayah jajahan dari Perancis berubah status menjadi *overseas territory* tahun 1946. Proses integrasi dari wilayah *Saint Pierre and Miquelon* menjadi bagian dari Republik Perancis semakin besar setelah pada tahun 1976 menjadi *overseas department* melalui *Loi n°76-664 du 19 juillet 1976 organisation des pouvoirs publics a saint-pierre-et-miquelon*. Amandemen konstitusi Perancis pada 28 Maret 2003 melahirkan suatu bentuk baru yakni *Overseas Collectivité*. *Saint Pierre and Miquelon* saat ini merupakan *Overseas Collectivité* dari Perancis sebagaimana yang diatur di dalam pasal 74 konstitusi Perancis hasil amandemen. Pengaturan mengenai *Saint Pierre and Miquelon* terdapat pada *LOI organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer* (Undang-Undang nomor 2007-223 tanggal 21 Februari 2007, tentang Kelembagaan dan Wilayah Luar Negeri).

Adanya pengaturan mengenai wilayah *Saint Pierre and Miquelon* di dalam konstitusi Perancis menunjukkan bahwa adanya kedaulatan dari Perancis terhadap wilayah tersebut. Ketentuan dalam konstitusi tersebut dilaksanakan dengan undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Wilayah *Saint Pierre dan Miquelon* termasuk dalam wilayah yang termasuk ke dalam *overseas countries and territories* (OCTs) dari Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan dari Perancis terhadap wilayah tersebut diakui oleh Uni Eropa sebagai subjek hukum internasional. Penguasaan wilayah tersebut oleh Perancis saat ini, meskipun pada awalnya merupakan daerah jajahan, tidak dapat dianggap sebagai bentuk kolonialisasi karena keberadaan Perancis di wilayah tersebut diakui oleh hukum internasional.

4.3 Analisis Wilayah OCTs dari Belanda

Disamping pembahasan mengenai OCTs Uni Eropa yang merupakan bagian dari negara Perancis, pembahasan mengenai OCTs Uni Eropa yang merupakan bagian dari Belanda akan dibahas sebagai berikut.

4.3.1. Aruba

Aruba merupakan salahsatu dari empat negara yang saat berada di bawah Kerajaan Belanda²³³. Aruba merupakan sebuah pulau sepanjang 33 km di selatan Laut Karibia, terletak 27 km sebelah utara pantai Venezuela dan kurang lebih 130 km sebelah timur Columbia²³⁴. Aruba sebelumnya merupakan bagian dari *Netherland Antiles* yang kemudian memerdekakan diri pada tahun 1986.

Gambar 4.13

Lokasi Aruba²³⁵



²³³ Keempat negara yang membentuk Kerajaan Belanda adalah Aruba, Belanda, Curacao dan Sint Marteen. Keempat negara ini memiliki satu kewarganegaraan yang sama yaitu kewarganegaraan Belanda.

²³⁴ Aruba berada pada koordinat 12° – 31° Lintang Utara dan 69° – 58° Bujur Barat.

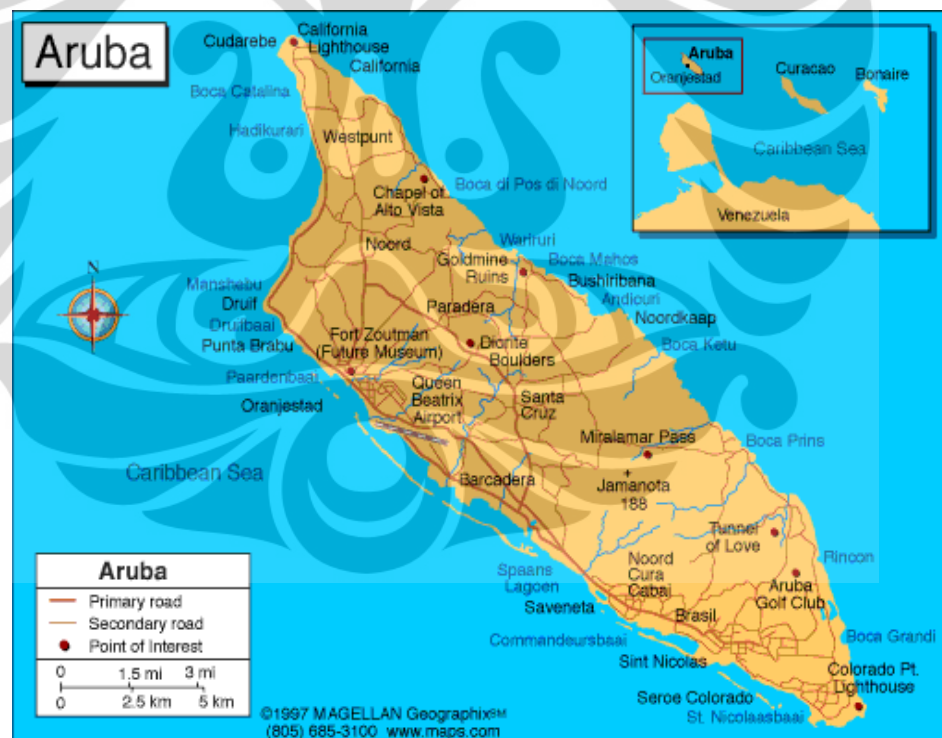
²³⁵ Gambar diunduh dari <http://www.aruba-travelguide.com/about/graphics/map-caribbean-aruba.jpg> pada hari Minggu 3 Juni 2012 pukul 18.10 WIB.

Aruba dihuni oleh sekitar 107.000 jiwa²³⁶ penduduk dengan mayoritas penduduk berada di wilayah *Oranjestad* yang merupakan ibukota dari Aruba.

Aruba pertama kali ditemukan oleh seorang Eropa bernama Amerigo Vespucci. Sejak ditemukannya, wilayah Aruba menjadi daerah kolonial dari Spanyol. Alonso de Ojeda yang ikut menemukan wilayah Aruba bersama Amerigo Vespucci diangkat menjadi gubernur pertama Spanyol di wilayah Aruba. Kemudian pada tahun 1636, Aruba berada di bawah pemerintahan Belanda. Sejak saat itu, Aruba praktis menjadi bagian dari Belanda dengan diberlakukannya hukum Belanda di wilayah tersebut. Pada tahun 1933, Aruba untuk pertama kalinya mengajukan status pemisahan dan permohonan otonomi kepada Ratu Belanda.

Gambar 4.14

Peta Aruba²³⁷



²³⁶ Laporan PBB mengenai jumlah populasi di Aruba tahun 2009 <http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Aruba> diakses pada hari Minggu, 3 Juni 2012 pukul 19.16.

²³⁷ Gambar diunduh dari <http://www.maps.caribseek.com/images/caribbean-maps/aruba-map.gif> pada Minggu, 3 Juni 2012 pukul 19.01 WIB.

4.3.1.1 Status Aruba sebagai wilayah OCTs Uni Eropa dari Belanda

Selama Perang Dunia II, wilayah Aruba pernah dikuasai oleh sejumlah negara yang berbeda. Pada tahun 1940-1942, Aruba berada di bawah Protektorat Inggris, sementara di tahun 1942-1945 berada di bawah protektorat Amerika Serikat.

Pada Agustus tahun 1947, Aruba untuk pertama kalinya mengajukan konstitusi (*staatsreglement*) untuk negara Aruba yang merdeka. Pada tahun 1954, dibentuklah *Charter for the Kingdom of Netherlands* (Piagam Kerajaan Belanda) yang mengatur hubungan antara Kerajaan Belanda dengan masing-masing negara. Piagam inilah yang kemudian mengatur bagaimana hubungan antara Kerajaan Belanda dengan Aruba.

Pada maret 1983, Aruba dan Kerajaan Belanda akhirnya mencapai kesepakatan untuk kemerdekaan Aruba dengan mulai memberikan otonomi secara bertahap. Dalam kesepakatan yang bernama *Aruba's De-Kolonisatie Accoord* tersebut dinyatakan bahwa Aruba akan mendapatkan *Status Aparte* sejak 1 Januari 1986. Konstitusi dari Aruba disepakati secara mutlak pada 9 Agustus 1985 dan dituangkan di dalam undang-undang (*Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1985, nr. 665; Rijkswet Staatsblad 1985, Nr. 664*).

Aruba akhirnya menjadi negara yang merdeka di bawah kerajaan Belanda pada tahun 1986²³⁸. Berdasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*right of self determination*) dari setiap pulau, maka seluruh wilayah dari Aruba sepakat untuk menyetujui pilihan dari Aruba untuk menjadi negara yang merdeka di bawah bingkai Kerajaan Belanda (*The Kingdom of Netherlands*).

²³⁸ Setelah diselenggarakannya pemilihan umum pertama untuk memilih anggota parlemen dari Aruba, pada tanggal 1 Januari 1986, Aruba resmi memisahkan diri dari Netherlands Antilles dan menjadi negara yang merdeka dan otonom di bawah Kerajaan Belanda. Hal ini berarti bahwa Aruba telah resmi memiliki kapasitas penuh sebagai sebuah negara di bawah Kerajaan. Kemerdekaan.

Berbeda dengan OCTs Uni Eropa yang menjadi bagian dari Perancis, Aruba memiliki bentuk yang berbeda yakni berbentuk suatu negara (*country*). Namun demikian, keberadaan Aruba sebagai sebuah *country* berada di bawah Kerajaan Belanda (*the Kingdom of Netherlands*) yang merupakan anggota dari Uni Eropa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat bahwa keberadaan Aruba sebagai bagian dari Kerajaan Belanda tidak bertentangan dengan hukum internasional. Bahkan Uni Eropa sebagai subjek hukum internasional mengakui keberadaan Aruba sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Pengaturan di dalam *Charter for the Kingdom of Netherlands* yang menjadi dasar bagi hubungan antara kerajaan dengan wilayah Aruba menunjukkan adanya masih adanya kedaulatan dari Kerajaan Belanda terhadap wilayah Aruba. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan Gubernur Jenderal yang mewakili kerajaan di wilayah Aruba²³⁹. Kerajaan Belanda pun tetap bertanggung jawab terhadap urusan-urusan luar negeri dari Aruba seperti dalam keikutsertaan dalam organisasi internasional Uni Eropa²⁴⁰.

²³⁹ Pasal 2 ayat (2) dari *Charter for The Kingdom of Netherlands* menyatakan:

“The King shall be represented by the Governor in the Netherlands Antilles and Aruba. The powers, duties and responsibility of the Governor as representative of the Government of the Kingdom shall be determined by Kingdom Act or, as the case may be, by order in council for the Kingdom.”

²⁴⁰ Mengenai urusan-urusan yang masih menjadi tanggung jawab dari kerajaan Belanda diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) *Charter for The Kingdom of Netherlands* yakni:

“Without prejudice to provisions elsewhere in the Charter, Kingdom affairs shall include:

- a. maintenance of the independence and the defence of the Kingdom;*
- b. foreign relations;*
- c. Netherlands nationality;*
- d. regulation of the orders of chivalry, the flag and the coat of arms of the Kingdom;*
- e. regulation of the nationality of vessels and the standards required for the safety and navigation of seagoing vessels flying the flag of the Kingdom, with the exception of sailing ships;*
- f. supervision of the general rules governing the admission and expulsion of Netherlands nationals;*
- g. general conditions for the admission and expulsion of aliens;*
- h. extradition.”*

4.3.2. Netherlands Antilles

Wilayah Belanda berikutnya yang termasuk dalam *overseas countries and territories* (OCTs) berdasarkan Uni Eropa adalah *Netherlands Antilles*. *Netherlands Antilles* (*Nederlandse Antillen* dalam Bahasa Belanda; *Antianan Hulandes* dalam bahasa daerah *Papiamentu*) adalah sekelompok kepulauan di Karibia yang berada di bawah kekuasaan dari Belanda. *Netherlands Antilles* terdiri dari dua kelompok kepulauan yakni sebelah utara terdiri dari *Sint Eustasius*, *Saba* dan *Sint Marteen* (bagian selatan dari pulau *Saint Martin*, sisi utara dari pulau merupakan *Saint Martin* yang merupakan *overseas collectivity* dari Perancis). Sementara kelompok kepulauan sebelah selatan terdiri dari *Curaçao* dan *Bonaire* yang terletak sekitar 80 km dari pantai Venezuela. *Netherlands Antilles* memiliki luas 800 km² dengan jumlah penduduk mencapai 203.748 jiwa²⁴¹ pada tahun 2011.

Gambar 4.15

Netherlands Antilles²⁴²



²⁴¹ Data diperoleh dari http://en.worldstat.info/Central_America_and_the_Caribbean/Netherlands_Antilles diakses pada Selasa 5 Juni 2012 pukul 22.07 WIB.

²⁴² Gambar diunduh dari <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/caribb/annewz.gif> pada hari Selasa, 5 Juni 2012 pukul 21.48 WIB.

4.3.2.1. Status wilayah *Netherlands Antilles* sebagai OCTs Uni Eropa dari Belanda

Netherlands Antilles memiliki riwayat yang sama dengan *Aruba*. Akan tetapi, *Aruba* memperoleh kemerdekaan dan menjadi negara di bawah kerajaan Belanda pada tahun 1986. Aturan mengenai kedudukan *Netherlands Antilles* juga terdapat di dalam *Charter for the Kingdom of Netherlands* sebagaimana terdapat pengaturan mengenai *Aruba*. *Charter for the Kingdom of Netherlands* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya memberikan otonomi kepada *Netherlands Antilles* dan *Aruba*. tersebut juga berakibat dicabutnya wilayah *Netherlands Antilles* dari daftar *Non-Self Governing Territories* PBB.

Pada saat ini, *Netherlands Antilles* tidak lagi *exist* sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini terjadi karena telah terjadinya pembubaran dari *Netherlands Antilles* pada tahun 2010. Wilayah-wilayah *Netherlands Antilles* yang sebelumnya terdiri *Curaçao*, *Bonaire*, *Sint Eustasius*, *Saba* dan *Sint Marteen* memutuskan untuk membubarkan diri dari *Netherlands Antilles*. Antara tahun 2000 hingga tahun 2005, diadakan referendum di wilayah tersebut yang akan memilih empat opsi yakni (i) opsi untuk memiliki status yang lebih erat dengan Belanda; (ii) opsi tetap dengan *Netherlands Antilles*; (iii) otonomi sebagai negara di bawah kerajaan Belanda; dan (iv) opsi untuk merdeka. Dari referendum yang telah dilakukan tersebut, wilayah *Curaçao* dan *Sint Marteen* memutuskan untuk menjadi negara di bawah naungan Kerajaan Belanda, sementara *Bonaire*, *Sint Eustasius* dan *Saba* memilih opsi pertama. Hal tersebut kemudian memberikan implikasi bahwa *Curaçao* dan *Sint Marteen* bergabung dengan *Aruba* dan *Netherlands* menjadi empat negara yang berada di bawah Kerajaan Belanda (*Kingdom of Netherlands*)²⁴³ sementara *Bonaire*, *Sint Eustasius* dan *Saba* memperoleh status ‘badan publik’

²⁴³ Hal ini kemudian diatur di dalam *Kingdom act amending the Charter for the Kingdom of the Netherlands with regard to the dissolution of the Netherlands Antilles* yang ditandatangani oleh ketiga negara yang sebelumnya menyepakati *Charter for the Kingdom of Netherlands*. Aturan ini disepakati pada 9 Oktober 2010 dan berlaku pada tanggal 10 Oktober 2010.

yang diatur dalam *31954: Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)* atau Aturan nomor 31954 tentang Badan Publik *Bonaire, Sint Eustatius dan Saba*. Sejak 10 Oktober tahun 2010, *Netherlands Antilles* resmi membubarkan diri.

Meskipun *Netherlands Antilles* telah membubarkan diri, namun Kerajaan Belanda tetap memiliki kedaulatan terhadap masing-masing wilayah. Terhadap *Curaçao* dan *Sint Marteen*, kerajaan Belanda tetap memiliki kedaulatan terhadap urusan-urusan sebagaimana yang diatur di dalam *Charter for the Kingdom of Netherlands* yang juga berlaku terhadap *Aruba* dan *Netherlands*. Sementara *Bonaire, Sint Eustatius dan Saba* tidak menjadi suatu wilayah yang otonom dari Belanda, melainkan menjadi wilayah khusus yang memiliki kedudukan sama dengan wilayah Belanda di benua Eropa namun berkedudukan di luar negeri sebagai suatu *overseas territory*.

PBB telah mengeluarkan *Netherlands Antilles* dari daftar *non-self governing territories* sejak disepakatinya *Charter for the Kingdom of Netherlands*. Hal ini berarti bahwa tidak ada persoalan terhadap kedaulatan Belanda atas wilayah *Netherlands Antilles*. Meskipun setelah terjadinya pembubaran *Netherlands Antilles* kedaulatan Belanda terhadap wilayah tersebut tetap diakui. Hal tersebut didukung dengan adanya referendum yang telah dilakukan demi memenuhi hak menentukan nasib sendiri (*right of self determination*) dari masing-masing wilayah *Netherlands Antilles*.

Adanya wilayah yang tidak berada di benua Eropa namun menjadi bagian dari wilayah Belanda juga diakui oleh Uni Eropa sebagai suatu subjek hukum internasional. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya wilayah *Netherlands Antilles* sebagai wilayah yang termasuk di dalam *overseas countries and territories* (OCTs) Uni Eropa sebagaimana diatur di dalam pasal 198 TFEU. Di dalam Traktat Lisbon, pada Annex II dari TFEU, masih disebutkan istilah *Netherlands Antilles*. Hal ini

karena Traktat Lisbon disepakati pada 13 Desember 2007 sementara *Netherlands Antilles* resmi membubarkan diri pada 10 Oktober 2010. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah pengaturan hubungan antara Uni Eropa dengan wilayah-wilayah bekas *Netherlands Antilles*.

4.4 Hubungan Uni Eropa dengan OCTs sebagai bentuk pengakuan terhadap wilayah suatu negara di luar negeri

Dari penjelasan mengenai *overseas countries and territories* (OCTs) yang dikemukakan di atas, ditemukan sejumlah fakta terkait dengan status dari OCTs tersebut. OCTs yang merupakan wilayah dari Perancis ternyata menyanggah sejumlah status yang berbeda-beda. Status yang dimiliki tersebut ternyata tidak menghilangkan kedaulatan dari Perancis terhadap wilayah-wilayah tersebut. Seperti *New Caledonia* yang berdasarkan *Nouméa Accord* akan diserahkan kedaulatan penuh layaknya sebuah negara, tetapi sampai pada waktu yang ditentukan masih berada di bawah kekuasaan Perancis. Begitu juga dengan wilayah lainnya seperti *French Polynesia* yang meskipun sudah diberikan kewenangan eksekutif yang cukup besar, tetapi pemerintahan Perancis tetap memiliki kedaulatan di bidang-bidang tertentu seperti pertahanan dan hubungan luar negeri.

Wilayah dari Belanda yang termasuk dalam OCTs dari Uni Eropa ternyata memiliki perbedaan status dengan OCTs yang termasuk wilayah Perancis. Jika OCTs yang merupakan wilayah dari Perancis merupakan wilayah-wilayah yang menyanggah status sebagai *overseas territory*, maka OCTs yang merupakan wilayah dari Belanda merupakan suatu *country* di bawah kerajaan Belanda. Hal ini sebagaimana *Aruba* dan *Netherlands Antilles* yang merupakan OCTs yang diakui oleh Uni Eropa, di dalam *Charter for the Kingdom of Netherlands* diakui sebagai suatu *country* di bawah *Kingdom of Netherlands*.

Aturan mengenai *Overseas Countries and Territories* di dalam Traktat Lisbon menunjukkan bahwa adanya pengakuan mengenai wilayah suatu negara di luar negeri. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah yang berada di bawah penguasaan dari suatu negara. Penguasaan terhadap wilayah

Universitas Indonesia

yang berada di luar negeri mengakibatkan suatu negara memiliki kedaulatan atas wilayah-wilayah tersebut. Adanya kedaulatan tersebut mengakibatkan bahwa wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah dari suatu negara yang menguasainya menurut hukum internasional.

Negara Perancis dan Belanda merupakan contoh dari negara yang menguasai wilayah di luar negeri. bagi negara Perancis, wilayah-wilayah yang terdapat di luar negeri tersebut menyandang status sebagai wilayah yang diberikan otonomi khusus untuk mengatur urusan-urusan tertentu di wilayah tersebut. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa Perancis tidak lagi memiliki kedaulatan di wilayah tersebut. Adanya kedaulatan dari negara Perancis di wilayah tersebut ditunjukkan dengan adanya wakil dari pemerintah pusat Perancis di masing-masing wilayah tersebut yang mengurus urusan yang tidak diberikan otonomi terhadapnya. Terdapat sedikit perbedaan antara Perancis yang memiliki bentuk negara republik dengan Belanda yang memiliki bentuk negara monarki. Wilayah-wilayah yang merupakan OCTs Uni Eropa dari Belanda merupakan negara-negara (*constituent countries*) yang bersama-sama menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Pengaturan terhadap wilayah tersebut secara keseluruhan diatur dalam *Charter for the Kingdom of Netherlands* dengan tidak mengatur secara spesifik dalam undang-undang tertentu hubungan dengan masing-masing negara. Karena Perancis dan Belanda merupakan anggota dari Uni Eropa, maka Uni Eropa pun kemudian menjalin hubungan dengan wilayah-wilayah tersebut sebagaimana yang diatur di dalam pasal 198 TFEU. Adanya hubungan antara Uni Eropa dengan OCTs menunjukkan bahwa diakuiinya wilayah-wilayah dari negara anggotanya (Perancis dan Belanda) yang berada di luar negeri.

Hubungan antara Uni Eropa dengan wilayah-wilayah tersebut sebagaimana yang dinyatakan di dalam paragraf kedua dari Pasal 198 TFEU adalah untuk memajukan perekonomian dan perkembangan sosial dari wilayah-wilayah tersebut serta mengupayakan hubungan ekonomi yang kuat antara wilayah tersebut dengan negara-negara anggota Uni Eropa secara keseluruhan. Disamping itu, adanya hubungan antara Uni Eropa dengan wilayah-wilayah tersebut bertujuan untuk mengusahakan kepentingan dan

kebutuhan kesejahteraan dari OCTs demi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan keinginan dari masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Pengaturan mengenai rezim asosiasi antara Uni Eropa dengan OCTs saat ini diatur dengan *Council Decision 2001/822/EC*. *Council Decision* ini merupakan *implementing regulation* dari pasal 182 *Treaty establishing the European Community* yang saat ini menjadi bunyi pasal 198 *Treaty on the Functioning of European Union* dalam Traktat Lisbon. *Council Decision* tersebut mengatur secara teknis pelaksanaan hubungan antara Uni Eropa dengan masing-masing wilayah *overseas countries and territories* (OCTs) tersebut. Dengan dinyatakannya hubungan antara Uni Eropa dengan wilayah-wilayah negara anggota di luar negeri (yang disebut dengan istilah *overseas countries and territories*) di dalam TFEU sebagai bagian dari Traktat Lisbon, serta adanya pengaturan mengenai hubungan tersebut di dalam *Council Decision 2001/822/EC* sebagai *implementing regulation* dari Traktat Lisbon, menunjukkan diakuinya keberadaan wilayah suatu negara di luar negeri menurut hukum internasional.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, penguasaan terhadap suatu wilayah (*territory*) dilakukan berdasar prinsip Efektivitas (*Effectiveness*) dan prinsip *Uti Possidetis*.

Persoalan wilayah merupakan salahsatu unsur fundamental di dalam hukum internasional. Hal tersebut karena wilayah merupakan deskripsi yang tegas tentang di mana dimulai dan berakhirnya kekuasaan suatu negara. Adanya kekuasaan suatu negara didasarkan pada ketentuan yang jelas tentang wilayah mana di permukaan bumi ini yang dikuasai oleh suatu negara sehingga dapat melaksanakan kekuasaannya sebagai suatu negara dan mempertahankan kekuasaan tersebut terhadap negara-negara lain.

Keberadaan unsur wilayah dari suatu negara dapat terjadi dengan berbagai cara. Jika mengacu pada teori terjadinya negara, maka unsur wilayah hadir seiring dengan berkembangnya kelompok *Gemeinschaft* (orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan, nasib dan kesamaan budaya) yang kemudian mengadakan kepemilikan bersama terhadap tanah. Jika melihat kepada sejarah Yunani kuno, unsur wilayah berkembang seiring dengan perubahan bentuk negara dari *polis* hingga menjadi suatu *civitas* dan menjadi negara.

Penguasaan terhadap suatu wilayah di era modern didasarkan pada dua prinsip, yakni prinsip Efektivitas (*Effectiveness*) dan prinsip *Uti Possidetis*. Prinsip Efektivitas sebagaimana yang dikemukakan Hans Kelsen adalah penguasaan dari suatu negara terhadap suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Prinsip *Uti Possidetis* berarti bahwa batas-batas wilayah suatu negara, kecuali

diperjanjikan, akan mengikuti batas wilayah negara yang mendudukinya. Sementara cara-cara penguasaan terhadap suatu wilayah dilakukan dengan cara *occupation* (pendudukan), *conquest* (penaklukan) atau *annexation* (aneksasi), *prescription* (keputusan atau kesepakatan) dan *cessie* (penyerahan).

Kedua, Territorial Sovereignty (Kedaulatan atas Wilayah) suatu negara terhadap wilayah yang berada di luar negeri diakui di dalam hukum Internasional. Kedaulatan merupakan konstruksi yuridis dari kekuasaan. Adanya kedaulatan atas wilayah berarti suatu wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan dari suatu negara. Adanya kedaulatan dari suatu negara terhadap wilayah yang berada di luar negeri tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa wilayah-wilayah tersebut menjadi daerah jajahan dari negara yang saat ini menguasainya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang lahir dengan semangat dekolonisasi memunculkan konsep *Non-Self Governing Territories* di dalam Piagam PBB. Hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan dilaksanakan oleh *Special Committee on Decolonization*. Hal ini mengharuskan negara-negara yang menguasai wilayah di luar negeri untuk mengusahakan semaksimal mungkin terbentuknya suatu pemerintah yang mandiri di wilayah-wilayah tersebut hingga akhirnya dapat melepaskan diri dan menjadi suatu pemerintahan yang berdaulat. Pelaksanaan ketentuan tersebut bagaimanapun didasarkan atas adanya hak menentukan nasib sendiri (*right of self determination*) bagi wilayah-wilayah tersebut. Konsep inilah yang kemudian mengakibatkan penguasaan oleh suatu negara terhadap wilayah yang berada di luar negeri masih diakui di dalam hukum internasional.

Ketiga, Pasal 198 TFEU merupakan dasar hubungan antara Uni Eropa dengan OCTs dari Perancis dan Belanda sebagai bentuk pengakuan terhadap wilayah suatu negara yang berada di luar negeri. Sejumlah negara-negara anggota Uni Eropa menguasai wilayah yang terletak beribu-ribu kilometer jauhnya dari Brussels. Penguasaan terhadap wilayah tersebut termasuk di

dalam *Non-Self Governing Territories* sebagaimana yang dikemukakan oleh PBB. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Perancis dan Belanda.

Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional yang merupakan subjek hukum internasional mengakui keberadaan wilayah-wilayah dari suatu negara yang berada di luar negeri tersebut. Hal tersebut ditegaskan dengan di dalam Traktat Lisbon yang merupakan suatu *constitutional treaty* bagi Uni Eropa saat ini. Di dalam *Treaty on the Functioning of European Union* (TFEU) yang merupakan bagian dari Traktat Lisbon terdapat pengaturan mengenai *Association of the Overseas Countries and Territories*.

Wilayah-wilayah yang diakui di dalam *Traktat Lisbon* tersebut diantaranya adalah *New Caledonia and Dependencies, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Wallis and Futuna Islands, Mayotte, Saint Pierre and Miquelon* yang merupakan wilayah di bawah kekuasaan Perancis serta *Aruba dan Netherlands Antilles* yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Masing-masing wilayah tersebut ternyata memiliki hubungan yang berbeda-beda dengan negara yang menguasainya. Pada dasarnya, masing-masing wilayah telah memiliki suatu pemerintah sendiri yang otonom. Namun demikian, negara yang menguasainya masih memiliki kedaulatan terhadap kebijakan tertentu yang diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 198 dari TFEU tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa sepakat untuk menjalin hubungan dengan wilayah-wilayah yang kemudian disebut sebagai *Overseas Countries and Territories* (OCTs). Adanya hubungan yang terbentuk antara Uni Eropa dengan OCTs menunjukkan bahwa Uni Eropa sebagai suatu subjek hukum internasional mengakui keberadaan wilayah suatu negara di luar negeri dan menyatakannya di dalam Traktat Lisbon sebagai sumber hukum internasional. elaksanaan dari pasal 198 TFEU tersebut dituangkan dalam keputusan *law making institution* dari Uni Eropa yakni *Council of European Union* dengan *Council Decision 2001/822/EC*. *Council Decision* ini merupakan *implementing regulation* yang mengatur secara teknis hubungan antara Uni Eropa dengan wilayah OCTs.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasjid, Priyatna. *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*. Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1989.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Amerasinghe, Chittharanjan Félix. *Principles of the Institutional Law of International Organization*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Borchardt, Klaus-Dieter. *L'ABC du Droit Communautaire*. Luxembourg: Commission Europeene, 2000.
- Brownlie, Ian. *Principle of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. ed.14*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Collins, Lawrence. *European Community Law in the United Kingdom*. London: Biddles Ltd, 1990.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. USA: Thomson West Publishings, 2004.
- Habermas, J. *The Divided West*. Cambridge: Polity, 2006.
- Harris, D.J. *Cases and Materials, 3rd ed*. London: Sweet and Maxwell, 1991.
- Jasentuliyana, Nandasiri. (ed). *Perspective on International Law*. London : Kluwer Law International Sterling House, 1995.
- Jones, Alistair. *A Glossary of the European Union*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008.
- Kelsen, Hans. *Principle of International Law*. New York: Rinehart &Co., 1956.
- Kranenburg, R. dan B. Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum. ed.11*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional. cet.1*. Bandung: PT. Alumni, 2003.

- Malanczuk, Peter. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. London: Routledge, 1997.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985.
- Morgenstern, Felice. *Legal Problems of International Organizations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Nasroen, M. *Asal Mula Negara*. Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Noussis, Nicholas. *Access to European Union – Institutions and Policies*. Brussels: EDIR-EUR, 1995.
- O'Connel, D.P. *International Law*. London: Stevens and Sons, 1970.
- Oppenheim, Lassa F dan Hersch Lauterpacht. *International Law : Peace Vol. 1*. London : Longmans, Green, 1967.
- Sabon, Max Boli. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gramedia Utama, 1992.
- Samidjo. *Ilmu Negara. ed.4*. Bandung: CV. Armico, 1986.
- Sands, Philippe dan Pierre Klein, *Bowett's Law of International Institutions*. London: Sweet and Maxwell Ltd, 2001.
- Schermers, Henry G. *International Institutional Law. 3rd ed*. Illinois : Martinus Nijhoff Publishers, 1995.
- Schmitt, Carl. *Verfassungslehre. 8th ed*. Berlin : Duncker & Humblot, 1993.
- Shaw, Josephine. *Law of the European Union*. USA :Palgrave Macmillan, 2000.
- Shaw, Malcolm N. *International Law. 5th ed*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Soehini. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. cet.3*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Starke, J.G. *An Introduction to International Law. 4th ed*. London: Butterworth & Co.Ltd, 1958.

- Suwardi, Sri Setianingsih. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia.
- Syahmin A.K. *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. *Ilmu Negara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Wahjono, Padmo. *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara. ed.1*. Jakarta: Indo-Hill-Co, 1996.
- Wahjono, Padmo. *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1966.
- Walker, N. *Late Sovereignty in the European Union, Sovereignty in Transition*, Oxford: Hart, 2003.
- Wallace, Rebecca M.M. *International Law*. London: Sweet&Maxwell, 1992.
- Weiler, J.H.H. *The Constitution for Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Artikel, Jurnal, dan Majalah

- Avbelj, Matej. "Theory of European Union." *European Law Review* 2011, (2012)
- Beaud, O. "Fédéralisme et souveraineté. Notes pour une théorie constitutionnelle de la Fédération." (1998)
- Broderic. "Associated Statehood- a New Form Decolonisation". *International and Comparative Law Quarterly*. (Volume 17, 1968).
- Curtis, Michael. "International Law and the Territories." *Harvard International Law Journal*. (Nomor 32 Tahun 1991).
- Division for Social Policy and Development, Department of Economic and Social Affairs, United Nations. "The Concept of Indigenous Peoples". Workshop on Data Collection and Disaggregation For Indigenous Peoples, New York, 19-21 Januari 2004
- Fern, Sean. "Tokdo or Takeshima? The International Law of Territorial Acquisition in the Japan-Korea Island Dispute." *Stanford Journal of East Asian Affairs*. (Volume 5, Nomor 1, Winter 2005).
- Haftel, Yoram Z. dan Alexander Thompson. "The Independence of International Organizations: Concept and Applications." *The Journal of Conflict Resolution*, (Vol. 50, No. 2 April, 2006).

Universitas Indonesia

K. Lenaerts, "Constitutionalism and the Many Faces of Federalism" *American Journal of Comparative Law* (Nomor 38 Tahun 1990).

Kochenov, Dimitry. "Substantive and Procedural Issues of Application of European Law in the Overseas Possessions of the Member States of the European Union". *Michigan State Journal of International Law*. (Nomor 17 Tahun 2008).

_____. "The Application Of Eu Law In The Eu's Overseas Regions, Countries, And Territories After The Entry Into Force Of The Treaty Of Lisbon." *Michigan State Journal of International Law*. (Nomor 20 Tahun 2012).

Kurpas, Sebastian. *et al.* "The Treaty of Lison : Implementing Institutional Innovations". *Joint Study CEPS, EGMONT and EPC*. November 2007.

Marrani, David. "Principle of indivisibility of the French Republic and the People's Right to Self-Determination: The 'New Caledonia Test'." *Journal of Academic Legal Studies* (Nomor 2 Tahun 2006).

Marsh, Norman S. "Some Reflections on Legal Integration in Europe." *The International and Comparative Law Quarterly*, (Volume 12, Nomor 4, Oktober, 1963).

Stein, E. "Toward Supremacy of Treaty Constitution by Judicial Fiat: on the Margin of the Costa Case", *Michigan Law Review* (No. 63 Tahun 1964).

_____. *Lawyers*, "Judges and the Making of Transnational Constitution." *American Journal of International Law* (Nomor 1 Tahun 1981).

Tony Angelo. "French Polynesia / France". *Kreddha Autonomy Mapping Project: a Project of the Kreddha Research and Analysis Department*. December 2007.

Weiler, J.H.H. "The Transformation of Europe." *Yale Law Journal* (No. 2407, Tahun 1991).

Putusan Pengadilan

European Court of Justice. *NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration Case (26/62) E.C.R.* 5 February 1963.

_____. *Flaminio Costa v E.N.E.L. (6/64) E.C.R.* 15 Juli 1964.

_____. *Parti écologiste "Les Verts" v European Parliament. (294/83) E.C.R. 25 Februari 1988.*

Sumber Internet dan Lain-Lain

Aruba Foreign Affairs. "Charter for the Kingdom of Netherlands." <http://www.arubaforeignaffairs.com/afa/readBlob.do?id=704> diunduh pada 6 Mei 2012 pukul. 18.30 WIB.

Aruba Vacation. "Aruba". <http://www.aruba-travelguide.com/about/graphics/map-caribbean-aruba.jpg>. diunduh pada hari Minggu 3 Juni 2012 pukul 18.10 WIB.

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trades. "French Polynesia country". http://www.dfat.gov.au/geo/french_polynesia/polynesia_brief.html diunduh pada 20 Mei 2012 pukul. 15.20 WIB.

BBC News. "French Polynesia Profile." <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16492623> diunduh pada 20 Mei 2012 pukul 15.18 WIB.

BBC News. "Status change means Dutch Antilles no longer exists." <http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-11511355> diunduh pada 6 Mei 2012 pukul 18.26 WIB.

Caribseek Maps. Aruba. <http://www.maps.caribseek.com/images/caribbean-maps/aruba-map.gif>. diunduh pada Minggu, 3 Juni 2012 pukul 19.01 WIB.

Central Intelligence Agency. "Wallis and Futuna Islands". <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wf.html>. diunduh pada hari Jumat, 1 Juni 2012 pukul 15.45 WIB.

Encyclopedia Britannica. "Mayotte". <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/371085/Mayotte>. diunduh pada Sabtu, 2 Juni 2012 pukul 20.50 WIB.

Encyclopedia Britannica. "New Caledonia Map". <http://media1.web.britannica.com/eb-media/93/3293-004-8AA31F9B.gif>. diunduh pada hari Minggu 20 Mei 2012 pukul. 11.57 WIB.

Ensiklopedi Britannica. "French Polynesia". <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/219285/French-Polynesia/54080/History>. diunduh pada Minggu, 20 Mei 2012 pukul 18.25 WIB.

Europa. Summaries of EU Legislation. "Overseas Countries and Territories". http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/index_en.htm. diunduh pada tanggal 8 Maret 2012, pukul 16.03 WIB.

Universitas Indonesia

European Union, “Community Acquis”. http://europa.eu/schadplus/glossary/community_acquis_en.htm. diunduh pada 12 Maret 2012 pukul 17.05 WIB.

EuroVoc. Multilingual Thesaurus of the European Union. “Community Acquis”. <http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=request&uri=http://eurovoc.europa.eu/210682>. diunduh pada 12 Maret 2012 pukul 13.52 WIB.

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Saint Pierre and Miquelon <http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-departements.asp?annee=2009>. diunduh pada minggu 3 Juni 2012 pukul 12.17 WIB.

Institute De La Statistique Et Des Etudes Economiques. “Nouvelle Caledonie.” <http://www.isee.nc/population/telecharxls/pop-com-56-09.xls>. diunduh Minggu 20 Mei 2012.

International Court of Justice. “Summary of the Advisory Opinion of 16 October 1975 on Western Sahara Case”. <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=323&code=sa&p1=3&p2=4&case=61&k=69&p3=5>. diunduh pada Jumat, 23 Maret 2012 pukul 14.14 WIB.

Legifrance. “Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises.” <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019463499>. diunduh pada 21 Mei 2012 pukul 19.43 WIB.

Legifrance. “Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.” <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000435515>. diunduh pada 20 Mei 2012, pukul 15.40 WIB.

Ministere Des Outre-Mer, Wallis et Futuna. <http://www.outre-mer.gouv.fr/IMG/pdf/wallis.pdf>. pada hari Kamis, 31 Mei 2012, pukul 15.49 WIB.

Ministere Des Outre-Mer. “Polynésie Française”. <http://www.outre-mer.gouv.fr/IMG/pdf/polynesie.pdf>. pada Minggu 20 Mei 2012 pukul. 16.55 WIB.

Ministere Des Outre-Mer. “Saint Pierre.” <http://www.outre-mer.gouv.fr/IMG/pdf/saint-pierre.pdf>. pada Minggu, 3 Juni 2012 pukul 12.30 WIB.

Ministere Des Outre-Mer. “Terres Australes et Antarctiques Françaises.” <http://www.outre-mer.gouv.fr/?-terres-australes-et-antarctiques-francaises.html> diunduh pada 21 Mei 2012 pukul 19.40 WIB.

- Ministere Des Outre-Mer. Mayotte. “Mayotte.” <http://www.outre-mer.gouv.fr/IMG/pdf/mayotte.pdf>. pada Sabtu, 2 Juni 2012 pukul 16.44 WIB.
- Mr.Bricolage. “Mayotte”, <http://blog.mr-bricolage.com/wp-content/uploads/2012/02/mayotte-afrique-madagascar-la-reunion-ile-maurice.png> pada Sabtu, 2 Juni 2012 pukul 16.00 WIB.
- Operation World. “French Polynesia”. <http://www.operationworld.org/files/ow/maps/iginset/frep-LMAP-md.png>. pada Minggu 20 Mei 2012 pukul 18.52 WIB.
- Operation World. “Wallis and Futuna Islands”. <http://www.operationworld.org/files/ow/maps/iginset/wall-LMAP-md.png>. pada hari Kamis, 31 Mei 2012 pukul 16.00 WIB.
- Operation World. “Saint Pierre and Miquelon.” <http://www.operationworld.org/files/ow/maps/iginset/saip-LMAP-md.png>. pada Minggu, 3 Juni 2012 pukul 12.15 WIB.
- Reference.com. <http://www.reference.com/browse/unitary+state>. diunduh pada Senin, 19 Maret 2012 pukul 19.00 WIB.
- South Pacific Expert.”New Caledonia Map”. <http://www.sunspotsintl.com/images/pacificmap.gif>. pada hari Minggu 20 Mei 2012 pukul. 11.56 WIB.
- The Canadian Encyclopedia. “Saint Pierre-and-Miquelon.” <http://www.the-canadianencyclopedia.com/articles/saintpierre-and-miquelon> diunduh pada 6 Maret 2012 pukul 14.26 WIB.
- The French National Assembly. “Constitution of October 4, 1958.” <http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp> diunduh pada 21 Mei 2012 pukul 13.55 WIB.
- The United Nations and Decolonization, Trust and Non-Self-Governing Territories (1945-1999). <http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgov.shtml> .diunduh pada Kamis, 3 Mei 2012 pukul.14.30 WIB.
- The World Bank. “World Development Indicators, French Polynesia”. <http://data.worldbank.org/country/french-polynesia>. diunduh pada Minggu 20 Mei 2012 pukul 18.39 WIB.
- Trésor de la langue française au Québec. “Wallis-et-Futuna.” <http://www.tlfg.ulaval.ca/axl/pacifique/wallis-futuna.htm>. pada hari Sabtu, 2 Juni 2012 pukul 11.02 WIB.

UN Data. "United Nations Statistic Division: Aruba." <http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Aruba>. diunduh pada hari Minggu, 3 Juni 2012 pukul 19.16.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. "Mayotte." <http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/p2k0data.asp> diunduh pada Sabtu, 2 Juni 2012 pukul 16.21 WIB.

World Atlas Including Geography Facts, Maps, Flags. "Netherlands Antilles." <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/caribb/annewz.gif> pada hari Selasa, 5 Juni 2012 pukul 21.48 WIB.

Worldstat Info. "Population of Netherlands Antilles." http://en.worldstat.info/Central_America_and_the_Caribbean/Netherlands_Antilles. diunduh pada Selasa 5 Juni 2012 pukul 22.07 WIB.

Daftar Perjanjian, Konvensi Internasional, dan Peraturan Perundang-Undangan Asing

Charter for The Kingdom of Netherlands.

Charter of the United Nations, 1945.

Council Decision 2001/822/EC of 27 November 2001 on the association of the overseas countries and territories with the European Community (Overseas Association Decision).

Décret du 21 novembre 1924 rattachant les îles saint-paul et amsterdam, les archipels kerguelen et crozet et la terre adélie au gouvernement général de Madagascar (Dekret 21 November 1924 tentang penyatuan pulau Saint Paul Amsterdam, kepulauan Kerguelen dan Crozet dan Adélie Land dengan pusat pemerintahan di Madagascar).

Decret n° 60-555 du 1^{er} avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France (Dekret Presiden 60-555 tanggal 1 April 1960 tentang status administratif dari wilayah yang berada di bawah Perancis).

International Conference of American States. *Convention on Rights And Duties of States*. Ditandatangani di Montevideo, Uruguay, 26 Desember 1933.

L'acte du 23 août 1892 portant prise de possession, au nom de la France, des îles Glorieuses. (Undang-Undang tahun 1892 tentang Penguasaan dari Perancis terhadap wilayah Glorioso).

Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton. (Undang-Undang Nomor 55-1052 tanggal 6 Agustus 1955 tentang status dari *French Southern Antarctic* dan Pulau *Clipperton*).

Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (Undang-Undang 61-814 tanggal 29 Juli 1961 tentang Pemberian status *overseas territory* kepada *Wallis dan Futuna Islands*).

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. (Undang-Undang Nomor 2004-192 tanggal 27 Februari 2004 tentang Status Otonomi French Polynesia).

LOI organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (Undang-Undang nomor 2007-223 tanggal 21 Februari 2007, tentang Kelembagaan dan Wilayah Luar Negeri).

Noumea Accord. Ditandatangani pada tanggal 5 May 1998 oleh Pemerintah Perancis, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste dan the Rassemblement Pour la Calédonie dans la République (RPCR).

The French National Assembly. *Constitution of October 4, 1958.* (Konstitusi Perancis tanggal 4 Oktober 1958).

Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community. Ditandatangani 13 Desember 2007 dan mulai berlaku tanggal 1 Desember 2009.

Treaty on European Union 1992 (Treaty of Maastrich). Ditandatangani pada tanggal 2 Februari 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1993.

Treaty on the Functioning of the European Union 2007. Treaty of Rome 1957 amended by Treaty of Lisbon 2007. Ditandatangani 13 Desember 2007 dan mulai berlaku tanggal 1 Desember 2009.

United Nations. General Assembly Resolution 2625. *Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations.* 24 October 1970.

_____. *International Convention on Civil and Political Rights.* Ditandatangani 16 Desember 1966 dan mulai berlaku efektif 23 Maret 1976.

_____. *International Convention on Economic, Social and Cultural Rights*. Ditandatangani 16 Desember 1966 dan mulai berlaku efektif 3 Januari 1976.

_____. *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*. Ditandatangani 23 Mei 1969 dan mulai berlaku tanggal 27 Januari 1980.



**Wilayah-Wilayah Trust Territories and Non-Self Governing Territories
yang diakui berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB**

Administering Power/ Authority	Territory	Status	Year
Australia	Cocos (Keeling) Islands	Change in Status	1984
	Papua	Independence as Papua New Guinea	1975
	Nauru Trust Territory	Independence	1968
	New Guinea Trust Territory	Independence as Papua New Guinea	1975
Belgium	Belgian Congo	Independence as Congo Leopoldville, then Zaire Now Democratic Republic of the Congo	1960
	Ruanda-Urundi Trust Territory	Independence as Burundi	1962
		Independence as Rwanda	1962
Denmark	Greenland	Change in Status	1954
France	French Equatorial Africa	Independence as Chad	1960
		Independence as Gabon	1960
	(Middle Congo)	Independence as Congo (Brazzaville) Now Republic of the	1960

		Congo	
	(Ubangi Shari)	Independence as Central African Republic	1960
	French Establishments in India	Change in Status	1947
	French Establishments in Oceania	Change in Status	1947
	French Guiana	Change in Status	1947
	French Somaliland	Independence as Djibouti	1977
	French West Africa	Independence as Dahomey Now Benin	1960
	(French Guinea)	Independence as Guinea	1958
	(French Sudan)	Independence as Mali	1960
		Independence as Ivory Coast	1960
		Independence as Mauritania	1960
	(Niger Colony)	Independence as Niger	1960
		Independence as Senegal	1960
		Independence as Upper Volta	1960

		Now Burkina-Faso	
	Guadeloupe and Dependencies	Change in Status	1947
	Indo-China	Independence as Cambodia	1953
		Independence as Laos	1949
		Independence as Viet Nam	1945
	Madagascar and Dependencies	Independence as Madagascar	1960
		Independence as Comoros	1975
	Martinique	Change in Status	1947
	Morocco	Independence	1956
	New Caledonia ¹ and Dependencies	Change in Status	1947
	New Hebrides (Under Anglo-French Condominium)	Independence as Vanuatu	1980
	Reunion	Change in Status	1947
	St. Pierre and	Change in Status	1947

¹ Pada Tahun 1986, Majelis Umum PBB menyatakan New Caledonia sebagai *Non-self Governing Territories*.

	Miquelon		
	Tunisia	Independence	1956
	Cameroons Trust Territory	Independence as Cameroon	1960
	French Togoland Trust Territory	Independence as Togo	1960
Italy	Somaliland Trust Territory	Independence as Somalia (joined with British Somaliland)	1960
Netherlands	Netherlands Indies	Independence as Indonesia	1949
	Netherlands New Guinea	Joined with Indonesia as Irian Jaya	1963
	Netherlands Antilles	Change in Status	1951
	Surinam	Change in Status	1951
		Independence as Suriname	1975
New Zealand	Cook Islands	Change in Status	1965
	Niue Island	Change in Status	1974
	Western Samoa Trust Territory	Independence as Samoa	1962
Portugal	Angola, including the enclave of	Independence	1975

	Cabinda		
	Cape Verde Archipelago	Independence as Cape Verde	1975
	Goa and Dependencies	Change in Status	1961
	Portuguese Guinea	Independence as Guinea Bissau	1974
	Macau and Dependencies	Change in Status	1972
	Mozambique	Independence	1975
	Sao Joao Batista de Ajuda	Change in Status	1961
	Sao Tome and Principe	Independence	1975
	East Timor ²	Independence as Timor Leste	2002
South Africa	South West Africa	General Assembly terminated South Africa's mandate	1966
		Independence as Namibia	1990
Spain	Fernando Póo and Rí	Independence as	1968

² *East Timor* atau Timor Timur pada awalnya merupakan wilayah yang berada di bawah Pemerintahan negara Portugal. Kemudian pada tahun 1975 sampai 1999 East Timor berada di bawah pemerintahan negara Indonesia. *East Timor* pada akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1999 dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2002 sebagai *Timor Leste*.

	Muni	Equatorial Guinea	
	Ifni	Change in Status	1969
United Kingdom	Aden Colony and Protectorate	Independence as South Yemen	1967
	Bahamas	Independence	1973
	Barbados	Independence	1966
	Basutoland	Independence as Lesotho	1966
	Bechuanaland Protectorate	Independence as Botswana	1966
	British Guiana	Independence as Guyana	1966
	British Honduras	Independence as Belize	1981
	British Somaliland	Independence as Somalia (joined with Italian Somaliland)	1960
	Brunei	Independence Now Brunei Darussalam	1984
	Cyprus	Independence	1960
	Fiji	Independence	1970
	Gambia	Independence as The Gambia	1965
Gilbert and Ellice	Independence as Kiribati	1979	

	Islands Colony	Independence as Tuvalu	1978
	Gold Coast Colony and Protectorate	Independence as Ghana	1957
	Hong Kong	Change in Status	1972
	Jamaica	Independence	1962
	Kenya	Independence	1963
	Leeward Islands		
	(Antigua)	Independence as Antigua and Barbuda	1981
	(St. Kitts- Nevis- Anguilla)	Independence as St. Kitts and Nevis (separated from Anguilla)	1983
	Malayan Union	Independence as Federation ³ of Malaya Now Malaysia	1957
	Malta	Independence	1964
	Mauritius	Independence	1968
	Nigeria	Independence	1960
	North Borneo ⁴	Change in status	1963

³Pada Tahun 1963, Federation of Malaya berganti menjadi Malaysia seiring dengan bertambahnya jumlah negara bagian yakni Singapore, North Borneo (Sabah) dan Serawak. Singapore sendiri pada akhirnya merdeka pada tahun 1965.

	Northern Rhodesia	Independence as Zambia	1964
	Nyasaland	Independence as Malawi	1964
	Sarawak ³	Change in status	1963
	Seychelles	Independence	1976
	Sierra Leone	Independence	1961
	Singapore ³	Independence	1965
	Solomon Islands	Independence	1978
	Southern Rhodesia	Independence as Zimbabwe	1980
	Swaziland	Independence	1968
	Trinidad and Tobago	Independence	1962
	Uganda	Independence	1962
	Windward Islands		
	(Dominica)	Independence as Dominica	1978
	(Grenada)	Independence as Grenada	1974
	(St. Lucia)	Independence as St. Lucia	1979

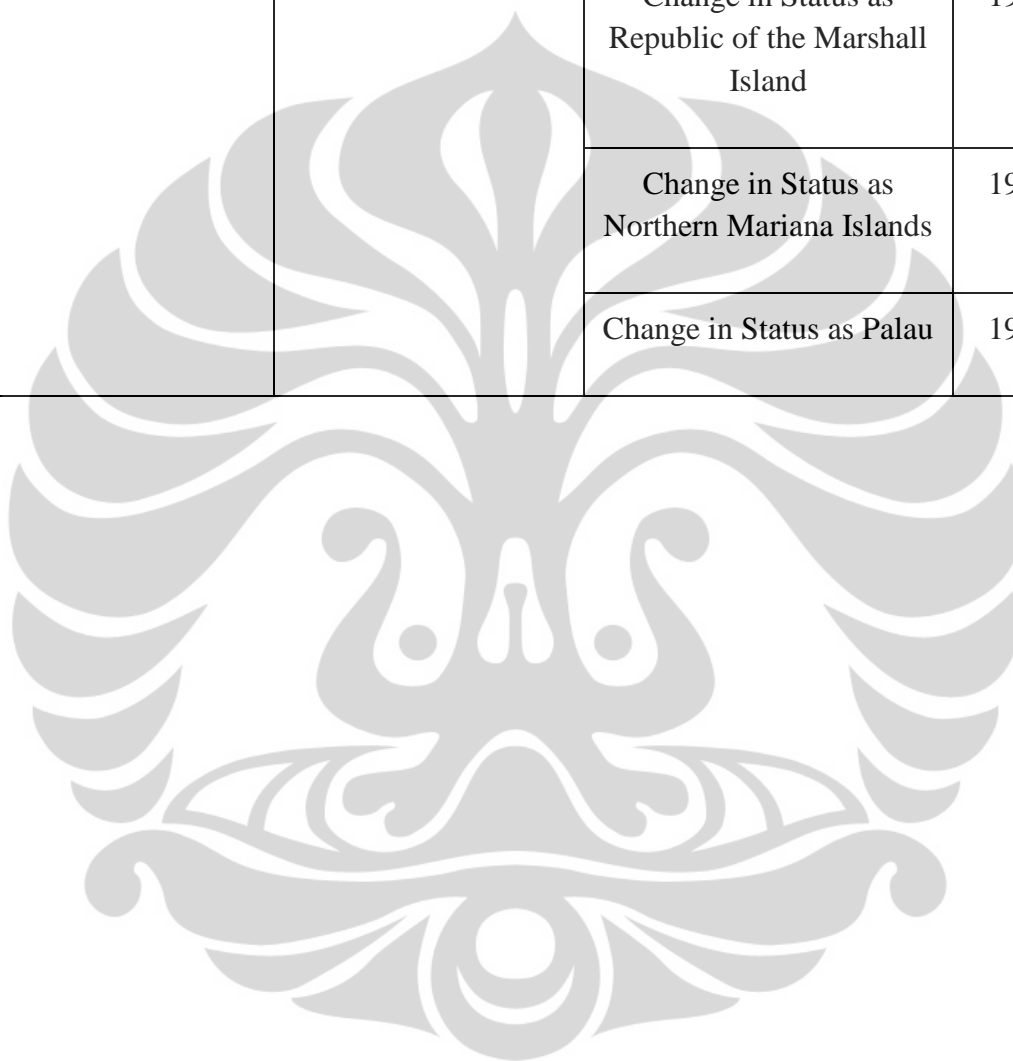
⁴ North Borneo berganti nama menjadi Sabah dan bergabung dengan Federation of Malaya yang berganti nama menjadi Malaysia.

	(St. Vincent)	Independence as St. Vincent and the Grenadines	1979
	Zanzibar	Independence ⁵ as United Republic of Tanganyika and Zanzibar Now Republic of Tanzania	1963
	Cameroons Trust Territory	Northern Cameroons joined with Nigeria	1961
		Southern Cameroons joined with Cameroon	1961
	Togoland Trust Territory	Joined Gold Coast to form Ghana	1957
	Tanganyika Trust Territory	Independence ⁶ as United Republic of Tanganyika and Zanzibar after joining with Zanzibar Now Republic of Tanzania	1963
United States	Alaska	Change in Status	1959
	Hawaii	Change in Status	1959
	Panama Canal Zone	Change in Status	1947

⁵Dengan adanya ratifikasi pada tahun 1964 terhadap perjanjian tentang penyatuan dengan Tanganyika, terbentuklah Republik Tanganyika-Zanzibar yang kemudian berganti nama menjadi Republik Tanzania.

⁶Ratifikasi yang dilakukan pada tahun 1964 terhadap perjanjian penyatuan dengan Zanzibar melahirkan Republik Tanganyika-Zanzibar yang kemudian berganti nama menjadi Republik Tanzania.

	<u>Puerto Rico</u>	Change in Status	1952
	Pacific Islands Trust Territory	Change in Status as Federated Sates of Micronesia	1990
		Change in Status as Republic of the Marshall Island	1990
		Change in Status as Northern Mariana Islands	1990
		Change in Status as Palau	1994

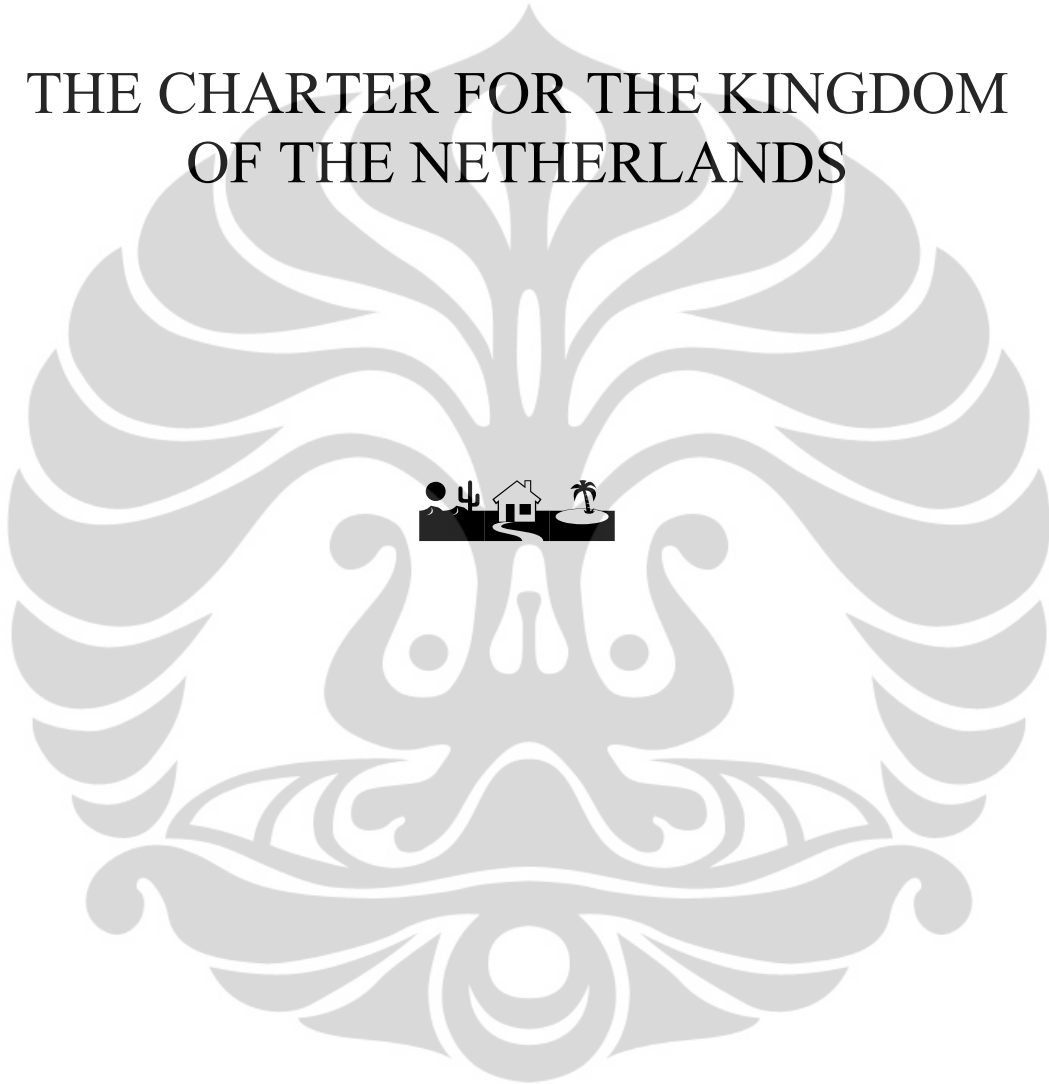


Overseas Countries and Territories Associated with the European Union

OCT	Member State	Location	Capital	Surface Area	Population
Anguilla	United Kingdom	Caribbean	The Valley	91 km ²	11.430
Aruba	Netherlands	Caribbean	Oranjestad	180km ²	90.508
Bermuda	United Kingdom	Atlantic	Hamilton	53km ²	62.059
Bonaire	Netherlands	Caribbean	Kralendijk	288km ²	15.414
British Antarctic Territory	United Kingdom	Antarctica	Rothera	1.709.400 km ²	250
British Indian Ocean Territory	United Kingdom	Indian Ocean	Diego Garcia	60km ²	4.000
British Virgin Islands	United Kingdom	Caribbean	Road Town	153km ²	27.000
Cayman Islands	United Kingdom	Caribbean	George Town	264km ²	60.456
Curacao	Netherlands	Caribbean	Willemstad	444km ²	142.180
Falkland Islands	United Kingdom	Atlantic	Stanley	12.173km ²	3.140
French Polynesia	France	Pacific Ocean	Papeete	4.167km ²	26.000
French Southern and Antarctic Territories	France	Indian Ocean, Antarctica	Port-aux-Francais	439.781 km ²	140
Greenland	Denmark	Arctic	Nuuk	2.166.086 km ²	56.452
Mayotte	France	Indian Ocean	Mamoudzou	374km ²	194.000

Montserrat	United Kingdom	Caribbean	Plymouth (Brades)	102km ²	4.655
New Caledonia and Dependencies	France	Pacific	Noumea	18.575km ²	249.000
Pitcairn	United Kingdom	Pacific	Adamstown	47km ²	50
Saba	Netherlands	Caribbean	The Bottom	13km ²	2.000
Saint-Barthelemy	France	Caribbean	Gustavia	25km ²	8.300
Saint Helena and Dependencies	United Kingdom	Atlantic	Jamestown	122km ²	4.255
Saint-Pierre-et-Miquelon	France	Atlantic	Saint-Pierre	242km ²	7.063
Sint Eustasius	Netherlands	Caribbean	Oranjestad	21km ²	3.100
Sint Maarten	Netherlands	Caribbean	Philipsburg	34km ²	71.000
South Georgia and South Sandwich Islands	United Kingdom	Atlantic	King Edward Point	3.903km ²	30
Turks and Caicos Islands	United Kingdom	West Indies	Cockburn Town	430km ²	36.605
Walls and Futuna Islands	France	Pacific	Mata-Unu	264km ²	15.289

THE CHARTER FOR THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS



Ministry of Foreign Affairs
The Hague
September 2002

THE CHARTER FOR THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Act of 28 October 1954, containing
Acceptance of a charter for the Kingdom of the Netherlands
(Bulletin of Acts and Decrees 1954, no. 503)

as last amended by Kingdom Act of 7 September 1998 (Bulletin of Acts and Decrees 1998, no. 579)

PREAMBLE

The Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba,
noting that in 1954 the Netherlands, Suriname and the Netherlands Antilles expressed freely their will to establish a new constitutional order in the Kingdom of the Netherlands, in which they will conduct their internal interests autonomously and their common interests on a basis of equality and will accord each other assistance, and resolved in consultation to adopt the Charter for the Kingdom;
noting that the ties with Suriname under the Charter were terminated as of 25 November 1975 by means of an amendment to the Charter by Kingdom Act of 22 November 1975, Bulletin of Acts and Decrees no. 617, Official Bulletin of the Netherlands Antilles no. 233;
considering that Aruba has expressed freely its will to accept the aforesaid constitutional order as a Country;
have resolved in consultation to adopt the Charter for the Kingdom as follows.

§ 1. General provisions

Article 1

The Crown of the Kingdom shall devolve by inheritance upon Her Majesty Queen Juliana, Princess of Orange-Nassau, and upon her lawful successors.

Article 2

1. The King shall reign over the Kingdom and over each of the Countries. He shall be inviolable. The Ministers shall be responsible.
2. The King shall be represented by the Governor in the Netherlands Antilles and Aruba. The powers, duties and responsibility of the Governor as representative of the Government of the Kingdom shall be determined by Kingdom Act or, as the case may be, by order in council for the Kingdom.
3. Matters pertaining to the appointment and removal of the Governor shall be determined by Kingdom Act. The appointment or removal of the Governor shall be effected by the King as Head of the Kingdom.

Article 3

1. Without prejudice to provisions elsewhere in the Charter, Kingdom affairs shall include:
 - a. maintenance of the independence and the defence of the Kingdom;
 - b. foreign relations;
 - c. Netherlands nationality;
 - d. regulation of the orders of chivalry, the flag and the coat of arms of the Kingdom;
 - e. regulation of the nationality of vessels and the standards required for the safety and navigation of seagoing vessels flying the flag of the Kingdom, with the exception of sailing ships;
 - f. supervision of the general rules governing the admission and expulsion of Netherlands nationals;
 - g. general conditions for the admission and expulsion of aliens;
 - h. extradition.
2. Other matters may be declared to be Kingdom affairs in consultation.
Article 55 shall apply *mutatis mutandis*.

Article 4

1. Royal power in Kingdom affairs shall be exercised by the King as Head of the Kingdom.
2. Legislative power in Kingdom affairs shall be exercised by the legislative bodies of the Kingdom.
Kingdom Bills shall be considered with due observance of the provisions of Articles 15 to 21 inclusive.

Article 5

1. The Monarchy and the succession to the Throne, the Organs of the Kingdom referred to in the Charter, and the exercise of royal and legislative power in Kingdom affairs shall be governed, if not provided for by the Charter, by the Constitution of the Kingdom.
2. The Constitution shall have regard to the provisions of the Charter.
3. Articles 15 to 20 inclusive shall apply to any proposal for amendment of the Constitution containing provisions concerning Kingdom affairs, as well as to the Bill stating the grounds for considering such a proposal.

§ 2. The conduct of Kingdom affairs

Article 6

1. Kingdom affairs shall be conducted in cooperation by the Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba, in accordance with the following provisions.
2. Wherever possible the Organs of the Countries shall participate in the conduct of these affairs.

Article 7

The Council of Ministers of the Kingdom shall be composed of the Ministers appointed by the King and the Ministers Plenipotentiary appointed by the Governments of the Netherlands Antilles and of Aruba.

Article 8

1. The Ministers Plenipotentiary shall act in the name of the Governments of their Countries, which shall appoint or remove them. They must be of Netherlands nationality.
2. The Government of the relevant Country shall provide for a deputy for the Minister Plenipotentiary in the event of absence. The provisions of the Charter with regard to the Minister Plenipotentiary shall apply *mutatis mutandis* to his deputy.

Article 9

1. Before assuming office the Minister Plenipotentiary shall, in the presence of the Governor, take an oath or make a promise of allegiance to the King and to the Charter. The form of the oath or promise shall be prescribed by order in council for the Kingdom.
2. A Minister Plenipotentiary who is in the Netherlands shall take the oath or make the promise in the presence of the King.

Article 10

1. The Minister Plenipotentiary shall participate in the deliberations of the Council of Ministers and of the permanent boards and special committees of the Council whenever Kingdom affairs are discussed which affect the Country in question.
2. The Governments of the Netherlands Antilles and of Aruba shall be entitled to appoint - if they see reason to do so in relation to a particular matter - a Minister, in addition to the Minister Plenipotentiary, to participate with an advisory vote in the deliberations referred to in the preceding paragraph.

Article 11

1. Proposals for the amendment of the Constitution containing provisions relating to Kingdom affairs shall affect the Netherlands Antilles and Aruba.
2. The defence of Netherlands Antillean or Aruban territory, and agreements or arrangements relating to any territory within their sphere of interest, shall be deemed to affect the Netherlands Antilles and Aruba respectively.
3. Foreign relations shall be deemed to affect the Netherlands Antilles or Aruba whenever the particular interests of the Netherlands Antilles or of Aruba are involved, or whenever arrangements are contemplated which may have significant consequences for such interests.
4. The determination of the contribution to the expenses referred to in Article 35 shall be deemed to affect the Netherlands Antilles and Aruba respectively.
5. Proposals for naturalization shall be deemed to affect the Netherlands Antilles and Aruba only if they relate to persons resident in the Country concerned.
6. The Government of the Netherlands Antilles or of Aruba may indicate Kingdom affairs which affect their respective Countries other than those mentioned in paragraphs 1 to 4.

Article 12

1. If the Minister Plenipotentiary of either the Netherlands Antilles or Aruba, indicating his reasons for expecting that a proposed instrument containing generally binding rules would be seriously detrimental to his Country, has declared that his Country could not be bound by such an instrument, the instrument may not be adopted in such a way as to apply to the Country concerned, unless such a course would be inconsistent with the Country's ties with the Kingdom.
2. If the Minister Plenipotentiary of either the Netherlands Antilles or Aruba has serious objections to the initial opinion of the Council of Ministers on the binding nature of the provision referred to in paragraph 1, or on any other matter in the consideration of which he has participated, deliberations thereon shall continue at his request, if necessary having regard to a time-limit to be determined by the Council of Ministers.
3. The deliberations referred to above shall be conducted by the Prime Minister, two Ministers, the Minister Plenipotentiary and a Minister or special representative to be designated by the Government concerned.
4. If both Ministers Plenipotentiary desire to participate in the continued deliberations, these deliberations shall be conducted by the Prime Minister, two Ministers and the two Ministers Plenipotentiary. Article 10, paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis*.
5. The Council of Ministers shall take a decision in accordance with the result of the continued deliberations. If the opportunity for continued deliberations has not been utilized within the time-limit specified, the Council of Ministers shall decide.

Article 13

1. There shall be a Council of State of the Kingdom.
2. If the Government of the Netherlands Antilles or of Aruba so desires, the King shall appoint, in agreement with the relevant Government, a member to represent the Netherlands Antilles or Aruba respectively in the Council of State.
The said member shall not be removed without prior consultation with his Government.
3. The member of the Council of State for the Netherlands Antilles or for Aruba shall participate in the Council of State's proceedings whenever the Council or a division thereof is being heard on proposed Kingdom Acts or orders in council for the Kingdom which are to apply in the Netherlands Antilles or Aruba, or on other matters which, pursuant to Article 11, affect the Netherlands Antilles or Aruba.
4. Regulations concerning the said members of the Council of State which depart from the Council of State Act may be laid down by order in council for the Kingdom.

Article 14

1. Provisions regarding Kingdom affairs shall be laid down - if the matter in question is not regulated by the Netherlands Constitution and subject to international agreements and the provisions of article 3 - by Kingdom Act or, if appropriate, by order in council for the Kingdom. Such an Act or order in council may instruct or allow other organs to lay down further rules. In the case of the countries, the appropriate organs shall be the legislatures or the governments.
2. If the regulation of a matter is not to be effected solely by Kingdom Act, it may be effected by order in council for the Kingdom.
3. Provisions concerning Kingdom affairs which do not apply in either the Netherlands Antilles or Aruba shall be effected by Act of Parliament or order in council.
4. Persons resident in the Netherlands Antilles or Aruba shall be naturalized by or pursuant to a Kingdom Act.

Article 15

1. The King shall forward Bills for Kingdom Acts, at the same time as they are introduced in the States-General, to the representative assemblies of the Netherlands Antilles and Aruba.
2. If a Bill for a Kingdom Act was initiated by the States-General, the Bill shall be forwarded by the Lower House immediately following its introduction in the Lower House.
3. The Minister Plenipotentiary of the Netherlands Antilles or Aruba shall have the power to propose that the Lower House initiate a Kingdom Bill.

Article 16

The representative assembly of the Country in which the legislation is to apply shall be empowered, before the Bill is publicly debated in the Lower House, to examine the Bill and to issue a written report thereon, if necessary within a fixed time-limit.

Article 17

1. The Minister Plenipotentiary of the Country in which the legislation is to apply shall be afforded the opportunity to attend the debates on the Bill in the States-General and to furnish such information to the Upper and Lower House as he considers desirable.
2. The representative assembly of the Country in which the legislation is to apply may decide to designate, for the purposes of the debate on a particular Bill in the States-General, one or more special delegates who shall likewise be empowered to attend the debates and furnish information.
3. The Ministers Plenipotentiary and the special delegates shall be immune from any legal proceedings in respect of anything they say in or submit in writing to the meetings of the Upper or Lower House.
4. The Ministers Plenipotentiary and the special delegates shall be empowered to propose amendments to a Bill during the proceedings in the Lower House.

Article 18

1. Before a final vote is taken on any Kingdom Bill in the Upper and Lower House, the Minister Plenipotentiary of the Country in which the legislation is to apply shall have the opportunity to express his opinion on the Bill. If the Minister Plenipotentiary states his opposition to the proposal, he may request the House at the same time to postpone the vote till the following meeting. If, after the Minister Plenipotentiary has stated his opposition to the Bill, the Lower House adopts it with a majority of less than three-fifths of the number of votes cast, the proceedings shall be suspended and the Council of Ministers shall consider the Bill further.
2. If the meetings of the Upper or Lower House are being attended by special delegates, the power referred to in paragraph 1 shall devolve upon the delegate designated for the purpose by the representative assembly.

Article 19

Articles 17 and 18 shall apply *mutatis mutandis* to proceedings in joint session of the States-General.

Article 20

Further rules relating to the provisions of articles 15 to 19 may be laid down by Kingdom Act.

Article 21

If, in the event of war or in other exceptional circumstances in which immediate action is required, the King is of the opinion, after consultation with the Ministers Plenipotentiary of the Netherlands Antilles and Aruba, that it is impossible to await the result of the examination referred to in Article 16, a departure may be made from the provisions of that Article.

Article 22

1. The Government of the Kingdom shall ensure the publication of Kingdom Acts and orders in council for the Kingdom, which shall appear in the official bulletin of the Country where the legislation is to apply. The Governments of the Countries shall lend all the assistance necessary to that end.
2. Kingdom Acts and orders in council for the Kingdom shall enter into force on the date determined therein or pursuant thereto.
3. The terms of the publication of Kingdom Acts and orders in council for the Kingdom shall state that the provisions of the Charter for the Kingdom have been observed.

Article 23

1. The jurisdiction of the Supreme Court of the Netherlands in respect of legal cases in the Netherlands Antilles and Aruba shall be regulated by Kingdom Act.
2. If the Government of the Country concerned so requests, the said Kingdom Act shall provide for the addition of a member, an extraordinary member or an advisory member to the Court.

Article 24

1. Agreements with other powers and with international organizations which affect the Netherlands Antilles or Aruba shall be submitted to the representative assembly of the Netherlands Antilles or of Aruba at the same time as they are submitted to the States-General.
2. If an agreement has been submitted for the tacit approval of the States-General, the Ministers Plenipotentiary may, within the time-limit set for this purpose for the Upper and Lower Houses, communicate their wish that the agreement shall be subject to the express approval of the States-General.
3. The preceding paragraphs shall apply *mutatis mutandis* in respect of the denunciation of international agreements, with the proviso in the case of paragraph 1 that the representative assembly of the Netherlands Antilles or Aruba respectively shall be notified of the intended denunciation.

Article 25

1. The King shall not bind the Netherlands Antilles or Aruba to international economic or financial agreements if the Government of the Country, indicating the reasons for considering that this would be detrimental to the Country, has declared that the Country should not be bound by them.
2. The King shall not denounce international economic or financial agreements in respect of the Netherlands Antilles or Aruba if the Government of the Country, indicating the reasons for considering that a denunciation would be detrimental to the Country, has declared that denunciation should not take place with respect to that Country. An agreement may nevertheless be denounced if exclusion of the Country concerned from the denunciation is incompatible with the provisions of the agreement.

Article 26

If the Government of the Netherlands Antilles or Aruba communicates its wish for the conclusion of an international economic or financial agreement that applies solely to the Country concerned, the Government of the Kingdom shall assist in the conclusion of such an agreement, unless this would be inconsistent with the Country's ties with the Kingdom.

Article 27

The Netherlands Antilles or Aruba shall be consulted in the preparation of agreements with other Powers which affect either of them in accordance with Article 11. They shall also be involved in the implementation of agreements which affect them and by which they are bound.

Article 28

In accordance with international agreements entered into by the Kingdom, the Netherlands Antilles or Aruba may, if they so desire, accede to membership of international organizations.

Article 29

1. Loans outside the Kingdom in the name of or for the account of one of the Countries shall be contracted or guaranteed in agreement with the Government of the Kingdom.
2. The Council of Ministers shall agree to the contracting or guaranteeing of such loans, unless this would be contrary to the interests of the Kingdom.

Article 30

1. The Netherlands Antilles and Aruba shall lend such assistance and support to the armed forces within their territory as the latter require for the discharge of their task.
2. Provisions shall be laid down by country ordinance to ensure that the armed forces of the Kingdom stationed in the Netherlands Antilles or Aruba can discharge their task.

Article 31

1. Persons resident in the Netherlands Antilles or Aruba may be compelled to serve in the armed forces or to perform alternative civilian service only by country ordinance.
2. The Constitution may determine that persons subject to compulsory service in the army shall be sent elsewhere without their consent only pursuant to a country ordinance.

Article 32

The armed forces for the defence of the Netherlands Antilles or Aruba shall consist as far as possible of persons resident within the Country concerned.

Article 33

1. Requisitioning and use of property, restrictions on title and rights of use, the requisitioning of services and billeting for defence purposes shall be effected only with due regard to general rules to be laid down by Kingdom Act, which shall also contain provisions concerning compensation.
2. Whenever possible the said Kingdom Act shall instruct the authorities of the countries to issue further provisions.

Article 34

1. In the event of war or a threat of war or if a threat to or the disturbance of internal peace and order might seriously damage the Kingdom's interests, the King may, to maintain internal or external security, declare any part of the territory to be in a state of war or a state of emergency.
2. How such a declaration shall be made and the ensuing consequences provided for shall be determined by or pursuant to Kingdom Act.
3. Such legislation may determine that, and in what manner, powers of the civil authorities in respect of public order and the police shall be transferred, wholly or in part, to other civil authorities or to the military authorities and that, in the latter case, the civil authorities shall be subordinate to the military authorities. Whenever possible the Government of the Country concerned shall be consulted with regard to the transfer of powers. Such legislation may depart from provisions relating to the freedom of the press and freedom of association and assembly, and from those relating to the inviolability of dwellings and correspondence.
4. In an area where in the event of war a state of emergency has been declared, military criminal law and military criminal jurisdiction may be declared wholly or partially applicable to any person, in a manner determined by Kingdom Act.

Article 35

1. The Netherlands Antilles and Aruba shall contribute, to an extent consonant with their resources, to the cost of maintaining the independence and the defence of the Kingdom, and to the cost of the conduct of other Kingdom affairs, to the extent that they benefit the Netherlands Antilles or Aruba respectively.
2. The contributions of the Netherlands Antilles and of Aruba referred to in paragraph 1 shall be determined by the Council of Ministers for one fiscal year or for a number of consecutive fiscal years. Article 12 shall apply *mutatis mutandis* with the proviso that decisions shall be taken unanimously.
3. If the contributions referred to in paragraph 2 are not determined in due time, the contributions determined for the previous fiscal year in accordance with that paragraph shall apply for a period not to exceed one fiscal year.
4. The preceding paragraphs shall not apply to the costs of measures for which special provision has been made.

§ 3. Mutual assistance, consultation and co-operation

Article 36

The Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba shall accord one another aid and assistance.

Article 36a

1. The Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba shall participate in a fund designed to maintain a proper standard of governance in the island territories of Bonaire, Saba and St Eustatius in the Netherlands Antilles.

2. Such a fund shall be established by Kingdom Act.

Article 37

1. The Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba shall consult wherever possible on all matters involving the interests of at least two Countries. To this end special representatives may be designated and joint bodies created.

2. The matters referred to in this Article shall include:

- a. the promotion of cultural and social relations between the Countries;
- b. the promotion of effective economic, financial and monetary relations between the Countries;
- c. problems in respect of coinage and currency, banking and foreign exchange policy;
- d. the promotion of economic resilience by means of mutual aid and assistance;
- e. the conduct of professions and business in the Countries by Dutch nationals;
- f. matters relating to aviation, including policy on unscheduled air transport;
- g. matters relating to shipping;
- h. cooperation in the field of telegraphic, telephone and radio communications.

Article 38

1. The Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba may enter into mutual arrangements.

2. They may decide by common consent that such arrangements and the modification thereof shall be laid down by Kingdom Act or order in council of the Kingdom.

3. Private law and criminal law matters of an interregional or international nature may be regulated by Kingdom Act, provided that the Governments of the Countries concerned agree to the provisions thereof.

4. Provision for the transfer of the registered offices of legal persons shall be made by Kingdom Act. Such provision must be approved by the Governments of the Countries.

Article 39

1. Civil and commercial law, the law of civil procedure, criminal law, the law of criminal procedure, copyright, industrial property, the office of notary, and provisions concerning weights and measures shall be regulated as far as possible in a similar manner in the Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba.
2. Any proposal for drastic amendment of the existing legislation in regard to these matters shall not be submitted to or considered by a representative assembly until the Governments in the other countries have had the opportunity to express their views on the matter.

Article 40

Judgments given and warrants issued by courts in the Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba, and engrossments of authentic acts issued by them, may be enforced throughout the Kingdom, with due observance of statutory provisions in the Country of enforcement.

§ 4. The constitutional organization of the Countries

Article 41

1. The Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba shall conduct their internal affairs autonomously.
2. The interests of the Kingdom shall be a matter of common concern to the Countries.

Article 42

1. Within the Kingdom, the constitutional organization of the Netherlands is set forth in the Constitution, and that of the Netherlands Antilles and Aruba in their respective Constitutions.
2. The Constitutions of the Netherlands Antilles and of Aruba are established by country ordinance. Any proposal for the amendment of the Constitutions shall explicitly describe the proposed amendment. The representative assemblies shall adopt a Bill for a country ordinance of this kind only by a two-thirds majority of the votes cast.

Article 43

1. Each of the Countries shall promote the realization of fundamental human rights and freedoms, legal certainty and good governance.
2. The safeguarding of such rights and freedoms, legal certainty and good governance shall be a Kingdom affair.

Article 44

1. Any country ordinance amending a Constitution with regard to:
a. articles relating to fundamental human rights and freedoms;
b. provisions relating to the powers of the Governor;
c. articles relating to the powers of the representative assemblies of the Countries;
d. articles relating to the administration of justice,
shall be submitted to the Government of the Kingdom. Such country ordinances shall not enter into effect until the Government of the Kingdom has signified its agreement.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to any country ordinance amending the Constitution of the Netherlands Antilles with regard to the allocation of seats in the representative assembly of the Netherlands Antilles to the various island territories and with regard to provisions concerning the island territories.

3. Bills for country ordinances as referred to in the preceding paragraphs shall not be submitted to the representative assembly or be examined by the assembly if it has initiated such a Bill, until the opinion of the Government of the Kingdom has been obtained.

Article 45

Amendments to the Constitution with regard to:

a. articles relating to fundamental human rights and freedoms;
b. provisions relating to the powers of the Government;
c. articles relating to the powers of the representative assemblies;
d. articles relating to the administration of justice,
shall be deemed - without prejudice to the provisions of Article 5 - to affect the Netherlands Antilles and Aruba within the meaning of Article 10.

Article 46

1. The representative assemblies shall be elected by Netherlands nationals who are residents of the Country concerned and have attained an age to be determined by the Countries, which should not exceed 25 years. Each voter shall cast only one vote. Elections shall be free and by secret ballot. In case of necessity the Countries may impose restrictions. Any Netherlands national shall have the right to stand for election, subject to such requirements of residence and age as the Countries may define.

2. The Countries may award to Netherlands nationals who are not residents of the Country concerned the right to vote in elections for the representative assemblies, and to residents of the Country concerned who are not Netherlands nationals the right to vote and stand in elections for the representative assemblies, provided in the case of all the foregoing that the requirements for residents who are Netherlands nationals are observed.

Article 47

1. Before taking office the Ministers and the members of the representative assemblies in the Countries shall swear or promise allegiance to the King and the Charter.

2. The Ministers and the members of the representative assemblies in the Netherlands Antilles and Aruba shall take the oath, or make the promise, in the presence of the King's representative.

Article 48

The Countries shall take account of the provisions of this Charter in their legislation and administration.

Article 49

Rules may be established by Kingdom Act with regard to the binding force of legislative measures which are inconsistent with the Charter, an international instrument, a Kingdom Act or an order in council for the Kingdom.

Article 50

1. Legislative and administrative measures in the Netherlands Antilles and Aruba which are inconsistent with the Charter, an international instrument, a Kingdom Act or an order in council for the Kingdom, or with interests whose promotion or protection is a Kingdom affair, may be suspended and annulled by the King as Head of the Kingdom by virtue of a decree stating reasons. The recommendation for annulment shall be made by the Council of Ministers.

2. This matter shall be regulated for the Netherlands, if necessary, in the Constitution.

Article 51

1. If any organ in the Netherlands Antilles or in Aruba does not or does not adequately perform its duties as required by this present Charter, an international instrument, a Kingdom Act or an order in council for the Kingdom, the measures to be taken may be determined by Kingdom Act, setting forth the legal grounds and the reasons on which it is based.

2. This matter shall be regulated for the Netherlands, if necessary, in the Constitution.

Article 52

With the assent of the King, a country ordinance may confer upon the King as head of the Kingdom and upon the Governor as an organ of the Kingdom, powers with respect to Country affairs.

Article 53

If the Netherlands Antilles or Aruba so wish, the independent supervision of the expenditure of funds under the budgets of the Netherlands Antilles and the island territories or of Aruba may be exercised by the Netherlands Court of Audit. In that event, after consultation with the Court of Audit, rules shall be established by Kingdom Act governing cooperation between the Court of Audit and the territory concerned. The Government of that Country shall be empowered to appoint, on the nomination of its representative assembly, a person who shall have the opportunity to attend deliberations on all affairs of the relevant territory.

§ 5. Transitional and final provisions

Article 54

(Rescinded.)

Article 55

1. Amendments to this Charter shall be effected by Kingdom Act.
2. A Bill for an amendment passed by the States-General shall not be approved by the King until it has been accepted by the Netherlands Antilles and Aruba. This acceptance shall be enacted by country ordinance. Such a country ordinance shall not be adopted until it has been approved by the States of the countries in two readings. If the draft is passed at the first reading by two-thirds of the votes cast, it shall be deemed approved forthwith. The second reading shall take place within one month after the Bill has passed the first reading.
3. If and in so far as a Bill for the amendment of this Charter is at variance with the Constitution, the Bill shall be dealt with in the manner provided for in the Constitution in respect of proposed amendments to the Constitution, with the proviso that in second reading the two Houses may adopt the proposed amendment by an absolute majority of the votes cast.

Article 56

Authorities, binding legislation, ordinances and decrees existing on the date of entry into force of the Charter shall remain in effect until they have been replaced by others pursuant to this Charter. In so far as the Charter provides otherwise with respect to any matter, the terms of the Charter shall prevail.

Article 57

Acts and ordinances applicable to the Netherlands Antilles shall acquire the status of Kingdom Act or order in council for the Kingdom respectively with the proviso that, if they can be amended by country ordinance pursuant to the Charter, they shall acquire the status of country ordinance.

Article 58

1. Aruba may declare by country ordinance that it wishes to terminate the constitutional order enshrined in the Charter in respect of Aruba.
2. A Bill for such a country ordinance shall be accompanied on its submission by an outline of a future constitution, containing in any event provisions on fundamental rights, government, the representative assembly, legislation and administration, the administration of justice and amendments to the Constitution.
3. The States may only approve such a Bill with a majority of two thirds of the sitting members.

Article 59

1. Within six months of the approval by the States of Aruba of the Bill referred to in Article 58, a referendum to be regulated by country ordinance shall be held, at which those entitled to vote in elections to the States may express their opinion on the Bill.
2. The Bill shall not be enacted as a country ordinance until it has received the approval of a majority of the voters in a referendum.

Article 60

1. Once the country ordinance has been enacted in accordance with Articles 58 and 59 and once the future constitution has been approved by the States of Aruba with a majority of at least two thirds of the sitting members, the date on which the government of Aruba feels that the constitutional order should be terminated in respect of Aruba shall be determined by Royal Decree.
2. This date shall be no more than a month after the constitution has been adopted, which in turn shall be no more than a year after the date of the referendum referred to in Article 59.

Article 61

The Charter shall enter into force on the date of its ceremonial promulgation, after approval by the King. Prior to its approval the Charter must be accepted in respect of the Netherlands in the manner provided for in the Constitution; in respect of Suriname and the Netherlands Antilles by decision of the representative assemblies. Such a decision shall require two-thirds of the votes cast. If such a majority is not obtained the States shall be dissolved and the decision shall be effected by the new States by an absolute majority of the votes cast.

Article 62

(Rescinded)



II

(Acts whose publication is not obligatory)

COUNCIL

COUNCIL DECISION
of 27 November 2001on the association of the overseas countries and territories with the European Community
(‘Overseas Association Decision’)

(2001/822/EC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, hereinafter referred to as the Treaty, and in particular Article 187 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Whereas:

- (1) Council Decision 91/482/EEC of 25 July 1991 on the association of the overseas countries and territories with the European Economic Community⁽¹⁾, was applicable until 1 December 2001. Article 240(4) thereof states that the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, shall establish the provisions to be laid down for the subsequent application of the principles set out in Articles 182 to 186 of the Treaty.
- (2) Declaration No 36 on the overseas countries and territories, hereinafter referred to as the ‘OCTs’, annexed to the final act of the Conference of the Representatives of the Governments of the Member States signed in Amsterdam in 1997, invites the Council, acting in accordance with Article 187 of the Treaty, to review the association arrangements with the OCTs with a fourfold objective as follows:
- promoting the economic and social development of the OCTs more effectively;
 - developing economic relations between the OCTs and the European Union;
 - taking greater account of the diversity and specific characteristics of the individual OCTs, including aspects relating to freedom of establishment;
 - and ensuring that the effectiveness of the financial instrument is improved.

- (3) On 11 February 1999 the European Parliament adopted a resolution on relations between the OCTs, the ACP States and the outermost regions of the European Union⁽²⁾. Furthermore, on 4 October 2001, it adopted a resolution on the proposal from the Commission for a Council Decision on the association of the OCTs with the European Community⁽³⁾.

- (4) In its communication of 20 May 1999 entitled ‘the Status of OCTs associated with the EC and options for “OCT 2000”’, the Commission examined the features and the development of the OCT-EC association since 1957, noted the basic principles and the current situation of the association and sketched out alternative policies for it for the period beginning 1 March 2000.

- (5) In accordance with Article 10 of Decision 91/482/EEC, the competent OCT authorities informed the Commission of the amendments or additions they desired in future, notably at a meeting held in the context of the partnership on 29 and 30 April 1999, attended by the Commission, the four Member States to which the OCTs are linked and the 20 OCTs concerned.

- (6) Though not third countries, the OCTs do not form part of the single market and must comply with the obligations imposed on third countries in respect of trade, notably rules of origin, health and plant health standards and safeguard measures.

- (7) As a general rule, when the Council adopts measures under Article 187 of the Treaty, it must take account both of the principles laid down in Part Four of the Treaty and of the other principles of Community law. It should also take account of experience acquired in the implementation of the trade arrangements of Decision 91/482/EEC.

⁽¹⁾ OJ L 263, 19.9.1991, p. 1. Decision as last amended and extended by Decision 2001/161/EC (OJ L 58, 28.2.2001, p. 21).

⁽²⁾ PE 228.210, 1.12.1998.

⁽³⁾ Not yet published C5-0070 - 2001/2033 (COS).

- (8) These arrangements provide for duty-free access for products originating in the OCTs and rules of origin allowing cumulation with products originating in the ACP States, which are subject to different arrangements, or in the Community. This causes or threatens to cause serious disruption to the functioning of certain common market organisations under the common agricultural policy, in particular those for rice and sugar. Such disruption has on a number of occasions led the Commission and the Council to adopt safeguard measures.
- (9) By limiting the scope for use of cumulation of origin, the changes made in relation to rice at the mid-term review of the Decision⁽¹⁾ have helped maintain access for OCT products to the Community market on terms conducive to its balance. This access should be improved in respect of the least developed OCTs, but without modifying the overall quantity benefiting from cumulation. Given that only two other OCTs have ever operated in this sector, the remaining available quantities should be allocated to them, in the interest of transparency.
- (10) However, as regards sugar and sugar mixes, the rise in OCT exports made from sugar of ACP or Community origin to a heavily oversupplied market has resulted in a greater reduction in the quota allowed for Community producers and therefore a greater loss of guaranteed income for them.
- (11) Moreover, in view of the minimal, low value-added operations that currently suffice to obtain the status of a product originating in the OCTs in the sugar sector, the contribution of these exports to the development of the territories can only be small at best and, without a doubt, out of all proportion to the disruption caused to the Community sectors concerned.
- (12) For the above reasons, origin rules should therefore be adopted which exclude the possibility of ACP/EC-OCT cumulation for sugar when only minimal operations are carried out. However, taking into account the investments already made in the OCTs on the basis of the rules in force since 1991, such exclusion should enter into force in a progressive way. Therefore, subject to the adoption of the necessary implementing provisions, cumulation should be temporarily allowed to continue within progressively decreasing quantitative limits which are compatible with the objectives of the Community's common market organisation for sugar whilst taking due account of the legitimate interests of OCT operators.
- (13) Provision should also be made to ensure that agricultural products originating in the Community and which have benefited from an export refund cannot be re-imported
- duty-free into the Community by means of the cumulation procedure.
- (14) Furthermore, all the OCT rules of origin should be updated, in the interests of the operators and administrations concerned, to take account of technical progress and the policy adopted by the Community of origin-rule harmonisation. Likewise, the procedure should be simplified to enable the necessary technical amendments to the rules to be made more easily in future.
- (15) The procedure for the transhipment of goods not originating in the OCTs but in free circulation there should be completed and clarified, with a view to ensuring a transparent and reliable legal framework for operators and administrations. It should also be extended to cover certain fishery products of particular importance for Greenland and Saint-Pierre-et-Miquelon, subject to the adoption of the necessary implementing provisions.
- (16) The general provisions of the Treaty and legislation derived thereunder do not automatically apply to the OCTs, barring express provisions to the contrary. OCT products imported into the Community must nevertheless comply with the Community rules in force.
- (17) Financial assistance to the OCTs should be allocated on the basis of uniform, transparent and effective criteria, taking into account the needs and performances of the OCTs. Such criteria should include in particular the economic and physical dimensions of the OCTs, the use made of past allocations, respect for the principles of sound financial management, fair fiscal policy, estimated absorption capacity, the need for establishing a reserve in order to finance non-programmable expenditure and a smooth transition to prevent a sudden considerable setback in allocation for New Caledonia, French Polynesia and the Netherlands Antilles. In the interests of efficiency, simplification and recognition of the management capacities of the OCT authorities, the financial resources granted to the OCTs should be managed more on the basis of partnership by applying procedures based on the rules in force for the structural funds.
- (18) For this purpose, the procedures delegate the main responsibility for programming and implementing cooperation to the OCTs in particular. Cooperation will be conducted predominantly in conformity with OCT territorial regulations and will underpin support for the monitoring, evaluation and audit of the operations programmed. In addition, it is necessary to clarify which Community programmes and budget lines are open to the OCTs, as well as the procedures for a smooth transition from previous EDFs to the 9th one.
- (19) Global changes, reflected in the continuing process of trade liberalisation, broadly implicate the Community, the OCTs' principal trading partner, as well as their ACP neighbours and other economic partners. In the market access equation, the level of tariffs plays an increasingly reduced role while trade in services and trade-related
- ⁽¹⁾ Council Decision 97/803/EC of 29 November 1997 amending at mid-term Decision 91/482/EEC on the association of the overseas countries and territories with the European Economic Community (OJ L 329, 29.11.1997, p. 50).

areas assume an ever greater importance in the relationship between the OCTs and their economic partners. That relationship should therefore be fostered, while retaining the broad outline of the current trade arrangements, and the conditions for the gradual integration of those OCTs who so wish into the regional and global economy simplified by helping them to increase their capacity to handle all these new areas.

- (20) The measures necessary for the implementation of this Decision should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999, laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission ⁽¹⁾. However, so far as the implementation of the 9th EDF is concerned, the voting and the majority should be as laid down in Article 21 of the Internal Agreement between the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the financing and administration of Community Aid under the Financial Protocol to the Partnership Agreement between the African, Caribbean and Pacific States and the European Community and its Member States signed in Cotonou (Benin) on 23 June 2000 and the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of

the Treaty applies ⁽²⁾, hereinafter the 'Internal Agreement'.

- (21) The OCTs are fragile island environments requiring adequate protection, including in respect of waste management. In respect of radioactive waste, this is provided under Article 198 of the Euratom Treaty and legislation adopted thereunder, except for Greenland, to which the Euratom Treaty does not apply. For other waste, it should be specified which Community rules are to apply in respect of the OCTs.
- (22) The arrangements for association laid down in this Decision should not be applied to Bermuda in accordance with the wishes of the Government of Bermuda.
- (23) The Council should produce an innovative response to all the above mentioned new factors which is both consistent and tailored to the variety of situations. A new status for the association can provide such a response,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

PART ONE

GENERAL PROVISIONS OF THE ASSOCIATION OF THE OCTs WITH THE COMMUNITY

Chapter 1

General provisions

Article 1

Purpose, objectives and principles

1. The association of the OCTs with the Community, hereinafter referred to as the 'OCT-EC Association', shall have as its basis the purpose set out in Article 182 of the Treaty, namely to promote the economic and social development of the OCTs and to establish close economic relations between them and the Community as a whole.

It shall pursue the objectives laid down in Article 183 of the Treaty in accordance with the principles set out in Articles 184 to 188 of the Treaty by focusing on the reduction, prevention and, eventually, eradication of poverty and on sustainable development and gradual integration into the regional and world economies.

2. The association relates to the OCTs listed in Annex I A.

3. In accordance with Article 188 of the Treaty, this Decision shall apply to Greenland subject to the specific provisions set out in the Protocol on the special arrangements for Greenland annexed to the Treaty.

Article 2

Basic elements

1. The OCT-EC association shall be based on the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms and the rule of law. These principles, on

which the Union is founded in accordance with Article 6 of the Treaty on European Union, shall be common to the Member States and the OCTs linked to them.

2. There shall be no discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation in the areas of cooperation referred to in this Decision.

Article 3

The least-developed OCTs

1. The Community shall accord special treatment to the least-developed OCTs and to those unable to take advantage of the regional cooperation and integration referred to in Article 16.

2. To respond to such difficulties, development finance cooperation shall comprise, *inter alia*, special treatment when determining the volume of financial resources and the conditions attached thereto in order to enable the least-developed OCTs to overcome structural and other obstacles to their development. It shall pay special attention to improving the living conditions of the poorest sections of the population in the context of poverty alleviation.

3. The OCTs considered the least developed for the purposes of this Decision are listed in Annex I B. This list shall be amended by decision of the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, where the economic situation of an OCT undergoes a significant and lasting change, necessitating its inclusion in the category of least-developed OCTs or where its inclusion in that category is no longer warranted.

⁽¹⁾ OJ L 184, 7.7.1999, p. 23.

⁽²⁾ OJ L 317, 15.12.2000, p. 355.

Chapter 2

Actors of cooperation in the OCTs

Article 4

Principles

1. Within the framework of the partnership laid down in Article 7, the OCT authorities shall assume primary responsibility for the formulation of association and development strategies and their implementation through the preparation, together with the Commission and the Member State to which the OCT is linked, of Single Programming Documents (hereinafter referred to as SPDs) and cooperation programmes.

2. The Community shall recognise that local public and private actors play a key role in achieving the objectives laid down in Article 183 of the Treaty.

3. In implementing this Decision, the parties shall have as their guiding principles transparency, subsidiarity and the need for efficiency.

Article 5

The different actors involved

1. Actors of cooperation in the OCTs shall include:

- the OCT authorities;
- the other regional and local authorities within the OCTs;
- civil society, social, business and trade union associations, public service providers and local, national or international non-governmental organisations (NGOs).

The Member States to which the OCTs are linked shall inform the Commission within three months of the entry into force of this Decision of the national, regional or local authorities referred to in the various Articles of the Decision.

2. The recognition of non-governmental actors shall depend on their capacity to meet the needs of the local population, their expertise and their having democratic and accountable organisation and management.

3. Non-governmental actors shall be identified by agreement between the OCT authorities, the Commission and the Member State to which the OCT is linked, taking into account the subject concerned, their expertise and field of activity. The process of identification shall be conducted in each OCT as part of the process for the preparation of cooperation programmes referred to in Article 4.

Article 6

Responsibilities of the non-governmental actors

Non-governmental actors identified pursuant to Article 5(3) may play a role in:

- information and consultation;
- the preparation and implementation of cooperation programmes;

- decentralised cooperation in the context of responsibilities delegated for the purpose of supporting local development initiatives.

Chapter 3

Principles and Procedures of the OCT-EC Partnership

Article 7

Dialogue and Partnership

1. With the aim of enabling the OCT to take a full part in the implementation of the OCT-EC association, with due regard for the way that the institutions of the Member States concerned are organised, the association shall use a consultation procedure based on the provisions referred to below. It shall deal with any issue arising in relations between the OCTs and the Community.

2. A broad-based dialogue should enable the Community, all the OCTs and the Member States to which they are linked to consult each other on the principles, detailed procedures and results of the association.

An OCT-EU forum for dialogue, hereinafter referred to as the 'OCT Forum', shall meet annually to bring together OCT authorities, representatives of the Member States and the Commission.

3. There shall be separate partnerships between the Commission, the Member State to which the OCT is linked and each OCT, represented by its authorities, to enable the objectives and principles of this Decision, in particular those referred to in Articles 4 and 19 to be put into practice. This trilateral consultation shall hereinafter be referred to as the 'partnership'.

Partnership working parties, acting in an advisory capacity, shall be set up for each OCT. Their membership shall comprise the abovementioned three partners. These working parties may be convened at the request of the Commission, of a Member State or of an OCT. At the request of one of the partners, several partnership working parties may hold joint meetings to consider subjects of common interest or the regional aspects of the association.

4. This consultation shall be conducted in full compliance with the respective institutional, legal and financial powers of each of the three partners.

The Commission shall chair the working parties and the OCT Forum and provide their secretariat.

A representative of the European Investment Bank, hereinafter referred to as the EIB, shall be present at meetings when matters concerning it are on the agenda.

5. The opinions of the working parties and the OCT Forum shall, where appropriate, be the subject of Commission decisions, within the limits of its powers, or of proposals from the Commission to the Council with a view to implementation of new elements of the OCT-EC association or its amendment on the basis of Article 187 of the Treaty.

Article 8

ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

The OCT authorities shall be informed of the agenda, resolutions and recommendations of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly.

Member States and the Commission shall support any request by OCT authorities to participate as observers at the plenary sessions of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, subject to the Assembly's own rules of procedure.

Article 9

Management

Day-to-day management of this Decision shall be conducted by the Commission and the OCT authorities and, should the need arise, by the Member State to which the OCT is linked, in accordance with the institutional, legal and financial powers of each of the partners, notably as regards development finance cooperation and cooperation in the area of trade and services.

PART TWO

THE AREAS OF OCT-EC COOPERATION

Article 10

Areas of cooperation

The Community shall contribute to cooperation in those areas in the OCTs listed in this Title in accordance with the priorities established in the development strategies for each OCT or, where appropriate, in the form of regional measures.

Article 11

Productive sectors

Cooperation shall support sectoral policies and strategies that facilitate access to productive activities and resources, in particular:

- (a) **Agriculture:** agricultural policy and institution building, diversification, irrigation, seed multiplication, crop protection measures, fertiliser production, equipment, agro-processing, livestock and cattle breeding, animal husbandry, extension and research; marketing; storage and transportation; food security; agricultural credit; land settlement and reform, land use and registration policy, technology transfer, irrigation and drainage infrastructure, other support services.
- (b) **Forestry:** forestry policy and institution building, including use of trees to conserve the environment in erosion and desertification control; afforestation; forest management, including the rational utilisation and management of timber exports; issues relating to tropical rain-forests; research and training.
- (c) **Fisheries:** fishing policy and institution building, fish stock protection and rational management of fish stocks; fish farming and artisanal fisheries; fishery transport; cold storage and fish marketing and preservation.
- (d) **Rural development:** rural policy and institution building, integrated rural development projects/programmes; assistance and projects targeted at people,

production and marketing in rural areas; rural infrastructure.

- (e) **Industry:** sectoral policy and institution building; craft industries; agro-industries and other manufacturing sectors, transport equipment industry; technological research and development; quality control; development and expansion of SMEs and micro-enterprises.
- (f) **Mining:** sectoral policy and institution building, technological research and development; small-scale mining, etc.
- (g) **Energy:** energy policy and institution building; power generation (non-renewable and renewable); efficient use of energy resources; energy research and training; encouraging private sector involvement in power generation and distribution.
- (h) **Transport:** transport policy and institution building; transport by road, rail, air, sea or inland waterway and storage facilities.
- (i) **Communication:** communication policy and institution building; telecommunications and media.
- (j) **Water:** water policy and institution building; protecting water resources, waste management, water supplies in rural and urban areas for domestic, industrial or agricultural purposes; storage, distribution and management of water resources.
- (k) **Banking, finance and business services:** financial sector policy and institution building, business services; privatisation, equity participation and marketing; support to trade, commerce and business associations (including export promotion agencies); financial and banking institutions.
- (l) **Technology development and application, research:** policy and institution building; concerted action at local, national and/or regional level for the promotion of science and technology activities and their application to production and promotion of computer literacy in the public and private sectors, scientific programmes and equipment for research.

Article 12

Trade development

1. The Community shall implement measures for the development of trade at all stages up to final distribution of the product.

The object is to ensure that the OCTs derive the maximum benefit from the provisions of his Decision and may participate under the most favourable conditions in the Community, domestic, sub-regional, regional and international markets by diversifying the range and increasing the value and the volume of OCT trade in goods and services.

2. In addition to developing trade between the OCTs and the Community, particular attention shall be given to operations designed to increase the OCTs' self-reliance and improve regional cooperation in trade and services.

3. Within the instruments provided for in this Decision and in accordance with the provisions set out in relation thereto, operations shall be undertaken at the request of the OCT authorities, particularly in the following areas:

- (a) support for the definition of appropriate macroeconomic policies necessary for trade development;
- (b) support for the creation or reform of appropriate legal and regulatory frameworks as well as for the reform of administrative procedures;
- (c) the establishment of coherent trade strategies;
- (d) support for OCTs in developing their internal capacities, information systems and awareness of the role and importance of trade in economic development;
- (e) support for strengthening the infrastructure related to trade and in particular support for the OCTs' efforts to develop and improve supportive service infrastructure, including transport and storage facilities, in order to ensure their effective participation in the distribution of goods and services and in order to enhance the flow of exports from the OCTs;
- (f) development of human resources and professional skills in the field of trade and services, in particular in the processing, marketing, distribution and transport sectors for the Community, regional and international markets;
- (g) support to private sector development and, in particular, to SMEs for product identification and development, market outlets and export-oriented joint ventures;
- (h) support for OCT actions aimed at encouraging and attracting private investment and joint venture operations;
- (i) the establishment, adaptation and strengthening of organisations in the OCTs dealing with the development of trade and services, particular attention being paid to the special needs of organisations in the least-developed OCTs;
- (j) support for OCTs aiming to improve the quality of their products, adapt them to market requirements and diversify their outlets;

(k) support for OCT efforts to penetrate third country markets more effectively;

(l) market development measures including increasing contacts and exchange of information between economic operators in OCTs, ACP States, the Member States and in third countries;

(m) support for OCTs in the application of modern marketing techniques in production-oriented sectors and programmes, in particular in areas such as rural development and agriculture;

(n) the establishment and development of insurance and credit institutions in the field of trade development.

4. Support for OCTs' participation in trade fairs, exhibitions and trade missions shall be carried out only where such events form an integral part of overall trade and market development programmes.

5. Participation of the least-developed OCTs in various trade activities shall be encouraged by special provisions, *inter alia*, the payment of travel expenses of personnel and costs of transporting exhibits, on the occasion of their participation in local, regional and third-country fairs, exhibitions or trade missions, including the cost of the temporary construction and/or renting of exhibition booths and stalls. The least-developed OCTs shall be granted special aid to assist in the preparation and/or purchase of promotional materials.

Article 13

Trade in services

1. The Community agrees to develop and finance infrastructure and human resources as regards trade in services in accordance with the priorities established under the development strategies for each OCT.

2. The Community shall contribute to the development and promotion of cost-effective and efficient maritime transport services in the OCTs, by:

- (a) promoting the efficient shipment of cargo at economically and commercially meaningful rates;
- (b) implementing good policies and competition rules;
- (c) facilitating greater OCT participation in international shipping services;
- (d) encouraging regional programmes of maritime transport and trade development;
- (e) increasing local private sector involvement in shipping activities.

The Community and the OCTs undertake to promote shipping safety, security of crews and the prevention of pollution.

3. The Community shall step up cooperation with the OCTs so as to ensure regular improvement and growth in air traffic.

This shall involve:

- (a) examining all means of reforming and modernising the OCT air transport industries;
- (b) promoting their commercial viability and competitiveness;
- (c) encouraging higher levels of private sector investment and participation and a greater exchange of knowledge and good business practice;
- (d) providing passengers and exporters in all OCTs with access to global air transport networks.

4. Safety must be ensured in the air transport sector and the relevant international standards introduced and implemented.

To that end, the Community shall assist the OCTs in:

- (a) implementing air navigation safety systems, including the Communications, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM) system;
- (b) implementing airport security and strengthening the capacity of civil aviation authorities to manage all aspects of operational security placed under their control;
- (c) developing infrastructures and human resources;
- (d) ensuring that any measures taken in this field are based on advice from the relevant international organisations and that they will be effective and sustainable in the long term.

5. Proper attention must be paid to minimising the environmental impact of air transport, in particular by means of appropriate environmental impact studies.

6. In many aspects of air transport, regional solutions may offer scope for greater cost effectiveness and economies of scale. To that end, the Community undertakes to support and encourage actions on a regional level where appropriate.

7. Since telecommunication and active participation in the information society are prerequisites for the successful integration of the OCTs into the world economy, the Community and the OCTs reconfirm their respective commitments under existing multilateral agreements, in particular the World Trade Organisation (WTO) Agreement on Basic Telecommunications.

8. The Community shall support the efforts of the OCTs to increase their capacity in the field of trade in services. Cooperation shall cover, *inter alia*, the following areas:

- (a) promoting consultations between competent telecommunications bodies in the OCTs and the Community with a view to encouraging development of a competitive telecommunications environment bringing rates closer to costs;
- (b) establishment of a dialogue on different aspects of the information society, including regulatory aspects and communications policy;

(c) information exchanges and possible technical assistance on regulation, standardisation, conformity testing and certification of information and communications technologies and the use of frequencies;

(d) dissemination of new information and communications technologies and the development of new facilities, particularly in relation to interconnection of networks and interoperability of applications;

(e) promotion and implementation of joint research in the field of new technologies related to the information society;

(f) design and implementation of programmes and policies to raise the awareness of the economic and social benefits deriving from the information society.

9. Cooperation shall, in particular, be directed towards greater complementarity and harmonisation of communication systems at local, national, regional, inter-regional and international level and their adaptation to new technologies.

10. The Community shall support measures and operations to develop and support sustainable tourism. These measures shall be implemented at all levels, from the identification of the tourist product to the marketing and promotion stage.

The aim shall be to support the efforts of the authorities of the OCT to derive maximum benefit from local, regional and international tourism in view of tourism's impact on economic development and to stimulate private financial flows from the Community and other sources into the development of tourism in the OCTs. Particular attention shall be given to the need to integrate tourism into the social, cultural and economic life of the people, as well as to respect for the environment.

Specific tourism development measures shall be aimed at the definition, adaptation and development of appropriate policies at local, regional, sub-regional and international levels. Tourism development programmes and projects shall be based on these policies on the basis of the following four components:

- (a) human resource and institutional development, *inter alia*:
 - professional management development in specific skills and continuous training at appropriate levels in the private and public sectors to ensure adequate planning and development;
 - establishment and strengthening of tourism promotion centres;
 - education and training for specific segments of the population and public/private organisations active in the tourism sector, including personnel involved in sectors that support tourism;
 - inter-OCT and OCT-ACP cooperation and exchanges in the fields of training, technical assistance and the development of institutions.

- (b) the development of products including, *inter alia*:
- identification of the tourism product, development of non-traditional and new tourism products, adaptation of existing products including the preservation and development of cultural heritage, ecological and environmental aspects, management, protection and conservation of flora and fauna, historical, social and other natural assets, development of ancillary services;
 - promotion of private investment in the OCTs' tourist industries, including the creation of joint ventures;
 - production of crafts of a cultural nature for the tourist market.
- (c) market development including, *inter alia*:
- assistance for the definition and execution of objectives and market development plans at local, sub-regional, regional and international levels;
 - support for the OCTs' efforts to gain access to services for the tourist industry such as central reservation systems and air traffic control and security systems;
 - marketing and promotional measures and materials in the framework of integrated market development plans and programmes with a view to improved market penetration, aimed at the main generators of tourism flows in traditional and non-traditional markets as well as specific activities such as participation at specialised trade events, such as fairs, production of quality literature, films and marketing aids;
- (d) research and information including, *inter alia*:
- improving tourism information and collecting, analysing, disseminating and utilising statistical data;
 - assessment of the socio-economic impact of tourism on the economies of the OCT with particular emphasis on the development of linkages to other sectors in the OCT and the surrounding regions, such as food production, construction, technology and management.

Article 14

Trade-related areas

1. The Community shall help reinforce, within the development strategies of each OCT, the capacity of the OCTs to handle all areas related to trade, including where necessary improving and supporting the institutional framework.
2. The Community shall cooperate with the OCTs in the introduction of the general principles on protection and promotion of investments.
3. The Community shall also help to reinforce cooperation with the OCTs with a view to formulating and supporting effective competition policies with the appropriate competition agencies that progressively ensure the efficient enforcement of the competition rules by both private and state enterprises. Cooperation in this area shall, in particular, include assistance in the drafting of an appropriate legal framework and its administrative enforcement with particular reference to the least developed OCTs.
4. The Community shall continue to foster cooperation with the OCTs and extend it, in particular, to the following areas:
 - (a) the preparation of laws and regulations for the protection and enforcement of intellectual property rights, the prevention of the abuse of such rights by rightholders and the infringement of such rights by competitors, the establishment and reinforcement of local, national and regional offices and other agencies including support for regional intellectual property organisations involved in enforcement and protection, including the training of personnel;
 - (b) the conclusion of agreements aimed at protecting trademarks and geographical indications for products of particular interest.
5. The Community shall assist the OCTs in their efforts with regard to standardisation and certification aimed at promoting compatible systems between the Community and the OCTs. Cooperation shall comprise the following in particular:
 - (a) measures to promote greater use of international technical regulations, standards and conformity assessment procedures, including sector-specific measures, in accordance with the level of economic development of the OCTs;
 - (b) cooperation in the area of quality management and assurance in selected sectors of importance to the OCTs;
 - (c) support for OCT capacity building initiatives in the fields of conformity assessment, metrology and standardisation;
 - (d) developing links between OCT and European standardisation, conformity assessment and certification institutions.
6. The Community shall help strengthen cooperation with the OCTs with regard to human, animal and plant health measures with a view to building public and private sector capacity in this area.
7. Bearing in mind the Rio Principles and with a view to reinforcing the mutual supportiveness of trade and environment policies, the Community shall enhance cooperation with the OCTs. The aim of cooperation shall in particular be to:
 - (a) establish coherent local, national, regional and international policies;
 - (b) reinforce quality controls of goods and services related to the environment;
 - (c) improve environment-friendly production methods in relevant sectors.

8. The Community shall cooperate with the OCTs in relation to labour standards. Cooperation in this area shall mainly consist of:

- (a) exchanges of information on respective labour laws and regulations;
- (b) assistance in the formulation of labour legislation and strengthening of existing legislation;
- (c) educational and awareness-raising programmes aimed at eliminating child labour;
- (d) enforcement of labour legislation and regulations.

9. The Community shall cooperate with the OCTs in the area of consumer policy and consumer health protection by:

- (a) improving institutional and technical capacity in this area;
- (b) establishing rapid-alert systems of mutual information on dangerous products;
- (c) exchanging information and experiences on the establishment and operation of post-market surveillance of products and product safety;
- (d) improving information provided to consumers on prices, characteristics of products and services offered;
- (e) encouraging the development of private consumer associations and contacts between consumer-interest representatives;
- (f) improving compatibility of consumer policies and systems;
- (g) informing on the entry into force of legislation and promoting cooperation in investigating harmful or unfair business practices;
- (h) implementing exports prohibitions on the trade of goods and services the marketing of which has been prohibited in their country of production.

10. The Community shall support the efforts deployed by the OCT public and private actors in the field of information technology and telecommunications to:

- (a) modernise telecommunications infrastructure, data transmission services, remote processing applications and telematics application projects (TAP);
- (b) develop and improve the services and the human capacity needed for achieving the information society, and integrate those services in the best possible way in a regional context;
- (c) improve awareness of economic opportunities and exchanges of experience and of know-how;
- (d) provide better information to the users of those resources;
- (e) exploit the potential of this sector in an optimum and sustainable manner;

- (f) develop the use of communications and information technology in the field of education, including distance learning;
- (g) increase electronic commerce and economic cooperation;
- (h) improve and modernise health networks, through the development of links between hospitals, the use of remote diagnosis and the creation of joint databases;
- (i) develop multimedia access to cultural and tourist resources;
- (j) improve and increase the use of information and communications technology in industry and for innovation.

Article 15

Social sectors

The Community shall contribute, within the development strategies of each OCT, to human and social development measures. Cooperation could in particular support programmes in the following sectors:

- (a) Education policy and institution building (buildings and materials); language and teacher training; primary education; secondary education and vocational training; higher education (including sector-specific education activities, e.g. agricultural training).

In education, the focus should be on widening access to and improving the quality of basic education by constructing more schools, rehabilitating existing classrooms and providing educational materials, teacher training, and bursaries for poor students;

- (b) Health sector reform activities, health policy and institution building; medical education, training and research, health infrastructure; HIV/AIDS.

In the health sector, projects should help to provide primary and preventive care services, particularly family planning and child and maternal health services;

- (c) Population policy and family planning; mother and child care, including support for projects on the nurturing and development of the next generation.

- (d) Increasing the efficiency of policies to prevent the production, distribution and trafficking of all kinds of drugs, narcotics and psychotropic substances, preventing and reducing drug abuse, taking into account work done in this context by international bodies.

Cooperation shall comprise the following:

- (i) training, education, health promotion and rehabilitation of addicts, including projects for the reintegration of addicts into work and social environments;
- (ii) measures to encourage alternative economic opportunities, for example programmes for the alternative development of areas used for the illicit production of narcotic plants, linked to effective enforcement measures;

- (iii) technical, financial and administrative assistance relating to the monitoring of precursors trade, and the establishment of standards equivalent to those adopted by the Community and international authorities concerned;
 - (iv) technical, financial and administrative assistance relating to the prevention, treatment and reduction of drug abuse;
 - (v) technical assistance and training, and the establishment of standards to prevent money laundering equivalent to those adopted by the Community and other international bodies, in particular the Financial Action Task Force on Money Laundering;
 - (vi) exchange of relevant information for the implementation of points (a) to (d).
- (e) Water policy and institution building; water resources protection; waste management (water for agriculture or energy will be covered under the relevant sector).

In the water supply and sanitation sector, the aim shall be to provide services in under-served areas. Funding that supports increasing access to drinking water supply and sanitation services contributes directly to human resources development by improving the state of health, and thus increasing the productivity, of people who do not already have access to these services; the continuing need to extend basic services in water, sanitation, and transport to both urban and rural populations must be addressed in environmentally sustainable ways.

- (f) The Community shall cooperate with the OCTs in the conservation, sustainable use and management of their biological diversity taking into account the Community Action Plan on biological diversity.

Cooperation in this area may, in particular, extend to:

- (i) supporting the elaboration, updating and implementation of national biodiversity strategies and action plans;
- (ii) facilitating the establishment of local, regional and sub-regional mechanisms for the exchange of information and the monitoring and assessment of progress in the implementation of the Convention on Biological Diversity (CBD) ⁽¹⁾;
- (iii) developing and maintaining up-to-date databases on OCT biological diversity;
- (iv) implementing appropriate measures relating to the access to genetic resources;
- (v) promoting the conclusion of agreements with the private sector for the use of the country's genetic resources, so that local communities may effectively benefit from the economic revenue derived from such agreements and so that the use of genetic resources does not harm the protection and conservation of the biodiversity;

- (vi) assisting the OCTs to participate actively in the policy-making process and negotiations under the CBD.
- (g) Housing and integrated urban development projects and programmes.

In urban development, efforts shall focus on building or rehabilitating roads and other basic infrastructure, including low-income housing.

Article 16

Regional cooperation and integration

Cooperation shall ensure that effective aid is provided in order to achieve the objectives and priorities established by the competent OCT authorities in the framework of regional and sub-regional cooperation and integration:

1. Regional cooperation shall cover operations agreed on between:
 - (a) two or more OCTs;
 - (b) one or more OCTs and one or more neighbouring ACP or non-ACP States;
 - (c) one or more OCTs and one or more ACP States or one or more of the most remote regions referred to in Article 299(2) of the Treaty (Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, the Canary Islands, Azores and Madeira);
 - (d) two or more regional bodies of which OCTs are members;
 - (e) one or more OCTs and regional bodies of which OCTs, ACP States or one or more of the most remote regions are members.
2. The objectives of cooperation in this context shall be to:
 - (a) foster the gradual integration of the OCTs into the world economy;
 - (b) accelerate economic cooperation and development within the regions of the OCT and between them and the regions of the ACP States;
 - (c) promote the free movement of persons, goods, services, capital, labour and technology;
 - (d) accelerate economic diversification and the coordination and harmonisation of regional and sub-regional cooperation policies;
 - (e) promote and foster inter-OCT and intra-OCT trade as well as trade with the most remote regions, ACP States or other third countries.
3. In the context of regional integration, the aim of cooperation shall be to:
 - (a) build and enhance the capacity of regional cooperation and integration organisations and institutions to promote regional cooperation and integration;
 - (b) encourage the least developed OCTs to take part in the development of regional markets and benefit therefrom;

⁽¹⁾ Council Decision 93/626/EEC of 25 October 1993 concerning the conclusion of the convention on Biological Diversity (OJ L 309, 13.12.1993, p. 1).

- (c) implement sectoral reform policies at regional level;
 - (d) liberalise trade and payments;
 - (e) stimulate cross-border foreign and domestic investment and other regional or sub-regional economic integration initiatives;
 - (f) take account of the net transitional cost of regional integration on budget revenue and balance of payments.
4. Cooperation shall, in the area of regional cooperation, cover a wide variety of functional and thematic fields which specifically address common problems and take advantage of economies of scale, including:
- (a) infrastructure, particularly transport and communications infrastructure and related safety problems, energy;
 - (b) the environment, water resource management;
 - (c) health, education and training;
 - (d) research and scientific and technical cooperation;
 - (e) regional disaster preparedness and alleviation initiatives;
 - (f) other areas, e.g. arms controls, drugs, organised crime, money laundering, fraud and corruption.
5. Cooperation shall also support inter-regional, inter-OCT and inter-ACP cooperation schemes and initiatives.

Article 17

Cultural and social cooperation

Cooperation shall contribute to the self-reliant development of the OCTs, this being a process centred on people themselves and rooted in each people's culture. The human and cultural dimension shall embrace all areas and be reflected in all development projects and programmes. Cooperation shall back up the policies and measures adopted by the competent OCT authorities to enhance their human resources, increase their own creative capacities and promote their cultural identities. It shall foster participation by the population in the process of development.

Cultural and social cooperation shall be expressed through:

- the taking into account of the cultural and social dimension;
- promotion of cultural identities and intercultural dialogue, with particular reference to preserving the cultural heritage, the production and dissemination of cultural products, cultural events and information and communication;
- operations to enhance human resources, notably covering education and training, scientific and technical cooperation, the role of women in development, health and combating drug abuse, population and demography.

PART THREE

INSTRUMENTS OF OCT-EC COOPERATION

TITLE I

DEVELOPMENT FINANCE COOPERATION

Chapter 1

General provisions

Article 18

Objectives

The objective of development finance cooperation shall be, through the provision of adequate financial resources and appropriate technical assistance, to:

- (a) support and promote the OCTs' own efforts to achieve sustainable social, cultural and economic development on the basis of mutual interest and in a spirit of interdependence;
- (b) help raise the standard of living of the peoples of the OCTs;
- (c) promote measures likely to mobilise the capacity for initiative of communities, groups, associations and individuals and their participation in the design and implementation of development programmes;

- (d) contribute to the fullest participation of the population in the benefits of development in the interests of alleviating poverty;
- (e) contribute to the development of the capacity of the OCTs to innovate, adapt and transform local technologies and to master appropriate new technologies;
- (f) support the efforts of the OCTs to achieve economic diversification, *inter alia* by contributing to sustainable exploration, conservation, processing and exploitation of their natural resources;
- (g) provide support for and promote the optimal development of human resources in the OCTs;
- (h) facilitate an increase in the financial flows to the OCTs that meet their evolving needs and support the efforts of the OCTs to harmonise international cooperation for their development through cofinancing of operations with other financing agencies or third parties;
- (i) promote direct private investment in the OCTs, support the development of a healthy, prosperous and dynamic OCT private sector and encourage local, national and foreign private investment flows into the productive sectors in the OCTs;

- (j) encourage inter-OCT and OCT-ACP regional cooperation, solidarity and integration;
- (k) permit the establishment of more balanced economic and social relations and better understanding between the OCTs, ACP States, Member States and the rest of the world, with a view to assisting the integration of the OCTs into the world economy;
- (l) enable OCTs faced with serious economic and social difficulties of an exceptional nature resulting from natural disasters or extraordinary circumstances having comparable effects to benefit from emergency assistance;
- (m) help the least-developed OCTs to overcome the specific obstacles which hamper their development efforts.

Article 19

Principles

1. Development finance cooperation shall be based on partnership, complementarity and subsidiarity and shall:
 - (a) be implemented, in accordance with the association and development strategies adopted pursuant to Article 4, with due regard to the OCTs respective geographical, social and cultural characteristics, as well as their specific potential;
 - (b) ensure that resource flows are accorded on a predictable and regular basis;
 - (c) be flexible and tailored to the situation in each OCT.
2. Member States shall cooperate with the Commission to ensure sound financial management in the use of Community funds.
3. Following a partnership approach, Community activities shall be decided in close consultation between the Commission, the OCT authorities concerned and the Member State to which it is linked. Such partnership shall be conducted in full compliance with the respective institutional, legal and financial powers of each of the partners.
4. Without prejudice to the second subparagraph of Article 25(1), Community and Member States contributions shall be complementary.
5. In accordance with the principle of subsidiarity, the authorities of the OCT concerned shall be responsible for implementing operations without prejudice to the powers of the Commission designed to ensure sound financial management in the use of Community funds.

Article 20

Single Programming Documents

1. Pursuant to Article 4, the OCT authorities, the Commission and the Member State to which the OCT is linked, acting

in partnership, shall lay down the strategy and the priority aims on which the SPD is to be based.

2. The OCT authorities shall be responsible for:

- (a) establishing their priorities on which the cooperation strategy should be based;
- (b) in the framework of sectoral planning, identifying projects and programmes and establishing back-up measures to ensure the sustainability and viability of the proposed schemes;
- (c) preparing project and programme dossiers;
- (d) preparing, negotiating and concluding contracts;
- (e) implementing and managing projects and programmes;
- (f) maintaining projects and programmes and ensuring their sustainability.

3. The relevant authorities of the OCTs and the Commission shall be jointly responsible for:

- (a) adopting the SPD;
- (b) ensuring equality of conditions for participation in invitations to tender and contracts;
- (c) monitoring and evaluating the effects and results of projects and programmes;
- (d) ensuring the proper, prompt and efficient execution of projects and programmes.

4. The Commission shall be responsible for taking the financing decision on the overall allocation corresponding to the SPD, in accordance with the procedure referred to in Article 24.

5. Unless otherwise provided in this Decision, all decisions requiring the approval of a party to the association shall be approved, or be deemed approved, within six months of notification by the other party.

Article 21

Scope of financing

Within the framework of the strategy and priorities established by the OCT concerned at local or regional level, financial support may be given to operations helping to achieve the objectives set out in this Decision.

The following activities shall fall within its scope:

- (a) sectoral policies and reforms as well as projects that are in coherence with them;
- (b) institutional development, capacity building and integration of environmental aspects;

- (c) technical cooperation programmes;
- (d) humanitarian aid and emergency relief operations;
- (e) additional support in the event of fluctuations in export earnings from exports of goods and services.

Article 22

Eligibility for financing

1. The following entities or bodies shall be eligible for financial support provided under this Decision:

- (a) OCTs;
 - (b) regional or inter-State bodies to which one or more OCTs belong and which are authorised by their relevant authorities;
 - (c) joint bodies set up by the Community and the OCTs to pursue certain specific objectives.
2. Subject to the agreement of the authorities of OCTs concerned, the following shall also be eligible for support:
- (a) local, national and/or regional public or semi-public agencies, departments or local authorities of the OCTs and in particular their financial institutions and development banks;
 - (b) companies and firms of the OCTs and of regional groups;
 - (c) enterprises of a Member State, so as to enable them, in addition to their own contribution, to undertake productive projects in the territory of an OCT;
 - (d) OCT or Community financial intermediaries promoting and financing private investments in the OCTs;
 - (e) actors of decentralised cooperation and other non-State actors from OCTs and from the Community, to enable them to undertake economic, cultural, social and educational projects and programmes in the OCTs in the framework of decentralised cooperation, as referred to in Article 29.

Article 23

Programming and implementation

The Commission shall adopt the implementing provisions for this Part of the Decision and for Annexes II A to D within 12 months of its entry into force, in accordance with the procedure laid down in Article 24 and in cooperation with the OCTs in accordance with Article 7.

It shall support the full utilisation by the OCTs of the instruments laid down in this Decision, in particular the trade and financial provisions, by providing the relevant guidelines and information within 12 months of its entry into force.

The provisions shall include in particular:

- (a) the procedure for preparing the SPD and its essential elements;

- (b) the procedures and criteria for the follow-up, audit, ex-ante, mid-term and ex-post evaluation, review and implementation of the SPD, including those in relation to the Commission's participation in these activities;
- (c) the preparation of periodical or other reports;
- (d) detailed rules for the financial corrections referred to in Article 32.

The financial and accounting procedures shall be laid down in the 9th EDF Financial Regulation.

Article 24

The EDF-OCT Committee

1. The Commission shall, where appropriate, be assisted by the Committee created by the Internal Agreement, hereinafter referred to in this Article as 'the Committee'.

2. When exercising the powers conferred on it by this Decision, the Committee shall be known as the 'EDF-OCT Committee'. The internal rules of procedure of the Committee created by the Internal Agreement shall apply to the EDF-OCT Committee.

3. The Committee shall focus its work on the substantive issues of development cooperation at OCT and regional level. In the interests of coherence, coordination and complementarity, it shall monitor the implementation of the SPDs.

4. The Committee shall give its opinion on:

- (a) draft SPDs and any amendments to them;
- (b) the implementing provisions for this Part of the Decision and for Annexes II A to D.

5. The representative of the Commission shall submit to the Committee a draft of the measures to be taken. The Committee shall deliver its opinion on the draft within a time limit laid down by the chairman. The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 21(4) of the Internal Agreement. The votes of the representatives of the Member States within the Committee shall be weighted in the manner set out in paragraph 3 of that Article. The chairman shall not vote.

6. The Commission shall adopt the measures, which shall apply immediately. However, if the measures are not in accordance with the opinion of the Committee they shall be communicated by the Commission to the Council forthwith. In that event, the Commission may defer application of the measures which it has decided on for a period of not more than three months from the date of such communication.

7. The Council, acting by the majority and in accordance with the weighting referred to in paragraph 5, may take a different decision within the period provided for in paragraph 6.

8. The Commission shall inform the Committee of the follow-up, evaluation and audit of SPDs.

Chapter 2

Resources made available to the OCTs

Article 25

Financial assistance

1. The overall amount of Community financial assistance for the purposes of Chapter 1, its allocation, financing terms and arrangements and of the use of the assistance for the period from 2000 to 2007 can be found in Annexes II A to D and in Chapter 3, without prejudice to the provisions to be adopted by the Commission as laid down in Article 24.

Financial assistance under this Decision may be used to cover the total cost of both the local and foreign expenditure of projects and programmes, including financing of recurrent costs.

2. OCTs are also eligible for financing under the legislation in force in favour of the developing countries listed in Annex II E and for the Community programmes listed in Annex II F.

Chapter 3

Private Sector Investment Support

Article 26

Investment promotion

The authorities of the OCT, Member States and the Community, recognising the importance of private investment in the promotion of their development cooperation and acknowledging the need to take steps to promote such investment, shall:

- (a) implement measures to encourage participation in their development efforts by private investors who comply with the objectives and priorities of OCT-EC development cooperation and with the appropriate laws and regulations;
- (b) accord fair and equitable treatment to such investors;
- (c) take measures and actions which help to create and maintain a predictable and secure investment climate as well as enter into negotiations on agreements which will improve such a climate;
- (d) promote effective cooperation among OCT economic operators and between them and those of the Community in order to increase the flow of capital, management skills, technology and other forms of know-how;
- (e) seek to promote a greater flow of private resources between the Community and the OCTs by contributing, *inter alia*, to the removal of obstacles which impede OCT operators' access to international capital markets, including those of the Community;
- (f) create an environment which encourages the development of financial institutions and the mobilisation of resources which are essential to capital formation and the growth of entrepreneurship;

- (g) promote the development of enterprises by taking such steps as are necessary to improve the business environment and, in particular, foster a legal, administrative and incentive framework which is conducive to the emergence and development of dynamic private sector enterprises including grassroots operations;
- (h) strengthen the capacity of local institutions in the OCTs to provide the range of services which can encourage greater local participation in industrial and business activity.

Article 27

Investment support and financing

Cooperation will provide long-term financing to help promote private sector growth and mobilise national and foreign capital to that effect. To this end, cooperation shall in particular provide:

- (a) grants to cover technical and financial assistance in support of human resource development, institutional capacity building, or other forms of institutional aid linked to a specific investment; measures designed to make enterprises more competitive and build the capacity of private financial and non-financial intermediaries; measures to facilitate and promote investment and activities to improve competitiveness;
- (b) advisory and consultancy services to help create an investment-friendly climate and a stock of information to help guide and encourage capital flows;
- (c) grants funded by the Investment Facility referred to in Annex II C;
- (d) loans from the EIB's own resources.

The conditions applicable to the Investment Facility and the abovementioned loans are laid down respectively in Annexes II B and C.

Chapter 4

Additional support in the event of fluctuations in export earnings

Article 28

Additional support

1. In order to mitigate the adverse effects of any short-term fluctuations in export earnings, in particular in the agricultural and mining sectors, which might jeopardise the attainment of the development objectives of the OCT concerned, a system of additional support shall be instituted within the financial allocation referred to in Annex II A.

2. The purpose of support in the event of short-term fluctuations in export earnings is to safeguard macroeconomic and sectoral reforms and policies that are at risk as a result of a drop in revenue and remedy the adverse effects of instability of export earnings in particular from agricultural and mining products.

3. The dependence of the OCT economies on exports, in particular in the agricultural and mining sectors, shall be taken into account in the allocation of resources referred to in Annex II D. In this context, the least developed OCTs shall receive more favourable treatment.

4. The additional resources shall be provided in accordance with the specific modalities of the support mechanism as set out in Annex II D.

5. The Community shall also provide support for market-based insurance schemes designed for OCTs seeking to protect themselves against the risk of fluctuations in export earnings.

Chapter 5

Support for other actors of cooperation

Article 29

Objectives and financing

1. In order to respond to the development needs of local communities and encourage all actors of decentralised cooperation which are in a position to contribute to the autonomous development of the OCTs to put forward and implement initiatives, OCT-EC cooperation shall support such development operations within limits laid down by the OCTs concerned and by the Member States to which these OCTs are linked, and within the framework of the SPD provisions.

2. In this context, financial support shall be given to decentralised projects and microprojects as follows:

- (a) The cooperation partners eligible for financial support under this Chapter shall be decentralised cooperation agents in the Community or the OCTs or other developing countries, namely: local authorities, non-governmental organisations, local traders' associations and local citizens' groups, cooperatives, trade unions, women's and youth organisations, teaching and research institutions, churches and any non-governmental associations likely to contribute to development.

This form of cooperation shall make available for the development of the OCTs the capabilities, innovative operating methods and resources of the actors of decentralised cooperation. Support will take account in particular joint actions between Community, OCT and other developing countries;

- (b) Local microprojects shall have an economic and social impact on the life of the people, meet a demonstrated and observed priority need and be undertaken at the initiative and with the active participation of the local community which will benefit therefrom.

3. Projects or programmes under this form of cooperation may be a way of achieving the specific objectives of the SPD or

the results of initiatives by local communities or decentralised actors.

4. The support provided for under this Chapter shall be additional or, if need be, complementary in respect of the provisions in Annex II E.

5. Contributions to the funding of microprojects and decentralised cooperation shall come from grants, in which case the contribution shall not normally exceed three-quarters of the total cost of each project. The balance shall be financed:

- (a) for microprojects, by the local community concerned, in kind or in the form of services or cash and adapted to its capacity to contribute;
- (b) for decentralised cooperation, by the actors of decentralised cooperation, provided that the financial, technical, material and other resources brought in by such actors is not, as a general rule, less than 25 % of the estimated cost of the project/programme;
- (c) in exceptional cases where both microprojects and decentralised cooperation are concerned, by the authorities of the OCT concerned, either in the form of financial contribution or through the use of public equipment or the supply of services.

The procedures applicable to projects and programmes financed in the context of microprojects or decentralised cooperation shall be as set out in this Decision, notably with regard to the SPD implementing provisions.

Chapter 6

Support for humanitarian and emergency aid

Article 30

Objectives and means

1. Humanitarian and emergency aid shall be granted to OCTs faced with serious economic and social difficulties of an exceptional nature resulting from natural disasters or extraordinary circumstances having comparable effects. Humanitarian and emergency aid shall be maintained as long as necessary to deal with the urgent problems which arise in such situations.

Humanitarian and emergency aid shall be granted solely on the basis of the needs and interests of disaster victims.

2. The aim of humanitarian and emergency aid shall be to:

- (a) save human lives in crisis and post-crisis situations caused by natural disasters or extraordinary circumstances having comparable effects;
- (b) help finance the transport of aid and efforts to ensure that it is accessible to those for whom it is intended, by all logistical means available;

- (c) implement short-term rehabilitation and reconstruction measures in order to establish conditions as soon as possible for the people concerned to be integrated or reintegrated;
- (d) respond to needs arising as a result of people being displaced, such as refugees, displaced persons and returnees following natural or man-made disasters so as to meet all the requirements of refugees and displaced persons wherever they may be for as long as is necessary and facilitate their voluntary resettlement;
- (e) help the OCTs to develop or perfect systems of disaster prevention and preparedness, including prediction and early-warning systems, with a view to reducing the consequences of disasters.

3. Similarly aid may be granted to OCTs taking in refugees or returnees to meet acute needs not covered by emergency assistance.

4. Aid provided for by this Article shall be financed from the Community budget. However, it may exceptionally be financed from the allocations laid down in Annex II A, in addition to the funding from the budget heading concerned.

5. Humanitarian and emergency aid operations shall be undertaken at the request of the OCT affected, the Commission, the Member State to which the OCT is linked, international organisations or local or international non-governmental organisations. Such aid shall be administered and implemented under procedures that facilitate rapid, flexible and effective operations.

Chapter 7

Implementation Procedures

Article 31

Technical assistance

1. On the initiative of or on behalf of the Commission, studies or technical assistance measures may be financed in order to ensure the preparation, monitoring, evaluation and supervision necessary for implementing this Decision.

Such studies or technical assistance measures shall be financed by the overall grant allocation.

2. On the initiative of the OCT, studies or technical assistance measures may be financed in relation to the implementation of the activities contained in the SPD, subject to the Commission's opinion.

Such studies or technical assistance measures shall be financed from the allocation of the OCT concerned.

Article 32

Financial control

1. The OCT concerned shall bear primary responsibility for the financial supervision of the operation. This shall be carried out, where appropriate, in coordination with the Member State to which the OCT is linked in accordance with the applicable national legislation.

2. The Commission shall be responsible for:

- (a) ensuring that management and control systems exist and function properly in the OCT concerned so as to ensure that the Community funds are used correctly and effectively;
- (b) in the event of irregularities, sending recommendations or requests for corrective measures to remedy those irregularities and rectify any management shortcomings found.

3. The Commission, OCT and, where appropriate, the Member State to which it is linked, shall cooperate on the basis of administrative arrangements at annual or biannual meeting to coordinate programmes, methodologies and the implementation of controls.

4. With regard to financial corrections:

- (a) the OCT shall be responsible in the first instance for detecting and correcting financial irregularities;
- (b) however, in the event of shortcomings by the OCT concerned, the Commission shall take action, if the OCT fails to remedy the situation and attempts at conciliation are unsuccessful, to reduce or withdraw the balance of the overall allocation corresponding to the SPD financing decision.

Chapter 8

Transition from previous European Development Funds (EDFs) to the 9th EDF

Article 33

Implementing the previous EDFs and the transitional phase

1. Commitments made in the framework of the 6th, 7th and 8th EDFs before the entry into force of this Decision shall continue to be executed following the rules applicable to those EDFs.

Resources from the sixth, seventh and eighth EDFs which were allocated to OCTs before the entry into force of this Decision shall remain allocated to them. These resources shall continue to be used in accordance with the relevant provisions of Decision 91/482/EEC, which shall remain applicable for such purposes, until the entry into force of the Internal Agreement establishing the 9th EDF.

Until the Internal Agreement establishing the 9th EDF comes into force, the officials responsible for managing and implementing European Development Fund resources, namely the EDF Chief Authorising Officer, the OCT Local Authorising Officer and the Commission's Head of Delegation, shall remain responsible for the management and implementation tasks assigned to them by Council Decision 91/482/EC.

2. Any balances remaining from previous EDFs on the date of entry into force of the Internal Agreement establishing the 9th EDF, as well as any amounts that shall be decommitted at a later date from ongoing projects under these Funds, shall be transferred to the 9th EDF and used in accordance with the conditions laid down in this Decision.

Any resources thus transferred to the 9th EDF that previously had been allocated to the indicative programme of an OCT or region shall remain allocated to that OCT or to regional cooperation.

Any other remaining balances not allocated to an indicative programme shall be transferred to the non-committed amount of the 9th EDF. The overall amount of this Decision, supplemented by the transferred balances from previous EDFs, shall cover the period 2000–2007. This paragraph shall apply in particular to any remaining balances of the overall amounts referred to in Articles 118 and 142 of Decision 91/482/EEC concerning, respectively, the stabilisation of export earnings from agricultural commodities (Stabex) and the special financing facility (Sysmin).

TITLE II

ECONOMIC AND TRADE COOPERATION

Article 34

Objective

1. The objective of economic and trade cooperation shall be to promote the economic and social development of the OCTs, in particular by establishing close economic relations between them and the Community as a whole.

The implementation of such cooperation must be consistent with the objectives of the other common policies.

2. Furthermore, the Community undertakes to support the effective integration of the OCTs in the global economy and the development of their trade in goods and services to regional and world markets.

Chapter 1

Arrangements for trade in goods

Article 35

Free access for originating products

1. Products originating in the OCTs shall be imported into the Community free of import duty.

2. The concept of originating products and the methods of administrative cooperation relating thereto are laid down in Annex III.

Article 36

Transshipment of non-originating products in free circulation in the OCTs

1. Products not originating in the OCTs but which are in free circulation in an OCT and are re-exported as such to the Community shall be accepted for import into the Community free of customs duties and taxes having equivalent effect providing that they:

- (a) have paid, in the OCT concerned, customs duties or taxes having equivalent effect of a level equal to, or higher than, the customs duties applicable in the Community on import of these same products originating in third countries eligible for the most-favoured-nation clause;
- (b) have not been the subject of an exemption from, or a refund of, in whole or in part, customs duties or taxes having equivalent effect, without prejudice to paragraph 2;
- (c) are accompanied by an export certificate.

2. Without prejudice to paragraph 1, the Commission may, following a duly substantiated request from the authorities of the OCT concerned and in the light of the objectives of this Decision, authorise OCT public financial aid to those operating the transshipment procedure.

The request shall in particular indicate the nature and the anticipated volume of trade, which would benefit from the aid.

This aid must take the form of an aid for transport of goods put in free circulation, including legitimate running costs supported in relationship with the transshipment procedure. This aid shall not provoke a serious disturbance or difficulties, which may result in a deterioration in an economic sector of the Community or of one or more Member States.

The OCT authorities may make representations to the Commission in order to provide further information to substantiate their written request.

If the OCT authorities so request, a partnership working party referred to in Article 7(3) shall be convened to resolve any issues arising from the administration of the transshipment procedure.

3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to:

- (a) the agricultural products listed in Annex I to the Treaty nor to products covered by Council Regulation (EEC) No 3448/93 of 6 December 1993 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products⁽¹⁾ except, as from 1 February 2002 and subject to the adoption by the Commission of the necessary implementing arrangements, for fisheries products:

- (A) falling within CN codes 0303 31 10 00, 0304 20 95 10 and 0306 13 10 transhipped through Greenland within an annual quantity of 10 000 tons, and

⁽¹⁾ OJ L 318, 20.12.1993, p. 18. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 2580/2000 (OJ L 298, 25.11.2000, p. 5).

- (B) falling within CN codes 0302 21 10, 0303 31 10, 0305 49 10, 0306 12 10, 0306 12 90, 0306 22 91, 0306 22 99, 0306 13 10, 0306 13 30, 0306 13 40, 0306 13 50, 0306 13 80, 0306 23 10, 0306 23 31, 0306 23 39, 0306 23 90 transhipped through Saint-Pierre-et-Miquelon within an annual quantity of 2 000 tonnes;
- (b) products subject, on import into the Community, to quantitative restrictions or limitations or to anti-dumping duties.
4. The conditions for entry into the Community of products not originating in the OCTs but in free circulation in an OCT, and the methods of administrative cooperation relating thereto, are laid down in Annex IV.

Article 37

Committee procedure

1. In matters covered by Article 36, the Commission shall be assisted by a Committee.
2. Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply to the proceedings of the Committee.
3. The Committee shall adopt its rules of procedure.

Article 38

Quantitative restrictions and measures having equivalent effect

1. The Community shall not apply to imports of products originating in the OCTs any quantitative restrictions or measures having equivalent effect.
2. Paragraph 1 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality or public policy, the protection of health and life of humans, animals and plants, the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value, the conservation of exhaustible natural resources or the protection of industrial and commercial property.

Such prohibitions or restrictions shall in no case constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction of trade generally.

Article 39

Waste

1. Movements of waste between the Member States and the OCTs shall be controlled in accordance with international and Community law. The Community shall support the establishment and development of effective international cooperation in

this area with a view to protecting the environment and public health.

2. The Community shall prohibit all direct or indirect export of waste to the OCTs, with the exception of exports of non-hazardous waste destined for recovery operations while at the same time the OCT authorities shall prohibit the direct or indirect import into their country of such waste from the Community or any other country, without prejudice to specific international undertakings concerning these areas that have been made, or may be made in future, in the competent international fora.

3. As regards the Community, Council Regulation (EEC) No 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community⁽¹⁾ shall apply.

4. As regards those OCTs, which, due to their constitutional status, are not Party to the Basle Convention, their relevant authorities shall expedite adoption of the necessary internal legislation and administrative regulations to implement the provisions of the Basle Convention⁽²⁾.

5. In addition, the Member States concerned shall promote the adoption by the OCTs of the necessary internal legislation and administrative regulations to implement:

- (a) Regulation (EEC) No 259/93 as follows:
 - (i) Article 13 as regards shipments of waste within the OCTs,
 - (ii) Article 18 as regards exports of waste to the ACP States from the OCTs;
- (b) Regulation (EC) No 1420/1999⁽³⁾;
- (c) Commission Regulation (EC) No 1547/1999⁽⁴⁾;
- (d) European Parliament and Council Directive 2000/59/EC subject to the time limits for transposition laid down in Article 16 thereof⁽⁵⁾.

6. As regards imports into the Community from the OCTs of hazardous waste and of non-hazardous waste destined for final disposal, Articles 1 to 12 and 25 to 39 of Regulation (EEC) No 259/93 and Commission Decision 94/774/EC⁽⁶⁾, shall apply.

7. One or more OCTs and the Member State to which they are linked may apply national procedures to export of waste from the OCTs to that Member State.

⁽¹⁾ OJ L 30, 6.2.1993, p. 1. Regulation as last amended by Commission Decision 1999/816/EC (OJ L 316, 10.12.1999, p. 45).

⁽²⁾ Council Decision 93/98/EEC of 1 February 1993 on the conclusion on behalf of the Community, of the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basle Convention) (OJ L 39, 16.2.1993, p. 1).

⁽³⁾ Council Regulation (EC) No 1420/1999 of 29 April 1999 establishing common rules and procedures to apply to shipments to certain non-OECD countries of certain types of waste (OJ L 166, 1.7.1999, p. 6). Regulation as last amended by Commission Regulation (EC) No 1800/2001 (OJ L 244, 14.9.2001, p. 19).

⁽⁴⁾ Commission Regulation No 1547/1999/EC of 12 July 1999 determining the control procedures under Council Regulation (EEC) No 259/93 to apply to shipments of certain types of waste to certain countries to which OECD Decision C(92)39 final does not apply (OJ L 185, 17.7.1999, p. 1). Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1800/2001.

⁽⁵⁾ European Parliament and Council Directive No 2000/59/EC of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues (OJ L 332, 28.12.2000, p. 81).

⁽⁶⁾ Commission Decision 94/774/EC of 24 November 1994 concerning the standard consignment note referred to in Council Regulation No 259/93/EEC on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community (OJ L 310, 3.12.94, p. 70).

In this case, the Member State concerned notifies to the Commission the applicable legislation within six months from the entry into force of this Decision or of any future relevant national legislation, including any amendments to it.

Article 40

Measures adopted by the OCTs

1. In view of the present development needs of the OCTs, the authorities of the OCTs may retain or introduce, in respect of imports of products originating in the Community, such customs duties or quantitative restrictions as they consider necessary.
2. (a) The trade arrangements applied to the Community by the OCTs may not give rise to any discrimination between Member States nor be less favourable than most-favoured-nation treatment.
- (b) Notwithstanding specific provisions of this Decision, the Community shall not discriminate between OCTs in the field of trade.
- (c) The provisions of (a) shall not preclude a country or territory from granting certain other OCTs or other developing countries more favourable treatment than that accorded to the Community.
3. The authorities of the OCTs shall communicate to the Commission, within a period of three months following the entry into force of this Decision, the customs tariffs and lists of quantitative restrictions which they apply.

They shall also communicate to the Commission any subsequent amendments to such measures as and when they are adopted.

Article 41

Surveillance clause

1. The products originating in the OCTs referred to in Article 35 or products not originating in the OCT referred to in Article 36 may be subject to special surveillance. The Commission shall decide to which products surveillance shall apply in consultation with the OCT authorities and the Member State to which the OCT is linked.
2. Article 308d of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993, laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 on the Community Customs Code⁽¹⁾, shall apply.
3. The Commission and the competent OCT authorities shall ensure the effectiveness of the surveillance measures by introducing the methods of administrative cooperation set out in Annexes III and IV.

⁽¹⁾ OJ L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 993/2001 (OJ L 141, 28.5.2001, p. 1).

Article 42

Safeguard measures

1. If, as a result of the application of this Decision, serious disturbances occur in a sector of the economy of the Community or one or more of its Member States, or their external financial stability is jeopardised, or if difficulties arise which may result in a deterioration in a sector of the Community's activity or in a region of the Community, the Commission may, on its own initiative or at the request of one or more Member States and following consultation with the Committee referred to in Article 43 take or authorise the Member States concerned to take the necessary safeguard measures, in accordance with the paragraphs below.
2. For the purpose of implementing paragraph 1, priority shall be given to such measures as would least disturb the functioning of the association and the Community. These measures shall not exceed the limits of what is strictly necessary to remedy the difficulties that have arisen. They cannot exceed the withdrawal of the preferential treatment granted by this Decision.
3. When safeguard measures are taken or modified, particular attention shall be paid to the interests of the least-developed OCTs.
4. This Article is without prejudice to the rights and obligations of the Community under WTO rules, including those contained in the WTO Agreement on Safeguards⁽²⁾. Neither shall it preclude application of the regulations establishing a common organisation of agricultural markets, or Community or national administrative provisions derived therefrom, or the specific rules adopted under Article 235 of the Treaty for processed agricultural products.
5. (a) If a Member State asks the Commission for safeguard measures to be applied, the Commission shall inform the Council, the Member States and the OCT authorities accordingly within three working days from the date of receipt of the Member State's request, and shall invite the OCT authorities to supply any information which they consider important to the situation at hand.
- (b) When the Commission acts on its own initiative, it shall inform the OCTs concerned and the Member States at the earliest possible stage.
- (c) If the OCT authorities so require and without prejudice to the deadlines referred to in this Article, a partnership working party referred to in Article 7(3) shall be convened. The outcome of the working party shall be transmitted to the consultative committee. In this case, the deadline referred to in paragraph 9 of this Article shall be extended by ten working days. At the same time it shall invite the Member States to a meeting of the committee referred to in Article 43.

Member States and the OCTs shall provide the Commission with any information necessary to justify their requests to apply safeguard measures or not to do so.

⁽²⁾ OJ L 336, 23.12.1994, p. 184.

6. The Commission shall notify the Council, the Member States and the OCT authorities immediately of the decision to take the necessary safeguard measures. The Decision shall apply with immediate effect.

7. Any Member State may refer the Commission's decision referred to in paragraph 6 to the Council within 10 working days of receiving notification of the decision.

8. Should the Commission fail to adopt a decision within 21 working days or if it rejects the request or if the Commission decides not to take safeguard measures, any Member State that has brought the matter before the Commission may refer it to the Council.

9. In the cases referred to in paragraphs 7 and 8, the Council, acting by a qualified majority, may adopt a different decision within 21 working days.

Article 43

Committee procedure

1. In matters covered by Article 42, the Commission shall be assisted by a Committee.

2. Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply to the proceedings of the Committee.

3. The Committee shall adopt its rules of procedure.

Chapter 2

Trade in services and rules of establishment

Article 44

General objective

The long-term aim in this area is a progressive liberalisation of trade in services, with due respect for the OCTs' local policy objectives, and taking due account of the level of development of the OCT and the obligations entered into by the Community, Member States or the OCTs in the WTO framework.

Article 45

General principles of establishment and the provision of services

1. For the purposes of this Chapter, the following definitions shall apply:

(a) 'companies or enterprises': companies or enterprises constituted under civil or commercial law, including public or other companies, cooperative societies and any other legal person or association governed by public or private law, save for those which are non-profit-making.

'Companies or enterprises of Member States' are those formed in accordance with the laws of a Member State and whose registered office, central administration or principal place of business is in a Member State. However, a company or enterprise having only its registered office in a

Member State must be engaged in an activity which has an actual and continuous link with the economy of that Member State.

'OCT companies or enterprises' are those formed in accordance with the law applicable in a given OCT and whose registered office, central administration or principal place of business is in that OCT; however, a company or enterprise having only its registered office in a country or territory must be engaged in an activity which has an actual and continuous link with the economy of that country or territory;

(b) 'inhabitants of an OCT': persons ordinarily resident in an OCT who are nationals of a Member State or who enjoy a legal status specific to an OCT. This definition is without prejudice to the rights conferred by citizenship of the Union within the meaning of the Treaty.

2. As regards the arrangements applicable to establishment and the provision of services, in line with Article 183(5) of the Treaty and subject to paragraph 3 below:

(a) the Community shall apply to the OCTs the undertakings entered into under the General Agreement on Trade in Services (GATS) under the conditions laid down in that Agreement and in accordance with this Decision; in application of such undertakings, Member States shall not discriminate between inhabitants, companies or enterprises of the OCTs;

(b) the OCT authorities shall afford nationals, companies or enterprises of the Member States treatment that is no less favourable than that which they extend to nationals, companies or enterprises of third countries and shall not discriminate between nationals, companies or enterprises of Member States.

3. The authorities of an OCT may with a view to promoting or supporting local employment, adopt regulations to aid their inhabitants and local activities.

In this event, the OCT authorities shall notify the Commission of the regulations they adopt so that it may inform the Member States.

4. With regard to the professions of doctor, dentist, midwife, general nurse, pharmacist and veterinary surgeon, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, shall adopt the list of professional qualifications specific to OCT inhabitants which are to be recognised in the Member States.

Article 46

Maritime transport

The objective of cooperation in this field shall be to ensure harmonious development of efficient and reliable shipping services on economically satisfactory terms by facilitating the active participation of all parties according to the principle of unrestricted access to the trade on a commercial basis.

This provision shall not apply to Greenland.

Chapter 3

Trade-related areas

Article 47

Current payments and capital movements

1. Without prejudice to paragraph 2:

- (a) Member States and the OCT authorities shall impose no restrictions on any payments in freely convertible currency on the current account of balance of payments between residents of the Community and of the OCTs;
- (b) with regard to transactions on the capital account of balance of payments, the Member States and the OCT authorities shall impose no restrictions on the free movement of capital for direct investments in companies formed in accordance with the laws of the host Member State, country or territory and to ensure that the assets formed by such investment and any profit stemming therefrom can be realised and repatriated.

2. The Community, Member States and OCTs shall be entitled to take the measures referred to *mutatis mutandis* in Articles 57, 58, 59, 60 and 301 of the Treaty in accordance with the conditions laid down therein. Equally, where one or more OCTs or one or more Member States is in serious balance of payments difficulties, or under threat thereof, the OCT authorities, the Member State or the Community may, in accordance with the conditions established under the GATT, GATS and Article VIII and XIV of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, adopt restrictions on current transactions which shall be of limited duration and may not go beyond what is necessary to remedy the balance of payments situation. When taking such measures, the OCT authorities, the Member State or the Community shall inform each other without delay and submit to each other as soon as possible a timetable for the elimination of the measures concerned.

Article 48

Competition policies

1. The introduction and implementation of effective and sound competition policies and rules are of crucial importance in order to improve and secure an investment friendly climate, a sustainable industrialisation process and transparency in the access to markets.

2. To ensure the elimination of distortions to competition and with due consideration to the different levels of development and economic needs of each OCT, the Community and

the OCTs undertake to implement local, national or regional rules and policies including the control and, under certain conditions, the prohibition of agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices between undertakings which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition. The above prohibition also relates to the abuse by one or more undertakings of a dominant position in the territory of the Community or of the OCTs.

Article 49

Protection of intellectual property rights

1. An adequate and effective level of protection of intellectual, industrial and commercial property rights, including means for enforcing such rights, shall be ensured in line with the highest international standards with a view to reducing distortions and impediments to bilateral trade.

2. Intellectual property rights cover copyright, including in particular the copyright on computer programmes and neighbouring rights, utility models, patents including bio-technological inventions, industrial designs, geographical indications including appellations of origin, trademarks for goods or services, topographies of integrated circuits, the legal protection of data bases and the protection against unfair competition as referred to in Article 10 bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and protection of undisclosed information on know-how.

Article 50

Standardisation and certification

Closer cooperation shall be pursued in the field of standardisation, certification and quality assurance to remove unnecessary technical barriers and to reduce differences in those areas, so as to facilitate trade.

Article 51

Trade and the environment

Development of international trade shall be promoted in such a way as to ensure sustainable and sound management of the environment, in accordance with the relevant international agreements and undertakings and with due regard to the respective levels of development of the OCTs. The special needs and requirements of the OCTs shall be taken into account in the design and implementation of environmental measures.

Bearing in mind the Rio Principles, cooperation shall aim at ensuring the mutual supportiveness of trade and environment policies, in particular through the reinforcement of quality controls of goods and services related to the environment and the improvement of environment-friendly production methods.

Article 52

Trade and labour standards

The internationally and nationally recognised core labour standards must be respected, in particular the freedom of association and protection of the right to organise, application of the right to organise and to bargain collectively, the abolition of forced labour, the elimination of worst forms of child labour, the minimum age for admission to employment and non-discrimination in respect to employment.

Article 53

Consumer policy and consumer health protection

Cooperation shall be pursued in the area of consumer policy and consumer health protection, having due regard to the legislation in force in OCTs and the Community to avoid barriers to trade.

Article 54

Prohibition of disguised protectionist measures

The provisions of this Chapter shall not be used as a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade.

Chapter 4

Monetary and tax matters

Article 55

Tax carve-out clause

1. Without prejudice to the provisions of Article 56, the most-favoured-nation treatment granted in accordance with the provisions of this Decision shall not apply to tax advantages which the Member States or OCT authorities are providing or may provide in the future on the basis of agreements to avoid double taxation or other tax arrangements, or domestic fiscal legislation in force.

2. Nothing in this Decision may be construed to prevent the adoption or enforcement of any measure aimed at preventing the avoidance or fraud of taxes pursuant to the tax provisions of agreements to avoid double taxation or other tax arrangements, or domestic fiscal legislation in force.

3. Nothing in this Decision shall be construed to prevent the respective competent authorities from distinguishing, in the application of the relevant provisions of their fiscal legislation, between taxpayers who are not in the same situation, in particular with regard to their place of residence, or with regard to the place where their capital is invested.

Article 56

Tax and customs arrangements for Community-funded contracts

1. The OCTs shall apply to Community-funded contracts tax and customs arrangements no less favourable than those applied by them to the most-favoured States or international development organisations with which they have relations. For the purpose of determining the most-favoured-nation treatment, account shall not be taken of arrangements applied by the relevant authorities of the country or territory concerned to other developing countries.

2. Subject to paragraph 1, the following arrangements shall apply to contracts financed by the Community:

- (a) the contract shall not be subject in the beneficiary OCT to stamp or registration duties or to fiscal charges having equivalent effect, whether such charges already exist or are to be instituted in the future; however, such contracts shall be registered in accordance with the laws in force in the OCT and a fee corresponding to the service rendered may be charged for it;
- (b) profits and/or income arising from the performance of contracts shall be taxable according to the internal fiscal arrangements of the OCT concerned, provided that the natural or legal persons who realise such profit and/or income have a permanent place of business in that OCT, or that the performance of the contract takes longer than six months;
- (c) enterprises which must import equipment in order to carry out works contracts shall, if they so request, benefit from the system of temporary admission as laid down by the legislation of the beneficiary OCT in respect of that equipment;
- (d) professional equipment necessary for carrying out tasks defined in a service contract shall be temporarily admitted into the beneficiary OCT in accordance with the legislation of that OCT free of fiscal, import and customs duties and of other charges having equivalent effect where these duties and charges do not constitute remuneration for services rendered;
- (e) imports under supply contracts shall be admitted into the beneficiary OCT without customs duties, import duties, taxes or fiscal charges having equivalent effect. The contract for supplies originating in the country or territory concerned shall be concluded on the basis of the ex-works price of the supplies, to which may be added such internal fiscal charges as may be applicable to those supplies in the country or territory;
- (f) fuels, lubricants and hydrocarbon binders and, in general, all materials used in the performance of works contracts shall be deemed to have been purchased on the local market and shall be subject to fiscal rules applicable under the legislation in force in the beneficiary OCT;

(g) personal and household effects imported for use by natural persons, other than those recruited locally, engaged in carrying out tasks defined in a service contract and members of their families, shall be exempt from customs or import duties, taxes and other fiscal charges having equivalent effect, within the limits of the legislation in force in the beneficiary OCT.

3. Any matter not covered by paragraphs 1 and 2 shall remain subject to the legislation of the OCT concerned.

4. The Commission officials, excluding locally hired staff, shall be exempt from all taxes levied in the country or territory where they are posted.

Chapter 5

Vocational training, eligibility for Community programmes and other provisions

Article 57

Vocational training

Individuals from an OCT with the nationality of a Member State shall be eligible to receive vocational training in the Community on the same basis as nationals of the Member State in question where they can meet the conditions required to be met by those nationals, including any condition of residence within the Community or the EEA.

Article 58

Programmes open to the OCTs

Individuals from an OCT and where applicable the relevant public and/or private bodies and institutions in an OCT shall be eligible for the Community programmes listed in Annex II F

and any programmes succeeding them, subject to the rules of the programmes and the arrangements applicable to the Member State with which they are connected.

The Commission may modify this list at the request of an OCT or a Member State or at its own initiative.

Article 59

Euro-Info Correspondence Centres (EICC)

At the request of the OCT authorities and in accordance with the procedures specified in Part Three, Title I, a Euro-Info Correspondence Centre, hereinafter referred to as "EICC", may be set up in an OCT. Part-financing may be made available to the EICC host structure from the grant aid available under the SPD or regional cooperation.

The tasks of the EICCs, the tools and services made available to them, the establishment procedures and criteria for selecting the host structure are set out in Annex V.

Article 60

CDE and CTA

At the request of their authorities, the OCT shall be eligible for the services of the Centre for the Development of Enterprise (CDE) and of the Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) referred to in Article 1 of Annex III to the ACP/EC Partnership Agreement.

Any costs resulting from services provided by the CDE or CTA for the benefit of the OCTs shall be financed from the funds provided for in Annex II A.

PART FOUR

FINAL PROVISIONS

Article 61

Change of status

If an OCT becomes independent:

- (a) the arrangements provided for in this Decision may continue to apply provisionally to that country or territory under conditions laid down by the Council;
- (b) the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, shall decide on any necessary adjustments to this Decision, in particular to the amounts specified in Annex II A.

set out in Articles 182 to 186 of the Treaty. In this context, the Council shall in particular adopt any necessary measures where an OCT decides in accordance with its own constitutional procedures to enter into special preferential arrangements between the Community and various partners in the region to which it belongs. The Council shall take particular account in this respect of international obligations entered into by the Community, its Member States or the OCTs, including those within the framework of the WTO.

Article 63

Article 62

Review

Entry into force

Before 31 December 2007, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, shall establish the provisions to be laid down for the subsequent application of the principles

This Decision shall enter into force on 2 December 2001. It shall be applicable until 31 December 2011.

*Article 64***Publication**

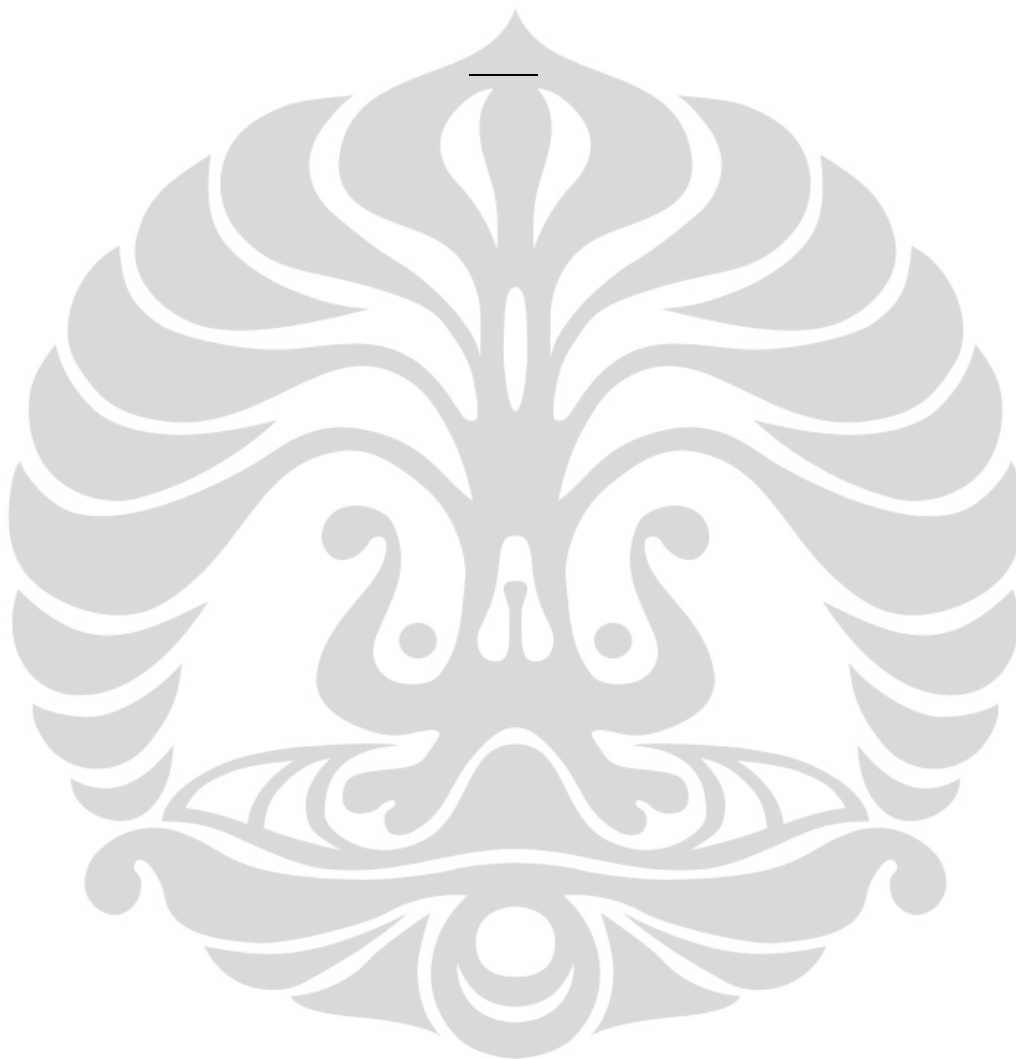
This Decision shall be published in the *Official Journal of the European Communities*.

Done at Brussels, 27 November 2001.

For the Council

The President

A. NEYTS-UYTTEBROECK



ANNEX I A

LIST OF THE COUNTRIES AND TERRITORIES (OCTs) REFERRED TO IN ARTICLE 1

- Greenland,
- New Caledonia and Dependencies,
- French Polynesia,
- French Southern and Antarctic Territories,
- Wallis and Futuna Islands,
- Mayotte,
- St Pierre and Miquelon,
- Aruba,
- Netherlands Antilles:
 - Bonaire,
 - Curaçao,
 - Saba,
 - Saint Eustatius,
 - Saint Martin (Sint Maarten),
- Anguilla,
- Cayman Islands,
- Falkland Islands,
- South Georgia and the South Sandwich Islands,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Saint Helena, Ascension Island, Tristan da Cunha,
- British Antarctic Territory,
- British Indian Ocean Territory,
- Turks and Caicos Islands,
- British Virgin Islands.

ANNEX I B

LIST OF THE OCTs CONSIDERED THE LEAST DEVELOPED, FOR THE PURPOSES OF THIS DECISION, REFERRED TO IN ARTICLE 3(3)

- Anguilla,
- Mayotte,
- Montserrat,
- Saint Helena, Ascension Island, Tristan da Cunha,
- Turks and Caicos Islands,
- Wallis and Futuna Islands,
- St Pierre and Miquelon.

ANNEX II A

COMMUNITY FINANCIAL ASSISTANCE: 9TH EDF

Article 1

Allocation between the various instruments

1. For the purposes set out in this Decision, for the five-year period from 1 March 2000 to 28 February 2005, the overall amount of Community financial assistance of EUR 175 million under the 9th European Development Fund (EDF) fixed by the Internal Agreement shall be allocated as follows:

- (a) EUR 153 million in the form of grants, including:
 - (i) EUR 145 million for programmable support for long-term development, humanitarian aid, emergency aid, refugee aid and the additional support in the event of fluctuations in export earnings. This amount shall be used in particular to finance the initiatives referred to in the Single Programming Documents (SPD);
 - (ii) EUR 8 million to support regional cooperation and integration including the dialogue and partnership actions laid down in Article 7;
- (b) EUR 20 million shall be allocated to finance the OCT Investment Facility referred to in Annex II C.
- (c) EUR 2 million shall be allocated to studies or technical assistance measures on the initiative or on the behalf of the Commission, notably for an overall evaluation of the Decision to be made two years before it expires at the latest.

2. In addition, the overall amount of financial assistance under the 9th EDF, plus any balances transferred to the 9th EDF from previous Funds pursuant to the Internal Agreement shall cover the period 2000 to 2007. Before the expiry of the 9th EDF, the Member States shall assess the degree of realisation of commitments and disbursements. The need for new resources to support financial cooperation shall be determined in the light of this assessment and shall take due account of the uncommitted and non-disbursed resources under the 9th EDF.

3. Before the expiry of the 9th EDF, the Member States shall set a date beyond which the funds of the 9th EDF may no longer be committed.

4. Should the funds provided for in paragraph 1 be exhausted before this Decision expires, the Council shall take the appropriate measures.

Article 2

Administration of resources

The EIB shall administer the loans made from its own resources, as well as the operations financed under the OCT Investment Facility. All other financial resources under this Decision shall be administered by the Commission.

Article 3

Allocation between the OCTs

1. The amount of EUR 145 million mentioned in Article 1(1)(i) shall be allocated on the basis of the needs and performance of the OCTs in accordance with the following criteria:

- (a) An amount A of EUR 66,1 million shall be allocated to the OCTs whose economic development is least advanced, namely those with a per capita Gross National Product (GNP) not exceeding 75 % of the Community GNP, according to the available statistical data.
- (b) An amount B of EUR 61 million is allocated to the OCT with a per capita GNP not exceeding the Community's GNP, in order to finance priority actions for social development and environmental protection, within the framework of the fight against poverty.
- (c) The allocation of amounts A and B shall take into account the population, the level of the GNP, the use made of previous EDFs, the respect of the principles of sound international tax and financial management, constraints due to geographical characteristics, the estimated absorption capacity and a smooth transition to prevent a sudden considerable setback in allocation for New Caledonia, French Polynesia and the Netherlands Antilles. Any allocation shall be such as to allow its effective use. It should be decided in conformity with the principle of subsidiarity.

2. The question of a possible allocation to Greenland will be examined in the light of the review provided for in Article 14 of the Protocol on the fishing conditions for the period 2001 to 2006 ⁽¹⁾.

3. A non-allocated reserve C of EUR 17,9 million is set aside in order:

- (a) to finance humanitarian, emergency and refugee aid for all the OCTs and, if necessary, the additional support in the event of fluctuations in export earnings, in accordance with Annex II D;
- (b) to make new allocations in accordance with the development of the needs and performance of the OCTs.

Performance is evaluated in an objective and transparent way, taking into account the use of the allocated resources, the effective implementation of the on-going operations, the alleviation or reduction of poverty and the sustainable development measures adopted;

- (c) If appropriate, to take the necessary measures, following the review referred to in paragraph 2;
- (d) A maximum amount of EUR 1 million is set aside to fund the interest subsidies for operations to be financed by the Bank from its own resources, in accordance with Annex II B, or under the OCT Investment Facility.

⁽¹⁾ Council Regulation (EC) No 1575/2001 of 25 June 2001 on the conclusion of the Fourth Protocol laying down the conditions relating to fishing provided for in the Agreement on fisheries between the European Economic Community, on the one hand, and the Government of Denmark and the local Government of Greenland, on the other (O) L 209, 2.8.2001, p. 1).

4. In accordance with the paragraphs above and without prejudice to the transfer of the unspent balances from previous EDF, the indicative amounts allocated under the 9th EDF are the following:

(EUR in millions)

OCT	9th EDF initial indicative allocation		
	A	B	Total
New Caledonia		13,75	13,75
French Polynesia		13,25	13,25
Wallis and Futuna	8	3,5	11,5
Mayotte	9,9	5,3	15,2
St Pierre and Miquelon	5,6	6,8	12,4
Netherlands Antilles	11,7	8,3	20,0
Falkland Islands		3	3
Turks and Caicos	8,2	0,2	8,4
Anguilla	7,9	0,1	8
Montserrat	5,3	5,7	11,0
Saint Helena and dependencies (Ascension, Tristan da Cunha)	7,5	1,1	8,6
Pitcairn	2		2
Total		EUR 127,1 million	
Non-allocated C reserve		EUR 17,9 million	

5. The Commission, following a mid-term review, may decide a different allocation of any non-allocated balances of the funds mentioned in this Article. The procedures for this review and the decision on any new allocation are adopted in accordance with Article 24 of this Decision.

ANNEX II B

COMMUNITY FINANCIAL ASSISTANCE: LOANS FROM THE EUROPEAN INVESTMENT BANK'S OWN RESOURCES

Article 1

Amount

An amount of up to EUR 20 million as laid down in Article 5 of the Internal Agreement shall be provided by the EIB in the form of loans from its own resources in accordance with the conditions provided for by its statutes and this Annex.

Article 2

European Investment Bank

1. The EIB shall:
 - (a) contribute, through the resources it manages, to the economic and industrial development of the OCTs on a territorial and regional basis; and to this end, finance as a priority productive projects and programmes or other investments aimed at promoting the private sector in all economic sectors;
 - (b) establish close cooperation links with national and regional development banks and with banking and financial institutions of the OCTs and of the Community;
 - (c) in consultation with the OCT concerned, adapt the arrangements and procedures for implementing development finance cooperation, as set out in this Decision, if necessary, to take account of the nature of the projects and programmes and to act in accordance with the objectives of this Decision, within the framework of the procedures laid down by its statute.
2. Loans from the EIB's own resources shall be granted under the following terms and conditions:
 - (a) the reference rate of interest shall be the rate applied by the EIB for a loan with the same conditions as to currency, and repayment period on the day of signature of the contract or on the date of disbursement;
 - (b) however:
 - (i) in principle, public sector projects shall be eligible for an interest rate subsidy of 3 %;
 - (ii) for private sector projects which involve restructuring operations in the framework of privatisation or for projects with substantial and clearly demonstrable social or environmental benefits, loans may be extended with an interest rate subsidy the amount and form of which will be decided with respect to the particular characteristics of the project. However, the interest rate subsidy shall not be higher than 3 %.

The final interest rate shall, in any case, never be less than 50 % of the reference rate.

- (c) the amount of the interest rate subsidy calculated in terms of its value at the times of disbursement of the loan shall be charged against the interest subsidy allocation laid down in Annex II A, Article 3(3)(d), and paid directly to the EIB;

Interest subsidies may be capitalised or used in the form of grants to support project-related technical assistance, particularly for financial institutions in the OCTs.
- (d) the repayment period of loans made by the EIB from its own resources shall be determined on the basis of the economic and financial characteristics of the project, but may not exceed 25 years. These loans shall normally comprise a grace period fixed by reference to the construction period of the project.
3. For investments financed by the EIB from its own resources in public sector companies, specific project-related guarantees or undertakings may be required from the OCT concerned.

Article 3

Conditions for foreign exchange transfer

The OCT concerned shall, in respect of operations under this Decision and in respect of which they have given their written approval:

- (a) grant exemption from all national or local duties, fiscal charges on interest, commission and amortisation of loans due in accordance with the law or laws of the OCTs concerned;
- (b) place at the disposal of the beneficiaries the currency necessary for the payment of interest, commission and the amortisation of loans due in terms of financing contracts granted for the implementation of projects and programmes on their territories;
- (c) make available to the EIB the foreign currency necessary for the transfer of all sums received by it in national currency at the exchange rate applicable between the Euro or other currencies of transfer and the national currency at the date of the transfer. These include all forms of remuneration, such as, *inter alia*, interest, dividends, commissions and fees, as well as the amortisation of loans and the proceeds from the sale of shares due in terms of financing contracts granted for the implementation of projects and programmes on their territories.

ANNEX II C

COMMUNITY FINANCIAL ASSISTANCE: THE OCT INVESTMENT FACILITY

Article 1

Objective

An OCT Investment Facility (hereinafter referred to as 'the Facility') shall be set up to promote commercially viable enterprises, mainly in the private sector but also those in the public sector supporting private sector development.

The terms and conditions of financing in relation to the operations of the Facility and the loans from own resources of the EIB shall be as laid down in this Annex, Annex II B and Articles 29 and 30 of the Internal Agreement. These resources may be channelled to eligible enterprises, either directly or indirectly, through eligible investment funds and/or financial intermediaries.

Article 2

Resources of the Facility

1. The resources of the Facility may be used, *inter alia*, to:

(a) provide risk capital in the form of:

- (i) equity participation in OCT enterprises, including financial institutions;
- (ii) quasi-capital assistance to OCT enterprises, including financial institutions;
- (iii) guarantees and other credit enhancements which may be used to cover political and other investment-related risks, both for foreign and local investors or lenders.

(b) provide ordinary loans.

2. Equity participation shall normally be for non-controlling minority holdings and shall be remunerated on the basis of the performance of the project concerned.

3. Quasi-capital assistance may consist of shareholders' advances, convertible bonds, conditional, subordinated and participating loans or any other similar form of assistance. Such assistance may consist in particular of:

- (a) conditional loans, the servicing and/or the duration of which shall be linked to the fulfilment of certain conditions with regard to the performance of the project; in the specific case of conditional loans for pre-investment studies or other project-related technical assistance, servicing may be waived if the investment is not carried out;
- (b) participating loans, the servicing and/or the duration of which shall be linked to the financial return of the project;

(c) subordinated loans, which shall be repaid only after other claims have been settled.

4. The remuneration of each operation shall be specified when the loan is made.

However:

- (a) in the case of conditional or participating loans, the remuneration shall normally comprise a fixed interest rate of not more than 3 % and a variable component related to the performance of the project;
- (b) in the case of subordinated loans, the interest rate shall be market related.

5. Guarantees shall be priced so as to reflect the risks insured and the particular characteristics of the operation.

6. The interest rate of ordinary loans shall comprise a reference rate applied by the EIB for comparable loans with the same terms and conditions as to grace and repayment periods and a mark up determined by the EIB.

7. Ordinary loans may be extended on concessional terms and conditions in the following cases:

- (a) for infrastructure projects in the least developed OCTs that are prerequisites for private sector development. In such cases, the interest rate of the loan will be reduced by 3 %;
- (b) for projects which involve restructuring operations in the framework of privatisation or for projects with substantial and clearly demonstrable social or environmental benefits. In such cases, loans may be extended with an interest rate subsidy the amount and form of which will be decided with respect to the particular characteristics of the project. However, the interest rate subsidy shall not be higher than 3 %.

The final interest rate shall, in any case, never be less than 50 % of the reference rate.

8. The funds to be provided for these concessional purposes will be made available from the Facility and shall not exceed 5 % of the overall amount allocated for investment financing by the Facility and by the EIB from its own resources.

9. Interest subsidies may be capitalised or may be used in the form of grants to support project-related technical assistance, particularly for financial institutions in the OCTs.

*Article 3***Operations of the Facility**

1. The Facility shall operate in all economic sectors and support investments of private and commercially run public sector entities, including revenue generating economic and technological infrastructure critical for the private sector. The Facility shall:

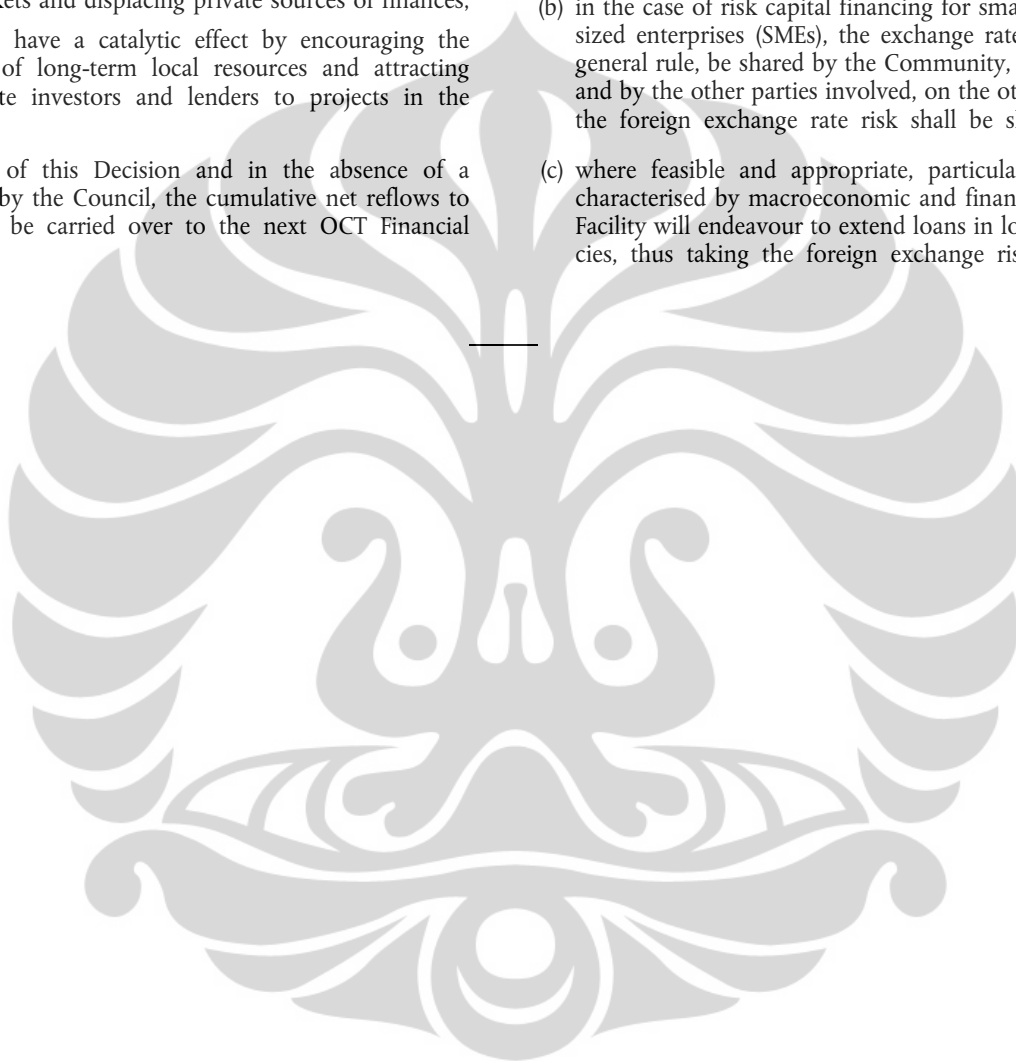
- (a) be managed as a revolving fund and aim at being financially sustainable. Its operations shall be on market-related terms and conditions and shall avoid creating distortions on local markets and displacing private sources of finances;
- (b) endeavour to have a catalytic effect by encouraging the mobilisation of long-term local resources and attracting foreign private investors and lenders to projects in the OCTs.

2. On expiry of this Decision and in the absence of a specific decision by the Council, the cumulative net reflows to the Facility shall be carried over to the next OCT Financial Instrument.

*Article 4***Conditions for foreign exchange rate risk**

In order to minimise the effects of exchange rate fluctuations, the problems of exchange rate risk shall be dealt with in the following way:

- (a) in the case of equity participation designed to strengthen an enterprise's own funds, the exchange rate risk shall, as a general rule, be borne by the Facility;
- (b) in the case of risk capital financing for small- and medium-sized enterprises (SMEs), the exchange rate risk shall, as a general rule, be shared by the Community, on the one part, and by the other parties involved, on the other. On average, the foreign exchange rate risk shall be shared equally;
- (c) where feasible and appropriate, particularly in countries characterised by macroeconomic and financial stability, the Facility will endeavour to extend loans in local OCT currencies, thus taking the foreign exchange risk.



ANNEX II D

COMMUNITY FINANCIAL ASSISTANCE: ADDITIONAL SUPPORT IN THE EVENT OF SHORT-TERM FLUCTUATIONS IN EXPORT EARNINGS*Article 1***Principles**

1. The degree of dependence of an OCT economy on the export of goods, and in particular from agricultural and mining products shall be a criterion for determining the allocation of long-term development.
2. In order to mitigate the adverse effects of instability of export earnings and safeguard the development programme jeopardised by the drop in revenue, additional financial support may be mobilised from the programmable resources for the country's long-term development on the basis of Articles 2 and 3.

*Article 2***Eligibility criteria**

1. Eligibility for additional resources shall be established by:
 - a 10 %, or 2 % in the case of least-developed countries, loss of export earnings from goods compared with the arithmetical average of the earnings in the first three years of the first four years preceding the application year;
 - or
 - a 10 %, or 2 % in the case of least-developed countries, loss of export earnings from the total of agricultural or mineral products compared with the arithmetical average of the earnings in the first three years of the first four years preceding the application year for countries where the agricultural or mineral export revenues represent more than 40 % of total export revenues from goods.
2. Entitlement to additional support shall be limited to four successive years.

3. The additional resources shall be reflected in the public accounts of the country concerned. They shall be utilised in accordance with the implementing provisions to be laid down pursuant to Article 23 of this Decision. By agreement of both Parties the resources may be used to finance programmes included in national budget. However a part of the additional resources may also be set aside for specific sectors.

*Article 3***Advances**

The system for allocating additional resources shall provide for advances to cover any delays in obtaining consolidated trade statistics and to ensure that the resources in question can be included in the budget of the year following the application year. Advances shall be mobilised on the basis of provisional export statistics drawn up by the authorities of the OCTs and submitted to the Commission in advance of the official final consolidated statistics. The maximum advance shall be 80 % of the estimated amount of additional resources for the application year. The amounts thus mobilised shall be adjusted by common agreement between the Commission and the authorities of the OCT in the light of final consolidated export statistics and the final figure of the public deficit.

*Article 4***Revision**

The provisions in this Annex shall be subject to review at the latest after two years from the entry into force of the implementing provisions referred to in Article 23 of this Decision and subsequently at the request of the Commission, a Member State or an OCT.

ANNEX II E

COMMUNITY FINANCIAL ASSISTANCE: BUDGETARY AID FOR DEVELOPING COUNTRIES

Without prejudice to future modifications of budgetary provisions, the OCTs benefit from the following budget lines foreseen for developing countries within the general budget of the European Union. Except if explicitly excluded, the OCTs may benefit from the general budget funds granted to developing countries.

1. Food and Humanitarian aid (Title B7-2 1)

- Council Decision 1999/576/EC of 29 June 1999 on the signing and notification of the provisional application of the Food Aid Convention 1999 on behalf of the European Community ⁽¹⁾.
- Council Decision 2000/421/EC of 13 June 2000, on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Food Aid Convention 1999 ⁽²⁾.
- Council Regulation (EC) No 1292/96 of 27 June 1996 on food aid policy and food aid management and special operations in support of food security ⁽³⁾.
- Council Regulation (EC) No 1257/96 of 20 June 1996 concerning humanitarian aid ⁽⁴⁾.

2. Community measures to support NGOs (Chapter B7.60)

- Resolution of the European Parliament of 14 May 1992 on the role of the non-governmental organisations in development cooperation ⁽⁵⁾.
- Council Regulation (EC) No 1658/98 of 17 July 1998 on co-financing operations with European non-governmental development organisations (NGOs) in fields of interest to the developing countries ⁽⁶⁾.

3. Training and promotion of awareness of development issues (Chapter B7.61)

- Council Regulation (EC) No 2836/98 of 22 December 1998 on integrating gender issues in development cooperation ⁽⁷⁾.

4. Environment (Chapter B7.62)

- Regulation (EC) No 2493/2000 of the European Parliament and of the Council of 7 November 2000 on measures to promote the full integration of the environmental dimension in the development process of developing countries ⁽⁸⁾.
- Regulation (EC) No 2494/2000 of the European Parliament and of the Council of 7 November 2000 on measures to promote the conservation and sustainable management of tropical forests and other forests in developing countries ⁽⁹⁾.

5. Health and the fight against drugs, population and demography in the developing countries (Chapter B7.63)

- Council Regulation (EC) No 2046/97 of 13 October 1997 on north-south cooperation in the campaign against drugs and drug addiction ⁽¹⁰⁾.
- Council Regulation (EC) No 550/97 of 24 March 1997 on HIV/AIDS-related operations in developing countries ⁽¹¹⁾.

6. Specific aid schemes in the development field (Chapter B7.64)

- Council Regulation (EC) No 2258/96 of 22 November 1996 on rehabilitation and reconstruction operations in developing countries ⁽¹²⁾.
- Council Regulation (EC) No 1659/98 of 17 July 1998 on decentralised cooperation ⁽¹³⁾.

⁽¹⁾ OJ L 222, 24.8.1999, p. 38.

⁽²⁾ OJ L 163, 4.7.2000, p. 37.

⁽³⁾ OJ L 166, 5.7.1996, p. 1.

⁽⁴⁾ OJ L 163, 2.7.1996, p. 1.

⁽⁵⁾ OJ C 150, 15.6.1992, p. 273.

⁽⁶⁾ OJ L 213, 30.7.1998, p. 1. Regulation as amended by Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 1726/2001 (OJ L 234, 1.9.2001, p. 10).

⁽⁷⁾ OJ L 354, 30.12.1998, p. 5.

⁽⁸⁾ OJ L 288, 15.11.2000, p. 1.

⁽⁹⁾ OJ L 288, 15.11.2000, p. 6.

⁽¹⁰⁾ OJ L 287, 21.10.1997, p. 1.

⁽¹¹⁾ OJ L 85, 27.3.1997, p. 1.

⁽¹²⁾ OJ L 306, 28.11.1996, p. 1.

⁽¹³⁾ OJ L 213, 30.7.1998, p. 6.

7. **Campaign against sex tourism in third countries** (Chapter B7.626)

- Implementation of the activities envisaged under the campaign against child sex tourism will continue on the basis of the Commission communication of 26 May 1999 and the Council conclusions of 21 December 1999.



ANNEX II F

OTHER COMMUNITY ASSISTANCE: PARTICIPATION IN COMMUNITY PROGRAMMES

The following programmes, and any programmes succeeding them, shall apply to OCT nationals within the framework of the quota for the Member State to which the OCT concerned is linked:

1. Education and training programmes:

- (a) Leonardo da Vinci, second phase of the Community vocational training action programme, set up by Council Decision 1999/382/EC of 26 April 1999 ⁽¹⁾,
- (b) Promotion of European pathways for work-linked training, including apprenticeship, set up by Council Decision 1999/51/EC of 21 December 1998 ⁽²⁾,
- (c) Socrates, second phase of the Community action programme in the field of education, set up by Decision 253/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 24 January 2000 ⁽³⁾,
- (d) 'Youth' Community action programme, established by Decision 1031/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 13 April 2000 ⁽⁴⁾.

2. The enterprise support programmes:

- (a) Multi-annual Programme for Enterprise and Entrepreneurship (2001-2005), set up by Council Decision 2000/819/EC of 20 December 2000 ⁽⁵⁾,
- (b) Artisanat, provided for in the programme referred to in (a),
- (c) Euromanagement, provided for in the programme referred to in (a),
- (d) Seed capital, according to the third multiannual programme for SMEs, set up by Council Decision 97/15/EC of 9 December 1996 ⁽⁶⁾.

3. Research, development and innovation programmes of the 5th Framework Programme:**3.1. Theme programmes:**

- (a) Specific programme for research, technological development and demonstration on quality of life and management of living resources (1998 to 2002) ⁽⁷⁾,
- (b) Specific programme for research, technological development and demonstration on a user-friendly information society (1998 to 2002) ⁽⁸⁾,
- (c) Specific programme for research, technological development and demonstration on competitive and sustainable growth (1998 to 2002) ⁽⁹⁾,
- (d) Specific programme for research, technological development and demonstration on energy, environment and sustainable development (1998 to 2002), set up by Council Decision 1999/171/EC of 25 January 1999 ⁽¹⁰⁾.

3.2. Horizontal Programmes:

- (a) Specific programme on confirming the international role of Community research (1998-2002) ⁽¹¹⁾.
- (b) Specific programme for research, technological development and demonstration on promotion of innovation and encouragement of SME participation (1998-2002) ⁽¹²⁾.
- (c) Specific programme for research, technological development and demonstration on improving the human research potential and the socio-economic knowledge base (1998-2002) ⁽¹³⁾.

4. Cultural and audio-visual programmes:

- (a) Programme to encourage the development, distribution and promotion of European audio-visual works (Media Plus — Development, Distribution and Promotion) for the period 2001-2005, set up by Council Decision 2000/821/EC of 20 December 2000.
- (b) Culture 2000 (2000-2004), set up by Decision 508/2000/EC of the European Parliament and the Council of 14 February 2000 ⁽¹⁴⁾.

- 5. The H RTP Japan programme (human resources training programme in Japan) and topical missions, set up by Council Decision 92/278/EEC of 18 May 1992. ⁽¹⁵⁾

⁽¹⁾ OJ L 146, 11.6.1999, p. 33.

⁽²⁾ OJ L 17, 22.1.1999, p. 45.

⁽³⁾ OJ L 28, 3.2.2000, p. 1.

⁽⁴⁾ OJ L 117, 18.5.2000, p. 1.

⁽⁵⁾ OJ L 333, 29.12.2000, p. 84.

⁽⁶⁾ OJ L 6, 10.1.1997, p. 25.

⁽⁷⁾ OJ L 64, 12.3.1999, p. 1.

⁽⁸⁾ OJ L 64, 12.3.1999, p. 20.

⁽⁹⁾ OJ L 64, 12.3.1999, p. 40.

⁽¹⁰⁾ OJ L 64, 12.3.1999, p. 58.

⁽¹¹⁾ OJ L 64, 12.3.1999, p. 78.

⁽¹²⁾ OJ L 64, 12.3.1999, p. 91.

⁽¹³⁾ OJ L 64, 12.3.1999, p. 105.

⁽¹⁴⁾ OJ L 63, 10.3.2000, p. 1.

⁽¹⁵⁾ OJ L 144, 26.5.1992, p. 19.

ANNEX III

CONCERNING THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF 'ORIGINATING PRODUCTS' AND METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION

INDEX

TITLE I	GENERAL PROVISIONS
— Article 1	Definitions
TITLE II	DEFINITION OF THE CONCEPT OF 'ORIGINATING PRODUCTS'
— Article 2	General requirements
— Article 3	Wholly obtained products
— Article 4	Sufficiently worked or processed products
— Article 5	Insufficient working or processing operations
— Article 6	Cumulation of origin
— Article 7	Unit of qualification
— Article 8	Accessories, spare parts and tools
— Article 9	Sets
— Article 10	Neutral elements
TITLE III	TERRITORIAL REQUIREMENTS
— Article 11	Principal of territoriality
— Article 12	Direct transport
— Article 13	Exhibitions
TITLE IV	PROOF OF ORIGIN
— Article 14	General requirements
— Article 15	Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1
— Article 16	Movement certificates EUR.1 issued retrospectively
— Article 17	Issue of a duplicate movement certificate EUR.1
— Article 18	Issue of movement certificates EUR.1 on the basis of a proof of origin issued or made out previously
— Article 19	Conditions for making out an invoice declaration
— Article 20	Approved exporter
— Article 21	Validity of proof of origin
— Article 22	Transit procedure
— Article 23	Submission of proof of origin
— Article 24	Importation by instalments
— Article 25	Exemptions from proof of origin
— Article 26	Information procedure for cumulation purposes
— Article 27	Supporting documents
— Article 28	Preservation of proof of origin and supporting documents
— Article 29	Discrepancies and formal errors
— Article 30	Amounts expressed in EUR
TITLE V	ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION
— Article 31	Communication of stamps and addresses
— Article 32	Verification of proofs of origin
— Article 33	Verification of suppliers declarations
— Article 34	Dispute settlement
— Article 35	Penalties
— Article 36	Free zones
— Article 37	Derogations

TITLE VI	CEUTA AND MELILLA
— Article 38	Special conditions
TITLE VII	FINAL PROVISIONS
— Article 39	Revision of Rules of Origin
— Article 40	Appendices
— Article 41	Implementation of the Annex
— Article 42	Transitional period concerning the making out of forms EUR.2

Appendices

— Appendix 1	Introductory notes to the list in Appendix 2.
— Appendix 2	List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status.
— Appendix 3	Form for movement certificate EUR.1
— Appendix 4	Invoice declaration.
— Appendix 5A	Supplier declaration for products having preferential origin status.
— Appendix 5B	Supplier declaration for products not having preferential origin status.
— Appendix 6	Information certificate.
— Appendix 7	Form for application for a derogation.

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of this Annex:

- (a) 'manufacture' means any kind of working or processing including assembly or specific operations;
- (b) 'material' means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;
- (c) 'product' means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;
- (d) 'goods' means both materials and products;
- (e) 'customs value' means the value as determined in accordance with the 1994 Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on customs valuation);
- (f) 'ex-works price' means the price paid for the product ex works to the manufacturer in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;
- (g) 'value of materials' means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the territory concerned;
- (h) 'value of originating materials' means the value of such materials as defined in subparagraph (g) applied *mutatis mutandis*;

- (i) 'value added' shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of third-country materials imported into the Community, the ACP States or the OCT;
- (j) 'chapters' and 'headings' mean the chapters and the headings (four-digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonised Commodity Description and Coding System, referred to in this Annex as 'the Harmonised System' or 'HS';
- (k) 'classified' refers to the classification of a product or material under a particular heading;
- (l) 'consignment' means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;
- (m) 'territories' includes territorial waters.

TITLE II

DEFINITION OF THE CONCEPT OF 'ORIGINATING PRODUCTS'

Article 2

General requirements

1. For the purpose of implementing the trade cooperation provisions of the Decision, the following products shall be considered as originating in the OCT:
 - (a) products wholly obtained in the OCT within the meaning of Article 3 of this Annex;
 - (b) products obtained in the OCT incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in the OCT within the meaning of Article 4 of this Annex.
2. For the purpose of implementing paragraph 1, the territories of the OCT shall be considered as being one territory.

3. Originating products made up of materials wholly obtained or sufficiently worked or processed in two or more OCT shall be considered as products originating in the OCT where the last working or processing took place, provided this working or processing goes beyond that referred to in Article 5 of this Annex.

Article 3

Wholly obtained products

1. The following shall be considered as wholly obtained, in the OCT, in the Community, or in the ACP States:

- (a) mineral products extracted from their soil or from their seabed;
- (b) vegetable products harvested there;
- (c) live animals born and raised there;
- (d) products from live animals raised there;
- (e) products obtained by hunting or fishing conducted there;
- (f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters by their vessels;
- (g) products made aboard their factory ships exclusively from products referred to in subparagraph (f);
- (h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit only for retreading or for use as waste;
- (i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
- (j) products extracted from marine soil or subsoil outside the territorial waters provided that they have sole rights to work that soil or subsoil;
- (k) goods produced there exclusively from the products specified in subparagraphs (a) to (j).

2. The terms 'their vessels' and 'their factory ships' in paragraph 1(f) and (g) shall apply only to vessels and factory ships:

- (a) which are registered or recorded in an OCT, in a Member State or in an ACP State;
- (b) which sail under the flag of an OCT, of a EC Member State or of an ACP State;
- (c) which are owned to an extent of at least 50 per cent by OCT, Member State or ACP nationals, or by a company with its head office in the OCT or one of these States, of which Chairman of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the members of such boards are OCT, Member State, or ACP nationals and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half the capital belongs to Member States or ACP States or to public bodies or nationals of the said States, or of an OCT;

(d) of which at least 50 % of the crew, master and officers included, are OCT, Member State, or ACP nationals.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, where an OCT offers the Community the opportunity to negotiate a fisheries agreement and the Community does not accept this offer, the OCT concerned may charter or lease third country vessels to undertake fisheries activities in its exclusive economic zone and request that such vessels be treated as 'their vessels' under the following conditions:

- that the OCT offered the Community the opportunity to negotiate a fisheries agreement and the Community did not accept this offer;
- that at least 50 % of the crew, master and officers included are OCT, Member State, or ACP nationals;
- that the charter or lease contract has been accepted by the Commission as providing adequate opportunities for developing the capacity of the OCT concerned to fish on its own account and in particular as conferring on the OCT concerned the responsibility for the nautical and commercial management of the vessel placed at its disposal for a significant period of time.

Article 4

Sufficiently worked or processed products

1. For the purposes of this Annex, products which are not wholly obtained are considered to be sufficiently worked or processed in the OCT, in the Community or in the ACP States, when the conditions set out in the list in Appendix 2 are fulfilled.

The conditions referred to above indicate, for all products covered by this Decision, the working or processing which must be carried out on non-originating materials used in manufacturing and apply only in relation to such materials. Accordingly, it follows that if a product, which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.

2. Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials which, according to the conditions set out in the list, should not be used in the manufacture of a given product may nevertheless be used, provided that:

- (a) their total value does not exceed 15 per cent of the ex-works price of the product;
- (b) any of the percentages given in the list for the maximum value of non-originating materials are not exceeded through the application of this paragraph.

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply except as provided in Article 5.

Article 5

Insufficient working or processing operations

1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 4 are satisfied:

- (a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;
- (b) breaking-up and assembly of packages;
- (c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;
- (d) ironing or pressing of textiles;
- (e) simple painting and polishing operations;
- (f) husking, partial or total milling, polishing, and glazing of cereals and rice;
- (g) operations to colour sugar or form sugar lumps; partial or total milling of sugar;
- (h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;
- (i) sharpening, simple grinding or simple cutting;
- (j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles);
- (k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;
- (l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;
- (m) simple mixing of products, whether or not of different kinds, where one or more components of the mixtures do not meet the conditions laid down in this Annex to enable them to be considered as originating in the OCT, in the Community or in an ACP State;
- (n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;
- (o) a combination of two or more operations specified in subparagraphs (a) to (n);
- (p) slaughter of animals.

2. All the operations carried out in either the OCT, the Community or the ACP States on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

Article 6

Cumulation of origin

1. Materials originating in the Community or in the ACP States shall be considered as materials originating in the OCT when incorporated into a product obtained there. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing going beyond that referred to in Article 5.

2. Working and processing carried out in the Community or in the ACP States shall be considered as having been carried out in the OCT, when the materials undergo subsequent working or processing in the OCT.

3. Products which have acquired originating status by virtue of paragraph 2 shall only continue to be considered as products originating in the OCT, when the working or processing carried out in the OCT goes beyond that referred to in Article 5.

4. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to the products falling within Chapters 1 to 24 of the Harmonised System if the materials used originate in the Community and are covered by an export refund system for agricultural products, unless evidence is provided that no export refund has been paid for the materials used.

With regard to products falling within HS Chapter 17 and HS tariff headings 1806 10 30 and 1806 10 90, ACP/EC-OCT cumulation of origin shall only be allowed as from 1 February 2002 within an annual quantity of 28 000 tonnes until 31 December 2007. Such annual quantity shall be progressively reduced and eventually phased out, as follows:

21 000 tonnes on 1 January 2008;

14 000 tonnes on 1 January 2009;

7 000 tonnes on 1 January 2010;

zero tonnes on 1 January 2011.

Such annual quantities may not be carried over from one year to the next.

For the purpose of implementing the rules on cumulation of origin, forming sugar lumps or cubes and milling of sugar shall be considered as sufficient to confer OCT-originating status.

The Commission shall adopt the necessary implementing arrangements.

5. With regard to products falling within HS code 1006 and without prejudice to the possible increases referred to in subparagraphs 4 and 5, ACP-OCT cumulation of origin shall only be allowed as from 1 February 2002 within a total annual quantity of 160 000 tonnes expressed as husked rice equivalent, which shall include the tariff quota for rice originating in ACP States provided for in the ACP-EC Partnership Agreement.

An initial issue of import licences for a quantity of 35 000 tonnes expressed as husked rice equivalent shall be made to the OCTs each year, and within this quantity, import licences for a quantity of 10 000 tonnes expressed as husked rice equivalent shall be issued to the least developed OCTs listed in Annex IB. All other import licences shall be issued to the Netherlands Antilles and Aruba. OCT imports may reach the level of 160 000 tonnes referred to in the first subparagraph, including the abovementioned 35 000 tonnes, without prejudice to any increases referred to in subparagraphs 4 and 5, in so far as the ACP States do not actually use their direct export possibilities under the quota referred to in the first subparagraph.

The issue of import licences shall be spaced out over the year in a series of periods laid down to ensure balanced market management.

In accordance with the procedure laid down in Article 22 of Regulation (EC) No 3072/95, the Commission may increase the quantity referred to in the first subparagraph by a maximum of 20 000 tonnes expressed as husked rice equivalent if, during April and once it has a sufficiently clear view of the current Community marketing year, it finds that such an increase will not disrupt the Community market.

If the Commission finds, as from 1 August, that there is an established risk of a shortage of Indica rice on the Community market, it may, by way of derogation from subparagraphs 1 to 4 and in accordance with the applicable management procedures, increase the above quantities.

For the purposes of implementing this paragraph and notwithstanding Article 5(1)(f), wholly milling or semi-milling operations shall be considered as sufficient to confer the status of OCT-originating products.

The Commission shall adopt the necessary implementing arrangements by the same procedure.

The quantities set out in this paragraph may not be carried over from one year to the next.

Article 7

Unit of qualification

1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Annex shall be the particular product which is considered as the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonised System.

Accordingly, it follows that:

- (a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonised System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;
- (b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonised System, each product must be taken individually when applying the provisions of this Annex.

2. Where, under General Rule 5 of the Harmonised System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.

Article 8

Accessories, spare parts and tools

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

Article 9

Sets

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonised System, shall be regarded as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 per cent of the ex-works price of the set.

Article 10

Neutral elements

In order to determine whether a product originates, it shall not be necessary to determine the origin of the following which might be used in its manufacture:

- (a) energy and fuel;
- (b) plant and equipment;
- (c) machines and tools;
- (d) goods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the product.

TITLE III

(c) failing these, any substantiating documents.

TERRITORIAL REQUIREMENTS*Article 13**Article 11***Exhibitions****Principle of territoriality**

1. The conditions set out in Title II relative to the acquisition of originating status must be fulfilled without interruption in the OCT, except as provided for in Article 6.

2. If originating goods exported from the OCT, the Community, or the ACP States to another country are returned, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

- (a) the goods returned are the same goods as those exported;
- (b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

*Article 12***Direct transport**

1. The preferential treatment provided for under the trade cooperation provisions of the Decision applies only to products, satisfying the requirements of this Annex, which are transported directly between the territories of the OCT, of the Community, or of the ACP States, without entering any other territory. However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the occasion arise, transshipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of an OCT, of the Community, or of an ACP State.

2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing country by the production of:

- (a) a single transport document covering the passage from the exporting country or territory through the country of transit; or
- (b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:
 - (i) giving an exact description of the products;
 - (ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used;
 - (iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country; or

TITLE IV

PROOF OF ORIGIN*Article 14***General requirements**

1. Originating products, sent from an OCT for exhibition in a country other than an OCT, an ACP State or a Member State and sold after the exhibition for importation in the Community shall benefit on importation from the provisions of the Decision provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:

- (a) an exporter has consigned these products from an OCT to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;
- (b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in the Community;
- (c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition;
- (d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. A proof of origin must be issued or made out in accordance with the provisions of Title IV and submitted to the customs authorities of the importing country in the normal manner. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.

1. Products originating in the OCT shall, on importation into the Community benefit from this Decision upon submission of either:

- (a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Appendix 3; or
- (b) in the cases specified in Article 19(1), a declaration, the text of which appears in Appendix 4, given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified (hereinafter referred to as the 'invoice declaration').

2. Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this Annex shall, in the cases specified in Article 25, benefit from this Decision without it being necessary to submit any of the documents referred to above.

Article 15

Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1

1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting OCT on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter's responsibility, by his authorised representative.

2. For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill out both the movement certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in Appendix 3. These forms shall be completed in accordance with the provisions of this Annex. If they are hand-written, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting OCT where the movement certificate EUR.1 is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Annex.

4. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting OCT if the products concerned can be considered as products originating in the OCT, in the Community or in the ACP and fulfil the other requirements of this Annex.

5. The issuing customs authorities shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfilment of the other requirements of this Annex. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate. The issuing customs authorities shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

6. The date of issue of the movement certificate EUR.1 shall be indicated in Box 11 of the certificate.

7. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

Article 16

Movement certificates EUR.1 issued retrospectively

1. Notwithstanding Article 15(7), a movement certificate EUR.1 may exceptionally be issued after exportation of the products to which it relates if:

- (a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances; or
- (b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 was issued but was not accepted at importation for technical reasons.

2. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 relates, and state the reasons for his request.

3. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporter's application agrees with that in the corresponding file.

4. Movement certificates EUR.1 issued retrospectively must be endorsed with one of the following phrases in the 'Remarks' box (Box 7) of the movement certificate EUR.1.

«EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», 'ISSUED RETROSPECTIVELY', «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the 'Remarks' box of the movement certificate EUR.1.

Article 17

Issue of a duplicate movement certificate EUR.1

1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.

2. The duplicate movement certificate EUR.1 shall be endorsed in the 'Remarks' box (Box 7) with one of the following words:

'DUPLICADO', 'DUPLIKAT', 'ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ', 'DUPLICATE', 'DUPLICATA', 'DUPLICATO', 'DUPLICAAT', 'SEGUNDA VIA', 'KAKSOISKAPPALE'.

3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the 'Remarks' box of the duplicate movement certificate EUR.1.

4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1, shall take effect as from that date.

Article 18

Issue of movement certificates EUR.1 on the basis of a proof of origin issued or made out previously

When originating products are placed under the control of a customs office in the Community or in an OCT, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or more movement certificates EUR.1 for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within the Community or within the OCT. The replacement movement certificate(s) EUR.1 shall be issued by the customs office under whose control the products are placed.

Article 19

Conditions for making out an invoice declaration

1. An invoice declaration as referred to in Article 14(1)(b) may be made out:

- (a) by an approved exporter within the meaning of Article 20, or
- (b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EUR 6 000.

2. An invoice declaration may be made out if the products concerned can be considered as products originating in the OCT, in the ACP States or in the Community and fulfil the other requirements of this Annex.

3. The exporter making out an invoice declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country or territory, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Annex.

4. An invoice declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Appendix 4, using one of the linguistic versions set out in that Annex and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country or territory. If the declaration is hand-written, it shall be written in ink in printed characters.

5. Invoice declarations shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 20 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting country a written undertaking that he accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

6. An invoice declaration may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation on condition that it is presented in the importing

country no longer than two years after the importation of the products to which it relates.

Article 20

Approved exporter

1. The customs authorities of the exporting country may authorise any exporter who makes frequent shipments of products under the trade cooperation provisions of the Decision to make out invoice declarations irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking such authorisation must offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other requirements of this Annex.

2. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions which they consider appropriate.

3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number which shall appear on the invoice declaration.

4. The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the approved exporter.

5. The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so where the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 1, does not fulfil the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the authorisation.

Article 21

Validity of proof of origin

1. A proof of origin shall be valid for ten months from the date of issue in the exporting country, and must be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.

2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing country after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due to exceptional circumstances.

3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may accept the proofs of origin where the products have been submitted before the said final date.

Article 22

Transit procedure

When the products enter an OCT or an ACP State other than the country of origin, a further period of validity of 4 months shall commence on the date on which the customs authorities in the country of transit enter the following in the Remarks box (Box 7) of the certificate EUR.1:

- the word 'transit',
- the name of the country of transit,

- the official stamp, a specimen of which had been made available to the Commission, in conformity with Article 31,
- date of the endorsements.

Article 23

Submission of proof of origin

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that country. The said authorities may require a translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the Decision.

Article 24

Importation by instalments

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs authorities of the importing country, dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonised System falling within Sections XVI and XVII or heading Nos 7308 and 9406 of the Harmonised System are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities upon importation of the first instalment.

Article 25

Exemptions from proof of origin

1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers' personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Annex and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In the case of products sent by post, this declaration can be made on the customs declaration CN22/CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.

2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients or travellers or their families shall not be considered as imports by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.

3. Furthermore, the total value of these products shall not exceed 500 EUR in the case of small packages or 1 200 EUR in the case of products forming part of travellers' personal luggage.

Article 26

Information procedure for cumulation purposes

1. When Article 2(2) or Article 6(1) are applied, the evidence of originating status within the meaning of this Annex of the materials coming from the other OCT, the Community or the ACP States shall be given by a movement certificate EUR.1 or by the supplier's declaration, a specimen of which appears in Appendix 5 A, given by the exporter in the country from which the materials came.

2. When Article 2(2) or Article 6(2) are applied, the evidence of the working or processing carried out in the other OCT, the Community or in the ACP States shall be given by the supplier's declaration a specimen of which appears in Appendix 5 B, given by the exporter in the country from which the materials came.

3. A separate supplier's declaration shall be given by the supplier for each consignment of material on the commercial invoice related to that shipment or in an annex to that invoice, or on a delivery note or other commercial document related to that shipment which describes the materials concerned in sufficient detail to enable them to be identified.

4. The supplier's declaration may be made out on a pre-printed form.

5. The suppliers' declarations shall be signed in manuscript. However, where the invoice and the supplier's declaration are established using electronic data-processing methods, the supplier's declaration need not be signed in manuscript provided the responsible official in the supplying company is identified to the satisfaction of the customs authorities in the country or territory where the suppliers' declarations are established. The said customs authorities may lay down conditions for the implementation of this paragraph.

6. The supplier's declarations are submitted to the competent customs office in the exporting OCT requested to issue the movement certificate EUR.1.

7. Suppliers' declarations made and information certificates issued before the date of entry into force of this Decision in accordance with Article 23 of Annex II to Decision 91/482/EEC shall remain valid.

8. For the purpose of Article 6(4), first subparagraph, the movement certificate EUR.1 shall be endorsed with one of the following phrases in the 'Remarks' box (Box 7) of the movement certificate EUR.1:

«RESTITUCIÓN A LA EXPORTACIÓN NO PAGADA», «EKSPORTRESTITUTION IKKE UDBETALT», «KEINE AUSFUHRERSTATTUNG GEZAHLT», «ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΗΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΦΩΓΗ», «EXPORT REFUND NOT PAID», «RESTITUTION À L'EXPORTATION NON PAYÉE», «RESTITUZIONE ALL'ESPORTAZIONE NON CORRISPOSTA», «GEEN UITVOERRESTITUTIE BETAALD», «RESTITUIÇÕES À EXPORTAÇÃO NÃO PAGAS», «EI MAKSETTU VIENTITUKEA», «EXPORTSTÖD EJ UTBETALAT».

Article 27

Supporting documents

The documents referred to in Article 15(3) and Article 19(3) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an invoice declaration can be considered as products originating in an OCT or in the Community or in an ACP and fulfil the other requirements of this Annex may consist *inter alia* of the following:

- (a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or internal bookkeeping;
- (b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in an OCT, or in the Community or in an ACP State where these documents are used in accordance with domestic law;

- (c) documents proving the working or processing of materials in the OCT, in the Community, or in the ACP States, issued or made out in an OCT, in the Community or in an ACP State, where these documents are used in accordance with domestic law;
- (d) movement certificates EUR.1 or invoice declarations proving the originating status of materials used, issued or made out in the OCT, in the Community or in the ACP States and in accordance with this Annex.

Article 28

Preservation of proof of origin and supporting documents

1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the documents referred to in Article 15(3).
2. The exporter making out an invoice declaration shall keep for at least three years a copy of this invoice declaration as well as the documents referred to in Article 19(3).
3. The customs authorities of the exporting OCT issuing a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the application form referred to in Article 15(2).
4. The customs authorities of the importing country shall keep for at least three years the movement certificates EUR.1 and the invoice declarations submitted to them.

Article 29

Discrepancies and formal errors

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not *ipso facto* render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted.
2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin should not cause this document to be rejected if these errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in this document.

Article 30

Amounts expressed in euro

1. The amounts to be used in any given national currency of a Member State shall be the equivalent in that national currency of the amounts expressed in euro as at the first working day in October 1999.
2. The amounts expressed in euro and their equivalents in the national currencies of some Member States shall be reviewed by the Customs Code Committee (Origin Section) at

the request of the Commission, a Member State or of the OCT. When carrying out this review, the Committee shall ensure that there will be no decrease in the amounts to be used in any national currency and shall furthermore consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.

3. When the products are invoiced in the currency of another Member State, the importing country shall recognise the amount notified by the Member State concerned.

TITLE V

ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 31

Communication of stamps and addresses

The OCT shall send to the Commission specimens of the stamps used together with the addresses of the customs authorities competent to issue movement certificates EUR.1 and carry out the subsequent verification of movement certificates EUR.1 and invoice declarations.

Movement certificates EUR.1 shall be accepted for the purpose of applying preferential treatment from the date the information is received by the Commission.

The Commission shall send this information to the customs authorities of the Member States.

Article 32

Verification of proofs of origin

1. In order to ensure the proper application of this Annex, the OCT, the Community and the ACP States shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1 or the invoice declarations and the correctness of the information given in these documents.

The authorities consulted shall furnish the relevant information concerning the conditions under which the product has been made, indicating especially the conditions in which the rules of origin have been respected in the various OCT, Member States or ACP States concerned.

2. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other requirements of this Annex.

3. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 2, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.1 and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof or origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.

4. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting country. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate.

5. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

6. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of this verification as soon as possible. These results must indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned can be considered as products originating in the OCT, in the Community or in the ACP and fulfil the other requirements of this Annex.

7. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

8. Where the verification procedure or any other available information appears to indicate that the provisions of this Annex are being contravened, the OCT on its own initiative or at the request of the Community shall carry out appropriate enquiries or arrange for such enquiries to be carried out with due urgency to identify and prevent such contraventions. The Commission may participate in the enquiries.

Article 33

Verification of suppliers' declarations

1. Verification of suppliers' declaration may be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of the document or the accuracy or completeness of the information concerning the true origin of the materials in question.

2. The customs authorities to which a supplier's declaration is submitted may request the customs authorities of the State where the declaration was made to issue an information certificate, a specimen of which appears in Appendix 6. Alternatively, the customs authorities to which a supplier's declaration

is submitted may request the exporter to produce an information certificate issued by the customs authorities of the State where the declaration was made.

A copy of the information certificate shall be preserved by the office which has issued it for at least three years.

3. The requesting customs authorities shall be informed of the results of the verification as soon as possible. The results must be such as to indicate positively whether the declaration concerning the status of the materials is correct.

4. For the purpose of verification, suppliers shall keep for not less than three years a copy of the document containing the declaration together with all necessary evidence showing the true status of the materials.

5. The customs authorities in the State where the supplier's declaration is established shall have the right to call for any evidence or to carry out any check which they consider appropriate in order to verify the correctness of any supplier's declaration.

6. Any movement certificate EUR.1 issued or made out on the basis of an incorrect supplier's declaration shall be considered null and void.

Article 34

Dispute settlement

Where disputes arise in relation to the verification procedures of Articles 32 and 33 which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this Annex, they shall be submitted to the Customs Code Committee — Origin Section instituted by Regulation (EEC) No 2913/92.

In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall be under the legislation of the said country.

Article 35

Penalties

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

Article 36

Free zones

1. The OCT and the Member States shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin or a supplier's declaration and which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

2. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 1, when originating products are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new EUR.1 certificate at the exporter's request, if the treatment or processing undergone is in conformity with the provisions of this Annex.

Article 37

Derogations

1. Derogations from this Annex may be adopted where the development of existing industries or the creation of new industries justifies them.

The Member State or, where appropriate, the OCT authorities concerned shall notify the Community of its request for a derogation together with the reasons for the request in accordance with paragraph 2.

The Community shall respond positively to all the requests which are duly justified in conformity with this Article and which cannot cause serious injury to an established Community industry.

2. In order to facilitate the examination of requests for derogation, the Member State or OCT making the request shall, by means of the form given in Appendix 7, furnish in support of its request the fullest possible information covering in particular the points listed below:

- description of the finished product,
- nature and quantity of materials originating in a third country,
- nature and quantity of materials originating in ACP States, the Community or the OCT, or which have been processed there,
- manufacturing processes,
- value added,
- number of employees in the enterprise concerned,
- anticipated volume of exports to the Community,
- other possible sources of supply for raw materials,
- reasons for the duration requested in the light of efforts made to find new sources of supply,
- other observations.

The same rules shall apply to any requests for extension.

3. The examination of requests shall in particular take into account:

- (a) the level of development or the geographical situation of the OCT concerned;
- (b) cases where the application of the existing rules of origin would significantly affect the ability of an existing industry in OCT to continue its exports to the Community, with particular reference to cases where this could lead to cessation of its activities;

(c) specific cases where it can be clearly demonstrated that significant investment in an industry could be deterred by the rules of origin and where a derogation favouring the realisation of the investment programme would enable these rules to be satisfied by stages.

4. In every case an examination shall be made to ascertain whether the rules relating to cumulation of origin do not provide a solution to the problem.

5. In addition when a request for derogation concerns a least-developed country or territory, its examination shall be carried out with a favourable bias having particular regard to:

- (a) the economic and social impact of the decision to be taken especially in respect of employment;
- (b) the need to apply the derogation for a period taking into account the particular situation of the OCT concerned and its difficulties.

6. In the examination of requests, special account shall be taken, case by case, of the possibility of conferring originating status on products which include in their composition materials originating in neighbouring developing countries or least-developed countries, provided that satisfactory administrative cooperation can be established.

7. Without prejudice to paragraphs 1 to 6, the derogation shall be granted where the value added to the non-originating products used in the OCT concerned is at least 45 % of the value of the finished product, provided that the derogation is not such as to cause serious injury to an economic sector of the Community or of one or more Member States.

8. (a) The Council and the Commission shall take steps necessary to ensure that a decision is reached as quickly as possible and in any case not later than 75 working days after the request is received by the Chairman of the Customs Code Committee — Origin Section. In this context, Council Decision 2000/399/EC⁽¹⁾ shall apply *mutatis mutandis*.

(b) If a decision is not taken within the time limit referred to in subparagraph (a), the request shall be deemed to have been accepted.

9. (a) The derogation shall be valid for a period, generally of five years.

(b) The derogation decision may provide for renewals without a new decision of the Commission being necessary, provided that the Member State or OCT concerned submits, three months before the end of each period, proof that it is still unable to meet the conditions of this Annex which have been derogated from.

If any objection is made to the extension, the Commission shall examine it as soon as possible and decide whether to prolong the derogation. The Commission shall proceed as provided for in paragraph 8. All necessary measures shall be taken to avoid interruptions in the application of the derogation.

⁽¹⁾ Council Decision of 16 June 2000 on the procedure concerning derogations from the rules of origin set out in Protocol No 1 to the ACP-EC Partnership Agreement (OJ L 151, 24.6.2000, p. 16).

(c) In the periods referred to in subparagraphs (a) and (b), the Community may review the terms for implementing the derogation should a significant change be found to have taken place in the substantive factors governing the decision to grant the derogation. On conclusion of its review the Community may decide to amend the terms of its decision as regards the scope of derogation or any other condition previously laid down.

TITLE VI

CEUTA AND MELILLA

Article 38

Special conditions

1. The term 'Community' used in this Annex shall not cover Ceuta and Melilla. The term 'products originating in the Community' shall not cover products originating in Ceuta and Melilla.
2. The provisions of this Annex shall apply *mutatis mutandis* in determining whether products may be deemed as originating in the OCT when imported into Ceuta and Melilla.
3. Where products wholly obtained in Ceuta, Melilla, the ACP States or the Community undergo working and processing in the OCT, they shall be considered as having been wholly obtained in the OCT.
4. Working or processing carried out in Ceuta, Melilla, the ACP States or the Community shall be considered as having been carried out in the OCT, when materials undergo further working or processing in the OCT.
5. For the purpose of implementing paragraphs 3 and 4, the insufficient operations listed in Article 5 shall not be considered as working or processing.
6. Ceuta and Melilla shall be considered as a single territory.

TITLE VII

FINAL PROVISIONS

Article 39

Revision of rules of origin

1. The Council shall examine whenever the relevant authorities of a country or territory or of the Community so request, the application of the provisions of this Annex and their

economic effects with a view to making any necessary amendments or adaptations.

The Council shall take into account among other elements the effects on the rules of origin of technological developments.

The decisions taken shall be implemented as soon as possible.

2. Any technical amendments to this Annex shall be adopted in accordance with the regulatory procedure laid down in Article 5 of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999. The Commission shall be assisted for such purpose by the Customs Code Committee referred to in Article 247a of Regulation (EEC) No 2913/92 ⁽¹⁾, and the period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months. The afore-mentioned procedure shall not apply to Article 6(4) and (5) of this Annex.

Article 40

Appendices

The Appendices to this Annex shall form an integral part thereof.

Article 41

Implementation of the Annex

The Community and the OCT shall each take the steps necessary to implement this Annex.

Article 42

Transitional period concerning the making out of forms EUR.2

1. Until 31 December 2002, the competent customs authorities of the Community shall accept as valid proof of origin within the meaning of this Annex EUR.2 forms issued within the context of this Decision.
2. Requests for subsequent verification of EUR.2 forms shall be accepted by the competent authorities of the exporting countries for a period of two years after the making out of the EUR.2 form concerned. These verifications shall be carried out in accordance with Title V of this Annex.

⁽¹⁾ OJ L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 2700/2000 (OJ L 311, 12.12.2000, p. 17).

Appendix 1

Introductory notes to the list in Appendix 2

Note 1:

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 4 of Appendix 2.

Note 2:

- 2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or chapter number used in the Harmonized System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns a rule is specified in columns 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an 'ex', this signifies that the rules in columns 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.
- 2.2. Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rules in columns 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonized System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column 1.
- 2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in columns 3 or 4.
- 2.4. Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 has to be applied.

Note 3:

- 3.1. The provisions of Article 4 of Annex III concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products apply regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in the Community or in the OCT.

Example:

An engine of heading No 8407, for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40 per cent of the ex-works price, is made from 'other alloy steel roughly shaped by forging' of heading No ex 7224.

If this forging has been forged in the country concerned from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading No ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value calculation for the engine regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in the Community. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

- 3.2. The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required and the carrying out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying out of less working or processing cannot confer originating status. Thus if a rule provides that non-originating material at a certain level of manufacture may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed and the use of such material at a later stage is not.
- 3.3. Without prejudice to Note 3.2 where a rule states that 'materials of any heading' may be used, materials of the same heading as the product may also be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule. However, the expression 'manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No...' means that only materials classified in the same heading as the product of a different description than that of the product as given in column 2 of the list may be used.
- 3.4. When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that any one or more materials may be used. It does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of heading Nos 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other or both.

- 3.5. Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 and 6.3 below in relation to textiles).

Example:

The rule for prepared foods of heading No 1904 which specifically excludes the use of cereals and their derivatives does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth — even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn — that is the fibre stage.

- 3.6. Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the highest of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded in relation to the particular materials they apply to.

Note 4:

- 4.1. The term 'natural fibres' is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres that have been carded, combed or otherwise processed but not spun.
- 4.2. The term 'natural fibres' includes horsehair of heading No 0503, silk of heading Nos 5002 and 5003 as well as the wool fibres, fine or coarse animal hair of heading Nos 5101 to 5105, the cotton fibres of heading Nos 5201 to 5203 and the other vegetable fibres of heading Nos 5301 to 5305.
- 4.3. The terms 'textile pulp', 'chemical materials' and 'paper-making materials' are used in the list to describe the materials not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.
- 4.4. The term 'man-made staple fibres' is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of heading Nos 5501 to 5507.

Note 5:

- 5.1. Where for a given product in the list a reference is made to this note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials, used in the manufacture of this product, which, taken together, represent 10 per cent or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below).
- 5.2. However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may only be applied to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

- silk,
- wool,
- coarse animal hair,
- fine animal hair,
- horsehair,
- cotton,
- paper-making materials and paper,
- flax,
- true hemp,
- jute and other textile bast fibres,
- sisal and other textile fibres of the genus Agave,
- coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,
- synthetic man-made filaments,
- artificial man-made filaments,
- current conducting filaments,

- synthetic man-made staple fibres of polypropylene,
- synthetic man-made staple fibres of polyester,
- synthetic man-made staple fibres of polyamide,
- synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,
- synthetic man-made staple fibres of polyimide,
- synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,
- synthetic man-made staple fibres of polyphenylene sulphide,
- synthetic man-made staple fibres of polyvinyl chloride,
- other synthetic man-made staple fibres,
- artificial man-made staple fibres of viscose,
- other artificial man-made staple fibres,
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether whether or not gimped,
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester whether or not gimped,
- products of heading No 5605 (metallized yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film,
- other products of heading No 5605.

Example:

A yarn of heading No 5205 made from cotton fibres of heading No 5203 and synthetic staple fibres of heading No 5506 is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres that do not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used up to a weight of 10 per cent of the yarn.

Example:

A woollen fabric of heading No 5112 made from woollen yarn of heading No 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading No 5509 is a mixed fabric. Therefore, synthetic yarn which does not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) or woollen yarn that does not satisfy the origin rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning) or a combination of the two may be used provided their total weight does not exceed 10 per cent of the weight of the fabric.

Example:

Tufted textile fabric of heading No 5802 made from cotton yarn of heading No 5205 and cotton fabric of heading No 5210 is only a mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric being made from yarns classified in two separate headings or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading No 5205 and synthetic fabric of heading No 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is accordingly a mixed product.

- 5.3. In the case of products incorporating 'yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether whether or not gimped' this tolerance is 20 per cent in respect of this yarn.
- 5.4. In the case of products incorporating 'strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of an adhesive between two layers of plastic film', this tolerance is 30 per cent in respect of this strip.

Note 6:

- 6.1. In the case of those textile products, which are marked in the list by a footnote referring to this Introductory Note, textile trimmings and accessories which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made up products concerned may be used provided that their weight does not exceed 10 % of the total weight of all the textile materials incorporated.

Textile trimmings and accessories are those classified in Chapters 50 to 63. Linings and interlinings are not to be regarded as trimmings or accessories.

- 6.2. Any non-textile trimmings and accessories or other materials used which contain textiles do not have to satisfy the conditions set out in column 3 even though they fall outside the scope of Note 3.5.
- 6.3. In accordance with Note 3.5, any non-originating non-textile trimmings and accessories or other product, which do not contain any textiles, may, anyway, be used freely where they cannot be made from the materials listed in column 3.

For example if a rule in the list says that for a particular textile item, such as a blouse, yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because they cannot be made from textile materials.

- 6.4. Where a percentage rule applies, the value of trimmings and accessories must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 7:

- 7.1. For the purposes of heading Nos ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the 'specific processes' are the following:

- (a) vacuum distillation;
- (b) redistillation by a very thorough fractionation process ⁽¹⁾;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) extraction by means of selective solvents;
- (f) the process comprising all the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralization with alkaline agents; decolorization and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
- (g) polymerization;
- (h) alkylation;
- (i) isomerization.

- 7.2. For the purposes of heading Nos 2710, 2711 and 2712, the 'specific processes' are the following:

- (a) vacuum distillation;
- (b) redistillation by a very thorough fractionation process;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) extraction by means of selective solvents;
- (f) the process comprising all the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralization with alkaline agents; decolorization and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
- (g) polymerization;
- (h) alkylation;
- ij) isomerization;
- (k) in respect of heavy oils falling within heading No ex 2710 only, desulphurization with hydrogen resulting in a reduction of at least 85 per cent of the sulphur content of the products processed
(ASTM D 1266-59 T method);

- (l) in respect of products falling within heading No 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;
- (m) in respect of heavy oils falling within heading No ex 2710 only, treatment with hydrogen at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250 °C with the use of a catalyst, other than to effect desulphurization, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment with hydrogen of lubricating oils of heading No ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolorization) in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;

⁽¹⁾ See Additional Explanatory Note 4(b) to Chapter 27 of the Combined Nomenclature.

- (n) in respect of fuel oils falling within heading No ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30 per cent of these products distils, by volume, including losses, at 300 °C by the ASTM D 86 method;
- (o) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils falling within heading No ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge.
- 7.3. For the purposes of heading Nos ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations such as cleaning, decanting, desalting, water separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur content as a result of mixing products with different sulphur contents, any combination of these operations or like operations do not confer origin.



Appendix 2

List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status (*)



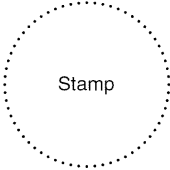
(*) This Appendix will be published in the Official Journal as soon as possible.

*Appendix 3***Form for movement certificate EUR.1**

1. Movement certificates EUR.1 shall be made out on the form of which a specimen appears in this Appendix. This form shall be printed in one or more of the languages in which this Decision is drawn up. Certificates shall be made out in one of these languages and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting State if they are handwritten, they shall be completed in ink and in capital letters.
2. Each certificate shall measure 210 × 297 mm, a tolerance of up to plus 8 mm or minus 5 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25g/m². It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.
3. The exporting States may reserve the right to print the certificates themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case each certificate must include a reference to such approval. Each certificate must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.



MOVEMENT CERTIFICATE

<p>1. Exporter (Name, full address, country)</p>	<p>EUR.1 No A 000.000</p>	
<p>See notes overleaf before completing this form.</p>		
<p>3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)</p>	<p>2. Certificate used in preferential trade between</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)</p>	
<p>6. Transport details (Optional)</p>	<p>4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating</p>	<p>5. Country, group of countries or territory of destination</p>
<p>7. Remarks</p>		
<p>8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages ⁽¹⁾; Description of goods</p>	<p>9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.)</p>	<p>10. Invoice (Optional)</p>
<p>11. CUSTOMS ENDORSEMENT Declaration certified Export document ⁽²⁾ Form No of Customs office: Issuing country: Place, date: (Signature)</p>		<p>12. DECLARATION BY EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. Place, date (Signature)</p>

⁽¹⁾ If goods are not packed, indicate number of articles or state 'in bulk' as appropriate.
⁽²⁾ Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

<p>13. Request for verification, to:</p>	<p>14. RESULT OF VERIFICATION</p>
<p>Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.</p> <p>Place , date</p> <p style="text-align: center;">Stamp</p> <p>..... (Signature)</p>	<p>Verification carried out shows that this certificate (*)</p> <p><input type="checkbox"/> was issued by the Customs Office indicated and that the information contained therein is accurate</p> <p><input type="checkbox"/> does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).</p> <p>Place , date</p> <p style="text-align: center;">Stamp</p> <p>..... (Signature)</p> <p>..... (*) Insert X in the appropriate box.</p>

NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

<p>1. Exporter (Name, full address, country)</p>	<p>EUR.1 No A 000.000</p>	
	<p>See notes overleaf before completing this form.</p>	
<p>3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)</p>	<p>2. Application for certificate used in preferential trade between</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>.....</p> <p>(Insert appropriate countries or groups of countries or territories)</p>	
	<p>4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating</p>	<p>5. Country, group of countries or territory of destination</p>
<p>6. Transport details (Optional)</p>	<p>7. Remarks</p>	
<p>8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages (1); Description of goods</p>	<p>9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.)</p>	<p>10. Invoice (Optional)</p>

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state 'in bulk' as appropriate.

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

.....
.....
.....
.....

SUBMIT the following supporting documents ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes for manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

Place, date

.....
(Signature)

⁽¹⁾ For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

Appendix 4

INVOICE DECLARATION

The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

Spanish version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Danish version

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

German version

Der Ausführer (Zoll-Bewilligungs-Nr ... ⁽¹⁾), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind ⁽²⁾.

Greek version

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπαριθμ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin ⁽²⁾.

French version

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Italian version

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

Dutch version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Portuguese version

O, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ... ⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Finnish version

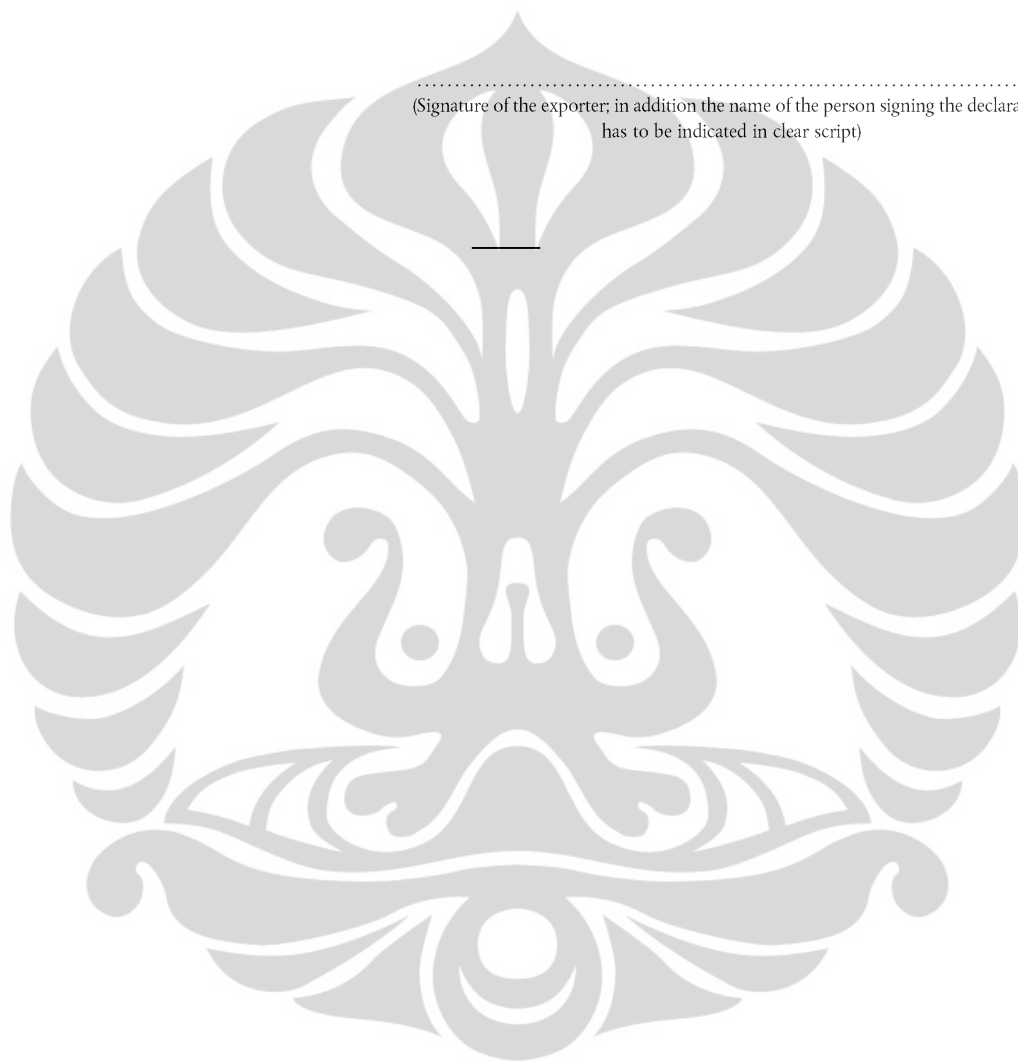
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... ⁽²⁾ alkuperäituotteita.

Swedish version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr....⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

.....⁽³⁾
(Place and date)

.....⁽⁴⁾
(Signature of the exporter; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)



⁽¹⁾ When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 20 of Annex III, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

⁽²⁾ Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla within the meaning of Article 38 of Annex III, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol 'CM'.

⁽³⁾ These indications may be omitted if the information is contained on the document itself.

⁽⁴⁾ See Article 19(5) of Annex III. In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.

Appendix 5 A

SUPPLIER'S DECLARATION FOR PRODUCTS HAVING PREFERENTIAL ORIGIN STATUS

I, the undersigned, declare that the goods listed on this invoice (1)

were produced in (2) and satisfy the rules of origin governing preferential trade between the OCTs and the European Community.

I undertake to make available to the customs authorities, if required, evidence in support of this declaration.

..... (3)

..... (4)

..... (5)

Note

The abovementioned text, suitably completed in conformity with the footnotes below, constitutes a supplier's declaration. The footnotes do not have to be reproduced.

(1) — If only some of the goods listed on the invoice are concerned they should be clearly indicated or marked and this marking entered on the declaration as follows: '..... listed on this invoice and marked. were produced'.
 — If a document other than an invoice or an annex to the invoice is used (see Article 26(3) of Annex III), the name of the document concerned shall be mentioned instead of the word 'invoice'.

(2) The Community, Member State, ACP State or OCT. Where an ACP State or an OCT is given, a reference must also be made to the Community customs office holding any EUR.1(s) concerned, giving the No of the certificate(s) concerned and, if possible, the relevant customs entry No involved.

(3) Place and date.

(4) Name and function in company.

(5) Signature.

Appendix 5 B

SUPPLIER'S DECLARATION FOR PRODUCTS NOT HAVING PREFERENTIAL ORIGINAL STATUS

I, the undersigned, declare that the goods listed on this invoice (1)

were produced in (2)

and incorporate the following components or materials which do not have ACP, OCT or Community origin for preferential trade:

..... (3) (4) (5)

.....

.....

..... (6)

I undertake to make available to the customs authorities, if required, evidence in support of this declaration.

..... (7) (8)

..... (9)

Note

The abovementioned text, suitably completed in conformity with the footnotes below, constitutes a supplier's declaration. The footnotes do not have to be reproduced.

- (1) — If only some of the goods listed on the invoice are concerned they should be clearly indicated or marked and this marking entered on the declaration as follows: '..... listed on this invoice and marked were produced
- If a document other than an invoice or an annex to the invoice is used (see Article 26(3) of Annex III), the name of the document concerned shall be mentioned instead of the word 'invoice'.
- (2) The Community, Member State, ACP State, OCT.
- (3) Description is to be given in all cases. The description must be adequate and should be sufficiently detailed to allow the tariff classification of the goods concerned to be determined.
- (4) Customs values to be given only if required.
- (5) Country of origin to be given only if required. The origin to be given must be a preferential origin, all other origins to be given as 'third country'.
- (6) 'and have undergone the following processing in [the Community] [Member State] [ACP State] [OCT] [.....]', to be added with a description of the processing carried out if this information is required.
- (7) Place and date.
- (8) Name and function in company.
- (9) Signature.

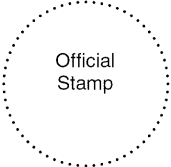
*Appendix 6***Information certificate**

- 1) The form of information certificate given in this Appendix shall be used and be printed in one or more of the official languages in which this Decision is drawn up and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting State. Information certificates shall be completed in one of those languages; if they are handwritten, they shall be completed in ink in capital letters. They shall bear a serial number, whether or not printed, by which they can be identified.
- 2) The information certificate shall measure 210×297 mm, a tolerance of up to plus 8 mm or minus 5 mm in the length may be allowed. The paper must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m².
- 3) The national administrators may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by printers approved by them. In the latter case, each form must include a reference to such approval. The forms shall bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified.

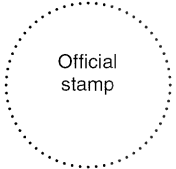
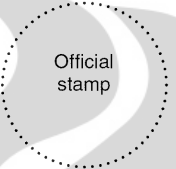




EUROPEAN COMMUNITIES

1. Supplier ⁽¹⁾		INFORMATION CERTIFICATE to facilitate the issue of a MOVEMENT CERTIFICATE for preferential trade between the		
2. Consignee ⁽¹⁾		EUROPEAN COMMUNITY and the OCTs		
3. Processor ⁽¹⁾		4. State in which the working or processing has been carried out		
6. Customs office of importation ⁽¹⁾		5. For official use		
7. Import document ⁽²⁾ Form N° Series Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
GOODS SENT TO THE MEMBER STATES OF DESTINATION				
8. Marks, numbers, quantity and kind of package	9. Harmonised Commodity Description and Coding System heading/subheading number (HS code)	10. Quantity ⁽³⁾		
		11. Value ⁽⁴⁾		
IMPORTED GOODS USED				
12. Harmonised Commodity Description and Coding System heading/subheading number (HS code)	13. Country of origin	14. Quantity ⁽³⁾	15. Value ⁽²⁾ ⁽⁵⁾	
16. Nature of the working or processing carried out				
17. Remarks				
18. CUSTOMS ENDORSEMENT Declaration certified: Document: Form: N° Customs office Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Official Stamp</p> </div> (Signature)		19. DECLARATION BY THE SUPPLIER I, the undersigned, declare that the information on this certificate is accurate. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (Place) (Date) (Signature)		

⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ See footnotes on verso.

REQUEST FOR VERIFICATION	RESULT OF VERIFICATION
The undersigned customs official requests verification of the authenticity and accuracy of this information certificate.	Verification carried out by the undersigned customs official shows that this information certificate:
	a) was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate (*) b) does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see notes appended). (*)
..... (Place and date) (Place and date)
 <p>Official stamp</p>	 <p>Official stamp</p>
..... (Official's signature) (Official's signature)
	(*) Delete where not applicable.

CROSS REFERENCES

- (¹) Name of individual or business and full address.
 (²) Optional information.
 (³) Kg, hl, m³ or other measures.
 (⁴) Packaging shall be considered as forming a whole with the goods contained therein. However, this provision shall not apply to packaging which is not of the normal type for the article packed, and which has a lasting utility value of its own, apart from its function as packaging.
 (⁵) The value must be indicated in accordance with the provisions on rules of origin.

Appendix 7

Form for application for a derogation

<p>1. Commercial description of the finished product 1.1. Customs classification (H.S. code)</p>	<p>2. Anticipated annual quantity of exports to the Community (weight, No of pieces, meters or other unit)</p>
<p>3. Commercial description of third country materials Customs classification (H.S. code)</p>	<p>4. Anticipated annual quantity of third country materials to be used</p>
<p>5. Value of third country materials</p>	<p>6. Value of finished products</p>
<p>7. Origin of third country materials</p>	<p>8. Reasons why the rule of origin for the finished product cannot be fulfilled</p>
<p>9. Commercial description of materials originating in the ACP States, EC or OCT to be used</p>	<p>10. Anticipated annual quantity of ACP, EC or OCT materials to be used</p>
<p>11. Value of ACP, EC or OCT materials</p>	<p>12. Working or processing carried out in the EC or OCT on third country materials without obtaining origin</p>
<p>13. Duration requested for derogation from to</p>	
<p>14. Detailed description of working and processing in the ACP States:</p>	<p>15. Capital structure of the firm concerned</p>
	<p>16. Amount of investments made/foreseen</p>
	<p>17. Staff employed/expected</p>
<p>18. Value added by the working or processing in the ACP States: 18.1. Labour: 18.2. Overheads:</p>	<p>20. Possible developments to overcome the need for a derogation</p>
<p>19. Other possible sources of supply for materials</p>	<p>21. Observations</p>

NOTES

1. If the boxes in the form are not sufficient to contain all relevant information, additional pages may be attached to the form. In this case, the mention 'see Annex' shall be entered in the box concerned.
2. If possible, samples or other illustrative material (pictures, designs, catalogues, etc.) of the final product and of the materials should accompany the form.
3. A form shall be completed for each product covered by the request.

Boxes 3, 4, 5, 7: 'Third country' means any country which is not an ACP or Community State or OCT.

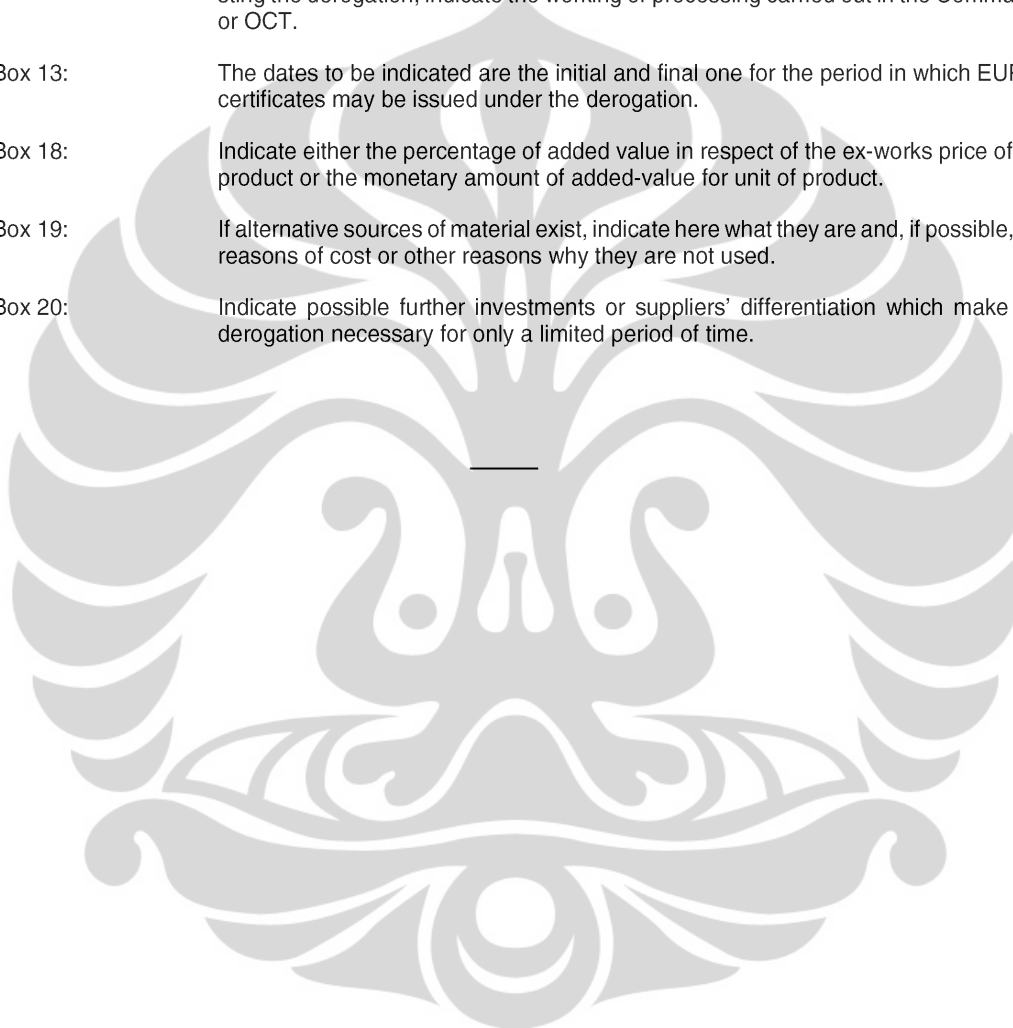
Box 12: If third country materials have been worked or processed in the Community or in the OCT without obtaining origin, before being further processed in the ACP State requesting the derogation, indicate the working or processing carried out in the Community or OCT.

Box 13: The dates to be indicated are the initial and final one for the period in which EUR. 1 certificates may be issued under the derogation.

Box 18: Indicate either the percentage of added value in respect of the ex-works price of the product or the monetary amount of added-value for unit of product.

Box 19: If alternative sources of material exist, indicate here what they are and, if possible, the reasons of cost or other reasons why they are not used.

Box 20: Indicate possible further investments or suppliers' differentiation which make the derogation necessary for only a limited period of time.



ANNEX IV

CONDITIONS FOR ENTRY INTO THE COMMUNITY OF PRODUCTS NOT ORIGINATING IN THE OCT, BUT WHICH ARE IN FREE CIRCULATION IN THE OCT, AND METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION*Article 1***Direct transport**

1. The arrangements provided for under the provisions of Article 36 of this Decision apply only to products, satisfying the requirements of this Annex, which are transported directly between the territory of the OCT and the Community without entering any other territory. However, products constituting one single consignment may be transported through territory other than that of the OCT with, should the occasion arise, transshipment or temporary warehousing in such territory, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.
2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the responsible customs authorities by the production of:
 - (a) a single transport document covering the passage from the exporting country or territory through the country of transit; or
 - (b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:
 - (i) giving an exact description of the products;
 - (ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used; and
 - (iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country; or
 - (c) failing these, any substantiating documents.

*Article 2***Export Certificate EXP**

1. Evidence of compliance with the provisions of Article 36 of this Decision shall be given by an Export Certificate EXP, a specimen of which appears in the Appendix.
2. An Export Certificate EXP shall be issued by the customs authorities of the exporting OCT on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter's responsibility, by his authorised representative.
3. For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill out the Export Certificate EXP, a specimen of which appears in the Appendix. These forms shall be completed in accordance with the provisions of this Annex. If they are hand-written, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line

must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

Applications for Export Certificates EXP must be preserved for at least three years by customs authorities of the exporting country or territory.

4. The exporter applying for the issue of an Export Certificate EXP shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting OCT where the Export Certificate EXP is issued, all appropriate documents proving that the products to be exported are such as to qualify for the issue of an Export Certificate EXP.

Exporters are required to keep the supporting documents referred to in this paragraph for at least three years.

5. An Export Certificate EXP shall be issued by the customs authorities of the exporting OCT if the products concerned can be considered as having been in free circulation and fulfil the other provisions of Article 36 of this Decision.

6. The issuing customs authorities shall take any steps necessary to verify the correctness of the application. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate. The issuing customs authorities shall also ensure that the form referred to in paragraph 3 is duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

7. The date of issue of the Export Certificate EXP shall be indicated in Box 11 of the certificate.

8. An Export Certificate EXP shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

*Article 3***Issue of a duplicate Export Certificate EXP**

1. In the event of theft, loss or destruction of an Export Certificate EXP, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.
2. The duplicate issued in this way must be endorsed with one of the following words:

'DUPLICADO', 'DUPLIKAT', 'ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ', 'DUPLICATE', 'DUPLICATA', 'DUPLICATO', 'DUPLICAAT', 'SEGUNDA VIA', 'KAKSOISKAPPALE'.
3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the 'Remarks' box 7 of the duplicate Export Certificate EXP.

4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original Export Certificate EXP, shall take effect as from that date.

Article 4

Validity of Export Certificates EXP

1. An Export Certificate EXP shall be valid for four months from the date of issue in the exporting OCT, and must be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.
2. Exports Certificate EXP which are submitted to the customs authorities of the importing country after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying the arrangements, where the failure to submit these documents by the final date set is due to exceptional circumstances.
3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may accept the Export Certificates EXP where the products have been submitted before the said final date.

Article 5

Submission of Export Certificates EXP

Export Certificates EXP shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that country. The said authorities may require a translation of Export Certificates EXP and may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the Decision.

ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 6

Mutual assistance

1. The OCT shall send to the Commission specimens of the stamps used together with the addresses of the customs authorities competent to issue Export Certificates EXP if they differ from those included in Article 31 of Annex III. The OCT shall carry out the subsequent verification of Export Certificates EXP.

Export Certificates EXP shall be accepted for the purpose of applying the arrangements provided for from the date the information is received by the Commission.

The Commission shall send this information to the customs authorities of the Member States.

2. In order to ensure the proper application of this Annex, the OCT and the Community shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the Export Certificates EXP and the correctness of the information given in these documents.

Article 7

Verification of Export Certificates EXP

1. Subsequent verifications of Export Certificates EXP shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such documents or the compliance with the provisions of Article 36 of this Decision.

2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the importing country shall return the Export Certificate EXP, the relevant commercial documents or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting OCT giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the Export Certificate EXP is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting OCT. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate.

4. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the application of the arrangements to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of this verification as soon as possible. These results must indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned can be considered as having fulfilled the provisions of Article 36 of this Decision.

6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or that the products to be exported are such as to qualify for the issue of an Export Certificate EXP, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse application of the arrangements.

7. Where the verification procedure or any other available information appears to indicate that the provisions of this Annex are being contravened, the OCT on its own initiative or at the request of the Community shall carry out appropriate enquiries or arrange for such enquiries to be carried out with due urgency to identify and prevent such contraventions. The Commission may participate in the enquiries.

8. Where disputes arise in relation to the verification procedures which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this Annex, they shall be submitted to the Customs Code Committee set up by Council Regulation (EEC) No 2454/93.

9. In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall be under the legislation of the said country.

Article 8

Penalties

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information to enable products to be accepted as eligible for the arrangements provided for.

Article 9

Free zones

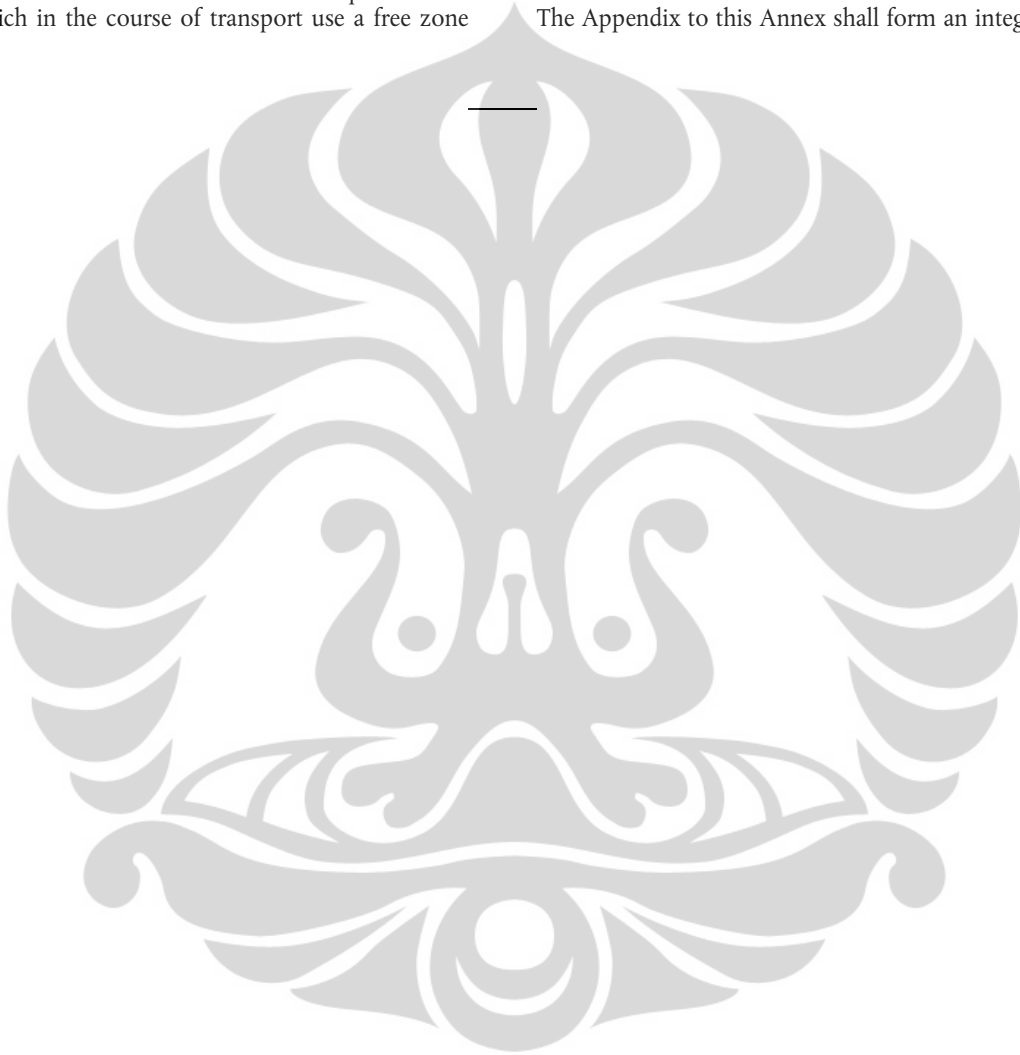
The OCT and the Member States shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of an Export Certificate EXP and which in the course of transport use a free zone

situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

Article 10

Annexes

The Appendix to this Annex shall form an integral part thereof.

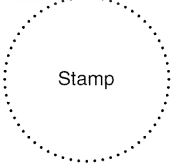


*Appendix***EXP. 1 transshipment certificate**

1. The EXP. 1 transshipment certificate shall be made out on the form of which a specimen appears in this Annex. This form shall be printed in one or more of the languages in which the Decision is drawn up. Certificates shall be made out in one of these languages and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting State if they are hand-written, they shall be completed in ink and in capital letters.
2. Each certificate shall measure 210 × 297 mm, a tolerance of up to plus 8 mm or minus 5 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 60g/m². It shall have a printed green guilloche pattern making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.
3. The competent authorities of the exporting OCT may reserve the right to print the certificates themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case each certificate must include a reference to such approval. Each certificate must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.



TRANSHIPMENT CERTIFICATE

1. Exporter (name, full address, country)		EXP.1 No A 000.000	
		See notes overleaf before completing this form	
3. Consignee (name, full address, country) (Optional)		2. Certificate used in preferential trade between and (insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
		4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination
6. Transport details (Optional)		7. Remarks	
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of package ⁽¹⁾ ; Description of goods		9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.)	10. Invoices (Optional)
11. CUSTOMS ENDORSEMENT Declaration certified Export document ⁽²⁾ Form No Customs office Issuing country or territory Date: (Signature)			12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. Place and date (Signature)

⁽¹⁾ If goods are not packed, indicate number of articles or state 'In bulk' as appropriate.
⁽²⁾ Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

<p>13. Request for verification, to:</p>	<p>14. RESULT OF VERIFICATION</p>
<p>Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.</p> <p>..... (Place and date)</p> <p>Stamp</p> <p>..... (Signature)</p>	<p>Verification carried out shows that this certificate (*)</p> <p><input type="checkbox"/> was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate</p> <p><input type="checkbox"/> does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).</p> <p>..... (Place and date)</p> <p>Stamp</p> <p>..... (Signature)</p> <p>(*) Insert X in the appropriate box.</p>

NOTES

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialed by the person who completed the certificate and endorsed by the customs authorities of the issuing country or territory.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A TRANSHIPMENT CERTIFICATE

<p>1. Exporter (name, full address, country) (Optional)</p>	<p>EXP.1 No A 000.000</p>	
<p>3. Consignee (name, full address, country) (Optional)</p>	<p>2. Application for a certificate to be used in preferential trade between</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>.....</p> <p>(insert appropriate countries or groups of countries or territories)</p>	
<p>6. Transport details (Optional)</p>	<p>4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating</p>	<p>5. Country, group of countries or territory of destination</p>
<p>8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages ⁽¹⁾; Description of goods</p>	<p>7. Remarks</p>	<p>10. Invoices (Optional)</p>
	<p>9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.)</p>	

⁽¹⁾ If goods are not packed, indicate number of articles or state 'In bulk' as appropriate.

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

.....
.....
.....
.....

SUBMIT the following supporting documents ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

.....
(Place and date)

.....
(Signature)

⁽¹⁾ For example, import documents, movement certificates, manufacturer's declarations, etc. referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

ANNEX V

EURO-INFO CORRESPONDENCE CENTRES (EICC)**Tasks of the EICC**

In respect of the OCTs the tasks of the Euro-info Correspondence Centres (EICC) shall be to:

- disseminate Community information to OCT firms,
- gather and transmit to the Euro-info Centres (EIC) information from the OCTs which may be of use to European small and medium-sized enterprises,
- answer general, legal, administrative and statistical questions from OCT firms about the European Union,
- answer general, legal, administrative and statistical questions from Community firms about the OCTs.

To achieve the greatest possible reciprocity in the exchange of information, the Commission shall ensure that Community firms have access to the same type of information and the same advisory/support services in relation to the OCTs as those offered by the Community to OCT firms.

Tools and services

The following tools and services shall be made available to or be acquired by the Correspondence Centres for the proper performance of their work:

- (a) documentation: a list of documents selected to form a basic library collection (to be acquired); terms and cost of acquisition;
- (b) a specific software program (to be acquired) for creating and managing dossiers on specific issues and conducting searches on previous dossiers and existing document and databases;
- (c) databases: list of databanks available (for which there is a charge); terms and cost of connection;
- (d) training: teach yourself courses (to be acquired), timetable of training sessions (specific Community matters, working of the EICs), fee-paying training sessions in database use, and annual conference of all EICs and EICCs (for all these activities, travel and accommodation expenses to be borne by the EICC);
- (e) access to information officers of the central administration for replies to requests for information on Community-related matters;
- (f) access to the capitalisation database via the VANS: this EIC-network database contains questions and answers on mainly Community matters;
- (g) electronic mail: the EICCs shall have access to the electronic mail system, in particular the EIC network's own environment.

Establishment procedures

1. A request for the establishment of a correspondence centre and the choice of host structure should be addressed to the Commission by the competent authorities of the country or territory through the channels provided for in Article 59 of this Decision.
2. An agreement providing for, *inter alia*, sufficient human, material and financial resources shall be concluded between the EICC and the Commission.

Criteria for selecting the host structure

The following criteria shall be used to select applicant host structures of the EICCs:

- experience of the applicant structure in assisting and advising businesses, a business-oriented attitude to small and medium-sized enterprises,
- representativeness in respect of the business sector in the applicant country or territory,
- knowledge of European issues,
- the will and the ability to ensure reciprocity of services to OCT and Community firms,
- the potential for financial independence,
- willingness to employ as staff for the Centre, people with a good command of English or French and experience of computers,
- provision of computer and communications equipment that complies with the specifications,
- an undertaking to serve all small and medium-sized enterprises equally without discrimination as to status or sector, where appropriate in liaison with other EICs or EICCs on the network.

LAW

**Law No. 55-1052 of 6 August 1955 concerning the status of French
Southern and Antarctic and Clipperton Island.**

Consolidated version to 31 March 2011

• Title I: Status of the French Southern and Antarctic

Article 1

Amended by [Act No. 2007-224 of February 21, 2007 - art. 14 Official Journal of 22 February 2007](#)

The St. Paul Island, Amsterdam Island, Crozet Archipelago, Kerguelen Archipelago, Adelie Land and the islands Bassas da India, Europa, Glorioso, Juan da Nova and Tromelin form an overseas territory with legal personality and with the administrative and financial autonomy.

This territory became known as French Southern and Antarctic.

Article 1-1

Amended by [Law n ° 2011-334 of March 29, 2011 - art. 18](#)

In matters within the jurisdiction of the State, shall apply in the French Southern and Antarctic laws and regulations which shall make specific reference to this end.

Notwithstanding the first paragraph, shall apply as of right in the French Southern and Antarctic Lands, without prejudice to adapting to the particular organization of the territory, the laws and regulations that relate to:

1 ° In the composition, organization, operation and functions of constitutional Government of the Republic, the State Council, the Court of Cassation, the Court of Auditors, the Disputes Tribunal and all courts National Sovereign Rights Defender (1) and the National Commission on Informatics and Liberties;

2 ° A national defense;

3 ° A national;

4 ° In the civil law;

5 ° In the criminal law and criminal procedure;

6 ° of the currency, treasury, credit and foreign exchange, financial relations with foreign countries, to fight against the illicit traffic and money laundering, the fight against terrorist financing, powers of search and of detection of offenses and litigation relating to customs, the foreign investment regime in an activity that participates in the exercise of public authority or under the control of activities likely to undermine public

order, security public, the interests of national defense or under the control of research, production or marketing of weapons, ammunition, explosive substances or powders;

7 ° In commercial law and insurance law;

8 ° In the administrative proceedings and not contentious;

9 ° In the statutes of the state of public officials;

10 ° A research.

Are also applicable law in the French Southern and Antarctic laws address authorization to ratify or approve international agreements and decrees which decide on their publication, and any other legislative and regulatory provisions which, because of its object, is necessarily intended to govern the entire territory of the Republic.

NOTE:

(A) the words: "Rights Defender" replaces the words "the Ombudsman" to the date specified in Section I of Article 44 of Organic Law n ° 2011-333 of 29 March 2011 on the Defender rights (March 31, 2011).

Are replaced by the words: "Defender of Rights" but the date in the first paragraph of that Article II (1 May 2011), the words "the Child Advocate, and the High Authority against the discrimination and equality".

Article 1-2

- o Created by [Act 2007-224 2007-02-21 Art. April 14 ° JORF February 22, 2007](#)

I. - The laws and, when published in the Official Journal of the French Republic, the administrative acts come into force in the French Southern and Antarctic on the date specified in them or, failing this, the tenth day following publication Official Journal of the French Republic. However, the entry into force of those provisions thereof which requires the execution of enforcement is postponed to the date of entry into force of these measures.

In an emergency, come into force upon publication laws which decree promulgating the prescribed administrative acts for which the Government so directs by a special provision.

This I shall not apply to individual acts.

II. - The publication of laws, ordinances, decrees and, when a law or a decree provides, other administrative acts is assured, the same day, in conditions that guarantee their authenticity, in print and electronic form . The Official Journal of the French Republic is made available to the public in electronic form on a permanent and free.

III. - Are automatically applicable in the French Southern and Antarctic regulatory provisions in force in the metropolis that define the individual acts are not to be published in electronic form and those that define the categories of administrative acts

which publication in the Official Journal of the French Republic in electronic form is sufficient to ensure the entry into force.

IV. - In the French Southern and Antarctic, the publication of acts and administrative documents in the Official Gazette of a department issued in electronic form under conditions ensuring its reliability has the same effect of law that their publication in printed form.

V. - The statutory or regulatory provisions referred to in Article 1 and III-1 of this section are published for information in the Official Journal of the French Southern and Antarctic.

VI. - Laws and regulations made prior to the date of enactment of Law No. 2007-224 of 21 February 2007 laying down provisions relating to the institutional and overseas include a statement of application in the French Southern and Antarctic Lands and which have not been promulgated a local administrator to take effect than the tenth day following the publication of the said Act, unless they decide otherwise.

VII. - Acts of regulatory authorities of the territory are published in the Official Journal of the French Southern and Antarctic. They are effective on the date specified in them or, failing that, the day after their publication.

Article 2

- Amended by [Act No. 2007-224 of February 21, 2007 - art. 14 Official Journal of 22 February 2007](#)

This territory is under the authority of a state representative territory manager, who takes the title of senior administrator of French Southern and Antarctic.

In his capacity as representative of the State, the senior administrator responsible public policy and contributes to respect for civil liberties and individual and collective rights.

It directs state agencies, excluding bodies of a judicial nature, subject to exceptions listed exhaustively by decree.

National defense and State action at sea, he served under the law and regulations.

It ensures, on behalf of the State, as provided by laws and regulations, control bodies or persons receiving public or private grants or contributions from the state.

It makes regulations in matters within its jurisdiction.

Article 3

- Amended by [Act No. 2007-224 of February 21, 2007 - art. 14 Official Journal of 22 February 2007](#)

The Senior Administrator is assisted by an advisory board whose composition, organization, functioning and powers are set by decree.

Article 5

- Amended by [Act No. 2007-224 of February 21, 2007 - art. 14 Official Journal of 22 February 2007](#)

Credits required for installation, maintenance and operation of permanent establishments of French Southern and Antarctic are budgeted for the ministry in charge of overseas territories.

Article 6

- Created by [Act 2007-224 2007-02-21 Art. September 14 ° JORF February 22, 2007](#)
The senior administrator may decide to waive the requirement of filing with the State funds the territory under the conditions defined in Chapter VIII of Title VI of the book only the first part of the general code of local government.

Article 7

- Amended by [Act No. 2007-224 of February 21, 2007 - art. 14 Official Journal of 22 February 2007](#)

Orders issued on the report of the Minister for Overseas and possibly the Minister of Finance and Economic Affairs will settle the mode of application of this Act.

Article 8

- Amended by [Act No. 2007-224 of February 21, 2007 - art. 14 Official Journal of 22 February 2007](#)

All prior enactments contrary to these provisions, including the [Decree of 21 November 1924](#) linking the islands of St. Paul and Amsterdam, Crozet and Kerguelen islands and Adelie Land to the general government of Madagascar are repealed.

This Act shall be enforced as State law.

Islands Bassas da India, Europa, Glorioso, Juan da Nova and Tromelin shall be governed, from the date of enactment of [Law No. 2007-224 of 21 February 2007](#) referred to above, by the laws and regulations, this same date, in the territory of the French Southern and Antarctic.

Article 1-1 comes into force on 1 January 2008. The laws and regulations occurred in areas subject, under Law No. 2007-224 of 21 February 2007 referred to above, the

application of the regime of right laws and regulations are applicable in the French Southern and Antarctic, after that date, provided they do not provide otherwise.

Article 4 (repealed)

- Repealed by [Act 2007-224 2007-02-21 Art. July 14 ° JORF February 22, 2007](#)

- Title II: Status of Clipperton Island

Article 9

- Created by [Act 2007-224 2007-02-21 Art. Dec. 14 ° Official Journal of 22 February 2007](#)

Clipperton Island is under the direct authority of the Government.

The minister for overseas territories are responsible for the administration of the island. It carries all the powers conferred by the laws and regulations to administrative authorities. He may delegate the exercise of these powers.

The laws and regulations are fully applicable in Clipperton Island.

A decree specifies the terms of this section.

By the President of the Republic:

RENE COTY. The President of the Council of Ministers,

EDGAR FAURE

The Minister of Finance and Economic Affairs,

PIERRE PFLIMLIN

The Minister of Overseas France,

PIERRE-HENRI TEITGEN

(1) Preparatory work: Law No. 55-1052.

National Assembly:

Bill (No. 1203);

Notice of the Meeting of the French Union of 7 February 1952 (No. 2575);

Mr. Laforest report on behalf of the Committee on Territories Overseas (No. 6378);

Opinion of the Committee on Finance (No. 8249);

Tacit adoption April 9, 1954 (L. No. 1328).

Council of the Republic:

Transmission (No. 235, 1954);

Mr. Castellani reports on behalf of the Committee on Overseas France (Nos. 389 and 429, 1954);

Opinion of the Committee on Finance (Nos. 400 and 445, 1954);

Discussion on 8 and 29 July 1954;

Adoption of the opinion July 29, 1954 (A. 186, 1954).

National Assembly:

Opinion of the Council of the Republic (No. 9023);

Mr. Laforest report on behalf of the Committee on Territories Overseas (No. 10241);

Adoption without debate March 24, 1955 (L. No. 1847).

Council of the Republic:

Transmission (No. 203, 1955);

Mr. Castellani report on behalf of the Committee on Overseas France (1955);

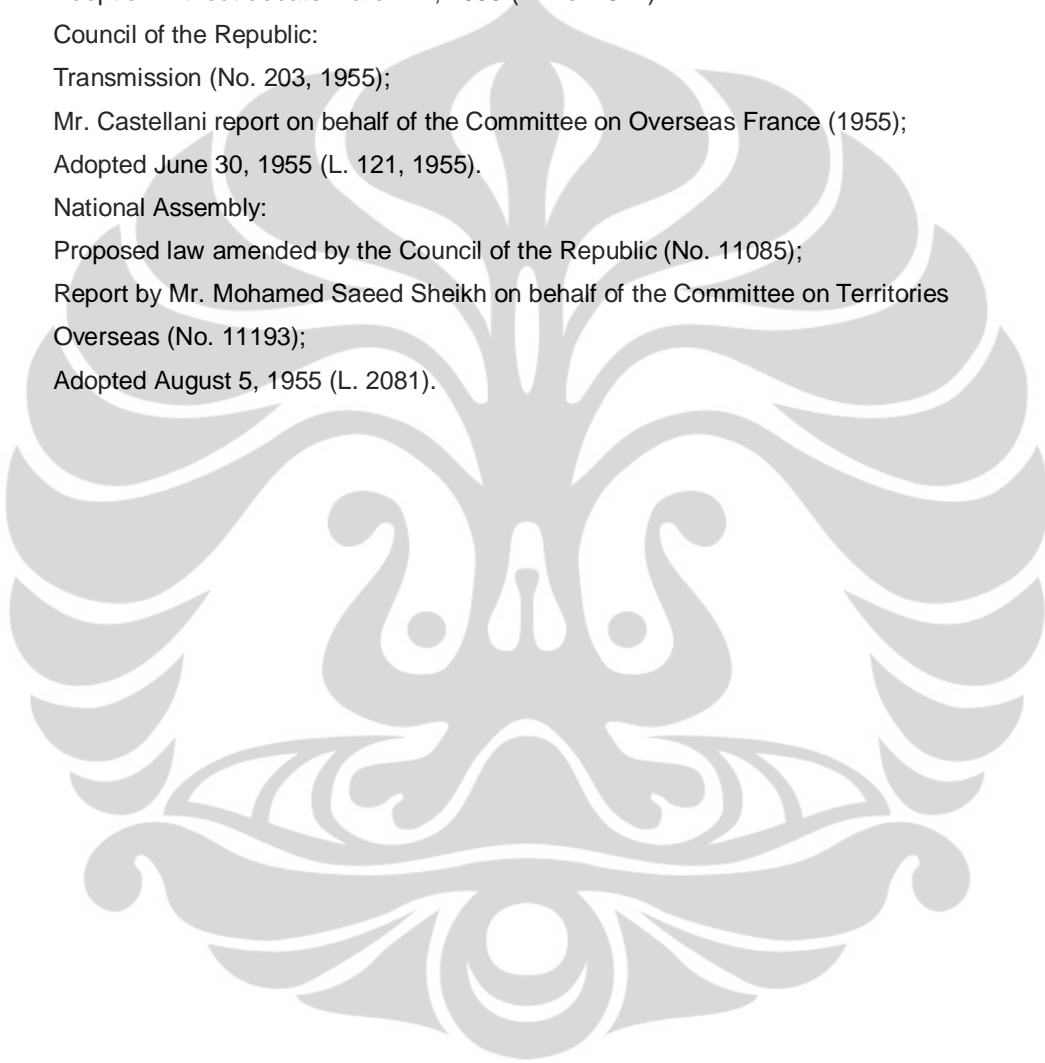
Adopted June 30, 1955 (L. 121, 1955).

National Assembly:

Proposed law amended by the Council of the Republic (No. 11085);

Report by Mr. Mohamed Saeed Sheikh on behalf of the Committee on Territories Overseas (No. 11193);

Adopted August 5, 1955 (L. 2081).



Loi n°55-1052 du 6 août 1955
Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

Version consolidée au 31 mars 2011

Titre Ier : Statut des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 1

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 (JORF 22 février 2007).

L'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin forment un territoire d'outre-mer doté de la personnalité morale et possédant l'autonomie administrative et financière.

Ce territoire prend le nom de Terres australes et antarctiques françaises.

Article 1-1

*Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 4° (JORF 22 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2008)
Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 18.*

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Défenseur des droits et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

2° A la défense nationale ;

"3° A la nationalité ;

"4° Au droit civil ;

"5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;

"6° A la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de

recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;

"7° Au droit commercial et au droit des assurances ;

"8° A la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

"9° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;

"10° A la recherche.

"Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.

Article 1-2

Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 4° (JORF 22 février 2007).

I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

III. - Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

IV. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

V. - Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'article 1er-1 et au III du présent article sont publiées pour information au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

VI. - Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer qui comportent une mention d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.

VII. - Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

Article 2

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 (JORF 22 février 2007).

Ce territoire est placé sous l'autorité d'un représentant de l'Etat chef du territoire qui prend le titre d'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

En sa qualité de représentant de l'Etat, l'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il dirige les services de l'Etat, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.

En matière de défense nationale et d'action de l'Etat en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Article 3

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 (JORF 22 février 2007).

L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

Article 4

Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 7° (JORF 22 février 2007).

Article 5

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 (JORF 22 février 2007).

Les crédits nécessaires à l'installation, à l'entretien et au fonctionnement des établissements permanents des îles australes et des missions en terre Adélie et sur le continent antarctique sont inscrits au budget du ministère de la France d'outre-mer.

Article 6

Abrogé par Décret n°96-200 du 14 mars 1996 art. 1 (jorf 16 mars 1996).

Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 9° (JORF 22 février 2007).

L'administrateur supérieur peut décider de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Article 7

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 (JORF 22 février 2007).

Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et, éventuellement, du ministre des finances et des affaires économiques régleront les modalités d'application de la présente loi.

Article 8

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 (JORF 22 février 2007).

Tous textes antérieurs contraires aux présentes dispositions, et notamment le décret du 21 novembre 1924 rattachant les îles Saint-Paul et Amsterdam, les archipels Crozet et Kerguelen et la terre Adélie au gouvernement général de Madagascar sont abrogés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 précitée, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 1er-1 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en application de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 précitée, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement.

Titre II : Statut de l'Île de Clipperton.

Article 9

Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 12° (JORF 22 février 2007).

L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.

Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions.

Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Par le Président de la République :

RENÉ COTY. Le président du conseil des ministres,

EDGAR FAURE

Le ministre des finances et des affaires économiques,

PIERRE PFLIMLIN

Le ministre de la France d'outre-mer,

PIERRE-HENRI TEITGEN

ACT
**Act No. 61-814 of 29 July 1961 giving the Wallis and Futuna Islands
the status of overseas territory (1)**
Consolidated version to 1 May 2012

• **PART I: ORGANIZATION AND LEGAL SYSTEM.**

Article 1 [Learn more about this article ...](#)

- Amended by [Organic Law No 2010-704 of 28 June 2010 - art. 21 \(V\)](#)

The Wallis Islands, Futuna, Alofi and its dependent islands are under the name "Territory of Wallis and Futuna Islands", an overseas territory endowed with legal personality and administrative and financial autonomy.
The territory of Wallis and Futuna Islands is represented in Parliament of the Republic and the Economic, social and environmental conditions defined by the organic laws.

Article 2 [Learn more about this article ...](#)

The originating in the territory of Wallis and Futuna Islands have French nationality. They enjoy the rights and freedoms prerogatives attached to the quality of French citizen and are subject to the same obligations. Those among them who do not have the status of common law retain their personal status as they have not expressly waived.

Article 3

The Republic guarantees to the people of the territory of Wallis and Futuna Islands the free exercise of their religion, and respect their beliefs and customs as they are not contrary to general principles of law and the provisions of this legislation.
It takes all measures to ensure the region's economic development, including through investment funds and economic and social development.

Article 4 [Learn more about this article ...](#)

- Amended by [Act 78-1018 1978 -10 to 18 s. 1 Official Journal of 20 October 1978](#)

The territory of Wallis and Futuna Islands is now regulated:

- a) By the laws of the Republic and relevant decrees, because they object to the entire national territory and, upon their promulgation in the territory, the laws, decrees and ministerial orders expressly declared applicable to territories overseas or in territory of Wallis and Futuna Islands;
- b) the regulations for the administration of the territory by the High Commissioner of the Republic in the Pacific Ocean or the senior administrator of the territory of Wallis and Futuna Islands, each under the powers vested in it by this Law and decrees to be adopted for its implementation.

The laws, decrees and orders referred to above and has the regulations made by the High Commissioner of the French Republic in the Pacific Ocean or the Resident Commissioner of France to Wallis and Futuna Islands and Futuna delegate, made prior to the date of enactment of this Act local, are and shall remain applicable to the territory of Wallis and Futuna Islands, without special enactment, for everything that is not contrary to the provisions of that Act.

Own laws and decrees to New Caledonia and in force in that territory at the date of enactment of this Act Local may, with the exception of those related to the particular organization of this territory, be extended by decree to the territory Wallis and Futuna Islands, after consultation with the territorial assembly.

Article 4-1 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 2007-223 of 21 February 2007 - art. 16 Official Journal of 22 February 2007](#)

I. - The laws and, when published in the Official Journal of the French Republic, the administrative acts are effective in Wallis and Futuna Islands on the date specified in them or, failing this, the tenth day following their publication in Official Journal of the French Republic. However, the entry into force of those provisions thereof which requires the execution of enforcement is postponed to the date of entry into force of these measures.

In an emergency, come into force upon publication laws which decree promulgating the prescribed administrative acts for which the Government so directs by a special provision.

This I shall not apply to individual acts.

II. - The publication of laws, ordinances, decrees and, when a law, order or decree provides, other administrative acts is assured, the same day, in conditions that guarantee their authenticity, and on paper electronic form. The Official Journal of the French Republic is made available to the public in electronic form on a permanent and free.

III. - Are automatically applicable in the Wallis and Futuna Islands regulatory provisions in force in the metropolis that define the individual acts are not to be published in electronic form and those that define the categories of administrative acts whose gazettal of the French Republic in electronic form is sufficient to ensure the entry into force.

IV. - In Wallis and Futuna Islands, the publication of acts and administrative documents in the official bulletin of a department issued in electronic form under conditions ensuring its reliability has the same effect of law that their publication in printed form.

V. - The laws and regulations applicable to Wallis and Futuna are published for information in the Official Journal of Wallis and Futuna Islands.

Article 5 [Learn more about this article ...](#)

- Amended by [Act No. 2007-224 of February 21, 2007 - art. 21 \(V\) Official Journal of 22 February 2007](#)

It is established in the territory of Wallis and Futuna Islands an ordinary court within the jurisdiction of the Court of Appeal of Noumea and jurisdiction of local law.

A load of appeal, the jurisdiction of local law is competent in the first degree:

1 ° For disputes between citizens governed by statute and local law concerning the application of this statute;

2 ° For disputes over property held as usual.

However, parties defendants to the jurisdiction of local law may, by agreement, claim the benefit of the general court, in this case, their advantage is taken of the governing practices and customs.

The judgments rendered by the ultimate jurisdiction of local law may be challenged in a room cancellation at the Court of Appeal of Nouméa, for incompetence, abuse of power or violation of law.

A State Council decree regulates the organization of the common law jurisdiction. From the date of promulgation of this decree in the territory, the provisions of Articles 1 to 16 of the Decree of August 8, 1933 are repealed.
An order of the senior administrator organizes the jurisdiction of local law.

Article 6 (repealed) [More about this product ...](#)

- Repealed by [Ordinance 2003-923 2003-09-26 Art. June 2 ° Official Journal of 27 September 2003 into force on 1 September 2004](#)

• PART II: AUTHORITY OF THE REPUBLIC.

Article 7 [Learn more about this article ...](#)

- Amended by [Order No. 2009-536 of 14 May 2009 - art. 19](#)

The Republic guarantees the defense of the territory of Wallis and Futuna Islands, order and public security, compliance with laws, regulations and court decisions, the external relations and communications, education, keeping the state Civil, operation of the Treasury and Customs, the administrative and financial control, "Hygiene and Public Health."

To exercise these powers in the territory, the Republic has headquarters in Noumea services, or the senior administrator of the territory, under conditions to be defined by decree.

The administration of justice is also of the Republic.

Republic assumes the charge of operating expenses and equipment services referred to above.

Article 8 [More about this product ...](#)

- Amended by [Order No. 2012-351 of 12 March 2012 - art. 12](#)

The senior administrator of the territory, appointed by Order in Council of Ministers, depository of the powers of the Republic, representing each member of the Government. He has charge of the national interests and respect for laws. He exercises the powers of governors by the laws and regulations, including the [Act of May 29, 1874 on naturalization](#) and residence of foreigners and the code of the defense, as well as those of the Governor of New Caledonia by [Decree changed from 13 July 1937](#) regulating the admission of French citizens and foreigners in New Caledonia and those recognized in Governor of French Polynesia by the amended decree of 25 June 1934 on the transfer of real property in French Polynesia.

The administrator ensures greater public order and contributes to respect for civil liberties and individual and collective rights in the Wallis and Futuna Islands. He takes measures for the good order, safety, security and public safety. He has, by analogy, the powers conferred on the mayor on administrative police.

Paid to report to the Government of the Republic through the Minister in charge of overseas territories, the senior administrator may:

To-Epidemic all measures of a sanitary or phytosanitary measure, necessitated by the particular situation of the territory;

-Take any material action that he considers should be taken urgently and necessary for the proper functioning of local institutions, protection of citizens and their property, safeguarding people, the local economy or freedoms.

It directs the state to Wallis and Futuna excluding bodies of a judicial nature and subject to exceptions listed exhaustively by decree.
It ensures, on behalf of the State, as provided by law or regulations, control bodies or persons receiving public or private grants or contributions from the state.
The Senior Administrator is authorized to commit the state to the territory of Wallis and Futuna Islands and to speak on behalf of the State before the territorial assembly.
The senior administrator and coordinates the policy of crime prevention and the whole system of internal security in accordance with [Article L. 122-1 of the Code of Homeland Security](#) , as amended by the 4 ° of [Article L. 157-2 of the Code](#) .

- PART III: INSTITUTIONS LAND
 - SECTION I: The head of the territory.

Article 9 [Learn more about this article ...](#)

- Amended by [Act No. 2007-224 of February 21, 2007 - art. 21 \(V\) Official Journal of 22 February 2007](#)

The administrator of the upper Wallis and Futuna Islands shall serve as chief of the territory.

He takes the advice of the Territorial Council, all regulatory acts to ensure the implementation of the decisions of the territorial assembly and all legislative acts within its jurisdiction as head of territory under the laws, decrees and regulations.

It takes, by decision, all individual measurements of its powers to a national territory manager.

It represents the territory in court and in all acts of civil life. The administrator is higher officer of the Territory's budget. He may delegate his powers in authorizing officials or agents working as head of service under its authority, except the power of requisition. It makes enforceable by order of the proceedings of the territorial assembly and ensures its official publication.

Violations of the orders of the head of the territory may be enforced by the courts as a sentencing range established by the senior administrator. These penalties shall not exceed the maximum established for penalties for petty offenses.

- SECTION II: The territorial council.

Article 10

There shall be established for the territory of Wallis and Futuna Islands, a territorial council consists of:

- The senior administrator, chief of the territory, President;
- The three traditional leaders (or Sau Hau), Wallis and Futuna Islands or their alternates, vice presidents;
- Three members appointed by the senior administrator, chief of the territory, the agreement of the territorial assembly, among French citizens enjoying their civil and political rights or their alternates, appointed in the same way.

In the conditions determined by decree, the territorial council assists the Head of Territory for the administration of the territory of Wallis and Futuna Islands. It discuss all projects to be submitted to the territorial assembly.

- DIVISION III: Territorial Assembly and Standing Committee.

Article 11

It is established in the territory of Wallis and Futuna Islands a territorial assembly that sits in the chief town of the territory.

[* Composition *] The membership of this meeting is specified in the table below:

: =====:
: (1): (2): (3):
: =====:
MUA ::: 6:
:: Hahake: 4:
: 20: Hihifo: 3:
Alo ::: 4:
Sigave ::: 3:
: =====:

The assembly shall be renewed. (A) Number of members (2) electoral districts (3) Number of councilors to be elected

Article 12 [Learn more about this article ...](#)

- Amended by [Organic Law No 2010-704 of 28 June 2010 - art. 21 \(V\)](#)

Subject to the arrangements which are made necessary by the organization of the territory which will, where appropriate, subject to a State Council decree, the rules governing the election and the mode of operation, and the jurisdiction of the Territorial Assembly of Wallis and Futuna Islands are determined by the following texts relating to the territorial assembly of New Caledonia:

-Articles 3-12 of the amended law No. 52-1310 of 10 December 1952;

-Articles 7, 9, 15 to 23 of Decree No. 46-2377 of 25 October 1946;

-Article 40, except paragraphs 2, 3, 28 °, 35 ° and 36 °, hygiene and public health and regulation of civil status, sections 41, 43 and 44, 45, with the exception of the second subparagraph of paragraph a, Article 46 and 47, 49, with the exception of paragraphs d, e and i, Article 50 of Decree No. 57-811 of 22 July 1957;

-Articles 2, 25-34, 49, 50, 56-73 and 78, 1, of the amended Order No. 1081 of December 1, 1944 the Governor of New Caledonia.

The territorial assembly may decide that a duty allowance, paid monthly, is allocated to its members.

This compensation, which amount is set by a decision of the territorial assembly, may not exceed a maximum set by decree, by reference to the treatment of a class of officers serving in the territory.

It can not be combined with the damages awarded to members of the National Assembly, Senate or the Economic, social and environmental, with the processing of official or other public services on active service or on secondment. "

However, when the amount of the compensation function is greater than the salary or allowance received by members of the territorial assembly to which the provisions of the preceding paragraph, they can, upon request, receive the difference as an allowance.

Members of the Territorial Assembly are entitled to travel allowances.

A subsistence allowance is also allocated:

To those members of the territorial assembly which receives nt no allowance;

To all members of the territorial assembly when duty allowance is not established. The conditions of award and the maximum rates of compensation s of travel and subsistence are fixed by decree. 9

Article 13 [Learn more about this article ...](#)

- Amended by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 22 \(V\) Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)

The electoral territory of Wallis and Futuna are established by the village. Table of villages in the territory may be amended by resolution of the territorial assembly. The top administrator of the territory will develop and publish, by December 1 of each year, the table of villages as possibly resulting changes in the table deliberations made effective by the territorial assembly. This table will be for the entire following year.

Article 13-1 [Learn more about this article ...](#)

- Amended by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 7](#)

Members of the Territorial Assembly of Wallis and Futuna are elected in accordance with Articles L. 387 to L. 391 and Title VIII of the Electoral Code (Legislative Part).

Section 13-1-1 [read more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 2000-294 of 5 April 2000 - art. 13](#)

For the purposes of all provisions establishing certain incompatibilities between electoral mandates, the mandate of a member of the Territorial Assembly of Wallis and Futuna is assimilated to the general mandate to advise a department.

Article 13-2 [Learn more about this article ...](#)

- Amended by [Organic Law No 2011-333 of 29 March 2011 - art. 43 \(V\)](#)

The Defender of Rights is not eligible for the Territorial Assembly.

Article 13-3 (repealed) [More about this product ...](#)

- Created by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 14 Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)
 - Repealed by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 20 \(V\)](#)

Article 13-4 (repealed) [More about this product ...](#)

- Created by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 14 Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)
 - Repealed by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 20 \(V\)](#)

Article 13-5 (repealed) [More about this product ...](#)

- Created by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 14 Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)
- Repealed by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 20 \(V\) Official Journal of 22 April 2000](#)

Article 13-6 (repealed) [More about this product ...](#)

- Created by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 14 Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)
- Repealed by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 20 \(V\) Official Journal of 22 April 2000](#)

Article 13-7 (repealed) [More about this product ...](#)

- Created by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 14 Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)
- Repealed by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 20 \(V\) Official Journal of 22 April 2000](#)

Article 13-8 (repealed) [More about this product ...](#)

- Created by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 14 Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)
- Repealed by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 20 \(V\) Official Journal of 22 April 2000](#)

Article 13-9 (repealed) [More about this product ...](#)

- Created by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 14 Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)
- Repealed by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 20 \(V\) Official Journal of 22 April 2000](#)

Article 13-10 (repealed) [More about this product ...](#)

- Created by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 14 Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)
- Repealed by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 20 \(V\) Official Journal of 22 April 2000](#)

Article 13-11 (repealed) [More about this product ...](#)

- Created by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 14 Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)
- Repealed by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 20 \(V\) Official Journal of 22 April 2000](#)

Article 13-12 (repealed) [More about this product ...](#)

- Created by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 14 Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)

- Repealed by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 20 \(V\) Official Journal of 22 April 2000](#)

Article 13-13 (repealed) [More about this product ...](#)

- Created by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 14 Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)
- Repealed by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 20 \(V\) Official Journal of 22 April 2000](#)

Article 13-14 (repealed) [More about this product ...](#)

- Created by [Ordinance No. 98-730 of 20 August 1998 - art. 14 Official Journal of 22 August 1998 in force on 1 October 1998](#)
- Repealed by [Order No. 2000-350 of 19 April 2000 - art. 20 \(V\) Official Journal of 22 April 2000](#)

Article 13-16 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 2000-294 of 5 April 2000 - art. 14](#)

The mandate of a member of the Territorial Assembly is incompatible with the office of General Counsel, Regional Adviser, adviser of Paris, to advise the Corsican Assembly or member of the Executive or a deliberative assembly of New Caledonia or French Polynesia.

Article 14

The Assembly may issue opinions tending to the facility for the materials it regulates, tax and criminal penalties. Penalties for violations of a regulatory proceedings will be instituted by decrees of the senior administrator. In criminal cases, they may not exceed three months' imprisonment and a fine of 3,000 metropolitan NF.

Article 14-1 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 10](#)

Public institutions of the territory are created by resolution of the territorial assembly subject to the approval of the senior administrator.

"The president of the board or the director of the public institution prepares and executes the deliberations of the Board, including the budget, according to the status of each institution.

"It is the authorizing officer for revenue and expenditure.

Article 14-2 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 10](#)

Subject to the exceptions set out in the last paragraph, the territory can not grant a person in private law a loan guarantee or surety under the conditions set out below.

"The total amount of annual loan guarantees already condoned or accruing during the period, plus the amount of the first installment of the entire guaranteed new

competition, and the amount of annual debt of the territory may not exceed a percentage defined by decree of the actual revenue of the operating section of the budget planning. The amount of specific provisions made by the territory to cover guarantees and sureties granted, multiplied by a multiplier set by decree, is deducted from the total set in this paragraph.

"The amount of annuity guarantees or condoned in favor of a debtor, owing to a financial year must not exceed a percentage, set by decree, the total amount of annuity may be guaranteed or condoned under the preceding paragraph.

"No provision can not preclude the involvement of collateral or guarantees given by the territory holder, at his option, either on the entire competition or on annuities determined by the contractual schedule.

"The foregoing paragraphs are not applicable to loan guarantees or guarantees granted by the Territory to building operations, acquisition or improvement of homes financed by a grant from the State or made with the benefit of subsidized loans by the state. "

Article 15

The assembly appoints from among its members a standing committee of four members selected material to represent all constituencies of the territory and to be gathered at any time of the year in the chief town of the territory. These conditions will be set by decree.

The standing committee rule the affairs referred to it by the Assembly. It can, in an emergency and unable to call a meeting within the time required, discuss and give opinions on matters within the jurisdiction thereof concerning matters that are submitted by the head of territory after consulting the territorial council.

Article 16

The deliberations of the Territorial Assembly and its Standing Committee, other than those relating to the program of investment funds for economic and social development of the territory and those that occurred in customs matters, are not final until approved by the Senior Administrator.

• PART IV: DISTRICT LAND.

Article 17

The territory of Wallis and Futuna Islands is divided into three territorial divisions:

- That of Uvea;
- That of Alo;
- That of Sigave,

in their current limits.

Article 18

These districts are endowed with legal personality. They may have a budget in the manner specified by decree. They are organized by orders of the senior administrator issued after consultation with the territorial assembly and the territorial council which sets their institutions and determines the powers of the latter within the limits defined by the laws and decrees.

The administrator has higher Wallis as Chief of riding. The delegate of the director over the head Futuna districts under its jurisdiction.

The head of the district represents the constituency in all acts of civil life. It has regulatory power. It is, if any, authorizing the district's budget.
Each constituency has a county council whose members are elected as provided by custom.
The Chairman of riding is one of the vice-presidents of the Territorial Council (or Sau Hau) belonging to the constituency. He represents the constituency in court.
The number of board members of the constituency shall be determined by order of the senior administrator, chief of the territory.

- **TITLE V: Budgetary and accounting Chapter I: Budgetary provisions Section 1: Provisions applicable to the Territory's budget**

Article 19 [Learn more about this article ...](#)

- Amended by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

The Territory's budget forecasts and authorizes the revenue and expenditure planning for the period 1 January to 31 December each year.

"It includes an operating section and an investment section. It is divided into chapters and articles in the conditions which are determined by joint order of the Minister for the Budget and the minister for territories overseas.

"The supplementary budgets are voted in the manner and conditions of the original budget.

Article 20 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

The appropriations are voted by chapter and, if the Territorial Assembly so decides, per item.

"However, except where the Assembly has specified that the appropriations shall each, the top administrator of the territory may make transfers between articles within the same chapter within one fifth of staffing the chapter.

Article 21 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

On the proposal of the senior administrator, the Territorial Assembly may decide that the allocations for capital expenditure include program authorizations and payments.

"A single transaction in the form of capital expenditures, grants or loans can be divided into slices. Each program authorization must cover a portion constitute a separate unit forming a coherent whole likely to be operated without the addition.

"The program authorizations represent the maximum expenses that may be incurred to finance investment. They remain valid indefinitely until their cancellation process. May be revised.

"However, the program authorizations not used for three consecutive years shall lapse.

"Payment appropriations are the upper limit of expenditure that can be scheduled or paid during the year to cover the liabilities incurred under program authorities related.

"Balancing the budget section of the investment is assessed taking into account only payments.

"When the investment section of the budget includes program authorizations and payment appropriations, the senior administrator of the territory may, until the budget is adopted or until settled for non-adoption of the budget liquidate and appoint investment spending corresponds with program authorities to open prior years, within the amount of payment appropriations by chapter equal to the third program authorities opened during the previous year. The appropriations are budgeted when it was adopted and the Regulations.

Article 22 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

The procedure of assistance funds is used when the funds paid by persons or entities to compete with those of the territory for expenditure of public interest, regularly accepted by the Territorial Assembly, are directly recognized as revenue in the budget. An additional credit of same amount is made by the chapter budget deliberation to bear the expense. The use of funds must be consistent with the intent of the payer or donor.

Article 23 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

May be subject to specific budgets financial transactions services of territory not have legal personality and whose core business is to produce goods or render services giving rise to payment of a prize.

"Budgets appendices include the one hand, revenues and operating expenses, on the other hand, capital spending and resources for these expenditures. Specific budget transactions are executed in the manner provided for the general budget.

"The services have a specific budget can manage the sinking funds, reserves and provisions.

"The decision establishing a specific budget provides the conditions for using the balance appearing at the end of management.

Article 24 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

The original draft budget is accompanied by explanatory annexes which list set by decree in Conseil d'Etat.

Article 25 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

The Territory's budget is voted in real equilibrium.

"The budget is in balance when the actual operating section and the investment section are respectively enacted or established balance, revenues and expenses have been assessed so sincere, and when out of the earnings of the operating section the benefit of the investment section, added to this section's own revenues, excluding the proceeds of loans, grants and possibly accounts for depreciation and provisioning, provides sufficient resources to cover the repayment of capital Loan installments falling due during the year.

"However, for the purposes of this section, is not considered in the budget imbalance operating section comprises or contains a surplus and the investment section which is in equilibrium real after repeated for each section results appear to administrative account of the previous year.

"Nothing that could lead to new charges can not be adopted until these charges have not been evaluated and approved by a budget deliberation or by order of the Administrator after consultation with the upper head of the district. The same rules apply when provisions should result in revenue losses.

Article 26 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

The budget is voted on or before December 31st of the year preceding the year to which it applies.

"When the Territory's budget was not voted in real balance or when the Territorial Assembly refused to vote, the top administrator of the territory invites the territorial assembly to deliberate again within a fortnight.

"If the budget is not passed or if it has a deficit in the operating section and an overall deficit, it is set by the Minister in charge of overseas territories and the Minister for the Budget.

Article 27 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

In the event that the Territory's budget was not adopted before 1 January of the year to which it applies, the senior administrator of the territory is entitled, until the adoption of this budget, to in revenue collection, commit, and mandate to liquidate the expenses of the operating section to the extent of those budgeted the previous year.

"The authorizing officer is entitled to mandate the expenditure on the capital repayment of installments of debt maturing before the budget vote.

"In addition, until the budget is adopted or until March 31, in the absence of adoption of the budget before that date, the senior administrator of the territory may, after informing the President of the Territorial Assembly, engage, instruct and liquidate capital expenditure, within a quarter of the budget appropriations of the previous year, excluding allocations for debt repayment. The corresponding appropriations are budgeted at its adoption.

- **TITLE V: Budgetary and accounting Chapter I: Budgetary provisions Section 2: Provisions applicable to districts budget**

Article 28 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

The budget provides for and authorizes the district revenues and expenditures of the district for the period 1 January to 31 December each year. He was arrested by the senior administrator.

"The provisions of Article 25 of this title shall apply.

- TITLE V: Budgetary and accounting Chapter I: Budgetary provisions Section 3: Provisions applicable to the budget for public land administrative nature

Article 29 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

The budget of a public institution in the territory of an administrative forecasts and authorizes the revenue and expenditure of the establishment for the period 1 January to 31 December each year.

The provisions of Article 19, those of the first paragraph of Article 20 and Articles 24 to 27 of this title shall apply.

For their application, it should read:

- "The Board" instead of "the territorial assembly";
- "Public establishment" instead of "territory";
- "President of the Board or the Director, by statute," instead of "the senior administrator of the territory".

- TITLE V: Budgetary and accounting Chapter II: Accounting provisions

Article 30 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

The financial statements of the territory is formed by the vote of the Territorial Assembly on the administrative account established by the authorizing After transmission, no later than April 1 of the year following the year of the management account established by the accountant. The vote of the Territorial Assembly adopting the accounts shall take place before July 1 of the year following the fiscal year.

"The administrative account is stopped if a majority of votes was not clear against it.

Article 31 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

The top administrator of the territory shall, after transmission not later than April 1 of the year following the year of account management by the accountant of the constituency, and opinion of the board of the district, the administrative accounts of the district. The order must be made no later than June 1 of the year following the fiscal year.

Article 32 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

Administrative accounts of public administrative institutions of the territory are prepared in the format and manner prescribed by the regulations applicable to the territory.

For its application, it should be read:

- "Board" instead of "the territorial assembly";
- "Public establishment" instead of "territory";

- "President of the Board or the Director, by statute," instead of "the senior administrator of the territory".

Article 32-1 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-97 of February 1, 1995 - art. 14](#)

The amount of territory and district is a direct accounting of the Treasury who is qualified senior accountant.
He is appointed by the Minister of the Budget after informing the senior administrator.

Article 33 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

The amount of territory and district shall file its accounts to the Court of Auditors, which act by means stop.

"The accounting officer may not make its acts of payment to an appreciation of the merits of decisions taken by the officer. He may not submit the same acts that judicial review from the exercise of his personal and financial responsibility . It shall give reasons for the suspension of payment.

"When the accountant notifies its decision to suspend payment of an expenditure, the authorizing officer may issue a requisition order. Accountant to comply immediately, unless there are insufficient funds available, expenditure on sequenced irregular or insufficient credit or open credit other than those on which she should be charged, total absence of proof of service forms and liberating character flaw of the regulation.

"The requisition order is notified to the Court of Auditors.

"In case of requisition, the officer shall be liable clean. The provisions of this section are applicable to the accounting of public land.

Article 34 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 11](#)

A decree determines the list of documents that the accountant may require prior to payment under controls its obligations under Article 33. "

Article 34-1 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-97 of February 1, 1995 - art. 15](#)

Recovery in Wallis and Futuna claims of the State, local authorities of the Republic and their public institutions, other than the territory of its constituencies and their public institutions, is entrusted to the Treasury and accounting is done as in product planning.

Article 34-2 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-97 of February 1, 1995 - art. 15](#)

Revenues and expenditures to be made outside the territory of Wallis and Futuna Islands are made by accountants Treasury as provided by regulations on revenues and expenditures of the state.

Article 34-3 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-97 of February 1, 1995 - art. 15](#)

Procedures for ensuring the validity of the payment of expenses of the territory, its districts and their public institutions and whether they are legal tender are those applicable for state expenditure.

Article 34-4 [Learn more about this article ...](#)

- Created by [Act No. 95-97 of February 1, 1995 - art. 15](#)

Prosecution for the recovery of proceeds of the territory, its public and its constituencies are carried out as in terms of direct contributions from the territory or, failing that, in accordance with State regulations on direct contributions.

However, the authorizing officer authorizes the issuance of commands and acts of subsequent pursuit. It may, however, provide the accountant responsible for collecting relevant request authorization to issue commands.

The refusal, or failure to respond within a month justifies the presentation of non-value receivables where recovery has been achieved amicably.

• TITLE VI: MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 35 [Learn more about this article ...](#)

- Transferred by [Act No. 95-173 of 20 February 1995 - art. 12](#)

Orders in Council of State will determine, as appropriate, procedures for implementing this Act.

This Act shall be enforced as State law.

Charles de Gaulle By the President of the Republic:

Prime Minister,

MICHEL DEBRÉ

The Minister of State,

ROBERT LECOURT

The Keeper of the Seals, Minister of Justice,

Edmond Michelet

The interior minister,

ROGER FREY

The Minister of Finance and Economic Affairs,

WILFRID BAUMGARTNER

(1) Preparatory work: Law No. 61-814

Senate:

Bill No. 103 (1960-1961);

Report by Mr Baker on behalf of the Law Committee, No. 186 (1960-1961);
Discussion and Adoption May 18, 1961.

National Assembly:

Bill passed by the Senate (No. 1207);

Report by Mr Laurelli, on behalf of the Committee on Constitutional Laws (No. 1312);

Discussion on 11 and 18 July 1961;

Adopted July 18, 1961.

Senate:

Bill amended by the National Assembly, No. 325 (1960-1961);

Mr. Zussy report on behalf of the Law Committee, No. 329 (1960-1961);

Discussion and adoption on 21 July 1961.



LOI
Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)

TITRE Ier : ORGANISATION ET REGIME JURIDIQUE.

Article 1

· Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

Les îles Wallis, Futuna, Alofi et les îlots qui en dépendent constituent, sous la dénomination de " Territoire des îles Wallis et Futuna ", un territoire d'outre-mer doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.

Le territoire des îles Wallis et Futuna est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.

Article 2

Les originaires du territoire des îles Wallis et Futuna ont la nationalité française. Ils jouissent des droits prérogatives et libertés attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations. Ceux d'entre eux qui n'ont pas le statut de droit commun conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas expressément renoncé.

Article 3

La République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi.

Elle prend toutes mesures propres à assurer le développement économique du territoire, notamment par l'intermédiaire du fonds d'investissement et de développement

économique et social.

Article 4

· Modifié par Loi 78-1018 1978-10-18 art. 1 jorf 20 octobre 1978

Le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais régi :

a) Par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ;

b) Par les règlements pris pour l'administration du territoire par le haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique ou par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, chacun selon les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi et par les décrets qui seront pris pour son application.

Les lois, décrets et arrêtés visés au a ci-dessus et les règlements pris par le haut-commissaire de la République française dans l'océan Pacifique ou le commissaire résident de France aux îles Wallis et Futuna et son délégué à Futuna, intervenus antérieurement à la date de promulgation locale de la présente loi, sont et demeurent applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, sans promulgation spéciale, pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de ladite loi.

Les lois et décrets propres à la Nouvelle-Calédonie et en vigueur dans ce territoire à la date de promulgation locale de la présente loi pourront, à l'exception de ceux relatifs à l'organisation particulière de ce territoire, être étendus par décret au territoire des îles Wallis et Futuna, après avis de l'assemblée territoriale.

Article 4-1

· Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 16 JORF 22 février 2007

I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

III. - Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

IV. - Dans les îles Wallis et Futuna, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna sont publiées, pour information, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna.

Article 5

· Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V) JORF 22 février 2007

Il est institué sur le territoire des îles Wallis et Futuna une juridiction de droit commun comprise dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et une juridiction de droit local.

A charge d'appel, la juridiction de droit local est compétente au premier degré :

1° Pour les contestations entre citoyens régis par un statut de droit local et portant sur l'application de ce statut ;

2° Pour les contestations portant sur les biens détenus suivant la coutume.

Toutefois, les parties justiciables de la juridiction de droit local peuvent, d'un commun accord, réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun ; en ce cas, il leur est fait application des usages et coutumes les régissant.

Les jugements rendus en dernier ressort par la juridiction de droit local peuvent être

attaqués devant une chambre d'annulation près la cour d'appel de Nouméa, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Un décret en Conseil d'Etat règle l'organisation de la juridiction de droit commun. A dater de la promulgation de ce décret dans le territoire, les dispositions des articles 1er à 16 du décret du 8 août 1933 sont abrogées.

Un arrêté de l'administrateur supérieur organise la juridiction de droit local.

TITRE II : AUTORITE DE LA REPUBLIQUE.

Article 7

· Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 19

La République assure la défense du territoire des îles Wallis et Futuna, l'ordre et la sécurité publics, le respect des lois, des règlements et des décisions des tribunaux, les relations et communications extérieures, l'enseignement, la tenue de l'état civil, le fonctionnement du Trésor et de la douane, le contrôle administratif et financier, "l'hygiène et la santé publique."

Pour l'exercice de ces compétences dans le territoire, la République dispose de services siégeant à Nouméa, ou de l'administrateur supérieur du territoire, dans des conditions qui seront définies par décret.

L'administration de la justice relève également de la République.

La République assume la charge des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services visés ci-dessus.

Article 8

· Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 12

L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres, dépositaire des pouvoirs de la République, représente chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il exerce les pouvoirs conférés aux gouverneurs par les lois et les règlements, notamment la loi du 29 mai 1874 sur la naturalisation et le séjour des étrangers et le code de la défense, ainsi que ceux conférés au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie par le décret modifié du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des citoyens français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie et ceux reconnus au gouverneur de la Polynésie française par le décret modifié du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française.

L'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs dans les îles Wallis et Futuna. Il prend les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Il exerce, par analogie, les attributions qui sont conférées au maire en matière de police administrative.

A charge d'en rendre compte au Gouvernement de la République par l'intermédiaire du ministre chargé des territoires d'outre-mer, l'administrateur supérieur peut :

-prendre en cas d'épidémie toutes mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire,

nécessités par la situation particulière du territoire ;

-prendre en toutes matières les mesures qu'il juge devoir être prises d'urgence et être nécessaires à la bonne marche des institutions locales, à la protection des citoyens et de leurs biens, à la sauvegarde des personnes, de l'économie locale ou des libertés.

Il dirige les services de l'Etat à Wallis-et-Futuna à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel et sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

L'administrateur supérieur est habilité à engager l'Etat envers le territoire des îles Wallis et Futuna et à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée territoriale.

L'administrateur supérieur anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 4° de l'article L. 157-2 du même code.

TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES

SECTION I : Le chef du territoire.

Article 9

· Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V) JORF 22 février 2007

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire.

Il prend, après avis du conseil territorial, tous actes réglementaires propres à assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef de territoire aux termes des lois, décrets et règlements.

Il prend, par voie de décision, toutes mesures individuelles ressortissant à ses attributions de chef de territoire.

Il représente le territoire en justice et dans tous les actes de la vie civile. L'administrateur supérieur est ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires ou à des agents exerçant des fonctions de chef de service relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition.

Il rend exécutoires, par arrêté, les délibérations de l'assemblée territoriale et en assure la publication officielle.

Les infractions aux arrêtés du chef de territoire pourront être sanctionnées par les tribunaux selon une échelle de peines établie par l'administrateur supérieur. Ces peines

ne pourront dépasser les maxima établis pour les peines de simple police.

SECTION II : Le conseil territorial.

Article 10

Il est institué, pour le territoire des îles Wallis et Futuna, un conseil territorial composé :

- de l'administrateur supérieur, chef du territoire, président ;
- des trois chefs traditionnels (Hau ou Sau), des îles Wallis et Futuna ou de leurs suppléants, vice-présidents ;
- de trois membres nommés par l'administrateur supérieur, chef du territoire, après accord de l'assemblée territoriale, parmi les citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques ou de leurs suppléants, désignés de la même manière.

Dans les conditions qui seront fixées par décret, le conseil territorial assiste le chef du territoire pour l'administration du territoire des îles Wallis et Futuna. Il examine notamment tous les projets qui doivent être soumis à l'assemblée territoriale.

SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.

Article 11

Il est institué dans le territoire des îles Wallis et Futuna une assemblée territoriale qui siège au chef-lieu du territoire.

[*composition*] Le nombre des membres de cette assemblée est fixé conformément au tableau ci-après :

:=====:

: (1) : (2) : (3) :

:=====:

: : MUA : 6 :

: : Hahake : 4 :

: 20 : Hihifo : 3 :

:: Alo : 4 :

:: Sigave : 3 :

:=====:

L'assemblée se renouvelle intégralement. (1) NOMBRE des membres (2)
CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES (3) NOMBRE de conseillers à élire

Article 12

· Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

Sous réserve des aménagements qui seraient rendus nécessaires par l'organisation du territoire et qui feront, le cas échéant, l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, les règles relatives à l'élection et au mode de fonctionnement, ainsi que la compétence de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sont déterminées par les textes ci-après relatifs à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie :

-articles 3 à 12 de la loi modifiée n° 52-1310 du 10 décembre 1952 ;

-articles 7, 9, 15 à 23 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 ;

-article 40, à l'exception des paragraphes 2°, 3°, 28°, 35°, et 36°, de l'hygiène et de la santé publique et de la réglementation de l'état civil, articles 41, 43 et 44, 45, à l'exception du second alinéa du paragraphe a, articles 46 et 47, 49, à l'exception des paragraphes d, e et i, article 50 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ;

-articles 2, 25 à 34, 49, 50, 56 à 73 et 78, 1°, de l'arrêté modifié n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.

L'assemblée territoriale peut décider qu'une indemnité de fonction, payée mensuellement, est allouée à ses membres.

Cette indemnité, dont le montant est fixé par délibération de l'assemblée territoriale, ne peut excéder un maximum fixé par décret, par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires en service dans le territoire.

Elle ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil économique, social et environnemental, avec le traitement de fonctionnaire ou d'agent des services publics en activité de service ou en service détaché.
“

Toutefois, lorsque le montant de l'indemnité de fonction est supérieur au traitement ou indemnité reçus par les membres de l'assemblée territoriale auxquels s'appliquent les dispositions de l'alinéa précédent, ceux-ci peuvent, sur leur demande, recevoir la différence à titre d'indemnité de fonction.

Les membres de l'assemblée territoriale ont droit à des indemnités de déplacement.

Une indemnité de séjour est en outre allouée :

A ceux des membres de l'assemblée territoriale qui ne reçoivent aucune indemnité de fonction ;

A tous les membres de l'assemblée territoriale lorsque l'indemnité de fonction n'est pas instituée.

Les conditions d'attribution et les taux maxima des indemnités de déplacement et de séjour sont fixés par décret. 9

Article 13

- Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 22 (V) JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998

Les listes électorales du territoire de Wallis et Futuna sont établies par village.

Le tableau des villages du territoire pourra être modifié par délibération de l'assemblée territoriale. L'administrateur supérieur du territoire dressera et publiera, avant le 1er décembre de chaque année, le tableau des villages tel qu'il résulte éventuellement des modifications apportées au tableau par délibérations rendues exécutoires de l'assemblée territoriale. Ce tableau vaudra pour toute l'année suivante.

Article 13-1

- Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 7

Les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 391 et au titre VIII du code électoral (partie Législative).

Article 13-1-1

- Créé par Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 13

Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

Article 13-2

- Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 43 (V)
Le Défenseur des droits est inéligible à l'assemblée territoriale.

Article 13-16

- Créé par Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 14

Le mandat de membre de l'assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller à l'assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française.

Article 14

L'assemblée peut émettre des avis tendant à l'établissement, pour les matières qu'elle réglemente, de sanctions fiscales et pénales. Les peines sanctionnant les infractions aux délibérations à caractère réglementaire seront instituées par arrêtés de l'administrateur supérieur. En matière pénale, elles ne pourront excéder trois mois d'emprisonnement et une amende de 3 000 NF métropolitains.

Article 14-1

- Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 10

Les établissements publics du territoire sont créés par délibération de l'assemblée territoriale sous réserve de l'approbation de l'administrateur supérieur.

” Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement public prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

” Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article 14-2

· Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 10

Sous réserve des exceptions énoncées au dernier alinéa, le territoire ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées ci-après.

” Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette du territoire ne peut excéder un pourcentage défini par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du territoire. Le montant des provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

” Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

” Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par le territoire porte, au choix de ce dernier, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

” Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par le territoire pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat. “

Article 15

L'assemblée désigne en son sein une commission permanente de quatre membres choisis de manière à représenter l'ensemble des circonscriptions du territoire et à pouvoir être réunis à tout moment de l'année au chef-lieu du territoire. Ces conditions seront fixées par décret.

La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée. Elle peut, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée dans les délais nécessaires, délibérer et émettre des avis dans les matières relevant de la compétence de celle-ci concernant les affaires qui lui sont soumises par le chef de territoire, après avis du conseil territorial.

Article 16

Les délibérations de l'assemblée territoriale et de sa commission permanente, autres que celles relatives au programme du fonds d'investissement pour le développement économique et social du territoire et que celles intervenues en matière douanière, ne sont définitives qu'après approbation par l'administrateur supérieur.

TITRE IV : CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES.

Article 17

Le territoire des îles Wallis et Futuna est divisé en trois circonscriptions territoriales :

- celle d'Uvea ;
 - celle d'Alo ;
 - celle de Sigave,
- dans leurs limites actuelles.

Article 18

Ces circonscriptions sont dotées de la personnalité morale. Elles peuvent disposer d'un budget dans des conditions précisées par décret. Elles sont organisées par des arrêtés de l'administrateur supérieur pris après avis de l'assemblée territoriale et du conseil territorial qui fixe leurs institutions et détermine les pouvoirs de celles-ci dans les limites définies par les lois et décrets.

L'administrateur supérieur exerce à Wallis les fonctions de chef de circonscription. Le délégué de l'administrateur supérieur à Futuna est le chef des circonscriptions de son ressort.

Le chef de circonscription représente la circonscription dans tous les actes de la vie civile. Il dispose du pouvoir réglementaire. Il est, le cas échéant, ordonnateur du budget de la circonscription.

Chaque circonscription est dotée d'un conseil de circonscription dont les membres sont élus dans les conditions prévues par la coutume.

Le président du conseil de circonscription est celui des vice-présidents du conseil territorial (Hau ou Sau) appartenant à la circonscription. Il représente la circonscription en justice.

Le nombre des membres du conseil de la circonscription est fixé par un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire.

TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire

Article 19

- Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Le budget du territoire prévoit et autorise les recettes et les dépenses du territoire pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

” Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

” Les budgets supplémentaires sont votés dans les formes et les conditions du budget primitif.

Article 20

- Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée territoriale en décide ainsi, par article.

” Toutefois, hors les cas où l'assemblée a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'administrateur supérieur du territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre.

Article 21

- Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Sur proposition de l'administrateur supérieur, l'assemblée territoriale peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

” Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

” Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

” Toutefois, les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques.

” Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

” L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

” Lorsque la section d’investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, l’administrateur supérieur du territoire peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

Article 22

· Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux du territoire à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptés par l’assemblée territoriale, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

Article 23

· Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

” Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

” Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

” La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

Article 24

· Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 25

· Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Le budget du territoire est voté en équilibre réel.

” Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées ou établies en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

” Toutefois, pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

” Aucune disposition susceptible d’entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n’ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire ou par arrêté de l’administrateur supérieur après avis du chef de circonscription. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.

Article 26

· Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Le budget est voté au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’exercice auquel il s’applique.

” Lorsque le budget du territoire n’a pas été voté en équilibre réel ou lorsque l’assemblée territoriale a refusé de le voter, l’administrateur supérieur du territoire invite l’assemblée territoriale à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

” Si le budget n’est pas voté ou s’il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre chargé des territoires d’outre-mer et du ministre chargé du budget.

Article 27

· Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Dans le cas où le budget du territoire n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’administrateur supérieur du territoire est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

” L’ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

” En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’administrateur supérieur du territoire peut, après information du président de l’assemblée territoriale, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.

TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 2 : Dispositions applicables au budget des circonscriptions

Article 28

- Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Le budget de la circonscription prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la circonscription pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il est arrêté par l'administrateur supérieur.

” Les dispositions de l'article 25 du présent titre lui sont applicables.

TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 3 : Dispositions applicables au budget des établissements publics du territoire à caractère administratif

Article 29

- Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Le budget d'un établissement public du territoire ayant un caractère administratif prévoit et autorise les recettes et les dépenses de cet établissement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les dispositions de l'article 19, celles du premier alinéa de l'article 20 et des articles 24 à 27 du présent titre lui sont applicables.

Pour leur application, il y a lieu de lire :

- “le conseil d'administration” au lieu de : “l'assemblée territoriale” ;

- “de l'établissement public” au lieu de : “du territoire” ;

- “le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts,” au lieu de : “l'administrateur supérieur du territoire”.

TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre II : Dispositions comptables

Article 30

- Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

L'arrêté des comptes du territoire est constitué par le vote de l'assemblée territoriale sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote de l'assemblée territoriale arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice.

” Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Article 31

· Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

L'administrateur supérieur du territoire arrête, après transmission au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice du compte de gestion par le comptable de la circonscription, et avis du conseil de la circonscription, les comptes administratifs de la circonscription.

L'arrêté doit intervenir au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice.

Article 32

· Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Les comptes administratifs des établissements publics à caractère administratif du territoire sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable au territoire.

Pour son application, il y a lieu de lire :

- “du conseil d'administration”, au lieu de : “de l'assemblée territoriale” ;

- “de l'établissement public”, au lieu de : “du territoire” ;

- “le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts”, au lieu de : “l'administrateur supérieur du territoire”.

Article 32-1

· Créé par Loi n°95-97 du 1 février 1995 - art. 14

Le comptable du territoire et des circonscriptions est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information de l'administrateur supérieur.

Article 33

· Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Le comptable du territoire et des circonscriptions est tenu de produire ses comptes devant la Cour des comptes, qui statue par voie d'arrêt.

” Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

” Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

” L'ordre de réquisition est notifié à la Cour des comptes.

” En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. Les dispositions du présent article sont applicables au comptable des établissements publics du territoire.

Article 34

· Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11

Un décret fixe la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement dans le cadre des contrôles qui lui incombent en application de l'article 33. “

Article 34-1

· Créé par Loi n°95-97 du 1 février 1995 - art. 15

Le recouvrement à Wallis et Futuna des créances de l'Etat, des collectivités territoriales de la République et de leurs établissements publics, autres que celles du territoire, de ses circonscriptions et de leurs établissements publics, est confié au comptable du Trésor et s'effectue comme en matière de produits du territoire.

Article 34-2

- Créé par Loi n°95-97 du 1 février 1995 - art. 15

Les recettes et les dépenses à effectuer hors du territoire des îles Wallis et Futuna sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et les dépenses de l'Etat.

Article 34-3

- Créé par Loi n°95-97 du 1 février 1995 - art. 15

Les procédures garantissant la validité du règlement des dépenses du territoire, de ses circonscriptions et de leurs établissements publics ainsi que leur caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'Etat.

Article 34-4

- Créé par Loi n°95-97 du 1 février 1995 - art. 15

Les poursuites pour le recouvrement des produits du territoire, de ses établissements publics et de ses circonscriptions sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut, conformément à la réglementation de l'Etat en matière de contributions directes.

Toutefois, l'ordonnateur autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35

- Transféré par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 12

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

CHARLES DE GAULLE Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL DEBRÉ

Le ministre d'Etat,

ROBERT LECOURT

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

EDMOND MICHELET

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY

Le ministre des finances et des affaires économiques,

WILFRID BAUMGARTNER

(1) Travaux préparatoires : loi n° 61-814

Sénat :

Projet de loi n° 103 (1960-1961) ;

Rapport de M. Boulanger au nom de la commission des lois, n° 186 (1960-1961) ;

Discussion et adoption le 18 mai 1961.

Assemblée nationale :

Projet de loi adopté par le Sénat (n° 1207) ;

Rapport de M. Laurelli, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 1312) ;

Discussion les 11 et 18 juillet 1961 ;

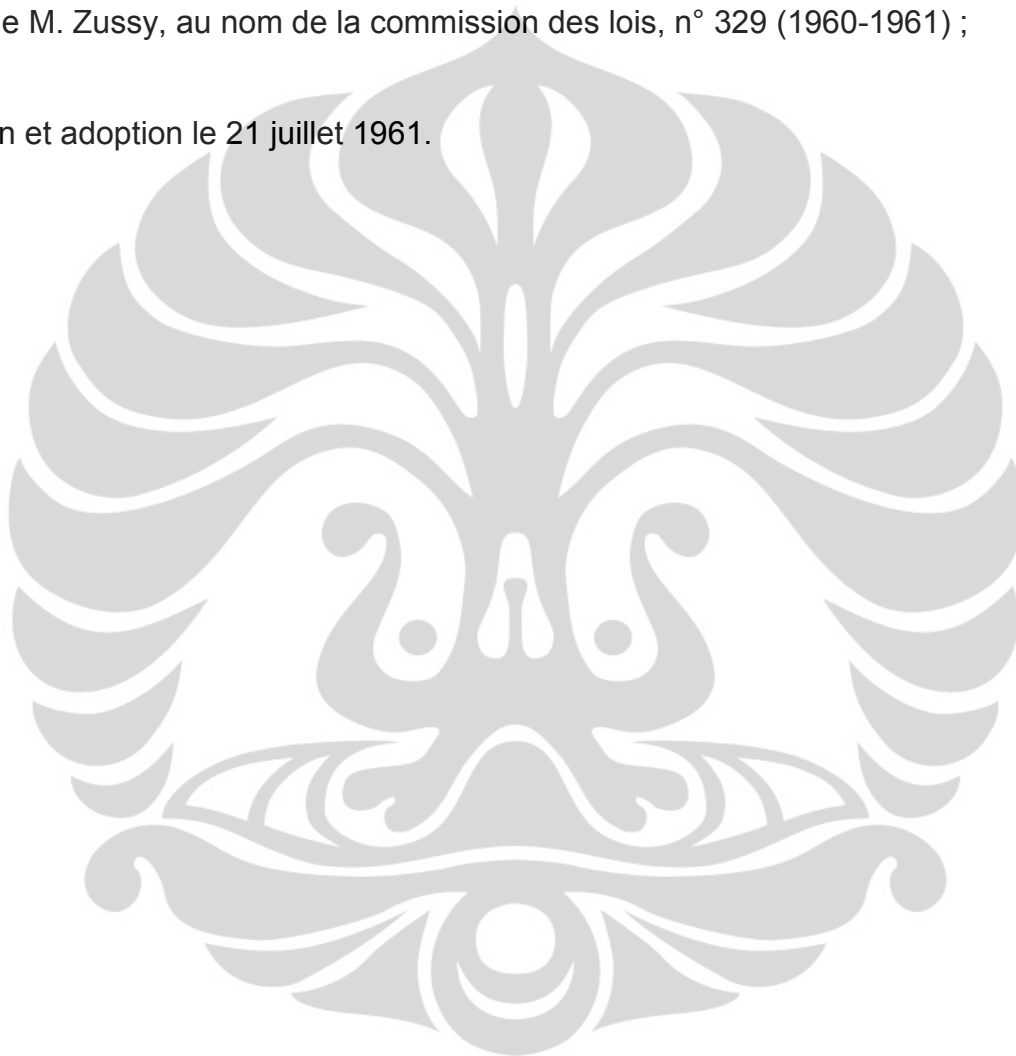
Adoption le 18 juillet 1961.

Sénat :

Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, n° 325 (1960-1961) ;

Rapport de M. Zussy, au nom de la commission des lois, n° 329 (1960-1961) ;

Discussion et adoption le 21 juillet 1961.



LOIS

LOI organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

NOR : DOMX0300085L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I^{er} DE L'AUTONOMIE

Article 1^{er}

La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution.

La Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par la présente loi organique.

La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de l'identité de sa population.

La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

Article 2

L'Etat et la Polynésie française veillent au développement de ce pays d'outre-mer. Ils apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

Article 3

Le haut-commissaire de la République, représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

Article 4

La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

Article 5

Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social et culturel.

Article 6

Les communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de la République, s'administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.

TITRE II

L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 7

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public de l'Etat ;

4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux statuts des agents publics de l'Etat.

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication.

Article 8

Les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article 7 entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le dixième jour suivant celui de leur publication au *Journal officiel* de la République française.

Les actes mentionnés à l'article 7 sont publiés, pour information, au *Journal officiel* de la Polynésie française.

Article 9

L'assemblée de la Polynésie française est consultée :

1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ;

3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également être habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur les projets et propositions de loi autres que ceux modifiant la présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au *Journal officiel* de la Polynésie française.

Article 10

Le gouvernement de la Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française.

Il est également consulté, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au *Journal officiel* de la Polynésie française.

Article 11

Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique.

Article 12

I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française.

II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

TITRE III

LES COMPÉTENCES

CHAPITRE I^{er}

La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes

Article 13

Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique.

La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

Section 1

Les compétences de l'Etat

Article 14

Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1^o Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2^o Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative, attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics ;

3^o Politique étrangère ;

4^o Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

5^o Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;

6^o Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radio-électriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

7^o Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

8^o Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6^o du I de l'article 21 de la loi organique n^o 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation civile ;

9^o Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en œuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;

10^o Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénom-

11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public de l'Etat ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;

12° Communication audiovisuelle ;

13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

Section 2

Les compétences particulières de la Polynésie française

Article 15

La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout Etat ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République et l'assemblée de la Polynésie française en sont tenues informées.

Article 16

Suivant les modalités définies à l'article 39, le président de la Polynésie française négocie, dans le respect et pour l'application des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.

Ces arrangements administratifs sont signés par le président de la Polynésie française et approuvés par le conseil des ministres de la Polynésie française. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.

Article 17

Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie française. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.

Article 18

La Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières.

A égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes.

La Polynésie française peut également adopter, dans les conditions prévues au premier alinéa, des mesures favorisant l'accès à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, notamment d'une profession libérale.

Les mesures prises en application du présent article doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local. En outre, ces mesures ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au premier alinéa et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur à cette date.

Les conditions d'application du présent article sont prévues par des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays ». Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension du délai pris en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées par les alinéas précédents.

Article 19

La Polynésie française peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

Dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004]
- justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004]
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004]
- justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus.

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays ». Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, pro-

fessionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au cinquième alinéa.

Article 20

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française de peines d'amende, y compris des amendes forfaitaires dans le cadre défini par le code de procédure pénale, respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

La Polynésie française peut également instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie française.

Article 21

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Article 22

La Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

Le produit des condamnations est versé au budget de la Polynésie française.

Article 23

Le droit de transaction peut être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

Article 24

L'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat.

Article 25

I. – La Polynésie française peut créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles.

II. – Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le gouvernement de la Polynésie française associe la Polynésie française à la politique de communication audiovisuelle.

III. – Le gouvernement de la Polynésie française est consulté en matière de communication audiovisuelle :

1° Par le haut-commissaire de la République, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Polynésie française ;

2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle de sauvegarde de

tence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française.

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Article 26

La Polynésie française organise ses propres filières de formation et ses propres services de recherche.

Article 27

La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce que l'Etat :

1° Prenne, à l'égard de la Polynésie française et de ses établissements publics, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent des dispositions législatives applicables à l'organisation générale de la Nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;

2° Fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale ;

3° Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à la livraison des produits pétroliers nécessaires à l'exercice des missions de sécurité et de défense.

Pour l'application du présent article, l'Etat dispose en tant que de besoin des services de la Polynésie française et de ses établissements publics.

Article 28

Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du pays, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité de la Polynésie française dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics.

Article 29

La Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française à ces dernières. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

La Polynésie française, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaire, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante de la personne morale actionnaire.

Article 30

La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.

Ces participations feront l'objet d'un rapport annuel annexé au compte administratif de la Polynésie française

Section 3

La participation de la Polynésie française
à l'exercice des compétences de l'Etat

Article 31

Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat, à participer à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14 :

- 1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
- 2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;
- 3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ;
- 4° Communication audiovisuelle ;
- 5° Services financiers des établissements postaux.

Article 32

I. – Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » intervenant dans le champ d'application de l'article 31 sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.

Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de l'assemblée de la Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française.

Le décret portant approbation est transmis, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française. Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par l'assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes.

Les décrets mentionnés au deuxième alinéa du présent I deviennent caducs s'ils n'ont pas été ratifiés par la loi [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004]

II. – Les arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française intervenant pour l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » prévus au I du présent article, et les arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine du règlement dans l'une des matières visées à l'article précédent, sont adoptés dans les conditions suivantes.

Le projet d'arrêté est transmis par le président de la Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié au président de la Polynésie française.

Le décret portant approbation est transmis au président de la Polynésie française. L'arrêté ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été délibéré par le conseil des ministres dans les mêmes termes et sans modification.

III. – Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et les arrêtés en conseil des ministres mentionnés au I et au II du présent article peuvent être respectivement

modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application en Polynésie française.

IV. – Sans préjudice de l'article 33 et du troisième alinéa de l'article 36, les décisions individuelles prises en application des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des arrêtés mentionnés au présent article sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le haut-commissaire de la République.

Article 33

Dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l'article 32, le haut-commissaire de la République peut s'opposer à la délivrance de titres de séjour des étrangers par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret.

Article 34

I. – La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures et des missions de sécurité publique ou civile.

A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.

L'agrément peut être suspendu par le haut-commissaire de la République ou par le procureur de la République après information du président de la Polynésie française. Il peut être retiré par les mêmes autorités après consultation du président de la Polynésie française qui dispose d'un délai de cinq jours pour donner son avis ; ce délai expiré, l'avis est réputé donné.

II. – Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française, à la circulation routière et à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste établie dans les conditions prévues au II de l'article 32.

III. – Sur la demande du haut-commissaire de la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire.

Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention.

Article 35

Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » peuvent comporter, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française, autres que ceux mentionnés à l'article 34, de rechercher et de constater les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et aux arrêtés réglementaires du conseil des ministres dont ces administrations et services publics sont spécialement chargés de contrôler la mise en œuvre.

Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre de la recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à des consignations, des prélèvements d'échantil-

lons, des saisies conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un officier de police judiciaire.

Ils peuvent également être habilités à effectuer des visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à cet effet.

Ces agents sont commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.

Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont chargés d'appliquer.

Les agents assermentés de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que cette caisse est chargée d'appliquer.

Article 36

La réglementation édictée par la Polynésie française en application du 4^o de l'article 31 et de l'article 32 respecte les principes définis par la législation relative à la liberté de la communication.

Préalablement à leur transmission au ministre chargé de l'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 32, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté, par l'assemblée de la Polynésie française ou par le conseil des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « loi du pays » et sur les projets d'arrêtés en conseil des ministres. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. L'avis est publié au *Journal officiel* de la République française et au *Journal officiel* de la Polynésie française.

Les décisions individuelles prises par les autorités de la Polynésie française en application de la réglementation mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent être annulées ou réformées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la demande du haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d'un intérêt pour agir.

Article 37

I. – Le gouvernement de la Polynésie française est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Polynésie française. Il est consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Polynésie française. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.

II. – La Polynésie française détermine avec l'Etat la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

L'assemblée de la Polynésie française délibère sur les propositions de création de filières de formation et de programmes de recherche qui lui sont faites par le président de la Polynésie française ou par le haut-commissaire de la République.

La carte de l'enseignement universitaire et de la recherche, qui prévoit notamment la localisation des établissements d'enseignement universitaire ainsi que leur capacité d'accueil, fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française.

En l'absence de convention, la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche est arrêtée par l'Etat.

Article 38

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de négocier et

signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Le président de la Polynésie française peut être autorisé par les autorités de la République à représenter cette dernière dans les organismes internationaux.

Article 39

Dans les domaines de compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie française peut, après délibération du conseil des ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec tout Etat, territoire ou organisme international.

Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président de la Polynésie française de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Polynésie française. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des accords.

Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de signer les accords au nom de la République.

Ces accords sont ensuite soumis à la délibération de l'assemblée de la Polynésie française puis soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Article 40

Lorsque l'Etat prend l'initiative de négocier des accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française, le président de la Polynésie française ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française à ces négociations.

Article 41

Le président de la Polynésie française ou son représentant participe, au sein de la délégation française, aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Polynésie française.

Article 42

La Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d'organisations internationales du Pacifique ou observateur auprès de celles-ci.

En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé, avec l'accord des autorités de la République, aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.

Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant.

Section 4

Les compétences des communes de la Polynésie française

Article 43

I. – Dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, et sans préjudice des attributions qui leur sont

réservées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, par les lois et règlements en vigueur, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes :

- 1° Police municipale ;
- 2° Voirie communale ;
- 3° Cimetières ;
- 4° Transports communaux ;
- 5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
- 6° Distribution d'eau potable, sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ;
- 7° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
- 8° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
- 9° Collecte et traitement des eaux usées.

II. – Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et la réglementation édictée par la Polynésie française, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir dans les matières suivantes :

- 1° Aides et interventions économiques ;
- 2° Aide sociale ;
- 3° Urbanisme ;
- 4° Culture et patrimoine local.

Article 44

Dans les communes où n'existe pas de service d'assainissement assuré par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.

Article 45

La Polynésie française peut, sur demande des conseils municipaux, autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour les communes qui, à la date de promulgation présente loi organique, produisent et distribuent l'électricité, dans les limites de leur circonscription.

Section 5

La domanialité

Article 46

L'Etat, la Polynésie française et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

Article 47

Le domaine de la Polynésie française comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette

La Polynésie française régleme et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux.

Section 6

Les relations entre collectivités publiques

Article 48

Les autorités de la Polynésie française peuvent déléguer aux maires les compétences pour prendre les mesures individuelles d'application des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des réglementations édictées par ces autorités.

La délégation de compétences ne peut intervenir qu'avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée et s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui font l'objet de la délégation.

Article 49

La Polynésie française fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Article 50

Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, le gouvernement de la Polynésie française peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en Polynésie française.

Article 51

Les programmes de logements sociaux construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat font l'objet de conventions passées entre l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions prévoient également l'information du maire de la commune intéressée sur les principes régissant les attributions de ces logements et les décisions d'attribution.

En contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière des communes à la réalisation des programmes de logements sociaux, les communes signent des conventions particulières avec l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions prévoient notamment les modalités de réservation de ces logements.

Article 52

Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française.

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % des dites ressources, est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. Lorsque le compte administratif de la Polynésie française fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.

Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française, présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'Etat. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.

Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.

Article 53

La Polynésie française institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.

Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française.

Les communes peuvent, en outre, dans le cadre des règles fixées en application du 10^e de l'article 14, instituer des redevances pour services rendus.

Article 54

En vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements.

La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.

Article 55

Lorsque la Polynésie française confie par convention aux communes ou aux établissements communaux ou de coopération intercommunale, au vu d'une demande ou d'un accord de leurs organes délibérants, la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le concours financier de la Polynésie française.

Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de projets d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés selon les règles applicables à la Polynésie française. La convention prévoit la participation financière des communes.

Article 56

Le domaine initial des communes de la Polynésie française est déterminé, après avis conforme de l'assemblée de la Polynésie française, par des décrets qui affectent à chacune d'entre elles une partie du domaine de la Polynésie française.

Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, après avis conforme du conseil municipal.

Section 7

L'identité culturelle

Article 57

Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.

La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française.

Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n'encourent aucune nullité au motif qu'ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle.

La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles ou établissements par l'une des autres langues polynésiennes.

L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont enseignées dans les établissements de formation des personnels enseignants.

Article 58

Il est institué un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Les membres du collège d'experts sont nommés par cette assemblée.

Ce collège peut être consulté par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.

Il propose à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts judiciaires.

CHAPITRE II

Les modalités des transferts de compétences

Article 59

L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française reçoit de la présente loi organique.

Tout accroissement net de charges résultant pour la Polynésie française des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert des compétences. Les modalités de cette évaluation

sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

Il est créé en Polynésie française une commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, elle est composée de représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française et de l'assemblée de la Polynésie française. Elle est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées.

Article 60

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Polynésie française sont eux-mêmes transférés à la Polynésie française à titre gratuit.

Sont également transférés gratuitement à la Polynésie française les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de la Polynésie française en application des conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Polynésie française sont transmis à titre gratuit à la Polynésie française, que le transfert résulte de la présente loi organique ou de conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

La Polynésie française est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.

L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.

Article 61

Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en œuvre d'une compétence attribuée à la Polynésie française en vertu de la présente loi organique sont transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par décret.

Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française détermine les conditions de la mise en œuvre de ces transferts.

Article 62

I. – Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Polynésie française en application des dispositions du présent chapitre et qui ne sont pas déjà liés à celle-ci par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la Polynésie française. Les fonctionnaires de l'Etat précités sont mis à disposition de la Polynésie française, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

II. – Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Polynésie française, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française.

Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française, il est fait droit à sa

demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.

Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut, dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :

1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie française auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.

S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie française. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.

III. – Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au II sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.

TITRE IV

LES INSTITUTIONS

CHAPITRE I^{er}

Le président et le gouvernement de la Polynésie française

Section 1

Attributions et missions du président et du gouvernement

Article 63

Le gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de la Polynésie française dont il conduit la politique.

Il dispose de l'administration de la Polynésie française.

Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les procédures prévues à l'article 156.

Article 64

Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.

Il promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays ».

Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.

Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.

Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les

emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.

Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.

Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Article 65

Le président de la Polynésie française assure la publication au *Journal officiel* de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Polynésie française.

Article 66

Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 67

Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres.

Article 68

Le président de la Polynésie française est informé par le haut-commissaire de la République des mesures prises en matière de maintien de l'ordre et de sécurité intérieure.

Il est également associé à la préparation et à la mise en œuvre des mesures prises par le haut-commissaire en matière de coordination et de réquisition des moyens concourant à la sécurité civile.

Section 2

Election du président

Article 69

Le président de la Polynésie française est élu au scrutin secret par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Il peut également être élu par l'assemblée hors de son sein sur présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les quarante-huit heures.

L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants à l'assemblée de la Polynésie française présents. Le vote est personnel.

Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier tour de scrutin.

Le président est élu à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Si celle-ci n'est pas obtenue au pre-

mier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Article 70

Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Les résultats de l'élection du président de la Polynésie française peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l'élection ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

Article 71

L'élection du président de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie conformément aux dispositions de l'article 118.

En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.

Article 72

Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 74 et des articles 75, 77, 80 et 156.

Section 3

Composition et formation du gouvernement

Article 73

Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française par son président.

A défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue au premier alinéa.

Les attributions de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 74

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au

cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

Article 75

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont en outre incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées aux articles LO 143, LO 145, LO 146 et LO 146-1 du code électoral.

Pour l'application des dispositions précitées du code électoral, le mot : « député » est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de la Polynésie française ».

Article 76

Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article LO 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d'un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Article 77

Le président de la Polynésie française, au moment de son élection, le vice-président et les ministres, au moment de leur désignation, doivent, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur entrée en fonction.

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure, selon le cas, à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert pendant le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.

A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président de la Polynésie française, le vice-président ou le ministre est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française.

L'option exercée ou le défaut d'option est constaté par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au membre du gouvernement intéressé.

Article 78

Lorsqu'un membre de l'assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de vice-président du gouvernement ou de ministre, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son mandat à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

Article 79

I. – Le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement qui a la qualité d'agent public à la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 75, il ne peut être nommé

de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.

II. – Le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité de salarié à la date de sa nomination peut bénéficier d'une suspension de son contrat de travail. Cette suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à la date de sa nomination.

Article 80

La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

En cas de démission ou de décès du président de la Polynésie française ou lorsque son absence ou son empêchement, constaté par le conseil des ministres, excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Article 81

La démission d'un ministre est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président de la Polynésie française. Cet arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres et l'affectation des ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 73, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer à ces dispositions et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 74.

Article 82

Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 73 et 81 ou lorsque le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

Section 4

Règles de fonctionnement

Article 83

Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.

Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président de la Polynésie française.

Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 84

Le président de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions qui lui sont soumises sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.

Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, sur demande du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions mentionnées à l'alinéa précédent.

Dans tous les autres cas, en accord avec le président de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.

Article 85

Les réunions du conseil des ministres ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.

Article 86

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 87

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant en Polynésie française. Le conseil des ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission du président de la Polynésie française et des autres membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunérée.

Article 88

L'assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.

Section 5**Attributions du conseil des ministres et des ministres****Article 89**

Le conseil des ministres est chargé collégalement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

Il arrête les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », après avis du haut conseil de la Polynésie française, ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente.

Il prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ainsi que des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.

Il prend également, les arrêtés intervenant dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat prévue à l'article 31.

Article 90

Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés « lois du pays », le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

4° Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;

5° Organisation générale des foires et marchés ;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;

8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures [*Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004*] ; pilotage des navires ;

12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;

13° [*Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004*]

14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ;

15° Circulation routière ;

16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes ;

17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ;

18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.

Article 91

Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

1° Crée, régit et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française la représentation des intérêts économiques et culturels ;

2° Crée, régit et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;

4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ;

6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

7° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française.

8° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

9° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;

10° Autorise les investissements étrangers ;

11° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

12° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

13° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;

14° Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;

15° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;

16° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;

17° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

18° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;

19° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

20° Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 ;

21° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;

22° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts ;

23° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ;

24° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte, y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;

25° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ;

26° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

27° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

28° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées à l'article 24 ;

29° Constate l'état de catastrophe naturelle.

Article 92

Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit de la Polynésie française ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

5° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour annuelle des codes ;

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers ;

7° Ordre d'exécution des travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

8° Licences de pêche ;

9° Création des charges et nomination des officiers publics et des officiers ministériels ;

10° Placement des fonds libres mentionnés au 23° de l'article 91 ;

11° Assignation des fréquences radioélectriques.

Article 93

Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, chefs de services, directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics et auprès des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

Sont également nommés en conseil des ministres, dans le cadre des statuts de ces établissements, le ou les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers et les comptables des services et des établissements publics de la Polynésie française, à l'exception du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paie de la Polynésie française.

Article 94

Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires, dans le cadre défini par le code de procédure pénale, et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la Polynésie française.

Article 95

Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.

Article 96

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement adressent directement aux chefs des services de la Polynésie française et, en application des conventions mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services de la Polynésie française, à ceux des services de l'Etat ainsi qu'aux membres de leur cabinet.

Article 97

Le conseil des ministres est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions et dans les matières suivantes :

1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

2° Desserte aérienne relevant de la compétence de l'Etat ;

3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

4° Création et suppression des communes et de leurs groupements, modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes ; transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ;

5° Nomination du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paie de la Polynésie française.

Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

Article 98

Le conseil des ministres peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Ces vœux sont publiés au *Journal officiel* de la Polynésie française.

Article 99

Le conseil des ministres est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les Etats étrangers.

Article 100

Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes de la Polynésie française, après adoption par le conseil municipal.

Article 101

Il est créé, auprès du conseil des ministres, un comité consultatif du crédit.

Ce comité est composé à parts égales de :

1° Représentants de l'Etat ;

2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;

3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;

4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.

CHAPITRE II

L'assemblée de la Polynésie française**Article 102**

L'assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française.

Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française.

L'assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie française.

Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie française.

Section 1

Composition et formation**Article 103**

L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

Article 104

L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;

2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Tapuatapea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;

3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takarua. Elle élit trois représentants ;

4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;

5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;

6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.

Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

Article 105

I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.

Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.

Article 106

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Article 107

I. – Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au *Journal officiel* de la République française du décret de dissolution.

Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au *Journal officiel* de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

II. – Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au *Journal officiel* de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Article 108

Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.

Article 109

I. – Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre I^{er} de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

II. – En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;

4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

III. – Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

Article 110

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.

Article 111

I. – Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

II. – Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

III. – Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

Article 112

I. – Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

II. – Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

Article 113

I. – Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.

II. – Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise.

Article 114

La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.

Article 115

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

Article 116

Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Article 117

Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

Section 2

Règles de fonctionnement

Article 118

L'assemblée de la Polynésie française siège au chef-lieu de la Polynésie française. Elle peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres, sous la présidence de son doyen d'âge.

Article 119

L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit à des dates et pour des durées fixées au début du mandat par une loi.

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française. Au cas où l'assemblée ne s'est pas réunie conformément aux dispositions précédentes, le haut-commissaire met en demeure son président de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.

Article 120

L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président à la suite de la demande qui lui est présentée par écrit soit par le président de la Polynésie française, soit par la majorité absolue de ses membres, soit par le haut-commissaire en cas de circonstances exceptionnelles.

La demande comporte la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président de la Polynésie française ou par la majorité des représentants à l'assemblée de la Polynésie française est notifiée au haut-commissaire.

Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie au jour fixé par la demande, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. Si l'assemblée ne s'est pas réunie dans ce délai, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Article 121

L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Article 122

L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.

Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure.

Article 123

L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il est publié au *Journal officiel* de la Polynésie française. Il peut être déféré au Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Article 124

Les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques ainsi que les moyens mis à leur disposition sont déterminés par le règlement intérieur.

Article 125

L'assemblée de la Polynésie française fixe l'ordre du jour de ses séances, sous réserve des dispositions de l'article 153, et établit un procès-verbal de chaque séance.

Article 126

Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française. Cette indemnité est versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée prévue au deuxième alinéa de l'article 118.

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de protection sociale des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa sera retenue lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l'assemblée ou de ses commissions.

Article 127

I. – L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente, à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne.

La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 153.

II. – Entre les sessions, la commission permanente :

1° Règle par ses délibérations les affaires qui lui ont été renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence ;

2° Emet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'Etat est prévue ;

3° Adopte les résolutions mentionnées à l'article 133 et à l'article 135.

Elle n'a pas compétence pour adopter les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », le budget annuel et le compte administratif de la Polynésie française, pour se prononcer sur la motion de censure ni pour décider de recourir au référendum local.

Elle ne peut procéder à des virements de crédits d'un chapitre à l'autre que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Elle peut néanmoins ouvrir des crédits correspondant à des ressources affectées au-delà de cette limite.

III. – Le règlement intérieur de l'assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.

Article 128

Les séances de l'assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.

Les séances de l'assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au *Journal officiel* de la Polynésie française.

Article 129

L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et

selon les mêmes règles que celles applicables au budget de la Polynésie française. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée, dans les mêmes limites que celles fixées par le dernier alinéa du II de l'article 127.

Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission dont les membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.

La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'assemblée ne peut à représentation constante excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée à l'assemblée, au plus tard le 1^{er} octobre, par le président de la Polynésie française.

Section 3

Attributions de l'assemblée

Article 130

Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou d'autres délibérations.

A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Article 131

Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des représentants et aux réponses du président et des membres du gouvernement.

Article 132

L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent.

Le régime des commissions d'enquête est défini par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 133

Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente peut adopter des résolutions tendant soit à étendre des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française.

Ces résolutions sont adressées, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé de l'outre-mer.

Ces résolutions sont publiées au *Journal officiel* de la Polynésie française.

Article 134

L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française.

Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française, sur les conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

Article 135

Le haut-commissaire soumet à l'assemblée de la Polynésie française les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui sont relatives à l'association des pays d'outre-mer à la Communauté européenne.

L'assemblée de la Polynésie française peut voter des résolutions, qui sont adressées par son président au président de la Polynésie française et au haut-commissaire.

Section 4

Attributions du président de l'assemblée

Article 136

Le président exerce seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

En cas de besoin, le président de l'assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

Article 137

Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions du 25^o de l'article 91.

Article 138

Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux responsables des services administratifs et aux membres de son cabinet.

Section 5

« Lois du pays » et délibérations

Article 139

L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations.

Article 140

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes :

- 1^o Droit civil ;
- 2^o Principes fondamentaux des obligations commerciales ;
- 3^o Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- 4^o Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;
- 5^o Droit de la santé publique ;
- 6^o Droit de l'action sociale et des familles ;

7° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;

8° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;

9° Droit de l'environnement ;

10° Droit domanial de la Polynésie française ;

11° Droit minier ;

12° Règles relatives à l'emploi local, en application de l'article 18 ;

13° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l'article 19 ;

14° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre I^{er} du titre III ;

15° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ;

16° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ;

17° Matières mentionnées à l'article 31.

Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.

Article 141

L'initiative des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.

Les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » sont soumises, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur première lecture. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son avis. En cas d'urgence, à la demande du président de la Polynésie française ou du président de l'assemblée, l'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois.

Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.

Article 142

Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays », un rapporteur est désigné par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.

Article 143

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française dans un délai de huit jours.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays », le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables.

Article 144

I. – Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel.

Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a expressément décidé.

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

II. – Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article LO 273-1 du code des juridictions financières. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article LO 273-2 du même code.

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article LO 273-3 du même code.

Article 145

Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1^{er} janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.

Article 146

Est nul tout acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, pris hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

CHAPITRE III

Le conseil économique, social et culturel

Article 147

Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française.

Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

Article 148

Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 111 et au 4° du II de l'article 109.

Article 149

Des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française fixent :

1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel ;

2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;

3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;

4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;

5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ;

6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique.

Article 150

Le conseil économique, social et culturel élit son président.

Il se réunit à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres. Ses séances sont publiques.

Il adopte son règlement intérieur, qui est publié au *Journal officiel* de la Polynésie française. Ce règlement peut être déferé au tribunal administratif.

Article 151

I. - Le conseil économique, social et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française.

II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social ou culturel.

Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

III. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

IV. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics. Tinjuan hukum..., Wahyu Dedy, Setiawan, FH UII, 2012

Article 152

Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.

Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

CHAPITRE IV**Les rapports entre les institutions****Article 153**

Le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française par dérogation aux dispositions de l'article 125, ou à l'ordre du jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 127, les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou les projets de délibérations dont il estime la discussion urgente.

Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.

Le président de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

Article 154

En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée.

Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé de l'outre-mer.

Le président de la Polynésie française et les ministres assistent de droit aux séances de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

Article 155

Le président de la Polynésie française adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Pour approbation, le projet d'arrêtés des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la session budgétaire ;

2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière de la Polynésie française et sur l'état de ses différents services.

Article 156

L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ;

faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure.

L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

Article 157

Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française.

L'assemblée de la Polynésie française peut également être dissoute, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections.

Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

CHAPITRE V

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

Section 1

Pétition des électeurs de la Polynésie française

Article 158

L'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence.

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

La pétition est adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Lorsque la pétition est recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.

Section 2

Référendum local en Polynésie française

Article 159

I. – L'assemblée de la Polynésie française peut, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004] soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des

avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre des articles 133 et 135.

Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.

II. – L'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres selon le cas, par une même délibération ou un même arrêté, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

Le président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent.

Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégal. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004.]

III. – La délibération ou l'arrêté organisant un référendum local est notifié, dans les quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

IV. – Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

V. – La Polynésie française ne peut organiser de référendum local :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;

2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

- l'élection du Président de la République ;
- un référendum décidé par le Président de la République ;
- une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;
- le renouvellement général des députés ;

- le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;
- l'élection des membres du Parlement européen ;
- le renouvellement général des conseils municipaux.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.

La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

VI. - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie française.

VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la Polynésie française est mis à disposition du public.

VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre I^{er} du livre I^{er} du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

- les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;
- les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

X. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :

1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la Polynésie française ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.

Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la dispo-

sition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévision et cinq minutes à la radio ;

3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

XI. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.

XII. - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre I^{er} du livre I^{er} du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées sur les bulletins sont relevées » au lieu de : « les noms portés sur les bulletins sont relevés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignées par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

XIII. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre I^{er} du livre I^{er} du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° des I, II et III de l'article L. 113-1.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

XIV. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

XV. - La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 116 de la présente loi organique pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

XVI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

CHAPITRE VI

Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française

Article 160

Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 161

La Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 162

La Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, aux ministres ou au président de l'assemblée de la Polynésie française, ou à toute personne ayant cessé d'exercer l'une de ces fonctions, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions.

Le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique.

La Polynésie française est tenue de protéger le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

CHAPITRE VII

Le haut conseil de la Polynésie française**Article 163**

Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », des délibérations et des actes réglementaires.

Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et sur les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » qui lui sont soumis par le gouvernement.

Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis à l'autorité qui l'a saisi et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

Il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Avec l'accord du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d'une disposition législative, dans une matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d'Etat.

Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont destinés.

Article 164

Le président et les membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire n'exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et n'y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les prési-

seurs des universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.

Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

Article 165

Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre.

TITRE V

LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTATCHAPITRE I^{er}**Le haut-commissaire de la République****Article 166**

Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

Article 167

A défaut de publication au *Journal officiel* de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.

CHAPITRE II

Coordination entre l'Etat et la Polynésie française**Article 168**

La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170.

CHAPITRE III

Des concours de l'Etat**Article 169**

A la demande de la Polynésie française et par conventions, l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.

Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

Article 170

Pour l'enseignement secondaire, l'Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.

TITRE VI
LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

CHAPITRE I^{er}

Le contrôle de légalité par le tribunal administratif

Article 171

I. – Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au *Journal officiel* de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au *Journal officiel* de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente.

La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. – Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

A. – Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

1^o Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

2^o Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6^o, 9^o à 15^o, 18^o, 20^o, 23^o, 24^o et 26^o à 28^o de l'article 91 ;

3^o Les autorisations individuelles d'occupation des sols ;

4^o Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;

5^o Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

6^o Les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ;

7^o Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française ;

8^o Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

B. – Pour l'assemblée de la Polynésie française :

1^o Ses délibérations, autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », et celles prises par sa commission permanente par délégation de l'assemblée ;

2^o Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'assemblée ;

3^o Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

III. – Les actes pris au nom de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

IV. – Les actes pris par les institutions de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

V. – Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République.

VI. – Le président de la Polynésie française, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le président de la commission permanente, le président du conseil économique, social et culturel certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Article 172

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social et culturel, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un magistrat du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents rendus sur recours du haut-commissaire est présenté par celui-ci.

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'Etat sta-

tuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

Article 173

Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Polynésie française peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 172.

Pour les actes mentionnés au II de l'article 171, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172.

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III de l'article 171, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

Article 174

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1^o du A et au 1^o du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au *Journal officiel* de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.

Article 175

Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.

CHAPITRE II

Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays »

Article 176

I. – A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immé-

diatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

II. – A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est publié au *Journal officiel* de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 178.

III. – Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.

Article 177

Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au *Journal officiel* de la République française et au *Journal officiel* de la Polynésie française.

Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée.

Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au *Journal officiel* de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'assemblée de la Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa.

Article 178

A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au *Journal officiel* de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 177, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas dudit article.

Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est publié, pour information, au *Journal officiel* de la République française.

Article 179

Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » avec la

Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

Article 180

Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation.

Lorsque le Conseil d'Etat a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à l'article 140, les dispositions d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'Etat est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois mois.

CHAPITRE III

Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française

Article 181

Le président de l'assemblée de la Polynésie française porte à la connaissance des membres de celle-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes

Article 182

Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil économique, social et culturel. Ces contrôles sont organisés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 183

Le contrôle exercé par le comptable de la Polynésie française sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article LO 274-4 du code des juridictions financières.

Les autres modalités du contrôle sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article LO 274-5 du même code.

Article 184

Devant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française qui statue par voie de jugement, les comptables de la Polynésie française et leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article LO 272-32 du code des juridictions financières.

ments publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article LO 272-32 du code des juridictions financières.

Article 185

Le jugement des comptes de la Polynésie française et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

Article 186

Le titre VII du livre II (partie Législative) du code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. – L'article LO 272-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »

II. – Après la section 4 du chapitre II, il est inséré une section 4 bis intitulée « Du contrôle de certaines conventions », comprenant un article LO 272-38-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 272-38-1. – Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.

« L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. »

III. – L'article LO 272-40 est ainsi rédigé :

« Art. LO 272-40. – La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. »

IV. – Après l'article L. 272-41-1, il est inséré un article LO 272-41-2 ainsi rédigé :

« Art. LO 272-41-2. – Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française. »

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 187

La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède au territoire de la Polynésie française dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations.

La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède au territoire de la Polynésie française dans l'ensemble des droits et obligations af-

férents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à la Polynésie française en application des dispositions de la présente loi organique.

Article 188

Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 47, à l'exception de la zone économique exclusive, en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.

Article 189

L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 190

I. – Les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur en Polynésie française à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

II. – Dans toutes les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur :

1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1^{er} ;

2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième alinéa du même article ;

3° La référence au président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au président de la Polynésie française ;

4° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République ;

5° La référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

III. – Les dispositions législatives applicables, à la date de publication de la présente loi organique, aux pouvoirs des agents des services d'Etat transférés, en tout ou en partie, à la Polynésie française, continuent de s'appliquer.

Article 191

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Dans le troisième alinéa de l'article 9, les mots : « de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de » sont remplacés par les mots : « de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou de membre de » ;

2° Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1-1. – Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans. »

Article 192

Le treizième alinéa (8°) de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est ainsi rédigé :

« 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; ».

Article 193

I. – Avant l'article L. 385 du code électoral, il est inséré un article LO 384-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 384-1. – Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :

« a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

« b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

« c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;

« 2° Pour la Polynésie française :

« a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

« b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

« c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

« d) "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

« 3° Pour les îles Wallis et Futuna :

« a) "Wallis et Futuna" au lieu de : "département" ;

« b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

« c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet". »

II. – Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 394, il est inséré un article LO 393-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 393-1. – Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie.

« Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française.

« Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après l'article L. 394, sont insérés deux articles LO 394-1 et LO 394-2 ainsi rédigés :

« Art. LO 394-1. – Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre I^{er}, à l'exception de l'article LO 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. LO 394-2. – Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. »

III. – Avant l'article L. 407 du même code, il est inséré un article LO 406-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 406-1. – La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. 103. – L'assemblée de la Polynésie française est

« Art. 104. – L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

« Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

« La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

« 1^o La circonscription des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maïao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Tairapu-Est, Tairapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;

« 2^o La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;

« 3^o La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takarua. Elle élit trois représentants ;

« 4^o La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;

« 5^o La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;

« 6^o La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.

« Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

« Art. 105. – I. – L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« II. – Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.

« Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Art. 106. – Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix.

« Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Art. 107. – I. – Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

« Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales.

de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.

« Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« II. – Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

« Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

« Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« Art. 108. – Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.

« Art. 109. – I. – Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

« 1^o Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre 1^{er} de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2^o Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3^o Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

« 4^o Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

« 5^o Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. – En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1^o Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

« 2^o Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

« 3^o Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;

« 4^o Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions,

des directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

« III. – Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

« 1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

« 2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

« 3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

« 4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

« Art. 110. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

« Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

« La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.

« Art. 111. – I. – Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

« 1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

« II. – Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« III. – Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, le mandat est maintenu jusqu'à la décision de la Haute Cour de Justice.

vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

« Art. 112. – I. – Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

« II. – Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Art. 113. – I. – Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.

« II. – Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.

« Art. 114. – La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.

« Art. 115. – Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.

« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Art. 116. – Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat

« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. 117. – Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille. »

IV. – Dans le titre 1^{er} du livre V du même code, après l'article L. 392, il est inséré un article LO 392-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 392-1. – Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. 189. – L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

« Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

« Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 194

I. – Au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « ou des communautés de communes et » sont remplacés par les mots : « les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française et ».

II. – Dans le I du même article, les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer » et les mots : « territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « d'une même collectivité d'outre-mer ».

III. – Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi. »

Article 195

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ».

Article 196

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment :

1° En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :

a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Etablissements français de l'Océanie ;

b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;

c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;

d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;

2° Les articles 1^{er} à 12 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;

6° Les articles 1^{er}, 2, 2-1 et 3 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ;

8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;

10° L'article 1^{er} de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Article 197

I. – Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Polynésie française expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A prévue par l'article LO 276 du code électoral.

II. – Le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de la promulgation de la présente loi organique deviennent de plein droit, respectivement, président de la Polynésie française, membres du gouvernement de la Polynésie française et représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Ils exercent immédiatement, jusqu'à l'expiration de leur mandat, les attributions qui leur sont conférées par la présente loi organique.

Article 198

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi organique.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 février 2004.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-François Copé

Delia Setiawan, P.H.U., Wahyu

*Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,*
NICOLAS SARKOZY

*Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,*
FRANÇOIS FILLON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
DOMINIQUE PERBEN

Le ministre des affaires étrangères,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

*Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,*
LUC FERRY

*Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,*
FRANCIS MER

*Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,*
GILLES DE ROBIEN

*Le ministre de l'écologie
et du développement durable,*
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

*Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,*
JEAN-FRANÇOIS MATTEI

*Le ministre de la culture
et de la communication,*
JEAN-JACQUES AILLAGON

*Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,*
JEAN-PAUL DELEVOYE

Le ministre de l'outre-mer,
BRIGITTE GIRARDIN

*Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,*
ALAIN LAMBERT

(1) Loi n° 2004-192.

– *Travaux préparatoires :*

Sénat :

Projet de loi organique n° 38 (2003-2004) ;
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois,
n° 107 (2003-2004) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le
18 décembre 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n° 1323 ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois,
n° 1336 ;
Discussion les 13 et 14 janvier 2004 et adoption le 14 jan-
vier 2004.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première
lecture, n° 150 (2003-2004) ;
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 169 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 29 janvier 2004.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 1373 ;
Discussion et adoption le 29 janvier 2004.

– *Conseil constitutionnel :*

Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 publiée au *Journal
officiel* de ce jour.

LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

NOR : DOMX0300087L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision en Conseil constitutionnel n° 2004-491 DC
du 12 février 2004,

Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :

TITRE I^{er}

DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT

Article 1^{er}

Le haut-commissaire de la République assure l'ordre
public et concourt au respect des libertés publiques et des
droits individuels et collectifs en Polynésie française.

Il dirige les services de l'Etat en Polynésie française sous
réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 de
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exclusion
des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'ex-
ceptions limitativement énumérées par décret en Conseil
d'Etat.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues
par la législation ou la réglementation en vigueur, le
contrôle des organismes ou personnes publics ou privés
bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa
compétence.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de
l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un
fonctionnaire relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par
la législation et la réglementation en vigueur en Polynésie
française.

Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions pré-
vues par les lois et décrets. Il en rend compte au ministre
chargé de l'outre-mer et en informe le président de la Poly-
nésie française.

Le haut-commissaire est habilité à engager l'Etat envers
la Polynésie française, les communes ou leurs groupements
et à s'exprimer au nom de l'Etat devant leurs assemblées
délibérantes.

Il signe, au nom de l'Etat, les conventions conclues entre
l'Etat et la Polynésie française.

Dans les conditions prévues par la loi, il veille à l'exer-
cice régulier de leurs compétences par les autorités des
communes. A cet effet, les maires transmettent au haut-
commissaire, sur sa demande, les informations nécessaires à
l'exercice de ses attributions.

Article 2

Sous réserve des dispositions du code de procédure
pénale relatives à l'exercice de la mission de police judi-
ciaire, le haut-commissaire de la République anime et coor-
donne la politique de prévention de la délinquance et
l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie
relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres
que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judi-
ciaire et coordonne l'action des différents services et forces
dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure. Il en
informe le président de la Polynésie française en tant que de
besoin.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des
unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public
et de police administrative. Les responsables locaux des ser-
vices de police et des unités de gendarmerie lui rendent
compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur
sont confiées.

The National Assembly and the Senate have adopted,
the Constitutional Council has declared to be constitutional,
the President of the Republic promulgates the following terms:

- **TITLE I: THE RANGE**

Article 1 [Learn more about this article ...](#)

French Polynesia comprises the Windward Islands, the Leeward Islands, the Windward Islands Tuamotu, Gambier Islands, the Marquesas and Austral Islands and adjacent seas.

Country overseas in the Republic, French Polynesia is an overseas community whose autonomy is governed by Article 74 of the Constitution.

French Polynesia is a free and democratic government, through its elected representatives and by way of local referendum in as provided by this organic law.

The Republic guarantees the autonomy of French Polynesia, it promotes the development of this autonomy in order to drive sustainable economic development in French Polynesia, social and cultural, in accordance with its own interests, of its specific geographic and identity of its population.

The French Polynesia shall freely distinctive signs to mark his personality in the official public events alongside the national emblem and symbols of the Republic. It can create a specific order recognizing the merits of its inhabitants and its guests.

Article 2

The State and French Polynesia ensure the development of this country overseas. They provide assistance to municipalities for Powers vested in them.

Article 3

The High Commissioner of the Republic, state representative, representative of each member of the Government, is the depository of the powers of the Republic. He is responsible for national interests, compliance with laws and international commitments, public order and administrative control.

Article 4

French Polynesia is represented in Parliament and the Economic and Social Council under the conditions defined by the organic laws.

Article 5

The institutions of French Polynesia include the president, government, assembly and council economic, social and cultural.

Article 6

The municipalities of French Polynesia, local authorities of the Republic, freely administered in accordance with the Constitution, this Organic Law and the laws applicable to them.

- **PART II: THE APPLICATION OF LAWS AND REGULATIONS IN FRENCH POLYNESIA**

Article 7 [Learn more about this article ...](#)

In matters within the jurisdiction of the State, are applicable to French Polynesia the laws and regulations which shall make specific reference to this end.

Notwithstanding the first paragraph, are automatically applicable in French Polynesia, without prejudice provisions adapting them to his particular organization, the laws and regulations that relate to:

- 1 ° the composition, organization, functioning and powers of constitutional Government of the Republic, the State Council, the Court of Cassation, the Court of Auditors, the Disputes Tribunal and any national sovereign jurisdiction, and the Ombudsman and the Ombudsman for Children,
- 2 ° A national defense;
- 3 ° In the public domain of the State;
- 4 ° A national, state and capacity of persons;
- 5 ° In the statutes of the state public officials.

Also automatically applicable in French Polynesia laws address authorization to ratify or approve the international commitments and decrees which decide their publication.

Article 8 [More about this product ...](#)

The laws and regulations mentioned in section 7 come into force in French Polynesia on the date specified therein or, failing this, the tenth day following their publication in

the Official Journal of the French Republic.
Acts mentioned in Article 7 shall be published for information in the Official Journal of French Polynesia.

Article 9

The Assembly of French Polynesia's views:

- 1 ° The draft laws and draft laws and draft ordinances that introduce, modify or delete specific provisions to French Polynesia;
- 2 ° The draft orders taken on the basis of Article 74-1 of the Constitution;
- 3 ° Of the bills authorizing the ratification or approval of international commitments involved in the fields of competence of French Polynesia.

The assembly has a within one month of its opinion. This period is reduced to fifteen days in case of emergency, at the request of the High Commissioner of the Republic. The deadline expired, the notice is deemed given.

In addition to sessions, the opinion on the draft order is issued by the Standing Committee. This can also be empowered by the Assembly to issue opinions on draft laws and proposals other than those amending this organic law. Notices are issued on time in the preceding paragraph.

consultations mentioned in the preceding paragraphs should intervene, at the latest, before the adoption of the bill or the bill on first reading by the first assembly.

The notice issued under this section shall be published in the Official Journal of French Polynesia.

Article 10 [Learn more about this article ...](#)

The government of French Polynesia is consulted on the draft decree introducing a regulatory nature, changing or deleting specific provisions to French Polynesia. It is also consulted prior to their ratification or approval, on treaties or agreements that are not among those mentioned in the first paragraph of Article 53 of the Constitution and involved in the fields of competence of French Polynesia.

The government has a period of one month to issue its opinion. This period is reduced to fifteen days in case of emergency, at the request of the High Commissioner of the Republic. The deadline expired, the notice is deemed given.

The opinion issued under this section shall be published in the Official Journal of French Polynesia.

Article 11

Laws, ordinances and decrees that occurred before the entry into force of this organic law in areas which now fall under the jurisdiction of the authorities of French Polynesia may be amended or repealed, as they apply to Polynesia French, by the authorities of French Polynesia following the procedures provided for by this organic law.

Article 12

I. - When the Constitutional Council found that a law enacted after the entry into force of this organic law has intervened in matters within the jurisdiction of French Polynesia, as it applies to the latter, This Act may be amended or repealed by the Assembly of French Polynesia.

II. - The Constitutional Council is called upon by the President of French Polynesia after deliberation by the Council of Ministers, the President of the Assembly of French Polynesia in pursuance of a resolution of this meeting, the Prime Minister, President of National Assembly or Senate President. He informed of the referral, which must be substantiated, other authorities hold the power to enter; they may submit comments within a fortnight.

The Constitutional Council decides within three months.

- PART III: SKILLS
 - Chapter I: The distribution of powers between the state, French Polynesia and the common

Article 13 [Learn more about this article ...](#)

Notwithstanding any contrary provisions, the authorities of French Polynesia have jurisdiction in all matters not delegated to the State under section 14, subject to the powers granted to municipalities or performed by them under this organic law . French Polynesia and municipalities exercise their respective powers to the outer limit of territorial waters.

- Section 1: The powers of the State

Article 14 [Learn more about this article ...](#)

The state authorities are competent only in the following subjects:

- 1 ° Nationality, civil rights, electoral law, civil rights, status and capacity of individuals, including acts of civil status, absence, marriage, divorce, paternity, authority parental matrimonial regimes, inheritance and gifts;
- 2 ° guarantee of civil liberties, justice: judicial, legal aid, organization of the legal profession, to the exclusion of any other legal profession or judiciary, criminal law, criminal procedure, Commissions of Office, the public prison service, service and residential facilities for juvenile offenders on court, administrative proceedings, criminal justice costs and administrative functions of the Ombudsman and the Ombudsman for Children in relations between citizens , public authorities and public services;
- 3 ° Foreign Policy,
- Defense 4, import, export and trade of military equipment, weapons and

ammunition of all kinds; strategic raw materials as defined for all the territory of the Republic, with the exception of liquid and gaseous hydrocarbons; bonds and government communications security or defense regarding post and telecommunications;

5 ° entry and residence of foreigners, with the exception of access to work foreigners;

6 ° Public safety and order, including policing; import prohibitions and export which are of public order and international commitments ratified by France; regulation of radio frequencies; preparation safeguard measures, development and implementation of operational plans and emergency resources needed to cope with major risks and disasters, coordination and requisition of means contributing to civil security;

7 ° Currency, credit, foreign exchange, treasury, market financial obligations relating to the fight against illicit traffic and money laundering;

8 ° Authorization to operate the air service between French Polynesia and any other point on the territory of the Republic, except the part of these connections between French Polynesia and every point of call outside the national territory, without prejudice to 6 ° of I of Article 21 of Law No. 99-209 of 19 March 1999 on the New Caledonia; approval of operating programs and the corresponding rates, police and security for civil aviation;

9 ° Police and security of maritime traffic; monitoring of sea fishing, navigation safety and coordination of emergency resources at sea; francization vessels, safety of ships over 160 gross tons and all vessels for the carriage of passengers; implementation of works and airport facilities of national interest;

10 ° Rules on Administration , organization and powers of municipalities, their associations and their public institutions; intermunicipal cooperation; control acts of Commons, of their organizations and their public institutions, the accounting and financial and budgetary control of these communities function municipal public; communal public domain; population count;

11 ° Public civil and military state; status of other public officials of the State; public domain of the State, public contracts and public service delegations of State and its public;

12 ° Audiovisual Communication;

13 degrees University education, research, collation and issue degrees, national qualifications, rules applicable to authorized personnel of private schools under contract to public bodies for fulfilling teaching assignments in that they result in the extension to these provisions on personal classroom teachers in public education, including those relating to conditions of service and termination of activity, measures social, training opportunities and measures for promotion and advancement.

skills defined in the State shall be exercised subject to the powers granted to institutions of French Polynesia by the provisions of Section 2 of this chapter and Title IV, and the participation of French Polynesia to the jurisdiction of the State under the provisions of Section 3 of this chapter.

- **Section 2: The special skills of French Polynesia**

Article 15

French Polynesia can have representations of any State and any of its territory or territorial entities recognized by the French Republic or any international organization of which the latter is a member of any international body or the Pacific. President of French Polynesia is negotiating the opening of these representations and appointed representatives. The authorities of the Republic and the Assembly of French Polynesia are kept informed.

Article 16

Under the terms defined in Article 39, the President of French Polynesia negotiates, respecting and implementing the international commitments of the Republic, administrative arrangements with the government of any State or Territory of the Pacific, for promote economic development, social and cultural French Polynesia.

These administrative arrangements are signed by the President of French Polynesia and approved by the cabinet of French Polynesia. They are effective upon transmission to the High Commissioner of the Republic under the conditions laid down in Article 171.

Article 17

In compliance with international commitments of the Republic, President of French Polynesia negotiates and signs, in matters within the jurisdiction of French Polynesia, decentralized cooperation agreements with local French or foreign, public or their groupings .

These agreements are subject to their conclusion after the approval of the Cabinet of French Polynesia. They are effective upon transmission to the High Commissioner of the Republic under the conditions laid down in Article 171.

Article 18

French Polynesia can take measures to promote access to employment in private sector employees the benefit of persons showing a sufficient length of residence in its territory or persons showing a sufficient duration of marriage, cohabitation or civil partnership solidarity with them.

of equal merit, such measures are applied under the same conditions for access to jobs in the public service of French Polynesia and municipalities.

French Polynesia is also possible to adopt, in accordance with first paragraph of measures to facilitate access to the exercise of self-employment, including professional services.

Measures taken under this section shall, for each type of occupation and each

sector of activity, be justified by objective criteria directly related to the needs of support or promotion of local employment. In addition, these measures may affect the individual and collective rights enjoyed at the date of publication, the persons or entities other than those mentioned in paragraph one and pursued their activities in accordance with the laws and regulations force on that date.

The applicability of this section shall be prescribed by the acts mentioned in Article 140 referred to as "laws". They may provide for cases in which periods spent outside of French Polynesia to perform national service, for study or training or for family reasons, medical professional or not, for people who were previously residents, a cause of interruption or suspension of the period taken into consideration when assessing the conditions of residence required by the preceding paragraphs.

Article 19

French Polynesia may make the declaration to inter vivos transfers of land and buildings situated in its territory or rights thereto, except donations online or collateral to the fourth degree.

In order to maintain membership of land ownership to the cultural heritage of the population of French Polynesia and the identity thereof, and save or enhance natural, French Polynesia can exercise within two months its right of first refusal on landed property or social rights related subject of the declaration of transfer, subject to payment to the beneficiaries the amount of the value of such real estate or social rights. Failing agreement, this value is set as on expropriation.

The provisions of the first two paragraphs do not apply to transfers made for the benefit of persons:

- [Provisions declared inconsistent with the Constitution by decision of the Constitutional Council ° 2004-490 DC of 12 February 2004]
- justifying sufficient length of residence in French Polynesia, or
- [Provisions declared not to be constitutional by the Constitutional Council Decision No. 2004-490 DC of 12 February 2004]
- [Provisions declared not to be constitutional by the Constitutional Council Decision No. 2004-490 DC of 12 February 2004]
- justifying a sufficient duration of marriage, cohabitation or civil partnership with someone who has one of above qualities.

They are also not apply to corporations with offices in French Polynesia and controlled, directly or indirectly, by the persons mentioned in the preceding paragraph.

Rules for the purposes of this section are determined by the acts referred to in Article 140 referred to as "laws". They may provide for cases in which periods spent outside of French Polynesia to perform national service, for study or training or for family reasons, medical professional or not, for people who were previously residents, a cause of interruption or suspension of the time taken into consideration when assessing the conditions of residence required in the fifth paragraph.

Article 20

French Polynesia can match offenses the acts specified in Article 140 referred to as "laws" or the deliberations of the Assembly of French Polynesia of fines, including fixed fines within the framework defined by the code Criminal Procedure, with the classification of offenses and offenses and not exceeding the maximum provided for similar offenses by the laws and regulations applicable in criminal matters. It may impose additional penalties for the offenses provided for similar offenses by the laws and regulations applicable in criminal matters. The French Polynesia may also impose administrative sanctions, such as tax, customs or economic. The proceeds of these fines is paid to the budget of French Polynesia.

Article 21 [Learn more about this article ...](#)

French Polynesia can match offenses the acts specified in Article 140 referred to as "laws" of imprisonment not exceeding the maximum penalty under national law for similar offenses, subject to approval prior to its deliberation by law. Until the entry into force of the law approval, only fines and additional penalties may be provided by the resolution are applicable.

Article 22

French Polynesia can issue fines of great roads to suppress violations of the public domain assigned to it. These tickets can not exceed the maximum provided for similar offenses by the laws and regulations applicable to high road. Product convictions is paid to the budget of French Polynesia.

Article 23

The transaction fee may be regulated by French Polynesia in any material administrative, fiscal, customs or economic under its jurisdiction. When the transaction involves the acts constituting infringement and to extinguish the public action, it can only occur with consent of Public Prosecutor.

Article 24

The Assembly of French Polynesia determines the rules for casinos and gaming clubs, lotteries, raffles and Paris, in compliance with the rules of control and penalties determined by the state.

Article 25

I. - The French Polynesia companies can create production and dissemination of audiovisual programs.

II. - An agreement between the Higher Audiovisual Council and the Government of French Polynesia French Polynesia combines the audiovisual communications policy.

III. - The government of French Polynesia is consulted for audiovisual communication:

1 ° For the High Commissioner of the Republic, on any decision under the Government of the Republic and clean to French Polynesia;

2 ° For the Supreme Council of the audiovisual, or any regulatory decisions on individual under its jurisdiction or on the national program company responsible for designing and programming for television and radio broadcasting intended for distribution overseas, where such decisions concern the French Polynesia.

Notice is deemed given if it is not reached within a month, which can be reduced, in an emergency, at the request of the High Commissioner of the Republic or the Supreme Council Audiovisual as appropriate, not being less than forty-eight hours.

Article 26

French Polynesia, organizes its own training courses and its own research.

Article 27 [Learn more about this article ...](#)

French Polynesia, exercises its powers in accordance with the obligations imposed by national defense.

In this respect, the division of powers under this organic law does not preclude the State:

Takes 1 °, with respect of French Polynesia and its public institutions, the measures necessary for the exercise of its powers in defense, as they result from laws applicable to the general organization of the nation in time of war and the requisitioning of goods and services;

2 ° Fixed rules of labor law applicable to employees who work in institutions of the State concerning national defense;

3 ° Establishes rules concerning the transport, storage and delivery of products oil necessary for carrying out the tasks of security and defense.

For the purposes of this section, the State has as to require the services of French Polynesia and its public institutions.

Article 28

When officials of state bodies for the administration of French Polynesia are affected in the administration of the country, decisions relating to their particular

situation, except for grade promotion decisions, and those relate to the disciplinary authority in respect of the sanctions first and second groups are, for the duration of their assignment, taken by the authority of French Polynesia which they belong, that decides their assignment to particular jobs such services and public institutions.

Article 29

French Polynesia can create mixed-economy companies who associate itself or its public bodies, to one or more private persons, and possibly to other public entities, as provided by applicable law in French Polynesia to the latter. The Model Rules of these companies are set by resolution of the Assembly of French Polynesia.

French Polynesia, its public institutions or other legal persons of public law are entitled, as a shareholder, at least one representative on the Board of Directors or the Supervisory Board appointed respectively by the Council of Ministers of French Polynesia, the board of a public shareholder or the deliberative assembly of the legal person shareholder.

Article 30

French Polynesia can participate in the capital of private companies managing a public service or public interest and may also, for reasons of general interest, participate in the capital of commercial companies.

These investments will be an annual report annexed to the administrative account of French Polynesia reviewed annually.

▪ **Section 3: Participation of French Polynesia to the Powers of the State**

Article 31 [Learn more about this article ...](#)

The institutions of French Polynesia are entitled, in respect of guarantees given on the whole national territory for the exercise of civil liberties, under the control of the State, to participate in the exercise of the powers it retains in legislative and regulatory framework under Article 14:

1 ° state and capacity of persons, custody, matrimonial regimes, inheritance and gifts;

2 ° Search and detection of offenses, criminal law provisions on gambling ;

3 Entry and residence of foreigners, except the right of asylum, expulsion of foreigners and movement of citizens of the European Union;

4 ° Audiovisual Communication,

5 ° Financial Services postal facilities.

Article 32 [Learn more about this article ...](#)

I. - The acts referred to in Article 140 referred to as "laws" involved in the scope of Article 31 were adopted as follows, without prejudice to the provisions of Section 5 of Chapter II of Title IV and Chapter II of Title VI.

the project or the proposed act provided for in Article 140 referred to as "law of the country" is transmitted by the President of French Polynesia or the chairman of the Assembly of French Polynesia to the Minister from overseas who shall acknowledge receipt immediately, after receiving this, the minister and, where appropriate, the other ministers concerned shall propose to the Prime Minister, within two months, a draft decree to be approval or partial text, or refusal of approval.

Decree bringing non-approval is motivated and is notified, as appropriate, the president of French Polynesia or the assembly of French Polynesia .

Decree on the approval is transmitted, as appropriate, the president of French Polynesia or the assembly of French Polynesia. The project or the proposed act shall be adopted by the Assembly of French Polynesia in the same terms.

The decrees mentioned in the second paragraph of this I shall lapse if they have not been ratified by law [provisions found not to be constitutional by the Constitutional Council decision No. 2004-490 DC of 12 February 2004]

II. - The decrees of Cabinet of French Polynesia speaker for the application of the acts mentioned in Article 140 referred to as "laws" referred to in Article I of this, and orders of the Cabinet involved in the field of Regulation in a subject listed in the preceding article, are adopted under the following conditions.

The draft order is sent by the president of French Polynesia to the minister for overseas territories who shall acknowledge receipt of such notification; after that reception, the minister and, where appropriate, the other ministers concerned shall propose to the Prime Minister, within two months, a draft decree to either total or partial approval of the text or the refusal of approval.

Decree bringing non-approval is motivated and is notified to the President of French Polynesia.

Decree approving is transmitted to the President of French Polynesia. The order shall come into force after being deliberated by the Council of Ministers in the same terms and without modification.

III. - The acts referred to in Article 140 referred to as "laws" and the Orders in Council of Ministers referred to in I and II of this article can be respectively changed by law or order or decree that includes a specific reference Application in French Polynesia.

IV. - Without prejudice to Article 33 and the third paragraph of Article 36, the individual decisions taken pursuant to the acts mentioned in Article 140 referred to as "laws" and orders mentioned in this article are subject to hierarchical control High Commissioner of the Republic. Their entry into force is subject to receipt by the High Commissioner of the Republic.

Article 33

Under the regulations issued by French Polynesia in application of Article 32, the High Commissioner of the Republic may object to the issuance of residence permits of foreigners by the government of French Polynesia in the conditions and deadlines set by decree.

Article 34

I. - The French Polynesia can participate in the exercise of police duties incumbent upon the state in monitoring and use of public of French Polynesia, police road traffic, the traffic police in the maritime inland waters and public security missions or civil.

For these purposes, holders of senior officials are appointed by the territorial president of French Polynesia after approval by the High Commissioner of the Republic and by the prosecutor and after delivery oath before the trial court. Approval may be suspended by the High Commissioner of the Republic or by the prosecutor after informing the President of French Polynesia. It can be removed by the authorities, after consulting the President of French Polynesia, which has a period of five days to give its opinion, this period has expired, the notice is deemed given.

II. - The officials mentioned in the second paragraph of I can see by the minutes contraventions of the regulations for the monitoring and use of public of French Polynesia, road traffic and marine traffic in inland waters contained on a list established as provided in II of Article 32.

III. - At the request of the High Commissioner of the Republic, officials mentioned in the second paragraph of I can, after agreement of the President of French Polynesia, be associated with the missions of public safety or emergency preparedness including the duration, subject and focal points are set in the request of the High Commissioner.

They are, to do so under the authority of direct operational commander of the gendarmerie or the Director of Public Security, which determine how their intervention .

Article 35

The acts referred to in Article 140 referred to as "laws" may include, within the same limits and conditions as provided by law, provisions for sworn officers and officials of government and public services of French Polynesia, other than those mentioned in Article 34, to seek and report breaches of the acts referred to in Article 140 referred to as "laws" in the deliberations of the Assembly of French Polynesia and regulatory orders of the cabinet in which these government and public services are specifically responsible for monitoring the implementation. These agents are finding these offenses by the minutes. Under the search for these offenses, they can ask offenders to prove their identity, make any deposits, take samples, provisional attachments, withdrawals of consumption, enact

prohibitions or requirements, conducting offenders before a police officer. They can also be empowered to carry out visits in the presence of a police officer required for this purpose.

These agents are commissioned by the President of French Polynesia after being approved by the Attorney the Republic. They take an oath before the trial court. Approval may be withdrawn or suspended after informing the President of French Polynesia.

The sworn officers of port authorities responsible for port police can make any finding and detecting infringements of regulations that these institutions are responsible for applying.

Sworn agents Control of the Social Insurance Fund may make any findings and detecting infringements of regulations that the fund is charged with enforcing.

Article 36

The regulations issued by French Polynesia under 4 of Article 31 and Article 32 follows the policies defined by the legislation on freedom of communication.

Prior to transmission to the Minister for the Overseas sea in accordance with Article 32, the Higher Audiovisual Council is consulted by the Assembly of French Polynesia or the cabinet of French Polynesia, respectively, on projects and proposals for instruments provided for in Article 140 referred to as "law of the land" and on the draft Orders in Council of Ministers. The notice is deemed given if it is not reached within thirty days. The notice is published in the Official Journal of the French Republic and the Official Journal of French Polynesia.

Individual decisions taken by the authorities of French Polynesia under the rules mentioned in first paragraph and which are normally the responsibility of the Council Higher Audiovisual may be canceled or reformed by the Higher Audiovisual Council at the request of the High Commissioner of the Republic or any person with an interest in acting.

Article 37

I. - The government of French Polynesia is associated with the development contract settlement between the state and academic institutions involved in French Polynesia. It is consulted on the draft contract between the state and research organizations established in French Polynesia. It may enter into agreements on objectives and guidance with these institutions or organizations.

II. - The French Polynesia with the State determines the map of university teaching and research as provided in the following paragraphs.

The Assembly of French Polynesia deliberates on proposals to create training courses and research programs made to him by the President of French Polynesia or the High Commissioner of the Republic.

Map of university teaching and research, which includes the location of higher education institutions and their ability to home, the subject of an agreement between the State and French Polynesia.

In the absence of agreement, the map of university teaching and research is stopped by the state.

Article 38

In the areas of state jurisdiction, the authorities of the Republic can entrust the President of French Polynesia's powers to negotiate and sign agreements with one or more states, territories or Pacific regional agencies and with regional bodies dependent on the United Nations specialized agencies.

If it is not made under the provisions of the first paragraph, the President of French Polynesia or his representative may be involved or participate in the French delegation to the negotiations and the signing of agreements with one or more states, territories or Pacific regional agencies and with regional bodies dependent on the United Nations specialized agencies.

agreements defined in the first paragraph are subject to ratification or approval in accordance with Articles 52 and 53 of the Constitution.

President of French Polynesia may be authorized by the authorities of the Republic to represent it in international organizations.

Article 39

In the areas of competence of French Polynesia, the president of French Polynesia may, after consideration of the Cabinet, negotiate, in accordance with international commitments of the Republic, agreements with any state, territory or international organization.

authorities Republic of jurisdiction in matters of foreign policy are informed of the intention of the President of French Polynesia to negotiate and, upon request, to bargain represented in the delegation of French Polynesia. They have a period of one month from the notification of intent to negotiate to oppose the negotiation of agreements.

The competent authorities of the Republic can entrust the President of French Polynesia's powers to sign the agreements on behalf of the Republic.

These agreements are then submitted to the deliberation of the Assembly of French Polynesia and then subject to ratification or approval in accordance with Articles 52 and 53 of the Constitution.

Article 40

When the state takes the initiative to negotiate agreements within the scope of competence of French Polynesia, the president of French Polynesia or his representative is actively involved in the French delegation to the negotiations.

Article 41

President of French Polynesia or his representative shall participate, within the French delegation to the negotiations concerning relations between the European and French Polynesia.

Article 42

French Polynesia can, with the agreement of the authorities of the Republic, being a member or associate member of international organizations in the Pacific or observer of them.

In addition, the president of French Polynesia or his representative may be associated, agreement with the authorities of the Republic, the work of Pacific regional agencies in the areas under the jurisdiction of French Polynesia. It is represented by the President of French Polynesia or his representative.

▪ **Section 4: The skills of Commons of French Polynesia**

Article 43

I. - Under rules issued by the State and by French Polynesia in accordance with their respective powers, and without prejudice to the powers reserved to them on the date of entry into force of this Organic Law, the laws and regulations in effect, the municipalities of French Polynesia are competent in the following subjects:

- 1 ° Municipal Police,
- Municipal Highways 2 °;
- 3 ° Cemeteries;
- 4 ° Transport communal;
- 5 ° Construction, maintenance and operation of schools of education at the first degree;
- 6 ° drinking water supply, without prejudice to French Polynesia to meet its own needs;
- 7 ° Collection and processing of household waste;
- 8 ° Collection and waste treatment plants;
- 9 ° Collection and treatment of wastewater.

II . - Under the conditions defined by the acts referred to in Article 140 referred to as "laws" and regulations issued by French Polynesia, subject to the transfer of resources necessary for the exercise of these powers, local authorities can intervene in following subjects:

- 1 ° economic aid and intervention;
- 2 ° Welfare;
- 3 ° Urbanism;
- 4 ° Culture and local heritage.

Article 44

In municipalities where there are no sanitation service provided by the French Polynesia, municipalities or public establishments of intercommunal cooperation may be authorized by French Polynesia to be prescribed or may be required to allow the connection of private waste do not meet the characteristics of the receiving water, sewage systems or treatment facilities they build or operate.

Article 45

French Polynesia can, on request of the municipal councils, authorize municipalities to produce and distribute electricity within their district. This authorization is not necessary for the municipalities which, on the date of enactment this organic law, produce and distribute electricity within the limits of their riding.

- **Section 5: The domaniality**

Article 46

The State, French Polynesia and the common practice, each in his case, their ownership of their public and private domain.

Article 47

The field of French Polynesia includes vacant property without an owner, including stocks, shares and cash deposits with the prescription in a timely manner by the law applicable to the area of the state, those persons who die without heir or whose estates have been abandoned, the area known as the geometric fifty paces from the Marquesas Islands and all rivers, lakes, and groundwater sources.

the maritime public of French Polynesia includes, subject to the rights State and third, the shores of the sea, soil and subsoil of inland waters, especially estuaries and lagoons, as well as soil and subsoil of the territorial waters.

The provisions of preceding paragraph shall apply subject to rights of way necessary, to the date of publication of this organic law, the exercise by the state of his skills and as this necessity is justified.

, French Polynesia and has practiced law regulates exploration and exploitation rights of natural resources and non-living inland waters, especially estuaries and lagoons, soil, subsoil and superjacent waters of the territorial sea and economic zone exclusively in compliance with international commitments.

- **Section 6: The relationship between public**

Article 48

The authorities of French Polynesia may delegate the powers to mayors to take individual measures implementing the acts specified in Article 140 referred to as "laws" and regulations issued by these authorities.

The delegation of powers may be made only 'agreement with the city council of the municipality concerned and involves the transfer of the means necessary to exercise powers that are the subject of the delegation.

Article 49

French Polynesia, sets the rules on public procurement and public service delegations of Commons, of their organizations and their public in accordance with the principles of equal treatment of applicants and transparent procedures.

Article 50

In communities with a planning document against third parties, the government of French Polynesia can give, by order, on demand or after approval of the council, the mayor authority, acting on behalf of the municipality or to instruction and issuing individual permits to land use and planning certificates, either for the only issue of such licenses and certificates, as provided by applicable law in French Polynesia.

Article 51

Programs of social housing built, acquired or improved with funding from the State are subject to agreements between State and French Polynesia. These agreements also provide information of the mayor of the municipality concerned on the principles governing the functions of these units and allocation decisions. In exchange for the provision of land, financing or financial security of Commons to the achievement of social housing programs, the common sign special agreements with the State and French Polynesia. Agreements shall include procedures for booking these apartments.

Article 52 [Learn more about this article ...](#)

An inter-fund equalization receives a share of taxes, duties and taxes levied for the benefit of the general budget of French Polynesia.

This share, which can not be less than 15% of those resources, is fixed by decree, after consultation the Assembly of French Polynesia and the cabinet of French Polynesia, taking into account the respective loads of French Polynesia

and municipalities. When the administrative account of French Polynesia shows that revenues from taxes, duties and taxes actually paid less than you budgeted primitive, the amount of the difference is recorded as a deduction from the tax base equalization fund of intercommunal year following the adoption of the administrative account.

inter equalization fund may also receive state funding for all municipalities. inter equalization fund is managed by a local finance committee of Polynesia French, jointly chaired by the High Commissioner of the Republic and President of French Polynesia and including representatives of Commons, the government of French Polynesia, the Assembly of French Polynesia and the State. Representatives of local authorities constitute the majority of committee members.

This committee allocates resources between funds of the municipalities, for a pro rata share of the number of their inhabitants, for the other due to their loads. He may decide to award a grant assigned to groups of municipalities to carry out investment operations or the management of operating expenses of interest intercommunal.

A decree in Conseil d'Etat determines the conditions of application of this section and in particular the conditions for electing representatives of Commons and the Assembly of French Polynesia to the local finance committee. It also sets conditions under which the fund provides each joint a minimum of resources.

Article 53

French Polynesia, establishes taxes or specific taxes to municipalities, including the services rendered.

The rate of these taxes and how their perceptions are determined by the municipal council in accordance with regulations established by the Polynesia French.

Municipalities may also, under the rules established pursuant to 10 ° of Article 14, establish fees for services rendered.

Article 54

In order to promote their development, French Polynesia can provide financial support and technical assistance to municipalities or their associations. , French Polynesia can participate in the operation of municipal services by the provision of any staff of its services, ministerial staff or facilities public as part of agreements between the President of French Polynesia and municipalities.

Article 55

When French Polynesia says the agreement by municipalities or municipal institutions or inter-municipal cooperation, in light of a request or agreement of

their governing bodies, the construction of public amenities or management of public services within its jurisdiction. The agreement provides for financial assistance from French Polynesia.

Municipalities or groups may entrust by convention to French Polynesia projects community facilities or management utilities under their jurisdiction. In this case, the work is done under the rules applicable to French Polynesia. The agreement provides for financial participation of Commons.

Article 56

The initial domain of Commons of French Polynesia is determined, with the assent of the Assembly of French Polynesia, by decrees that affect each part of the area of French Polynesia.

The area thus formed can be extended by decisions of the Assembly of French Polynesia, with the assent of the municipal council concerned.

- **Section 7: Cultural identity**

Article 57

French is the official language of French Polynesia. Its use requires legal persons of public law and private parties in the exercise of a public service mission and to the users in their relations with public administrations and services.

Tahitian is a fundamental cultural identity: cement of social cohesion, daily means of communication, it is recognized and must be preserved, as well as other Polynesian languages, alongside the language of the Republic, to ensure cultural diversity that makes the wealth of French Polynesia.

French, Tahitian, Marquesan, and the paumotu mangarevien are the languages of French Polynesia. The natural and legal persons of private law wear freely in their acts and conventions, they incur no nullity on the grounds that they are not written in the official language.

Tahitian is a subject taught in the context of regular schedule of nursery and primary schools, in secondary schools and in institutions of higher education.

On decision of the Assembly of French Polynesia, the Tahitian language can be replaced in some schools or facilities by the one of the other Polynesian languages.

study and teaching of language and culture are taught in Tahitian institutions for teacher training.

Article 58

There shall be a panel of experts composed of individuals who have acquired special expertise in land matters.

Its composition, its organization and operations are set by resolution of the

Assembly of French Polynesia. Members of the panel of experts appointed by the assembly.

This college can be consulted by the President of French Polynesia, the Chair of the Assembly of French Polynesia or the High Commissioner of the Republic on any matter relating to the landed property in French Polynesia.

It proposes to the general assembly of judges of the court of appeal of persons qualified in land ownership to be accredited as assessors to the courts ruling on land or as legal experts.

○ Chapter II: The methods of transfer of skills

Article 59

As the state charges relating to the exercise of powers that French Polynesia receives this organic law.

Any net increase in expenses resulting for French Polynesia transferred competence is accompanied by the concomitant payment by the State of financial compensation for the normal exercise of these powers. The amount of compensation is determined by reference to the annual expenditure incurred by the State, the date of transfer, under these skills; this compensation changes each year as the overall operating allocated to municipalities.

The costs relating the exercise of the powers transferred are evaluated prior to the transfer of those powers. The terms of this assessment are set by decree. These expenses are offset by the allocation of a total award of compensation entered in the state budget. The Finance Act specifies each year the amount of the total allocation of compensation.

It is in French Polynesia created an advisory commission to assess charges. Chaired by a judge of the Territorial Chamber of Accounts of French Polynesia, it is composed of representatives of the state government of French Polynesia and the Assembly of French Polynesia. It is consulted on the assessment of loads corresponding to the transferred responsibilities.

Article 60

The movable and immovable property belonging to the State and assigned to the exercise of State powers transferred to French Polynesia are themselves transferred to French Polynesia for free.

shall also be transferred for free to French Polynesia goods and personal property belonging to the State and made available in French Polynesia under agreements made under previous legislation involving the transfer of powers.

The leases on buildings leased by the state and assigned to the exercise of State powers transferred to French Polynesia are transmitted for free to French Polynesia, that the transfer results of this organic law or agreements made under previous legislation involving the transfer of powers.

These transfers not give rise to any compensation, duties, taxes, wages or fees.

French Polynesia is substituted for the State in its rights and obligations of contracts and agreements that it has concluded for the development, maintenance and conservation of these goods and services for the operation.
State finds these substitutions and notify its contractors.

Article 61

Services or parts of state services entrusted exclusively with the implementation of a power given to the French Polynesia under this organic law are transferred to it. The manner and date of transfer are determined by law.
For each service or part service, an agreement between the high commissioner and the president of French Polynesia determines the conditions for the implementation of these transfers.

Article 62

I. - The state officials discharging their duties in a service or part service transferred to French Polynesia under the provisions of this chapter and who are not already bound to it by statute or contract shall be deemed right available in French Polynesia. The state officials mentioned above are available in French Polynesia, notwithstanding sections 41 and 42 of Law No. 84-16 of 11 January 1984 laying down provisions concerning the public service of the State. They remain governed by the laws and regulations applicable to them.

II. - However, the state officials who serve in the services or parts of services are transferred, when not subject to a rule limiting the length of stay in French Polynesia, opt within two years from the date of entry into force of the transfer, to maintain their status as civil servant or civil servant status of French Polynesia. If the officer opts for civil servants of French Polynesia, he is granted his request within a maximum of two years from the date of receipt thereof, under the conditions set by the territorial status of civil servants.

If the employee chooses to maintain its status as a state official, he may, within the time prescribed in the first paragraph of this II:

1 ° or ask to be placed on secondment in a long-term use of French Polynesia from which it exercises its functions, in which case, it has priority to be detached.

If the secondment is terminated at the request of the authority with which the official was seconded and for a reason other than incompetence or disciplinary reasons, the person is reinstated in State employment within existing vacancies. In the absence of vacancy, it continues to be paid by the community that ended at the detachment, at the latest until the date on which the detachment was to end;

2 Or ask to be assigned to a position in State and is granted his request within a maximum of two years from the date of receipt thereof and within the limits of available jobs. The President of the Government may be consulted for advice. When no job is vacant, the employee remains available in French Polynesia. The applicant has a period of six months to confirm or modify its initial option. After that time, he is deemed to confirm this option. If the employee changes

his original option, it is granted his request within one year of this new option.

III. - Employees who have not exercised their option right on schedule II shall be deemed to have elected to maintain their status as civil servant and soliciting their detachment under the conditions described in 1 of II.

officials who chose, in the time stated in II, maintaining their status as civil servant without having exercised the option under II are deemed, at the end of the schedule, soliciting their detachment under the conditions described in 1 of II.

- **PART IV: INSTITUTIONS**
 - **Chapter I: The President and the Government of French Polynesia**
 - **Section 1: Responsibilities and duties of the president and the government**

Article 63

The government of French Polynesia is the executive of French Polynesia which he conducts the policy.

It has the administration of French Polynesia.

It is responsible to the Assembly of French Polynesia in the conditions and procedures provided in section 156.

Article 64

President of French Polynesia is the French Polynesia. He directs the government.

He promulgates acts referred to in Article 140 referred to as "laws".

He signed deliberate acts by the Cabinet.

He is responsible for implementing the actions specified in section 140 referred to as "laws" and the deliberations of the Assembly of French Polynesia and its Standing Committee. He shall exercise statutory authority for the application of acts of the Cabinet.

It directs the administration of French Polynesia. Subject to the provisions of section 93, he called to all public of French Polynesia, except those under the jurisdiction of the Speaker of the Assembly of French Polynesia.

Subject to the provisions of Article 90, it takes the non-regulatory acts necessary for the implementation of the acts mentioned in Article 140 referred to as "laws", the deliberations of the Assembly of French Polynesia and regulations.

It is the Budget officer of French Polynesia.

He may delegate authority officer. He can make a requisition order to the accounting of French Polynesia in the conditions laid down in Article LO 274-5 of the Code of Financial Jurisdictions, but can not delegate this authority.

Article 65

President of French Polynesia ensure publication in the Official Journal of French Polynesia acts within the jurisdiction of the institutions of French Polynesia.

Article 66

The acts of the President of French Polynesia other than those mentioned in Articles 39, 65, 73 and 81 shall be countersigned by the ministers responsible for their implementation.

Article 67

President of French Polynesia may delegate certain powers to the Vice President and Ministers.

Article 68

President of French Polynesia is informed by the High Commissioner of the Republic of the measures taken for the maintenance of order and internal security.

It is also associated with the preparation and implementation of the measures taken by the High Commissioner for coordination and requisition of means contributing to civil security.

▪ **Section 2: Election of Chairman**

Article 69

President of French Polynesia is elected by secret ballot by the Assembly of French Polynesia from among its members.

It may also be elected by the Assembly from outside its ranks upon presentation of his application by at least a quarter of representatives to the Assembly of French Polynesia, each representative can nominate only one candidate. In this case, candidates must meet the requirements to be eligible for the Assembly of French Polynesia. In case of doubt on the eligibility of a candidate, the High Commissioner of the Republic may, within forty-eight in the nomination, to the Administrative Tribunal, which shall within forty-eight hours.

The Assembly of French Polynesia can not validly proceed with the election only if three-fifths of its members are present. If this condition is not met, the meeting is automatically three days later, Sunday and holidays not included, regardless of the number of representatives to the Assembly of French Polynesia present. The vote is personal.

Applications are delivered to the Chairman of the Assembly of French Polynesia

later than the fifth day before the date fixed for the poll. Each candidate presents his program to the assembly before the opening of the first ballot.

The president is elected by an absolute majority of the members of the congregation. If it is not obtained on the first ballot, there shall be a runoff. Can only present the two candidates who, on any withdrawal of more favored candidates, will have received the greatest number of votes in the first round. In the event of a tie in the second round, the election is acquired for the benefit of age.

Article 70

The chairman of the meeting of French Polynesia announce the results of the election of the President of French Polynesia and immediately transmit to the High Commissioner.

The results of the election of the President of French Polynesia may be challenged by any representative the assembly of French Polynesia, by any candidate or by the High Commissioner, before the Council of State decision in litigation within five days after the proclamation.

Article 71

The election of the President of French Polynesia takes place within fifteen days after the opening of the first session of the Assembly of French Polynesia convened pursuant to section 118.

In case of vacancy or as a result of vote on a censure motion, the Assembly of French Polynesia elects the President of French Polynesia within fifteen days after the finding of the vacancy or the vote of confidence motion. If the meeting is not in session, it automatically meets in extraordinary session.

Until the election of new president of French Polynesia, the government ensures the despatch of business.

Article 72

President of French Polynesia remain in office until the expiry of the mandate of the assembly which elected, subject to the provisions of the second paragraph of Article 74 and Articles 75, 77, 80 and 156.

▪ **Section 3: Composition and formation of government**

Article 73

Within five days after his election, the president of French Polynesia notify the High Commissioner and Chair of the Assembly of French Polynesia the decree by

which he appointed a vice president, responsible for such temporary in the absence or incapacity, and ministers, indicating for each of the functions assigned to them. This order is immediately brought to the attention of representatives of the Assembly of French Polynesia by the President.

In the absence of the notification under the first paragraph in the period, the President of French Polynesia is considered to have resigned. It is given act of such resignation by the President of the Assembly of French Polynesia.

The appointment of Vice-President and Ministers shall take effect upon notification of the decree in the first paragraph.

The responsibilities of each minister are defined by order of the President of French Polynesia, transmitted to the High Commissioner and Chair of the Assembly of French Polynesia.

Article 74

President of French Polynesia and other government members must meet the requirements for the election of representatives to the Assembly of French Polynesia.

President of French Polynesia or any other member of government, a fact arising during his term, would be in a situation contrary to the first subparagraph or be struck by one of the disabilities which deprive qualified elector is eligible or dismissed by order of the High Commissioner.

Article 75

President of French Polynesia and other government officials are subject to incompatibility rules to representatives of the Assembly of French Polynesia.

The positions of president of French Polynesia or member of the government are also incompatible with functions and activities specified in Articles LO 143, LO 145, LO 146 and LO 146-1 of the Electoral Code.

For the purposes of these provisions of the Electoral Code, the word "member" is replaced by the words "member of the Government of French Polynesia. "

Article 76

It is forbidden to the President of French Polynesia or any other member of the incumbent government to accept a position of member of board of directors or supervisory or advisory function in one of the institutions, companies or firms mentioned in section LO 146 of the Electoral Code. This prohibition does not apply to the President of French Polynesia or any other government official who sits as a representative of French Polynesia or representative of a public territorial when these functions are not paid.

Article 77

President of French Polynesia at the time of his election, the Vice-President and Ministers, at the time of their appointment, should, when in one case of incompatibility under sections 75 and 76, declare their option to the High Commissioner within one month after taking office.

If the cause of the inconsistency is later, as appropriate, to elect or appoint, the right of option provided for the preceding paragraph is open during the month of the occurrence of the cause of the inconsistency.

Failing to have exercised its option in time, the president of French Polynesia, the Vice President or the Minister is deemed to have waived to his duties as chairman or member of the Government of French Polynesia.

The option exercised or default option is evidenced by a decree of the High Commissioner. This order is notified to the President of French Polynesia, the President of the Assembly of French Polynesia and, where applicable, the member of the government concerned.

Article 78

When an audience member who, after renouncing his mandate as Member of the Assembly of French Polynesia as a result of his election as President of French Polynesia or by following his appointment as Vice- Chairman of Government or Minister leaves office in the government of French Polynesia, he finds his election at the meeting of French Polynesia in place of the last representative in the Assembly of French Polynesia, who was elected on the same list and asked to sit in his suite.

Article 79

I. - The president of French Polynesia or the member of the government that as a public official on the date of his election or appointment is placed outside the framework of the administration or body to which he belongs as provided by the statute that governs it. Subject to the provisions of Article 78, it is, at the expiration of his term, returned to his request, as appropriate, within the framework or body to which he belonged before joining the government of French Polynesia, possibly redundant, or in the public sector company that employed under a public law or private law.

II. - The president of French Polynesia or member of the Government of French Polynesia has employee status on the date of appointment may receive a suspension of his employment contract. This suspension is automatic when the employee has a minimum length of one year with the employer, the date of his appointment.

Article 80

The resignation of the government of French Polynesia is made by the President to the Speaker of the Assembly of French Polynesia. It shall accept it and immediately inform the High Commissioner.

In case of resignation or death of the President of French Polynesia or when his absence or incapacity, noted by the Council of Ministers, exceed a period of three months from the exercise of agency by Vice-President, the Government of French Polynesia has resigned automatically and it is filling the vacancy as provided in Sections 2 and 3 of this chapter.

Article 81

The resignation of a minister is made to the President of French Polynesia, which shall certify that fact and inform the President of the Assembly of French Polynesia and the High Commissioner.

Any change in the composition of government and in the distribution of functions within the government is decided by decree of President of French Polynesia. This order is notified to the High Commissioner and Chair of the Assembly of French Polynesia. The appointment of new ministers and assigning ministers to new duties take effect only after this notification. If the composition of the government does not comply with the provisions of Article 73, the president of French Polynesia has a period of fifteen days from the notification to comply with these provisions and notify its ruling to the High Commissioner and Chair of the Assembly of French Polynesia. Otherwise, the Government is considered resigned and is made under the provisions of Article 74.

Article 82

Appeals against the Orders referred to in Articles 73, 74, 77 and 81 are brought before the Council of State decision in litigation. They are suspensive, except in cases mentioned in Articles 73 and 81 or when the President of French Polynesia or any other member of the Government of French Polynesia is said to have resigned after a criminal conviction becomes final pronounced against him and thereby causing the loss of his civil rights, civil and family.

▪ Section 4: Performance requirements

Article 83

The government of French Polynesia meets Cabinet in the capital of French Polynesia. It is convened by its chairman. The Cabinet may determine to some sessions an alternative venue.

Meetings of the Council of Ministers are chaired by the President of French Polynesia or the Vice President, or, in the absence thereof, by a minister

designated for that purpose by the President of French Polynesia.
The cabinet may validly deliberate on the issues on the agenda.

Article 84

President of French Polynesia stop the agenda of the cabinet. It shall send a copy to the high commissioner before the meeting. Except in an emergency, the copy must be received by the High Commissioner twenty-four hours at least before the meeting.

Where the opinion of the Government of French Polynesia is requested by the minister for overseas or by the High Commissioner , questions that are submitted are listed on the agenda of the first cabinet meeting following receipt of the request.

High Commissioner shall be heard by the Council of Ministers, upon request of the Minister for Overseas sea, when the Cabinet is seized of the issues mentioned in the preceding paragraph.

In all other cases, in agreement with President of French Polynesia, the high commissioner is understood by the Cabinet.

Article 85

Meetings of the Cabinet are not public. They are the subject of a statement.

Article 86

President of French Polynesia and other members of the government of French Polynesia are, as well as civil servants or public officials and persons assisting them, required to keep confidential the facts that they have gained because of their duties.

Article 87

President of French Polynesia and other government members receive a monthly allowance in an amount fixed by the Assembly of French Polynesia by reference to the treatment of public officials serving in French Polynesia. Cabinet sets the conditions for reimbursement of travel expenses and mission of the President of French Polynesia and other government members, the amount of liquidated damages for annual expenses and the social protection system.

President of French Polynesia and other members of the Government of French Polynesia perceive their compensation for six months after leaving office, unless they were made under the provisions of Article 78 or if they have previously taken gainful employment.

Article 88

The Assembly of French Polynesia vote the appropriations necessary for the functioning of the Government of French Polynesia. These credits are compulsory expenditure.

▪ Section 5: Responsibilities of the Cabinet and Ministers

Article 89

The Cabinet is responsible collectively and severally business of government jurisdiction established pursuant to this section.

It stops drafts of instruments provided for in Article 140 referred to as "laws", after consulting the High Council French Polynesia, and other projects to be submitted to the deliberations of the French Polynesia Assembly or its Standing Committee. It shall make regulations to implement the actions specified in Article 140 referred to as "laws of the country "and other decisions of the Assembly of French Polynesia or its Standing Committee.

It shall also take orders involved through the participation of French Polynesia to the Powers of the State provided for Article 31.

Article 90 [Learn more about this article ...](#)

Subject field of acts specified in Article 140 referred to as "laws", the Cabinet shall determine the rules applicable to the following matters:

- 1 ° Creation and organization of services, public institutions and public interest groups to French Polynesia;
- 2 ° education in institutions under the jurisdiction of French Polynesia;
- 3 ° education of local languages in all schools;
- 4 ° Fellowships, grants, awards or prizes in contests or competition, rescue and educational allowances allocated from the budget funds of French Polynesia;
- 5 ° General organization of fairs and markets;
- 6 ° Prices, tariffs and domestic trade;
- ° 7 Tariffs and rules of assessment and collection of fees for services rendered;
- 8 ° Quantitative restrictions on imports;
- 9 ° Conditions for approval of private airports;
- 10 ° opening, organization and competition programs of access to public employment of French Polynesia and its public establishments; modalities application of the remuneration of public servants in French Polynesia; compensation of personal ministerial offices;
- 11 ° Traffic safety and navigation in inland waters [Provisions declared inconsistent with the Constitution by decision of Constitutional Council No. 2004-490 DC of 12 February 2004]; pilotage of vessels;
- 12 ° Conduct of vessels, vessel registration, water activities,

13 ° [Provisions declared not to be constitutional by the Constitutional Council Decision No. 2004 - 490 DC 12 February 2004]

14 ° Mounting legal time and legal time seasonal

Traffic 15 °;

16 ° Consolidation of regulations of French Polynesia and updated codes;

17 ° Limits remuneration subject contribution rates and contribution to the financing of social protection schemes;

18 ° Amounts of benefits under the various social protection schemes.

Article 91

Within the skills of French Polynesia, the Council of Ministers:

1 ° Create, regulates and sets tariffs organizations providing representation in French Polynesia of economic and cultural interests;

2 ° Creates, regulates and sets rates for agencies interests of authors, composers and publishers;

3 ° Authorizes the conclusion of agreements to be concluded with public service concessions and adopt the specifications relating thereto;

4 ° Determines the nature and rates of delivery of public services and in-house; disposals of material, equipment and materials;

5 ° Approves tax rates and fees payable in respect of post and telecommunications within French Polynesia;

6 ° Assign radio frequencies within the jurisdiction of French Polynesia;

7 ° Sets royalties management of radio frequencies within the jurisdiction of French Polynesia;

8 ° Stops curricula and processing statistical data;

9 ° Deliver the licenses of airline companies based in French Polynesia, issues permits for operating international flights other than those mentioned in Article 8 of the 14 and approves the operating programs and corresponding international airfares thereto, in compliance with international commitments of the Republic;

10 ° Allow foreign investment ;

11 ° Allows concessions of the right of exploration and exploitation of natural marine resources;

12 ° Identifies easements in favor of the estate and public works of French Polynesia in the conditions and limits set by the assembly of French Polynesia,

13 ° Approves airfields territorial public air traffic;

14 ° Approves contracts constituent of public interest groups involving the French Polynesia or public institutions;

15 ° Fixed conditions of supply, storage and delivery and rates of liquid and gaseous hydrocarbons;

16 ° Determines the scope and modalities of implementation or exploitation of public works and public works;

17 ° Fixed the order in which the work will be executed budgeted in French Polynesia;

18 ° Takes orders of declaration of public utility and transferability when the expropriation is pursued on behalf of French Polynesia;

- 19 ° Takes all acts of administration and disposition of interests and State-owned property in French Polynesia under the conditions and limits set by the Assembly of French Polynesia;
- 20 ° shall exercise the right of first refusal under section 19;
- 21 ° Accept or refuse gifts and bequests for the benefit of Polynesia French,
- 22 ° in the ceilings of engagement set by the budget deliberations of the Assembly of French Polynesia, empowers the President of French Polynesia or a Minister specially designated for this purpose to negotiate and conclude the terms of borrowings including bond, or loan guarantees;
- 23 ° Ensures placement of free funds of French Polynesia and authorizes the placement of free funds its public institutions, in government securities or in securities guaranteed by the State;
- 24 ° Authorizes, within existing budget allocations voted by the Assembly of French Polynesia, the participation of French Polynesia in the capital of the companies mentioned in Article 30 and the capital of semi-public companies, including credit institutions regulated by the Monetary and Financial Code, authorizes loan agreements or current account advances to these companies;
- 25 ° Decides to institute or defend actions before the courts on behalf of French Polynesia, including with respect to actions against the decisions of the Assembly of French Polynesia or its Standing Committee; compromise on disputes subject to the provisions of section 23;
- 26 ° Creates expenses and appoints public officials and judicial officers;
- 27 ° Deliver work permits and professional cards abroad;
- 28 ° Approves the circles and casinos under the conditions laid down in Article 24;
- 29 ° Recognizes the state of natural disaster.

Article 92

The Cabinet may delegate to its chairman or the minister holding the corresponding powers the authority to make decisions in the following areas:

- 1 Administration and State-owned property interests of French Polynesia;
- 2 ° Acceptance or rejection of gifts and bequests to benefit of French Polynesia;
- 3 ° Actions to initiate or support on behalf of French Polynesia and trading disputes;
- 4 ° Approval of private airports;
- 5 ° Consolidation of regulations of French Polynesia and annual updating of the codes;
- 6 ° Issuance of work permits and business cards for foreigners;
- 7 ° Order of works budgeted in French Polynesia;
- 8 ° Fishing licenses;
- 9 ° Creation of charges and appointment of public officers and officers government;
- 10 ° Investment of Funds free 23 ° mentioned in section 91;
- 11 ° Assignment of radio frequencies.

Article 93

The Cabinet Secretary, the Assistant Secretaries General, heads of departments, offices or directors of public establishments of French Polynesia, the Commissioners of the Government of French Polynesia with those offices and public institutions and among interest groups public are appointed by the Cabinet. It ended their function under the same conditions. These jobs are left to the decision of the Government of French Polynesia.

are also appointed by the Cabinet, under the statutes of these institutions, or representatives of French Polynesia to the supervisory board of the Central Bank Overseas, the director and the accountant of the Social Welfare Fund and recipients individuals and accounting services and public institutions of French Polynesia, with the exception of public accountant, agent of the State in charge of the pay office of French Polynesia.

Article 94 [Learn more about this article ...](#)

The cabinet may include offenses that it enacts regulations on matters within its competence of administrative sanctions as well as fixed fines, within the framework defined by the Criminal Procedure Code, contraventions and penalties not exceeding the maximum provided for similar offenses by the laws and regulations applicable in criminal matters. The fines are paid to the budget of French Polynesia.

Article 95

The responsibilities of individual ministers to exercise delegated by the president of French Polynesia and in the context of decisions taken by the Cabinet. Each minister is responsible to the Cabinet of business management and, where applicable, the operation of services within the administrative sector of which it is responsible. He holds the Council of Ministers regularly informed.

Article 96

President of French Polynesia and other government leaders talk directly to services in French Polynesia and, under conventions mentioned in Article 169, the heads of State departments all necessary instructions for carrying tasks they assign to those departments. They control the execution of these tasks. They can, under their supervision and responsibility, delegate power of signature to service officials in French Polynesia, to those of state departments and members of their firm.

Article 97

The cabinet is consulted by the minister for overseas or by the High Commissioner on issues and in the following areas:
the preparation of operational plans No relief necessary to address the major risks and disasters coordination and requisition of means contributing to civil security;
2 ° Air services within the jurisdiction of the State;
3 ° of Regulation control of entry and residence of foreigners and issuing of residence permits;
4 ° Creation and Deletion municipalities and their groupings, changes in municipal boundaries, municipalities and associated groups of municipalities; transfer of the chief town of the communes and associated communes;
5 ° Appointment of Public Accountant, State official, in charge of the pay office of French Polynesia.

The cabinet has a period of one month to issue its opinion. This period is fifteen days in case of emergency, at the request of the High Commissioner.

The provisions of this section shall not apply to projects and legislative proposals relating to items and materials listed above, or to projects of Order on these issues and subjects.

Article 98

The Cabinet can make wishes on matters within the jurisdiction of the State. These wishes are published in the Official Journal of French Polynesia.

Article 99

The Cabinet was informed of the projects involved international commitments in the areas of competence of French Polynesia or which relate to the movement of people between French Polynesia and foreign states.

Section 100

The Cabinet is informed of the decisions taken by the authorities of the Republic in monetary matters.

He is informed of the budget, together with its annexes, each of the municipalities of French Polynesia, after adoption by council.

Section 101

It is created with the Cabinet, an advisory committee of the credit.

This committee is composed of equal parts:

1 ° State Representatives;

- 2 ° Representatives of the Government of French Polynesia;
 - 3 ° Representatives of banks and financial conduct business in French Polynesia;
 - 4 ° Representatives of professional organizations and trade unions concerned.
- A decree determines the rules of organization and functioning of the committee.

o Chapter II: The Assembly of French Polynesia

Section 102

The Assembly of French Polynesia by its deliberations the affairs of French Polynesia. The skills of the community in the field of law are exercised by the Assembly of French Polynesia.

All matters are the jurisdiction of French Polynesia are the Assembly of French Polynesia, with the exception of those which are assigned by this organic law in Cabinet or the President of French Polynesia.

The assembly votes on the budget and accounts of French Polynesia.

It controls the action of the President and government of French Polynesia.

Article 103

The Assembly of French Polynesia are elected by direct universal suffrage.

Section 104

The Assembly of French Polynesia consists of fifty-seven members elected for five years and re-elected. It shall be renewed.

The powers of the Assembly of French Polynesia expire at the first meeting of the newly elected under the provisions of the first paragraph of I of Article 107. This provision is not applicable in case of dissolution.

French Polynesia is divided into electoral districts. Each constituency has a minimum representation. This minimum is set to three seats. The seats are divided as follows in the following electoral districts designated:

- 1 ° The electoral district of the Windward Islands includes the municipalities of: Papeete, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Tahiti-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu East, West and Taiarapu Teva I Uta. It elects representatives thirty-seven;
- 2 ° The electoral district of the Leeward Islands, Windward includes the municipalities of: Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea Tumaraa and Uturoa. It shall elect eight representatives;
- 3 ° The electoral district of the Tuamotu islands of the West includes the municipalities of: Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa and Takarua. It elects three representatives;
- 4 ° The electoral Tuamotu and Gambier Islands Eastern includes the municipalities of: Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, and Tatakoto Tureia. It elects three representatives;
- 5 ° The electoral district of the Marquesas Islands includes the municipalities of Fatu-

Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka, and Ua Pou. It elects three representatives;

6 ° The electoral district of the Austral Islands includes the municipalities of: Raivavae, Rapa, Rimatarā, Rurutu and Tubuai. It elects three representatives.

limits of Commons referred to in the foregoing are those resulting from the provisions prevailing at the date of enactment of this organic law.

Article 105 [Learn more about this article ...](#)

I. - The election of representatives to the Assembly of French Polynesia takes place in each constituency, the party-list in a round without addition or deletion of names without changing the order of presentation.

It is assigned to the list who collected the majority of the votes cast a number of seats equal to one third the number of seats rounded to the next whole number.

This award made, the remaining seats are distributed among all lists by proportional representation according to the rule of highest average.

If several lists have the same average for the award of the last seat, it is assigned to the list that obtained the highest number of votes. In case of equal votes, the seat is allocated to the oldest of candidates to be declared elected.

II. - No person shall be eligible for the allocation of seats List with at least 3% of the votes cast.

Seats are allocated to candidates in order of presentation of each list.

Article 106

Each list is composed alternately of a candidate of each sex.

Each list contains a number of candidates equals the number of seats, plus the same number as the number of seats in the limit of ten.

No one shall be candidate on more than one list.

Section 107

I. - Elections for the complete renewal of the Assembly of French Polynesia are organized within two months preceding the expiry of the mandate of the outgoing members.

They are organized within three months after the cancellation of elections overall, the resignation of all members of the assembly or the dissolution of the assembly. This period begins either from the reading of the judgment of the State Council, or the receipt of the resignation by the Chairman of the meeting or after the gazettal of the French Republic the dissolution decree.

Voters are summoned by decree. The decree is published in the Official Journal of French Polynesia at least four weeks before the election date.

II. - When a registered representative at the meeting of French Polynesia becomes vacant for any reason whatsoever shall be filled by candidates from immediately after the last elected on the list which comes from the outgoing member.

When the application This rule does not fill a vacancy, there shall be within three months in a byelection, by FPTP to a tower where the vacancy is for a single seat, the party-list

FPTP where the vacancy focuses on two seats, and under the conditions laid down in Article 105 where the vacancy is on three or more seats. The new representatives are elected for the term of office still to run.

However, no election can take place within six months before the normal expiration of the mandate of the representatives of the Assembly of French Polynesia.

Voters are summoned by order of the High Commissioner after consultation with the President of French Polynesia. The order is published in the Official Journal of French Polynesia at least four weeks before the election date.

Article 108

Are eligible for the assembly of French Polynesia persons aged eighteen years of age, enjoying their civil and political rights, not being in any case of incapacity under the law and registered as a voter in French Polynesia justifying or they qualify to be listed on election day.

Article 109

I. - Are ineligible for the assembly of French Polynesia:

- 1 ° For a year after the court decision declaring the ineligibility, the chairman and members of the assembly, the president of French Polynesia and other government of French Polynesia that have not filed a notification under Title I of Act No. 88-227 of 11 March 1988 on the financial transparency of political life;
- 2 Persons deprived, by decision jurisdictional acquired the force of res judicata, of their right to be elected under laws that permit such deprivation;
- 3 ° The High Commissioners of the Republic, the General Secretaries, Assistant Secretaries General of the High Commission, the directors of the firm high commissioner and the chiefs of administrative subdivisions in exercise or have exercised their functions in French Polynesia for less than three years;
- 4 ° Persons declared ineligible under Article L. 118-3 of the Electoral Code;
- 5 ° The Ombudsman and the Ombudsman for Children, unless they were in the same office prior to their appointment.

II. - Also, can not be elected members of the assembly of French Polynesia where they exercise their functions in French Polynesia or if they have exercised for less than six months:

- 1 ° The judges of administrative courts and courts of justice ;
- 2 ° The members of the inspectorate and state control;
- 3 ° The directors and heads of state service;
- 4 ° The secretary general of the government of French Polynesia and the general secretaries of institutions, general managers, inspectors general, inspectors, directors, deputy directors of French Polynesia or any of its public institutions and the Executive Secretary to the President of French Polynesia.

III. - Do can not be elected members of the Assembly of French Polynesia, exclusively in the district where they hold or have held less than six months since their functions:

- 1 ° The officers of the army, navy and air and members of the gendarmerie in activity in French Polynesia;

- 2 ° Civil servants in active police activity in French Polynesia;
- 3 ° The heads of administrative unit of French Polynesia;
- 4 ° and accounting officers of Polynesia French acting as an official employed at the base, collection and recovery of direct or indirect contributions and payment of public spending of any kind.

Section 110

Employers are required to let their employees candidates for the Assembly of French Polynesia, the time required to participate in the election within ten working days. On the applicant's request, the duration of his absence is charged against that of paid annual leave within the limits of his acquired rights to this title to the election date. When they are not charged to paid annual leave, absences are unpaid, they then give rise to off, in agreement with the employer. The duration of these absences is treated as a period of actual work for the determination of rights to paid leave and the rights associated with seniority.

Section 111

- I. - The mandate of the Representative Assembly of French Polynesia are inconsistent with the 1 ° as President of French Polynesia or member of government or council economic, social and cultural development;
 - 2 ° With the membership of a meeting or an executive of a community special status governed by the first paragraph of Article 72 of the Constitution, a community mentioned in the last paragraph of Article 73 of the Constitution, another community Overseas governed by Article 74 of the Constitution or the community governed by Title XIII of the Constitution, and with that of councilor, regional councilor, councilor of Paris and member of the Corsican Assembly;
 - 3 ° With the functions of a professional soldier or similar on active service or used beyond the statutory period;
 - 4 ° With the functions of judges of administrative courts or courts with judicial and non-elective public office ;
 - 5 ° with the position of director or president of public, when paid.
- II. - A representative at the meeting of French Polynesia may not receive its mandate more than one of the following: councilor, MP or Senator, Representative to the European Parliament.
- If the nominee to replace a representative at the meeting of French Polynesia is located in one of the cases mentioned in this incompatibility II, it has a period of thirty days from the vacancy to end the conflict by resigning from the office or the office of his choice . If no option within the prescribed period, the High Commissioner noted the incompatibility and replacement is provided by the candidate next in the order listed.
- III. - A representative at the meeting of French Polynesia elected in another constituency of French Polynesia ceases by that very fact, represent the first of two constituencies in which he was elected. However, if challenged by the new election, the vacancy is declared that from the decision of the Council of State ruling on the appeal, until the

intervention of this decision, the elect can participate in the meeting under its new mandate alone.

Article 112 [Learn more about this article ...](#)

I. - A representative at the meeting of French Polynesia which will prove the ineligibility after the expiry of the period during which the election may be challenged or who, during the term of office, will be struck by one of the disabilities that lose eligibility to vote is dismissed by order of the High Commissioner on its own motion or on complaint by any elector.

II. - A representative at the meeting of French Polynesia who at the time of his election, is in one case of incompatibility under this title has a period of one month from the date his election becomes final to resign his office or terminate the situation incompatible with the exercise of it. He made known his option in writing to the High Commissioner who shall inform the chairman of the meeting concerned. If no option within the prescribed period, it is deemed to have resigned its mandate; resigning is established by order of the High Commissioner on its own motion or on complaint by any elector.

If the cause of incompatibility occurs after the election, the right of option is open under the same conditions. A default option within one month from the date on which occurred the grounds of incompatibility, the representative at the meeting of French Polynesia is dismissed from his office by the High Commissioner is of own motion or on complaint by any elector.

Article 113

I. - The representative at the meeting of French Polynesia who is a public official at the time of his election is placed outside the framework of the administration or body to which he belongs as provided by statute or the contract that governs it. It is, at the expiration of his term, returned to his request, as appropriate, within the framework or body to which he belonged before his election to the Assembly of French Polynesia, possibly redundant, or business public sector that employed under a public law or private law.

II. - When the representative to the Assembly of French Polynesia has employee status at the time of his election, he may receive, upon request, a suspension of his employment contract. This demand is satisfied automatically when the employee is, on the date of the election, a minimum length of one year in the company.

Section 114

The resignation of a representative at the meeting of French Polynesia is addressed to the chairman of the meeting, which shall immediately inform the High Commissioner and President of French Polynesia. This resignation is effective upon receipt by the chairman of the meeting.

Section 115

The representative at the meeting of French Polynesia is missing in a regular session without lawful excuse accepted by the Assembly of French Polynesia is said to have resigned from the Assembly at the last meeting of the session.

The representative Assembly of French Polynesia alleged absentee within the meaning of section 112 of the Civil Code is temporarily replaced at the meeting, when the intervention of the judgment establishing the presumption of absence, the candidate coming immediately after the last elected on the list which comes from the alleged missing.

Section 116

Elections for the Assembly of French Polynesia may be appealed within fifteen days after the declaration of results by any candidate or any elector of the constituency before the Council of State decision in litigation.

The same right is open to the top Commissioner being satisfied that the conditions and manner prescribed by law were not met.

The proclamation of the candidate to become the representative assembly of French Polynesia by applying the first paragraph of II of Article 107 can be challenged within fifteen days from the date on which the candidate has replaced the representative to the Assembly of French Polynesia, whose seat became vacant.

A finding by the State Council of the ineligibility of one or more candidates will entail the annulment of the election as the elected or declared ineligible. The State Council proclaimed the election as a result of or following list.

representative to the Assembly of French Polynesia, whose election is contested remain in office until he was finally disposed of the claim.

Section 117

Appeals against the Orders referred to in section 112 proceedings and cons mentioned in Article 115 shall be brought before the Council of State decision in litigation. They have suspensive effect. However, the appeal does not suspend the meeting when a representative of French Polynesia is said to have resigned after a criminal conviction became final order passed against him and thereby causing the loss of his civil rights, civil and family.

Section 118

The Assembly of French Polynesia to the siege the capital of French Polynesia. It can, for some sessions, fix another venue.

It meets on the second Thursday following the election of its members, chaired by its oldest member.

Article 119

The Assembly of French Polynesia holds two regular sessions each year that open automatically on dates and durations set at the beginning of the term by a discussion. The sessions are opened and closed as provided in the bylaws the Assembly of French Polynesia. If the meeting does not meet under the foregoing provisions, the High Commissioner gives notice of its president to convene thereof within forty-eight hours. Otherwise, the High Commissioner shall call the meeting in regular session.

Section 120

The Assembly of French Polynesia to hold a special meeting convened by its chairman as a result of the application is submitted in writing either by the president of French Polynesia, either by an absolute majority of its members or by the High Commissioner in exceptional circumstances.

The application includes the opening date and the agenda of the session. The application by the President of French Polynesia or the majority of representatives of the Assembly of French Polynesia is notified to the High Commissioner.

If the Assembly of French Polynesia has not met on the appointed day by the application, the High Commissioner gives notice to the chairman of the meeting to proceed with the convening thereof within forty-eight hours. If the meeting does not meet this deadline, the High Commissioner shall call the meeting in special session immediately.

The duration of each session may not exceed one month.

the cumulative duration of special sessions held between sessions ordinary not exceed two months.

The provisions of the two preceding paragraphs are not applicable to special sessions at the request of the High Commissioner.

Section 121

The Assembly of French Polynesia annually elects its chairman and officers to the proportional representation of political groups and under conditions established by its rules.

Section 122

The Assembly of French Polynesia can only make decisions if more than half of its current members are present at the opening of the session.

If a quorum is not present at the opening of the session, it is to the next day, Sunday and holidays not included and can then be held regardless of the number present.

In the cases described in the previous two paragraphs, the names of absentees are registered in the minutes.

Voting by proxy is authorized within the limits of a representative by proxy at the meeting of French Polynesia. However, it is forbidden for the election of the President of French Polynesia, the President and Officers of the Assembly of French Polynesia and to vote on a censure motion.

Section 123

The Assembly of French Polynesia establish its own procedure. These regulations establish rules of operation that are not provided in this title. It is published in the Official Journal of French Polynesia. It can be referred to the Council of State decision in litigation.

Section 124

The conditions for the formation and operation of political groups and the means available to them are determined by the rules.

Section 125

The Assembly of French Polynesia sets the agenda of its meetings, subject to the provisions of section 153, and establishes a record of each meeting.

Section 126

The representatives of the Assembly of French Polynesia receive a monthly allowance in an amount fixed by the Assembly by reference to the treatment of public officials in French Polynesia. This allowance is paid until the first meeting of the assembly in the second paragraph of Article 118.

This allowance may be combined with that of member of Parliament in accordance with the conditions laid down by Article 4 of Ordinance No. 58-1210 of 13 December 1958 organic law on the compensation of members of Parliament.

The Assembly of French Polynesia also sets the conditions for reimbursement of travel expenses and mission and the welfare regime officials the assembly of French Polynesia, and the amount of the allowance for representation expenses allocated to eventually chairman of the meeting and the Chairman of the Standing Committee.

The Assembly of French Polynesia provides, in its rules Inside, the conditions under which all or part of the compensation mentioned in the first subparagraph to select if a representative at the meeting of French Polynesia has been absent without valid excuse for a specified number of meetings of the assembly or its commissions.

Section 127

I. - The Assembly of French Polynesia elect annually from among its members the standing committee, the proportional representation of groups according to the system the highest average.

The Standing Committee shall elect a chairperson, vice-president and secretary. This vote is personal.

The Standing Committee shall adopt its agenda, subject to the provisions of section 153.

II. - Between sessions, the Standing Committee:

Rule 1 deliberates on matters that were referred by the Assembly of French Polynesia or

that are addressed directly by the government of French Polynesia, where it has declared emergency

2 ° Emits opinion on the texts for which the consultation of the Assembly of French Polynesia by the State is planned;

3 ° Adopt the resolutions referred to in Article 133 and Article 135.

It does not have jurisdiction to adopt the acts referred to in Article 140 referred to as "laws", the annual budget and the administrative account of French Polynesia, to rule on the motion of censure or to decide to call a referendum local.

It may make transfers from one chapter to another if such transfers occur within the same section of the budget and if kept within a quarter of Staffing each of the chapters concerned. It may nevertheless open credits corresponding to resources beyond this limit.

III. - The rules of the House shall determine the operating conditions of the standing committee.

Section 128

The sessions of the Assembly of French Polynesia are public unless the Assembly decides otherwise by an absolute majority of members present or represented. The President may decide that a meeting will be broadcast by means of audiovisual communication.

Sittings of the Assembly of French Polynesia are the subject of a full report published in the Official Journal of French Polynesia.

Section 129

The Assembly of French Polynesia has financial autonomy. The budget of the Assembly of French Polynesia is presented and executed in the same manner and under the same rules as those applicable to the budget of French Polynesia. Amendments are approved by the office of the assembly, within the same limits as those laid down by the last paragraph of II of Article 127.

Its president is the budget officer of the meeting and may delegate its powers of authorizing officer a quaestor. He can make a requisition order to the accounting of French Polynesia in the conditions laid down in Article LO 274-5 of the Code of Financial Jurisdictions, but can not delegate this authority.

necessary appropriations to the budget of the assembly are the subject of proposals prepared by a commission whose members are appointed by the Assembly of French Polynesia. The proposals are arrested and sent to the President of French Polynesia, on or before October 15, and included in the proposed budget of French Polynesia which is annexed an explanatory report.

Progression from one year to the next budget functioning of the assembly can not exceed that at constant representation of the expected evolution of ordinary income as reported to the Assembly, no later than October 1, by the President of French Polynesia.

Section 130

A representative at the meeting of French Polynesia has the right, as part of its function, to be informed of matters that are the subject of a project or a proposed act under section 140 called "law of the country" or other proceedings.

To this end, the representatives shall receive at least twelve days before the meeting for a project or a proposed act provided for in Article 140 referred to as "law of the land" and four days before the meeting for a project or a proposal for another discussion, a report on each of the items on the agenda.

Section 131

One session per month at least precedence shall be given to questions and answers of representatives of the President and cabinet members.

Section 132

The Assembly of French Polynesia may establish commissions of inquiry made to the proportional representation of political groups that compose it.
The system of commissions of inquiry is defined by a decision of the Assembly of French Polynesia.

Section 133

In matters within the jurisdiction of the State, the Assembly of French Polynesia or its Standing Committee may adopt resolutions tending either to extend the laws or regulations in force in the metropolis, or to repeal, amend or supplement the laws or regulatory requirements applicable in French Polynesia.
These resolutions are addressed, as appropriate, by the President of the Assembly of French Polynesia or its Standing Committee to the President of French Polynesia and the High Commissioner. It transmits them to the minister for overseas territories.
These resolutions are published in the Official Journal of French Polynesia.

Section 134

The Assembly of French Polynesia is available on the creations and deletions common in French Polynesia.
It is also available, in case of disagreement the Cabinet of French Polynesia or municipal councils concerned, on the Boundary Adjustment communes and municipalities involved and the transfer of their capital.

Section 135

The High Commissioner shall submit to the Assembly of French Polynesia's legislative proposals of the European Communities and the European Union which relate to the association of overseas countries in the European Community.

The assembly of French Polynesia can vote on resolutions, which are addressed by its president to the president of French Polynesia and the High Commissioner.

Section 136

The President has sole police of the assembly in the enclosure thereof. It can be expelled from the Chamber any person who disturbs order. In cases of flagrant offense or crime, he can make arrests, he shall make a report and the prosecutor is immediately seized. If necessary, the Chair of the Assembly of French Polynesia can appeal to the High Commissioner to ensure the cooperation of the police.

Article 137

The chairman of the meeting of French Polynesia appoints the officers of the assembly. Agents are recruited in accordance with the rules applicable to staff employed by the services of French Polynesia. All acts of management of such personnel are made by the chairman of the meeting.

President of the Assembly of French Polynesia decides to bring or defend actions before the courts on behalf of the Assembly of French Polynesia without prejudice to the provisions of 25 of section 91.

Section 138

The chairman of the meeting of French Polynesia may delegate his signature to the vice-presidents, heads of administrative departments and members of his cabinet.

Section 139

The Assembly of French Polynesia adopts acts specified in Article 140 referred to as "laws" and deliberation.

Section 140

The proceedings of the Assembly of French Polynesia, called "laws" on which the State Council shall exercise specific judicial, are those who, in the field of law, is within the jurisdiction of Polynesia French, or are made under the participation of French Polynesia to the powers of the State and are involved in the following subjects:

- 1 Civil Law;
- 2 Fundamentals of trade obligations;
- Plate 3, rate and methods of collection of charges of any kind;
- 4 ° Employment law, labor law and social security, including access to foreign labor;
- 5 ° Right of Public Health;
- 6 ° Right to social action and families;
- 7 ° Fundamental guarantees granted to civil servants in French Polynesia;
- 8 ° Right to development and urban planning;

- 9 ° Environmental Law;
 - 10 ° Right lands of French Polynesia;
 - 11 ° Mining Law;
 - 12 ° Rules to local employment, pursuant to Article 18;
 - 13 ° Rules for the declaration of inter vivos transfers of land and buildings situated in French Polynesia and the right of first refusal by French Polynesia, pursuant to Article 19;
 - 14 ° Relations between French Polynesia and municipalities provided for in Section 6 of Chapter I of Title III;
 - 15 ° Agreements concluded under article 39, when working in the field of competence defined by the this section, and
 - 16 ° Rules for publication of the acts of the institutions of French Polynesia;
 - 17 ° Substances referred to in Article 31.
- Measures taken on the basis of this Article may apply, when the public interest justifies it, current contracts.

Article 141

The initiative of the acts mentioned in Article 140 referred to as "laws" and other proceedings rests with both the government and representatives of the Assembly of French Polynesia.

Projects of the acts mentioned in Article 140 referred to as " laws "are submitted for opinion to the High Council of French Polynesia before adoption by the Cabinet. Proposals for acts specified in Article 140 referred to as "laws" are submitted for opinion to High Council of French Polynesia before the first reading. The vote of the Assembly of French Polynesia can not occur before the high council has given its opinion. In an emergency, at the request of the President of French Polynesia or the chairman of the meeting, the notice is deemed given if it is not reached within a month. Any project or proposal act provided for in Article 140 referred to as "law of the country" or else deliberation is accompanied by an explanatory memorandum.

Section 142

On each project or proposed act provided for in Article 140 referred to as "law of the country", a rapporteur is appointed by the Assembly of French Polynesia from among its members.

No project or proposed act provided for in Article 140 referred to as "law of the country" can not be introduced for debate and vote unless it has previously been the subject of a written report, in accordance with Article 130, filed, printed and published under the conditions set by the rules.

Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.

Article 143

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont

transmis, par leur président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française dans un délai de huit jours.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays », le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables.

Article 144

I. - Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel.

Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a expressément décidé.

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

II. - Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article LO 273-1 du code des juridictions financières. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article LO 273-2 du même code.

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article LO 273-3 du même code.

Article 145

Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en

vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.

Article 146

Est nul tout acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, pris hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Article 147

Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française.

Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

Article 148

Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 111 et au 4° du II de l'article 109.

Article 149

Des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française fixent :

- 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel ;
- 2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;
- 3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;
- 4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;
- 5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ;
- 6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique.

Article 150

Le conseil économique, social et culturel élit son président.

Il se réunit à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres. Ses séances sont publiques.

Il adopte son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Article 151

I. - Le conseil économique, social et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française.

II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social ou culturel.

Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

III. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

IV. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

Article 152

Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.

Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

Article 153

Le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l'ordre du jour de l'assemblée de

la Polynésie française par dérogation aux dispositions de l'article 125, ou à l'ordre du jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 127, les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou les projets de délibérations dont il estime la discussion urgente.

Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.

Le président de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

Article 154

En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée.

Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé de l'outre-mer.

Le président de la Polynésie française et les ministres assistent de droit aux séances de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

Article 155

Le président de la Polynésie française adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la session budgétaire ;

2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière de la Polynésie française et sur l'état de ses différents services.

Article 156

L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure.

L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la

Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

Article 157

Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française. L'assemblée de la Polynésie française peut également être dissoute, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française. La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement. Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

- **Section 1 : Pétition des électeurs de la Polynésie française**

Article 158

L'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence. La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale. La pétition est adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Lorsque la pétition est recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.

- **Section 2 : Référendum local en Polynésie française**

Article 159 [En savoir plus sur cet article...](#)

I. - L'assemblée de la Polynésie française peut, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004] soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part,

des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre des articles 133 et 135.

Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.

II. - L'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres selon le cas, par une même délibération ou un même arrêté, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

Le président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent.

Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégal. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004.]

III. - La délibération ou l'arrêté organisant un référendum local est notifié, dans les quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

V. - La Polynésie française ne peut organiser de référendum local :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;

2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

- l'élection du Président de la République ;
- un référendum décidé par le Président de la République ;
- une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;
- le renouvellement général des députés ;
- le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;
- l'élection des membres du Parlement européen ;
- le renouvellement général des conseils municipaux.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.

La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

VI. - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie française.

VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la Polynésie française est mis à disposition du public.

VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit. Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

- les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;
- les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

X. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :

1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio

est mise à la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la Polynésie française ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.

Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévision et cinq minutes à la radio ;

3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

XI. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.

XII. - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées sur les bulletins sont relevées » au lieu de : « les noms portés sur les bulletins sont relevés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

XIII. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° des I, II et III de l'article L. 113-1.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

XIV. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392

dudit code.

XV. - La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 116 de la présente loi organique pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

XVI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 160 [En savoir plus sur cet article...](#)

Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 161

La Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 162

La Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, aux ministres ou au président de l'assemblée de la Polynésie française, ou à toute personne ayant cessé d'exercer l'une de ces fonctions, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions.

Le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique.

La Polynésie française est tenue de protéger le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Article 163

Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », des délibérations et des actes réglementaires.

Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et sur les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » qui lui sont soumis par le gouvernement.

Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis à l'autorité qui l'a saisi et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

Il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Avec l'accord du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d'une disposition législative, dans une matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d'Etat.

Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont destinés.

Article 164

Le président et les membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire n'exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et n'y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.

Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

Article 165

Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre.

- **Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République**

Article 166 [En savoir plus sur cet article...](#)

Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

Article 167

A défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes

ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.

- **Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française**

Article 168

La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170.

- **Chapitre III : Des concours de l'Etat**

Article 169

A la demande de la Polynésie française et par conventions, l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.

Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

Article 170

Pour l'enseignement secondaire, l'Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.

- **Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif**

Article 171 [En savoir plus sur cet article...](#)

I. - Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente.

La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

A. - Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18°, 20°, 23°, 24° et 26° à 28° de l'article 91 ;

3° Les autorisations individuelles d'occupation des sols ;

4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;

5° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ;

7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française ;

8° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

B. - Pour l'assemblée de la Polynésie française :

1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », et celles prises par sa commission permanente par délégation de l'assemblée ;

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'assemblée ;

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

III. - Les actes pris au nom de la Polynésie française autres que ceux qui sont

mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

IV. - Les actes pris par les institutions de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

V. - Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République.

VI. - Le président de la Polynésie française, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le président de la commission permanente, le président du conseil économique, social et culturel certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Article 172

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social et culturel, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un magistrat du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de

quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents rendus sur recours du haut-commissaire est présenté par celui-ci.

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

Article 173 [En savoir plus sur cet article...](#)

Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Polynésie française peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 172.

Pour les actes mentionnés au II de l'article 171, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172.

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III de l'article 171, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

Article 174

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.

Article 175

Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie

française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.

- **Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays »**

Article 176

I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 178.

III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.

Article 177

Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée.

Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'assemblée de la Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa.

Article 178

A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 177, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas dudit article.

Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est publié, pour information, au Journal officiel de la République française.

Article 179

Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au

Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

Article 180

Les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation.

Lorsque le Conseil d'Etat a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à l'article 140, les dispositions d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'Etat est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois mois.

- **Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française**

Article 181

Le président de l'assemblée de la Polynésie française porte à la connaissance des membres de celle-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.

- **Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes**

Article 182

Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil économique, social et culturel. Ces contrôles sont organisés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 183

Le contrôle exercé par le comptable de la Polynésie française sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article LO 274-4 du code des

juridictions financières.

Les autres modalités du contrôle sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article LO 274-5 du même code.

Article 184

Devant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française qui statue par voie de jugement, les comptables de la Polynésie française et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article LO 272-32 du code des juridictions financières.

Article 185 [En savoir plus sur cet article...](#)

Le jugement des comptes de la Polynésie française et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

Article 186

Le titre VII du livre II (partie Législative) du code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. - L'article LO 272-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »

II. - Après la section 4 du chapitre II, il est inséré une section 4 bis intitulée « Du contrôle de certaines conventions », comprenant un article LO 272-38-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 272-38-1. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.

« L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est

informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. »

III. - L'article LO 272-40 est ainsi rédigé :

« Art. LO 272-40. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. »

IV. - Après l'article L. 272-41-1, il est inséré un article LO 272-41-2 ainsi rédigé :

« Art. LO 272-41-2. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édition entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française. »

Article 187

La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède au territoire de la Polynésie française dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations.

La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à la Polynésie française en application des dispositions de la présente loi organique.

Article 188

Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 47, à l'exception de la zone économique exclusive, en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.

Article 189

L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 190

I. - Les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur en Polynésie française à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

II. - Dans toutes les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur :

1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er ;

2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième alinéa du même article ;

3° La référence au président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au président de la Polynésie française ;

4° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République ;

5° La référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

III. - Les dispositions législatives applicables, à la date de publication de la présente loi organique, aux pouvoirs des agents des services d'Etat transférés, en tout ou en partie, à la Polynésie française, continuent de s'appliquer.

Article 191

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Dans le troisième alinéa de l'article 9, les mots : « de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de » sont remplacés par les mots : « de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou de membre de » ;

2° Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans. »

Article 192 [En savoir plus sur cet article...](#)

Le treizième alinéa (8°) de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est ainsi rédigé :

« 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; ».

Article 193

I. - Avant l'article L. 385 du code électoral, il est inséré un article LO 384-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 384-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :

« a) "Nouvelle-Calédonie au lieu de : "département ;

- « b) "haut-commissaire de la République et "services du haut-commissaire de la République au lieu de : "préfet et "préfecture ;
- « c) "commissaire délégué de la République au lieu de : "sous-préfet ;
- « 2° Pour la Polynésie française :
 - « a) "Polynésie française au lieu de : "département ;
 - « b) "haut-commissaire de la République et "services du haut-commissaire de la République au lieu de : "préfet et "préfecture ;
 - « c) "chef de subdivision administrative au lieu de : "sous-préfet ;
 - « d) "tribunal de première instance au lieu de : "tribunal d'instance et de : "tribunal de grande instance ;
- « 3° Pour les îles Wallis et Futuna :
 - « a) "Wallis et Futuna au lieu de : "département ;
 - « b) "administrateur supérieur et "services de l'administrateur supérieur au lieu de : "préfet et "préfecture ;
 - « c) "chef de circonscription territoriale au lieu de : "sous-préfet. »

II. - Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 394, il est inséré un article LO 393-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 393-1. - Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie.

« Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française.

« Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après l'article L. 394, sont insérés deux articles LO 394-1 et LO 394-2 ainsi rédigés :

« Art. LO 394-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier, à l'exception de l'article LO 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. LO 394-2. - Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. »

III. - Avant l'article L. 407 du même code, il est inséré un article LO 406-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 406-1. - La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

« Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

« Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

« La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

« 1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Faa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Tairapu-

Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;

« 2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;

« 3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;

« 4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;

« 5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;

« 6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.

« Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

« Art. 105. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.

« Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Art. 106. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix.

« Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Art. 107. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

« Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.

« Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

« Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

« Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« Art. 108. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.

« Art. 109. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

« 5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

« 3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;

« 4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

« III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

« 1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

« 2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

« 3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

« 4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

« Art. 110. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

« Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

« La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.

« Art. 111. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

« 1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

« II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

« Art. 112. - I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont

l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

« II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Art. 113. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.

« II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.

« Art. 114. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.

« Art. 115. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.

« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Art. 116. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie

française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. 117. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille. »

IV. - Dans le titre Ier du livre V du même code, après l'article L. 392, il est inséré un article LO 392-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 392-1. - Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

« Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

« Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 194

I. - Au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « ou des communautés de communes et » sont remplacés par les mots : « les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française et ».

II. - Dans le I du même article, les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer » et les mots : « territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « d'une même collectivité d'outre-mer ».

III. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi. »

Article 195

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions

d'exercice des mandats locaux, les mots : « des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ».

Article 196

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment :

1° En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :

- a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Etablissements français de l'Océanie ;
 - b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;
 - c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;
 - d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
- 2° Les articles 1er à 12 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
- 3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
- 4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
- 5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;
- 6° Les articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
- 7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ;
- 8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- 9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;
- 10° L'article 1er de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Article 197

I. - Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Polynésie française expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A prévue par l'article LO 276 du code électoral.

II. - Le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de

l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de la promulgation de la présente loi organique deviennent de plein droit, respectivement, président de la Polynésie française, membres du gouvernement de la Polynésie française et représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Ils exercent immédiatement, jusqu'à l'expiration de leur mandat, les attributions qui leur sont conférées par la présente loi organique.

Article 198

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi organique.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 février 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'écologie
et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de la culture
et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

(1) Loi n° 2004-192.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi organique n° 38 (2003-2004) ;

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 107 (2003-2004) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 18 décembre 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n° 1323 ;

Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, n° 1336 ;

Discussion les 13 et 14 janvier 2004 et adoption le 14 janvier 2004.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 150 (2003-2004) ;

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 169 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 29 janvier 2004.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1373 ;

Discussion et adoption le 29 janvier 2004.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.



LES ACCORDS DE NOUMEA

PARTENAIRES	2
PREAMBULE	4
ACCORD	8
1 – L'IDENTITE KANAK.....	8
1.1. – <i>Le statut civil particulier</i>	8
1.2. – <i>Droit et structures coutumières</i>	8
1.3. – <i>Le patrimoine culturel</i>	9
1.4. – <i>La terre</i>	10
1.5. – <i>Les symboles</i>	10
2 – LES INSTITUTIONS.....	11
2.1. – <i>Les assemblées</i>	11
2.2. – <i>Le corps électoral et le mode de scrutin</i>	12
2.3. – <i>L'Exécutif</i>	12
2.4. – <i>Les communes</i>	13
3 – LES COMPETENCES.....	13
3.1. – <i>Les compétences nouvelles conférées à la Nouvelle-Calédonie</i>	13
3.2. – <i>Les compétences partagées</i>	15
3.3. – <i>Les compétences régaliennes</i>	16
4 – LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL.....	16
4.1. – <i>La formation des hommes</i>	16
4.2. – <i>Le développement économique</i>	17
4.3. – <i>La politique sociale</i>	18
4.4. – <i>Le contrôle des outils de développement</i>	18
5 – L'EVOLUTION DE L'ORGANISATION POLITIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE.....	18
6.1. – <i>Textes</i>	19
6.2. – <i>Consultations</i>	19
6.3. – <i>Scrutin de 1998</i>	19
6.4. – <i>Elections aux assemblées de province et au Congrès</i>	19
6.5. – <i>Comité des signataires</i>	20

Partenaires

L'Accord de Nouméa, préambules et document d'orientation ont recueilli l'approbation des partenaires des accords de Matignon, traduisant la fin de la négociation, qui s'est déroulée en présence de M. Dominique BUR, Délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République.

Les partenaires procéderont aux informations et aux consultations nécessaires avant leur signature, par le Premier Ministre et les signataires, le 5 mai 1998.

Pour le F.L.N.K.S.

*Pour le Gouvernement,
ses représentants sur place*

Pour le R.P.C.R.



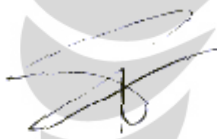
Rock WAMYTAN



Alain CHRISTNACHT



Jacques LAFLEUR



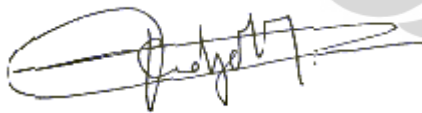
Paul NEAOUTYINE



Thierry LATASTE



Pierre FROGIER



Charles PIDJOT



Simon LOUECKHOTE



Victor TUTUGORO

Harold MARTIN

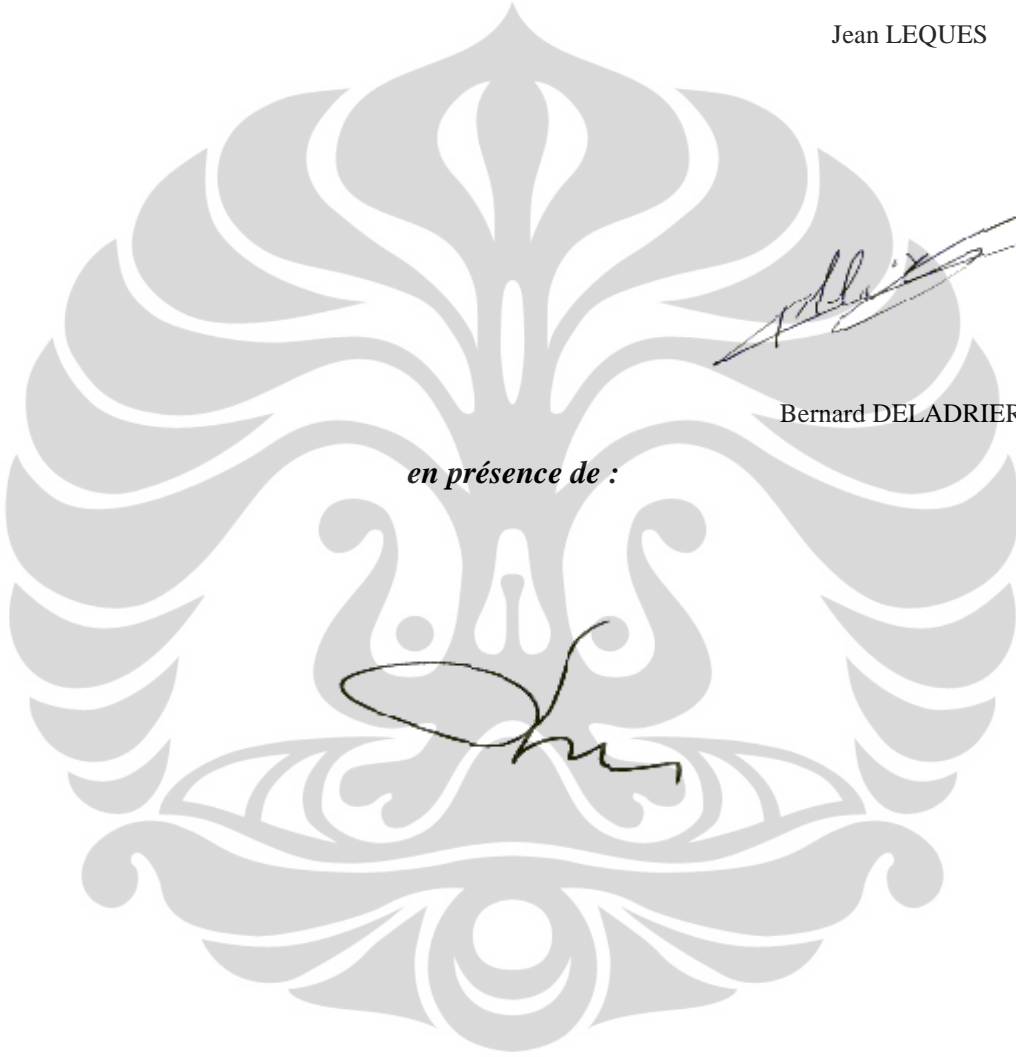


Jean LEQUES



Bernard DELADRIERE

en présence de :



Préambule

1 – Lorsque la France prend possession de la Grande Terre, que James Cook avait dénommée "Nouvelle-Calédonie", le 24 septembre 1853, elle s'approprie un territoire selon les conditions du droit international alors reconnu par les nations d'Europe et d'Amérique, elle n'établit pas des relations de droit avec la population autochtone. Les traités passés, au cours de l'année 1854 et les années suivantes, avec les autorités coutumières, ne constituent pas des accords équilibrés mais, de fait, des actes unilatéraux.

Or, ce Territoire n'était pas vide.

La Grande Terre et les Iles étaient habités par des hommes et des femmes qui ont été dénommés Kanak. Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses traditions, ses langues, la coutume qui organisait le champ social et politique. Leur culture et leur imaginaire s'exprimaient dans diverses formes de création.

L'identité kanak était fondée sur un lien particulier à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport spécifique avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière, et gardait la mémoire de l'accueil d'autres familles. Les noms que la tradition donnait à chaque élément du paysage, les tabous marquant certains d'entre eux, les chemins coutumiers structuraient l'espace et les échanges.

2 – La colonisation de la Nouvelle-Calédonie s'est inscrite dans un vaste mouvement historique où les pays d'Europe ont imposé leur domination au reste du monde.

Des hommes et des femmes sont venus en grand nombre, aux XIX^{ème} et XX^{ème} siècles, convaincus d'apporter le progrès, animés par leur foi religieuse, venus contre leur gré ou cherchant une seconde chance en Nouvelle-Calédonie. Ils se sont installés et y ont fait souche. Ils ont apporté avec eux leurs idéaux, leurs connaissances, leurs espoirs, leurs ambitions, leurs illusions et leurs contradictions.

Parmi eux certains, notamment des hommes de culture, des prêtres ou des pasteurs, des médecins et des ingénieurs, des administrateurs, des militaires, des responsables politiques ont porté sur le peuple d'origine un regard différent, marqués par une plus grande compréhension ou une réelle compassion.

Les nouvelles populations sur le Territoire ont participé, dans des conditions souvent difficiles, en apportant des connaissances scientifiques et techniques, à la mise en valeur minière ou agricole et, avec l'aide de l'Etat, à l'aménagement de la Nouvelle-Calédonie. Leur détermination et leur inventivité ont permis une mise en valeur et jeté les bases du développement.

La relation de la Nouvelle-Calédonie avec la métropole lointaine est demeurée longtemps marquée par la dépendance coloniale, un lien univoque, un refus de

reconnaître les spécificités, dont les populations nouvelles ont aussi souffert dans leurs aspirations.

3 – Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière.

Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d'origine.

Des clans ont été privés de leur nom en même temps que de leur terre. Une importante colonisation foncière a entraîné des déplacements considérables de population, dans lesquels des clans kanak ont vu leurs moyens de subsistance réduits et leurs lieux de mémoire perdus. Cette dépossession a conduit à une perte des repères identitaires.

L'organisation sociale kanak, même si elle a été reconnue dans ses principes, s'en est trouvée bouleversée. Les mouvements de population l'ont déstructurée, la méconnaissance ou des stratégies de pouvoir ont conduit trop souvent à nier les autorités légitimes et à mettre en place des autorités dépourvues de légitimité selon la coutume, ce qui a accentué le traumatisme identitaire.

Simultanément, le patrimoine artistique kanak était nié ou pillé.

A cette négation des éléments fondamentaux de l'identité kanak, se sont ajoutées des limitations aux libertés publiques et une absence de droits politiques, alors même que les kanak avaient payé un lourd tribut à la défense de la France, notamment lors de la première guerre mondiale.

Les kanak ont été repoussés aux marges géographiques, économiques et politiques de leur propre pays, ce qui ne pouvait, chez un peuple fier et non dépourvu de traditions guerrières, que provoquer des révoltes, lesquelles ont suscité des répressions violentes, aggravant les ressentiments et les incompréhensions.

La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leurs raisons de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun.

4 – La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps.

Les communautés qui vivent sur le Territoire ont acquis par leur participation à l'édification de la Nouvelle-Calédonie une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Elles sont indispensables à son équilibre social et au fonctionnement de son économie et de ses institutions sociales. Si l'accession des kanak aux responsabilités demeure insuffisante et doit être

accrue par des mesures volontaristes, il n'en reste pas moins que la participation des autres communautés à la vie du Territoire lui est essentielle.

Il est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d'origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun.

La taille de la Nouvelle-Calédonie et ses équilibres économiques et sociaux ne permettent pas d'ouvrir largement le marché du travail et justifient des mesures de protection de l'emploi local.

Les accords de Matignon signés en juin 1988 ont manifesté la volonté des habitants de Nouvelle-Calédonie de tourner la page de la violence et du mépris pour écrire ensemble des pages de paix, de solidarité et de prospérité.

Dix ans plus tard, il convient d'ouvrir une nouvelle étape, marquée par la pleine reconnaissance de l'identité kanak, préalable à la refondation d'un contrat social entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, et par un partage de souveraineté avec la France, sur la voie de la pleine souveraineté.

Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité, dans un destin commun.

La France est prête à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie.

5 - Les signataires des accords de Matignon ont donc décidé d'arrêter ensemble une solution négociée, de nature consensuelle, pour laquelle ils appelleront ensemble les habitants de Nouvelle-Calédonie à se prononcer.

Cette solution définit pour vingt années l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son émancipation.

Sa mise en œuvre suppose une loi constitutionnelle que le gouvernement s'engage à préparer en vue de son adoption au Parlement.

La pleine reconnaissance de l'identité kanak conduit à préciser le statut coutumier et ses liens avec le statut civil des personnes de droit commun, à prévoir la place des structures coutumières dans les institutions, notamment par l'établissement d'un Sénat coutumier, à protéger et valoriser le patrimoine culturel kanak, à mettre en place de nouveaux mécanismes juridiques et financiers pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre, tout en favorisant sa mise en valeur, et à adopter des symboles identitaires exprimant la place essentielle de l'identité kanak du pays dans la communauté de destin acceptée.

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie traduiront la nouvelle étape vers la souveraineté : certaines des délibérations du Congrès du territoire auront valeur législative et un Exécutif élu les préparera et les mettra en œuvre.

Au cours de cette période, des signes seront donnés de la reconnaissance progressive d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci devant

traduire la communauté de destin choisie et pouvant se transformer, après la fin de la période, en nationalité, s'il en était décidé ainsi.

Le corps électoral pour les élections aux assemblées locales propres à la Nouvelle-Calédonie sera restreint aux personnes établies depuis une certaine durée.

Afin de tenir compte de l'étroitesse du marché du travail, des dispositions seront définies pour favoriser l'accès à l'emploi local des personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie.

Le partage des compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée. Il sera progressif. Des compétences seront transférées dès la mise en œuvre de la nouvelle organisation. D'autres le seront selon un calendrier défini, modulable par le Congrès, selon le principe d'auto-organisation. Les compétences transférées ne pourront revenir à l'Etat, ce qui traduira le principe d'irréversibilité de cette organisation.

La Nouvelle-Calédonie bénéficiera pendant toute la durée de mise en œuvre de la nouvelle organisation de l'aide de l'Etat, en termes d'assistance technique et de formation et des financements nécessaires, pour l'exercice des compétences transférées et pour le développement économique et social.

Les engagements seront inscrits dans des programmes pluriannuels. La Nouvelle-Calédonie prendra part au capital ou au fonctionnement des principaux outils du développement dans lesquels l'Etat est partie prenante.

Au terme d'une période de vingt années, le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité seront proposées au vote des populations intéressées.

Leur approbation équivaldrait à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

ACCORD

1 – L'identité kanak

L'organisation politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie doit mieux prendre en compte l'identité kanak.

1.1. – Le statut civil particulier

Certains Kanak ont le statut civil de droit commun sans l'avoir souhaité.

Le statut civil particulier est source d'insécurité juridique et ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à certaines situations de la vie moderne.

En conséquence, les orientations suivantes sont retenues :

- le statut civil particulier s'appellera désormais "statut coutumier" ;
- toute personne pouvant relever du statut coutumier et qui y aurait renoncé, ou qui s'en serait trouvé privé à la suite d'une renonciation faite par ses ancêtres ou par mariage ou par toute autre cause (cas des enfants inscrits en métropole sur l'état-civil) pourra le retrouver. La loi de révision constitutionnelle autorisera cette dérogation à l'article 75 de la Constitution ;
- les règles relatives au statut coutumier seront fixées par les institutions de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions indiquées plus loin ;
- le statut coutumier distinguera les biens situés dans les "terres coutumières" (nouveau nom de la réserve), qui seront appropriés et dévolus en cas de succession selon les règles de la coutume et ceux situés en dehors des terres coutumières qui obéiront à des règles de droit commun.

1.2. – Droit et structures coutumières

1.2.1. – Le statut juridique du procès-verbal de palabre (dont le nom pourrait être modifié) doit être redéfini, pour lui donner une pleine force juridique, en fixant sa forme et en organisant une procédure d'appel permettant d'éviter toute contestation ultérieure. Le rôle de syndic des affaires coutumières, actuellement tenu par les gendarmes, sera exercé par un autre agent, par exemple de la commune ou de l'aire coutumière.

La forme du procès-verbal de palabre sera définie par le Congrès en accord avec les instances coutumières (voir plus bas). L'appel aura lieu devant le conseil d'aire et l'enregistrement se fera par le conseil d'aire ou la mairie.

1.2.2. – Le rôle des aires coutumières sera valorisé, notamment en confiant aux conseils d'aires un rôle dans la clarification et l'interprétation des règles coutumières. Plus généralement, l'organisation spatiale de la Nouvelle-Calédonie devra mieux tenir compte de leur existence. En particulier les limites communales devraient pouvoir tenir compte des limites des aires.

1.2.3. – Le mode de reconnaissance des autorités coutumières sera précisé pour garantir leur légitimité. Il sera défini par l'instance coutumière de la Nouvelle-

Calédonie (voir plus bas). Notification en sera faite au représentant de l'Etat et à l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie qui ne pourront que l'enregistrer. Leur statut sera précisé.

1.2.4. – Le rôle des autorités coutumières dans la prévention sociale et la médiation pénale sera reconnu. Ce dernier rôle sera prévu dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de procédure pénale.

Les autorités coutumières pourront être associées à l'élaboration des décisions des assemblées locales, à l'initiative des assemblées de provinces ou des communes.

1.2.5. – Le Conseil coutumier de la Nouvelle-Calédonie deviendra un "Sénat coutumier", composé de seize membres (deux par aire coutumière), obligatoirement consulté sur les sujets intéressant l'identité kanak.

1.3. – Le patrimoine culturel

1.3.1. – Les noms de lieux

Les noms kanak des lieux seront recensés et rétablis. Les sites sacrés selon la tradition kanak seront identifiés et juridiquement protégés, selon les règles applicables en matière de monuments historiques.

1.3.2. – Les objets culturels

L'Etat favorisera le retour en Nouvelle-Calédonie d'objets culturels kanak qui se trouvent dans des musées ou des collections, en France métropolitaine ou dans d'autres pays. Les moyens juridiques dont dispose l'Etat pour la protection du patrimoine national seront mis en œuvre à cette fin.

Des conventions seront passées avec ces institutions pour le retour de ces objets ou leur mise en valeur.

1.3.3. – Les langues

Les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement et les médias doit donc être accrue et faire l'objet d'une réflexion approfondie.

Une recherche scientifique et un enseignement universitaire sur les langues kanak doivent être organisés en Nouvelle-Calédonie. L'Institut national des langues et civilisations orientales y jouera un rôle essentiel. Pour que ces langues trouvent la place qui doit leur revenir dans l'enseignement primaire et secondaire, un effort important sera fait sur la formation des formateurs.

Une académie des langues kanak, établissement local dont le conseil d'administration sera composé de locuteurs désignés en accord avec les autorités coutumières, sera mise en place. Elle fixera leurs règles d'usage et leur évolution.

1.3.4. – Le développement culturel

La culture kanak doit être valorisée dans les formations artistiques et dans les médias. Les droits des auteurs doivent être effectivement protégés.

1.3.5. – Le Centre culturel Tjibaou

L'Etat s'engage à apporter durablement l'assistance technique et les financements nécessaires au Centre culturel Tjibaou pour lui permettre de tenir pleinement son rôle de pôle de rayonnement de la culture kanak.

Sur l'ensemble de ces questions relatives au patrimoine culturel, l'Etat proposera à la Nouvelle-Calédonie de conclure un accord particulier.

1.4. – La terre

L'identité de chaque Kanak se définit d'abord en référence à une terre.

Le rôle et les conditions de fonctionnement de l'Agence de Développement Rural et d'Aménagement Foncier (A.D.R.A.F.) devront faire l'objet d'un bilan approfondi. Elle devra disposer des moyens suffisants pour intervenir dans les zones suburbaines. L'accompagnement des attributions de terre devra être accentué pour favoriser l'installation des attributaires et la mise en valeur.

Les terres coutumières doivent être cadastrées pour que les droits coutumiers sur une parcelle soient clairement identifiés. De nouveaux outils juridiques et financiers seront mis en place pour favoriser le développement sur les terres coutumières, dont le statut ne doit pas être un obstacle à la mise en valeur.

La réforme foncière sera poursuivie. Les terres coutumières seront constituées des réserves, des terres attribuées aux "groupements de droit particulier local" et des terres qui seront attribuées par l'ADRAF pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Il n'y aura plus ainsi que les terres coutumières et les terres de droit commun. Des baux seront définis par le Congrès, en accord avec le Sénat coutumier, pour préciser les relations entre le propriétaire coutumier et l'exploitant sur les terres coutumières. Les juridictions statuant sur les litiges seront les juridictions de droit commun avec des assesseurs coutumiers.

Les domaines de l'Etat et du Territoire doivent faire l'objet d'un examen dans la perspective d'attribuer ces espaces à d'autres collectivités ou à des propriétaires coutumiers ou privés, en vue de rétablir des droits ou de réaliser des aménagements d'intérêt général. La question de la zone maritime sera également examinée dans le même esprit.

1.5. – Les symboles

Des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise, graphismes des billets de banque, devront être recherchés en commun, pour exprimer l'identité kanak et le futur partagé entre tous.

La loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie prévoiera la possibilité de changer ce nom, par "loi du pays" adoptée à la majorité qualifiée (voir plus bas).

Une mention du nom du pays pourra être apposée sur les documents d'identité, comme signe de citoyenneté.

2 – Les institutions

L'un des principes de l'accord politique est la reconnaissance d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci traduit la communauté de destin choisie et s'organiserait, après la fin de la période d'application de l'accord, en nationalité, s'il en était décidé ainsi.

Pour cette période, la notion de citoyenneté fonde les restrictions apportées au corps électoral pour les élections aux institutions du pays et pour la consultation finale. Elle sera aussi une référence pour la mise au point des dispositions qui seront définies pour préserver l'emploi local.

La loi constitutionnelle le permettra.

2.1. – Les assemblées

2.1.1. – Les assemblées de provinces seront composées, respectivement pour les Iles Loyauté, le Nord et le Sud, de 7, 15 et 32 membres, également membres du Congrès, ainsi que de 7, 7 et 8 membres supplémentaires, non-membres du Congrès lors de la mise en place des institutions. Les assemblées de provinces pourront réduire, pour les mandats suivants, l'effectif des conseillers non-membres du Congrès.

2.1.2. – Le mandat des membres du congrès et des assemblées de province sera de cinq ans.

2.1.3. – Certaines délibérations du Congrès auront le caractère de loi du pays et de ce fait ne pourront être contestées que devant le Conseil constitutionnel avant leur publication, sur saisine du représentant de l'Etat, de l'Exécutif de la Nouvelle Calédonie, d'un président de province, du président du Congrès ou d'un tiers des membres du Congrès.

2.1.4. a – Le Sénat coutumier sera obligatoirement saisi des projets de lois du pays et de délibération lorsqu'ils concerneront l'identité kanak au sens du présent document. Lorsque le texte qui lui sera soumis aura le caractère de loi du pays et concernera l'identité kanak, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie devra à nouveau délibérer si le vote du Sénat coutumier n'est pas conforme. Le vote du Congrès s'imposera alors.

b – Un Conseil économique et social représentera les principales institutions économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie. Il sera obligatoirement consulté sur les délibérations à caractère économique et social du Congrès. Il comprendra des représentants du Sénat coutumier.

2.1.5. – Les limites des provinces et des communes devraient coïncider, de manière qu'une commune n'appartienne qu'à une province.

2.2. – Le corps électoral et le mode de scrutin

2.2.1. – Le corps électoral

Le corps électoral pour les consultations relatives à l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie intervenant à l'issue du délai d'application du présent accord (point 5) comprendra exclusivement : les électeurs inscrits sur les listes électorales aux dates des consultations électorales prévues au 5 et qui ont été admis à participer au scrutin prévu à l'article 2 de la loi référendaire, ou qui remplissaient les conditions pour y participer, ainsi que ceux qui pourront justifier que les interruptions dans la continuité de leur domicile en Nouvelle-Calédonie étaient dues à des raisons professionnelles ou familiales, ceux qui, de statut coutumier ou nés en Nouvelle-Calédonie, y ont eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux et ceux qui ne sont pas nés en Nouvelle-Calédonie mais dont l'un des parents y est né et qui y ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux.

Pourront également voter pour ces consultations les jeunes atteignant la majorité électorale, inscrits sur les listes électorales, et qui, s'ils sont nés avant 1988 auront eu leur domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ou, s'ils sont nés après 1988, ont eu un de leurs parents qui remplissait ou aurait pu remplir les conditions pour voter au scrutin de la fin de 1998.

Pourront également voter à ces consultations les personnes qui pourront justifier, en 2013, de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie.

Comme il avait été prévu dans le texte signé . de Matignon, le corps électoral aux assemblées des provinces et au Congrès sera restreint : il sera réservé aux électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de l'élection, ainsi qu'aux électeurs atteignant l'âge de la majorité pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront de dix ans de domicile en 1998, soit auront eu un parent remplissant les conditions pour être électeur au scrutin de la fin de 1998, soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

La notion de domicile s'entendra au sens de l'article 2 de la loi référendaire. La liste des électeurs admis à participer aux scrutins sera arrêtée avant la fin de l'année précédant le scrutin.

Le corps électoral restreint s'appliquerait aux élections communales si les communes avaient une organisation propre à la Nouvelle-Calédonie.

2.2.2. – Pour favoriser l'efficacité du fonctionnement des assemblées locales, en évitant les conséquences d'une dispersion des suffrages, le seuil de 5 % s'appliquera aux inscrits et non aux exprimés.

2.3. – L'Exécutif

L'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie deviendra un Gouvernement collégial, élu par le Congrès, responsable devant lui.

L'Exécutif sera désigné à la proportionnelle par le Congrès, sur proposition par les groupes politiques de listes de candidats, membres ou non du Congrès. L'appartenance au Gouvernement sera incompatible avec la qualité de membre du Congrès ou des assemblées de province. Le membre du Congrès ou de l'assemblée de province élu membre du Gouvernement est remplacé à l'assemblée par le suivant de liste. En cas de cessation de fonction, il retrouvera son siège.

La composition de l'Exécutif sera fixée par le Congrès.

Le représentant de l'Etat sera informé de l'ordre du jour des réunions du Gouvernement et assistera à ses délibérations. Il recevra les projets de décisions avant leur publication et pourra demander une seconde délibération de l'Exécutif.

2.4. – Les communes

Les compétences des communes pourront être élargies en matière d'urbanisme, de développement local, de concessions de distribution d'électricité et de fiscalité locale. Elles pourront bénéficier de transferts domaniaux.

3 – Les compétences

Les compétences détenues par l'Etat seront transférées à la Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes :

- certaines seront transférées dès la mise en oeuvre de la nouvelle organisation politique ;
- d'autres le seront dans des étapes intermédiaires ;
- d'autres seront partagées entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ;
- les dernières, de caractère régalien, ne pourront être transférées qu'à l'issue de la consultation mentionnée au 5.

Le Congrès, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes, pourra demander à modifier l'échéancier prévu des transferts de compétences, à l'exclusion des compétences de caractère régalien.

L'Etat participera pendant cette période à la prise en charge financière des compétences transférées. Cette compensation financière sera garantie par la loi constitutionnelle.

3.1. – Les compétences nouvelles conférées à la Nouvelle-Calédonie

3.1.1. – Les compétences immédiatement transférées

Le principe du transfert est acquis dès l'installation des institutions issues du présent accord : la mise en place s'effectuera au cours du premier mandat du Congrès.

- *le droit à l'emploi* : la Nouvelle-Calédonie mettra en place, en liaison avec l'Etat, des mesures destinées à offrir des garanties particulières pour le droit à l'emploi de ses habitants ;

La réglementation sur l'entrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie sera confortée.

Pour les professions indépendantes le droit d'établissement pourra être restreint pour les personnes non établies en Nouvelle-Calédonie.

Pour les salariés du secteur privé et pour la fonction publique territoriale, une réglementation locale sera définie pour privilégier l'accès à l'emploi des habitants.

- *le droit au travail des ressortissants étrangers* ;
- *le commerce extérieur, dont la réglementation des importations, et l'autorisation des investissements étrangers* ;
- *les communications extérieures en matière de poste et de télécommunications à l'exclusion des communications gouvernementales et de la réglementation des fréquences radioélectriques* ;
- *la navigation et les dessertes maritimes internationales* ;
- *les communications extérieures en matière de desserte aérienne lorsqu'elles n'ont pour escale en France que la Nouvelle-Calédonie et dans le respect des engagements internationaux de la France* ;
- *l'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique* ;
- *les principes directeurs du droit du travail* ;
- *les principes directeurs de la formation professionnelle* ;
- *la médiation pénale coutumière* ;
- *la définition de peines contraventionnelles pour les infractions aux lois du pays* ;
- *les règles relatives à l'administration provinciale* ;
- *les programmes de l'enseignement primaire, la formation des maîtres et le contrôle pédagogique* ;
- *le domaine public maritime, transféré aux provinces.*

3.1.2. – Les compétences transférées dans une seconde étape :

Dans une étape intermédiaire, au cours du second et troisième mandats du Congrès, les compétences suivantes seront transférées à la Nouvelle-Calédonie :

- *les règles concernant l'état-civil, dans le cadre des lois existantes* ;
- *les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne et maritime intérieure* ;
- *l'élaboration des règles et la mise en œuvre des mesures intéressant la sécurité civile* ;

Toutefois, un dispositif permettra au représentant de l'Etat de prendre les mesures nécessaires en cas de carence.

- *le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;*
- *le droit civil et le droit commercial ;*
- *les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels ;*
- *la législation relative à l'enfance délinquante et à l'enfance en danger ;*
- *les règles relatives à l'administration communale ;*
- *le contrôle administratif des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;*
- *l'enseignement du second degré ;*
- *les règles applicables aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat.*

3.2. – Les compétences partagées

3.2.1. – Les relations internationales et régionales

Les relations internationales sont de la compétence de l'Etat. Celui-ci prendra en compte les intérêts propres de la Nouvelle-Calédonie dans les négociations internationales conduites par la France et l'associera à ces discussions.

La Nouvelle-Calédonie pourra être membre de certaines organisations internationales ou associée à elles, en fonction de leurs statuts (Organisations internationales du Pacifique, ONU, UNESCO, OIT, etc....). Le cheminement vers l'émancipation sera porté à la connaissance de l'ONU.

La Nouvelle-Calédonie pourra avoir des représentations dans des pays de la zone Pacifique et auprès de ces organisations et de l'Union européenne.

Elle pourra conclure . avec ces pays dans ses domaines de compétence.

Elle sera associée à la renégociation de la décision d'association Europe-PTOM.

Une formation sera mise en place pour préparer des néo-calédoniens à l'exercice de responsabilités dans le domaine des relations internationales.

Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des Iles Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord particulier. L'organisation des services de l'Etat sera distincte pour la Nouvelle-Calédonie et ce territoire.

3.2.2. – Les étrangers

L'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie sera associé à la mise en œuvre de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers.

3.2.3. – L'audiovisuel

L'Exécutif est consulté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant toute décision propre à la Nouvelle-Calédonie.

Une convention pourra être conclue entre le C.S.A. et la Nouvelle-Calédonie pour associer celle-ci à la politique de communication audiovisuelle.

3.2.4. – Le maintien de l'ordre

L'Exécutif sera informé par le représentant de l'Etat des mesures prises.

3.2.5. – La réglementation minière :

Les compétences réservées à l'Etat pour les hydrocarbures, les sels de potasse, le nickel, le chrome et le cobalt seront transférées .

La responsabilité de l'élaboration des règles sera conférée à la Nouvelle-Calédonie, celle de la mise en œuvre aux provinces.

Un conseil des mines, composé de représentants des provinces et auquel assiste le représentant de l'Etat, sera consulté sur les projets de délibérations du Congrès ou des provinces en matière minière. Si son avis n'est pas conforme ou si le représentant de l'Etat exprime un avis défavorable, l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie se prononcera.

3.2.6. – Les dessertes aériennes internationales

L'Exécutif sera associé aux négociations lorsque la compétence n'est pas entièrement confiée à la Nouvelle-Calédonie.

3.2.7. – L'enseignement supérieur et la recherche scientifique

L'Etat associera l'Exécutif à la préparation des contrats qui le lient aux organismes de recherche implantés en Nouvelle-Calédonie et à l'Université, afin de permettre une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de la Nouvelle-Calédonie en matière de formation supérieure et de recherche. La Nouvelle-Calédonie pourra conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces institutions.

3.3. – Les compétences régaliennes

La justice, l'ordre public, la défense et la monnaie (ainsi que le crédit et les changes), et les affaires étrangères (sous réserve des dispositions du 3.2.1. resteront de la compétence de l'Etat jusqu'à la nouvelle organisation politique résultant de la consultation des populations intéressées prévue au 5.

Pendant cette période, des néo-calédoniens seront formés et associés à l'exercice de responsabilités dans ces domaines, dans un souci de rééquilibrage et de préparation de cette nouvelle étape.

4 – Le développement économique et social

4.1. – La formation des hommes

4.1.1 – Les *formations* devront, dans leur contenu et leur méthode, mieux prendre en compte les réalités locales, l'environnement régional et les

impératifs de rééquilibrage. Des discussions s'engageront pour la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations avec les Etats du Pacifique. Le nouveau partage des compétences devra permettre aux habitants de la Nouvelle-Calédonie d'occuper davantage les emplois de formateur.

L'Université devra répondre aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie.

L'Institut de formation des personnels administratifs sera rattaché à la Nouvelle-Calédonie.

4.1.2. – Un programme de formation de *cadres* moyens et supérieurs, notamment techniques et financiers, sera soutenu par l'Etat à travers les contrats de développement pour accompagner les transferts de compétences réalisés et à venir.

Un programme spécifique, qui prendra la suite du programme "400 cadres" et concernera les enseignements secondaire, supérieur, et professionnel tendra à la poursuite du rééquilibrage et à l'accession des Kanak aux responsabilités dans tous les secteurs d'activités.

4.2. – Le développement économique

4.2.1. – Des *contrats de développement* pluriannuels seront conclus avec l'Etat. Ils pourront concerner la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et tendront à accroître l'autonomie et la diversification économiques.

4.2.2. – Les mines

Un schéma de mise en valeur des richesses minières du territoire sera élaboré. Sa mise en œuvre sera contrôlée par la Nouvelle-Calédonie grâce au transfert progressif de l'élaboration et de l'application du droit minier.

4.2.3. – La *politique énergétique* contribuera à l'objectif d'autonomie et de rééquilibrage : recherche de sites hydroélectriques, programmation de l'électrification rurale tenant compte des coûts différenciés liés à la géographie du Territoire. Les opérateurs du secteur seront associés à la mise en œuvre de cette politique.

4.2.4. – Le *financement de l'économie* devra être modernisé :

- L'Exécutif sera consulté sur les décisions de politique monétaire. La Nouvelle-Calédonie sera représentée dans les instances compétentes de l'Institut d'émission.
- Pour financer le développement, l'Institut calédonien de participation sera maintenu dans son rôle et ses attributions. Il sera créé un fonds de garantie pour faciliter le financement des projets de développement sur les terres coutumières.
- Des objectifs d'intérêt public en faveur du développement seront fixés pour la Banque calédonienne d'investissement. Les collectivités, dans la limite de leurs compétences, pourront soutenir le développement des entreprises en collaboration avec le secteur bancaire.

- Un dispositif spécifique sera mis en place pour faciliter la restructuration et le redressement des entreprises.

4.3. – La politique sociale

4.3.1. – L'effort en faveur du *logement social* sera poursuivi avec le concours de l'Etat. L'attribution des financements et les choix des opérateurs devront contribuer à un équilibre géographique. Une distinction sera effectuée entre les rôles de collecteur, de promoteur et de gestionnaire du parc social.

4.3.2. – Une *couverture sociale généralisée* sera mise en place.

4.4. – Le contrôle des outils de développement

La Nouvelle-Calédonie sera mise à même, au cours de la nouvelle période qui s'ouvre, de disposer d'une maîtrise suffisante des principaux outils de son développement. Lorsque l'Etat détient directement ou indirectement la maîtrise totale ou partielle de ces outils, la Nouvelle-Calédonie le remplacera selon des modalités et des calendriers à déterminer. Lorsque la Nouvelle-Calédonie le souhaitera, les établissements publics nationaux intervenant seulement en Nouvelle-Calédonie deviendront des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie.

Sont notamment concernés : Office des Postes et Télécommunications, Institut de Formation des Personnels Administratifs, Société néo-calédonienne de l'énergie ENERCAL, Institut Calédonien de Participation, Agence de Développement Rural et d'Aménagement Foncier, Agence de Développement de la Culture Kanak ...

Lorsque les organismes n'interviennent pas seulement en Nouvelle-Calédonie, celle-ci devra disposer des moyens de faire valoir ses orientations stratégiques, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par une participation dans le capital ou les instances dirigeantes.

5 – L'évolution de l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie

Au cours du quatrième mandat (de cinq ans) du Congrès, une consultation électorale sera organisée. La date de cette consultation sera déterminée par le Congrès, au cours de ce mandat, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes.

Si le Congrès n'a pas fixé cette date avant la fin de l'avant-dernière année de ce quatrième mandat, la consultation sera organisée, à une date fixée par l'Etat, dans la dernière année du mandat.

La consultation portera sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité.

Si la réponse des électeurs à ces propositions est négative, le tiers des membres du Congrès pourra provoquer l'organisation d'une nouvelle consultation qui interviendra dans la deuxième année suivant la première consultation. Si la réponse est à nouveau négative, une nouvelle consultation pourra être

organisée selon la même procédure et dans les mêmes délais. Si la réponse est encore négative, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée.

Tant que les consultations n'auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l'organisation politique mise en place par l'accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d'évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette "irréversibilité" étant constitutionnellement garantie.

Le résultat de cette consultation s'appliquera globalement pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Une partie de la Nouvelle-Calédonie ne pourra accéder seule à la pleine souveraineté, ou conserver seule des liens différents avec la France, au motif que les résultats de la consultation électorale y auraient été différents du résultat global.

L'Etat reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier, à la fin de cette période, d'une complète émancipation.

6 – Application de l'accord

6.1. – Textes

Le Gouvernement engagera la préparation des textes nécessaires à la mise en œuvre de l'accord et notamment du projet de loi de révision constitutionnelle en vue de son adoption au Parlement. Si cette révision ne pouvait être menée à bien et si les modifications constitutionnelles nécessaires à la mise en application des dispositions de l'accord ne pouvaient être prises, les partenaires se réuniraient pour en examiner les conséquences sur l'équilibre général du présent accord.

6.2. – Consultations

Des consultations seront organisées en Nouvelle-Calédonie auprès des organisations politiques, coutumières, économiques et sociales sur l'accord conclu, à l'initiative des signataires.

6.3. – Scrutin de 1998

Un scrutin sera organisée avant la fin de l'année 1998 sur l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, objet du présent accord.

La loi constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie permettra que ne se prononcent que les électeurs admis à participer au scrutin prévu à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988.

6.4. – Elections aux assemblées de province et au Congrès

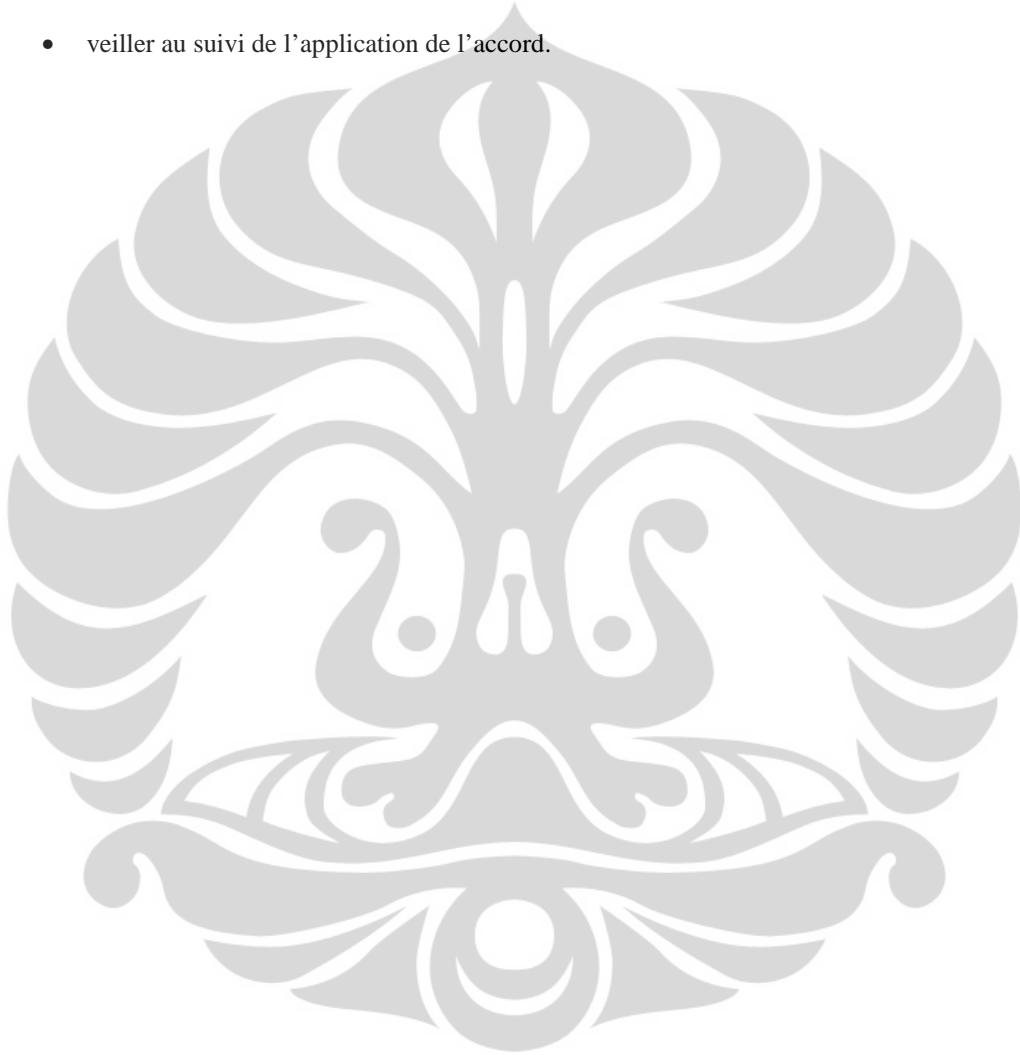
Des élections aux assemblées de province et au Congrès auront lieu dans les six mois suivant l'adoption des textes relatifs à l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie.

Les mandats des membres des assemblées de province prendront fin à la date de ces élections.

6.5. – Comité des signataires

Un comité des signataires sera mis en place pour :

- prendre en compte les avis qui seront formulés par les organismes locaux consultés sur l'accord ;
- participer à la préparation des textes nécessaires pour la mise en œuvre de l'accord ;
- veiller au suivi de l'application de l'accord.



Noumea Accord

Government of France, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste and the Rassemblement Pour la Calédonie dans la République (RPCR)

5 May 1998

After a complex series of negotiations, the Noumea Accord for New Caledonia was signed on 5 May 1998 by the government of France, the Kanak independence movement Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) and the conservative settler party Rassemblement Pour la Calédonie dans la République (RPCR).

Subsequent legislation in Paris enacted key elements of the Accord, including:

- constitutional changes to New Caledonia's status within the French Republic, creating 'shared sovereignty', a new citizenship for New Caledonians, and ending the previous status as a territoire d'outre-mer (overseas territory) of France;
- elections in May 1999 for new political institutions, replacing the existing Territorial Congress;
- an 'irreversible' transfer of administrative powers from Paris to local authorities and the new Congress in New Caledonia;
- measures to recognise Indigenous Kanak culture and identity (highlighted by a preamble to the Noumea Accord which acknowledges the 'shadows' of the colonial period); and
- a further 15–20 year transition before a referendum on self-determination for New Caledonia, possibly leading to the 'emancipation' of the territory.

The transitional status created by the Noumea Accord is unique, and was negotiated in stages. Following the signing of the agreement on 5 May 1998, the French National Assembly and Senate passed amendments to the French [Constitution](#) that were approved at a joint sitting of Parliament at Versailles on 6 July 1998. The agreement was then ratified by nearly 72 per cent of the population of New Caledonia in a referendum on 8 November 1998. The French Parliament passed legislation to implement the referendum decision on 12 March 1999.

This opened the way for May 1999 elections to the new political institutions:

- a) Three Provincial Assemblies for the Southern Province (40 seats), the Northern Province (22 seats) and the Loyalty Islands Province (14 seats).
- b) A new 54 seat Congress made up of 32 Assembly members from the south, 15 from the north and 7 from the Loyalty Islands, elected for five-year terms.
- c) A Government executive of 11 members that replaced the French High Commissioner as the country's executive body, and can propose laws for adoption by the Congress.

d) A 16-member Senate for Indigenous customary chiefs, which must be consulted on issues that affect Kanak identity.

The new category of 'New Caledonian citizens' under French law is important for voting, immigration and employment rights. Only New Caledonians were allowed to vote in the November 1998 referendum and for the Assembly and Congress elections (however, New Caledonian citizens retain their French nationality, and can join all other French nationals to vote for the French National Assembly and European Parliament).

Powers currently held by the French State will be transferred to New Caledonia in stages. Unlike France's autonomy statutes for French Polynesia, these powers cannot revert to Paris once transferred. Some powers were transferred from 1 January 2000 (including control of local employment and primary education); others will be transferred in stages over a decade.

Throughout the transition period, some powers will be shared between New Caledonia and the French State. For example, while international relations are within the state's responsibility, New Caledonia can join international and regional organisations as an observer — in 1999, New Caledonia became an official observer of the Pacific Islands Forum, the regional organisations which links Australia, New Zealand and 14 independent island nations. The crucial 'sovereign powers' — justice, public order, defence, finance and currency — will remain as French State powers until after the final referendum on self-determination.

This vote on New Caledonia's final political status will be delayed for a period of 15–20 years (that is, until after three terms of the Congress, and before the end of the fourth term). This vote, between the years 2013 and 2018, will be based on a limited franchise (rather than all French citizens) and will focus on 'the transfer of the sovereign powers to New Caledonia, accession to an international status of full responsibility and transformation from citizenship to nationality'.

Other self-determination movements in the region have studied the Noumea Accords model, such as the Bougainville independence movement. Papua New Guinea's Parliament has recently passed legislation giving increased autonomy to Bougainville, leading to a vote in ten years time to determine its political future — a transition similar to the Noumea Accord process in New Caledonia.

Leaders of the Indigenous Kanak movement have largely supported the Noumea Accords process, and the FLNKS has entered into a coalition government with the conservative RPCR party. Kanak poet, teacher and women's activist Dewe Gorode currently serves as Vice President of the Government of New Caledonia.

In a May 2002 speech to the United Nations Special Committee on Decolonisation, Dewe Gorode spoke of the important steps achieved since the signing of the Accord, including:

- an agreement on cultural development, signed with the French government, which provides for the protection and fostering of our traditional heritage and knowledge, the expansion of Kanak language teaching and the creation, distribution and exchange of Indigenous arts;
- a comprehensive medical insurance plan for the country;
- initiatives to promote artistic creation, protect copyright and intellectual and artistic property rights; and
- substantial progress in making the collegial government work for both pro-independence and anti-independence members.

At the same time, the FLNKS has noted ongoing problems that cloud the success of the Noumea Accord process, including the failure of the French President to convene a sitting of the Congress (a joint sitting of the French Senate and National Assembly) to ratify crucial constitutional changes that define the electoral body in New Caledonia. Discussions have not yet commenced on the new name, anthem and symbols of the country, and provisions of the Accord continue to be overruled by the French Courts, or come into conflict with policies and rulings of the European Union.

The following text includes key extracts of the Agreement on New Caledonia, signed in Noumea on 5 May 1998. The full text of the agreement can be found at <www.ambafrance.au.org/politics/pages/noumea.en.htm>.

Agreement on New Caledonia

Please note that this is an informal translation of the 'Agreement on New Caledonia' done by the Pacific Community translation services.

Preamble

1. On 24 September 1853, when France claimed 'Grande Terre', which James Cook had named 'New Caledonia', it took possession of a territory in accordance with the conditions of international law, as recognised at that time by the nations of Europe and America. It did not establish legally formalised relations with the indigenous population. The treaties entered into with the customary authorities in 1854 and subsequent years did not represent balanced agreements but were, in fact, unilateral instruments.

This territory, however, was not empty.

Grande Terre and the outlying islands were inhabited by men and women now known as Kanaks. They had developed their own civilisation, with its traditions and languages, in which custom, which governed social and political life, prevailed. Their cultural and spiritual life was expressed through various forms of creativity.

The Kanak identity was based on a particular relationship with land. Each individual and each clan defined itself in terms of a specific link to a valley, a hill,

the sea or a river estuary and carried in its memory the acceptance of other families on its land. The names attached by tradition to each element of the landscape and the taboos affecting some of these, as well as the customary ways, gave structure to space and exchanges.

2. The colonisation of New Caledonia occurred as part of a broad historical movement which saw the European countries impose their domination on the rest of the world. In the 19th and 20th centuries, many men and women came, either with the conviction that they were bringing progress, or inspired by their religious faith, or sent against their will or seeking a second chance in New Caledonia. They settled and started families there. They brought with them their ideals, knowledge, hopes, ambitions, illusions and contradictions.

Some of them, especially the cultured people, priests and pastors, doctors and engineers, administrators, soldiers and political leaders, looked differently upon the original inhabitants, showing greater understanding and genuine compassion.

Through their scientific and technical knowledge, the Territory's new communities participated in mining and agricultural activity, often under difficult circumstances, and, with the help of the State, in the shaping of New Caledonia. Their determination and inventiveness made it possible to use resources and lay a foundation for development.

The relationship of New Caledonia with the distant motherland long remained marked by colonial dependency, a one-sided relationship and a refusal to recognise specific characteristics, from which the new communities, in their aspirations, also suffered.

3. The time has come to recognise the shadows of the colonial period, even if it was not devoid of light.

The impact of colonisation had a long-lasting traumatic effect on the original people.

Some clans lost their names when they lost their land. Large-scale land colonisation caused considerable population movements, in which the Kanak clans saw their subsistence resources depleted and their places of memory lost. This process of dispossession engendered a loss of identity markers.

Kanak social organisation, even if its principles were recognised, was thus thrown into upheaval. Population movements damaged its fabric, while ignorance, or power strategies, all too often led to the negation of the legitimate authorities and the installation of leaders considered under custom to have no legitimacy, which aggravated the identity trauma.

At the same time, the Kanak artistic heritage was considered non-existent or looted.

To this denial of the fundamental elements of the Kanak identity, were added restrictions on public freedoms and a lack of political rights, despite the fact that the Kanaks had paid a heavy toll in the defence of France, especially during the First World War.

The Kanaks were relegated to the geographical, economic and political fringes of their own country, which, in a proud people not without warrior traditions, could not but cause revolts, which were violently put down, aggravating resentment and misunderstanding.

Colonisation harmed the dignity of the Kanak people and deprived it of its identity. In this confrontation, some men and women lost their lives or their reasons for living. Much suffering resulted from it. These difficult times need to be remembered, the mistakes recognised and the Kanak people's confiscated identity restored, which equates in its mind with a recognition of its sovereignty, prior to the forging of a new sovereignty, shared in a common destiny.

4. Decolonisation is the way to rebuild a lasting social bond between the communities living in New Caledonia today, by enabling the Kanak people to establish new relations with France, reflecting the realities of our time.

Through their participation in the construction of New Caledonia, the communities living in the Territory have acquired a legitimacy to live there and to continue contributing to its development. They are essential for its social balance and the operation of its economy and social institutions. Although accession of Kanaks to positions of responsibility remains insufficient, and needs to be increased through proactive measures, it is also a fact that the participation of other communities in the life of the Territory is essential.

It is now necessary to start making provision for a citizenship of New Caledonia, enabling the original people to form a human community, asserting its common destiny, with the other men and women living there.

The size of New Caledonia and its economic and social balances do not make it possible to open the employment market widely, and justify action to protect local employment. The Matignon Accords, signed in June 1988, demonstrated the will of the inhabitants of New Caledonia to put violence and rejection behind them and tread the path of peace, solidarity and prosperity together.

Ten years on, a new process needs to commence, entailing the full recognition of the Kanak identity, as a pre-requisite for rebuilding a social contract between all the communities living in New Caledonia, and entailing shared sovereignty with France, in preparation for full sovereignty.

The past was the time of colonisation. The present is the time of sharing, through the achievement of a new balance. The future must be the time of an identity, in a common destiny.

France stands ready to accompany New Caledonia on that path.

5. The signatories of the Matignon Accords have therefore decided together to come to a negotiated agreement, based on consensus, which they will, jointly, call upon the inhabitants of New Caledonia to endorse.

This agreement specifies the political organisation of New Caledonia and the arrangements for its emancipation over a twenty-year period.

Its implementation will require a [Constitution](#) Bill which the Government undertakes to draft for enactment by Parliament.

The full recognition of the Kanak identity requires customary law status and its links with the civil law status of persons governed by ordinary law to be defined, and provision to be made for the place of customary bodies in the institutions, particularly through the establishment of a Customary Senate; it requires the Kanak cultural heritage to be protected and enhanced and new legal and financial mechanisms to be introduced in response to representations based on the link with land, while facilitating land development, and identity symbols conveying the essential place of the Kanak identity in the accepted common destiny to be adopted.

The institutions of New Caledonia will reflect further progress towards sovereignty: some Congress Resolutions will be deemed to be laws and an elected Executive will draft and implement them.

During this period, signs will be given of the gradual recognition of a citizenship of New Caledonia, which must express the chosen common destiny and be able, after the end of the period, to become a nationality, should it be so decided.

The entitlement to vote in elections to New Caledonia's own local assemblies will be restricted to persons with a certain period of prior residence in New Caledonia.

In order to take into account the limited size of the employment market, provision will be made to give priority access to local employment to persons residing on a long-term basis in New Caledonia.

The sharing of responsibilities between the State and New Caledonia will signify shared sovereignty. This will be a gradual process. Some powers will be transferred as soon as the new arrangements commence. Others will be transferred according to a set timetable, which the Congress will be able to modify, according to the principle of self-organisation. The transferred powers may not revert to the State, reflecting the principle of irreversibility governing these arrangements.

Throughout the period of implementation of the new arrangements, New Caledonia will enjoy the support of the State, in terms of technical assistance, training and the funding necessary to exercise the transferred powers and for economic and social development.

Commitments will be applied to multi-annual programmes. New Caledonia will participate in the capital and operation of the main development institutions in which the State is a partner.

At the end of a period of twenty years, the transfer to New Caledonia of the reserved powers, its achievement of full international responsibility status and the conversion of citizenship into nationality, will be voted upon by the people concerned.

Their approval would mean full sovereignty for New Caledonia.

Policy document

1 The Kanak Identity

New Caledonia's political and social organisation must take the Kanak identity into account more fully.

1.1 The Special Civil Law Status

Some Kanaks have ordinary civil law status without having desired it.

The Special Civil Law Status is a source of legal insecurity and does not make it possible to respond appropriately to certain situations of modern life.

Consequently, the following policy has been set:

- the Special Civil Law Status will henceforth be called 'Customary Status'.
- any person entitled to Customary Status who may have renounced it or been deprived of it following such renunciation by his/her ancestors, or through marriage, or for any other reason (case of children whose births were registered in metropolitan France), will be able to recover it. The Constitutional Revision Act will authorise this exception under Article 75 of the [Constitution](#).
- the rules pertaining to the Customary Status will be laid down by the institutions of New Caledonia, as set out hereafter.
- the Customary Status will make a distinction between property located in 'Customary Land' (new name for the Reserves), which, in the case of inheritance, will be transferred and allocated in accordance with the rules of custom, and property located outside Customary Land, which will be governed by the rules of ordinary law.

1.2 Customary Law and Bodies

1.2.1 The legal status of the 'Palaver Record' (which name may be changed) must be redefined, in order to give it full force of law, by determining its format and setting up an appeal process that will guard against subsequent disputes. The role of the Syndic des affaires coutumières (Recorder of Customary Affairs), at

present held by the Gendarmerie, will be played by another agent, possibly a representative of the 'commune' or of the Customary Area.

The format of the Palaver Record will be defined by the Congress in consultation with the customary authorities (see below). The roll-call will take place before the Area Council and proceedings will be recorded by that council or the commune authorities.

1.2.2 The role of the Customary Areas will be enhanced, in particular by giving the Area Councils a say in clarifying and interpreting customary rules. Broadly speaking, New Caledonia's spatial organisation will need to take more account of their existence. In particular, the boundaries of the communes should be able to take the Customary Areas' boundaries into consideration.

1.2.3 The mode of recognition of the customary authorities will be specified in order to guarantee their legitimacy. It will be defined by New Caledonia's customary authorities (see below). It will be notified to the Representative of the State and to New Caledonia's Executive whose role will be confined to recording it. Their status will be specified.

1.2.4 The role of the customary authorities in the prevention of social ills and mediation in criminal sentencing will be acknowledged. Their role in respect of the latter will be included in the provisions of the legal instruments governing criminal procedure in New Caledonia.

The Customary authorities could be invited by the provincial assemblies or commune authorities to take part in the drafting of local assembly resolutions.

1.2.5 The Customary Council of New Caledonia will become a 'Customary Senate', consisting of sixteen members (two from each Customary Area), which it will be compulsory to consult on subjects relating to Kanak identity.

1.3 The Cultural Heritage

...

1.3.3 Languages

The Kanak languages, together with French, are languages of education and culture in New Caledonia. Their place in school curricula and in the media should therefore be increased and extensive consideration should be given to how to achieve this.

Scientific research and university courses on Kanak languages should be organised in New Caledonia. The Institut national des langues et civilisations orientales (Institute for Oriental Languages and Civilisations) will play a pivotal role in this regard. For these languages to gain their rightful place in primary and secondary schooling, a substantial effort will be put into training of trainers.

An Academy of Kanak Languages will be set up as a local public institution whose Board of Governors will consist of speakers of Kanak languages, appointed by agreement with the customary authorities. The Academy will set rules for usage and development of the Kanak languages.

1.3.4 Cultural development

Kanak culture must be developed and enhanced through artistic training courses and in the media. Copyright must be effectively protected.

1.3.5 Tjibaou Cultural Centre

The State undertakes to provide, on a long-term basis, the technical assistance and funds required for the Tjibaou Cultural Centre to be able to fully play its part as a centre for outreach by Kanak culture.

On all these matters pertaining to the cultural heritage, the State will propose that a specific agreement be entered into with New Caledonia.

1.4 Land

Every Kanak's identity is defined primarily with reference to an area of land.

The task and operations of the Agence de développement rural et d'aménagement foncier — ADRAF (Rural Development and Land Management Board) will have to be thoroughly reassessed. It will require sufficient resources for taking action in suburban areas. Measures accompanying land grants will need to be strengthened so as to facilitate the beneficiaries' establishment and development of the land.

Customary Land must be surveyed and registered so that customary rights over any piece of land can be clearly identified. New legal and financial instruments will be introduced to promote development on Customary Land, whose status must not act as an obstacle to economic development.

Land reform will be continued. Customary Land will consist of Reserve Land, the land assigned to groupements de droit particulier local — GDPL (groups governed by special local law provisions) and the land that will be assigned by ADRAF in response to representations based on the link to land. Thus, all land will henceforth be either Customary Land or land held under ordinary civil law. Lease arrangements specifying relations between the customary owner and the developer of custom land will be defined by the Congress, in consultation with the Customary Senate. Any disputes will be dealt with by the ordinary law courts, with the assistance of customary assessors.

A survey of State land and land held by the Territory will be undertaken with a view to assigning these land areas to other local government entities or to customary owners or private owners, either in order to restore land rights or to

enable developments of common interest to be carried out. The issue of the maritime zone will be considered in a similar spirit.

...

2 The Institutions

2.1 The Assemblies

2.1.1 The Provincial Assemblies will, respectively for the Loyalty Islands, Northern and Southern Provinces, consist of 7, 15 and 32 members who will also be members of the Congress, as well as of 7, 7 and 8 additional members, not members of the Congress, when the new institutions are set up. For subsequent terms, the Provincial Assemblies can, if they wish, reduce the number of members who are not Congress members.

2.1.2 The term of office of members of the Congress and of the Provincial Assemblies will be five years.

2.1.3 Some Congress Resolutions will be deemed to be laws of the country; the only way, therefore, that it will be possible to dispute them will be by submission before the Constitutional Council prior to their publication, by either the Representative of the State, or New Caledonia's Executive, or the President of a Provincial Assembly, or the President of the Congress or a third of the members of the Congress.

2.1.4 a) Draft laws of the country and draft resolutions will be referred to the Customary Senate whenever they concern the Kanak identity as defined in this document. When the draft submitted to it has the nature of a law of the country and concerns the Kanak identity, the Congress of New Caledonia will be required to re-examine it if it has not been endorsed by the Customary Senate. The Congress's vote will then be final.

b) New Caledonia's main economic and social institutions will be represented by an Economic and Social Council. It will be consulted on all Congress Resolutions of an economic or social nature. Its members will include representatives of the Customary Senate.

2.1.5 The boundaries of the Provinces and communes (municipal districts) should coincide, to ensure that every commune belongs to one Province only.

...

3 Devolution of powers

The powers held by the State will be transferred to New Caledonia in the following manner:

- some will be transferred at the start of implementation of the new political organisation;
- some will be transferred in subsequent stages;
- some will be shared between the State and New Caledonia;
- some, termed reserved powers, cannot be transferred until after the poll referred to in [Section 5](#).

The Congress, subject to the approval of a qualified majority of three-fifths, will be able to request changes to be made in the provisional schedule for the transfer of powers, with the exception of the reserved powers.

Throughout this period, the State will contribute to the funding of the transferred powers. This financial contribution will be guaranteed by the [Constitution](#) Act.

3.1 The new powers devolved to New Caledonia

3.1.1 Powers to be transferred immediately

The principle of transfer will apply as soon as the institutions provided for in this Accord have been set up: this decision will be implemented during the Congress's first term, in respect of the following powers:

- the right to employment: New Caledonia, in conjunction with the State, will take measures designed to offer special guarantees for its inhabitants' right to employment. Regulations on the entry of persons not resident in New Caledonia will be reinforced.

For self-employed persons, the right to set up business could be restricted for persons not resident in New Caledonia.

Where salaried workers in the private sector and for the Territorial Public Service are concerned, local regulations will be drawn up with a view to giving territorial inhabitants preferential access to employment.

- Aliens' right to work;
- External trade, including import regulations and approval of foreign investments;
- External communications through postal and telecommunication services, except government communications and regulations governing radio frequencies;
- Navigation and international shipping services;
- External communications through air services when their only stop in France is New Caledonia and in compliance with the international commitments entered into by France;
- Exploration, exploitation, management and conservation of living and non-living natural resources of the Economic Zone;
- Fundamental principles for employment law;
- Fundamental principles for vocational training;

- Customary mediation in sentencing;
- Setting of penalties for breaches of the laws of the country;
- Rules for the administration of the Provinces;
- Curriculum content for primary schools, teacher training and inspection of teachers;
- the public maritime zone, transferred to the Provinces.

3.1.2 Powers to be transferred as a second stage

The following powers will be transferred, as an intermediate stage, to New Caledonia during the second and third Congress terms of office:

- Civil registration rules, within the framework of the existing legislation;
- Policing and security regulations for domestic air and sea traffic;
- Drawing up of rules and implementation of measures for civil defence. However, a system will be set up which will allow the State to take the measures required in the event of shortcomings.
- Accounting and financial regulations for Territorial local government entities and their public corporations;
- Civil and commercial law;
- Fundamental principles governing land ownership and real property rights;
- Legislation on delinquent and endangered children;
- Rules for administration of communes;
- Administrative control over local government entities and their public corporations;
- Secondary education;
- Regulations pertaining to private school teachers under contract.

3.2 The shared powers

3.2.1 International and regional relations

International relations remain the responsibility of the State. The latter will take New Caledonia's specific interests into account in international negotiations conducted by France and will associate it to the discussions.

New Caledonia will be entitled to become a member or associate member of certain international organisations, depending on their constitutions (Pacific international organisations, United Nations Organisation, UNESCO, ILO, etc.). The UN will be advised that New Caledonia's emancipation is under way.

New Caledonia will be entitled to have representation in countries of the Pacific region and with the above-mentioned organisations and in European Union.

It will be entitled to enter into agreements with these countries within its areas of responsibility.

It will be associated with the re-negotiation of the Europe-OCT Association Decision.

Training will be initiated to prepare New Caledonians for exercising responsibilities in the sphere of international relations.

Relations between New Caledonia and the Territory of the Islands of Wallis and Futuna will be addressed in a separate agreement. The State's services will be organised separately in New Caledonia and in this Territory.

3.2.2 Aliens

The Executive of New Caledonia will be associated with the implementation of regulations regarding entry and length of stay of aliens.

3.2.3 Broadcasting

The Executive will be consulted by the Conseil supérieur de l'audiovisuel — CSA (French Broadcasting Authority) prior to any decision specifically concerning New Caledonia.

An agreement may be drawn up with New Caledonia to associate the latter with the CSA's broadcasting policies.

3.2.4 Law and order

The Executive will be informed by the Representative of the State of any measures taken.

3.2.5 Mining regulations

The State will devolve its powers with regard to fuel oils, potassium salts, nickel, chromium and cobalt to the Territory.

Responsibility for drafting regulations will be devolved to New Caledonia, responsibility for their implementation to the Provinces.

A Mining Council, consisting of representatives of the Provinces, whose meetings the Representative of the State will attend, will be consulted on draft Congress and Provincial Resolutions relating to mining matters. Should the Council not agree with the Resolution or the Representative of the State not be in favour, the final decision will be made by the Executive of New Caledonia.

3.2.6 International air services

The Executive will be associated with negotiations where responsibility has not been entirely devolved to New Caledonia.

3.2.7 Tertiary Education and Scientific Research

The State will associate the Executive with the preparation of contracts binding it to the research institutions working in New Caledonia and to the University, so that more appropriate consideration can be given to New Caledonia's specific requirements in the fields of higher education and research. New Caledonia will be entitled to enter into agreements on policy and objectives with these bodies.

...

5 Evolution of New Caledonia's political organisation

A poll will be held during the fourth (five-year) Congress term of office. The date of the poll will be set by the Congress in the course of the fourth term, by a qualified majority of three-fifths of its members.

If the Congress has not set such date by the end of the second-to-last year of this fourth term, the poll will be held, on a date set by the State, during the last year of the Congress term.

The poll will address devolution to New Caledonia of the reserved powers, access to international full responsibility status, and conversion of citizenship into nationality.

If the electorate votes against these proposals, the Congress, if at least one third of its members, so request, will be entitled to arrange for a second poll to be held in the second year following the first poll. Should a majority again vote against, a further poll may be held using the same procedure and the same time-frame. Should no majority in favour again be recorded, the political partners would meet to consider the situation thus arising.

For such time as the polls have not been in favour of the new political organisation proposed, the political organisation set up by the 1998 Agreement will remain in force, at its latest stage of evolution, without there being any possibility of reversal, such 'irreversibility' being constitutionally guaranteed.

The result of the poll will apply comprehensively to New Caledonia as a whole. It will not be possible for one part of New Caledonia alone to achieve full sovereignty, or alone to retain different links with France, on the grounds that its results in the poll differed from the overall result.

The State acknowledges that it is appropriate that New Caledonia achieve complete emancipation at the end of this period.

CONSTITUTION OF OCTOBER 4, 1958



WARNING

By virtue of the Constitutional Law no. 2008-724 of July 23, 2008:

- 1° The versions in italics of articles 11, 13, 25 subject to 4° below, 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 and 73 of the Constitution will come into effect in the manner determined by statutes and Institutional Acts necessary for their application ;
- 2° The versions in italics of articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50-1, 51-1 and 51-2 of the Constitution will come into effect on March 1, 2009 ;
- 3° The versions in italics of the title of Title XV and articles 88-1, 88-2, 88-4, 88-5, 88-6, 88-7 will come into effect upon the coming into effect of the Treaty of Lisbon, amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed on December 13, 2007 ;
- 4° The provisions of the version in italics of article 25 of the Constitution concerning the temporary nature of the replacement of Members of the National Assembly and of Senators accepting governmental positions, applies to Members of the National Assembly and to Senators having accepted such positions prior to the date of coming into effect of the Institutional Act provided for in this article, if, on this same date, they still hold such a position and if the parliamentary term of office for which they were elected has not yet expired ;
- 5° The two versions of article 88-5 are not applicable to accessions that result from an Intergovernmental Conference whose meeting was decided by the European Council before July 1, 2004.

CONTENTS

PREAMBLE

TITLE I - On Sovereignty (art. 2 to 4)

TITLE II - The President of the Republic (art. 5 to 19)

TITLE III - The Government (art. 20 to 23)

TITLE IV - Parliament (art. 24 to 33)

TITLE V - On Relations between Parliament and the Government (art. 34 to 51)

TITLE VI - On Treaties and International Agreements (art. 52 to 55)

TITLE VII - The Constitutional Council (art. 56 to 63)

TITLE VIII - On Judicial Authority (art. 64 to 66-1)

TITLE IX - The High Court (art. 67 and 68)

TITLE X - On the Criminal Liability of Members of the Government (art. 68-1 to 68-3)

TITLE XI - The Economic, Social and Environmental Council (art. 69 to 71)

TITLE XI A - The Defender of Rights (art. 71-1)

TITLE XII - On Territorial Communities (art. 72 to 75)

TITLE XIII - Transitional Provisions relating to New Caledonia (art. 76 to 77)

TITLE XIV - On Association Agreements (art. 88)

TITLE XV - On the European Communities and the European Union (art. 88-1 to 88-5)

- The European Union (art. 88-1 to 88-7)

TITLE XVI - On Amendments to the Constitution (art. 89)

TITLE XVII (Repealed)

CHARTER FOR THE ENVIRONMENT

PREAMBLE

The French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the Constitution of 1946, and to the rights and duties as defined in the Charter for the Environment of 2004.

By virtue of these principles and that of the self-determination of peoples, the Republic offers to the overseas territories which have expressed the will to adhere to them new institutions founded on the common ideal of liberty, equality and fraternity and conceived for the purpose of their democratic development.

Article 1.

France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. It shall be organised on a decentralised basis.

Statutes shall promote equal access by women and men to elective offices and posts as well as to position of professional and social responsibility.

TITLE I ON SOVEREIGNTY

Article 2.

The language of the Republic shall be French.

The national emblem shall be the blue, white and red tricolour flag.

The national anthem shall be *La Marseillaise*.

The maxim of the Republic shall be “Liberty, Equality, Fraternity”.

The principle of the Republic shall be: government of the people, by the people and for the people.

Article 3.

National sovereignty shall vest in the people, who shall exercise it through their representatives and by means of referendum.

No section of the people nor any individual may arrogate to itself, or to himself, the exercise thereof.

Suffrage may be direct or indirect as provided for by the Constitution. It shall always be universal, equal and secret.

All French citizens of either sex who have reached their majority and are in possession of their civil and political rights may vote as provided for by statute.

Article 4.

Political parties and groups shall contribute to the exercise of suffrage. They shall be formed and carry on their activities freely. They shall respect the principles of national sovereignty and democracy.

They shall contribute to the implementation of the principle set out in the second paragraph of article 1 as provided for by statute.

Statutes shall guarantee the expression of diverse opinions and the equitable participation of political parties and groups in the democratic life of the Nation.

TITLE II THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Article 5.

The President of the Republic shall ensure due respect for the Constitution. He shall ensure, by his arbitration, the proper functioning of the public authorities and the continuity of the State.

He shall be the guarantor of national independence, territorial integrity and due respect for Treaties.

Article 6.

The President of the Republic shall be elected for a term of five years by direct universal suffrage.

No one may hold office for more than two consecutive terms.

The manner of implementation of this article shall be determined by an Institutional Act.

Article 7.

The President of the Republic shall be elected by an absolute majority of votes cast. If such a majority is not obtained on the first ballot, a second ballot shall take place on the fourteenth day thereafter. Only the two candidates polling the greatest number of votes in the first ballot, after any withdrawal of better placed candidates, may stand in the second ballot.

The process of electing a President shall commence by the calling of said election by the Government.

The election of the new President shall be held no fewer than twenty days and no more than thirty-five days before the expiry of the term of the President in office.

Should the Presidency of the Republic fall vacant for any reason whatsoever, or should the Constitutional Council on a referral from the Government rule by an absolute majority of its members that the President of the Republic is incapacitated, the duties of the President of the Republic, with the exception of those specified in articles 11 and 12, shall be temporarily exercised by the President of the Senate or, if the latter is in turn incapacitated, by the Government.

In the case of a vacancy, or where the incapacity of the President is declared to be permanent by the Constitutional Council, elections for the new President shall, except in the event of a finding by the Constitutional Council of force majeure, be held no fewer than twenty days and no more than thirty-five days after the beginning of the vacancy or the declaration of permanent incapacity.

In the event of the death or incapacitation in the seven days preceding the deadline for registering candidacies of any of the persons who, fewer than thirty days prior to such deadline, have publicly announced their decision to stand for election, the Constitutional Council may decide to postpone the election.

If, before the first round of voting, any of the candidates dies or becomes incapacitated, the Constitutional Council shall declare the election to be postponed.

In the event of the death or incapacitation of either of the two candidates in the lead after the first round of voting before any withdrawals, the Constitutional Council shall declare that the electoral process must be repeated in full; the same shall apply in the event of the death or incapacitation of either of the two candidates still standing on the second round of voting.

All cases shall be referred to the Constitutional Council in the manner laid down in the second paragraph of article 61 or in that laid down for the registration of candidates in the Institutional Act provided for in article 6.

The Constitutional Council may extend the time limits set in paragraphs three and five above, provided that polling takes place no later than thirty-five days after the decision of the Constitutional Council. If the implementation of the provisions of this paragraph results in the postponement of the election beyond the expiry of the term of the President in office, the latter shall remain in office until his successor is proclaimed.

Neither articles 49 and 50 nor article 89 of the Constitution shall be implemented during the vacancy of the Presidency of the Republic or during the period between the declaration of the permanent incapacity of the President of the Republic and the election of his successor.

Article 8.

The President of the Republic shall appoint the Prime Minister. He shall terminate the appointment of the Prime Minister when the latter tenders the resignation of the Government.

On the recommendation of the Prime Minister, he shall appoint the other members of the Government and terminate their appointments.

Article 9.

The President of the Republic shall preside over the Council of Ministers.

Article 10.

The President of the Republic shall promulgate Acts of Parliament within fifteen days following the final passage of an Act and its transmission to the Government.

He may, before the expiry of this time limit, ask Parliament to reopen debate on the Act or any sections thereof. Such reopening of debate shall not be refused.

Article 11.

The President of the Republic may, on a recommendation from the Government when Parliament is in session, or on a joint motion of the two

Houses, published in the *Journal Officiel*, submit to a referendum any Government Bill which deals with the organization of the public authorities, or with reforms relating to the economic or social policy of the Nation, and to the public services contributing thereto, or which provides for authorization to ratify a treaty which, although not contrary to the Constitution, would affect the functioning of the institutions.

Where the referendum is held on the recommendation of the Government, the latter shall make a statement before each House and the same shall be followed by a debate.

Article 11⁽¹⁾.

The President of the Republic may, on a recommendation from the Government when Parliament is in session, or on a joint motion of the two Houses, published in the Journal Officiel, submit to a referendum any Government Bill which deals with the organization of the public authorities, or with reforms relating to the economic, social or environmental policy of the Nation, and to the public services contributing thereto, or which provides for authorization to ratify a treaty which, although not contrary to the Constitution, would affect the functioning of the institutions.

Where the referendum is held on the recommendation of the Government, the latter shall make a statement before each House and the same shall be followed by a debate.

A referendum concerning a subject mentioned in the first paragraph may be held upon the initiative of one fifth of the Members of Parliament, supported by one tenth of the voters enrolled on the electoral register. This initiative shall take the form of a Private Member's Bill and shall not be applied to the repeal of a statutory provision promulgated for less than one year.

The conditions by which it is introduced and those according to which the Constitutional Council monitors the respect of the provisions of the previous paragraph, are set down by an Institutional Act.

If the Private Member's Bill has not been considered by the two Houses within a period set by the Institutional Act, the President of the Republic shall submit it to a referendum.

Where the decision of the French people in the referendum is not favourable to the Private Member's Bill, no new referendum proposal on the same subject may be submitted before the end of a period of two years following the date of the vote.

Where the outcome of the referendum is favourable to the Government Bill or to the Private Member's Bill, the President of the Republic shall promulgate the resulting statute within fifteen days following the proclamation of the results of the vote.

Article 12.

The President of the Republic may, after consulting the Prime Minister and the Presidents of the Houses of Parliament, declare the National Assembly dissolved.

A general election shall take place no fewer than twenty days and no more than forty days after the dissolution.

The National Assembly shall sit as of right on the second Thursday following its election. Should this sitting fall outside the period prescribed for the ordinary session, a session shall be convened by right for a fifteen-day period. No further dissolution shall take place within a year following said election.

Article 13.

The President of the Republic shall sign the Ordinances and Decrees deliberated upon in the Council of Ministers.

He shall make appointments to the civil and military posts of the State.

Conseillers d'État, the *Grand Chancelier de la Légion d'Honneur*, Ambassadors and Envoys Extraordinary, *Conseillers Maîtres* of the *Cour des Comptes*, Prefects, State representatives in the overseas communities to which article 74 applies and in New Caledonia, highest-ranking Military Officers, *Recteurs des Académies* and Directors of Central Government Departments shall be appointed in the Council of Ministers.

An Institutional Act shall determine the other posts to be filled at meetings of the Council of Ministers and the manner in which the power of the President of the Republic to make appointments may be delegated by him to be exercised on his behalf.

An Institutional Act shall determine the posts or positions, other than those mentioned in the third paragraph, concerning which, on account of their importance in the guaranteeing of the rights and freedoms or the economic and social life of the Nation, the power of appointment vested in the President of the Republic shall be exercised after public consultation with the relevant standing committee in each House. The President of the Republic shall not make an appointment when the sum of the negative votes in each committee represents at least three fifths of the votes cast by the two committees. Statutes shall determine the relevant standing committees according to the posts or positions concerned.

Article 14.

The President of the Republic shall accredit ambassadors and envoys extraordinary to foreign powers; foreign ambassadors and envoys extraordinary shall be accredited to him.

Article 15.

The President of the Republic shall be Commander-in-Chief of the Armed Forces. He shall preside over the higher national defence councils and committees.

Article 16.

Where the institutions of the Republic, the independence of the Nation, the integrity of its territory or the fulfilment of its international commitments are under serious and immediate threat, and where the proper functioning of the constitutional public authorities is interrupted, the President of the Republic shall take measures required by these circumstances, after formally consulting the Prime Minister, the Presidents of the Houses of Parliament and the Constitutional Council.

He shall address the Nation and inform it of such measures.

The measures shall be designed to provide the constitutional public authorities as swiftly as possible, with the means to carry out their duties. The Constitutional Council shall be consulted with regard to such measures.

Parliament shall sit as of right.

The National Assembly shall not be dissolved during the exercise of such emergency powers.

After thirty days of the exercise of such emergency powers, the matter may be referred to the Constitutional Council by the President of the National Assembly, the President of the Senate, sixty Members of the National Assembly or sixty Senators, so as to decide if the conditions laid down in paragraph one still apply. The Council shall make its decision publicly as soon as possible. It shall, as of right, carry out such an examination and shall make its decision in the same manner after sixty days of the exercise of emergency powers or at any moment thereafter.

Article 17.

The President of the Republic is vested with the power to grant individual pardons.

Article 18.

The President of the Republic shall communicate with the two Houses of Parliament by messages which he shall cause to be read aloud and which shall not give rise to any debate.

He may take the floor before Parliament convened in Congress for this purpose. His statement may give rise, in his absence, to a debate without vote.

When not in session, the Houses of Parliament shall be convened especially for this purpose.

Article 19.

Instruments of the President of the Republic, other than those provided for under articles 8 (paragraph one), 11, 12, 16, 18, 54, 56 and 61, shall be countersigned by the Prime Minister and, where required, by the ministers concerned.

TITLE III

THE GOVERNMENT

Article 20.

The Government shall determine and conduct the policy of the Nation.

It shall have at its disposal the civil service and the armed forces.

It shall be accountable to Parliament in accordance with the terms and procedures set out in articles 49 and 50.

Article 21.

The Prime Minister shall direct the actions of the Government. He shall be responsible for national defence. He shall ensure the implementation of legislation. Subject to article 13, he shall have power to make regulations and shall make appointments to civil and military posts.

He may delegate certain of his powers to Ministers.

He shall deputize, if the case arises, for the President of the Republic as chairman of the councils and committees referred to in article 15.

He may, in exceptional cases, deputize for him as chairman of a meeting of the Council of Ministers by virtue of an express delegation of powers for a specific agenda.

Article 22.

Instruments of the Prime Minister shall be countersigned, where required, by the ministers responsible for their implementation.

Article 23.

Membership of the Government shall be incompatible with the holding of any Parliamentary office, any position of professional representation at national level, any public employment or any professional activity.

An Institutional Act shall determine the manner in which the holders of such offices, positions or employment shall be replaced.

The replacement of Members of Parliament shall take place in accordance with the provisions of article 25.

TITLE IV

PARLIAMENT

Article 24.

Parliament shall pass statutes. It shall monitor the action of the Government. It shall assess public policies.

It shall comprise the National Assembly and the Senate.

Members of the National Assembly, whose number shall not exceed five hundred and seventy-seven, shall be elected by direct suffrage.

The Senate, whose members shall not exceed three hundred and forty-eight, shall be elected by indirect suffrage. The Senate shall ensure the representation of the territorial communities of the Republic.

French nationals living abroad shall be represented in the National Assembly and in the Senate.

Article 25.

An Institutional Act shall determine the term for which each House is elected, the number of its members, their allowances, the conditions of eligibility and the terms of disqualification and of incompatibility with membership.

It shall likewise determine the manner of election of those persons called upon to replace Members of the National Assembly or Senators whose seats have become vacant, until the general or partial renewal by election of the House in which they sat, or have been temporarily replaced on account of having accepted a position in Government.

An independent commission, whose composition and rules of organization and operation shall be set down by statute, shall publicly express an opinion on the Government and Private Members' Bills defining the constituencies for the election of Members of the National Assembly, or modifying the distribution of the seats of Members of the National Assembly or of Senators.

Article 26.

No Member of Parliament shall be prosecuted, investigated, arrested, detained or tried in respect of opinions expressed or votes cast in the performance of his official duties.

No Member of Parliament shall be arrested for a serious crime or other major offence, nor shall he be subjected to any other custodial or semi-custodial measure, without the authorization of the Bureau of the House of which he is a member. Such authorization shall not be required in the case of a serious crime or other major offence committed *flagrante delicto* or when a conviction has become final.

The detention, subjecting to custodial or semi-custodial measures, or prosecution of a Member of Parliament shall be suspended for the duration of the session if the House of which he is a member so requires.

The House concerned shall meet as of right for additional sittings in order to permit the application of the foregoing paragraph should circumstances so require.

Article 27.

No Member shall be elected with any binding mandate.

Members' right to vote shall be exercised in person.

An Institutional Act may, in exceptional cases, authorize voting by proxy. In that event, no Member shall be given more than one proxy.

Article 28.

Parliament shall sit as of right in one ordinary session which shall start on the first working day of October and shall end on the last working day of June.

The number of days for which each House may sit during the ordinary session shall not exceed one hundred and twenty. The number of sitting weeks shall be determined by each House.

The Prime Minister, after consulting the President of the House concerned or the majority of the members of each House may decide that said House shall meet for additional sitting days.

The days and hours of sittings shall be determined by the Rules of Procedure of each House.

Article 29.

Parliament shall meet in extraordinary session, at the request of the Prime Minister or of the majority of the Members of the National Assembly, to debate a specific agenda.

Where an extraordinary session is held at the request of Members of the National Assembly, this session shall be closed by decree once all the items on the agenda for which Parliament was convened have been dealt with, or not later than twelve days after its first sitting, whichever shall be the earlier.

The Prime Minister alone may request a new session before the end of the month following the decree closing an extraordinary session.

Article 30.

Except where Parliament sits as of right, extraordinary sessions shall be opened and closed by a Decree of the President of the Republic.

Article 31.

Members of the Government shall have access to both Houses. They shall address either House whenever they so request.
They may be assisted by *commissaires du Gouvernement*.

Article 32.

The President of the National Assembly shall be elected for the life of a Parliament. The President of the Senate shall be elected each time elections are held for partial renewal of the Senate.

Article 33.

The sittings of the two Houses shall be public. A verbatim report of the debates shall be published in the *Journal Officiel*.
Each House may sit in camera at the request of the Prime Minister or of one tenth of its members.

TITLE V

ON RELATIONS BETWEEN PARLIAMENT AND THE GOVERNMENT

Article 34.

Statutes shall determine the rules concerning:

- civic rights and the fundamental guarantees granted to citizens for the exercise of their civil liberties; freedom, diversity and the independence of the media; the obligations imposed for the purposes of national defence upon the person and property of citizens;
- nationality, the status and capacity of persons, matrimonial property systems, inheritance and gifts;
- the determination of serious crimes and other major offences and the penalties they carry; criminal procedure; amnesty; the setting up of new categories of courts and the status of members of the Judiciary;
- the base, rates and methods of collection of all types of taxes; the issuing of currency.

Statutes shall also determine the rules governing:

- the system for electing members of the Houses of Parliament, local assemblies and the representative bodies for French nationals living abroad, as well as the conditions for holding elective offices and positions for the members of the deliberative assemblies of the territorial communities;
- the setting up of categories of public legal entities;
- the fundamental guarantees granted to civil servants and members of the Armed Forces;
- nationalisation of companies and the transfer of ownership of companies from the public to the private sector.

Statutes shall also lay down the basic principles of:

- the general organisation of national defence;

- the self-government of territorial communities, their powers and revenue;
- education;
- the preservation of the environment;
- systems of ownership, property rights and civil and commercial obligations;
- Employment law, Trade Union law and Social Security.

Finance Acts shall determine the revenue and expenditure of the State in the conditions and with the reservations provided for by an Institutional Act.

Social Security Financing Acts shall lay down the general conditions for the financial equilibrium thereof, and taking into account forecasted revenue, shall determine expenditure targets in the conditions and with the reservations provided for by an Institutional Act.

Programming Acts shall determine the objectives of the action of the State.

The multiannual guidelines for public finances shall be established by Programming Acts. They shall contribute to achieving the objective of balanced accounts for public administrations.

The provisions of this article may be further specified and completed by an Institutional Act.

Article 34-1.

The Houses of Parliament may adopt resolutions according to the conditions determined by the Institutional Act.

Any draft resolution, whose adoption or rejection would be considered by the Government as an issue of confidence, or which contained an injunction to the Government, shall be inadmissible and may not be included on the agenda.

Article 35.

A declaration of war shall be authorized by Parliament.

The Government shall inform Parliament of its decision to have the armed forces intervene abroad, at the latest three days after the beginning of said intervention. It shall detail the objectives of the said intervention. This information may give rise to a debate, which shall not be followed by a vote.

Where the said intervention shall exceed four months, the Government shall submit the extension to Parliament for authorization. It may ask the National Assembly to make the final decision.

If Parliament is not sitting at the end of the four-month period, it shall express its decision at the opening of the following session.

Article 36.

A state of siege shall be decreed in the Council of Ministers.

The extension thereof after a period of twelve days may be authorized solely by Parliament.

Article 37.

Matters other than those coming under the scope of statute law shall be matters for regulation.

Provisions of statutory origin enacted in such matters may be amended by decree issued after consultation with the *Conseil d'État*. Any such provisions passed after the coming into force of the Constitution shall be amended by

decree only if the Constitutional Council has found that they are matters for regulation as defined in the foregoing paragraph.

Article 37-1.

Statutes and regulations may contain provisions enacted on an experimental basis for limited purposes and duration.

Article 38.

In order to implement its programme, the Government may ask Parliament for authorization, for a limited period, to take measures by Ordinance that are normally the preserve of statute law.

Ordinances shall be issued in the Council of Ministers, after consultation with the *Conseil d'État*. They shall come into force upon publication, but shall lapse in the event of failure to table before Parliament the Bill to ratify them by the date set by the Enabling Act. They may only be ratified in explicit terms.

At the end of the period referred to in the first paragraph hereinabove Ordinances may be amended solely by an Act of Parliament in those areas governed by statute law.

Article 39.

Both the Prime Minister and Members of Parliament shall have the right to initiate legislation.

Government Bills shall be discussed in the Council of Ministers after consultation with the *Conseil d'État* and shall be tabled in one or other of the two Houses. Finance Bills and Social Security Financing Bills shall be tabled first before the National Assembly. Without prejudice to the first paragraph of article 44, Bills primarily dealing with the organisation of territorial communities shall be tabled first in the Senate.

The tabling of Government Bills before the National Assembly or the Senate, shall comply with the conditions determined by an Institutional Act.

Government Bills may not be included on the agenda if the Conference of Presidents of the first House to which the Bill has been referred, declares that the rules determined by the Institutional Act have not been complied with. In the case of disagreement between the Conference of Presidents and the Government, the President of the relevant House or the Prime Minister may refer the matter to the Constitutional Council, which shall rule within a period of eight days.

Within the conditions provided for by statute, the President of either House may submit a Private Member's Bill tabled by a Member of the said House, before it is considered in committee, to the *Conseil d'État* for its opinion, unless the Member who tabled it disagrees.

Article 40.

Private Members' Bills and amendments introduced by Members of Parliament shall not be admissible where their enactment would result in either a diminution of public revenue or the creation or increase of any public expenditure.

Article 41.

If, during the legislative process, it appears that a Private Member's Bill or amendment is not a matter for statute or is contrary to a delegation granted under article 38, the Government or the President of the House concerned, may argue that it is inadmissible.

In the event of disagreement between the Government and the President of the House concerned, the Constitutional Council, at the request of one or the other, shall give its ruling within eight days.

Article 42.

The discussion of Government and Private Members' Bills shall, in plenary sitting, concern the text passed by the committee to which the Bill has been referred, in accordance with article 43, or failing that, the text which has been referred to the House.

Notwithstanding the foregoing, the plenary discussion of Constitutional Revision Bills, Finance Bills and Social Security Financing Bills, shall concern, during the first reading before the House to which the Bill has been referred in the first instance, the text presented by the Government, and during the subsequent readings, the text transmitted by the other House.

The plenary discussion at first reading of a Government or Private Members' Bill may only occur before the first House to which it is referred, at the end of a period of six weeks after it has been tabled. It may only occur, before the second House to which it is referred, at the end of a period of four weeks, from the date of transmission.

The previous paragraph shall not apply if the accelerated procedure has been implemented according to the conditions provided for in article 45. Neither shall it apply to Finance Bills, Social Security Financing Bills, or to Bills concerning a state of emergency.

Article 43.

Government and Private Members' Bills shall be referred to one of the standing committees, the number of which shall not exceed eight in each House.

At the request of the Government or of the House before which such a bill has been tabled, Government and Private Members' Bills shall be referred for consideration to a committee specially set up for this purpose.

Article 44.

Members of Parliament and the Government shall have the right of amendment. This right may be used in plenary sitting or in committee under the conditions set down by the Rules of Procedure of the Houses, according to the framework determined by an Institutional Act.

Once debate has begun, the Government may object to the consideration of any amendment which has not previously been referred to committee.

If the Government so requests, the House before which the Bill is tabled shall proceed to a single vote on all or part of the text under debate, on the sole basis of the amendments proposed or accepted by the Government.

Article 45.

Every Government or Private Member's Bill shall be considered successively in the two Houses of Parliament with a view to the passing of an identical text. Without prejudice to the application of articles 40 and 41, all amendments which have a link, even an indirect one, with the text that was tabled or transmitted, shall be admissible on first reading.

If, as a result of a failure to agree by the two Houses, it has proved impossible to pass a Government or Private Member's Bill after two readings by each House or, if the Government has decided to apply the accelerated procedure without the two Conferences of Presidents being jointly opposed, after a single reading of such a Bill by each House, the Prime Minister, or in the case of a Private Members' Bill, the Presidents of the two Houses acting jointly, may convene a joint committee, composed of an equal number of members from each House, to propose a text on the provisions still under debate.

The text drafted by the joint committee may be submitted by the Government to both Houses for approval. No amendment shall be admissible without the consent of the Government.

If the joint committee fails to agree on a common text, or if the text is not passed as provided in the foregoing paragraph, the Government may, after a further reading by the National Assembly and by the Senate, ask the National Assembly to reach a final decision. In such an event, the National Assembly may reconsider either the text drafted by the joint committee, or the last text passed by itself, as modified, as the case may be, by any amendment(s) passed by the Senate.

Article 46.

Acts of Parliament which are defined by the Constitution as being Institutional Acts shall be enacted and amended as provided for hereinafter.

The Government or Private Member's Bill may only be submitted, on first reading, to the consideration and vote of the Houses after the expiry of the periods set down in the third paragraph of article 42. Notwithstanding the foregoing, if the accelerated procedure has been applied according to the conditions provided for in article 45, the Government or Private Member's Bill may not be submitted for consideration by the first House to which it is referred before the expiry of a fifteen-day period after it has been tabled.

The procedure set out in article 45 shall apply. Nevertheless, failing agreement between the two Houses, the text may be passed by the National Assembly on a final reading only by an absolute majority of the Members thereof.

Institutional Acts relating to the Senate must be passed in identical terms by the two Houses.

Institutional Acts shall not be promulgated until the Constitutional Council has declared their conformity with the Constitution.

Article 47.

Parliament shall pass Finance Bills in the manner provided for by an Institutional Act.

Should the National Assembly fail to reach a decision on first reading within forty days following the tabling of a Bill, the Government shall refer the Bill to the Senate, which shall make its decision known within fifteen days. The procedure set out in article 45 shall then apply.

Should Parliament fail to reach a decision within seventy days, the provisions of the Bill may be brought into force by Ordinance.

Should the Finance Bill setting out revenue and expenditure for a financial year not be tabled in time for promulgation before the beginning of that year, the Government shall as a matter of urgency ask Parliament for authorization to collect taxes and shall make available by decree the funds needed to meet commitments already voted for.

The time limits set by this article shall be suspended when Parliament is not in session.

Article 47-1.

Parliament shall pass Social Security Financing Bills in the manner provided by an Institutional Act.

Should the National Assembly fail to reach a decision on first reading within twenty days of the tabling of a Bill, the Government shall refer the Bill to the Senate, which shall make its decision known within fifteen days. The procedure set out in article 45 shall then apply.

Should Parliament fail to reach a decision within fifty days, the provisions of the Bill may be implemented by Ordinance.

The time limits set by this article shall be suspended when Parliament is not in session and, as regards each House, during the weeks when it has decided not to sit in accordance with the second paragraph of article 28.

Article 47-2.

The *Cour des Comptes* shall assist Parliament in monitoring Government action. It shall assist Parliament and the Government in monitoring the implementation of Finance Acts and Social Security Financing Acts, as well in assessing public policies. By means of its public reports, it shall contribute to informing citizens.

The accounts of public administrations shall be lawful and faithful. They shall provide a true and fair view of the result of the management, assets and financial situation of the said public administrations.

Article 48.

Without prejudice to the application of the last three paragraphs of article 28, the agenda shall be determined by each House.

During two weeks of sittings out of four, priority shall be given, in the order determined by the Government, to the consideration of texts and to debates which it requests to be included on the agenda.

In addition, the consideration of Finance Bills, Social Security Financing Bills and, subject to the provisions of the following paragraph, texts transmitted by the other House at least six weeks previously, as well as Bills concerning a state of emergency and requests for authorization referred to in article 35, shall, upon Government request, be included on the agenda with priority.

During one week of sittings out of four, priority shall be given, in the order determined by each House, to the monitoring of Government action and to the assessment of public policies.

One day of sitting per month shall be given over to an agenda determined by each House upon the initiative of the opposition groups in the relevant House, as well as upon that of the minority groups.

During at least one sitting per week, including during the extraordinary sittings provided for in article 29, priority shall be given to questions from Members of Parliament and to answers from the Government.

Article 49.

The Prime Minister, after deliberation by the Council of Ministers, may make the Government's programme or possibly a general policy statement an issue of a vote of confidence before the National Assembly.

The National Assembly may call the Government to account by passing a resolution of no-confidence. Such a resolution shall not be admissible unless it is signed by at least one tenth of the Members of the National Assembly. Voting may not take place within forty-eight hours after the resolution has been tabled. Solely votes cast in favour of the no-confidence resolution shall be counted and the latter shall not be passed unless it secures a majority of the Members of the House. Except as provided for in the following paragraph, no Member shall sign more than three resolutions of no-confidence during a single ordinary session and no more than one during a single extraordinary session.

The Prime Minister may, after deliberation by the Council of Ministers, make the passing of a Finance Bill or Social Security Financing Bill an issue of a vote of confidence before the National Assembly. In that event, the Bill shall be considered passed unless a resolution of no-confidence, tabled within the subsequent twenty-four hours, is carried as provided for in the foregoing paragraph. In addition, the Prime Minister may use the said procedure for one other Government or Private Members' Bill per session.

The Prime Minister may ask the Senate to approve a statement of general policy.

Article 50.

When the National Assembly passes a resolution of no-confidence, or when it fails to endorse the Government programme or general policy statement, the Prime Minister shall tender the resignation of the Government to the President of the Republic.

Article 50-1.

The Government may, before either House, upon its own initiative or upon the request of a parliamentary group, as set down in article 51-1, make a declaration on a given subject, which leads to a debate and, if it so desires, gives rise to a vote, without making it an issue of confidence.

Article 51.

The closing of ordinary or extraordinary sessions shall be automatically postponed in order to permit the application of article 49, if the case arises. Additional sittings shall be held automatically for the same purpose.

Article 51-1.

The Rules of Procedure of each House shall determine the rights of the parliamentary groups set up within it. They shall recognize that opposition groups in the House concerned, as well as minority groups, have specific rights.

Article 51-2.

In order to implement the monitoring and assessment missions laid down in the first paragraph of article 24, committees of inquiry may be set up within each House to gather information, according to the conditions provided for by statute.

Statutes shall determine their rules of organization and operation. The conditions for their establishment shall be determined by the Rules of Procedure of each House.

TITLE VI

ON TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS

Article 52.

The President of the Republic shall negotiate and ratify treaties.

He shall be informed of any negotiations for the conclusion of an international agreement not subject to ratification.

Article 53.

Peace Treaties, Trade agreements, treaties or agreements relating to international organization, those committing the finances of the State, those modifying provisions which are the preserve of statute law, those relating to the status of persons, and those involving the ceding, exchanging or acquiring of territory, may be ratified or approved only by an Act of Parliament.

They shall not take effect until such ratification or approval has been secured.

No ceding, exchanging or acquiring of territory shall be valid without the consent of the population concerned.

Article 53-1.

The Republic may enter into agreements with European States which are bound by undertakings identical with its own in matters of asylum and the protection of human rights and fundamental freedoms, for the purpose of determining their respective jurisdiction as regards requests for asylum submitted to them.

However, even if the request does not fall within their jurisdiction under the terms of such agreements, the authorities of the Republic shall remain empowered to grant asylum to any foreigner who is persecuted for his action in pursuit of freedom or who seeks the protection of France on other grounds.

Article 53-2.

The Republic may recognize the jurisdiction of the International Criminal Court as provided for by the Treaty signed on 18 July 1998.

Article 54.

If the Constitutional Council, on a referral from the President of the Republic, from the Prime Minister, from the President of one or the other Houses, or from sixty Members of the National Assembly or sixty Senators, has held that an international undertaking contains a clause contrary to the Constitution, authorization to ratify or approve the international undertaking involved may be given only after amending the Constitution.

Article 55.

Treaties or agreements duly ratified or approved shall, upon publication, prevail over Acts of Parliament, subject, with respect to each agreement or treaty, to its application by the other party.

**TITLE VII
THE CONSTITUTIONAL COUNCIL**

Article 56.

The Constitutional Council shall comprise nine members, each of whom shall hold office for a non-renewable term of nine years. One third of the membership of the Constitutional Council shall be renewed every three years. Three of its members shall be appointed by the President of the Republic, three by the President of the National Assembly and three by the President of the Senate. The procedure provided for in the last paragraph of article 13 shall apply to these appointments. The appointments made by the President of each House shall be submitted for the opinion solely of the relevant standing committee in that House.

In addition to the nine members provided for above, former Presidents of the Republic shall be ex officio life members of the Constitutional Council.

The President shall be appointed by the President of the Republic. He shall have a casting vote in the event of a tie.

Article 57.

The office of member of the Constitutional Council shall be incompatible with that of Minister or Member of the Houses of Parliament. Other incompatibilities shall be determined by an Institutional Act.

Article 58.

The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of the election of the President of the Republic.

It shall examine complaints and shall proclaim the results of the vote.

Article 59.

The Constitutional Council shall rule on the proper conduct of the election of Members of the National Assembly and Senators in disputed cases.

Article 60.

The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of referendum proceedings as provided for in articles 11 and 89 and in Title XV and shall proclaim the results of the referendum.

Article 61.

Institutional Acts, before their promulgation, Private Members' Bills mentioned in article 11 before they are submitted to referendum, and the Rules of Procedure of the Houses of Parliament shall, before coming into force, be referred to the Constitutional Council, which shall rule on their conformity with the Constitution.

To the same end, Acts of Parliament may be referred to the Constitutional Council, before their promulgation, by the President of the Republic, the Prime Minister, the President of the National Assembly, the President of the Senate, sixty Members of the National Assembly or sixty Senators.

In the cases provided for in the two foregoing paragraphs, the Constitutional Council must deliver its ruling within one month. However, at the request of the Government, in cases of urgency, this period shall be reduced to eight days.

In these same cases, referral to the Constitutional Council shall suspend the time allotted for promulgation.

Article 61-1.

If, during proceedings in progress before a court of law, it is claimed that a statutory provision infringes the rights and freedoms guaranteed by the Constitution, the matter may be referred by the Conseil d'État or by the Cour de Cassation to the Constitutional Council, within a determined period.

An Institutional Act shall determine the conditions for the application of the present article.

Article 62.

A provision declared unconstitutional on the basis of article 61 shall be neither promulgated nor implemented.

A provision declared unconstitutional on the basis of article 61-1 shall be repealed as of the publication of the said decision of the Constitutional Council or as of a subsequent date determined by said decision. The Constitutional Council shall determine the conditions and the limits according to which the effects produced by the provision shall be liable to challenge.

No appeal shall lie from the decisions of the Constitutional Council. They shall be binding on public authorities and on all administrative authorities and all courts.

Article 63.

An Institutional Act shall determine the rules of organization and operation of the Constitutional Council, the procedure to be followed before it and, in particular, the time limits allotted for referring disputes to it.

TITLE VIII

ON JUDICIAL AUTHORITY

Article 64.

The President of the Republic shall be the guarantor of the independence of the Judicial Authority.

He shall be assisted by the High Council of the Judiciary.

An Institutional Act shall determine the status of members of the Judiciary.

Judges shall be irremovable from office.

Article 65

The High Council of the Judiciary shall consist of a section with jurisdiction over judges and a section with jurisdiction over public prosecutors.

The section with jurisdiction over judges shall be presided over by the Chief President of the Cour de cassation. It shall comprise, in addition, five judges and one public prosecutor, one Conseiller d'État appointed by the Conseil d'État and one practising lawyer, as well as six qualified, prominent citizens who are not Members of Parliament, of the Judiciary or of the administration.

The President of the Republic, the President of the National Assembly and the President of the Senate shall each appoint two qualified, prominent citizens.

The procedure provided for in the last paragraph of article 13 shall be applied to the appointments of the qualified, prominent citizens. The appointments made by the President of each House of Parliament shall be submitted for the sole opinion of the relevant standing committee in that House.

The section with jurisdiction over public prosecutors shall be presided over by the Chief Public Prosecutor at the Cour de Cassation. It shall comprise, in addition, five public prosecutors and one judge, as well as the Conseiller d'État and the practising lawyer, together with the six qualified, prominent citizens referred to in the second paragraph.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over judges shall make recommendations for the appointment of judges to the Cour de cassation, the Chief Presidents of Courts of Appeal and the Presidents of the Tribunaux de grande instance. Other judges shall be appointed after consultation with this section.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over public prosecutors shall give its opinion on the appointment of public prosecutors.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over judges shall act as disciplinary tribunal for judges. When acting in such capacity, in addition to the members mentioned in the second paragraph, it shall comprise the judge belonging to the section with jurisdiction over public prosecutors.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over public prosecutors shall give its opinion on disciplinary measures regarding public prosecutors. When acting in such capacity, it shall comprise, in addition to the members mentioned in paragraph three, the public prosecutor belonging to the section with jurisdiction over judges.

The High Council of the Judiciary shall meet in plenary section to reply to the requests for opinions made by the President of the Republic in application of article 64. It shall also express its opinion in plenary section, on questions concerning the deontology of judges or on any question concerning the operation of justice which is referred to it by the Minister of Justice. The plenary section comprises three of the five judges mentioned in the second

paragraph, three of the five prosecutors mentioned in the third paragraph as well as the Conseiller d'État, the practising lawyer and the six qualified, prominent citizens referred to in the second paragraph. It is presided over by the Chief President of the Cour de cassation who may be substituted by the Chief Public Prosecutor of this court.

The Minister of Justice may participate in all the sittings of the sections of the High Council of the Judiciary except those concerning disciplinary matters.

According to the conditions determined by an Institutional Act, a referral may be made to the High Council of the Judiciary by a person awaiting trial.

The Institutional Act shall determine the manner in which this article is to be implemented.

Article 66.

No one shall be arbitrarily detained.

The Judicial Authority, guardian of the freedom of the individual, shall ensure compliance with this principle in the conditions laid down by statute.

Article 66-1.

No one shall be sentenced to death.

TITLE IX

THE HIGH COURT

Article 67.

The President of the Republic shall incur no liability by reason of acts carried out in his official capacity, subject to the provisions of Articles 53-2 and 68 hereof.

Throughout his term of office the President shall not be required to testify before any French Court of law or Administrative authority and shall not be the object of any civil proceedings, nor of any preferring of charges, prosecution or investigatory measures. All limitation periods shall be suspended for the duration of said term of office.

All actions and proceedings thus stayed may be reactivated or brought against the President one month after the end of his term of office.

Article 68.

The President of the Republic shall not be removed from office during the term thereof on any grounds other than a breach of his duties patently incompatible with his continuing in office. Such removal from office shall be proclaimed by Parliament sitting as the High Court.

The proposal to convene the High Court adopted by one or other of the Houses of Parliament shall be immediately transmitted to the other House which shall make its decision known within fifteen days of receipt thereof.

The High Court shall be presided over by the President of the National Assembly. It shall give its ruling as to the removal from office of the President, by secret ballot, within one month. Its decision shall have immediate effect.

Rulings given hereunder shall require a majority of two thirds of the members of the House involved or of the High Court. No proxy voting shall be allowed.

Only votes in favour of the removal from office or the convening of the High Court shall be counted.

An Institutional Act shall determine the conditions for the application hereof.

TITLE X

ON THE CRIMINAL LIABILITY OF THE GOVERNMENT

Article 68-1.

Members of the Government shall be criminally liable for acts performed in the holding of their office and classified as serious crimes or other major offences at the time they were committed.

They shall be tried by the Court of Justice of the Republic.

The Court of Justice of the Republic shall be bound by such definition of serious crimes and other major offences and such determination of penalties as are laid down by statute.

Article 68-2.

The Court of Justice of the Republic shall consist of fifteen members: twelve Members of Parliament, elected in equal number from among their ranks by the National Assembly and the Senate after each general or partial renewal by election of these Houses, and three judges of the *Cour de cassation*, one of whom shall preside over the Court of Justice of the Republic.

Any person claiming to be a victim of a serious crime or other major offence committed by a member of the Government in the holding of his office may lodge a complaint with a petitions committee.

This committee shall order the case to be either closed or forwarded to the Chief Public Prosecutor at the *Cour de cassation* for referral to the Court of Justice of the Republic.

The Chief Public prosecutor at the *Cour de cassation* may also make a referral *ex officio* to the Court of Justice of the Republic with the assent of the petitions committee.

An Institutional Act shall determine the manner in which this article is to be implemented.

Article 68-3.

The provisions of this title shall apply to acts committed before its entry into force.

TITLE XI

THE ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL COUNCIL

Article 69.

The Economic, Social and Environmental Council, on a referral from the Government, shall give its opinion on such Government Bills, draft Ordinances, draft Decrees, and Private Members' Bills as have been submitted to it.

A member of the Economic, Social and Environmental Council may be designated by the Council to present, to the Houses of Parliament, the opinion of the Council on such drafts, Government or Private Members' Bills as have been submitted to it.

A referral may be made to the Economic, Social and Environmental Council by petition, in the manner determined by an Institutional Act. After consideration of the petition, it shall inform the Government and Parliament of the pursuant action it proposes.

Article 70.

The Economic, Social and Environmental Council may also be consulted by the Government or Parliament on any economic, social or environmental issue. The Government may also consult it on Programming Bills setting down the multiannual guidelines for public finances. Any plan or Programming Bill of an economic, social or environmental nature shall be submitted to it for its opinion.

Article 71.

The composition of the Economic, Social and Environmental Council, which shall not exceed two hundred and thirty-three members, and its rules of proceeding shall be determined by an Institutional Act.

**TITLE XI A
THE DEFENDER OF RIGHTS**

Article 71-1(1).

The Defender of Rights shall ensure the due respect of rights and freedoms by state administrations, territorial communities, public legal entities, as well as by all bodies carrying out a public service mission or by those that the Institutional Act decides fall within his remit.

Referral may be made to the Defender of Rights, in the manner determined by an Institutional Act, by every person who considers his rights to have been infringed by the operation of a public service or of a body mentioned in the first paragraph. He may act without referral.

The Institutional Act shall set down the mechanisms for action and the powers of the Defender of Rights. It shall determine the manner in which he may be assisted by third parties in the exercise of certain of his powers.

The Defender of Rights shall be appointed by the President of the Republic for a six-year, non-renewable term, after the application of the procedure provided for in the last paragraph of article 13. This position is incompatible with membership of the Government or membership of Parliament. Other incompatibilities shall be determined by the Institutional Act.

The Defender of Rights is accountable for his actions to the President of the Republic and to Parliament.

**TITLE XII
ON TERRITORIAL COMMUNITIES**

Article 72.

The territorial communities of the Republic shall be the Communes, the Departments, the Regions, the Special-Status communities and the Overseas Territorial communities to which article 74 applies. Any other territorial community created, if need be, to replace one or more communities provided for by this paragraph shall be created by statute.

Territorial communities may take decisions in all matters arising under powers that can best be exercised at their level.

In the conditions provided for by statute, these communities shall be self-governing through elected councils and shall have power to make regulations for matters coming within their jurisdiction.

In the manner provided for by an Institutional Act, except where the essential conditions for the exercise of public freedoms or of a right guaranteed by the Constitution are affected, territorial communities or associations thereof may, where provision is made by statute or regulation, as the case may be, derogate on an experimental basis for limited purposes and duration from provisions laid down by statute or regulation governing the exercise of their powers.

No territorial community may exercise authority over another. However, where the exercising of a power requires the combined action of several territorial communities, one of those communities or one of their associations may be authorised by statute to organise such combined action.

In the territorial communities of the Republic, the State representative, representing each of the members of the Government, shall be responsible for national interests, administrative supervision and compliance with the law.

Article 72-1.

The conditions in which voters in each territorial community may use their right of petition to ask for a matter within the powers of the community to be entered on the agenda of its Deliberative Assembly shall be determined by statute.

In the conditions determined by an Institutional Act, draft decisions or acts within the powers of a territorial community may, on the initiative of the latter, be submitted for a decision by voters of said community by means of a referendum.

When the creation of a special-status territorial community or modification of its organisation are contemplated, a decision may be taken by statute to consult the voters registered in the relevant communities. Voters may also be consulted on changes to the boundaries of territorial communities in the conditions determined by statute.

Article 72-2.

Territorial communities shall enjoy revenue of which they may dispose freely in the conditions determined by statute.

They may receive all or part of the proceeds of taxes of all kinds. They may be authorised by statute to determine the basis of assessment and the rates thereof, within the limits set by such statutes.

Tax revenue and other own revenue of territorial communities shall, for each category of territorial community, represent a decisive share of their revenue. The conditions for the implementation of this rule shall be determined by an Institutional Act.

Whenever powers are transferred between central government and the territorial communities, revenue equivalent to that given over to the exercise of those powers shall also be transferred. Whenever the effect of newly created or extended powers is to increase the expenditure to be borne by territorial

communities, revenue as determined by statute shall be allocated to said communities.

Equalisation mechanisms intended to promote equality between territorial communities shall be provided for by statute.

Article 72-3.

The Republic shall recognise the overseas populations within the French people in a common ideal of liberty, equality and fraternity.

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, the Wallis and Futuna Islands and French Polynesia shall be governed by article 73 as regards overseas departments and regions and for the territorial communities set up under the final paragraph of article 73, and by article 74 for the other communities.

The status of New Caledonia shall be governed by title XIII.

The legislative system and special organisation of the French Southern and Antarctic Territories and Clipperton shall be determined by statute.

Article 72-4.

No change of status as provided for by articles 73 and 74 with respect to the whole or part of any one of the communities to which the second paragraph of article 72-3 applies, shall take place without the prior consent of voters in the relevant community or part of a community being sought in the manner provided for by the paragraph below. Such change of status shall be made by an Institutional Act.

The President of the Republic may, on a recommendation from the Government when Parliament is in session or on a joint motion of the two Houses, published in either case in the *Journal Officiel*, decide to consult voters in an overseas territorial community on a question relating to its organisation, its powers or its legislative system. Where the referendum concerns a change of status as provided for by the foregoing paragraph and is held in response to a recommendation by the Government, the Government shall make a statement before each House which shall be followed by debate.

Article 73.

In the overseas departments and regions, statutes and regulations shall be automatically applicable. They may be adapted in the light of the specific characteristics and constraints of such communities.

Those adaptations may be decided on by the communities in areas in which their powers are exercised if the relevant communities have been empowered to that end by statute.

By way of derogation from the first paragraph hereof and in order to take account of their specific features, communities to which this article applies may be empowered by statute to determine themselves the rules applicable in their territory in a limited number of matters that fall to be determined by statute.

These rules may not concern nationality, civic rights, the guarantees of civil liberties, the status and capacity of persons, the organisation of justice, criminal law, criminal procedure, foreign policy, defence, public security and

public order, currency, credit and exchange, or electoral law. This list may be clarified and amplified by an Institutional Act.

The two foregoing paragraphs shall not apply in the department and region of La Réunion.

The powers to be conferred pursuant to the second and third paragraphs hereof shall be determined at the request of the relevant territorial community in the conditions and subject to the reservations provided for by an Institutional Act. They may not be conferred where the essential conditions for the exercise of civil liberties or of a right guaranteed by the Constitution are affected.

The setting up by statute of a territorial community to replace an overseas department and region or a single Deliberative Assembly for the two communities shall not be carried out unless the consent of the voters registered there has first been sought as provided by the second paragraph of article 72-4.

Article 73⁽¹⁾.

In the overseas departments and regions, statutes and regulations shall be automatically applicable. They may be adapted in the light of the specific characteristics and constraints of such communities.

Those adaptations may be decided on by the communities in areas in which their powers are exercised if the relevant communities have been empowered to that end by statute or by regulation, whichever is the case.

By way of derogation from the first paragraph hereof and in order to take account of their specific features, communities to which this article applies may be empowered by statute or by regulation, whichever is the case, to determine themselves the rules applicable in their territory in a limited number of matters that fall to be determined by statute or by regulation.

These rules may not concern nationality, civic rights, the guarantees of civil liberties, the status and capacity of persons, the organisation of justice, criminal law, criminal procedure, foreign policy, defence, public security and public order, currency, credit and exchange, or electoral law. This list may be clarified and amplified by an Institutional Act.

The two foregoing paragraphs shall not apply in the department and region of La Réunion.

The powers to be conferred pursuant to the second and third paragraphs hereof shall be determined at the request of the relevant territorial community in the conditions and subject to the reservations provided for by an Institutional Act. They may not be conferred where the essential conditions for the exercise of civil liberties or of a right guaranteed by the Constitution are affected.

The setting up by statute of a territorial community to replace an overseas department and region or a single Deliberative Assembly for the two communities shall not be carried out unless the consent of the voters registered there has first been sought as provided by the second paragraph of article 72-4.

Article 74.

The Overseas territorial communities to which this article applies shall have a status reflecting their respective local interests within the Republic.

This status shall be determined by an Institutional Act, passed after consultation of the Deliberative Assembly, which shall specify:

- the conditions in which statutes and regulations shall apply there;
- the powers of the territorial community; subject to those already exercised by said community the transfer of central government powers may not involve any of the matters listed in paragraph four of article 73, as specified and completed, if need be, by an Institutional Act;
- the rules governing the organisation and operation of the institutions of the territorial community and the electoral system for its Deliberative Assembly;
- the conditions in which its institutions are consulted on Government or Private Members' Bills and draft Ordinances or draft Decrees containing provisions relating specifically to the community and to the ratification or approval of international undertakings entered into in matters within its powers.

The Institutional Act may also, for such territorial communities as are self-governing, determine the conditions in which:

- the *Conseil d'État* shall exercise specific judicial review of certain categories of decisions taken by the Deliberative Assembly in matters which are within the powers vested in it by statute;
- the Deliberative Assembly may amend a statute promulgated after the coming into effect of the new status of said territorial community where the Constitutional Council, acting in particular on a referral from the authorities of the territorial community, has found that statute law has intervened in a field within the powers of said Assembly;
- measures justified by local needs may be taken by the territorial community in favour of its population as regards access to employment, the right of establishment for the exercise of a professional activity or the protection of land;
- the community may, subject to review by the central government, participate in the exercise of the powers vested in it while showing due respect for the guaranties given throughout national territory for the exercising of civil liberties.

The other rules governing the specific organisation of the territorial communities to which this article applies shall be determined and amended by statute after consultation with their Deliberative Assembly.

Article 74-1.

In the Overseas territorial communities referred to by Article 74 and in New Caledonia, the Government may, in matters which remain within the power of the State, extend by Ordinance, with any necessary adaptations, the statutory provisions applying in mainland France, or adapt the statutory provisions applying, to the specific organization of the community in question, provided statute law has not expressly excluded the use of this procedure for the provisions involved.

Such Ordinances shall be issued in the Council of Ministers after receiving the opinion of the relevant Deliberative Assemblies and the *Conseil d'État*. They shall come into force upon publication. They shall lapse if they are not ratified by Parliament within eighteen months of their publication.

Article 75.

Citizens of the Republic who do not have ordinary civil status, the sole status referred to in Article 34, shall retain their personal status until such time as they have renounced the same.

Article 75-1.

Regional languages are part of France's heritage.

TITLE XIII

TRANSITIONAL PROVISIONS PERTAINING TO NEW CALEDONIA

Article 76.

The population of New Caledonia is called upon to vote by 31 December, 1998 on the provisions of the agreement signed at Nouméa on 5 May, 1998, published in the *Journal Officiel* of the French Republic on 27 May, 1998.

Persons satisfying the requirements laid down in article 2 of Act No. 88-1028 of 9 November, 1988 shall be eligible to take part in the vote.

The measures required to organize the voting process shall be taken by decree adopted after consultation with the *Conseil d'État* and discussion in the Council of Ministers.

Article 77.

After approval of the agreement by the vote provided for in article 76, the Institutional Act passed after consultation with the Deliberative Assembly of New Caledonia shall determine, in order to ensure the development of New Caledonia in accordance with the guidelines set out in that agreement and in the manner required for its implementation:

- those of the State's powers which are to be definitively transferred to the institutions of New Caledonia, the applicable time frame and the manner in which said transfer shall be proceeded with, together with the apportionment of expenditure arising in connection therewith;
- the rules governing the organization and operation of the institutions of New Caledonia, in particular the circumstances in which certain kinds of decisions taken by the Deliberative Assembly of New Caledonia may be referred to the Constitutional Council for review before publication;
- the rules concerning citizenship, the electoral system, employment, and personal status as laid down by customary law;
- the conditions and the time limits within which the population concerned in New Caledonia is to vote on the attainment of full sovereignty.

Any other measures required to give effect to the agreement referred to in article 76 shall be determined by statute.

For the purpose of defining the body of electors called upon to elect members of the Deliberative Assemblies of New Caledonia and the provinces, the list referred to in the Agreement mentioned in Article 76 hereof and Sections 188 and 189 of Institutional Act n° 99-209 of March 19, 1999 pertaining to New Caledonia is the list drawn up for the ballot provided for in Article 76 hereinabove which includes those persons not eligible to vote.

Articles 78 to 86 repealed

TITLE XIV

ON THE FRENCH-SPEAKING WORLD AND ON ASSOCIATION AGREEMENTS

Article 87.

The Republic shall participate in the development of solidarity and cooperation between States and peoples having the French language in common.

Article 88.

The Republic may enter into agreements with States which wish to associate with it in order to develop their civilizations.

TITLE XV

ON THE EUROPEAN UNION

Article 88-1.

The Republic shall participate in the European Union constituted by States which have freely chosen to exercise some of their powers in common by virtue of the Treaty on European Union and of the Treaty on the Functioning of the European Union, as they result from the treaty signed in Lisbon on 13 December, 2007.

Article 88-2.

Statutes shall determine the rules relating to the European arrest warrant pursuant to acts adopted by the institutions on the European Union.

Article 88-3.

Subject to reciprocity and in accordance with the terms of the Treaty on European Union signed on 7 February 1992, the right to vote and stand as a candidate in municipal elections shall be granted only to citizens of the Union residing in France. Such citizens shall neither hold the office of Mayor or Deputy Mayor nor participate in the designation of Senate electors or in the election of Senators. An Institutional Act passed in identical terms by the two Houses shall determine the manner of implementation of this article.

Article 88-4.

The government shall lay before the National Assembly and the Senate drafts of European legislative acts as well as other drafts of or proposals for acts of the European Union as soon as they have been transmitted to the Council of the European Union.

In the manner laid down by the Rules of Procedure of each House, European resolutions may be passed, even if Parliament is not in session, on the drafts or proposals referred to in the preceding paragraph, as well as on any document issuing from a European Union Institution.

A committee in charge of European affairs shall be set up in each of the Houses of Parliament.

Article 88-5⁽¹⁾.

Any Government Bill authorizing the ratification of a treaty pertaining to the accession of a state to the European Union shall be submitted to referendum by the President of the Republic.

Notwithstanding the foregoing, by passing a motion adopted in identical terms in each House by a three-fifths majority, Parliament may authorize the passing of the Bill according to the procedure provided for in paragraph three of article 89.

Article 88-6

The National Assembly or the Senate may issue a reasoned opinion as to the conformity of a draft proposal for a European Act with the principle of subsidiarity. Said opinion shall be addressed by the President of the House involved to the Presidents of the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission. The Government shall be informed of said opinion.

Each House may institute proceedings before the Court of Justice of the European Union against a European Act for non-compliance with the principle of subsidiarity. Such proceedings shall be referred to the Court of Justice of the European Union by the Government.

For the purpose of the foregoing, resolutions may be passed, even if Parliament is not in session, in the manner set down by the Rules of Procedure of each House for the tabling and discussion thereof. Such proceedings shall be obligatory upon the request of sixty Members of the National Assembly or sixty Senators.

Article 88-7

Parliament may, by the passing of a motion in identical terms by the National Assembly and the Senate, oppose any modification of the rules governing the passing of Acts of the European Union in cases provided for under the simplified revision procedure for treaties or under judicial cooperation on civil matters, as set forth in the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, as they result from the treaty signed in Lisbon on December 13, 2007.

TITLE XVI

ON AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

Article 89.

The President of the Republic, on the recommendation of the Prime Minister, and Members of Parliament alike shall have the right to initiate amendments to the Constitution.

A Government or a Private Member's Bill to amend the Constitution must be considered within the time limits set down in the third paragraph of article 42 and be passed by the two Houses in identical terms. The amendment shall take effect after approval by referendum.

However, a Government Bill to amend the Constitution shall not be submitted to referendum where the President of the Republic decides to submit it to Parliament convened in Congress; the Government Bill to amend the

Constitution shall then be approved only if it is passed by a three-fifths majority of the votes cast. The Bureau of the Congress shall be that of the National Assembly.

No amendment procedure shall be commenced or continued where the integrity of national territory is placed in jeopardy.

The republican form of government shall not be the object of any amendment.

TITLE XVII (REPEALED)

CHARTER FOR THE ENVIRONMENT

The French People,

Having considered that

Natural resources and equilibria have conditioned the emergence of mankind;

The future and very existence of mankind are inextricably linked with its natural environment;

The environment is the common heritage of all human beings;

Man exerts ever-increasing influence over the conditions for life and over his own evolution;

Biological diversity, the fulfilment of the individual and the progress of human societies are affected by certain types of consumption or production and by excessive exploitation of natural resources;

The safeguarding of the environment is a goal to be pursued in the same way as the other fundamental interests of the Nation;

In order to ensure sustainable development, choices designed to meet the needs of the present generation should not jeopardise the ability of future generations and other peoples to meet their own needs,

Hereby proclaim:

Art 1 – Each person has the right to live in a balanced environment which shows due respect for health.

Art 2 – Each person has a duty to participate in preserving and enhancing the environment.

Art 3 – Each person shall, in the conditions provided for by law, foresee and avoid the occurrence of any damage which he or she may cause to the environment or, failing that, limit the consequences of such damage.

Art 4 – Each person shall be required, in the conditions provided for by law, to contribute to the making good of any damage he or she may have caused to the environment.

Art 5 - When the occurrence of any damage, albeit unpredictable in the current state of scientific knowledge, may seriously and irreversibly harm the environment, public authorities shall, with due respect for the principle of precaution and the areas within their jurisdiction, ensure the implementation of procedures for risk assessment and the adoption of temporary measures commensurate with the risk involved in order to deal with the occurrence of such damage.

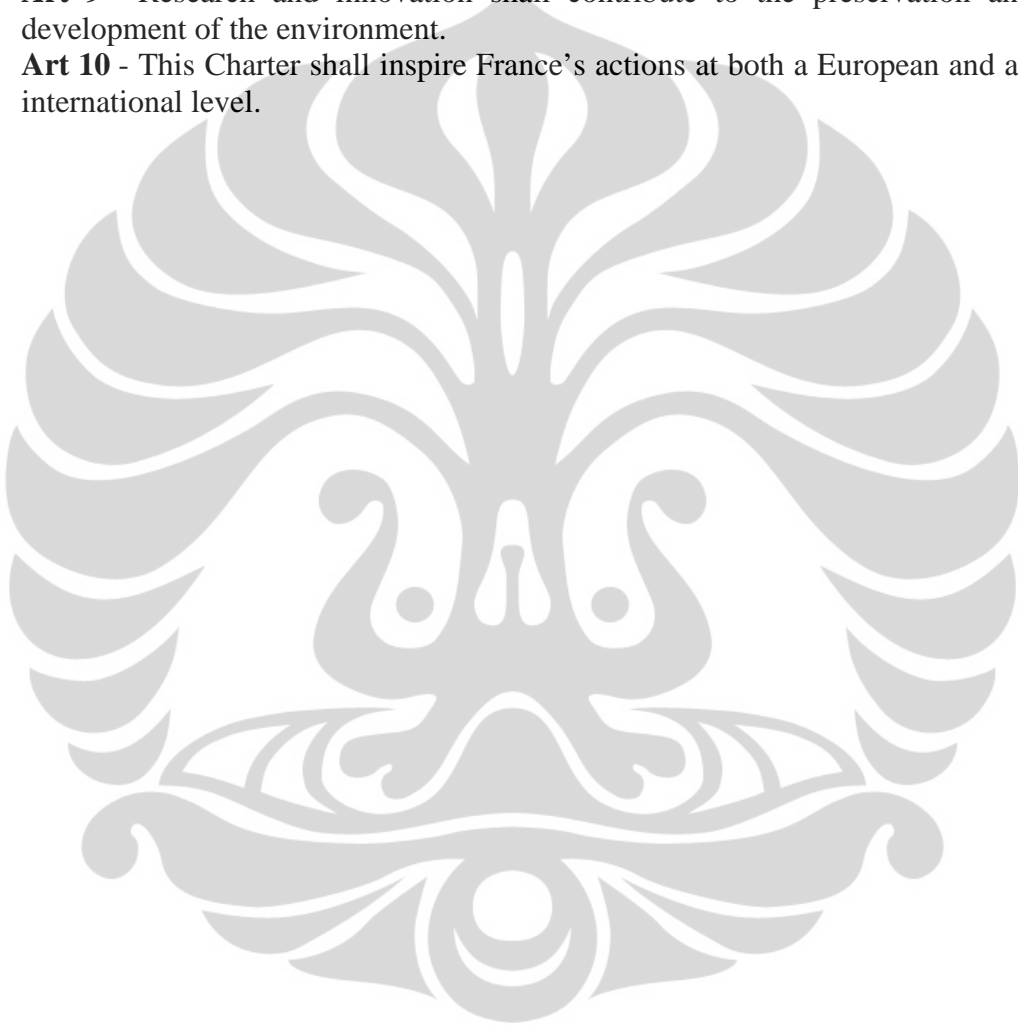
Art 6 - Public policies shall promote sustainable development. To this end they shall reconcile the protection and enhancement of the environment with economic development and social progress.

Art 7 – Each person has the right, in the conditions and to the extent provided for by law, to have access to any information pertaining to the environment in the possession of public bodies and to participate in the public decision-making process likely to affect the environment.

Art 8 - Education and training with regard to the environment shall contribute to the exercising of the rights and duties set out in this Charter.

Art 9 - Research and innovation shall contribute to the preservation and development of the environment.

Art 10 - This Charter shall inspire France's actions at both a European and an international level.



[Home](#) | [Plan](#) | [Help](#) | [Site Info](#) | [Write](#) | [Forums](#) | [Subscriptions](#) | [RSS](#) | [Links](#)

[Home](#) > [English](#) > Constitution of October 4, 1958

See also :

[The National Assembly in the French Institutions](#)

Constitution of October 4, 1958

WARNING

1° The versions in italics of articles 11, 71-1 and 73 of the Constitution will come into effect in the manner determined by statutes and Institutional Acts necessary for their application by virtue of the article 46 of the Constitutional Act no. 2008-724 of July 23, 2008 ;

2° (Application of article 65)

3° (Application of article 88-5)

CONTENTS

PREAMBLE

TITLE I - On Sovereignty (art. 2 to 4)

TITLE II - The President of the Republic (art. 5 to 19)

TITLE III - The Government (art. 20 to 23)

TITLE IV - Parliament (art. 24 to 33)

TITLE V - On Relations between Parliament and the Government (art. 34 to 51-2)

TITLE VI - On Treaties and International Agreements (art. 52 to 55)

TITLE VII - The Constitutional Council (art. 56 to 63)

TITLE VIII - On Judicial Authority (art. 64 to 66-1)

TITLE IX - The High Court (art. 67 and 68)

TITLE X - On the Criminal Liability of Members of the Government (art. 68-1 to 68-3)

TITLE XI - The Economic, Social and Environmental Council (art. 69 to 71)

TITLE XI A - The Defender of Rights (art. 71-1)

TITLE XII - On Territorial Communities (art. 72 to 75-1)

TITLE XIII - Transitional Provisions relating to New Caledonia (art. 76 to 77)

TITLE XIV - On the French-speaking World and on Association Agreements (art. 87 to 88)

TITLE XV - On the European Union (art. 88-1 to 88-7)

TITLE XVI - On Amendments to the Constitution (art. 89)

TITLE XVII (*Repealed*)

CHARTER FOR THE ENVIRONMENT

PREAMBLE

The French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the Constitution of 1946, and to the rights and duties as defined in the Charter for the Environment of 2004.

By virtue of these principles and that of the self-determination of peoples, the Republic offers to the overseas territories which have expressed the will to adhere to them new institutions founded on the common ideal of liberty, equality and fraternity and conceived for the purpose of their democratic development.

France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. It shall be organised on a decentralised basis.

Statutes shall promote equal access by women and men to elective offices and posts as well as to position of professional and social responsibility.

TITLE I ON SOVEREIGNTY

Article 2.

The language of the Republic shall be French.

The national emblem shall be the blue, white and red tricolour flag.

The national anthem shall be *La Marseillaise*.

The maxim of the Republic shall be "Liberty, Equality, Fraternity".

The principle of the Republic shall be: government of the people, by the people and for the people.

Article 3.

National sovereignty shall vest in the people, who shall exercise it through their representatives and by means of referendum.

No section of the people nor any individual may arrogate to itself, or to himself, the exercise thereof.

Suffrage may be direct or indirect as provided for by the Constitution. It shall always be universal, equal and secret.

All French citizens of either sex who have reached their majority and are in possession of their civil and political rights may vote as provided for by statute.

Article 4.

Political parties and groups shall contribute to the exercise of suffrage. They shall be formed and carry on their activities freely. They shall respect the principles of national sovereignty and democracy.

They shall contribute to the implementation of the principle set out in the second paragraph of article 1 as provided for by statute.

Statutes shall guarantee the expression of diverse opinions and the equitable participation of political parties and groups in the democratic life of the Nation.

TITLE II THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Article 5.

The President of the Republic shall ensure due respect for the Constitution. He shall ensure, by his arbitration, the proper functioning of the public authorities and the continuity of the State.

He shall be the guarantor of national independence, territorial integrity and due respect for Treaties.

Article 6.

The President of the Republic shall be elected for a term of five years by direct universal suffrage.

No one may hold office for more than two consecutive terms.

The manner of implementation of this article shall be determined by an Institutional Act.

Article 7.

The President of the Republic shall be elected by an absolute majority of votes cast. If such a majority is not obtained on the first ballot, a second ballot shall take place on the fourteenth day thereafter. Only the two candidates polling the greatest number of votes in the first ballot, after any withdrawal of better placed candidates, may stand in the second ballot.

The process of electing a President shall commence by the calling of said election by the Government.

The election of the new President shall be held no fewer than twenty days and no more than thirty-five days before the expiry of the term of the President in office.

Statute of the President of the Republic, *Tinjauan hukum...*, Wahyu Defry Setiawan, FH UI, 2012

Should the Presidency of the Republic fall vacant for any reason whatsoever, or should the Constitutional Council on a referral from the Government rule by an absolute majority of its members that the President of the Republic is incapacitated, the duties of the President of the Republic, with the exception of those specified in articles 11 and 12, shall be temporarily exercised by the President of the Senate or, if the latter is in turn incapacitated, by the Government.

In the case of a vacancy, or where the incapacity of the President is declared to be permanent by the Constitutional Council, elections for the new President shall, except in the event of a finding by the Constitutional Council of force majeure, be held no fewer than twenty days and no more than thirty-five days after the beginning of the vacancy or the declaration of permanent incapacity.

In the event of the death or incapacitation in the seven days preceding the deadline for registering candidacies of any of the persons who, fewer than thirty days prior to such deadline, have publicly announced their decision to stand for election, the Constitutional Council may decide to postpone the election.

If, before the first round of voting, any of the candidates dies or becomes incapacitated, the Constitutional Council shall declare the election to be postponed.

In the event of the death or incapacitation of either of the two candidates in the lead after the first round of voting before any withdrawals, the Constitutional Council shall declare that the electoral process must be repeated in full; the same shall apply in the event of the death or incapacitation of either of the two candidates still standing on the second round of voting.

All cases shall be referred to the Constitutional Council in the manner laid down in the second paragraph of article 61 or in that laid down for the registration of candidates in the Institutional Act provided for in article 6.

The Constitutional Council may extend the time limits set in paragraphs three and five above, provided that polling takes place no later than thirty-five days after the decision of the Constitutional Council. If the implementation of the provisions of this paragraph results in the postponement of the election beyond the expiry of the term of the President in office, the latter shall remain in office until his successor is proclaimed.

Neither articles 49 and 50 nor article 89 of the Constitution shall be implemented during the vacancy of the Presidency of the Republic or during the period between the declaration of the permanent incapacity of the President of the Republic and the election of his successor.

Article 8.

The President of the Republic shall appoint the Prime Minister. He shall terminate the appointment of the Prime Minister when the latter tenders the resignation of the Government.

On the recommendation of the Prime Minister, he shall appoint the other members of the Government and terminate their appointments.

Article 9.

The President of the Republic shall preside over the Council of Ministers.

Article 10.

The President of the Republic shall promulgate Acts of Parliament within fifteen days following the final passage of an Act and its transmission to the Government.

He may, before the expiry of this time limit, ask Parliament to reopen debate on the Act or any sections thereof. Such reopening of debate shall not be refused.

Article 11.

The President of the Republic may, on a recommendation from the Government when Parliament is in session, or on a joint motion of the two Houses, published in the *Journal Officiel*, submit to a referendum any Government Bill which deals with the organization of the public authorities, or with reforms relating to the economic or social policy of the Nation, and to the public services contributing thereto, or which provides for authorization to ratify a treaty which, although not contrary to the Constitution, would affect the functioning of the institutions.

Where the referendum is held on the recommendation of the Government, the latter shall make a statement before each House and the same shall be followed by a debate.

Article 11⁽¹⁾.

The President of the Republic may, on a recommendation from the Government when Parliament is in session, or on a joint motion of the two Houses, published in the Journal Officiel, submit to a referendum any Government Bill which deals with the organization of the public authorities, or with reforms relating to the economic, social or environmental policy of the Nation, and to the public services contributing thereto, or which provides for authorization to ratify a treaty which, although not contrary to the Constitution, would affect the functioning of the institutions.

Where the referendum is held on the recommendation of the Government, the latter shall make a statement before each House and the same shall be followed by a debate.

A referendum concerning a subject mentioned in the first paragraph may be held upon the initiative of one fifth of the Members of

Parliament, supported by one tenth of the voters enrolled on the electoral register. This initiative shall take the form of a Private Member's Bill and shall not be applied to the repeal of a statutory provision promulgated for less than one year.

The conditions by which it is introduced and those according to which the Constitutional Council monitors the respect of the provisions of the previous paragraph, are set down by an Institutional Act.

If the Private Member's Bill has not been considered by the two Houses within a period set by the Institutional Act, the President of the Republic shall submit it to a referendum.

Where the decision of the French people in the referendum is not favourable to the Private Member's Bill, no new referendum proposal on the same subject may be submitted before the end of a period of two years following the date of the vote.

Where the outcome of the referendum is favourable to the Government Bill or to the Private Member's Bill, the President of the Republic shall promulgate the resulting statute within fifteen days following the proclamation of the results of the vote.

Article 12.

The President of the Republic may, after consulting the Prime Minister and the Presidents of the Houses of Parliament, declare the National Assembly dissolved.

A general election shall take place no fewer than twenty days and no more than forty days after the dissolution.

The National Assembly shall sit as of right on the second Thursday following its election. Should this sitting fall outside the period prescribed for the ordinary session, a session shall be convened by right for a fifteen-day period.

No further dissolution shall take place within a year following said election.

Article 13.

The President of the Republic shall sign the Ordinances and Decrees deliberated upon in the Council of Ministers.

He shall make appointments to the civil and military posts of the State.

Conseillers d'État, the Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, Ambassadors and Envoys Extraordinary, Conseillers Maîtres of the Cour des Comptes, Prefects, State representatives in the overseas communities to which article 74 applies and in New Caledonia, highest-ranking Military Officers, Recteurs des Académies and Directors of Central Government Departments shall be appointed in the Council of Ministers.

An Institutional Act shall determine the other posts to be filled at meetings of the Council of Ministers and the manner in which the power of the President of the Republic to make appointments may be delegated by him to be exercised on his behalf.

An Institutional Act shall determine the posts or positions, other than those mentioned in the third paragraph, concerning which, on account of their importance in the guaranteeing of the rights and freedoms or the economic and social life of the Nation, the power of appointment vested in the President of the Republic shall be exercised after public consultation with the relevant standing committee in each House. The President of the Republic shall not make an appointment when the sum of the negative votes in each committee represents at least three fifths of the votes cast by the two committees. Statutes shall determine the relevant standing committees according to the posts or positions concerned.

Article 14.

The President of the Republic shall accredit ambassadors and envoys extraordinary to foreign powers; foreign ambassadors and envoys extraordinary shall be accredited to him.

Article 15.

The President of the Republic shall be Commander-in-Chief of the Armed Forces. He shall preside over the higher national defence councils and committees.

Article 16.

Where the institutions of the Republic, the independence of the Nation, the integrity of its territory or the fulfilment of its international commitments are under serious and immediate threat, and where the proper functioning of the constitutional public authorities is interrupted, the President of the Republic shall take measures required by these circumstances, after formally consulting the Prime Minister, the Presidents of the Houses of Parliament and the Constitutional Council.

He shall address the Nation and inform it of such measures.

The measures shall be designed to provide the constitutional public authorities as swiftly as possible, with the means to carry out their duties. The Constitutional Council shall be consulted with regard to such measures.

Parliament shall sit as of right.

The National Assembly shall not be dissolved during the exercise of such emergency powers.

After thirty days of the exercise of such emergency powers, the matter may be referred to the Constitutional Council by the President of the National Assembly, the President of the Senate, sixty Members of the National Assembly or sixty Senators, so as to decide if the conditions laid down in paragraph one still apply. The Council shall make its decision publicly as soon as possible. It shall, as of right, carry out such an examination and shall make its decision in the same manner after sixty days of the exercise of emergency powers or at any moment thereafter.

Article 17.

The President of the Republic is vested with the power to grant individual pardons.

Article 18.

The President of the Republic shall communicate with the two Houses of Parliament by messages which he shall cause to be read aloud and which shall not give rise to any debate.

He may take the floor before Parliament convened in Congress for this purpose. His statement may give rise, in his absence, to a debate without vote.

When not in session, the Houses of Parliament shall be convened especially for this purpose.

Article 19.

Instruments of the President of the Republic, other than those provided for under articles 8 (paragraph one), 11, 12, 16, 18, 54, 56 and 61, shall be countersigned by the Prime Minister and, where required, by the ministers concerned.

TITLE III

THE GOVERNMENT

Article 20.

The Government shall determine and conduct the policy of the Nation.

It shall have at its disposal the civil service and the armed forces.

It shall be accountable to Parliament in accordance with the terms and procedures set out in articles 49 and 50.

Article 21.

The Prime Minister shall direct the actions of the Government. He shall be responsible for national defence. He shall ensure the implementation of legislation. Subject to article 13, he shall have power to make regulations and shall make appointments to civil and military posts.

He may delegate certain of his powers to Ministers.

He shall deputize, if the case arises, for the President of the Republic as chairman of the councils and committees referred to in article 15.

He may, in exceptional cases, deputize for him as chairman of a meeting of the Council of Ministers by virtue of an express delegation of powers for a specific agenda.

Article 22.

Instruments of the Prime Minister shall be countersigned, where required, by the ministers responsible for their implementation.

Article 23.

Membership of the Government shall be incompatible with the holding of any Parliamentary office, any position of professional representation at national level, any public employment or any professional activity.

An Institutional Act shall determine the manner in which the holders of such offices, positions or employment shall be replaced.

The replacement of Members of Parliament shall take place in accordance with the provisions of article 25.

TITLE IV

PARLIAMENT

Article 24.

Tinjuan hukum..., Wahyu Defry Setiawan, FH UI, 2012

Parliament shall pass statutes. It shall monitor the action of the Government. It shall assess public policies.

It shall comprise the National Assembly and the Senate.

Members of the National Assembly, whose number shall not exceed five hundred and seventy-seven, shall be elected by direct suffrage.

The Senate, whose members shall not exceed three hundred and forty-eight, shall be elected by indirect suffrage. The Senate shall ensure the representation of the territorial communities of the Republic.

French nationals living abroad shall be represented in the National Assembly and in the Senate.

Article 25.

An Institutional Act shall determine the term for which each House is elected, the number of its members, their allowances, the conditions of eligibility and the terms of disqualification and of incompatibility with membership.

It shall likewise determine the manner of election of those persons called upon to replace Members of the National Assembly or Senators whose seats have become vacant, until the general or partial renewal by election of the House in which they sat, or have been temporarily replaced on account of having accepted a position in Government.

An independent commission, whose composition and rules of organization and operation shall be set down by statute, shall publicly express an opinion on the Government and Private Members' Bills defining the constituencies for the election of Members of the National Assembly, or modifying the distribution of the seats of Members of the National Assembly or of Senators.

Article 26.

No Member of Parliament shall be prosecuted, investigated, arrested, detained or tried in respect of opinions expressed or votes cast in the performance of his official duties.

No Member of Parliament shall be arrested for a serious crime or other major offence, nor shall he be subjected to any other custodial or semi-custodial measure, without the authorization of the Bureau of the House of which he is a member. Such authorization shall not be required in the case of a serious crime or other major offence committed *flagrante delicto* or when a conviction has become final.

The detention, subjecting to custodial or semi-custodial measures, or prosecution of a Member of Parliament shall be suspended for the duration of the session if the House of which he is a member so requires.

The House concerned shall meet as of right for additional sittings in order to permit the application of the foregoing paragraph should circumstances so require.

Article 27.

No Member shall be elected with any binding mandate.

Members' right to vote shall be exercised in person.

An Institutional Act may, in exceptional cases, authorize voting by proxy. In that event, no Member shall be given more than one proxy.

Article 28.

Parliament shall sit as of right in one ordinary session which shall start on the first working day of October and shall end on the last working day of June.

The number of days for which each House may sit during the ordinary session shall not exceed one hundred and twenty. The number of sitting weeks shall be determined by each House.

The Prime Minister, after consulting the President of the House concerned or the majority of the members of each House may decide that said House shall meet for additional sitting days.

The days and hours of sittings shall be determined by the Rules of Procedure of each House.

Article 29.

Parliament shall meet in extraordinary session, at the request of the Prime Minister or of the majority of the Members of the National Assembly, to debate a specific agenda.

Where an extraordinary session is held at the request of Members of the National Assembly, this session shall be closed by decree once all the items on the agenda for which Parliament was convened have been dealt with, or not later than twelve days after its first sitting, whichever shall be the earlier.

The Prime Minister alone may request a new session before the end of the month following the decree closing an extraordinary

session.

Article 30.

Except where Parliament sits as of right, extraordinary sessions shall be opened and closed by a Decree of the President of the Republic.

Article 31.

Members of the Government shall have access to both Houses. They shall address either House whenever they so request.

They may be assisted by *commissaires du Gouvernement*.

Article 32.

The President of the National Assembly shall be elected for the life of a Parliament. The President of the Senate shall be elected each time elections are held for partial renewal of the Senate.

Article 33.

The sittings of the two Houses shall be public. A verbatim report of the debates shall be published in the *Journal Officiel*.

Each House may sit in camera at the request of the Prime Minister or of one tenth of its members.

TITLE V

ON RELATIONS BETWEEN PARLIAMENT AND THE GOVERNMENT

Article 34.

Statutes shall determine the rules concerning:

- civic rights and the fundamental guarantees granted to citizens for the exercise of their civil liberties; freedom, diversity and the independence of the media; the obligations imposed for the purposes of national defence upon the person and property of citizens;
- nationality, the status and capacity of persons, matrimonial property systems, inheritance and gifts;
- the determination of serious crimes and other major offences and the penalties they carry; criminal procedure; amnesty; the setting up of new categories of courts and the status of members of the Judiciary;
- the base, rates and methods of collection of all types of taxes; the issuing of currency.

Statutes shall also determine the rules governing:

- the system for electing members of the Houses of Parliament, local assemblies and the representative bodies for French nationals living abroad, as well as the conditions for holding elective offices and positions for the members of the deliberative assemblies of the territorial communities;
- the setting up of categories of public legal entities;
- the fundamental guarantees granted to civil servants and members of the Armed Forces;
- nationalisation of companies and the transfer of ownership of companies from the public to the private sector.

Statutes shall also lay down the basic principles of:

- the general organisation of national defence;
- the self-government of territorial communities, their powers and revenue;
- education;
- the preservation of the environment;
- systems of ownership, property rights and civil and commercial obligations;
- Employment law, Trade Union law and Social Security.

Finance Acts shall determine the revenue and expenditure of the State in the conditions and with the reservations provided for by an Institutional Act.

Social Security Financing Acts shall lay down the general conditions for the financial equilibrium thereof, and taking into account forecasted revenue, shall determine expenditure targets in the conditions and with the reservations provided for by an Institutional Act.

Programming Acts shall determine the general conditions for the execution of the budget.

Programming Acts shall determine the objectives of the action of the State.

The multiannual guidelines for public finances shall be established by Programming Acts. They shall contribute to achieving the objective of balanced accounts for public administrations.

The provisions of this article may be further specified and completed by an Institutional Act.

Article 34-1.

The Houses of Parliament may adopt resolutions according to the conditions determined by the Institutional Act.

Any draft resolution, whose adoption or rejection would be considered by the Government as an issue of confidence, or which contained an injunction to the Government, shall be inadmissible and may not be included on the agenda.

Article 35.

A declaration of war shall be authorized by Parliament.

The Government shall inform Parliament of its decision to have the armed forces intervene abroad, at the latest three days after the beginning of said intervention. It shall detail the objectives of the said intervention. This information may give rise to a debate, which shall not be followed by a vote.

Where the said intervention shall exceed four months, the Government shall submit the extension to Parliament for authorization. It may ask the National Assembly to make the final decision.

If Parliament is not sitting at the end of the four-month period, it shall express its decision at the opening of the following session.

Article 36.

A state of siege shall be decreed in the Council of Ministers.

The extension thereof after a period of twelve days may be authorized solely by Parliament.

Article 37.

Matters other than those coming under the scope of statute law shall be matters for regulation.

Provisions of statutory origin enacted in such matters may be amended by decree issued after consultation with the *Conseil d'État*. Any such provisions passed after the coming into force of the Constitution shall be amended by decree only if the Constitutional Council has found that they are matters for regulation as defined in the foregoing paragraph.

Article 37-1.

Statutes and regulations may contain provisions enacted on an experimental basis for limited purposes and duration.

Article 38.

In order to implement its programme, the Government may ask Parliament for authorization, for a limited period, to take measures by Ordinance that are normally the preserve of statute law.

Ordinances shall be issued in the Council of Ministers, after consultation with the *Conseil d'État*. They shall come into force upon publication, but shall lapse in the event of failure to table before Parliament the Bill to ratify them by the date set by the Enabling Act. They may only be ratified in explicit terms.

At the end of the period referred to in the first paragraph hereinabove Ordinances may be amended solely by an Act of Parliament in those areas governed by statute law.

Article 39.

Both the Prime Minister and Members of Parliament shall have the right to initiate legislation.

Government Bills shall be discussed in the Council of Ministers after consultation with the *Conseil d'État* and shall be tabled in one or other of the two Houses. Finance Bills and Social Security Financing Bills shall be tabled first before the National Assembly. Without prejudice to the first paragraph of article 44, Bills primarily dealing with the organisation of territorial communities shall be tabled first in the Senate.

The tabling of Government Bills before the National Assembly or the Senate, shall comply with the conditions determined by an Institutional Act.

Government Bills may not be included on the agenda if the Conference of Presidents of the first House to which the Bill has been referred, declares that the rules determined by the Institutional Act have not been complied with. In the case of disagreement between the Conference of Presidents and the Government, the President of the relevant House or the Prime Minister may refer the

matter to the Constitutional Council, which shall rule within a period of eight days.

Within the conditions provided for by statute, the President of either House may submit a Private Member's Bill tabled by a Member of the said House, before it is considered in committee, to the *Conseil d'État* for its opinion, unless the Member who tabled it disagrees.

Article 40.

Private Members' Bills and amendments introduced by Members of Parliament shall not be admissible where their enactment would result in either a diminution of public revenue or the creation or increase of any public expenditure.

Article 41.

If, during the legislative process, it appears that a Private Member's Bill or amendment is not a matter for statute or is contrary to a delegation granted under article 38, the Government or the President of the House concerned, may argue that it is inadmissible.

In the event of disagreement between the Government and the President of the House concerned, the Constitutional Council, at the request of one or the other, shall give its ruling within eight days.

Article 42.

The discussion of Government and Private Members' Bills shall, in plenary sitting, concern the text passed by the committee to which the Bill has been referred, in accordance with article 43, or failing that, the text which has been referred to the House.

Notwithstanding the foregoing, the plenary discussion of Constitutional Revision Bills, Finance Bills and Social Security Financing Bills, shall concern, during the first reading before the House to which the Bill has been referred in the first instance, the text presented by the Government, and during the subsequent readings, the text transmitted by the other House.

The plenary discussion at first reading of a Government or Private Members' Bill may only occur before the first House to which it is referred, at the end of a period of six weeks after it has been tabled. It may only occur, before the second House to which it is referred, at the end of a period of four weeks, from the date of transmission.

The previous paragraph shall not apply if the accelerated procedure has been implemented according to the conditions provided for in article 45. Neither shall it apply to Finance Bills, Social Security Financing Bills, or to Bills concerning a state of emergency.

Article 43.

Government and Private Members' Bills shall be referred to one of the standing committees, the number of which shall not exceed eight in each House.

At the request of the Government or of the House before which such a bill has been tabled, Government and Private Members' Bills shall be referred for consideration to a committee specially set up for this purpose.

Article 44.

Members of Parliament and the Government shall have the right of amendment. This right may be used in plenary sitting or in committee under the conditions set down by the Rules of Procedure of the Houses, according to the framework determined by an Institutional Act.

Once debate has begun, the Government may object to the consideration of any amendment which has not previously been referred to committee.

If the Government so requests, the House before which the Bill is tabled shall proceed to a single vote on all or part of the text under debate, on the sole basis of the amendments proposed or accepted by the Government.

Article 45.

Every Government or Private Member's Bill shall be considered successively in the two Houses of Parliament with a view to the passing of an identical text. Without prejudice to the application of articles 40 and 41, all amendments which have a link, even an indirect one, with the text that was tabled or transmitted, shall be admissible on first reading.

If, as a result of a failure to agree by the two Houses, it has proved impossible to pass a Government or Private Member's Bill after two readings by each House or, if the Government has decided to apply the accelerated procedure without the two Conferences of Presidents being jointly opposed, after a single reading of such a Bill by each House, the Prime Minister, or in the case of a Private Members' Bill, the Presidents of the two Houses acting jointly, may convene a joint committee, composed of an equal number of members from each House, to propose a text on the provisions still under debate.

The text drafted by the joint committee may be submitted by the Government to both Houses for approval. No amendment shall be admissible without the consent of the Government.

If the joint committee fails to agree on a common text, or if the text is not passed as provided in the foregoing paragraph, the Government may, after a further reading by the National Assembly and by the Senate, ask the National Assembly to reach a final

decision. In such an event, the National Assembly may reconsider either the text drafted by the joint committee, or the last text passed by itself, as modified, as the case may be, by any amendment(s) passed by the Senate.

Article 46.

Acts of Parliament which are defined by the Constitution as being Institutional Acts shall be enacted and amended as provided for hereinafter.

The Government or Private Member's Bill may only be submitted, on first reading, to the consideration and vote of the Houses after the expiry of the periods set down in the third paragraph of article 42. Notwithstanding the foregoing, if the accelerated procedure has been applied according to the conditions provided for in article 45, the Government or Private Member's Bill may not be submitted for consideration by the first House to which it is referred before the expiry of a fifteen-day period after it has been tabled.

The procedure set out in article 45 shall apply. Nevertheless, failing agreement between the two Houses, the text may be passed by the National Assembly on a final reading only by an absolute majority of the Members thereof.

Institutional Acts relating to the Senate must be passed in identical terms by the two Houses.

Institutional Acts shall not be promulgated until the Constitutional Council has declared their conformity with the Constitution.

Article 47.

Parliament shall pass Finance Bills in the manner provided for by an Institutional Act.

Should the National Assembly fail to reach a decision on first reading within forty days following the tabling of a Bill, the Government shall refer the Bill to the Senate, which shall make its decision known within fifteen days. The procedure set out in article 45 shall then apply.

Should Parliament fail to reach a decision within seventy days, the provisions of the Bill may be brought into force by Ordinance.

Should the Finance Bill setting out revenue and expenditure for a financial year not be tabled in time for promulgation before the beginning of that year, the Government shall as a matter of urgency ask Parliament for authorization to collect taxes and shall make available by decree the funds needed to meet commitments already voted for.

The time limits set by this article shall be suspended when Parliament is not in session.

Article 47-1.

Parliament shall pass Social Security Financing Bills in the manner provided by an Institutional Act.

Should the National Assembly fail to reach a decision on first reading within twenty days of the tabling of a Bill, the Government shall refer the Bill to the Senate, which shall make its decision known within fifteen days. The procedure set out in article 45 shall then apply.

Should Parliament fail to reach a decision within fifty days, the provisions of the Bill may be implemented by Ordinance.

The time limits set by this article shall be suspended when Parliament is not in session and, as regards each House, during the weeks when it has decided not to sit in accordance with the second paragraph of article 28.

Article 47-2.

The *Cour des Comptes* shall assist Parliament in monitoring Government action. It shall assist Parliament and the Government in monitoring the implementation of Finance Acts and Social Security Financing Acts, as well in assessing public policies. By means of its public reports, it shall contribute to informing citizens.

The accounts of public administrations shall be lawful and faithful. They shall provide a true and fair view of the result of the management, assets and financial situation of the said public administrations.

Article 48.

Without prejudice to the application of the last three paragraphs of article 28, the agenda shall be determined by each House.

During two weeks of sittings out of four, priority shall be given, in the order determined by the Government, to the consideration of texts and to debates which it requests to be included on the agenda.

In addition, the consideration of Finance Bills, Social Security Financing Bills and, subject to the provisions of the following paragraph, texts transmitted by the other House at least six weeks previously, as well as Bills concerning a state of emergency and requests for authorization referred to in article 35, shall, upon Government request, be included on the agenda with priority.

During one week of sittings out of four, priority shall be given, in the order determined by each House, to the monitoring of Government action and to the assessment of public policies.

One day of sitting per month shall be given over to an agenda determined by each House upon the initiative of the opposition groups in the relevant House, as well as upon that of the minority groups.

During at least one sitting per week, including during the extraordinary sittings provided for in article 29, priority shall be given to questions from Members of Parliament and to answers from the Government.

Article 49.

The Prime Minister, after deliberation by the Council of Ministers, may make the Government's programme or possibly a general policy statement an issue of a vote of confidence before the National Assembly.

The National Assembly may call the Government to account by passing a resolution of no-confidence. Such a resolution shall not be admissible unless it is signed by at least one tenth of the Members of the National Assembly. Voting may not take place within forty-eight hours after the resolution has been tabled. Solely votes cast in favour of the no-confidence resolution shall be counted and the latter shall not be passed unless it secures a majority of the Members of the House. Except as provided for in the following paragraph, no Member shall sign more than three resolutions of no-confidence during a single ordinary session and no more than one during a single extraordinary session.

The Prime Minister may, after deliberation by the Council of Ministers, make the passing of a Finance Bill or Social Security Financing Bill an issue of a vote of confidence before the National Assembly. In that event, the Bill shall be considered passed unless a resolution of no-confidence, tabled within the subsequent twenty-four hours, is carried as provided for in the foregoing paragraph. In addition, the Prime Minister may use the said procedure for one other Government or Private Members' Bill per session.

The Prime Minister may ask the Senate to approve a statement of general policy.

Article 50.

When the National Assembly passes a resolution of no-confidence, or when it fails to endorse the Government programme or general policy statement, the Prime Minister shall tender the resignation of the Government to the President of the Republic.

Article 50-1.

The Government may, before either House, upon its own initiative or upon the request of a parliamentary group, as set down in article 51-1, make a declaration on a given subject, which leads to a debate and, if it so desires, gives rise to a vote, without making it an issue of confidence.

Article 51.

The closing of ordinary or extraordinary sessions shall be automatically postponed in order to permit the application of article 49, if the case arises. Additional sittings shall be held automatically for the same purpose.

Article 51-1.

The Rules of Procedure of each House shall determine the rights of the parliamentary groups set up within it. They shall recognize that opposition groups in the House concerned, as well as minority groups, have specific rights.

Article 51-2.

In order to implement the monitoring and assessment missions laid down in the first paragraph of article 24, committees of inquiry may be set up within each House to gather information, according to the conditions provided for by statute.

Statutes shall determine their rules of organization and operation. The conditions for their establishment shall be determined by the Rules of Procedure of each House.

TITLE VI

ON TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS

Article 52.

The President of the Republic shall negotiate and ratify treaties.

He shall be informed of any negotiations for the conclusion of an international agreement not subject to ratification.

Article 53.

Peace Treaties, Trade agreements, treaties or agreements relating to international organization, those committing the finances of the State, those modifying provisions which are the preserve of statute law, those relating to the status of persons, and those involving the ceding, exchanging or acquiring of territory, may be ratified or approved only by an Act of Parliament.

They shall not take effect until they have been approved by the Senate.

they shall not take effect until such ratification or approval has been secured.

No ceding, exchanging or acquiring of territory shall be valid without the consent of the population concerned.

Article 53-1.

The Republic may enter into agreements with European States which are bound by undertakings identical with its own in matters of asylum and the protection of human rights and fundamental freedoms, for the purpose of determining their respective jurisdiction as regards requests for asylum submitted to them.

However, even if the request does not fall within their jurisdiction under the terms of such agreements, the authorities of the Republic shall remain empowered to grant asylum to any foreigner who is persecuted for his action in pursuit of freedom or who seeks the protection of France on other grounds.

Article 53-2.

The Republic may recognize the jurisdiction of the International Criminal Court as provided for by the Treaty signed on 18 July 1998.

Article 54.

If the Constitutional Council, on a referral from the President of the Republic, from the Prime Minister, from the President of one or the other Houses, or from sixty Members of the National Assembly or sixty Senators, has held that an international undertaking contains a clause contrary to the Constitution, authorization to ratify or approve the international undertaking involved may be given only after amending the Constitution.

Article 55.

Treaties or agreements duly ratified or approved shall, upon publication, prevail over Acts of Parliament, subject, with respect to each agreement or treaty, to its application by the other party.

TITLE VII THE CONSTITUTIONAL COUNCIL

Article 56.

The Constitutional Council shall comprise nine members, each of whom shall hold office for a non-renewable term of nine years. One third of the membership of the Constitutional Council shall be renewed every three years. Three of its members shall be appointed by the President of the Republic, three by the President of the National Assembly and three by the President of the Senate. The procedure provided for in the last paragraph of article 13 shall apply to these appointments. The appointments made by the President of each House shall be submitted for the opinion solely of the relevant standing committee in that House.

In addition to the nine members provided for above, former Presidents of the Republic shall be ex officio life members of the Constitutional Council.

The President shall be appointed by the President of the Republic. He shall have a casting vote in the event of a tie.

Article 57.

The office of member of the Constitutional Council shall be incompatible with that of Minister or Member of the Houses of Parliament. Other incompatibilities shall be determined by an Institutional Act.

Article 58.

The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of the election of the President of the Republic.

It shall examine complaints and shall proclaim the results of the vote.

Article 59.

The Constitutional Council shall rule on the proper conduct of the election of Members of the National Assembly and Senators in disputed cases.

Article 60.

The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of referendum proceedings as provided for in articles 11 and 89 and in Title XV and shall proclaim the results of the referendum.

Article 61.

Institutional Acts, before their promulgation, Private Members' Bills mentioned in article 11 before they are submitted to referendum, and the Rules of Procedure of the Houses of Parliament shall, before coming into force, be referred to the Constitutional Council, which shall rule on their conformity with the Constitution.

To the same end, Acts of Parliament may be referred to the Constitutional Council, before their promulgation, by the President of the Republic, the Prime Minister, the President of the National Assembly, the President of the Senate, sixty Members of the National Assembly or sixty Senators.

In the cases provided for in the two foregoing paragraphs, the Constitutional Council must deliver its ruling within one month. However, at the request of the Government, in cases of urgency, this period shall be reduced to eight days.

In these same cases, referral to the Constitutional Council shall suspend the time allotted for promulgation.

Article 61-1.

If, during proceedings in progress before a court of law, it is claimed that a statutory provision infringes the rights and freedoms guaranteed by the Constitution, the matter may be referred by the Conseil d'État or by the Cour de Cassation to the Constitutional Council, within a determined period.

An Institutional Act shall determine the conditions for the application of the present article.

Article 62.

A provision declared unconstitutional on the basis of article 61 shall be neither promulgated nor implemented.

A provision declared unconstitutional on the basis of article 61-1 shall be repealed as of the publication of the said decision of the Constitutional Council or as of a subsequent date determined by said decision. The Constitutional Council shall determine the conditions and the limits according to which the effects produced by the provision shall be liable to challenge.

No appeal shall lie from the decisions of the Constitutional Council. They shall be binding on public authorities and on all administrative authorities and all courts.

Article 63.

An Institutional Act shall determine the rules of organization and operation of the Constitutional Council, the procedure to be followed before it and, in particular, the time limits allotted for referring disputes to it.

**TITLE VIII
ON JUDICIAL AUTHORITY**

Article 64.

The President of the Republic shall be the guarantor of the independence of the Judicial Authority.

He shall be assisted by the High Council of the Judiciary.

An Institutional Act shall determine the status of members of the Judiciary.

Judges shall be irremovable from office.

Article 65

The High Council of the Judiciary shall consist of a section with jurisdiction over judges and a section with jurisdiction over public prosecutors.

The section with jurisdiction over judges shall be presided over by the Chief President of the Cour de cassation. It shall comprise, in addition, five judges and one public prosecutor, one Conseiller d'État appointed by the Conseil d'État and one practising lawyer, as well as six qualified, prominent citizens who are not Members of Parliament, of the Judiciary or of the administration. The President of the Republic, the President of the National Assembly and the President of the Senate shall each appoint two qualified, prominent citizens. The procedure provided for in the last paragraph of article 13 shall be applied to the appointments of the qualified, prominent citizens. The appointments made by the President of each House of Parliament shall be submitted for the sole opinion of the relevant standing committee in that House.

The section with jurisdiction over public prosecutors shall be presided over by the Chief Public Prosecutor at the Cour de Cassation. It shall comprise, in addition, five public prosecutors and one judge, as well as the Conseiller d'État and the practising lawyer, together with the six qualified, prominent citizens referred to in the second paragraph.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over judges shall make recommendations for the appointment of judges to the Cour de cassation; the Chief Presidents of Courts of Appeal and the Presidents of the Tribunaux de grande instance.

Other judges shall be appointed after consultation with this section.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over public prosecutors shall give its opinion on the appointment of public prosecutors.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over judges shall act as disciplinary tribunal for judges. When acting in such capacity, in addition to the members mentioned in the second paragraph, it shall comprise the judge belonging to the section with jurisdiction over public prosecutors.

The section of the High Council of the Judiciary with jurisdiction over public prosecutors shall give its opinion on disciplinary measures regarding public prosecutors. When acting in such capacity, it shall comprise, in addition to the members mentioned in paragraph three, the public prosecutor belonging to the section with jurisdiction over judges.

The High Council of the Judiciary shall meet in plenary session to reply to the requests for opinions made by the President of the Republic in application of article 64. It shall also express its opinion in plenary session, on questions concerning the deontology of judges or on any question concerning the operation of justice which is referred to it by the Minister of Justice. The plenary session comprises three of the five judges mentioned in the second paragraph, three of the five prosecutors mentioned in the third paragraph as well as the Conseiller d'État, the practising lawyer and the six qualified, prominent citizens referred to in the second paragraph. It is presided over by the Chief President of the Cour de cassation who may be substituted by the Chief Public Prosecutor of this court.

The Minister of Justice may participate in all the sittings of the sections of the High Council of the Judiciary except those concerning disciplinary matters.

According to the conditions determined by an Institutional Act, a referral may be made to the High Council of the Judiciary by a person awaiting trial.

The Institutional Act shall determine the manner in which this article is to be implemented.

Article 66.

No one shall be arbitrarily detained.

The Judicial Authority, guardian of the freedom of the individual, shall ensure compliance with this principle in the conditions laid down by statute.

Article 66-1.

No one shall be sentenced to death.

TITLE IX

THE HIGH COURT

Article 67.

The President of the Republic shall incur no liability by reason of acts carried out in his official capacity, subject to the provisions of Articles 53-2 and 68 hereof.

Throughout his term of office the President shall not be required to testify before any French Court of law or Administrative authority and shall not be the object of any civil proceedings, nor of any preferring of charges, prosecution or investigatory measures. All limitation periods shall be suspended for the duration of said term of office.

All actions and proceedings thus stayed may be reactivated or brought against the President one month after the end of his term of office.

Article 68.

The President of the Republic shall not be removed from office during the term thereof on any grounds other than a breach of his duties patently incompatible with his continuing in office. Such removal from office shall be proclaimed by Parliament sitting as the High Court.

The proposal to convene the High Court adopted by one or other of the Houses of Parliament shall be immediately transmitted to the other House which shall make its decision known within fifteen days of receipt thereof.

The High Court shall be presided over by the President of the National Assembly. It shall give its ruling as to the removal from office of the President, by secret ballot, within one month. Its decision shall have immediate effect.

Rulings given hereunder shall require a majority of two thirds of the members of the House involved or of the High Court. No proxy voting shall be allowed. Only votes in favour of the removal from office or the convening of the High Court shall be counted.

An Institutional Act shall determine the conditions for the application hereof.

.....

ON THE CRIMINAL LIABILITY OF THE GOVERNMENT

Article 68-1.

Members of the Government shall be criminally liable for acts performed in the holding of their office and classified as serious crimes or other major offences at the time they were committed.

They shall be tried by the Court of Justice of the Republic.

The Court of Justice of the Republic shall be bound by such definition of serious crimes and other major offences and such determination of penalties as are laid down by statute.

Article 68-2.

The Court of Justice of the Republic shall consist of fifteen members: twelve Members of Parliament, elected in equal number from among their ranks by the National Assembly and the Senate after each general or partial renewal by election of these Houses, and three judges of the *Cour de cassation*, one of whom shall preside over the Court of Justice of the Republic.

Any person claiming to be a victim of a serious crime or other major offence committed by a member of the Government in the holding of his office may lodge a complaint with a petitions committee.

This committee shall order the case to be either closed or forwarded to the Chief Public Prosecutor at the *Cour de cassation* for referral to the Court of Justice of the Republic.

The Chief Public prosecutor at the *Cour de cassation* may also make a referral *ex officio* to the Court of Justice of the Republic with the assent of the petitions committee.

An Institutional Act shall determine the manner in which this article is to be implemented.

Article 68-3.

The provisions of this title shall apply to acts committed before its entry into force.

TITLE XI

THE ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL COUNCIL

Article 69.

The Economic, Social and Environmental Council, on a referral from the Government, shall give its opinion on such Government Bills, draft Ordinances, draft Decrees, and Private Members' Bills as have been submitted to it.

A member of the Economic, Social and Environmental Council may be designated by the Council to present, to the Houses of Parliament, the opinion of the Council on such drafts, Government or Private Members' Bills as have been submitted to it.

A referral may be made to the Economic, Social and Environmental Council by petition, in the manner determined by an Institutional Act. After consideration of the petition, it shall inform the Government and Parliament of the pursuant action it proposes.

Article 70.

The Economic, Social and Environmental Council may also be consulted by the Government or Parliament on any economic, social or environmental issue. The Government may also consult it on Programming Bills setting down the multiannual guidelines for public finances. Any plan or Programming Bill of an economic, social or environmental nature shall be submitted to it for its opinion.

Article 71.

The composition of the Economic, Social and Environmental Council, which shall not exceed two hundred and thirty-three members, and its rules of proceeding shall be determined by an Institutional Act.

TITLE XI A

THE DEFENDER OF RIGHTS

Article 71-1(1).

The Defender of Rights shall ensure the due respect of rights and freedoms by state administrations, territorial communities, public legal entities, as well as by all bodies carrying out a public service mission or by those that the Institutional Act decides fall within his remit.

Referral may be made to the Defender of Rights, in the manner determined by an Institutional Act, by every person who considers his rights to have been infringed by the operation of a public service or of a body mentioned in the first paragraph. He may act without referral.

Tinjauan hukum..., Wahyu Defry Setiawan, FH UI, 2012

without referral.

The Institutional Act shall set down the mechanisms for action and the powers of the Defender of Rights. It shall determine the manner in which he may be assisted by third parties in the exercise of certain of his powers.

The Defender of Rights shall be appointed by the President of the Republic for a six-year, non-renewable term, after the application of the procedure provided for in the last paragraph of article 13. This position is incompatible with membership of the Government or membership of Parliament. Other incompatibilities shall be determined by the Institutional Act.

The Defender of Rights is accountable for his actions to the President of the Republic and to Parliament.

TITLE XII

ON TERRITORIAL COMMUNITIES

Article 72.

The territorial communities of the Republic shall be the Communes, the Departments, the Regions, the Special-Status communities and the Overseas Territorial communities to which article 74 applies. Any other territorial community created, if need be, to replace one or more communities provided for by this paragraph shall be created by statute.

Territorial communities may take decisions in all matters arising under powers that can best be exercised at their level.

In the conditions provided for by statute, these communities shall be self-governing through elected councils and shall have power to make regulations for matters coming within their jurisdiction.

In the manner provided for by an Institutional Act, except where the essential conditions for the exercise of public freedoms or of a right guaranteed by the Constitution are affected, territorial communities or associations thereof may, where provision is made by statute or regulation, as the case may be, derogate on an experimental basis for limited purposes and duration from provisions laid down by statute or regulation governing the exercise of their powers.

No territorial community may exercise authority over another. However, where the exercising of a power requires the combined action of several territorial communities, one of those communities or one of their associations may be authorised by statute to organise such combined action.

In the territorial communities of the Republic, the State representative, representing each of the members of the Government, shall be responsible for national interests, administrative supervision and compliance with the law.

Article 72-1.

The conditions in which voters in each territorial community may use their right of petition to ask for a matter within the powers of the community to be entered on the agenda of its Deliberative Assembly shall be determined by statute.

In the conditions determined by an Institutional Act, draft decisions or acts within the powers of a territorial community may, on the initiative of the latter, be submitted for a decision by voters of said community by means of a referendum.

When the creation of a special-status territorial community or modification of its organisation are contemplated, a decision may be taken by statute to consult the voters registered in the relevant communities. Voters may also be consulted on changes to the boundaries of territorial communities in the conditions determined by statute.

Article 72-2.

Territorial communities shall enjoy revenue of which they may dispose freely in the conditions determined by statute.

They may receive all or part of the proceeds of taxes of all kinds. They may be authorised by statute to determine the basis of assessment and the rates thereof, within the limits set by such statutes.

Tax revenue and other own revenue of territorial communities shall, for each category of territorial community, represent a decisive share of their revenue. The conditions for the implementation of this rule shall be determined by an Institutional Act.

Whenever powers are transferred between central government and the territorial communities, revenue equivalent to that given over to the exercise of those powers shall also be transferred. Whenever the effect of newly created or extended powers is to increase the expenditure to be borne by territorial communities, revenue as determined by statute shall be allocated to said communities.

Equalisation mechanisms intended to promote equality between territorial communities shall be provided for by statute.

Article 72-3.

The Republic shall recognise the overseas populations within the French people in a common ideal of liberty, equality and fraternity.

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, the Wallis and Futuna Islands and French Polynesia shall be governed by article 73 as regards overseas departments and regions and for the territorial communities set up under the final paragraph of article 73, and by article 74 for the other communities.

The status of New Caledonia shall be governed by title XIII.

The text of the Constitution of the French Republic, as amended, is available at www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp

The legislative system and special organisation of the French Southern and Antarctic Territories and Clipperton shall be determined by statute.

Article 72-4.

No change of status as provided for by articles 73 and 74 with respect to the whole or part of any one of the communities to which the second paragraph of article 72-3 applies, shall take place without the prior consent of voters in the relevant community or part of a community being sought in the manner provided for by the paragraph below. Such change of status shall be made by an Institutional Act.

The President of the Republic may, on a recommendation from the Government when Parliament is in session or on a joint motion of the two Houses, published in either case in the *Journal Officiel*, decide to consult voters in an overseas territorial community on a question relating to its organisation, its powers or its legislative system. Where the referendum concerns a change of status as provided for by the foregoing paragraph and is held in response to a recommendation by the Government, the Government shall make a statement before each House which shall be followed by debate.

Article 73.

In the overseas departments and regions, statutes and regulations shall be automatically applicable. They may be adapted in the light of the specific characteristics and constraints of such communities.

Those adaptations may be decided on by the communities in areas in which their powers are exercised if the relevant communities have been empowered to that end by statute.

By way of derogation from the first paragraph hereof and in order to take account of their specific features, communities to which this article applies may be empowered by statute to determine themselves the rules applicable in their territory in a limited number of matters that fall to be determined by statute.

These rules may not concern nationality, civic rights, the guarantees of civil liberties, the status and capacity of persons, the organisation of justice, criminal law, criminal procedure, foreign policy, defence, public security and public order, currency, credit and exchange, or electoral law. This list may be clarified and amplified by an Institutional Act.

The two foregoing paragraphs shall not apply in the department and region of La Réunion.

The powers to be conferred pursuant to the second and third paragraphs hereof shall be determined at the request of the relevant territorial community in the conditions and subject to the reservations provided for by an Institutional Act. They may not be conferred where the essential conditions for the exercise of civil liberties or of a right guaranteed by the Constitution are affected.

The setting up by statute of a territorial community to replace an overseas department and region or a single Deliberative Assembly for the two communities shall not be carried out unless the consent of the voters registered there has first been sought as provided by the second paragraph of article 72-4.

Article 73⁽¹⁾.

In the overseas departments and regions, statutes and regulations shall be automatically applicable. They may be adapted in the light of the specific characteristics and constraints of such communities.

Those adaptations may be decided on by the communities in areas in which their powers are exercised if the relevant communities have been empowered to that end by statute or by regulation, whichever is the case.

By way of derogation from the first paragraph hereof and in order to take account of their specific features, communities to which this article applies may be empowered by statute or by regulation, whichever is the case, to determine themselves the rules applicable in their territory in a limited number of matters that fall to be determined by statute or by regulation.

These rules may not concern nationality, civic rights, the guarantees of civil liberties, the status and capacity of persons, the organisation of justice, criminal law, criminal procedure, foreign policy, defence, public security and public order, currency, credit and exchange, or electoral law. This list may be clarified and amplified by an Institutional Act.

The two foregoing paragraphs shall not apply in the department and region of La Réunion.

The powers to be conferred pursuant to the second and third paragraphs hereof shall be determined at the request of the relevant territorial community in the conditions and subject to the reservations provided for by an Institutional Act. They may not be conferred where the essential conditions for the exercise of civil liberties or of a right guaranteed by the Constitution are affected.

The setting up by statute of a territorial community to replace an overseas department and region or a single Deliberative Assembly for the two communities shall not be carried out unless the consent of the voters registered there has first been sought as provided by the second paragraph of article 72-4.

Article 74.

The Overseas territorial communities to which this article applies shall have a status reflecting their respective local interests within the Republic.

This status shall be determined by an Institutional Act, passed after consultation of the Deliberative Assembly, which shall specify:

- the conditions in which statutes and regulations shall apply there;

- the powers of the territorial community, the powers of the Government and the transfer of central government

the powers of the territorial community, subject to those already exercised by said community, the transfer of central government powers may not involve any of the matters listed in paragraph four of article 73, as specified and completed, if need be, by an Institutional Act;

- the rules governing the organisation and operation of the institutions of the territorial community and the electoral system for its Deliberative Assembly;
- the conditions in which its institutions are consulted on Government or Private Members' Bills and draft Ordinances or draft Decrees containing provisions relating specifically to the community and to the ratification or approval of international undertakings entered into in matters within its powers.

The Institutional Act may also, for such territorial communities as are self-governing, determine the conditions in which:

- the *Conseil d'État* shall exercise specific judicial review of certain categories of decisions taken by the Deliberative Assembly in matters which are within the powers vested in it by statute;
- the Deliberative Assembly may amend a statute promulgated after the coming into effect of the new status of said territorial community where the Constitutional Council, acting in particular on a referral from the authorities of the territorial community, has found that statute law has intervened in a field within the powers of said Assembly;
- measures justified by local needs may be taken by the territorial community in favour of its population as regards access to employment, the right of establishment for the exercise of a professional activity or the protection of land;
- the community may, subject to review by the central government, participate in the exercise of the powers vested in it while showing due respect for the guaranties given throughout national territory for the exercising of civil liberties.

The other rules governing the specific organisation of the territorial communities to which this article applies shall be determined and amended by statute after consultation with their Deliberative Assembly.

Article 74-1.

In the Overseas territorial communities referred to by Article 74 and in New Caledonia, the Government may, in matters which remain within the power of the State, extend by Ordinance, with any necessary adaptations, the statutory provisions applying in mainland France, or adapt the statutory provisions applying, to the specific organization of the community in question, provided statute law has not expressly excluded the use of this procedure for the provisions involved.

Such Ordinances shall be issued in the Council of Ministers after receiving the opinion of the relevant Deliberative Assemblies and the *Conseil d'État*. They shall come into force upon publication. They shall lapse if they are not ratified by Parliament within eighteen months of their publication.

Article 75.

Citizens of the Republic who do not have ordinary civil status, the sole status referred to in Article 34, shall retain their personal status until such time as they have renounced the same.

Article 75-1.

Regional languages are part of France's heritage.

TITLE XIII

TRANSITIONAL PROVISIONS PERTAINING TO NEW CALEDONIA

Article 76.

The population of New Caledonia is called upon to vote by 31 December, 1998 on the provisions of the agreement signed at Nouméa on 5 May, 1998, published in the *Journal Officiel* of the French Republic on 27 May, 1998.

Persons satisfying the requirements laid down in article 2 of Act No. 88-1028 of 9 November, 1988 shall be eligible to take part in the vote.

The measures required to organize the voting process shall be taken by decree adopted after consultation with the *Conseil d'État* and discussion in the Council of Ministers.

Article 77.

After approval of the agreement by the vote provided for in article 76, the Institutional Act passed after consultation with the Deliberative Assembly of New Caledonia shall determine, in order to ensure the development of New Caledonia in accordance with the guidelines set out in that agreement and in the manner required for its implementation:

- those of the State's powers which are to be definitively transferred to the institutions of New Caledonia, the applicable time frame and the manner in which said transfer shall be proceeded with, together with the apportionment of expenditure arising in connection therewith;
- the rules governing the organization and operation of the institutions of New Caledonia in particular for the circumstances in which

certain kinds of decisions taken by the Deliberative Assembly of New Caledonia may be referred to the Constitutional Council for review before publication;

- the rules concerning citizenship, the electoral system, employment, and personal status as laid down by customary law;
- the conditions and the time limits within which the population concerned in New Caledonia is to vote on the attainment of full sovereignty.

Any other measures required to give effect to the agreement referred to in article 76 shall be determined by statute.

For the purpose of defining the body of electors called upon to elect members of the Deliberative Assemblies of New Caledonia and the provinces, the list referred to in the Agreement mentioned in Article 76 hereof and Sections 188 and 189 of Institutional Act n° 99-209 of March 19, 1999 pertaining to New Caledonia is the list drawn up for the ballot provided for in Article 76 hereinabove which includes those persons not eligible to vote.

Articles 78 to 86 repealed

TITLE XIV

ON THE FRENCH-SPEAKING WORLD AND ON ASSOCIATION AGREEMENTS

Article 87.

The Republic shall participate in the development of solidarity and cooperation between States and peoples having the French language in common.

Article 88.

The Republic may enter into agreements with States which wish to associate with it in order to develop their civilizations.

TITLE XV

ON THE EUROPEAN UNION

Article 88-1.

The Republic shall participate in the European Union constituted by States which have freely chosen to exercise some of their powers in common by virtue of the Treaty on European Union and of the Treaty on the Functioning of the European Union, as they result from the treaty signed in Lisbon on 13 December, 2007.

Article 88-2.

Statutes shall determine the rules relating to the European arrest warrant pursuant to acts adopted by the institutions on the European Union.

Article 88-3.

Subject to reciprocity and in accordance with the terms of the Treaty on European Union signed on 7 February 1992, the right to vote and stand as a candidate in municipal elections shall be granted only to citizens of the Union residing in France. Such citizens shall neither hold the office of Mayor or Deputy Mayor nor participate in the designation of Senate electors or in the election of Senators. An Institutional Act passed in identical terms by the two Houses shall determine the manner of implementation of this article.

Article 88-4.

The government shall lay before the National Assembly and the Senate drafts of European legislative acts as well as other drafts of or proposals for acts of the European Union as soon as they have been transmitted to the Council of the European Union.

In the manner laid down by the Rules of Procedure of each House, European resolutions may be passed, even if Parliament is not in session, on the drafts or proposals referred to in the preceding paragraph, as well as on any document issuing from a European Union Institution.

A committee in charge of European affairs shall be set up in each of the Houses of Parliament.

Article 88-5⁽¹⁾.

Any Government Bill authorizing the ratification of a treaty pertaining to the accession of a state to the European Union shall be submitted to referendum by the people.

submitted to referendum by the President of the Republic.

Notwithstanding the foregoing, by passing a motion adopted in identical terms in each House by a three-fifths majority, Parliament may authorize the passing of the Bill according to the procedure provided for in paragraph three of article 89.

Article 88-6

The National Assembly or the Senate may issue a reasoned opinion as to the conformity of a draft proposal for a European Act with the principle of subsidiarity. Said opinion shall be addressed by the President of the House involved to the Presidents of the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission. The Government shall be informed of said opinion.

Each House may institute proceedings before the Court of Justice of the European Union against a European Act for non-compliance with the principle of subsidiarity. Such proceedings shall be referred to the Court of Justice of the European Union by the Government.

For the purpose of the foregoing, resolutions may be passed, even if Parliament is not in session, in the manner set down by the Rules of Procedure of each House for the tabling and discussion thereof. Such proceedings shall be obligatory upon the request of sixty Members of the National Assembly or sixty Senators.

Article 88-7

Parliament may, by the passing of a motion in identical terms by the National Assembly and the Senate, oppose any modification of the rules governing the passing of Acts of the European Union in cases provided for under the simplified revision procedure for treaties or under judicial cooperation on civil matters, as set forth in the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, as they result from the treaty signed in Lisbon on December 13, 2007.

TITLE XVI

ON AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

Article 89.

The President of the Republic, on the recommendation of the Prime Minister, and Members of Parliament alike shall have the right to initiate amendments to the Constitution.

A Government or a Private Member's Bill to amend the Constitution must be considered within the time limits set down in the third paragraph of article 42 and be passed by the two Houses in identical terms. The amendment shall take effect after approval by referendum.

However, a Government Bill to amend the Constitution shall not be submitted to referendum where the President of the Republic decides to submit it to Parliament convened in Congress; the Government Bill to amend the Constitution shall then be approved only if it is passed by a three-fifths majority of the votes cast. The Bureau of the Congress shall be that of the National Assembly.

No amendment procedure shall be commenced or continued where the integrity of national territory is placed in jeopardy.

The republican form of government shall not be the object of any amendment.

TITLE XVII

(REPEALED)

CHARTER FOR THE ENVIRONMENT

The French People,

Having considered that

Natural resources and equilibria have conditioned the emergence of mankind;

The future and very existence of mankind are inextricably linked with its natural environment;

The environment is the common heritage of all human beings;

Man exerts ever-increasing influence over the conditions for life and over his own evolution;

Biological diversity, the fulfilment of the individual and the progress of human societies are affected by certain types of consumption or production and by excessive exploitation of natural resources;

The safeguarding of the environment is a goal to be pursued in the same way as the other fundamental interests of the Nation;

In order to ensure sustainable development, choices designed to meet the needs of the present generation should not jeopardise the ability of future generations and other peoples to meet their own needs.

Hereby proclaim:

Art 1 – Each person has the right to live in a balanced environment which shows due respect for health.

Art 2 – Each person has a duty to participate in preserving and enhancing the environment.

Art 3 – Each person shall, in the conditions provided for by law, foresee and avoid the occurrence of any damage which he or she may cause to the environment or, failing that, limit the consequences of such damage.

Art 4 – Each person shall be required, in the conditions provided for by law, to contribute to the making good of any damage he or she may have caused to the environment.

Art 5 – When the occurrence of any damage, albeit unpredictable in the current state of scientific knowledge, may seriously and irreversibly harm the environment, public authorities shall, with due respect for the principle of precaution and the areas within their jurisdiction, ensure the implementation of procedures for risk assessment and the adoption of temporary measures commensurate with the risk involved in order to deal with the occurrence of such damage.

Art 6 – Public policies shall promote sustainable development. To this end they shall reconcile the protection and enhancement of the environment with economic development and social progress.

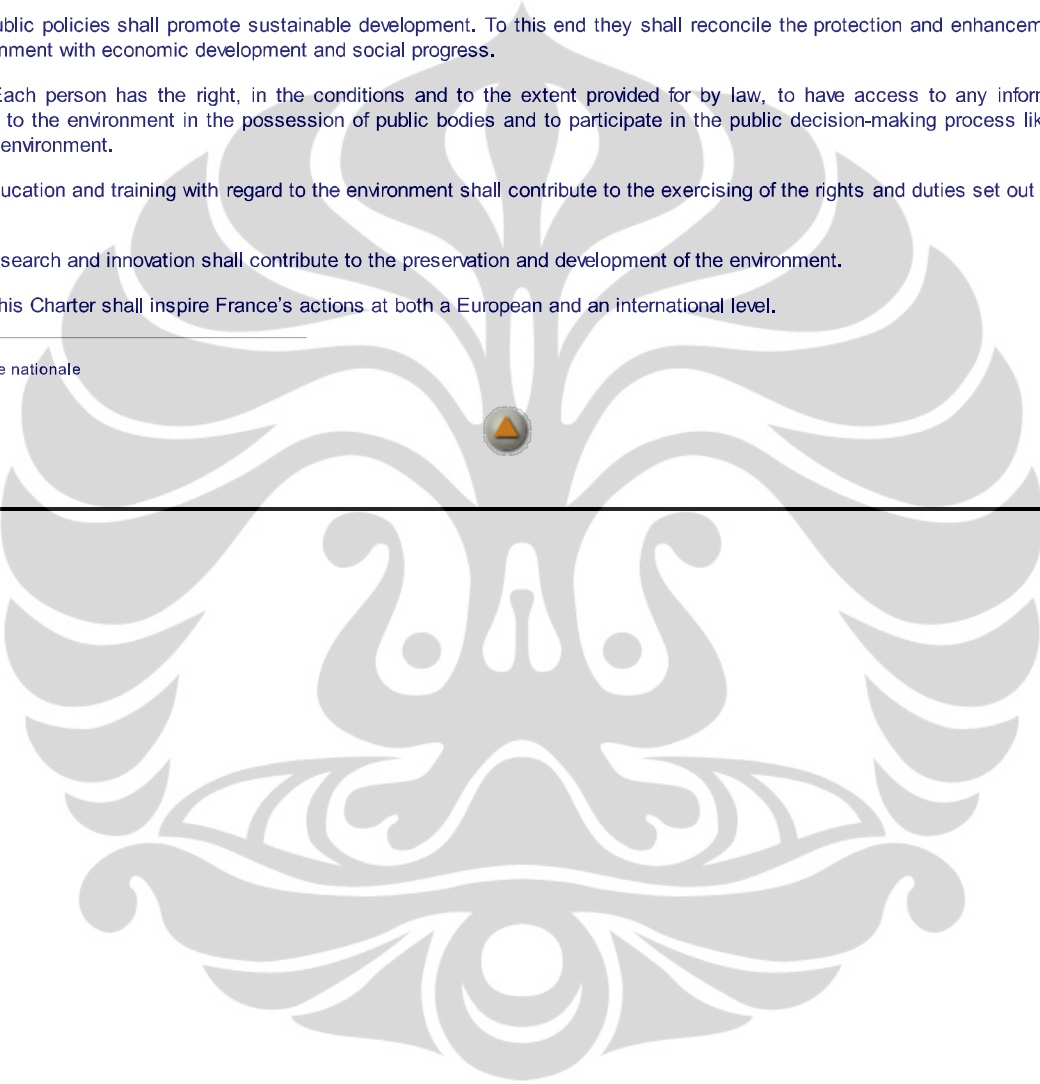
Art 7 – Each person has the right, in the conditions and to the extent provided for by law, to have access to any information pertaining to the environment in the possession of public bodies and to participate in the public decision-making process likely to affect the environment.

Art 8 – Education and training with regard to the environment shall contribute to the exercising of the rights and duties set out in this Charter.

Art 9 – Research and innovation shall contribute to the preservation and development of the environment.

Art 10 – This Charter shall inspire France's actions at both a European and an international level.

© Assemblée nationale



Official Journal

of the European Union

C 306

Volume 50

English edition

Information and Notices

17 December 2007

Notice No	Contents	Page
2007/C 306/01	Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007	1
	AMENDMENTS TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND TO THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY	10
	Article 1	10
	Article 2	42
	FINAL PROVISIONS	134
	Article 3	134
	Article 4	134
	Article 5	134
	Article 6	135
	Article 7	135
	PROTOCOLS	147
	A. Protocols to be annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and, where applicable, to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community	148
	— Protocol on the role of national Parliaments in the European Union	148
	— Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality	150
	— Protocol on the Euro Group	153
	— Protocol on permanent structured cooperation established by Article 28 A of the Treaty on European Union	153
	— Protocol relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms	155
	— Protocol on the internal market and competition	156
	— Protocol on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to Poland and to the United Kingdom	156
	— Protocol on the exercise of shared competence	158
	— Protocol on services of general interest	158



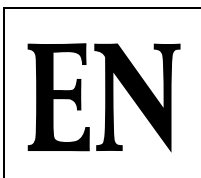
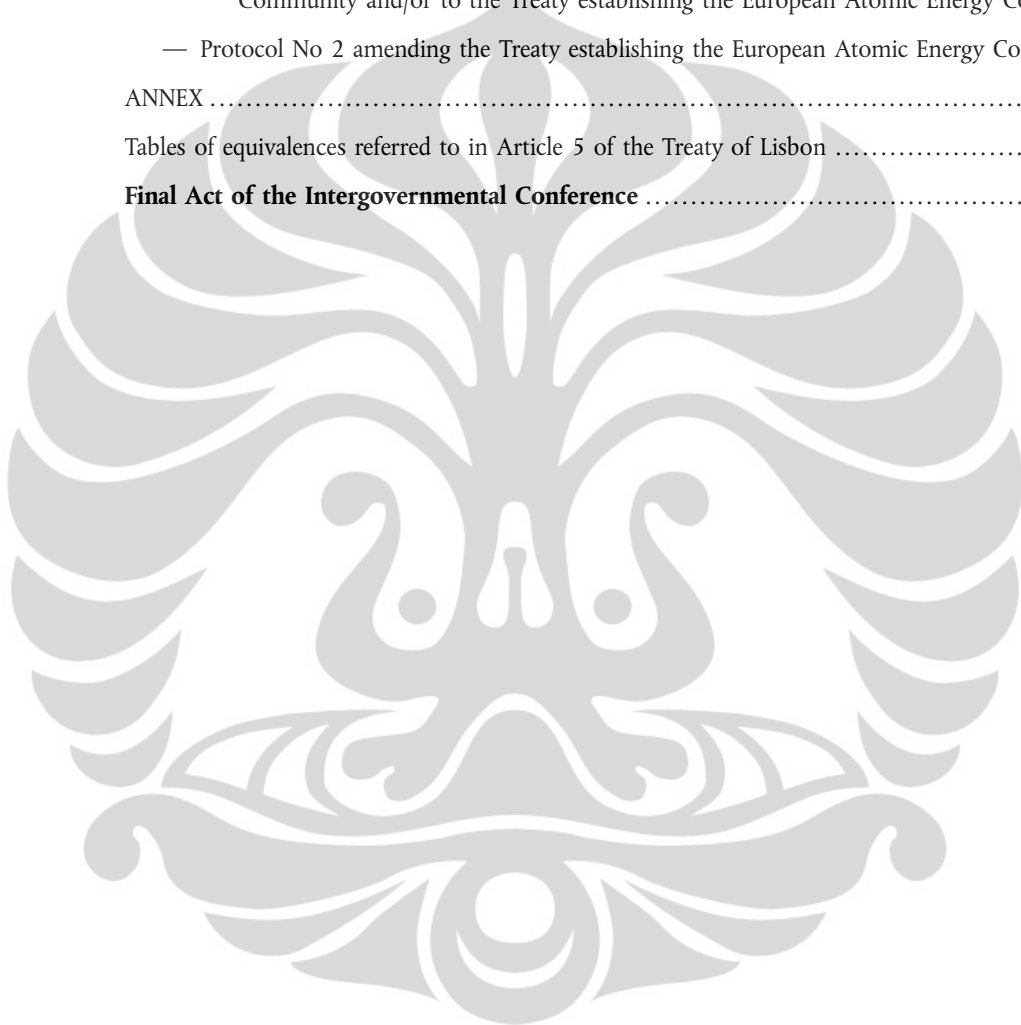
Price: 42 EUR

Tinjauan hukum..., Wahyu Defry Setiawan, FH UI, 2012

(Continued overleaf)

- Protocol on the Decision of the Council relating to the implementation of Article 9c(4) of the Treaty on European Union and Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union between 1 November 2014 and 31 March 2017 on the one hand, and as from 1 April 2017 on the other 159
- Protocol on transitional provisions 159
- B. Protocols to be annexed to the Treaty of Lisbon 165
 - Protocol No 1 amending the Protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community 165
 - Annex — Tables of equivalences referred to in Article 2 of Protocol (No 1) amending the Protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community. 195
 - Protocol No 2 amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community 199
- ANNEX 202
- Tables of equivalences referred to in Article 5 of the Treaty of Lisbon 202
- Final Act of the Intergovernmental Conference** 231

2007/C 306/02



TREATY OF LISBON

AMENDING THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND
THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN
COMMUNITY

(2007/C 306/01)



PREAMBLE

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA,

THE PRESIDENT OF THE CZECH REPUBLIC,

HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK,

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA,

THE PRESIDENT OF IRELAND,

THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC,

HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA,

HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY,

THE PRESIDENT OF MALTA,

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS,

THE FEDERAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND,

THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE PRESIDENT OF ROMANIA,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA,

THE PRESIDENT OF THE SLOVAK REPUBLIC,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN,

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

DESIRING to complete the process started by the Treaty of Amsterdam and by the Treaty of Nice with a view to enhancing the efficiency and democratic legitimacy of the Union and to improving the coherence of its action,

HAVE RESOLVED to amend the Treaty on European Union, the Treaty establishing the European Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community,

and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS

Guy VERHOFSTADT

Prime Minister

Karel DE GUCHT

Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Sergei STANISHEV

Prime Minister

Ivailo KALFINE

Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE CZECH REPUBLIC

Mirek TOPOLÁNEK

Prime Minister

Karel SCHWARZENBERG

Minister for Foreign Affairs

HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK

Anders Fogh RASMUSSEN

Prime Minister

Per Stig MØLLER

Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Dr Angela MERKEL

Federal Chancellor

Dr Frank-Walter STEINMEIER

Deputy Federal Chancellor and Federal Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

Andrus ANSIP

Prime Minister

Urmas PAET

Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF IRELAND

Bertie AHERN

Taoiseach (Prime Minister)

Dermot AHERN

Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC

Konstantinos KARAMANLIS

Prime Minister

Dora BAKOYANNIS

Minister for Foreign Affairs

HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

President of the Government

Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ

Minister for Foreign Affairs and Cooperation

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC

Nicolas SARKOZY

President

François FILLON

Prime Minister

Bernard KOUCHNER

Minister for Foreign and European Affairs

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Romano PRODI

President of the Council of Ministers

Massimo D'ALEMA

Vice-President of the Council of Ministers and Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Tassos PAPADOPOULOS

President

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS

Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

Valdis ZATLERS

President

Aigars KALVĪTIS

Prime Minister

Māris RIEKSTIŅŠ

Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

Valdas ADAMKUS

President

Gediminas KIRKILAS

Prime Minister

Petras VAITIEKŪNAS

Minister for Foreign Affairs

HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG

Jean-Claude JUNCKER

Prime Minister, Minister of State

Jean ASSELBORN

Minister for Foreign Affairs and Immigration

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

Ferenc GYURCSÁNY

Prime Minister

Dr Kinga GÖNCZ

Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF MALTA

The Hon. Lawrence GONZI

Prime Minister

The Hon. Michael FRENDU

Minister for Foreign Affairs

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS

Dr J. P. BALKENENDE

Prime Minister

M. J. M. VERHAGEN

Minister for Foreign Affairs

THE FEDERAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA

Dr Alfred GUSENBAUER

Federal Chancellor

Dr Ursula PLASSNIK

Federal Minister for European and International Affairs

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND

Donald TUSK

Prime Minister

Radosław SIKORSKI

Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa

Prime Minister

Luís Filipe Marques Amado

Minister of State; Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF ROMANIA,

Traian Bănescu

President

Călin Popescu Țăriceanu

Prime Minister

Adrian Cioroianu

Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Janez Janša

President of the Government

Dr. Dimitrij Rupel

Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE SLOVAK REPUBLIC

Robert FICO

Prime Minister

Ján KUBIŠ

Minister for Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND

Matti VANHANEN

Prime Minister

Ilkka KANERVA

Minister for Foreign Affairs

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN

Fredrik REINFELDT

Prime Minister

Cecilia MALMSTRÖM

Minister for European Affairs

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

The Rt Hon. Gordon BROWN

Prime Minister

The Rt Hon. David MILIBAND

Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs

WHO, having exchanged their full powers, found in good and due form,

Tinjuan hukum..., Wahyu Defry Setiawan, FH UI, 2012

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

AMENDMENTS TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND TO THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY

Article 1

The Treaty on European Union shall be amended in accordance with the provisions of this Article.

PREAMBLE

- 1) The preamble shall be amended as follows:
 - (a) the following text shall be inserted as the second recital:

‘DRAWING INSPIRATION from the cultural, religious and humanist inheritance of Europe, from which have developed the universal values of the inviolable and inalienable rights of the human person, freedom, democracy, equality and the rule of law;’
 - (b) In the seventh, which shall become the eighth, recital, the words ‘of this Treaty’ shall be replaced by ‘of this Treaty and of the Treaty on the Functioning of the European Union,’;
 - (c) In the eleventh, which shall become the twelfth, recital, the words ‘of this Treaty’ shall be replaced by ‘of this Treaty and of the Treaty on the Functioning of the European Union,’.

GENERAL PROVISIONS

- 2) Article 1 shall be amended as follows:
 - (a) the following words shall be inserted at the end of the first paragraph:

‘on which the Member States confer competences to attain objectives they have in common.’;
 - (b) the third paragraph shall be replaced by the following:

‘The Union shall be founded on the present Treaty and on the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as “the Treaties”). Those two Treaties shall have the same legal value. The Union shall replace and succeed the European Community.’

- 3) The following Article 1a shall be inserted:

'Article 1a

The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.'

- 4) Article 2 shall be replaced by the following:

'Article 2

1. The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.
2. The Union shall offer its citizens an area of freedom, security and justice without internal frontiers, in which the free movement of persons is ensured in conjunction with appropriate measures with respect to external border controls, asylum, immigration and the prevention and combating of crime.
3. The Union shall establish an internal market. It shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. It shall promote scientific and technological advance.

It shall combat social exclusion and discrimination, and shall promote social justice and protection, equality between women and men, solidarity between generations and protection of the rights of the child.

It shall promote economic, social and territorial cohesion, and solidarity among Member States.

It shall respect its rich cultural and linguistic diversity, and shall ensure that Europe's cultural heritage is safeguarded and enhanced.

4. The Union shall establish an economic and monetary union whose currency is the euro.
5. In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute to the protection of its citizens. It shall contribute to peace, security, the sustainable development of the Earth, solidarity and mutual respect among peoples, free and fair trade, eradication of poverty and the protection of human rights, in particular the rights of the child, as well as to the strict observance and the development of international law, including respect for the principles of the United Nations Charter.
6. The Union shall pursue its objectives by appropriate means commensurate with the competences which are conferred upon it in the Treaties.'

- 5) Article 3 shall be repealed, and the following Article 3a shall be inserted:

'Article 3a

1. In accordance with Article 3b, competences not conferred upon the Union in the Treaties remain with the Member States.

2. The Union shall respect the equality of Member States before the Treaties as well as their national identities, inherent in their fundamental structures, political and constitutional, inclusive of regional and local self-government. It shall respect their essential State functions, including ensuring the territorial integrity of the State, maintaining law and order and safeguarding national security. In particular, national security remains the sole responsibility of each Member State.

3. Pursuant to the principle of sincere cooperation, the Union and the Member States shall, in full mutual respect, assist each other in carrying out tasks which flow from the Treaties.

The Member States shall take any appropriate measure, general or particular, to ensure fulfilment of the obligations arising out of the Treaties or resulting from the acts of the institutions of the Union.

The Member States shall facilitate the achievement of the Union's tasks and refrain from any measure which could jeopardise the attainment of the Union's objectives.'

- 6) The following Article 3b shall be inserted, replacing Article 5 of the Treaty establishing the European Community:

'Article 3b

1. The limits of Union competences are governed by the principle of conferral. The use of Union competences is governed by the principles of subsidiarity and proportionality.

2. Under the principle of conferral, the Union shall act only within the limits of the competences conferred upon it by the Member States in the Treaties to attain the objectives set out therein. Competences not conferred upon the Union in the Treaties remain with the Member States.

3. Under the principle of subsidiarity, in areas which do not fall within its exclusive competence, the Union shall act only if and insofar as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the Member States, either at central level or at regional and local level, but can rather, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved at Union level.

The institutions of the Union shall apply the principle of subsidiarity as laid down in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. National Parliaments ensure compliance with the principle of subsidiarity in accordance with the procedure set out in that Protocol.

4. Under the principle of proportionality, the content and form of Union action shall not exceed what is necessary to achieve the objectives of the Treaties.

The institutions of the Union shall apply the principle of proportionality as laid down in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality.’

- 7) Articles 4 and 5 shall be repealed.
- 8) Article 6 shall be replaced by the following:

‘Article 6

1. The Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000, as adapted at Strasbourg, on 12 December 2007, which shall have the same legal value as the Treaties.

The provisions of the Charter shall not extend in any way the competences of the Union as defined in the Treaties.

The rights, freedoms and principles in the Charter shall be interpreted in accordance with the general provisions in Title VII of the Charter governing its interpretation and application and with due regard to the explanations referred to in the Charter, that set out the sources of those provisions.

2. The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Such accession shall not affect the Union’s competences as defined in the Treaties.

3. Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, shall constitute general principles of the Union’s law.’

- 9) Article 7 shall be amended as follows:
 - (a) throughout the Article, the word ‘assent’ shall be replaced by ‘consent’, the reference to breach ‘of principles mentioned in Article 6(1)’ shall be replaced by a reference to breach ‘of the values referred to in Article 1a’, the words ‘of this Treaty’ shall be replaced by ‘of the Treaties’ and the word ‘Commission’ shall be replaced by ‘European Commission’;
 - (b) at the end of the first sentence of the first subparagraph of paragraph 1, the words ‘and address appropriate recommendations to that State’ shall be deleted; at the end of the last sentence, the words ‘and, acting in accordance with the same procedure, may call on independent persons to submit within a reasonable time limit a report on the situation in the Member State in question’ shall be replaced by ‘and may address recommendations to it, acting in accordance with the same procedure.’;
 - (c) in paragraph 2, the words ‘The Council, meeting in the composition of the Heads of State or Government and acting by unanimity’ shall be replaced by ‘The European Council, acting by unanimity’ and the words ‘the government of the Member State in question’ shall be replaced by ‘the Member State in question’;

(d) paragraphs 5 and 6 shall be replaced by the following:

‘5. The voting arrangements applying to the European Parliament, the European Council and the Council for the purposes of this Article are laid down in Article 309 of the Treaty on the Functioning of the European Union.’

10) The following new Article 7a shall be inserted:

Article 7a

1. The Union shall develop a special relationship with neighbouring countries, aiming to establish an area of prosperity and good neighbourliness, founded on the values of the Union and characterised by close and peaceful relations based on cooperation.

2. For the purposes of paragraph 1, the Union may conclude specific agreements with the countries concerned. These agreements may contain reciprocal rights and obligations as well as the possibility of undertaking activities jointly. Their implementation shall be the subject of periodic consultation.’

11) The provisions of Title II shall be incorporated into the Treaty establishing the European Community, as amended elsewhere, which shall become the Treaty on the Functioning of the European Union.

DEMOCRATIC PRINCIPLES

12) Title II and Article 8 shall be replaced by the following new heading and new Articles 8 to 8 C:

‘TITLE II

PROVISIONS ON DEMOCRATIC PRINCIPLES

Article 8

In all its activities, the Union shall observe the principle of the equality of its citizens, who shall receive equal attention from its institutions, bodies, offices and agencies. Every national of a Member State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the Union shall be additional to national citizenship and shall not replace it.

Article 8 A

1. The functioning of the Union shall be founded on representative democracy.
2. Citizens are directly represented at Union level in the European Parliament.

Member States are represented in the European Council by their Heads of State or Government and in the Council by their governments, themselves democratically accountable either to their national Parliaments, or to their citizens.

3. Every citizen shall have the right to participate in the democratic life of the Union. Decisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.
4. Political parties at European level contribute to forming European political awareness and to expressing the will of citizens of the Union.

Article 8 B

1. The institutions shall, by appropriate means, give citizens and representative associations the opportunity to make known and publicly exchange their views in all areas of Union action.
2. The institutions shall maintain an open, transparent and regular dialogue with representative associations and civil society.
3. The European Commission shall carry out broad consultations with parties concerned in order to ensure that the Union's actions are coherent and transparent.
4. Not less than one million citizens who are nationals of a significant number of Member States may take the initiative of inviting the European Commission, within the framework of its powers, to submit any appropriate proposal on matters where citizens consider that a legal act of the Union is required for the purpose of implementing the Treaties.

The procedures and conditions required for such a citizens' initiative shall be determined in accordance with the first paragraph of Article 21 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 8 C

National Parliaments contribute actively to the good functioning of the Union:

- (a) through being informed by the institutions of the Union and having draft legislative acts of the Union forwarded to them in accordance with the Protocol on the role of national Parliaments in the European Union;
- (b) by seeing to it that the principle of subsidiarity is respected in accordance with the procedures provided for in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality;
- (c) by taking part, within the framework of the area of freedom, security and justice, in the evaluation mechanisms for the implementation of the Union policies in that area, in accordance with Article 61 C of the Treaty on the Functioning of the European Union, and through being involved in the political monitoring of Europol and the evaluation of Eurojust's activities in accordance with Articles 69 G and 69 D of that Treaty;
- (d) by taking part in the revision procedures of the Treaties, in accordance with Article 48 of this Treaty;

- (e) by being notified of applications for accession to the Union, in accordance with Article 49 of this Treaty;
- (f) by taking part in the inter-parliamentary cooperation between national Parliaments and with the European Parliament, in accordance with the Protocol on the role of national Parliaments in the European Union.’

INSTITUTIONS

- 13) The provisions of Title III shall be repealed. Title III shall be replaced by the following heading:

‘TITLE III
PROVISIONS ON THE INSTITUTIONS’.

- 14) Article 9 shall be replaced by the following:

‘Article 9

1. The Union shall have an institutional framework which shall aim to promote its values, advance its objectives, serve its interests, those of its citizens and those of the Member States, and ensure the consistency, effectiveness and continuity of its policies and actions.

The Union’s institutions shall be:

- the European Parliament,
- the European Council,
- the Council,
- the European Commission (hereinafter referred to as “the Commission”),
- the Court of Justice of the European Union,
- the European Central Bank,
- the Court of Auditors.

2. Each institution shall act within the limits of the powers conferred on it in the Treaties, and in conformity with the procedures, conditions and objectives set out in them. The institutions shall practice mutual sincere cooperation.

3. The provisions relating to the European Central Bank and the Court of Auditors and detailed provisions on the other institutions are set out in the Treaty on the Functioning of the European Union.

4. The European Parliament, the Council and the Commission shall be assisted by an Economic and Social Committee and a Committee of the Regions acting in an advisory capacity.’.

15) An Article 9 A shall be inserted:

'Article 9 A

1. The European Parliament shall, jointly with the Council, exercise legislative and budgetary functions. It shall exercise functions of political control and consultation as laid down in the Treaties. It shall elect the President of the Commission.

2. The European Parliament shall be composed of representatives of the Union's citizens. They shall not exceed seven hundred and fifty in number, plus the President. Representation of citizens shall be degressively proportional, with a minimum threshold of six members per Member State. No Member State shall be allocated more than ninety-six seats.

The European Council shall adopt by unanimity, on the initiative of the European Parliament and with its consent, a decision establishing the composition of the European Parliament, respecting the principles referred to in the first subparagraph.

3. The members of the European Parliament shall be elected for a term of five years by direct universal suffrage in a free and secret ballot.

4. The European Parliament shall elect its President and its officers from among its members.'

16) An Article 9 B shall be inserted:

'Article 9 B

1. The European Council shall provide the Union with the necessary impetus for its development and shall define the general political directions and priorities thereof. It shall not exercise legislative functions.

2. The European Council shall consist of the Heads of State or Government of the Member States, together with its President and the President of the Commission. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall take part in its work.

3. The European Council shall meet twice every six months, convened by its President. When the agenda so requires, the members of the European Council may decide each to be assisted by a minister and, in the case of the President of the Commission, by a member of the Commission. When the situation so requires, the President shall convene a special meeting of the European Council.

4. Except where the Treaties provide otherwise, decisions of the European Council shall be taken by consensus.

5. The European Council shall elect its President, by a qualified majority, for a term of two and a half years, renewable once. In the event of an impediment or serious misconduct, the European Council can end the President's term of office in accordance with the same procedure.

6. The President of the European Council:

- (a) shall chair it and drive forward its work;
- (b) shall ensure the preparation and continuity of the work of the European Council in cooperation with the President of the Commission, and on the basis of the work of the General Affairs Council;
- (c) shall endeavour to facilitate cohesion and consensus within the European Council;
- (d) shall present a report to the European Parliament after each of the meetings of the European Council.

The President of the European Council shall, at his level and in that capacity, ensure the external representation of the Union on issues concerning its common foreign and security policy, without prejudice to the powers of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.

The President of the European Council shall not hold a national office.’.

17) An Article 9 C shall be inserted:

‘Article 9 C

1. The Council shall, jointly with the European Parliament, exercise legislative and budgetary functions. It shall carry out policy-making and coordinating functions as laid down in the Treaties.
2. The Council shall consist of a representative of each Member State at ministerial level, who may commit the government of the Member State in question and cast its vote.
3. The Council shall act by a qualified majority except where the Treaties provide otherwise.
4. As from 1 November 2014, a qualified majority shall be defined as at least 55 % of the members of the Council, comprising at least fifteen of them and representing Member States comprising at least 65 % of the population of the Union.

A blocking minority must include at least four Council members, failing which the qualified majority shall be deemed attained.

The other arrangements governing the qualified majority are laid down in Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

5. The transitional provisions relating to the definition of the qualified majority which shall be applicable until 31 October 2014 and those which shall be applicable from 1 November 2014 to 31 March 2017 are laid down in the Protocol on transitional provisions.

6. The Council shall meet in different configurations, the list of which shall be adopted in accordance with Article 201b of the Treaty on the Functioning of the European Union.

The General Affairs Council shall ensure consistency in the work of the different Council configurations. It shall prepare and ensure the follow-up to meetings of the European Council, in liaison with the President of the European Council and the Commission.

The Foreign Affairs Council shall elaborate the Union's external action on the basis of strategic guidelines laid down by the European Council and ensure that the Union's action is consistent.

7. A Committee of Permanent Representatives of the Governments of the Member States shall be responsible for preparing the work of the Council.

8. The Council shall meet in public when it deliberates and votes on a draft legislative act. To this end, each Council meeting shall be divided into two parts, dealing respectively with deliberations on Union legislative acts and non-legislative activities.

9. The Presidency of Council configurations, other than that of Foreign Affairs, shall be held by Member State representatives in the Council on the basis of equal rotation, in accordance with the conditions established in accordance with Article 201b of the Treaty on the Functioning of the European Union.'

18) An Article 9 D shall be inserted:

'Article 9 D

1. The Commission shall promote the general interest of the Union and take appropriate initiatives to that end. It shall ensure the application of the Treaties, and of measures adopted by the institutions pursuant to them. It shall oversee the application of Union law under the control of the Court of Justice of the European Union. It shall execute the budget and manage programmes. It shall exercise coordinating, executive and management functions, as laid down in the Treaties. With the exception of the common foreign and security policy, and other cases provided for in the Treaties, it shall ensure the Union's external representation. It shall initiate the Union's annual and multiannual programming with a view to achieving interinstitutional agreements.

2. Union legislative acts may only be adopted on the basis of a Commission proposal, except where the Treaties provide otherwise. Other acts shall be adopted on the basis of a Commission proposal where the Treaties so provide.

3. The Commission's term of office shall be five years.

The members of the Commission shall be chosen on the ground of their general competence and European commitment from persons whose independence is beyond doubt.

In carrying out its responsibilities, the Commission shall be completely independent. Without prejudice to Article 9 E(2), the members of the Commission shall neither seek nor take instructions from any Government or other institution, body, office or entity. They shall refrain from any action incompatible with their duties or the performance of their tasks.

4. The Commission appointed between the date of entry into force of the Treaty of Lisbon and 31 October 2014 shall consist of one national of each Member State, including its President and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy who shall be one of its Vice-Presidents.

5. As from 1 November 2014, the Commission shall consist of a number of members, including its President and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, corresponding to two thirds of the number of Member States, unless the European Council, acting unanimously, decides to alter this number.

The members of the Commission shall be chosen from among the nationals of the Member States on the basis of a system of strictly equal rotation between the Member States, reflecting the demographic and geographical range of all the Member States. This system shall be established unanimously by the European Council in accordance with Article 211a of the Treaty on the Functioning of the European Union.

6. The President of the Commission shall:

- (a) lay down guidelines within which the Commission is to work;
- (b) decide on the internal organisation of the Commission, ensuring that it acts consistently, efficiently and as a collegiate body;
- (c) appoint Vice-Presidents, other than the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, from among the members of the Commission.

A member of the Commission shall resign if the President so requests. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall resign, in accordance with the procedure set out in Article 9 E(1), if the President so requests.

7. Taking into account the elections to the European Parliament and after having held the appropriate consultations, the European Council, acting by a qualified majority, shall propose to the European Parliament a candidate for President of the Commission. This candidate shall be elected by the European Parliament by a majority of its component members. If he does not obtain the required majority, the European Council, acting by a qualified majority, shall within one month propose a new candidate who shall be elected by the European Parliament following the same procedure.

The Council, by common accord with the President-elect, shall adopt the list of the other persons whom it proposes for appointment as members of the Commission. They shall be selected, on the basis of the suggestions made by Member States, in accordance with the criteria set out in paragraph 3, second subparagraph, and paragraph 5, second subparagraph.

The President, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the other members of the Commission shall be subject as a body to a vote of consent by the European Parliament. On the basis of this consent the Commission shall be appointed by the European Council, acting by a qualified majority.

8. The Commission, as a body, shall be responsible to the European Parliament. In accordance with Article 201 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the European Parliament may vote on a motion of censure of the Commission. If such a motion is carried, the members of the Commission shall resign as a body and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall resign from the duties that he carries out in the Commission.'

19) The following new Article 9 E shall be inserted:

'Article 9 E

1. The European Council, acting by a qualified majority, with the agreement of the President of the Commission, shall appoint the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. The European Council may end his term of office by the same procedure.

2. The High Representative shall conduct the Union's common foreign and security policy. He shall contribute by his proposals to the development of that policy, which he shall carry out as mandated by the Council. The same shall apply to the common security and defence policy.

3. The High Representative shall preside over the Foreign Affairs Council.

4. The High Representative shall be one of the Vice-Presidents of the Commission. He shall ensure the consistency of the Union's external action. He shall be responsible within the Commission for responsibilities incumbent on it in external relations and for coordinating other aspects of the Union's external action. In exercising these responsibilities within the Commission, and only for these responsibilities, the High Representative shall be bound by Commission procedures to the extent that this is consistent with paragraphs 2 and 3.'

20) An Article 9 F shall be inserted:

'Article 9 F

1. The Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the General Court and specialised courts. It shall ensure that in the interpretation and application of the Treaties the law is observed.

Member States shall provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by Union law.

2. The Court of Justice shall consist of one judge from each Member State. It shall be assisted by Advocates-General.

The General Court shall include at least one judge per Member State.

The judges and the Advocates-General of the Court of Justice and the judges of the General Court shall be chosen from persons whose independence is beyond doubt and who satisfy the conditions set out in Articles 223 and 224 of the Treaty on the Functioning of the European Union. They shall be appointed by common accord of the governments of the Member States for six years. Retiring judges and Advocates-General may be reappointed.

3. The Court of Justice of the European Union shall, in accordance with the Treaties:

- (a) rule on actions brought by a Member State, an institution or a natural or legal person;
- (b) give preliminary rulings, at the request of courts or tribunals of the Member States, on the interpretation of Union law or the validity of acts adopted by the institutions;
- (c) rule in other cases provided for in the Treaties.’

21) The provisions of Title IV shall be incorporated into the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, as amended elsewhere.

ENHANCED COOPERATION

22) Title IV shall take over the heading of Title VII, ‘PROVISIONS ON ENHANCED COOPERATION’ and Articles 27 A to 27 E, Articles 40 to 40b and Articles 43 to 45 shall be replaced by the following Article 10, which shall also replace Articles 11 and 11a of the Treaty establishing the European Community. These same articles shall also be replaced by Articles 280 A to 280 I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as set out below in point 278 of Article 2 of this Treaty:

Article 10

1. Member States which wish to establish enhanced cooperation between themselves within the framework of the Union’s non-exclusive competences may make use of its institutions and exercise those competences by applying the relevant provisions of the Treaties, subject to the limits and in accordance with the detailed arrangements laid down in this Article and in Articles 280 A to 280 I of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Enhanced cooperation shall aim to further the objectives of the Union, protect its interests and reinforce its integration process. Such cooperation shall be open at any time to all Member States, in accordance with Article 280 C of the Treaty on the Functioning of the European Union.

2. The decision authorising enhanced cooperation shall be adopted by the Council as a last resort, when it has established that the objectives of such cooperation cannot be attained within a reasonable period by the Union as a whole, and provided that at least nine Member States participate in it. The Council shall act in accordance with the procedure laid down in Article 280 D of the Treaty on the Functioning of the European Union.

3. All members of the Council may participate in its deliberations, but only members of the Council representing the Member States participating in enhanced cooperation shall take part in the vote. The voting rules are set out in Article 280 E of the Treaty on the Functioning of the European Union.

4. Acts adopted in the framework of enhanced cooperation shall bind only participating Member States. They shall not be regarded as part of the *acquis* which has to be accepted by candidate States for accession to the Union.'

- 23) Title V shall be renamed as follows: 'GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION AND SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY'.

GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION

- 24) The following new Chapter 1 and Articles 10 A and 10 B shall be inserted:

'CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION

Article 10 A

1. The Union's action on the international scene shall be guided by the principles which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world: democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter and international law.

The Union shall seek to develop relations and build partnerships with third countries, and international, regional or global organisations which share the principles referred to in the first subparagraph. It shall promote multilateral solutions to common problems, in particular in the framework of the United Nations.

2. The Union shall define and pursue common policies and actions, and shall work for a high degree of cooperation in all fields of international relations, in order to:

- (a) safeguard its values, fundamental interests, security, independence and integrity;
- (b) consolidate and support democracy, the rule of law, human rights and the principles of international law;
- (c) preserve peace, prevent conflicts and strengthen international security, in accordance with the purposes and principles of the United Nations Charter, with the principles of the Helsinki Final Act and with the aims of the Charter of Paris, including those relating to external borders;

- (d) foster the sustainable economic, social and environmental development of developing countries, with the primary aim of eradicating poverty;
- (e) encourage the integration of all countries into the world economy, including through the progressive abolition of restrictions on international trade;
- (f) help develop international measures to preserve and improve the quality of the environment and the sustainable management of global natural resources, in order to ensure sustainable development;
- (g) assist populations, countries and regions confronting natural or man-made disasters; and
- (h) promote an international system based on stronger multilateral cooperation and good global governance.

3. The Union shall respect the principles and pursue the objectives set out in paragraphs 1 and 2 in the development and implementation of the different areas of the Union's external action covered by this Title and by Part Five of the Treaty on the Functioning of the European Union, and of the external aspects of its other policies.

The Union shall ensure consistency between the different areas of its external action and between these and its other policies. The Council and the Commission, assisted by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall ensure that consistency and shall cooperate to that effect.

Article 10 B

1. On the basis of the principles and objectives set out in Article 10 A, the European Council shall identify the strategic interests and objectives of the Union.

Decisions of the European Council on the strategic interests and objectives of the Union shall relate to the common foreign and security policy and to other areas of the external action of the Union. Such decisions may concern the relations of the Union with a specific country or region or may be thematic in approach. They shall define their duration, and the means to be made available by the Union and the Member States.

The European Council shall act unanimously on a recommendation from the Council, adopted by the latter under the arrangements laid down for each area. Decisions of the European Council shall be implemented in accordance with the procedures provided for in the Treaties.

2. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, for the area of common foreign and security policy, and the Commission, for other areas of external action, may submit joint proposals to the Council.'

THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY

25) The following headings shall be inserted:

'CHAPTER 2

SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY

SECTION 1

COMMON PROVISIONS'

26) The following new Article 10 C shall be inserted:

'Article 10 C

The Union's action on the international scene, pursuant to this Chapter, shall be guided by the principles, shall pursue the objectives of, and be conducted in accordance with, the general provisions laid down in Chapter 1.'

27) Article 11 shall be amended as follows:

(a) paragraph 1 shall be replaced by the following two paragraphs:

'1. The Union's competence in matters of common foreign and security policy shall cover all areas of foreign policy and all questions relating to the Union's security, including the progressive framing of a common defence policy that might lead to a common defence.

The common foreign and security policy is subject to specific rules and procedures. It shall be defined and implemented by the European Council and the Council acting unanimously, except where the Treaties provide otherwise. The adoption of legislative acts shall be excluded. The common foreign and security policy shall be put into effect by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and by Member States, in accordance with the Treaties. The specific role of the European Parliament and of the Commission in this area is defined by the Treaties. The Court of Justice of the European Union shall not have jurisdiction with respect to these provisions, with the exception of its jurisdiction to monitor compliance with Article 25b of this Treaty and to review the legality of certain decisions as provided for by the second paragraph of Article 240a of the Treaty on the Functioning of the European Union.

2. Within the framework of the principles and objectives of its external action, the Union shall conduct, define and implement a common foreign and security policy, based on the development of mutual political solidarity among Member States, the identification of questions of general interest and the achievement of an ever-increasing degree of convergence of Member States' actions.';

- (b) paragraph 2, renumbered 3, shall be amended as follows:
 - (i) The following words shall be added at the end of the first subparagraph:
‘and shall comply with the Union’s action in this area.’;
 - (ii) the third subparagraph shall be replaced by ‘The Council and the High Representative shall ensure compliance with these principles.’.

28) Article 12 shall be replaced by the following:

Article 12

The Union shall conduct the common foreign and security policy by:

- (a) defining the general guidelines;
- (b) adopting decisions defining:
 - (i) actions to be undertaken by the Union;
 - (ii) positions to be taken by the Union;
 - (iii) arrangements for the implementation of the decisions referred to in points (i) and (ii);and by
- (c) strengthening systematic cooperation between Member States in the conduct of policy.’.

29) Article 13 shall be amended as follows:

- (a) in paragraph 1, the words ‘define the principles of and general guidelines for’ shall be replaced by ‘identify the Union’s strategic interests, determine the objectives of and define general guidelines for’ and the following sentence shall be added: ‘It shall adopt the necessary decisions.’. The following subparagraph shall be inserted:

‘If international developments so require, the President of the European Council shall convene an extraordinary meeting of the European Council in order to define the strategic lines of the Union’s policy in the face of such developments.’;

- (b) paragraph 2 shall be deleted and paragraph 3 shall be renumbered 2. The first subparagraph shall be replaced by the following: ‘The Council shall frame the common foreign and security policy and take the decisions necessary for defining and implementing it on the basis of the general guidelines and strategic lines defined by the European Council.’ The second subparagraph shall be deleted. In the third subparagraph, which shall become the second, the words ‘shall ensure’ shall be replaced by ‘and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall ensure’;

(c) the following new paragraph shall be inserted:

‘3. The common foreign and security policy shall be put into effect by the High Representative and by the Member States, using national and Union resources.’.

30) The following new Article 13a shall be inserted:

Article 13a

1. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, who shall chair the Foreign Affairs Council, shall contribute through his proposals towards the preparation of the common foreign and security policy and shall ensure implementation of the decisions adopted by the European Council and the Council.

2. The High Representative shall represent the Union for matters relating to the common foreign and security policy. He shall conduct political dialogue with third parties on the Union's behalf and shall express the Union's position in international organisations and at international conferences.

3. In fulfilling his mandate, the High Representative shall be assisted by a European External Action Service. This service shall work in cooperation with the diplomatic services of the Member States and shall comprise officials from relevant departments of the General Secretariat of the Council and of the Commission as well as staff seconded from national diplomatic services of the Member States. The organisation and functioning of the European External Action Service shall be established by a decision of the Council. The Council shall act on a proposal from the High Representative after consulting the European Parliament and after obtaining the consent of the Commission.’.

31) Article 14 shall be amended as follows:

(a) in paragraph 1, the first two sentences shall be replaced by the following sentence: ‘Where the international situation requires operational action by the Union, the Council shall adopt the necessary decisions.’;

(b) paragraph 2 shall become the second subparagraph of paragraph 1, and the other paragraphs shall be renumbered accordingly. In the first sentence, the words ‘to joint action,’ shall be replaced by ‘to such a decision,’ and the words ‘that action’ shall be replaced by ‘that decision’. The last sentence shall be deleted;

(c) in paragraph 3, renumbered 2, the words ‘Joint actions’ shall be replaced by ‘Decisions referred to in paragraph 1’;

(d) the current paragraph 4 shall be deleted and the remaining paragraphs shall be renumbered accordingly;

- (e) in the first sentence of paragraph 5, renumbered 3, the words ‘pursuant to a joint action, information shall be provided in time to allow,’ shall be replaced by ‘pursuant to a decision as referred to in paragraph 1, information shall be provided by the Member State concerned in time to allow.’;
 - (f) in the first sentence of paragraph 6, renumbered 4, the words ‘failing a Council decision,’ shall be replaced by ‘failing a review of the Council decision as referred to in paragraph 1,’ and the words ‘of the joint action’ shall be replaced by ‘of that decision’;
 - (g) in paragraph 7, renumbered 5, the words ‘joint action’ in the first sentence shall be replaced by ‘decision as referred to in this Article’ and in the second sentence by ‘decision referred to in paragraph 1’.
- 32) At the beginning of Article 15, the words ‘The Council shall adopt common positions. Common positions shall define’ shall be replaced by ‘The Council shall adopt decisions which shall define’ and at the end of the Article the words ‘common positions’ shall be replaced by ‘Union positions’.
- 33) An Article 15a shall be inserted, with the text of Article 22, with the following amendments:
- (a) in paragraph 1, the words ‘Any Member State or the Commission may refer to the Council any question relating to the common foreign and security policy’ shall be replaced by ‘Any Member State, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, or the High Representative with the Commission’s support, may refer any question relating to the common foreign and security policy to the Council’ and the words ‘submit proposals to the Council’ shall be replaced by ‘submit to it initiatives or proposals as appropriate’;
 - (b) in paragraph 2, the words ‘the Presidency, of its own motion,’ shall be replaced by ‘the High Representative, of his own motion’ and the words ‘, or at the request of the Commission or a Member State,’ shall be replaced by ‘, or at the request of a Member State.’
- 34) An Article 15b shall be inserted, with the text of Article 23, with the following amendments:
- (a) in paragraph 1, the first subparagraph shall be replaced by the following: ‘Decisions under this Chapter shall be taken by the European Council and the Council acting unanimously, except where this Chapter provides otherwise. The adoption of legislative acts shall be excluded.’ and the last sentence in the second subparagraph shall be replaced by the following: ‘If the members of the Council qualifying their abstention in this way represent at least one third of the Member States comprising at least one third of the population of the Union, the decision shall not be adopted.’;
 - (b) paragraph 2 shall be amended as follows:
 - (i) the first indent shall be replaced by the following two indents:
 - ‘— when adopting a decision defining a Union action or position on the basis of a decision of the European Council relating to the Union’s strategic interests and objectives, as referred to in Article 10 B(1),

- when adopting a decision defining a Union action or position, on a proposal which the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy has presented following a specific request from the European Council, made on its own initiative or that of the High Representative;’
 - (ii) in the second indent, which shall become the third indent, the words ‘a joint action or a common position,’ shall be replaced by ‘a decision defining a Union action or position;’
 - (iii) in the second subparagraph, first sentence, the word ‘important’ shall be replaced by ‘vital’; the last sentence shall be replaced by the following: ‘The High Representative will, in close consultation with the Member State involved, search for a solution acceptable to it. If he does not succeed, the Council may, acting by a qualified majority, request that the matter be referred to the European Council for a decision by unanimity.’;
 - (iv) the third subparagraph shall be replaced by the following new paragraph 3, the last subparagraph shall become paragraph 4 and paragraph 3 shall be renumbered 5:

‘3. The European Council may unanimously adopt a decision stipulating that the Council shall act by a qualified majority in cases other than those referred to in paragraph 2.’;
 - (c) in the paragraph now numbered 4, the words ‘This paragraph shall not apply’ shall be replaced by ‘Paragraphs 2 and 3 shall not apply’.
- 35) Article 16 shall be amended as follows:
- (a) the words ‘inform and’ shall be deleted, the words ‘within the Council’ shall be replaced by ‘within the European Council and the Council’ and the words ‘in order to ensure that the Union’s influence is exerted as effectively as possible by means of concerted and convergent action’ shall be replaced by ‘in order to determine a common approach’;
 - (b) the following sentences shall be added after the first sentence: ‘Before undertaking any action on the international scene or entering into any commitment which could affect the Union’s interests, each Member State shall consult the others within the European Council or the Council. Member States shall ensure, through the convergence of their actions, that the Union is able to assert its interests and values on the international scene. Member States shall show mutual solidarity.’;
 - (c) the following two paragraphs shall be added:

‘When the European Council or the Council has defined a common approach of the Union within the meaning of the first paragraph, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Ministers for Foreign Affairs of the Member States shall coordinate their activities within the Council.

The diplomatic missions of the Member States and the Union delegations in third countries and at international organisations shall cooperate and shall contribute to formulating and implementing the common approach.’.

- 36) The text of Article 17 shall become Article 28 A, it shall be amended as set out below in point 49.
- 37) Article 18 shall be amended as follows:
- (a) paragraphs 1 to 4 shall be deleted;
 - (b) in paragraph 5, which shall not be numbered, the words ‘whenever it deems it necessary,’ shall be replaced by ‘on a proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy’ and the following sentence shall be added at the end: ‘The special representative shall carry out his mandate under the authority of the High Representative.’.
- 38) Article 19 shall be amended as follows:
- (a) in paragraph 1, the words ‘the common positions’ shall be replaced by ‘the Union’s positions’ in the first and second subparagraphs and the following sentence shall be added at the end of the first subparagraph: ‘The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall organise this coordination.’;
 - (b) paragraph 2 shall be amended as follows:
 - (i) in the first subparagraph, the words ‘Without prejudice to paragraph 1 and Article 14(3),’ shall be replaced by ‘In accordance with Article 11(3),’ and the words ‘the latter’ shall be replaced by ‘the other Member States and the High Representative’;
 - (ii) in the second subparagraph, first sentence, the words ‘and the High Representative’ shall be inserted after ‘the other Member States’; in the second sentence, the word ‘permanent’ shall be deleted and the words ‘ensure the defence of the positions’ shall be replaced by ‘defend the positions’;
 - (iii) the following new third subparagraph shall be added:

‘When the Union has defined a position on a subject which is on the United Nations Security Council agenda, those Member States which sit on the Security Council shall request that the High Representative be invited to present the Union’s position.’

- 39) Article 20 shall be amended as follows:
- (a) in the first paragraph, the words ‘Commission delegations’ shall be replaced by ‘Union delegations’ and the words ‘the common positions and joint actions adopted by the Council’ shall be replaced by ‘decisions defining Union positions and actions adopted pursuant to this Chapter’;
 - (b) in the second paragraph, the words ‘information, carrying out joint assessments’ shall be replaced by ‘information and carrying out joint assessments’ and the words ‘and contributing to the implementation of the provisions referred to in Article 20 of the Treaty establishing the European Community’ shall be deleted;
 - (c) the following new paragraph shall be added:

‘They shall contribute to the implementation of the right of citizens of the Union to protection in the territory of third countries as referred to in Article 17(2)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union and of the measures adopted pursuant to Article 20 of that Treaty.’.
- 40) Article 21 shall be amended as follows:
- (a) the first paragraph shall be replaced by the following:

‘The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall regularly consult the European Parliament on the main aspects and the basic choices of the common foreign and security policy and the common security and defence policy and inform it of how those policies evolve. He shall ensure that the views of the European Parliament are duly taken into consideration. Special representatives may be involved in briefing the European Parliament.’;
 - (b) in the second paragraph, first sentence, the words ‘and to the High Representative’ shall be inserted at the end; in the second sentence, the words ‘It shall hold an annual debate’ shall be replaced by ‘Twice a year it shall hold a debate’ and the words ‘, including the common security and defence policy’ shall be inserted at the end.
- 41) The text of Article 22 shall become Article 15a; it shall be amended as set out above in point 33.
- 42) The text of Article 23 shall become Article 15b; it shall be amended as set out above in point 34.
- 43) Article 24 shall be replaced by the following:

‘Article 24

The Union may conclude agreements with one or more States or international organisations in areas covered by this Chapter.’

44) Article 25 shall be amended as follows:

- (a) in the first paragraph, first sentence, the reference to the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the functioning of the European Union and the words 'or of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy' shall be inserted after 'at the request of the Council'; in the second sentence, the words 'without prejudice to the responsibility of the Presidency and the Commission' shall be replaced by 'without prejudice to the powers of the High Representative';
- (b) the text of the second paragraph shall be replaced by the following: 'Within the scope of this Chapter, the Political and Security Committee shall exercise, under the responsibility of the Council and of the High Representative, the political control and strategic direction of the crisis management operations referred to in Article 28 B.';
- (c) in the third paragraph, the words ', without prejudice to Article 47' shall be deleted.

45) Articles 26 and 27 shall be repealed. The following Articles 25a and 25b shall be inserted, with Article 25b replacing Article 47:

'Article 25a

In accordance with Article 16 B of the Treaty on the Functioning of the European Union and by way of derogation from paragraph 2 thereof, the Council shall adopt a decision laying down the rules relating to the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of this Chapter, and the rules relating to the free movement of such data. Compliance with these rules shall be subject to the control of independent authorities.

Article 25b

The implementation of the common foreign and security policy shall not affect the application of the procedures and the extent of the powers of the institutions laid down by the Treaties for the exercise of the Union competences referred to in Articles 2 B to 2 E of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Similarly, the implementation of the policies listed in those Articles shall not affect the application of the procedures and the extent of the powers of the institutions laid down by the Treaties for the exercise of the Union competences under this Chapter.'

46) Articles 27 A to 27 E, on enhanced cooperation, shall be replaced by Article 10 in accordance with point 22 above.

47) Article 28 shall be amended as follows:

- (a) paragraph 1 shall be deleted and the remaining paragraphs shall be renumbered accordingly; throughout the Article the words 'budget of the European Communities' shall be replaced by 'Union budget';
- (b) in paragraph 2, renumbered 1, the words 'which the provisions relating to the areas referred to in this Title entail' shall be replaced by 'to which the implementation of this Chapter gives rise';
- (c) in paragraph 3, renumbered 2, the words 'the implementation of those provisions' in the first subparagraph shall be replaced by 'the implementation of this Chapter';
- (d) the following new paragraph 3 shall be added and paragraph 4 deleted:

'3. The Council shall adopt a decision establishing the specific procedures for guaranteeing rapid access to appropriations in the Union budget for urgent financing of initiatives in the framework of the common foreign and security policy, and in particular for preparatory activities for the tasks referred to in Article 28 A(1) and Article 28 B. It shall act after consulting the European Parliament.

Preparatory activities for the tasks referred to in Article 28 A(1) and Article 28 B which are not charged to the Union budget shall be financed by a start-up fund made up of Member States' contributions.

The Council shall adopt by a qualified majority, on a proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, decisions establishing:

- (a) the procedures for setting up and financing the start-up fund, in particular the amounts allocated to the fund;
- (b) the procedures for administering the start-up fund;
- (c) the financial control procedures.

When the task planned in accordance with Article 28 A(1) and Article 28 B cannot be charged to the Union budget, the Council shall authorise the High Representative to use the fund. The High Representative shall report to the Council on the implementation of this remit.'

THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY

48) The following new section 2 shall be inserted:

‘SECTION 2

PROVISIONS ON THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY’

49) An Article 28 A shall be inserted, taking over the wording of Article 17, with the following amendments:

(a) the following new paragraph 1 shall be inserted and the next paragraph shall be renumbered 2:

‘1. The common security and defence policy shall be an integral part of the common foreign and security policy. It shall provide the Union with an operational capacity drawing on civilian and military assets. The Union may use them on missions outside the Union for peace-keeping, conflict prevention and strengthening international security in accordance with the principles of the United Nations Charter. The performance of these tasks shall be undertaken using capabilities provided by the Member States.’;

(b) paragraph 1, renumbered 2, shall be amended as follows:

(i) the first subparagraph shall be replaced by the following:

‘2. The common security and defence policy shall include the progressive framing of a common Union defence policy. This will lead to a common defence, when the European Council, acting unanimously, so decides. It shall in that case recommend to the Member States the adoption of such a decision in accordance with their respective constitutional requirements.’;

(ii) in the second subparagraph, the words ‘in accordance with this Article’ shall be replaced by ‘in accordance with this Section’;

(iii) the third subparagraph shall be deleted.

(c) the present paragraphs 2, 3, 4 and 5 shall be replaced by the following paragraphs 3 to 7:

‘3. Member States shall make civilian and military capabilities available to the Union for the implementation of the common security and defence policy, to contribute to the objectives defined by the Council. Those Member States which together establish multinational forces may also make them available to the common security and defence policy.

Member States shall undertake progressively to improve their military capabilities. The Agency in the field of defence capabilities development, research, acquisition and armaments (hereinafter referred to as “the European Defence Agency”) shall identify operational requirements, shall promote measures to satisfy those requirements, shall contribute to identifying and, where appropriate, implementing any measure needed to

strengthen the industrial and technological base of the defence sector, shall participate in defining a European capabilities and armaments policy, and shall assist the Council in evaluating the improvement of military capabilities.

4. Decisions relating to the common security and defence policy, including those initiating a mission as referred to in this Article, shall be adopted by the Council acting unanimously on a proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy or an initiative from a Member State. The High Representative may propose the use of both national resources and Union instruments, together with the Commission where appropriate.

5. The Council may entrust the execution of a task, within the Union framework, to a group of Member States in order to protect the Union's values and serve its interests. The execution of such a task shall be governed by Article 28 C.

6. Those Member States whose military capabilities fulfil higher criteria and which have made more binding commitments to one another in this area with a view to the most demanding missions shall establish permanent structured cooperation within the Union framework. Such cooperation shall be governed by Article 28 E. It shall not affect the provisions of Article 28 B.

7. If a Member State is the victim of armed aggression on its territory, the other Member States shall have towards it an obligation of aid and assistance by all the means in their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter. This shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States.

Commitments and cooperation in this area shall be consistent with commitments under the North Atlantic Treaty Organisation, which, for those States which are members of it, remains the foundation of their collective defence and the forum for its implementation.'

50) The following new Articles 28 B to 28 E shall be inserted:

Article 28 B

1. The tasks referred to in Article 28 A(1), in the course of which the Union may use civilian and military means, shall include joint disarmament operations, humanitarian and rescue tasks, military advice and assistance tasks, conflict prevention and peace-keeping tasks, tasks of combat forces in crisis management, including peace-making and post-conflict stabilisation. All these tasks may contribute to the fight against terrorism, including by supporting third countries in combating terrorism in their territories.

2. The Council shall adopt decisions relating to the tasks referred to in paragraph 1, defining their objectives and scope and the general conditions for their implementation. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, acting under the authority of the Council and in close and constant contact with the Political and Security Committee, shall ensure coordination of the civilian and military aspects of such tasks.

Article 28 C

1. Within the framework of the decisions adopted in accordance with Article 28 B, the Council may entrust the implementation of a task to a group of Member States which are willing and have the necessary capability for such a task. Those Member States, in association with the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall agree among themselves on the management of the task.

2. Member States participating in the task shall keep the Council regularly informed of its progress on their own initiative or at the request of another Member State. Those States shall inform the Council immediately should the completion of the task entail major consequences or require amendment of the objective, scope and conditions determined for the task in the decisions referred to in paragraph 1. In such cases, the Council shall adopt the necessary decisions.

Article 28 D

1. The European Defence Agency referred to in Article 28 A(3), subject to the authority of the Council, shall have as its task to:

- (a) contribute to identifying the Member States' military capability objectives and evaluating observance of the capability commitments given by the Member States;
- (b) promote harmonisation of operational needs and adoption of effective, compatible procurement methods;
- (c) propose multilateral projects to fulfil the objectives in terms of military capabilities, ensure coordination of the programmes implemented by the Member States and management of specific cooperation programmes;
- (d) support defence technology research, and coordinate and plan joint research activities and the study of technical solutions meeting future operational needs;
- (e) contribute to identifying and, if necessary, implementing any useful measure for strengthening the industrial and technological base of the defence sector and for improving the effectiveness of military expenditure.

2. The European Defence Agency shall be open to all Member States wishing to be part of it. The Council, acting by a qualified majority, shall adopt a decision defining the Agency's statute, seat and operational rules. That decision should take account of the level of effective participation in the Agency's activities. Specific groups shall be set up within the Agency bringing together Member States engaged in joint projects. The Agency shall carry out its tasks in liaison with the Commission where necessary.

Article 28 E

1. Those Member States which wish to participate in the permanent structured cooperation referred to in Article 28 A(6), which fulfil the criteria and have made the commitments on military capabilities set out in the Protocol on permanent structured cooperation, shall notify their intention to the Council and to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.

2. Within three months following the notification referred to in paragraph 1 the Council shall adopt a decision establishing permanent structured cooperation and determining the list of participating Member States. The Council shall act by a qualified majority after consulting the High Representative.

3. Any Member State which, at a later stage, wishes to participate in the permanent structured cooperation shall notify its intention to the Council and to the High Representative.

The Council shall adopt a decision confirming the participation of the Member State concerned which fulfils the criteria and makes the commitments referred to in Articles 1 and 2 of the Protocol on permanent structured cooperation. The Council shall act by a qualified majority after consulting the High Representative. Only members of the Council representing the participating Member States shall take part in the vote.

A qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

4. If a participating Member State no longer fulfils the criteria or is no longer able to meet the commitments referred to in Articles 1 and 2 of the Protocol on permanent structured cooperation, the Council may adopt a decision suspending the participation of the Member State concerned.

The Council shall act by a qualified majority. Only members of the Council representing the participating Member States, with the exception of the Member State in question, shall take part in the vote.

A qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

5. Any participating Member State which wishes to withdraw from permanent structured cooperation shall notify its intention to the Council, which shall take note that the Member State in question has ceased to participate.

6. The decisions and recommendations of the Council within the framework of permanent structured cooperation, other than those provided for in paragraphs 2 to 5, shall be adopted by unanimity. For the purposes of this paragraph, unanimity shall be constituted by the votes of the representatives of the participating Member States only.'

- 51) Articles 29 to 39 of Title VI, which relate to judicial cooperation in criminal matters and to police cooperation, shall be replaced by the provisions of Chapters 1, 4 and 5 of Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union. As set out below, in Article 2, points 64, 67 and 68 of this Treaty, Article 29 shall be replaced by Article 61 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Article 30 shall be replaced by Articles 69 F and 69 G thereof, Article 31 shall be replaced by Articles 69 A, 69 B and 69 D thereof, Article 32 shall be replaced by Article 69 H thereof, Article 33 shall be replaced by Article 61 E thereof and Article 36 shall be replaced by Article 61 D thereof. The heading of the Title shall be deleted and its number shall become the number of the Title on final provisions.
- 52) Articles 40 to 40 B of Title VI and Articles 43 to 45 of Title VII, relating to enhanced cooperation, shall be replaced by Article 10 in accordance with point 22 above, and Title VII shall be repealed.
- 53) Articles 41 and 42 shall be repealed.

FINAL PROVISIONS

- 54) Title VIII, on final provisions, shall be renumbered VI; this Title and Articles 48, 49 and 53 shall be amended as set out respectively in points 56, 57 and 61 below. Article 47 shall be replaced by Article 25b, as indicated above in point 45, and Articles 46 and 50 shall be repealed.
- 55) The following new Article 46 A shall be inserted:

'Article 46 A

The Union shall have legal personality.'

- 56) Article 48 shall be replaced by the following:

'Article 48

1. The Treaties may be amended in accordance with an ordinary revision procedure. They may also be amended in accordance with simplified revision procedures.

Ordinary revision procedure

2. The Government of any Member State, the European Parliament or the Commission may submit to the Council proposals for the amendment of the Treaties. These proposals may, *inter alia*, serve either to increase or to reduce the competences conferred on the Union in the Treaties. These proposals shall be submitted to the European Council by the Council and the national Parliaments shall be notified.

3. If the European Council, after consulting the European Parliament and the Commission, adopts by a simple majority a decision in favour of examining the proposed amendments, the President of the European Council shall convene a Convention composed of representatives of the national Parliaments, of the Heads of State or Government of the Member States, of the European Parliament and of the Commission. The European Central Bank shall also be consulted in the case of institutional changes in the monetary area. The Convention shall examine the proposals for amendments and shall adopt by consensus a recommendation to a conference of representatives of the governments of the Member States as provided for in paragraph 4.

The European Council may decide by a simple majority, after obtaining the consent of the European Parliament, not to convene a Convention should this not be justified by the extent of the proposed amendments. In the latter case, the European Council shall define the terms of reference for a conference of representatives of the governments of the Member States.

4. A conference of representatives of the governments of the Member States shall be convened by the President of the Council for the purpose of determining by common accord the amendments to be made to the Treaties.

The amendments shall enter into force after being ratified by all the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

5. If, two years after the signature of a treaty amending the Treaties, four fifths of the Member States have ratified it and one or more Member States have encountered difficulties in proceeding with ratification, the matter shall be referred to the European Council.

Simplified revision procedures

6. The Government of any Member State, the European Parliament or the Commission may submit to the European Council proposals for revising all or part of the provisions of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union relating to the internal policies and action of the Union.

The European Council may adopt a decision amending all or part of the provisions of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union. The European Council shall act by unanimity after consulting the European Parliament and the Commission, and the European Central Bank in the case of institutional changes in the monetary area. That decision shall not enter into force until it is approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

The decision referred to in the second subparagraph shall not increase the competences conferred on the Union in the Treaties.

7. Where the Treaty on the Functioning of the European Union or Title V of this Treaty provides for the Council to act by unanimity in a given area or case, the European Council may adopt a decision authorising the Council to act by a qualified majority in that area or in that case. This subparagraph shall not apply to decisions with military implications or those in the area of defence.

Where the Treaty on the Functioning of the European Union provides for legislative acts to be adopted by the Council in accordance with a special legislative procedure, the European Council may adopt a decision allowing for the adoption of such acts in accordance with the ordinary legislative procedure.

Any initiative taken by the European Council on the basis of the first or the second subparagraph shall be notified to the national Parliaments. If a national Parliament makes known its opposition within six months of the date of such notification, the decision referred to in the first or the second subparagraph shall not be adopted. In the absence of opposition, the European Council may adopt the decision.

For the adoption of the decisions referred to in the first and second subparagraphs, the European Council shall act by unanimity after obtaining the consent of the European Parliament, which shall be given by a majority of its component members.’

- 57) The first paragraph of Article 49 shall be amended as follows:
- (a) in the first sentence, the words ‘which respects the principles set out in Article 6(1) may apply’ shall be replaced by ‘which respects the values referred to in Article 1a and is committed to promoting them may apply’;
 - (b) in the second sentence, the words ‘It shall address its application to the Council, which shall act unanimously’ shall be replaced by ‘The European Parliament and national Parliaments shall be notified of this application. The applicant State shall address its application to the Council, which shall act unanimously’; the word ‘assent’ shall be replaced by ‘consent’ and the words ‘an absolute majority’ shall be replaced by ‘a majority’;
 - (c) the following sentence shall be added at the end of the paragraph: ‘The conditions of eligibility agreed upon by the European Council shall be taken into account.’
- 58) The following new Article 49 A shall be inserted:

Article 49 A

1. Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements.
2. A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. In the light of the guidelines provided by the European Council, the Union shall negotiate and conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union. That agreement shall be negotiated in accordance with Article 188 N(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union. It shall be concluded on behalf of the Union by the Council, acting by a qualified majority, after obtaining the consent of the European Parliament.
3. The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.

4. For the purposes of paragraphs 2 and 3, the member of the European Council or of the Council representing the withdrawing Member State shall not participate in the discussions of the European Council or Council or in decisions concerning it.

A qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

5. If a State which has withdrawn from the Union asks to rejoin, its request shall be subject to the procedure referred to in Article 49.’.

59) The following Article 49 B shall be inserted:

‘Article 49 B

The Protocols and Annexes to the Treaties shall form an integral part thereof.’.

60) An Article 49 C shall be inserted:

‘Article 49 C

1. The Treaties shall apply to the Kingdom of Belgium, Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

2. The territorial scope of the Treaties is specified in Article 311a of the Treaty on the Functioning of the European Union.’.

61) Article 53 shall be amended as follows:

(a) the first paragraph shall be numbered 1, the languages listed in the second paragraph of the current Article 53 of the Treaty on European Union shall be added to the list in this paragraph and the second paragraph shall be deleted;

(b) the following new paragraph 2 shall be added:

‘2. This Treaty may also be translated into any other languages as determined by Member States among those which, in accordance with their constitutional order, enjoy official status in all or part of their territory. A certified copy of such translations shall be provided by the Member States concerned to be deposited in the archives of the Council.’.

Article 2

The Treaty establishing the European Community shall be amended in accordance with the provisions of this Article.

- 1) The title of the Treaty shall be replaced by 'Treaty on the Functioning of the European Union'.

A. HORIZONTAL AMENDMENTS

- 2) Throughout the Treaty:

- (a) the words 'Community' and 'European Community' shall be replaced by 'Union' and any necessary grammatical changes shall be made, the words 'European Communities' shall be replaced by 'European Union', except in paragraph 6(c) of Article 299, renumbered paragraph 5(c) of Article 311a. In respect of Article 136, this amendment shall apply only to the mention of 'The Community' at the beginning of the first paragraph;
- (b) the words 'this Treaty' and 'the present Treaty' shall be replaced by 'the Treaties', the verb, where applicable, shall be put in the plural and any necessary grammatical changes shall be made; this point shall not apply to the third paragraph of Article 182 and to Articles 312 and 313;
- (c) the words 'the Council [shall], acting in accordance with the procedure referred to in Article 251' shall be replaced by 'the European Parliament and the Council [shall], acting in accordance with the ordinary legislative procedure', and the words 'procedure referred to in Article 251' shall be replaced by 'ordinary legislative procedure';
- (d) the words 'acting by a qualified majority' and 'by a qualified majority' shall be deleted;
- (e) the words 'Council meeting in the composition of the Heads of State or Government' shall be replaced by 'European Council';
- (f) the words 'institutions or bodies' and 'institutions and bodies' shall be replaced by 'institutions, bodies, offices or agencies', except in the first paragraph of Article 193;
- (g) the words 'common market' shall be replaced by 'internal market';
- (h) the word 'ecu' shall be replaced by 'euro';
- (i) the words 'Member States without a derogation' shall be replaced by 'Member States whose currency is the euro';

- (j) the abbreviation 'ECB' shall be replaced by 'European Central Bank';
- (k) the words 'Statute of the ESCB' shall be replaced by 'Statute of the ESCB and of the ECB';
- (l) The words 'Committee provided for in Article 114' and 'Committee referred to in Article 114' shall be replaced by 'Economic and Financial Committee';
- (m) the words 'Statute of the Court of Justice' or 'Statute of the Court' shall be replaced by 'Statute of the Court of Justice of the European Union';
- (n) the words 'Court of First Instance' shall be replaced by 'General Court';
- (o) the words 'judicial panel' and 'judicial panels' shall be replaced by 'specialised court' and 'specialised courts' respectively and any necessary grammatical changes shall be made.
- 3) In the following Articles, the words 'acting unanimously on a proposal from the Commission' shall be replaced by 'acting unanimously in accordance with a special legislative procedure':
- | | |
|--|--|
| — Article 13, renumbered 16 E, first paragraph | — Article 93 |
| — Article 19(1) | — Article 94, renumbered 95 |
| — Article 19(2) | — Article 104(14), second subparagraph |
| — Article 22, second paragraph | — Article 175(2), first subparagraph |
- 4) In the following Articles, the words 'acting by a simple majority' shall be inserted after 'the Council':
- | | |
|--------------------------------|--|
| — Article 130, first paragraph | — Article 213, final paragraph, third sentence |
| — Article 144, first paragraph | — Article 216 |
| — Article 208 | — Article 284 |
| — Article 209 | |
- 5) In the following Articles, the words 'consulting the European Parliament' shall be replaced by 'obtaining the consent of the European Parliament':
- Article 13, renumbered 16 E, first paragraph
 - Article 22, second paragraph

- 6) In the following Articles, the word 'institution' or 'institutions' shall be replaced by 'institution, body, office or agency' or 'institutions, bodies, offices or agencies', as appropriate, and any grammatical changes necessary shall be made:
- Article 195(1), second subparagraph
 - Article 232, second paragraph
 - Article 233, first paragraph:
 - Article 234, point (b)
 - Article 255(3) which shall become Article 16 A(3), third subparagraph
- 7) In the following Articles, the words 'Court of Justice' shall be replaced by 'Court of Justice of the European Union'.
- | | |
|---|--------------------------------------|
| — Article 83(2)(d) | — Article 233, first paragraph |
| — Article 88(2), second subparagraph | — Article 234, first paragraph |
| — Article 95, renumbered 94(9) | — Article 235 |
| — Article 195(1) | — Article 236 |
| — Article 225a, sixth paragraph | — Article 237, introductory sentence |
| — Article 226, second paragraph | — Article 238 |
| — Article 227, first paragraph | — Article 240 |
| — Article 228(1), first instance | — Article 242, first sentence |
| — Article 229 | — Article 243 |
| — Article 229a | — Article 244 |
| — Article 230, first paragraph | — Article 247(9), renumbered (8) |
| — Article 231, first paragraph | — Article 256, second paragraph |
| — Article 232, first and third paragraphs | |

In the following Articles, the words 'of Justice' shall be deleted after 'Court':

- | | |
|---------------------------------------|--|
| — Article 227, fourth paragraph | — Article 234, second and third paragraphs |
| — Article 228(1), second instance and | — Article 237, point (d), third sentence |
| — Article 228(2), second subparagraph | — Article 242, second sentence |
| — Article 230, third paragraph | — Article 256, fourth paragraph |
| — Article 231, second paragraph | |
| — Article 232, third paragraph | |

- 8) In the following Articles, the reference to another Article of the Treaty shall be replaced by the following reference to an Article of the Treaty on European Union:

— Article 21, third, now fourth, paragraph	reference to Article 9 (first reference) and to Article 53(1) (second reference)
— Article 97b	reference to Article 2
— Article 98	reference to Article 2 (first reference)
— Article 105(1), second sentence	reference to Article 2
— Article 215, third, now fourth, paragraph	reference to Article 9 D(7), first subparagraph.

- 9) *(Does not apply to the English version.)*

B. SPECIFIC AMENDMENTS

PREAMBLE

- 10) In the second recital, the word ‘countries’ shall be replaced by ‘States’ and in the last recital, the words ‘HAVE DECIDED to create a EUROPEAN COMMUNITY and to this end have designated’ shall be replaced by ‘and to this end HAVE DESIGNATED’.

COMMON PROVISIONS

- 11) Articles 1 and 2 shall be repealed. The following Article 1a shall be inserted:

‘Article 1a

1. This Treaty organises the functioning of the Union and determines the areas of, delimitation of, and arrangements for exercising its competences.

2. This Treaty and the Treaty on European Union constitute the Treaties on which the Union is founded. These two Treaties, which have the same legal value, shall be referred to as “the Treaties”.

CATEGORIES AND AREAS OF COMPETENCE

12) The following new Title and new Articles 2 A to 2 E shall be inserted:

‘TITLE I

CATEGORIES AND AREAS OF UNION COMPETENCE

Article 2 A

1. When the Treaties confer on the Union exclusive competence in a specific area, only the Union may legislate and adopt legally binding acts, the Member States being able to do so themselves only if so empowered by the Union or for the implementation of Union acts.

2. When the Treaties confer on the Union a competence shared with the Member States in a specific area, the Union and the Member States may legislate and adopt legally binding acts in that area. The Member States shall exercise their competence to the extent that the Union has not exercised its competence. The Member States shall again exercise their competence to the extent that the Union has decided to cease exercising its competence.

3. The Member States shall coordinate their economic and employment policies within arrangements as determined by this Treaty, which the Union shall have competence to provide.

4. The Union shall have competence, in accordance with the provisions of the Treaty on European Union, to define and implement a common foreign and security policy, including the progressive framing of a common defence policy.

5. In certain areas and under the conditions laid down in the Treaties, the Union shall have competence to carry out actions to support, coordinate or supplement the actions of the Member States, without thereby superseding their competence in these areas.

Legally binding acts of the Union adopted on the basis of the provisions of the Treaties relating to these areas shall not entail harmonisation of Member States' laws or regulations.

6. The scope of and arrangements for exercising the Union's competences shall be determined by the provisions of the Treaties relating to each area.

Article 2 B

1. The Union shall have exclusive competence in the following areas:

(a) customs union;

(b) the establishing of the competition rules necessary for the functioning of the internal market;

- (c) monetary policy for the Member States whose currency is the euro;
- (d) the conservation of marine biological resources under the common fisheries policy;
- (e) common commercial policy.

2. The Union shall also have exclusive competence for the conclusion of an international agreement when its conclusion is provided for in a legislative act of the Union or is necessary to enable the Union to exercise its internal competence, or insofar as its conclusion may affect common rules or alter their scope.

Article 2 C

1. The Union shall share competence with the Member States where the Treaties confer on it a competence which does not relate to the areas referred to in Articles 2 B and 2 E.

2. Shared competence between the Union and the Member States applies in the following principal areas:

- (a) internal market;
- (b) social policy, for the aspects defined in this Treaty;
- (c) economic, social and territorial cohesion;
- (d) agriculture and fisheries, excluding the conservation of marine biological resources;
- (e) environment;
- (f) consumer protection;
- (g) transport;
- (h) trans-European networks;
- (i) energy;
- (j) area of freedom, security and justice;
- (k) common safety concerns in public health matters, for the aspects defined in this Treaty.

3. In the areas of research, technological development and space, the Union shall have competence to carry out activities, in particular to define and implement programmes; however, the exercise of that competence shall not result in Member States being prevented from exercising theirs.

4. In the areas of development cooperation and humanitarian aid, the Union shall have competence to carry out activities and conduct a common policy; however, the exercise of that competence shall not result in Member States being prevented from exercising theirs.

Article 2 D

1. The Member States shall coordinate their economic policies within the Union. To this end, the Council shall adopt measures, in particular broad guidelines for these policies.

Specific provisions shall apply to those Member States whose currency is the euro.

2. The Union shall take measures to ensure coordination of the employment policies of the Member States, in particular by defining guidelines for these policies.

3. The Union may take initiatives to ensure coordination of Member States' social policies.

Article 2 E

The Union shall have competence to carry out actions to support, coordinate or supplement the actions of the Member States. The areas of such action shall, at European level, be:

- (a) protection and improvement of human health;
- (b) industry;
- (c) culture;
- (d) tourism;
- (e) education, vocational training, youth and sport;
- (f) civil protection;
- (g) administrative cooperation.'

PROVISIONS HAVING GENERAL APPLICATION

13) The following title and Article 2 F shall be inserted:

'TITLE II

PROVISIONS HAVING GENERAL APPLICATION

Article 2 F

The Union shall ensure consistency between its policies and activities, taking all of its objectives into account and in accordance with the principle of conferral of powers.'

- 14) Paragraph 1 of Article 3 shall be repealed. Paragraph 2 shall be left unnumbered, and the words 'the activities referred to in this Article,' shall be replaced by 'its activities,'.
- 15) The text of Article 4 shall become Article 97b. It shall be amended as set out below in point 85.
- 16) Article 5 shall be repealed; it shall be replaced by Article 3b of the Treaty on European Union.
- 17) The following Article 5a shall be inserted:

'Article 5a

In defining and implementing its policies and activities, the Union shall take into account requirements linked to the promotion of a high level of employment, the guarantee of adequate social protection, the fight against social exclusion, and a high level of education, training and protection of human health.'

- 18) The following Article 5b shall be inserted:

'Article 5b

In defining and implementing its policies and activities, the Union shall aim to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.'

- 19) In Article 6, the words 'referred to in Article 3' shall be deleted.
- 20) An Article 6a shall be inserted, with the wording of Article 153(2).
- 21) An Article 6b shall be inserted, with the wording of the enacting terms of the Protocol on the protection and welfare of animals; the word 'fisheries' shall be inserted after 'agriculture', the words 'and research' shall be replaced by 'research and technological development and space', and the words ', since animals are sentient beings,' shall be inserted after 'Member States shall'.
- 22) Articles 7 to 10 shall be repealed. Articles 11 and 11a shall be replaced by Article 10 of the Treaty on European Union and by Articles 280 A and 280 I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as set out in this Treaty in point 22 of Article 1 above and in point 278 below.
- 23) The text of Article 12 shall become Article 16 D.
- 24) The text of Article 13 shall become Article 16 E. It shall be amended as set out below at point 33.
- 25) The text of Article 14 shall become Article 22a. It shall be amended as set out below at point 41.
- 26) The text of Article 15 shall become Article 22b. It shall be amended as set out below at point 42.

27) Article 16 shall be amended as follows:

- (a) at the beginning, the words 'Without prejudice to Articles 73, 86 and 87,' shall be replaced by 'Without prejudice to Article 3a of the Treaty on European Union or to Articles 73, 86 and 87 of this Treaty;';
- (b) at the end of the sentence, the words 'and conditions which enable them to fulfil their missions' shall be replaced by 'and conditions, particularly economic and financial conditions, which enable them to fulfil their missions.';
- (c) the following new sentence shall be added:

'The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish these principles and set these conditions without prejudice to the competence of Member States, in compliance with the Treaties, to provide, to commission and to fund such services.'

28) An Article 16 A shall be inserted, with the wording of Article 255; it shall be amended as follows:

- (a) paragraph 1 shall be preceded by the following text, paragraph 1 being renumbered 3 and paragraphs 2 and 3 becoming subparagraphs:
 - 1. In order to promote good governance and ensure the participation of civil society, the Union institutions, bodies, offices and agencies shall conduct their work as openly as possible.
 - 2. The European Parliament shall meet in public, as shall the Council when considering and voting on a draft legislative act.';
- (b) in paragraph 1, renumbered 3, which shall become the first subparagraph of paragraph 3, a change shall be made to the French which does not concern the English version. The words 'European Parliament, Council and Commission documents' shall be replaced by 'documents of the Union institutions, bodies, offices and agencies, whatever their medium' and the words 'paragraphs 2 and 3' shall be replaced by the words 'this paragraph';
- (c) in paragraph 2, which shall become the second subparagraph of paragraph 1, renumbered 3, the words 'by means of regulations' shall be inserted after 'shall be determined by the Council' and the words 'within two years of the entry into force of the Treaty of Amsterdam' shall be deleted;
- (d) in paragraph 3, which shall become the third subparagraph of paragraph 1, renumbered 3, the words 'referred to above shall elaborate' shall be replaced by 'shall ensure that its proceedings are transparent and shall elaborate', the words ', in accordance with the regulations referred to in the second subparagraph' shall be inserted at the end of the subparagraph and the following two new subparagraphs shall be added:

'The Court of Justice of the European Union, the European Central Bank and the European Investment Bank shall be subject to this paragraph only when exercising their administrative tasks.

The European Parliament and the Council shall ensure publication of the documents relating to the legislative procedures under the terms laid down by the regulation referred to in the second subparagraph.’

29) An Article 16 B shall be inserted, replacing Article 286:

‘Article 16 B

1. Everyone has the right to the protection of personal data concerning them.
2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall lay down the rules relating to the protection of individuals with regard to the processing of personal data by Union institutions, bodies, offices and agencies, and by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Union law, and the rules relating to the free movement of such data. Compliance with these rules shall be subject to the control of independent authorities.

The rules adopted on the basis of this Article shall be without prejudice to the specific rules laid down in Article 25a of the Treaty on European Union.’

30) The following new Article 16 C shall be inserted:

‘Article 16 C

1. The Union respects and does not prejudice the status under national law of churches and religious associations or communities in the Member States.
2. The Union equally respects the status under national law of philosophical and non-confessional organisations.
3. Recognising their identity and their specific contribution, the Union shall maintain an open, transparent and regular dialogue with these churches and organisations.’

NON-DISCRIMINATION AND CITIZENSHIP

31) The heading of Part Two shall be replaced by the following heading: ‘NON-DISCRIMINATION AND CITIZENSHIP OF THE UNION’.

32) An Article 16 D shall be inserted, with the wording of Article 12.

33) An Article 16 E shall be inserted, with the wording of Article 13; in paragraph 2, the words ‘when the Council adopts Community’ shall be replaced by ‘the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt the basic principles of the Union’s’ and the words at the end of the paragraph ‘it shall act in accordance with the procedure referred to in Article 251’ shall be deleted.

34) Article 17 shall be amended as follows:

- (a) in paragraph 1, the word 'complement' shall be replaced by 'be additional to';
- (b) paragraph 2 shall be replaced by the following:

'2. Citizens of the Union shall enjoy the rights and be subject to the duties provided for in the Treaties. They shall have, *inter alia*:

- (a) the right to move and reside freely within the territory of the Member States;
- (b) the right to vote and to stand as candidates in elections to the European Parliament and in municipal elections in their Member State of residence, under the same conditions as nationals of that State;
- (c) the right to enjoy, in the territory of a third country in which the Member State of which they are nationals is not represented, the protection of the diplomatic and consular authorities of any Member State on the same conditions as the nationals of that State;
- (d) the right to petition the European Parliament, to apply to the European Ombudsman, and to address the institutions and advisory bodies of the Union in any of the Treaty languages and to obtain a reply in the same language.

These rights shall be exercised in accordance with the conditions and limits defined by the Treaties and by the measures adopted thereunder.'

35) Article 18 shall be amended as follows:

- (a) in paragraph 2, the words 'the Council may adopt' shall be replaced by 'the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt' and the last sentence shall be deleted;
- (b) paragraph 3 shall be replaced by the following:

'3. For the same purposes as those referred to in paragraph 1 and if the Treaties have not provided the necessary powers, the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, may adopt measures concerning social security or social protection. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.'

- 36) In Article 20, the words ‘establish the necessary rules among themselves and’ shall be replaced by ‘adopt the necessary provisions and’. The following new paragraph shall be added:

‘The Council, acting in accordance with a special legislative procedure and after consulting the European Parliament, may adopt directives establishing the coordination and cooperation measures necessary to facilitate such protection.’

- 37) In Article 21, the following new first paragraph shall be inserted:

‘The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt the provisions for the procedures and conditions required for a citizens’ initiative within the meaning of Article 8 B of the Treaty on European Union, including the minimum number of Member States from which such citizens must come.’

- 38) In Article 22, second paragraph, the words ‘the rights laid down in this Part, which it shall recommend to the Member States for adoption in accordance with their respective constitutional requirements’ shall be replaced by ‘the rights listed in Article 17(2). These provisions shall enter into force after their approval by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.’

- 39) In the heading of Part Three, the words ‘AND INTERNAL ACTIONS’ shall be inserted after ‘POLICIES’.

INTERNAL MARKET

- 40) A Title I, with the heading ‘THE INTERNAL MARKET’ shall be inserted at the beginning of Part Three.

- 41) An Article 22a shall be inserted, with the wording of Article 14. Paragraph 1 shall be replaced by the following:

‘1. The Union shall adopt measures with the aim of establishing or ensuring the functioning of the internal market, in accordance with the relevant provisions of the Treaties.’

- 42) An Article 22b shall be inserted, with the wording of Article 15. In the first paragraph, the words ‘during the period of establishment’ shall be replaced by ‘for the establishment’.

- 43) Title I on the free movement of goods shall become Title Ia.

- 44) In Article 23(1), the words ‘shall be based upon’ shall be replaced by ‘shall comprise’.

- 45) A Chapter Ia entitled ‘CUSTOMS COOPERATION’ shall be inserted after Article 27, and an Article 27a shall be inserted with the wording of Article 135, the last sentence of that Article being deleted.

AGRICULTURE AND FISHERIES

- 46) In the heading of Title II, the words 'AND FISHERIES' shall be added.
- 47) Article 32 shall be amended as follows:
- (a) in paragraph 1, the following new first subparagraph shall be inserted:

'1. The Union shall define and implement a common agriculture and fisheries policy.',
the current text of paragraph 1 shall become the second subparagraph.

In the second subparagraph, the word ', fisheries' shall be inserted after 'agriculture' in the first sentence and the following sentence shall be added as the last sentence of the subparagraph: 'References to the common agricultural policy or to agriculture, and the use of the term "agricultural", shall be understood as also referring to fisheries, having regard to the specific characteristics of this sector.'
 - (b) in paragraph 2, the words 'and functioning' shall be inserted after the word 'establishment'.
 - (c) in paragraph 3, the words 'to this Treaty' shall be deleted.
- 48) Article 36 shall be amended as follows:
- (a) in the first paragraph, the words 'the European Parliament and' shall be inserted before 'the Council' and the words 'and (3)' shall be deleted;
 - (b) in the second paragraph, the introductory sentence shall be replaced by the following: 'The Council, on a proposal from the Commission, may authorise the granting of aid:'.
- 49) Article 37 shall be amended as follows:
- (a) paragraph 1 shall be deleted;
 - (b) paragraph 2 shall be renumbered 1; the words 'Having taken into account the work of the Conference provided for in paragraph 1, after consulting the Economic and Social Committee and within two years of the entry into force of the Treaty, the Commission shall submit proposals' shall be replaced by 'The Commission shall submit proposals', and the third subparagraph shall be deleted;
 - (c) the following paragraphs shall be inserted as new paragraphs 2 and 3, and the remaining paragraphs shall be renumbered accordingly:

'2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall establish the common organisation of agricultural markets provided for in Article 34(1) and the other provisions necessary for the pursuit of the objectives of the common agricultural policy and the common fisheries policy;

3. The Council, on a proposal from the Commission, shall adopt measures on fixing prices, levies, aid and quantitative limitations and on the fixing and allocation of fishing opportunities.’;
- (d) in the introductory words to paragraph 3 renumbered 4, the words ‘The Council may, acting by a qualified majority and in accordance with paragraph 2, replace the national market organisations by the common organisation’ shall be replaced by ‘In accordance with paragraph 2, the national market organisations may be replaced by the common organisation’;
- (e) at the beginning of paragraph 4 renumbered 5, a change shall be made to the French which does not concern the English version.

FREE MOVEMENT OF WORKERS

- 50) In Article 39(3)(d), the word ‘implementing’ shall be deleted.
- 51) Article 42 shall be amended as follows:
- (a) in the first paragraph, the words ‘migrant workers and their dependants.’ shall be replaced by ‘employed and self-employed migrant workers and their dependants.’;
- (b) the last paragraph shall be replaced by the following:
- ‘Where a member of the Council declares that a draft legislative act referred to in the first subparagraph would affect important aspects of its social security system, including its scope, cost or financial structure, or would affect the financial balance of that system, it may request that the matter be referred to the European Council. In that case, the ordinary legislative procedure shall be suspended. After discussion, the European Council shall, within four months of this suspension, either:
- (a) refer the draft back to the Council, which shall terminate the suspension of the ordinary legislative procedure; or
- (b) take no action or request the Commission to submit a new proposal; in that case, the act originally proposed shall be deemed not to have been adopted.’.

FREEDOM OF ESTABLISHMENT

- 52) In Article 44(2), the words ‘The European Parliament,’ shall be inserted at the beginning of the paragraph.
- 53) In Article 45, second paragraph, the words ‘The Council may, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission,’ shall be replaced by ‘The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may’.

- 54) Article 47 shall be amended as follows:
- (a) the following phrase shall be added at the end of paragraph 1: ‘and for the coordination of the provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the taking-up and pursuit of activities as self-employed persons.’;
 - (b) paragraph 2 shall be deleted and paragraph 3 shall be renumbered 2; a change shall be made to the French which does not concern the English version.
- 55) An Article 48a shall be inserted, with the wording of Article 294.

SERVICES

- 56) Article 49 shall be amended as follows:
- (a) in the first paragraph, the words ‘State of the Community’ shall be replaced by ‘Member State’;
 - (b) in the second paragraph, the words ‘The Council may, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, extend’ shall be replaced by ‘The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may extend’.
- 57) In Article 50, third paragraph, the words ‘the State’ shall be replaced by ‘the Member State’.
- 58) In Article 52(1), the words ‘the Council shall, on a proposal from the Commission and after consulting the Economic and Social Committee and the European Parliament, issue’ shall be replaced by ‘the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall issue’.
- 59) In Article 53, the words ‘declare their readiness to’ shall be replaced by ‘shall endeavour to’.

CAPITAL

- 60) In Article 57(2), the words ‘the Council may, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, adopt measures’ shall be replaced by ‘the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt the measures’ and the last sentence of paragraph 2 shall become paragraph 3, reading as follows:

‘3. Notwithstanding paragraph 2, only the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, may unanimously, and after consulting the European Parliament, adopt measures which constitute a step backwards in Union law as regards the liberalisation of the movement of capital to or from third countries.’

61) In Article 58, the following new paragraph 4 shall be added:

‘4. In the absence of measures pursuant to Article 57(3), the Commission or, in the absence of a Commission decision within three months from the request of the Member State concerned, the Council, may adopt a decision stating that restrictive tax measures adopted by a Member State concerning one or more third countries are to be considered compatible with the Treaties insofar as they are justified by one of the objectives of the Union and compatible with the proper functioning of the internal market. The Council shall act unanimously on application by a Member State.’

62) Article 60 shall become Article 61 H. It shall be amended as set out below in point 64.

AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE;

63) A Title IV, with the heading ‘AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE’, shall replace the Title IV on visas, asylum, immigration, and other policies related to free movement of persons. Title IV shall contain the following Chapters:

Chapter 1: General provisions

Chapter 2: Policies on border checks, asylum and immigration

Chapter 3: Judicial cooperation in civil matters

Chapter 4: Judicial cooperation in criminal matters

Chapter 5: Police cooperation.

GENERAL PROVISIONS

64) Article 61 shall be replaced by the following Chapter 1 and Articles 61 to 61 I. Article 61 shall also replace the current Article 29 of the Treaty on European Union, Article 61 D shall replace Article 36 thereof, Article 61 E shall replace Article 64(1) of the Treaty establishing the European Community and the current Article 33 of the Treaty on European Union, Article 61G shall replace Article 66 of the Treaty establishing the European Community and Article 61 H shall take over Article 60 thereof, as set out in point 62 above:

‘CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

Article 61

1. The Union shall constitute an area of freedom, security and justice with respect for fundamental rights and the different legal systems and traditions of the Member States.

2. It shall ensure the absence of internal border controls for persons and shall frame a common policy on asylum, immigration and external border control, based on solidarity between Member States, which is fair towards third-country nationals. For the purpose of this Title, stateless persons shall be treated as third-country nationals.

3. The Union shall endeavour to ensure a high level of security through measures to prevent and combat crime, racism and xenophobia, and through measures for coordination and cooperation between police and judicial authorities and other competent authorities, as well as through the mutual recognition of judgments in criminal matters and, if necessary, through the approximation of criminal laws.

4. The Union shall facilitate access to justice, in particular through the principle of mutual recognition of judicial and extrajudicial decisions in civil matters.

Article 61 A

The European Council shall define the strategic guidelines for legislative and operational planning within the area of freedom, security and justice.

Article 61 B

National Parliaments ensure that the proposals and legislative initiatives submitted under Chapters 4 and 5 comply with the principle of subsidiarity, in accordance with the arrangements laid down by the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality.

Article 61 C

Without prejudice to Articles 226, 227 and 228, the Council may, on a proposal from the Commission, adopt measures laying down the arrangements whereby Member States, in collaboration with the Commission, conduct objective and impartial evaluation of the implementation of the Union policies referred to in this Title by Member States' authorities, in particular in order to facilitate full application of the principle of mutual recognition. The European Parliament and national Parliaments shall be informed of the content and results of the evaluation.

Article 61 D

A standing committee shall be set up within the Council in order to ensure that operational cooperation on internal security is promoted and strengthened within the Union. Without prejudice to Article 207, it shall facilitate coordination of the action of Member States' competent authorities. Representatives of the Union bodies, offices and agencies concerned may be involved in the proceedings of this committee. The European Parliament and national Parliaments shall be kept informed of the proceedings.

Article 61 E

This Title shall not affect the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security.

Article 61 F

It shall be open to Member States to organise between themselves and under their responsibility such forms of cooperation and coordination as they deem appropriate between the competent departments of their administrations responsible for safeguarding national security.

Article 61 G

The Council shall adopt measures to ensure administrative cooperation between the relevant departments of the Member States in the areas covered by this Title, as well as between those departments and the Commission. It shall act on a Commission proposal, subject to Article 61 I, and after consulting the European Parliament.

Article 61 H

Where necessary to achieve the objectives set out in Article 61, as regards preventing and combating terrorism and related activities, the European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall define a framework for administrative measures with regard to capital movements and payments, such as the freezing of funds, financial assets or economic gains belonging to, or owned or held by, natural or legal persons, groups or non-State entities.

The Council, on a proposal from the Commission, shall adopt measures to implement the framework referred to in the first paragraph.

The acts referred to in this Article shall include necessary provisions on legal safeguards.

Article 61 I

The acts referred to in Chapters 4 and 5, together with the measures referred to in Article 61 G which ensure administrative cooperation in the areas covered by these Chapters, shall be adopted:

- (a) on a proposal from the Commission, or
- (b) on the initiative of a quarter of the Member States.'

BORDER CHECKS, ASYLUM AND IMMIGRATION

- 65) Articles 62 to 64 shall be replaced by the following Chapter 2 and Articles 62 to 63b. Article 62 shall replace Article 62, paragraphs 1 and 2 of Article 63 shall replace points 1 and 2 of Article 63, paragraph 3 of Article 63 shall replace paragraph 2 of Article 64 and Article 63a shall replace points 3 and 4 of Article 63:

‘CHAPTER 2

POLICIES ON BORDER CHECKS, ASYLUM AND IMMIGRATION

Article 62

1. The Union shall develop a policy with a view to:
 - (a) ensuring the absence of any controls on persons, whatever their nationality, when crossing internal borders;
 - (b) carrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external borders;
 - (c) the gradual introduction of an integrated management system for external borders.
2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures concerning:
 - (a) the common policy on visas and other short-stay residence permits;
 - (b) the checks to which persons crossing external borders are subject;
 - (c) the conditions under which nationals of third countries shall have the freedom to travel within the Union for a short period;
 - (d) any measure necessary for the gradual establishment of an integrated management system for external borders;
 - (e) the absence of any controls on persons, whatever their nationality, when crossing internal borders.
3. If action by the Union should prove necessary to facilitate the exercise of the right referred to in Article 17(2)(a), and if the Treaties have not provided the necessary powers, the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, may adopt provisions concerning passports, identity cards, residence permits or any other such document. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.
4. This Article shall not affect the competence of the Member States concerning the geographical demarcation of their borders, in accordance with international law.

Article 63

1. The Union shall develop a common policy on asylum, subsidiary protection and temporary protection with a view to offering appropriate status to any third-country national requiring international protection and ensuring compliance with the principle of *non-refoulement*. This policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties.

2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures for a common European asylum system comprising:

- (a) a uniform status of asylum for nationals of third countries, valid throughout the Union;
- (b) a uniform status of subsidiary protection for nationals of third countries who, without obtaining European asylum, are in need of international protection;
- (c) a common system of temporary protection for displaced persons in the event of a massive inflow;
- (d) common procedures for the granting and withdrawing of uniform asylum or subsidiary protection status;
- (e) criteria and mechanisms for determining which Member State is responsible for considering an application for asylum or subsidiary protection;
- (f) standards concerning the conditions for the reception of applicants for asylum or subsidiary protection;
- (g) partnership and cooperation with third countries for the purpose of managing inflows of people applying for asylum or subsidiary or temporary protection.

3. In the event of one or more Member States being confronted by an emergency situation characterised by a sudden inflow of nationals of third countries, the Council, on a proposal from the Commission, may adopt provisional measures for the benefit of the Member State(s) concerned. It shall act after consulting the European Parliament.

Article 63a

1. The Union shall develop a common immigration policy aimed at ensuring, at all stages, the efficient management of migration flows, fair treatment of third-country nationals residing legally in Member States, and the prevention of, and enhanced measures to combat, illegal immigration and trafficking in human beings.

2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures in the following areas:

- (a) the conditions of entry and residence, and standards on the issue by Member States of long-term visas and residence permits, including those for the purpose of family reunification;
- (b) the definition of the rights of third-country nationals residing legally in a Member State, including the conditions governing freedom of movement and of residence in other Member States;

(c) illegal immigration and unauthorised residence, including removal and repatriation of persons residing without authorisation;

(d) combating trafficking in persons, in particular women and children.

3. The Union may conclude agreements with third countries for the readmission to their countries of origin or provenance of third-country nationals who do not or who no longer fulfil the conditions for entry, presence or residence in the territory of one of the Member States.

4. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may establish measures to provide incentives and support for the action of Member States with a view to promoting the integration of third-country nationals residing legally in their territories, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

5. This Article shall not affect the right of Member States to determine volumes of admission of third-country nationals coming from third countries to their territory in order to seek work, whether employed or self-employed.

Article 63b

The policies of the Union set out in this Chapter and their implementation shall be governed by the principle of solidarity and fair sharing of responsibility, including its financial implications, between the Member States. Whenever necessary, the Union acts adopted pursuant to this Chapter shall contain appropriate measures to give effect to this principle.’.

JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS

66) Article 65 shall be replaced by the following Chapter 3 and Article 65:

‘CHAPTER 3

JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS

Article 65

1. The Union shall develop judicial cooperation in civil matters having cross-border implications, based on the principle of mutual recognition of judgments and of decisions in extrajudicial cases. Such cooperation may include the adoption of measures for the approximation of the laws and regulations of the Member States.

2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures, particularly when necessary for the proper functioning of the internal market, aimed at ensuring:

(a) the mutual recognition and enforcement between Member States of judgments and of decisions in extrajudicial cases;

- (b) the cross-border service of judicial and extrajudicial documents;
- (c) the compatibility of the rules applicable in the Member States concerning conflict of laws and of jurisdiction;
- (d) cooperation in the taking of evidence;
- (e) effective access to justice;
- (f) the elimination of obstacles to the proper functioning of civil proceedings, if necessary by promoting the compatibility of the rules on civil procedure applicable in the Member States;
- (g) the development of alternative methods of dispute settlement;
- (h) support for the training of the judiciary and judicial staff.

3. Notwithstanding paragraph 2, measures concerning family law with cross-border implications shall be established by the Council, acting in accordance with a special legislative procedure. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.

The Council, on a proposal from the Commission, may adopt a decision determining those aspects of family law with cross-border implications which may be the subject of acts adopted by the ordinary legislative procedure. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.

The proposal referred to in the second subparagraph shall be notified to the national Parliaments. If a national Parliament makes known its opposition within six months of the date of such notification, the decision shall not be adopted. In the absence of opposition, the Council may adopt the decision.'

JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS

- 67) Article 66 shall be replaced by Article 61 G, as set out in point 64 above, and Articles 67 to 69 shall be repealed. The following Chapter 4 and Articles 69 A to 69 E shall be inserted. Articles 69 A, 69 B and 69 D shall replace the current Article 31 of the Treaty on European Union, as set out above in point 51 of Article 1 of this Treaty:

'CHAPTER 4

JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS

Article 69 A

1. Judicial cooperation in criminal matters in the Union shall be based on the principle of mutual recognition of judgments and judicial decisions and shall include the approximation of the laws and regulations of the Member States in the areas referred to in paragraph 2 and in Article 69 B.

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures to:

- (a) lay down rules and procedures for ensuring recognition throughout the Union of all forms of judgments and judicial decisions;
- (b) prevent and settle conflicts of jurisdiction between Member States;
- (c) support the training of the judiciary and judicial staff;
- (d) facilitate cooperation between judicial or equivalent authorities of the Member States in relation to proceedings in criminal matters and the enforcement of decisions.

2. To the extent necessary to facilitate mutual recognition of judgments and judicial decisions and police and judicial cooperation in criminal matters having a cross-border dimension, the European Parliament and the Council may, by means of directives adopted in accordance with the ordinary legislative procedure, establish minimum rules. Such rules shall take into account the differences between the legal traditions and systems of the Member States.

They shall concern:

- (a) mutual admissibility of evidence between Member States;
- (b) the rights of individuals in criminal procedure;
- (c) the rights of victims of crime;
- (d) any other specific aspects of criminal procedure which the Council has identified in advance by a decision; for the adoption of such a decision, the Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.

Adoption of the minimum rules referred to in this paragraph shall not prevent Member States from maintaining or introducing a higher level of protection for individuals.

3. Where a member of the Council considers that a draft directive as referred to in paragraph 2 would affect fundamental aspects of its criminal justice system, it may request that the draft directive be referred to the European Council. In that case, the ordinary legislative procedure shall be suspended. After discussion, and in case of a consensus, the European Council shall, within four months of this suspension, refer the draft back to the Council, which shall terminate the suspension of the ordinary legislative procedure.

Within the same timeframe, in case of disagreement, and if at least nine Member States wish to establish enhanced cooperation on the basis of the draft directive concerned, they shall notify the European Parliament, the Council and the Commission accordingly. In such a case, the authorisation to proceed with enhanced cooperation referred to in Article 10(2) of the Treaty on European Union and Article 280 D(1) of this Treaty shall be deemed to be granted and the provisions on enhanced cooperation shall apply.

Article 69 B

1. The European Parliament and the Council may, by means of directives adopted in accordance with the ordinary legislative procedure, establish minimum rules concerning the definition of criminal offences and sanctions in the areas of particularly serious crime with a cross-border dimension resulting from the nature or impact of such offences or from a special need to combat them on a common basis.

These areas of crime are the following: terrorism, trafficking in human beings and sexual exploitation of women and children, illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, money laundering, corruption, counterfeiting of means of payment, computer crime and organised crime.

On the basis of developments in crime, the Council may adopt a decision identifying other areas of crime that meet the criteria specified in this paragraph. It shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.

2. If the approximation of criminal laws and regulations of the Member States proves essential to ensure the effective implementation of a Union policy in an area which has been subject to harmonisation measures, directives may establish minimum rules with regard to the definition of criminal offences and sanctions in the area concerned. Such directives shall be adopted by the same ordinary or special legislative procedure as was followed for the adoption of the harmonisation measures in question, without prejudice to Article 61 I.

3. Where a member of the Council considers that a draft directive as referred to in paragraph 1 or 2 would affect fundamental aspects of its criminal justice system, it may request that the draft directive be referred to the European Council. In that case, the ordinary legislative procedure shall be suspended. After discussion, and in case of a consensus, the European Council shall, within four months of this suspension, refer the draft back to the Council, which shall terminate the suspension of the ordinary legislative procedure.

Within the same timeframe, in case of disagreement, and if at least nine Member States wish to establish enhanced cooperation on the basis of the draft directive concerned, they shall notify the European Parliament, the Council and the Commission accordingly. In such a case, the authorisation to proceed with enhanced cooperation referred to in Article 10(2) of the Treaty on European Union and Article 280 D(1) of this Treaty shall be deemed to be granted and the provisions on enhanced cooperation shall apply.

Article 69 C

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may establish measures to promote and support the action of Member States in the field of crime prevention, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

Article 69 D

1. Eurojust's mission shall be to support and strengthen coordination and cooperation between national investigating and prosecuting authorities in relation to serious crime affecting two or more Member States or requiring a prosecution on common bases, on the basis of operations conducted and information supplied by the Member States' authorities and by Europol.

In this context, the European Parliament and the Council, by means of regulations adopted in accordance with the ordinary legislative procedure, shall determine Eurojust's structure, operation, field of action and tasks. These tasks may include:

- (a) the initiation of criminal investigations, as well as proposing the initiation of prosecutions conducted by competent national authorities, particularly those relating to offences against the financial interests of the Union;
- (b) the coordination of investigations and prosecutions referred to in point (a);
- (c) the strengthening of judicial cooperation, including by resolution of conflicts of jurisdiction and by close cooperation with the European Judicial Network.

These regulations shall also determine arrangements for involving the European Parliament and national Parliaments in the evaluation of Eurojust's activities.

2. In the prosecutions referred to in paragraph 1, and without prejudice to Article 69 E, formal acts of judicial procedure shall be carried out by the competent national officials.

Article 69 E

1. In order to combat crimes affecting the financial interests of the Union, the Council, by means of regulations adopted in accordance with a special legislative procedure, may establish a European Public Prosecutor's Office from Eurojust. The Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.

In the absence of unanimity, a group of at least nine Member States may request that the draft regulation be referred to the European Council. In that case, the procedure in the Council shall be suspended. After discussion, and in case of a consensus, the European Council shall, within four months of this suspension, refer the draft back to the Council for adoption.

Within the same timeframe, in case of disagreement, and if at least nine Member States wish to establish enhanced cooperation on the basis of the draft regulation concerned, they shall notify the European Parliament, the Council and the Commission accordingly. In such a case, the authorisation to proceed with enhanced cooperation referred to in Article 10(2) of the Treaty on European Union and Article 280 D(1) of this Treaty shall be deemed to be granted and the provisions on enhanced cooperation shall apply.

2. The European Public Prosecutor's Office shall be responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment, where appropriate in liaison with Europol, the perpetrators of, and accomplices in, offences against the Union's financial interests, as determined by the regulation provided for in paragraph 1. It shall exercise the functions of prosecutor in the competent courts of the Member States in relation to such offences.

3. The regulations referred to in paragraph 1 shall determine the general rules applicable to the European Public Prosecutor's Office, the conditions governing the performance of its functions, the rules of procedure applicable to its activities, as well as those governing the admissibility of evidence, and the rules applicable to the judicial review of procedural measures taken by it in the performance of its functions.

4. The European Council may, at the same time or subsequently, adopt a decision amending paragraph 1 in order to extend the powers of the European Public Prosecutor's Office to include serious crime having a cross-border dimension and amending accordingly paragraph 2 as regards the perpetrators of, and accomplices in, serious crimes affecting more than one Member State. The European Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament and after consulting the Commission.'

POLICE COOPERATION

68) The following Chapter 5 and Articles 69 F, 69 G and 69 H shall be inserted. Articles 69 F and 69 G shall replace the current Article 30 of the Treaty on European Union, and Article 69 H shall replace Article 32 thereof, as set out above in point 51 of Article 1 of this Treaty:

CHAPTER 5

POLICE COOPERATION

Article 69 F

1. The Union shall establish police cooperation involving all the Member States' competent authorities, including police, customs and other specialised law enforcement services in relation to the prevention, detection and investigation of criminal offences.

2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may establish measures concerning:

- (a) the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
- (b) support for the training of staff, and cooperation on the exchange of staff, on equipment and on research into crime-detection;
- (c) common investigative techniques in relation to the detection of serious forms of organised crime.

3. The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, may establish measures concerning operational cooperation between the authorities referred to in this Article. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.

In case of the absence of unanimity in the Council, a group of at least nine Member States may request that the draft measures be referred to the European Council. In that case, the procedure in the Council shall be suspended. After discussion, and in case of a consensus, the European Council shall, within four months of this suspension, refer the draft back to the Council for adoption.

Within the same timeframe, in case of disagreement, and if at least nine Member States wish to establish enhanced cooperation on the basis of the draft measures concerned, they shall notify the European Parliament, the Council and the Commission accordingly. In such a case, the authorisation to proceed with enhanced cooperation referred to in Article 10(2) of the Treaty on European Union and Article 280 D(1) of this Treaty shall be deemed to be granted and the provisions on enhanced cooperation shall apply.

The specific procedure provided for in the second and third subparagraphs shall not apply to acts which constitute a development of the Schengen *acquis*.

Article 69 G

1. Europol's mission shall be to support and strengthen action by the Member States' police authorities and other law enforcement services and their mutual cooperation in preventing and combating serious crime affecting two or more Member States, terrorism and forms of crime which affect a common interest covered by a Union policy.
2. The European Parliament and the Council, by means of regulations adopted in accordance with the ordinary legislative procedure, shall determine Europol's structure, operation, field of action and tasks. These tasks may include:
 - (a) the collection, storage, processing, analysis and exchange of information, in particular that forwarded by the authorities of the Member States or third countries or bodies;
 - (b) the coordination, organisation and implementation of investigative and operational action carried out jointly with the Member States' competent authorities or in the context of joint investigative teams, where appropriate in liaison with Eurojust.

These regulations shall also lay down the procedures for scrutiny of Europol's activities by the European Parliament, together with national Parliaments.

3. Any operational action by Europol must be carried out in liaison and in agreement with the authorities of the Member State or States whose territory is concerned. The application of coercive measures shall be the exclusive responsibility of the competent national authorities.

Article 69 H

The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall lay down the conditions and limitations under which the competent authorities of the Member States referred to in Articles 69 A and 69 F may operate in the territory of another Member State in liaison and in agreement with the authorities of that State. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.'

TRANSPORT

- 69) In Article 70, the words 'of this Treaty' shall be replaced by 'of the Treaties' and the words 'by Member States' shall be deleted.
- 70) In Article 71, paragraph 2 shall be replaced by the following:
- '2. When the measures referred to in paragraph 1 are adopted, account shall be taken of cases where their application might seriously affect the standard of living and level of employment in certain regions, and the operation of transport facilities.'
- 71) At the beginning of Article 72, the words ', without the unanimous approval of the Council,' shall be replaced by ', unless the Council has unanimously adopted a measure granting a derogation,'.
- 72) Article 75 shall be amended as follows:
- (a) in paragraph 1, the words 'shall be abolished' shall be replaced by 'shall be prohibited';
- (b) in paragraph 2, the words 'the Council' shall be replaced by 'the European Parliament and the Council';
- (c) in the first subparagraph of paragraph 3, the words 'the Economic and Social Committee' shall be replaced by 'the European Parliament and the Economic and Social Committee'.
- 73) In Article 78, the following sentence shall be added:
- 'Five years after the entry into force of the Treaty of Lisbon, the Council, acting on a proposal from the Commission, may adopt a decision repealing this Article.'
- 74) In Article 79, the phrase 'without prejudice to the powers of the Economic and Social Committee' shall be deleted.
- 75) In Article 80, paragraph 2 shall be replaced by the following:
- '2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may lay down appropriate provisions for sea and air transport. They shall act after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.'

RULES ON COMPETITION

- 76) In Article 85, the following new paragraph 3 shall be added:
- '3. The Commission may adopt regulations relating to the categories of agreement in respect of which the Council has adopted a regulation or a directive pursuant to Article 83(2)(b).'

77) Article 87 shall be amended as follows:

(a) in paragraph 2, the following sentence shall be added at the end of point (c):

‘Five years after the entry into force of the Treaty of Lisbon, the Council, acting on a proposal from the Commission, may adopt a decision repealing this point.’;

(b) in paragraph 3, the following words shall be added at the end of point (a): ‘, and of the regions referred to in Article 299, in view of their structural, economic and social situation.’;

78) In Article 88, the following new paragraph 4 shall be added:

‘4. The Commission may adopt regulations relating to the categories of State aid that the Council has, pursuant to Article 89, determined may be exempted from the procedure provided for by paragraph 3 of this Article.’.

TAX PROVISIONS

79) At the end of Article 93, the words ‘within the time limit laid down in Article 14’ shall be replaced by ‘and to avoid distortion of competition.’.

APPROXIMATION OF LAWS

80) The order of Articles 94 and 95 shall be reversed. Article 94 shall be renumbered 95 and Article 95 shall be renumbered 94.

81) Article 95, renumbered 94, shall be amended as follows:

(a) at the beginning of paragraph 1, the words ‘By way of derogation from Article 94 and’ shall be deleted;

(b) at the beginning of paragraph 4, the words ‘If, after the adoption by the Council or by the Commission of a harmonisation measure,’ shall be replaced by ‘If, after the adoption of a harmonisation measure by the European Parliament and the Council, by the Council or by the Commission.’;

(c) at the beginning of paragraph 5, the words ‘Moreover, without prejudice to paragraph 4, if, after the adoption by the Council or by the Commission of a harmonisation measure,’ shall be replaced by ‘Moreover, without prejudice to paragraph 4, if, after the adoption of a harmonisation measure by the European Parliament and the Council, by the Council or by the Commission.’;

(d) in paragraph 10, the words ‘Community control procedure’ shall be replaced by ‘Union control procedure’.

82) In Article 94, renumbered 95, the words ‘Without prejudice to Article 94,’ shall be inserted at the beginning.

- 83) In Article 96, second paragraph, first sentence, the words ‘, the Council shall, on a proposal from the Commission, acting by a qualified majority, issue’ shall be replaced by ‘, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall issue’. The second sentence shall be replaced by ‘Any other appropriate measures provided for in the Treaties may be adopted.’.

INTELLECTUAL PROPERTY

- 84) The following new Article 97a shall be inserted as the final article of Title VI:

‘Article 97a

In the context of the establishment and functioning of the internal market, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish measures for the creation of European intellectual property rights to provide uniform protection of intellectual property rights throughout the Union and for the setting up of centralised Union-wide authorisation, coordination and supervision arrangements.

The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall by means of regulations establish language arrangements for the European intellectual property rights. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.’.

ECONOMIC AND MONETARY POLICY

- 85) An Article 97b shall be inserted as the first article of Title VII, with the wording of Article 4; it shall be amended as follows:
- (a) in paragraph 1, the words ‘and in accordance with the timetable set out therein’ shall be deleted;
 - (b) in paragraph 2, the words ‘Concurrently with the foregoing, and as provided in this Treaty and in accordance with the timetable and the procedures set out therein, these activities shall include the irrevocable fixing of exchange rates leading to the introduction of a single currency, the ecu,’ shall be replaced by ‘Concurrently with the foregoing, and as provided in the Treaties and in accordance with the procedures set out therein, these activities shall include a single currency, the euro,’.
- 86) Article 99 shall be amended as follows:
- (a) in paragraph 4, the first sentence of the first subparagraph shall be replaced by the following two sentences:

‘Where it is established, under the procedure referred to in paragraph 3, that the economic policies of a Member State are not consistent with the broad guidelines referred to in paragraph 2 or that they risk jeopardising the proper functioning of economic and monetary union, the Commission may address a warning to the Member State concerned. The Council, on a recommendation from the Commission, may address the necessary recommendations to the Member State concerned.’;

- (b) the second subparagraph of paragraph 4 shall become paragraph 5 and the current paragraph 5 shall be renumbered 6;
- (c) the following two new subparagraphs shall be inserted in paragraph 4:

‘Within the scope of this paragraph, the Council shall act without taking into account the vote of the member of the Council representing the Member State concerned.

A qualified majority of the other members of the Council shall be defined in accordance with Article 205(3)(a).’;

- (d) in paragraph 5, renumbered 6, the words ‘The Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 252, may adopt detailed rules’ shall be replaced by the following: ‘The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt detailed rules’, the words ‘of this Article’ shall be deleted.

DIFFICULTIES IN THE SUPPLY OF CERTAIN PRODUCTS (ENERGY)

- 87) In Article 100, paragraph 1 shall be replaced by the following:

‘1. Without prejudice to any other procedures provided for in the Treaties, the Council, on a proposal from the Commission, may decide, in a spirit of solidarity between Member States, upon the measures appropriate to the economic situation, in particular if severe difficulties arise in the supply of certain products, notably in the area of energy.’.

OTHER PROVISIONS — ECONOMIC AND MONETARY POLICY

- 88) In Article 102, paragraph 2 shall be deleted and paragraph 1 shall not be numbered;

- 89) In Article 103, paragraph 2 shall be replaced by the following:

‘2. The Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, may, as required, specify definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 101 and 102 and in this Article.’.

EXCESSIVE DEFICIT PROCEDURE

- 90) Article 104 shall be amended as follows:

- (a) paragraph 5 shall be replaced by the following:

‘5. If the Commission considers that an excessive deficit in a Member State exists or may occur, it shall address an opinion to the Member State concerned and shall inform the Council accordingly.’;

- (b) in paragraph 6, the word ‘recommendation’ shall be replaced by ‘proposal’;

- (c) in paragraph 7, the first sentence shall be replaced by ‘Where the Council decides, in accordance with paragraph 6, that an excessive deficit exists, it shall adopt, without undue delay, on a recommendation from the Commission, recommendations addressed to the Member State concerned with a view to bringing that situation to an end within a given period.’;
- (d) in the introductory words of the first subparagraph of paragraph 11, there is a change to the French which does not affect the English version;
- (e) in paragraph 12, at the beginning of the first sentence, the words ‘its decisions’ shall be replaced by ‘its decisions or recommendations’;
- (f) paragraph 13 shall be replaced by the following:

‘13. When taking the decisions or recommendations referred to in paragraphs 8, 9, 11 and 12, the Council shall act on a recommendation from the Commission.

When the Council adopts the measures referred to in paragraphs 6 to 9, 11 and 12, it shall act without taking into account the vote of the member of the Council representing the Member State concerned.

A qualified majority of the other members of the Council shall be defined in accordance with Article 205(3)(a).’;
- (g) in paragraph 14, third subparagraph, the words ‘, before 1 January 1994’ shall be deleted.

MONETARY POLICY

91) Article 105 shall be amended as follows:

- (a) in the first sentence of paragraph 1, ‘ESCB’ shall be replaced by ‘European System of Central Banks, hereinafter referred to as “ESCB”’;
- (b) in the second indent of paragraph 2, the reference to Article 111 shall be replaced by a reference to Article 188 O;
- (c) The text of paragraph 6 shall be replaced by the following:

‘6. The Council, acting by means of regulations in accordance with a special legislative procedure, may unanimously, and after consulting the European Parliament and the European Central Bank, confer specific tasks upon the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance undertakings.’.

92) Article 106 shall be amended as follows:

- (a) in paragraph 1, first sentence, the word ‘euro’ shall be inserted before ‘banknotes’;

- (b) in paragraph 2, first sentence, the word ‘euro’ shall be inserted before ‘coins’; at the beginning of the second sentence, the words ‘The Council may, acting in accordance with the procedure referred to in Article 252 and after consulting the ECB’ shall be replaced by: ‘The Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the European Central Bank, may’.

93) Article 107 shall be amended as follows:

- (a) paragraphs 1 and 2 shall be deleted and paragraphs 3, 4, 5 and 6 shall be renumbered 1, 2, 3 and 4 respectively;
- (b) in paragraph 4, renumbered 2, the words ‘Statute of the ESCB’ shall be replaced by the following: ‘Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, hereinafter referred to as “Statute of the ESCB and of the ECB”’;
- (c) paragraph 5, renumbered 3, shall be replaced by the following:

‘3. Articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1(a) and 36 of the Statute of the ESCB and of the ECB may be amended by the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure. They shall act either on a recommendation from the European Central Bank and after consulting the Commission or on a proposal from the Commission and after consulting the European Central Bank.’.

- 94) In Article 109, the words ‘, at the latest at the date of the establishment of the ESCB,’ shall be deleted.
- 95) In Article 110, the first four subparagraphs of paragraph 2 shall be deleted.

MEASURES RELATING TO USE OF THE EURO

- 96) In Article 111, paragraphs 1 to 3 and 5 shall become, respectively, paragraphs 1 to 4 of Article 188 O; they shall be amended as set out below in point 174. The text of paragraph 4 shall become paragraph 1 of Article 115 C; it shall be amended as set out below in point 100.
- 97) The following Article 111a shall be inserted:

‘Article 111a

Without prejudice to the powers of the European Central Bank, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall lay down the measures necessary for the use of the euro as the single currency. Such measures shall be adopted after consultation of the European Central Bank.’.

INSTITUTIONAL PROVISIONS (EMU)

- 98) The text of Article 112 shall become Article 245b, and shall be amended as set out in point 228 below. The text of Article 113 shall become Article 245c.
- 99) Article 114 shall be amended as follows:
- (a) in paragraph 1, first subparagraph, the words 'a Monetary Committee with advisory status' shall be replaced by 'an Economic and Financial Committee';
 - (b) in paragraph 1, the second and third subparagraphs shall be deleted;
 - (c) in paragraph 2, the first subparagraph shall be deleted; in the third indent, the reference to paragraphs 2, 3, 4 and 5 of Article 99 shall be replaced by a reference to paragraphs 2, 3, 4 and 6 of Article 99, and the references to paragraph 2 of Article 122 and to paragraphs 4 and 5 of Article 123 shall be replaced by a reference to paragraphs 2 and 3 of Article 117a;
 - (d) in paragraph 4, the reference to Articles 122 and 123 shall be replaced by a reference to Article 116a.

PROVISIONS SPECIFIC TO MEMBER STATES WHOSE CURRENCY IS THE EURO

- 100) The following new Chapter 3a and new Articles 115 A, 115 B and 115 C shall be inserted:

'CHAPTER 3a

PROVISIONS SPECIFIC TO MEMBER STATES WHOSE CURRENCY IS THE EURO

Article 115 A

1. In order to ensure the proper functioning of economic and monetary union, and in accordance with the relevant provisions of the Treaties, the Council shall, in accordance with the relevant procedure from among those referred to in Articles 99 and 104, with the exception of the procedure set out in Article 104(14), adopt measures specific to those Member States whose currency is the euro:

- (a) to strengthen the coordination and surveillance of their budgetary discipline;
- (b) to set out economic policy guidelines for them, while ensuring that they are compatible with those adopted for the whole of the Union and are kept under surveillance.

2. For those measures set out in paragraph 1, only members of the Council representing Member States whose currency is the euro shall take part in the vote.

A qualified majority of the said members shall be defined in accordance with Article 205(3)(a).

Article 115 B

Arrangements for meetings between ministers of those Member States whose currency is the euro are laid down by the Protocol on the Euro Group.

Article 115 C

1. In order to secure the euro's place in the international monetary system, the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt a decision establishing common positions on matters of particular interest for economic and monetary union within the competent international financial institutions and conferences. The Council shall act after consulting the European Central Bank.

2. The Council, on a proposal from the Commission, may adopt appropriate measures to ensure unified representation within the international financial institutions and conferences. The Council shall act after consulting the European Central Bank.

3. For the measures referred to in paragraphs 1 and 2, only members of the Council representing Member States whose currency is the euro shall take part in the vote.

A qualified majority of the said members shall be defined in accordance with Article 205(3)(a).'

TRANSITIONAL PROVISIONS RELATING TO MEMBER STATES WITH A DEROGATION

101) Article 116 shall be repealed, and the following Article 116a shall be inserted:

'Article 116a

1. Member States in respect of which the Council has not decided that they fulfil the necessary conditions for the adoption of the euro shall hereinafter be referred to as "Member States with a derogation".

2. The following provisions of the Treaties shall not apply to Member States with a derogation:

- (a) adoption of the parts of the broad economic policy guidelines which concern the euro area generally (Article 99(2));
- (b) coercive means of remedying excessive deficits (Article 104(9) and (11));
- (c) the objectives and tasks of the ESCB (Article 105(1), (2), (3) and (5));
- (d) issue of the euro (Article 106);
- (e) acts of the European Central Bank (Article 110);
- (f) measures governing the use of the euro (Article 111a);

- (g) monetary agreements and other measures relating to exchange-rate policy (Article 188 O);
- (h) appointment of members of the Executive Board of the European Central Bank (Article 245b(2));
- (i) decisions establishing common positions on issues of particular relevance for economic and monetary union within the competent international financial institutions and conferences (Article 115 C(1));
- (j) measures to ensure unified representation within the international financial institutions and conferences (Article 115 C(2)).

In the Articles referred to in points (a) to (j), "Member States" shall therefore mean Member States whose currency is the euro.

3. Under Chapter IX of the Statute of the ESCB and of the ECB, Member States with a derogation and their national central banks are excluded from rights and obligations within the SCB.

4. The voting rights of members of the Council representing Member States with a derogation shall be suspended for the adoption by the Council of the measures referred to in the Articles listed in paragraph 2, and in the following instances:

- (a) recommendations made to those Member States whose currency is the euro in the framework of multilateral surveillance, including on stability programmes and warnings (Article 99(4));
- (b) measures relating to excessive deficits concerning those Member States whose currency is the euro (Article 104(6), (7), (8), (12) and (13)).

A qualified majority of the other members of the Council shall be defined in accordance with Article 205(3)(a).'

102) Article 117 shall be repealed, with the exception of the first five indents of paragraph 2 thereof, which shall become the first five indents of paragraph 2 of Article 118a; they shall be amended as set out in point 103 below. A new Article 117a shall be inserted as follows:

- (a) paragraph 1 thereof shall take over the wording of Article 121(1), with the following amendments:
 - (i) throughout the paragraph, the words 'the EMI' shall be replaced by 'the European Central Bank';
 - (ii) at the beginning of the first subparagraph, the following shall be inserted: 'At least once every two years, or at the request of a Member State with a derogation,';

- (iii) in the first subparagraph, first sentence, the words 'the progress made in the fulfilment by the Member States of their obligations' shall be replaced by 'the progress made by the Member States with a derogation in fulfilling their obligations';
 - (iv) in the first subparagraph, second sentence, the words 'each Member State's national legislation' shall be replaced by 'the national legislation of each of these Member States' and the words 'of this Treaty' shall be deleted;
 - (v) in the third indent of the first subparagraph, the words 'against the currency of any other Member State' shall be replaced by 'against the euro';
 - (vi) in the fourth indent of the first subparagraph, the words 'the Member State' shall be replaced by 'the Member State with a derogation' and the words 'of the European Monetary System' shall be deleted;
 - (vii) in the second subparagraph, the words 'the development of the ecu' shall be deleted;
- (b) paragraph 2 thereof shall take over the wording of the second sentence of Article 122(2), with the following amendments:
- (i) at the end of the text, the words 'set out in Article 121(1)' shall be replaced by 'set out in paragraph 1';
 - (ii) the following new second and third subparagraphs shall be added:

'The Council shall act having received a recommendation of a qualified majority of those among its members representing Member States whose currency is the euro. These members shall act within six months of the Council receiving the Commission's proposal.

The qualified majority of the said members, as referred to in the second subparagraph, shall be defined in accordance with Article 205(3)(a).';
- (c) paragraph 3 thereof shall take over the wording of Article 123(5), with the following amendments:
- (i) at the beginning of the paragraph, the words 'If it is decided, according to the procedure set out in Article 122(2), to abrogate a derogation,' shall be replaced by 'If it is decided, in accordance with the procedure set out in paragraph 2, to abrogate a derogation,';
 - (ii) the words 'adopt the rate' shall be replaced by 'irrevocably fix the rate'.

- 103) Article 118 shall be repealed. A new Article 118a shall be inserted as follows:
- (a) paragraph 1 thereof shall take over the text of Article 123(3); the words 'of this Treaty' shall be deleted;
 - (b) paragraph 2 thereof shall take over the text of the first five indents of Article 117(2); the five indents shall be amended as set out below and shall be preceded by the following introductory words:

'If and as long as there are Member States with a derogation, the European Central Bank shall, as regards those Member States:'

 - (i) in the third indent, the words 'European Monetary System' shall be replaced by 'exchange-rate mechanism';
 - (ii) the fifth indent shall be replaced by the following:

'— carry out the former tasks of the European Monetary Cooperation Fund which had subsequently been taken over by the European Monetary Institute.'
- 104) An Article 118b shall be inserted, with the wording of Article 124(1); it shall be amended as follows:
- (a) the words 'Until the beginning of the third stage, each Member State shall treat' shall be replaced by 'Each Member State with a derogation shall treat';
 - (b) the words 'of the European Monetary System (EMS) and in developing the ecu, and shall respect existing powers in this field' shall be replaced by 'of the exchange-rate mechanism.'
- 105) Article 119 shall be amended as follows:
- (a) in paragraph 1, the words 'with a derogation' shall be inserted after 'Member State' in the first and second subparagraphs and the word 'progressive' in the first subparagraph shall be deleted;
 - (b) in paragraph 2(a), the words 'with a derogation' shall be inserted after 'Member States' and in paragraph 2(b), the words 'the State which is in difficulties' shall be replaced by 'the Member State with a derogation which is in difficulties,';
 - (c) in paragraph 3, the words 'the Commission shall authorise the State which is in difficulties' shall be replaced by 'the Commission shall authorise the Member State with a derogation, which is in difficulties,';
 - (d) paragraph 4 shall be deleted.

- 106) Article 120 shall be amended as follows:
- (a) in paragraph 1, the words ‘the Member State concerned’ shall be replaced by ‘a Member State with a derogation’;
 - (b) in paragraph 3, the words ‘an opinion’ shall be replaced by ‘a recommendation’ and the word ‘Member’ shall be inserted before ‘State’;
 - (c) paragraph 4 shall be deleted.
- 107) Article 121(1) shall become Article 117a(1); it shall be amended as set out above in point 102. The rest of Article 121 shall be repealed.
- 108) In Article 122(2), the second sentence shall become the first subparagraph of Article 117a(2); it shall be amended as set out above in point 102. The rest of Article 122 shall be repealed.
- 109) Article 123(3) shall become Article 118a(1) and Article 123(5) shall become Article 117a(3); they shall be amended as set out above in points 103 and 102 respectively. The rest of Article 123 shall be repealed.
- 110) Article 124(1) shall become the new Article 118b; it shall be amended as set out above in point 104. The rest of Article 124 shall be repealed.

EMPLOYMENT

- 111) In Article 125, the words ‘and in Article 2 of this Treaty’ shall be deleted.

TITLES WHICH ARE TO BE MOVED

- 112) Title IX ‘COMMON COMMERCIAL POLICY’ shall become Title II in Part Five on the Union’s external action and Articles 131 and 133 shall become Articles 188 B and 188 C respectively. Article 131 shall be amended as set out below in point 157 and Article 133 shall be replaced by Article 188 C.

Articles 132 and 134 shall be repealed.

- 113) Title X ‘CUSTOMS COOPERATION’ shall become Chapter 1a in Title Ia, ‘Free movement of goods’ and Article 135 shall become Article 27a, as set out above in point 45.

SOCIAL POLICY

- 114) The heading of Title XI ‘SOCIAL POLICY, EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING AND YOUTH’ shall be replaced by the heading ‘SOCIAL POLICY’, renumbered IX; the heading ‘Chapter 1 — Social provisions’ shall be deleted.

115) The following new Article 136a shall be inserted:

'Article 136a

The Union recognises and promotes the role of the social partners at its level, taking into account the diversity of national systems. It shall facilitate dialogue between the social partners, respecting their autonomy.

The Tripartite Social Summit for Growth and Employment shall contribute to social dialogue.'

116) Article 137 shall be amended as follows:

- (a) in paragraph 2, in the introductory words of the first subparagraph, the words 'the Council:' shall be replaced by 'the European Parliament and the Council:' and the first sentence of the second subparagraph shall be split into two subparagraphs which shall read as follows:

'The European Parliament and the Council shall act in accordance with the ordinary legislative procedure after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

In the fields referred to in paragraph 1(c), (d), (f) and (g), the Council shall act unanimously, in accordance with a special legislative procedure, after consulting the European Parliament and the said Committees.'

The second sentence of the second subparagraph shall become the last subparagraph, and the words 'of this Article' shall be deleted;

- (b) in paragraph 3, at the end of the first subparagraph, the following words shall be added 'or, where appropriate, with the implementation of a Council decision adopted in accordance with Article 139'; in the second subparagraph, the words 'a directive must be transposed in accordance with Article 249' shall be replaced by 'a directive or a decision must be transposed or implemented,' and the words 'or that decision' shall be added at the end of the subparagraph.

117) In Article 138(4), first sentence, the words 'On the occasion of such consultation,' shall be replaced by 'On the occasion of the consultation referred to in paragraphs 2 and 3,' and, in the second sentence, the words 'the procedure' shall be replaced by 'this process'.

118) Article 139(2) shall be amended as follows:

- (a) at the end of the first subparagraph, the following sentence shall be added: 'The European Parliament shall be informed.';
- (b) in the second subparagraph, at the beginning of the first sentence, 'The Council shall act by qualified majority, except where the agreement' shall be replaced by 'The Council shall act unanimously where the agreement' and the second sentence shall be deleted.

- 119) In Article 140, the following words shall be added at the end of the second subparagraph: ‘, in particular initiatives aiming at the establishment of guidelines and indicators, the organisation of exchange of best practice, and the preparation of the necessary elements for periodic monitoring and evaluation. The European Parliament shall be kept fully informed.’.
- 120) In Article 143, the second paragraph shall be deleted.

EUROPEAN SOCIAL FUND

- 121) Chapter 2 shall be renumbered TITLE X.
- 122) In Article 148, the words ‘implementing decisions’ shall be replaced by ‘implementing regulations’.

EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING, YOUTH AND SPORT

- 123) Chapter 3 shall be renumbered TITLE XI and the words ‘AND YOUTH’ at the end of the heading shall be replaced by ‘, YOUTH AND SPORT’.
- 124) Article 149 shall be amended as follows:
- (a) in paragraph 1, the following subparagraph shall be inserted:

‘The Union shall contribute to the promotion of European sporting issues, while taking account of the specific nature of sport, its structures based on voluntary activity and its social and educational function.’;
 - (b) in paragraph 2, fifth indent, the words ‘and encouraging the participation of young people in democratic life in Europe,’ shall be added at the end; the following shall be inserted as the last indent:

‘— developing the European dimension in sport, by promoting fairness and openness in sporting competitions and cooperation between bodies responsible for sports, and by protecting the physical and moral integrity of sportsmen and sportswomen, especially the youngest sportsmen and sportswomen.’;
 - (c) in paragraph 3, the words ‘and sport’ shall be added after ‘in the field of education’;
 - (d) in paragraph 4, the words ‘the Council’ shall be deleted from the introductory phrase and the first indent shall begin with the words ‘the European Parliament and the Council, acting’; the second indent shall begin with the words ‘the Council, on a proposal’.
- 125) In Article 150(4), the following words shall be added at the end: ‘, and the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt recommendations’.

CULTURE

126) Article 151(5) shall be amended as follows:

- (a) in the introductory phrase, the words 'the Council' shall be deleted;
- (b) in the first indent, the first sentence shall begin with the words 'the European Parliament and the Council, acting', and the second sentence shall be deleted;
- (c) in the second indent, the words 'acting unanimously' shall be deleted and the indent shall begin with the words 'the Council, on a proposal'.

PUBLIC HEALTH

127) Article 152 shall be amended as follows:

- (a) in paragraph 1, second subparagraph, the word 'human' shall be replaced by 'physical and mental' and, at the end of that subparagraph, the following shall be added: ', and monitoring, early warning of and combating serious cross-border threats to health';
- (b) in paragraph 2, at the end of the first subparagraph, the following sentence shall be added: 'It shall in particular encourage cooperation between the Member States to improve the complementarity of their health services in cross-border areas.';
- (c) In paragraph 2, the following shall be added at the end of the second subparagraph: ', in particular initiatives aiming at the establishment of guidelines and indicators, the organisation of exchange of best practice, and the preparation of the necessary elements for periodic monitoring and evaluation. The European Parliament shall be kept fully informed.';
- (d) paragraph 4 shall be amended as follows:
 - (i) in the introductory wording to the first subparagraph, the following words shall be inserted at the beginning: 'By way of derogation from Article 2 A(5) and Article 2 E(a) and in accordance with Article 2 C(2)(k)' and the following shall be added at the end: 'in order to meet common safety concerns:';
 - (ii) in point (b), the words 'by way of derogation from Article 37,' shall be deleted;
 - (iii) the following new point (c) shall be inserted:
 - '(c) measures setting high standards of quality and safety for medicinal products and devices for medical use.';

- (iv) the current point (c) shall be renumbered paragraph 5 and replaced by the following:

‘5. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, may also adopt incentive measures designed to protect and improve human health and in particular to combat the major cross-border health scourges, measures concerning monitoring, early warning of and combating serious cross-border threats to health, and measures which have as their direct objective the protection of public health regarding tobacco and the abuse of alcohol, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.’;

- (e) the second subparagraph of the current paragraph 4 shall become paragraph 6 and paragraph 5, renumbered 7, shall be replaced by the following:

‘7. Union action shall respect the responsibilities of the Member States for the definition of their health policy and for the organisation and delivery of health services and medical care. The responsibilities of the Member States shall include the management of health services and medical care and the allocation of the resources assigned to them. The measures referred to in paragraph 4(a) shall not affect national provisions on the donation or medical use of organs and blood.’.

CONSUMER PROTECTION

- 128) Article 153(2) shall become Article 6a and paragraphs 3, 4 and 5 shall be renumbered 2, 3 and 4 respectively.

INDUSTRY

- 129) Article 157 shall be amended as follows:

- (a) at the end of paragraph 2, the following shall be added: ‘, in particular initiatives aiming at the establishment of guidelines and indicators, the organisation of exchange of best practice, and the preparation of the necessary elements for periodic monitoring and evaluation. The European Parliament shall be kept fully informed.’;
- (b) in paragraph 3, first subparagraph, the following phrase shall be added at the end of the second sentence: ‘, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States’.

ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIAL COHESION

- 130) The heading of Title XVII shall be replaced by: ‘ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIAL COHESION’.

- 131) Article 158 shall be amended as follows:
- (a) in the first paragraph, the words ‘economic and social cohesion’ shall be replaced by ‘economic, social and territorial cohesion’;
 - (b) in the second paragraph, the words ‘or islands, including rural areas’ shall be deleted;
 - (c) the following new paragraph shall be added:
‘Among the regions concerned, particular attention shall be paid to rural areas, areas affected by industrial transition, and regions which suffer from severe and permanent natural or demographic handicaps such as the northernmost regions with very low population density and island, cross-border and mountain regions.’.
- 132) In Article 159, second paragraph, the words ‘economic and social’ shall be replaced by ‘economic, social and territorial’.
- 133) Article 161 shall be amended as follows:
- (a) at the beginning of the first paragraph, first sentence, the words ‘Without prejudice to Article 162, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the assent of the European Parliament’ shall be replaced by ‘Without prejudice to Article 162, the European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure’. In the second sentence the words ‘The Council, acting by the same procedure, shall also define’ shall be deleted at the beginning and the words ‘shall also be defined by the same procedure’ added at the end;
 - (b) in the second paragraph the words ‘by the Council’ shall be deleted;
 - (c) the third paragraph shall be deleted.
- 134) In Article 162, first paragraph, the words ‘implementing decisions’ shall be replaced by ‘implementing regulations’.

RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

- 135) The words ‘AND SPACE’ shall be added to the heading of Title XVIII.
- 136) Article 163 shall be amended as follows:
- (a) paragraph 1 shall be replaced by the following:

‘1. The Union shall have the objective of strengthening its scientific and technological bases by achieving a European research area in which researchers, scientific knowledge and technology circulate freely, and encouraging it to become more competitive, including in its industry, while promoting all the research activities deemed necessary by virtue of other Chapters of the Treaties.’;

(b) in paragraph 2, the words 'enabling undertakings to exploit the internal market potential to the full,' shall be replaced by 'permitting researchers to cooperate freely across borders and at enabling undertakings to exploit the internal market potential to the full,'.

137) The following shall be added at the end of Article 165(2): ' , in particular initiatives aiming at the establishment of guidelines and indicators, the organisation of exchange of best practice, and the preparation of the necessary elements for periodic monitoring and evaluation. The European Parliament shall be kept fully informed.'

138) Article 166 shall be amended as follows:

(a) in paragraph 4, the words 'The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission' shall be replaced by 'The Council, acting in accordance with a special legislative procedure';

(b) the following new paragraph 5 shall be added:

'5. As a complement to the activities planned in the multiannual framework programme, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall establish the measures necessary for the implementation of the European research area.'

139) In Article 167, the words 'the Council' shall be replaced by 'the Union'.

140) In Article 168, second paragraph, the words 'the Council' shall be replaced by 'the Union'.

141) In the second paragraph of Article 170, the words ' , which shall be negotiated and concluded in accordance with Article 300' shall be deleted.

SPACE

142) The following new Article 172a shall be inserted:

'Article 172a

1. To promote scientific and technical progress, industrial competitiveness and the implementation of its policies, the Union shall draw up a European space policy. To this end, it may promote joint initiatives, support research and technological development and coordinate the efforts needed for the exploration and exploitation of space.

2. To contribute to attaining the objectives referred to in paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the necessary measures, which may take the form of a European space programme, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

3. The Union shall establish any appropriate relations with the European Space Agency.
4. This Article shall be without prejudice to the other provisions of this Title.’

ENVIRONMENT (CLIMATE CHANGE)

143) Article 174 shall be amended as follows:

- (a) in paragraph 1, the fourth indent shall be replaced by the following:

‘— promoting measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems, and in particular combating climate change.’;
- (b) in paragraph 2, second subparagraph, the words ‘Community inspection procedure’ shall be replaced by ‘a procedure of inspection by the Union’;
- (c) in paragraph 4, first subparagraph, the last phrase ‘, which shall be negotiated and concluded in accordance with Article 300’ shall be deleted.

144) Article 175 shall be amended as follows:

- (a) in paragraph 2, the second subparagraph shall be replaced by the following:

‘The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, may make the ordinary legislative procedure applicable to the matters referred to in the first subparagraph.’;
- (b) in the first subparagraph of paragraph 3, the words ‘In other areas,’ shall be deleted and the second subparagraph shall be replaced by the following:

‘The measures necessary for the implementation of these programmes shall be adopted under the terms of paragraph 1 or 2, as the case may be.’;
- (c) in paragraph 4, the words ‘certain measures of a Community nature,’ shall be replaced by ‘certain measures adopted by the Union’;
- (d) in paragraph 5, the words ‘the Council shall, in the act adopting that measure, lay down’ shall be replaced by ‘such measure shall lay down’.

TITLES WHICH ARE TO BE MOVED

145) Title XX ‘DEVELOPMENT COOPERATION’ shall become Chapter I of Title III of Part Five on the Union’s external action, and Articles 177, 179, 180 and 181 shall become Articles 188 D to 188 G respectively; those articles shall be amended as set out below in points 161 to 164. Article 178 shall be repealed.

- 146) Title XXI 'ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES' shall become Chapter 2 of Title III of Part Five on the Union's external action and Article 181a shall become the new Article 188 H; that Article shall be amended as set out below in point 166.

ENERGY

- 147) Title XX shall be replaced by the following new Title and new Article 176 A:

'TITLE XX
ENERGY

Article 176 A

1. In the context of the establishment and functioning of the internal market and with regard for the need to preserve and improve the environment, Union policy on energy shall aim, in a spirit of solidarity between Member States, to:

- (a) ensure the functioning of the energy market;
- (b) ensure security of energy supply in the Union; and
- (c) promote energy efficiency and energy saving and the development of new and renewable forms of energy; and
- (d) promote the interconnection of energy networks.

2. Without prejudice to the application of other provisions of the Treaties, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the measures necessary to achieve the objectives in paragraph 1. Such measures shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

Such measures shall not affect a Member State's right to determine the conditions for exploiting its energy resources, its choice between different energy sources and the general structure of its energy supply, without prejudice to Article 175(2)(c).

3. By way of derogation from paragraph 2, the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall unanimously and after consulting the European Parliament, establish the measures referred to therein when they are primarily of a fiscal nature.'

TOURISM

148) Title XXI shall be replaced by the following new Title and new Article 176 B:

‘TITLE XXI

TOURISM

Article 176 B

1. The Union shall complement the action of the Member States in the tourism sector, in particular by promoting the competitiveness of Union undertakings in that sector.

To that end, Union action shall be aimed at:

- (a) encouraging the creation of a favourable environment for the development of undertakings in this sector;
- (b) promoting cooperation between the Member States, particularly by the exchange of good practice.

2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish specific measures to complement actions within the Member States to achieve the objectives referred to in this Article, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.’

CIVIL PROTECTION

149) The following new Title XXII and new Article 176 C shall be inserted:

‘TITLE XXII

CIVIL PROTECTION

Article 176 C

1. The Union shall encourage cooperation between Member States in order to improve the effectiveness of systems for preventing and protecting against natural or man-made disasters.

Union action shall aim to:

- (a) support and complement Member States’ action at national, regional and local level in risk prevention, in preparing their civil-protection personnel and in responding to natural or man-made disasters within the Union;
- (b) promote swift, effective operational cooperation within the Union between national civil-protection services;

(c) promote consistency in international civil-protection work.

2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the measures necessary to help achieve the objectives referred to in paragraph 1, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.’

ADMINISTRATIVE COOPERATION

150) The following new Title XXIII and new Article 176 D shall be inserted:

‘TITLE XXIII

ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 176 D

1. Effective implementation of Union law by the Member States, which is essential for the proper functioning of the Union, shall be regarded as a matter of common interest.

2. The Union may support the efforts of Member States to improve their administrative capacity to implement Union law. Such action may include facilitating the exchange of information and of civil servants as well as supporting training schemes. No Member State shall be obliged to avail itself of such support. The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the necessary measures to this end, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

3. This Article shall be without prejudice to the obligations of the Member States to implement Union law or to the prerogatives and duties of the Commission. It shall also be without prejudice to other provisions of the Treaties providing for administrative cooperation among the Member States and between them and the Union.’

ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES

151) At the end of Article 182, first paragraph, the words ‘to this Treaty’ shall be deleted.

152) At the end of Article 186, the words ‘shall be governed by agreements to be concluded subsequently with the unanimous approval of Member States’ shall be replaced by ‘shall be regulated by acts adopted in accordance with Article 187’.

153) In Article 187, the words ‘acting unanimously’ shall be replaced by ‘acting unanimously on a proposal from the Commission’ and the following sentence shall be added at the end of the Article: ‘Where the provisions in question are adopted by the Council in accordance with a special legislative procedure, it shall act unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament.’

EXTERNAL ACTION BY THE UNION

154) A new Part Five shall be inserted. Its heading shall be 'EXTERNAL ACTION BY THE UNION' and it shall contain the following Titles and Chapters:

Title I: General provisions on the Union's external action

Title II: Common commercial policy

Title III: Cooperation with third countries and humanitarian aid

Chapter 1: Development cooperation

Chapter 2: Economic, financial and technical cooperation with third countries

Chapter 3: Humanitarian aid

Title IV: Restrictive measures

Title V: International agreements

Title VI: The Union's relations with international organisations and third countries and Union delegations

Title VII: Solidarity clause.

GENERAL PROVISIONS

155) The following new Title I and new Article 188 A shall be inserted:

'TITLE I

GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION

Article 188 A

The Union's action on the international scene, pursuant to this Part, shall be guided by the principles, pursue the objectives and be conducted in accordance with the general provisions laid down in Chapter 1 of Title V of the Treaty on European Union.'

COMMON COMMERCIAL POLICY

156) A Title II 'COMMON COMMERCIAL POLICY' shall be inserted, taking over the heading of Title IX of Part 3.

157) An Article 188 B shall be inserted, with the wording of Article 131; it shall be amended as follows:

(a) the first paragraph shall be replaced by the following:

‘By establishing a customs union in accordance with Articles 23 to 27, the Union shall contribute, in the common interest, to the harmonious development of world trade, the progressive abolition of restrictions on international trade and on foreign direct investment, and the lowering of customs and other barriers.’;

(b) the second paragraph shall be deleted.

158) An Article 188 C shall be inserted, replacing Article 133:

‘Article 188 C

1. The common commercial policy shall be based on uniform principles, particularly with regard to changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements relating to trade in goods and services, and the commercial aspects of intellectual property, foreign direct investment, the achievement of uniformity in measures of liberalisation, export policy and measures to protect trade such as those to be taken in the event of dumping or subsidies. The common commercial policy shall be conducted in the context of the principles and objectives of the Union’s external action.

2. The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt the measures defining the framework for implementing the common commercial policy.

3. Where agreements with one or more third countries or international organisations need to be negotiated and concluded, Article 188 N shall apply, subject to the special provisions of this Article.

The Commission shall make recommendations to the Council, which shall authorise it to open the necessary negotiations. The Council and the Commission shall be responsible for ensuring that the agreements negotiated are compatible with internal Union policies and rules.

The Commission shall conduct these negotiations in consultation with a special committee appointed by the Council to assist the Commission in this task and within the framework of such directives as the Council may issue to it. The Commission shall report regularly to the special committee and to the European Parliament on the progress of negotiations.

4. For the negotiation and conclusion of the agreements referred to in paragraph 3, the Council shall act by a qualified majority.

For the negotiation and conclusion of agreements in the fields of trade in services and the commercial aspects of intellectual property, as well as foreign direct investment, the Council shall act unanimously where such agreements include provisions for which unanimity is required for the adoption of internal rules.

The Council shall also act unanimously for the negotiation and conclusion of agreements:

- (a) in the field of trade in cultural and audiovisual services, where these agreements risk prejudicing the Union's cultural and linguistic diversity;
- (b) in the field of trade in social, education and health services, where these agreements risk seriously disturbing the national organisation of such services and prejudicing the responsibility of Member States to deliver them.

5. The negotiation and conclusion of international agreements in the field of transport shall be subject to Title V of Part Three and to Article 188 N.

6. The exercise of the competences conferred by this Article in the field of the common commercial policy shall not affect the delimitation of competences between the Union and the Member States, and shall not lead to harmonisation of legislative or regulatory provisions of the Member States insofar as the Treaties exclude such harmonisation.'

DEVELOPMENT COOPERATION

159) A Title III 'COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES AND HUMANITARIAN AID' shall be inserted.

160) A Chapter 1 'DEVELOPMENT COOPERATION' shall be inserted, taking over the heading of Title XX of Part 3.

161) An Article 188 D shall be inserted, with the wording of Article 177; it shall be amended as follows:

- (a) paragraphs 1 and 2 shall be replaced by the following:

'1. Union policy in the field of development cooperation shall be conducted within the framework of the principles and objectives of the Union's external action. The Union's development cooperation policy and that of the Member States complement and reinforce each other.

Union development cooperation policy shall have as its primary objective the reduction and, in the long term, the eradication of poverty. The Union shall take account of the objectives of development cooperation in the policies that it implements which are likely to affect developing countries.;

- (b) paragraph 3 shall be renumbered '2'.

- 162) An Article 188 E shall be inserted, with the wording of Article 179; it shall be amended as follows:
- (a) paragraph 1 shall be replaced by the following:
- ‘1. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt the measures necessary for the implementation of development cooperation policy, which may relate to multiannual cooperation programmes with developing countries or programmes with a thematic approach.’;
- (b) the following new paragraph 2 shall be inserted:
- ‘2. The Union may conclude with third countries and competent international organisations any agreement helping to achieve the objectives referred to in Article 10 A of the Treaty on European Union and in Article 188 D of this Treaty.
- The first subparagraph shall be without prejudice to Member States’ competence to negotiate in international bodies and to conclude agreements.’;
- (c) the current paragraph 2 shall be renumbered ‘3’ and the current paragraph 3 shall be deleted.
- 163) An Article 188 F shall be inserted, with the wording of Article 180; it shall be amended as follows:
- At the beginning of paragraph 1, the following words shall be inserted: ‘In order to promote the complementarity and efficiency of their action,’.
- 164) An Article 188 G shall be inserted, with the wording of Article 181; the second sentence of the first paragraph and the second paragraph shall be deleted.

ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES

- 165) A Chapter 2 ‘ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES’ shall be inserted, taking over the heading of Title XXI of Part 3.
- 166) An Article 188 H shall be inserted, with the wording of Article 181a; it shall be amended as follows:
- (a) paragraph 1 shall be replaced by the following:
- ‘1. Without prejudice to the other provisions of the Treaties, and in particular Articles 188 D to 188 G, the Union shall carry out economic, financial and technical cooperation measures, including assistance, in particular financial assistance, with third countries other than developing countries. Such measures shall be consistent with the development policy of the Union and shall be carried out within the framework of the principles and objectives of its external action. The Union’s operations and those of the Member States shall complement and reinforce each other.’;

(b) paragraph 2 shall be replaced by the following:

‘2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt the measures necessary for the implementation of paragraph 1.’;

(c) at the end of the second sentence of the first subparagraph of paragraph 3, the words ‘, which shall be negotiated and concluded in accordance with Article 300’ shall be deleted.

167) The following new Article 188 I shall be inserted:

‘Article 188 I

When the situation in a third country requires urgent financial assistance from the Union, the Council shall adopt the necessary decisions on a proposal from the Commission.’.

HUMANITARIAN AID

168) The following new Chapter 3 and new Article 188 J shall be inserted:

‘CHAPTER 3

HUMANITARIAN AID

Article 188 J

1. The Union’s operations in the field of humanitarian aid shall be conducted within the framework of the principles and objectives of the external action of the Union. Such operations shall be intended to provide ad hoc assistance and relief and protection for people in third countries who are victims of natural or man-made disasters, in order to meet the humanitarian needs resulting from these different situations. The Union’s measures and those of the Member States shall complement and reinforce each other.

2. Humanitarian aid operations shall be conducted in compliance with the principles of international law and with the principles of impartiality, neutrality and non-discrimination.

3. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the measures defining the framework within which the Union’s humanitarian aid operations shall be implemented.

4. The Union may conclude with third countries and competent international organisations any agreement helping to achieve the objectives referred to in paragraph 1 and in Article 10 A of the Treaty on European Union.

The first subparagraph shall be without prejudice to Member States’ competence to negotiate in international bodies and to conclude agreements.

5. In order to establish a framework for joint contributions from young Europeans to the humanitarian aid operations of the Union, a European Voluntary Humanitarian Aid Corps shall be set up. The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall determine the rules and procedures for the operation of the Corps.

6. The Commission may take any useful initiative to promote coordination between actions of the Union and those of the Member States, in order to enhance the efficiency and complementarity of Union and national humanitarian aid measures.

7. The Union shall ensure that its humanitarian aid operations are coordinated and consistent with those of international organisations and bodies, in particular those forming part of the United Nations system.’

RESTRICTIVE MEASURES

169) The following Title IV and Article 188 K shall be inserted, replacing Article 301:

‘TITLE IV

RESTRICTIVE MEASURES

Article 188 K

1. Where a decision, adopted in accordance with Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Union, provides for the interruption or reduction, in part or completely, of economic and financial relations with one or more third countries, the Council, acting by a qualified majority on a joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Commission, shall adopt the necessary measures. It shall inform the European Parliament thereof.

2. Where a decision adopted in accordance with Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Union so provides, the Council may adopt restrictive measures under the procedure referred to in paragraph 1 against natural or legal persons and groups or non-State entities.

3. The acts referred to in this Article shall include necessary provisions on legal safeguards.’

INTERNATIONAL AGREEMENTS

170) A Title V ‘INTERNATIONAL AGREEMENTS’ shall be inserted after Article 188 K.

171) The following Article 188 L shall be inserted:

‘Article 188 L

1. The Union may conclude an agreement with one or more third countries or international organisations where the Treaties so provide or where the conclusion of an agreement is necessary in order to achieve, within the framework of the Union’s policies, one

of the objectives referred to in the Treaties, or is provided for in a legally binding Union act or is likely to affect common rules or alter their scope.

2. Agreements concluded by the Union are binding upon the institutions of the Union and on its Member States.’

172) An Article 188 M shall be inserted, with the wording of Article 310. The word ‘States’ shall be replaced by ‘third countries’.

173) An Article 188 N shall be inserted, replacing Article 300:

‘Article 188 N

1. Without prejudice to the specific provisions laid down in Article 188 C, agreements between the Union and third countries or international organisations shall be negotiated and concluded in accordance with the following procedure.

2. The Council shall authorise the opening of negotiations, adopt negotiating directives, authorise the signing of agreements and conclude them.

3. The Commission, or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy where the agreement envisaged relates exclusively or principally to the common foreign and security policy, shall submit recommendations to the Council, which shall adopt a decision authorising the opening of negotiations and, depending on the subject of the agreement envisaged, nominating the Union negotiator or the head of the Union’s negotiating team.

4. The Council may address directives to the negotiator and designate a special committee in consultation with which the negotiations must be conducted.

5. The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision authorising the signing of the agreement and, if necessary, its provisional application before entry into force.

6. The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision concluding the agreement.

Except where agreements relate exclusively to the common foreign and security policy, the Council shall adopt the decision concluding the agreement:

(a) after obtaining the consent of the European Parliament in the following cases:

(i) association agreements;

(ii) agreement on Union accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

(iii) agreements establishing a specific institutional framework by organising cooperation procedures;

- (iv) agreements with important budgetary implications for the Union;
- (v) agreements covering fields to which either the ordinary legislative procedure applies, or the special legislative procedure where consent by the European Parliament is required.

The European Parliament and the Council may, in an urgent situation, agree upon a time-limit for consent.

- (b) after consulting the European Parliament in other cases. The European Parliament shall deliver its opinion within a time-limit which the Council may set depending on the urgency of the matter. In the absence of an opinion within that time-limit, the Council may act.

7. When concluding an agreement, the Council may, by way of derogation from paragraphs 5, 6 and 9, authorise the negotiator to approve on the Union's behalf modifications to the agreement where it provides for them to be adopted by a simplified procedure or by a body set up by the agreement. The Council may attach specific conditions to such authorisation.

8. The Council shall act by a qualified majority throughout the procedure.

However, it shall act unanimously when the agreement covers a field for which unanimity is required for the adoption of a Union act as well as for association agreements and the agreements referred to in Article 188 H with the States which are candidates for accession. The Council shall also act unanimously for the agreement on accession of the Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; the decision concluding this agreement shall enter into force after it has been approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

9. The Council, on a proposal from the Commission or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall adopt a decision suspending application of an agreement and establishing the positions to be adopted on the Union's behalf in a body set up by an agreement, when that body is called upon to adopt acts having legal effects, with the exception of acts supplementing or amending the institutional framework of the agreement.

10. The European Parliament shall be immediately and fully informed at all stages of the procedure.

11. A Member State, the European Parliament, the Council or the Commission may obtain the opinion of the Court of Justice as to whether an agreement envisaged is compatible with the Treaties. Where the opinion of the Court is adverse, the agreement envisaged may not enter into force unless it is amended or the Treaties are revised.'

174) An Article 188 O shall be inserted, with the wording of paragraphs 1 to 3 and 5 of Article 111 and paragraph 1 shall be split into two subparagraphs, the last two sentences becoming the second subparagraph; the Article shall be amended as follows:

(a) paragraph 1, first subparagraph, shall be replaced by the following:

‘1. By way of derogation from Article 188 N(1), the Council, either on a recommendation from the European Central Bank or on a recommendation from the Commission and after consulting the European Central Bank, in an endeavour to reach a consensus consistent with the objective of price stability, may conclude formal agreements on an exchange-rate system for the euro in relation to the currencies of third States. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament and in accordance with the procedure provided for in paragraph 3.’

In the second subparagraph, the words ‘on a recommendation from the ECB or from the Commission and after consulting the ECB in an endeavour to’ shall be replaced by the following: ‘either on a recommendation from the European Central Bank or on a recommendation from the Commission, and after consulting the European Central Bank, in an endeavour to’;

(b) in paragraph 2, the words ‘non-Community currencies’ shall be replaced by ‘currencies of third States’;

(c) in paragraph 3, in the first sentence of the first subparagraph, the reference to Article 300 shall be replaced by a reference to Article 188 N and the word ‘States’ shall be replaced by ‘third States’, and the second subparagraph shall be deleted;

(d) paragraph 5 shall be renumbered ‘4’.

THE UNION’S RELATIONS WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND THIRD COUNTRIES AND UNION DELEGATIONS

175) The following Title VI and Articles 188 P and 188 Q shall be inserted, with Article 188 P replacing Articles 302 to 304:

‘TITLE VI

THE UNION’S RELATIONS WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND THIRD COUNTRIES AND UNION DELEGATIONS

Article 188 P

1. The Union shall establish all appropriate forms of cooperation with the organs of the United Nations and its specialised agencies, the Council of Europe, the Organisation for Security and Cooperation in Europe and the Organisation for Economic Cooperation and Development.

The Union shall also maintain such relations as are appropriate with other international organisations.

2. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Commission shall be instructed to implement this Article.

Article 188 Q

1. Union delegations in third countries and at international organisations shall represent the Union.
2. Union delegations shall be placed under the authority of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. They shall act in close cooperation with Member States' diplomatic and consular missions.'

SOLIDARITY CLAUSE

176) The following new Title VII and new Article 188 R shall be inserted:

'TITLE VII

SOLIDARITY CLAUSE

Article 188 R

1. The Union and its Member States shall act jointly in a spirit of solidarity if a Member State is the object of a terrorist attack or the victim of a natural or man-made disaster. The Union shall mobilise all the instruments at its disposal, including the military resources made available by the Member States, to:
 - (a) — prevent the terrorist threat in the territory of the Member States;
— protect democratic institutions and the civilian population from any terrorist attack;
— assist a Member State in its territory, at the request of its political authorities, in the event of a terrorist attack;
 - (b) assist a Member State in its territory, at the request of its political authorities, in the event of a natural or man-made disaster.
2. Should a Member State be the object of a terrorist attack or the victim of a natural or man-made disaster, the other Member States shall assist it at the request of its political authorities. To that end, the Member States shall coordinate between themselves in the Council.
3. The arrangements for the implementation by the Union of the solidarity clause shall be defined by a decision adopted by the Council acting on a joint proposal by the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. The Council shall act in accordance with Article 15b(1) of the Treaty on European Union where this decision has defence implications. The European Parliament shall be informed.

For the purposes of this paragraph and without prejudice to Article 207, the Council shall be assisted by the Political and Security Committee with the support of the structures developed in the context of the common security and defence policy and by the Committee referred to in Article 61 D; the two committees shall, if necessary, submit joint opinions.

4. The European Council shall regularly assess the threats facing the Union in order to enable the Union and its Member States to take effective action.’

INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS

- 177) Part Five shall be renumbered ‘PART SIX’ and its heading shall be replaced by ‘INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS’.

EUROPEAN PARLIAMENT

- 178) Article 189 shall be repealed.

- 179) Article 190 shall be amended as follows:

- (a) paragraphs 1, 2 and 3 shall be deleted and paragraphs 4 and 5 shall be renumbered 1 and 2 respectively;
- (b) paragraph 4, renumbered 1, shall be amended as follows:

- (i) in the first subparagraph, the words ‘for elections by direct universal suffrage’ shall be replaced by the following: ‘to lay down the provisions necessary for the election of its members by direct universal suffrage’;
- (ii) the second subparagraph shall be replaced by the following:

‘The Council, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after obtaining the consent of the European Parliament, which shall act by a majority of its component members, shall lay down the necessary provisions. These provisions shall enter into force following their approval by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.’;

- (c) in paragraph 5, renumbered 2, the words ‘, acting by means of regulations on its own initiative in accordance with a special legislative procedure’ shall be inserted after ‘The European Parliament’.

- 180) In Article 191, the first paragraph shall be deleted. In the second paragraph, the words ‘, by means of regulations,’ shall be inserted before ‘shall lay down’ and the words ‘referred to in Article 8 A(4) of the Treaty on European Union’ shall be inserted after ‘at European level’.

- 181) In Article 192, the first paragraph shall be deleted; in the second paragraph, the words ‘of its Members’ shall be replaced by ‘of its component members’ and the following sentence shall be added at the end of the paragraph: ‘If the Commission does not submit a proposal, it shall inform the European Parliament of the reasons.’

182) Article 193 shall be amended as follows:

- (a) in the first paragraph, the words 'of its Members' shall be replaced by 'of its component Members';
- (b) the third paragraph shall be replaced by the following:

'The detailed provisions governing the exercise of the right of inquiry shall be determined by the European Parliament, acting by means of regulations on its own initiative in accordance with a special legislative procedure, after obtaining the consent of the Council and the Commission.'

183) Article 195 shall be amended as follows:

- (a) in the first subparagraph of paragraph 1, the words at the beginning 'The European Parliament shall appoint an Ombudsman, empowered to receive complaints' shall be replaced by 'A European Ombudsman, elected by the European Parliament, shall be empowered to receive complaints'; in the last part of the sentence, the words 'and the Court of First Instance acting in their judicial role' shall be replaced by: 'acting in its judicial role' and the following final sentence shall be added: 'He or she shall examine such complaints and report on them.';
- (b) in the first subparagraph of paragraph 2, the word 'appointed' shall be replaced by 'elected';
- (c) in paragraph 3, the words 'from any body' shall be replaced by 'from any Government, institution, body, office or entity';
- (d) in paragraph 4, the words 'acting by means of regulations on its own initiative in accordance with a special legislative procedure' shall be inserted after 'The European Parliament'.

184) In the second paragraph of Article 196, the words 'in extraordinary session' shall be replaced by 'in extraordinary part-session' and the words 'of its Members' shall be replaced by 'of its component members'.

185) Article 197 shall be amended as follows:

- (a) the first paragraph shall be deleted;
- (b) the second paragraph shall be replaced by the following:

'The Commission may attend all the meetings and shall, at its request, be heard.';

- (c) the fourth paragraph shall be replaced by the following:

'The European Council and the Council shall be heard by the European Parliament in accordance with the conditions laid down in the Rules of Procedure of the European Council and those of the Council.'

186) In the first paragraph of Article 198, the word 'absolute' shall be deleted.

- 187) In the second paragraph of Article 199, the words ‘manner laid down in its Rules of Procedure’ shall be replaced by ‘manner laid down in the Treaties and in its Rules of Procedure’.
- 188) In Article 201, the second paragraph shall be replaced by the following:

‘If the motion of censure is carried by a two-thirds majority of the votes cast, representing a majority of the component members of the European Parliament, the members of the Commission shall resign as a body and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall resign from duties that he or she carries out in the Commission. They shall remain in office and continue to deal with current business until they are replaced in accordance with Article 9 D of the Treaty on European Union. In this case, the term of office of the members of the Commission appointed to replace them shall expire on the date on which the term of office of the members of the Commission obliged to resign as a body would have expired.’.

EUROPEAN COUNCIL

- 189) The following new Section 1a and new Articles 201a and 201b shall be inserted:

‘SECTION 1a

THE EUROPEAN COUNCIL

Article 201a

1. Where a vote is taken, any member of the European Council may also act on behalf of not more than one other member.

Article 9 C(4) of the Treaty on European Union and Article 205(2) of this Treaty shall apply to the European Council when it is acting by a qualified majority. Where the European Council decides by vote, its President and the President of the Commission shall not take part in the vote.

Abstentions by members present in person or represented shall not prevent the adoption by the European Council of acts which require unanimity.

2. The President of the European Parliament may be invited to be heard by the European Council.
3. The European Council shall act by a simple majority for procedural questions and for the adoption of its Rules of Procedure.
4. The European Council shall be assisted by the General Secretariat of the Council.

Article 201b

The European Council shall adopt by a qualified majority:

- (a) a decision establishing the list of Council configurations, other than those of the General Affairs Council and of the Foreign Affairs Council, in accordance with Article 9 C(6) of the Treaty on European Union;
- (b) a decision on the Presidency of Council configurations, other than that of Foreign Affairs, in accordance with Article 9 C(9) of the Treaty on European Union.’

COUNCIL

190) Articles 202 and 203 shall be repealed.

191) Article 205 shall be amended as follows:

- (a) paragraphs 1 and 2 shall be replaced by the following:

‘1. Where it is required to act by a simple majority, the Council shall act by a majority of its component members.

2. By way of derogation from Article 9 C(4) of the Treaty on European Union, as from 1 November 2014 and subject to the provisions laid down in the Protocol on transitional provisions, where the Council does not act on a proposal from the Commission or from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the qualified majority shall be defined as at least 72 % of the members of the Council, representing Member States comprising at least 65 % of the population of the Union.

3. As from 1 November 2014 and subject to the provisions laid down in the Protocol on transitional provisions, in cases where, under the Treaties, not all the members of the Council participate in voting, a qualified majority shall be defined as follows:

- (a) A qualified majority shall be defined as at least 55 % of the members of the Council representing the participating Member States, comprising at least 65 % of the population of these States.

A blocking minority must include at least the minimum number of Council members representing more than 35 % of the population of the participating Member States, plus one member, failing which the qualified majority shall be deemed attained;

- (b) By way of derogation from point (a), where the Council does not act on a proposal from the Commission or from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the qualified majority shall be defined as at least 72 % of the members of the Council representing the participating Member States, comprising at least 65 % of the population of these States.’

(b) paragraph 4 shall be deleted and paragraph 3 shall be renumbered 4.

192) Article 207 shall be replaced by the following:

'Article 207

1. A committee consisting of the Permanent Representatives of the Governments of the Member States shall be responsible for preparing the work of the Council and for carrying out the tasks assigned to it by the latter. The Committee may adopt procedural decisions in cases provided for in the Council's Rules of Procedure.

2. The Council shall be assisted by a General Secretariat, under the responsibility of a Secretary-General appointed by the Council.

The Council shall decide on the organisation of the General Secretariat by a simple majority.

3. The Council shall act by a simple majority regarding procedural matters and for the adoption of its Rules of Procedure.'

193) In Article 208, the following sentence shall be added at the end of the Article: 'If the Commission does not submit a proposal, it shall inform the Council of the reasons.'

194) In Article 209, the words 'receiving an opinion from' shall be replaced by 'consulting'.

195) Article 210 shall be replaced by the following:

'Article 210

The Council shall determine the salaries, allowances and pensions of the President of the European Council, the President of the Commission, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the members of the Commission, the Presidents, members and Registrars of the Court of Justice of the European Union, and the Secretary-General of the Council. It shall also determine any payment to be made instead of remuneration.'

COMMISSION

196) Article 211 shall be repealed. The following Article 211a shall be inserted:

'Article 211a

In accordance with Article 9 D(5) of the Treaty on European Union, the members of the Commission shall be chosen on the basis of a system of rotation established unanimously by the European Council and on the basis of the following principles:

(a) Member States shall be treated on a strictly equal footing as regards determination of the sequence of, and the time spent by, their nationals as members of the Commission; consequently, the difference between the total number of terms of office held by nationals of any given pair of Member States may never be more than one;

(b) subject to point (a), each successive Commission shall be so composed as to reflect satisfactorily the demographic and geographical range of all the Member States.’.

197) Article 212 shall become a new paragraph 2 of Article 218.

198) In Article 213, paragraph 1 shall be deleted and paragraph 2 shall not be numbered; its first two paragraphs shall be merged and shall read as follows:

‘The Members of the Commission shall refrain from any action incompatible with their duties. Member States shall respect their independence and shall not seek to influence them in the performance of their tasks.’.

199) Article 214 shall be repealed.

200) Article 215 shall be amended as follows:

(a) the second paragraph shall be replaced by the following two paragraphs:

‘A vacancy caused by resignation, compulsory retirement or death shall be filled for the remainder of the member’s term of office by a new member of the same nationality appointed by the Council, by common accord with the President of the Commission, after consulting the European Parliament and in accordance with the criteria set out in the second subparagraph of Article 9 D(3) of the Treaty on European Union.

The Council may, acting unanimously on a proposal from the President of the Commission, decide that such a vacancy need not be filled, in particular when the remainder of the member’s term of office is short.’;

(b) the following new fifth paragraph shall be inserted:

‘In the event of resignation, compulsory retirement or death, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall be replaced, for the remainder of his or her term of office, in accordance with Article 9 E(1) of the Treaty on European Union’;

(c) the last paragraph shall be replaced by the following:

‘In the case of the resignation of all the members of the Commission, they shall remain in office and continue to deal with current business until they have been replaced, for the remainder of their term of office, in accordance with Article 9 D of the Treaty on European Union.’.

201) In Article 217, paragraphs 1, 3 and 4 shall be deleted and paragraph 2 shall not be numbered. Its first sentence shall be replaced by the following: ‘Without prejudice to Article 9 E(4) of the Treaty on European Union, the responsibilities incumbent upon the Commission shall be structured and allocated among its members by its President, in accordance with Article 9 D(6) of that Treaty’.

- 202) In Article 218, paragraph 1 shall be deleted; paragraph 2 shall be renumbered 1 and the words 'in accordance with the provisions of this Treaty' shall be deleted. A paragraph 2 shall be inserted, with the wording of Article 212.
- 203) In Article 219, first paragraph, the words 'of the number of Members provided for in Article 213' shall be replaced by 'of its members' and the second paragraph shall be replaced by 'Its Rules of Procedure shall determine the quorum.'

COURT OF JUSTICE

- 204) In the heading of Section 4, the words 'OF THE EUROPEAN UNION' shall be added.
- 205) Article 220 shall be repealed.
- 206) In Article 221, the first paragraph shall be deleted.
- 207) In Article 223, the words ', after consultation of the panel provided for in Article 224a' shall be added at the end of the first paragraph.
- 208) In Article 224, first paragraph, the first sentence shall be deleted and the words 'of the Court' shall be inserted after 'The number of Judges'. In the second paragraph, the words ', after consultation of the panel provided for in Article 224a' shall be inserted at the end of the second sentence.
- 209) The following new Article 224a shall be inserted:

'Article 224a

A panel shall be set up in order to give an opinion on candidates' suitability to perform the duties of Judge and Advocate-General of the Court of Justice and the General Court before the governments of the Member States make the appointments referred to in Articles 223 and 224.

The panel shall comprise seven persons chosen from among former members of the Court of Justice and the General Court, members of national supreme courts and lawyers of recognised competence, one of whom shall be proposed by the European Parliament. The Council shall adopt a decision establishing the panel's operating rules and a decision appointing its members. It shall act on the initiative of the President of the Court of Justice.'

- 210) In Article 225, paragraph 1, first subparagraph, first sentence, the words 'assigned to a judicial panel and those' shall be replaced by 'assigned to a specialised court set up under Article 225a and those' and in paragraph 2, first subparagraph, the words 'set up under Article 225a' shall be deleted.
- 211) Article 225a shall be amended as follows:
- (a) the first paragraph shall be replaced by the following text:

'The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may establish specialised courts attached to the General Court to hear and determine at first instance certain classes of action or proceeding brought in

specific areas. The European Parliament and the Council shall act by means of regulations either on a proposal from the Commission after consultation of the Court of Justice or at the request of the Court of Justice after consultation of the Commission.;

- (b) in the second paragraph, the words 'the decision' shall be replaced by 'the regulation' and the words 'the panel' shall be replaced by 'the court';
- (c) in the third paragraph, the words 'the decision establishing the panel' shall be replaced by 'the regulation establishing the specialised court';
- (d) in the sixth paragraph, the words 'the decision' shall be replaced by 'the regulation' and the following sentence shall be added at the end: 'Title I of the Statute and Article 64 thereof shall in any case apply to the specialised courts.'

212) Article 228 shall be amended as follows:

- (a) in paragraph 2, the first and second subparagraphs shall be replaced by the following wording, which shall become the first subparagraph:

'2. If the Commission considers that the Member State concerned has not taken the necessary measures to comply with judgment of the Court, it may bring the case before the Court after giving that State the opportunity to submit its observations. It shall specify the amount of the lump sum or penalty payment to be paid by the Member State concerned which it considers appropriate in the circumstances.'

In the third subparagraph, which shall become the second, the words 'of Justice' shall be deleted after 'Court';

- (b) the following new paragraph 3 shall be added:

'3. When the Commission brings a case before the Court pursuant to Article 226 on the grounds that the Member State concerned has failed to fulfil its obligation to notify measures transposing a directive adopted under a legislative procedure, it may, when it deems appropriate, specify the amount of the lump sum or penalty payment to be paid by the Member State concerned which it considers appropriate in the circumstances.'

If the Court finds that there is an infringement it may impose a lump sum or penalty payment on the Member State concerned not exceeding the amount specified by the Commission. The payment obligation shall take effect on the date set by the Court in its judgment.'

213) In Article 229a, the words 'the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament,' shall be replaced by 'the Council, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after consulting the European Parliament,' and the words 'Community industrial property rights' shall be replaced by 'European intellectual property rights'. The last sentence shall be replaced by the following: 'These provisions shall enter into force after their approval by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.'

214) Article 230 shall be amended as follows:

- (a) in the first paragraph, the words 'acts adopted jointly by the European Parliament and the Council,' shall be replaced by 'legislative acts,' the words 'and of the European Council' shall be inserted after 'European Parliament' and the following sentence shall be added at the end: 'It shall also review the legality of acts of bodies, offices or agencies of the Union intended to produce legal effects vis-à-vis third parties.';
- (b) in the third paragraph, the words 'by the Court of Auditors and by the ECB for the purpose of protecting their prerogatives' shall be replaced by 'by the Court of Auditors, by the European Central Bank and by the Committee of the Regions for the purpose of protecting their prerogatives';
- (c) the fourth paragraph shall be replaced by the following:

'Any natural or legal person may, under the conditions laid down in the first and second paragraphs, institute proceedings against an act addressed to that person or which is of direct and individual concern to them, and against a regulatory act which is of direct concern to them and does not entail implementing measures.';

- (d) the following new fifth paragraph shall be inserted, and the present fifth paragraph shall become the sixth paragraph:

'Acts setting up bodies, offices and agencies of the Union may lay down specific conditions and arrangements concerning actions brought by natural or legal persons against acts of these bodies, offices or agencies intended to produce legal effects in relation to them.'

215) In Article 231, the second paragraph shall be replaced by the following: 'However, the Court shall, if it considers this necessary, state which of the effects of the act which it has declared void shall be considered as definitive.'

216) Article 232 shall be amended as follows:

- (a) in the first paragraph, the words 'the European Council,' shall be inserted after 'European Parliament', the words 'or the European Central Bank' shall be inserted after 'Commission', the word 'or' before 'the Commission' shall be replaced by a comma and the following sentence shall be added at the end of the paragraph: 'This Article shall apply, under the same conditions, to bodies, offices and agencies of the Union which fail to act.';
- (b) in the third paragraph, the words ', body, office or agency' shall be inserted after 'an institution';
- (c) the fourth paragraph shall be deleted.

217) In Article 233, first paragraph, the words 'or institutions' shall be deleted; the third paragraph shall be deleted.

- 218) In Article 234, first paragraph, point (b), the words ‘and of the ECB’ shall be deleted and point (c) shall be deleted. The following paragraph shall be added at the end of the Article: ‘If such a question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State with regard to a person in custody, the Court of Justice of the European Union shall act with the minimum of delay.’.
- 219) In Article 235, the reference to the second paragraph of Article 288 shall be replaced by a reference to the second and third paragraphs of Article 288.
- 220) The following new Article 235a shall be inserted:

‘Article 235a

The Court of Justice shall have jurisdiction to decide on the legality of an act adopted by the European Council or by the Council pursuant to Article 7 of the Treaty on European Union solely at the request of the Member State concerned by a determination of the European Council or of the Council and in respect solely of the procedural stipulations contained in that Article.

Such a request must be made within one month from the date of such determination. The Court shall rule within one month from the date of the request.’.

- 221) In Article 236, the words ‘in the Staff Regulations or the Conditions of Employment’ shall be replaced by ‘in the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of other servants of the Union’.
- 222) In Article 237(d), at the beginning of the second sentence, the word ‘Governing’ shall be inserted before ‘Council’.
- 223) The following two new Articles 240a and 240b shall be inserted:

‘Article 240a

The Court of Justice of the European Union shall not have jurisdiction with respect to the provisions relating to the common foreign and security policy nor with respect to acts adopted on the basis of those provisions.

However, the Court shall have jurisdiction to monitor compliance with Article 25b of the Treaty on European Union and to rule on proceedings, brought in accordance with the conditions laid down in the fourth paragraph of Article 230 of this Treaty, reviewing the legality of decisions providing for restrictive measures against natural or legal persons adopted by the Council on the basis of Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Union.

Article 240b

In exercising its powers regarding the provisions of Chapters 4 and 5 of Title IV of Part Three relating to the area of freedom, security and justice, the Court of Justice of the European Union

shall have no jurisdiction to review the validity or proportionality of operations carried out by the police or other law-enforcement services of a Member State or the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security.’.

224) Article 241 shall be replaced by the following:

‘Article 241

Notwithstanding the expiry of the period laid down in Article 230, fifth paragraph, any party may, in proceedings in which an act of general application adopted by an institution, body, office or agency of the Union is at issue, plead the grounds specified in Article 230, second paragraph, in order to invoke before the Court of Justice of the European Union the inapplicability of that act.’.

225) In Article 242, second sentence, the words ‘of Justice’ after ‘Court’ shall be deleted.

226) In Article 245, the second paragraph shall be replaced by the following:

‘The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may amend the provisions of the Statute, with the exception of Title I and Article 64. The European Parliament and the Council shall act either at the request of the Court of Justice and after consultation of the Commission, or on a proposal from the Commission and after consultation of the Court of Justice.’.

EUROPEAN CENTRAL BANK

227) The following Section 4a and Article 245a shall be inserted:

‘SECTION 4a

THE EUROPEAN CENTRAL BANK

Article 245a

1. The European Central Bank, together with the national central banks, shall constitute the European System of Central Banks (ESCB). The European Central Bank, together with the national central banks of the Member States whose currency is the euro, which constitute the Eurosystem, shall conduct the monetary policy of the Union.

2. The ESCB shall be governed by the decision-making bodies of the European Central Bank. The primary objective of the ESCB shall be to maintain price stability. Without prejudice to that objective, it shall support the general economic policies in the Union in order to contribute to the achievement of the latter’s objectives.

3. The European Central Bank shall have legal personality. It alone may authorise the issue of the euro. It shall be independent in the exercise of its powers and in the management of its finances. Union institutions, bodies, offices and agencies and the governments of the Member States shall respect that independence.

4. The European Central Bank shall adopt such measures as are necessary to carry out its tasks in accordance with Articles 105 to 111a, with Article 115 C, and with the conditions laid down in the Statute of the ESCB and of the ECB. In accordance with these same Articles, those Member States whose currency is not the euro, and their central banks, shall retain their powers in monetary matters.

5. Within the areas falling within its responsibilities, the European Central Bank shall be consulted on all proposed Union acts, and all proposals for regulation at national level, and may give an opinion.’.

228) An Article 245b shall be inserted, with the wording of Article 112; it shall be amended as follows:

(a) in paragraph 1, the words ‘of the Member States whose currency is the euro’ shall be inserted at the end after ‘national central banks’;

(b) in paragraph 2 the numbering (a) and (b) shall be deleted, the present point (a) shall become the first subparagraph and the three subparagraphs of the present point (b) shall respectively become the second, third and fourth subparagraphs of the paragraph; in the second subparagraph, the words ‘from among persons of recognised standing and professional experience in monetary or banking matters by common accord of the governments of the Member States at the level of Heads of State or Government,’ shall be replaced by ‘by the European Council, acting by a qualified majority, from among persons of recognised standing and professional experience in monetary or banking matters,’.

229) An Article 245c shall be inserted, with the wording of Article 113.

COURT OF AUDITORS

230) In Article 246, the word ‘Union’s’ shall be inserted before ‘audit’ and the following new paragraph shall be added as a second paragraph:

‘It shall consist of one national of each Member State. Its members shall be completely independent in the performance of their duties, in the Union’s general interest.’.

231) Article 247 shall be amended as follows:

(a) paragraph 1 and the first subparagraph of paragraph 4 shall be deleted. Paragraphs 2 to 9 shall be renumbered 1 to 8 respectively;

(b) in paragraph 2, renumbered 1, the word ‘countries’ shall be replaced by ‘States’;

(c) in paragraph 4, renumbered 3, the word ‘they’ shall be replaced by ‘the Members of the Court of Auditors’.

232) In Article 248, the word ‘bodies’ shall be replaced by ‘bodies, offices or agencies’, singular or plural as the case may be, except in the expression ‘national audit bodies’ and except in the final sentence of the first subparagraph of Article 248(3).

LEGAL ACTS OF THE UNION

233) The heading of Chapter 2 shall be replaced by the following 'LEGAL ACTS OF THE UNION, ADOPTION PROCEDURES AND OTHER PROVISIONS'.

234) A Section 1 shall be inserted above Article 249:

'SECTION 1

THE LEGAL ACTS OF THE UNION'.

235) Article 249 shall be amended as follows:

(a) the first paragraph shall be replaced by the following:

'To exercise the Union's competences, the institutions shall adopt regulations, directives, decisions, recommendations and opinions.'

(b) the fourth paragraph shall be replaced by the following:

'A decision shall be binding in its entirety. A decision which specifies those to whom it is addressed shall be binding only on them.'

236) The following new Articles 249 A to 249 D shall be inserted:

Article 249 A

1. The ordinary legislative procedure shall consist in the joint adoption by the European Parliament and the Council of a regulation, directive or decision on a proposal from the Commission. This procedure is defined in Article 251.

2. In the specific cases provided for by the Treaties, the adoption of a regulation, directive or decision by the European Parliament with the participation of the Council, or by the latter with the participation of the European Parliament, shall constitute a special legislative procedure.

3. Legal acts adopted by legislative procedure shall constitute legislative acts.

4. In the specific cases provided for by the Treaties, legislative acts may be adopted on the initiative of a group of Member States or of the European Parliament, on a recommendation from the European Central Bank or at the request of the Court of Justice or the European Investment Bank.

Article 249 B

1. A legislative act may delegate to the Commission the power to adopt non-legislative acts of general application to supplement or amend certain non-essential elements of the legislative act.

The objectives, content, scope and duration of the delegation of power shall be explicitly defined in the legislative acts. The essential elements of an area shall be reserved for the legislative act and accordingly shall not be the subject of a delegation of power.

2. Legislative acts shall explicitly lay down the conditions to which the delegation is subject; these conditions may be as follows:

- (a) the European Parliament or the Council may decide to revoke the delegation;
- (b) the delegated act may enter into force only if no objection has been expressed by the European Parliament or the Council within a period set by the legislative act.

For the purposes of (a) and (b), the European Parliament shall act by a majority of its component members, and the Council by a qualified majority.

3. The adjective “delegated” shall be inserted in the title of delegated acts.

Article 249 C

1. Member States shall adopt all measures of national law necessary to implement legally binding Union acts.

2. Where uniform conditions for implementing legally binding Union acts are needed, those acts shall confer implementing powers on the Commission, or, in duly justified specific cases and in the cases provided for in Articles 11 and 13 of the Treaty on European Union, on the Council.

3. For the purposes of paragraph 2, the European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall lay down in advance the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers.

4. The word “implementing” shall be inserted in the title of implementing acts.

Article 249 D

The Council shall adopt recommendations. It shall act on a proposal from the Commission in all cases where the Treaties provide that it shall adopt acts on a proposal from the Commission. It shall act unanimously in those areas in which unanimity is required for the adoption of a Union act. The Commission, and the European Central Bank in the specific cases provided for in the Treaties, shall adopt recommendations.’

PROCEDURES FOR THE ADOPTION OF ACTS AND OTHER PROVISIONS

237) A Section 2 ‘PROCEDURES FOR THE ADOPTION OF ACTS AND OTHER PROVISIONS’ shall be inserted before Article 250.

238) In Article 250, paragraph 1 shall be replaced by the following:

‘1. Where, pursuant to the Treaties, the Council acts on a proposal from the Commission, the Council may amend that proposal only by acting unanimously, except in the cases referred to in paragraphs 10 and 13 of Article 251, in Articles 268, 270a and 272 and in the second paragraph of Article 273.’.

239) Article 251 shall be amended as follows:

- (a) in paragraph 1 the words ‘to this Article’ shall be replaced by ‘to the ordinary legislative procedure’;
- (b) the second and third subparagraphs of paragraph 2, and paragraphs 3 to 7 shall be replaced by the following:

First reading

3. The European Parliament shall adopt its position at first reading and communicate it to the Council.

4. If the Council approves the European Parliament’s position, the act concerned shall be adopted in the wording which corresponds to the position of the European Parliament.

5. If the Council does not approve the European Parliament’s position, it shall adopt its position at first reading and communicate it to the European Parliament.

6. The Council shall inform the European Parliament fully of the reasons which led it to adopt its position at first reading. The Commission shall inform the European Parliament fully of its position.

Second reading

7. If, within three months of such communication, the European Parliament:

- (a) approves the Council’s position at first reading or has not taken a decision, the act concerned shall be deemed to have been adopted in the wording which corresponds to the position of the Council;
- (b) rejects, by a majority of its component members, the Council’s position at first reading, the proposed act shall be deemed not to have been adopted;
- (c) proposes, by a majority of its component members, amendments to the Council’s position at first reading, the text thus amended shall be forwarded to the Council and to the Commission, which shall deliver an opinion on those amendments.

8. If, within three months of receiving the European Parliament's amendments, the Council, acting by a qualified majority:

- (a) approves all those amendments, the act in question shall be deemed to have been adopted;
- (b) does not approve all the amendments, the President of the Council, in agreement with the President of the European Parliament, shall within six weeks convene a meeting of the Conciliation Committee.

9. The Council shall act unanimously on the amendments on which the Commission has delivered a negative opinion.

Conciliation

10. The Conciliation Committee, which shall be composed of the members of the Council or their representatives and an equal number of members representing the European Parliament, shall have the task of reaching agreement on a joint text, by a qualified majority of the members of the Council or their representatives and by a majority of the members representing the European Parliament within six weeks of its being convened, on the basis of the positions of the European Parliament and the Council at second reading.

11. The Commission shall take part in the Conciliation Committee's proceedings and shall take all necessary initiatives with a view to reconciling the positions of the European Parliament and the Council.

12. If, within six weeks of its being convened, the Conciliation Committee does not approve the joint text, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.

Third reading

13. If, within that period, the Conciliation Committee approves a joint text, the European Parliament, acting by a majority of the votes cast, and the Council, acting by a qualified majority, shall each have a period of six weeks from that approval in which to adopt the act in question in accordance with the joint text. If they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.

14. The periods of three months and six weeks referred to in this Article shall be extended by a maximum of one month and two weeks respectively at the initiative of the European Parliament or the Council.

Special provisions

15. Where, in the cases provided for in the Treaties, a legislative act is submitted to the ordinary legislative procedure on the initiative of a group of Member States, on a recommendation by the European Central Bank, or at the request of the Court of Justice, paragraph 2, the second sentence of paragraph 6, and paragraph 9 shall not apply.

In such cases, the European Parliament and the Council shall communicate the proposed act to the Commission with their positions at first and second readings. The European Parliament or the Council may request the opinion of the Commission throughout the procedure, which the Commission may also deliver on its own initiative. It may also, if it deems it necessary, take part in the Conciliation Committee in accordance with paragraph 11.’

240) Article 252 shall be repealed. The following new Article 252a shall be inserted:

‘Article 252a

The European Parliament, the Council and the Commission shall consult each other and by common agreement make arrangements for their cooperation. To that end, they may, in compliance with the Treaties, conclude interinstitutional agreements which may be of a binding nature.’

241) Article 253 shall be replaced by the following:

‘Article 253

Where the Treaties do not specify the type of act to be adopted, the institutions shall select it on a case-by-case basis, in compliance with the applicable procedures and with the principle of proportionality.

Legal acts shall state the reasons on which they are based and shall refer to any proposals, initiatives, recommendations, requests or opinions required by the Treaties.

When considering draft legislative acts, the European Parliament and the Council shall refrain from adopting acts not provided for by the relevant legislative procedure in the area in question.’

242) Article 254 shall be replaced by the following:

‘Article 254

1. Legislative acts adopted under the ordinary legislative procedure shall be signed by the President of the European Parliament and by the President of the Council.

Legislative acts adopted under a special legislative procedure shall be signed by the President of the institution which adopted them.

Legislative acts shall be published in the *Official Journal of the European Union*. They shall enter into force on the date specified in them or, in the absence thereof, on the twentieth day following that of their publication.

2. Non-legislative acts adopted in the form of regulations, directives or decisions, when the latter do not specify to whom they are addressed, shall be signed by the President of the institution which adopted them.

Regulations and directives which are addressed to all Member States, as well as decisions which do not specify to whom they are addressed, shall be published in the *Official Journal of the European Union*. They shall enter into force on the date specified in them or, in the absence thereof, on the twentieth day following that of their publication.

Other directives, and decisions which specify to whom they are addressed, shall be notified to those to whom they are addressed and shall take effect upon such notification.’

243) The following new Article 254a shall be inserted:

‘Article 254a

1. In carrying out their missions, the institutions, bodies, offices and agencies of the Union shall have the support of an open, efficient and independent European administration.

2. In compliance with the Staff Regulations and the Conditions of Employment adopted on the basis of Article 283, the European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish provisions to that end.’

244) Article 255 shall become Article 16 A; it shall be amended as set out above in point 28.

245) In Article 256, first paragraph, the words ‘Decisions of the Council or of the Commission which impose’ shall be replaced by ‘Acts of the Council, the Commission or the European Central Bank which impose’.

ADVISORY BODIES

246) The following new Chapter 3 and Article 256a shall be inserted; Chapters 3 and 4 shall become Section 1 and Section 2 respectively and Chapter 5 shall be renumbered 4:

‘CHAPTER 3

THE UNION’S ADVISORY BODIES

Article 256a

1. The European Parliament, the Council and the Commission shall be assisted by an Economic and Social Committee and a Committee of the Regions, exercising advisory functions.

2. The Economic and Social Committee shall consist of representatives of organisations of employers, of the employed, and of other parties representative of civil society, notably in socio-economic, civic, professional and cultural areas.

3. The Committee of the Regions shall consist of representatives of regional and local bodies who either hold a regional or local authority electoral mandate or are politically accountable to an elected assembly.

4. The members of the Economic and Social Committee and of the Committee of the Regions shall not be bound by any mandatory instructions. They shall be completely independent in the performance of their duties, in the Union’s general interest.

5. The rules referred to in paragraphs 2 and 3 governing the nature of the composition of the Committees shall be reviewed at regular intervals by the Council to take account of economic, social and demographic developments within the Union. The Council, on a proposal from the Commission, shall adopt decisions to that end.’.

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE

- 247) Articles 257 and 261 shall be repealed.
- 248) In Article 258, the second and third paragraphs shall be replaced by the following paragraph:
‘The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, shall adopt a decision determining the Committee’s composition.’.
- 249) Article 259 shall be amended as follows:
- (a) in paragraph 1, the first sentence shall be replaced by the following sentence: ‘The members of the Committee shall be appointed for five years.’;
 - (b) paragraph 2 shall be replaced by the following:
‘2. The Council shall act after consulting the Commission. It may obtain the opinion of European bodies which are representative of the various economic and social sectors and of civil society to which the Union’s activities are of concern.’.
- 250) In Article 260, in the first paragraph, the words ‘two years’ shall be replaced by ‘two and a half years’ and in the third paragraph, the words ‘of the European Parliament,’ shall be inserted before ‘of the Council’.
- 251) Article 262 shall be amended as follows:
- (a) a reference to the European Parliament shall be inserted before the reference to the Council in the first, second and third paragraphs;
 - (b) in the first paragraph, the word ‘must’ shall be replaced by ‘shall’;
 - (c) in the third paragraph, the words ‘and that of the specialised section’ shall be deleted.
 - (d) the fourth paragraph shall be deleted.

COMMITTEE OF THE REGIONS

252) Article 263 shall be amended as follows:

- (a) the first paragraph shall be deleted;
- (b) the third paragraph, which shall become the second, shall be replaced by the following:

‘The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, shall adopt a decision determining the Committee’s composition.’;
- (c) in the fourth paragraph, which shall become the third, in the first sentence, the words ‘on proposals from the respective Member States’ shall be deleted and the figure ‘four’ shall be replaced by ‘five’; in the fourth sentence, the words ‘the first paragraph’ shall be replaced by the words ‘Article 256a(3),’;
- (d) the last paragraph shall be deleted.

253) In Article 264, first paragraph, the words ‘two years’ shall be replaced by ‘two and a half years’ and in the third paragraph, the words ‘of the European Parliament,’ shall be inserted before ‘of the Council’.

254) Article 265 shall be amended as follows:

- (a) a reference to the European Parliament shall be inserted before the reference to the Council in the first, second, third and last paragraphs;
- (b) in the first paragraph, the word ‘two’ shall be deleted;
- (c) the fourth paragraph shall be deleted ;

EUROPEAN INVESTMENT BANK

255) In Article 266, third paragraph, the words ‘at the request of the Commission’ shall be replaced by ‘on a proposal from the Commission’ and the words ‘in accordance with a special legislative procedure’ shall be inserted after ‘unanimously’ and the words ‘Articles 4, 11, and 12 and Article 18(5) of’ shall be deleted.

256) In Article 267(b), the word ‘progressive’ shall be deleted and the words ‘or functioning’ shall be inserted after ‘establishment’.

FINANCIAL PROVISIONS

257) Article 268 shall be amended as follows:

- (a) in the first paragraph, the words ‘, including those relating to the European Social Fund,’ shall be deleted and the three paragraphs shall become paragraph 1;

- (b) the second subparagraph shall be replaced by the following:

‘The Union’s annual budget shall be established by the European Parliament and the Council in accordance with Article 272.’;

- (c) the following new paragraphs 2 to 6 shall be added:

2. The expenditure shown in the budget shall be authorised for the annual budgetary period in accordance with the regulation referred to in Article 279.

3. The implementation of expenditure shown in the budget shall require the prior adoption of a legally binding Union act providing a legal basis for its action and for the implementation of the corresponding expenditure in accordance with the regulation referred to in Article 279, except in cases for which that law provides.

4. With a view to maintaining budgetary discipline, the Union shall not adopt any act which is likely to have appreciable implications for the budget without providing an assurance that the expenditure arising from such an act is capable of being financed within the limit of the Union’s own resources and in compliance with the multiannual financial framework referred to in Article 270a.

5. The budget shall be implemented in accordance with the principle of sound financial management. Member States shall cooperate with the Union to ensure that the appropriations entered in the budget are used in accordance with this principle.

6. The Union and the Member States, in accordance with Article 280, shall counter fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union.’

THE UNION’S OWN RESOURCES

258) A Chapter 1 ‘THE UNION’S OWN RESOURCES’ shall be inserted before Article 269.

259) Article 269 shall be amended as follows:

- (a) the following new first paragraph shall be inserted:

‘The Union shall provide itself with the means necessary to attain its objectives and carry through its policies.’;

- (b) the last paragraph shall be replaced by the following two paragraphs:

‘The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall unanimously and after consulting the European Parliament adopt a decision laying down the provisions relating to the system of own resources of the Union. In this context it may establish new categories of own resources or abolish an existing category. That decision shall not enter into force until it is approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

The Council, acting by means of regulations in accordance with a special legislative procedure, shall lay down implementing measures for the Union's own resources system insofar as this is provided for in the decision adopted on the basis of the third paragraph. The Council shall act after obtaining the consent of the European Parliament.'

260) Article 270 shall be repealed.

MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK

261) The following new Chapter 2 and new Article 270a shall be inserted:

'CHAPTER 2
THE MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK

Article 270a

1. The multiannual financial framework shall ensure that Union expenditure develops in an orderly manner and within the limits of its own resources.

It shall be established for a period of at least five years.

The annual budget of the Union shall comply with the multiannual financial framework.

2. The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall adopt a regulation laying down the multiannual financial framework. The Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament, which shall be given by a majority of its component members.

The European Council may, unanimously, adopt a decision authorising the Council to act by a qualified majority when adopting the regulation referred to in the first paragraph.

3. The financial framework shall determine the amounts of the annual ceilings on commitment appropriations by category of expenditure and of the annual ceiling on payment appropriations. The categories of expenditure, limited in number, shall correspond to the Union's major sectors of activity.

The financial framework shall lay down any other provisions required for the annual budgetary procedure to run smoothly.

4. Where no Council regulation determining a new financial framework has been adopted by the end of the previous financial framework, the ceilings and other provisions corresponding to the last year of that framework shall be extended until such time as that act is adopted.

5. Throughout the procedure leading to the adoption of the financial framework, the European Parliament, the Council and the Commission shall take any measure necessary to facilitate its adoption.'

THE UNION'S ANNUAL BUDGET

- 262) A Chapter 3 'THE UNION'S ANNUAL BUDGET' shall be inserted after Article 270a.
- 263) An Article 270b shall be inserted, with the wording of Article 272(1).
- 264) Article 271 shall become the new Article 273a; it shall be amended as set out below in point 267.
- 265) Article 272(1) shall become Article 270b and paragraphs 2 to 10 of Article 272 shall be replaced by the following:

'Article 272

The European Parliament and the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall establish the Union's annual budget in accordance with the following provisions.

1. With the exception of the European Central Bank, each institution shall, before 1 July, draw up estimates of its expenditure for the following financial year. The Commission shall consolidate these estimates in a draft budget which may contain different estimates.

The draft budget shall contain an estimate of revenue and an estimate of expenditure.

2. The Commission shall submit a proposal containing the draft budget to the European Parliament and to the Council not later than 1 September of the year preceding that in which the budget is to be implemented.

The Commission may amend the draft budget during the procedure until such time as the Conciliation Committee, referred to in paragraph 5, is convened.

3. The Council shall adopt its position on the draft budget and forward it to the European Parliament not later than 1 October of the year preceding that in which the budget is to be implemented. The Council shall inform the European Parliament in full of the reasons which led it to adopt its position.

4. If, within forty-two days of such communication, the European Parliament:

- (a) approves the position of the Council, the budget shall be adopted;

- (b) has not taken a decision, the budget shall be deemed to have been adopted;

- (c) adopts amendments by a majority of its component members, the amended draft shall be forwarded to the Council and to the Commission. The President of the European Parliament, in agreement with the President of the Council, shall immediately convene a meeting of the Conciliation Committee. However, if within ten days of the draft being forwarded the Council informs the European Parliament that it has approved all its amendments, the Conciliation Committee shall not meet.

5. The Conciliation Committee, which shall be composed of the members of the Council or their representatives and an equal number of members representing the European Parliament, shall have the task of reaching agreement on a joint text, by a qualified majority of the members of the Council or their representatives and by a majority of the representatives of the European Parliament within twenty-one days of its being convened, on the basis of the positions of the European Parliament and the Council.

The Commission shall take part in the Conciliation Committee's proceedings and shall take all the necessary initiatives with a view to reconciling the positions of the European Parliament and the Council.

6. If, within the twenty-one days referred to in paragraph 5, the Conciliation Committee agrees on a joint text, the European Parliament and the Council shall each have a period of fourteen days from the date of that agreement in which to approve the joint text.
7. If, within the period of fourteen days referred to in paragraph 6:
 - (a) the European Parliament and the Council both approve the joint text or fail to take a decision, or if one of these institutions approves the joint text while the other one fails to take a decision, the budget shall be deemed to be definitively adopted in accordance with the joint text; or
 - (b) the European Parliament, acting by a majority of its component members, and the Council both reject the joint text, or if one of these institutions rejects the joint text while the other one fails to take a decision, a new draft budget shall be submitted by the Commission; or
 - (c) the European Parliament, acting by a majority of its component members, rejects the joint text while the Council approves it, a new draft budget shall be submitted by the Commission; or
 - (d) the European Parliament approves the joint text whilst the Council rejects it, the European Parliament may, within fourteen days from the date of the rejection by the Council and acting by a majority of its component members and three-fifths of the votes cast, decide to confirm all or some of the amendments referred to in paragraph 4(c). Where a European Parliament amendment is not confirmed, the position agreed in the Conciliation Committee on the budget heading which is the subject of the amendment shall be retained. The budget shall be deemed to be definitively adopted on this basis.
8. If, within the twenty-one days referred to in paragraph 5, the Conciliation Committee does not agree on a joint text, a new draft budget shall be submitted by the Commission.

9. When the procedure provided for in this Article has been completed, the President of the European Parliament shall declare that the budget has been definitively adopted.
10. Each institution shall exercise the powers conferred upon it under this Article in compliance with the Treaties and the acts adopted thereunder, with particular regard to the Union's own resources and the balance between revenue and expenditure.'

266) Article 273 shall be amended as follows:

- (a) in the first paragraph, the word 'voted' shall be replaced by 'definitively adopted', the words 'or other subdivision' shall be deleted and, at the end of the sentence, the words 'this arrangement shall not, however, have the effect of placing at the disposal of the Commission appropriations in excess of one twelfth of those provided for in the draft budget in course of preparation' shall be replaced by 'that sum shall not, however, exceed one twelfth of the appropriations provided for in the same chapter of the draft budget.';
- (b) in the second paragraph, the words 'on a proposal from the Commission,' shall be inserted after 'The Council' and the following shall be added at the end: 'in accordance with the regulations made pursuant to Article 279. The Council shall forward the decision immediately to the European Parliament.';
- (c) the third paragraph shall be deleted;
- (d) the last paragraph shall be replaced by the following:

'The decision referred to in the second paragraph shall lay down the necessary measures relating to resources to ensure application of this Article, in accordance with the acts referred to in Article 269.

It shall enter into force thirty days following its adoption if the European Parliament, acting by a majority of its component members, has not decided to reduce this expenditure within that time-limit.'

267) An Article 273a shall be inserted, with the wording of Article 271; it shall be amended as follows:

- (a) the first paragraph shall be deleted;
- (b) In the third paragraph, which has become the second, the words 'as far as may be necessary' shall be deleted;
- (c) in the last paragraph, the words 'the Council, the Commission and the Court of Justice' shall be replaced by 'the European Council and the Council, the Commission and the Court of Justice of the European Union'.

IMPLEMENTATION OF THE BUDGET AND DISCHARGE

268) A Chapter 4 'IMPLEMENTATION OF THE BUDGET AND DISCHARGE', shall be inserted before Article 274, which shall be amended as follows:

- (a) in the first paragraph, the words at the beginning 'The Commission shall implement the budget' shall be replaced by 'The Commission shall implement the budget in cooperation with the Member States';
- (b) the second paragraph shall be replaced by the following:

'The regulations shall lay down the control and audit obligations of the Member States in the implementation of the budget and the resulting responsibilities. They shall also lay down the responsibilities and detailed rules for each institution concerning its part in effecting its own expenditure.'

269) In Article 275 the order of the Council and the European Parliament shall be reversed. The following new second paragraph shall be added:

'The Commission shall also submit to the European Parliament and to the Council an evaluation report on the Union's finances based on the results achieved, in particular in relation to the indications given by the European Parliament and the Council pursuant to Article 276'.

270) In Article 276(1), the words 'the accounts and the financial statement referred to in Article 275' shall be replaced by 'the accounts, the financial statement and the evaluation report referred to in Article 275'.

COMMON FINANCIAL PROVISIONS

271) A Chapter 5 'COMMON PROVISIONS' shall be inserted before Article 277.

272) Article 277 shall be replaced by the following:

'Article 277

The multiannual financial framework and the annual budget shall be drawn up in euro.'

273) Article 279 shall be amended as follows:

- (a) paragraph 1 shall be replaced by the following:

'1. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, and after consulting the Court of Auditors, shall adopt by means of regulations:

- (a) the financial rules which determine in particular the procedure to be adopted for establishing and implementing the budget and for presenting and auditing accounts;
- (b) rules providing for checks on the responsibility of financial actors, in particular authorising officers and accounting officers.'

- (b) in paragraph 2, the word ‘unanimously’ and the words ‘obtaining the opinion of’ shall be deleted.

274) The following new Articles 279a and 279b shall be inserted:

‘Article 279a

The European Parliament, the Council and the Commission shall ensure that the financial means are made available to allow the Union to fulfil its legal obligations in respect of third parties.

Article 279b

Regular meetings between the Presidents of the European Parliament, the Council and the Commission shall be convened, on the initiative of the Commission, under the budgetary procedures referred to in this Chapter. The Presidents shall take all the necessary steps to promote consultation and the reconciliation of the positions of the institutions over which they preside in order to facilitate the implementation of this Title.’

COMBATING FRAUD

275) A Chapter 6 ‘COMBATING FRAUD’ shall be inserted before Article 280.

276) Article 280 shall be amended as follows:

- (a) the following words shall be added at the end of paragraph 1: ‘, and in all the Union’s institutions, bodies, offices and agencies.’;
- (b) in paragraph 4, the following words: ‘and in all the Union’s institutions, bodies, offices and agencies’ shall be inserted after the words: ‘in the Member States’, and the last sentence shall be deleted.

ENHANCED COOPERATION

277) A Title III ‘ENHANCED COOPERATION’ shall be inserted after Article 280.

278) The following new Articles 280 A to 280 I shall be inserted, which, with Article 10 of the Treaty on European Union, shall replace the current Articles 27a to 27e, Articles 40 to 40b and Articles 43 to 45 of the Treaty on European Union and Articles 11 and 11a of the Treaty establishing the European Community:

‘Article 280 A

Any enhanced cooperation shall comply with the Treaties and the law of the Union.

Such cooperation shall not undermine the internal market or economic, social and territorial cohesion. It shall not constitute a barrier to or discrimination in trade between Member States, nor shall it distort competition between them.

Article 280 B

Any enhanced cooperation shall respect the competences, rights and obligations of those Member States which do not participate in it. Those Member States shall not impede its implementation by the participating Member States.

Article 280 C

1. When enhanced cooperation is being established, it shall be open to all Member States, subject to compliance with any conditions of participation laid down by the authorising decision. It shall also be open to them at any other time, subject to compliance with the acts already adopted within that framework, in addition to those conditions.

The Commission and the Member States participating in enhanced cooperation shall ensure that they promote participation by as many Member States as possible.

2. The Commission and, where appropriate, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall keep the European Parliament and the Council regularly informed regarding developments in enhanced cooperation.

Article 280 D

1. Member States which wish to establish enhanced cooperation between themselves in one of the areas covered by the Treaties, with the exception of fields of exclusive competence and the common foreign and security policy, shall address a request to the Commission, specifying the scope and objectives of the enhanced cooperation proposed. The Commission may submit a proposal to the Council to that effect. In the event of the Commission not submitting a proposal, it shall inform the Member States concerned of the reasons for not doing so.

Authorisation to proceed with the enhanced cooperation referred to in the first subparagraph shall be granted by the Council, on a proposal from the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament.

2. The request of the Member States which wish to establish enhanced cooperation between themselves within the framework of the common foreign and security policy shall be addressed to the Council. It shall be forwarded to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, who shall give an opinion on whether the enhanced cooperation proposed is consistent with the Union's common foreign and security policy, and to the Commission, which shall give its opinion in particular on whether the enhanced cooperation proposed is consistent with other Union policies. It shall also be forwarded to the European Parliament for information.

Authorisation to proceed with enhanced cooperation shall be granted by a decision of the Council acting unanimously.

Article 280 E

All members of the Council may participate in its deliberations, but only members of the Council representing the Member States participating in enhanced cooperation shall take part in the vote.

Unanimity shall be constituted by the votes of the representatives of the participating Member States only.

A qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3).

Article 280 F

1. Any Member State which wishes to participate in enhanced cooperation in progress in one of the areas referred to in Article 280 D(1) shall notify its intention to the Council and the Commission.

The Commission shall, within four months of the date of receipt of the notification, confirm the participation of the Member State concerned. It shall note where necessary that the conditions of participation have been fulfilled and shall adopt any transitional measures necessary with regard to the application of the acts already adopted within the framework of enhanced cooperation.

However, if the Commission considers that the conditions of participation have not been fulfilled, it shall indicate the arrangements to be adopted to fulfil those conditions and shall set a deadline for re-examining the request. On the expiry of that deadline, it shall re-examine the request, in accordance with the procedure set out in the second subparagraph. If the Commission considers that the conditions of participation have still not been met, the Member State concerned may refer the matter to the Council, which shall decide on the request. The Council shall act in accordance with Article 280 E. It may also adopt the transitional measures referred to in the second subparagraph on a proposal from the Commission.

2. Any Member State which wishes to participate in enhanced cooperation in progress in the framework of the common foreign and security policy shall notify its intention to the Council, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Commission.

The Council shall confirm the participation of the Member State concerned, after consulting the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and after noting, where necessary, that the conditions of participation have been fulfilled. The Council, on a proposal from the High Representative, may also adopt any transitional measures necessary with regard to the application of the acts already adopted within the framework of enhanced cooperation. However, if the Council considers that the conditions of participation have not been fulfilled, it shall indicate the arrangements to be adopted to fulfil those conditions and shall set a deadline for re-examining the request for participation.

For the purposes of this paragraph, the Council shall act unanimously and in accordance with Article 280 E.

Article 280 G

Expenditure resulting from implementation of enhanced cooperation, other than administrative costs entailed for the institutions, shall be borne by the participating Member States, unless all members of the Council, acting unanimously after consulting the European Parliament, decide otherwise.

Article 280 H

1. Where a provision of the Treaties which may be applied in the context of enhanced cooperation stipulates that the Council shall act unanimously, the Council, acting unanimously in accordance with the arrangements laid down in Article 280 E, may adopt a decision stipulating that it will act by a qualified majority.
2. Where a provision of the Treaties which may be applied in the context of enhanced cooperation stipulates that the Council shall adopt acts under a special legislative procedure, the Council, acting unanimously in accordance with the arrangements laid down in Article 280 E, may adopt a decision stipulating that it will act under the ordinary legislative procedure. The Council shall act after consulting the European Parliament.
3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to decisions having military or defence implications.

Article 280 I

The Council and the Commission shall ensure the consistency of activities undertaken in the context of enhanced cooperation and the consistency of such activities with the policies of the Union, and shall cooperate to that end.'

GENERAL AND FINAL PROVISIONS

- 279) Part Six shall be renumbered 'PART SEVEN'.
- 280) Articles 281, 293, 305 and 314 shall be repealed. Article 286 shall be replaced by Article 16 B.
- 281) In Article 282, the following sentence shall be added at the end: 'However, the Union shall be represented by each of the institutions, by virtue of their administrative autonomy, in matters relating to their respective operation.'
- 282) At the beginning of Article 283, the words 'The Council shall, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission and after consulting' shall be replaced by 'The European Parliament and the Council shall, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure on a proposal from the Commission and after consulting' and at the end the words 'servants of those Communities' shall be replaced by the words 'servants of the Union'.
- 283) In Article 288, the third paragraph shall be replaced by the following:

'Notwithstanding the second paragraph, the European Central Bank shall, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States, make good any damage caused by it or by its servants in the performance of their duties.'
- 284) In Article 290, the words 'by means of regulations' shall be added at the end.
- 285) In Article 291, the words ', the European Monetary Institute' shall be deleted.
- 286) Article 294 shall become Article 48a.

287) Article 299 shall be amended as follows:

- (a) paragraph 1 shall be deleted. The first subparagraph of paragraph 2 and paragraphs 3 to 6 shall become Article 311a; they shall be amended as set out below in point 293.

Paragraph 2 shall not be numbered;

- (b) at the beginning of the first paragraph, the word 'However,' shall be deleted and the words 'the French overseas departments' shall be replaced by 'Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin'; the following sentence shall be added at the end of the paragraph: 'Where the specific measures in question are adopted by the Council in accordance with a special legislative procedure, it shall also act on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament.';
- (c) at the beginning of the second paragraph, the words 'The Council shall, when adopting the relevant measures referred to in the second subparagraph, take into account areas such as' shall be replaced by 'The measures referred to in the first paragraph concern in particular areas such as';
- (d) at the beginning of the third paragraph, the reference to the second subparagraph shall be replaced by a reference to the first paragraph.

288) Articles 300 and 301 shall be replaced by Articles 188 N and 188 K respectively and Articles 302 to 304 shall be replaced by Article 188 P.

289) Article 308 shall be replaced by the following:

'Article 308

1. If action by the Union should prove necessary, within the framework of the policies defined in the Treaties, to attain one of the objectives set out in the Treaties, and the Treaties have not provided the necessary powers, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament, shall adopt the appropriate measures. Where the measures in question are adopted by the Council in accordance with a special legislative procedure, it shall also act unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament.

2. Using the procedure for monitoring the subsidiarity principle referred to in Article 3b(3) of the Treaty on European Union, the Commission shall draw national Parliaments' attention to proposals based on this Article.

3. Measures based on this Article shall not entail harmonisation of Member States' laws or regulations in cases where the Treaties exclude such harmonisation.

4. This Article cannot serve as a basis for attaining objectives pertaining to the common foreign and security policy and any acts adopted pursuant to this Article shall respect the limits set out in Article 25b, second paragraph, of the Treaty on European Union.'

290) The following new Article 308a shall be inserted:

'Article 308a

Article 48(7) of the Treaty on European Union shall not apply to the following Articles:

- Article 269, third and fourth paragraphs,
- Article 270a(2), first subparagraph,
- Article 308, and
- Article 309.'

291) Article 309 shall be replaced by the following:

'Article 309

For the purposes of Article 7 of the Treaty on European Union on the suspension of certain rights resulting from Union membership, the member of the European Council or of the Council representing the Member State in question shall not take part in the vote and the Member State in question shall not be counted in the calculation of the one third or four fifths of Member States referred to in paragraphs 1 and 2 of that Article. Abstentions by members present in person or represented shall not prevent the adoption of decisions referred to in paragraph 2 of that Article.

For the adoption of the decisions referred to in paragraphs 3 and 4 of Article 7 of the Treaty on European Union, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3)(b) of this Treaty.

Where, following a decision to suspend voting rights adopted pursuant to paragraph 3 of Article 7 of the Treaty on European Union, the Council acts by a qualified majority on the basis of a provision of the Treaties, that qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3)(b) of this Treaty, or, where the Council acts on a proposal from the Commission or from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, in accordance with Article 205(3)(a).

For the purposes of Article 7 of the Treaty on European Union, the European Parliament shall act by a two-thirds majority of the votes cast, representing the majority of its component members.'

292) Article 310 shall become Article 188 M.

293) Article 311 shall be repealed. A new Article 311a shall be inserted, with the wording of Article 299(2), first subparagraph, and Article 299(3) to (6); the text shall be amended as follows:

- (a) the first subparagraph of paragraph 2 and paragraphs 3 to 6 shall be renumbered 1 to 5 and the following new introductory wording shall be inserted at the beginning of the Article:

‘In addition to the provisions of Article 49 C of the Treaty on European Union relating to the territorial scope of the Treaties, the following provisions shall apply:’;

- (b) at the beginning of the first subparagraph of paragraph 2, renumbered 1, the words ‘the French overseas departments,’ shall be replaced by ‘Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin’ and the words ‘in accordance with Article 299’ shall be added at the end;
- (c) in paragraph 3, renumbered 2, the words ‘of this Treaty’ shall be deleted;
- (d) in paragraph 6, renumbered 5, the introductory words ‘Notwithstanding the preceding paragraphs:’ shall be replaced by ‘Notwithstanding Article 49 C of the Treaty on European Union and paragraphs 1 to 4 of this Article:’;
- (e) the following new paragraph shall be added at the end of the Article:

‘6. The European Council may, on the initiative of the Member State concerned, adopt a decision amending the status, with regard to the Union, of a Danish, French or Netherlands country or territory referred to in paragraphs 1 and 2. The European Council shall act unanimously after consulting the Commission.’.

294) The heading ‘FINAL PROVISIONS’ before Article 313 shall be deleted.

295) The following Article 313a shall be inserted:

‘Article 313a

The provisions of Article 53 of the Treaty on European Union shall apply to this Treaty.’.

FINAL PROVISIONS

Article 3

This Treaty is concluded for an unlimited period.

Article 4

1. Protocol No 1 annexed to this Treaty contains the amendments to the Protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.
2. Protocol No 2 annexed to this Treaty contains the amendments to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

Article 5

1. The articles, sections, chapters, titles and parts of the Treaty on European Union and of the Treaty establishing the European Community, as amended by this Treaty, shall be renumbered in accordance with the tables of equivalences set out in the Annex to this Treaty, and which form an integral part of this Treaty.
2. The cross-references to the articles, sections, chapters, titles and parts of the Treaty on European Union and of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as between them, shall be adapted pursuant to paragraph 1 and the references to paragraphs of the said articles as renumbered or re-ordered by the provisions of this Treaty shall be adapted in accordance with those provisions.

References to the articles, sections, chapters, titles and parts of the Treaty on European Union and of the Treaty establishing the European Community contained in the other treaties and acts of primary legislation on which the Union is founded shall be adapted pursuant to paragraph 1 of this Article. References to recitals of the Treaty on European Union or to paragraphs or articles of the Treaty on European Union or of the Treaty establishing the European Community as renumbered or re-arranged by the provisions of this Treaty shall be adapted pursuant to this latter.

Such adaptations shall, where necessary, also apply in the event that the provision in question has been repealed.

3. The references to the recitals, articles, sections, chapters, titles and parts of the Treaty on European Union and of the Treaty establishing the European Community, as amended by this Treaty, contained in other instruments or acts shall be understood as referring to the recitals, articles, sections, chapters, titles and parts of those Treaties as renumbered pursuant to paragraph 1 and, respectively, to the paragraphs of the said articles, as renumbered or re-arranged by certain provisions of this Treaty.

Article 6

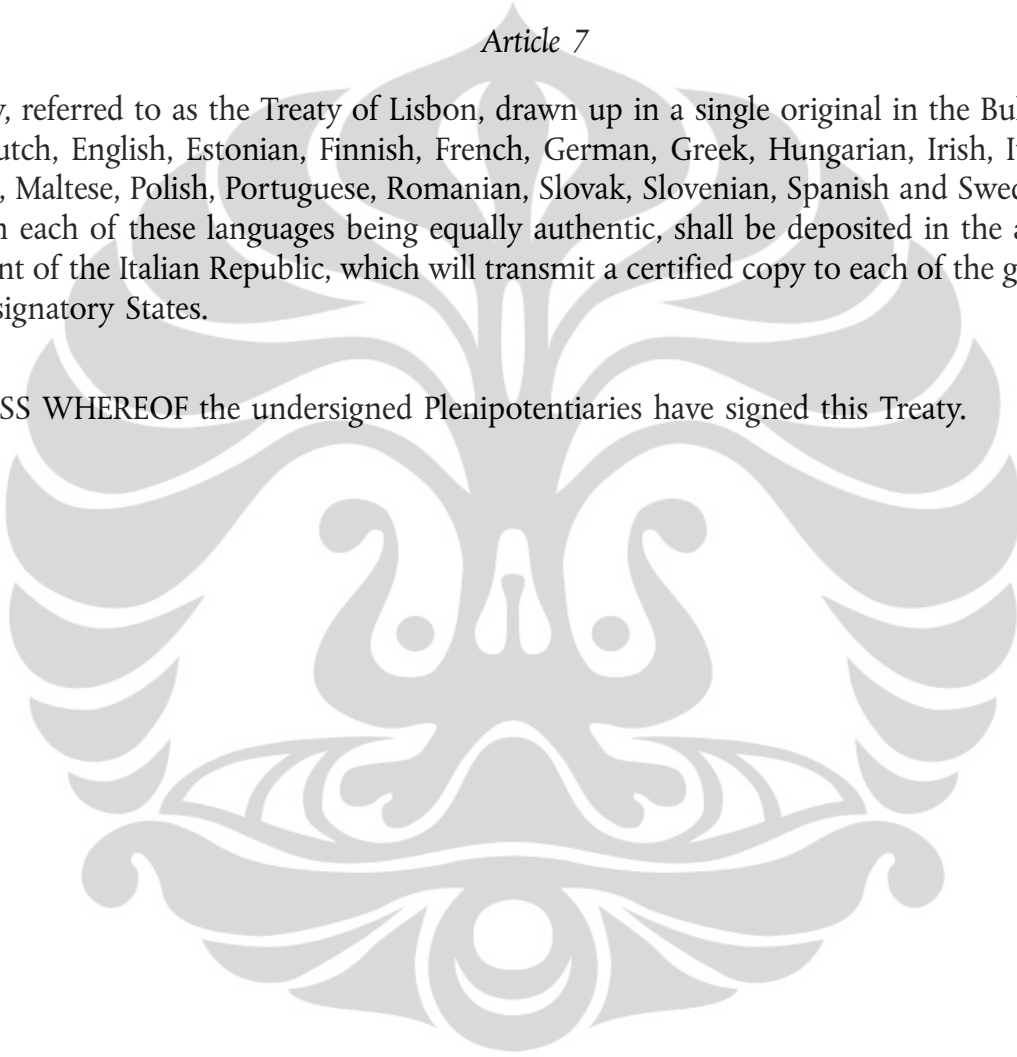
1. This Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Italian Republic.

2. This Treaty shall enter into force on 1 January 2009, provided that all the instruments of ratification have been deposited, or, failing that, on the first day of the month following the deposit of the instrument of ratification by the last signatory State to take this step.

Article 7

This Treaty, referred to as the Treaty of Lisbon, drawn up in a single original in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, the texts in each of these languages being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the Italian Republic, which will transmit a certified copy to each of the governments of the other signatory States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.



Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.

Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.

V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Kahe tuhanda seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.

Έγινε στη Λισσαβόνα, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.

Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.

Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.

Lisabonā, divtūkstoš septītā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio trylikta dieną.

Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.

Magħmul f'Lisbona, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgha.

Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.

V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícisedem.

V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Für Seine Majestät den König der Belgier

„Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»

„Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.“

За Правителството на Република България

Za prezidenta České republiky

Handwritten signature: Jiří Dienstbier

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Handwritten signature: Anders Fogh Rasmussen

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Handwritten signature: Frank-Walter Steinmeier

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Andrus Ansip
Urmasaia

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Bertie Ahern

Herzog Alois

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Karamanlis
Dimitris

Por Su Majestad el Rey de España

Japatero 777

Pour le Président de la République française

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Per il Presidente della Repubblica italiana

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā

Valdis Zatlers.
Igaunskā vārds: Valdis
Zatlers

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Valdas Adamkus.
Lietuvos vārds: Valdas
Adamkus

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Handwritten signature

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről



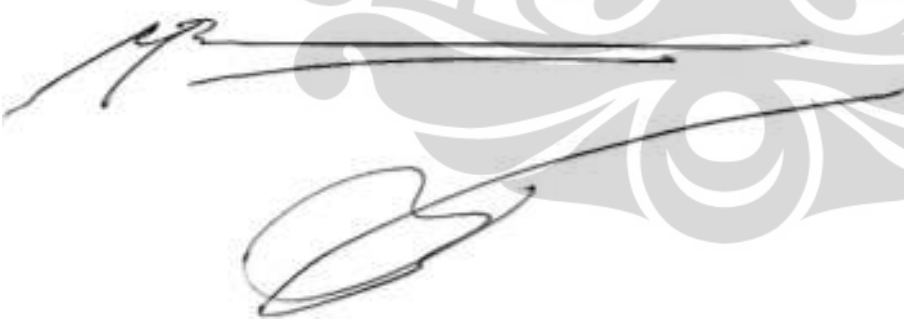
Árpád Göncz

Għall-President ta' Malta



Michael Frendo

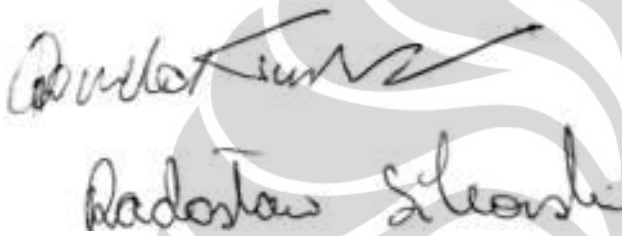
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden



Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich


Heinz Fischer

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Andrzej Duda

Pelo Presidente da República Portuguesa


Aníbal Cavaco Silva

Pentru Preşedintele României

Băilă Jianiceanu
Adrian Cioloş

Za predsednika Republike Slovenije

Primož
Grobner

Za prezidenta Slovenske republike

Kozelj
Janez Krstić

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

Matti Vanhanen

Sten Andersson

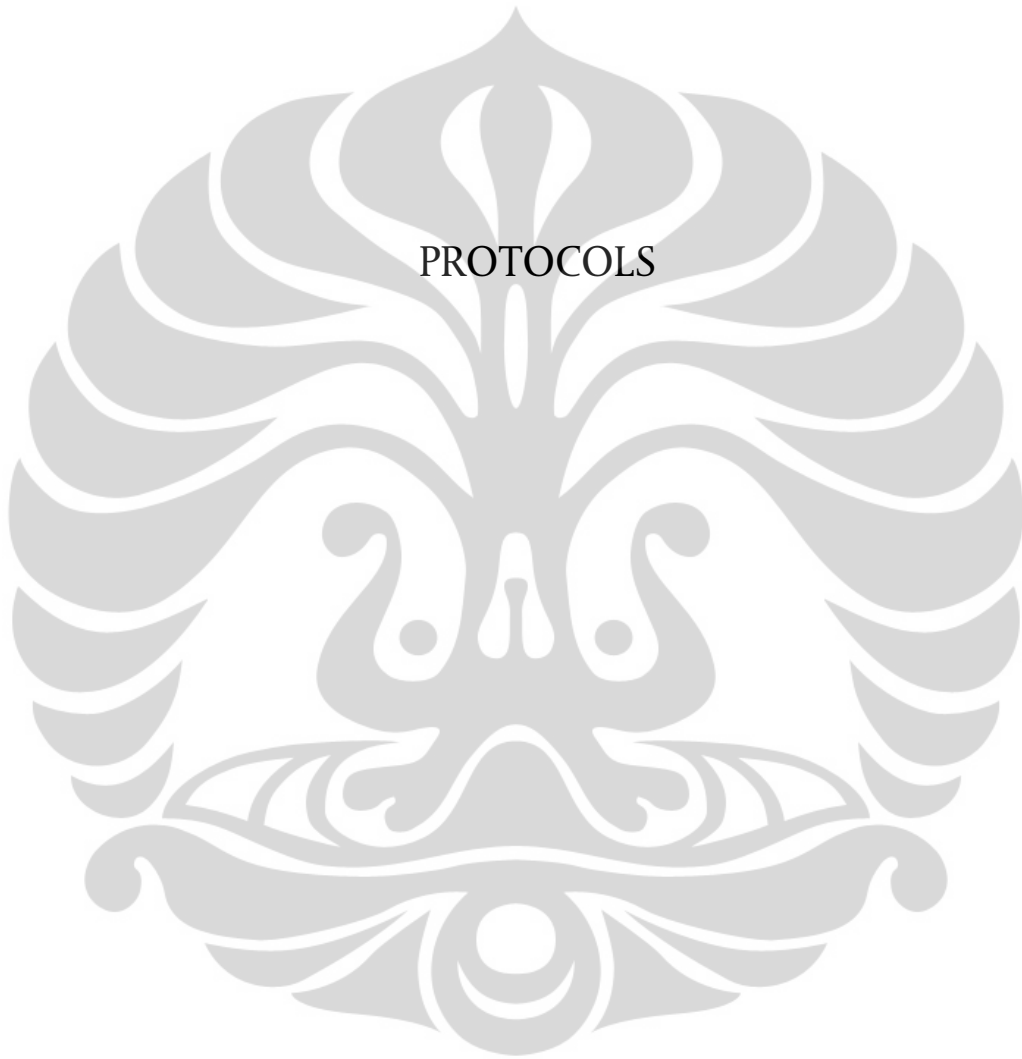
För Konungariket Sveriges regering

Cecilia Malmström

Cecilia Malmström

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Caroline Brown



A. PROTOCOLS TO BE ANNEXED TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION, TO THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION AND, WHERE APPLICABLE, TO THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY

PROTOCOL

ON THE ROLE OF NATIONAL PARLIAMENTS IN THE EUROPEAN UNION

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

RECALLING that the way in which national Parliaments scrutinise their governments in relation to the activities of the European Union is a matter for the particular constitutional organisation and practice of each Member State;

DESIRING to encourage greater involvement of national Parliaments in the activities of the European Union and to enhance their ability to express their views on draft legislative acts of the European Union as well as on other matters which may be of particular interest to them,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community:

TITLE I

INFORMATION FOR NATIONAL PARLIAMENTS

Article 1

Commission consultation documents (green and white papers and communications) shall be forwarded directly by the Commission to national Parliaments upon publication. The Commission shall also forward the annual legislative programme as well as any other instrument of legislative planning or policy to national Parliaments, at the same time as to the European Parliament and the Council.

Article 2

Draft legislative acts sent to the European Parliament and to the Council shall be forwarded to national Parliaments. For the purposes of this Protocol, 'draft legislative acts' shall mean proposals from the Commission, initiatives from a group of Member States, initiatives from the European Parliament, requests from the Court of Justice, recommendations from the European Central Bank and requests from the European Investment Bank for the adoption of a legislative act.

Draft legislative acts originating from the Commission shall be forwarded to national Parliaments directly by the Commission, at the same time as to the European Parliament and the Council.

Draft legislative acts originating from the European Parliament shall be forwarded to national Parliaments directly by the European Parliament.

Draft legislative acts originating from a group of Member States, the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank shall be forwarded to national Parliaments by the Council.

Article 3

National Parliaments may send to the Presidents of the European Parliament, the Council and the Commission a reasoned opinion on whether a draft legislative act complies with the principle of subsidiarity, in accordance with the procedure laid down in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality.

If the draft legislative act originates from a group of Member States, the President of the Council shall forward the reasoned opinion or opinions to the governments of those Member States.

If the draft legislative act originates from the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank, the President of the Council shall forward the reasoned opinion or opinions to the institution or body concerned.

Article 4

An eight-week period shall elapse between a draft legislative act being made available to national Parliaments in the official languages of the Union and the date when it is placed on a provisional agenda for the Council for its adoption or for adoption of a position under a legislative procedure. Exceptions shall be possible in cases of urgency, the reasons for which shall be stated in the act or position of the Council. Save in urgent cases for which due reasons have been given, no agreement may be reached on a draft legislative act during those eight weeks. Save in urgent cases for which due reasons have been given, a ten-day period shall elapse between the placing of a draft legislative act on the provisional agenda for the Council and the adoption of a position.

Article 5

The agendas for and the outcome of meetings of the Council, including the minutes of meetings where the Council is deliberating on draft legislative acts, shall be forwarded directly to national Parliaments, at the same time as to Member States' governments.

Article 6

When the European Council intends to make use of the first or second subparagraphs of Article 48(7) of the Treaty on European Union, national Parliaments shall be informed of the initiative of the European Council at least six months before any decision is adopted.

Article 7

The Court of Auditors shall forward its annual report to national Parliaments, for information, at the same time as to the European Parliament and to the Council.

Article 8

Where the national Parliamentary system is not unicameral, Articles 1 to 7 shall apply to the component chambers.

TITLE II

INTERPARLIAMENTARY COOPERATION

Article 9

The European Parliament and national Parliaments shall together determine the organisation and promotion of effective and regular interparliamentary cooperation within the Union.

Article 10

A conference of Parliamentary Committees for Union Affairs may submit any contribution it deems appropriate for the attention of the European Parliament, the Council and the Commission. That conference shall in addition promote the exchange of information and best practice between national Parliaments and the European Parliament, including their special committees. It may also organise interparliamentary conferences on specific topics, in particular to debate matters of common foreign and security policy, including common security and defence policy. Contributions from the conference shall not bind national Parliaments and shall not prejudice their positions.

PROTOCOL

**ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF SUBSIDIARITY
AND PROPORTIONALITY**

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

WISHING to ensure that decisions are taken as closely as possible to the citizens of the Union,

RESOLVED to establish the conditions for the application of the principles of subsidiarity and proportionality, as laid down in Article 3b of the Treaty on European Union, and to establish a system for monitoring the application of those principles,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

Each institution shall ensure constant respect for the principles of subsidiarity and proportionality, as laid down in Article 3b of the Treaty on European Union.

Article 2

Before proposing legislative acts, the Commission shall consult widely. Such consultations shall, where appropriate, take into account the regional and local dimension of the action envisaged. In cases of exceptional urgency, the Commission shall not conduct such consultations. It shall give reasons for its decision in its proposal.

Article 3

For the purposes of this Protocol, 'draft legislative acts' shall mean proposals from the Commission, initiatives from a group of Member States, initiatives from the European Parliament, requests from the Court of Justice, recommendations from the European Central Bank and requests from the European Investment Bank for the adoption of a legislative act.

Article 4

The Commission shall forward its draft legislative acts and its amended drafts to national Parliaments at the same time as to the Union legislator.

The European Parliament shall forward its draft legislative acts and its amended drafts to national Parliaments.

The Council shall forward draft legislative acts originating from a group of Member States, the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank and amended drafts to national Parliaments.

Upon adoption, legislative resolutions of the European Parliament and positions of the Council shall be forwarded by them to national Parliaments.

Article 5

Draft legislative acts shall be justified with regard to the principles of subsidiarity and proportionality. Any draft legislative act should contain a detailed statement making it possible to appraise compliance with the principles of subsidiarity and proportionality. This statement should contain some assessment of the proposal's financial impact and, in the case of a directive, of its implications for the rules to be put in place by Member States, including, where necessary, the regional legislation. The reasons for concluding that a Union objective can be better achieved at Union level shall be substantiated by qualitative and, wherever possible, quantitative indicators. Draft legislative acts shall take account of the need for any burden, whether financial or administrative, falling upon the Union, national governments, regional or local authorities, economic operators and citizens, to be minimised and commensurate with the objective to be achieved.

Article 6

Any national Parliament or any chamber of a national Parliament may, within eight weeks from the date of transmission of a draft legislative act, in the official languages of the Union, send to the Presidents of the European Parliament, the Council and the Commission a reasoned opinion stating why it considers that the draft in question does not comply with the principle of subsidiarity. It will be for each national Parliament or each chamber of a national Parliament to consult, where appropriate, regional parliaments with legislative powers.

If the draft legislative act originates from a group of Member States, the President of the Council shall forward the opinion to the governments of those Member States.

If the draft legislative act originates from the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank, the President of the Council shall forward the opinion to the institution or body concerned.

Article 7

1. The European Parliament, the Council and the Commission, and, where appropriate, the group of Member States, the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank, if the draft legislative act originates from them, shall take account of the reasoned opinions issued by national Parliaments or by a chamber of a national Parliament.

Each national Parliament shall have two votes, shared out on the basis of the national Parliamentary system. In the case of a bicameral Parliamentary system, each of the two chambers shall have one vote.

2. Where reasoned opinions on a draft legislative act's non-compliance with the principle of subsidiarity represent at least one third of all the votes allocated to the national Parliaments in accordance with the second subparagraph of paragraph 1, the draft must be reviewed. This threshold shall be a quarter in the case of a draft legislative act submitted on the basis of Article 61 I of the Treaty on the Functioning of the European Union on the area of freedom, security and justice.

After such review, the Commission or, where appropriate, the group of Member States, the European Parliament, the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank, if the draft legislative act originates from them, may decide to maintain, amend or withdraw the draft. Reasons must be given for this decision.

3. Furthermore, under the ordinary legislative procedure, where reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity represent at least a simple majority of the votes allocated to the national Parliaments in accordance with the second subparagraph of paragraph 1, the proposal must be reviewed. After such review, the Commission may decide to maintain, amend or withdraw the proposal.

If it chooses to maintain the proposal, the Commission will have, in a reasoned opinion, to justify why it considers that the proposal complies with the principle of subsidiarity. This reasoned opinion, as well as the reasoned opinions of the national Parliaments, will have to be submitted to the Union legislator, for consideration in the procedure:

- (a) before concluding the first reading, the legislator (the European Parliament and the Council) shall consider whether the legislative proposal is compatible with the principle of subsidiarity, taking particular account of the reasons expressed and shared by the majority of national Parliaments as well as the reasoned opinion of the Commission;
- (b) if, by a majority of 55 % of the members of the Council or a majority of the votes cast in the European Parliament, the legislator is of the opinion that the proposal is not compatible with the principle of subsidiarity, the legislative proposal shall not be given further consideration.

Article 8

The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in actions on grounds of infringement of the principle of subsidiarity by a legislative act, brought in accordance with the rules laid down in Article 230 of the Treaty on the Functioning of the European Union by Member States, or notified by them in accordance with their legal order on behalf of their national Parliament or a chamber thereof.

In accordance with the rules laid down in the said Article, the Committee of the Regions may also bring such actions against legislative acts for the adoption of which the Treaty on the Functioning of the European Union provides that it be consulted.

Article 9

The Commission shall submit each year to the European Council, the European Parliament, the Council and national Parliaments a report on the application of Article 3b of the Treaty on European Union. This annual report shall also be forwarded to the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

PROTOCOL
ON THE EURO GROUP

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to promote conditions for stronger economic growth in the European Union and, to that end, to develop ever-closer coordination of economic policies within the euro area,

CONSCIOUS of the need to lay down special provisions for enhanced dialogue between the Member States whose currency is the euro, pending the euro becoming the currency of all Member States of the Union,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The Ministers of the Member States whose currency is the euro shall meet informally. Such meetings shall take place, when necessary, to discuss questions related to the specific responsibilities they share with regard to the single currency. The Commission shall take part in the meetings. The European Central Bank shall be invited to take part in such meetings, which shall be prepared by the representatives of the Ministers with responsibility for finance of the Member States whose currency is the euro and of the Commission.

Article 2

The Ministers of the Member States whose currency is the euro shall elect a president for two and a half years, by a majority of those Member States.

PROTOCOL

**ON PERMANENT STRUCTURED COOPERATION ESTABLISHED
BY ARTICLE 28 A OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION**

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

HAVING REGARD TO Article 28 A(6) and Article 28 E of the Treaty on European Union,

RECALLING that the Union is pursuing a common foreign and security policy based on the achievement of growing convergence of action by Member States;

RECALLING that the common security and defence policy is an integral part of the common foreign and security policy; that it provides the Union with operational capacity drawing on civil and military assets; that the Union may use such assets in the tasks referred to in Article 28 B of the Treaty on European Union outside the Union for peace-keeping, conflict prevention and strengthening international security in accordance with the principles of the United Nations Charter; that the performance of these tasks is to be undertaken using capabilities provided by the Member States in accordance with the principle of a single set of forces;

RECALLING that the common security and defence policy of the Union does not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States;

RECALLING that the common security and defence policy of the Union respects the obligations under the North Atlantic Treaty of those Member States which see their common defence realised in the North Atlantic Treaty Organisation, which remains the foundation of the collective defence of its members, and is compatible with the common security and defence policy established within that framework;

CONVINCED that a more assertive Union role in security and defence matters will contribute to the vitality of a renewed Atlantic Alliance, in accordance with the Berlin Plus arrangements;

DETERMINED to ensure that the Union is capable of fully assuming its responsibilities within the international community;

RECOGNISING that the United Nations Organisation may request the Union's assistance for the urgent implementation of missions undertaken under Chapters VI and VII of the United Nations Charter;

RECOGNISING that the strengthening of the security and defence policy will require efforts by Member States in the area of capabilities;

CONSCIOUS that embarking on a new stage in the development of the European security and defence policy involves a determined effort by the Member States concerned;

RECALLING the importance of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy being fully involved in proceedings relating to permanent structured cooperation,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The permanent structured cooperation referred to in Article 28 A(6) of the Treaty on European Union shall be open to any Member State which undertakes, from the date of entry into force of the Treaty of Lisbon, to:

- (a) proceed more intensively to develop its defence capacities through the development of its national contributions and participation, where appropriate, in multinational forces, in the main European equipment programmes, and in the activity of the Agency in the field of defence capabilities development, research, acquisition and armaments (European Defence Agency), and
- (b) have the capacity to supply by 2010 at the latest, either at national level or as a component of multinational force groups, targeted combat units for the missions planned, structured at a tactical level as a battle group, with support elements including transport and logistics, capable of carrying out the tasks referred to in Article 28 B of the Treaty on European Union, within a period of 5 to 30 days, in particular in response to requests from the United Nations Organisation, and which can be sustained for an initial period of 30 days and be extended up to at least 120 days.

Article 2

To achieve the objectives laid down in Article 1, Member States participating in permanent structured cooperation shall undertake to:

- (a) cooperate, as from the entry into force of the Treaty of Lisbon, with a view to achieving approved objectives concerning the level of investment expenditure on defence equipment, and regularly review these objectives, in the light of the security environment and of the Union's international responsibilities;

- (b) bring their defence apparatus into line with each other as far as possible, particularly by harmonising the identification of their military needs, by pooling and, where appropriate, specialising their defence means and capabilities, and by encouraging cooperation in the fields of training and logistics;
- (c) take concrete measures to enhance the availability, interoperability, flexibility and deployability of their forces, in particular by identifying common objectives regarding the commitment of forces, including possibly reviewing their national decision-making procedures;
- (d) work together to ensure that they take the necessary measures to make good, including through multinational approaches, and without prejudice to undertakings in this regard within the North Atlantic Treaty Organisation, the shortfalls perceived in the framework of the 'Capability Development Mechanism';
- (e) take part, where appropriate, in the development of major joint or European equipment programmes in the framework of the European Defence Agency.

Article 3

The European Defence Agency shall contribute to the regular assessment of participating Member States' contributions with regard to capabilities, in particular contributions made in accordance with the criteria to be established, *inter alia*, on the basis of Article 2, and shall report thereon at least once a year. The assessment may serve as a basis for Council recommendations and decisions adopted in accordance with Article 28 E of the Treaty on European Union.

PROTOCOL

RELATING TO ARTICLE 6(2) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE ACCESSION OF THE UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the 'European Convention') provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:

- (a) the specific arrangements for the Union's possible participation in the control bodies of the European Convention;
- (b) the mechanisms necessary to ensure that proceedings by non-Member States and individual applications are correctly addressed to Member States and/or the Union as appropriate.

Article 2

The agreement referred to in Article 1 shall ensure that accession of the Union shall not affect the competences of the Union or the powers of its institutions. It shall ensure that nothing therein affects the situation of Member States in relation to the European Convention, in particular in relation to the Protocols thereto, measures taken by Member States derogating from the European Convention in accordance with Article 15 thereof and reservations to the European Convention made by Member States in accordance with Article 57 thereof.

Article 3

Nothing in the agreement referred to in Article 1 shall affect Article 292 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

**PROTOCOL
ON THE INTERNAL MARKET AND COMPETITION**

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

CONSIDERING that the internal market as set out in Article 2 of the Treaty on European Union includes a system ensuring that competition is not distorted,

HAVE AGREED that:

to this end, the Union shall, if necessary, take action under the provisions of the Treaties, including under Article 308 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

This protocol shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union.

**PROTOCOL
ON THE APPLICATION OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL
RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION TO POLAND AND TO THE
UNITED KINGDOM**

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

WHEREAS in Article 6 of the Treaty on European Union, the Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union;

WHEREAS the Charter is to be applied in strict accordance with the provisions of the aforementioned Article 6 and Title VII of the Charter itself;

WHEREAS the aforementioned Article 6 requires the Charter to be applied and interpreted by the courts of Poland and of the United Kingdom strictly in accordance with the explanations referred to in that Article;

WHEREAS the Charter contains both rights and principles;

WHEREAS the Charter contains both provisions which are civil and political in character and those which are economic and social in character;

WHEREAS the Charter reaffirms the rights, freedoms and principles recognised in the Union and makes those rights more visible, but does not create new rights or principles;

RECALLING the obligations devolving upon Poland and the United Kingdom under the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union, and Union law generally;

NOTING the wish of Poland and the United Kingdom to clarify certain aspects of the application of the Charter;

DESIROUS therefore of clarifying the application of the Charter in relation to the laws and administrative action of Poland and of the United Kingdom and of its justiciability within Poland and within the United Kingdom;

REAFFIRMING that references in this Protocol to the operation of specific provisions of the Charter are strictly without prejudice to the operation of other provisions of the Charter;

REAFFIRMING that this Protocol is without prejudice to the application of the Charter to other Member States;

REAFFIRMING that this Protocol is without prejudice to other obligations devolving upon Poland and the United Kingdom under the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union, and Union law generally,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

1. The Charter does not extend the ability of the Court of Justice of the European Union, or any court or tribunal of Poland or of the United Kingdom, to find that the laws, regulations or administrative provisions, practices or action of Poland or of the United Kingdom are inconsistent with the fundamental rights, freedoms and principles that it reaffirms.

2. In particular, and for the avoidance of doubt, nothing in Title IV of the Charter creates justiciable rights applicable to Poland or the United Kingdom except in so far as Poland or the United Kingdom has provided for such rights in its national law.

Article 2

To the extent that a provision of the Charter refers to national laws and practices, it shall only apply to Poland or the United Kingdom to the extent that the rights or principles that it contains are recognised in the law or practices of Poland or of the United Kingdom.

PROTOCOL
ON THE EXERCISE OF SHARED COMPETENCE

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Sole Article

With reference to Article 2 A of the Treaty on the Functioning of the European Union on shared competence, when the Union has taken action in a certain area, the scope of this exercise of competence only covers those elements governed by the Union act in question and therefore does not cover the whole area.

PROTOCOL
ON SERVICES OF GENERAL INTEREST

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

WISHING to emphasise the importance of services of general interest,

HAVE AGREED UPON the following interpretative provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The shared values of the Union in respect of services of general economic interest within the meaning of Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union include in particular:

- the essential role and the wide discretion of national, regional and local authorities in providing, commissioning and organising services of general economic interest as closely as possible to the needs of the users;
- the diversity between various services of general economic interest and the differences in the needs and preferences of users that may result from different geographical, social or cultural situations;
- a high level of quality, safety and affordability, equal treatment and the promotion of universal access and of user rights.

Article 2

The provisions of the Treaties do not affect in any way the competence of Member States to provide, commission and organise non-economic services of general interest.

PROTOCOL**ON THE DECISION OF THE COUNCIL RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 9C(4) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND ARTICLE 205(2) OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION BETWEEN 1 NOVEMBER 2014 AND 31 MARCH 2017 ON THE ONE HAND, AND AS FROM 1 APRIL 2017 ON THE OTHER**

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

TAKING INTO ACCOUNT the fundamental importance that agreeing on the Decision of the Council relating to the implementation of Article 9 C(4) of the Treaty on European Union and Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union between 1 November 2014 and 31 March 2017 on the one hand, and as from 1 April 2017 on the other (hereinafter 'the Decision'), had when approving the Treaty of Lisbon,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Sole Article

Before the examination by the Council of any draft which would aim either at amending or abrogating the Decision or any of its provisions, or at modifying indirectly its scope or its meaning through the modification of another legal act of the Union, the European Council shall hold a preliminary deliberation on the said draft, acting by consensus in accordance with Article 9 B(4) of the Treaty on European Union.

PROTOCOL**ON TRANSITIONAL PROVISIONS**

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

WHEREAS, in order to organise the transition from the institutional provisions of the Treaties applicable prior to the entry into force of the Treaty of Lisbon to the provisions contained in that Treaty, it is necessary to lay down transitional provisions,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community:

Article 1

In this Protocol, the words 'the Treaties' shall mean the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

TITLE I

PROVISIONS CONCERNING THE EUROPEAN PARLIAMENT

Article 2

In accordance with the second subparagraph of Article 9 A(2) of the Treaty on European Union, the European Council shall adopt a decision determining the composition of the European Parliament in good time before the 2009 European Parliament elections.

Until the end of the 2004-2009 parliamentary term, the composition and the number of representatives elected to the European Parliament shall remain the same as on the date of the entry into force of the Treaty of Lisbon.

TITLE II

PROVISIONS CONCERNING THE QUALIFIED MAJORITY

Article 3

1. In accordance with Article 9 C(4) of the Treaty on European Union, the provisions of that paragraph and of Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union relating to the definition of the qualified majority in the European Council and the Council shall take effect on 1 November 2014.

2. Between 1 November 2014 and 31 March 2017, when an act is to be adopted by qualified majority, a member of the Council may request that it be adopted in accordance with the qualified majority as defined in paragraph 3. In that case, paragraphs 3 and 4 shall apply.

3. Until 31 October 2014, the following provisions shall remain in force, without prejudice to the second subparagraph of Article 201a(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

For acts of the European Council and of the Council requiring a qualified majority, members' votes shall be weighted as follows:

Belgium	12	Greece	12
Bulgaria	10	Spain	27
Czech Republic	12	France	29
Denmark	7	Italy	29
Germany	29	Cyprus	4
Estonia	4	Latvia	4
Ireland	7	Lithuania	7

Luxembourg	4	Romania	14
Hungary	12	Slovenia	4
Malta	3	Slovakia	7
Netherlands	13	Finland	7
Austria	10	Sweden	10
Poland	27	United Kingdom	29
Portugal	12		

Acts shall be adopted if there are at least 255 votes in favour representing a majority of the members where, under the Treaties, they must be adopted on a proposal from the Commission. In other cases decisions shall be adopted if there are at least 255 votes in favour representing at least two thirds of the members.

A member of the European Council or the Council may request that, where an act is adopted by the European Council or the Council by a qualified majority, a check is made to ensure that the Member States comprising the qualified majority represent at least 62 % of the total population of the Union. If that proves not to be the case, the act shall not be adopted.

4. Until 31 October 2014, the qualified majority shall, in cases where, under the Treaties, not all the members of the Council participate in voting, namely in the cases where reference is made to the qualified majority as defined in Article 205(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, be defined as the same proportion of the weighted votes and the same proportion of the number of the Council members and, if appropriate, the same percentage of the population of the Member States concerned as laid down in paragraph 3 of this Article.

TITLE III

PROVISIONS CONCERNING THE CONFIGURATIONS OF THE COUNCIL

Article 4

Until the entry into force of the decision referred to in the first subparagraph of Article 9 C(6) of the Treaty on European Union, the Council may meet in the configurations laid down in the second and third subparagraphs of that paragraph and in the other configurations on the list established by a decision of the General Affairs Council, acting by a simple majority.

TITLE IV

PROVISIONS CONCERNING THE COMMISSION, INCLUDING THE HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY

Article 5

The members of the Commission in office on the date of entry into force of the Treaty of Lisbon shall remain in office until the end of their term of office. However, on the day of the appointment of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the term of office of the member having the same nationality as the High Representative shall end.

TITLE V

PROVISIONS CONCERNING THE SECRETARY-GENERAL OF THE COUNCIL, HIGH REPRESENTATIVE FOR THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY, AND THE DEPUTY SECRETARY-GENERAL OF THE COUNCIL

Article 6

The terms of office of the Secretary-General of the Council, High Representative for the common foreign and security policy, and the Deputy Secretary-General of the Council shall end on the date of entry into force of the Treaty of Lisbon. The Council shall appoint a Secretary-General in conformity with Article 207(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

TITLE VI

PROVISIONS CONCERNING ADVISORY BODIES

Article 7

Until entry into force of the decision referred to in Article 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the allocation of members of the Economic and Social Committee shall be as follows:

Belgium	12	Luxembourg	6
Bulgaria	12	Hungary	12
Czech Republic	12	Malta	5
Denmark	9	Netherlands	12
Germany	24	Austria	12
Estonia	7	Poland	21
Ireland	9	Portugal	12
Greece	12	Romania	15
Spain	21	Slovenia	7
France	24	Slovakia	9
Italy	24	Finland	9
Cyprus	6	Sweden	12
Latvia	7	United Kingdom	24
Lithuania	9		

Article 8

Until entry into force of the decision referred to in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the allocation of members of the Committee of the Regions shall be as follows:

Belgium	12	Estonia	7
Bulgaria	12	Ireland	9
Czech Republic	12	Greece	12
Denmark	9	Spain	21
Germany	24	France	24

Italy	24	Poland	21
Cyprus	6	Portugal	12
Latvia	7	Romania	15
Lithuania	9	Slovenia	7
Luxembourg	6	Slovakia	9
Hungary	12	Finland	9
Malta	5	Sweden	12
Netherlands	12	United Kingdom	24
Austria	12		

TITLE VII

TRANSITIONAL PROVISIONS CONCERNING ACTS ADOPTED ON THE BASIS OF TITLES V AND VI OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION PRIOR TO THE ENTRY INTO FORCE OF THE TREATY OF LISBON

Article 9

The legal effects of the acts of the institutions, bodies, offices and agencies of the Union adopted on the basis of the Treaty on European Union prior to the entry into force of the Treaty of Lisbon shall be preserved until those acts are repealed, annulled or amended in implementation of the Treaties. The same shall apply to agreements concluded between Member States on the basis of the Treaty on European Union.

Article 10

1. As a transitional measure, and with respect to acts of the Union in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters which have been adopted before the entry into force of the Treaty of Lisbon, the powers of the institutions shall be the following at the date of entry into force of that Treaty: the powers of the Commission under Article 226 of the Treaty on the Functioning of the European Union shall not be applicable and the powers of the Court of Justice of the European Union under Title VI of the Treaty on European Union, in the version in force before the entry into force of the Treaty of Lisbon, shall remain the same, including where they have been accepted under Article 35(2) of the said Treaty on European Union.

2. The amendment of an act referred to in paragraph 1 shall entail the applicability of the powers of the institutions referred to in that paragraph as set out in the Treaties with respect to the amended act for those Member States to which that amended act shall apply.

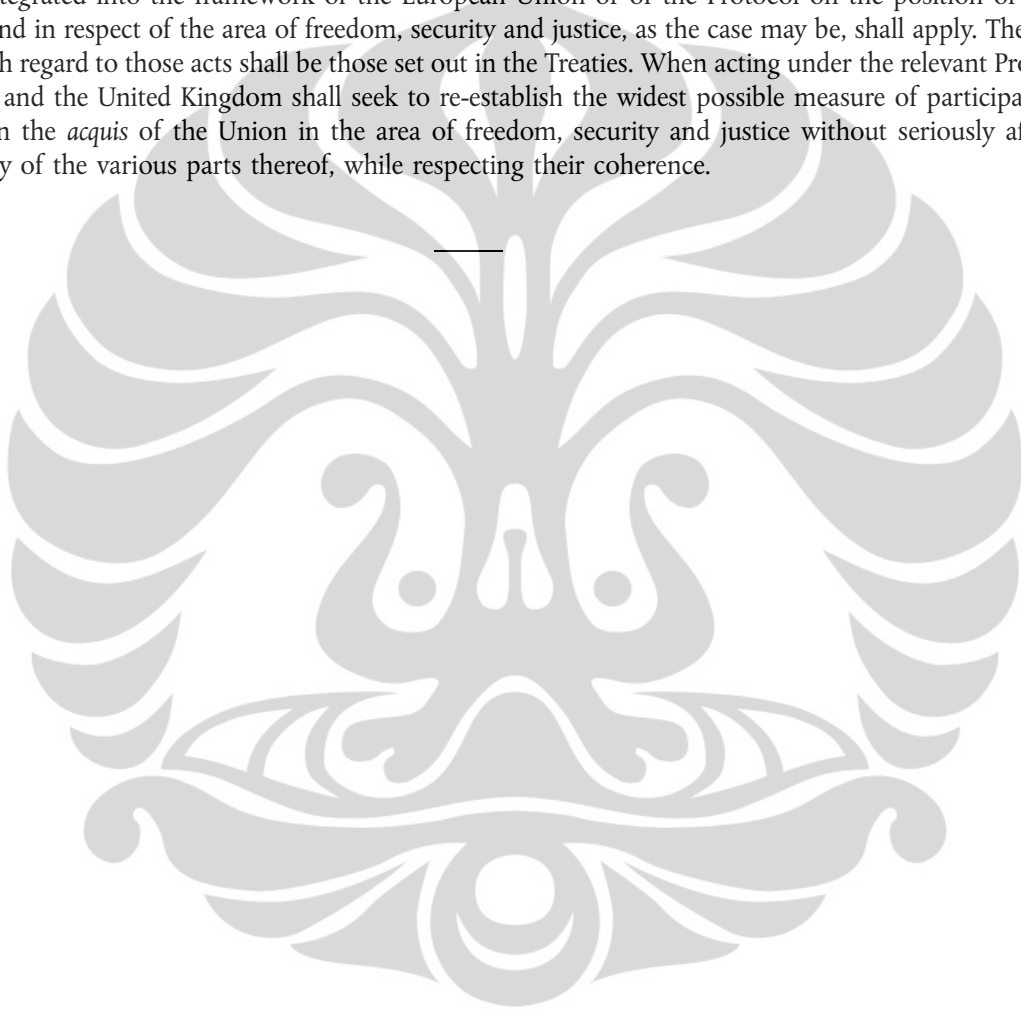
3. In any case, the transitional measure mentioned in paragraph 1 shall cease to have effect five years after the date of entry into force of the Treaty of Lisbon.

4. At the latest six months before the expiry of the transitional period referred to in paragraph 3, the United Kingdom may notify to the Council that it does not accept, with respect to the acts referred to in paragraph 1, the powers of the institutions referred to in paragraph 1 as set out in the Treaties. In case the United Kingdom has made that notification, all acts referred to in paragraph 1 shall cease to apply to it as from the date of expiry of the transitional period referred to in paragraph 3. This subparagraph shall not apply with respect to the amended acts which are applicable to the United Kingdom as referred to in paragraph 2.

The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, shall determine the necessary consequential and transitional arrangements. The United Kingdom shall not participate in the adoption of this decision. A qualified majority of the Council shall be defined in accordance with Article 205(3)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may also adopt a decision determining that the United Kingdom shall bear the direct financial consequences, if any, necessarily and unavoidably incurred as a result of the cessation of its participation in those acts.

5. The United Kingdom may, at any time afterwards, notify the Council of its wish to participate in acts which have ceased to apply to it pursuant to paragraph 4, first subparagraph. In that case, the relevant provisions of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union or of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice, as the case may be, shall apply. The powers of the institutions with regard to those acts shall be those set out in the Treaties. When acting under the relevant Protocols, the Union institutions and the United Kingdom shall seek to re-establish the widest possible measure of participation of the United Kingdom in the *acquis* of the Union in the area of freedom, security and justice without seriously affecting the practical operability of the various parts thereof, while respecting their coherence.



B. PROTOCOLS TO BE ANNEX ED TO THE TREATY OF LISBON

PROTOCOL No 1

AMENDING THE PROTOCOLS ANNEX ED TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION, TO THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY AND/OR TO THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to amend the Protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, in order to adapt them to the new rules laid down by the Treaty of Lisbon,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty of Lisbon:

Article 1

- 1) The protocols in force on the date of entry into force of this Treaty and annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community shall be amended in accordance with the provisions of this Article.

A. HORIZONTAL AMENDMENTS

- 2) The horizontal amendments laid down in Article 2(2) of the Treaty of Lisbon shall apply to the Protocols referred to in this Article, with the exception of points (d), (e) and (j). Where point 5(a) or point 12(a) below specifically provides otherwise, the horizontal amendment laid down in Article 2(3)(b) of that Treaty shall not apply to the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank or to the Protocol on the Statute of the European Investment Bank, respectively.
- 3) In the Protocols referred to in point 1 of this Article:
 - (a) the last paragraph of their respective preambles, referring to the Treaty or Treaties to which the Protocol in question is annexed, shall be replaced by 'HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union'. This subparagraph shall apply neither to the Protocol on economic and social cohesion nor to the Protocol on the system of public broadcasting in the Member States.

The Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union, the Protocol on the location of the seats of the institutions and of certain bodies, offices, agencies and departments of the European Union, the Protocol on Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland and the Protocol on the privileges and immunities of the European Union shall also be annexed to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community;

- (b) the word 'Communities' shall be replaced by 'Union' and any necessary grammatical changes shall be made.

- 4) In the following Protocols, the words 'the Treaty' and 'this Treaty' shall be replaced by 'the Treaties' and 'these Treaties' respectively, and references to the Treaty on European Union and/or to the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to the Treaties, and any necessary grammatical changes shall be made:
- (a) Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union:
 - Article 1 (including the references to the EU and EC Treaty, respectively);
 - (b) Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank:
 - Article 1.1, new second subparagraph;
 - Article 12.1, first subparagraph;
 - Article 14.1 (second instance);
 - Article 14.2, second subparagraph;
 - Article 34.1, second indent;
 - Article 35.1;
 - (c) Protocol on the excessive deficit procedure:
 - Article 3, second sentence;
 - (d) Protocol on certain provisions relating to Denmark:
 - point 2, renumbered 1, second sentence;
 - (e) Protocol integrating the Schengen *acquis* into the framework of the European Union:
 - sixth, renumbered fifth, recital;
 - Article 1;
 - (f) Protocol on asylum for nationals of Member States of the European Union:
 - sixth, renumbered seventh recital;
 - (g) Protocol on the acquisition of property in Denmark:
 - sole provision;
 - (h) Protocol on the system of public broadcasting in the Member States:
 - sole provision;
 - (i) Protocol on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel:
 - Article 3.

- 5) In the following Protocols and Annexes, references to 'this Treaty' and 'the Treaty' shall be replaced by references to 'the Treaty on the Functioning of the European Union':
- (a) Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank:
- | | |
|--|--|
| — Article 2 | — Article 25 |
| — Article 3 | — Article 27 |
| — Article 4 | — Article 34.1 (first instance) |
| — Article 6.3 | — Article 35 |
| — Article 7 | — Article 41.1 |
| — Article 9.2 | — Article 42 (renumbered 41) |
| — Article 9.3 | — Article 43 (renumbered 42) |
| — Article 11 | — Article 44 (renumbered 43) second subparagraph |
| — Article 14.1 (first instance of 'This Treaty') | — Article 45 (renumbered 44) |
| — Article 15 | — Article 47 (renumbered 46) |
| — Article 16 | |
| — Article 21 | |
- (b) Protocol on the excessive deficit procedure:
- Article 1, introductory phrase;
- (c) Protocol on the convergence criteria referred to in Article 121 of the Treaty establishing the European Community:
- sole recital
 - Article 1, first sentence;
- (d) Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
- paragraph 6, renumbered 5, second subparagraph;
 - paragraph 9, renumbered 8, introductory phrase;
 - paragraph 10, renumbered 9, second sentence of (a);
 - paragraph 11, renumbered 10;
- (e) Protocol on economic and social cohesion:
- fifteenth, renumbered eleventh, recital
- (f) Annexes I and II:
- titles of both Annexes.

- 6) In the following Protocols, the words 'of this Treaty' shall be replaced by 'of the said Treaty':
- (a) *(Does not apply to the English version.);*
 - (b) Protocol on the excessive deficit procedure:
 - Article 2, introductory phrase;
 - (c) Protocol on the convergence criteria referred to in Article 121 of the Treaty establishing the European Community:
 - Article 2;
 - Article 3;
 - Article 4, first sentence;
 - Article 6;
 - (d) Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
 - paragraph 7, renumbered 6, second subparagraph;
 - paragraph 10, renumbered 9, point (c).
- 7) In the following Protocols, the words 'acting by a simple majority' shall be inserted after 'the Council':
- (a) Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union:
 - Article 4, second paragraph;
 - Article 13, second paragraph;
 - (b) Protocol on the privileges and immunities of the European Communities:
 - Article 7, renumbered 6, paragraph 1, first subparagraph, first sentence.
- 8) In the following Protocols, the words 'Court of Justice of the European Communities', 'Court of Justice' or 'Court' shall be replaced by 'Court of Justice of the European Union':
- (a) Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union:
 - Article 1; — Article 1 of the Annex;
 - Article 3, fourth paragraph;

- (b) Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank:
 - Article 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 and 35.6;
 - Article 36.2;
- (c) Protocol on the location of the seats of the institutions and of certain bodies and departments of the European Communities and of Europol:
 - Sole Article, point (d);
- (d) Protocol on the privileges and immunities of the European Communities:
 - Article 12, renumbered 11, point (a);
 - Article 21, renumbered 20, first occurrence;
- (e) Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland:
 - Article 2;
- (f) Protocol on asylum for nationals of Member States of the European Union:
 - second, renumbered third, recital.

B. SPECIFIC AMENDMENTS

PROTOCOLS REPEALED

- 9) The following Protocols shall be repealed:
- (a) Protocol on Italy (1957);
 - (b) Protocol on goods originating in and coming from certain countries and enjoying special treatment when imported into a Member State (1957);
 - (c) Protocol on the Statute of the European Monetary Institute (1992);
 - (d) Protocol on the transition to the third stage of economic and monetary union (1992);
 - (e) Protocol on Portugal (1992);
 - (f) Protocol on the role of national parliaments in the European Union (1997), which shall be replaced by a new Protocol with the same title;
 - (g) Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality (1997), which shall be replaced by a new Protocol with the same title;
 - (h) Protocol on protection and welfare of animals (1997), the text of which shall become Article 6b of the Treaty on the Functioning of the European Union;
 - (i) Protocol on the enlargement of the European Union (2001);
 - (j) Protocol on Article 67 of the Treaty establishing the European Community (2001).

STATUTE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

10) The Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union shall be amended as follows:

- (a) in the preamble, first recital, the reference to the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the Functioning of the European Union. In the rest of the Protocol, the words 'of the EC Treaty' shall be replaced by 'of the Treaty on the Functioning of the European Union'; throughout the Protocol, references to articles of the EAEC Treaty which are repealed by Protocol No 2 annexed to this Treaty shall be deleted and necessary grammatical changes shall be made;
- (b) in the following Articles, the word 'Court', where it refers specifically to the Court of Justice, shall be replaced by 'Court of Justice':
- Article 3, second paragraph, beginning of the sentence;
 - Article 4, fourth paragraph
 - Article 5, second paragraph;
 - Article 6, first paragraph;
 - Articles 10, 11, 12 and 14;
 - Article 13, first paragraph, first instance
 - Article 15, first sentence;
 - Article 16, first paragraph;
 - Article 17, first paragraph;
 - Article 18, third paragraph;
 - Article 19, first paragraph;
 - Article 20, first paragraph;
 - Article 21, first paragraph;
 - Article 22, first paragraph;
 - Article 23, first paragraph;
 - Article 24, first paragraph, beginning of the sentence;
 - Articles 25 and 27;
 - Article 29, first paragraph;
 - Articles 30 to 32, 35, 38, 41 and 43;
 - Article 39, first paragraph
 - Article 40, first paragraph
 - Article 44, first paragraph, first instance;
 - Article 46, first paragraph;
 - Article 52: does not apply to the English version;
 - Article 54: does not apply to the English version;
 - Article 56: does not apply to the English version;
 - Article 57: does not apply to the English version;
 - Article 58: does not apply to the English version;
 - Article 59: does not apply to the English version;
 - Article 60: does not apply to the English version;
 - Article 61: does not apply to the English version;
 - Article 62: does not apply to the English version;
 - Article 62a: does not apply to the English version;
 - Article 62b: does not apply to the English version;
 - Article 63: does not apply to the English version;
 - Article 64: does not apply to the English version;
 - Article 3(2) of the Annex, second sentence;
 - Article 6(1) of the Annex: does not apply to the English version;
 - Article 8(1) of the Annex: does not apply to the English version;

- (c) in Article 2, the words 'in open court' shall be replaced by 'before the Court of Justice sitting in open court';
- (d) in Article 3, second paragraph, and Article 4, fourth paragraph, the following sentence shall be added: 'If the decision concerns a member of the General Court or of a specialised court, the Court shall decide after consulting the court concerned.';
- (e) in Article 6, first paragraph, the following sentence shall be added: 'If the person concerned is a member of the General Court or of a specialised court, the Court shall decide after consulting the court concerned.';
- (f) in the heading of Title II, the words 'of the Court of Justice' shall be added;
- (g) in Article 13, first paragraph, first sentence, the words 'On a proposal from' shall be replaced by 'At the request of', and the words 'the Council may, acting unanimously, provide for' shall be replaced by 'the European Parliament and the Council may, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, provide for';
- (h) in the heading of Title III, the words 'before the Court of Justice' shall be added;
- (i) Article 23 shall be amended as follows:
 - (i) in the first paragraph, first, sentence, the words 'by Article 35(1) of the EU Treaty,' shall be deleted. In the second sentence, the words 'and also to the Council or to the European Central Bank if the act the validity or interpretation of which is in dispute originates from one of them, and to the European Parliament and the Council if the act the validity or interpretation of which is in dispute was adopted jointly by those two institutions' shall be replaced by 'and to the institution, body, office or agency of the Union which adopted the act the validity or interpretation of which is in dispute';
 - (ii) in the second paragraph, the words 'and, where appropriate, the European Parliament, the Council and the European Central Bank, shall be entitled' shall be replaced by 'and, where appropriate, the institution, body, office or agency which adopted the act the validity or interpretation of which is in dispute, shall be entitled';
- (j) in Article 24, second paragraph, the words ', bodies, offices and agencies' shall be inserted after 'institutions';
- (k) in Article 40 the second paragraph shall be replaced by the following:

'The same right shall be open to the bodies, offices and agencies of the Union and to any other person which can establish an interest in the result of a case submitted to the Court of Justice. Natural or legal persons shall not intervene in cases between Member States, between institutions of the Union or between Member States and institutions of the Union.';
- (l) in Article 42, the words ', bodies, offices and agencies' shall be inserted after 'institutions';
- (m) in Article 46, the following new paragraph shall be added: 'This Article shall also apply to proceedings against the European Central Bank regarding non-contractual liability.';
- (n) the heading of Title IV shall be replaced by 'GENERAL COURT';
- (o) in Article 47, the first paragraph shall be replaced by 'The first paragraph of Article 9, Articles 14 and 15, the first, second, fourth and fifth paragraphs of Article 17 and Article 18 shall apply to the General Court and its members.';
- (p) in Article 51, first paragraph, in the third indent of point (a), the reference to the third indent of Article 202 shall be replaced by a reference to the second paragraph of Article 249 , and the reference in point (b) to Article 11a shall be replaced by a reference to the first paragraph of Article 280 F. In the second paragraph, the words 'or by the European Central Bank' shall be deleted;

- (q) Article 64 shall be amended as follows:
- (i) the following new first paragraph shall be inserted:
- ‘The rules governing the language arrangements applicable at the Court of Justice of the European Union shall be laid down by a regulation of the Council acting unanimously. This regulation shall be adopted either at the request of the Court of Justice and after consultation of the Commission and the European Parliament, or on a proposal from the Commission and after consultation of the Court of Justice and of the European Parliament.’;
- (ii) in the first sentence of the first paragraph which shall become the second paragraph, the words ‘Until the rules governing the language arrangements applicable at the Court of Justice and the Court of First Instance have been adopted in this Statute’ shall be replaced by ‘Until those rules have been adopted’; the second sentence shall be replaced by the following: ‘By way of derogation from Articles 223 and 224 of the Treaty on the Functioning of the European Union, those provisions may only be amended or repealed with the unanimous consent of the Council.’;
- (r) in Annex I to the Protocol, Article 3(1), second sentence, the words ‘Civil Service’ shall be inserted before ‘Tribunal’; in paragraphs 2 and 3, the words ‘by a qualified majority’ shall be deleted;
- (s) *(Does not apply to the English version.)*.

STATUTE OF THE ESCB AND OF THE ECB

- 11) The Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank shall be amended as follows:
- (a) in the preamble, first recital, the reference to Article 8 of the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to the second paragraph of Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union;
- (b) The title of Chapter I shall be replaced by the following: ‘THE EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS’;
- (c) Article 1.1 shall be split at the semi-colon into two unnumbered subparagraphs. The first subparagraph shall be replaced by the following: ‘In accordance with Article 245a(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the European Central Bank (ECB) and the national central banks shall constitute the European System of Central Banks (ESCB). The ECB and the national central banks of those Member States whose currency is the euro shall constitute the Eurosystem.’; at the beginning of the second subparagraph, the words ‘they shall perform’ shall be replaced by ‘The ESCB and the ECB shall perform’;
- (d) Article 1.2 shall be deleted;
- (e) in Article 2, the words ‘In accordance with Article 105(1) of this Treaty’ shall be replaced by ‘In accordance with Article 105(1) and Article 245a(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union’;
- (f) in the second indent of Article 3.1, the words ‘Article 111 of this Treaty’ shall be replaced by ‘Article 188 O of that Treaty’;
- (g) in Article 4, point (b), the word ‘appropriate’ shall be deleted;
- (h) at the beginning of Article 9.1, the words ‘in accordance with Article 107(2) of this Treaty’ shall be replaced by ‘in accordance with Article 245a(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union’;
- (i) Article 10 shall be amended as follows:
- (i) in Article 10.1, the words ‘of the Member States whose currency is the euro’ shall be inserted at the end;

- (ii) in Article 10.2, first indent, at the end of the first sentence, the words 'Member States which have adopted the euro' shall be replaced by 'Member States whose currency is the euro'; at the end of the third subparagraph, the words 'under Articles 10.3, 10.6 and 41.2' shall be replaced by 'under Articles 10.3, 40.2 and 40.3';
- (iii) Article 10.6 shall be deleted;
- (j) in Article 11.2, first subparagraph, the words 'shall be appointed from among persons of recognised standing and professional experience in monetary or banking matters by common accord of the governments of the Member States at the level of Heads of State or Government' shall be replaced by 'shall be appointed by the European Council, acting by a qualified majority, from among persons of recognised standing and professional experience in monetary or banking matters';
- (k) in Article 14.1, the words ', at the latest at the date of the establishment of the ESCB,' shall be deleted;
- (l) in Article 16, first sentence, the word 'euro' shall be inserted before 'banknotes';
- (m) in Article 18.1, first indent, the words 'whether in Community or non-Community currencies' shall be replaced by 'whether in euro or other currencies';
- (n) in Article 25.2, the words 'any decision of the Council' shall be replaced by 'any regulation of the Council';
- (o) in Article 28.1, the words ', which shall become operational upon its establishment,' shall be deleted;
- (p) in Article 29.1, the introductory wording shall be replaced by the following: 'The key for subscription of the ECB's capital, fixed for the first time in 1998 when the ESCB was established, shall be determined by assigning to each national central bank a weighting in this key equal to the sum of:'; the second subparagraph shall be replaced by the following: 'The percentages shall be rounded up or down to the nearest multiple of 0,0001 percentage points.';
- (q) in Article 32.2, the words 'Subject to Article 32.3,' shall be deleted and in Article 32.3 the words ', after the start of the third stage,' shall be replaced by 'after the introduction of the euro';
- (r) in Article 34.2, the first four subparagraphs shall be deleted;
- (s) in Article 35.6, the words 'the Treaties and' shall be inserted before 'this Statute';
- (t) Article 37 shall be repealed and the remaining Articles shall be renumbered accordingly;
- (u) Article 41, renumbered 40, shall be amended as follows:
 - (i) in Article 41.1, renumbered 40.1, the words 'may be amended by the Council, acting either by a qualified majority on a recommendation' shall be replaced by 'may be amended by the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure either on a recommendation', the word 'unanimously' shall be deleted, and the last sentence shall be deleted;
 - (ii) the following new Article 40.2 shall be inserted, and the current paragraph 41.2 shall be renumbered 40.3:

'40.2. Article 10.2 may be amended by a decision of the European Council, acting unanimously, either on a recommendation from the European Central Bank and after consulting the European Parliament and the Commission, or on a recommendation from the Commission and after consulting the European Parliament and the European Central Bank. These amendments shall not enter into force until they are approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.';

- (v) in Article 42, renumbered 41, the words ‘immediately after the decision on the date for the beginning of the third stage,’ shall be deleted and the words ‘acting by a qualified majority’ shall be deleted;
- (w) in Articles 43.1, 43.2 and 43.3, renumbered Articles 42.1, 42.2 and 42.3 respectively, the reference to Article 122 shall be replaced by a reference to Article 116a; in Article 43.3, renumbered 42.3, the reference to Articles 34.2 and 50 shall be deleted and in Article 43.4, renumbered 42.4, the reference to Article 10.1 shall be replaced by a reference to Article 10.2;
- (x) in Article 44, renumbered 43, first paragraph, the words ‘those tasks of the EMI’ shall be replaced by ‘the former tasks of the EMI referred to in Article 118a(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union’ and the words ‘in the third stage’ shall be replaced by ‘after the introduction of the euro’; in the second paragraph, the reference to Article 122 shall be replaced by a reference to Article 117a;
- (y) in Article 47.3, renumbered 46.3, the words ‘against the currencies, or the single currency, of the Member States without a derogation,’ shall be replaced by ‘against the euro’;
- (z) Articles 50 and 51 shall be repealed and the remaining Articles shall be renumbered accordingly;
- (aa) in Article 52, renumbered 49, the words ‘in accordance with Article 116a(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union’ shall be inserted after the words ‘Following the irrevocable fixing of exchange rates’.
- (ab) *(Does not apply to the English version.)*

STATUTE OF THE EIB

12) The Protocol on the Statute of the European Investment Bank shall be amended as follows:

- (a) throughout the Protocol, references to an Article of ‘the Treaty’ shall be replaced by references to an Article of ‘the Treaty on the Functioning of the European Union’ and references to ‘this Treaty’ shall be replaced by references to an Article of ‘the Treaty on the Functioning of the European Union’ in Article 1 (first occurrence), Article 3, Article 18 (renumbered 16), Article 19 (renumbered 17), and Article 25 (renumbered 23);
- (b) at the end of the preamble, the words ‘to this Treaty’ shall be replaced by ‘to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union’;
- (c) in Article 1, the second paragraph shall be deleted;
- (d) in Article 3, the introductory phrase shall be replaced by ‘In accordance with Article 266 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Bank’s members shall be the Member States’ and the list of States shall be deleted;
- (e) in Article 4(1), the figure for the capital of the Bank shall be replaced by ‘EUR 164 808 169 000’, the figures for the following Member States shall read as follows and the second subparagraph shall be deleted;

Poland	3 411 263 500	Bulgaria	290 917 500
Czech Republic	1 258 785 500	Lithuania	249 617 500
Hungary	1 190 868 500	Cyprus	183 382 000
Romania	863 514 500	Latvia	152 335 000
Slovakia	428 490 500	Estonia	117 640 000
Slovenia	397 815 000	Malta	69 804 000

- (f) Article 5 shall be amended as follows:
- (i) in paragraph 2, the following new sentence shall be added: 'Cash payments shall be made exclusively in euro.';
 - (ii) in paragraph 3, first subparagraph, the words 'towards those who have made loans to it' shall be deleted, and in the second subparagraph the words 'in the currencies required by the Bank to meet these obligations' shall be deleted;
- (g) Articles 6 and 7 shall be repealed and the remaining Articles shall be renumbered accordingly;
- (h) Article 9, renumbered 7, shall be amended as follows:
- (i) in paragraph 2, the words 'with particular reference to the objectives to be pursued as progress is made in the attainment of the common market' shall be replaced by 'in accordance with the Union's objectives';
 - (ii) in paragraph 3, the text of point (b) shall be replaced by '(b) for the purposes of Article 9(1), determine the principles applicable to financing operations undertaken within the framework of the Bank's task;', the text of point (d) shall be replaced by 'take decisions in respect of the granting of finance for investment operations to be carried out, in whole or in part, outside the territories of the Member States in accordance with Article 16(1);' and, in point (g), the word 'other' shall be inserted before 'powers' and the words 'provided in Articles 4, 7, 14, 17, 26 and 27' shall be replaced by 'conferred by this Statute';
- (i) Article 10, renumbered 8, shall be amended as follows:
- (i) the third sentence shall be deleted;
 - (ii) the following two new paragraphs shall be inserted:

'A qualified majority shall require eighteen votes in favour and 68 % of the subscribed capital.

Abstentions by members present in person or represented shall not prevent the adoption of decisions requiring unanimity.'
- (j) Article 11, renumbered 9, shall be amended as follows:
- (i) paragraph 1, first subparagraph, shall be replaced by the following:

'1. The Board of Directors shall take decisions in respect of granting finance, in particular in the form of loans and guarantees, and raising loans; it shall fix the interest rates on loans granted and the commission and other charges. It may, on the basis of a decision taken by a qualified majority, delegate some of its functions to the Management Committee. It shall determine the terms and conditions for such delegation and shall supervise its execution.

The Board of Directors shall see that the Bank is properly run; it shall ensure that the Bank is managed in accordance with the provisions of the Treaties and of this Statute and with the general directives laid down by the Board of Governors.';
 - (ii) in paragraph 2, the sixth subparagraph shall be replaced by the following:

'The Rules of Procedure shall lay down the arrangements for participating in the meetings of the Board of Directors and the provisions applicable to alternates and co-opted experts.'

- (iii) in paragraph 5, second sentence, the words ‘, acting unanimously,’ shall be deleted.
- (k) Article 13, renumbered 11, shall be amended as follows:
- (i) in paragraph 3, second subparagraph, the words ‘the granting of loans’ shall be replaced by ‘the granting of finance, in particular in the form of loans’;
 - (ii) in paragraph 4, the words ‘on proposals for raising loans or granting loans and guarantees’ shall be replaced by ‘on proposals for raising loans or granting finance, in particular in the form of loans and guarantees’;
 - (iii) in paragraph 7, first sentence, the words ‘officials and other employees’ shall be replaced by ‘staff’. The following sentence shall be added at the end: ‘The Rules of Procedure shall determine which organ is competent to adopt the provisions applicable to staff.’;
- (l) Article 14, renumbered 12, shall be amended as follows:
- (i) in paragraph 1, the words ‘three members’ shall be replaced by ‘six members’ and the words ‘shall annually verify that the operations of the Bank have been conducted and its books kept in a proper manner’ shall be replaced by ‘shall verify that the activities of the Bank conform to best banking practice and shall be responsible for the auditing of its accounts’;
 - (ii) paragraph 2 shall be replaced by the following three new paragraphs:
 - ‘2. The Committee referred to in paragraph 1 shall annually ascertain that the operations of the Bank have been conducted and its books kept in a proper manner. To this end, it shall verify that the Bank’s operations have been carried out in compliance with the formalities and procedures laid down by this Statute and the Rules of Procedure.
 - 3. The Committee referred to in paragraph 1 shall confirm that the financial statements, as well as any other financial information contained in the annual accounts drawn up by the Board of Directors, give a true and fair view of the financial position of the Bank in respect of its assets and liabilities, and of the results of its operations and its cash flows for the financial year under review.
 - 4. The Rules of Procedure shall specify the qualifications required of the members of the Committee and lay down the terms and conditions for the Committee’s activity.’
- (m) in Article 15, renumbered 13, the words ‘the bank of issue’ shall be replaced by ‘the national central bank’;
- (n) Article 18, renumbered 16, shall be amended as follows:
- (i) in the first subparagraph of paragraph 1, the words ‘shall grant loans’ shall be replaced by ‘shall grant finance, in particular in the form of loans and guarantees’, the words ‘investment projects’ shall be replaced by ‘investments’ and the word ‘European’ shall be deleted; in the second subparagraph, the words ‘by way of derogation authorised by the Board of Governors, acting unanimously’ shall be replaced by ‘by decision of the Board of Governors, acting by a qualified majority’, the words ‘loans for investment projects’ shall be replaced by ‘financing for investment’ and the word ‘European’ shall be deleted;

- (ii) in paragraph 3, the words 'the project' shall be replaced by 'the investment', the following shall be added at the end of the sentence: ', or on the financial strength of the debtor' and the following new second subparagraph shall be added:

'Furthermore, in accordance with the principles established by the Board of Governors pursuant to Article 7(3)(b), and where the implementation of projects provided for in Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union so requires, the Board of Directors shall, acting by a qualified majority, lay down the terms and conditions of any financing operation presenting a specific risk profile and thus considered to be a special activity.'

- (iii) paragraph 5 shall be replaced by the following:

'5. The aggregate amount outstanding at any time of loans and guarantees granted by the Bank shall not exceed 250 % of its subscribed capital, reserves, non-allocated provisions and profit and loss account surplus. The latter aggregate amount shall be reduced by an amount equal to the amount subscribed (whether or not paid in) for any equity participation of the Bank.

The amount of the Bank's disbursed equity participations shall not exceed at any time an amount corresponding to the total of its paid-in subscribed capital, reserves, non-allocated provisions and profit and loss account surplus.

By way of exception, the special activities of the Bank, as decided by the Board of Governors and the Board of Directors in accordance with paragraph 3, will have a specific allocation of reserve.

This paragraph shall also apply to the consolidated accounts of the Bank.'

- (o) in paragraph 1 of Article 19, renumbered 17, the words 'commission on guarantees' shall be replaced by 'commission and other charges' and the words 'and risks' shall be inserted after 'to cover its expenses'; in paragraph 2, the words 'the project' shall be replaced by 'the investment';
- (p) Article 20, renumbered 18, shall be amended as follows:
- (i) in the introductory phrase, the words 'loan and guarantee operations' shall be replaced by 'financing operations';
- (ii) in paragraph 1, point (a), the words 'projects carried out by' shall be replaced by 'investments by', the words 'in other cases' shall be replaced by 'in the case of other investments' and the words 'in which the project is carried out' shall be replaced by 'in which the investment is made'; in point (b), the words 'of the project' shall be replaced by 'of the investment';
- (iii) in paragraph 2, the following new second subparagraph shall be added:

'However, in accordance with the principles determined by the Board of Governors pursuant to Article 7(3)(b), and where the implementation of operations provided for in Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union so requires, the Board of Directors shall, acting by a qualified majority, lay down the terms and conditions for taking an equity participation in a commercial undertaking, normally as a complement to a loan or a guarantee, insofar as this is required to finance an investment or programme.';

- (iv) in paragraph 6, the words 'any project' shall be replaced by 'any investment';

- (v) the following new paragraph 7 shall be added:
- ‘7. As a complement to its lending activity, the Bank may provide technical assistance services in accordance with the terms and conditions laid down by the Board of Governors, acting by a qualified majority, and in compliance with this Statute.’
- (q) Article 21, renumbered 19, shall be amended as follows:
- (i) paragraph 1 shall be replaced by the following:
- ‘1. Any undertaking or public or private entity may apply directly to the Bank for financing. Applications to the Bank may also be made either through the Commission or through the Member State on whose territory the investment will be carried out.’;
- (ii) in paragraph 2, the words ‘the project’ shall be replaced by ‘the investment’;
- (iii) in paragraph 3 and in the first sentence of paragraph 4, the words ‘applications for loans or guarantees’ shall be replaced by ‘financing operations’;
- (iv) in paragraph 4, the reference in the first sentence to Article 20 shall be replaced by a reference to Articles 18 and 20, renumbered 16 and 18 respectively; in the second sentence, the words ‘granting the loan or guarantee’ shall be replaced by ‘the financing operation’ and the words ‘draft contract’ shall be replaced by ‘corresponding proposal’; in the last sentence, the words ‘loan or guarantee’ shall be replaced by ‘finance’;
- (v) in paragraphs 5, 6 and 7, the words ‘loan or guarantee’ shall be replaced by ‘finance’;
- (vi) the following new paragraph 8 shall be added:
- ‘8. In the event that a financing operation relating to an approved investment has to be restructured in order to safeguard the Bank’s rights and interests, the Management Committee shall take without delay the emergency measures which it deems necessary, subject to immediate reporting thereon to the Board of Directors.’
- (r) in Article 22, renumbered 20, the word ‘international’ shall be deleted from paragraph 1 and paragraph 2 shall be replaced by the following:
- ‘2. The Bank may borrow on the capital markets of the Member States in accordance with the legal provisions applying to those markets.
- The competent authorities of a Member State with a derogation within the meaning of Article 116a(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union may oppose this only if there is reason to fear serious disturbances on the capital market of that State.’;
- (s) in paragraph 1(b) of Article 23, renumbered 21, the words ‘issued by itself or by those who have borrowed from it’ shall be deleted and in paragraph 3 the words ‘the bank of issue’ shall be replaced by ‘the national central bank’;
- (t) in Article 25, renumbered 23, the words ‘a Member State whose currency is not the euro’ shall be inserted to replace ‘one Member State’ in paragraph 1, first sentence, and to replace ‘a Member State’ in paragraph 2; in paragraph 1, first sentence, the words ‘into the currency of another Member State’ shall be deleted, in paragraph 3 the words ‘in gold or convertible currency and’ shall be deleted and in paragraph 4 the word ‘projects’ shall be replaced by ‘investment’;
- (u) in Article 26, renumbered 24, the words ‘, to grant its special loans’ shall be deleted;

- (v) in paragraph 2 of Article 27, renumbered 25, the following sentence shall be added at the end: 'It shall ensure that the rights of the members of staff are safeguarded.';
- (w) in the first paragraph of Article 29, renumbered 27, the words 'of the European Union' shall be added at the end and the following sentence shall be added: 'The Bank may provide for arbitration in any contract.'; in the second paragraph the words 'or provide for arbitration' shall be deleted;
- (x) Article 30, renumbered 28, shall be replaced by the following:

'Article 28

1. The Board of Governors may, acting unanimously, decide to establish subsidiaries or other entities, which shall have legal personality and financial autonomy.
2. The Board of Governors shall establish the Statutes of the bodies referred to in paragraph 1. The Statutes shall define, in particular, their objectives, structure, capital, membership, the location of their seat, their financial resources, means of intervention and auditing arrangements, as well as their relationship with the organs of the Bank.
3. The Bank shall be entitled to participate in the management of these bodies and contribute to their subscribed capital up to the amount determined by the Board of Governors, acting unanimously.
4. The Protocol on the privileges and immunities of the European Union shall apply to the bodies referred to in paragraph 1 insofar as they are incorporated under Union law, to the members of their organs in the performance of their duties as such and to their staff, under the same terms and conditions as those applicable to the Bank.

Those dividends, capital gains or other forms of revenue stemming from such bodies to which the members, other than the European Union and the Bank, are entitled, shall however remain subject to the fiscal provisions of the applicable legislation.
5. The Court of Justice of the European Union shall, within the limits hereinafter laid down, have jurisdiction in disputes concerning measures adopted by organs of a body incorporated under Union law. Proceedings against such measures may be instituted by any member of such a body in its capacity as such or by Member States under the conditions laid down in Article 230 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
6. The Board of Governors may, acting unanimously, decide to admit the staff of bodies incorporated under Union law to joint schemes with the Bank, in compliance with the respective internal procedures.'

PROTOCOL ON THE LOCATION OF SEATS

- 13) The Protocol on the location of the seats of the institutions and of certain bodies and departments of the European Communities and of Europol shall be amended as follows:
 - (a) in the title of the Protocol, and in the preamble, the words ', offices, agencies' shall be inserted before 'and departments'; in the title of the Protocol words 'and of Europol' shall be deleted;
 - (b) in the first citation in the preamble, the reference to the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the Functioning of the European Union and the reference to Article 77 of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community shall be deleted; the second citation shall be deleted;

- (c) in point (d), the reference to the Court of First Instance shall be deleted and the words 'their seat' shall be replaced by 'its seat';
- (d) in point (i), the reference to the European Monetary Institute shall be deleted and the words 'their seat' shall be replaced by 'its seat'.

PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNION

14) The Protocol on the privileges and immunities of the European Communities shall be amended as follows:

- (a) in the first recital in the preamble, the reference to Article 28 of the Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities shall be replaced by a reference to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union and to Article 191 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, abbreviated as the EAEC, and the words 'these Communities and the European Investment Bank' shall be replaced by 'the European Union and the EAEC';
- (b) Article 5 shall be repealed and the remaining Articles shall be renumbered accordingly;
- (c) In Article 7, renumbered 6, paragraph 2 shall be deleted and paragraph 1 shall not be numbered;
- (d) in Article 13, renumbered 12, the words 'in accordance with the conditions and procedure laid down by the Council, acting on a proposal from the Commission' shall be replaced by 'in accordance with the conditions and procedure laid down by the European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure and after consultation of the institutions concerned';
- (e) in Article 15, renumbered 14, the opening words 'The Council shall, acting unanimously on a proposal from the Commission, lay down' shall be replaced by 'The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure and after consultation of the institutions concerned, shall lay down';
- (f) in Article 16, renumbered 15, the opening words 'The Council shall, acting on a proposal from the Commission' shall be replaced by 'The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall';
- (g) in Article 21, renumbered 20, after 'the Advocates-General,' the words 'the Registrar' shall be replaced by 'the Registrars' and the words 'and to the Members and Registrar of the Court of First Instance' shall be deleted;
- (h) in Article 23, renumbered 22, the last paragraph shall be deleted;
- (i) after the closing formula, 'IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol', the date and the list of signatories shall be deleted.

PROTOCOL ON THE CONVERGENCE CRITERIA

15) The Protocol on the convergence criteria referred to in Article 121 of the Treaty establishing the European Community shall be amended as follows:

- (a) in the title of the Protocol, the words 'referred to in Article 121 of the Treaty establishing the European Community' shall be deleted;
- (b) in the first recital, the words 'in taking decisions on the passage to the third stage of economic and monetary union' shall be replaced by 'in taking decisions to end the derogations of those Member States with a derogation';
- (c) in Article 3, second sentence, the words 'against another Member State's currency' shall be replaced by 'against the euro';

- (d) in Article 6, the words 'the EMI or' shall be deleted;
- (e) *(Does not apply to the English version.)*

PROTOCOL ON CERTAIN PROVISIONS RELATING TO THE UNITED KINGDOM

- 16) The Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall be amended as follows:
- (a) throughout the Protocol, the words 'to move to the third stage of economic and monetary union' and 'to move to the third stage' shall be replaced by 'to adopt the euro'; the words 'moves to the third stage' shall be replaced by 'adopts the euro'; the words 'in the third stage' shall be replaced by 'after the introduction of the euro';
 - (b) in the preamble, the following new second recital shall be inserted:

'GIVEN that on 16 October 1996 and 30 October 1997 the United Kingdom government notified the Council of its intention not to participate in the third stage of economic and monetary union;'
 - (c) in paragraph 1, the first and third subparagraphs shall be deleted;
 - (d) paragraph 2 shall be replaced by the following:

'2. In view of the notice given to the Council by the United Kingdom government on 16 October 1996 and 30 October 1997, paragraphs 3 to 8 and 10 shall apply to the United Kingdom.';
 - (e) paragraph 3 shall be deleted and the remaining paragraphs shall be renumbered accordingly;
 - (f) paragraph 5, renumbered 4, shall be amended as follows:
 - (i) in the first sentence, the list of Articles shall be replaced by 'Articles 245a(2), with the exception of the first and last sentences thereof, 245a(5), 97b, second paragraph, 104(1), (9) and (11), 105(1) to (5), 106, 108, 109, 110 and 111a, 115 C, 117a(3), 188 O and 245b of the Treaty on the Functioning of the European Union';
 - (ii) the following new second sentence shall be inserted: 'The same applies to Article 99(2) of this Treaty as regards the adoption of the parts of the broad economic policy guidelines which concern the euro area generally.';
 - (g) in paragraph 6, renumbered 5, the following new first subparagraph shall be inserted: 'The United Kingdom shall endeavour to avoid an excessive government deficit.', and at the beginning of the following subparagraph, the words '116(4) and' shall be deleted;
 - (h) the first subparagraph of paragraph 7, renumbered 6, shall be replaced by the following: '6. The voting rights of the United Kingdom shall be suspended in respect of acts of the Council referred to in the Articles listed in paragraph 4 and in the instances referred to in the first subparagraph of Article 116a(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union. For this purpose the second subparagraph of Article 116a(4) of the Treaty shall apply.' In the second subparagraph, the words 'Articles 112(2)b and 123(1)' shall be replaced by 'Article 245b(2)b';
 - (i) in point (a) of paragraph 9, renumbered 8, the words 'move to that stage' shall be replaced by 'adopt the euro';

- (j) in paragraph 10, renumbered 9, the introductory subparagraph shall be replaced by 'The United Kingdom may notify the Council at any time of its intention to adopt the euro. In that event:' In point (a), the reference to Article 122(2) shall be replaced by a reference to Article 117a(1) and (2);
- (k) in paragraph 11, renumbered 10, the words 'Articles 101 and 116(3)' shall be replaced by 'Article 101', and the words 'does not move to the third stage' shall be replaced by 'does not adopt the euro'.

PROTOCOL ON CERTAIN PROVISIONS RELATING TO DENMARK

17) The Protocol on certain provisions relating to Denmark shall be amended as follows:

- (a) in the preamble, the first recital shall be deleted, in the second recital, which shall become the first recital, the words 'Danish participation in the third stage of economic and monetary union' shall be replaced by 'Denmark renouncing its exemption', and the following new second recital shall be inserted: 'GIVEN THAT, on 3 November 1993, the Danish Government notified the Council of its intention not to participate in the third stage of economic and monetary union,';
- (b) points 1 and 3 shall be deleted and the remaining points shall be renumbered accordingly;
- (c) in point 2, renumbered 1, the first sentence shall be replaced by 'In view of the notice given to the Council by the Danish Government on 3 November 1993, Denmark shall have an exemption.'
- (d) in point 4, renumbered 2, the reference to Article 122(2) shall be replaced by a reference to Article 117a of the Treaty on the Functioning of the European Union.

SCHENGEN PROTOCOL

18) The Protocol integrating the Schengen *acquis* into the framework of the European Union shall be amended as follows:

- (a) in the title of the Protocol, the words 'integrating the Schengen *acquis* into' shall be replaced by 'on the Schengen *acquis* integrated into';
- (b) the preamble shall be amended as follows:
 - (i) at the end of the first recital, the words 'are aimed at enhancing European integration and, in particular, at enabling the European Union to develop more rapidly into an area of freedom, security and justice;' shall be replaced by 'have been integrated into the framework of the European Union by the Treaty of Amsterdam of 2 October 1997;';

- (ii) the second recital shall be replaced by the following:

'DESIRING to preserve the Schengen *acquis*, as developed since the entry into force of the Treaty of Amsterdam, and to develop this *acquis* in order to contribute towards achieving the objective of offering citizens of the Union an area of freedom, security and justice without internal borders;';

- (iii) the third recital shall be deleted;

- (iv) in the fifth recital, which shall become the fourth recital, the words 'are not parties to and have not signed the aforementioned agreements' shall be replaced by 'do not participate in all the provisions of the Schengen *acquis*' and, at the end, the words 'to accept some or all of the provisions thereof' shall be replaced by 'to accept other provisions of this *acquis* in full or in part';

- (v) at the end of the sixth recital, which shall become the fifth recital, the words ‘and that those provisions should only be used as a last resort’ shall be deleted;
- (vi) at the end of the seventh recital, which shall become the sixth recital, the words ‘both States having confirmed their intention to become bound by the provisions mentioned above, on the basis of the Agreement signed in Luxembourg on 19 December 1996’ shall be replaced by ‘both States being bound by the provisions of the Nordic passport union, together with the Nordic States which are members of the European Union’;
- (c) in Article 1, the first sentence shall be replaced by the following:

‘The Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden shall be authorised to establish closer cooperation among themselves in areas covered by provisions defined by the Council which constitute the Schengen *acquis*.’;

- (d) Article 2 shall be replaced by the following:

‘Article 2

The Schengen *acquis* shall apply to the Member States referred to in Article 1, without prejudice to Article 3 of the Act of Accession of 16 April 2003 or to Article 4 of the Act of Accession of 25 April 2005. The Council will substitute itself for the Executive Committee established by the Schengen agreements.’;

- (e) Article 3 shall be replaced by the following:

‘Article 3

The participation of Denmark in the adoption of measures constituting a development of the Schengen *acquis*, as well as the implementation of these measures and their application to Denmark, shall be governed by the relevant provisions of the Protocol on the position of Denmark.’;

- (f) in Article 4, first paragraph, the words ‘which are not bound by the Schengen *acquis*,’ shall be deleted;

- (g) Article 5 shall be replaced by the following:

‘Article 5

1. Proposals and initiatives to build upon the Schengen *acquis* shall be subject to the relevant provisions of the Treaties.

In this context, where either Ireland or the United Kingdom has not notified the Council in writing within a reasonable period that it wishes to take part, the authorisation referred to in Article 280 D of the Treaty on the Functioning of the European Union shall be deemed to have been granted to the Member States referred to in Article 1 and to Ireland or the United Kingdom where either of them wishes to take part in the areas of cooperation in question.

2. Where either Ireland or the United Kingdom is deemed to have given notification pursuant to a decision under Article 4, it may nevertheless notify the Council in writing, within 3 months, that it does not wish to take

part in such a proposal or initiative. In that case, Ireland or the United Kingdom shall not take part in its adoption. As from the latter notification, the procedure for adopting the measure building upon the Schengen *acquis* shall be suspended until the end of the procedure set out in paragraphs 3 or 4 or until the notification is withdrawn at any moment during that procedure.

3. For the Member State having made the notification referred to in paragraph 2, any decision taken by the Council pursuant to Article 4 shall, as from the date of entry into force of the proposed measure, cease to apply to the extent considered necessary by the Council and under the conditions to be determined in a decision of the Council acting by a qualified majority on a proposal from the Commission. That decision shall be taken in accordance with the following criteria: the Council shall seek to retain the widest possible measure of participation of the Member State concerned without seriously affecting the practical operability of the various parts of the Schengen *acquis*, while respecting their coherence. The Commission shall submit its proposal as soon as possible after the notification referred to in paragraph 2. The Council shall, if needed after convening two successive meetings, act within four months of the Commission proposal.

4. If, by the end of the period of four months, the Council has not adopted a decision, a Member State may, without delay, request that the matter be referred to the European Council. In that case, the European Council shall, at its next meeting, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, take a decision in accordance with the criteria referred to in paragraph 3.

5. If, by the end of the procedure set out in paragraphs 3 or 4, the Council or, as the case may be, the European Council has not adopted its decision, the suspension of the procedure for adopting the measure building upon the Schengen *acquis* shall be terminated. If the said measure is subsequently adopted any decision taken by the Council pursuant to Article 4 shall, as from the date of entry into force of that measure, cease to apply for the Member State concerned to the extent and under the conditions decided by the Commission, unless the said Member State has withdrawn its notification referred to in paragraph 2 before the adoption of the measure. The Commission shall act by the date of this adoption. When taking its decision, the Commission shall respect the criteria referred to in paragraph 3.;

- (h) at the end of the first sentence of the first paragraph of Article 6, the words 'on the basis of the Agreement signed in Luxembourg on 19 December 1996' shall be deleted;
- (i) Article 7 shall be repealed and Article 8 shall be renumbered 7;
- (j) the Annex shall be repealed.

PROTOCOL ON THE APPLICATION OF ARTICLE 22A TO THE UNITED KINGDOM AND TO IRELAND

- 19) The Protocol on the application of certain aspects of Article 14 of the Treaty establishing the European Community to the United Kingdom and to Ireland shall be amended as follows:
- (a) in the title of the Protocol, the reference to the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the Functioning of the European Union;
 - (b) in Article 1, first paragraph, point (a), the words 'States which are Contracting Parties to the Agreement on the European Economic Area' shall be replaced by 'Member States';
 - (c) in Article 1, first and second paragraphs, in Article 2 and in Article 3, second paragraph, the reference to Article 14 shall be replaced by a reference to Articles 22a and 62 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

PROTOCOL ON THE POSITION OF THE UNITED KINGDOM AND IRELAND IN RESPECT OF THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

20) The Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland shall be amended as follows:

- (a) at the end of the title of the Protocol, the words 'in respect of the area of freedom, security and justice' shall be added;
- (b) in the second recital of the preamble, the reference to the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the Functioning of the European Union;
- (c) in Article 1, first sentence, the words 'pursuant to Title IV of the Treaty establishing the European Community' shall be replaced by 'pursuant to Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union'; the second sentence shall be deleted and the following paragraph shall be added:

'For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.';

- (d) at the beginning of Article 2 the words 'provisions of Title IV of the Treaty establishing the European Community' shall be replaced by 'provisions of Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union'; at the end of the Article, the words '*acquis communautaire*' shall be replaced by 'Community or Union *acquis*';
- (e) Article 3(1) shall be amended as follows:
 - (i) in the first sentence of the first subparagraph, the words 'pursuant to Title IV of the Treaty establishing the European Community' shall be replaced by 'pursuant to Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union' and the second sentence shall be deleted;
 - (ii) the following new subparagraphs shall be added after the second subparagraph:

'Measures adopted pursuant to Article 61 C of the Treaty on the Functioning of the European Union shall lay down the conditions for the participation of the United Kingdom and Ireland in the evaluations concerning the areas covered by Title IV of Part Three of that Treaty.

For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.';

- (f) in Articles 4, 5 and 6, the words 'Title IV of the Treaty establishing the European Community' shall be replaced by 'Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union';
- (g) in the second sentence of Article 4, the reference to Article 11(3) shall be replaced by a reference to Article 280 F(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union;
- (h) the following new Article 4a shall be inserted:

'Article 4a

1. The provisions of this Protocol apply for the United Kingdom and Ireland also to measures proposed or adopted pursuant to Title IV of Part III of the Treaty on the Functioning of the European Union amending an existing measure by which they are bound.

2. However, in cases where the Council, acting on a proposal from the Commission, determines that the non-participation of the United Kingdom or Ireland in the amended version of an existing measure makes the

application of that measure inoperable for other Member States or the Union, it may urge them to make a notification under Article 3 or 4. For the purposes of Article 3 a further period of two months starts to run as from the date of such determination by the Council.

If at the expiry of that period of two months from the Council's determination the United Kingdom or Ireland has not made a notification under Article 3 or Article 4, the existing measure shall no longer be binding upon or applicable to it, unless the Member State concerned has made a notification under Article 4 before the entry into force of the amending measure. This shall take effect from the date of entry into force of the amending measure or of expiry of the period of two months, whichever is the later.

For the purpose of this paragraph, the Council shall, after a full discussion of the matter, act by a qualified majority of its members representing the Member States participating or having participated in the adoption of the amending measure. A qualified majority of the Council shall be defined in accordance with Article 205(3)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

3. The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may determine that the United Kingdom or Ireland shall bear the direct financial consequences, if any, necessarily and unavoidably incurred as a result of the cessation of its participation in the existing measure.

4. This Article shall be without prejudice to Article 4.;

- (i) at the end of Article 5, the following shall be added: ' unless all members of the Council, acting unanimously after consulting the European Parliament, decide otherwise';
- (j) In Article 6, the words 'the relevant provisions of that Treaty, including Article 68,' shall be replaced by 'the relevant provisions of the Treaties';
- (k) the following new Article 6a shall be inserted:

'Article 6a

The United Kingdom and Ireland shall not be bound by the rules laid down on the basis of Article 16 B of the Treaty on the Functioning of the European Union which relate to the processing of personal data by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Chapter 4 or Chapter 5 of Title IV of Part Three of that Treaty where the United Kingdom and Ireland are not bound by the rules governing the forms of judicial cooperation in criminal matters or police cooperation which require compliance with the provisions laid down on the basis of Article 16 B.;

- (l) in Article 7, the words 'Articles 3 and 4' shall be replaced by 'Articles 3, 4 and 4a' and the words 'Protocol integrating the Schengen *acquis* into' shall be replaced by 'Protocol on the Schengen *acquis* integrated into';
- (m) in Article 8, the words 'the President of' shall be deleted.;
- (n) the following new Article 9 shall be added:

'Article 9

With regard to Ireland, this Protocol shall not apply to Article 61 H of the Treaty on the Functioning of the European Union.'

PROTOCOL ON THE POSITION OF DENMARK

21) The Protocol on the position of Denmark shall be amended as follows:

(a) the preamble shall be amended as follows:

(i) the following three new recitals shall be inserted after the second recital:

‘CONSCIOUS of the fact that a continuation under the Treaties of the legal regime originating in the Edinburgh decision will significantly limit Denmark’s participation in important areas of cooperation of the Union, and that it would be in the best interest of the Union to ensure the integrity of the *acquis* in the area of freedom, security and justice;

WISHING therefore to establish a legal framework that will provide an option for Denmark to participate in the adoption of measures proposed on the basis of Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union and welcoming the intention of Denmark to avail itself of this option when possible in accordance with its constitutional requirements;

NOTING that Denmark will not prevent the other Member States from further developing their cooperation with respect to measures not binding on Denmark;’

(ii) in the penultimate recital, the words ‘Protocol integrating the Schengen *acquis* into’ shall be replaced by ‘Protocol on the Schengen *acquis* integrated into’;

(b) in Article 1, first paragraph, first sentence, the words ‘Title IV of the Treaty establishing the European Community’ shall be replaced by ‘Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union’;

(c) in Article 1, the second sentence of the first paragraph shall be deleted and the following new paragraph shall be added:

‘For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.’;

(d) Article 2 shall be replaced by the following:

‘Article 2

None of the provisions of Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, no measure adopted pursuant to that Title, no provision of any international agreement concluded by the Union pursuant to that Title, and no decision of the Court of Justice of the European Union interpreting any such provision or measure or any measure amended or amendable pursuant to that Title shall be binding upon or applicable in Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the competences, rights and obligations of Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the Community or Union *acquis* nor form part of Union law as they apply to Denmark. In particular, acts of the Union in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters adopted before the entry into force of the Treaty of Lisbon which are amended shall continue to be binding upon and applicable to Denmark unchanged.’;

- (e) the following new Article 2a shall be inserted:

'Article 2a

Article 2 of this Protocol shall also apply in respect of those rules laid down on the basis of Article 16 B of the Treaty on the Functioning of the European Union which relate to the processing of personal data by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Chapter 4 or Chapter 5 of Title IV of Part Three of that Treaty.;

- (f) Article 4 shall become Article 6;

- (g) Article 5, renumbered 4, shall be amended as follows:

- (i) throughout the Article, the word 'decision' shall be replaced by 'measure';
- (ii) in paragraph 1, the words 'under the provisions of Title IV of the Treaty establishing the European Community' shall be replaced by 'covered by this Part' and the words 'Member States referred to in Article 1 of the Protocol integrating the Schengen *acquis* into the framework of the European Union as well as Ireland or the United Kingdom if those Member States take part in the areas of cooperation in question' shall be replaced by 'Member States bound by the measure';
- (iii) in paragraph 2, the words 'the Member States referred to in Article 1 of the Protocol integrating the Schengen *acquis* into the framework of the European Union will consider' shall be replaced by 'the Member States bound by that measure and Denmark will consider';

- (h) Article 6, renumbered 5, shall be amended as follows:

- (i) in the first sentence, the words 'in the field of Articles 13(1) and 17 of the Treaty on European Union' shall be replaced by 'pursuant to Article 13(1), Article 28 A and Articles 28 B to 28 E of the Treaty on European Union' and the closing words ', but will not prevent the development of closer cooperation between Member States in this area' shall be deleted;
- (ii) the following new third sentence shall be inserted: 'Denmark will not prevent the other Member States from further developing their cooperation in this area.';
- (iii) at the end of the new fourth sentence, the following shall be added: ', nor to make military capabilities available to the Union';

- (iv) the following two new paragraphs shall be added:

'The unanimity of the members of the Council, with the exception of the representative of the government of Denmark, shall be necessary for the acts of the Council which must be adopted unanimously.

For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.';

- (i) following the heading 'PART III' an Article 6 shall be inserted, with the wording of Article 4;

- (j) a heading 'PART IV' shall be inserted before Article 7;
- (k) the following new Article 8 shall be inserted:

'Article 8

1. At any time and without prejudice to Article 7, Denmark may, in accordance with its constitutional requirements, notify the other Member States that, with effect from the first day of the month following the notification, Part I shall consist of the provisions in the Annex. In that case Articles 5 to 8 shall be renumbered in consequence.
2. Six months after the date on which the notification referred to in paragraph 1 takes effect all Schengen *acquis* and measures adopted to build upon this *acquis*, which until then have been binding on Denmark as obligations under international law, shall be binding upon Denmark as Union law.;

- (l) the following new Annex shall be added to the Protocol:

'ANNEX

Article 1

Subject to Article 3, Denmark shall not take part in the adoption by the Council of measures proposed pursuant to Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union. The unanimity of the members of the Council, with the exception of the representative of the government of Denmark, shall be necessary for the acts of the Council which must be adopted unanimously.

For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 2

Pursuant to Article 1 and subject to Articles 3, 4 and 8, none of the provisions in Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, no measure adopted pursuant to that Title, no provision of any international agreements concluded by the Union pursuant to that Title, no decision of the Court of Justice of the European Union interpreting any such provision or measure shall be binding upon or applicable in Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the competences, rights and obligations of Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the Community or Union *acquis* nor form part of Union law as they apply to Denmark.

Article 3

1. Denmark may notify the President of the Council in writing, within three months after a proposal or initiative has been presented to the Council pursuant to Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, that it wishes to take part in the adoption and application of any such proposed measure, whereupon Denmark shall be entitled to do so.
2. If after a reasonable period of time a measure referred to in paragraph 1 cannot be adopted with Denmark taking part, the Council may adopt that measure referred to in paragraph 1 in accordance with Article 1 without the participation of Denmark. In that case Article 2 applies.

Article 4

Denmark may at any time after the adoption of a measure pursuant to Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union notify its intention to the Council and the Commission that it wishes to accept that measure. In that case, the procedure provided for in Article 280 F(1) of that Treaty shall apply *mutatis mutandis*.

Article 5

1. The provisions of this Protocol apply for Denmark also to measures proposed or adopted pursuant to Title IV of Part III of the Treaty on the Functioning of the European Union amending an existing measure by which it is bound.

2. However, in cases where the Council, acting on a proposal from the Commission, determines that the non-participation of Denmark in the amended version of an existing measure makes the application of that measure inoperable for other Member States or the Union, it may urge it to make a notification under Article 3 or 4. For the purposes of Article 3 a further period of two months starts to run as from the date of such determination by the Council.

If at the expiry of that period of two months from the Council's determination Denmark has not made a notification under Article 3 or Article 4, the existing measure shall no longer be binding upon or applicable to it, unless it has made a notification under Article 4 before the entry into force of the amending measure. This shall take effect from the date of entry into force of the amending measure or of expiry of the period of two months, whichever is the later.

For the purpose of this paragraph, the Council shall, after a full discussion of the matter, act by a qualified majority of its members representing the Member States participating or having participated in the adoption of the amending measure. A qualified majority of the Council shall be defined in accordance with Article 205(3)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

3. The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may determine that Denmark shall bear the direct financial consequences, if any, necessarily and unavoidably incurred as a result of the cessation of its participation in the existing measure.

4. This Article shall be without prejudice to Article 4.

Article 6

1. Notification pursuant to Article 4 shall be submitted no later than six months after the final adoption of a measure if this measure builds upon the Schengen *acquis*.

If Denmark does not submit a notification in accordance with Articles 3 or 4 regarding a measure building upon the Schengen *acquis*, the Member States bound by that measure and Denmark will consider appropriate measures to be taken.

2. A notification pursuant to Article 3 with respect to a measure building upon the Schengen *acquis* shall be deemed irrevocably to be a notification pursuant to Article 3 with respect to any further proposal or initiative aiming to build upon that measure to the extent that such proposal or initiative builds upon the Schengen *acquis*.

Article 7

Denmark shall not be bound by the rules laid down on the basis of Article 16 B of the Treaty on the Functioning of the European Union which relate to the processing of personal data by the Member States when carrying out

activities which fall within the scope of Chapter 4 or Chapter 5 of Title IV of Part Three of that Treaty where Denmark is not bound by the rules governing the forms of judicial cooperation in criminal matters or police cooperation which require compliance with the provisions laid down on the basis of Article 16 B.

Article 8

Where, in cases referred to in this Part, Denmark is bound by a measure adopted by the Council pursuant to Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, the relevant provisions of the Treaties shall apply to Denmark in relation to that measure.

Article 9

Where Denmark is not bound by a measure adopted pursuant to Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, it shall bear no financial consequences of that measure other than administrative costs entailed for the institutions unless the Council, with all its Members acting unanimously after consulting the European Parliament, decides otherwise.'

PROTOCOL ON ASYLUM FOR NATIONALS OF THE UNION

22) The Protocol on asylum for nationals of Member States of the European Union shall be amended as follows:

(a) the preamble shall be amended as follows:

(i) the first recital shall be replaced by the following:

'WHEREAS, in accordance with Article 6(1) of the Treaty on European Union, the Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights;'

(ii) the following new second recital shall be inserted:

'WHEREAS pursuant to Article 6(3) of the Treaty on European Union, fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, constitute part of the Union's law as general principles;'

(iii) in the second, renumbered third, recital, the reference to Article 6(2) shall be replaced by a reference to Article 6, paragraphs (1) and (3);

(iv) in the third, renumbered fourth, recital, the reference to Article 6(1) shall be replaced by a reference to Article 1a;

(v) in the third and fourth recitals, which shall become the fourth and fifth recitals, the word 'principles' shall be replaced by 'values'; in the fourth recital, which shall become the fifth recital, the reference to Article 309 of the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to Article 7 of the Treaty on European Union;

(vi) in the fifth, which shall become the sixth, recital, the reference to the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the Functioning of the European Union;

(vii) the seventh recital, which shall become the eighth recital, shall be deleted;

- (b) the Sole Article shall be amended as follows:
- (i) in point (b), the words ‘, or, where appropriate, the European Council,’ shall be inserted after ‘the Council’ and the words ‘with regard to the Member State of which the applicant is a national’ shall be added at the end;
 - (ii) point (c) shall be replaced by the following:
 - ‘(c) if the Council has adopted a decision in accordance with Article 7(1) of the Treaty on European Union in respect of the Member State of which the applicant is a national or if the European Council has adopted a decision in accordance with Article 7(2) of that Treaty in respect of the Member State of which the applicant is a national;’.

PROTOCOL ON ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIAL COHESION

23) The Protocol on economic and social cohesion shall be amended as follows:

- (a) throughout the Protocol, the words ‘economic and social cohesion’ shall be replaced by ‘economic, social and territorial cohesion’;
- (b) the preamble shall be amended as follows:
 - (i) the first, second, fifth, sixth and fourteenth recitals shall be deleted;
 - (ii) the following new first recital shall be inserted:

‘RECALLING that Article 2 of the Treaty on European Union includes the objective of promoting economic, social and territorial cohesion and solidarity between Member States and that the said cohesion figures among the areas of shared competence of the Union listed in Article 2 C(2)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union;’;
 - (iii) the fourth recital, which shall become the third recital, shall be replaced by the following:

‘RECALLING that the provisions of Article 161 of the Treaty on the Functioning of the European Union envisage setting up a Cohesion Fund;’;
 - (iv) at the end of the eleventh recital, which shall become the eighth recital, the words ‘, and underline the importance of the inclusion of economic and social cohesion in Articles 2 and 3 of this Treaty’ shall be deleted;
 - (v) in the fifteenth recital, which shall become the new eleventh recital, the words ‘to be set up before 31 December 1993’ shall be deleted;
 - (vi) in the last recital, the reference to the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.

OTHER PROTOCOLS

- 24) In the Protocol on the excessive deficit procedure, in the first recital of the preamble, the reference to the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the Functioning of the European Union.
- 25) In the Protocol on France, the words ‘in its overseas territories’ shall be replaced by ‘in New Caledonia, French Polynesia and Wallis and Futuna’.

- 26) In the Protocol on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders, the reference to Article 62(2)(a) of Title IV of the Treaty shall be replaced by a reference to Article 62(2)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union.
- 27) In the Protocol on Article 17 of the Treaty on European Union, in the enacting terms, the final words ‘, within a year from the entry into force of the Treaty of Amsterdam’ shall be deleted.
- 28) In the Protocol on the system of public broadcasting in the Member States, in the final paragraph of the preamble, the words ‘which shall be annexed to the Treaty establishing the European Community’ shall be replaced by ‘which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union’.
- 29) In the Protocol concerning imports into the European Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles, in the second sentence of Article 3(3), the words ‘by a decision taken by a qualified majority’ shall be deleted.
- 30) The Protocol concerning Article 141 of the Treaty establishing the European Community shall be amended as follows:
- (a) in the title of the Protocol, the reference to the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the Functioning of the European Union;
 - (b) in the sole provision, the words ‘of this Treaty’ shall be replaced by ‘of the Treaty on the Functioning of the European Union’.
- 31) In the Protocol on special arrangements for Greenland, the words ‘Treaty establishing the European Community’ shall be replaced by ‘Treaty on the Functioning of the European Union’, and Article 2 shall be deleted.
- 32) The Protocol annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities shall be amended as follows:
- (a) the Protocol shall be entitled ‘Protocol on Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland’;
 - (b) the words ‘Nothing in the Treaty on European Union, or in the Treaties establishing the European Communities’ shall be replaced by ‘Nothing in the Treaties, or in the Treaty establishing the European Atomic Energy Community’.
- 33) The Protocol on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel shall be amended as follows:
- (a) in the preamble, the first two recitals shall be replaced by following new first recital:

‘RECALLING that all assets and liabilities of the European Coal and Steel Community, as they existed on 23 July 2002, were transferred to the European Community on 24 July 2002;’
 - (b) Article 1(1) shall be deleted and the two remaining paragraphs shall be renumbered accordingly;
 - (c) Article 2 shall be split into two paragraphs, the first of which shall end with the words ‘including essential principles.’. Furthermore, that Article shall be amended as follows:
 - (i) in the first paragraph, the words ‘acting unanimously on a proposal from the Commission’ shall be replaced by ‘acting in accordance with a special legislative procedure’ and the word ‘consulting’ shall be replaced by ‘obtaining the consent of’;

(ii) in the second paragraph, the words ‘and proper decision-making procedures, in particular for the adoption of’ shall be replaced by ‘The Council shall adopt, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, measures establishing’;

(d) Article 4 shall be repealed.

Article 2

1. The articles of the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, of the Protocol on the Statute of the European Investment Bank, and of the Protocol on the privileges and immunities of the European Union, as they are amended by the Treaty of Lisbon, shall be renumbered in accordance with the tables of equivalences set out in the annex to this Protocol. Cross-references to articles of those protocols which appear therein shall be adapted in accordance with the tables.

2. References to recitals of the protocols set out in point 1 of Article 1, or to articles of those protocols, including to paragraphs thereof, as renumbered or rearranged by this Protocol, and which references figure in other protocols or acts of primary legislation shall be adapted in accordance with this Protocol. Such adaptations shall, if necessary, also apply in the event that the provision in question has been repealed.

3. References to recitals and articles, including to paragraphs thereof, of the protocols set out in point 1 of Article 1, as amended by the provisions of this Protocol and which figure in other instruments or acts, shall be understood as references to recitals and articles, including to paragraphs thereof, of those protocols as renumbered or rearranged in accordance with this Protocol.

ANNEX

**TABLES OF EQUIVALENCES REFERRED TO IN ARTICLE 2 OF PROTOCOL (NO 1)
AMENDING THE PROTOCOLS ANNEXED TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION, TO
THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY AND/OR TO THE
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY.**

A. PROTOCOL ON THE STATUTE OF THE EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS AND
OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK

Old numbering of the protocol	New numbering of the protocol
Article 1	Article 1
Article 2	Article 2
Article 3	Article 3
Article 4	Article 4
Article 5	Article 5
Article 6	Article 6
Article 7	Article 7
Article 8	Article 8
Article 9	Article 9
Article 10	Article 10
Article 11	Article 11
Article 12	Article 12
Article 13	Article 13
Article 14	Article 14
Article 15	Article 15
Article 16	Article 16
Article 17	Article 17
Article 18	Article 18
Article 19	Article 19
Article 20	Article 20
Article 21	Article 21
Article 22	Article 22
Article 23	Article 23
Article 24	Article 24

Old numbering of the protocol	New numbering of the protocol
Article 25	Article 25
Article 26	Article 26
Article 27	Article 27
Article 28	Article 28
Article 29	Article 29
Article 30	Article 30
Article 31	Article 31
Article 32	Article 32
Article 33	Article 33
Article 34	Article 34
Article 35	Article 35
Article 36	Article 36
Article 37 (repealed)	
Article 38	Article 37
Article 39	Article 38
Article 40	Article 39
Article 41	Article 40
Article 42	Article 41
Article 43	Article 42
Article 44	Article 43
Article 45	Article 44
Article 46	Article 45
Article 47	Article 46
Article 48	Article 47
Article 49	Article 48
Article 50 (repealed)	
Article 51 (repealed)	
Article 52	Article 49
Article 53	Article 50

B. PROTOCOL ON THE STATUTE OF THE EUROPEAN INVESTMENT BANK

Old numbering of the Protocol	New numbering of the Protocol
Article 1	Article 1
Article 2	Article 2
Article 3	Article 3
Article 4	Article 4
Article 5	Article 5
Article 6 (repealed)	
Article 7 (repealed)	
Article 8	Article 6
Article 9	Article 7
Article 10	Article 8
Article 11	Article 9
Article 12	Article 10
Article 13	Article 11
Article 14	Article 12
Article 15	Article 13
Article 16	Article 14
Article 17	Article 15
Article 18	Article 16
Article 19	Article 17
Article 20	Article 18
Article 21	Article 19
Article 22	Article 20
Article 23	Article 21
Article 24	Article 22
Article 25	Article 23
Article 26	Article 24
Article 27	Article 25
Article 28	Article 26
Article 29	Article 27
Article 30	Article 28

C. PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN UNION

Old numbering of the Protocol	New numbering of the Protocol
Article 1	Article 1
Article 2	Article 2
Article 3	Article 3
Article 4	Article 4
Article 5 (repealed)	
Article 6	Article 5
Article 7	Article 6
Article 8	Article 7
Article 9	Article 8
Article 10	Article 9
Article 11	Article 10
Article 12	Article 11
Article 13	Article 12
Article 14	Article 13
Article 15	Article 14
Article 16	Article 15
Article 17	Article 16
Article 18	Article 17
Article 19	Article 18
Article 20	Article 19
Article 21	Article 20
Article 22	Article 21
Article 23	Article 22

PROTOCOL No 2
AMENDING THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY
COMMUNITY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

RECALLING the necessity that the provisions of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community should continue to have full legal effect;

DESIRING to adapt that Treaty to the new rules laid down by the Treaty on European Union and by the Treaty on the Functioning of the European Union, in particular in the institutional and financial fields,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty of Lisbon and which amend the Treaty establishing the European Atomic Energy Community as follows:

Article 1

This Protocol shall amend the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (hereinafter referred to as the 'EAEC Treaty') in its version in force at the time of entry into force of the Treaty of Lisbon.

(The second paragraph does not apply to the English version.)

Article 2

The heading of Title III of the EAEC Treaty 'Institutional provisions' shall be replaced by the heading: 'Institutional and financial provisions'.

Article 3

The following chapter shall be inserted at the beginning of Title III of the EAEC Treaty:

'CHAPTER I

APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND OF THE
TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION

Article 106a

1. Article 7, Articles 9 to 9 F, Article 48(2) to (5), and Articles 49 and 49 A of the Treaty on European Union, Article 16 A, Articles 190 to 201b, Articles 204 to 211a, Article 213, Articles 215 to 236, Articles 238, 239 and 240, Articles 241 to 245, Articles 246 to 262, Articles 268 to 277, Articles 279 to 280 and Articles 283, 290 and 292 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and the Protocol on Transitional Provisions, shall apply to this Treaty.

2. Within the framework of this Treaty, the references to the Union, to the “Treaty on European Union”, to the “Treaty on the Functioning of the European Union” or to the “Treaties” in the provisions referred to in paragraph 1 and those in the protocols annexed both to those Treaties and to this Treaty shall be taken, respectively, as references to the European Atomic Energy Community and to this Treaty.

3. The provisions of the Treaty on European Union and of the Treaty on the Functioning of the European Union shall not derogate from the provisions of this Treaty.’

Article 4

Chapters I, II and III of Title III of the EAEC Treaty shall be renumbered II, III and IV respectively.

Article 5

Article 3, Articles 107 to 132, Articles 136 to 143, Articles 146 to 156, Articles 158 to 163, Articles 165 to 170, Articles 173 and 173 , Article 175, Articles 177 to 179a, and Articles 180b, 181, 183, 183 , 190 and 204 of the EAEC Treaty shall be repealed.

Article 6

The heading of Title IV of the EAEC Treaty ‘Financial provisions’ shall be replaced by the heading: ‘Specific financial provisions’.

Article 7

1. In the third paragraph of Article 38 and the third paragraph of Article 82 of the EAEC Treaty the references to Articles 141 and 142 shall be replaced by references to Articles 226 and 227 respectively of the Treaty on the Functioning of the European Union.

2. In Article 171(2) and Article 176(3) of the EAEC Treaty the references to Article 183 shall be replaced by references to Article 279 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

3. In Article 172(4) of the EAEC Treaty the reference to Article 177(5) shall be replaced by a reference to Article 272 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

4. In the EAEC Treaty the words ‘Court of Justice’ shall be replaced by ‘Court of Justice of the European Union’.

Article 8

Article 191 of the EAEC Treaty shall be replaced by the following:

‘Article 191

The Community shall enjoy in the territories of the Member States such privileges and immunities as are necessary for the performance of its tasks, under the conditions laid down in the Protocol on the privileges and immunities of the European Union.’

Article 9

Article 206 of the EAEC Treaty shall be replaced by the following:

'Article 206

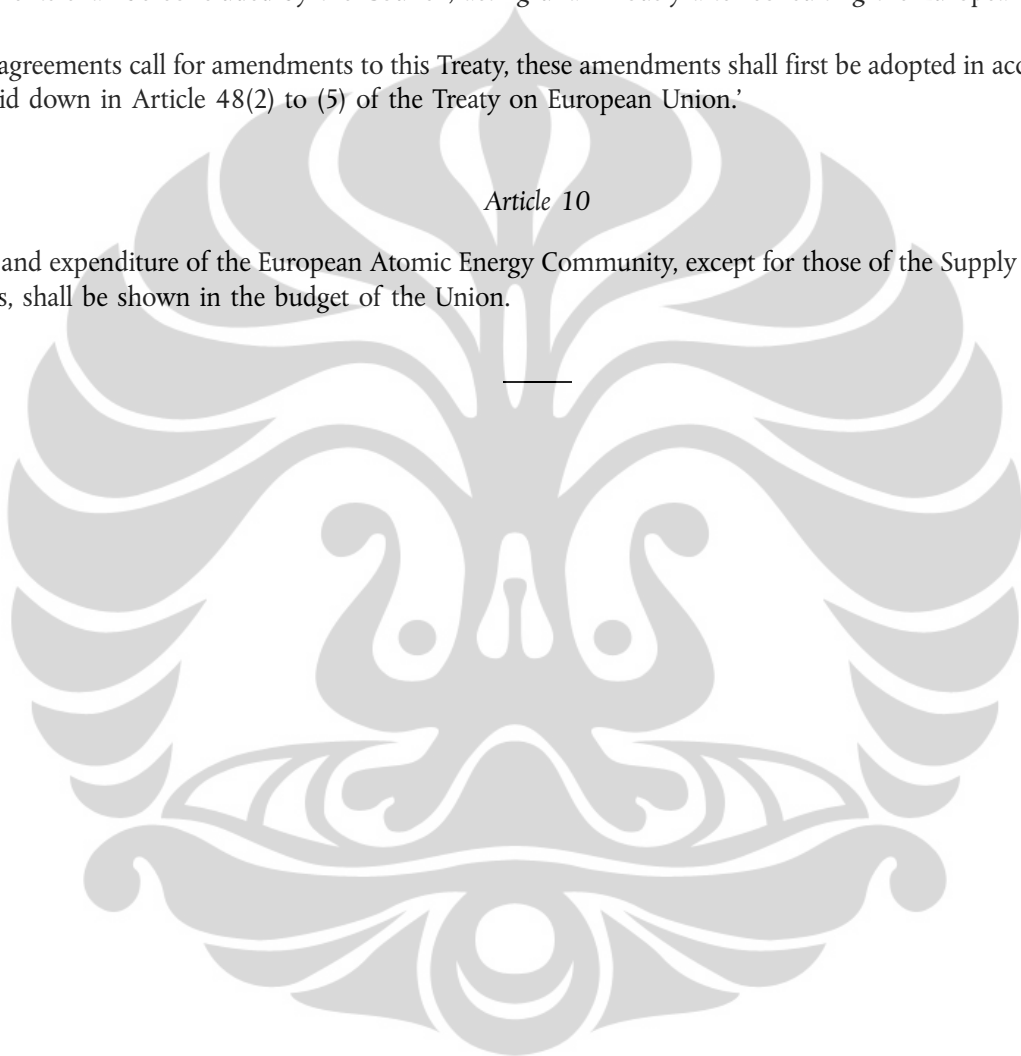
The Community may conclude with one or more States or international organisations agreements establishing an association involving reciprocal rights and obligations, common action and special procedures.

These agreements shall be concluded by the Council, acting unanimously after consulting the European Parliament.

Where such agreements call for amendments to this Treaty, these amendments shall first be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 48(2) to (5) of the Treaty on European Union.'

Article 10

The revenue and expenditure of the European Atomic Energy Community, except for those of the Supply Agency and Joint Undertakings, shall be shown in the budget of the Union.



ANNEX

TABLES OF EQUIVALENCES REFERRED TO IN ARTICLE 5 OF THE TREATY OF LISBON

A. Treaty on European Union

Old numbering of the Treaty on European Union	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on European Union
TITLE I — COMMON PROVISIONS	TITLE I — COMMON PROVISIONS	TITLE I — COMMON PROVISIONS
Article 1	Article 1	Article 1
	Article 1a	Article 2
Article 2	Article 2	Article 3
Article 3 (repealed) ⁽¹⁾		
	Article 3a	Article 4
	Article 3b ⁽²⁾	Article 5
Article 4 (repealed) ⁽³⁾		
Article 5 (repealed) ⁽⁴⁾		
Article 6	Article 6	Article 6
Article 7	Article 7	Article 7
	Article 7a	Article 8
TITLE II — PROVISIONS AMENDING THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY WITH A VIEW TO ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY	TITLE II — PROVISIONS ON DEMOCRATIC PRINCIPLES	TITLE II — PROVISIONS ON DEMOCRATIC PRINCIPLES
Article 8 (repealed) ⁽⁵⁾	Article 8	Article 9
	Article 8 A ⁽⁶⁾	Article 10
	Article 8 B	Article 11
	Article 8 C	Article 12
TITLE III — PROVISIONS AMENDING THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY	TITLE III — PROVISIONS ON THE INSTITUTIONS	TITLE III — PROVISIONS ON THE INSTITUTIONS
Article 9 (repealed) ⁽⁷⁾	Article 9	Article 13
	Article 9 A ⁽⁸⁾	Article 14

Old numbering of the Treaty on European Union	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on European Union
	Article 9 B ⁽⁹⁾	Article 15
	Article 9 C ⁽¹⁰⁾	Article 16
	Article 9 D ⁽¹¹⁾	Article 17
	Article 9 E	Article 18
	Article 9 F ⁽¹²⁾	Article 19
TITLE IV — PROVISIONS AMENDING THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY	TITLE IV — PROVISIONS ON ENHANCED COOPERATION	TITLE IV — PROVISIONS ON ENHANCED COOPERATION
Article 10 (repealed) ⁽¹³⁾ Articles 27 A to 27 E (replaced) Articles 40 to 40 B (replaced) Articles 43 to 45 (replaced)	Article 10 ⁽¹⁴⁾	Article 20
TITLE V — PROVISIONS ON A COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY	TITLE V — GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION AND SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY	TITLE V — GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION AND SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
	Chapter 1 — General provisions on the Union's external action	Chapter 1 — General provisions on the Union's external action
	Article 10 A	Article 21
	Article 10 B	Article 22
	Chapter 2 — Specific provisions on the common foreign and security policy	Chapter 2 — Specific provisions on the common foreign and security policy
	Section 1 — Common provisions	Section 1 — Common provisions
	Article 10 C	Article 23
Article 11	Article 11	Article 24
Article 12	Article 12	Article 25
Article 13	Article 13	Article 26
	Article 13a	Article 27
Article 14	Article 14	Article 28
Article 15	Article 15	Article 29

Old numbering of the Treaty on European Union	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on European Union
<i>Article 22 (moved)</i>	Article 15a	Article 30
<i>Article 23 (moved)</i>	Article 15b	Article 31
Article 16	Article 16	Article 32
<i>Article 17 (moved)</i>	<i>Article 28 A</i>	<i>Article 42</i>
Article 18	Article 18	Article 33
Article 19	Article 19	Article 34
Article 20	Article 20	Article 35
Article 21	Article 21	Article 36
<i>Article 22 (moved)</i>	<i>Article 15a</i>	<i>Article 30</i>
<i>Article 23 (moved)</i>	<i>Article 15b</i>	<i>Article 31</i>
Article 24	Article 24	Article 37
Article 25	Article 25	Article 38
	Article 25a	Article 39
<i>Article 47 (moved)</i>	Article 25b	Article 40
Article 26 (repealed)		
Article 27 (repealed)		
Article 27 A (replaced) ⁽¹⁵⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 27 B (replaced) ⁽¹⁵⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 27 C (replaced) ⁽¹⁵⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 27 D (replaced) ⁽¹⁵⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 27 E (replaced) ⁽¹⁵⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 28	Article 28	Article 41
	Section 2 — Provisions on the common security and defence policy	Section 2 — Provisions on the common security and defence policy
<i>Article 17 (moved)</i>	Article 28 A	Article 42
	Article 28 B	Article 43
	Article 28 C	Article 44
	Article 28 D	Article 45
	Article 28 E	Article 46

Old numbering of the Treaty on European Union	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on European Union
TITLE VI — PROVISIONS ON POLICE AND JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS (repealed) ⁽¹⁶⁾		
Article 29 (replaced) ⁽¹⁷⁾		
Article 30 (replaced) ⁽¹⁸⁾		
Article 31 (replaced) ⁽¹⁹⁾		
Article 32 (replaced) ⁽²⁰⁾		
Article 33 (replaced) ⁽²¹⁾		
Article 34 (repealed)		
Article 35 (repealed)		
Article 36 (replaced) ⁽²²⁾		
Article 37 (repealed)		
Article 38 (repealed)		
Article 39 (repealed)		
Article 40 (replaced) ⁽²³⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 40 A (replaced) ⁽²³⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 40 B (replaced) ⁽²³⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 41 (repealed)		
Article 42 (repealed)		
TITLE VII — PROVISIONS ON ENHANCED COOPERATION (replaced) ⁽²⁴⁾	TITLE IV — PROVISION ON ENHANCED COOPERATION	TITLE IV — PROVISION ON ENHANCED COOPERATION
Article 43 (replaced) ⁽²⁴⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 43 A (replaced) ⁽²⁴⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 43 B (replaced) ⁽²⁴⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 44 (replaced) ⁽²⁴⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 44 A (replaced) ⁽²⁴⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
Article 45 (replaced) ⁽²⁴⁾	<i>Article 10</i>	<i>Article 20</i>
TITRE VIII — FINAL PROVISIONS	TITLE VI — FINAL PROVISIONS	TITLE VI — FINAL PROVISIONS
Article 46 (repealed)		

Old numbering of the Treaty on European Union	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on European Union
	Article 46a	Article 47
Article 47 (moved)	Article 25b	Article 40
Article 48	Article 48	Article 48
Article 49	Article 49	Article 49
	Article 49 A	Article 50
	Article 49 B	Article 51
	Article 49 C	Article 52
Article 50 (repealed)		
Article 51	Article 51	Article 53
Article 52	Article 52	Article 54
Article 53	Article 53	Article 55

- (¹) Replaced, in substance, by Article 2 F (renumbered 7) of the Treaty on the Functioning of the European Union ('TFEU') and by Articles 9(1) and 10 A, paragraph 3, second subparagraph (renumbered 13 and 21) of the Treaty on European Union ('TEU').
- (²) Replaces Article 5 of the Treaty establishing the European Community ('TEC').
- (³) Replaced, in substance, by Article 9 B (renumbered 15).
- (⁴) Replaced, in substance, by Article 9, paragraph 2 (renumbered 13).
- (⁵) Article 8 TEU, which was in force until the entry into force of the Treaty of Lisbon (hereinafter 'current'), amended the TEC. Those amendments are incorporated into the latter Treaty and Article 8 is repealed. Its number is used to insert a new provision.
- (⁶) Paragraph 4 replaces, in substance, the first subparagraph of Article 191 TEC.
- (⁷) The current Article 9 TEU amended the Treaty establishing the European Coal and Steel Community. This latter expired on 23 July 2002. Article 9 is repealed and the number thereof is used to insert another provision.
- (⁸) — Paragraphs 1 and 2 replace, in substance, Article 189 TEC;
 — paragraphs 1 to 3 replace, in substance, paragraphs 1 to 3 of Article 190 TEC;
 — paragraph 1 replaces, in substance, the first subparagraph of Article 192 TEC;
 — paragraph 4 replaces, in substance, the first subparagraph of Article 197 TEC.
- (⁹) Replaces, in substance, Article 4.
- (¹⁰) — Paragraph 1 replaces, in substance, the first and second indents of Article 202 TEC;
 — paragraphs 2 and 9 replace, in substance, Article 203 TEC;
 — paragraphs 4 and 5 replace, in substance, paragraphs 2 and 4 of Article 205 TEC.
- (¹¹) — Paragraph 1 replaces, in substance, Article 211 TEC;
 — paragraphs 3 and 7 replace, in substance, Article 214 TEC.
 — paragraph 6 replaces, in substance, paragraphs 1, 3 and 4 of Article 217 TEC.
- (¹²) — Replaces, in substance, Article 220 TEC.
 — the second subparagraph of paragraph 2 replaces, in substance, the first subparagraph of Article 221 TEC.
- (¹³) The current Article 10 TEU amended the Treaty establishing the European Atomic Energy Community. Those amendments are incorporated into the Treaty of Lisbon. Article 10 is repealed and the number thereof is used to insert another provision.
- (¹⁴) Also replaces Articles 11 and 11a TEC.
- (¹⁵) The current Articles 27 A to 27 E, on enhanced cooperation, are also replaced by Articles 280 A to 280 I TFEU (renumbered 326 to 334).

- (¹⁶) The current provisions of Title VI of the TEU, on police and judicial cooperation in criminal matters, are replaced by the provisions of Chapters 1, 5 and 5 of Title IV of Part Three of the TFEU.
- (¹⁷) Replaced by Article 61 TFEU (renumbered 67).
- (¹⁸) Replaced by Articles 69 F and 69 G TFEU (renumbered 87 and 88).
- (¹⁹) Replaced by Articles 69 A, 69 B and 69 D TFEU (renumbered 82, 83 and 85).
- (²⁰) Replaced by Article 69 H TFEU (renumbered 89).
- (²¹) Replaced by Article 61 E TFEU (renumbered 72).
- (²²) Replaced by Article 61 D TFEU (renumbered 71).
- (²³) The current Articles 40 to 40 B, on enhanced cooperation, are also replaced by Articles 280 A to 280 I TFEU (renumbered 326 to 334).
- (²⁴) The current Articles 43 to 45 and Title VII of the TEU, on enhanced cooperation, are also replaced by Articles 280 A to 280 I TFEU (renumbered 326 to 334).

B. Treaty on the Functioning of the European Union

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
PART ONE — PRINCIPLES	PART ONE — PRINCIPLES	PART ONE — PRINCIPLES
Article 1 (repealed)		
	Article 1a	Article 1
Article 2 (repealed) (¹)		
	Title I — Categories and areas of union competence	Title I — Categories and areas of union competence
	Article 2 A	Article 2
	Article 2 B	Article 3
	Article 2 C	Article 4
	Article 2 D	Article 5
	Article 2 E	Article 6
	Title II — Provisions having general application	Title II — Provisions having general application
	Article 2 F	Article 7
Article 3, paragraph 1 (repealed) (²)		
Article 3, paragraph 2	Article 3	Article 8
Article 4 (moved)	Article 97b	Article 119
Article 5 (replaced) (³)		
	Article 5a	Article 9

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
	Article 5b	Article 10
Article 6	Article 6	Article 11
<i>Article 153, paragraph 2 (moved)</i>	Article 6a	Article 12
	Article 6b ⁽⁴⁾	Article 13
Article 7 (repealed) ⁽⁵⁾		
Article 8 (repealed) ⁽⁶⁾		
Article 9 (repealed)		
Article 10 (repealed) ⁽⁷⁾		
Article 11 (replaced) ⁽⁸⁾	<i>Articles 280 A to 280 I</i>	<i>Articles 326 to 334</i>
Article 11a (replaced) ⁽⁸⁾	<i>Articles 280 A to 280 I</i>	<i>Articles 326 to 334</i>
Article 12 (repealed)	<i>Article 16 D</i>	<i>Article 18</i>
Article 13 (moved)	<i>Article 16 E</i>	<i>Article 19</i>
Article 14 (moved)	<i>Article 22a</i>	<i>Article 26</i>
Article 15 (moved)	<i>Article 22b</i>	<i>Article 27</i>
Article 16	Article 16	Article 14
<i>Article 255 (moved)</i>	Article 16 A	Article 15
<i>Article 286 (moved)</i>	Article 16 B	Article 16
	Article 16 C	Article 17
PART TWO — CITIZENSHIP OF THE UNION	PART TWO — NON-DISCRIMINATION AND CITIZENSHIP OF THE UNION	PART TWO — NON-DISCRIMINATION AND CITIZENSHIP OF THE UNION
<i>Article 12 (moved)</i>	Article 16 D	Article 18
<i>Article 13 (moved)</i>	Article 16 E	Article 19
Article 17	Article 17	Article 20
Article 18	Article 18	Article 21
Article 19	Article 19	Article 22
Article 20	Article 20	Article 23
Article 21	Article 21	Article 24
Article 22	Article 22	Article 25

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
PART THREE — COMMUNITY POLICIES	PART THREE — POLICIES AND INTERNAL ACTIONS OF THE UNION	PART THREE — POLICIES AND INTERNAL ACTIONS OF THE UNION
	Title I — The internal market	Title I — The internal market
<i>Article 14 (moved)</i>	Article 22a	Article 26
<i>Article 15 (moved)</i>	Article 22b	Article 27
Title I — Free movement of goods	Title Ia — Free movement of goods	Title II — Free movement of goods
Article 23	Article 23	Article 28
Article 24	Article 24	Article 29
Chapter 1 — The customs union	Chapter 1 — The customs union	Chapter 1 — The customs union
Article 25	Article 25	Article 30
Article 26	Article 26	Article 31
Article 27	Article 27	Article 32
<i>Part Three, Title X, Customs cooperation (moved)</i>	Chapter 1a — Customs cooperation	Chapter 2 — Customs cooperation
<i>Article 135 (moved)</i>	Article 27a	Article 33
Chapter 2 — Prohibition of quantitative restrictions between Member States	Chapter 2 — Prohibition of quantitative restrictions between Member States	Chapter 3 — Prohibition of quantitative restrictions between Member States
Article 28	Article 28	Article 34
Article 29	Article 29	Article 35
Article 30	Article 30	Article 36
Article 31	Article 31	Article 37
Title II — Agriculture	Title II — Agriculture and fisheries	Title III — Agriculture and fisheries
Article 32	Article 32	Article 38
Article 33	Article 33	Article 39
Article 34	Article 34	Article 40
Article 35	Article 35	Article 41
Article 36	Article 36	Article 42
Article 37	Article 37	Article 43

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 38	Article 38	Article 44
Title III — Free movement of persons, services and capital	Title III — Free movement of persons, services and capital	Title IV — Free movement of persons, services and capital
Chapter 1 — Workers	Chapter 1 — Workers	Chapter 1 — Workers
Article 39	Article 39	Article 45
Article 40	Article 40	Article 46
Article 41	Article 41	Article 47
Article 42	Article 42	Article 48
Chapter 2 — Right of establishment	Chapter 2 — Right of establishment	Chapter 2 — Right of establishment
Article 43	Article 43	Article 49
Article 44	Article 44	Article 50
Article 45	Article 45	Article 51
Article 46	Article 46	Article 52
Article 47	Article 47	Article 53
Article 48	Article 48	Article 54
Article 294 (<i>moved</i>)	Article 48a	Article 55
Chapter 3 — Services	Chapter 3 — Services	Chapter 3 — Services
Article 49	Article 49	Article 56
Article 50	Article 50	Article 57
Article 51	Article 51	Article 58
Article 52	Article 52	Article 59
Article 53	Article 53	Article 60
Article 54	Article 54	Article 61
Article 55	Article 55	Article 62
Chapter 4 — Capital and payments	Chapter 4 — Capital and payments	Chapter 4 — Capital and payments
Article 56	Article 56	Article 63
Article 57	Article 57	Article 64
Article 58	Article 58	Article 65

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 59	Article 59	Article 66
Article 60 (moved)	Article 61 H	Article 75
Title IV — Visas, asylum, immigration and other policies related to free movement of persons	Title IV — Area of freedom, security and justice	Title V — Area of freedom, security and justice
	Chapter 1 — General provisions	Chapter 1 — General provisions
Article 61	Article 61 ⁽⁹⁾	Article 67
	Article 61 A	Article 68
	Article 61 B	Article 69
	Article 61 C	Article 70
	Article 61 D ⁽¹⁰⁾	Article 71
Article 64, paragraph 1 (replaced)	Article 61 E ⁽¹¹⁾	Article 72
	Article 61 F	Article 73
Article 66 (replaced)	Article 61 G	Article 74
Article 60 (moved)	Article 61 H	Article 75
	Article 61 I	Article 76
	Chapter 2 — Policies on border checks, asylum and immigration	Chapter 2 — Policies on border checks, asylum and immigration
Article 62	Article 62	Article 77
Article 63, points 1 et 2, and Article 64, paragraph 2 ⁽¹²⁾	Article 63	Article 78
Article 63, points 3 and 4	Article 63a	Article 79
	Article 63b	Article 80
Article 64, paragraph 1 (replaced)	Article 61 E	Article 72
	Chapter 3 — Judicial cooperation in civil matters	Chapter 3 — Judicial cooperation in civil matters
Article 65	Article 65	Article 81
Article 66 (replaced)	Article 61 G	Article 74
Article 67 (repealed)		
Article 68 (repealed)		

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 69 (repealed)		
	Chapter 4 — Judicial cooperation in criminal matters	Chapter 4 — Judicial cooperation in criminal matters
	Article 69 A ⁽¹³⁾	Article 82
	Article 69 B ⁽¹³⁾	Article 83
	Article 69 C	Article 84
	Article 69 D ⁽¹³⁾	Article 85
	Article 69 E	Article 86
	Chapter 5 — Police cooperation	Chapter 5 — Police cooperation
	Article 69 F ⁽¹⁴⁾	Article 87
	Article 69 G ⁽¹⁴⁾	Article 88
	Article 69 H ⁽¹⁵⁾	Article 89
Title V — Transport	Title V — Transport	Title VI — Transport
Article 70	Article 70	Article 90
Article 71	Article 71	Article 91
Article 72	Article 72	Article 92
Article 73	Article 73	Article 93
Article 74	Article 74	Article 94
Article 75	Article 75	Article 95
Article 76	Article 76	Article 96
Article 77	Article 77	Article 97
Article 78	Article 78	Article 98
Article 79	Article 79	Article 99
Article 80	Article 80	Article 100
Title VI — Common rules on competition, taxation and approximation of laws	Title VI — Common rules on competition, taxation and approximation of laws	Title VII — Common rules on competition, taxation and approximation of laws
Chapter 1 — Rules on competition	Chapter 1 — Rules on competition	Chapter 1 — Rules on competition

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Section 1 — Rules applying to undertakings	Section 1 — Rules applying to undertakings	Section 1 — Rules applying to undertakings
Article 81	Article 81	Article 101
Article 82	Article 82	Article 102
Article 83	Article 83	Article 103
Article 84	Article 84	Article 104
Article 85	Article 85	Article 105
Article 86	Article 86	Article 106
Section 2 — Aids granted by States	Section 2 — Aids granted by States	Section 2 — Aids granted by States
Article 87	Article 87	Article 107
Article 88	Article 88	Article 108
Article 89	Article 89	Article 109
Chapter 2 — Tax provisions	Chapter 2 — Tax provisions	Chapter 2 — Tax provisions
Article 90	Article 90	Article 110
Article 91	Article 91	Article 111
Article 92	Article 92	Article 112
Article 93	Article 93	Article 113
Chapter 3 — Approximation of laws	Chapter 3 — Approximation of laws	Chapter 3 — Approximation of laws
<i>Article 95 (moved)</i>	Article 94	Article 114
<i>Article 94 (moved)</i>	Article 95	Article 115
Article 96	Article 96	Article 116
Article 97	Article 97	Article 117
	Article 97a	Article 118
Title VII — Economic and monetary policy	Title VII — Economic and monetary policy	Title VIII — Economic and monetary policy
<i>Article 4 (moved)</i>	Article 97b	Article 119
Chapter 1 — Economic policy	Chapter 1 — Economic policy	Chapter 1 — Economic policy

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 98	Article 98	Article 120
Article 99	Article 99	Article 121
Article 100	Article 100	Article 122
Article 101	Article 101	Article 123
Article 102	Article 102	Article 124
Article 103	Article 103	Article 125
Article 104	Article 104	Article 126
Chapter 2 — monetary policy	Chapter 2 — monetary policy	Chapter 2 — monetary policy
Article 105	Article 105	Article 127
Article 106	Article 106	Article 128
Article 107	Article 107	Article 129
Article 108	Article 108	Article 130
Article 109	Article 109	Article 131
Article 110	Article 110	Article 132
Article 111, paragraphs 1 to 3 and 5 (moved)	Article 188 O	Article 219
Article 111, paragraph 4 (moved)	Article 115 C, paragraph 1	Article 138
	Article 111a	Article 133
Chapter 3 — Institutional provisions	Chapter 3 — Institutional provisions	Chapter 3 — Institutional provisions
Article 112 (moved)	Article 245b	Article 283
Article 113 (moved)	Article 245c	Article 294
Article 114	Article 114	Article 134
Article 115	Article 115	Article 135
	Chapter 3a — Provisions specific to Member States whose currency is the euro	Chapter 4 — Provisions specific to Member States whose currency is the euro
	Article 115 A	Article 136
	Article 115 B	Article 137
Article 111, paragraph 4 (moved)	Article 115 C	Article 138

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Chapter 4 — Transitional provisions	Chapter 4 — Transitional provisions	Chapter 5 — Transitional provisions
Article 116 (repealed)		
	Article 116a	Article 139
Article 117, paragraph 2, first five indents (moved)	Article 118a, paragraph 2	Article 141, paragraph 2
Article 117, paragraphs 1, 2, sixth indent, and 3 to 9 (repealed)		
Article 121, paragraph 1 (moved) Article 122, paragraph 2, second sentence (moved) Article 123, paragraph 5 (moved)	Article 117a, first paragraph ⁽¹⁶⁾ Article 117a, second paragraph ⁽¹⁷⁾ Article 117a, third paragraph ⁽¹⁸⁾	Article 140
Article 118 (repealed)		
Article 123, paragraph 3 (moved) Article 117, paragraph 2, first five indents (moved)	Article 118a, paragraph 1 ⁽¹⁹⁾ Article 118a, paragraph 2 ⁽²⁰⁾	Article 141
Article 124, paragraph 1 (moved)	Article 118b	Article 142
Article 119	Article 119	Article 143
Article 120	Article 120	Article 144
Article 121, paragraph 1 (moved)	Article 117a, paragraph 1	Article 140, paragraph 1
Article 121, paragraphs 2 to 4 (repealed)		
Article 122, paragraphs 1, 2, first sentence, 3, 4, 5 and 6 (repealed)		
Article 122, paragraph 2, second sentence (moved)	Article 117a, paragraph 2, first subparagraph	Article 140, paragraph 2, first subparagraph
Article 123, paragraphs 1, 2 and 4 (repealed)		
Article 123, paragraph 3 (moved)	Article 118a, paragraph 1	Article 141, paragraph 1
Article 123, paragraph 5 (moved)	Article 117a, paragraph 3	Article 140, paragraph 3
Article 124, paragraph 1 (moved)	Article 118b	Article 142
Article 124, paragraph 2 (repealed)		
Title VIII — Employment	Title VIII — Employment	Title IX — Employment
Article 125	Article 125	Article 145

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 126	Article 126	Article 146
Article 127	Article 127	Article 147
Article 128	Article 128	Article 148
Article 129	Article 129	Article 149
Article 130	Article 130	Article 150
Title IX — Common commercial policy (moved)	<i>Part Five, Title II, common commercial policy</i>	<i>Part Five, Title II, common commercial policy</i>
Article 131 (moved)	<i>Article 188 B</i>	<i>Article 206</i>
Article 132 (repealed)		
Article 133 (moved)	<i>Article 188 C</i>	<i>Article 207</i>
Article 134 (repealed)		
Title X — Customs cooperation (moved)	<i>Part Three, Title II, Chapter 1a, Customs cooperation</i>	<i>Part Three, Title II, Chapter 2, Customs cooperation</i>
Article 135 (moved)	<i>Article 27a</i>	<i>Article 33</i>
Title XI — Social policy, education, vocational training and youth	Title IX — Social policy	Title X — Social policy
Chapter 1 — social provisions (repealed)		
Article 136	Article 136	Article 151
	Article 136a	Article 152
Article 137	Article 137	Article 153
Article 138	Article 138	Article 154
Article 139	Article 139	Article 155
Article 140	Article 140	Article 156
Article 141	Article 141	Article 157
Article 142	Article 142	Article 158
Article 143	Article 143	Article 159
Article 144	Article 144	Article 160
Article 145	Article 145	Article 161
Chapter 2 — The European Social Fund	Title X — The European Social Fund	Title XI — The European Social Fund

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 146	Article 146	Article 162
Article 147	Article 147	Article 163
Article 148	Article 148	Article 164
Chapter 3 — Education, vocational training and youth	Title XI — Education, vocational training, youth and sport	Title XII — Education, vocational training, youth and sport
Article 149	Article 149	Article 165
Article 150	Article 150	Article 166
Title XII — Culture	Title XII — Culture	Title XIII — Culture
Article 151	Article 151	Article 167
Title XIII — Public health	Title XIII — Public health	Title XIV — Public health
Article 152	Article 152	Article 168
Title XIV — Consumer protection	Title XIV — Consumer protection	Title XV — Consumer protection
Article 153, paragraphs 1, 3, 4 and 5	Article 153	Article 169
Article 153, paragraph 2 (moved)	<i>Article 6a</i>	<i>Article 12</i>
Title XV — Trans-European networks	Title XV — Trans-European networks	Title XVI — Trans-European networks
Article 154	Article 154	Article 170
Article 155	Article 155	Article 171
Article 156	Article 156	Article 172
Title XVI — Industry	Title XVI — Industry	Title XVII — Industry
Article 157	Article 157	Article 173
Title XVII — Economic and social cohesion	Title XVII — Economic, social and territorial cohesion	Title XVIII — Economic, social and territorial cohesion
Article 158	Article 158	Article 174
Article 159	Article 159	Article 175
Article 160	Article 160	Article 176
Article 161	Article 161	Article 177
Article 162	Article 162	Article 178
Title XVIII — Research and technological development	Title XVIII — Research and technological development and space	Title XIX — Research and technological development and space

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 163	Article 163	Article 179
Article 164	Article 164	Article 180
Article 165	Article 165	Article 181
Article 166	Article 166	Article 182
Article 167	Article 167	Article 183
Article 168	Article 168	Article 184
Article 169	Article 169	Article 185
Article 170	Article 170	Article 186
Article 171	Article 171	Article 187
Article 172	Article 172	Article 188
	Article 172bis	Article 189
Article 173	Article 173	Article 190
Title XIX — Environment	Title XIX — Environment	Title XX — Environment
Article 174	Article 174	Article 191
Article 175	Article 175	Article 192
Article 176	Article 176	Article 193
	Title XX — Energy	Titre XXI — Energy
	Article 176 A	Article 194
	Title XXI — Tourism	Title XXII — Tourism
	Article 176 B	Article 195
	Title XXII — Civil protection	Title XXIII — Civil protection
	Article 176 C	Article 196
	Title XXIII — Administrative cooperation	Title XXIV — Administrative cooperation
	Article 176 D	Article 197
Title XX — Development cooperation (moved)	<i>Part Five, Title III, Chapter 1, Development cooperation</i>	<i>Part Five, Title III, Chapter 1, Development cooperation</i>
Article 177 (moved)	Article 188 D	Article 208
Article 178 (repealed) ⁽²¹⁾		

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 179 (moved)	Article 188 E	Article 209
Article 180 (moved)	Article 188 F	Article 210
Article 181 (moved)	Article 188 G	Article 211
Title XXI — Economic, financial and technical cooperation with third countries (moved)	Part Five, Title III, Chapter 2, Economic, financial and technical cooperation with third countries	Part Five, Title III, Chapter 2, Economic, financial and technical cooperation with third countries
Article 181a (moved)	Article 188 H	Article 212
PART FOUR — ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES	PART FOUR — ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES	PART FOUR — ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES
Article 182	Article 182	Article 198
Article 183	Article 183	Article 199
Article 184	Article 184	Article 200
Article 185	Article 185	Article 201
Article 186	Article 186	Article 202
Article 187	Article 187	Article 203
Article 188	Article 188	Article 204
	PART FIVE — EXTERNAL ACTION BY THE UNION	PART FIVE — EXTERNAL ACTION BY THE UNION
	Title I — General provisions on the union's external action	Title I — General provisions on the union's external action
	Article 188 A	Article 205
Part Three, Title IX, Common commercial policy (moved)	Title II — Common commercial policy	Title II — Common commercial policy
Article 131 (moved)	Article 188 B	Article 206
Article 133 (moved)	Article 188 C	Article 207
	Title III — Cooperation with third countries and humanitarian aid	Title III — Cooperation with third countries and humanitarian aid
Part Three, Title XX, Development cooperation (moved)	Chapter 1 — development cooperation	Chapter 1 — development cooperation
Article 177 (moved)	Article 188 D ⁽²²⁾	Article 208
Article 179 (moved)	Article 188 E	Article 209

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
<i>Article 180 (moved)</i>	Article 188 F	Article 210
<i>Article 181 (moved)</i>	Article 188 G	Article 211
<i>Part Three, Title XXI, Economic, financial and technical cooperation with third countries (moved)</i>	Chapter 2 — Economic, financial and technical cooperation with third countries	Chapter 2 — Economic, financial and technical cooperation with third countries
<i>Article 181a (moved)</i>	Article 188 H	Article 212
	Article 188 I	Article 213
	Chapter 3 — Humanitarian aid	Chapter 3 — Humanitarian aid
	Article 188 J	Article 214
	Title IV — Restrictive measures	Title IV — Restrictive measures
<i>Article 301 (replaced)</i>	Article 188 K	Article 215
	Title V — International agreements	Title V — International agreements
	Article 188 L	Article 216
<i>Article 310 (moved)</i>	Article 188 M	Article 217
<i>Article 300 (replaced)</i>	Article 188 N	Article 218
<i>Article 111, paragraphe 1 to 3 and 5 (moved)</i>	Article 188 O	Article 219
	Title VI — The Union's relations with international organisations and third countries and the Union delegations	Title VI — The Union's relations with international organisations and third countries and the Union delegations
<i>Articles 302 to 304 (replaced)</i>	Article 188 P	Article 220
	Article 188 Q	Article 221
	Title VII — Solidarity clause	Title VII — Solidarity clause
	Article 188 R	Article 222
PART FIVE — INSTITUTIONS OF THE COMMUNITY	PART SIX — INSTITUTIONAL AND BUDGETARY PROVISIONS	PART SIX — INSTITUTIONAL AND BUDGETARY PROVISIONS
Title I — Institutional provisions	Title I — Institutional provisions	Title I — Institutional provisions
Chapter 1 — The institutions	Chapter 1 — The institutions	Chapter 1 — The institutions
Section 1 — The European Parliament	Section 1 — The European Parliament	Section 1 — The European Parliament
<i>Article 189 (repealed) ⁽²³⁾</i>		

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 190, paragraphs 1 to 3 (repealed) ⁽²⁴⁾		
Article 190, paragraphs 4 and 5	Article 190	Article 223
Article 191, first paragraph (repealed) ⁽²⁵⁾		
Article 191, second paragraph	Article 191	Article 224
Article 192, first paragraph (repealed) ⁽²⁶⁾		
Article 192, second paragraph	Article 192	Article 225
Article 193	Article 193	Article 226
Article 194	Article 194	Article 227
Article 195	Article 195	Article 228
Article 196	Article 196	Article 229
Article 197, first paragraph (repealed) ⁽²⁷⁾		
Article 197, second, third and fourth paragraphs	Article 197	Article 230
Article 198	Article 198	Article 231
Article 199	Article 199	Article 232
Article 200	Article 200	Article 233
Article 201	Article 201	Article 234
	Section 1a — The European Council	Section 2 — The European Council
	Article 201a	Article 235
	Article 201b	Article 236
Section 2 — The Council	Section 2 — The Council	Section 3 — The Council
Article 202 (repealed) ⁽²⁸⁾		
Article 203 (repealed) ⁽²⁹⁾		
Article 204	Article 204	Article 237
Article 205, paragraphs 2 and 4 (repealed) ⁽³⁰⁾		
Article 205, paragraphs 1 and 3	Article 205	Article 238
Article 206	Article 206	Article 239

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 207	Article 207	Article 240
Article 208	Article 208	Article 241
Article 209	Article 209	Article 242
Article 210	Article 210	Article 243
Section 3 — The Commission	Section 3 — The Commission	Section 4 — The Commission
Article 211 (repealed) ⁽³¹⁾		
	Article 211a	Article 244
Article 212 (moved)	<i>Article 218, paragraph 2</i>	<i>Article 249, paragraph 2</i>
Article 213	Article 213	Article 245
Article 214 (repealed) ⁽³²⁾		
Article 215	Article 215	Article 246
Article 216	Article 216	Article 247
Article 217, paragraphs 1, 3 and 4 (repealed) ⁽³³⁾		
Article 217, paragraph 2	Article 217	Article 248
Article 218, paragraph 1 (repealed) ⁽³⁴⁾		
Article 218, paragraph 2	Article 218	Article 249
Article 219	Article 219	Article 250
Section 4 — The Court of Justice	Section 4 — The Court of Justice of the European Union	Section 5 — The Court of Justice of the European Union
Article 220 (repealed) ⁽³⁵⁾		
Article 221, first paragraph (repealed) ⁽³⁶⁾		
Article 221, second and third paragraphs	Article 221	Article 251
Article 222	Article 222	Article 252
Article 223	Article 223	Article 253
Article 224 ⁽³⁷⁾	Article 224	Article 254
	Article 224a	Article 255
Article 225	Article 225	Article 256

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 225a	Article 225a	Article 257
Article 226	Article 226	Article 258
Article 227	Article 227	Article 259
Article 228	Article 228	Article 260
Article 229	Article 229	Article 261
Article 229a	Article 229a	Article 262
Article 230	Article 230	Article 263
Article 231	Article 231	Article 264
Article 232	Article 232	Article 265
Article 233	Article 233	Article 266
Article 234	Article 234	Article 267
Article 235	Article 235	Article 268
	Article 235a	Article 269
Article 236	Article 236	Article 270
Article 237	Article 237	Article 271
Article 238	Article 238	Article 272
Article 239	Article 239	Article 273
Article 240	Article 240	Article 274
	Article 240a	Article 275
	Article 240b	Article 276
Article 241	Article 241	Article 277
Article 242	Article 242	Article 278
Article 243	Article 243	Article 279
Article 244	Article 244	Article 280
Article 245	Article 245	Article 281
	Section 4a — The European Central Bank	Section 6 — The European Central Bank
	Article 245a	Article 282
Article 112 (<i>moved</i>)	Article 245b	Article 283

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 113 (<i>moved</i>)	Article 245c	Article 284
Section 5 — The Court of Auditors	Section 5 — The Court of Auditors	Section 7 — The Court of Auditors
Article 246	Article 246	Article 285
Article 247	Article 247	Article 286
Article 248	Article 248	Article 287
Chapter 2 — Provisions common to several institutions	Chapter 2 — Legal acts of the Union, adoption procedures and other provisions	Chapter 2 — Legal acts of the Union, adoption procedures and other provisions
	Section 1 — The legal acts of the Union	Section 1 — The legal acts of the Union
Article 249	Article 249	Article 288
	Article 249 A	Article 289
	Article 249 B ⁽³⁸⁾	Article 290
	Article 249 C ⁽³⁸⁾	Article 291
	Article 249 D	Article 292
	Section 2 — Procedures for the adoption of acts and other provisions	Section 2 — Procedures for the adoption of acts and other provisions
Article 250	Article 250	Article 293
Article 251	Article 251	Article 294
Article 252 (<i>repealed</i>)		
	Article 252a	Article 295
Article 253	Article 253	Article 296
Article 254	Article 254	Article 297
	Article 254a	Article 298
Article 255 (<i>moved</i>)	Article 16 A	Article 15
Article 256	Article 256	Article 299
	Chapter 3 — The Union's advisory bodies	Chapter 3 — The Union's advisory bodies
	Article 256a	Article 300
Chapter 3 — The Economic and Social Committee	Section 1 — The Economic and Social Committee	Section 1 — The Economic and Social Committee

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 257 (repealed) ⁽³⁹⁾		
Article 258, first, second and fourth paragraphs ⁽⁴⁰⁾	Article 258	Article 301
Article 258, third paragraph (repealed) ⁽⁴⁰⁾		
Article 259	Article 259	Article 302
Article 260	Article 260	Article 303
Article 261 (repealed)		
Article 262	Article 262	Article 304
Chapter 4 — The Committee of the Regions	Section 2 — The Committee of the Regions	Section 2 — The Committee of the Regions
Article 263, first and fifth paragraphs (repealed) ⁽⁴¹⁾		
Article 263, second to fourth paragraphs	Article 263	Article 305
Article 264	Article 264	Article 306
Article 265	Article 265	Article 307
Chapter 5 — The European Investment Bank	Chapter 4 — The European Investment Bank	Chapter 4 — The European Investment Bank
Article 266	Article 266	Article 308
Article 267	Article 267	Article 309
Title II — Financial provisions	Title II — Financial provisions	Title II — Financial provisions
Article 268	Article 268	Article 310
	Chapter 1 — The Union's own resources	Chapter 1 — The Union's own resources
Article 269	Article 269	Article 311
Article 270 (repealed) ⁽⁴²⁾		
	Chapter 2 — The multiannual financial framework	Chapter 2 — The multiannual financial framework
	Article 270a	Article 312
	Chapter 3 — The Union's annual budget	Chapter 3 — The Union's annual budget
Article 272, paragraph 1 (moved)	Article 270b	Article 313

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 271 (moved)	Article 273a	Article 316
Article 272, paragraph 1 (moved)	Article 270b	Article 313
Article 272, paragraphs 2 to 10	Article 272	Article 314
Article 273	Article 273	Article 315
Article 271 (moved)	Article 273a	Article 316
	Chapter 4 — Implementation of the budget and discharge	Chapter 4 — Implementation of the budget and discharge
Article 274	Article 274	Article 317
Article 275	Article 275	Article 318
Article 276	Article 276	Article 319
	Chapter 5 — Common provisions	Chapter 5 — Common provisions
Article 277	Article 277	Article 320
Article 278	Article 278	Article 321
Article 279	Article 279	Article 322
	Article 279a	Article 323
	Article 279b	Article 324
	Chapter 6 — Combating fraud	Chapter 6 — Combating fraud
Article 280	Article 280	Article 325
	Title III — Enhanced cooperation	Title III — Enhanced cooperation
Articles 11 and 11 A (replaced)	Article 280 A ⁽⁴³⁾	Article 326
Articles 11 and 11 A (replaced)	Article 280 B ⁽⁴³⁾	Article 327
Articles 11 and 11 A (replaced)	Article 280 C ⁽⁴³⁾	Article 328
Articles 11 and 11 A (replaced)	Article 280 D ⁽⁴³⁾	Article 329
Articles 11 and 11 A (replaced)	Article 280 E ⁽⁴³⁾	Article 330
Articles 11 and 11 A (replaced)	Article 280 F ⁽⁴³⁾	Article 331
Articles 11 and 11 A (replaced)	Article 280 G ⁽⁴³⁾	Article 332
Articles 11 and 11 A (replaced)	Article 280 H ⁽⁴³⁾	Article 333
Articles 11 and 11 A (replaced)	Article 280 I ⁽⁴³⁾	Article 334

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
PART SIX — GENERAL AND FINAL PROVISIONS	PART SEVEN — GENERAL AND FINAL PROVISIONS	PART SEVEN — GENERAL AND FINAL PROVISIONS
Article 281 (repealed) ⁽⁴⁴⁾		
Article 282	Article 282	Article 335
Article 283	Article 283	Article 336
Article 284	Article 284	Article 337
Article 285	Article 285	Article 338
Article 286 (replaced)	Article 16 B	Article 16
Article 287	Article 287	Article 339
Article 288	Article 288	Article 340
Article 289	Article 289	Article 341
Article 290	Article 290	Article 342
Article 291	Article 291	Article 343
Article 292	Article 292	Article 344
Article 293 (repealed)		
Article 294 (moved)	Article 48a	Article 55
Article 295	Article 295	Article 345
Article 296	Article 296	Article 346
Article 297	Article 297	Article 347
Article 298	Article 298	Article 348
Article 299, paragraph 1 (repealed) ⁽⁴⁵⁾		
Article 299, paragraph 2, second, third and fourth subparagraphs	Article 299	Article 349
Article 299, paragraph 2, first subparagraph, and paragraphs 3 to 6 (moved)	Article 311a	Article 355
Article 300 (replaced)	Article 188 N	Article 218
Article 301 (replaced)	Article 188 K	Article 215
Article 302 (replaced)	Article 188 P	Article 220
Article 303 (replaced)	Article 188 P	Article 220

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	Numbering in the Treaty of Lisbon	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 304 (replaced)	<i>Article 188 P</i>	<i>Article 220</i>
Article 305 (repealed)		
Article 306	Article 306	Article 350
Article 307	Article 307	Article 351
Article 308	Article 308	Article 352
	Article 308a	Article 353
Article 309	Article 309	Article 354
Article 310 (moved)	<i>Article 188 M</i>	<i>Article 217</i>
Article 311 (repealed) ⁽⁴⁶⁾		
<i>Article 299, paragraph 2, first subparagraph, and paragraphs 3 to 6 (moved)</i>	Article 311a	Article 355
Article 312	Article 312	Article 356
Final Provisions		
Article 313	Article 313	Article 357
	Article 313a	Article 358
Article 314 (repealed) ⁽⁴⁷⁾		

⁽¹⁾ Replaced, in substance, by Article 2 TEU (renumbered 3).

⁽²⁾ Replaced, in substance, by Articles 2 B to 2 E TFEU (renumbered 3 to 6).

⁽³⁾ Replaced, in substance, by Article 3b TEU (renumbered 5).

⁽⁴⁾ Insertion of the operative part of the protocol on protection and welfare of animals.

⁽⁵⁾ Replaced, in substance, by Article 9 TEU (renumbered 13).

⁽⁶⁾ Replaced, in substance, by Article 9 TEU (renumbered 13) and Article 245a, paragraph 1, TFEU (renumbered 282).

⁽⁷⁾ Replaced, in substance, by Article 3a, paragraph 3, TEU (renumbered 4).

⁽⁸⁾ Also replaced by Article 10 TEU (renumbered 20).

⁽⁹⁾ Also replaces the current Article 29 TEU.

⁽¹⁰⁾ Also replaces the current Article 36 TEU.

⁽¹¹⁾ Also replaces the current Article 33 TEU.

⁽¹²⁾ Points 1 and 2 of Article 63 EC are replaced by paragraphs 1 and 2 of Article 63 TFEU, and paragraph 2 of Article 64 is replaced by paragraph 3 of Article 63 TFEU.

⁽¹³⁾ Replaces the current Article 31 TEU.

⁽¹⁴⁾ Replaces the current Article 30 TEU.

⁽¹⁵⁾ Replaces the current Article 32 TEU.

⁽¹⁶⁾ Article 117a, paragraph 1, (renumbered 140) takes over the wording of paragraph 1 of Article 121.

⁽¹⁷⁾ Article 117a, paragraph 2, (renumbered 140) takes over the second sentence of paragraph 2 of Article 122.

⁽¹⁸⁾ Article 117a, paragraph 3, (renumbered 140) takes over paragraph 5 of Article 123.

- (¹⁹) Article 118a, paragraph 1, (renumbered 140) takes over paragraph 3 of Article 123.
- (²⁰) Article 118a, paragraph 2, (renumbered 141) takes over the first five indents of paragraph 2 of Article 117.
- (²¹) Replaced, in substance, by the second sentence of the second subparagraph of paragraph 1 of Article 188 D TFUE.
- (²²) The second sentence of the second subparagraph of paragraph 1 replaces, in substance, Article 178 TEC.
- (²³) Replaced, in substance, by Article 9 A, paragraphs 1 and 2, TEU (renumbered 14).
- (²⁴) Replaced, in substance, by Article 9 A, paragraphs 1 to 3, TEU (renumbered 14).
- (²⁵) Replaced, in substance, by Article 8 A, paragraph 4, TEU (renumbered 11).
- (²⁶) Replaced, in substance, by Article 9 A, paragraph 1, TEU (renumbered 14).
- (²⁷) Replaced, in substance, by Article 9 A, paragraph 4, TEU (renumbered 14).
- (²⁸) Replaced, in substance, by Article 9 C, paragraph 1, TEU (renumbered 16) and Articles 249 B and 249 C TFEU (renumbered 290 and 291).
- (²⁹) Replaced, in substance, by Article 9 C, paragraphs 2 and 9 TEU (renumbered 16).
- (³⁰) Replaced, in substance, by Article 9 C, paragraphs 4 and 5 TEU (renumbered 16).
- (³¹) Replaced, in substance, by Article 9 D, paragraph 1 TEU (renumbered 17).
- (³²) Replaced, in substance, by Article 9 D, paragraphs 3 and 7 TEU (renumbered 17).
- (³³) Replaced, in substance, by Article 9 D, paragraph 6, TEU (renumbered 17).
- (³⁴) Replaced, in substance, by Article 252a TFEU (renumbered 295).
- (³⁵) Replaced, in substance, by Article 9 F TEU (renumbered 19).
- (³⁶) Replaced, in substance, by Article 9 F, paragraph 2, first subparagraph, of the TEU (renumbered 19).
- (³⁷) The first sentence of the first subparagraph is replaced, in substance, by Article 9 F, paragraph 2, second subparagraph of the TEU (renumbered 19).
- (³⁸) Replaces, in substance, the third indent of Article 202 TEC.
- (³⁹) Replaced, in substance, by Article 256a, paragraph 2 of the TFEU (renumbered 300).
- (⁴⁰) Replaced, in substance, by Article 256a, paragraph 4 of the TFEU (renumbered 300).
- (⁴¹) Replaced, in substance, by Article 256a, paragraphs 3 and 4, TFEU (renumbered 300).
- (⁴²) Replaced, in substance, by Article 268, paragraph 4, TFEU (renumbered 310).
- (⁴³) Also replaces the current Articles 27 A to 27 E, 40 to 40 B, and 43 to 45 TEU.
- (⁴⁴) Replaced, in substance, by Article 49 C TEU (renumbered 52).
- (⁴⁵) Replaced, in substance by Article 49 C TEU (renumbered 52).
- (⁴⁶) Replaced, in substance by Article 49 B TEU (renumbered 51).
- (⁴⁷) Replaced, in substance by Article 53 TEU (renumbered 55).



THE CONFERENCE OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES, convened in Brussels on 23 July 2007 to adopt by common accord the amendments to be made to the Treaty on European Union, the Treaty establishing the European Community, and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, has adopted the following texts:

- I. The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community

- II. Protocols
 - A. Protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community, and/or the Treaty establishing the European Atomic Energy Community:
 - Protocol on the role of national Parliaments in the European Union
 - Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
 - Protocol on the Euro Group
 - Protocol on permanent structured cooperation established by Article 28 A of the Treaty on European Union
 - Protocol relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
 - Protocol on the internal market and competition
 - Protocol on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to Poland and to the United Kingdom
 - Protocol on the exercise of shared competence
 - Protocol on services of general interest
 - Protocol on the Decision of the Council relating to the implementation of Article 9 C(4) of the Treaty on European Union and Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union between 1 November 2014 and 31 March 2017 on the one hand, and as from 1 April 2017 on the other
 - Protocol on transitional provisions

B. Protocols annexed to the Treaty of Lisbon

- Protocol No 1 amending the Protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
- Tables of equivalences referred to in Article 2 of Protocol No 1 amending the protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
- Protocol No 2 amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community

III. Annex to the Treaty of Lisbon:

- Tables of equivalences referred to in Article 5 of the Treaty of Lisbon

The Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.

A. Declarations concerning provisions of the Treaties

1. Declaration concerning the Charter of Fundamental Rights of the European Union
2. Declaration on Article 6(2) of the Treaty on European Union
3. Declaration on Article 7a of the Treaty on European Union
4. Declaration on the composition of the European Parliament
5. Declaration on the political agreement by the European Council concerning the draft Decision on the composition of the European Parliament
6. Declaration on Articles 9 B(5) and (6), Articles 9 D(6) and (7), and Article 9 E of the Treaty on European Union
7. Declaration on Article 9 C(4) of the Treaty on European Union and Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union
8. Declaration on practical measures to be taken upon the entry into force of the Treaty of Lisbon as regards the Presidency of the European Council and of the Foreign Affairs Council
9. Declaration on Article 9 C(9) of the Treaty on European Union concerning the European Council decision on the exercise of the Presidency of the Council
10. Declaration on Article 9 D of the Treaty on European Union
11. Declaration on Article 9 D(6) and (7) of the Treaty on European Union

12. Declaration on Article 9 E of the Treaty on European Union
13. Declaration concerning the common foreign and security policy
14. Declaration concerning the common foreign and security policy
15. Declaration on Article 13a of the Treaty on European Union
16. Declaration on Article 53(2) of the Treaty on European Union
17. Declaration concerning primacy
18. Declaration in relation to the delimitation of competences
19. Declaration on Article 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union
20. Declaration on Article 16 B of the Treaty on the Functioning of the European Union
21. Declaration on the protection of personal data in the fields of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation
22. Declaration on Articles 42 and 63a of the Treaty on the Functioning of the European Union
23. Declaration on the second paragraph of Article 42 of the Treaty on the Functioning of the European Union
24. Declaration concerning the legal personality of the European Union
25. Declaration on Articles 61 H and 188 K of the Treaty on the Functioning of the European Union
26. Declaration on non-participation by a Member State in a measure based on Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union
27. Declaration on Article 69 D(1), second subparagraph, of the Treaty on the Functioning of the European Union
28. Declaration on Article 78 of the Treaty on the Functioning of the European Union
29. Declaration on Article 87(2)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union
30. Declaration on Article 104 of the Treaty on the Functioning of the European Union

31. Declaration on Article 140 of the Treaty on the Functioning of the European Union
32. Declaration on Article 152(4)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union
33. Declaration on Article 158 of the Treaty on the Functioning of the European Union
34. Declaration on Article 163 of the Treaty on the Functioning of the European Union
35. Declaration on Article 176 A of the Treaty on the Functioning of the European Union
36. Declaration on Article 188 N of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the negotiation and conclusion of international agreements by Member States relating to the area of freedom, security and justice
37. Declaration on Article 188 R of the Treaty on the Functioning of the European Union
38. Declaration on Article 222 of the Treaty on the Functioning of the European Union regarding the number of Advocates-General in the Court of Justice
39. Declaration on Article 249 B of the Treaty on the Functioning of the European Union
40. Declaration on Article 280 D of the Treaty on the Functioning of the European Union
41. Declaration on Article 308 of the Treaty on the Functioning of the European Union
42. Declaration on Article 308 of the Treaty on the Functioning of the European Union
43. Declaration on Article 311a(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union

B. Declarations concerning Protocols annexed to the Treaties

44. Declaration on Article 5 of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union
45. Declaration on Article 5(2) of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union
46. Declaration on Article 5(3) of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union

47. Declaration on Article 5(3), (4) and (5) of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union
48. Declaration concerning the Protocol on the position of Denmark
49. Declaration concerning Italy
50. Declaration concerning Article 10 of the Protocol on transitional provisions

Furthermore, the Conference has noted the declarations listed hereafter and annexed to this Final Act:

51. Declaration by the Kingdom of Belgium on national Parliaments
52. Declaration by the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Lithuania, the Grand-Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic on the symbols of the European Union
53. Declaration by the Czech Republic on the Charter of Fundamental Rights of the European Union
54. Declaration by the Federal Republic of Germany, Ireland, the Republic of Hungary, the Republic of Austria and the Kingdom of Sweden
55. Declaration by the Kingdom of Spain and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
56. Declaration by Ireland on Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice
57. Declaration by the Italian Republic on the composition of the European Parliament
58. Declaration by the Republic of Latvia, the Republic of Hungary and the Republic of Malta on the spelling of the name of the single currency in the Treaties
59. Declaration by the Kingdom of the Netherlands on Article 270a of the Treaty on the Functioning of the European Union
60. Declaration by the Kingdom of the Netherlands on Article 311a of the Treaty on the Functioning of the European Union

61. Declaration by the Republic of Poland on the Charter of Fundamental Rights of the European Union
62. Declaration by the Republic of Poland concerning the Protocol on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in relation to Poland and the United Kingdom
63. Declaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the definition of the term 'nationals'
64. Declaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the franchise for elections to the European Parliament
65. Declaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Article 61 H of the Treaty on the Functioning of the European Union



Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.

Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.

V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Kahe tuhanda seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.

Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.

Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.

Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.

Lisabonā, divtūkstoš septītā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio trylikta dieną.

Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.

Magħmul f'Lisbona, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgha.

Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.

V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícisedem.

V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Für Seine Majestät den König der Belgier



„Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»

„Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.“

За Правителството на Република България



Za prezidenta České republiky

*John G.
Schwarzborg*

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

*Per Hylleberg
Henrik Rasmussen*

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

*Angelika
Frank-Walter*

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Andrus Ansip
Urmas Paet

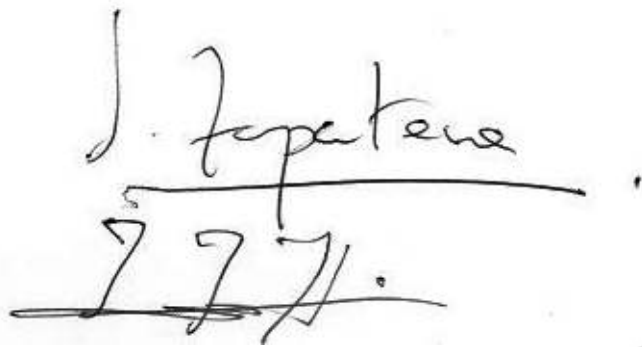
Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Bertie Ahern
Dermot Ahern

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Karolos Papoulias
Niki Karamanlis

Por Su Majestad el Rey de España



J. Zapatero

Pour le Président de la République française



N. Sarkozy

Per il Presidente della Repubblica italiana



Giorgio Napolitano



Susilo Bambang Yudhoyono


Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας


 Ζόισος Λιβανός
 Εκκλαση

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā


 Valdis Zatlers
 Valdis Zatlers

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu


 Valdas Adamkus
 Valdas Adamkus
 P. vai L

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

f

q ks

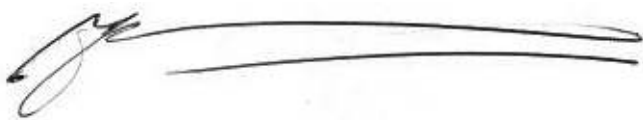
A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Ábrahám Ábrahám

Għall-President ta' Malta

Michael Frendo

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden



Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich



Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej



Radosław Sikorski

Pelo Presidente da República Portuguesa



Handwritten signature of José Sampaio, President of the Portuguese Republic.

Pentru Președintele României



Handwritten signature of Traian Băsescu, President of Romania, with the name 'Traian Băsescu' written above it.

Za predsednika Republike Slovenije



Handwritten signature of Danilo Türk, President of the Republic of Slovenia.

Za prezidenta Slovenskej republiky

Zdobytica
Jan Kubis

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

Matti Vanhanen

Kenn Karman

För Konungariket Sveriges regering

Credin Cristofor

Cecilia Malmström

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Carole Remy Jamblich



A. DECLARATIONS CONCERNING PROVISIONS OF THE TREATIES

1. Declaration concerning the Charter of Fundamental Rights of the European Union

The Charter of Fundamental Rights of the European Union, which has legally binding force, confirms the fundamental rights guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States.

The Charter does not extend the field of application of Union law beyond the powers of the Union or establish any new power or task for the Union, or modify powers and tasks as defined by the Treaties.

2. Declaration on Article 6(2) of the Treaty on European Union

The Conference agrees that the Union's accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms should be arranged in such a way as to preserve the specific features of Union law. In this connection, the Conference notes the existence of a regular dialogue between the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights; such dialogue could be reinforced when the Union accedes to that Convention.

3. Declaration on Article 7a of the Treaty on European Union

The Union will take into account the particular situation of small-sized countries which maintain specific relations of proximity with it.

4. Declaration on the composition of the European Parliament

The additional seat in the European Parliament will be attributed to Italy.

5. Declaration on the political agreement by the European Council concerning the draft Decision on the composition of the European Parliament

The European Council will give its political agreement on the revised draft Decision on the composition of the European Parliament for the legislative period 2009-2014, based on the proposal from the European Parliament.

6. Declaration on Article 9 B(5) and (6), Article 9 D(6) and (7) and Article 9 E of the Treaty on European Union

In choosing the persons called upon to hold the offices of President of the European Council, President of the Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, due account is to be taken of the need to respect the geographical and demographic diversity of the Union and its Member States.

7. Declaration on Article 9 C(4) of the Treaty on European Union and Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference declares that the decision relating to the implementation of Article 9 C(4) of the Treaty on European Union and Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union will be adopted by the Council on the date of the signature of the Treaty of Lisbon and will enter into force on the day that Treaty enters into force. The draft decision is set out below:

Draft decision of the Council
relating to the implementation of Article 9 C(4) of the Treaty on European Union
and Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union
between 1 November 2014 and 31 March 2017 on the one hand, and as from
1 April 2017 on the other

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Whereas:

- (1) Provisions should be adopted allowing for a smooth transition from the system for decision-making in the Council by a qualified majority as defined in Article 3(3) of the Protocol on the transitional provisions, which will continue to apply until 31 October 2014, to the voting system provided for in Article 9 C(4) of the Treaty on European Union and Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, which will apply with effect from 1 November 2014, including, during a transitional period until 31 March 2017, specific provisions laid down in Article 3(2) of that Protocol.
- (2) It is recalled that it is the practice of the Council to devote every effort to strengthening the democratic legitimacy of decisions taken by a qualified majority,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Section 1

Provisions to be applied from 1 November 2014 to 31 March 2017

Article 1

From 1 November 2014 to 31 March 2017, if members of the Council, representing:

- (a) at least three quarters of the population, or
- (b) at least three quarters of the number of Member States

necessary to constitute a blocking minority resulting from the application of Article 9 C(4), first subparagraph, of the Treaty on European Union or Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, indicate their opposition to the Council adopting an act by a qualified majority, the Council shall discuss the issue.

Article 2

The Council shall, in the course of these discussions, do all in its power to reach, within a reasonable time and without prejudicing obligatory time limits laid down by Union law, a satisfactory solution to address concerns raised by the members of the Council referred to in Article 1.

Article 3

To this end, the President of the Council, with the assistance of the Commission and in compliance with the Rules of Procedure of the Council, shall undertake any initiative necessary to facilitate a wider basis of agreement in the Council. The members of the Council shall lend him or her their assistance.

Section 2

Provisions to be applied as from 1 April 2017

Article 4

As from 1 April 2017, if members of the Council, representing:

- (a) at least 55 % of the population, or
- (b) at least 55 % of the number of Member States

necessary to constitute a blocking minority resulting from the application of Article 9 C(4), first subparagraph, of the Treaty on European Union or Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, indicate their opposition to the Council adopting an act by a qualified majority, the Council shall discuss the issue.

Article 5

The Council shall, in the course of these discussions, do all in its power to reach, within a reasonable time and without prejudicing obligatory time limits laid down by Union law, a satisfactory solution to address concerns raised by the members of the Council referred to in Article 4.

Article 6

To this end, the President of the Council, with the assistance of the Commission and in compliance with the Rules of Procedure of the Council, shall undertake any initiative necessary to facilitate a wider basis of agreement in the Council. The members of the Council shall lend him or her their assistance.

Section 3

Entry into force

Article 7

This Decision shall enter into force on the date of the entry into force of the Treaty of Lisbon.

8. Declaration on practical measures to be taken upon the entry into force of the Treaty of Lisbon as regards the Presidency of the European Council and of the Foreign Affairs Council

In the event that the Treaty of Lisbon enters into force later than 1 January 2009, the Conference requests the competent authorities of the Member State holding the six-monthly Presidency of the Council at that time, on the one hand, and the person elected President of the European Council and the person appointed High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, on the other hand, to take the necessary specific measures, in consultation with the following six-monthly Presidency, to allow an efficient handover of the material and organisational aspects of the Presidency of the European Council and of the Foreign Affairs Council.

**9. Declaration on Article 9 C(9) of the Treaty on European Union
concerning the European Council decision on the exercise of the Presidency
of the Council**

The Conference declares that the Council should begin preparing the decision establishing the procedures for implementing the decision on the exercise of the Presidency of the Council as soon as the Treaty of Lisbon is signed, and should give its political approval within six months. A draft decision of the European Council, which will be adopted on the date of entry into force of the said Treaty, is set out below:

Draft decision of the European Council on the exercise of the Presidency of the Council

Article 1

1. The Presidency of the Council, with the exception of the Foreign Affairs configuration, shall be held by pre-established groups of three Member States for a period of 18 months. The groups shall be made up on a basis of equal rotation among the Member States, taking into account their diversity and geographical balance within the Union.

2. Each member of the group shall in turn chair for a six-month period all configurations of the Council, with the exception of the Foreign Affairs configuration. The other members of the group shall assist the Chair in all its responsibilities on the basis of a common programme. Members of the team may decide alternative arrangements among themselves.

Article 2

The Committee of Permanent Representatives of the Governments of the Member States shall be chaired by a representative of the Member State chairing the General Affairs Council.

The Chair of the Political and Security Committee shall be held by a representative of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.

The chair of the preparatory bodies of the various Council configurations, with the exception of the Foreign Affairs configuration, shall fall to the member of the group chairing the relevant configuration, unless decided otherwise in accordance with Article 4.

Article 3

The General Affairs Council shall ensure consistency and continuity in the work of the different Council configurations in the framework of multiannual programmes in cooperation with the Commission. The Member States holding the Presidency shall take all necessary measures for the organisation and smooth operation of the Council's work, with the assistance of the General Secretariat of the Council.

Article 4

The Council shall adopt a decision establishing the measures for the implementation of this decision.

10. Declaration on Article 9 D of the Treaty on European Union

The Conference considers that when the Commission no longer includes nationals of all Member States, the Commission should pay particular attention to the need to ensure full transparency in relations with all Member States. Accordingly, the Commission should liaise closely with all Member States, whether or not they have a national serving as member of the Commission, and in this context pay special attention to the need to share information and consult with all Member States.

The Conference also considers that the Commission should take all the necessary measures to ensure that political, social and economic realities in all Member States, including those which have no national serving as member of the Commission, are fully taken into account. These measures should include ensuring that the position of those Member States is addressed by appropriate organisational arrangements.

11. Declaration on Article 9 D(6) and (7) of the Treaty on European Union

The Conference considers that, in accordance with the provisions of the Treaties, the European Parliament and the European Council are jointly responsible for the smooth running of the process leading to the election of the President of the European Commission. Prior to the decision of the European Council, representatives of the European Parliament and of the European Council will thus conduct the necessary consultations in the framework deemed the most appropriate. These consultations will focus on the backgrounds of the candidates for President of the Commission, taking account of the elections to the European Parliament, in accordance with the first subparagraph of Article 9 D(7). The arrangements for such consultations may be determined, in due course, by common accord between the European Parliament and the European Council.

12. Declaration on Article 9 E of the Treaty on European Union

1. The Conference declares that, in the course of the preparatory work preceding the appointment of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy which is due to take place on the date of entry into force of the Treaty of Lisbon in accordance with Article 9 E of the Treaty on European Union and Article 5 of the Protocol on transitional provisions and whose term of office will be from that date until the end of the term of office of the Commission in office on that date, appropriate contacts will be made with the European Parliament.

2. Furthermore, the Conference recalls that, as regards the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy whose term of office will start in November 2009 at the same time and for the same duration as the next Commission, he or she will be appointed in accordance with the provisions of Articles 9 D and 9 E of the Treaty on European Union.

13. **Declaration concerning the common foreign and security policy**

The Conference underlines that the provisions in the Treaty on European Union covering the Common Foreign and Security Policy, including the creation of the office of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the establishment of an External Action Service, do not affect the responsibilities of the Member States, as they currently exist, for the formulation and conduct of their foreign policy nor of their national representation in third countries and international organisations.

The Conference also recalls that the provisions governing the Common Security and Defence Policy do not prejudice the specific character of the security and defence policy of the Member States.

It stresses that the European Union and its Member States will remain bound by the provisions of the Charter of the United Nations and, in particular, by the primary responsibility of the Security Council and of its Members for the maintenance of international peace and security.

14. **Declaration concerning the common foreign and security policy**

In addition to the specific rules and procedures referred to in paragraph 1 of Article 11 of the Treaty on European Union, the Conference underlines that the provisions covering the Common Foreign and Security Policy including in relation to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the External Action Service will not affect the existing legal basis, responsibilities, and powers of each Member State in relation to the formulation and conduct of its foreign policy, its national diplomatic service, relations with third countries and participation in international organisations, including a Member State's membership of the Security Council of the United Nations.

The Conference also notes that the provisions covering the Common Foreign and Security Policy do not give new powers to the Commission to initiate decisions nor do they increase the role of the European Parliament.

The Conference also recalls that the provisions governing the Common Security and Defence Policy do not prejudice the specific character of the security and defence policy of the Member States.

15. **Declaration on Article 13a of the Treaty on European Union**

The Conference declares that, as soon as the Treaty of Lisbon is signed, the Secretary-General of the Council, High Representative for the common foreign and security policy, the Commission and the Member States should begin preparatory work on the European External Action Service.

16. Declaration on Article 53(2) of the Treaty on European Union

The Conference considers that the possibility of producing translations of the Treaties in the languages mentioned in Article 53(2) contributes to fulfilling the objective of respecting the Union's rich cultural and linguistic diversity as set forth in the fourth subparagraph of Article 2(3). In this context, the Conference confirms the attachment of the Union to the cultural diversity of Europe and the special attention it will continue to pay to these and other languages.

The Conference recommends that those Member States wishing to avail themselves of the possibility recognised in Article 53(2) communicate to the Council, within six months from the date of the signature of the Treaty of Lisbon, the language or languages into which translations of the Treaties will be made.

17. Declaration concerning primacy

The Conference recalls that, in accordance with well settled case law of the Court of Justice of the European Union, the Treaties and the law adopted by the Union on the basis of the Treaties have primacy over the law of Member States, under the conditions laid down by the said case law.

The Conference has also decided to attach as an Annex to this Final Act the Opinion of the Council Legal Service on the primacy of EC law as set out in 11197/07 (JUR 260):

'Opinion of the Council Legal Service of 22 June 2007

It results from the case-law of the Court of Justice that primacy of EC law is a cornerstone principle of Community law. According to the Court, this principle is inherent to the specific nature of the European Community. At the time of the first judgment of this established case law (Costa/ENEL, 15 July 1964, Case 6/641 ⁽¹⁾) there was no mention of primacy in the treaty. It is still the case today. The fact that the principle of primacy will not be included in the future treaty shall not in any way change the existence of the principle and the existing case-law of the Court of Justice.

⁽¹⁾ "It follows (...) that the law stemming from the treaty, an independent source of law, could not, because of its special and original nature, be overridden by domestic legal provisions, however framed, without being deprived of its character as Community law and without the legal basis of the Community itself being called into question."

18. Declaration in relation to the delimitation of competences

The Conference underlines that, in accordance with the system of division of competences between the Union and the Member States as provided for in the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, competences not conferred upon the Union in the Treaties remain with the Member States.

When the Treaties confer on the Union a competence shared with the Member States in a specific area, the Member States shall exercise their competence to the extent that the Union has not exercised, or has decided to cease exercising, its competence. The latter situation arises when the relevant EU institutions decide to repeal a legislative act, in particular better to ensure constant respect for the principles of subsidiarity and proportionality. The Council may, at the initiative of one or several of its members (representatives of Member States) and in accordance with Article 208 of the Treaty on the Functioning of the European Union, request the Commission to submit proposals for repealing a legislative act. The Conference welcomes the Commission's declaration that it will devote particular attention to these requests.

Equally, the representatives of the governments of the Member States, meeting in an Intergovernmental Conference, in accordance with the ordinary revision procedure provided for in Article 48(2) to (5) of the Treaty on European Union, may decide to amend the Treaties upon which the Union is founded, including either to increase or to reduce the competences conferred on the Union in the said Treaties.

19. Declaration on Article 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference agrees that, in its general efforts to eliminate inequalities between women and men, the Union will aim in its different policies to combat all kinds of domestic violence. The Member States should take all necessary measures to prevent and punish these criminal acts and to support and protect the victims.

20. Declaration on Article 16 B of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference declares that, whenever rules on protection of personal data to be adopted on the basis of Article 15a could have direct implications for national security, due account will have to be taken of the specific characteristics of the matter. It recalls that the legislation presently applicable (see in particular Directive 95/46/EC) includes specific derogations in this regard.

21. Declaration on the protection of personal data in the fields of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation

The Conference acknowledges that specific rules on the protection of personal data and the free movement of such data in the fields of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation based on Article 16 B of the Treaty on the Functioning of the European Union may prove necessary because of the specific nature of these fields.

22. Declaration on Articles 42 and 63a of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference considers that in the event that a draft legislative act based on Article 69 A(2) would affect important aspects of the social security system of a Member State, including its scope, cost or financial structure, or would affect the financial balance of that system as set out in the second paragraph of Article 42, the interests of that Member State will be duly taken into account.

23. Declaration on the second paragraph of Article 42 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference recalls that in that case, in accordance with Article 9 B(4) of the Treaty on European Union, the European Council acts by consensus.

24. Declaration concerning the legal personality of the European Union

The Conference confirms that the fact that the European Union has a legal personality will not in any way authorise the Union to legislate or to act beyond the competences conferred upon it by the Member States in the Treaties.

25. Declaration on Articles 61 H and 188 K of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference recalls that the respect for fundamental rights and freedoms implies, in particular, that proper attention is given to the protection and observance of the due process rights of the individuals or entities concerned. For this purpose and in order to guarantee a thorough judicial review of decisions subjecting an individual or entity to restrictive measures, such decisions must be based on clear and distinct criteria. These criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.

26. Declaration on non-participation by a Member State in a measure based on Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference declares that, where a Member State opts not to participate in a measure based on Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Council will hold a full discussion on the possible implications and effects of that Member State's non-participation in the measure.

In addition, any Member State may ask the Commission to examine the situation on the basis of Article 96 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

The above paragraphs are without prejudice to the entitlement of a Member State to refer the matter to the European Council.

27. Declaration on Article 69 D(1), second subparagraph, of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference considers that the regulations referred to in the second subparagraph of Article 69 D(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union should take into account national rules and practices relating to the initiation of criminal investigations.

28. Declaration on Article 78 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference notes that the provisions of Article 78 shall be applied in accordance with the current practice. The terms 'such measures are required in order to compensate for the economic disadvantages caused by the division of Germany to the economy of certain areas of the Federal Republic affected by that division' shall be interpreted in accordance with the existing case law of the Court of Justice of the European Union.

29. Declaration on Article 87(2)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference notes that Article 87(2)(c) shall be interpreted in accordance with the existing case law of the Court of Justice of the European Union regarding the applicability of the provisions to aid granted to certain areas of the Federal Republic of Germany affected by the former division of Germany.

30. Declaration on Article 104 of the Treaty on the Functioning of the European Union

With regard to Article 104, the Conference confirms that raising growth potential and securing sound budgetary positions are the two pillars of the economic and fiscal policy of the Union and the Member States. The Stability and Growth Pact is an important tool to achieve these goals.

The Conference reaffirms its commitment to the provisions concerning the Stability and Growth Pact as the framework for the coordination of budgetary policies in the Member States.

The Conference confirms that a rule-based system is the best guarantee for commitments to be enforced and for all Member States to be treated equally.

Within this framework, the Conference also reaffirms its commitment to the goals of the Lisbon Strategy: job creation, structural reforms, and social cohesion.

The Union aims at achieving balanced economic growth and price stability. Economic and budgetary policies thus need to set the right priorities towards economic reforms, innovation, competitiveness and strengthening of private investment and consumption in phases of weak economic growth. This should be reflected in the orientations of budgetary decisions at the national and Union level in

particular through restructuring of public revenue and expenditure while respecting budgetary discipline in accordance with the Treaties and the Stability and Growth Pact.

Budgetary and economic challenges facing the Member States underline the importance of sound budgetary policy throughout the economic cycle.

The Conference agrees that Member States should use periods of economic recovery actively to consolidate public finances and improve their budgetary positions. The objective is to gradually achieve a budgetary surplus in good times which creates the necessary room to accommodate economic downturns and thus contribute to the long-term sustainability of public finances.

The Member States look forward to possible proposals of the Commission as well as further contributions of Member States with regard to strengthening and clarifying the implementation of the Stability and Growth Pact. The Member States will take all necessary measures to raise the growth potential of their economies. Improved economic policy coordination could support this objective. This Declaration does not prejudge the future debate on the Stability and Growth Pact.

31. Declaration on Article 140 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference confirms that the policies described in Article 140 fall essentially within the competence of the Member States. Measures to provide encouragement and promote coordination to be taken at Union level in accordance with this Article shall be of a complementary nature. They shall serve to strengthen cooperation between Member States and not to harmonise national systems. The guarantees and practices existing in each Member State as regards the responsibility of the social partners will not be affected.

This Declaration is without prejudice to the provisions of the Treaties conferring competence on the Union, including in social matters.

32. Declaration on Article 152(4)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference declares that the measures to be adopted pursuant to Article 152(4)(c) must meet common safety concerns and aim to set high standards of quality and safety where national standards affecting the internal market would otherwise prevent a high level of human health protection being achieved.

33. Declaration on Article 158 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference considers that the reference in Article 158 to island regions can include island States in their entirety, subject to the necessary criteria being met.

34. Declaration on Article 163 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference agrees that the Union's action in the area of research and technological development will pay due respect to the fundamental orientations and choices of the research policies of the Member States.

35. Declaration on Article 176 A of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference believes that Article 176 A does not affect the right of the Member States to take the necessary measures to ensure their energy supply under the conditions provided for in Article 297.

36. Declaration on Article 188 N of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the negotiation and conclusion of international agreements by Member States relating to the area of freedom, security and justice

The Conference confirms that Member States may negotiate and conclude agreements with third countries or international organisations in the areas covered by Chapters 3, 4 and 5 of Title IV of Part Three insofar as such agreements comply with Union law.

37. Declaration on Article 188 R of the Treaty on the Functioning of the European Union

Without prejudice to the measures adopted by the Union to comply with its solidarity obligation towards a Member State which is the object of a terrorist attack or the victim of natural or man-made disaster, none of the provisions of Article 188 R is intended to affect the right of another Member State to choose the most appropriate means to comply with its own solidarity obligation towards that Member State.

38. Declaration on Article 222 of the Treaty on the Functioning of the European Union regarding the number of Advocates-General in the Court of Justice

The Conference declares that if, in accordance with Article 222, first paragraph, of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Court of Justice requests that the number of Advocates-General be increased by three (eleven instead of eight), the Council will, acting unanimously, agree on such an increase.

In that case, the Conference agrees that Poland will, as is already the case for Germany, France, Italy, Spain and the United Kingdom, have a permanent Advocate-General and no longer take part in the rotation system, while the existing rotation system will involve the rotation of five Advocates-General instead of three.

39. Declaration on Article 249 B of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference takes note of the Commission's intention to continue to consult experts appointed by the Member States in the preparation of draft delegated acts in the financial services area, in accordance with its established practice.

40. Declaration on Article 280 D of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference declares that Member States may indicate, when they make a request to establish enhanced cooperation, if they intend already at that stage to make use of Article 280 H providing for the extension of qualified majority voting or to have recourse to the ordinary legislative procedure.

41. Declaration on Article 308 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference declares that the reference in Article 308(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union to objectives of the Union refers to the objectives as set out in Article 2(2) and (3) of the Treaty on European Union and to the objectives of Article 3(5) of the said Treaty with respect to external action under Part Five of the Treaty on the Functioning of the European Union. It is therefore excluded that an action based on Article 308 of the Treaty on the Functioning of the European Union would only pursue objectives set out in Article 2(1) of the Treaty on European Union. In this connection, the Conference notes that in accordance with Article 15b(1) of the Treaty on European Union, legislative acts may not be adopted in the area of the Common Foreign and Security Policy.

42. Declaration on Article 308 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference underlines that, in accordance with the settled case law of the Court of Justice of the European Union, Article 308 of the Treaty on the Functioning of the European Union, being an integral part of an institutional system based on the principle of conferred powers, cannot serve as a basis for widening the scope of Union powers beyond the general framework created by the provisions of the Treaties as a whole and, in particular, by those that define the tasks and the activities of the Union. In any event, this Article cannot be used as a basis for the adoption of provisions whose effect would, in substance, be to amend the Treaties without following the procedure which they provide for that purpose.

43. Declaration on Article 311a(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union

The High Contracting Parties agree that the European Council, pursuant to Article 311a(6), will take a decision leading to the modification of the status of Mayotte with regard to the Union in order to make this territory an outermost region within the meaning of Article 311a(1) and Article 299, when the French authorities notify the European Council and the Commission that the evolution currently under way in the internal status of the island so allows.

B. DECLARATIONS CONCERNING PROTOCOLS ANNEXED TO THE TREATIES

44. Declaration on Article 5 of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union

The Conference notes that where a Member State has made a notification under Article 5(2) of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union that it does not wish to take part in a proposal or initiative, that notification may be withdrawn at any moment before the adoption of the measure building upon the Schengen *acquis*.

45. Declaration on Article 5(2) of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union

The Conference declares that whenever the United Kingdom or Ireland indicates to the Council its intention not to participate in a measure building upon a part of the Schengen *acquis* in which it participates, the Council will have a full discussion on the possible implications of the non-participation of that Member State in that measure. The discussion within the Council should be conducted in the light of the indications given by the Commission concerning the relationship between the proposal and the Schengen *acquis*.

46. Declaration on Article 5(3) of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union

The Conference recalls that if the Council does not take a decision after a first substantive discussion of the matter, the Commission may present an amended proposal for a further substantive re-examination by the Council within the deadline of 4 months.

47. Declaration on Article 5(3), (4) and (5) of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union

The Conference notes that the conditions to be determined in the decision referred to in paragraphs 3, 4 or 5 of Article 5 of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union may determine that the Member State concerned shall bear the direct financial consequences, if any, necessarily and unavoidably incurred as a result of the cessation of its participation in some or all of the *acquis* referred to in any decision taken by the Council pursuant to Article 4 of the said Protocol.

48. **Declaration concerning the Protocol on the position of Denmark**

The Conference notes that with respect to legal acts to be adopted by the Council acting alone or jointly with the European Parliament and containing provisions applicable to Denmark as well as provisions not applicable to Denmark because they have a legal basis to which Part I of the Protocol on the position of Denmark applies, Denmark declares that it will not use its voting right to prevent the adoption of the provisions which are not applicable to Denmark.

Furthermore, the Conference notes that on the basis of the Declaration by the Conference on Article 188 R, Denmark declares that Danish participation in actions or legal acts pursuant to Article 188 R will take place in accordance with Part I and Part II of the Protocol on the position of Denmark.

49. **Declaration concerning Italy**

The Conference notes that the Protocol on Italy annexed in 1957 to the Treaty establishing the European Economic Community, as amended upon adoption of the Treaty on European Union, stated that:

‘THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to settle certain particular problems relating to Italy,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to this Treaty:

THE MEMBER STATES OF THE COMMUNITY

TAKE NOTE of the fact that the Italian Government is carrying out a ten-year programme of economic expansion designed to rectify the disequilibria in the structure of the Italian economy, in particular by providing an infrastructure for the less developed areas in Southern Italy and in the Italian islands and by creating new jobs in order to eliminate unemployment;

RECALL that the principles and objectives of this programme of the Italian Government have been considered and approved by organisations for international cooperation of which the Member States are members;

RECOGNISE that it is in their common interest that the objectives of the Italian programme should be attained;

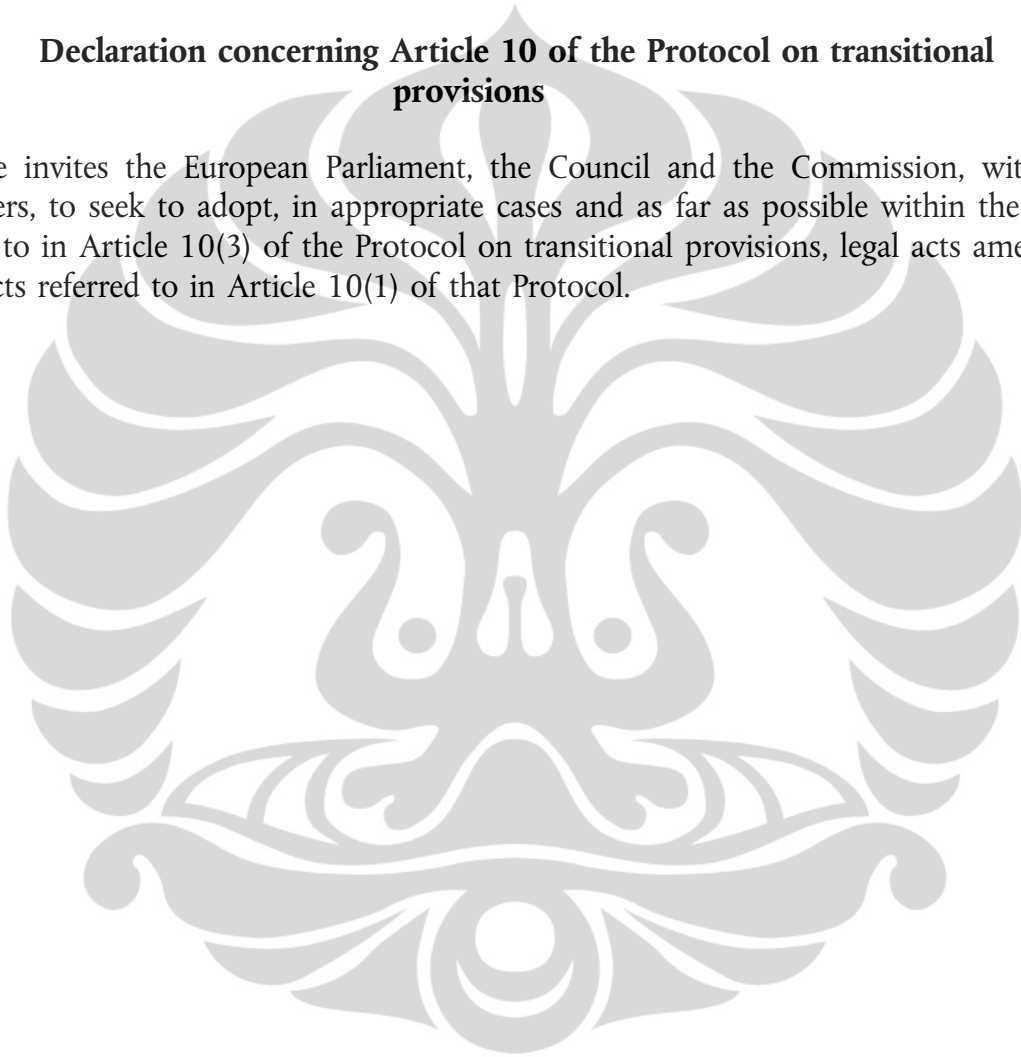
AGREE, in order to facilitate the accomplishment of this task by the Italian Government, to recommend to the institutions of the Community that they should employ all the methods and procedures provided in this Treaty and, in particular, make appropriate use of the resources of the European Investment Bank and the European Social Fund;

ARE OF THE OPINION that the institutions of the Community should, in applying this Treaty, take account of the sustained effort to be made by the Italian economy in the coming years and of the desirability of avoiding dangerous stresses in particular within the balance of payments or the level of employment, which might jeopardise the application of this Treaty in Italy;

RECOGNISE that in the event of Articles 109 H and 109 I being applied it will be necessary to take care that any measures required of the Italian Government do not prejudice the completion of its programme for economic expansion and for raising the standard of living of the population.’.

50. Declaration concerning Article 10 of the Protocol on transitional provisions

The Conference invites the European Parliament, the Council and the Commission, within their respective powers, to seek to adopt, in appropriate cases and as far as possible within the five-year period referred to in Article 10(3) of the Protocol on transitional provisions, legal acts amending or replacing the acts referred to in Article 10(1) of that Protocol.



C. DECLARATIONS BY MEMBER STATES

Furthermore, the Conference has noted the declarations listed hereafter and annexed to this Final Act:

51. Declaration by the Kingdom of Belgium on national Parliaments

Belgium wishes to make clear that, in accordance with its constitutional law, not only the Chamber of Representatives and Senate of the Federal Parliament but also the parliamentary assemblies of the Communities and the Regions act, in terms of the competences exercised by the Union, as components of the national parliamentary system or chambers of the national Parliament.

52. Declaration by the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Lithuania, the Grand-Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic on the symbols of the European Union

Belgium, Bulgaria, Germany, Greece, Spain, Italy, Cyprus, Lithuania, Luxemburg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania, Slovenia and the Slovak Republic declare that the flag with a circle of twelve golden stars on a blue background, the anthem based on the 'Ode to Joy' from the Ninth Symphony by Ludwig van Beethoven, the motto 'United in diversity', the euro as the currency of the European Union and Europe Day on 9 May will for them continue as symbols to express the sense of community of the people in the European Union and their allegiance to it.

53. Declaration by the Czech Republic on the Charter of Fundamental Rights of the European Union

1. The Czech Republic recalls that the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union are addressed to the institutions and bodies of the European Union with due regard for the principle of subsidiarity and division of competences between the European Union and its Member States, as reaffirmed in Declaration (No 18) in relation to the delimitation of competences. The Czech Republic stresses that its provisions are addressed to the Member States only when they are implementing Union law, and not when they are adopting and implementing national law independently from Union law.

2. The Czech Republic also emphasises that the Charter does not extend the field of application of Union law and does not establish any new power for the Union. It does not diminish the field of application of national law and does not restrain any current powers of the national authorities in this field.

3. The Czech Republic stresses that, in so far as the Charter recognises fundamental rights and principles as they result from constitutional traditions common to the Member States, those rights and principles are to be interpreted in harmony with those traditions.

4. The Czech Republic further stresses that nothing in the Charter may be interpreted as restricting or adversely affecting human rights and fundamental freedoms as recognised, in their respective field of application, by Union law and by international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by the Member States' Constitutions.

54. Declaration by the Federal Republic of Germany, Ireland, the Republic of Hungary, the Republic of Austria and the Kingdom of Sweden

Germany, Ireland, Hungary, Austria and Sweden note that the core provisions of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community have not been substantially amended since its entry into force and need to be brought up to date. They therefore support the idea of a Conference of the Representatives of the Governments of the Member States, which should be convened as soon as possible.

55. Declaration by the Kingdom of Spain and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

The Treaties apply to Gibraltar as a European territory for whose external relations a Member State is responsible. This shall not imply changes in the respective positions of the Member States concerned.

56. Declaration by Ireland on Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice

Ireland affirms its commitment to the Union as an area of freedom, security and justice respecting fundamental rights and the different legal systems and traditions of the Member States within which citizens are provided with a high level of safety.

Accordingly, Ireland declares its firm intention to exercise its right under Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice to take part in the adoption of measures pursuant to Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union to the maximum extent it deems possible.

Ireland will, in particular, participate to the maximum possible extent in measures in the field of police cooperation.

Furthermore, Ireland recalls that in accordance with Article 8 of the Protocol it may notify the Council in writing that it no longer wishes to be covered by the terms of the Protocol. Ireland intends to review the operation of these arrangements within three years of the entry into force of the Treaty of Lisbon.

57. Declaration by the Italian Republic on the composition of the European Parliament

Italy notes that, pursuant to Article 8 A (renumbered Article 10) and Article 9 A (renumbered Article 14) of the Treaty on European Union, the European Parliament is to be composed of representatives of the Union's citizens; this representation is to be degressively proportional.

Italy likewise notes that on the basis of Article 8 (renumbered Article 9) of the Treaty on European Union and Article 17 (renumbered Article 20) of the Treaty on the Functioning of the European Union, every national of a Member State is a citizen of the Union.

Italy therefore considers that, without prejudice to the decision on the 2009/2014 legislative period, any decision adopted by the European Council, at the initiative of the European Parliament and with its consent, establishing the composition of the European Parliament, must abide by the principles laid down out in the first subparagraph of Article 9 A(2) (renumbered Article 14).

58. Declaration by the Republic of Latvia, the Republic of Hungary and the Republic of Malta on the spelling of the name of the single currency in the Treaties

Without prejudice to the unified spelling of the name of the single currency of the European Union referred to in the Treaties as displayed on the banknotes and on the coins, Latvia, Hungary and Malta declare that the spelling of the name of the single currency, including its derivatives as applied throughout the Latvian, Hungarian and Maltese text of the Treaties, has no effect on the existing rules of the Latvian, Hungarian or Maltese languages.

59. Declaration by the Kingdom of the Netherlands on Article 270a of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Kingdom of the Netherlands will agree to a decision as referred to in the second subparagraph of Article 270a(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union once a revision of the decision referred to in the third paragraph of Article 269 of that Treaty has provided the Netherlands with a satisfactory solution for its excessive negative net payment position vis-à-vis the Union budget.

60. Declaration by the Kingdom of the Netherlands on Article 311a of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Kingdom of the Netherlands declares that an initiative for a decision, as referred to in Article 311a(6) aimed at amending the status of the Netherlands Antilles and/or Aruba with regard to the Union, will be submitted only on the basis of a decision taken in conformity with the Charter for the Kingdom of the Netherlands.

61. Declaration by the Republic of Poland on the Charter of Fundamental Rights of the European Union

The Charter does not affect in any way the right of Member States to legislate in the sphere of public morality, family law, as well as the protection of human dignity and respect for human physical and moral integrity.

62. Declaration by the Republic of Poland concerning the Protocol on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in relation to Poland and the United Kingdom

Poland declares that, having regard to the tradition of social movement of 'Solidarity' and its significant contribution to the struggle for social and labour rights, it fully respects social and labour rights, as established by European Union law, and in particular those reaffirmed in Title IV of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

63. Declaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the definition of the term 'nationals'

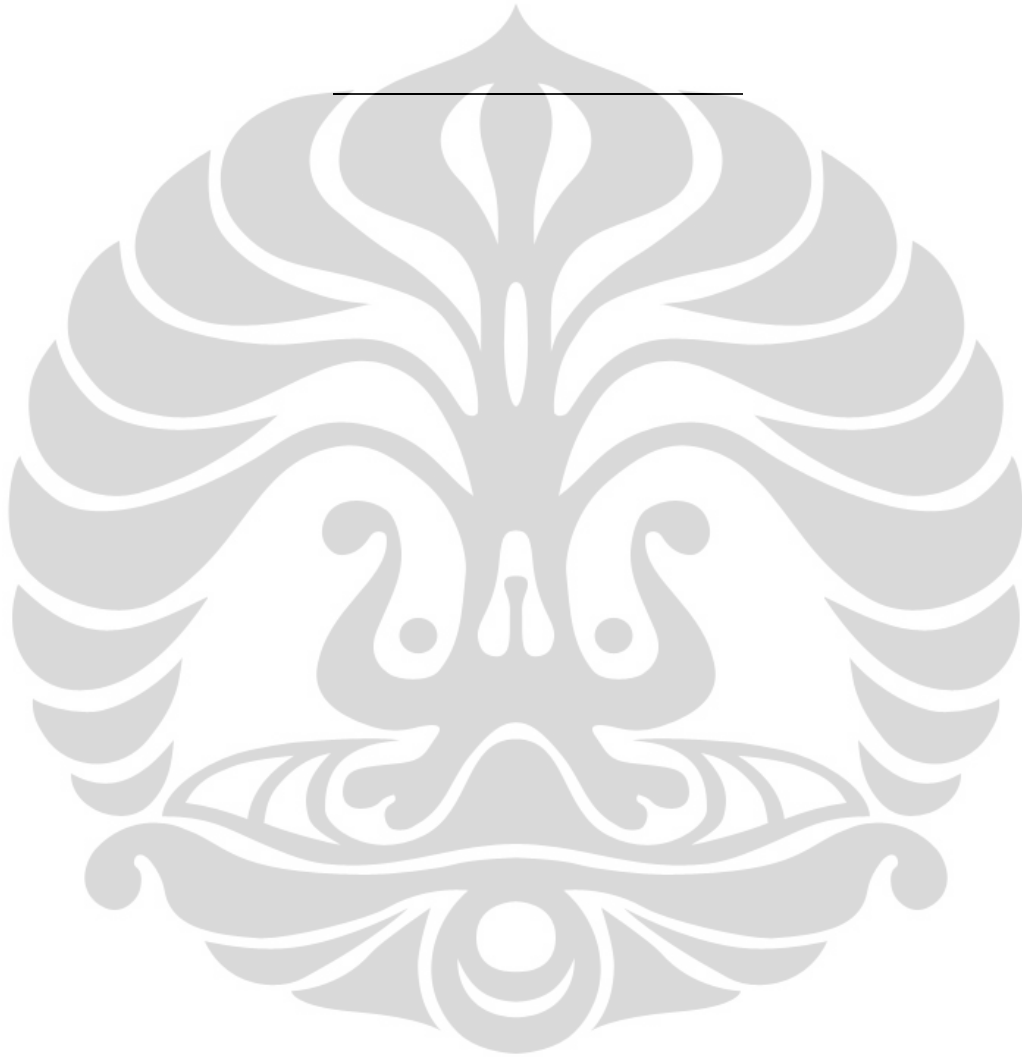
In respect of the Treaties and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in any of the acts deriving from those Treaties or continued in force by those Treaties, the United Kingdom reiterates the Declaration it made on 31 December 1982 on the definition of the term 'nationals' with the exception that the reference to 'British Dependent Territories Citizens' shall be read as meaning 'British overseas territories citizens'.

64. Declaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the franchise for elections to the European Parliament

The United Kingdom notes that Article 9 A of the Treaty on European Union and other provisions of the Treaties are not intended to change the basis for the franchise for elections to the European Parliament.

65. Declaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Article 61 H of the Treaty on the Functioning of the European Union

The United Kingdom fully supports robust action with regard to adopting financial sanctions designed to prevent and combat terrorism and related activities. Therefore, the United Kingdom declares that it intends to exercise its right under Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice to take part in the adoption of all proposals made under Article 61 H of the Treaty on the Functioning of the European Union.



2007 SUBSCRIPTION PRICES (excluding VAT, including normal transport charges)

EU Official Journal, L + C series, paper edition only	21 official EU languages	EUR 1 000 per year (*)
EU Official Journal, L + C series, paper edition only	21 official EU languages	EUR 100 per month (*)
EU Official Journal, L + C series, paper + annual CD-ROM	21 official EU languages	EUR 1 200 per year
EU Official Journal, L series, paper edition only	21 official EU languages	EUR 700 per year
EU Official Journal, L series, paper edition only	21 official EU languages	EUR 70 per month
EU Official Journal, C series, paper edition only	21 official EU languages	EUR 400 per year
EU Official Journal, C series, paper edition only	21 official EU languages	EUR 40 per month
EU Official Journal, L + C series, monthly CD-ROM (cumulative)	21 official EU languages	EUR 500 per year
Supplement to the Official Journal (S series), tendering procedures for public contracts, CD-ROM, two editions per week	multilingual: 23 official EU languages	EUR 360 per year (= EUR 30 per month)
EU Official Journal, C series — recruitment competitions	Language(s) according to competition(s)	EUR 50 per year
<i>Acquis communautaire</i> , special edition, paper version	Bulgarian and Romanian	EUR 2 000

(*) Sold in single issues: up to 32 pages: EUR 6
from 33 to 64 pages: EUR 12
over 64 pages: Priced individually.

Subscriptions to the *Official Journal of the European Union*, which is published in the official languages of the European Union, are available for 21 language versions. The Official Journal comprises two series, L (Legislation) and C (Information and Notices).

A separate subscription must be taken out for each language version.

In accordance with Regulation (EC) No 930/2004, published in Official Journal L 169 of 1 May 2004, the institutions of the European Union are temporarily not bound by the obligation to draft all acts in Maltese and publish them in that language. Maltese editions of the Official Journal are therefore sold separately. By analogy, this rule shall also apply for Irish as of 1 January 2007.

As from 1 May 2007, the L and C series will also be published in Maltese.

Subscriptions to the Supplement to the Official Journal (S Series — tendering procedures for public contracts) cover all 23 official language versions on a single multilingual CD-ROM.

On request, subscribers to the *Official Journal of the European Union* can receive the various Annexes to the Official Journal. Subscribers are informed of the publication of Annexes by notices inserted in the *Official Journal of the European Union*.

Sale and subscriptions

Priced publications issued by the Publications Office are available from our sales offices. The list of sales offices is available on the Internet at the following address:

http://publications.europa.eu/others/sales_agents_en.html

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offers direct access to European Union legislation free of charge. The *Official Journal of the European Union* can be consulted on this site, as can the Treaties, legislation, case-law and preparatory acts.

For further information on the European Union, see: <http://europa.eu>

Official Journal

of the European Union

C 83



English edition

Information and Notices

Volume 53
30 March 2010

<u>Notice No</u>	Contents	Page
2010/C 83/01	Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union	1
	Consolidated version of the Treaty on European Union	13
	Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union	47
	Protocols	201
	Annexes	329
	Declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon	335
	Tables of equivalences	361
2010/C 83/02	Charter of Fundamental Rights of the European Union	389

Note to the reader (see page 2 of the cover)

EN

Price:
EUR 10

NOTE TO THE READER

This publication contains the consolidated versions of the Treaty on European Union and of the Treaty on the Functioning of the European Union, together with the annexes and protocols thereto, as they result from the amendments introduced by the Treaty of Lisbon, which was signed on 13 December 2007 in Lisbon and which entered into force on 1 December 2009. It also contains the declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon.

As indicated in the Note to the Reader accompanying the previous issue of the consolidated Treaties (OJ C 115, 9.5.2008, p. 1), the current issue includes those rectifications which were adopted up to the time of publication.

This publication also contains the Charter of Fundamental Rights of the European Union which was proclaimed at Strasbourg on 12 December 2007 by the European Parliament, the Council and the Commission (OJ C 303, 14.12.2007, p. 1). This text repeats and adapts the Charter proclaimed on 7 December 2000, and replaces it with effect from 1 December 2009, the date of entry into force of the Treaty of Lisbon. By virtue of the first subparagraph of Article 6(1) of the Treaty on European Union, the Charter proclaimed in 2007 has the same legal value as the Treaties.

This text has been produced for documentary purposes and does not involve the responsibility of the institutions of the European Union.



CONSOLIDATED VERSIONS
OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION
AND
THE TREATY ON THE FUNCTIONING
OF THE EUROPEAN UNION

(2010/C 83/01)



Table of Contents

	Page
CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION	1
PREAMBLE	15
TITLE I COMMON PROVISIONS	16
TITLE II PROVISIONS ON DEMOCRATIC PRINCIPLES	20
TITLE III PROVISIONS ON THE INSTITUTIONS	22
TITLE IV PROVISIONS ON ENHANCED COOPERATION	27
TITLE V GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION AND SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY	28
Chapter 1 General provisions on the Union's external action	28
Chapter 2 Specific provisions on the common foreign and security policy	30
Section 1 Common provisions	30
Section 2 Provisions on the common security and defence policy	38
TITLE VI FINAL PROVISIONS	41
CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION	47
PREAMBLE	49
PART ONE PRINCIPLES	50
TITLE I CATEGORIES AND AREAS OF UNION COMPETENCE	50
TITLE II PROVISIONS HAVING GENERAL APPLICATION	53
PART TWO NON-DISCRIMINATION AND CITIZENSHIP OF THE UNION	56
PART THREE UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS	59
TITLE I THE INTERNAL MARKET	59
TITLE II FREE MOVEMENT OF GOODS	59
Chapter 1 The customs union	60

	Page
Chapter 2 Customs cooperation	61
Chapter 3 Prohibition of quantitative restrictions between Member States	61
TITLE III AGRICULTURE AND FISHERIES	62
TITLE IV FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITAL	65
Chapter 1 Workers	65
Chapter 2 Right of establishment	67
Chapter 3 Services	70
Chapter 4 Capital and payments	71
TITLE V AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE	73
Chapter 1 General provisions	73
Chapter 2 Policies on border checks, asylum and immigration	75
Chapter 3 Judicial cooperation in civil matters	78
Chapter 4 Judicial cooperation in criminal matters	79
Chapter 5 Police cooperation	83
TITLE VI Transport	85
TITLE VII COMMON RULES ON COMPETITION, TAXATION AND APPROXIMATION OF LAWS	88
Chapter 1 Rules on competition	88
Section 1 Rules applying to undertakings	88
Section 2 Aids granted by States	91
Chapter 2 Tax provisions	93
Chapter 3 Approximation of laws	94
TITLE VIII ECONOMIC AND MONETARY POLICY	96
Chapter 1 Economic policy	97
Chapter 2 Monetary policy	102
Chapter 3 Institutional provisions	105

	Page
Chapter 4 Provisions specific to Member States whose currency is the euro	106
Chapter 5 Transitional provisions	107
TITLE IX EMPLOYMENT	112
TITLE X SOCIAL POLICY	114
TITLE XI THE EUROPEAN SOCIAL FUND	119
TITLE XII EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING, YOUTH AND SPORT	120
TITLE XIII CULTURE	121
TITLE XIV PUBLIC HEALTH	122
TITLE XV CONSUMER PROTECTION	124
TITLE XVI TRANS-EUROPEAN NETWORKS	124
TITLE XVII INDUSTRY	126
TITLE XVIII ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIAL COHESION	127
TITLE XIX RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND SPACE	128
TITLE XX ENVIRONMENT	132
TITLE XXI ENERGY	134
TITLE XXII TOURISM	135
TITLE XXIII CIVIL PROTECTION	135
TITLE XXIV ADMINISTRATIVE COOPERATION	136
PART FOUR ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES	137
PART FIVE EXTERNAL ACTION BY THE UNION	139
TITLE I GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION	139
TITLE II COMMON COMMERCIAL POLICY	139
TITLE III COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES AND HUMANITARIAN AID	141
Chapter 1 Development cooperation	141
Chapter 2 Economic, financial and technical cooperation with third countries	142
Chapter 3 Humanitarian aid	143

	Page
TITLE IV RESTRICTIVE MEASURES	144
TITLE V INTERNATIONAL AGREEMENTS	144
TITLE VI THE UNION'S RELATIONS WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND THIRD COUNTRIES AND UNION DELEGATIONS	147
TITLE VII SOLIDARITY CLAUSE	148
PART SIX INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS	149
TITLE I INSTITUTIONAL PROVISIONS	149
Chapter 1 The institutions	149
Section 1 The European Parliament	149
Section 2 The European Council	152
Section 3 The Council	153
Section 4 The Commission	155
Section 5 The Court of Justice of the European Union	157
Section 6 The European Central Bank	167
Section 7 The Court of Auditors	169
Chapter 2 Legal acts of the Union, adoption procedures and other provisions	171
Section 1 The legal acts of the Union	171
Section 2 Procedures for the adoption of acts and other provisions	173
Chapter 3 The Union's advisory bodies	177
Section 1 The Economic and Social Committee	177
Section 2 The Committee of the Regions	178
Chapter 4 The European Investment Bank	180
TITLE II FINANCIAL PROVISIONS	181
Chapter 1 The Union's own resources	181
Chapter 2 The multiannual financial framework	182
Chapter 3 The Union's annual budget	183
Chapter 4 Implementation of the budget and discharge	186

	Page
Chapter 5 Common provisions	187
Chapter 6 Combatting fraud	188
TITLE III ENHANCED COOPERATION	189
PART SEVEN GENERAL AND FINAL PROVISIONS	192
PROTOCOLS	201
Protocol (No 1) on the role of National Parliaments in the European Union ..	203
Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and proportionality	206
Protocol (No 3) on the statute of the Court of Justice of the European Union	210
Protocol (No 4) on the statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank	230
Protocol (No 5) on the statute of the European Investment Bank	251
Protocol (No 6) on the location of the seats of the institutions and of certain bodies, offices, agencies and departments of the European Union	265
Protocol (No 7) on the privileges and immunities of the European Union	266
Protocol (No 8) relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms	273
Protocol (No 9) on the decision of the Council relating to the implementation of Article 16(4) of the Treaty on European Union and Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union between 1 November 2014 and 31 March 2017 on the one hand, and as from 1 April 2017 on the other	274
Protocol (No 10) on permanent structured cooperation established by Article 42 of the Treaty on European Union	275
Protocol (No 11) on Article 42 of the Treaty on European Union	278
Protocol (No 12) on the excessive deficit procedure	279
Protocol (No 13) on the convergence criteria	281
Protocol (No 14) on the Euro Group	283

	Page
Protocol (No 15) on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	284
Protocol (No 16) on certain provisions relating to Denmark	287
Protocol (No 17) on Denmark	288
Protocol (No 18) on France	289
Protocol (No 19) on the Schengen <i>acquis</i> integrated into the framework of the European Union	290
Protocol (No 20) on the application of certain aspects of Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union to the United Kingdom and to Ireland	293
Protocol (No 21) on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice	295
Protocol (No 22) on the position of Denmark	299
Protocol (No 23) on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders	304
Protocol (No 24) on asylum for nationals of Member States of the European Union	305
Protocol (No 25) on the exercise of shared competence	307
Protocol (No 26) on services of general interest	308
Protocol (No 27) on the internal market and competition	309
Protocol (No 28) on economic, social and territorial cohesion	310
Protocol (No 29) on the system of public broadcasting in the Member States ..	312
Protocol (No 30) on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to Poland and to the United Kingdom	313
Protocol (No 31) concerning imports into the European Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles	315
Protocol (No 32) on the acquisition of property in Denmark	318
Protocol (No 33) concerning Article 157 of the Treaty on the Functioning of the European Union	319

	Page
Protocol (No 34) on special arrangements for Greenland	320
Protocol (No 35) on Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland	321
Protocol (No 36) on transitional provisions	322
Protocol (No 37) on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research fund for Coal and Steel	327
ANNEXES	329
ANNEX I List referred to in Article 38 of the Treaty on the Functioning of the European Union	331
ANNEX II Overseas countries and territories to which the provisions of Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union apply	334
DECLARATIONS annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007	335
A. DECLARATIONS CONCERNING PROVISIONS OF THE TREATIES	337
1. Declaration concerning the Charter of Fundamental Rights of the European Union	337
2. Declaration on Article 6(2) of the Treaty on European Union	337
3. Declaration on Article 8 of the Treaty on European Union	337
4. Declaration on the composition of the European Parliament	337
5. Declaration on the political agreement by the European Council concerning the draft Decision on the composition of the European Parliament	337
6. Declaration on Article 15(5) and (6), Article 17(6) and (7) and Article 18 of the Treaty on European Union	338
7. Declaration on Article 16(4) of the Treaty on European Union and Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union	338
8. Declaration on practical measures to be taken upon the entry into force of the Treaty of Lisbon as regards the Presidency of the European Council and of the Foreign Affairs Council	340
9. Declaration on Article 16(9) of the Treaty on European Union concerning the European Council decision on the exercise of the Presidency of the Council ..	341
10. Declaration on Article 17 of the Treaty on European Union	342
11. Declaration on Article 17(6) and (7) of the Treaty on European Union	342
12. Declaration on Article 18 of the Treaty on European Union	342

	Page
13. Declaration concerning the common foreign and security policy	343
14. Declaration concerning the common foreign and security policy	343
15. Declaration on Article 27 of the Treaty on European Union	343
16. Declaration on Article 55(2) of the Treaty on European Union	344
17. Declaration concerning primacy	344
18. Declaration in relation to the delimitation of competences	344
19. Declaration on Article 8 of the Treaty on the Functioning of the European Union	345
20. Declaration on Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union	345
21. Declaration on the protection of personal data in the fields of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation	345
22. Declaration on Articles 48 and 79 of the Treaty on the Functioning of the European Union	346
23. Declaration on the second paragraph of Article 48 of the Treaty on the Functioning of the European Union	346
24. Declaration concerning the legal personality of the European Union	346
25. Declaration on Articles 75 and 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union	346
26. Declaration on non-participation by a Member State in a measure based on Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union	346
27. Declaration on Article 85(1), second subparagraph, of the Treaty on the Functioning of the European Union	347
28. Declaration on Article 98 of the Treaty on the Functioning of the European Union	347
29. Declaration on Article 107(2)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union	347
30. Declaration on Article 126 of the Treaty on the Functioning of the European Union	347
31. Declaration on Article 156 of the Treaty on the Functioning of the European Union	348
32. Declaration on Article 168(4)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union	348
33. Declaration on Article 174 of the Treaty on the Functioning of the European Union	349
34. Declaration on Article 179 of the Treaty on the Functioning of the European Union	349
35. Declaration on Article 194 of the Treaty on the Functioning of the European Union	349

	Page
36. Declaration on Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the negotiation and conclusion of international agreements by Member States relating to the area of freedom, security and justice	349
37. Declaration on Article 222 of the Treaty on the Functioning of the European Union	349
38. Declaration on Article 252 of the Treaty on the Functioning of the European Union regarding the number of Advocates-General in the Court of Justice . . .	350
39. Declaration on Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union	350
40. Declaration on Article 329 of the Treaty on the Functioning of the European Union	350
41. Declaration on Article 352 of the Treaty on the Functioning of the European Union	350
42. Declaration on Article 352 of the Treaty on the Functioning of the European Union	351
43. Declaration on Article 355(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union	351
B. DECLARATIONS CONCERNING PROTOCOLS ANNEXED TO THE TREATIES . .	352
44. Declaration on Article 5 of the Protocol on the Schengen <i>acquis</i> integrated into the framework of the European Union	352
45. Declaration on Article 5(2) of the Protocol on the Schengen <i>acquis</i> integrated into the framework of the European Union	352
46. Declaration on Article 5(3) of the Protocol on the Schengen <i>acquis</i> integrated into the framework of the European Union	352
47. Declaration on Article 5(3), (4) and (5) of the Protocol on the Schengen <i>acquis</i> integrated into the framework of the European Union	352
48. Declaration concerning the Protocol on the position of Denmark	353
49. Declaration concerning Italy	353
50. Declaration concerning Article 10 of the Protocol on transitional provisions . .	354
C. DECLARATIONS BY MEMBER STATES	355
51. Declaration by the Kingdom of Belgium on national Parliaments	355
52. Declaration by the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic on the symbols of the European Union	355
53. Declaration by the Czech Republic on the Charter of Fundamental Rights of the European Union	355

	Page
54. Declaration by the Federal Republic of Germany, Ireland, the Republic of Hungary, the Republic of Austria and the Kingdom of Sweden	356
55. Declaration by the Kingdom of Spain and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	356
56. Declaration by Ireland on Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice ..	356
57. Declaration by the Italian Republic on the composition of the European Parliament	357
58. Declaration by the Republic of Latvia, the Republic of Hungary and the Republic of Malta on the spelling of the name of the single currency in the Treaties ..	357
59. Declaration by the Kingdom of the Netherlands on Article 312 of the Treaty on the Functioning of the European Union	357
60. Declaration by the Kingdom of the Netherlands on Article 355 of the Treaty on the Functioning of the European Union	358
61. Declaration by the Republic of Poland on the Charter of Fundamental Rights of the European Union	358
62. Declaration by the Republic of Poland concerning the Protocol on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in relation to Poland and the United Kingdom	358
63. Declaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the definition of the term 'nationals'	358
64. Declaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the franchise for elections to the European Parliament	358
65. Declaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Article 75 of the Treaty on the Functioning of the European Union	359
Tables of equivalences	361
Treaty on European Union	361
Treaty on the Functioning of the European Union	366





PREAMBLE

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK, THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE PRESIDENT OF IRELAND, THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS, THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ⁽¹⁾,

RESOLVED to mark a new stage in the process of European integration undertaken with the establishment of the European Communities,

DRAWING INSPIRATION from the cultural, religious and humanist inheritance of Europe, from which have developed the universal values of the inviolable and inalienable rights of the human person, freedom, democracy, equality and the rule of law,

RECALLING the historic importance of the ending of the division of the European continent and the need to create firm bases for the construction of the future Europe,

CONFIRMING their attachment to the principles of liberty, democracy and respect for human rights and fundamental freedoms and of the rule of law,

CONFIRMING their attachment to fundamental social rights as defined in the European Social Charter signed at Turin on 18 October 1961 and in the 1989 Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers,

DESIRING to deepen the solidarity between their peoples while respecting their history, their culture and their traditions,

DESIRING to enhance further the democratic and efficient functioning of the institutions so as to enable them better to carry out, within a single institutional framework, the tasks entrusted to them,

RESOLVED to achieve the strengthening and the convergence of their economies and to establish an economic and monetary union including, in accordance with the provisions of this Treaty and of the Treaty on the Functioning of the European Union, a single and stable currency,

DETERMINED to promote economic and social progress for their peoples, taking into account the principle of sustainable development and within the context of the accomplishment of the internal market and of reinforced cohesion and environmental protection, and to implement policies ensuring that advances in economic integration are accompanied by parallel progress in other fields,

⁽¹⁾ The Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Austria, the Republic of Poland, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have since become members of the European Union.

RESOLVED to establish a citizenship common to nationals of their countries,

RESOLVED to implement a common foreign and security policy including the progressive framing of a common defence policy, which might lead to a common defence in accordance with the provisions of Article 42, thereby reinforcing the European identity and its independence in order to promote peace, security and progress in Europe and in the world,

RESOLVED to facilitate the free movement of persons, while ensuring the safety and security of their peoples, by establishing an area of freedom, security and justice, in accordance with the provisions of this Treaty and of the Treaty on the Functioning of the European Union,

RESOLVED to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen in accordance with the principle of subsidiarity,

IN VIEW of further steps to be taken in order to advance European integration,

HAVE DECIDED to establish a European Union and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

(List of plenipotentiaries not reproduced)

WHO, having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed as follows:

TITLE I
COMMON PROVISIONS

Article 1
(ex Article 1 TEU) ⁽¹⁾

By this Treaty, the HIGH CONTRACTING PARTIES establish among themselves a EUROPEAN UNION, hereinafter called 'the Union', on which the Member States confer competences to attain objectives they have in common.

This Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen.

The Union shall be founded on the present Treaty and on the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as 'the Treaties'). Those two Treaties shall have the same legal value. The Union shall replace and succeed the European Community.

⁽¹⁾ These references are merely indicative. For more ample information, please refer to the tables of equivalences between the old and the new numbering of the Treaties.

Article 2

The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.

Article 3

(ex Article 2 TEU)

1. The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.
2. The Union shall offer its citizens an area of freedom, security and justice without internal frontiers, in which the free movement of persons is ensured in conjunction with appropriate measures with respect to external border controls, asylum, immigration and the prevention and combating of crime.
3. The Union shall establish an internal market. It shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. It shall promote scientific and technological advance.

It shall combat social exclusion and discrimination, and shall promote social justice and protection, equality between women and men, solidarity between generations and protection of the rights of the child.

It shall promote economic, social and territorial cohesion, and solidarity among Member States.

It shall respect its rich cultural and linguistic diversity, and shall ensure that Europe's cultural heritage is safeguarded and enhanced.
4. The Union shall establish an economic and monetary union whose currency is the euro.
5. In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute to the protection of its citizens. It shall contribute to peace, security, the sustainable development of the Earth, solidarity and mutual respect among peoples, free and fair trade, eradication of poverty and the protection of human rights, in particular the rights of the child, as well as to the strict observance and the development of international law, including respect for the principles of the United Nations Charter.
6. The Union shall pursue its objectives by appropriate means commensurate with the competences which are conferred upon it in the Treaties.

Article 4

1. In accordance with Article 5, competences not conferred upon the Union in the Treaties remain with the Member States.

2. The Union shall respect the equality of Member States before the Treaties as well as their national identities, inherent in their fundamental structures, political and constitutional, inclusive of regional and local self-government. It shall respect their essential State functions, including ensuring the territorial integrity of the State, maintaining law and order and safeguarding national security. In particular, national security remains the sole responsibility of each Member State.

3. Pursuant to the principle of sincere cooperation, the Union and the Member States shall, in full mutual respect, assist each other in carrying out tasks which flow from the Treaties.

The Member States shall take any appropriate measure, general or particular, to ensure fulfilment of the obligations arising out of the Treaties or resulting from the acts of the institutions of the Union.

The Member States shall facilitate the achievement of the Union's tasks and refrain from any measure which could jeopardise the attainment of the Union's objectives.

Article 5

(ex Article 5 TEC)

1. The limits of Union competences are governed by the principle of conferral. The use of Union competences is governed by the principles of subsidiarity and proportionality.

2. Under the principle of conferral, the Union shall act only within the limits of the competences conferred upon it by the Member States in the Treaties to attain the objectives set out therein. Competences not conferred upon the Union in the Treaties remain with the Member States.

3. Under the principle of subsidiarity, in areas which do not fall within its exclusive competence, the Union shall act only if and in so far as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the Member States, either at central level or at regional and local level, but can rather, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved at Union level.

The institutions of the Union shall apply the principle of subsidiarity as laid down in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. National Parliaments ensure compliance with the principle of subsidiarity in accordance with the procedure set out in that Protocol.

4. Under the principle of proportionality, the content and form of Union action shall not exceed what is necessary to achieve the objectives of the Treaties.

The institutions of the Union shall apply the principle of proportionality as laid down in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality.

Article 6

(ex Article 6 TEU)

1. The Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000, as adapted at Strasbourg, on 12 December 2007, which shall have the same legal value as the Treaties.

The provisions of the Charter shall not extend in any way the competences of the Union as defined in the Treaties.

The rights, freedoms and principles in the Charter shall be interpreted in accordance with the general provisions in Title VII of the Charter governing its interpretation and application and with due regard to the explanations referred to in the Charter, that set out the sources of those provisions.

2. The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Such accession shall not affect the Union's competences as defined in the Treaties.

3. Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, shall constitute general principles of the Union's law.

Article 7

(ex Article 7 TEU)

1. On a reasoned proposal by one third of the Member States, by the European Parliament or by the European Commission, the Council, acting by a majority of four fifths of its members after obtaining the consent of the European Parliament, may determine that there is a clear risk of a serious breach by a Member State of the values referred to in Article 2. Before making such a determination, the Council shall hear the Member State in question and may address recommendations to it, acting in accordance with the same procedure.

The Council shall regularly verify that the grounds on which such a determination was made continue to apply.

2. The European Council, acting by unanimity on a proposal by one third of the Member States or by the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament, may determine the existence of a serious and persistent breach by a Member State of the values referred to in Article 2, after inviting the Member State in question to submit its observations.

3. Where a determination under paragraph 2 has been made, the Council, acting by a qualified majority, may decide to suspend certain of the rights deriving from the application of the Treaties to the Member State in question, including the voting rights of the representative of the government of that Member State in the Council. In doing so, the Council shall take into account the possible consequences of such a suspension on the rights and obligations of natural and legal persons.

The obligations of the Member State in question under this Treaty shall in any case continue to be binding on that State.

4. The Council, acting by a qualified majority, may decide subsequently to vary or revoke measures taken under paragraph 3 in response to changes in the situation which led to their being imposed.

5. The voting arrangements applying to the European Parliament, the European Council and the Council for the purposes of this Article are laid down in Article 354 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 8

1. The Union shall develop a special relationship with neighbouring countries, aiming to establish an area of prosperity and good neighbourliness, founded on the values of the Union and characterised by close and peaceful relations based on cooperation.

2. For the purposes of paragraph 1, the Union may conclude specific agreements with the countries concerned. These agreements may contain reciprocal rights and obligations as well as the possibility of undertaking activities jointly. Their implementation shall be the subject of periodic consultation.

TITLE II

PROVISIONS ON DEMOCRATIC PRINCIPLES

Article 9

In all its activities, the Union shall observe the principle of the equality of its citizens, who shall receive equal attention from its institutions, bodies, offices and agencies. Every national of a Member State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the Union shall be additional to and not replace national citizenship.

Article 10

1. The functioning of the Union shall be founded on representative democracy.

2. Citizens are directly represented at Union level in the European Parliament.

Member States are represented in the European Council by their Heads of State or Government and in the Council by their governments, themselves democratically accountable either to their national Parliaments, or to their citizens.

3. Every citizen shall have the right to participate in the democratic life of the Union. Decisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.

4. Political parties at European level contribute to forming European political awareness and to expressing the will of citizens of the Union.

Article 11

1. The institutions shall, by appropriate means, give citizens and representative associations the opportunity to make known and publicly exchange their views in all areas of Union action.
2. The institutions shall maintain an open, transparent and regular dialogue with representative associations and civil society.
3. The European Commission shall carry out broad consultations with parties concerned in order to ensure that the Union's actions are coherent and transparent.
4. Not less than one million citizens who are nationals of a significant number of Member States may take the initiative of inviting the European Commission, within the framework of its powers, to submit any appropriate proposal on matters where citizens consider that a legal act of the Union is required for the purpose of implementing the Treaties.

The procedures and conditions required for such a citizens' initiative shall be determined in accordance with the first paragraph of Article 24 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 12

National Parliaments contribute actively to the good functioning of the Union:

- (a) through being informed by the institutions of the Union and having draft legislative acts of the Union forwarded to them in accordance with the Protocol on the role of national Parliaments in the European Union;
- (b) by seeing to it that the principle of subsidiarity is respected in accordance with the procedures provided for in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality;
- (c) by taking part, within the framework of the area of freedom, security and justice, in the evaluation mechanisms for the implementation of the Union policies in that area, in accordance with Article 70 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and through being involved in the political monitoring of Europol and the evaluation of Eurojust's activities in accordance with Articles 88 and 85 of that Treaty;
- (d) by taking part in the revision procedures of the Treaties, in accordance with Article 48 of this Treaty;
- (e) by being notified of applications for accession to the Union, in accordance with Article 49 of this Treaty;
- (f) by taking part in the inter-parliamentary cooperation between national Parliaments and with the European Parliament, in accordance with the Protocol on the role of national Parliaments in the European Union.

TITLE III

PROVISIONS ON THE INSTITUTIONS

Article 13

1. The Union shall have an institutional framework which shall aim to promote its values, advance its objectives, serve its interests, those of its citizens and those of the Member States, and ensure the consistency, effectiveness and continuity of its policies and actions.

The Union's institutions shall be:

- the European Parliament,
- the European Council,
- the Council,
- the European Commission (hereinafter referred to as 'the Commission'),
- the Court of Justice of the European Union,
- the European Central Bank,
- the Court of Auditors.

2. Each institution shall act within the limits of the powers conferred on it in the Treaties, and in conformity with the procedures, conditions and objectives set out in them. The institutions shall practice mutual sincere cooperation.

3. The provisions relating to the European Central Bank and the Court of Auditors and detailed provisions on the other institutions are set out in the Treaty on the Functioning of the European Union.

4. The European Parliament, the Council and the Commission shall be assisted by an Economic and Social Committee and a Committee of the Regions acting in an advisory capacity.

Article 14

1. The European Parliament shall, jointly with the Council, exercise legislative and budgetary functions. It shall exercise functions of political control and consultation as laid down in the Treaties. It shall elect the President of the Commission.

2. The European Parliament shall be composed of representatives of the Union's citizens. They shall not exceed seven hundred and fifty in number, plus the President. Representation of citizens shall be degressively proportional, with a minimum threshold of six members per Member State. No Member State shall be allocated more than ninety-six seats.

The European Council shall adopt by unanimity, on the initiative of the European Parliament and with its consent, a decision establishing the composition of the European Parliament, respecting the principles referred to in the first subparagraph.

3. The members of the European Parliament shall be elected for a term of five years by direct universal suffrage in a free and secret ballot.
4. The European Parliament shall elect its President and its officers from among its members.

Article 15

1. The European Council shall provide the Union with the necessary impetus for its development and shall define the general political directions and priorities thereof. It shall not exercise legislative functions.

2. The European Council shall consist of the Heads of State or Government of the Member States, together with its President and the President of the Commission. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall take part in its work.

3. The European Council shall meet twice every six months, convened by its President. When the agenda so requires, the members of the European Council may decide each to be assisted by a minister and, in the case of the President of the Commission, by a member of the Commission. When the situation so requires, the President shall convene a special meeting of the European Council.

4. Except where the Treaties provide otherwise, decisions of the European Council shall be taken by consensus.

5. The European Council shall elect its President, by a qualified majority, for a term of two and a half years, renewable once. In the event of an impediment or serious misconduct, the European Council can end the President's term of office in accordance with the same procedure.

6. The President of the European Council:

- (a) shall chair it and drive forward its work;
- (b) shall ensure the preparation and continuity of the work of the European Council in cooperation with the President of the Commission, and on the basis of the work of the General Affairs Council;
- (c) shall endeavour to facilitate cohesion and consensus within the European Council;
- (d) shall present a report to the European Parliament after each of the meetings of the European Council.

The President of the European Council shall, at his level and in that capacity, ensure the external representation of the Union on issues concerning its common foreign and security policy, without prejudice to the powers of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.

The President of the European Council shall not hold a national office.

Article 16

1. The Council shall, jointly with the European Parliament, exercise legislative and budgetary functions. It shall carry out policy-making and coordinating functions as laid down in the Treaties.
2. The Council shall consist of a representative of each Member State at ministerial level, who may commit the government of the Member State in question and cast its vote.
3. The Council shall act by a qualified majority except where the Treaties provide otherwise.
4. As from 1 November 2014, a qualified majority shall be defined as at least 55 % of the members of the Council, comprising at least fifteen of them and representing Member States comprising at least 65 % of the population of the Union.

A blocking minority must include at least four Council members, failing which the qualified majority shall be deemed attained.

The other arrangements governing the qualified majority are laid down in Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

5. The transitional provisions relating to the definition of the qualified majority which shall be applicable until 31 October 2014 and those which shall be applicable from 1 November 2014 to 31 March 2017 are laid down in the Protocol on transitional provisions.
6. The Council shall meet in different configurations, the list of which shall be adopted in accordance with Article 236 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

The General Affairs Council shall ensure consistency in the work of the different Council configurations. It shall prepare and ensure the follow-up to meetings of the European Council, in liaison with the President of the European Council and the Commission.

The Foreign Affairs Council shall elaborate the Union's external action on the basis of strategic guidelines laid down by the European Council and ensure that the Union's action is consistent.

7. A Committee of Permanent Representatives of the Governments of the Member States shall be responsible for preparing the work of the Council.
8. The Council shall meet in public when it deliberates and votes on a draft legislative act. To this end, each Council meeting shall be divided into two parts, dealing respectively with deliberations on Union legislative acts and non-legislative activities.
9. The Presidency of Council configurations, other than that of Foreign Affairs, shall be held by Member State representatives in the Council on the basis of equal rotation, in accordance with the conditions established in accordance with Article 236 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 17

1. The Commission shall promote the general interest of the Union and take appropriate initiatives to that end. It shall ensure the application of the Treaties, and of measures adopted by the institutions pursuant to them. It shall oversee the application of Union law under the control of the Court of Justice of the European Union. It shall execute the budget and manage programmes. It shall exercise coordinating, executive and management functions, as laid down in the Treaties. With the exception of the common foreign and security policy, and other cases provided for in the Treaties, it shall ensure the Union's external representation. It shall initiate the Union's annual and multiannual programming with a view to achieving interinstitutional agreements.

2. Union legislative acts may only be adopted on the basis of a Commission proposal, except where the Treaties provide otherwise. Other acts shall be adopted on the basis of a Commission proposal where the Treaties so provide.

3. The Commission's term of office shall be five years.

The members of the Commission shall be chosen on the ground of their general competence and European commitment from persons whose independence is beyond doubt.

In carrying out its responsibilities, the Commission shall be completely independent. Without prejudice to Article 18(2), the members of the Commission shall neither seek nor take instructions from any Government or other institution, body, office or entity. They shall refrain from any action incompatible with their duties or the performance of their tasks.

4. The Commission appointed between the date of entry into force of the Treaty of Lisbon and 31 October 2014, shall consist of one national of each Member State, including its President and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy who shall be one of its Vice-Presidents.

5. As from 1 November 2014, the Commission shall consist of a number of members, including its President and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, corresponding to two thirds of the number of Member States, unless the European Council, acting unanimously, decides to alter this number.

The members of the Commission shall be chosen from among the nationals of the Member States on the basis of a system of strictly equal rotation between the Member States, reflecting the demographic and geographical range of all the Member States. This system shall be established unanimously by the European Council in accordance with Article 244 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

6. The President of the Commission shall:

- (a) lay down guidelines within which the Commission is to work;
- (b) decide on the internal organisation of the Commission, ensuring that it acts consistently, efficiently and as a collegiate body;

- (c) appoint Vice-Presidents, other than the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, from among the members of the Commission.

A member of the Commission shall resign if the President so requests. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall resign, in accordance with the procedure set out in Article 18(1), if the President so requests.

7. Taking into account the elections to the European Parliament and after having held the appropriate consultations, the European Council, acting by a qualified majority, shall propose to the European Parliament a candidate for President of the Commission. This candidate shall be elected by the European Parliament by a majority of its component members. If he does not obtain the required majority, the European Council, acting by a qualified majority, shall within one month propose a new candidate who shall be elected by the European Parliament following the same procedure.

The Council, by common accord with the President-elect, shall adopt the list of the other persons whom it proposes for appointment as members of the Commission. They shall be selected, on the basis of the suggestions made by Member States, in accordance with the criteria set out in paragraph 3, second subparagraph, and paragraph 5, second subparagraph.

The President, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the other members of the Commission shall be subject as a body to a vote of consent by the European Parliament. On the basis of this consent the Commission shall be appointed by the European Council, acting by a qualified majority.

8. The Commission, as a body, shall be responsible to the European Parliament. In accordance with Article 234 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the European Parliament may vote on a motion of censure of the Commission. If such a motion is carried, the members of the Commission shall resign as a body and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall resign from the duties that he carries out in the Commission.

Article 18

1. The European Council, acting by a qualified majority, with the agreement of the President of the Commission, shall appoint the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. The European Council may end his term of office by the same procedure.

2. The High Representative shall conduct the Union's common foreign and security policy. He shall contribute by his proposals to the development of that policy, which he shall carry out as mandated by the Council. The same shall apply to the common security and defence policy.

3. The High Representative shall preside over the Foreign Affairs Council.

4. The High Representative shall be one of the Vice-Presidents of the Commission. He shall ensure the consistency of the Union's external action. He shall be responsible within the Commission for responsibilities incumbent on it in external relations and for coordinating other aspects of the Union's external action. In exercising these responsibilities within the Commission, and only for these responsibilities, the High Representative shall be bound by Commission procedures to the extent that this is consistent with paragraphs 2 and 3.

Article 19

1. The Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the General Court and specialised courts. It shall ensure that in the interpretation and application of the Treaties the law is observed.

Member States shall provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by Union law.

2. The Court of Justice shall consist of one judge from each Member State. It shall be assisted by Advocates-General.

The General Court shall include at least one judge per Member State.

The Judges and the Advocates-General of the Court of Justice and the Judges of the General Court shall be chosen from persons whose independence is beyond doubt and who satisfy the conditions set out in Articles 253 and 254 of the Treaty on the Functioning of the European Union. They shall be appointed by common accord of the governments of the Member States for six years. Retiring Judges and Advocates-General may be reappointed.

3. The Court of Justice of the European Union shall, in accordance with the Treaties:

- (a) rule on actions brought by a Member State, an institution or a natural or legal person;
- (b) give preliminary rulings, at the request of courts or tribunals of the Member States, on the interpretation of Union law or the validity of acts adopted by the institutions;
- (c) rule in other cases provided for in the Treaties.

TITLE IV

PROVISIONS ON ENHANCED COOPERATION

Article 20

(ex Articles 27a to 27e, 40 to 40b and 43 to 45 TEU and ex Articles 11 and 11a TEC)

1. Member States which wish to establish enhanced cooperation between themselves within the framework of the Union's non-exclusive competences may make use of its institutions and exercise those competences by applying the relevant provisions of the Treaties, subject to the limits and in accordance with the detailed arrangements laid down in this Article and in Articles 326 to 334 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Enhanced cooperation shall aim to further the objectives of the Union, protect its interests and reinforce its integration process. Such cooperation shall be open at any time to all Member States, in accordance with Article 328 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

2. The decision authorising enhanced cooperation shall be adopted by the Council as a last resort, when it has established that the objectives of such cooperation cannot be attained within a reasonable period by the Union as a whole, and provided that at least nine Member States participate in it. The Council shall act in accordance with the procedure laid down in Article 329 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

3. All members of the Council may participate in its deliberations, but only members of the Council representing the Member States participating in enhanced cooperation shall take part in the vote. The voting rules are set out in Article 330 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

4. Acts adopted in the framework of enhanced cooperation shall bind only participating Member States. They shall not be regarded as part of the *acquis* which has to be accepted by candidate States for accession to the Union.

TITLE V

GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION AND SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION

Article 21

1. The Union's action on the international scene shall be guided by the principles which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world: democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter and international law.

The Union shall seek to develop relations and build partnerships with third countries, and international, regional or global organisations which share the principles referred to in the first subparagraph. It shall promote multilateral solutions to common problems, in particular in the framework of the United Nations.

2. The Union shall define and pursue common policies and actions, and shall work for a high degree of cooperation in all fields of international relations, in order to:

(a) safeguard its values, fundamental interests, security, independence and integrity;

- (b) consolidate and support democracy, the rule of law, human rights and the principles of international law;
- (c) preserve peace, prevent conflicts and strengthen international security, in accordance with the purposes and principles of the United Nations Charter, with the principles of the Helsinki Final Act and with the aims of the Charter of Paris, including those relating to external borders;
- (d) foster the sustainable economic, social and environmental development of developing countries, with the primary aim of eradicating poverty;
- (e) encourage the integration of all countries into the world economy, including through the progressive abolition of restrictions on international trade;
- (f) help develop international measures to preserve and improve the quality of the environment and the sustainable management of global natural resources, in order to ensure sustainable development;
- (g) assist populations, countries and regions confronting natural or man-made disasters; and
- (h) promote an international system based on stronger multilateral cooperation and good global governance.

3. The Union shall respect the principles and pursue the objectives set out in paragraphs 1 and 2 in the development and implementation of the different areas of the Union's external action covered by this Title and by Part Five of the Treaty on the Functioning of the European Union, and of the external aspects of its other policies.

The Union shall ensure consistency between the different areas of its external action and between these and its other policies. The Council and the Commission, assisted by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall ensure that consistency and shall cooperate to that effect.

Article 22

1. On the basis of the principles and objectives set out in Article 21, the European Council shall identify the strategic interests and objectives of the Union.

Decisions of the European Council on the strategic interests and objectives of the Union shall relate to the common foreign and security policy and to other areas of the external action of the Union. Such decisions may concern the relations of the Union with a specific country or region or may be thematic in approach. They shall define their duration, and the means to be made available by the Union and the Member States.

The European Council shall act unanimously on a recommendation from the Council, adopted by the latter under the arrangements laid down for each area. Decisions of the European Council shall be implemented in accordance with the procedures provided for in the Treaties.

2. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, for the area of common foreign and security policy, and the Commission, for other areas of external action, may submit joint proposals to the Council.

CHAPTER 2

SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY

SECTION 1

COMMON PROVISIONS

Article 23

The Union's action on the international scene, pursuant to this Chapter, shall be guided by the principles, shall pursue the objectives of, and be conducted in accordance with, the general provisions laid down in Chapter 1.

Article 24

(ex Article 11 TEU)

1. The Union's competence in matters of common foreign and security policy shall cover all areas of foreign policy and all questions relating to the Union's security, including the progressive framing of a common defence policy that might lead to a common defence.

The common foreign and security policy is subject to specific rules and procedures. It shall be defined and implemented by the European Council and the Council acting unanimously, except where the Treaties provide otherwise. The adoption of legislative acts shall be excluded. The common foreign and security policy shall be put into effect by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and by Member States, in accordance with the Treaties. The specific role of the European Parliament and of the Commission in this area is defined by the Treaties. The Court of Justice of the European Union shall not have jurisdiction with respect to these provisions, with the exception of its jurisdiction to monitor compliance with Article 40 of this Treaty and to review the legality of certain decisions as provided for by the second paragraph of Article 275 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

2. Within the framework of the principles and objectives of its external action, the Union shall conduct, define and implement a common foreign and security policy, based on the development of mutual political solidarity among Member States, the identification of questions of general interest and the achievement of an ever-increasing degree of convergence of Member States' actions.

3. The Member States shall support the Union's external and security policy actively and unreservedly in a spirit of loyalty and mutual solidarity and shall comply with the Union's action in this area.

The Member States shall work together to enhance and develop their mutual political solidarity. They shall refrain from any action which is contrary to the interests of the Union or likely to impair its effectiveness as a cohesive force in international relations.

The Council and the High Representative shall ensure compliance with these principles.

Article 25
(ex Article 12 TEU)

The Union shall conduct the common foreign and security policy by:

- (a) defining the general guidelines;
 - (b) adopting decisions defining:
 - (i) actions to be undertaken by the Union;
 - (ii) positions to be taken by the Union;
 - (iii) arrangements for the implementation of the decisions referred to in points (i) and (ii);
- and by
- (c) strengthening systematic cooperation between Member States in the conduct of policy.

Article 26
(ex Article 13 TEU)

1. The European Council shall identify the Union's strategic interests, determine the objectives of and define general guidelines for the common foreign and security policy, including for matters with defence implications. It shall adopt the necessary decisions.

If international developments so require, the President of the European Council shall convene an extraordinary meeting of the European Council in order to define the strategic lines of the Union's policy in the face of such developments.

2. The Council shall frame the common foreign and security policy and take the decisions necessary for defining and implementing it on the basis of the general guidelines and strategic lines defined by the European Council.

The Council and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall ensure the unity, consistency and effectiveness of action by the Union.

3. The common foreign and security policy shall be put into effect by the High Representative and by the Member States, using national and Union resources.

Article 27

1. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, who shall chair the Foreign Affairs Council, shall contribute through his proposals to the development of the common foreign and security policy and shall ensure implementation of the decisions adopted by the European Council and the Council.
2. The High Representative shall represent the Union for matters relating to the common foreign and security policy. He shall conduct political dialogue with third parties on the Union's behalf and shall express the Union's position in international organisations and at international conferences.
3. In fulfilling his mandate, the High Representative shall be assisted by a European External Action Service. This service shall work in cooperation with the diplomatic services of the Member States and shall comprise officials from relevant departments of the General Secretariat of the Council and of the Commission as well as staff seconded from national diplomatic services of the Member States. The organisation and functioning of the European External Action Service shall be established by a decision of the Council. The Council shall act on a proposal from the High Representative after consulting the European Parliament and after obtaining the consent of the Commission.

Article 28

(ex Article 14 TEU)

1. Where the international situation requires operational action by the Union, the Council shall adopt the necessary decisions. They shall lay down their objectives, scope, the means to be made available to the Union, if necessary their duration, and the conditions for their implementation.

If there is a change in circumstances having a substantial effect on a question subject to such a decision, the Council shall review the principles and objectives of that decision and take the necessary decisions.

2. Decisions referred to in paragraph 1 shall commit the Member States in the positions they adopt and in the conduct of their activity.

3. Whenever there is any plan to adopt a national position or take national action pursuant to a decision as referred to in paragraph 1, information shall be provided by the Member State concerned in time to allow, if necessary, for prior consultations within the Council. The obligation to provide prior information shall not apply to measures which are merely a national transposition of Council decisions.

4. In cases of imperative need arising from changes in the situation and failing a review of the Council decision as referred to in paragraph 1, Member States may take the necessary measures as a matter of urgency having regard to the general objectives of that decision. The Member State concerned shall inform the Council immediately of any such measures.

5. Should there be any major difficulties in implementing a decision as referred to in this Article, a Member State shall refer them to the Council which shall discuss them and seek appropriate solutions. Such solutions shall not run counter to the objectives of the decision referred to in paragraph 1 or impair its effectiveness.

Article 29

(ex Article 15 TEU)

The Council shall adopt decisions which shall define the approach of the Union to a particular matter of a geographical or thematic nature. Member States shall ensure that their national policies conform to the Union positions.

Article 30

(ex Article 22 TEU)

1. Any Member State, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, or the High Representative with the Commission's support, may refer any question relating to the common foreign and security policy to the Council and may submit to it, respectively, initiatives or proposals.
2. In cases requiring a rapid decision, the High Representative, of his own motion, or at the request of a Member State, shall convene an extraordinary Council meeting within 48 hours or, in an emergency, within a shorter period.

Article 31

(ex Article 23 TEU)

1. Decisions under this Chapter shall be taken by the European Council and the Council acting unanimously, except where this Chapter provides otherwise. The adoption of legislative acts shall be excluded.

When abstaining in a vote, any member of the Council may qualify its abstention by making a formal declaration under the present subparagraph. In that case, it shall not be obliged to apply the decision, but shall accept that the decision commits the Union. In a spirit of mutual solidarity, the Member State concerned shall refrain from any action likely to conflict with or impede Union action based on that decision and the other Member States shall respect its position. If the members of the Council qualifying their abstention in this way represent at least one third of the Member States comprising at least one third of the population of the Union, the decision shall not be adopted.

2. By derogation from the provisions of paragraph 1, the Council shall act by qualified majority:
 - when adopting a decision defining a Union action or position on the basis of a decision of the European Council relating to the Union's strategic interests and objectives, as referred to in Article 22(1),
 - when adopting a decision defining a Union action or position, on a proposal which the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy has presented following a specific request from the European Council, made on its own initiative or that of the High Representative,

- when adopting any decision implementing a decision defining a Union action or position,
- when appointing a special representative in accordance with Article 33.

If a member of the Council declares that, for vital and stated reasons of national policy, it intends to oppose the adoption of a decision to be taken by qualified majority, a vote shall not be taken. The High Representative will, in close consultation with the Member State involved, search for a solution acceptable to it. If he does not succeed, the Council may, acting by a qualified majority, request that the matter be referred to the European Council for a decision by unanimity.

3. The European Council may unanimously adopt a decision stipulating that the Council shall act by a qualified majority in cases other than those referred to in paragraph 2.
4. Paragraphs 2 and 3 shall not apply to decisions having military or defence implications.
5. For procedural questions, the Council shall act by a majority of its members.

Article 32

(ex Article 16 TEU)

Member States shall consult one another within the European Council and the Council on any matter of foreign and security policy of general interest in order to determine a common approach. Before undertaking any action on the international scene or entering into any commitment which could affect the Union's interests, each Member State shall consult the others within the European Council or the Council. Member States shall ensure, through the convergence of their actions, that the Union is able to assert its interests and values on the international scene. Member States shall show mutual solidarity.

When the European Council or the Council has defined a common approach of the Union within the meaning of the first paragraph, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Ministers for Foreign Affairs of the Member States shall coordinate their activities within the Council.

The diplomatic missions of the Member States and the Union delegations in third countries and at international organisations shall cooperate and shall contribute to formulating and implementing the common approach.

Article 33

(ex Article 18 TEU)

The Council may, on a proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, appoint a special representative with a mandate in relation to particular policy issues. The special representative shall carry out his mandate under the authority of the High Representative.

Article 34

(ex Article 19 TEU)

1. Member States shall coordinate their action in international organisations and at international conferences. They shall uphold the Union's positions in such forums. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall organise this coordination.

In international organisations and at international conferences where not all the Member States participate, those which do take part shall uphold the Union's positions.

2. In accordance with Article 24(3), Member States represented in international organisations or international conferences where not all the Member States participate shall keep the other Member States and the High Representative informed of any matter of common interest.

Member States which are also members of the United Nations Security Council will concert and keep the other Member States and the High Representative fully informed. Member States which are members of the Security Council will, in the execution of their functions, defend the positions and the interests of the Union, without prejudice to their responsibilities under the provisions of the United Nations Charter.

When the Union has defined a position on a subject which is on the United Nations Security Council agenda, those Member States which sit on the Security Council shall request that the High Representative be invited to present the Union's position.

Article 35

(ex Article 20 TEU)

The diplomatic and consular missions of the Member States and the Union delegations in third countries and international conferences, and their representations to international organisations, shall cooperate in ensuring that decisions defining Union positions and actions adopted pursuant to this Chapter are complied with and implemented.

They shall step up cooperation by exchanging information and carrying out joint assessments.

They shall contribute to the implementation of the right of citizens of the Union to protection in the territory of third countries as referred to in Article 20(2)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union and of the measures adopted pursuant to Article 23 of that Treaty.

Article 36

(ex Article 21 TEU)

The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall regularly consult the European Parliament on the main aspects and the basic choices of the common foreign and security policy and the common security and defence policy and inform it of how those policies evolve. He shall ensure that the views of the European Parliament are duly taken into consideration. Special representatives may be involved in briefing the European Parliament.

The European Parliament may address questions or make recommendations to the Council or the High Representative. Twice a year it shall hold a debate on progress in implementing the common foreign and security policy, including the common security and defence policy.

Article 37

(ex Article 24 TEU)

The Union may conclude agreements with one or more States or international organisations in areas covered by this Chapter.

Article 38

(ex Article 25 TEU)

Without prejudice to Article 240 of the Treaty on the Functioning of the European Union, a Political and Security Committee shall monitor the international situation in the areas covered by the common foreign and security policy and contribute to the definition of policies by delivering opinions to the Council at the request of the Council or of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy or on its own initiative. It shall also monitor the implementation of agreed policies, without prejudice to the powers of the High Representative.

Within the scope of this Chapter, the Political and Security Committee shall exercise, under the responsibility of the Council and of the High Representative, the political control and strategic direction of the crisis management operations referred to in Article 43.

The Council may authorise the Committee, for the purpose and for the duration of a crisis management operation, as determined by the Council, to take the relevant decisions concerning the political control and strategic direction of the operation.

Article 39

In accordance with Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union and by way of derogation from paragraph 2 thereof, the Council shall adopt a decision laying down the rules relating to the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of this Chapter, and the rules relating to the free movement of such data. Compliance with these rules shall be subject to the control of independent authorities.

Article 40
(ex Article 47 TEU)

The implementation of the common foreign and security policy shall not affect the application of the procedures and the extent of the powers of the institutions laid down by the Treaties for the exercise of the Union competences referred to in Articles 3 to 6 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Similarly, the implementation of the policies listed in those Articles shall not affect the application of the procedures and the extent of the powers of the institutions laid down by the Treaties for the exercise of the Union competences under this Chapter.

Article 41
(ex Article 28 TEU)

1. Administrative expenditure to which the implementation of this Chapter gives rise for the institutions shall be charged to the Union budget.

2. Operating expenditure to which the implementation of this Chapter gives rise shall also be charged to the Union budget, except for such expenditure arising from operations having military or defence implications and cases where the Council acting unanimously decides otherwise.

In cases where expenditure is not charged to the Union budget, it shall be charged to the Member States in accordance with the gross national product scale, unless the Council acting unanimously decides otherwise. As for expenditure arising from operations having military or defence implications, Member States whose representatives in the Council have made a formal declaration under Article 31(1), second subparagraph, shall not be obliged to contribute to the financing thereof.

3. The Council shall adopt a decision establishing the specific procedures for guaranteeing rapid access to appropriations in the Union budget for urgent financing of initiatives in the framework of the common foreign and security policy, and in particular for preparatory activities for the tasks referred to in Article 42(1) and Article 43. It shall act after consulting the European Parliament.

Preparatory activities for the tasks referred to in Article 42(1) and Article 43 which are not charged to the Union budget shall be financed by a start-up fund made up of Member States' contributions.

The Council shall adopt by a qualified majority, on a proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, decisions establishing:

- (a) the procedures for setting up and financing the start-up fund, in particular the amounts allocated to the fund;
- (b) the procedures for administering the start-up fund;

(c) the financial control procedures.

When the task planned in accordance with Article 42(1) and Article 43 cannot be charged to the Union budget, the Council shall authorise the High Representative to use the fund. The High Representative shall report to the Council on the implementation of this remit.

SECTION 2

PROVISIONS ON THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY

Article 42

(ex Article 17 TEU)

1. The common security and defence policy shall be an integral part of the common foreign and security policy. It shall provide the Union with an operational capacity drawing on civilian and military assets. The Union may use them on missions outside the Union for peace-keeping, conflict prevention and strengthening international security in accordance with the principles of the United Nations Charter. The performance of these tasks shall be undertaken using capabilities provided by the Member States.

2. The common security and defence policy shall include the progressive framing of a common Union defence policy. This will lead to a common defence, when the European Council, acting unanimously, so decides. It shall in that case recommend to the Member States the adoption of such a decision in accordance with their respective constitutional requirements.

The policy of the Union in accordance with this Section shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States and shall respect the obligations of certain Member States, which see their common defence realised in the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), under the North Atlantic Treaty and be compatible with the common security and defence policy established within that framework.

3. Member States shall make civilian and military capabilities available to the Union for the implementation of the common security and defence policy, to contribute to the objectives defined by the Council. Those Member States which together establish multinational forces may also make them available to the common security and defence policy.

Member States shall undertake progressively to improve their military capabilities. The Agency in the field of defence capabilities development, research, acquisition and armaments (hereinafter referred to as 'the European Defence Agency') shall identify operational requirements, shall promote measures to satisfy those requirements, shall contribute to identifying and, where appropriate, implementing any measure needed to strengthen the industrial and technological base of the defence sector, shall participate in defining a European capabilities and armaments policy, and shall assist the Council in evaluating the improvement of military capabilities.

4. Decisions relating to the common security and defence policy, including those initiating a mission as referred to in this Article, shall be adopted by the Council acting unanimously on a proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy or an initiative from a Member State. The High Representative may propose the use of both national resources and Union instruments, together with the Commission where appropriate.

5. The Council may entrust the execution of a task, within the Union framework, to a group of Member States in order to protect the Union's values and serve its interests. The execution of such a task shall be governed by Article 44.

6. Those Member States whose military capabilities fulfil higher criteria and which have made more binding commitments to one another in this area with a view to the most demanding missions shall establish permanent structured cooperation within the Union framework. Such cooperation shall be governed by Article 46. It shall not affect the provisions of Article 43.

7. If a Member State is the victim of armed aggression on its territory, the other Member States shall have towards it an obligation of aid and assistance by all the means in their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter. This shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States.

Commitments and cooperation in this area shall be consistent with commitments under the North Atlantic Treaty Organisation, which, for those States which are members of it, remains the foundation of their collective defence and the forum for its implementation.

Article 43

1. The tasks referred to in Article 42(1), in the course of which the Union may use civilian and military means, shall include joint disarmament operations, humanitarian and rescue tasks, military advice and assistance tasks, conflict prevention and peace-keeping tasks, tasks of combat forces in crisis management, including peace-making and post-conflict stabilisation. All these tasks may contribute to the fight against terrorism, including by supporting third countries in combating terrorism in their territories.

2. The Council shall adopt decisions relating to the tasks referred to in paragraph 1, defining their objectives and scope and the general conditions for their implementation. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, acting under the authority of the Council and in close and constant contact with the Political and Security Committee, shall ensure coordination of the civilian and military aspects of such tasks.

Article 44

1. Within the framework of the decisions adopted in accordance with Article 43, the Council may entrust the implementation of a task to a group of Member States which are willing and have the necessary capability for such a task. Those Member States, in association with the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall agree among themselves on the management of the task.

2. Member States participating in the task shall keep the Council regularly informed of its progress on their own initiative or at the request of another Member State. Those States shall inform the Council immediately should the completion of the task entail major consequences or require amendment of the objective, scope and conditions determined for the task in the decisions referred to in paragraph 1. In such cases, the Council shall adopt the necessary decisions.

Article 45

1. The European Defence Agency referred to in Article 42(3), subject to the authority of the Council, shall have as its task to:

- (a) contribute to identifying the Member States' military capability objectives and evaluating observance of the capability commitments given by the Member States;
- (b) promote harmonisation of operational needs and adoption of effective, compatible procurement methods;
- (c) propose multilateral projects to fulfil the objectives in terms of military capabilities, ensure coordination of the programmes implemented by the Member States and management of specific cooperation programmes;
- (d) support defence technology research, and coordinate and plan joint research activities and the study of technical solutions meeting future operational needs;
- (e) contribute to identifying and, if necessary, implementing any useful measure for strengthening the industrial and technological base of the defence sector and for improving the effectiveness of military expenditure.

2. The European Defence Agency shall be open to all Member States wishing to be part of it. The Council, acting by a qualified majority, shall adopt a decision defining the Agency's statute, seat and operational rules. That decision should take account of the level of effective participation in the Agency's activities. Specific groups shall be set up within the Agency bringing together Member States engaged in joint projects. The Agency shall carry out its tasks in liaison with the Commission where necessary.

Article 46

1. Those Member States which wish to participate in the permanent structured cooperation referred to in Article 42(6), which fulfil the criteria and have made the commitments on military capabilities set out in the Protocol on permanent structured cooperation, shall notify their intention to the Council and to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.

2. Within three months following the notification referred to in paragraph 1 the Council shall adopt a decision establishing permanent structured cooperation and determining the list of participating Member States. The Council shall act by a qualified majority after consulting the High Representative.

3. Any Member State which, at a later stage, wishes to participate in the permanent structured cooperation shall notify its intention to the Council and to the High Representative.

The Council shall adopt a decision confirming the participation of the Member State concerned which fulfils the criteria and makes the commitments referred to in Articles 1 and 2 of the Protocol on permanent structured cooperation. The Council shall act by a qualified majority after consulting the High Representative. Only members of the Council representing the participating Member States shall take part in the vote.

A qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

4. If a participating Member State no longer fulfils the criteria or is no longer able to meet the commitments referred to in Articles 1 and 2 of the Protocol on permanent structured cooperation, the Council may adopt a decision suspending the participation of the Member State concerned.

The Council shall act by a qualified majority. Only members of the Council representing the participating Member States, with the exception of the Member State in question, shall take part in the vote.

A qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

5. Any participating Member State which wishes to withdraw from permanent structured cooperation shall notify its intention to the Council, which shall take note that the Member State in question has ceased to participate.

6. The decisions and recommendations of the Council within the framework of permanent structured cooperation, other than those provided for in paragraphs 2 to 5, shall be adopted by unanimity. For the purposes of this paragraph, unanimity shall be constituted by the votes of the representatives of the participating Member States only.

TITLE VI

FINAL PROVISIONS

Article 47

The Union shall have legal personality.

Article 48

(ex Article 48 TEU)

1. The Treaties may be amended in accordance with an ordinary revision procedure. They may also be amended in accordance with simplified revision procedures.

Ordinary revision procedure

2. The Government of any Member State, the European Parliament or the Commission may submit to the Council proposals for the amendment of the Treaties. These proposals may, *inter alia*, serve either to increase or to reduce the competences conferred on the Union in the Treaties. These proposals shall be submitted to the European Council by the Council and the national Parliaments shall be notified.

3. If the European Council, after consulting the European Parliament and the Commission, adopts by a simple majority a decision in favour of examining the proposed amendments, the President of the European Council shall convene a Convention composed of representatives of the national Parliaments, of the Heads of State or Government of the Member States, of the European Parliament and of the Commission. The European Central Bank shall also be consulted in the case of institutional changes in the monetary area. The Convention shall examine the proposals for amendments and shall adopt by consensus a recommendation to a conference of representatives of the governments of the Member States as provided for in paragraph 4.

The European Council may decide by a simple majority, after obtaining the consent of the European Parliament, not to convene a Convention should this not be justified by the extent of the proposed amendments. In the latter case, the European Council shall define the terms of reference for a conference of representatives of the governments of the Member States.

4. A conference of representatives of the governments of the Member States shall be convened by the President of the Council for the purpose of determining by common accord the amendments to be made to the Treaties.

The amendments shall enter into force after being ratified by all the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

5. If, two years after the signature of a treaty amending the Treaties, four fifths of the Member States have ratified it and one or more Member States have encountered difficulties in proceeding with ratification, the matter shall be referred to the European Council.

Simplified revision procedures

6. The Government of any Member State, the European Parliament or the Commission may submit to the European Council proposals for revising all or part of the provisions of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union relating to the internal policies and action of the Union.

The European Council may adopt a decision amending all or part of the provisions of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union. The European Council shall act by unanimity after consulting the European Parliament and the Commission, and the European Central Bank in the case of institutional changes in the monetary area. That decision shall not enter into force until it is approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

The decision referred to in the second subparagraph shall not increase the competences conferred on the Union in the Treaties.

7. Where the Treaty on the Functioning of the European Union or Title V of this Treaty provides for the Council to act by unanimity in a given area or case, the European Council may adopt a decision authorising the Council to act by a qualified majority in that area or in that case. This subparagraph shall not apply to decisions with military implications or those in the area of defence.

Where the Treaty on the Functioning of the European Union provides for legislative acts to be adopted by the Council in accordance with a special legislative procedure, the European Council may adopt a decision allowing for the adoption of such acts in accordance with the ordinary legislative procedure.

Any initiative taken by the European Council on the basis of the first or the second subparagraph shall be notified to the national Parliaments. If a national Parliament makes known its opposition within six months of the date of such notification, the decision referred to in the first or the second subparagraph shall not be adopted. In the absence of opposition, the European Council may adopt the decision.

For the adoption of the decisions referred to in the first and second subparagraphs, the European Council shall act by unanimity after obtaining the consent of the European Parliament, which shall be given by a majority of its component members.

Article 49

(ex Article 49 TEU)

Any European State which respects the values referred to in Article 2 and is committed to promoting them may apply to become a member of the Union. The European Parliament and national Parliaments shall be notified of this application. The applicant State shall address its application to the Council, which shall act unanimously after consulting the Commission and after receiving the consent of the European Parliament, which shall act by a majority of its component members. The conditions of eligibility agreed upon by the European Council shall be taken into account.

The conditions of admission and the adjustments to the Treaties on which the Union is founded, which such admission entails, shall be the subject of an agreement between the Member States and the applicant State. This agreement shall be submitted for ratification by all the contracting States in accordance with their respective constitutional requirements.

Article 50

1. Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements.

2. A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. In the light of the guidelines provided by the European Council, the Union shall negotiate and conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union. That agreement shall be negotiated in accordance with Article 218(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union. It shall be concluded on behalf of the Union by the Council, acting by a qualified majority, after obtaining the consent of the European Parliament.

3. The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.

4. For the purposes of paragraphs 2 and 3, the member of the European Council or of the Council representing the withdrawing Member State shall not participate in the discussions of the European Council or Council or in decisions concerning it.

A qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

5. If a State which has withdrawn from the Union asks to rejoin, its request shall be subject to the procedure referred to in Article 49.

Article 51

The Protocols and Annexes to the Treaties shall form an integral part thereof.

Article 52

1. The Treaties shall apply to the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

2. The territorial scope of the Treaties is specified in Article 355 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 53

(ex Article 51 TEU)

This Treaty is concluded for an unlimited period.

Article 54

(ex Article 52 TEU)

1. This Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Italian Republic.

2. This Treaty shall enter into force on 1 January 1993, provided that all the Instruments of ratification have been deposited, or, failing that, on the first day of the month following the deposit of the Instrument of ratification by the last signatory State to take this step.

Article 55

(ex Article 53 TEU)

1. This Treaty, drawn up in a single original in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, the texts in each of these languages being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the Italian Republic, which will transmit a certified copy to each of the governments of the other signatory States.

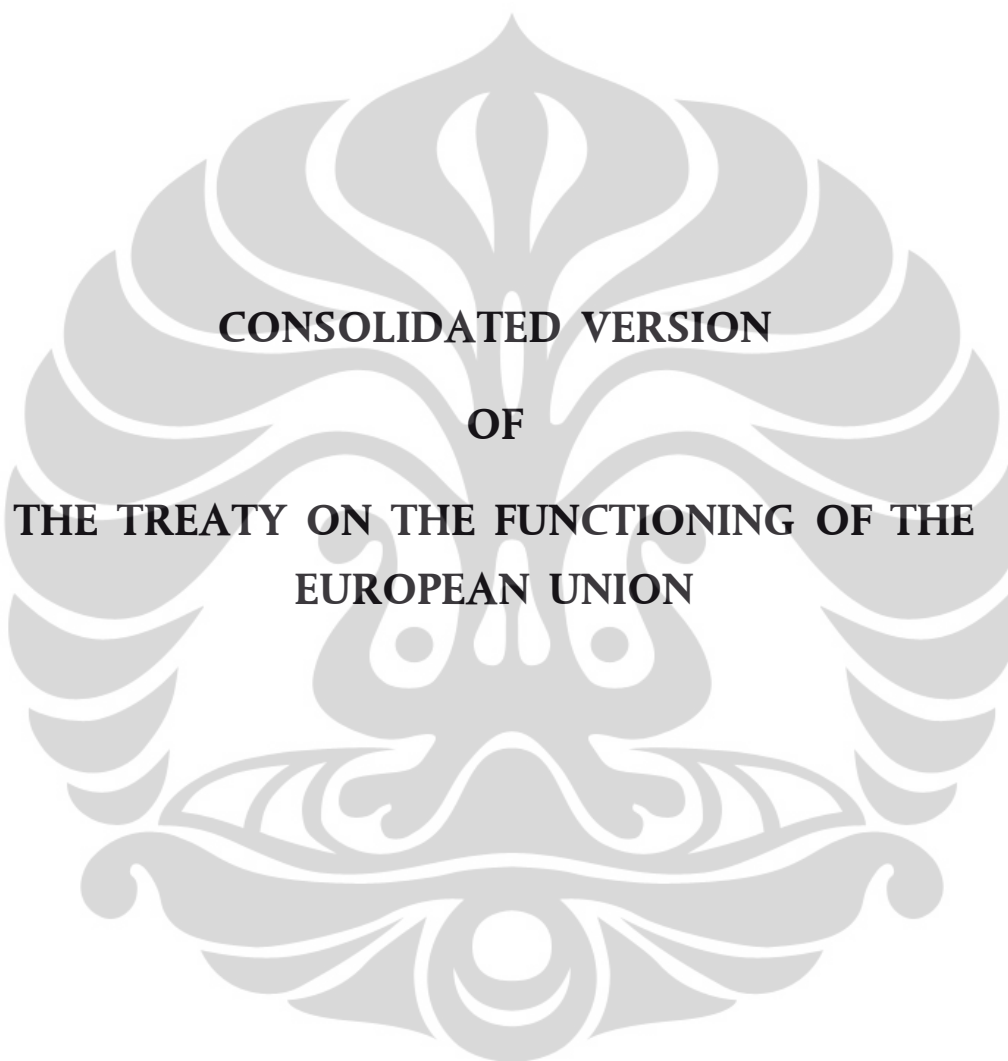
2. This Treaty may also be translated into any other languages as determined by Member States among those which, in accordance with their constitutional order, enjoy official status in all or part of their territory. A certified copy of such translations shall be provided by the Member States concerned to be deposited in the archives of the Council.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

(List of signatories not reproduced)







PREAMBLE

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, HER ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUCHESS OF LUXEMBOURG, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS ⁽¹⁾,

DETERMINED to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe,

RESOLVED to ensure the economic and social progress of their States by common action to eliminate the barriers which divide Europe,

AFFIRMING as the essential objective of their efforts the constant improvements of the living and working conditions of their peoples,

RECOGNISING that the removal of existing obstacles calls for concerted action in order to guarantee steady expansion, balanced trade and fair competition,

ANXIOUS to strengthen the unity of their economies and to ensure their harmonious development by reducing the differences existing between the various regions and the backwardness of the less favoured regions,

DESIRING to contribute, by means of a common commercial policy, to the progressive abolition of restrictions on international trade,

INTENDING to confirm the solidarity which binds Europe and the overseas countries and desiring to ensure the development of their prosperity, in accordance with the principles of the Charter of the United Nations,

RESOLVED by thus pooling their resources to preserve and strengthen peace and liberty, and calling upon the other peoples of Europe who share their ideal to join in their efforts,

DETERMINED to promote the development of the highest possible level of knowledge for their peoples through a wide access to education and through its continuous updating,

and to this end HAVE DESIGNATED as their Plenipotentiaries:

(List of plenipotentiaries not reproduced)

WHO, having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed as follows.

⁽¹⁾ The Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have since become members of the European Union.

PART ONE

PRINCIPLES

Article 1

1. This Treaty organises the functioning of the Union and determines the areas of, delimitation of, and arrangements for exercising its competences.

2. This Treaty and the Treaty on European Union constitute the Treaties on which the Union is founded. These two Treaties, which have the same legal value, shall be referred to as 'the Treaties'.

TITLE I

CATEGORIES AND AREAS OF UNION COMPETENCE

Article 2

1. When the Treaties confer on the Union exclusive competence in a specific area, only the Union may legislate and adopt legally binding acts, the Member States being able to do so themselves only if so empowered by the Union or for the implementation of Union acts.

2. When the Treaties confer on the Union a competence shared with the Member States in a specific area, the Union and the Member States may legislate and adopt legally binding acts in that area. The Member States shall exercise their competence to the extent that the Union has not exercised its competence. The Member States shall again exercise their competence to the extent that the Union has decided to cease exercising its competence.

3. The Member States shall coordinate their economic and employment policies within arrangements as determined by this Treaty, which the Union shall have competence to provide.

4. The Union shall have competence, in accordance with the provisions of the Treaty on European Union, to define and implement a common foreign and security policy, including the progressive framing of a common defence policy.

5. In certain areas and under the conditions laid down in the Treaties, the Union shall have competence to carry out actions to support, coordinate or supplement the actions of the Member States, without thereby superseding their competence in these areas.

Legally binding acts of the Union adopted on the basis of the provisions of the Treaties relating to these areas shall not entail harmonisation of Member States' laws or regulations.

6. The scope of and arrangements for exercising the Union's competences shall be determined by the provisions of the Treaties relating to each area.

Article 3

1. The Union shall have exclusive competence in the following areas:
 - (a) customs union;
 - (b) the establishing of the competition rules necessary for the functioning of the internal market;
 - (c) monetary policy for the Member States whose currency is the euro;
 - (d) the conservation of marine biological resources under the common fisheries policy;
 - (e) common commercial policy.
2. The Union shall also have exclusive competence for the conclusion of an international agreement when its conclusion is provided for in a legislative act of the Union or is necessary to enable the Union to exercise its internal competence, or in so far as its conclusion may affect common rules or alter their scope.

Article 4

1. The Union shall share competence with the Member States where the Treaties confer on it a competence which does not relate to the areas referred to in Articles 3 and 6.
2. Shared competence between the Union and the Member States applies in the following principal areas:
 - (a) internal market;
 - (b) social policy, for the aspects defined in this Treaty;
 - (c) economic, social and territorial cohesion;
 - (d) agriculture and fisheries, excluding the conservation of marine biological resources;
 - (e) environment;
 - (f) consumer protection;
 - (g) transport;
 - (h) trans-European networks;
 - (i) energy;

(j) area of freedom, security and justice;

(k) common safety concerns in public health matters, for the aspects defined in this Treaty.

3. In the areas of research, technological development and space, the Union shall have competence to carry out activities, in particular to define and implement programmes; however, the exercise of that competence shall not result in Member States being prevented from exercising theirs.

4. In the areas of development cooperation and humanitarian aid, the Union shall have competence to carry out activities and conduct a common policy; however, the exercise of that competence shall not result in Member States being prevented from exercising theirs.

Article 5

1. The Member States shall coordinate their economic policies within the Union. To this end, the Council shall adopt measures, in particular broad guidelines for these policies.

Specific provisions shall apply to those Member States whose currency is the euro.

2. The Union shall take measures to ensure coordination of the employment policies of the Member States, in particular by defining guidelines for these policies.

3. The Union may take initiatives to ensure coordination of Member States' social policies.

Article 6

The Union shall have competence to carry out actions to support, coordinate or supplement the actions of the Member States. The areas of such action shall, at European level, be:

(a) protection and improvement of human health;

(b) industry;

(c) culture;

(d) tourism;

(e) education, vocational training, youth and sport;

- (f) civil protection;
- (g) administrative cooperation.

TITLE II

PROVISIONS HAVING GENERAL APPLICATION

Article 7

The Union shall ensure consistency between its policies and activities, taking all of its objectives into account and in accordance with the principle of conferral of powers.

Article 8

(ex Article 3(2) TEC) ⁽¹⁾

In all its activities, the Union shall aim to eliminate inequalities, and to promote equality, between men and women.

Article 9

In defining and implementing its policies and activities, the Union shall take into account requirements linked to the promotion of a high level of employment, the guarantee of adequate social protection, the fight against social exclusion, and a high level of education, training and protection of human health.

Article 10

In defining and implementing its policies and activities, the Union shall aim to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.

Article 11

(ex Article 6 TEC)

Environmental protection requirements must be integrated into the definition and implementation of the Union's policies and activities, in particular with a view to promoting sustainable development.

⁽¹⁾ These references are merely indicative. For more ample information, please refer to the tables of equivalences between the old and the new numbering of the Treaties.

Article 12

(ex Article 153(2) TEC)

Consumer protection requirements shall be taken into account in defining and implementing other Union policies and activities.

Article 13

In formulating and implementing the Union's agriculture, fisheries, transport, internal market, research and technological development and space policies, the Union and the Member States shall, since animals are sentient beings, pay full regard to the welfare requirements of animals, while respecting the legislative or administrative provisions and customs of the Member States relating in particular to religious rites, cultural traditions and regional heritage.

Article 14

(ex Article 16 TEC)

Without prejudice to Article 4 of the Treaty on European Union or to Articles 93, 106 and 107 of this Treaty, and given the place occupied by services of general economic interest in the shared values of the Union as well as their role in promoting social and territorial cohesion, the Union and the Member States, each within their respective powers and within the scope of application of the Treaties, shall take care that such services operate on the basis of principles and conditions, particularly economic and financial conditions, which enable them to fulfil their missions. The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish these principles and set these conditions without prejudice to the competence of Member States, in compliance with the Treaties, to provide, to commission and to fund such services.

Article 15

(ex Article 255 TEC)

1. In order to promote good governance and ensure the participation of civil society, the Union's institutions, bodies, offices and agencies shall conduct their work as openly as possible.

2. The European Parliament shall meet in public, as shall the Council when considering and voting on a draft legislative act.

3. Any citizen of the Union, and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State, shall have a right of access to documents of the Union's institutions, bodies, offices and agencies, whatever their medium, subject to the principles and the conditions to be defined in accordance with this paragraph.

General principles and limits on grounds of public or private interest governing this right of access to documents shall be determined by the European Parliament and the Council, by means of regulations, acting in accordance with the ordinary legislative procedure.

Each institution, body, office or agency shall ensure that its proceedings are transparent and shall elaborate in its own Rules of Procedure specific provisions regarding access to its documents, in accordance with the regulations referred to in the second subparagraph.

The Court of Justice of the European Union, the European Central Bank and the European Investment Bank shall be subject to this paragraph only when exercising their administrative tasks.

The European Parliament and the Council shall ensure publication of the documents relating to the legislative procedures under the terms laid down by the regulations referred to in the second subparagraph.

Article 16
(ex Article 286 TEC)

1. Everyone has the right to the protection of personal data concerning them.
2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall lay down the rules relating to the protection of individuals with regard to the processing of personal data by Union institutions, bodies, offices and agencies, and by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Union law, and the rules relating to the free movement of such data. Compliance with these rules shall be subject to the control of independent authorities.

The rules adopted on the basis of this Article shall be without prejudice to the specific rules laid down in Article 39 of the Treaty on European Union.

Article 17

1. The Union respects and does not prejudice the status under national law of churches and religious associations or communities in the Member States.
2. The Union equally respects the status under national law of philosophical and non-confessional organisations.
3. Recognising their identity and their specific contribution, the Union shall maintain an open, transparent and regular dialogue with these churches and organisations.

PART TWO

NON-DISCRIMINATION AND CITIZENSHIP OF THE UNION

Article 18

(ex Article 12 TEC)

Within the scope of application of the Treaties, and without prejudice to any special provisions contained therein, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt rules designed to prohibit such discrimination.

Article 19

(ex Article 13 TEC)

1. Without prejudice to the other provisions of the Treaties and within the limits of the powers conferred by them upon the Union, the Council, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after obtaining the consent of the European Parliament, may take appropriate action to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.

2. By way of derogation from paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt the basic principles of Union incentive measures, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States, to support action taken by the Member States in order to contribute to the achievement of the objectives referred to in paragraph 1.

Article 20

(ex Article 17 TEC)

1. Citizenship of the Union is hereby established. Every person holding the nationality of a Member State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the Union shall be additional to and not replace national citizenship.

2. Citizens of the Union shall enjoy the rights and be subject to the duties provided for in the Treaties. They shall have, inter alia:

- (a) the right to move and reside freely within the territory of the Member States;
- (b) the right to vote and to stand as candidates in elections to the European Parliament and in municipal elections in their Member State of residence, under the same conditions as nationals of that State;

- (c) the right to enjoy, in the territory of a third country in which the Member State of which they are nationals is not represented, the protection of the diplomatic and consular authorities of any Member State on the same conditions as the nationals of that State;
- (d) the right to petition the European Parliament, to apply to the European Ombudsman, and to address the institutions and advisory bodies of the Union in any of the Treaty languages and to obtain a reply in the same language.

These rights shall be exercised in accordance with the conditions and limits defined by the Treaties and by the measures adopted thereunder.

Article 21

(ex Article 18 TEC)

1. Every citizen of the Union shall have the right to move and reside freely within the territory of the Member States, subject to the limitations and conditions laid down in the Treaties and by the measures adopted to give them effect.
2. If action by the Union should prove necessary to attain this objective and the Treaties have not provided the necessary powers, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt provisions with a view to facilitating the exercise of the rights referred to in paragraph 1.
3. For the same purposes as those referred to in paragraph 1 and if the Treaties have not provided the necessary powers, the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, may adopt measures concerning social security or social protection. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.

Article 22

(ex Article 19 TEC)

1. Every citizen of the Union residing in a Member State of which he is not a national shall have the right to vote and to stand as a candidate at municipal elections in the Member State in which he resides, under the same conditions as nationals of that State. This right shall be exercised subject to detailed arrangements adopted by the Council, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after consulting the European Parliament; these arrangements may provide for derogations where warranted by problems specific to a Member State.
2. Without prejudice to Article 223(1) and to the provisions adopted for its implementation, every citizen of the Union residing in a Member State of which he is not a national shall have the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European Parliament in the Member State in which he resides, under the same conditions as nationals of that State. This right shall be exercised subject to detailed arrangements adopted by the Council, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after consulting the European Parliament; these arrangements may provide for derogations where warranted by problems specific to a Member State.

Article 23

(ex Article 20 TEC)

Every citizen of the Union shall, in the territory of a third country in which the Member State of which he is a national is not represented, be entitled to protection by the diplomatic or consular authorities of any Member State, on the same conditions as the nationals of that State. Member States shall adopt the necessary provisions and start the international negotiations required to secure this protection.

The Council, acting in accordance with a special legislative procedure and after consulting the European Parliament, may adopt directives establishing the coordination and cooperation measures necessary to facilitate such protection.

Article 24

(ex Article 21 TEC)

The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt the provisions for the procedures and conditions required for a citizens' initiative within the meaning of Article 11 of the Treaty on European Union, including the minimum number of Member States from which such citizens must come.

Every citizen of the Union shall have the right to petition the European Parliament in accordance with Article 227.

Every citizen of the Union may apply to the Ombudsman established in accordance with Article 228.

Every citizen of the Union may write to any of the institutions or bodies referred to in this Article or in Article 13 of the Treaty on European Union in one of the languages mentioned in Article 55(1) of the Treaty on European Union and have an answer in the same language.

Article 25

(ex Article 22 TEC)

The Commission shall report to the European Parliament, to the Council and to the Economic and Social Committee every three years on the application of the provisions of this Part. This report shall take account of the development of the Union.

On this basis, and without prejudice to the other provisions of the Treaties, the Council, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after obtaining the consent of the European Parliament, may adopt provisions to strengthen or to add to the rights listed in Article 20(2). These provisions shall enter into force after their approval by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

PART THREE
UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS

TITLE I
THE INTERNAL MARKET

Article 26
(ex Article 14 TEC)

1. The Union shall adopt measures with the aim of establishing or ensuring the functioning of the internal market, in accordance with the relevant provisions of the Treaties.
2. The internal market shall comprise an area without internal frontiers in which the free movement of goods, persons, services and capital is ensured in accordance with the provisions of the Treaties.
3. The Council, on a proposal from the Commission, shall determine the guidelines and conditions necessary to ensure balanced progress in all the sectors concerned.

Article 27
(ex Article 15 TEC)

When drawing up its proposals with a view to achieving the objectives set out in Article 26, the Commission shall take into account the extent of the effort that certain economies showing differences in development will have to sustain for the establishment of the internal market and it may propose appropriate provisions.

If these provisions take the form of derogations, they must be of a temporary nature and must cause the least possible disturbance to the functioning of the internal market.

TITLE II
FREE MOVEMENT OF GOODS

Article 28
(ex Article 23 TEC)

1. The Union shall comprise a customs union which shall cover all trade in goods and which shall involve the prohibition between Member States of customs duties on imports and exports and of all charges having equivalent effect, and the adoption of a common customs tariff in their relations with third countries.

2. The provisions of Article 30 and of Chapter 2 of this Title shall apply to products originating in Member States and to products coming from third countries which are in free circulation in Member States.

Article 29

(ex Article 24 TEC)

Products coming from a third country shall be considered to be in free circulation in a Member State if the import formalities have been complied with and any customs duties or charges having equivalent effect which are payable have been levied in that Member State, and if they have not benefited from a total or partial drawback of such duties or charges.

CHAPTER 1

THE CUSTOMS UNION

Article 30

(ex Article 25 TEC)

Customs duties on imports and exports and charges having equivalent effect shall be prohibited between Member States. This prohibition shall also apply to customs duties of a fiscal nature.

Article 31

(ex Article 26 TEC)

Common Customs Tariff duties shall be fixed by the Council on a proposal from the Commission.

Article 32

(ex Article 27 TEC)

In carrying out the tasks entrusted to it under this Chapter the Commission shall be guided by:

- (a) the need to promote trade between Member States and third countries;
- (b) developments in conditions of competition within the Union in so far as they lead to an improvement in the competitive capacity of undertakings;
- (c) the requirements of the Union as regards the supply of raw materials and semi-finished goods; in this connection the Commission shall take care to avoid distorting conditions of competition between Member States in respect of finished goods;
- (d) the need to avoid serious disturbances in the economies of Member States and to ensure rational development of production and an expansion of consumption within the Union.

CHAPTER 2
CUSTOMS COOPERATION

Article 33
(ex Article 135 TEC)

Within the scope of application of the Treaties, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall take measures in order to strengthen customs cooperation between Member States and between the latter and the Commission.

CHAPTER 3
PROHIBITION OF QUANTITATIVE RESTRICTIONS BETWEEN MEMBER STATES

Article 34
(ex Article 28 TEC)

Quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between Member States.

Article 35
(ex Article 29 TEC)

Quantitative restrictions on exports, and all measures having equivalent effect, shall be prohibited between Member States.

Article 36
(ex Article 30 TEC)

The provisions of Articles 34 and 35 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of industrial and commercial property. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between Member States.

Article 37
(ex Article 31 TEC)

1. Member States shall adjust any State monopolies of a commercial character so as to ensure that no discrimination regarding the conditions under which goods are procured and marketed exists between nationals of Member States.

The provisions of this Article shall apply to any body through which a Member State, in law or in fact, either directly or indirectly supervises, determines or appreciably influences imports or exports between Member States. These provisions shall likewise apply to monopolies delegated by the State to others.

2. Member States shall refrain from introducing any new measure which is contrary to the principles laid down in paragraph 1 or which restricts the scope of the articles dealing with the prohibition of customs duties and quantitative restrictions between Member States.

3. If a State monopoly of a commercial character has rules which are designed to make it easier to dispose of agricultural products or obtain for them the best return, steps should be taken in applying the rules contained in this Article to ensure equivalent safeguards for the employment and standard of living of the producers concerned.

TITLE III AGRICULTURE AND FISHERIES

Article 38 (ex Article 32 TEC)

1. The Union shall define and implement a common agriculture and fisheries policy.

The internal market shall extend to agriculture, fisheries and trade in agricultural products. 'Agricultural products' means the products of the soil, of stockfarming and of fisheries and products of first-stage processing directly related to these products. References to the common agricultural policy or to agriculture, and the use of the term 'agricultural', shall be understood as also referring to fisheries, having regard to the specific characteristics of this sector.

2. Save as otherwise provided in Articles 39 to 44, the rules laid down for the establishment and functioning of the internal market shall apply to agricultural products.

3. The products subject to the provisions of Articles 39 to 44 are listed in Annex I.

4. The operation and development of the internal market for agricultural products must be accompanied by the establishment of a common agricultural policy.

Article 39 (ex Article 33 TEC)

1. The objectives of the common agricultural policy shall be:

(a) to increase agricultural productivity by promoting technical progress and by ensuring the rational development of agricultural production and the optimum utilisation of the factors of production, in particular labour;

- (b) thus to ensure a fair standard of living for the agricultural community, in particular by increasing the individual earnings of persons engaged in agriculture;
- (c) to stabilise markets;
- (d) to assure the availability of supplies;
- (e) to ensure that supplies reach consumers at reasonable prices.

2. In working out the common agricultural policy and the special methods for its application, account shall be taken of:

- (a) the particular nature of agricultural activity, which results from the social structure of agriculture and from structural and natural disparities between the various agricultural regions;
- (b) the need to effect the appropriate adjustments by degrees;
- (c) the fact that in the Member States agriculture constitutes a sector closely linked with the economy as a whole.

Article 40
(ex Article 34 TEC)

1. In order to attain the objectives set out in Article 39, a common organisation of agricultural markets shall be established.

This organisation shall take one of the following forms, depending on the product concerned:

- (a) common rules on competition;
- (b) compulsory coordination of the various national market organisations;
- (c) a European market organisation.

2. The common organisation established in accordance with paragraph 1 may include all measures required to attain the objectives set out in Article 39, in particular regulation of prices, aids for the production and marketing of the various products, storage and carryover arrangements and common machinery for stabilising imports or exports.

The common organisation shall be limited to pursuit of the objectives set out in Article 39 and shall exclude any discrimination between producers or consumers within the Union.

Any common price policy shall be based on common criteria and uniform methods of calculation.

3. In order to enable the common organisation referred to in paragraph 1 to attain its objectives, one or more agricultural guidance and guarantee funds may be set up.

Article 41

(ex Article 35 TEC)

To enable the objectives set out in Article 39 to be attained, provision may be made within the framework of the common agricultural policy for measures such as:

- (a) an effective coordination of efforts in the spheres of vocational training, of research and of the dissemination of agricultural knowledge; this may include joint financing of projects or institutions;
- (b) joint measures to promote consumption of certain products.

Article 42

(ex Article 36 TEC)

The provisions of the Chapter relating to rules on competition shall apply to production of and trade in agricultural products only to the extent determined by the European Parliament and the Council within the framework of Article 43(2) and in accordance with the procedure laid down therein, account being taken of the objectives set out in Article 39.

The Council, on a proposal from the Commission, may authorise the granting of aid:

- (a) for the protection of enterprises handicapped by structural or natural conditions;
- (b) within the framework of economic development programmes.

Article 43

(ex Article 37 TEC)

1. The Commission shall submit proposals for working out and implementing the common agricultural policy, including the replacement of the national organisations by one of the forms of common organisation provided for in Article 40(1), and for implementing the measures specified in this Title.

These proposals shall take account of the interdependence of the agricultural matters mentioned in this Title.

2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall establish the common organisation of agricultural markets provided for in Article 40(1) and the other provisions necessary for the pursuit of the objectives of the common agricultural policy and the common fisheries policy.

3. The Council, on a proposal from the Commission, shall adopt measures on fixing prices, levies, aid and quantitative limitations and on the fixing and allocation of fishing opportunities.

4. In accordance with paragraph 2, the national market organisations may be replaced by the common organisation provided for in Article 40(1) if:

(a) the common organisation offers Member States which are opposed to this measure and which have an organisation of their own for the production in question equivalent safeguards for the employment and standard of living of the producers concerned, account being taken of the adjustments that will be possible and the specialisation that will be needed with the passage of time;

(b) such an organisation ensures conditions for trade within the Union similar to those existing in a national market.

5. If a common organisation for certain raw materials is established before a common organisation exists for the corresponding processed products, such raw materials as are used for processed products intended for export to third countries may be imported from outside the Union.

Article 44

(ex Article 38 TEC)

Where in a Member State a product is subject to a national market organisation or to internal rules having equivalent effect which affect the competitive position of similar production in another Member State, a countervailing charge shall be applied by Member States to imports of this product coming from the Member State where such organisation or rules exist, unless that State applies a countervailing charge on export.

The Commission shall fix the amount of these charges at the level required to redress the balance; it may also authorise other measures, the conditions and details of which it shall determine.

TITLE IV

FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITAL

CHAPTER 1

WORKERS

Article 45

(ex Article 39 TEC)

1. Freedom of movement for workers shall be secured within the Union.

2. Such freedom of movement shall entail the abolition of any discrimination based on nationality between workers of the Member States as regards employment, remuneration and other conditions of work and employment.

3. It shall entail the right, subject to limitations justified on grounds of public policy, public security or public health:

- (a) to accept offers of employment actually made;
- (b) to move freely within the territory of Member States for this purpose;
- (c) to stay in a Member State for the purpose of employment in accordance with the provisions governing the employment of nationals of that State laid down by law, regulation or administrative action;
- (d) to remain in the territory of a Member State after having been employed in that State, subject to conditions which shall be embodied in regulations to be drawn up by the Commission.

4. The provisions of this Article shall not apply to employment in the public service.

Article 46
(ex Article 40 TEC)

The European Parliament and the Council shall, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, issue directives or make regulations setting out the measures required to bring about freedom of movement for workers, as defined in Article 45, in particular:

- (a) by ensuring close cooperation between national employment services;
- (b) by abolishing those administrative procedures and practices and those qualifying periods in respect of eligibility for available employment, whether resulting from national legislation or from agreements previously concluded between Member States, the maintenance of which would form an obstacle to liberalisation of the movement of workers;
- (c) by abolishing all such qualifying periods and other restrictions provided for either under national legislation or under agreements previously concluded between Member States as imposed on workers of other Member States conditions regarding the free choice of employment other than those imposed on workers of the State concerned;
- (d) by setting up appropriate machinery to bring offers of employment into touch with applications for employment and to facilitate the achievement of a balance between supply and demand in the employment market in such a way as to avoid serious threats to the standard of living and level of employment in the various regions and industries.

Article 47

(ex Article 41 TEC)

Member States shall, within the framework of a joint programme, encourage the exchange of young workers.

Article 48

(ex Article 42 TEC)

The European Parliament and the Council shall, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, adopt such measures in the field of social security as are necessary to provide freedom of movement for workers; to this end, they shall make arrangements to secure for employed and self-employed migrant workers and their dependants:

- (a) aggregation, for the purpose of acquiring and retaining the right to benefit and of calculating the amount of benefit, of all periods taken into account under the laws of the several countries;
- (b) payment of benefits to persons resident in the territories of Member States.

Where a member of the Council declares that a draft legislative act referred to in the first subparagraph would affect important aspects of its social security system, including its scope, cost or financial structure, or would affect the financial balance of that system, it may request that the matter be referred to the European Council. In that case, the ordinary legislative procedure shall be suspended. After discussion, the European Council shall, within four months of this suspension, either:

- (a) refer the draft back to the Council, which shall terminate the suspension of the ordinary legislative procedure; or
- (b) take no action or request the Commission to submit a new proposal; in that case, the act originally proposed shall be deemed not to have been adopted.

CHAPTER 2

RIGHT OF ESTABLISHMENT

Article 49

(ex Article 43 TEC)

Within the framework of the provisions set out below, restrictions on the freedom of establishment of nationals of a Member State in the territory of another Member State shall be prohibited. Such prohibition shall also apply to restrictions on the setting-up of agencies, branches or subsidiaries by nationals of any Member State established in the territory of any Member State.

Freedom of establishment shall include the right to take up and pursue activities as self-employed persons and to set up and manage undertakings, in particular companies or firms within the meaning of the second paragraph of Article 54, under the conditions laid down for its own nationals by the law of the country where such establishment is effected, subject to the provisions of the Chapter relating to capital.

Article 50

(ex Article 44 TEC)

1. In order to attain freedom of establishment as regards a particular activity, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall act by means of directives.
2. The European Parliament, the Council and the Commission shall carry out the duties devolving upon them under the preceding provisions, in particular:
 - (a) by according, as a general rule, priority treatment to activities where freedom of establishment makes a particularly valuable contribution to the development of production and trade;
 - (b) by ensuring close cooperation between the competent authorities in the Member States in order to ascertain the particular situation within the Union of the various activities concerned;
 - (c) by abolishing those administrative procedures and practices, whether resulting from national legislation or from agreements previously concluded between Member States, the maintenance of which would form an obstacle to freedom of establishment;
 - (d) by ensuring that workers of one Member State employed in the territory of another Member State may remain in that territory for the purpose of taking up activities therein as self-employed persons, where they satisfy the conditions which they would be required to satisfy if they were entering that State at the time when they intended to take up such activities;
 - (e) by enabling a national of one Member State to acquire and use land and buildings situated in the territory of another Member State, in so far as this does not conflict with the principles laid down in Article 39(2);
 - (f) by effecting the progressive abolition of restrictions on freedom of establishment in every branch of activity under consideration, both as regards the conditions for setting up agencies, branches or subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the conditions governing the entry of personnel belonging to the main establishment into managerial or supervisory posts in such agencies, branches or subsidiaries;
 - (g) by coordinating to the necessary extent the safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies or firms within the meaning of the second paragraph of Article 54 with a view to making such safeguards equivalent throughout the Union;
 - (h) by satisfying themselves that the conditions of establishment are not distorted by aids granted by Member States.

Article 51

(ex Article 45 TEC)

The provisions of this Chapter shall not apply, so far as any given Member State is concerned, to activities which in that State are connected, even occasionally, with the exercise of official authority.

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may rule that the provisions of this Chapter shall not apply to certain activities.

Article 52

(ex Article 46 TEC)

1. The provisions of this Chapter and measures taken in pursuance thereof shall not prejudice the applicability of provisions laid down by law, regulation or administrative action providing for special treatment for foreign nationals on grounds of public policy, public security or public health.
2. The European Parliament and the Council shall, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, issue directives for the coordination of the abovementioned provisions.

Article 53

(ex Article 47 TEC)

1. In order to make it easier for persons to take up and pursue activities as self-employed persons, the European Parliament and the Council shall, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, issue directives for the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications and for the coordination of the provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the taking-up and pursuit of activities as self-employed persons.
2. In the case of the medical and allied and pharmaceutical professions, the progressive abolition of restrictions shall be dependent upon coordination of the conditions for their exercise in the various Member States.

Article 54

(ex Article 48 TEC)

Companies or firms formed in accordance with the law of a Member State and having their registered office, central administration or principal place of business within the Union shall, for the purposes of this Chapter, be treated in the same way as natural persons who are nationals of Member States.

‘Companies or firms’ means companies or firms constituted under civil or commercial law, including cooperative societies, and other legal persons governed by public or private law, save for those which are non-profit-making.

Article 55

(ex Article 294 TEC)

Member States shall accord nationals of the other Member States the same treatment as their own nationals as regards participation in the capital of companies or firms within the meaning of Article 54, without prejudice to the application of the other provisions of the Treaties.

CHAPTER 3
SERVICES

Article 56
(ex Article 49 TEC)

Within the framework of the provisions set out below, restrictions on freedom to provide services within the Union shall be prohibited in respect of nationals of Member States who are established in a Member State other than that of the person for whom the services are intended.

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may extend the provisions of the Chapter to nationals of a third country who provide services and who are established within the Union.

Article 57
(ex Article 50 TEC)

Services shall be considered to be 'services' within the meaning of the Treaties where they are normally provided for remuneration, in so far as they are not governed by the provisions relating to freedom of movement for goods, capital and persons.

'Services' shall in particular include:

- (a) activities of an industrial character;
- (b) activities of a commercial character;
- (c) activities of craftsmen;
- (d) activities of the professions.

Without prejudice to the provisions of the Chapter relating to the right of establishment, the person providing a service may, in order to do so, temporarily pursue his activity in the Member State where the service is provided, under the same conditions as are imposed by that State on its own nationals.

Article 58
(ex Article 51 TEC)

1. Freedom to provide services in the field of transport shall be governed by the provisions of the Title relating to transport.
2. The liberalisation of banking and insurance services connected with movements of capital shall be effected in step with the liberalisation of movement of capital.

Article 59

(ex Article 52 TEC)

1. In order to achieve the liberalisation of a specific service, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall issue directives.

2. As regards the directives referred to in paragraph 1, priority shall as a general rule be given to those services which directly affect production costs or the liberalisation of which helps to promote trade in goods.

Article 60

(ex Article 53 TEC)

The Member States shall endeavour to undertake the liberalisation of services beyond the extent required by the directives issued pursuant to Article 59(1), if their general economic situation and the situation of the economic sector concerned so permit.

To this end, the Commission shall make recommendations to the Member States concerned.

Article 61

(ex Article 54 TEC)

As long as restrictions on freedom to provide services have not been abolished, each Member State shall apply such restrictions without distinction on grounds of nationality or residence to all persons providing services within the meaning of the first paragraph of Article 56.

Article 62

(ex Article 55 TEC)

The provisions of Articles 51 to 54 shall apply to the matters covered by this Chapter.

CHAPTER 4

CAPITAL AND PAYMENTS

Article 63

(ex Article 56 TEC)

1. Within the framework of the provisions set out in this Chapter, all restrictions on the movement of capital between Member States and between Member States and third countries shall be prohibited.

2. Within the framework of the provisions set out in this Chapter, all restrictions on payments between Member States and between Member States and third countries shall be prohibited.

Article 64

(ex Article 57 TEC)

1. The provisions of Article 63 shall be without prejudice to the application to third countries of any restrictions which exist on 31 December 1993 under national or Union law adopted in respect of the movement of capital to or from third countries involving direct investment — including in real estate — establishment, the provision of financial services or the admission of securities to capital markets. In respect of restrictions existing under national law in Bulgaria, Estonia and Hungary, the relevant date shall be 31 December 1999.

2. Whilst endeavouring to achieve the objective of free movement of capital between Member States and third countries to the greatest extent possible and without prejudice to the other Chapters of the Treaties, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt the measures on the movement of capital to or from third countries involving direct investment — including investment in real estate — establishment, the provision of financial services or the admission of securities to capital markets.

3. Notwithstanding paragraph 2, only the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, may unanimously, and after consulting the European Parliament, adopt measures which constitute a step backwards in Union law as regards the liberalisation of the movement of capital to or from third countries.

Article 65

(ex Article 58 TEC)

1. The provisions of Article 63 shall be without prejudice to the right of Member States:

- (a) to apply the relevant provisions of their tax law which distinguish between taxpayers who are not in the same situation with regard to their place of residence or with regard to the place where their capital is invested;
- (b) to take all requisite measures to prevent infringements of national law and regulations, in particular in the field of taxation and the prudential supervision of financial institutions, or to lay down procedures for the declaration of capital movements for purposes of administrative or statistical information, or to take measures which are justified on grounds of public policy or public security.

2. The provisions of this Chapter shall be without prejudice to the applicability of restrictions on the right of establishment which are compatible with the Treaties.

3. The measures and procedures referred to in paragraphs 1 and 2 shall not constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on the free movement of capital and payments as defined in Article 63.

4. In the absence of measures pursuant to Article 64(3), the Commission or, in the absence of a Commission decision within three months from the request of the Member State concerned, the Council, may adopt a decision stating that restrictive tax measures adopted by a Member State concerning one or more third countries are to be considered compatible with the Treaties in so far as they are justified by one of the objectives of the Union and compatible with the proper functioning of the internal market. The Council shall act unanimously on application by a Member State.

Article 66

(ex Article 59 TEC)

Where, in exceptional circumstances, movements of capital to or from third countries cause, or threaten to cause, serious difficulties for the operation of economic and monetary union, the Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European Central Bank, may take safeguard measures with regard to third countries for a period not exceeding six months if such measures are strictly necessary.

TITLE V

AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

Article 67

(ex Article 61 TEC and ex Article 29 TEU)

1. The Union shall constitute an area of freedom, security and justice with respect for fundamental rights and the different legal systems and traditions of the Member States.
2. It shall ensure the absence of internal border controls for persons and shall frame a common policy on asylum, immigration and external border control, based on solidarity between Member States, which is fair towards third-country nationals. For the purpose of this Title, stateless persons shall be treated as third-country nationals.
3. The Union shall endeavour to ensure a high level of security through measures to prevent and combat crime, racism and xenophobia, and through measures for coordination and cooperation between police and judicial authorities and other competent authorities, as well as through the mutual recognition of judgments in criminal matters and, if necessary, through the approximation of criminal laws.
4. The Union shall facilitate access to justice, in particular through the principle of mutual recognition of judicial and extrajudicial decisions in civil matters.

Article 68

The European Council shall define the strategic guidelines for legislative and operational planning within the area of freedom, security and justice.

Article 69

National Parliaments ensure that the proposals and legislative initiatives submitted under Chapters 4 and 5 comply with the principle of subsidiarity, in accordance with the arrangements laid down by the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality.

Article 70

Without prejudice to Articles 258, 259 and 260, the Council may, on a proposal from the Commission, adopt measures laying down the arrangements whereby Member States, in collaboration with the Commission, conduct objective and impartial evaluation of the implementation of the Union policies referred to in this Title by Member States' authorities, in particular in order to facilitate full application of the principle of mutual recognition. The European Parliament and national Parliaments shall be informed of the content and results of the evaluation.

Article 71

(ex Article 36 TEU)

A standing committee shall be set up within the Council in order to ensure that operational cooperation on internal security is promoted and strengthened within the Union. Without prejudice to Article 240, it shall facilitate coordination of the action of Member States' competent authorities. Representatives of the Union bodies, offices and agencies concerned may be involved in the proceedings of this committee. The European Parliament and national Parliaments shall be kept informed of the proceedings.

Article 72

(ex Article 64(1) TEC and ex Article 33 TEU)

This Title shall not affect the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security.

Article 73

It shall be open to Member States to organise between themselves and under their responsibility such forms of cooperation and coordination as they deem appropriate between the competent departments of their administrations responsible for safeguarding national security.

Article 74

(ex Article 66 TEC)

The Council shall adopt measures to ensure administrative cooperation between the relevant departments of the Member States in the areas covered by this Title, as well as between those departments and the Commission. It shall act on a Commission proposal, subject to Article 76, and after consulting the European Parliament.

Article 75

(ex Article 60 TEC)

Where necessary to achieve the objectives set out in Article 67, as regards preventing and combating terrorism and related activities, the European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall define a framework for administrative measures with regard to capital movements and payments, such as the freezing of funds, financial assets or economic gains belonging to, or owned or held by, natural or legal persons, groups or non-State entities.

The Council, on a proposal from the Commission, shall adopt measures to implement the framework referred to in the first paragraph.

The acts referred to in this Article shall include necessary provisions on legal safeguards.

Article 76

The acts referred to in Chapters 4 and 5, together with the measures referred to in Article 74 which ensure administrative cooperation in the areas covered by these Chapters, shall be adopted:

- (a) on a proposal from the Commission, or
- (b) on the initiative of a quarter of the Member States.

CHAPTER 2

POLICIES ON BORDER CHECKS, ASYLUM AND IMMIGRATION

Article 77

(ex Article 62 TEC)

1. The Union shall develop a policy with a view to:

- (a) ensuring the absence of any controls on persons, whatever their nationality, when crossing internal borders;

(b) carrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external borders;

(c) the gradual introduction of an integrated management system for external borders.

2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures concerning:

(a) the common policy on visas and other short-stay residence permits;

(b) the checks to which persons crossing external borders are subject;

(c) the conditions under which nationals of third countries shall have the freedom to travel within the Union for a short period;

(d) any measure necessary for the gradual establishment of an integrated management system for external borders;

(e) the absence of any controls on persons, whatever their nationality, when crossing internal borders.

3. If action by the Union should prove necessary to facilitate the exercise of the right referred to in Article 20(2)(a), and if the Treaties have not provided the necessary powers, the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, may adopt provisions concerning passports, identity cards, residence permits or any other such document. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.

4. This Article shall not affect the competence of the Member States concerning the geographical demarcation of their borders, in accordance with international law.

Article 78

(ex Articles 63, points 1 and 2, and 64(2) TEC)

1. The Union shall develop a common policy on asylum, subsidiary protection and temporary protection with a view to offering appropriate status to any third-country national requiring international protection and ensuring compliance with the principle of *non-refoulement*. This policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties.

2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures for a common European asylum system comprising:

(a) a uniform status of asylum for nationals of third countries, valid throughout the Union;

(b) a uniform status of subsidiary protection for nationals of third countries who, without obtaining European asylum, are in need of international protection;

- (c) a common system of temporary protection for displaced persons in the event of a massive inflow;
- (d) common procedures for the granting and withdrawing of uniform asylum or subsidiary protection status;
- (e) criteria and mechanisms for determining which Member State is responsible for considering an application for asylum or subsidiary protection;
- (f) standards concerning the conditions for the reception of applicants for asylum or subsidiary protection;
- (g) partnership and cooperation with third countries for the purpose of managing inflows of people applying for asylum or subsidiary or temporary protection.

3. In the event of one or more Member States being confronted by an emergency situation characterised by a sudden inflow of nationals of third countries, the Council, on a proposal from the Commission, may adopt provisional measures for the benefit of the Member State(s) concerned. It shall act after consulting the European Parliament.

Article 79

(ex Article 63, points 3 and 4, TEC)

1. The Union shall develop a common immigration policy aimed at ensuring, at all stages, the efficient management of migration flows, fair treatment of third-country nationals residing legally in Member States, and the prevention of, and enhanced measures to combat, illegal immigration and trafficking in human beings.

2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures in the following areas:

- (a) the conditions of entry and residence, and standards on the issue by Member States of long-term visas and residence permits, including those for the purpose of family reunification;
- (b) the definition of the rights of third-country nationals residing legally in a Member State, including the conditions governing freedom of movement and of residence in other Member States;
- (c) illegal immigration and unauthorised residence, including removal and repatriation of persons residing without authorisation;
- (d) combating trafficking in persons, in particular women and children.

3. The Union may conclude agreements with third countries for the readmission to their countries of origin or provenance of third-country nationals who do not or who no longer fulfil the conditions for entry, presence or residence in the territory of one of the Member States.

4. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may establish measures to provide incentives and support for the action of Member States with a view to promoting the integration of third-country nationals residing legally in their territories, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

5. This Article shall not affect the right of Member States to determine volumes of admission of third-country nationals coming from third countries to their territory in order to seek work, whether employed or self-employed.

Article 80

The policies of the Union set out in this Chapter and their implementation shall be governed by the principle of solidarity and fair sharing of responsibility, including its financial implications, between the Member States. Whenever necessary, the Union acts adopted pursuant to this Chapter shall contain appropriate measures to give effect to this principle.

CHAPTER 3

JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS

Article 81

(ex Article 65 TEC)

1. The Union shall develop judicial cooperation in civil matters having cross-border implications, based on the principle of mutual recognition of judgments and of decisions in extrajudicial cases. Such cooperation may include the adoption of measures for the approximation of the laws and regulations of the Member States.

2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures, particularly when necessary for the proper functioning of the internal market, aimed at ensuring:

- (a) the mutual recognition and enforcement between Member States of judgments and of decisions in extrajudicial cases;
- (b) the cross-border service of judicial and extrajudicial documents;
- (c) the compatibility of the rules applicable in the Member States concerning conflict of laws and of jurisdiction;
- (d) cooperation in the taking of evidence;
- (e) effective access to justice;
- (f) the elimination of obstacles to the proper functioning of civil proceedings, if necessary by promoting the compatibility of the rules on civil procedure applicable in the Member States;

(g) the development of alternative methods of dispute settlement;

(h) support for the training of the judiciary and judicial staff.

3. Notwithstanding paragraph 2, measures concerning family law with cross-border implications shall be established by the Council, acting in accordance with a special legislative procedure. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.

The Council, on a proposal from the Commission, may adopt a decision determining those aspects of family law with cross-border implications which may be the subject of acts adopted by the ordinary legislative procedure. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.

The proposal referred to in the second subparagraph shall be notified to the national Parliaments. If a national Parliament makes known its opposition within six months of the date of such notification, the decision shall not be adopted. In the absence of opposition, the Council may adopt the decision.

CHAPTER 4

JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS

Article 82

(ex Article 31 TEU)

1. Judicial cooperation in criminal matters in the Union shall be based on the principle of mutual recognition of judgments and judicial decisions and shall include the approximation of the laws and regulations of the Member States in the areas referred to in paragraph 2 and in Article 83.

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures to:

- (a) lay down rules and procedures for ensuring recognition throughout the Union of all forms of judgments and judicial decisions;
- (b) prevent and settle conflicts of jurisdiction between Member States;
- (c) support the training of the judiciary and judicial staff;
- (d) facilitate cooperation between judicial or equivalent authorities of the Member States in relation to proceedings in criminal matters and the enforcement of decisions.

2. To the extent necessary to facilitate mutual recognition of judgments and judicial decisions and police and judicial cooperation in criminal matters having a cross-border dimension, the European Parliament and the Council may, by means of directives adopted in accordance with the ordinary legislative procedure, establish minimum rules. Such rules shall take into account the differences between the legal traditions and systems of the Member States.

They shall concern:

- (a) mutual admissibility of evidence between Member States;
- (b) the rights of individuals in criminal procedure;
- (c) the rights of victims of crime;
- (d) any other specific aspects of criminal procedure which the Council has identified in advance by a decision; for the adoption of such a decision, the Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.

Adoption of the minimum rules referred to in this paragraph shall not prevent Member States from maintaining or introducing a higher level of protection for individuals.

3. Where a member of the Council considers that a draft directive as referred to in paragraph 2 would affect fundamental aspects of its criminal justice system, it may request that the draft directive be referred to the European Council. In that case, the ordinary legislative procedure shall be suspended. After discussion, and in case of a consensus, the European Council shall, within four months of this suspension, refer the draft back to the Council, which shall terminate the suspension of the ordinary legislative procedure.

Within the same timeframe, in case of disagreement, and if at least nine Member States wish to establish enhanced cooperation on the basis of the draft directive concerned, they shall notify the European Parliament, the Council and the Commission accordingly. In such a case, the authorisation to proceed with enhanced cooperation referred to in Article 20(2) of the Treaty on European Union and Article 329(1) of this Treaty shall be deemed to be granted and the provisions on enhanced cooperation shall apply.

Article 83

(ex Article 31 TEU)

1. The European Parliament and the Council may, by means of directives adopted in accordance with the ordinary legislative procedure, establish minimum rules concerning the definition of criminal offences and sanctions in the areas of particularly serious crime with a cross-border dimension resulting from the nature or impact of such offences or from a special need to combat them on a common basis.

These areas of crime are the following: terrorism, trafficking in human beings and sexual exploitation of women and children, illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, money laundering, corruption, counterfeiting of means of payment, computer crime and organised crime.

On the basis of developments in crime, the Council may adopt a decision identifying other areas of crime that meet the criteria specified in this paragraph. It shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.

2. If the approximation of criminal laws and regulations of the Member States proves essential to ensure the effective implementation of a Union policy in an area which has been subject to harmonisation measures, directives may establish minimum rules with regard to the definition of criminal offences and sanctions in the area concerned. Such directives shall be adopted by the same ordinary or special legislative procedure as was followed for the adoption of the harmonisation measures in question, without prejudice to Article 76.

3. Where a member of the Council considers that a draft directive as referred to in paragraph 1 or 2 would affect fundamental aspects of its criminal justice system, it may request that the draft directive be referred to the European Council. In that case, the ordinary legislative procedure shall be suspended. After discussion, and in case of a consensus, the European Council shall, within four months of this suspension, refer the draft back to the Council, which shall terminate the suspension of the ordinary legislative procedure.

Within the same timeframe, in case of disagreement, and if at least nine Member States wish to establish enhanced cooperation on the basis of the draft directive concerned, they shall notify the European Parliament, the Council and the Commission accordingly. In such a case, the authorisation to proceed with enhanced cooperation referred to in Article 20(2) of the Treaty on European Union and Article 329(1) of this Treaty shall be deemed to be granted and the provisions on enhanced cooperation shall apply.

Article 84

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may establish measures to promote and support the action of Member States in the field of crime prevention, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

Article 85

(ex Article 31 TEU)

1. Eurojust's mission shall be to support and strengthen coordination and cooperation between national investigating and prosecuting authorities in relation to serious crime affecting two or more Member States or requiring a prosecution on common bases, on the basis of operations conducted and information supplied by the Member States' authorities and by Europol.

In this context, the European Parliament and the Council, by means of regulations adopted in accordance with the ordinary legislative procedure, shall determine Eurojust's structure, operation, field of action and tasks. These tasks may include:

- (a) the initiation of criminal investigations, as well as proposing the initiation of prosecutions conducted by competent national authorities, particularly those relating to offences against the financial interests of the Union;
- (b) the coordination of investigations and prosecutions referred to in point (a);
- (c) the strengthening of judicial cooperation, including by resolution of conflicts of jurisdiction and by close cooperation with the European Judicial Network.

These regulations shall also determine arrangements for involving the European Parliament and national Parliaments in the evaluation of Eurojust's activities.

2. In the prosecutions referred to in paragraph 1, and without prejudice to Article 86, formal acts of judicial procedure shall be carried out by the competent national officials.

Article 86

1. In order to combat crimes affecting the financial interests of the Union, the Council, by means of regulations adopted in accordance with a special legislative procedure, may establish a European Public Prosecutor's Office from Eurojust. The Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.

In the absence of unanimity in the Council, a group of at least nine Member States may request that the draft regulation be referred to the European Council. In that case, the procedure in the Council shall be suspended. After discussion, and in case of a consensus, the European Council shall, within four months of this suspension, refer the draft back to the Council for adoption.

Within the same timeframe, in case of disagreement, and if at least nine Member States wish to establish enhanced cooperation on the basis of the draft regulation concerned, they shall notify the European Parliament, the Council and the Commission accordingly. In such a case, the authorisation to proceed with enhanced cooperation referred to in Article 20(2) of the Treaty on European Union and Article 329(1) of this Treaty shall be deemed to be granted and the provisions on enhanced cooperation shall apply.

2. The European Public Prosecutor's Office shall be responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment, where appropriate in liaison with Europol, the perpetrators of, and accomplices in, offences against the Union's financial interests, as determined by the regulation provided for in paragraph 1. It shall exercise the functions of prosecutor in the competent courts of the Member States in relation to such offences.

3. The regulations referred to in paragraph 1 shall determine the general rules applicable to the European Public Prosecutor's Office, the conditions governing the performance of its functions, the rules of procedure applicable to its activities, as well as those governing the admissibility of evidence, and the rules applicable to the judicial review of procedural measures taken by it in the performance of its functions.

4. The European Council may, at the same time or subsequently, adopt a decision amending paragraph 1 in order to extend the powers of the European Public Prosecutor's Office to include serious crime having a cross-border dimension and amending accordingly paragraph 2 as regards the perpetrators of, and accomplices in, serious crimes affecting more than one Member State. The European Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament and after consulting the Commission.

CHAPTER 5

POLICE COOPERATION

Article 87

(ex Article 30 TEU)

1. The Union shall establish police cooperation involving all the Member States' competent authorities, including police, customs and other specialised law enforcement services in relation to the prevention, detection and investigation of criminal offences.

2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may establish measures concerning:

- (a) the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
- (b) support for the training of staff, and cooperation on the exchange of staff, on equipment and on research into crime-detection;
- (c) common investigative techniques in relation to the detection of serious forms of organised crime.

3. The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, may establish measures concerning operational cooperation between the authorities referred to in this Article. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.

In case of the absence of unanimity in the Council, a group of at least nine Member States may request that the draft measures be referred to the European Council. In that case, the procedure in the Council shall be suspended. After discussion, and in case of a consensus, the European Council shall, within four months of this suspension, refer the draft back to the Council for adoption.

Within the same timeframe, in case of disagreement, and if at least nine Member States wish to establish enhanced cooperation on the basis of the draft measures concerned, they shall notify the European Parliament, the Council and the Commission accordingly. In such a case, the authorisation to proceed with enhanced cooperation referred to in Article 20(2) of the Treaty on European Union and Article 329(1) of this Treaty shall be deemed to be granted and the provisions on enhanced cooperation shall apply.

The specific procedure provided for in the second and third subparagraphs shall not apply to acts which constitute a development of the Schengen *acquis*.

Article 88

(ex Article 30 TEU)

1. Europol's mission shall be to support and strengthen action by the Member States' police authorities and other law enforcement services and their mutual cooperation in preventing and combating serious crime affecting two or more Member States, terrorism and forms of crime which affect a common interest covered by a Union policy.
2. The European Parliament and the Council, by means of regulations adopted in accordance with the ordinary legislative procedure, shall determine Europol's structure, operation, field of action and tasks. These tasks may include:
 - (a) the collection, storage, processing, analysis and exchange of information, in particular that forwarded by the authorities of the Member States or third countries or bodies;
 - (b) the coordination, organisation and implementation of investigative and operational action carried out jointly with the Member States' competent authorities or in the context of joint investigative teams, where appropriate in liaison with Eurojust.

These regulations shall also lay down the procedures for scrutiny of Europol's activities by the European Parliament, together with national Parliaments.

3. Any operational action by Europol must be carried out in liaison and in agreement with the authorities of the Member State or States whose territory is concerned. The application of coercive measures shall be the exclusive responsibility of the competent national authorities.

Article 89

(ex Article 32 TEU)

The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall lay down the conditions and limitations under which the competent authorities of the Member States referred to in Articles 82 and 87 may operate in the territory of another Member State in liaison and in agreement with the authorities of that State. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.

TITLE VI

TRANSPORT

Article 90

(ex Article 70 TEC)

The objectives of the Treaties shall, in matters governed by this Title, be pursued within the framework of a common transport policy.

Article 91

(ex Article 71 TEC)

1. For the purpose of implementing Article 90, and taking into account the distinctive features of transport, the European Parliament and the Council shall, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, lay down:

- (a) common rules applicable to international transport to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States;
- (b) the conditions under which non-resident carriers may operate transport services within a Member State;
- (c) measures to improve transport safety;
- (d) any other appropriate provisions.

2. When the measures referred to in paragraph 1 are adopted, account shall be taken of cases where their application might seriously affect the standard of living and level of employment in certain regions, and the operation of transport facilities.

Article 92

(ex Article 72 TEC)

Until the provisions referred to in Article 91(1) have been laid down, no Member State may, unless the Council has unanimously adopted a measure granting a derogation, make the various provisions governing the subject on 1 January 1958 or, for acceding States, the date of their accession less favourable in their direct or indirect effect on carriers of other Member States as compared with carriers who are nationals of that State.

Article 93

(ex Article 73 TEC)

Aids shall be compatible with the Treaties if they meet the needs of coordination of transport or if they represent reimbursement for the discharge of certain obligations inherent in the concept of a public service.

Article 94

(ex Article 74 TEC)

Any measures taken within the framework of the Treaties in respect of transport rates and conditions shall take account of the economic circumstances of carriers.

Article 95

(ex Article 75 TEC)

1. In the case of transport within the Union, discrimination which takes the form of carriers charging different rates and imposing different conditions for the carriage of the same goods over the same transport links on grounds of the country of origin or of destination of the goods in question shall be prohibited.

2. Paragraph 1 shall not prevent the European Parliament and the Council from adopting other measures pursuant to Article 91(1).

3. The Council shall, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the Economic and Social Committee, lay down rules for implementing the provisions of paragraph 1.

The Council may in particular lay down the provisions needed to enable the institutions of the Union to secure compliance with the rule laid down in paragraph 1 and to ensure that users benefit from it to the full.

4. The Commission shall, acting on its own initiative or on application by a Member State, investigate any cases of discrimination falling within paragraph 1 and, after consulting any Member State concerned, shall take the necessary decisions within the framework of the rules laid down in accordance with the provisions of paragraph 3.

Article 96

(ex Article 76 TEC)

1. The imposition by a Member State, in respect of transport operations carried out within the Union, of rates and conditions involving any element of support or protection in the interest of one or more particular undertakings or industries shall be prohibited, unless authorised by the Commission.

2. The Commission shall, acting on its own initiative or on application by a Member State, examine the rates and conditions referred to in paragraph 1, taking account in particular of the requirements of an appropriate regional economic policy, the needs of underdeveloped areas and the problems of areas seriously affected by political circumstances on the one hand, and of the effects of such rates and conditions on competition between the different modes of transport on the other.

After consulting each Member State concerned, the Commission shall take the necessary decisions.

3. The prohibition provided for in paragraph 1 shall not apply to tariffs fixed to meet competition.

Article 97

(ex Article 77 TEC)

Charges or dues in respect of the crossing of frontiers which are charged by a carrier in addition to the transport rates shall not exceed a reasonable level after taking the costs actually incurred thereby into account.

Member States shall endeavour to reduce these costs progressively.

The Commission may make recommendations to Member States for the application of this Article.

Article 98

(ex Article 78 TEC)

The provisions of this Title shall not form an obstacle to the application of measures taken in the Federal Republic of Germany to the extent that such measures are required in order to compensate for the economic disadvantages caused by the division of Germany to the economy of certain areas of the Federal Republic affected by that division. Five years after the entry into force of the Treaty of Lisbon, the Council, acting on a proposal from the Commission, may adopt a decision repealing this Article.

Article 99

(ex Article 79 TEC)

An Advisory Committee consisting of experts designated by the governments of Member States shall be attached to the Commission. The Commission, whenever it considers it desirable, shall consult the Committee on transport matters.

Article 100

(ex Article 80 TEC)

1. The provisions of this Title shall apply to transport by rail, road and inland waterway.

2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may lay down appropriate provisions for sea and air transport. They shall act after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

TITLE VII

COMMON RULES ON COMPETITION, TAXATION AND APPROXIMATION OF LAWS

CHAPTER 1

RULES ON COMPETITION

SECTION 1

RULES APPLYING TO UNDERTAKINGS

Article 101

(ex Article 81 TEC)

1. The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market, and in particular those which:

- (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;
- (b) limit or control production, markets, technical development, or investment;
- (c) share markets or sources of supply;
- (d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
- (e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.

2. Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.

3. The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of:

- any agreement or category of agreements between undertakings,
- any decision or category of decisions by associations of undertakings,

— any concerted practice or category of concerted practices,

which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and which does not:

- (a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives;
- (b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question.

Article 102

(ex Article 82 TEC)

Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States.

Such abuse may, in particular, consist in:

- (a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;
- (b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
- (c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
- (d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.

Article 103

(ex Article 83 TEC)

1. The appropriate regulations or directives to give effect to the principles set out in Articles 101 and 102 shall be laid down by the Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament.

2. The regulations or directives referred to in paragraph 1 shall be designed in particular:

- (a) to ensure compliance with the prohibitions laid down in Article 101(1) and in Article 102 by making provision for fines and periodic penalty payments;

- (b) to lay down detailed rules for the application of Article 101(3), taking into account the need to ensure effective supervision on the one hand, and to simplify administration to the greatest possible extent on the other;
- (c) to define, if need be, in the various branches of the economy, the scope of the provisions of Articles 101 and 102;
- (d) to define the respective functions of the Commission and of the Court of Justice of the European Union in applying the provisions laid down in this paragraph;
- (e) to determine the relationship between national laws and the provisions contained in this Section or adopted pursuant to this Article.

Article 104

(ex Article 84 TEC)

Until the entry into force of the provisions adopted in pursuance of Article 103, the authorities in Member States shall rule on the admissibility of agreements, decisions and concerted practices and on abuse of a dominant position in the internal market in accordance with the law of their country and with the provisions of Article 101, in particular paragraph 3, and of Article 102.

Article 105

(ex Article 85 TEC)

1. Without prejudice to Article 104, the Commission shall ensure the application of the principles laid down in Articles 101 and 102. On application by a Member State or on its own initiative, and in cooperation with the competent authorities in the Member States, which shall give it their assistance, the Commission shall investigate cases of suspected infringement of these principles. If it finds that there has been an infringement, it shall propose appropriate measures to bring it to an end.

2. If the infringement is not brought to an end, the Commission shall record such infringement of the principles in a reasoned decision. The Commission may publish its decision and authorise Member States to take the measures, the conditions and details of which it shall determine, needed to remedy the situation.

3. The Commission may adopt regulations relating to the categories of agreement in respect of which the Council has adopted a regulation or a directive pursuant to Article 103(2)(b).

Article 106

(ex Article 86 TEC)

1. In the case of public undertakings and undertakings to which Member States grant special or exclusive rights, Member States shall neither enact nor maintain in force any measure contrary to the rules contained in the Treaties, in particular to those rules provided for in Article 18 and Articles 101 to 109.

2. Undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest or having the character of a revenue-producing monopoly shall be subject to the rules contained in the Treaties, in particular to the rules on competition, in so far as the application of such rules does not obstruct the performance, in law or in fact, of the particular tasks assigned to them. The development of trade must not be affected to such an extent as would be contrary to the interests of the Union.

3. The Commission shall ensure the application of the provisions of this Article and shall, where necessary, address appropriate directives or decisions to Member States.

SECTION 2

AIDS GRANTED BY STATES

Article 107

(ex Article 87 TEC)

1. Save as otherwise provided in the Treaties, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the internal market.

2. The following shall be compatible with the internal market:

- (a) aid having a social character, granted to individual consumers, provided that such aid is granted without discrimination related to the origin of the products concerned;
- (b) aid to make good the damage caused by natural disasters or exceptional occurrences;
- (c) aid granted to the economy of certain areas of the Federal Republic of Germany affected by the division of Germany, in so far as such aid is required in order to compensate for the economic disadvantages caused by that division. Five years after the entry into force of the Treaty of Lisbon, the Council, acting on a proposal from the Commission, may adopt a decision repealing this point.

3. The following may be considered to be compatible with the internal market:

- (a) aid to promote the economic development of areas where the standard of living is abnormally low or where there is serious underemployment, and of the regions referred to in Article 349, in view of their structural, economic and social situation;
- (b) aid to promote the execution of an important project of common European interest or to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State;

- (c) aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest;
- (d) aid to promote culture and heritage conservation where such aid does not affect trading conditions and competition in the Union to an extent that is contrary to the common interest;
- (e) such other categories of aid as may be specified by decision of the Council on a proposal from the Commission.

Article 108
(ex Article 88 TEC)

1. The Commission shall, in cooperation with Member States, keep under constant review all systems of aid existing in those States. It shall propose to the latter any appropriate measures required by the progressive development or by the functioning of the internal market.

2. If, after giving notice to the parties concerned to submit their comments, the Commission finds that aid granted by a State or through State resources is not compatible with the internal market having regard to Article 107, or that such aid is being misused, it shall decide that the State concerned shall abolish or alter such aid within a period of time to be determined by the Commission.

If the State concerned does not comply with this decision within the prescribed time, the Commission or any other interested State may, in derogation from the provisions of Articles 258 and 259, refer the matter to the Court of Justice of the European Union direct.

On application by a Member State, the Council may, acting unanimously, decide that aid which that State is granting or intends to grant shall be considered to be compatible with the internal market, in derogation from the provisions of Article 107 or from the regulations provided for in Article 109, if such a decision is justified by exceptional circumstances. If, as regards the aid in question, the Commission has already initiated the procedure provided for in the first subparagraph of this paragraph, the fact that the State concerned has made its application to the Council shall have the effect of suspending that procedure until the Council has made its attitude known.

If, however, the Council has not made its attitude known within three months of the said application being made, the Commission shall give its decision on the case.

3. The Commission shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. If it considers that any such plan is not compatible with the internal market having regard to Article 107, it shall without delay initiate the procedure provided for in paragraph 2. The Member State concerned shall not put its proposed measures into effect until this procedure has resulted in a final decision.

4. The Commission may adopt regulations relating to the categories of State aid that the Council has, pursuant to Article 109, determined may be exempted from the procedure provided for by paragraph 3 of this Article.

Article 109

(ex Article 89 TEC)

The Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, may make any appropriate regulations for the application of Articles 107 and 108 and may in particular determine the conditions in which Article 108(3) shall apply and the categories of aid exempted from this procedure.

CHAPTER 2

TAX PROVISIONS

Article 110

(ex Article 90 TEC)

No Member State shall impose, directly or indirectly, on the products of other Member States any internal taxation of any kind in excess of that imposed directly or indirectly on similar domestic products.

Furthermore, no Member State shall impose on the products of other Member States any internal taxation of such a nature as to afford indirect protection to other products.

Article 111

(ex Article 91 TEC)

Where products are exported to the territory of any Member State, any repayment of internal taxation shall not exceed the internal taxation imposed on them whether directly or indirectly.

Article 112

(ex Article 92 TEC)

In the case of charges other than turnover taxes, excise duties and other forms of indirect taxation, remissions and repayments in respect of exports to other Member States may not be granted and countervailing charges in respect of imports from Member States may not be imposed unless the measures contemplated have been previously approved for a limited period by the Council on a proposal from the Commission.

Article 113

(ex Article 93 TEC)

The Council shall, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after consulting the European Parliament and the Economic and Social Committee, adopt provisions for the harmonisation of legislation concerning turnover taxes, excise duties and other forms of indirect taxation to the extent that such harmonisation is necessary to ensure the establishment and the functioning of the internal market and to avoid distortion of competition.

CHAPTER 3

APPROXIMATION OF LAWS

Article 114

(ex Article 95 TEC)

1. Save where otherwise provided in the Treaties, the following provisions shall apply for the achievement of the objectives set out in Article 26. The European Parliament and the Council shall, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, adopt the measures for the approximation of the provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States which have as their object the establishment and functioning of the internal market.
2. Paragraph 1 shall not apply to fiscal provisions, to those relating to the free movement of persons nor to those relating to the rights and interests of employed persons.
3. The Commission, in its proposals envisaged in paragraph 1 concerning health, safety, environmental protection and consumer protection, will take as a base a high level of protection, taking account in particular of any new development based on scientific facts. Within their respective powers, the European Parliament and the Council will also seek to achieve this objective.
4. If, after the adoption of a harmonisation measure by the European Parliament and the Council, by the Council or by the Commission, a Member State deems it necessary to maintain national provisions on grounds of major needs referred to in Article 36, or relating to the protection of the environment or the working environment, it shall notify the Commission of these provisions as well as the grounds for maintaining them.
5. Moreover, without prejudice to paragraph 4, if, after the adoption of a harmonisation measure by the European Parliament and the Council, by the Council or by the Commission, a Member State deems it necessary to introduce national provisions based on new scientific evidence relating to the protection of the environment or the working environment on grounds of a problem specific to that Member State arising after the adoption of the harmonisation measure, it shall notify the Commission of the envisaged provisions as well as the grounds for introducing them.

6. The Commission shall, within six months of the notifications as referred to in paragraphs 4 and 5, approve or reject the national provisions involved after having verified whether or not they are a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between Member States and whether or not they shall constitute an obstacle to the functioning of the internal market.

In the absence of a decision by the Commission within this period the national provisions referred to in paragraphs 4 and 5 shall be deemed to have been approved.

When justified by the complexity of the matter and in the absence of danger for human health, the Commission may notify the Member State concerned that the period referred to in this paragraph may be extended for a further period of up to six months.

7. When, pursuant to paragraph 6, a Member State is authorised to maintain or introduce national provisions derogating from a harmonisation measure, the Commission shall immediately examine whether to propose an adaptation to that measure.

8. When a Member State raises a specific problem on public health in a field which has been the subject of prior harmonisation measures, it shall bring it to the attention of the Commission which shall immediately examine whether to propose appropriate measures to the Council.

9. By way of derogation from the procedure laid down in Articles 258 and 259, the Commission and any Member State may bring the matter directly before the Court of Justice of the European Union if it considers that another Member State is making improper use of the powers provided for in this Article.

10. The harmonisation measures referred to above shall, in appropriate cases, include a safeguard clause authorising the Member States to take, for one or more of the non-economic reasons referred to in Article 36, provisional measures subject to a Union control procedure.

Article 115

(ex Article 94 TEC)

Without prejudice to Article 114, the Council shall, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after consulting the European Parliament and the Economic and Social Committee, issue directives for the approximation of such laws, regulations or administrative provisions of the Member States as directly affect the establishment or functioning of the internal market.

Article 116

(ex Article 96 TEC)

Where the Commission finds that a difference between the provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States is distorting the conditions of competition in the internal market and that the resultant distortion needs to be eliminated, it shall consult the Member States concerned.

If such consultation does not result in an agreement eliminating the distortion in question, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall issue the necessary directives. Any other appropriate measures provided for in the Treaties may be adopted.

Article 117

(ex Article 97 TEC)

1. Where there is a reason to fear that the adoption or amendment of a provision laid down by law, regulation or administrative action may cause distortion within the meaning of Article 116, a Member State desiring to proceed therewith shall consult the Commission. After consulting the Member States, the Commission shall recommend to the States concerned such measures as may be appropriate to avoid the distortion in question.

2. If a State desiring to introduce or amend its own provisions does not comply with the recommendation addressed to it by the Commission, other Member States shall not be required, pursuant to Article 116, to amend their own provisions in order to eliminate such distortion. If the Member State which has ignored the recommendation of the Commission causes distortion detrimental only to itself, the provisions of Article 116 shall not apply.

Article 118

In the context of the establishment and functioning of the internal market, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish measures for the creation of European intellectual property rights to provide uniform protection of intellectual property rights throughout the Union and for the setting up of centralised Union-wide authorisation, coordination and supervision arrangements.

The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall by means of regulations establish language arrangements for the European intellectual property rights. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.

TITLE VIII

ECONOMIC AND MONETARY POLICY

Article 119

(ex Article 4 TEC)

1. For the purposes set out in Article 3 of the Treaty on European Union, the activities of the Member States and the Union shall include, as provided in the Treaties, the adoption of an economic policy which is based on the close coordination of Member States' economic policies, on the internal market and on the definition of common objectives, and conducted in accordance with the principle of an open market economy with free competition.

2. Concurrently with the foregoing, and as provided in the Treaties and in accordance with the procedures set out therein, these activities shall include a single currency, the euro, and the definition and conduct of a single monetary policy and exchange-rate policy the primary objective of both of which shall be to maintain price stability and, without prejudice to this objective, to support the general economic policies in the Union, in accordance with the principle of an open market economy with free competition.

3. These activities of the Member States and the Union shall entail compliance with the following guiding principles: stable prices, sound public finances and monetary conditions and a sustainable balance of payments.

CHAPTER 1 ECONOMIC POLICY

Article 120 (ex Article 98 TEC)

Member States shall conduct their economic policies with a view to contributing to the achievement of the objectives of the Union, as defined in Article 3 of the Treaty on European Union, and in the context of the broad guidelines referred to in Article 121(2). The Member States and the Union shall act in accordance with the principle of an open market economy with free competition, favouring an efficient allocation of resources, and in compliance with the principles set out in Article 119.

Article 121 (ex Article 99 TEC)

1. Member States shall regard their economic policies as a matter of common concern and shall coordinate them within the Council, in accordance with the provisions of Article 120.

2. The Council shall, on a recommendation from the Commission, formulate a draft for the broad guidelines of the economic policies of the Member States and of the Union, and shall report its findings to the European Council.

The European Council shall, acting on the basis of the report from the Council, discuss a conclusion on the broad guidelines of the economic policies of the Member States and of the Union.

On the basis of this conclusion, the Council shall adopt a recommendation setting out these broad guidelines. The Council shall inform the European Parliament of its recommendation.

3. In order to ensure closer coordination of economic policies and sustained convergence of the economic performances of the Member States, the Council shall, on the basis of reports submitted by the Commission, monitor economic developments in each of the Member States and in the Union as well as the consistency of economic policies with the broad guidelines referred to in paragraph 2, and regularly carry out an overall assessment.

For the purpose of this multilateral surveillance, Member States shall forward information to the Commission about important measures taken by them in the field of their economic policy and such other information as they deem necessary.

4. Where it is established, under the procedure referred to in paragraph 3, that the economic policies of a Member State are not consistent with the broad guidelines referred to in paragraph 2 or that they risk jeopardising the proper functioning of economic and monetary union, the Commission may address a warning to the Member State concerned. The Council, on a recommendation from the Commission, may address the necessary recommendations to the Member State concerned. The Council may, on a proposal from the Commission, decide to make its recommendations public.

Within the scope of this paragraph, the Council shall act without taking into account the vote of the member of the Council representing the Member State concerned.

A qualified majority of the other members of the Council shall be defined in accordance with Article 238(3)(a).

5. The President of the Council and the Commission shall report to the European Parliament on the results of multilateral surveillance. The President of the Council may be invited to appear before the competent committee of the European Parliament if the Council has made its recommendations public.

6. The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt detailed rules for the multilateral surveillance procedure referred to in paragraphs 3 and 4.

Article 122

(ex Article 100 TEC)

1. Without prejudice to any other procedures provided for in the Treaties, the Council, on a proposal from the Commission, may decide, in a spirit of solidarity between Member States, upon the measures appropriate to the economic situation, in particular if severe difficulties arise in the supply of certain products, notably in the area of energy.

2. Where a Member State is in difficulties or is seriously threatened with severe difficulties caused by natural disasters or exceptional occurrences beyond its control, the Council, on a proposal from the Commission, may grant, under certain conditions, Union financial assistance to the Member State concerned. The President of the Council shall inform the European Parliament of the decision taken.

Article 123

(ex Article 101 TEC)

1. Overdraft facilities or any other type of credit facility with the European Central Bank or with the central banks of the Member States (hereinafter referred to as 'national central banks') in favour of Union institutions, bodies, offices or agencies, central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of Member States shall be prohibited, as shall the purchase directly from them by the European Central Bank or national central banks of debt instruments.

2. Paragraph 1 shall not apply to publicly owned credit institutions which, in the context of the supply of reserves by central banks, shall be given the same treatment by national central banks and the European Central Bank as private credit institutions.

Article 124

(ex Article 102 TEC)

Any measure, not based on prudential considerations, establishing privileged access by Union institutions, bodies, offices or agencies, central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of Member States to financial institutions, shall be prohibited.

Article 125

(ex Article 103 TEC)

1. The Union shall not be liable for or assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of any Member State, without prejudice to mutual financial guarantees for the joint execution of a specific project. A Member State shall not be liable for or assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of another Member State, without prejudice to mutual financial guarantees for the joint execution of a specific project.

2. The Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, may, as required, specify definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 123 and 124 and in this Article.

Article 126

(ex Article 104 TEC)

1. Member States shall avoid excessive government deficits.

2. The Commission shall monitor the development of the budgetary situation and of the stock of government debt in the Member States with a view to identifying gross errors. In particular it shall examine compliance with budgetary discipline on the basis of the following two criteria:

- (a) whether the ratio of the planned or actual government deficit to gross domestic product exceeds a reference value, unless:
- either the ratio has declined substantially and continuously and reached a level that comes close to the reference value,
 - or, alternatively, the excess over the reference value is only exceptional and temporary and the ratio remains close to the reference value;
- (b) whether the ratio of government debt to gross domestic product exceeds a reference value, unless the ratio is sufficiently diminishing and approaching the reference value at a satisfactory pace.

The reference values are specified in the Protocol on the excessive deficit procedure annexed to the Treaties.

3. If a Member State does not fulfil the requirements under one or both of these criteria, the Commission shall prepare a report. The report of the Commission shall also take into account whether the government deficit exceeds government investment expenditure and take into account all other relevant factors, including the medium-term economic and budgetary position of the Member State.

The Commission may also prepare a report if, notwithstanding the fulfilment of the requirements under the criteria, it is of the opinion that there is a risk of an excessive deficit in a Member State.

4. The Economic and Financial Committee shall formulate an opinion on the report of the Commission.

5. If the Commission considers that an excessive deficit in a Member State exists or may occur, it shall address an opinion to the Member State concerned and shall inform the Council accordingly.

6. The Council shall, on a proposal from the Commission, and having considered any observations which the Member State concerned may wish to make, decide after an overall assessment whether an excessive deficit exists.

7. Where the Council decides, in accordance with paragraph 6, that an excessive deficit exists, it shall adopt, without undue delay, on a recommendation from the Commission, recommendations addressed to the Member State concerned with a view to bringing that situation to an end within a given period. Subject to the provisions of paragraph 8, these recommendations shall not be made public.

8. Where it establishes that there has been no effective action in response to its recommendations within the period laid down, the Council may make its recommendations public.

9. If a Member State persists in failing to put into practice the recommendations of the Council, the Council may decide to give notice to the Member State to take, within a specified time limit, measures for the deficit reduction which is judged necessary by the Council in order to remedy the situation.

In such a case, the Council may request the Member State concerned to submit reports in accordance with a specific timetable in order to examine the adjustment efforts of that Member State.

10. The rights to bring actions provided for in Articles 258 and 259 may not be exercised within the framework of paragraphs 1 to 9 of this Article.

11. As long as a Member State fails to comply with a decision taken in accordance with paragraph 9, the Council may decide to apply or, as the case may be, intensify one or more of the following measures:

- to require the Member State concerned to publish additional information, to be specified by the Council, before issuing bonds and securities,
- to invite the European Investment Bank to reconsider its lending policy towards the Member State concerned,
- to require the Member State concerned to make a non-interest-bearing deposit of an appropriate size with the Union until the excessive deficit has, in the view of the Council, been corrected,
- to impose fines of an appropriate size.

The President of the Council shall inform the European Parliament of the decisions taken.

12. The Council shall abrogate some or all of its decisions or recommendations referred to in paragraphs 6 to 9 and 11 to the extent that the excessive deficit in the Member State concerned has, in the view of the Council, been corrected. If the Council has previously made public recommendations, it shall, as soon as the decision under paragraph 8 has been abrogated, make a public statement that an excessive deficit in the Member State concerned no longer exists.

13. When taking the decisions or recommendations referred to in paragraphs 8, 9, 11 and 12, the Council shall act on a recommendation from the Commission.

When the Council adopts the measures referred to in paragraphs 6 to 9, 11 and 12, it shall act without taking into account the vote of the member of the Council representing the Member State concerned.

A qualified majority of the other members of the Council shall be defined in accordance with Article 238(3)(a).

14. Further provisions relating to the implementation of the procedure described in this Article are set out in the Protocol on the excessive deficit procedure annexed to the Treaties.

The Council shall, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after consulting the European Parliament and the European Central Bank, adopt the appropriate provisions which shall then replace the said Protocol.

Subject to the other provisions of this paragraph, the Council shall, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, lay down detailed rules and definitions for the application of the provisions of the said Protocol.

CHAPTER 2

MONETARY POLICY

Article 127

(ex Article 105 TEC)

1. The primary objective of the European System of Central Banks (hereinafter referred to as 'the ESCB') shall be to maintain price stability. Without prejudice to the objective of price stability, the ESCB shall support the general economic policies in the Union with a view to contributing to the achievement of the objectives of the Union as laid down in Article 3 of the Treaty on European Union. The ESCB shall act in accordance with the principle of an open market economy with free competition, favouring an efficient allocation of resources, and in compliance with the principles set out in Article 119.

2. The basic tasks to be carried out through the ESCB shall be:

- to define and implement the monetary policy of the Union,
- to conduct foreign-exchange operations consistent with the provisions of Article 219,
- to hold and manage the official foreign reserves of the Member States,
- to promote the smooth operation of payment systems.

3. The third indent of paragraph 2 shall be without prejudice to the holding and management by the governments of Member States of foreign-exchange working balances.

4. The European Central Bank shall be consulted:

- on any proposed Union act in its fields of competence,
- by national authorities regarding any draft legislative provision in its fields of competence, but within the limits and under the conditions set out by the Council in accordance with the procedure laid down in Article 129(4).

The European Central Bank may submit opinions to the appropriate Union institutions, bodies, offices or agencies or to national authorities on matters in its fields of competence.

5. The ESCB shall contribute to the smooth conduct of policies pursued by the competent authorities relating to the prudential supervision of credit institutions and the stability of the financial system.

6. The Council, acting by means of regulations in accordance with a special legislative procedure, may unanimously, and after consulting the European Parliament and the European Central Bank, confer specific tasks upon the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance undertakings.

Article 128

(ex Article 106 TEC)

1. The European Central Bank shall have the exclusive right to authorise the issue of euro banknotes within the Union. The European Central Bank and the national central banks may issue such notes. The banknotes issued by the European Central Bank and the national central banks shall be the only such notes to have the status of legal tender within the Union.

2. Member States may issue euro coins subject to approval by the European Central Bank of the volume of the issue. The Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the European Central Bank, may adopt measures to harmonise the denominations and technical specifications of all coins intended for circulation to the extent necessary to permit their smooth circulation within the Union.

Article 129

(ex Article 107 TEC)

1. The ESCB shall be governed by the decision-making bodies of the European Central Bank which shall be the Governing Council and the Executive Board.

2. The Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (hereinafter referred to as 'the Statute of the ESCB and of the ECB') is laid down in a Protocol annexed to the Treaties.

3. Articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1(a) and 36 of the Statute of the ESCB and of the ECB may be amended by the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure. They shall act either on a recommendation from the European Central Bank and after consulting the Commission or on a proposal from the Commission and after consulting the European Central Bank.

4. The Council, either on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the European Central Bank or on a recommendation from the European Central Bank and after consulting the European Parliament and the Commission, shall adopt the provisions referred to in Articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 and 34.3 of the Statute of the ESCB and of the ECB.

Article 130

(ex Article 108 TEC)

When exercising the powers and carrying out the tasks and duties conferred upon them by the Treaties and the Statute of the ESCB and of the ECB, neither the European Central Bank, nor a national central bank, nor any member of their decision-making bodies shall seek or take instructions from Union institutions, bodies, offices or agencies, from any government of a Member State or from any other body. The Union institutions, bodies, offices or agencies and the governments of the Member States undertake to respect this principle and not to seek to influence the members of the decision-making bodies of the European Central Bank or of the national central banks in the performance of their tasks.

Article 131

(ex Article 109 TEC)

Each Member State shall ensure that its national legislation including the statutes of its national central bank is compatible with the Treaties and the Statute of the ESCB and of the ECB.

Article 132

(ex Article 110 TEC)

1. In order to carry out the tasks entrusted to the ESCB, the European Central Bank shall, in accordance with the provisions of the Treaties and under the conditions laid down in the Statute of the ESCB and of the ECB:

- make regulations to the extent necessary to implement the tasks defined in Article 3.1, first indent, Articles 19.1, 22 and 25.2 of the Statute of the ESCB and of the ECB in cases which shall be laid down in the acts of the Council referred to in Article 129(4),
- take decisions necessary for carrying out the tasks entrusted to the ESCB under the Treaties and the Statute of the ESCB and of the ECB,
- make recommendations and deliver opinions.

2. The European Central Bank may decide to publish its decisions, recommendations and opinions.

3. Within the limits and under the conditions adopted by the Council under the procedure laid down in Article 129(4), the European Central Bank shall be entitled to impose fines or periodic penalty payments on undertakings for failure to comply with obligations under its regulations and decisions.

Article 133

Without prejudice to the powers of the European Central Bank, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall lay down the measures necessary for the use of the euro as the single currency. Such measures shall be adopted after consultation of the European Central Bank.

CHAPTER 3

INSTITUTIONAL PROVISIONS

Article 134

(ex Article 114 TEC)

1. In order to promote coordination of the policies of Member States to the full extent needed for the functioning of the internal market, an Economic and Financial Committee is hereby set up.
2. The Economic and Financial Committee shall have the following tasks:
 - to deliver opinions at the request of the Council or of the Commission, or on its own initiative for submission to those institutions,
 - to keep under review the economic and financial situation of the Member States and of the Union and to report regularly thereon to the Council and to the Commission, in particular on financial relations with third countries and international institutions,
 - without prejudice to Article 240, to contribute to the preparation of the work of the Council referred to in Articles 66, 75, 121(2), (3), (4) and (6), 122, 124, 125, 126, 127(6), 128(2), 129(3) and (4), 138, 140(2) and (3), 143, 144(2) and (3), and in Article 219, and to carry out other advisory and preparatory tasks assigned to it by the Council,
 - to examine, at least once a year, the situation regarding the movement of capital and the freedom of payments, as they result from the application of the Treaties and of measures adopted by the Council; the examination shall cover all measures relating to capital movements and payments; the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination.

The Member States, the Commission and the European Central Bank shall each appoint no more than two members of the Committee.

3. The Council shall, on a proposal from the Commission and after consulting the European Central Bank and the Committee referred to in this Article, lay down detailed provisions concerning the composition of the Economic and Financial Committee. The President of the Council shall inform the European Parliament of such a decision.

4. In addition to the tasks set out in paragraph 2, if and as long as there are Member States with a derogation as referred to in Article 139, the Committee shall keep under review the monetary and financial situation and the general payments system of those Member States and report regularly thereon to the Council and to the Commission.

Article 135

(ex Article 115 TEC)

For matters within the scope of Articles 121(4), 126 with the exception of paragraph 14, 138, 140(1), 140(2), first subparagraph, 140(3) and 219, the Council or a Member State may request the Commission to make a recommendation or a proposal, as appropriate. The Commission shall examine this request and submit its conclusions to the Council without delay.

CHAPTER 4

PROVISIONS SPECIFIC TO MEMBER STATES WHOSE CURRENCY IS THE EURO

Article 136

1. In order to ensure the proper functioning of economic and monetary union, and in accordance with the relevant provisions of the Treaties, the Council shall, in accordance with the relevant procedure from among those referred to in Articles 121 and 126, with the exception of the procedure set out in Article 126(14), adopt measures specific to those Member States whose currency is the euro:

- (a) to strengthen the coordination and surveillance of their budgetary discipline;
- (b) to set out economic policy guidelines for them, while ensuring that they are compatible with those adopted for the whole of the Union and are kept under surveillance.

2. For those measures set out in paragraph 1, only members of the Council representing Member States whose currency is the euro shall take part in the vote.

A qualified majority of the said members shall be defined in accordance with Article 238(3)(a).

Article 137

Arrangements for meetings between ministers of those Member States whose currency is the euro are laid down by the Protocol on the Euro Group.

Article 138

(ex Article 111(4), TEC)

1. In order to secure the euro's place in the international monetary system, the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt a decision establishing common positions on matters of particular interest for economic and monetary union within the competent international financial institutions and conferences. The Council shall act after consulting the European Central Bank.
2. The Council, on a proposal from the Commission, may adopt appropriate measures to ensure unified representation within the international financial institutions and conferences. The Council shall act after consulting the European Central Bank.
3. For the measures referred to in paragraphs 1 and 2, only members of the Council representing Member States whose currency is the euro shall take part in the vote.

A qualified majority of the said members shall be defined in accordance with Article 238(3)(a).

CHAPTER 5

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 139

1. Member States in respect of which the Council has not decided that they fulfil the necessary conditions for the adoption of the euro shall hereinafter be referred to as 'Member States with a derogation'.
2. The following provisions of the Treaties shall not apply to Member States with a derogation:
 - (a) adoption of the parts of the broad economic policy guidelines which concern the euro area generally (Article 121(2));
 - (b) coercive means of remedying excessive deficits (Article 126(9) and (11));
 - (c) the objectives and tasks of the ESCB (Article 127(1) to (3) and (5));
 - (d) issue of the euro (Article 128);
 - (e) acts of the European Central Bank (Article 132);

- (f) measures governing the use of the euro (Article 133);
- (g) monetary agreements and other measures relating to exchange-rate policy (Article 219);
- (h) appointment of members of the Executive Board of the European Central Bank (Article 283(2));
- (i) decisions establishing common positions on issues of particular relevance for economic and monetary union within the competent international financial institutions and conferences (Article 138(1));
- (j) measures to ensure unified representation within the international financial institutions and conferences (Article 138(2)).

In the Articles referred to in points (a) to (j), 'Member States' shall therefore mean Member States whose currency is the euro.

3. Under Chapter IX of the Statute of the ESCB and of the ECB, Member States with a derogation and their national central banks are excluded from rights and obligations within the ESCB.

4. The voting rights of members of the Council representing Member States with a derogation shall be suspended for the adoption by the Council of the measures referred to in the Articles listed in paragraph 2, and in the following instances:

- (a) recommendations made to those Member States whose currency is the euro in the framework of multilateral surveillance, including on stability programmes and warnings (Article 121(4));
- (b) measures relating to excessive deficits concerning those Member States whose currency is the euro (Article 126(6), (7), (8), (12) and (13)).

A qualified majority of the other members of the Council shall be defined in accordance with Article 238(3)(a).

Article 140

(ex Articles 121(1), 122(2), second sentence, and 123(5) TEC)

1. At least once every two years, or at the request of a Member State with a derogation, the Commission and the European Central Bank shall report to the Council on the progress made by the Member States with a derogation in fulfilling their obligations regarding the achievement of

economic and monetary union. These reports shall include an examination of the compatibility between the national legislation of each of these Member States, including the statutes of its national central bank, and Articles 130 and 131 and the Statute of the ESCB and of the ECB. The reports shall also examine the achievement of a high degree of sustainable convergence by reference to the fulfilment by each Member State of the following criteria:

- the achievement of a high degree of price stability; this will be apparent from a rate of inflation which is close to that of, at most, the three best performing Member States in terms of price stability,
- the sustainability of the government financial position; this will be apparent from having achieved a government budgetary position without a deficit that is excessive as determined in accordance with Article 126(6),
- the observance of the normal fluctuation margins provided for by the exchange-rate mechanism of the European Monetary System, for at least two years, without devaluing against the euro,
- the durability of convergence achieved by the Member State with a derogation and of its participation in the exchange-rate mechanism being reflected in the long-term interest-rate levels.

The four criteria mentioned in this paragraph and the relevant periods over which they are to be respected are developed further in a Protocol annexed to the Treaties. The reports of the Commission and the European Central Bank shall also take account of the results of the integration of markets, the situation and development of the balances of payments on current account and an examination of the development of unit labour costs and other price indices.

2. After consulting the European Parliament and after discussion in the European Council, the Council shall, on a proposal from the Commission, decide which Member States with a derogation fulfil the necessary conditions on the basis of the criteria set out in paragraph 1, and abrogate the derogations of the Member States concerned.

The Council shall act having received a recommendation of a qualified majority of those among its members representing Member States whose currency is the euro. These members shall act within six months of the Council receiving the Commission's proposal.

The qualified majority of the said members, as referred to in the second subparagraph, shall be defined in accordance with Article 238(3)(a).

3. If it is decided, in accordance with the procedure set out in paragraph 2, to abrogate a derogation, the Council shall, acting with the unanimity of the Member States whose currency is the euro and the Member State concerned, on a proposal from the Commission and after consulting

the European Central Bank, irrevocably fix the rate at which the euro shall be substituted for the currency of the Member State concerned, and take the other measures necessary for the introduction of the euro as the single currency in the Member State concerned.

Article 141

(ex Articles 123(3) and 117(2) first five indents, TEC)

1. If and as long as there are Member States with a derogation, and without prejudice to Article 129(1), the General Council of the European Central Bank referred to in Article 44 of the Statute of the ESCB and of the ECB shall be constituted as a third decision-making body of the European Central Bank.

2. If and as long as there are Member States with a derogation, the European Central Bank shall, as regards those Member States:

- strengthen cooperation between the national central banks,
- strengthen the coordination of the monetary policies of the Member States, with the aim of ensuring price stability,
- monitor the functioning of the exchange-rate mechanism,
- hold consultations concerning issues falling within the competence of the national central banks and affecting the stability of financial institutions and markets,
- carry out the former tasks of the European Monetary Cooperation Fund which had subsequently been taken over by the European Monetary Institute.

Article 142

(ex Article 124(1) TEC)

Each Member State with a derogation shall treat its exchange-rate policy as a matter of common interest. In so doing, Member States shall take account of the experience acquired in cooperation within the framework of the exchange-rate mechanism.

Article 143

(ex Article 119 TEC)

1. Where a Member State with a derogation is in difficulties or is seriously threatened with difficulties as regards its balance of payments either as a result of an overall disequilibrium in its balance of payments, or as a result of the type of currency at its disposal, and where such difficulties are liable in particular to jeopardise the functioning of the internal market or the implementation of the common commercial policy, the Commission shall immediately investigate the position of the State in question and the action which, making use of all the means at its disposal, that State has taken or may take in accordance with the provisions of the Treaties. The Commission shall state what measures it recommends the State concerned to take.

If the action taken by a Member State with a derogation and the measures suggested by the Commission do not prove sufficient to overcome the difficulties which have arisen or which threaten, the Commission shall, after consulting the Economic and Financial Committee, recommend to the Council the granting of mutual assistance and appropriate methods therefor.

The Commission shall keep the Council regularly informed of the situation and of how it is developing.

2. The Council shall grant such mutual assistance; it shall adopt directives or decisions laying down the conditions and details of such assistance, which may take such forms as:

- (a) a concerted approach to or within any other international organisations to which Member States with a derogation may have recourse;
- (b) measures needed to avoid deflection of trade where the Member State with a derogation which is in difficulties maintains or reintroduces quantitative restrictions against third countries;
- (c) the granting of limited credits by other Member States, subject to their agreement.

3. If the mutual assistance recommended by the Commission is not granted by the Council or if the mutual assistance granted and the measures taken are insufficient, the Commission shall authorise the Member State with a derogation which is in difficulties to take protective measures, the conditions and details of which the Commission shall determine.

Such authorisation may be revoked and such conditions and details may be changed by the Council.

Article 144
(ex Article 120 TEC)

1. Where a sudden crisis in the balance of payments occurs and a decision within the meaning of Article 143(2) is not immediately taken, a Member State with a derogation may, as a precaution, take the necessary protective measures. Such measures must cause the least possible disturbance in the functioning of the internal market and must not be wider in scope than is strictly necessary to remedy the sudden difficulties which have arisen.

2. The Commission and the other Member States shall be informed of such protective measures not later than when they enter into force. The Commission may recommend to the Council the granting of mutual assistance under Article 143.

3. After the Commission has delivered a recommendation and the Economic and Financial Committee has been consulted, the Council may decide that the Member State concerned shall amend, suspend or abolish the protective measures referred to above.

TITLE IX
EMPLOYMENT

Article 145
(ex Article 125 TEC)

Member States and the Union shall, in accordance with this Title, work towards developing a coordinated strategy for employment and particularly for promoting a skilled, trained and adaptable workforce and labour markets responsive to economic change with a view to achieving the objectives defined in Article 3 of the Treaty on European Union.

Article 146
(ex Article 126 TEC)

1. Member States, through their employment policies, shall contribute to the achievement of the objectives referred to in Article 145 in a way consistent with the broad guidelines of the economic policies of the Member States and of the Union adopted pursuant to Article 121(2).

2. Member States, having regard to national practices related to the responsibilities of management and labour, shall regard promoting employment as a matter of common concern and shall coordinate their action in this respect within the Council, in accordance with the provisions of Article 148.

Article 147
(ex Article 127 TEC)

1. The Union shall contribute to a high level of employment by encouraging cooperation between Member States and by supporting and, if necessary, complementing their action. In doing so, the competences of the Member States shall be respected.

2. The objective of a high level of employment shall be taken into consideration in the formulation and implementation of Union policies and activities.

Article 148
(ex Article 128 TEC)

1. The European Council shall each year consider the employment situation in the Union and adopt conclusions thereon, on the basis of a joint annual report by the Council and the Commission.

2. On the basis of the conclusions of the European Council, the Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, the Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the Employment Committee referred to in Article 150, shall each year draw up guidelines which the Member States shall take into account in their employment policies. These guidelines shall be consistent with the broad guidelines adopted pursuant to Article 121(2).

3. Each Member State shall provide the Council and the Commission with an annual report on the principal measures taken to implement its employment policy in the light of the guidelines for employment as referred to in paragraph 2.

4. The Council, on the basis of the reports referred to in paragraph 3 and having received the views of the Employment Committee, shall each year carry out an examination of the implementation of the employment policies of the Member States in the light of the guidelines for employment. The Council, on a recommendation from the Commission, may, if it considers it appropriate in the light of that examination, make recommendations to Member States.

5. On the basis of the results of that examination, the Council and the Commission shall make a joint annual report to the European Council on the employment situation in the Union and on the implementation of the guidelines for employment.

Article 149

(ex Article 129 TEC)

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, may adopt incentive measures designed to encourage cooperation between Member States and to support their action in the field of employment through initiatives aimed at developing exchanges of information and best practices, providing comparative analysis and advice as well as promoting innovative approaches and evaluating experiences, in particular by recourse to pilot projects.

Those measures shall not include harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

Article 150

(ex Article 130 TEC)

The Council, acting by a simple majority after consulting the European Parliament, shall establish an Employment Committee with advisory status to promote coordination between Member States on employment and labour market policies. The tasks of the Committee shall be:

- to monitor the employment situation and employment policies in the Member States and the Union,
- without prejudice to Article 240, to formulate opinions at the request of either the Council or the Commission or on its own initiative, and to contribute to the preparation of the Council proceedings referred to in Article 148.

In fulfilling its mandate, the Committee shall consult management and labour.

Each Member State and the Commission shall appoint two members of the Committee.

TITLE X

SOCIAL POLICY*Article 151*

(ex Article 136 TEC)

The Union and the Member States, having in mind fundamental social rights such as those set out in the European Social Charter signed at Turin on 18 October 1961 and in the 1989 Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, shall have as their objectives the promotion of employment, improved living and working conditions, so as to make possible their harmonisation while the improvement is being maintained, proper social protection, dialogue between management and labour, the development of human resources with a view to lasting high employment and the combating of exclusion.

To this end the Union and the Member States shall implement measures which take account of the diverse forms of national practices, in particular in the field of contractual relations, and the need to maintain the competitiveness of the Union's economy.

They believe that such a development will ensue not only from the functioning of the internal market, which will favour the harmonisation of social systems, but also from the procedures provided for in the Treaties and from the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action.

Article 152

The Union recognises and promotes the role of the social partners at its level, taking into account the diversity of national systems. It shall facilitate dialogue between the social partners, respecting their autonomy.

The Tripartite Social Summit for Growth and Employment shall contribute to social dialogue.

Article 153

(ex Article 137 TEC)

1. With a view to achieving the objectives of Article 151, the Union shall support and complement the activities of the Member States in the following fields:

- (a) improvement in particular of the working environment to protect workers' health and safety;
- (b) working conditions;
- (c) social security and social protection of workers;
- (d) protection of workers where their employment contract is terminated;
- (e) the information and consultation of workers;

- (f) representation and collective defence of the interests of workers and employers, including co-determination, subject to paragraph 5;
- (g) conditions of employment for third-country nationals legally residing in Union territory;
- (h) the integration of persons excluded from the labour market, without prejudice to Article 166;
- (i) equality between men and women with regard to labour market opportunities and treatment at work;
- (j) the combating of social exclusion;
- (k) the modernisation of social protection systems without prejudice to point (c).

2. To this end, the European Parliament and the Council:

- (a) may adopt measures designed to encourage cooperation between Member States through initiatives aimed at improving knowledge, developing exchanges of information and best practices, promoting innovative approaches and evaluating experiences, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States;
- (b) may adopt, in the fields referred to in paragraph 1(a) to (i), by means of directives, minimum requirements for gradual implementation, having regard to the conditions and technical rules obtaining in each of the Member States. Such directives shall avoid imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and development of small and medium-sized undertakings.

The European Parliament and the Council shall act in accordance with the ordinary legislative procedure after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

In the fields referred to in paragraph 1(c), (d), (f) and (g), the Council shall act unanimously, in accordance with a special legislative procedure, after consulting the European Parliament and the said Committees.

The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, after consulting the European Parliament, may decide to render the ordinary legislative procedure applicable to paragraph 1(d), (f) and (g).

3. A Member State may entrust management and labour, at their joint request, with the implementation of directives adopted pursuant to paragraph 2, or, where appropriate, with the implementation of a Council decision adopted in accordance with Article 155.

In this case, it shall ensure that, no later than the date on which a directive or a decision must be transposed or implemented, management and labour have introduced the necessary measures by agreement, the Member State concerned being required to take any necessary measure enabling it at any time to be in a position to guarantee the results imposed by that directive or that decision.

4. The provisions adopted pursuant to this Article:

- shall not affect the right of Member States to define the fundamental principles of their social security systems and must not significantly affect the financial equilibrium thereof,
- shall not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent protective measures compatible with the Treaties.

5. The provisions of this Article shall not apply to pay, the right of association, the right to strike or the right to impose lock-outs.

Article 154
(ex Article 138 TEC)

1. The Commission shall have the task of promoting the consultation of management and labour at Union level and shall take any relevant measure to facilitate their dialogue by ensuring balanced support for the parties.

2. To this end, before submitting proposals in the social policy field, the Commission shall consult management and labour on the possible direction of Union action.

3. If, after such consultation, the Commission considers Union action advisable, it shall consult management and labour on the content of the envisaged proposal. Management and labour shall forward to the Commission an opinion or, where appropriate, a recommendation.

4. On the occasion of the consultation referred to in paragraphs 2 and 3, management and labour may inform the Commission of their wish to initiate the process provided for in Article 155. The duration of this process shall not exceed nine months, unless the management and labour concerned and the Commission decide jointly to extend it.

Article 155
(ex Article 139 TEC)

1. Should management and labour so desire, the dialogue between them at Union level may lead to contractual relations, including agreements.

2. Agreements concluded at Union level shall be implemented either in accordance with the procedures and practices specific to management and labour and the Member States or, in matters covered by Article 153, at the joint request of the signatory parties, by a Council decision on a proposal from the Commission. The European Parliament shall be informed.

The Council shall act unanimously where the agreement in question contains one or more provisions relating to one of the areas for which unanimity is required pursuant to Article 153(2).

Article 156

(ex Article 140 TEC)

With a view to achieving the objectives of Article 151 and without prejudice to the other provisions of the Treaties, the Commission shall encourage cooperation between the Member States and facilitate the coordination of their action in all social policy fields under this Chapter, particularly in matters relating to:

- employment,
- labour law and working conditions,
- basic and advanced vocational training,
- social security,
- prevention of occupational accidents and diseases,
- occupational hygiene,
- the right of association and collective bargaining between employers and workers.

To this end, the Commission shall act in close contact with Member States by making studies, delivering opinions and arranging consultations both on problems arising at national level and on those of concern to international organisations, in particular initiatives aiming at the establishment of guidelines and indicators, the organisation of exchange of best practice, and the preparation of the necessary elements for periodic monitoring and evaluation. The European Parliament shall be kept fully informed.

Before delivering the opinions provided for in this Article, the Commission shall consult the Economic and Social Committee.

Article 157

(ex Article 141 TEC)

1. Each Member State shall ensure that the principle of equal pay for male and female workers for equal work or work of equal value is applied.
2. For the purpose of this Article, 'pay' means the ordinary basic or minimum wage or salary and any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives directly or indirectly, in respect of his employment, from his employer.

Equal pay without discrimination based on sex means:

- (a) that pay for the same work at piece rates shall be calculated on the basis of the same unit of measurement;

(b) that pay for work at time rates shall be the same for the same job.

3. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, and after consulting the Economic and Social Committee, shall adopt measures to ensure the application of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, including the principle of equal pay for equal work or work of equal value.

4. With a view to ensuring full equality in practice between men and women in working life, the principle of equal treatment shall not prevent any Member State from maintaining or adopting measures providing for specific advantages in order to make it easier for the underrepresented sex to pursue a vocational activity or to prevent or compensate for disadvantages in professional careers.

Article 158

(ex Article 142 TEC)

Member States shall endeavour to maintain the existing equivalence between paid holiday schemes.

Article 159

(ex Article 143 TEC)

The Commission shall draw up a report each year on progress in achieving the objectives of Article 151, including the demographic situation in the Union. It shall forward the report to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee.

Article 160

(ex Article 144 TEC)

The Council, acting by a simple majority after consulting the European Parliament, shall establish a Social Protection Committee with advisory status to promote cooperation on social protection policies between Member States and with the Commission. The tasks of the Committee shall be:

- to monitor the social situation and the development of social protection policies in the Member States and the Union,
- to promote exchanges of information, experience and good practice between Member States and with the Commission,
- without prejudice to Article 240, to prepare reports, formulate opinions or undertake other work within its fields of competence, at the request of either the Council or the Commission or on its own initiative.

In fulfilling its mandate, the Committee shall establish appropriate contacts with management and labour.

Each Member State and the Commission shall appoint two members of the Committee.

Article 161

(ex Article 145 TEC)

The Commission shall include a separate chapter on social developments within the Union in its annual report to the European Parliament.

The European Parliament may invite the Commission to draw up reports on any particular problems concerning social conditions.

TITLE XI

THE EUROPEAN SOCIAL FUND

Article 162

(ex Article 146 TEC)

In order to improve employment opportunities for workers in the internal market and to contribute thereby to raising the standard of living, a European Social Fund is hereby established in accordance with the provisions set out below; it shall aim to render the employment of workers easier and to increase their geographical and occupational mobility within the Union, and to facilitate their adaptation to industrial changes and to changes in production systems, in particular through vocational training and retraining.

Article 163

(ex Article 147 TEC)

The Fund shall be administered by the Commission.

The Commission shall be assisted in this task by a Committee presided over by a Member of the Commission and composed of representatives of governments, trade unions and employers' organisations.

Article 164

(ex Article 148 TEC)

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall adopt implementing regulations relating to the European Social Fund.

TITLE XII

EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING, YOUTH AND SPORT

Article 165

(ex Article 149 TEC)

1. The Union shall contribute to the development of quality education by encouraging cooperation between Member States and, if necessary, by supporting and supplementing their action, while fully respecting the responsibility of the Member States for the content of teaching and the organisation of education systems and their cultural and linguistic diversity.

The Union shall contribute to the promotion of European sporting issues, while taking account of the specific nature of sport, its structures based on voluntary activity and its social and educational function.

2. Union action shall be aimed at:

- developing the European dimension in education, particularly through the teaching and dissemination of the languages of the Member States,
- encouraging mobility of students and teachers, by encouraging inter alia, the academic recognition of diplomas and periods of study,
- promoting cooperation between educational establishments,
- developing exchanges of information and experience on issues common to the education systems of the Member States,
- encouraging the development of youth exchanges and of exchanges of socio-educational instructors, and encouraging the participation of young people in democratic life in Europe,
- encouraging the development of distance education,
- developing the European dimension in sport, by promoting fairness and openness in sporting competitions and cooperation between bodies responsible for sports, and by protecting the physical and moral integrity of sportsmen and sportswomen, especially the youngest sportsmen and sportswomen.

3. The Union and the Member States shall foster cooperation with third countries and the competent international organisations in the field of education and sport, in particular the Council of Europe.

4. In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article:

- the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall adopt incentive measures, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States,

— the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt recommendations.

Article 166

(ex Article 150 TEC)

1. The Union shall implement a vocational training policy which shall support and supplement the action of the Member States, while fully respecting the responsibility of the Member States for the content and organisation of vocational training.

2. Union action shall aim to:

— facilitate adaptation to industrial changes, in particular through vocational training and retraining,

— improve initial and continuing vocational training in order to facilitate vocational integration and reintegration into the labour market,

— facilitate access to vocational training and encourage mobility of instructors and trainees and particularly young people,

— stimulate cooperation on training between educational or training establishments and firms,

— develop exchanges of information and experience on issues common to the training systems of the Member States.

3. The Union and the Member States shall foster cooperation with third countries and the competent international organisations in the sphere of vocational training.

4. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall adopt measures to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States, and the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt recommendations.

TITLE XIII

CULTURE

Article 167

(ex Article 151 TEC)

1. The Union shall contribute to the flowering of the cultures of the Member States, while respecting their national and regional diversity and at the same time bringing the common cultural heritage to the fore.

2. Action by the Union shall be aimed at encouraging cooperation between Member States and, if necessary, supporting and supplementing their action in the following areas:

- improvement of the knowledge and dissemination of the culture and history of the European peoples,
- conservation and safeguarding of cultural heritage of European significance,
- non-commercial cultural exchanges,
- artistic and literary creation, including in the audiovisual sector.

3. The Union and the Member States shall foster cooperation with third countries and the competent international organisations in the sphere of culture, in particular the Council of Europe.

4. The Union shall take cultural aspects into account in its action under other provisions of the Treaties, in particular in order to respect and to promote the diversity of its cultures.

5. In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article:

- the European Parliament and the Council acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Committee of the Regions, shall adopt incentive measures, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States,
- the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt recommendations.

TITLE XIV

PUBLIC HEALTH

Article 168

(ex Article 152 TEC)

1. A high level of human health protection shall be ensured in the definition and implementation of all Union policies and activities.

Union action, which shall complement national policies, shall be directed towards improving public health, preventing physical and mental illness and diseases, and obviating sources of danger to physical and mental health. Such action shall cover the fight against the major health scourges, by promoting research into their causes, their transmission and their prevention, as well as health information and education, and monitoring, early warning of and combating serious cross-border threats to health.

The Union shall complement the Member States' action in reducing drugs-related health damage, including information and prevention.

2. The Union shall encourage cooperation between the Member States in the areas referred to in this Article and, if necessary, lend support to their action. It shall in particular encourage cooperation between the Member States to improve the complementarity of their health services in cross-border areas.

Member States shall, in liaison with the Commission, coordinate among themselves their policies and programmes in the areas referred to in paragraph 1. The Commission may, in close contact with the Member States, take any useful initiative to promote such coordination, in particular initiatives aiming at the establishment of guidelines and indicators, the organisation of exchange of best practice, and the preparation of the necessary elements for periodic monitoring and evaluation. The European Parliament shall be kept fully informed.

3. The Union and the Member States shall foster cooperation with third countries and the competent international organisations in the sphere of public health.

4. By way of derogation from Article 2(5) and Article 6(a) and in accordance with Article 4(2)(k) the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article through adopting in order to meet common safety concerns:

- (a) measures setting high standards of quality and safety of organs and substances of human origin, blood and blood derivatives; these measures shall not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent protective measures;
- (b) measures in the veterinary and phytosanitary fields which have as their direct objective the protection of public health;
- (c) measures setting high standards of quality and safety for medicinal products and devices for medical use.

5. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, may also adopt incentive measures designed to protect and improve human health and in particular to combat the major cross-border health scourges, measures concerning monitoring, early warning of and combating serious cross-border threats to health, and measures which have as their direct objective the protection of public health regarding tobacco and the abuse of alcohol, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

6. The Council, on a proposal from the Commission, may also adopt recommendations for the purposes set out in this Article.

7. Union action shall respect the responsibilities of the Member States for the definition of their health policy and for the organisation and delivery of health services and medical care. The

responsibilities of the Member States shall include the management of health services and medical care and the allocation of the resources assigned to them. The measures referred to in paragraph 4(a) shall not affect national provisions on the donation or medical use of organs and blood.

TITLE XV

CONSUMER PROTECTION

Article 169

(ex Article 153 TEC)

1. In order to promote the interests of consumers and to ensure a high level of consumer protection, the Union shall contribute to protecting the health, safety and economic interests of consumers, as well as to promoting their right to information, education and to organise themselves in order to safeguard their interests.

2. The Union shall contribute to the attainment of the objectives referred to in paragraph 1 through:

- (a) measures adopted pursuant to Article 114 in the context of the completion of the internal market;
- (b) measures which support, supplement and monitor the policy pursued by the Member States.

3. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall adopt the measures referred to in paragraph 2(b).

4. Measures adopted pursuant to paragraph 3 shall not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent protective measures. Such measures must be compatible with the Treaties. The Commission shall be notified of them.

TITLE XVI

TRANS-EUROPEAN NETWORKS

Article 170

(ex Article 154 TEC)

1. To help achieve the objectives referred to in Articles 26 and 174 and to enable citizens of the Union, economic operators and regional and local communities to derive full benefit from the setting-up of an area without internal frontiers, the Union shall contribute to the establishment and development of trans-European networks in the areas of transport, telecommunications and energy infrastructures.

2. Within the framework of a system of open and competitive markets, action by the Union shall aim at promoting the interconnection and interoperability of national networks as well as access to such networks. It shall take account in particular of the need to link island, landlocked and peripheral regions with the central regions of the Union.

Article 171

(ex Article 155 TEC)

1. In order to achieve the objectives referred to in Article 170, the Union:
 - shall establish a series of guidelines covering the objectives, priorities and broad lines of measures envisaged in the sphere of trans-European networks; these guidelines shall identify projects of common interest,
 - shall implement any measures that may prove necessary to ensure the interoperability of the networks, in particular in the field of technical standardisation,
 - may support projects of common interest supported by Member States, which are identified in the framework of the guidelines referred to in the first indent, particularly through feasibility studies, loan guarantees or interest-rate subsidies; the Union may also contribute, through the Cohesion Fund set up pursuant to Article 177, to the financing of specific projects in Member States in the area of transport infrastructure.

The Union's activities shall take into account the potential economic viability of the projects.

2. Member States shall, in liaison with the Commission, coordinate among themselves the policies pursued at national level which may have a significant impact on the achievement of the objectives referred to in Article 170. The Commission may, in close cooperation with the Member State, take any useful initiative to promote such coordination.

3. The Union may decide to cooperate with third countries to promote projects of mutual interest and to ensure the interoperability of networks.

Article 172

(ex Article 156 TEC)

The guidelines and other measures referred to in Article 171(1) shall be adopted by the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

Guidelines and projects of common interest which relate to the territory of a Member State shall require the approval of the Member State concerned.

TITLE XVII

INDUSTRY

Article 173

(ex Article 157 TEC)

1. The Union and the Member States shall ensure that the conditions necessary for the competitiveness of the Union's industry exist.

For that purpose, in accordance with a system of open and competitive markets, their action shall be aimed at:

- speeding up the adjustment of industry to structural changes,
- encouraging an environment favourable to initiative and to the development of undertakings throughout the Union, particularly small and medium-sized undertakings,
- encouraging an environment favourable to cooperation between undertakings,
- fostering better exploitation of the industrial potential of policies of innovation, research and technological development.

2. The Member States shall consult each other in liaison with the Commission and, where necessary, shall coordinate their action. The Commission may take any useful initiative to promote such coordination, in particular initiatives aiming at the establishment of guidelines and indicators, the organisation of exchange of best practice, and the preparation of the necessary elements for periodic monitoring and evaluation. The European Parliament shall be kept fully informed.

3. The Union shall contribute to the achievement of the objectives set out in paragraph 1 through the policies and activities it pursues under other provisions of the Treaties. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, may decide on specific measures in support of action taken in the Member States to achieve the objectives set out in paragraph 1, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

This Title shall not provide a basis for the introduction by the Union of any measure which could lead to a distortion of competition or contains tax provisions or provisions relating to the rights and interests of employed persons.

TITLE XVIII

ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIAL COHESION*Article 174*

(ex Article 158 TEC)

In order to promote its overall harmonious development, the Union shall develop and pursue its actions leading to the strengthening of its economic, social and territorial cohesion.

In particular, the Union shall aim at reducing disparities between the levels of development of the various regions and the backwardness of the least favoured regions.

Among the regions concerned, particular attention shall be paid to rural areas, areas affected by industrial transition, and regions which suffer from severe and permanent natural or demographic handicaps such as the northernmost regions with very low population density and island, cross-border and mountain regions.

Article 175

(ex Article 159 TEC)

Member States shall conduct their economic policies and shall coordinate them in such a way as, in addition, to attain the objectives set out in Article 174. The formulation and implementation of the Union's policies and actions and the implementation of the internal market shall take into account the objectives set out in Article 174 and shall contribute to their achievement. The Union shall also support the achievement of these objectives by the action it takes through the Structural Funds (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guidance Section; European Social Fund; European Regional Development Fund), the European Investment Bank and the other existing Financial Instruments.

The Commission shall submit a report to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions every three years on the progress made towards achieving economic, social and territorial cohesion and on the manner in which the various means provided for in this Article have contributed to it. This report shall, if necessary, be accompanied by appropriate proposals.

If specific actions prove necessary outside the Funds and without prejudice to the measures decided upon within the framework of the other Union policies, such actions may be adopted by the Council acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

Article 176

(ex Article 160 TEC)

The European Regional Development Fund is intended to help to redress the main regional imbalances in the Union through participation in the development and structural adjustment of regions whose development is lagging behind and in the conversion of declining industrial regions.

Article 177

(ex Article 161 TEC)

Without prejudice to Article 178, the European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure and consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall define the tasks, priority objectives and the organisation of the Structural Funds, which may involve grouping the Funds. The general rules applicable to them and the provisions necessary to ensure their effectiveness and the coordination of the Funds with one another and with the other existing Financial Instruments shall also be defined by the same procedure.

A Cohesion Fund set up in accordance with the same procedure shall provide a financial contribution to projects in the fields of environment and trans-European networks in the area of transport infrastructure.

Article 178

(ex Article 162 TEC)

Implementing regulations relating to the European Regional Development Fund shall be taken by the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

With regard to the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guidance Section, and the European Social Fund, Articles 43 and 164 respectively shall continue to apply.

TITLE XIX

RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND SPACE*Article 179*

(ex Article 163 TEC)

1. The Union shall have the objective of strengthening its scientific and technological bases by achieving a European research area in which researchers, scientific knowledge and technology circulate freely, and encouraging it to become more competitive, including in its industry, while promoting all the research activities deemed necessary by virtue of other Chapters of the Treaties.
2. For this purpose the Union shall, throughout the Union, encourage undertakings, including small and medium-sized undertakings, research centres and universities in their research and technological development activities of high quality; it shall support their efforts to cooperate with one another, aiming, notably, at permitting researchers to cooperate freely across borders and at enabling undertakings to exploit the internal market potential to the full, in particular through the opening-up of national public contracts, the definition of common standards and the removal of legal and fiscal obstacles to that cooperation.

3. All Union activities under the Treaties in the area of research and technological development, including demonstration projects, shall be decided on and implemented in accordance with the provisions of this Title.

Article 180

(ex Article 164 TEC)

In pursuing these objectives, the Union shall carry out the following activities, complementing the activities carried out in the Member States:

- (a) implementation of research, technological development and demonstration programmes, by promoting cooperation with and between undertakings, research centres and universities;
- (b) promotion of cooperation in the field of Union research, technological development and demonstration with third countries and international organisations;
- (c) dissemination and optimisation of the results of activities in Union research, technological development and demonstration;
- (d) stimulation of the training and mobility of researchers in the Union.

Article 181

(ex Article 165 TEC)

1. The Union and the Member States shall coordinate their research and technological development activities so as to ensure that national policies and Union policy are mutually consistent.

2. In close cooperation with the Member State, the Commission may take any useful initiative to promote the coordination referred to in paragraph 1, in particular initiatives aiming at the establishment of guidelines and indicators, the organisation of exchange of best practice, and the preparation of the necessary elements for periodic monitoring and evaluation. The European Parliament shall be kept fully informed.

Article 182

(ex Article 166 TEC)

1. A multiannual framework programme, setting out all the activities of the Union, shall be adopted by the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure after consulting the Economic and Social Committee.

The framework programme shall:

- establish the scientific and technological objectives to be achieved by the activities provided for in Article 180 and fix the relevant priorities,

- indicate the broad lines of such activities,
 - fix the maximum overall amount and the detailed rules for Union financial participation in the framework programme and the respective shares in each of the activities provided for.
2. The framework programme shall be adapted or supplemented as the situation changes.
3. The framework programme shall be implemented through specific programmes developed within each activity. Each specific programme shall define the detailed rules for implementing it, fix its duration and provide for the means deemed necessary. The sum of the amounts deemed necessary, fixed in the specific programmes, may not exceed the overall maximum amount fixed for the framework programme and each activity.
4. The Council, acting in accordance with a special legislative procedure and after consulting the European Parliament and the Economic and Social Committee, shall adopt the specific programmes.
5. As a complement to the activities planned in the multiannual framework programme, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall establish the measures necessary for the implementation of the European research area.

Article 183

(ex Article 167 TEC)

For the implementation of the multiannual framework programme the Union shall:

- determine the rules for the participation of undertakings, research centres and universities,
- lay down the rules governing the dissemination of research results.

Article 184

(ex Article 168 TEC)

In implementing the multiannual framework programme, supplementary programmes may be decided on involving the participation of certain Member States only, which shall finance them subject to possible Union participation.

The Union shall adopt the rules applicable to supplementary programmes, particularly as regards the dissemination of knowledge and access by other Member States.

Article 185

(ex Article 169 TEC)

In implementing the multiannual framework programme, the Union may make provision, in agreement with the Member States concerned, for participation in research and development programmes undertaken by several Member States, including participation in the structures created for the execution of those programmes.

Article 186

(ex Article 170 TEC)

In implementing the multiannual framework programme the Union may make provision for cooperation in Union research, technological development and demonstration with third countries or international organisations.

The detailed arrangements for such cooperation may be the subject of agreements between the Union and the third parties concerned.

Article 187

(ex Article 171 TEC)

The Union may set up joint undertakings or any other structure necessary for the efficient execution of Union research, technological development and demonstration programmes.

Article 188

(ex Article 172 TEC)

The Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the Economic and Social Committee, shall adopt the provisions referred to in Article 187.

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall adopt the provisions referred to in Articles 183, 184 and 185. Adoption of the supplementary programmes shall require the agreement of the Member States concerned.

Article 189

1. To promote scientific and technical progress, industrial competitiveness and the implementation of its policies, the Union shall draw up a European space policy. To this end, it may promote joint initiatives, support research and technological development and coordinate the efforts needed for the exploration and exploitation of space.

2. To contribute to attaining the objectives referred to in paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the necessary measures, which may take the form of a European space programme, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

3. The Union shall establish any appropriate relations with the European Space Agency.

4. This Article shall be without prejudice to the other provisions of this Title.

Article 190
(ex Article 173 TEC)

At the beginning of each year the Commission shall send a report to the European Parliament and to the Council. The report shall include information on research and technological development activities and the dissemination of results during the previous year, and the work programme for the current year.

TITLE XX
ENVIRONMENT

Article 191
(ex Article 174 TEC)

1. Union policy on the environment shall contribute to pursuit of the following objectives:

- preserving, protecting and improving the quality of the environment,
- protecting human health,
- prudent and rational utilisation of natural resources,
- promoting measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems, and in particular combating climate change.

2. Union policy on the environment shall aim at a high level of protection taking into account the diversity of situations in the various regions of the Union. It shall be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken, that environmental damage should as a priority be rectified at source and that the polluter should pay.

In this context, harmonisation measures answering environmental protection requirements shall include, where appropriate, a safeguard clause allowing Member States to take provisional measures, for non-economic environmental reasons, subject to a procedure of inspection by the Union.

3. In preparing its policy on the environment, the Union shall take account of:
- available scientific and technical data,
 - environmental conditions in the various regions of the Union,
 - the potential benefits and costs of action or lack of action,
 - the economic and social development of the Union as a whole and the balanced development of its regions.

4. Within their respective spheres of competence, the Union and the Member States shall cooperate with third countries and with the competent international organisations. The arrangements for Union cooperation may be the subject of agreements between the Union and the third parties concerned.

The previous subparagraph shall be without prejudice to Member States' competence to negotiate in international bodies and to conclude international agreements.

Article 192

(ex Article 175 TEC)

1. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall decide what action is to be taken by the Union in order to achieve the objectives referred to in Article 191.

2. By way of derogation from the decision-making procedure provided for in paragraph 1 and without prejudice to Article 114, the Council acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after consulting the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall adopt:

- (a) provisions primarily of a fiscal nature;
- (b) measures affecting:
 - town and country planning,
 - quantitative management of water resources or affecting, directly or indirectly, the availability of those resources,
 - land use, with the exception of waste management;
- (c) measures significantly affecting a Member State's choice between different energy sources and the general structure of its energy supply.

The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, may make the ordinary legislative procedure applicable to the matters referred to in the first subparagraph.

3. General action programmes setting out priority objectives to be attained shall be adopted by the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

The measures necessary for the implementation of these programmes shall be adopted under the terms of paragraph 1 or 2, as the case may be.

4. Without prejudice to certain measures adopted by the Union, the Member States shall finance and implement the environment policy.

5. Without prejudice to the principle that the polluter should pay, if a measure based on the provisions of paragraph 1 involves costs deemed disproportionate for the public authorities of a Member State, such measure shall lay down appropriate provisions in the form of:

- temporary derogations, and/or
- financial support from the Cohesion Fund set up pursuant to Article 177.

Article 193

(ex Article 176 TEC)

The protective measures adopted pursuant to Article 192 shall not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent protective measures. Such measures must be compatible with the Treaties. They shall be notified to the Commission.

TITLE XXI

ENERGY

Article 194

1. In the context of the establishment and functioning of the internal market and with regard for the need to preserve and improve the environment, Union policy on energy shall aim, in a spirit of solidarity between Member States, to:

- (a) ensure the functioning of the energy market;
- (b) ensure security of energy supply in the Union;
- (c) promote energy efficiency and energy saving and the development of new and renewable forms of energy; and
- (d) promote the interconnection of energy networks.

2. Without prejudice to the application of other provisions of the Treaties, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the measures necessary to achieve the objectives in paragraph 1. Such measures shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

Such measures shall not affect a Member State's right to determine the conditions for exploiting its energy resources, its choice between different energy sources and the general structure of its energy supply, without prejudice to Article 192(2)(c).

3. By way of derogation from paragraph 2, the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall unanimously and after consulting the European Parliament, establish the measures referred to therein when they are primarily of a fiscal nature.

TITLE XXII

TOURISM

Article 195

1. The Union shall complement the action of the Member States in the tourism sector, in particular by promoting the competitiveness of Union undertakings in that sector.

To that end, Union action shall be aimed at:

- (a) encouraging the creation of a favourable environment for the development of undertakings in this sector;
- (b) promoting cooperation between the Member States, particularly by the exchange of good practice.

2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish specific measures to complement actions within the Member States to achieve the objectives referred to in this Article, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

TITLE XXIII

CIVIL PROTECTION

Article 196

1. The Union shall encourage cooperation between Member States in order to improve the effectiveness of systems for preventing and protecting against natural or man-made disasters.

Union action shall aim to:

- (a) support and complement Member States' action at national, regional and local level in risk prevention, in preparing their civil-protection personnel and in responding to natural or man-made disasters within the Union;
- (b) promote swift, effective operational cooperation within the Union between national civil-protection services;
- (c) promote consistency in international civil-protection work.

2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure shall establish the measures necessary to help achieve the objectives referred to in paragraph 1, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

TITLE XXIV

ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 197

1. Effective implementation of Union law by the Member States, which is essential for the proper functioning of the Union, shall be regarded as a matter of common interest.

2. The Union may support the efforts of Member States to improve their administrative capacity to implement Union law. Such action may include facilitating the exchange of information and of civil servants as well as supporting training schemes. No Member State shall be obliged to avail itself of such support. The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the necessary measures to this end, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

3. This Article shall be without prejudice to the obligations of the Member States to implement Union law or to the prerogatives and duties of the Commission. It shall also be without prejudice to other provisions of the Treaties providing for administrative cooperation among the Member States and between them and the Union.

PART FOUR

ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES

Article 198 (ex Article 182 TEC)

The Member States agree to associate with the Union the non-European countries and territories which have special relations with Denmark, France, the Netherlands and the United Kingdom. These countries and territories (hereinafter called the 'countries and territories') are listed in Annex II.

The purpose of association shall be to promote the economic and social development of the countries and territories and to establish close economic relations between them and the Union as a whole.

In accordance with the principles set out in the preamble to this Treaty, association shall serve primarily to further the interests and prosperity of the inhabitants of these countries and territories in order to lead them to the economic, social and cultural development to which they aspire.

Article 199 (ex Article 183 TEC)

Association shall have the following objectives.

1. Member States shall apply to their trade with the countries and territories the same treatment as they accord each other pursuant to the Treaties.
2. Each country or territory shall apply to its trade with Member States and with the other countries and territories the same treatment as that which it applies to the European State with which it has special relations.
3. The Member States shall contribute to the investments required for the progressive development of these countries and territories.
4. For investments financed by the Union, participation in tenders and supplies shall be open on equal terms to all natural and legal persons who are nationals of a Member State or of one of the countries and territories.
5. In relations between Member States and the countries and territories the right of establishment of nationals and companies or firms shall be regulated in accordance with the provisions and procedures laid down in the Chapter relating to the right of establishment and on a non-discriminatory basis, subject to any special provisions laid down pursuant to Article 203.

Article 200

(ex Article 184 TEC)

1. Customs duties on imports into the Member States of goods originating in the countries and territories shall be prohibited in conformity with the prohibition of customs duties between Member States in accordance with the provisions of the Treaties.

2. Customs duties on imports into each country or territory from Member States or from the other countries or territories shall be prohibited in accordance with the provisions of Article 30.

3. The countries and territories may, however, levy customs duties which meet the needs of their development and industrialisation or produce revenue for their budgets.

The duties referred to in the preceding subparagraph may not exceed the level of those imposed on imports of products from the Member State with which each country or territory has special relations.

4. Paragraph 2 shall not apply to countries and territories which, by reason of the particular international obligations by which they are bound, already apply a non-discriminatory customs tariff.

5. The introduction of or any change in customs duties imposed on goods imported into the countries and territories shall not, either in law or in fact, give rise to any direct or indirect discrimination between imports from the various Member States.

Article 201

(ex Article 185 TEC)

If the level of the duties applicable to goods from a third country on entry into a country or territory is liable, when the provisions of Article 200(1) have been applied, to cause deflections of trade to the detriment of any Member State, the latter may request the Commission to propose to the other Member States the measures needed to remedy the situation.

Article 202

(ex Article 186 TEC)

Subject to the provisions relating to public health, public security or public policy, freedom of movement within Member States for workers from the countries and territories, and within the countries and territories for workers from Member States, shall be regulated by acts adopted in accordance with Article 203.

Article 203

(ex Article 187 TEC)

The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, shall, on the basis of the experience acquired under the association of the countries and territories with the Union and of the principles set out in the Treaties, lay down provisions as regards the detailed rules and the procedure for the association of the countries and territories with the Union. Where the provisions in question are adopted by the Council in accordance with a special legislative procedure, it shall act unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament.

Article 204

(ex Article 188 TEC)

The provisions of Articles 198 to 203 shall apply to Greenland, subject to the specific provisions for Greenland set out in the Protocol on special arrangements for Greenland, annexed to the Treaties.

PART FIVE**THE UNION'S EXTERNAL ACTION****TITLE I****GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION***Article 205*

The Union's action on the international scene, pursuant to this Part, shall be guided by the principles, pursue the objectives and be conducted in accordance with the general provisions laid down in Chapter 1 of Title V of the Treaty on European Union.

TITLE II**COMMON COMMERCIAL POLICY***Article 206*

(ex Article 131 TEC)

By establishing a customs union in accordance with Articles 28 to 32, the Union shall contribute, in the common interest, to the harmonious development of world trade, the progressive abolition of restrictions on international trade and on foreign direct investment, and the lowering of customs and other barriers.

Article 207

(ex Article 133 TEC)

1. The common commercial policy shall be based on uniform principles, particularly with regard to changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements relating to trade in goods and services, and the commercial aspects of intellectual property, foreign direct investment, the achievement of uniformity in measures of liberalisation, export policy and measures to protect trade such as those to be taken in the event of dumping or subsidies. The common commercial policy shall be conducted in the context of the principles and objectives of the Union's external action.

2. The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt the measures defining the framework for implementing the common commercial policy.

3. Where agreements with one or more third countries or international organisations need to be negotiated and concluded, Article 218 shall apply, subject to the special provisions of this Article.

The Commission shall make recommendations to the Council, which shall authorise it to open the necessary negotiations. The Council and the Commission shall be responsible for ensuring that the agreements negotiated are compatible with internal Union policies and rules.

The Commission shall conduct these negotiations in consultation with a special committee appointed by the Council to assist the Commission in this task and within the framework of such directives as the Council may issue to it. The Commission shall report regularly to the special committee and to the European Parliament on the progress of negotiations.

4. For the negotiation and conclusion of the agreements referred to in paragraph 3, the Council shall act by a qualified majority.

For the negotiation and conclusion of agreements in the fields of trade in services and the commercial aspects of intellectual property, as well as foreign direct investment, the Council shall act unanimously where such agreements include provisions for which unanimity is required for the adoption of internal rules.

The Council shall also act unanimously for the negotiation and conclusion of agreements:

- (a) in the field of trade in cultural and audiovisual services, where these agreements risk prejudicing the Union's cultural and linguistic diversity;
- (b) in the field of trade in social, education and health services, where these agreements risk seriously disturbing the national organisation of such services and prejudicing the responsibility of Member States to deliver them.

5. The negotiation and conclusion of international agreements in the field of transport shall be subject to Title VI of Part Three and to Article 218.

6. The exercise of the competences conferred by this Article in the field of the common commercial policy shall not affect the delimitation of competences between the Union and the Member States, and shall not lead to harmonisation of legislative or regulatory provisions of the Member States in so far as the Treaties exclude such harmonisation.

TITLE III

COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES AND HUMANITARIAN AID

CHAPTER 1

DEVELOPMENT COOPERATION

Article 208

(ex Article 177 TEC)

1. Union policy in the field of development cooperation shall be conducted within the framework of the principles and objectives of the Union's external action. The Union's development cooperation policy and that of the Member States complement and reinforce each other.

Union development cooperation policy shall have as its primary objective the reduction and, in the long term, the eradication of poverty. The Union shall take account of the objectives of development cooperation in the policies that it implements which are likely to affect developing countries.

2. The Union and the Member States shall comply with the commitments and take account of the objectives they have approved in the context of the United Nations and other competent international organisations.

Article 209

(ex Article 179 TEC)

1. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt the measures necessary for the implementation of development cooperation policy, which may relate to multiannual cooperation programmes with developing countries or programmes with a thematic approach.

2. The Union may conclude with third countries and competent international organisations any agreement helping to achieve the objectives referred to in Article 21 of the Treaty on European Union and in Article 208 of this Treaty.

The first subparagraph shall be without prejudice to Member States' competence to negotiate in international bodies and to conclude agreements.

3. The European Investment Bank shall contribute, under the terms laid down in its Statute, to the implementation of the measures referred to in paragraph 1.

Article 210

(ex Article 180 TEC)

1. In order to promote the complementarity and efficiency of their action, the Union and the Member States shall coordinate their policies on development cooperation and shall consult each other on their aid programmes, including in international organisations and during international conferences. They may undertake joint action. Member States shall contribute if necessary to the implementation of Union aid programmes.

2. The Commission may take any useful initiative to promote the coordination referred to in paragraph 1.

Article 211

(ex Article 181 TEC)

Within their respective spheres of competence, the Union and the Member States shall cooperate with third countries and with the competent international organisations.

CHAPTER 2

ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES

Article 212

(ex Article 181a TEC)

1. Without prejudice to the other provisions of the Treaties, and in particular Articles 208 to 211, the Union shall carry out economic, financial and technical cooperation measures, including assistance, in particular financial assistance, with third countries other than developing countries. Such measures shall be consistent with the development policy of the Union and shall be carried out within the framework of the principles and objectives of its external action. The Union's operations and those of the Member States shall complement and reinforce each other.

2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt the measures necessary for the implementation of paragraph 1.

3. Within their respective spheres of competence, the Union and the Member States shall cooperate with third countries and the competent international organisations. The arrangements for Union cooperation may be the subject of agreements between the Union and the third parties concerned.

The first subparagraph shall be without prejudice to the Member States' competence to negotiate in international bodies and to conclude international agreements.

Article 213

When the situation in a third country requires urgent financial assistance from the Union, the Council shall adopt the necessary decisions on a proposal from the Commission.

CHAPTER 3

HUMANITARIAN AID

Article 214

1. The Union's operations in the field of humanitarian aid shall be conducted within the framework of the principles and objectives of the external action of the Union. Such operations shall be intended to provide ad hoc assistance and relief and protection for people in third countries who are victims of natural or man-made disasters, in order to meet the humanitarian needs resulting from these different situations. The Union's measures and those of the Member States shall complement and reinforce each other.

2. Humanitarian aid operations shall be conducted in compliance with the principles of international law and with the principles of impartiality, neutrality and non-discrimination.

3. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the measures defining the framework within which the Union's humanitarian aid operations shall be implemented.

4. The Union may conclude with third countries and competent international organisations any agreement helping to achieve the objectives referred to in paragraph 1 and in Article 21 of the Treaty on European Union.

The first subparagraph shall be without prejudice to Member States' competence to negotiate in international bodies and to conclude agreements.

5. In order to establish a framework for joint contributions from young Europeans to the humanitarian aid operations of the Union, a European Voluntary Humanitarian Aid Corps shall be set up. The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall determine the rules and procedures for the operation of the Corps.

6. The Commission may take any useful initiative to promote coordination between actions of the Union and those of the Member States, in order to enhance the efficiency and complementarity of Union and national humanitarian aid measures.

7. The Union shall ensure that its humanitarian aid operations are coordinated and consistent with those of international organisations and bodies, in particular those forming part of the United Nations system.

TITLE IV

RESTRICTIVE MEASURES*Article 215*

(ex Article 301 TEC)

1. Where a decision, adopted in accordance with Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Union, provides for the interruption or reduction, in part or completely, of economic and financial relations with one or more third countries, the Council, acting by a qualified majority on a joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Commission, shall adopt the necessary measures. It shall inform the European Parliament thereof.
2. Where a decision adopted in accordance with Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Union so provides, the Council may adopt restrictive measures under the procedure referred to in paragraph 1 against natural or legal persons and groups or non-State entities.
3. The acts referred to in this Article shall include necessary provisions on legal safeguards.

TITLE V

INTERNATIONAL AGREEMENTS*Article 216*

1. The Union may conclude an agreement with one or more third countries or international organisations where the Treaties so provide or where the conclusion of an agreement is necessary in order to achieve, within the framework of the Union's policies, one of the objectives referred to in the Treaties, or is provided for in a legally binding Union act or is likely to affect common rules or alter their scope.
2. Agreements concluded by the Union are binding upon the institutions of the Union and on its Member States.

Article 217

(ex Article 310 TEC)

The Union may conclude with one or more third countries or international organisations agreements establishing an association involving reciprocal rights and obligations, common action and special procedure.

Article 218

(ex Article 300 TEC)

1. Without prejudice to the specific provisions laid down in Article 207, agreements between the Union and third countries or international organisations shall be negotiated and concluded in accordance with the following procedure.

2. The Council shall authorise the opening of negotiations, adopt negotiating directives, authorise the signing of agreements and conclude them.

3. The Commission, or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy where the agreement envisaged relates exclusively or principally to the common foreign and security policy, shall submit recommendations to the Council, which shall adopt a decision authorising the opening of negotiations and, depending on the subject of the agreement envisaged, nominating the Union negotiator or the head of the Union's negotiating team.

4. The Council may address directives to the negotiator and designate a special committee in consultation with which the negotiations must be conducted.

5. The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision authorising the signing of the agreement and, if necessary, its provisional application before entry into force.

6. The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision concluding the agreement.

Except where agreements relate exclusively to the common foreign and security policy, the Council shall adopt the decision concluding the agreement:

(a) after obtaining the consent of the European Parliament in the following cases:

- (i) association agreements;
- (ii) agreement on Union accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;
- (iii) agreements establishing a specific institutional framework by organising cooperation procedures;
- (iv) agreements with important budgetary implications for the Union;
- (v) agreements covering fields to which either the ordinary legislative procedure applies, or the special legislative procedure where consent by the European Parliament is required.

The European Parliament and the Council may, in an urgent situation, agree upon a time-limit for consent.

(b) after consulting the European Parliament in other cases. The European Parliament shall deliver its opinion within a time-limit which the Council may set depending on the urgency of the matter. In the absence of an opinion within that time-limit, the Council may act.

7. When concluding an agreement, the Council may, by way of derogation from paragraphs 5, 6 and 9, authorise the negotiator to approve on the Union's behalf modifications to the agreement where it provides for them to be adopted by a simplified procedure or by a body set up by the agreement. The Council may attach specific conditions to such authorisation.

8. The Council shall act by a qualified majority throughout the procedure.

However, it shall act unanimously when the agreement covers a field for which unanimity is required for the adoption of a Union act as well as for association agreements and the agreements referred to in Article 212 with the States which are candidates for accession. The Council shall also act unanimously for the agreement on accession of the Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; the decision concluding this agreement shall enter into force after it has been approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

9. The Council, on a proposal from the Commission or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall adopt a decision suspending application of an agreement and establishing the positions to be adopted on the Union's behalf in a body set up by an agreement, when that body is called upon to adopt acts having legal effects, with the exception of acts supplementing or amending the institutional framework of the agreement.

10. The European Parliament shall be immediately and fully informed at all stages of the procedure.

11. A Member State, the European Parliament, the Council or the Commission may obtain the opinion of the Court of Justice as to whether an agreement envisaged is compatible with the Treaties. Where the opinion of the Court is adverse, the agreement envisaged may not enter into force unless it is amended or the Treaties are revised.

Article 219

(ex Article 111(1) to (3) and (5) TEC)

1. By way of derogation from Article 218, the Council, either on a recommendation from the European Central Bank or on a recommendation from the Commission and after consulting the European Central Bank, in an endeavour to reach a consensus consistent with the objective of price stability, may conclude formal agreements on an exchange-rate system for the euro in relation to the currencies of third States. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament and in accordance with the procedure provided for in paragraph 3.

The Council may, either on a recommendation from the European Central Bank or on a recommendation from the Commission, and after consulting the European Central Bank, in an endeavour to reach a consensus consistent with the objective of price stability, adopt, adjust or abandon the central rates of the euro within the exchange-rate system. The President of the Council shall inform the European Parliament of the adoption, adjustment or abandonment of the euro central rates.

2. In the absence of an exchange-rate system in relation to one or more currencies of third States as referred to in paragraph 1, the Council, either on a recommendation from the Commission and after consulting the European Central Bank or on a recommendation from the European Central Bank, may formulate general orientations for exchange-rate policy in relation to these currencies. These general orientations shall be without prejudice to the primary objective of the ESCB to maintain price stability.

3. By way of derogation from Article 218, where agreements concerning monetary or foreign exchange regime matters need to be negotiated by the Union with one or more third States or international organisations, the Council, on a recommendation from the Commission and after consulting the European Central Bank, shall decide the arrangements for the negotiation and for the conclusion of such agreements. These arrangements shall ensure that the Union expresses a single position. The Commission shall be fully associated with the negotiations.

4. Without prejudice to Union competence and Union agreements as regards economic and monetary union, Member States may negotiate in international bodies and conclude international agreements.

TITLE VI

THE UNION'S RELATIONS WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND THIRD COUNTRIES AND UNION DELEGATIONS

Article 220

(ex Articles 302 to 304 TEC)

1. The Union shall establish all appropriate forms of cooperation with the organs of the United Nations and its specialised agencies, the Council of Europe, the Organisation for Security and Cooperation in Europe and the Organisation for Economic Cooperation and Development.

The Union shall also maintain such relations as are appropriate with other international organisations.

2. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Commission shall implement this Article.

Article 221

1. Union delegations in third countries and at international organisations shall represent the Union.

2. Union delegations shall be placed under the authority of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. They shall act in close cooperation with Member States' diplomatic and consular missions.

TITLE VII
SOLIDARITY CLAUSE

Article 222

1. The Union and its Member States shall act jointly in a spirit of solidarity if a Member State is the object of a terrorist attack or the victim of a natural or man-made disaster. The Union shall mobilise all the instruments at its disposal, including the military resources made available by the Member States, to:

- (a) — prevent the terrorist threat in the territory of the Member States;
 - protect democratic institutions and the civilian population from any terrorist attack;
 - assist a Member State in its territory, at the request of its political authorities, in the event of a terrorist attack;
- (b) assist a Member State in its territory, at the request of its political authorities, in the event of a natural or man-made disaster.

2. Should a Member State be the object of a terrorist attack or the victim of a natural or man-made disaster, the other Member States shall assist it at the request of its political authorities. To that end, the Member States shall coordinate between themselves in the Council.

3. The arrangements for the implementation by the Union of the solidarity clause shall be defined by a decision adopted by the Council acting on a joint proposal by the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. The Council shall act in accordance with Article 31(1) of the Treaty on European Union where this decision has defence implications. The European Parliament shall be informed.

For the purposes of this paragraph and without prejudice to Article 240, the Council shall be assisted by the Political and Security Committee with the support of the structures developed in the context of the common security and defence policy and by the Committee referred to in Article 71; the two committees shall, if necessary, submit joint opinions.

4. The European Council shall regularly assess the threats facing the Union in order to enable the Union and its Member States to take effective action.

PART SIX
INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS

TITLE I
INSTITUTIONAL PROVISIONS

CHAPTER 1
THE INSTITUTIONS

SECTION 1
THE EUROPEAN PARLIAMENT

Article 223
(ex Article 190(4) and (5) TEC)

1. The European Parliament shall draw up a proposal to lay down the provisions necessary for the election of its Members by direct universal suffrage in accordance with a uniform procedure in all Member States or in accordance with principles common to all Member States.

The Council, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after obtaining the consent of the European Parliament, which shall act by a majority of its component Members, shall lay down the necessary provisions. These provisions shall enter into force following their approval by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

2. The European Parliament, acting by means of regulations on its own initiative in accordance with a special legislative procedure after seeking an opinion from the Commission and with the consent of the Council, shall lay down the regulations and general conditions governing the performance of the duties of its Members. All rules or conditions relating to the taxation of Members or former Members shall require unanimity within the Council.

Article 224
(ex Article 191, second subparagraph, TEC)

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, by means of regulations, shall lay down the regulations governing political parties at European level referred to in Article 10(4) of the Treaty on European Union and in particular the rules regarding their funding.

Article 225

(ex Article 192, second subparagraph, TEC)

The European Parliament may, acting by a majority of its component Members, request the Commission to submit any appropriate proposal on matters on which it considers that a Union act is required for the purpose of implementing the Treaties. If the Commission does not submit a proposal, it shall inform the European Parliament of the reasons.

Article 226

(ex Article 193 TEC)

In the course of its duties, the European Parliament may, at the request of a quarter of its component Members, set up a temporary Committee of Inquiry to investigate, without prejudice to the powers conferred by the Treaties on other institutions or bodies, alleged contraventions or maladministration in the implementation of Union law, except where the alleged facts are being examined before a court and while the case is still subject to legal proceedings.

The temporary Committee of Inquiry shall cease to exist on the submission of its report.

The detailed provisions governing the exercise of the right of inquiry shall be determined by the European Parliament, acting by means of regulations on its own initiative in accordance with a special legislative procedure, after obtaining the consent of the Council and the Commission.

Article 227

(ex Article 194 TEC)

Any citizen of the Union, and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State, shall have the right to address, individually or in association with other citizens or persons, a petition to the European Parliament on a matter which comes within the Union's fields of activity and which affects him, her or it directly.

Article 228

(ex Article 195 TEC)

1. A European Ombudsman, elected by the European Parliament, shall be empowered to receive complaints from any citizen of the Union or any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State concerning instances of maladministration in the activities of the Union institutions, bodies, offices or agencies, with the exception of the Court of Justice of the European Union acting in its judicial role. He or she shall examine such complaints and report on them.

In accordance with his duties, the Ombudsman shall conduct inquiries for which he finds grounds, either on his own initiative or on the basis of complaints submitted to him direct or through a Member of the European Parliament, except where the alleged facts are or have been the subject of legal proceedings. Where the Ombudsman establishes an instance of maladministration, he shall refer

the matter to the institution, body, office or agency concerned, which shall have a period of three months in which to inform him of its views. The Ombudsman shall then forward a report to the European Parliament and the institution, body, office or agency concerned. The person lodging the complaint shall be informed of the outcome of such inquiries.

The Ombudsman shall submit an annual report to the European Parliament on the outcome of his inquiries.

2. The Ombudsman shall be elected after each election of the European Parliament for the duration of its term of office. The Ombudsman shall be eligible for reappointment.

The Ombudsman may be dismissed by the Court of Justice at the request of the European Parliament if he no longer fulfils the conditions required for the performance of his duties or if he is guilty of serious misconduct.

3. The Ombudsman shall be completely independent in the performance of his duties. In the performance of those duties he shall neither seek nor take instructions from any Government, institution, body, office or entity. The Ombudsman may not, during his term of office, engage in any other occupation, whether gainful or not.

4. The European Parliament acting by means of regulations on its own initiative in accordance with a special legislative procedure shall, after seeking an opinion from the Commission and with the consent of the Council, lay down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties.

Article 229
(ex Article 196 TEC)

The European Parliament shall hold an annual session. It shall meet, without requiring to be convened, on the second Tuesday in March.

The European Parliament may meet in extraordinary part-session at the request of a majority of its component Members or at the request of the Council or of the Commission.

Article 230
(ex Article 197, second, third and fourth paragraph, TEC)

The Commission may attend all the meetings and shall, at its request, be heard.

The Commission shall reply orally or in writing to questions put to it by the European Parliament or by its Members.

The European Council and the Council shall be heard by the European Parliament in accordance with the conditions laid down in the Rules of Procedure of the European Council and those of the Council.

Article 231

(ex Article 198 TEC)

Save as otherwise provided in the Treaties, the European Parliament shall act by a majority of the votes cast.

The Rules of Procedure shall determine the quorum.

Article 232

(ex Article 199 TEC)

The European Parliament shall adopt its Rules of Procedure, acting by a majority of its Members.

The proceedings of the European Parliament shall be published in the manner laid down in the Treaties and in its Rules of Procedure.

Article 233

(ex Article 200 TEC)

The European Parliament shall discuss in open session the annual general report submitted to it by the Commission.

Article 234

(ex Article 201 TEC)

If a motion of censure on the activities of the Commission is tabled before it, the European Parliament shall not vote thereon until at least three days after the motion has been tabled and only by open vote.

If the motion of censure is carried by a two-thirds majority of the votes cast, representing a majority of the component Members of the European Parliament, the members of the Commission shall resign as a body and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall resign from duties that he or she carries out in the Commission. They shall remain in office and continue to deal with current business until they are replaced in accordance with Article 17 of the Treaty on European Union. In this case, the term of office of the members of the Commission appointed to replace them shall expire on the date on which the term of office of the members of the Commission obliged to resign as a body would have expired.

SECTION 2

THE EUROPEAN COUNCIL

Article 235

1. Where a vote is taken, any member of the European Council may also act on behalf of not more than one other member.

Article 16(4) of the Treaty on European Union and Article 238(2) of this Treaty shall apply to the European Council when it is acting by a qualified majority. Where the European Council decides by vote, its President and the President of the Commission shall not take part in the vote.

Abstentions by members present in person or represented shall not prevent the adoption by the European Council of acts which require unanimity.

2. The President of the European Parliament may be invited to be heard by the European Council.
3. The European Council shall act by a simple majority for procedural questions and for the adoption of its Rules of Procedure.
4. The European Council shall be assisted by the General Secretariat of the Council.

Article 236

The European Council shall adopt by a qualified majority:

- (a) a decision establishing the list of Council configurations, other than those of the General Affairs Council and of the Foreign Affairs Council, in accordance with Article 16(6) of the Treaty on European Union;
- (b) a decision on the Presidency of Council configurations, other than that of Foreign Affairs, in accordance with Article 16(9) of the Treaty on European Union.

SECTION 3

THE COUNCIL

Article 237

(ex Article 204 TEC)

The Council shall meet when convened by its President on his own initiative or at the request of one of its Members or of the Commission.

Article 238

(ex Article 205(1) and (2), TEC)

1. Where it is required to act by a simple majority, the Council shall act by a majority of its component members.
2. By way of derogation from Article 16(4) of the Treaty on European Union, as from 1 November 2014 and subject to the provisions laid down in the Protocol on transitional provisions,

where the Council does not act on a proposal from the Commission or from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the qualified majority shall be defined as at least 72 % of the members of the Council, representing Member States comprising at least 65 % of the population of the Union.

3. As from 1 November 2014 and subject to the provisions laid down in the Protocol on transitional provisions, in cases where, under the Treaties, not all the members of the Council participate in voting, a qualified majority shall be defined as follows:

(a) A qualified majority shall be defined as at least 55 % of the members of the Council representing the participating Member States, comprising at least 65 % of the population of these States.

A blocking minority must include at least the minimum number of Council members representing more than 35 % of the population of the participating Member States, plus one member, failing which the qualified majority shall be deemed attained;

(b) By way of derogation from point (a), where the Council does not act on a proposal from the Commission or from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the qualified majority shall be defined as at least 72 % of the members of the Council representing the participating Member States, comprising at least 65 % of the population of these States.

4. Abstentions by Members present in person or represented shall not prevent the adoption by the Council of acts which require unanimity.

Article 239

(ex Article 206 TEC)

Where a vote is taken, any Member of the Council may also act on behalf of not more than one other member.

Article 240

(ex Article 207 TEC)

1. A committee consisting of the Permanent Representatives of the Governments of the Member States shall be responsible for preparing the work of the Council and for carrying out the tasks assigned to it by the latter. The Committee may adopt procedural decisions in cases provided for in the Council's Rules of Procedure.

2. The Council shall be assisted by a General Secretariat, under the responsibility of a Secretary-General appointed by the Council.

The Council shall decide on the organisation of the General Secretariat by a simple majority.

3. The Council shall act by a simple majority regarding procedural matters and for the adoption of its Rules of Procedure.

Article 241

(ex Article 208 TEC)

The Council, acting by a simple majority, may request the Commission to undertake any studies the Council considers desirable for the attainment of the common objectives, and to submit to it any appropriate proposals. If the Commission does not submit a proposal, it shall inform the Council of the reasons.

Article 242

(ex Article 209 TEC)

The Council, acting by a simple majority shall, after consulting the Commission, determine the rules governing the committees provided for in the Treaties.

Article 243

(ex Article 210 TEC)

The Council shall determine the salaries, allowances and pensions of the President of the European Council, the President of the Commission, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the Members of the Commission, the Presidents, Members and Registrars of the Court of Justice of the European Union, and the Secretary-General of the Council. It shall also determine any payment to be made instead of remuneration.

SECTION 4

THE COMMISSION

Article 244

In accordance with Article 17(5) of the Treaty on European Union, the Members of the Commission shall be chosen on the basis of a system of rotation established unanimously by the European Council and on the basis of the following principles:

- (a) Member States shall be treated on a strictly equal footing as regards determination of the sequence of, and the time spent by, their nationals as members of the Commission; consequently, the difference between the total number of terms of office held by nationals of any given pair of Member States may never be more than one;
- (b) subject to point (a), each successive Commission shall be so composed as to reflect satisfactorily the demographic and geographical range of all the Member States.

Article 245

(ex Article 213 TEC)

The Members of the Commission shall refrain from any action incompatible with their duties. Member States shall respect their independence and shall not seek to influence them in the performance of their tasks.

The Members of the Commission may not, during their term of office, engage in any other occupation, whether gainful or not. When entering upon their duties they shall give a solemn undertaking that, both during and after their term of office, they will respect the obligations arising therefrom and in particular their duty to behave with integrity and discretion as regards the acceptance, after they have ceased to hold office, of certain appointments or benefits. In the event of any breach of these obligations, the Court of Justice may, on application by the Council acting by a simple majority or the Commission, rule that the Member concerned be, according to the circumstances, either compulsorily retired in accordance with Article 247 or deprived of his right to a pension or other benefits in its stead.

Article 246

(ex Article 215 TEC)

Apart from normal replacement, or death, the duties of a Member of the Commission shall end when he resigns or is compulsorily retired.

A vacancy caused by resignation, compulsory retirement or death shall be filled for the remainder of the Member's term of office by a new Member of the same nationality appointed by the Council, by common accord with the President of the Commission, after consulting the European Parliament and in accordance with the criteria set out in the second subparagraph of Article 17(3) of the Treaty on European Union.

The Council may, acting unanimously on a proposal from the President of the Commission, decide that such a vacancy need not be filled, in particular when the remainder of the Member's term of office is short.

In the event of resignation, compulsory retirement or death, the President shall be replaced for the remainder of his term of office. The procedure laid down in the first subparagraph of Article 17(7) of the Treaty on European Union shall be applicable for the replacement of the President.

In the event of resignation, compulsory retirement or death, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall be replaced, for the remainder of his or her term of office, in accordance with Article 18(1) of the Treaty on European Union.

In the case of the resignation of all the Members of the Commission, they shall remain in office and continue to deal with current business until they have been replaced, for the remainder of their term of office, in accordance with Article 17 of the Treaty on European Union.

Article 247

(ex Article 216 TEC)

If any Member of the Commission no longer fulfils the conditions required for the performance of his duties or if he has been guilty of serious misconduct, the Court of Justice may, on application by the Council acting by a simple majority or the Commission, compulsorily retire him.

Article 248

(ex Article 217(2) TEC)

Without prejudice to Article 18(4) of the Treaty on European Union, the responsibilities incumbent upon the Commission shall be structured and allocated among its members by its President, in accordance with Article 17(6) of that Treaty. The President may reshuffle the allocation of those responsibilities during the Commission's term of office. The Members of the Commission shall carry out the duties devolved upon them by the President under his authority.

Article 249

(ex Articles 218(2) and 212 TEC)

1. The Commission shall adopt its Rules of Procedure so as to ensure that both it and its departments operate. It shall ensure that these Rules are published.

2. The Commission shall publish annually, not later than one month before the opening of the session of the European Parliament, a general report on the activities of the Union.

Article 250

(ex Article 219 TEC)

The Commission shall act by a majority of its Members.

Its Rules of Procedure shall determine the quorum.

SECTION 5

THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

Article 251

(ex Article 221 TEC)

The Court of Justice shall sit in chambers or in a Grand Chamber, in accordance with the rules laid down for that purpose in the Statute of the Court of Justice of the European Union.

When provided for in the Statute, the Court of Justice may also sit as a full Court.

Article 252

(ex Article 222 TEC)

The Court of Justice shall be assisted by eight Advocates-General. Should the Court of Justice so request, the Council, acting unanimously, may increase the number of Advocates-General.

It shall be the duty of the Advocate-General, acting with complete impartiality and independence, to make, in open court, reasoned submissions on cases which, in accordance with the Statute of the Court of Justice of the European Union, require his involvement.

Article 253

(ex Article 223 TEC)

The Judges and Advocates-General of the Court of Justice shall be chosen from persons whose independence is beyond doubt and who possess the qualifications required for appointment to the highest judicial offices in their respective countries or who are jurisconsults of recognised competence; they shall be appointed by common accord of the governments of the Member States for a term of six years, after consultation of the panel provided for in Article 255.

Every three years there shall be a partial replacement of the Judges and Advocates-General, in accordance with the conditions laid down in the Statute of the Court of Justice of the European Union.

The Judges shall elect the President of the Court of Justice from among their number for a term of three years. He may be re-elected.

Retiring Judges and Advocates-General may be reappointed.

The Court of Justice shall appoint its Registrar and lay down the rules governing his service.

The Court of Justice shall establish its Rules of Procedure. Those Rules shall require the approval of the Council.

Article 254

(ex Article 224 TEC)

The number of Judges of the General Court shall be determined by the Statute of the Court of Justice of the European Union. The Statute may provide for the General Court to be assisted by Advocates-General.

The members of the General Court shall be chosen from persons whose independence is beyond doubt and who possess the ability required for appointment to high judicial office. They shall be appointed by common accord of the governments of the Member States for a term of six years, after consultation of the panel provided for in Article 255. The membership shall be partially renewed every three years. Retiring members shall be eligible for reappointment.

The Judges shall elect the President of the General Court from among their number for a term of three years. He may be re-elected.

The General Court shall appoint its Registrar and lay down the rules governing his service.

The General Court shall establish its Rules of Procedure in agreement with the Court of Justice. Those Rules shall require the approval of the Council.

Unless the Statute of the Court of Justice of the European Union provides otherwise, the provisions of the Treaties relating to the Court of Justice shall apply to the General Court.

Article 255

A panel shall be set up in order to give an opinion on candidates' suitability to perform the duties of Judge and Advocate-General of the Court of Justice and the General Court before the governments of the Member States make the appointments referred to in Articles 253 and 254.

The panel shall comprise seven persons chosen from among former members of the Court of Justice and the General Court, members of national supreme courts and lawyers of recognised competence, one of whom shall be proposed by the European Parliament. The Council shall adopt a decision establishing the panel's operating rules and a decision appointing its members. It shall act on the initiative of the President of the Court of Justice.

Article 256

(ex Article 225 TEC)

1. The General Court shall have jurisdiction to hear and determine at first instance actions or proceedings referred to in Articles 263, 265, 268, 270 and 272, with the exception of those assigned to a specialised court set up under Article 257 and those reserved in the Statute for the Court of Justice. The Statute may provide for the General Court to have jurisdiction for other classes of action or proceeding.

Decisions given by the General Court under this paragraph may be subject to a right of appeal to the Court of Justice on points of law only, under the conditions and within the limits laid down by the Statute.

2. The General Court shall have jurisdiction to hear and determine actions or proceedings brought against decisions of the specialised courts.

Decisions given by the General Court under this paragraph may exceptionally be subject to review by the Court of Justice, under the conditions and within the limits laid down by the Statute, where there is a serious risk of the unity or consistency of Union law being affected.

3. The General Court shall have jurisdiction to hear and determine questions referred for a preliminary ruling under Article 267, in specific areas laid down by the Statute.

Where the General Court considers that the case requires a decision of principle likely to affect the unity or consistency of Union law, it may refer the case to the Court of Justice for a ruling.

Decisions given by the General Court on questions referred for a preliminary ruling may exceptionally be subject to review by the Court of Justice, under the conditions and within the limits laid down by the Statute, where there is a serious risk of the unity or consistency of Union law being affected.

Article 257

(ex Article 225a TEC)

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may establish specialised courts attached to the General Court to hear and determine at first instance certain classes of action or proceeding brought in specific areas. The European Parliament and the Council shall act by means of regulations either on a proposal from the Commission after consultation of the Court of Justice or at the request of the Court of Justice after consultation of the Commission.

The regulation establishing a specialised court shall lay down the rules on the organisation of the court and the extent of the jurisdiction conferred upon it.

Decisions given by specialised courts may be subject to a right of appeal on points of law only or, when provided for in the regulation establishing the specialised court, a right of appeal also on matters of fact, before the General Court.

The members of the specialised courts shall be chosen from persons whose independence is beyond doubt and who possess the ability required for appointment to judicial office. They shall be appointed by the Council, acting unanimously.

The specialised courts shall establish their Rules of Procedure in agreement with the Court of Justice. Those Rules shall require the approval of the Council.

Unless the regulation establishing the specialised court provides otherwise, the provisions of the Treaties relating to the Court of Justice of the European Union and the provisions of the Statute of the Court of Justice of the European Union shall apply to the specialised courts. Title I of the Statute and Article 64 thereof shall in any case apply to the specialised courts.

Article 258

(ex Article 226 TEC)

If the Commission considers that a Member State has failed to fulfil an obligation under the Treaties, it shall deliver a reasoned opinion on the matter after giving the State concerned the opportunity to submit its observations.

If the State concerned does not comply with the opinion within the period laid down by the Commission, the latter may bring the matter before the Court of Justice of the European Union.

Article 259

(ex Article 227 TEC)

A Member State which considers that another Member State has failed to fulfil an obligation under the Treaties may bring the matter before the Court of Justice of the European Union.

Before a Member State brings an action against another Member State for an alleged infringement of an obligation under the Treaties, it shall bring the matter before the Commission.

The Commission shall deliver a reasoned opinion after each of the States concerned has been given the opportunity to submit its own case and its observations on the other party's case both orally and in writing.

If the Commission has not delivered an opinion within three months of the date on which the matter was brought before it, the absence of such opinion shall not prevent the matter from being brought before the Court.

Article 260

(ex Article 228 TEC)

1. If the Court of Justice of the European Union finds that a Member State has failed to fulfil an obligation under the Treaties, the State shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the Court.

2. If the Commission considers that the Member State concerned has not taken the necessary measures to comply with the judgment of the Court, it may bring the case before the Court after giving that State the opportunity to submit its observations. It shall specify the amount of the lump sum or penalty payment to be paid by the Member State concerned which it considers appropriate in the circumstances.

If the Court finds that the Member State concerned has not complied with its judgment it may impose a lump sum or penalty payment on it.

This procedure shall be without prejudice to Article 259.

3. When the Commission brings a case before the Court pursuant to Article 258 on the grounds that the Member State concerned has failed to fulfil its obligation to notify measures transposing a directive adopted under a legislative procedure, it may, when it deems appropriate, specify the amount of the lump sum or penalty payment to be paid by the Member State concerned which it considers appropriate in the circumstances.

If the Court finds that there is an infringement it may impose a lump sum or penalty payment on the Member State concerned not exceeding the amount specified by the Commission. The payment obligation shall take effect on the date set by the Court in its judgment.

Article 261

(ex Article 229 TEC)

Regulations adopted jointly by the European Parliament and the Council, and by the Council, pursuant to the provisions of the Treaties, may give the Court of Justice of the European Union unlimited jurisdiction with regard to the penalties provided for in such regulations.

Article 262

(ex Article 229a TEC)

Without prejudice to the other provisions of the Treaties, the Council, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after consulting the European Parliament, may adopt provisions to confer jurisdiction, to the extent that it shall determine, on the Court of Justice of the European Union in disputes relating to the application of acts adopted on the basis of the Treaties which create European intellectual property rights. These provisions shall enter into force after their approval by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

Article 263

(ex Article 230 TEC)

The Court of Justice of the European Union shall review the legality of legislative acts, of acts of the Council, of the Commission and of the European Central Bank, other than recommendations and opinions, and of acts of the European Parliament and of the European Council intended to produce legal effects *vis-à-vis* third parties. It shall also review the legality of acts of bodies, offices or agencies of the Union intended to produce legal effects *vis-à-vis* third parties.

It shall for this purpose have jurisdiction in actions brought by a Member State, the European Parliament, the Council or the Commission on grounds of lack of competence, infringement of an essential procedural requirement, infringement of the Treaties or of any rule of law relating to their application, or misuse of powers.

The Court shall have jurisdiction under the same conditions in actions brought by the Court of Auditors, by the European Central Bank and by the Committee of the Regions for the purpose of protecting their prerogatives.

Any natural or legal person may, under the conditions laid down in the first and second paragraphs, institute proceedings against an act addressed to that person or which is of direct and individual concern to them, and against a regulatory act which is of direct concern to them and does not entail implementing measures.

Acts setting up bodies, offices and agencies of the Union may lay down specific conditions and arrangements concerning actions brought by natural or legal persons against acts of these bodies, offices or agencies intended to produce legal effects in relation to them.

The proceedings provided for in this Article shall be instituted within two months of the publication of the measure, or of its notification to the plaintiff, or, in the absence thereof, of the day on which it came to the knowledge of the latter, as the case may be.

Article 264

(ex Article 231 TEC)

If the action is well founded, the Court of Justice of the European Union shall declare the act concerned to be void.

However, the Court shall, if it considers this necessary, state which of the effects of the act which it has declared void shall be considered as definitive.

Article 265

(ex Article 232 TEC)

Should the European Parliament, the European Council, the Council, the Commission or the European Central Bank, in infringement of the Treaties, fail to act, the Member States and the other institutions of the Union may bring an action before the Court of Justice of the European Union to have the infringement established. This Article shall apply, under the same conditions, to bodies, offices and agencies of the Union which fail to act.

The action shall be admissible only if the institution, body, office or agency concerned has first been called upon to act. If, within two months of being so called upon, the institution, body, office or agency concerned has not defined its position, the action may be brought within a further period of two months.

Any natural or legal person may, under the conditions laid down in the preceding paragraphs, complain to the Court that an institution, body, office or agency of the Union has failed to address to that person any act other than a recommendation or an opinion.

Article 266

(ex Article 233 TEC)

The institution whose act has been declared void or whose failure to act has been declared contrary to the Treaties shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the Court of Justice of the European Union.

This obligation shall not affect any obligation which may result from the application of the second paragraph of Article 340.

Article 267

(ex Article 234 TEC)

The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give preliminary rulings concerning:

- (a) the interpretation of the Treaties;
- (b) the validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices or agencies of the Union;

Where such a question is raised before any court or tribunal of a Member State, that court or tribunal may, if it considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, request the Court to give a ruling thereon.

Where any such question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State against whose decisions there is no judicial remedy under national law, that court or tribunal shall bring the matter before the Court.

If such a question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State with regard to a person in custody, the Court of Justice of the European Union shall act with the minimum of delay.

Article 268

(ex Article 235 TEC)

The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in disputes relating to compensation for damage provided for in the second and third paragraphs of Article 340.

Article 269

The Court of Justice shall have jurisdiction to decide on the legality of an act adopted by the European Council or by the Council pursuant to Article 7 of the Treaty on European Union solely at the request of the Member State concerned by a determination of the European Council or of the Council and in respect solely of the procedural stipulations contained in that Article.

Such a request must be made within one month from the date of such determination. The Court shall rule within one month from the date of the request.

Article 270

(ex Article 236 TEC)

The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in any dispute between the Union and its servants within the limits and under the conditions laid down in the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of other servants of the Union.

Article 271

(ex Article 237 TEC)

The Court of Justice of the European Union shall, within the limits hereinafter laid down, have jurisdiction in disputes concerning:

- (a) the fulfilment by Member States of obligations under the Statute of the European Investment Bank. In this connection, the Board of Directors of the Bank shall enjoy the powers conferred upon the Commission by Article 258;
- (b) measures adopted by the Board of Governors of the European Investment Bank. In this connection, any Member State, the Commission or the Board of Directors of the Bank may institute proceedings under the conditions laid down in Article 263;
- (c) measures adopted by the Board of Directors of the European Investment Bank. Proceedings against such measures may be instituted only by Member States or by the Commission, under the conditions laid down in Article 263, and solely on the grounds of non-compliance with the procedure provided for in Article 19(2), (5), (6) and (7) of the Statute of the Bank;
- (d) the fulfilment by national central banks of obligations under the Treaties and the Statute of the ESCB and of the ECB. In this connection the powers of the Governing Council of the European Central Bank in respect of national central banks shall be the same as those conferred upon the Commission in respect of Member States by Article 258. If the Court finds that a national central bank has failed to fulfil an obligation under the Treaties, that bank shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the Court.

Article 272

(ex Article 238 TEC)

The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give judgment pursuant to any arbitration clause contained in a contract concluded by or on behalf of the Union, whether that contract be governed by public or private law.

Article 273

(ex Article 239 TEC)

The Court of Justice shall have jurisdiction in any dispute between Member States which relates to the subject matter of the Treaties if the dispute is submitted to it under a special agreement between the parties.

Article 274

(ex Article 240 TEC)

Save where jurisdiction is conferred on the Court of Justice of the European Union by the Treaties, disputes to which the Union is a party shall not on that ground be excluded from the jurisdiction of the courts or tribunals of the Member States.

Article 275

The Court of Justice of the European Union shall not have jurisdiction with respect to the provisions relating to the common foreign and security policy nor with respect to acts adopted on the basis of those provisions.

However, the Court shall have jurisdiction to monitor compliance with Article 40 of the Treaty on European Union and to rule on proceedings, brought in accordance with the conditions laid down in the fourth paragraph of Article 263 of this Treaty, reviewing the legality of decisions providing for restrictive measures against natural or legal persons adopted by the Council on the basis of Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Union.

Article 276

In exercising its powers regarding the provisions of Chapters 4 and 5 of Title V of Part Three relating to the area of freedom, security and justice, the Court of Justice of the European Union shall have no jurisdiction to review the validity or proportionality of operations carried out by the police or other law-enforcement services of a Member State or the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security.

Article 277

(ex Article 241 TEC)

Notwithstanding the expiry of the period laid down in Article 263, sixth paragraph, any party may, in proceedings in which an act of general application adopted by an institution, body, office or agency of the Union is at issue, plead the grounds specified in Article 263, second paragraph, in order to invoke before the Court of Justice of the European Union the inapplicability of that act.

Article 278

(ex Article 242 TEC)

Actions brought before the Court of Justice of the European Union shall not have suspensory effect. The Court may, however, if it considers that circumstances so require, order that application of the contested act be suspended.

Article 279

(ex Article 243 TEC)

The Court of Justice of the European Union may in any cases before it prescribe any necessary interim measures.

Article 280

(ex Article 244 TEC)

The judgments of the Court of Justice of the European Union shall be enforceable under the conditions laid down in Article 299.

Article 281

(ex Article 245 TEC)

The Statute of the Court of Justice of the European Union shall be laid down in a separate Protocol.

The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may amend the provisions of the Statute, with the exception of Title I and Article 64. The European Parliament and the Council shall act either at the request of the Court of Justice and after consultation of the Commission, or on a proposal from the Commission and after consultation of the Court of Justice.

SECTION 6

THE EUROPEAN CENTRAL BANK

Article 282

1. The European Central Bank, together with the national central banks, shall constitute the European System of Central Banks (ESCB). The European Central Bank, together with the national central banks of the Member States whose currency is the euro, which constitute the Eurosystem, shall conduct the monetary policy of the Union.

2. The ESCB shall be governed by the decision-making bodies of the European Central Bank. The primary objective of the ESCB shall be to maintain price stability. Without prejudice to that objective, it shall support the general economic policies in the Union in order to contribute to the achievement of the latter's objectives.

3. The European Central Bank shall have legal personality. It alone may authorise the issue of the euro. It shall be independent in the exercise of its powers and in the management of its finances. Union institutions, bodies, offices and agencies and the governments of the Member States shall respect that independence.

4. The European Central Bank shall adopt such measures as are necessary to carry out its tasks in accordance with Articles 127 to 133, with Article 138, and with the conditions laid down in the Statute of the ESCB and of the ECB. In accordance with these same Articles, those Member States whose currency is not the euro, and their central banks, shall retain their powers in monetary matters.

5. Within the areas falling within its responsibilities, the European Central Bank shall be consulted on all proposed Union acts, and all proposals for regulation at national level, and may give an opinion.

Article 283

(ex Article 112 TEC)

1. The Governing Council of the European Central Bank shall comprise the members of the Executive Board of the European Central Bank and the Governors of the national central banks of the Member States whose currency is the euro.
2. The Executive Board shall comprise the President, the Vice-President and four other members.

The President, the Vice-President and the other members of the Executive Board shall be appointed by the European Council, acting by a qualified majority, from among persons of recognised standing and professional experience in monetary or banking matters, on a recommendation from the Council, after it has consulted the European Parliament and the Governing Council of the European Central Bank.

Their term of office shall be eight years and shall not be renewable.

Only nationals of Member States may be members of the Executive Board.

Article 284

(ex Article 113 TEC)

1. The President of the Council and a Member of the Commission may participate, without having the right to vote, in meetings of the Governing Council of the European Central Bank.

The President of the Council may submit a motion for deliberation to the Governing Council of the European Central Bank.

2. The President of the European Central Bank shall be invited to participate in Council meetings when the Council is discussing matters relating to the objectives and tasks of the ESCB.

3. The European Central Bank shall address an annual report on the activities of the ESCB and on the monetary policy of both the previous and current year to the European Parliament, the Council and the Commission, and also to the European Council. The President of the European Central Bank shall present this report to the Council and to the European Parliament, which may hold a general debate on that basis.

The President of the European Central Bank and the other members of the Executive Board may, at the request of the European Parliament or on their own initiative, be heard by the competent committees of the European Parliament.

SECTION 7

THE COURT OF AUDITORS

Article 285

(ex Article 246 TEC)

The Court of Auditors shall carry out the Union's audit.

It shall consist of one national of each Member State. Its Members shall be completely independent in the performance of their duties, in the Union's general interest.

Article 286

(ex Article 247 TEC)

1. The Members of the Court of Auditors shall be chosen from among persons who belong or have belonged in their respective States to external audit bodies or who are especially qualified for this office. Their independence must be beyond doubt.

2. The Members of the Court of Auditors shall be appointed for a term of six years. The Council, after consulting the European Parliament, shall adopt the list of Members drawn up in accordance with the proposals made by each Member State. The term of office of the Members of the Court of Auditors shall be renewable.

They shall elect the President of the Court of Auditors from among their number for a term of three years. The President may be re-elected.

3. In the performance of these duties, the Members of the Court of Auditors shall neither seek nor take instructions from any government or from any other body. The Members of the Court of Auditors shall refrain from any action incompatible with their duties.

4. The Members of the Court of Auditors may not, during their term of office, engage in any other occupation, whether gainful or not. When entering upon their duties they shall give a solemn undertaking that, both during and after their term of office, they will respect the obligations arising therefrom and in particular their duty to behave with integrity and discretion as regards the acceptance, after they have ceased to hold office, of certain appointments or benefits.

5. Apart from normal replacement, or death, the duties of a Member of the Court of Auditors shall end when he resigns, or is compulsorily retired by a ruling of the Court of Justice pursuant to paragraph 6.

The vacancy thus caused shall be filled for the remainder of the Member's term of office.

Save in the case of compulsory retirement, Members of the Court of Auditors shall remain in office until they have been replaced.

6. A Member of the Court of Auditors may be deprived of his office or of his right to a pension or other benefits in its stead only if the Court of Justice, at the request of the Court of Auditors, finds that he no longer fulfils the requisite conditions or meets the obligations arising from his office.

7. The Council shall determine the conditions of employment of the President and the Members of the Court of Auditors and in particular their salaries, allowances and pensions. It shall also determine any payment to be made instead of remuneration.

8. The provisions of the Protocol on the privileges and immunities of the European Union applicable to the Judges of the Court of Justice of the European Union shall also apply to the Members of the Court of Auditors.

Article 287

(ex Article 248 TEC)

1. The Court of Auditors shall examine the accounts of all revenue and expenditure of the Union. It shall also examine the accounts of all revenue and expenditure of all bodies, offices or agencies set up by the Union in so far as the relevant constituent instrument does not preclude such examination.

The Court of Auditors shall provide the European Parliament and the Council with a statement of assurance as to the reliability of the accounts and the legality and regularity of the underlying transactions which shall be published in the *Official Journal of the European Union*. This statement may be supplemented by specific assessments for each major area of Union activity.

2. The Court of Auditors shall examine whether all revenue has been received and all expenditure incurred in a lawful and regular manner and whether the financial management has been sound. In doing so, it shall report in particular on any cases of irregularity.

The audit of revenue shall be carried out on the basis both of the amounts established as due and the amounts actually paid to the Union.

The audit of expenditure shall be carried out on the basis both of commitments undertaken and payments made.

These audits may be carried out before the closure of accounts for the financial year in question.

3. The audit shall be based on records and, if necessary, performed on the spot in the other institutions of the Union, on the premises of any body, office or agency which manages revenue or expenditure on behalf of the Union and in the Member States, including on the premises of any natural or legal person in receipt of payments from the budget. In the Member States the audit shall be carried out in liaison with national audit bodies or, if these do not have the necessary powers, with the competent national departments. The Court of Auditors and the national audit bodies of the Member States shall cooperate in a spirit of trust while maintaining their independence. These bodies or departments shall inform the Court of Auditors whether they intend to take part in the audit.

The other institutions of the Union, any bodies, offices or agencies managing revenue or expenditure on behalf of the Union, any natural or legal person in receipt of payments from the budget, and the national audit bodies or, if these do not have the necessary powers, the competent national departments, shall forward to the Court of Auditors, at its request, any document or information necessary to carry out its task.

In respect of the European Investment Bank's activity in managing Union expenditure and revenue, the Court's rights of access to information held by the Bank shall be governed by an agreement between the Court, the Bank and the Commission. In the absence of an agreement, the Court shall nevertheless have access to information necessary for the audit of Union expenditure and revenue managed by the Bank.

4. The Court of Auditors shall draw up an annual report after the close of each financial year. It shall be forwarded to the other institutions of the Union and shall be published, together with the replies of these institutions to the observations of the Court of Auditors, in the *Official Journal of the European Union*.

The Court of Auditors may also, at any time, submit observations, particularly in the form of special reports, on specific questions and deliver opinions at the request of one of the other institutions of the Union.

It shall adopt its annual reports, special reports or opinions by a majority of its Members. However, it may establish internal chambers in order to adopt certain categories of reports or opinions under the conditions laid down by its Rules of Procedure.

It shall assist the European Parliament and the Council in exercising their powers of control over the implementation of the budget.

The Court of Auditors shall draw up its Rules of Procedure. Those rules shall require the approval of the Council.

CHAPTER 2

LEGAL ACTS OF THE UNION, ADOPTION PROCEDURES AND OTHER PROVISIONS

SECTION 1

THE LEGAL ACTS OF THE UNION

Article 288

(ex Article 249 TEC)

To exercise the Union's competences, the institutions shall adopt regulations, directives, decisions, recommendations and opinions.

A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods.

A decision shall be binding in its entirety. A decision which specifies those to whom it is addressed shall be binding only on them.

Recommendations and opinions shall have no binding force.

Article 289

1. The ordinary legislative procedure shall consist in the joint adoption by the European Parliament and the Council of a regulation, directive or decision on a proposal from the Commission. This procedure is defined in Article 294.

2. In the specific cases provided for by the Treaties, the adoption of a regulation, directive or decision by the European Parliament with the participation of the Council, or by the latter with the participation of the European Parliament, shall constitute a special legislative procedure.

3. Legal acts adopted by legislative procedure shall constitute legislative acts.

4. In the specific cases provided for by the Treaties, legislative acts may be adopted on the initiative of a group of Member States or of the European Parliament, on a recommendation from the European Central Bank or at the request of the Court of Justice or the European Investment Bank.

Article 290

1. A legislative act may delegate to the Commission the power to adopt non-legislative acts of general application to supplement or amend certain non-essential elements of the legislative act.

The objectives, content, scope and duration of the delegation of power shall be explicitly defined in the legislative acts. The essential elements of an area shall be reserved for the legislative act and accordingly shall not be the subject of a delegation of power.

2. Legislative acts shall explicitly lay down the conditions to which the delegation is subject; these conditions may be as follows:

- (a) the European Parliament or the Council may decide to revoke the delegation;
- (b) the delegated act may enter into force only if no objection has been expressed by the European Parliament or the Council within a period set by the legislative act.

For the purposes of (a) and (b), the European Parliament shall act by a majority of its component members, and the Council by a qualified majority.

3. The adjective 'delegated' shall be inserted in the title of delegated acts.

Article 291

1. Member States shall adopt all measures of national law necessary to implement legally binding Union acts.
2. Where uniform conditions for implementing legally binding Union acts are needed, those acts shall confer implementing powers on the Commission, or, in duly justified specific cases and in the cases provided for in Articles 24 and 26 of the Treaty on European Union, on the Council.
3. For the purposes of paragraph 2, the European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall lay down in advance the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers.
4. The word 'implementing' shall be inserted in the title of implementing acts.

Article 292

The Council shall adopt recommendations. It shall act on a proposal from the Commission in all cases where the Treaties provide that it shall adopt acts on a proposal from the Commission. It shall act unanimously in those areas in which unanimity is required for the adoption of a Union act. The Commission, and the European Central Bank in the specific cases provided for in the Treaties, shall adopt recommendations.

SECTION 2

PROCEDURES FOR THE ADOPTION OF ACTS AND OTHER PROVISIONS

Article 293

(ex Article 250 TEC)

1. Where, pursuant to the Treaties, the Council acts on a proposal from the Commission, it may amend that proposal only by acting unanimously, except in the cases referred to in paragraphs 10 and 13 of Article 294, in Articles 310, 312 and 314 and in the second paragraph of Article 315.
2. As long as the Council has not acted, the Commission may alter its proposal at any time during the procedures leading to the adoption of a Union act.

Article 294

(ex Article 251 TEC)

1. Where reference is made in the Treaties to the ordinary legislative procedure for the adoption of an act, the following procedure shall apply.
2. The Commission shall submit a proposal to the European Parliament and the Council.

First reading

3. The European Parliament shall adopt its position at first reading and communicate it to the Council.
4. If the Council approves the European Parliament's position, the act concerned shall be adopted in the wording which corresponds to the position of the European Parliament.
5. If the Council does not approve the European Parliament's position, it shall adopt its position at first reading and communicate it to the European Parliament.
6. The Council shall inform the European Parliament fully of the reasons which led it to adopt its position at first reading. The Commission shall inform the European Parliament fully of its position.

Second reading

7. If, within three months of such communication, the European Parliament:
 - (a) approves the Council's position at first reading or has not taken a decision, the act concerned shall be deemed to have been adopted in the wording which corresponds to the position of the Council;
 - (b) rejects, by a majority of its component members, the Council's position at first reading, the proposed act shall be deemed not to have been adopted;
 - (c) proposes, by a majority of its component members, amendments to the Council's position at first reading, the text thus amended shall be forwarded to the Council and to the Commission, which shall deliver an opinion on those amendments.
8. If, within three months of receiving the European Parliament's amendments, the Council, acting by a qualified majority:
 - (a) approves all those amendments, the act in question shall be deemed to have been adopted;
 - (b) does not approve all the amendments, the President of the Council, in agreement with the President of the European Parliament, shall within six weeks convene a meeting of the Conciliation Committee.
9. The Council shall act unanimously on the amendments on which the Commission has delivered a negative opinion.

Conciliation

10. The Conciliation Committee, which shall be composed of the members of the Council or their representatives and an equal number of members representing the European Parliament, shall have the task of reaching agreement on a joint text, by a qualified majority of the members of the Council or their representatives and by a majority of the members representing the European Parliament within six weeks of its being convened, on the basis of the positions of the European Parliament and the Council at second reading.

11. The Commission shall take part in the Conciliation Committee's proceedings and shall take all necessary initiatives with a view to reconciling the positions of the European Parliament and the Council.

12. If, within six weeks of its being convened, the Conciliation Committee does not approve the joint text, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.

Third reading

13. If, within that period, the Conciliation Committee approves a joint text, the European Parliament, acting by a majority of the votes cast, and the Council, acting by a qualified majority, shall each have a period of six weeks from that approval in which to adopt the act in question in accordance with the joint text. If they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.

14. The periods of three months and six weeks referred to in this Article shall be extended by a maximum of one month and two weeks respectively at the initiative of the European Parliament or the Council.

Special provisions

15. Where, in the cases provided for in the Treaties, a legislative act is submitted to the ordinary legislative procedure on the initiative of a group of Member States, on a recommendation by the European Central Bank, or at the request of the Court of Justice, paragraph 2, the second sentence of paragraph 6, and paragraph 9 shall not apply.

In such cases, the European Parliament and the Council shall communicate the proposed act to the Commission with their positions at first and second readings. The European Parliament or the Council may request the opinion of the Commission throughout the procedure, which the Commission may also deliver on its own initiative. It may also, if it deems it necessary, take part in the Conciliation Committee in accordance with paragraph 11.

Article 295

The European Parliament, the Council and the Commission shall consult each other and by common agreement make arrangements for their cooperation. To that end, they may, in compliance with the Treaties, conclude interinstitutional agreements which may be of a binding nature.

Article 296

(ex Article 253 TEC)

Where the Treaties do not specify the type of act to be adopted, the institutions shall select it on a case-by-case basis, in compliance with the applicable procedures and with the principle of proportionality.

Legal acts shall state the reasons on which they are based and shall refer to any proposals, initiatives, recommendations, requests or opinions required by the Treaties.

When considering draft legislative acts, the European Parliament and the Council shall refrain from adopting acts not provided for by the relevant legislative procedure in the area in question.

Article 297

(ex Article 254 TEC)

1. Legislative acts adopted under the ordinary legislative procedure shall be signed by the President of the European Parliament and by the President of the Council.

Legislative acts adopted under a special legislative procedure shall be signed by the President of the institution which adopted them.

Legislative acts shall be published in the *Official Journal of the European Union*. They shall enter into force on the date specified in them or, in the absence thereof, on the twentieth day following that of their publication.

2. Non-legislative acts adopted in the form of regulations, directives or decisions, when the latter do not specify to whom they are addressed, shall be signed by the President of the institution which adopted them.

Regulations and directives which are addressed to all Member States, as well as decisions which do not specify to whom they are addressed, shall be published in the *Official Journal of the European Union*. They shall enter into force on the date specified in them or, in the absence thereof, on the twentieth day following that of their publication.

Other directives, and decisions which specify to whom they are addressed, shall be notified to those to whom they are addressed and shall take effect upon such notification.

Article 298

1. In carrying out their missions, the institutions, bodies, offices and agencies of the Union shall have the support of an open, efficient and independent European administration.

2. In compliance with the Staff Regulations and the Conditions of Employment adopted on the basis of Article 336, the European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish provisions to that end.

Article 299

(ex Article 256 TEC)

Acts of the Council, the Commission or the European Central Bank which impose a pecuniary obligation on persons other than States, shall be enforceable.

Enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The order for its enforcement shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the government of each Member State shall designate for this purpose and shall make known to the Commission and to the Court of Justice of the European Union.

When these formalities have been completed on application by the party concerned, the latter may proceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the competent authority.

Enforcement may be suspended only by a decision of the Court. However, the courts of the country concerned shall have jurisdiction over complaints that enforcement is being carried out in an irregular manner.

CHAPTER 3

THE UNION'S ADVISORY BODIES

Article 300

1. The European Parliament, the Council and the Commission shall be assisted by an Economic and Social Committee and a Committee of the Regions, exercising advisory functions.
2. The Economic and Social Committee shall consist of representatives of organisations of employers, of the employed, and of other parties representative of civil society, notably in socio-economic, civic, professional and cultural areas.
3. The Committee of the Regions shall consist of representatives of regional and local bodies who either hold a regional or local authority electoral mandate or are politically accountable to an elected assembly.
4. The members of the Economic and Social Committee and of the Committee of the Regions shall not be bound by any mandatory instructions. They shall be completely independent in the performance of their duties, in the Union's general interest.
5. The rules referred to in paragraphs 2 and 3 governing the nature of the composition of the Committees shall be reviewed at regular intervals by the Council to take account of economic, social and demographic developments within the Union. The Council, on a proposal from the Commission, shall adopt decisions to that end.

SECTION 1

THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE

Article 301

(ex Article 258 TEC)

The number of members of the Economic and Social Committee shall not exceed 350.

The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, shall adopt a decision determining the Committee's composition.

The Council shall determine the allowances of members of the Committee.

Article 302

(ex Article 259 TEC)

1. The members of the Committee shall be appointed for five years. The Council shall adopt the list of members drawn up in accordance with the proposals made by each Member State. The term of office of the members of the Committee shall be renewable.

2. The Council shall act after consulting the Commission. It may obtain the opinion of European bodies which are representative of the various economic and social sectors and of civil society to which the Union's activities are of concern.

Article 303

(ex Article 260 TEC)

The Committee shall elect its chairman and officers from among its members for a term of two and a half years.

It shall adopt its Rules of Procedure.

The Committee shall be convened by its chairman at the request of the European Parliament, the Council or of the Commission. It may also meet on its own initiative.

Article 304

(ex Article 262 TEC)

The Committee shall be consulted by the European Parliament, by the Council or by the Commission where the Treaties so provide. The Committee may be consulted by these institutions in all cases in which they consider it appropriate. It may issue an opinion on its own initiative in cases in which it considers such action appropriate.

The European Parliament, the Council or the Commission shall, if it considers it necessary, set the Committee, for the submission of its opinion, a time limit which may not be less than one month from the date on which the chairman receives notification to this effect. Upon expiry of the time limit, the absence of an opinion shall not prevent further action.

The opinion of the Committee, together with a record of the proceedings, shall be forwarded to the European Parliament, to the Council and to the Commission.

SECTION 2

THE COMMITTEE OF THE REGIONS

Article 305

(ex Article 263, second, third and fourth paragraphs, TEC)

The number of members of the Committee of the Regions shall not exceed 350.

The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, shall adopt a decision determining the Committee's composition.

The members of the Committee and an equal number of alternate members shall be appointed for five years. Their term of office shall be renewable. The Council shall adopt the list of members and alternate members drawn up in accordance with the proposals made by each Member State. When the mandate referred to in Article 300(3) on the basis of which they were proposed comes to an end, the term of office of members of the Committee shall terminate automatically and they shall then be replaced for the remainder of the said term of office in accordance with the same procedure. No member of the Committee shall at the same time be a Member of the European Parliament.

Article 306
(ex Article 264 TEC)

The Committee of the Regions shall elect its chairman and officers from among its members for a term of two and a half years.

It shall adopt its Rules of Procedure.

The Committee shall be convened by its chairman at the request of the European Parliament, the Council or of the Commission. It may also meet on its own initiative.

Article 307
(ex Article 265 TEC)

The Committee of the Regions shall be consulted by the European Parliament, by the Council or by the Commission where the Treaties so provide and in all other cases, in particular those which concern cross-border cooperation, in which one of these institutions considers it appropriate.

The European Parliament, the Council or the Commission shall, if it considers it necessary, set the Committee, for the submission of its opinion, a time limit which may not be less than one month from the date on which the chairman receives notification to this effect. Upon expiry of the time limit, the absence of an opinion shall not prevent further action.

Where the Economic and Social Committee is consulted pursuant to Article 304, the Committee of the Regions shall be informed by the European Parliament, the Council or the Commission of the request for an opinion. Where it considers that specific regional interests are involved, the Committee of the Regions may issue an opinion on the matter.

It may issue an opinion on its own initiative in cases in which it considers such action appropriate.

The opinion of the Committee, together with a record of the proceedings, shall be forwarded to the European Parliament, to the Council and to the Commission.

CHAPTER 4
THE EUROPEAN INVESTMENT BANK

Article 308
(ex Article 266 TEC)

The European Investment Bank shall have legal personality.

The members of the European Investment Bank shall be the Member States.

The Statute of the European Investment Bank is laid down in a Protocol annexed to the Treaties. The Council acting unanimously in accordance with a special legislative procedure, at the request of the European Investment Bank and after consulting the European Parliament and the Commission, or on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the European Investment Bank, may amend the Statute of the Bank.

Article 309
(ex Article 267 TEC)

The task of the European Investment Bank shall be to contribute, by having recourse to the capital market and utilising its own resources, to the balanced and steady development of the internal market in the interest of the Union. For this purpose the Bank shall, operating on a non-profit-making basis, grant loans and give guarantees which facilitate the financing of the following projects in all sectors of the economy:

- (a) projects for developing less-developed regions;
- (b) projects for modernising or converting undertakings or for developing fresh activities called for by the establishment or functioning of the internal market, where these projects are of such a size or nature that they cannot be entirely financed by the various means available in the individual Member States;
- (c) projects of common interest to several Member States which are of such a size or nature that they cannot be entirely financed by the various means available in the individual Member States.

In carrying out its task, the Bank shall facilitate the financing of investment programmes in conjunction with assistance from the Structural Funds and other Union Financial Instruments.

TITLE II
FINANCIAL PROVISIONS

Article 310
(ex Article 268 TEC)

1. All items of revenue and expenditure of the Union shall be included in estimates to be drawn up for each financial year and shall be shown in the budget.

The Union's annual budget shall be established by the European Parliament and the Council in accordance with Article 314.

The revenue and expenditure shown in the budget shall be in balance.

2. The expenditure shown in the budget shall be authorised for the annual budgetary period in accordance with the regulation referred to in Article 322.

3. The implementation of expenditure shown in the budget shall require the prior adoption of a legally binding Union act providing a legal basis for its action and for the implementation of the corresponding expenditure in accordance with the regulation referred to in Article 322, except in cases for which that law provides.

4. With a view to maintaining budgetary discipline, the Union shall not adopt any act which is likely to have appreciable implications for the budget without providing an assurance that the expenditure arising from such an act is capable of being financed within the limit of the Union's own resources and in compliance with the multiannual financial framework referred to in Article 312.

5. The budget shall be implemented in accordance with the principle of sound financial management. Member States shall cooperate with the Union to ensure that the appropriations entered in the budget are used in accordance with this principle.

6. The Union and the Member States, in accordance with Article 325, shall counter fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union.

CHAPTER 1
THE UNION'S OWN RESOURCES

Article 311
(ex Article 269 TEC)

The Union shall provide itself with the means necessary to attain its objectives and carry through its policies.

Without prejudice to other revenue, the budget shall be financed wholly from own resources.

The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall unanimously and after consulting the European Parliament adopt a decision laying down the provisions relating to the system of own resources of the Union. In this context it may establish new categories of own resources or abolish an existing category. That decision shall not enter into force until it is approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

The Council, acting by means of regulations in accordance with a special legislative procedure, shall lay down implementing measures for the Union's own resources system in so far as this is provided for in the decision adopted on the basis of the third paragraph. The Council shall act after obtaining the consent of the European Parliament.

CHAPTER 2

THE MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK

Article 312

1. The multiannual financial framework shall ensure that Union expenditure develops in an orderly manner and within the limits of its own resources.

It shall be established for a period of at least five years.

The annual budget of the Union shall comply with the multiannual financial framework.

2. The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall adopt a regulation laying down the multiannual financial framework. The Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament, which shall be given by a majority of its component members.

The European Council may, unanimously, adopt a decision authorising the Council to act by a qualified majority when adopting the regulation referred to in the first subparagraph.

3. The financial framework shall determine the amounts of the annual ceilings on commitment appropriations by category of expenditure and of the annual ceiling on payment appropriations. The categories of expenditure, limited in number, shall correspond to the Union's major sectors of activity.

The financial framework shall lay down any other provisions required for the annual budgetary procedure to run smoothly.

4. Where no Council regulation determining a new financial framework has been adopted by the end of the previous financial framework, the ceilings and other provisions corresponding to the last year of that framework shall be extended until such time as that act is adopted.

5. Throughout the procedure leading to the adoption of the financial framework, the European Parliament, the Council and the Commission shall take any measure necessary to facilitate its adoption.

CHAPTER 3

THE UNION'S ANNUAL BUDGET

Article 313

(ex Article 272(1), TEC)

The financial year shall run from 1 January to 31 December.

Article 314

(ex Article 272(2) to (10), TEC)

The European Parliament and the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall establish the Union's annual budget in accordance with the following provisions.

1. With the exception of the European Central Bank, each institution shall, before 1 July, draw up estimates of its expenditure for the following financial year. The Commission shall consolidate these estimates in a draft budget, which may contain different estimates.

The draft budget shall contain an estimate of revenue and an estimate of expenditure.

2. The Commission shall submit a proposal containing the draft budget to the European Parliament and to the Council not later than 1 September of the year preceding that in which the budget is to be implemented.

The Commission may amend the draft budget during the procedure until such time as the Conciliation Committee, referred to in paragraph 5, is convened.

3. The Council shall adopt its position on the draft budget and forward it to the European Parliament not later than 1 October of the year preceding that in which the budget is to be implemented. The Council shall inform the European Parliament in full of the reasons which led it to adopt its position.

4. If, within forty-two days of such communication, the European Parliament:

(a) approves the position of the Council, the budget shall be adopted;

(b) has not taken a decision, the budget shall be deemed to have been adopted;

(c) adopts amendments by a majority of its component members, the amended draft shall be forwarded to the Council and to the Commission. The President of the European Parliament, in agreement with the President of the Council, shall immediately convene a meeting of the

Conciliation Committee. However, if within ten days of the draft being forwarded the Council informs the European Parliament that it has approved all its amendments, the Conciliation Committee shall not meet.

5. The Conciliation Committee, which shall be composed of the members of the Council or their representatives and an equal number of members representing the European Parliament, shall have the task of reaching agreement on a joint text, by a qualified majority of the members of the Council or their representatives and by a majority of the representatives of the European Parliament within twenty-one days of its being convened, on the basis of the positions of the European Parliament and the Council.

The Commission shall take part in the Conciliation Committee's proceedings and shall take all the necessary initiatives with a view to reconciling the positions of the European Parliament and the Council.

6. If, within the twenty-one days referred to in paragraph 5, the Conciliation Committee agrees on a joint text, the European Parliament and the Council shall each have a period of fourteen days from the date of that agreement in which to approve the joint text.

7. If, within the period of fourteen days referred to in paragraph 6:

- (a) the European Parliament and the Council both approve the joint text or fail to take a decision, or if one of these institutions approves the joint text while the other one fails to take a decision, the budget shall be deemed to be definitively adopted in accordance with the joint text; or
- (b) the European Parliament, acting by a majority of its component members, and the Council both reject the joint text, or if one of these institutions rejects the joint text while the other one fails to take a decision, a new draft budget shall be submitted by the Commission; or
- (c) the European Parliament, acting by a majority of its component members, rejects the joint text while the Council approves it, a new draft budget shall be submitted by the Commission; or
- (d) the European Parliament approves the joint text whilst the Council rejects it, the European Parliament may, within fourteen days from the date of the rejection by the Council and acting by a majority of its component members and three-fifths of the votes cast, decide to confirm all or some of the amendments referred to in paragraph 4(c). Where a European Parliament amendment is not confirmed, the position agreed in the Conciliation Committee on the budget heading which is the subject of the amendment shall be retained. The budget shall be deemed to be definitively adopted on this basis.

8. If, within the twenty-one days referred to in paragraph 5, the Conciliation Committee does not agree on a joint text, a new draft budget shall be submitted by the Commission.

9. When the procedure provided for in this Article has been completed, the President of the European Parliament shall declare that the budget has been definitively adopted.

10. Each institution shall exercise the powers conferred upon it under this Article in compliance with the Treaties and the acts adopted thereunder, with particular regard to the Union's own resources and the balance between revenue and expenditure.

Article 315

(ex Article 273 TEC)

If, at the beginning of a financial year, the budget has not yet been definitively adopted, a sum equivalent to not more than one twelfth of the budget appropriations for the preceding financial year may be spent each month in respect of any chapter of the budget in accordance with the provisions of the Regulations made pursuant to Article 322; that sum shall not, however, exceed one twelfth of the appropriations provided for in the same chapter of the draft budget.

The Council on a proposal by the Commission, may, provided that the other conditions laid down in the first paragraph are observed, authorise expenditure in excess of one twelfth in accordance with the regulations made pursuant to Article 322. The Council shall forward the decision immediately to the European Parliament.

The decision referred to in the second paragraph shall lay down the necessary measures relating to resources to ensure application of this Article, in accordance with the acts referred to in Article 311.

It shall enter into force thirty days following its adoption if the European Parliament, acting by a majority of its component Members, has not decided to reduce this expenditure within that time-limit.

Article 316

(ex Article 271 TEC)

In accordance with conditions to be laid down pursuant to Article 322, any appropriations, other than those relating to staff expenditure, that are unexpended at the end of the financial year may be carried forward to the next financial year only.

Appropriations shall be classified under different chapters grouping items of expenditure according to their nature or purpose and subdivided in accordance with the regulations made pursuant to Article 322.

The expenditure of the European Parliament, the European Council and the Council, the Commission and the Court of Justice of the European Union shall be set out in separate parts of the budget, without prejudice to special arrangements for certain common items of expenditure.

CHAPTER 4
IMPLEMENTATION OF THE BUDGET AND DISCHARGE

Article 317
(ex Article 274 TEC)

The Commission shall implement the budget in cooperation with the Member States, in accordance with the provisions of the regulations made pursuant to Article 322, on its own responsibility and within the limits of the appropriations, having regard to the principles of sound financial management. Member States shall cooperate with the Commission to ensure that the appropriations are used in accordance with the principles of sound financial management.

The regulations shall lay down the control and audit obligations of the Member States in the implementation of the budget and the resulting responsibilities. They shall also lay down the responsibilities and detailed rules for each institution concerning its part in effecting its own expenditure.

Within the budget, the Commission may, subject to the limits and conditions laid down in the regulations made pursuant to Article 322, transfer appropriations from one chapter to another or from one subdivision to another.

Article 318
(ex Article 275 TEC)

The Commission shall submit annually to the European Parliament and to the Council the accounts of the preceding financial year relating to the implementation of the budget. The Commission shall also forward to them a financial statement of the assets and liabilities of the Union.

The Commission shall also submit to the European Parliament and to the Council an evaluation report on the Union's finances based on the results achieved, in particular in relation to the indications given by the European Parliament and the Council pursuant to Article 319.

Article 319
(ex Article 276 TEC)

1. The European Parliament, acting on a recommendation from the Council, shall give a discharge to the Commission in respect of the implementation of the budget. To this end, the Council and the European Parliament in turn shall examine the accounts, the financial statement and the evaluation report referred to in Article 318, the annual report by the Court of Auditors together with the replies of the institutions under audit to the observations of the Court of Auditors, the statement of assurance referred to in Article 287(1), second subparagraph and any relevant special reports by the Court of Auditors.

2. Before giving a discharge to the Commission, or for any other purpose in connection with the exercise of its powers over the implementation of the budget, the European Parliament may ask to hear the Commission give evidence with regard to the execution of expenditure or the operation of financial control systems. The Commission shall submit any necessary information to the European Parliament at the latter's request.

3. The Commission shall take all appropriate steps to act on the observations in the decisions giving discharge and on other observations by the European Parliament relating to the execution of expenditure, as well as on comments accompanying the recommendations on discharge adopted by the Council.

At the request of the European Parliament or the Council, the Commission shall report on the measures taken in the light of these observations and comments and in particular on the instructions given to the departments which are responsible for the implementation of the budget. These reports shall also be forwarded to the Court of Auditors.

CHAPTER 5

COMMON PROVISIONS

Article 320

(ex Article 277 TEC)

The multiannual financial framework and the annual budget shall be drawn up in euro.

Article 321

(ex Article 278 TEC)

The Commission may, provided it notifies the competent authorities of the Member States concerned, transfer into the currency of one of the Member States its holdings in the currency of another Member State, to the extent necessary to enable them to be used for purposes which come within the scope of the Treaties. The Commission shall as far as possible avoid making such transfers if it possesses cash or liquid assets in the currencies which it needs.

The Commission shall deal with each Member State through the authority designated by the State concerned. In carrying out financial operations the Commission shall employ the services of the bank of issue of the Member State concerned or of any other financial institution approved by that State.

Article 322

(ex Article 279 TEC)

1. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, and after consulting the Court of Auditors, shall adopt by means of regulations:

(a) the financial rules which determine in particular the procedure to be adopted for establishing and implementing the budget and for presenting and auditing accounts;

(b) rules providing for checks on the responsibility of financial actors, in particular authorising officers and accounting officers.

2. The Council, acting on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the Court of Auditors, shall determine the methods and procedure whereby the budget revenue provided under the arrangements relating to the Union's own resources shall be made available to the Commission, and determine the measures to be applied, if need be, to meet cash requirements.

Article 323

The European Parliament, the Council and the Commission shall ensure that the financial means are made available to allow the Union to fulfil its legal obligations in respect of third parties.

Article 324

Regular meetings between the Presidents of the European Parliament, the Council and the Commission shall be convened, on the initiative of the Commission, under the budgetary procedures referred to in this Title. The Presidents shall take all the necessary steps to promote consultation and the reconciliation of the positions of the institutions over which they preside in order to facilitate the implementation of this Title.

CHAPTER 6

COMBATTING FRAUD

Article 325

(ex Article 280 TEC)

1. The Union and the Member States shall counter fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union through measures to be taken in accordance with this Article, which shall act as a deterrent and be such as to afford effective protection in the Member States, and in all the Union's institutions, bodies, offices and agencies.

2. Member States shall take the same measures to counter fraud affecting the financial interests of the Union as they take to counter fraud affecting their own financial interests.

3. Without prejudice to other provisions of the Treaties, the Member States shall coordinate their action aimed at protecting the financial interests of the Union against fraud. To this end they shall organise, together with the Commission, close and regular cooperation between the competent authorities.

4. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, after consulting the Court of Auditors, shall adopt the necessary measures in the fields of the prevention of and fight against fraud affecting the financial interests of the Union with a view to affording effective and equivalent protection in the Member States and in all the Union's institutions, bodies, offices and agencies.

5. The Commission, in cooperation with Member States, shall each year submit to the European Parliament and to the Council a report on the measures taken for the implementation of this Article.

TITLE III ENHANCED COOPERATION

Article 326

(ex Articles 27a to 27e, 40 to 40b and 43 to 45 TEU and ex Articles 11 and 11a TEC)

Any enhanced cooperation shall comply with the Treaties and Union law.

Such cooperation shall not undermine the internal market or economic, social and territorial cohesion. It shall not constitute a barrier to or discrimination in trade between Member States, nor shall it distort competition between them.

Article 327

(ex Articles 27a to 27e, 40 to 40b and 43 to 45 TEU and ex Articles 11 and 11a TEC)

Any enhanced cooperation shall respect the competences, rights and obligations of those Member States which do not participate in it. Those Member States shall not impede its implementation by the participating Member States.

Article 328

(ex Articles 27a to 27e, 40 to 40b and 43 to 45 TEU and ex Articles 11 and 11a TEC)

1. When enhanced cooperation is being established, it shall be open to all Member States, subject to compliance with any conditions of participation laid down by the authorising decision. It shall also be open to them at any other time, subject to compliance with the acts already adopted within that framework, in addition to those conditions.

The Commission and the Member States participating in enhanced cooperation shall ensure that they promote participation by as many Member States as possible.

2. The Commission and, where appropriate, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall keep the European Parliament and the Council regularly informed regarding developments in enhanced cooperation.

Article 329

(ex Articles 27a to 27e, 40 to 40b and 43 to 45 TEU and ex Articles 11 and 11a TEC)

1. Member States which wish to establish enhanced cooperation between themselves in one of the areas covered by the Treaties, with the exception of fields of exclusive competence and the common foreign and security policy, shall address a request to the Commission, specifying the scope and objectives of the enhanced cooperation proposed. The Commission may submit a proposal to the Council to that effect. In the event of the Commission not submitting a proposal, it shall inform the Member States concerned of the reasons for not doing so.

Authorisation to proceed with the enhanced cooperation referred to in the first subparagraph shall be granted by the Council, on a proposal from the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament.

2. The request of the Member States which wish to establish enhanced cooperation between themselves within the framework of the common foreign and security policy shall be addressed to the Council. It shall be forwarded to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, who shall give an opinion on whether the enhanced cooperation proposed is consistent with the Union's common foreign and security policy, and to the Commission, which shall give its opinion in particular on whether the enhanced cooperation proposed is consistent with other Union policies. It shall also be forwarded to the European Parliament for information.

Authorisation to proceed with enhanced cooperation shall be granted by a decision of the Council acting unanimously.

Article 330

(ex Articles 27a to 27e, 40 to 40b and 43 to 45 TEU and ex Articles 11 and 11a TEC)

All members of the Council may participate in its deliberations, but only members of the Council representing the Member States participating in enhanced cooperation shall take part in the vote.

Unanimity shall be constituted by the votes of the representatives of the participating Member States only.

A qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3).

Article 331

(ex Articles 27a to 27e, 40 to 40b and 43 to 45 TEU and ex Articles 11 and 11a TEC)

1. Any Member State which wishes to participate in enhanced cooperation in progress in one of the areas referred to in Article 329(1) shall notify its intention to the Council and the Commission.

The Commission shall, within four months of the date of receipt of the notification, confirm the participation of the Member State concerned. It shall note where necessary that the conditions of participation have been fulfilled and shall adopt any transitional measures necessary with regard to the application of the acts already adopted within the framework of enhanced cooperation.

However, if the Commission considers that the conditions of participation have not been fulfilled, it shall indicate the arrangements to be adopted to fulfil those conditions and shall set a deadline for re-examining the request. On the expiry of that deadline, it shall re-examine the request, in accordance with the procedure set out in the second subparagraph. If the Commission considers that the conditions of participation have still not been met, the Member State concerned may refer the matter to the Council, which shall decide on the request. The Council shall act in accordance with Article 330. It may also adopt the transitional measures referred to in the second subparagraph on a proposal from the Commission.

2. Any Member State which wishes to participate in enhanced cooperation in progress in the framework of the common foreign and security policy shall notify its intention to the Council, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Commission.

The Council shall confirm the participation of the Member State concerned, after consulting the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and after noting, where necessary, that the conditions of participation have been fulfilled. The Council, on a proposal from the High Representative, may also adopt any transitional measures necessary with regard to the application of the acts already adopted within the framework of enhanced cooperation. However, if the Council considers that the conditions of participation have not been fulfilled, it shall indicate the arrangements to be adopted to fulfil those conditions and shall set a deadline for re-examining the request for participation.

For the purposes of this paragraph, the Council shall act unanimously and in accordance with Article 330.

Article 332

(ex Articles 27a to 27e, 40 to 40b and 43 to 45 TEU and ex Articles 11 and 11a TEC)

Expenditure resulting from implementation of enhanced cooperation, other than administrative costs entailed for the institutions, shall be borne by the participating Member States, unless all members of the Council, acting unanimously after consulting the European Parliament, decide otherwise.

Article 333

(ex Articles 27a to 27e, 40 to 40b and 43 to 45 TEU and ex Articles 11 and 11a TEC)

1. Where a provision of the Treaties which may be applied in the context of enhanced cooperation stipulates that the Council shall act unanimously, the Council, acting unanimously in accordance with the arrangements laid down in Article 330, may adopt a decision stipulating that it will act by a qualified majority.

2. Where a provision of the Treaties which may be applied in the context of enhanced cooperation stipulates that the Council shall adopt acts under a special legislative procedure, the Council, acting unanimously in accordance with the arrangements laid down in Article 330, may adopt a decision stipulating that it will act under the ordinary legislative procedure. The Council shall act after consulting the European Parliament.

3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to decisions having military or defence implications.

Article 334

(ex Articles 27a to 27e, 40 to 40b and 43 to 45 TEU and ex Articles 11 and 11a TEC)

The Council and the Commission shall ensure the consistency of activities undertaken in the context of enhanced cooperation and the consistency of such activities with the policies of the Union, and shall cooperate to that end.

PART SEVEN GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Article 335

(ex Article 282 TEC)

In each of the Member States, the Union shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under their laws; it may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings. To this end, the Union shall be represented by the Commission. However, the Union shall be represented by each of the institutions, by virtue of their administrative autonomy, in matters relating to their respective operation.

Article 336

(ex Article 283 TEC)

The European Parliament and the Council shall, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the other institutions concerned, lay down the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of other servants of the Union.

Article 337

(ex Article 284 TEC)

The Commission may, within the limits and under conditions laid down by the Council acting by a simple majority in accordance with the provisions of the Treaties, collect any information and carry out any checks required for the performance of the tasks entrusted to it.

Article 338

(ex Article 285 TEC)

1. Without prejudice to Article 5 of the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures for the production of statistics where necessary for the performance of the activities of the Union.

2. The production of Union statistics shall conform to impartiality, reliability, objectivity, scientific independence, cost-effectiveness and statistical confidentiality; it shall not entail excessive burdens on economic operators.

Article 339

(ex Article 287 TEC)

The members of the institutions of the Union, the members of committees, and the officials and other servants of the Union shall be required, even after their duties have ceased, not to disclose information of the kind covered by the obligation of professional secrecy, in particular information about undertakings, their business relations or their cost components.

Article 340

(ex Article 288 TEC)

The contractual liability of the Union shall be governed by the law applicable to the contract in question.

In the case of non-contractual liability, the Union shall, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States, make good any damage caused by its institutions or by its servants in the performance of their duties.

Notwithstanding the second paragraph, the European Central Bank shall, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States, make good any damage caused by it or by its servants in the performance of their duties.

The personal liability of its servants towards the Union shall be governed by the provisions laid down in their Staff Regulations or in the Conditions of Employment applicable to them.

Article 341

(ex Article 289 TEC)

The seat of the institutions of the Union shall be determined by common accord of the governments of the Member States.

Article 342

(ex Article 290 TEC)

The rules governing the languages of the institutions of the Union shall, without prejudice to the provisions contained in the Statute of the Court of Justice of the European Union, be determined by the Council, acting unanimously by means of regulations.

Article 343

(ex Article 291 TEC)

The Union shall enjoy in the territories of the Member States such privileges and immunities as are necessary for the performance of its tasks, under the conditions laid down in the Protocol of 8 April 1965 on the privileges and immunities of the European Union. The same shall apply to the European Central Bank and the European Investment Bank.

Article 344

(ex Article 292 TEC)

Member States undertake not to submit a dispute concerning the interpretation or application of the Treaties to any method of settlement other than those provided for therein.

Article 345

(ex Article 295 TEC)

The Treaties shall in no way prejudice the rules in Member States governing the system of property ownership.

Article 346

(ex Article 296 TEC)

1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
 - (a) no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
 - (b) any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions of competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.
2. The Council may, acting unanimously on a proposal from the Commission, make changes to the list, which it drew up on 15 April 1958, of the products to which the provisions of paragraph 1(b) apply.

Article 347

(ex Article 297 TEC)

Member States shall consult each other with a view to taking together the steps needed to prevent the functioning of the internal market being affected by measures which a Member State may be called upon to take in the event of serious internal disturbances affecting the maintenance of law and order, in the event of war, serious international tension constituting a threat of war, or in order to carry out obligations it has accepted for the purpose of maintaining peace and international security.

Article 348

(ex Article 298 TEC)

If measures taken in the circumstances referred to in Articles 346 and 347 have the effect of distorting the conditions of competition in the internal market, the Commission shall, together with the State concerned, examine how these measures can be adjusted to the rules laid down in the Treaties.

By way of derogation from the procedure laid down in Articles 258 and 259, the Commission or any Member State may bring the matter directly before the Court of Justice if it considers that another Member State is making improper use of the powers provided for in Articles 346 and 347. The Court of Justice shall give its ruling in camera.

Article 349

(ex Article 299(2), second, third and fourth subparagraphs, TEC)

Taking account of the structural social and economic situation of Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, the Azores, Madeira and the Canary Islands, which is compounded by their remoteness, insularity, small size, difficult topography and climate, economic dependence on a few products, the permanence and combination of which severely restrain their development, the Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, shall adopt specific measures aimed, in particular, at laying down the conditions of application of the Treaties to those regions, including common policies. Where the specific measures in question are adopted by the Council in accordance with a special legislative procedure, it shall also act on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament.

The measures referred to in the first paragraph concern in particular areas such as customs and trade policies, fiscal policy, free zones, agriculture and fisheries policies, conditions for supply of raw materials and essential consumer goods, State aids and conditions of access to structural funds and to horizontal Union programmes.

The Council shall adopt the measures referred to in the first paragraph taking into account the special characteristics and constraints of the outermost regions without undermining the integrity and the coherence of the Union legal order, including the internal market and common policies.

Article 350

(ex Article 306 TEC)

The provisions of the Treaties shall not preclude the existence or completion of regional unions between Belgium and Luxembourg, or between Belgium, Luxembourg and the Netherlands, to the extent that the objectives of these regional unions are not attained by application of the Treaties.

Article 351

(ex Article 307 TEC)

The rights and obligations arising from agreements concluded before 1 January 1958 or, for acceding States, before the date of their accession, between one or more Member States on the one hand, and one or more third countries on the other, shall not be affected by the provisions of the Treaties.

To the extent that such agreements are not compatible with the Treaties, the Member State or States concerned shall take all appropriate steps to eliminate the incompatibilities established. Member States shall, where necessary, assist each other to this end and shall, where appropriate, adopt a common attitude.

In applying the agreements referred to in the first paragraph, Member States shall take into account the fact that the advantages accorded under the Treaties by each Member State form an integral part of the establishment of the Union and are thereby inseparably linked with the creation of common institutions, the conferring of powers upon them and the granting of the same advantages by all the other Member States.

Article 352

(ex Article 308 TEC)

1. If action by the Union should prove necessary, within the framework of the policies defined in the Treaties, to attain one of the objectives set out in the Treaties, and the Treaties have not provided the necessary powers, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament, shall adopt the appropriate measures. Where the measures in question are adopted by the Council in accordance with a special legislative procedure, it shall also act unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament.

2. Using the procedure for monitoring the subsidiarity principle referred to in Article 5(3) of the Treaty on European Union, the Commission shall draw national Parliaments' attention to proposals based on this Article.

3. Measures based on this Article shall not entail harmonisation of Member States' laws or regulations in cases where the Treaties exclude such harmonisation.

4. This Article cannot serve as a basis for attaining objectives pertaining to the common foreign and security policy and any acts adopted pursuant to this Article shall respect the limits set out in Article 40, second paragraph, of the Treaty on European Union.

Article 353

Article 48(7) of the Treaty on European Union shall not apply to the following Articles:

- Article 311, third and fourth paragraphs,
- Article 312(2), first subparagraph,
- Article 352, and
- Article 354.

Article 354

(ex Article 309 TEC)

For the purposes of Article 7 of the Treaty on European Union on the suspension of certain rights resulting from Union membership, the member of the European Council or of the Council representing the Member State in question shall not take part in the vote and the Member State in question shall not be counted in the calculation of the one third or four fifths of Member States referred to in paragraphs 1 and 2 of that Article. Abstentions by members present in person or represented shall not prevent the adoption of decisions referred to in paragraph 2 of that Article.

For the adoption of the decisions referred to in paragraphs 3 and 4 of Article 7 of the Treaty on European Union, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3)(b) of this Treaty.

Where, following a decision to suspend voting rights adopted pursuant to paragraph 3 of Article 7 of the Treaty on European Union, the Council acts by a qualified majority on the basis of a provision of the Treaties, that qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3)(b) of this Treaty, or, where the Council acts on a proposal from the Commission or from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, in accordance with Article 238(3)(a).

For the purposes of Article 7 of the Treaty on European Union, the European Parliament shall act by a two-thirds majority of the votes cast, representing the majority of its component Members.

Article 355

(ex Article 299(2), first subparagraph, and Article 299(3) to (6) TEC)

In addition to the provisions of Article 52 of the Treaty on European Union relating to the territorial scope of the Treaties, the following provisions shall apply:

1. The provisions of the Treaties shall apply to Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, the Azores, Madeira and the Canary Islands in accordance with Article 349.
2. The special arrangements for association set out in Part Four shall apply to the overseas countries and territories listed in Annex II.

The Treaties shall not apply to those overseas countries and territories having special relations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland which are not included in the aforementioned list.

3. The provisions of the Treaties shall apply to the European territories for whose external relations a Member State is responsible.

4. The provisions of the Treaties shall apply to the Åland Islands in accordance with the provisions set out in Protocol 2 to the Act concerning the conditions of accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden.

5. Notwithstanding Article 52 of the Treaty on European Union and paragraphs 1 to 4 of this Article:

(a) the Treaties shall not apply to the Faeroe Islands;

(b) the Treaties shall not apply to the United Kingdom Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia in Cyprus except to the extent necessary to ensure the implementation of the arrangements set out in the Protocol on the Sovereign Base Areas of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Cyprus annexed to the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union and in accordance with the terms of that Protocol;

(c) the Treaties shall apply to the Channel Islands and the Isle of Man only to the extent necessary to ensure the implementation of the arrangements for those islands set out in the Treaty concerning the accession of new Member States to the European Economic Community and to the European Atomic Energy Community signed on 22 January 1972.

6. The European Council may, on the initiative of the Member State concerned, adopt a decision amending the status, with regard to the Union, of a Danish, French or Netherlands country or territory referred to in paragraphs 1 and 2. The European Council shall act unanimously after consulting the Commission.

Article 356

(ex Article 312 TEC)

This Treaty is concluded for an unlimited period.

Article 357

(ex Article 313 TEC)

This Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements. The Instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Italian Republic.

This Treaty shall enter into force on the first day of the month following the deposit of the Instrument of ratification by the last signatory State to take this step. If, however, such deposit is made less than 15 days before the beginning of the following month, this Treaty shall not enter into force until the first day of the second month after the date of such deposit.

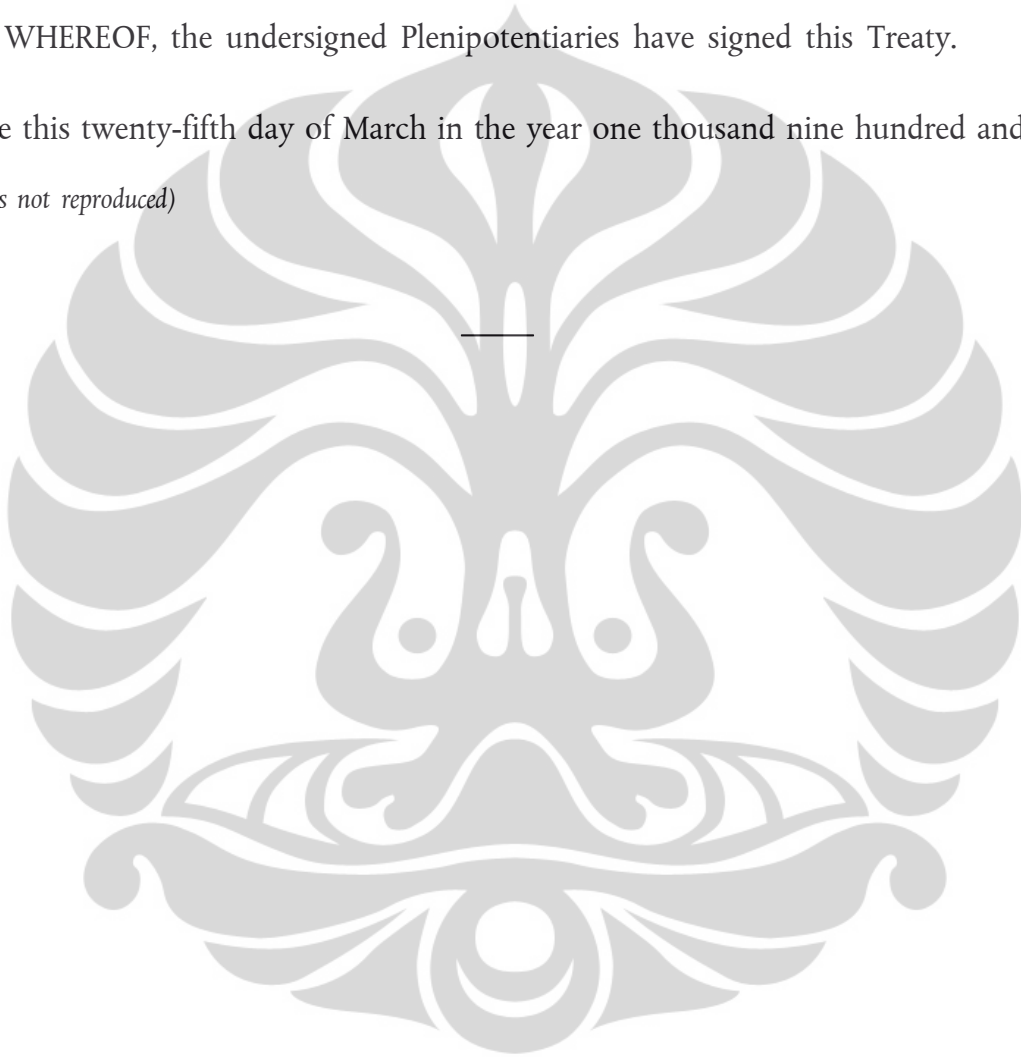
Article 358

The provisions of Article 55 of the Treaty on European Union shall apply to this Treaty.

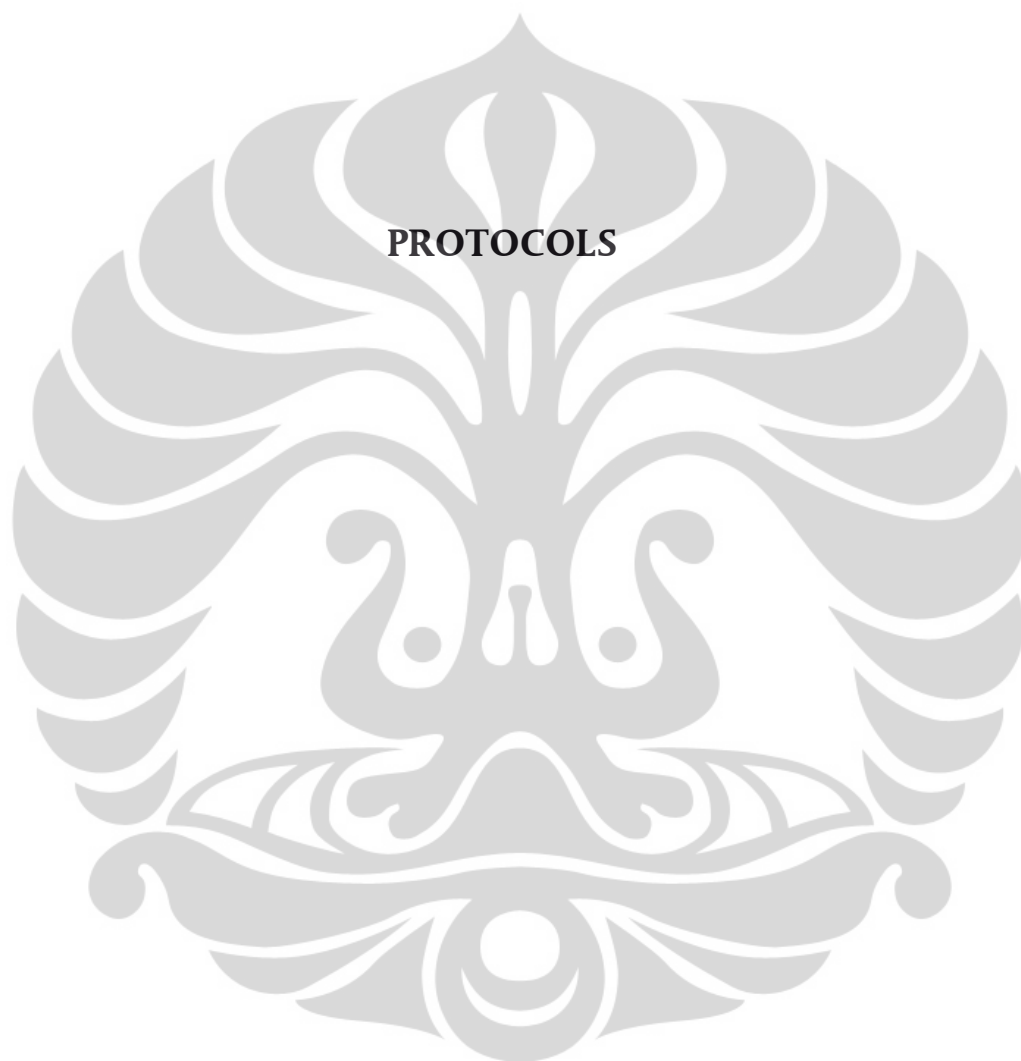
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

Done at Rome this twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty-seven.

(List of signatories not reproduced)









PROTOCOL (No 1)
ON THE ROLE OF NATIONAL PARLIAMENTS IN THE
EUROPEAN UNION

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

RECALLING that the way in which national Parliaments scrutinise their governments in relation to the activities of the Union is a matter for the particular constitutional organisation and practice of each Member State,

DESIRING to encourage greater involvement of national Parliaments in the activities of the European Union and to enhance their ability to express their views on draft legislative acts of the Union as well as on other matters which may be of particular interest to them,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community:

TITLE I

INFORMATION FOR NATIONAL PARLIAMENTS

Article 1

Commission consultation documents (green and white papers and communications) shall be forwarded directly by the Commission to national Parliaments upon publication. The Commission shall also forward the annual legislative programme as well as any other instrument of legislative planning or policy to national Parliaments, at the same time as to the European Parliament and the Council.

Article 2

Draft legislative acts sent to the European Parliament and to the Council shall be forwarded to national Parliaments.

For the purposes of this Protocol, 'draft legislative acts' shall mean proposals from the Commission, initiatives from a group of Member States, initiatives from the European Parliament, requests from the Court of Justice, recommendations from the European Central Bank and requests from the European Investment Bank, for the adoption of a legislative act.

Draft legislative acts originating from the Commission shall be forwarded to national Parliaments directly by the Commission, at the same time as to the European Parliament and the Council.

Draft legislative acts originating from the European Parliament shall be forwarded to national Parliaments directly by the European Parliament.

Draft legislative acts originating from a group of Member States, the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank shall be forwarded to national Parliaments by the Council.

Article 3

National Parliaments may send to the Presidents of the European Parliament, the Council and the Commission a reasoned opinion on whether a draft legislative act complies with the principle of subsidiarity, in accordance with the procedure laid down in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality.

If the draft legislative act originates from a group of Member States, the President of the Council shall forward the reasoned opinion or opinions to the governments of those Member States.

If the draft legislative act originates from the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank, the President of the Council shall forward the reasoned opinion or opinions to the institution or body concerned.

Article 4

An eight-week period shall elapse between a draft legislative act being made available to national Parliaments in the official languages of the Union and the date when it is placed on a provisional agenda for the Council for its adoption or for adoption of a position under a legislative procedure. Exceptions shall be possible in cases of urgency, the reasons for which shall be stated in the act or position of the Council. Save in urgent cases for which due reasons have been given, no agreement may be reached on a draft legislative act during those eight weeks. Save in urgent cases for which due reasons have been given, a ten-day period shall elapse between the placing of a draft legislative act on the provisional agenda for the Council and the adoption of a position.

Article 5

The agendas for and the outcome of meetings of the Council, including the minutes of meetings where the Council is deliberating on draft legislative acts, shall be forwarded directly to national Parliaments, at the same time as to Member States' governments.

Article 6

When the European Council intends to make use of the first or second subparagraphs of Article 48(7) of the Treaty on European Union, national Parliaments shall be informed of the initiative of the European Council at least six months before any decision is adopted.

Article 7

The Court of Auditors shall forward its annual report to national Parliaments, for information, at the same time as to the European Parliament and to the Council.

Article 8

Where the national Parliamentary system is not unicameral, Articles 1 to 7 shall apply to the component chambers.

TITLE II

INTERPARLIAMENTARY COOPERATION*Article 9*

The European Parliament and national Parliaments shall together determine the organisation and promotion of effective and regular interparliamentary cooperation within the Union.

Article 10

A conference of Parliamentary Committees for Union Affairs may submit any contribution it deems appropriate for the attention of the European Parliament, the Council and the Commission. That conference shall in addition promote the exchange of information and best practice between national Parliaments and the European Parliament, including their special committees. It may also organise interparliamentary conferences on specific topics, in particular to debate matters of common foreign and security policy, including common security and defence policy. Contributions from the conference shall not bind national Parliaments and shall not prejudice their positions.

PROTOCOL (No 2)
ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF
SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

WISHING to ensure that decisions are taken as closely as possible to the citizens of the Union,

RESOLVED to establish the conditions for the application of the principles of subsidiarity and proportionality, as laid down in Article 5 of the Treaty on European Union, and to establish a system for monitoring the application of those principles,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

Each institution shall ensure constant respect for the principles of subsidiarity and proportionality, as laid down in Article 5 of the Treaty on European Union.

Article 2

Before proposing legislative acts, the Commission shall consult widely. Such consultations shall, where appropriate, take into account the regional and local dimension of the action envisaged. In cases of exceptional urgency, the Commission shall not conduct such consultations. It shall give reasons for its decision in its proposal.

Article 3

For the purposes of this Protocol, 'draft legislative acts' shall mean proposals from the Commission, initiatives from a group of Member States, initiatives from the European Parliament, requests from the Court of Justice, recommendations from the European Central Bank and requests from the European Investment Bank, for the adoption of a legislative act.

Article 4

The Commission shall forward its draft legislative acts and its amended drafts to national Parliaments at the same time as to the Union legislator.

The European Parliament shall forward its draft legislative acts and its amended drafts to national Parliaments.

The Council shall forward draft legislative acts originating from a group of Member States, the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank and amended drafts to national Parliaments.

Upon adoption, legislative resolutions of the European Parliament and positions of the Council shall be forwarded by them to national Parliaments.

Article 5

Draft legislative acts shall be justified with regard to the principles of subsidiarity and proportionality. Any draft legislative act should contain a detailed statement making it possible to appraise compliance with the principles of subsidiarity and proportionality. This statement should contain some assessment of the proposal's financial impact and, in the case of a directive, of its implications for the rules to be put in place by Member States, including, where necessary, the regional legislation. The reasons for concluding that a Union objective can be better achieved at Union level shall be substantiated by qualitative and, wherever possible, quantitative indicators. Draft legislative acts shall take account of the need for any burden, whether financial or administrative, falling upon the Union, national governments, regional or local authorities, economic operators and citizens, to be minimised and commensurate with the objective to be achieved.

Article 6

Any national Parliament or any chamber of a national Parliament may, within eight weeks from the date of transmission of a draft legislative act, in the official languages of the Union, send to the Presidents of the European Parliament, the Council and the Commission a reasoned opinion stating why it considers that the draft in question does not comply with the principle of subsidiarity. It will be for each national Parliament or each chamber of a national Parliament to consult, where appropriate, regional parliaments with legislative powers.

If the draft legislative act originates from a group of Member States, the President of the Council shall forward the opinion to the governments of those Member States.

If the draft legislative act originates from the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank, the President of the Council shall forward the opinion to the institution or body concerned.

Article 7

1. The European Parliament, the Council and the Commission, and, where appropriate, the group of Member States, the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank, if the draft legislative act originates from them, shall take account of the reasoned opinions issued by national Parliaments or by a chamber of a national Parliament.

Each national Parliament shall have two votes, shared out on the basis of the national Parliamentary system. In the case of a bicameral Parliamentary system, each of the two chambers shall have one vote.

2. Where reasoned opinions on a draft legislative act's non-compliance with the principle of subsidiarity represent at least one third of all the votes allocated to the national Parliaments in accordance with the second subparagraph of paragraph 1, the draft must be reviewed. This threshold shall be a quarter in the case of a draft legislative act submitted on the basis of Article 76 of the Treaty on the Functioning of the European Union on the area of freedom, security and justice.

After such review, the Commission or, where appropriate, the group of Member States, the European Parliament, the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank, if the draft legislative act originates from them, may decide to maintain, amend or withdraw the draft. Reasons must be given for this decision.

3. Furthermore, under the ordinary legislative procedure, where reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity represent at least a simple majority of the votes allocated to the national Parliaments in accordance with the second subparagraph of paragraph 1, the proposal must be reviewed. After such review, the Commission may decide to maintain, amend or withdraw the proposal.

If it chooses to maintain the proposal, the Commission will have, in a reasoned opinion, to justify why it considers that the proposal complies with the principle of subsidiarity. This reasoned opinion, as well as the reasoned opinions of the national Parliaments, will have to be submitted to the Union legislator, for consideration in the procedure:

- (a) before concluding the first reading, the legislator (the European Parliament and the Council) shall consider whether the legislative proposal is compatible with the principle of subsidiarity, taking particular account of the reasons expressed and shared by the majority of national Parliaments as well as the reasoned opinion of the Commission;
- (b) if, by a majority of 55 % of the members of the Council or a majority of the votes cast in the European Parliament, the legislator is of the opinion that the proposal is not compatible with the principle of subsidiarity, the legislative proposal shall not be given further consideration.

Article 8

The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in actions on grounds of infringement of the principle of subsidiarity by a legislative act, brought in accordance with the rules laid down in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union by Member States, or notified by them in accordance with their legal order on behalf of their national Parliament or a chamber thereof.

In accordance with the rules laid down in the said Article, the Committee of the Regions may also bring such actions against legislative acts for the adoption of which the Treaty on the Functioning of the European Union provides that it be consulted.

Article 9

The Commission shall submit each year to the European Council, the European Parliament, the Council and national Parliaments a report on the application of Article 5 of the Treaty on European Union. This annual report shall also be forwarded to the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.



PROTOCOL (No 3)
ON THE STATUTE OF THE COURT OF JUSTICE OF
THE EUROPEAN UNION

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to lay down the Statute of the Court of Justice of the European Union provided for in Article 281 of the Treaty on the Functioning of the European Union,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community:

Article 1

The Court of Justice of the European Union shall be constituted and shall function in accordance with the provisions of the Treaties, of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EAEC Treaty) and of this Statute.

TITLE I

JUDGES AND ADVOCATES-GENERAL

Article 2

Before taking up his duties each Judge shall, before the Court of Justice sitting in open court, take an oath to perform his duties impartially and conscientiously and to preserve the secrecy of the deliberations of the Court.

Article 3

The Judges shall be immune from legal proceedings. After they have ceased to hold office, they shall continue to enjoy immunity in respect of acts performed by them in their official capacity, including words spoken or written.

The Court of Justice, sitting as a full Court, may waive the immunity. If the decision concerns a member of the General Court or of a specialised court, the Court shall decide after consulting the court concerned.

Where immunity has been waived and criminal proceedings are instituted against a Judge, he shall be tried, in any of the Member States, only by the court competent to judge the members of the highest national judiciary.

Articles 11 to 14 and Article 17 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Union shall apply to the Judges, Advocates-General, Registrar and Assistant Rapporteurs of the Court of Justice of the European Union, without prejudice to the provisions relating to immunity from legal proceedings of Judges which are set out in the preceding paragraphs.

Article 4

The Judges may not hold any political or administrative office.

They may not engage in any occupation, whether gainful or not, unless exemption is exceptionally granted by the Council, acting by a simple majority.

When taking up their duties, they shall give a solemn undertaking that, both during and after their term of office, they will respect the obligations arising therefrom, in particular the duty to behave with integrity and discretion as regards the acceptance, after they have ceased to hold office, of certain appointments or benefits.

Any doubt on this point shall be settled by decision of the Court of Justice. If the decision concerns a member of the General Court or of a specialised court, the Court shall decide after consulting the court concerned.

Article 5

Apart from normal replacement, or death, the duties of a Judge shall end when he resigns.

Where a Judge resigns, his letter of resignation shall be addressed to the President of the Court of Justice for transmission to the President of the Council. Upon this notification a vacancy shall arise on the bench.

Save where Article 6 applies, a Judge shall continue to hold office until his successor takes up his duties.

Article 6

A Judge may be deprived of his office or of his right to a pension or other benefits in its stead only if, in the unanimous opinion of the Judges and Advocates-General of the Court of Justice, he no longer fulfils the requisite conditions or meets the obligations arising from his office. The Judge concerned shall not take part in any such deliberations. If the person concerned is a member of the General Court or of a specialised court, the Court shall decide after consulting the court concerned.

The Registrar of the Court shall communicate the decision of the Court to the President of the European Parliament and to the President of the Commission and shall notify it to the President of the Council.

In the case of a decision depriving a Judge of his office, a vacancy shall arise on the bench upon this latter notification.

Article 7

A Judge who is to replace a member of the Court whose term of office has not expired shall be appointed for the remainder of his predecessor's term.

Article 8

The provisions of Articles 2 to 7 shall apply to the Advocates-General.

TITLE II

ORGANISATION OF THE COURT OF JUSTICE

Article 9

When, every three years, the Judges are partially replaced, 14 and 13 Judges shall be replaced alternately.

When, every three years, the Advocates-General are partially replaced, four Advocates-General shall be replaced on each occasion.

Article 10

The Registrar shall take an oath before the Court of Justice to perform his duties impartially and conscientiously and to preserve the secrecy of the deliberations of the Court of Justice.

Article 11

The Court of Justice shall arrange for replacement of the Registrar on occasions when he is prevented from attending the Court of Justice.

Article 12

Officials and other servants shall be attached to the Court of Justice to enable it to function. They shall be responsible to the Registrar under the authority of the President.

Article 13

At the request of the Court of Justice, the European Parliament and the Council may, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, provide for the appointment of Assistant Rapporteurs and lay down the rules governing their service. The Assistant Rapporteurs may be required, under conditions laid down in the Rules of Procedure, to participate in preparatory inquiries in cases pending before the Court and to cooperate with the Judge who acts as Rapporteur.

The Assistant Rapporteurs shall be chosen from persons whose independence is beyond doubt and who possess the necessary legal qualifications; they shall be appointed by the Council, acting by a simple majority. They shall take an oath before the Court to perform their duties impartially and conscientiously and to preserve the secrecy of the deliberations of the Court.

Article 14

The Judges, the Advocates-General and the Registrar shall be required to reside at the place where the Court of Justice has its seat.

Article 15

The Court of Justice shall remain permanently in session. The duration of the judicial vacations shall be determined by the Court with due regard to the needs of its business.

Article 16

The Court of Justice shall form chambers consisting of three and five Judges. The Judges shall elect the Presidents of the chambers from among their number. The Presidents of the chambers of five Judges shall be elected for three years. They may be re-elected once.

The Grand Chamber shall consist of 13 Judges. It shall be presided over by the President of the Court. The Presidents of the chambers of five Judges and other Judges appointed in accordance with the conditions laid down in the Rules of Procedure shall also form part of the Grand Chamber.

The Court shall sit in a Grand Chamber when a Member State or an institution of the Union that is party to the proceedings so requests.

The Court shall sit as a full Court where cases are brought before it pursuant to Article 228(2), Article 245(2), Article 247 or Article 286(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Moreover, where it considers that a case before it is of exceptional importance, the Court may decide, after hearing the Advocate-General, to refer the case to the full Court.

Article 17

Decisions of the Court of Justice shall be valid only when an uneven number of its members is sitting in the deliberations.

Decisions of the chambers consisting of either three or five Judges shall be valid only if they are taken by three Judges.

Decisions of the Grand Chamber shall be valid only if nine Judges are sitting.

Decisions of the full Court shall be valid only if 15 Judges are sitting.

In the event of one of the Judges of a chamber being prevented from attending, a Judge of another chamber may be called upon to sit in accordance with conditions laid down in the Rules of Procedure.

Article 18

No Judge or Advocate-General may take part in the disposal of any case in which he has previously taken part as agent or adviser or has acted for one of the parties, or in which he has been called upon to pronounce as a member of a court or tribunal, of a commission of inquiry or in any other capacity.

If, for some special reason, any Judge or Advocate-General considers that he should not take part in the judgment or examination of a particular case, he shall so inform the President. If, for some special reason, the President considers that any Judge or Advocate-General should not sit or make submissions in a particular case, he shall notify him accordingly.

Any difficulty arising as to the application of this Article shall be settled by decision of the Court of Justice.

A party may not apply for a change in the composition of the Court or of one of its chambers on the grounds of either the nationality of a Judge or the absence from the Court or from the chamber of a Judge of the nationality of that party.

TITLE III

PROCEDURE BEFORE THE COURT OF JUSTICE

Article 19

The Member States and the institutions of the Union shall be represented before the Court of Justice by an agent appointed for each case; the agent may be assisted by an adviser or by a lawyer.

The States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area and also the EFTA Surveillance Authority referred to in that Agreement shall be represented in same manner.

Other parties must be represented by a lawyer.

Only a lawyer authorised to practise before a court of a Member State or of another State which is a party to the Agreement on the European Economic Area may represent or assist a party before the Court.

Such agents, advisers and lawyers shall, when they appear before the Court, enjoy the rights and immunities necessary to the independent exercise of their duties, under conditions laid down in the Rules of Procedure.

As regards such advisers and lawyers who appear before it, the Court shall have the powers normally accorded to courts of law, under conditions laid down in the Rules of Procedure.

University teachers being nationals of a Member State whose law accords them a right of audience shall have the same rights before the Court as are accorded by this Article to lawyers.

Article 20

The procedure before the Court of Justice shall consist of two parts: written and oral.

The written procedure shall consist of the communication to the parties and to the institutions of the Union whose decisions are in dispute, of applications, statements of case, defences and observations, and of replies, if any, as well as of all papers and documents in support or of certified copies of them.

Communications shall be made by the Registrar in the order and within the time laid down in the Rules of Procedure.

The oral procedure shall consist of the reading of the report presented by a Judge acting as Rapporteur, the hearing by the Court of agents, advisers and lawyers and of the submissions of the Advocate-General, as well as the hearing, if any, of witnesses and experts.

Where it considers that the case raises no new point of law, the Court may decide, after hearing the Advocate-General, that the case shall be determined without a submission from the Advocate-General.

Article 21

A case shall be brought before the Court of Justice by a written application addressed to the Registrar. The application shall contain the applicant's name and permanent address and the description of the signatory, the name of the party or names of the parties against whom the application is made, the subject-matter of the dispute, the form of order sought and a brief statement of the pleas in law on which the application is based.

The application shall be accompanied, where appropriate, by the measure the annulment of which is sought or, in the circumstances referred to in Article 265 of the Treaty on the Functioning of the European Union, by documentary evidence of the date on which an institution was, in accordance with those Articles, requested to act. If the documents are not submitted with the application, the Registrar shall ask the party concerned to produce them within a reasonable period, but in that event the rights of the party shall not lapse even if such documents are produced after the time limit for bringing proceedings.

Article 22

A case governed by Article 18 of the EAEC Treaty shall be brought before the Court of Justice by an appeal addressed to the Registrar. The appeal shall contain the name and permanent address of the applicant and the description of the signatory, a reference to the decision against which the appeal is brought, the names of the respondents, the subject-matter of the dispute, the submissions and a brief statement of the grounds on which the appeal is based.

The appeal shall be accompanied by a certified copy of the decision of the Arbitration Committee which is contested.

If the Court rejects the appeal, the decision of the Arbitration Committee shall become final.

If the Court annuls the decision of the Arbitration Committee, the matter may be re-opened, where appropriate, on the initiative of one of the parties in the case, before the Arbitration Committee. The latter shall conform to any decisions on points of law given by the Court.

Article 23

In the cases governed by Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the decision of the court or tribunal of a Member State which suspends its proceedings and refers a case to the Court of Justice shall be notified to the Court by the court or tribunal concerned. The decision shall then be notified by the Registrar of the Court to the parties, to the Member States and to the Commission, and to the institution, body, office or agency of the Union which adopted the act the validity or interpretation of which is in dispute.

Within two months of this notification, the parties, the Member States, the Commission and, where appropriate, the institution, body, office or agency which adopted the act the validity or interpretation of which is in dispute, shall be entitled to submit statements of case or written observations to the Court.

In the cases governed by Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the decision of the national court or tribunal shall, moreover, be notified by the Registrar of the Court to the States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area and also to the EFTA Surveillance Authority referred to in that Agreement which may, within two months of notification, where one of the fields of application of that Agreement is concerned, submit statements of case or written observations to the Court.

Where an agreement relating to a specific subject matter, concluded by the Council and one or more non-member States, provides that those States are to be entitled to submit statements of case or written observations where a court or tribunal of a Member State refers to the Court of Justice for a preliminary ruling a question falling within the scope of the agreement, the decision of the national court or tribunal containing that question shall also be notified to the non-member States concerned. Within two months from such notification, those States may lodge at the Court statements of case or written observations.

Article 23a ⁽¹⁾

The Rules of Procedure may provide for an expedited or accelerated procedure and, for references for a preliminary ruling relating to the area of freedom, security and justice, an urgent procedure.

Those procedures may provide, in respect of the submission of statements of case or written observations, for a shorter period than that provided for by Article 23, and, in derogation from the fourth paragraph of Article 20, for the case to be determined without a submission from the Advocate General.

In addition, the urgent procedure may provide for restriction of the parties and other interested persons mentioned in Article 23, authorised to submit statements of case or written observations and, in cases of extreme urgency, for the written stage of the procedure to be omitted.

⁽¹⁾ Article inserted by Decision 2008/79/EC, Euratom (OJ L 24, 29.1.2008, p. 42).

Article 24

The Court of Justice may require the parties to produce all documents and to supply all information which the Court considers desirable. Formal note shall be taken of any refusal.

The Court may also require the Member States and institutions, bodies, offices and agencies not being parties to the case to supply all information which the Court considers necessary for the proceedings.

Article 25

The Court of Justice may at any time entrust any individual, body, authority, committee or other organisation it chooses with the task of giving an expert opinion.

Article 26

Witnesses may be heard under conditions laid down in the Rules of Procedure.

Article 27

With respect to defaulting witnesses the Court of Justice shall have the powers generally granted to courts and tribunals and may impose pecuniary penalties under conditions laid down in the Rules of Procedure.

Article 28

Witnesses and experts may be heard on oath taken in the form laid down in the Rules of Procedure or in the manner laid down by the law of the country of the witness or expert.

Article 29

The Court of Justice may order that a witness or expert be heard by the judicial authority of his place of permanent residence.

The order shall be sent for implementation to the competent judicial authority under conditions laid down in the Rules of Procedure. The documents drawn up in compliance with the letters rogatory shall be returned to the Court under the same conditions.

The Court shall defray the expenses, without prejudice to the right to charge them, where appropriate, to the parties.

Article 30

A Member State shall treat any violation of an oath by a witness or expert in the same manner as if the offence had been committed before one of its courts with jurisdiction in civil proceedings. At the instance of the Court of Justice, the Member State concerned shall prosecute the offender before its competent court.

Article 31

The hearing in court shall be public, unless the Court of Justice, of its own motion or on application by the parties, decides otherwise for serious reasons.

Article 32

During the hearings the Court of Justice may examine the experts, the witnesses and the parties themselves. The latter, however, may address the Court of Justice only through their representatives.

Article 33

Minutes shall be made of each hearing and signed by the President and the Registrar.

Article 34

The case list shall be established by the President.

Article 35

The deliberations of the Court of Justice shall be and shall remain secret.

Article 36

Judgments shall state the reasons on which they are based. They shall contain the names of the Judges who took part in the deliberations.

Article 37

Judgments shall be signed by the President and the Registrar. They shall be read in open court.

Article 38

The Court of Justice shall adjudicate upon costs.

Article 39

The President of the Court of Justice may, by way of summary procedure, which may, in so far as necessary, differ from some of the rules contained in this Statute and which shall be laid down in the Rules of Procedure, adjudicate upon applications to suspend execution, as provided for in Article 278 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 157 of the EAEC Treaty, or to prescribe interim measures pursuant to Article 279 of the Treaty on the Functioning of the European Union, or to suspend enforcement in accordance with the fourth paragraph of Article 299 of the Treaty on the Functioning of the European Union or the third paragraph of Article 164 of the EAEC Treaty.

Should the President be prevented from attending, his place shall be taken by another Judge under conditions laid down in the Rules of Procedure.

The ruling of the President or of the Judge replacing him shall be provisional and shall in no way prejudice the decision of the Court on the substance of the case.

Article 40

Member States and institutions of the Union may intervene in cases before the Court of Justice.

The same right shall be open to the bodies, offices and agencies of the Union and to any other person which can establish an interest in the result of a case submitted to the Court. Natural or legal persons shall not intervene in cases between Member States, between institutions of the Union or between Member States and institutions of the Union.

Without prejudice to the second paragraph, the States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area, and also the EFTA Surveillance Authority referred to in that Agreement, may intervene in cases before the Court where one of the fields of application of that Agreement is concerned.

An application to intervene shall be limited to supporting the form of order sought by one of the parties.

Article 41

Where the defending party, after having been duly summoned, fails to file written submissions in defence, judgment shall be given against that party by default. An objection may be lodged against the judgment within one month of it being notified. The objection shall not have the effect of staying enforcement of the judgment by default unless the Court of Justice decides otherwise.

Article 42

Member States, institutions, bodies, offices and agencies of the Union and any other natural or legal persons may, in cases and under conditions to be determined by the Rules of Procedure, institute third-party proceedings to contest a judgment rendered without their being heard, where the judgment is prejudicial to their rights.

Article 43

If the meaning or scope of a judgment is in doubt, the Court of Justice shall construe it on application by any party or any institution of the Union establishing an interest therein.

Article 44

An application for revision of a judgment may be made to the Court of Justice only on discovery of a fact which is of such a nature as to be a decisive factor, and which, when the judgment was given, was unknown to the Court and to the party claiming the revision.

The revision shall be opened by a judgment of the Court expressly recording the existence of a new fact, recognising that it is of such a character as to lay the case open to revision and declaring the application admissible on this ground.

No application for revision may be made after the lapse of 10 years from the date of the judgment.

Article 45

Periods of grace based on considerations of distance shall be determined by the Rules of Procedure.

No right shall be prejudiced in consequence of the expiry of a time limit if the party concerned proves the existence of unforeseeable circumstances or of *force majeure*.

Article 46

Proceedings against the Union in matters arising from non-contractual liability shall be barred after a period of five years from the occurrence of the event giving rise thereto. The period of limitation shall be interrupted if proceedings are instituted before the Court of Justice or if prior to such proceedings an application is made by the aggrieved party to the relevant institution of the Union. In the latter event the proceedings must be instituted within the period of two months provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union; the provisions of the second paragraph of Article 265 of the Treaty on the Functioning of the European Union shall apply where appropriate.

This Article shall also apply to proceedings against the European Central Bank regarding non-contractual liability.

TITLE IV

GENERAL COURT

Article 47

The first paragraph of Article 9, Articles 14 and 15, the first, second, fourth and fifth paragraphs of Article 17 and Article 18 shall apply to the General Court and its members.

The fourth paragraph of Article 3 and Articles 10, 11 and 14 shall apply to the Registrar of the General Court *mutatis mutandis*.

Article 48

The General Court shall consist of 27 Judges.

Article 49

The Members of the General Court may be called upon to perform the task of an Advocate-General.

It shall be the duty of the Advocate-General, acting with complete impartiality and independence, to make, in open court, reasoned submissions on certain cases brought before the General Court in order to assist the General Court in the performance of its task.

The criteria for selecting such cases, as well as the procedures for designating the Advocates-General, shall be laid down in the Rules of Procedure of the General Court.

A Member called upon to perform the task of Advocate-General in a case may not take part in the judgment of the case.

Article 50

The General Court shall sit in chambers of three or five Judges. The Judges shall elect the Presidents of the chambers from among their number. The Presidents of the chambers of five Judges shall be elected for three years. They may be re-elected once.

The composition of the chambers and the assignment of cases to them shall be governed by the Rules of Procedure. In certain cases governed by the Rules of Procedure, the General Court may sit as a full court or be constituted by a single Judge.

The Rules of Procedure may also provide that the General Court may sit in a Grand Chamber in cases and under the conditions specified therein.

Article 51

By way of derogation from the rule laid down in Article 256(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, jurisdiction shall be reserved to the Court of Justice in the actions referred to in Articles 263 and 265 of the Treaty on the Functioning of the European Union when they are brought by a Member State against:

- (a) an act of or failure to act by the European Parliament or the Council, or by those institutions acting jointly, except for:
- decisions taken by the Council under the third subparagraph of Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union;
 - acts of the Council adopted pursuant to a Council regulation concerning measures to protect trade within the meaning of Article 207 of the Treaty on the Functioning of the European Union;
 - acts of the Council by which the Council exercises implementing powers in accordance with the second paragraph of Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union;

(b) against an act of or failure to act by the Commission under the first paragraph of Article 331 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Jurisdiction shall also be reserved to the Court of Justice in the actions referred to in the same Articles when they are brought by an institution of the Union against an act of or failure to act by the European Parliament, the Council, both those institutions acting jointly, or the Commission, or brought by an institution of the Union against an act of or failure to act by the European Central Bank.

Article 52

The President of the Court of Justice and the President of the General Court shall determine, by common accord, the conditions under which officials and other servants attached to the Court of Justice shall render their services to the General Court to enable it to function. Certain officials or other servants shall be responsible to the Registrar of the General Court under the authority of the President of the General Court.

Article 53

The procedure before the General Court shall be governed by Title III.

Such further and more detailed provisions as may be necessary shall be laid down in its Rules of Procedure. The Rules of Procedure may derogate from the fourth paragraph of Article 40 and from Article 41 in order to take account of the specific features of litigation in the field of intellectual property.

Notwithstanding the fourth paragraph of Article 20, the Advocate-General may make his reasoned submissions in writing.

Article 54

Where an application or other procedural document addressed to the General Court is lodged by mistake with the Registrar of the Court of Justice, it shall be transmitted immediately by that Registrar to the Registrar of the General Court; likewise, where an application or other procedural document addressed to the Court of Justice is lodged by mistake with the Registrar of the General Court, it shall be transmitted immediately by that Registrar to the Registrar of the Court of Justice.

Where the General Court finds that it does not have jurisdiction to hear and determine an action in respect of which the Court of Justice has jurisdiction, it shall refer that action to the Court of Justice; likewise, where the Court of Justice finds that an action falls within the jurisdiction of the General Court, it shall refer that action to the General Court, whereupon that Court may not decline jurisdiction.

Where the Court of Justice and the General Court are seised of cases in which the same relief is sought, the same issue of interpretation is raised or the validity of the same act is called in question, the General Court may, after hearing the parties, stay the proceedings before it until such time as the Court of Justice has delivered judgment or, where the action is one brought pursuant to Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union, may decline jurisdiction so as to allow the Court of Justice to rule on such actions. In the same circumstances, the Court of Justice may also decide to stay the proceedings before it; in that event, the proceedings before the General Court shall continue.

Where a Member State and an institution of the Union are challenging the same act, the General Court shall decline jurisdiction so that the Court of Justice may rule on those applications.

Article 55

Final decisions of the General Court, decisions disposing of the substantive issues in part only or disposing of a procedural issue concerning a plea of lack of competence or inadmissibility, shall be notified by the Registrar of the General Court to all parties as well as all Member States and the institutions of the Union even if they did not intervene in the case before the General Court.

Article 56

An appeal may be brought before the Court of Justice, within two months of the notification of the decision appealed against, against final decisions of the General Court and decisions of that Court disposing of the substantive issues in part only or disposing of a procedural issue concerning a plea of lack of competence or inadmissibility.

Such an appeal may be brought by any party which has been unsuccessful, in whole or in part, in its submissions. However, interveners other than the Member States and the institutions of the Union may bring such an appeal only where the decision of the General Court directly affects them.

With the exception of cases relating to disputes between the Union and its servants, an appeal may also be brought by Member States and institutions of the Union which did not intervene in the proceedings before the General Court. Such Member States and institutions shall be in the same position as Member States or institutions which intervened at first instance.

Article 57

Any person whose application to intervene has been dismissed by the General Court may appeal to the Court of Justice within two weeks from the notification of the decision dismissing the application.

The parties to the proceedings may appeal to the Court of Justice against any decision of the General Court made pursuant to Article 278 or Article 279 or the fourth paragraph of Article 299 of the Treaty on the Functioning of the European Union or Article 157 or the third paragraph of Article 164 of the EAEC Treaty within two months from their notification.

The appeal referred to in the first two paragraphs of this Article shall be heard and determined under the procedure referred to in Article 39.

Article 58

An appeal to the Court of Justice shall be limited to points of law. It shall lie on the grounds of lack of competence of the General Court, a breach of procedure before it which adversely affects the interests of the appellant as well as the infringement of Union law by the General Court.

No appeal shall lie regarding only the amount of the costs or the party ordered to pay them.

Article 59

Where an appeal is brought against a decision of the General Court, the procedure before the Court of Justice shall consist of a written part and an oral part. In accordance with conditions laid down in the Rules of Procedure, the Court of Justice, having heard the Advocate-General and the parties, may dispense with the oral procedure.

Article 60

Without prejudice to Articles 278 and 279 of the Treaty on the Functioning of the European Union or Article 157 of the EAEC Treaty, an appeal shall not have suspensory effect.

By way of derogation from Article 280 of the Treaty on the Functioning of the European Union, decisions of the General Court declaring a regulation to be void shall take effect only as from the date of expiry of the period referred to in the first paragraph of Article 56 of this Statute or, if an appeal shall have been brought within that period, as from the date of dismissal of the appeal, without prejudice, however, to the right of a party to apply to the Court of Justice, pursuant to Articles 278 and 279 of the Treaty on the Functioning of the European Union or Article 157 of the EAEC Treaty, for the suspension of the effects of the regulation which has been declared void or for the prescription of any other interim measure.

Article 61

If the appeal is well founded, the Court of Justice shall quash the decision of the General Court. It may itself give final judgment in the matter, where the state of the proceedings so permits, or refer the case back to the General Court for judgment.

Where a case is referred back to the General Court, that Court shall be bound by the decision of the Court of Justice on points of law.

When an appeal brought by a Member State or an institution of the Union, which did not intervene in the proceedings before the General Court, is well founded, the Court of Justice may, if it considers this necessary, state which of the effects of the decision of the General Court which has been quashed shall be considered as definitive in respect of the parties to the litigation.

Article 62

In the cases provided for in Article 256(2) and (3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, where the First Advocate-General considers that there is a serious risk of the unity or consistency of Union law being affected, he may propose that the Court of Justice review the decision of the General Court.

The proposal must be made within one month of delivery of the decision by the General Court. Within one month of receiving the proposal made by the First Advocate-General, the Court of Justice shall decide whether or not the decision should be reviewed.

Article 62a

The Court of Justice shall give a ruling on the questions which are subject to review by means of an urgent procedure on the basis of the file forwarded to it by the General Court.

Those referred to in Article 23 of this Statute and, in the cases provided for in Article 256(2) of the EC Treaty, the parties to the proceedings before the General Court shall be entitled to lodge statements or written observations with the Court of Justice relating to questions which are subject to review within a period prescribed for that purpose.

The Court of Justice may decide to open the oral procedure before giving a ruling.

Article 62b

In the cases provided for in Article 256(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, without prejudice to Articles 278 and 279 of the Treaty on the Functioning of the European Union, proposals for review and decisions to open the review procedure shall not have suspensory effect. If the Court of Justice finds that the decision of the General Court affects the unity or consistency of Union law, it shall refer the case back to the General Court which shall be bound by the points of law decided by the Court of Justice; the Court of Justice may state which of the effects of the decision of the General Court are to be considered as definitive in respect of the parties to the litigation. If, however, having regard to the result of the review, the outcome of the proceedings flows from the findings of fact on which the decision of the General Court was based, the Court of Justice shall give final judgment.

In the cases provided for in Article 256(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, in the absence of proposals for review or decisions to open the review procedure, the answer(s) given by the General Court to the questions submitted to it shall take effect upon expiry of the periods prescribed for that purpose in the second paragraph of Article 62. Should a review procedure be opened, the answer(s) subject to review shall take effect following that procedure, unless the Court of Justice decides otherwise. If the Court of Justice finds that the decision of the General Court affects the unity or consistency of Union law, the answer given by the Court of Justice to the questions subject to review shall be substituted for that given by the General Court.

TITLE IVa

SPECIALISED COURTS

Article 62c

The provisions relating to the jurisdiction, composition, organisation and procedure of the specialised courts established under Article 257 of the Treaty on the Functioning of the European Union are set out in an Annex to this Statute.

TITLE V

FINAL PROVISIONS

Article 63

The Rules of Procedure of the Court of Justice and of the General Court shall contain any provisions necessary for applying and, where required, supplementing this Statute.

Article 64

The rules governing the language arrangements applicable at the Court of Justice of the European Union shall be laid down by a regulation of the Council acting unanimously. This regulation shall be adopted either at the request of the Court of Justice and after consultation of the Commission and the European Parliament, or on a proposal from the Commission and after consultation of the Court of Justice and of the European Parliament.

Until those rules have been adopted, the provisions of the Rules of Procedure of the Court of Justice and of the Rules of Procedure of the General Court governing language arrangements shall continue to apply. By way of derogation from Articles 253 and 254 of the Treaty on the Functioning of the European Union, those provisions may only be amended or repealed with the unanimous consent of the Council.

ANNEX I

THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL

Article 1

The European Union Civil Service Tribunal (hereafter 'the Civil Service Tribunal') shall exercise at first instance jurisdiction in disputes between the Union and its servants referred to in Article 270 of the Treaty on the Functioning of the European Union, including disputes between all bodies or agencies and their servants in respect of which jurisdiction is conferred on the Court of Justice of the European Union.

Article 2

The Civil Service Tribunal shall consist of seven judges. Should the Court of Justice so request, the Council, acting by a qualified majority, may increase the number of judges.

The judges shall be appointed for a period of six years. Retiring judges may be reappointed.

Any vacancy shall be filled by the appointment of a new judge for a period of six years.

Article 3

1. The judges shall be appointed by the Council, acting in accordance with the fourth paragraph of Article 257 of the Treaty on the Functioning of the European Union, after consulting the committee provided for by this Article. When appointing judges, the Council shall ensure a balanced composition of the Civil Service Tribunal on as broad a geographical basis as possible from among nationals of the Member States and with respect to the national legal systems represented.

2. Any person who is a Union citizen and fulfils the conditions laid down in the fourth paragraph of Article 257 of the Treaty on the Functioning of the European Union may submit an application. The Council, acting on a recommendation from the Court of Justice, shall determine the conditions and the arrangements governing the submission and processing of such applications.

3. A committee shall be set up comprising seven persons chosen from among former members of the Court of Justice and the General Court and lawyers of recognised competence. The committee's membership and operating rules shall be determined by the Council, acting on a recommendation by the President of the Court of Justice.

4. The committee shall give an opinion on candidates' suitability to perform the duties of judge at the Civil Service Tribunal. The committee shall append to its opinion a list of candidates having the most suitable high-level experience. Such list shall contain the names of at least twice as many candidates as there are judges to be appointed by the Council.

Article 4

1. The judges shall elect the President of the Civil Service Tribunal from among their number for a term of three years. He may be re-elected.

2. The Civil Service Tribunal shall sit in chambers of three judges. It may, in certain cases determined by its rules of procedure, sit in full court or in a chamber of five judges or of a single judge.

3. The President of the Civil Service Tribunal shall preside over the full court and the chamber of five judges. The Presidents of the chambers of three judges shall be designated as provided in paragraph 1. If the President of the Civil Service Tribunal is assigned to a chamber of three judges, he shall preside over that chamber.

4. The jurisdiction of and quorum for the full court as well as the composition of the chambers and the assignment of cases to them shall be governed by the rules of procedure.

Article 5

Articles 2 to 6, 14, 15, the first, second and fifth paragraphs of Article 17, and Article 18 of the Statute of the Court of Justice of the European Union shall apply to the Civil Service Tribunal and its members.

The oath referred to in Article 2 of the Statute shall be taken before the Court of Justice, and the decisions referred to in Articles 3, 4 and 6 thereof shall be adopted by the Court of Justice after consulting the Civil Service Tribunal.

Article 6

1. The Civil Service Tribunal shall be supported by the departments of the Court of Justice and of the General Court. The President of the Court of Justice or, in appropriate cases, the President of the General Court, shall determine by common accord with the President of the Civil Service Tribunal the conditions under which officials and other servants attached to the Court of Justice or the General Court shall render their services to the Civil Service Tribunal to enable it to function. Certain officials or other servants shall be responsible to the Registrar of the Civil Service Tribunal under the authority of the President of that Tribunal.

2. The Civil Service Tribunal shall appoint its Registrar and lay down the rules governing his service. The fourth paragraph of Article 3 and Articles 10, 11 and 14 of the Statute of the Court of Justice of the European Union shall apply to the Registrar of the Tribunal.

Article 7

1. The procedure before the Civil Service Tribunal shall be governed by Title III of the Statute of the Court of Justice of the European Union, with the exception of Articles 22 and 23. Such further and more detailed provisions as may be necessary shall be laid down in the rules of procedure.

2. The provisions concerning the General Court's language arrangements shall apply to the Civil Service Tribunal.

3. The written stage of the procedure shall comprise the presentation of the application and of the statement of defence, unless the Civil Service Tribunal decides that a second exchange of written pleadings is necessary. Where there is such second exchange, the Civil Service Tribunal may, with the agreement of the parties, decide to proceed to judgment without an oral procedure.

4. At all stages of the procedure, including the time when the application is filed, the Civil Service Tribunal may examine the possibilities of an amicable settlement of the dispute and may try to facilitate such settlement.

5. The Civil Service Tribunal shall rule on the costs of a case. Subject to the specific provisions of the Rules of Procedure, the unsuccessful party shall be ordered to pay the costs should the court so decide.

Article 8

1. Where an application or other procedural document addressed to the Civil Service Tribunal is lodged by mistake with the Registrar of the Court of Justice or General Court, it shall be transmitted immediately by that Registrar to the Registrar of the Civil Service Tribunal. Likewise, where an application or other procedural document addressed to the Court of Justice or to the General Court is lodged by mistake with the Registrar of the Civil Service Tribunal, it shall be transmitted immediately by that Registrar to the Registrar of the Court of Justice or General Court.

2. Where the Civil Service Tribunal finds that it does not have jurisdiction to hear and determine an action in respect of which the Court of Justice or the General Court has jurisdiction, it shall refer that action to the Court of Justice or to the General Court. Likewise, where the Court of Justice or the General Court finds that an action falls within the jurisdiction of the Civil Service Tribunal, the Court seised shall refer that action to the Civil Service Tribunal, whereupon that Tribunal may not decline jurisdiction.

3. Where the Civil Service Tribunal and the General Court are seised of cases in which the same issue of interpretation is raised or the validity of the same act is called in question, the Civil Service Tribunal, after hearing the parties, may stay the proceedings until the judgment of the General Court has been delivered.

Where the Civil Service Tribunal and the General Court are seised of cases in which the same relief is sought, the Civil Service Tribunal shall decline jurisdiction so that the General Court may act on those cases.

Article 9

An appeal may be brought before the General Court, within two months of notification of the decision appealed against, against final decisions of the Civil Service Tribunal and decisions of that Tribunal disposing of the substantive issues in part only or disposing of a procedural issue concerning a plea of lack of jurisdiction or inadmissibility.

Such an appeal may be brought by any party which has been unsuccessful, in whole or in part, in its submissions. However, interveners other than the Member States and the institutions of the Union may bring such an appeal only where the decision of the Civil Service Tribunal directly affects them.

Article 10

1. Any person whose application to intervene has been dismissed by the Civil Service Tribunal may appeal to the General Court within two weeks of notification of the decision dismissing the application.

2. The parties to the proceedings may appeal to the General Court against any decision of the Civil Service Tribunal made pursuant to Article 278 or Article 279 or the fourth paragraph of Article 299 of the Treaty on the Functioning of the European Union or Article 157 or the third paragraph of Article 164 of the EAEC Treaty within two months of its notification.

3. The President of the General Court may, by way of summary procedure, which may, in so far as necessary, differ from some of the rules contained in this Annex and which shall be laid down in the rules of procedure of the General Court, adjudicate upon appeals brought in accordance with paragraphs 1 and 2.

Article 11

1. An appeal to the General Court shall be limited to points of law. It shall lie on the grounds of lack of jurisdiction of the Civil Service Tribunal, a breach of procedure before it which adversely affects the interests of the appellant, as well as the infringement of Union law by the Tribunal.

2. No appeal shall lie regarding only the amount of the costs or the party ordered to pay them.

Article 12

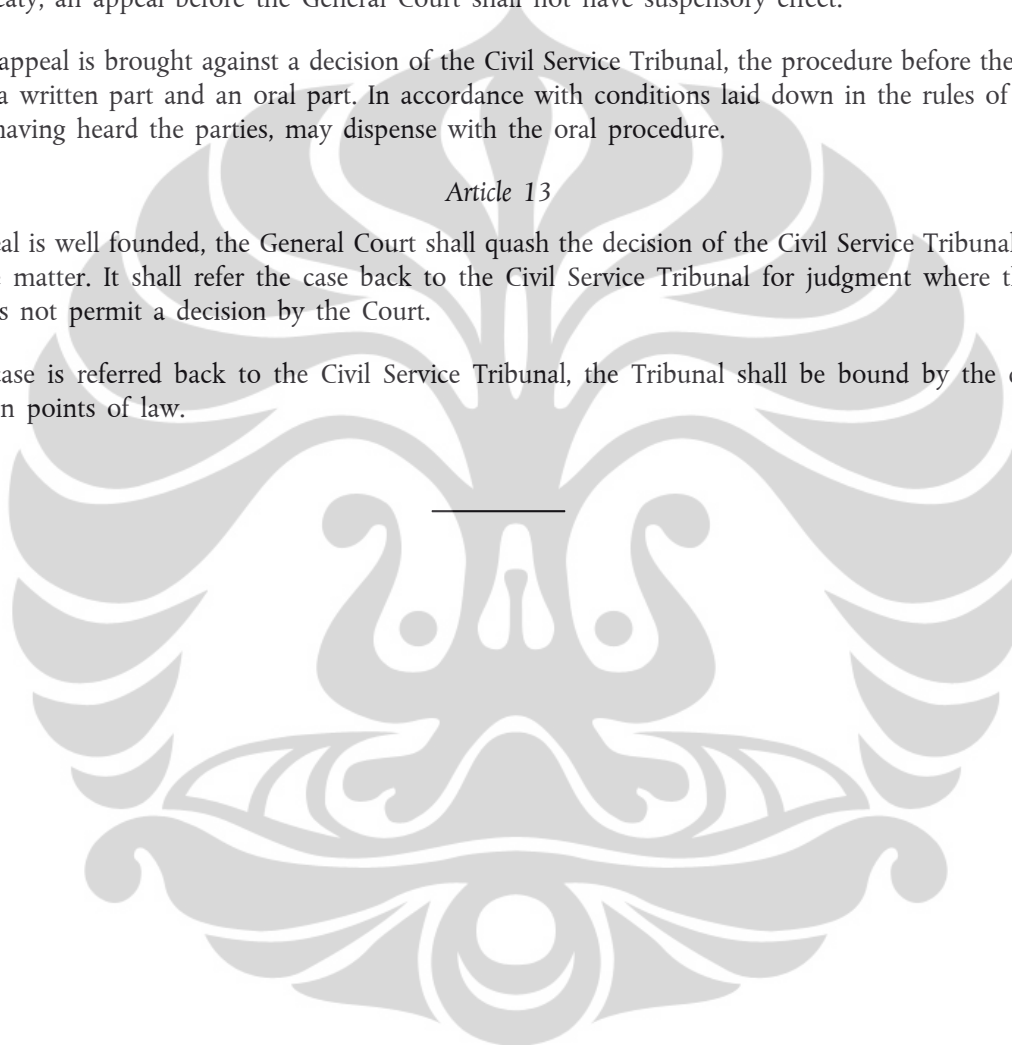
1. Without prejudice to Articles 278 and 279 of the Treaty on the Functioning of the European Union or Article 157 of the EAEC Treaty, an appeal before the General Court shall not have suspensory effect.

2. Where an appeal is brought against a decision of the Civil Service Tribunal, the procedure before the General Court shall consist of a written part and an oral part. In accordance with conditions laid down in the rules of procedure, the General Court, having heard the parties, may dispense with the oral procedure.

Article 13

1. If the appeal is well founded, the General Court shall quash the decision of the Civil Service Tribunal and itself give judgment in the matter. It shall refer the case back to the Civil Service Tribunal for judgment where the state of the proceedings does not permit a decision by the Court.

2. Where a case is referred back to the Civil Service Tribunal, the Tribunal shall be bound by the decision of the General Court on points of law.



PROTOCOL (No 4)
**ON THE STATUTE OF THE EUROPEAN SYSTEM OF
CENTRAL BANKS AND OF THE EUROPEAN CENTRAL
BANK**

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to lay down the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank provided for in the second paragraph of Article 129 of the Treaty on the Functioning of the European Union,

HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

CHAPTER I

THE EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS

Article 1

The European System of Central Banks

In accordance with Article 282(1) of the Treaty on European Union, the European Central Bank (ECB) and the national central banks shall constitute the European System of Central Banks (ESCB). The ECB and the national central banks of those Member States whose currency is the euro shall constitute the Eurosystem.

The ESCB and the ECB shall perform their tasks and carry on their activities in accordance with the provisions of the Treaties and of this Statute.

CHAPTER II

OBJECTIVES AND TASKS OF THE ESCB

Article 2

Objectives

In accordance with Article 127(1) and Article 282(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the primary objective of the ESCB shall be to maintain price stability. Without prejudice to the objective of price stability, it shall support the general economic policies in the Union with a view to contributing to the achievement of the objectives of the Union as laid down in Article 3 of the Treaty on European Union. The ESCB shall act in accordance with the principle of an open market economy with free competition, favouring an efficient allocation of resources, and in compliance with the principles set out in Article 119 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 3

Tasks

3.1. In accordance with Article 127(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the basic tasks to be carried out through the ESCB shall be:

- to define and implement the monetary policy of the Union;
- to conduct foreign-exchange operations consistent with the provisions of Article 219 of that Treaty;
- to hold and manage the official foreign reserves of the Member States;
- to promote the smooth operation of payment systems.

3.2. In accordance with Article 127(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the third indent of Article 3.1 shall be without prejudice to the holding and management by the governments of Member States of foreign-exchange working balances.

3.3. In accordance with Article 127(5) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the ESCB shall contribute to the smooth conduct of policies pursued by the competent authorities relating to the prudential supervision of credit institutions and the stability of the financial system.

Article 4

Advisory functions

In accordance with Article 127(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union:

- (a) the ECB shall be consulted:
- on any proposed Union act in its fields of competence;
 - by national authorities regarding any draft legislative provision in its fields of competence, but within the limits and under the conditions set out by the Council in accordance with the procedure laid down in Article 41;
- (b) the ECB may submit opinions to the Union institutions, bodies, offices or agencies or to national authorities on matters in its fields of competence.

Article 5

Collection of statistical information

5.1. In order to undertake the tasks of the ESCB, the ECB, assisted by the national central banks, shall collect the necessary statistical information either from the competent national authorities or directly from economic agents. For these purposes it shall cooperate with the Union institutions, bodies, offices or agencies and with the competent authorities of the Member States or third countries and with international organisations.

5.2. The national central banks shall carry out, to the extent possible, the tasks described in Article 5.1.

5.3. The ECB shall contribute to the harmonisation, where necessary, of the rules and practices governing the collection, compilation and distribution of statistics in the areas within its fields of competence.

5.4. The Council, in accordance with the procedure laid down in Article 41, shall define the natural and legal persons subject to reporting requirements, the confidentiality regime and the appropriate provisions for enforcement.

Article 6

International cooperation

6.1. In the field of international cooperation involving the tasks entrusted to the ESCB, the ECB shall decide how the ESCB shall be represented.

6.2. The ECB and, subject to its approval, the national central banks may participate in international monetary institutions.

6.3. Articles 6.1 and 6.2 shall be without prejudice to Article 138 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

CHAPTER III

ORGANISATION OF THE ESCB

Article 7

Independence

In accordance with Article 130 of the Treaty on the Functioning of the European Union, when exercising the powers and carrying out the tasks and duties conferred upon them by the Treaties and this Statute, neither the ECB, nor a national central bank, nor any member of their decision-making bodies shall seek or take instructions from Union institutions, bodies, offices or agencies, from any government of a Member State or from any other body. The Union institutions, bodies, offices or agencies and the governments of the Member States undertake to respect this principle and not to seek to influence the members of the decision-making bodies of the ECB or of the national central banks in the performance of their tasks.

Article 8

General principle

The ESCB shall be governed by the decision-making bodies of the ECB.

Article 9

The European Central Bank

9.1. The ECB which, in accordance with Article 282(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, shall have legal personality, shall enjoy in each of the Member States the most extensive legal capacity accorded to legal persons under its law; it may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.

9.2. The ECB shall ensure that the tasks conferred upon the ESCB under Article 127(2), (3) and (5) of the Treaty on the Functioning of the European Union are implemented either by its own activities pursuant to this Statute or through the national central banks pursuant to Articles 12.1 and 14.

9.3. In accordance with Article 129(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the decision making bodies of the ECB shall be the Governing Council and the Executive Board.

Article 10

The Governing Council

10.1. In accordance with Article 283(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Governing Council shall comprise the members of the Executive Board of the ECB and the governors of the national central banks of the Member States whose currency is the euro.

10.2. Each member of the Governing Council shall have one vote. As from the date on which the number of members of the Governing Council exceeds 21, each member of the Executive Board shall have one vote and the number of governors with a voting right shall be 15. The latter voting rights shall be assigned and shall rotate as follows:

- as from the date on which the number of governors exceeds 15, until it reaches 22, the governors shall be allocated to two groups, according to a ranking of the size of the share of their national central bank's Member State in the aggregate gross domestic product at market prices and in the total aggregated balance sheet of the monetary financial institutions of the Member States whose currency is the euro. The shares in the aggregate gross domestic product at market prices and in the total aggregated balance sheet of the monetary financial institutions shall be assigned weights of 5/6 and 1/6, respectively. The first group shall be composed of five governors and the second group of the remaining governors. The frequency of voting rights of the governors allocated to the first group shall not be lower than the frequency of voting rights of those of the second group. Subject to the previous sentence, the first group shall be assigned four voting rights and the second group eleven voting rights,
- as from the date on which the number of governors reaches 22, the governors shall be allocated to three groups according to a ranking based on the above criteria. The first group shall be composed of five governors and shall be assigned four voting rights. The second group shall be composed of half of the total number of governors, with any fraction rounded up to the nearest integer, and shall be assigned eight voting rights. The third group shall be composed of the remaining governors and shall be assigned three voting rights,

- within each group, the governors shall have their voting rights for equal amounts of time,
- for the calculation of the shares in the aggregate gross domestic product at market prices Article 29.2 shall apply. The total aggregated balance sheet of the monetary financial institutions shall be calculated in accordance with the statistical framework applying in the Union at the time of the calculation,
- whenever the aggregate gross domestic product at market prices is adjusted in accordance with Article 29.3, or whenever the number of governors increases, the size and/or composition of the groups shall be adjusted in accordance with the above principles,
- the Governing Council, acting by a two-thirds majority of all its members, with and without a voting right, shall take all measures necessary for the implementation of the above principles and may decide to postpone the start of the rotation system until the date on which the number of governors exceeds 18.

The right to vote shall be exercised in person. By way of derogation from this rule, the Rules of Procedure referred to in Article 12.3 may lay down that members of the Governing Council may cast their vote by means of teleconferencing. These rules shall also provide that a member of the Governing Council who is prevented from attending meetings of the Governing Council for a prolonged period may appoint an alternate as a member of the Governing Council.

The provisions of the previous paragraphs are without prejudice to the voting rights of all members of the Governing Council, with and without a voting right, under Articles 10.3, 40.2 and 40.3.

Save as otherwise provided for in this Statute, the Governing Council shall act by a simple majority of the members having a voting right. In the event of a tie, the President shall have the casting vote.

In order for the Governing Council to vote, there shall be a quorum of two-thirds of the members having a voting right. If the quorum is not met, the President may convene an extraordinary meeting at which decisions may be taken without regard to the quorum.

10.3. For any decisions to be taken under Articles 28, 29, 30, 32 and 33, the votes in the Governing Council shall be weighted according to the national central banks' shares in the subscribed capital of the ECB. The weights of the votes of the members of the Executive Board shall be zero. A decision requiring a qualified majority shall be adopted if the votes cast in favour represent at least two thirds of the subscribed capital of the ECB and represent at least half of the shareholders. If a Governor is unable to be present, he may nominate an alternate to cast his weighted vote.

10.4. The proceedings of the meetings shall be confidential. The Governing Council may decide to make the outcome of its deliberations public.

10.5. The Governing Council shall meet at least 10 times a year.

Article 11

The Executive Board

11.1. In accordance with the first subparagraph of Article 283(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Executive Board shall comprise the President, the Vice-President and four other members.

The members shall perform their duties on a full-time basis. No member shall engage in any occupation, whether gainful or not, unless exemption is exceptionally granted by the Governing Council.

11.2. In accordance with the second subparagraph of Article 283(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the President, the Vice-President and the other members of the Executive Board shall be appointed by the European Council, acting by a qualified majority, from among persons of recognised standing and professional experience in monetary or banking matters, on a recommendation from the Council after it has consulted the European Parliament and the Governing Council.

Their term of office shall be eight years and shall not be renewable.

Only nationals of Member States may be members of the Executive Board.

11.3. The terms and conditions of employment of the members of the Executive Board, in particular their salaries, pensions and other social security benefits shall be the subject of contracts with the ECB and shall be fixed by the Governing Council on a proposal from a Committee comprising three members appointed by the Governing Council and three members appointed by the Council. The members of the Executive Board shall not have the right to vote on matters referred to in this paragraph.

11.4. If a member of the Executive Board no longer fulfils the conditions required for the performance of his duties or if he has been guilty of serious misconduct, the Court of Justice may, on application by the Governing Council or the Executive Board, compulsorily retire him.

11.5. Each member of the Executive Board present in person shall have the right to vote and shall have, for that purpose, one vote. Save as otherwise provided, the Executive Board shall act by a simple majority of the votes cast. In the event of a tie, the President shall have the casting vote. The voting arrangements shall be specified in the Rules of Procedure referred to in Article 12.3.

11.6. The Executive Board shall be responsible for the current business of the ECB.

11.7. Any vacancy on the Executive Board shall be filled by the appointment of a new member in accordance with Article 11.2.

Article 12

Responsibilities of the decision-making bodies

12.1. The Governing Council shall adopt the guidelines and take the decisions necessary to ensure the performance of the tasks entrusted to the ESCB under these Treaties and this Statute. The Governing Council shall formulate the monetary policy of the Union including, as appropriate, decisions relating to intermediate monetary objectives, key interest rates and the supply of reserves in the ESCB, and shall establish the necessary guidelines for their implementation.

The Executive Board shall implement monetary policy in accordance with the guidelines and decisions laid down by the Governing Council. In doing so the Executive Board shall give the necessary instructions to national central banks. In addition the Executive Board may have certain powers delegated to it where the Governing Council so decides.

To the extent deemed possible and appropriate and without prejudice to the provisions of this Article, the ECB shall have recourse to the national central banks to carry out operations which form part of the tasks of the ESCB.

12.2. The Executive Board shall have responsibility for the preparation of meetings of the Governing Council.

12.3. The Governing Council shall adopt Rules of Procedure which determine the internal organisation of the ECB and its decision-making bodies.

12.4. The Governing Council shall exercise the advisory functions referred to in Article 4.

12.5. The Governing Council shall take the decisions referred to in Article 6.

Article 13

The President

13.1. The President or, in his absence, the Vice-President shall chair the Governing Council and the Executive Board of the ECB.

13.2. Without prejudice to Article 38, the President or his nominee shall represent the ECB externally.

Article 14

National central banks

14.1. In accordance with Article 131 of the Treaty on the Functioning of the European Union, each Member State shall ensure that its national legislation, including the statutes of its national central bank, is compatible with these Treaties and this Statute.

14.2. The statutes of the national central banks shall, in particular, provide that the term of office of a Governor of a national central bank shall be no less than five years.

A Governor may be relieved from office only if he no longer fulfils the conditions required for the performance of his duties or if he has been guilty of serious misconduct. A decision to this effect may be referred to the Court of Justice by the Governor concerned or the Governing Council on grounds of infringement of these Treaties or of any rule of law relating to their application. Such proceedings shall be instituted within two months of the publication of the decision or of its notification to the plaintiff or, in the absence thereof, of the day on which it came to the knowledge of the latter, as the case may be.

14.3. The national central banks are an integral part of the ESCB and shall act in accordance with the guidelines and instructions of the ECB. The Governing Council shall take the necessary steps to ensure compliance with the guidelines and instructions of the ECB, and shall require that any necessary information be given to it.

14.4. National central banks may perform functions other than those specified in this Statute unless the Governing Council finds, by a majority of two thirds of the votes cast, that these interfere with the objectives and tasks of the ESCB. Such functions shall be performed on the responsibility and liability of national central banks and shall not be regarded as being part of the functions of the ESCB.

Article 15

Reporting commitments

15.1. The ECB shall draw up and publish reports on the activities of the ESCB at least quarterly.

15.2. A consolidated financial statement of the ESCB shall be published each week.

15.3. In accordance with Article 284(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the ECB shall address an annual report on the activities of the ESCB and on the monetary policy of both the previous and the current year to the European Parliament, the Council and the Commission, and also to the European Council.

15.4. The reports and statements referred to in this Article shall be made available to interested parties free of charge.

Article 16

Banknotes

In accordance with Article 128(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Governing Council shall have the exclusive right to authorise the issue of euro banknotes within the Union. The ECB and the national central banks may issue such notes. The banknotes issued by the ECB and the national central banks shall be the only such notes to have the status of legal tender within the Union.

The ECB shall respect as far as possible existing practices regarding the issue and design of banknotes.

CHAPTER IV

MONETARY FUNCTIONS AND OPERATIONS OF THE ESCB

*Article 17***Accounts with the ECB and the national central banks**

In order to conduct their operations, the ECB and the national central banks may open accounts for credit institutions, public entities and other market participants and accept assets, including book entry securities, as collateral.

*Article 18***Open market and credit operations**

18.1. In order to achieve the objectives of the ESCB and to carry out its tasks, the ECB and the national central banks may:

- operate in the financial markets by buying and selling outright (spot and forward) or under repurchase agreement and by lending or borrowing claims and marketable instruments, whether in euro or other currencies, as well as precious metals;
- conduct credit operations with credit institutions and other market participants, with lending being based on adequate collateral.

18.2. The ECB shall establish general principles for open market and credit operations carried out by itself or the national central banks, including for the announcement of conditions under which they stand ready to enter into such transactions.

*Article 19***Minimum reserves**

19.1. Subject to Article 2, the ECB may require credit institutions established in Member States to hold minimum reserve on accounts with the ECB and national central banks in pursuance of monetary policy objectives. Regulations concerning the calculation and determination of the required minimum reserves may be established by the Governing Council. In cases of non-compliance the ECB shall be entitled to levy penalty interest and to impose other sanctions with comparable effect.

19.2. For the application of this Article, the Council shall, in accordance with the procedure laid down in Article 41, define the basis for minimum reserves and the maximum permissible ratios between those reserves and their basis, as well as the appropriate sanctions in cases of non-compliance.

Article 20

Other instruments of monetary control

The Governing Council may, by a majority of two thirds of the votes cast, decide upon the use of such other operational methods of monetary control as it sees fit, respecting Article 2.

The Council shall, in accordance with the procedure laid down in Article 41, define the scope of such methods if they impose obligations on third parties.

Article 21

Operations with public entities

21.1. In accordance with Article 123 of the Treaty on the Functioning of the European Union, overdrafts or any other type of credit facility with the ECB or with the national central banks in favour of Union institutions, bodies, offices or agencies, central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of Member States shall be prohibited, as shall the purchase directly from them by the ECB or national central banks of debt instruments.

21.2. The ECB and national central banks may act as fiscal agents for the entities referred to in Article 21.1.

21.3. The provisions of this Article shall not apply to publicly owned credit institutions which, in the context of the supply of reserves by central banks, shall be given the same treatment by national central banks and the ECB as private credit institutions.

Article 22

Clearing and payment systems

The ECB and national central banks may provide facilities, and the ECB may make regulations, to ensure efficient and sound clearing and payment systems within the Union and with other countries.

Article 23

External operations

The ECB and national central banks may:

- establish relations with central banks and financial institutions in other countries and, where appropriate, with international organisations;
- acquire and sell spot and forward all types of foreign exchange assets and precious metals; the term 'foreign exchange asset' shall include securities and all other assets in the currency of any country or units of account and in whatever form held;

- hold and manage the assets referred to in this Article;
- conduct all types of banking transactions in relations with third countries and international organisations, including borrowing and lending operations.

Article 24

Other operations

In addition to operations arising from their tasks, the ECB and national central banks may enter into operations for their administrative purposes or for their staff.

CHAPTER V

PRUDENTIAL SUPERVISION

Article 25

Prudential supervision

25.1. The ECB may offer advice to and be consulted by the Council, the Commission and the competent authorities of the Member States on the scope and implementation of Union legislation relating to the prudential supervision of credit institutions and to the stability of the financial system.

25.2. In accordance with any regulation of the Council under Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the ECB may perform specific tasks concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance undertakings.

CHAPTER VI

FINANCIAL PROVISIONS OF THE ESCB

Article 26

Financial accounts

26.1. The financial year of the ECB and national central banks shall begin on the first day of January and end on the last day of December.

26.2. The annual accounts of the ECB shall be drawn up by the Executive Board, in accordance with the principles established by the Governing Council. The accounts shall be approved by the Governing Council and shall thereafter be published.

26.3. For analytical and operational purposes, the Executive Board shall draw up a consolidated balance sheet of the ESCB, comprising those assets and liabilities of the national central banks that fall within the ESCB.

26.4. For the application of this Article, the Governing Council shall establish the necessary rules for standardising the accounting and reporting of operations undertaken by the national central banks.

Article 27

Auditing

27.1. The accounts of the ECB and national central banks shall be audited by independent external auditors recommended by the Governing Council and approved by the Council. The auditors shall have full power to examine all books and accounts of the ECB and national central banks and obtain full information about their transactions.

27.2. The provisions of Article 287 of the Treaty on the Functioning of the European Union shall only apply to an examination of the operational efficiency of the management of the ECB.

Article 28

Capital of the ECB

28.1. The capital of the ECB shall be euro 5 000 million. The capital may be increased by such amounts as may be decided by the Governing Council acting by the qualified majority provided for in Article 10.3, within the limits and under the conditions set by the Council under the procedure laid down in Article 41.

28.2. The national central banks shall be the sole subscribers to and holders of the capital of the ECB. The subscription of capital shall be according to the key established in accordance with Article 29.

28.3. The Governing Council, acting by the qualified majority provided for in Article 10.3, shall determine the extent to which and the form in which the capital shall be paid up.

28.4. Subject to Article 28.5, the shares of the national central banks in the subscribed capital of the ECB may not be transferred, pledged or attached.

28.5. If the key referred to in Article 29 is adjusted, the national central banks shall transfer among themselves capital shares to the extent necessary to ensure that the distribution of capital shares corresponds to the adjusted key. The Governing Council shall determine the terms and conditions of such transfers.

Article 29

Key for capital subscription

29.1. The key for subscription of the ECB's capital, fixed for the first time in 1998 when the ESCB was established, shall be determined by assigning to each national central bank a weighting in this key equal to the sum of:

- 50 % of the share of its respective Member State in the population of the Union in the penultimate year preceding the establishment of the ESCB;
- 50 % of the share of its respective Member State in the gross domestic product at market prices of the Union as recorded in the last five years preceding the penultimate year before the establishment of the ESCB.

The percentages shall be rounded up or down to the nearest multiple of 0,0001 percentage points.

29.2. The statistical data to be used for the application of this Article shall be provided by the Commission in accordance with the rules adopted by the Council under the procedure provided for in Article 41.

29.3. The weightings assigned to the national central banks shall be adjusted every five years after the establishment of the ESCB by analogy with the provisions laid down in Article 29.1. The adjusted key shall apply with effect from the first day of the following year.

29.4. The Governing Council shall take all other measures necessary for the application of this Article.

Article 30

Transfer of foreign reserve assets to the ECB

30.1. Without prejudice to Article 28, the ECB shall be provided by the national central banks with foreign reserve assets, other than Member States' currencies, euro, IMF reserve positions and SDRs, up to an amount equivalent to euro 50 000 million. The Governing Council shall decide upon the proportion to be called up by the ECB following its establishment and the amounts called up at later dates. The ECB shall have the full right to hold and manage the foreign reserves that are transferred to it and to use them for the purposes set out in this Statute.

30.2. The contributions of each national central bank shall be fixed in proportion to its share in the subscribed capital of the ECB.

30.3. Each national central bank shall be credited by the ECB with a claim equivalent to its contribution. The Governing Council shall determine the denomination and remuneration of such claims.

30.4. Further calls of foreign reserve assets beyond the limit set in Article 30.1 may be effected by the ECB, in accordance with Article 30.2, within the limits and under the conditions set by the Council in accordance with the procedure laid down in Article 41.

30.5. The ECB may hold and manage IMF reserve positions and SDRs and provide for the pooling of such assets.

30.6. The Governing Council shall take all other measures necessary for the application of this Article.

Article 31

Foreign reserve assets held by national central banks

31.1. The national central banks shall be allowed to perform transactions in fulfilment of their obligations towards international organisations in accordance with Article 23.

31.2. All other operations in foreign reserve assets remaining with the national central banks after the transfers referred to in Article 30, and Member States' transactions with their foreign exchange working balances shall, above a certain limit to be established within the framework of Article 31.3, be subject to approval by the ECB in order to ensure consistency with the exchange rate and monetary policies of the Union.

31.3. The Governing Council shall issue guidelines with a view to facilitating such operations.

Article 32

Allocation of monetary income of national central banks

32.1. The income accruing to the national central banks in the performance of the ESCB's monetary policy function (hereinafter referred to as 'monetary income') shall be allocated at the end of each financial year in accordance with the provisions of this Article.

32.2. The amount of each national central bank's monetary income shall be equal to its annual income derived from its assets held against notes in circulation and deposit liabilities to credit institutions. These assets shall be earmarked by national central banks in accordance with guidelines to be established by the Governing Council.

32.3. If, after the introduction of the euro, the balance sheet structures of the national central banks do not, in the judgment of the Governing Council, permit the application of Article 32.2, the Governing Council, acting by a qualified majority, may decide that, by way of derogation from Article 32.2, monetary income shall be measured according to an alternative method for a period of not more than five years.

32.4. The amount of each national central bank's monetary income shall be reduced by an amount equivalent to any interest paid by that central bank on its deposit liabilities to credit institutions in accordance with Article 19.

The Governing Council may decide that national central banks shall be indemnified against costs incurred in connection with the issue of banknotes or in exceptional circumstances for specific losses arising from monetary policy operations undertaken for the ESCB. Indemnification shall be in a form deemed appropriate in the judgment of the Governing Council; these amounts may be offset against the national central banks' monetary income.

32.5. The sum of the national central banks' monetary income shall be allocated to the national central banks in proportion to their paid up shares in the capital of the ECB, subject to any decision taken by the Governing Council pursuant to Article 33.2.

32.6. The clearing and settlement of the balances arising from the allocation of monetary income shall be carried out by the ECB in accordance with guidelines established by the Governing Council.

32.7. The Governing Council shall take all other measures necessary for the application of this Article.

Article 33

Allocation of net profits and losses of the ECB

33.1. The net profit of the ECB shall be transferred in the following order:

- (a) an amount to be determined by the Governing Council, which may not exceed 20 % of the net profit, shall be transferred to the general reserve fund subject to a limit equal to 100 % of the capital;
- (b) the remaining net profit shall be distributed to the shareholders of the ECB in proportion to their paid-up shares.

33.2. In the event of a loss incurred by the ECB, the shortfall may be offset against the general reserve fund of the ECB and, if necessary, following a decision by the Governing Council, against the monetary income of the relevant financial year in proportion and up to the amounts allocated to the national central banks in accordance with Article 32.5.

CHAPTER VII GENERAL PROVISIONS

Article 34

Legal acts

34.1. In accordance with Article 132 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the ECB shall:

- make regulations to the extent necessary to implement the tasks defined in Article 3.1, first indent, Articles 19.1, 22 or 25.2 and in cases which shall be laid down in the acts of the Council referred to in Article 41;
- take decisions necessary for carrying out the tasks entrusted to the ESCB under these Treaties and this Statute;
- make recommendations and deliver opinions.

34.2. The ECB may decide to publish its decisions, recommendations and opinions.

34.3. Within the limits and under the conditions adopted by the Council under the procedure laid down in Article 41, the ECB shall be entitled to impose fines or periodic penalty payments on undertakings for failure to comply with obligations under its regulations and decisions.

Article 35

Judicial control and related matters

35.1. The acts or omissions of the ECB shall be open to review or interpretation by the Court of Justice of the European Union in the cases and under the conditions laid down in the Treaty on the Functioning of the European Union. The ECB may institute proceedings in the cases and under the conditions laid down in the Treaties.

35.2. Disputes between the ECB, on the one hand, and its creditors, debtors or any other person, on the other, shall be decided by the competent national courts, save where jurisdiction has been conferred upon the Court of Justice of the European Union.

35.3. The ECB shall be subject to the liability regime provided for in Article 340 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The national central banks shall be liable according to their respective national laws.

35.4. The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give judgment pursuant to any arbitration clause contained in a contract concluded by or on behalf of the ECB, whether that contract be governed by public or private law.

35.5. A decision of the ECB to bring an action before the Court of Justice of the European Union shall be taken by the Governing Council.

35.6. The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in disputes concerning the fulfilment by a national central bank of obligations under the Treaties and this Statute. If the ECB considers that a national central bank has failed to fulfil an obligation under the Treaties and this Statute, it shall deliver a reasoned opinion on the matter after giving the national central bank concerned the opportunity to submit its observations. If the national central bank concerned does not comply with the opinion within the period laid down by the ECB, the latter may bring the matter before the Court of Justice of the European Union.

Article 36

Staff

36.1. The Governing Council, on a proposal from the Executive Board, shall lay down the conditions of employment of the staff of the ECB.

36.2. The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in any dispute between the ECB and its servants within the limits and under the conditions laid down in the conditions of employment.

Article 37 (ex Article 38)**Professional secrecy**

37.1. Members of the governing bodies and the staff of the ECB and the national central banks shall be required, even after their duties have ceased, not to disclose information of the kind covered by the obligation of professional secrecy.

37.2. Persons having access to data covered by Union legislation imposing an obligation of secrecy shall be subject to such legislation.

Article 38 (ex Article 39)**Signatories**

The ECB shall be legally committed to third parties by the President or by two members of the Executive Board or by the signatures of two members of the staff of the ECB who have been duly authorised by the President to sign on behalf of the ECB.

Article 39 (ex Article 40)**Privileges and immunities**

The ECB shall enjoy in the territories of the Member States such privileges and immunities as are necessary for the performance of its tasks, under the conditions laid down in the Protocol on the privileges and immunities of the European Union.

CHAPTER VIII

AMENDMENT OF THE STATUTE AND COMPLEMENTARY LEGISLATION

Article 40 (ex Article 41)**Simplified amendment procedure**

40.1. In accordance with Article 129(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, Articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1(a) and 36 of this Statute may be amended by the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure either on a recommendation from the ECB and after consulting the Commission, or on a proposal from the Commission and after consulting the ECB.

40.2. Article 10.2 may be amended by a decision of the European Council, acting unanimously, either on a recommendation from the European Central Bank and after consulting the European Parliament and the Commission, or on a recommendation from the Commission and after consulting the European Parliament and the European Central Bank. These amendments shall not enter into force until they are approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

40.3. A recommendation made by the ECB under this Article shall require a unanimous decision by the Governing Council.

Article 41 (ex Article 42)

Complementary legislation

In accordance with Article 129(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Council, either on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the ECB or on a recommendation from the ECB and after consulting the European Parliament and the Commission, shall adopt the provisions referred to in Articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 and 34.3 of this Statute.

CHAPTER IX

TRANSITIONAL AND OTHER PROVISIONS FOR THE ESCB

Article 42 (ex Article 43)

General provisions

42.1. A derogation as referred to in Article 139 of the Treaty on the Functioning of the European Union shall entail that the following Articles of this Statute shall not confer any rights or impose any obligations on the Member State concerned: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, and 49.

42.2. The central banks of Member States with a derogation as specified in Article 139(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union shall retain their powers in the field of monetary policy according to national law.

42.3. In accordance with Article 139 of the Treaty on the Functioning of the European Union, 'Member States' shall be read as 'Member States whose currency is the euro' in the following Articles of this Statute: 3, 11.2 and 19.

42.4. 'National central banks' shall be read as 'central banks of Member States whose currency is the euro' in the following Articles of this Statute: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 and 49.

42.5. 'Shareholders' shall be read as 'central banks of Member States whose currency is the euro' in Articles 10.3 and 33.1.

42.6. 'Subscribed capital of the ECB' shall be read as 'capital of the ECB subscribed by the central banks of Member States whose currency is the euro' in Articles 10.3 and 30.2.

Article 43 (ex Article 44)

Transitional tasks of the ECB

The ECB shall take over the former tasks of the EMI referred to in Article 141(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union which, because of the derogations of one or more Member States, still have to be performed after the introduction of the euro.

The ECB shall give advice in the preparations for the abrogation of the derogations specified in Article 140 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 44 (ex Article 45)

The General Council of the ECB

44.1. Without prejudice to Article 129(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the General Council shall be constituted as a third decision-making body of the ECB.

44.2. The General Council shall comprise the President and Vice-President of the ECB and the Governors of the national central banks. The other members of the Executive Board may participate, without having the right to vote, in meetings of the General Council.

44.3. The responsibilities of the General Council are listed in full in Article 46 of this Statute.

Article 45 (ex Article 46)

Rules of Procedure of the General Council

45.1. The President or, in his absence, the Vice-President of the ECB shall chair the General Council of the ECB.

45.2. The President of the Council and a Member of the Commission may participate, without having the right to vote, in meetings of the General Council.

45.3. The President shall prepare the meetings of the General Council.

45.4. By way of derogation from Article 12.3, the General Council shall adopt its Rules of Procedure.

45.5. The Secretariat of the General Council shall be provided by the ECB.

Article 46 (ex Article 47)

Responsibilities of the General Council

46.1. The General Council shall:

— perform the tasks referred to in Article 43;

— contribute to the advisory functions referred to in Articles 4 and 25.1.

46.2. The General Council shall contribute to:

- the collection of statistical information as referred to in Article 5;
- the reporting activities of the ECB as referred to in Article 15;
- the establishment of the necessary rules for the application of Article 26 as referred to in Article 26.4;
- the taking of all other measures necessary for the application of Article 29 as referred to in Article 29.4;
- the laying down of the conditions of employment of the staff of the ECB as referred to in Article 36.

46.3. The General Council shall contribute to the necessary preparations for irrevocably fixing the exchange rates of the currencies of Member States with a derogation against the euro as referred to in Article 140(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

46.4. The General Council shall be informed by the President of the ECB of decisions of the Governing Council.

Article 47 (ex Article 48)

Transitional provisions for the capital of the ECB

In accordance with Article 29.1, each national central bank shall be assigned a weighting in the key for subscription of the ECB's capital. By way of derogation from Article 28.3, central banks of Member States with a derogation shall not pay up their subscribed capital unless the General Council, acting by a majority representing at least two thirds of the subscribed capital of the ECB and at least half of the shareholders, decides that a minimal percentage has to be paid up as a contribution to the operational costs of the ECB.

Article 48 (ex Article 49)

Deferred payment of capital, reserves and provisions of the ECB

48.1. The central bank of a Member State whose derogation has been abrogated shall pay up its subscribed share of the capital of the ECB to the same extent as the central banks of other Member States whose currency is the euro, and shall transfer to the ECB foreign reserve assets in accordance with Article 30.1. The sum to be transferred shall be determined by multiplying the euro value at current exchange rates of the foreign reserve assets which have already been transferred to the ECB in accordance with Article 30.1, by the ratio between the number of shares subscribed by the national central bank concerned and the number of shares already paid up by the other national central banks.

48.2. In addition to the payment to be made in accordance with Article 48.1, the central bank concerned shall contribute to the reserves of the ECB, to those provisions equivalent to reserves, and to the amount still to be appropriated to the reserves and provisions corresponding to the balance of the profit and loss account as at 31 December of the year prior to the abrogation of the derogation.

The sum to be contributed shall be determined by multiplying the amount of the reserves, as defined above and as stated in the approved balance sheet of the ECB, by the ratio between the number of shares subscribed by the central bank concerned and the number of shares already paid up by the other central banks.

48.3. Upon one or more countries becoming Member States and their respective national central banks becoming part of the ESCB, the subscribed capital of the ECB and the limit on the amount of foreign reserve assets that may be transferred to the ECB shall be automatically increased. The increase shall be determined by multiplying the respective amounts then prevailing by the ratio, within the expanded capital key, between the weighting of the entering national central banks concerned and the weighting of the national central banks already members of the ESCB. Each national central bank's weighting in the capital key shall be calculated by analogy with Article 29.1 and in compliance with Article 29.2. The reference periods to be used for the statistical data shall be identical to those applied for the latest quinquennial adjustment of the weightings under Article 29.3.

Article 49 (ex Article 52)

Exchange of banknotes in the currencies of the Member States

Following the irrevocable fixing of exchange rates in accordance with Article 140 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Governing Council shall take the necessary measures to ensure that banknotes denominated in currencies with irrevocably fixed exchange rates are exchanged by the national central banks at their respective par values.

Article 50 (ex Article 53)

Applicability of the transitional provisions

If and as long as there are Member States with a derogation, Articles 42 to 47 shall be applicable.

PROTOCOL (No 5)
ON THE STATUTE OF THE EUROPEAN INVESTMENT
BANK

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to lay down the Statute of the European Investment Bank provided for in Article 308 of the Treaty on the Functioning of the European Union,

HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The European Investment Bank established by Article 308 of the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter called the ‘Bank’) is hereby constituted; it shall perform its functions and carry on its activities in accordance with the provisions of the Treaties and of this Statute.

Article 2

The task of the Bank shall be that defined in Article 309 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

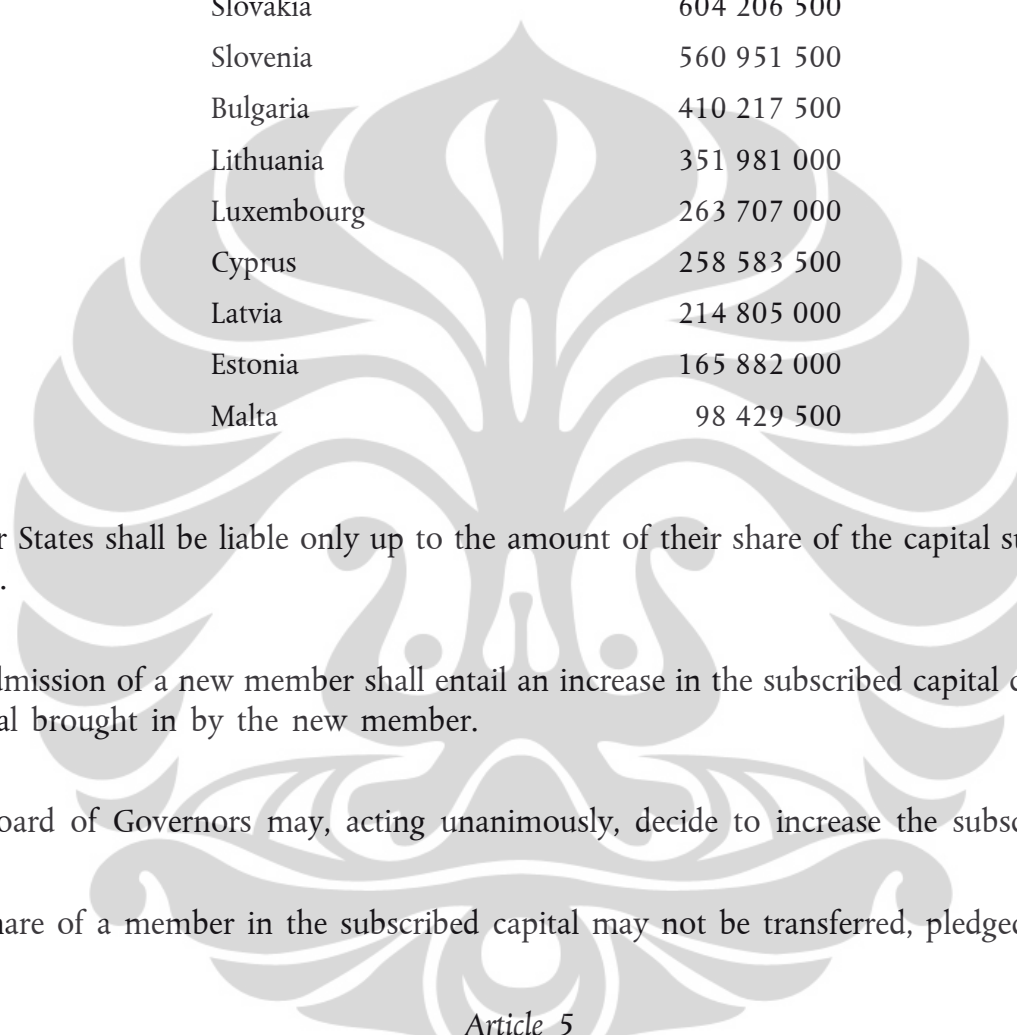
Article 3

In accordance with Article 308 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Bank’s members shall be the Member States.

Article 4

1. The capital of the Bank shall be EUR 232 392 989 000, subscribed by the Member States as follows:

Germany	37 578 019 000
France	37 578 019 000
Italy	37 578 019 000
United Kingdom	37 578 019 000
Spain	22 546 811 500
Belgium	10 416 365 500
Netherlands	10 416 365 500
Sweden	6 910 226 000
Denmark	5 274 105 000
Austria	5 170 732 500
Poland	4 810 160 500
Finland	2 970 783 000



Greece	2 825 416 500
Portugal	1 820 820 000
Czech Republic	1 774 990 500
Hungary	1 679 222 000
Ireland	1 318 525 000
Romania	1 217 626 000
Slovakia	604 206 500
Slovenia	560 951 500
Bulgaria	410 217 500
Lithuania	351 981 000
Luxembourg	263 707 000
Cyprus	258 583 500
Latvia	214 805 000
Estonia	165 882 000
Malta	98 429 500

The Member States shall be liable only up to the amount of their share of the capital subscribed and not paid up.

2. The admission of a new member shall entail an increase in the subscribed capital corresponding to the capital brought in by the new member.
3. The Board of Governors may, acting unanimously, decide to increase the subscribed capital.
4. The share of a member in the subscribed capital may not be transferred, pledged or attached.

Article 5

1. The subscribed capital shall be paid in by Member States to the extent of 5 % on average of the amounts laid down in Article 4(1).
2. In the event of an increase in the subscribed capital, the Board of Governors, acting unanimously, shall fix the percentage to be paid up and the arrangements for payment. Cash payments shall be made exclusively in euro.
3. The Board of Directors may require payment of the balance of the subscribed capital, to such extent as may be required for the Bank to meet its obligations.

Each Member State shall make this payment in proportion to its share of the subscribed capital.

Article 6

(ex Article 8)

The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.

Article 7

(ex Article 9)

1. The Board of Governors shall consist of the ministers designated by the Member States.
2. The Board of Governors shall lay down general directives for the credit policy of the Bank, in accordance with the Union's objectives. The Board of Governors shall ensure that these directives are implemented.
3. The Board of Governors shall in addition:
 - (a) decide whether to increase the subscribed capital in accordance with Article 4(3) and Article 5(2);
 - (b) for the purposes of Article 9(1), determine the principles applicable to financing operations undertaken within the framework of the Bank's task;
 - (c) exercise the powers provided in Articles 9 and 11 in respect of the appointment and the compulsory retirement of the members of the Board of Directors and of the Management Committee, and those powers provided in the second subparagraph of Article 11(1);
 - (d) take decisions in respect of the granting of finance for investment operations to be carried out, in whole or in part, outside the territories of the Member States in accordance with Article 16(1);
 - (e) approve the annual report of the Board of Directors;
 - (f) approve the annual balance sheet and profit and loss account;
 - (g) exercise the other powers and functions conferred by this Statute;
 - (h) approve the rules of procedure of the Bank.
4. Within the framework of the Treaty and this Statute, the Board of Governors shall be competent to take, acting unanimously, any decisions concerning the suspension of the operations of the Bank and, should the event arise, its liquidation.

Article 8

(ex Article 10)

Save as otherwise provided in this Statute, decisions of the Board of Governors shall be taken by a majority of its members. This majority must represent at least 50 % of the subscribed capital.

A qualified majority shall require eighteen votes in favour and 68 % of the subscribed capital.

Abstentions by members present in person or represented shall not prevent the adoption of decisions requiring unanimity.

Article 9

(ex Article 11)

1. The Board of Directors shall take decisions in respect of granting finance, in particular in the form of loans and guarantees, and raising loans; it shall fix the interest rates on loans granted and the commission and other charges. It may, on the basis of a decision taken by a qualified majority, delegate some of its functions to the Management Committee. It shall determine the terms and conditions for such delegation and shall supervise its execution.

The Board of Directors shall see that the Bank is properly run; it shall ensure that the Bank is managed in accordance with the provisions of the Treaties and of this Statute and with the general directives laid down by the Board of Governors.

At the end of the financial year the Board of Directors shall submit a report to the Board of Governors and shall publish it when approved.

2. The Board of Directors shall consist of twenty-eight directors and eighteen alternate directors.

The directors shall be appointed by the Board of Governors for five years, one nominated by each Member State, and one nominated by the Commission.

The alternate directors shall be appointed by the Board of Governors for five years as shown below:

- two alternates nominated by the Federal Republic of Germany,
- two alternates nominated by the French Republic,
- two alternates nominated by the Italian Republic,
- two alternates nominated by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
- one alternate nominated by common accord of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic,

- one alternate nominated by common accord of the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands,
- two alternates nominated by common accord of the Kingdom of Denmark, the Hellenic Republic, Ireland and Romania,
- two alternates nominated by common accord of the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden,
- three alternates nominated by common accord of the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic,
- one alternate nominated by the Commission.

The Board of Directors shall co-opt six non-voting experts: three as members and three as alternates.

The appointments of the directors and the alternates shall be renewable.

The Rules of Procedure shall lay down arrangements for participating in the meetings of the Board of Directors and the provisions applicable to alternates and co-opted experts.

The President of the Management Committee or, in his absence, one of the Vice-Presidents, shall preside over meetings of the Board of Directors but shall not vote.

Members of the Board of Directors shall be chosen from persons whose independence and competence are beyond doubt; they shall be responsible only to the Bank.

3. A director may be compulsorily retired by the Board of Governors only if he no longer fulfils the conditions required for the performance of his duties; the Board must act by a qualified majority.

If the annual report is not approved, the Board of Directors shall resign.

4. Any vacancy arising as a result of death, voluntary resignation, compulsory retirement or collective resignation shall be filled in accordance with paragraph 2. A member shall be replaced for the remainder of his term of office, save where the entire Board of Directors is being replaced.

5. The Board of Governors shall determine the remuneration of members of the Board of Directors. The Board of Governors shall lay down what activities are incompatible with the duties of a director or an alternate.

Article 10
(ex Article 12)

1. Each director shall have one vote on the Board of Directors. He may delegate his vote in all cases, according to procedures to be laid down in the Rules of Procedure of the Bank.
2. Save as otherwise provided in this Statute, decisions of the Board of Directors shall be taken by at least one third of the members entitled to vote representing at least fifty per cent of the subscribed capital. A qualified majority shall require eighteen votes in favour and sixty-eight per cent of the subscribed capital. The rules of procedure of the Bank shall lay down the quorum required for the decisions of the Board of Directors to be valid.

Article 11
(ex Article 13)

1. The Management Committee shall consist of a President and eight Vice-Presidents appointed for a period of six years by the Board of Governors on a proposal from the Board of Directors.

Their appointments shall be renewable. The Board of Governors, acting unanimously, may vary the number of members on the Management Committee.

2. On a proposal from the Board of Directors adopted by a qualified majority, the Board of Governors may, acting in its turn by a qualified majority, compulsorily retire a member of the Management Committee.
3. The Management Committee shall be responsible for the current business of the Bank, under the authority of the President and the supervision of the Board of Directors.

It shall prepare the decisions of the Board of Directors, in particular decisions on the raising of loans and the granting of finance, in particular in the form of loans and guarantees; it shall ensure that these decisions are implemented.

4. The Management Committee shall act by a majority when delivering opinions on proposals for raising loans or granting of finance, in particular in the form of loans and guarantees.

5. The Board of Governors shall determine the remuneration of members of the Management Committee and shall lay down what activities are incompatible with their duties.

6. The President or, if he is prevented, a Vice-President shall represent the Bank in judicial and other matters.

7. The staff of the Bank shall be under the authority of the President. They shall be engaged and discharged by him. In the selection of staff, account shall be taken not only of personal ability and qualifications but also of an equitable representation of nationals of Member States. The Rules of Procedure shall determine which organ is competent to adopt the provisions applicable to staff.

8. The Management Committee and the staff of the Bank shall be responsible only to the Bank and shall be completely independent in the performance of their duties.

Article 12

(ex Article 14)

1. A Committee consisting of six members, appointed on the grounds of their competence by the Board of Governors, shall verify that the activities of the Bank conform to best banking practice and shall be responsible for the auditing of its accounts.

2. The Committee referred to in paragraph 1 shall annually ascertain that the operations of the Bank have been conducted and its books kept in a proper manner. To this end, it shall verify that the Bank's operations have been carried out in compliance with the formalities and procedures laid down by this Statute and the Rules of Procedure.

3. The Committee referred to in paragraph 1 shall confirm that the financial statements, as well as any other financial information contained in the annual accounts drawn up by the Board of Directors, give a true and fair view of the financial position of the Bank in respect of its assets and liabilities, and of the results of its operations and its cash flows for the financial year under review.

4. The Rules of Procedure shall specify the qualifications required of the members of the Committee and lay down the terms and conditions for the Committee's activity.

Article 13

(ex Article 15)

The Bank shall deal with each Member State through the authority designated by that State. In the conduct of financial operations the Bank shall have recourse to the national central bank of the Member State concerned or to other financial institutions approved by that State.

Article 14

(ex Article 16)

1. The Bank shall cooperate with all international organisations active in fields similar to its own.

2. The Bank shall seek to establish all appropriate contacts in the interests of cooperation with banking and financial institutions in the countries to which its operations extend.

Article 15

(ex Article 17)

At the request of a Member State or of the Commission, or on its own initiative, the Board of Governors shall, in accordance with the same provisions as governed their adoption, interpret or supplement the directives laid down by it under Article 7 of this Statute.

Article 16
(ex Article 18)

1. Within the framework of the task set out in Article 309 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Bank shall grant finance, in particular in the form of loans and guarantees to its members or to private or public undertakings for investments to be carried out in the territories of Member States, to the extent that funds are not available from other sources on reasonable terms.

However, by decision of the Board of Governors, acting by a qualified majority on a proposal from the Board of Directors, the Bank may grant financing for investment to be carried out, in whole or in part, outside the territories of Member States.

2. As far as possible, loans shall be granted only on condition that other sources of finance are also used.

3. When granting a loan to an undertaking or to a body other than a Member State, the Bank shall make the loan conditional either on a guarantee from the Member State in whose territory the investment will be carried out or on other adequate guarantees, or on the financial strength of the debtor.

Furthermore, in accordance with the principles established by the Board of Governors pursuant to Article 7(3)(b), and where the implementation of projects provided for in Article 309 of the Treaty on the Functioning of the European Union so requires, the Board of Directors shall, acting by a qualified majority, lay down the terms and conditions of any financing operation presenting a specific risk profile and thus considered to be a special activity.

4. The Bank may guarantee loans contracted by public or private undertakings or other bodies for the purpose of carrying out projects provided for in Article 309 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

5. The aggregate amount outstanding at any time of loans and guarantees granted by the Bank shall not exceed 250 % of its subscribed capital, reserves, non-allocated provisions and profit and loss account surplus. The latter aggregate amount shall be reduced by an amount equal to the amount subscribed (whether or not paid in) for any equity participation of the Bank.

The amount of the Bank's disbursed equity participations shall not exceed at any time an amount corresponding to the total of its paid-in subscribed capital, reserves, non-allocated provisions and profit and loss account surplus.

By way of exception, the special activities of the Bank, as decided by the Board of Governors and the Board of Directors in accordance with paragraph 3, will have a specific allocation of reserve.

This paragraph shall also apply to the consolidated accounts of the Bank.

6. The Bank shall protect itself against exchange risks by including in contracts for loans and guarantees such clauses as it considers appropriate.

Article 17

(ex Article 19)

1. Interest rates on loans to be granted by the Bank and commission and other charges shall be adjusted to conditions prevailing on the capital market and shall be calculated in such a way that the income therefrom shall enable the Bank to meet its obligations, to cover its expenses and risks and to build up a reserve fund as provided for in Article 22.

2. The Bank shall not grant any reduction in interest rates. Where a reduction in the interest rate appears desirable in view of the nature of the investment to be financed, the Member State concerned or some other agency may grant aid towards the payment of interest to the extent that this is compatible with Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 18

(ex Article 20)

In its financing operations, the Bank shall observe the following principles:

1. It shall ensure that its funds are employed as rationally as possible in the interests of the Union.

It may grant loans or guarantees only:

(a) where, in the case of investments by undertakings in the production sector, interest and amortisation payments are covered out of operating profits or, in the case of other investments, either by a commitment entered into by the State in which the investment is made or by some other means; and

(b) where the execution of the investment contributes to an increase in economic productivity in general and promotes the attainment of the internal market.

2. It shall neither acquire any interest in an undertaking nor assume any responsibility in its management unless this is required to safeguard the rights of the Bank in ensuring recovery of funds lent.

However, in accordance with the principles determined by the Board of Governors pursuant to Article 7(3)(b), and where the implementation of operations provided for in Article 309 of the Treaty on the Functioning of the European Union so requires, the Board of Directors shall, acting by a qualified majority, lay down the terms and conditions for taking an equity participation in a commercial undertaking, normally as a complement to a loan or a guarantee, in so far as this is required to finance an investment or programme.

3. It may dispose of its claims on the capital market and may, to this end, require its debtors to issue bonds or other securities.

4. Neither the Bank nor the Member States shall impose conditions requiring funds lent by the Bank to be spent within a specified Member State.
5. The Bank may make its loans conditional on international invitations to tender being arranged.
6. The Bank shall not finance, in whole or in part, any investment opposed by the Member State in whose territory it is to be carried out.
7. As a complement to its lending activity, the Bank may provide technical assistance services in accordance with the terms and conditions laid down by the Board of Governors, acting by a qualified majority, and in compliance with this Statute.

Article 19
(ex Article 21)

1. Any undertaking or public or private entity may apply directly to the Bank for financing. Applications to the Bank may also be made either through the Commission or through the Member State on whose territory the investment will be carried out.
2. Applications made through the Commission shall be submitted for an opinion to the Member State in whose territory the investment will be carried out. Applications made through a Member State shall be submitted to the Commission for an opinion. Applications made direct by an undertaking shall be submitted to the Member State concerned and to the Commission.

The Member State concerned and the Commission shall deliver their opinions within two months. If no reply is received within this period, the Bank may assume that there is no objection to the investment in question.

3. The Board of Directors shall rule on financing operations submitted to it by the Management Committee.
4. The Management Committee shall examine whether financing operations submitted to it comply with the provisions of this Statute, in particular with Articles 16 and 18. Where the Management Committee is in favour of the financing operation, it shall submit the corresponding proposal to the Board of Directors; the Committee may make its favourable opinion subject to such conditions, as it considers essential. Where the Management Committee is against granting the finance, it shall submit the relevant documents together with its opinion to the Board of Directors.
5. Where the Management Committee delivers an unfavourable opinion, the Board of Directors may not grant the finance concerned unless its decision is unanimous.
6. Where the Commission delivers an unfavourable opinion, the Board of Directors may not grant the finance concerned unless its decision is unanimous, the director nominated by the Commission abstaining.

7. Where both the Management Committee and the Commission deliver an unfavourable opinion, the Board of Directors may not grant the finance.

8. In the event that a financing operation relating to an approved investment has to be restructured in order to safeguard the Bank's rights and interests, the Management Committee shall take without delay the emergency measures which it deems necessary, subject to immediate reporting thereon to the Board of Directors.

Article 20
(ex Article 22)

1. The Bank shall borrow on the capital markets the funds necessary for the performance of its tasks.
2. The Bank may borrow on the capital markets of the Member States in accordance with the legal provisions applying to those markets.

The competent authorities of a Member State with a derogation within the meaning of Article 139(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union may oppose this only if there is reason to fear serious disturbances on the capital market of that State.

Article 21
(ex Article 23)

1. The Bank may employ any available funds which it does not immediately require to meet its obligations in the following ways:

- (a) it may invest on the money markets;
- (b) it may, subject to the provisions of Article 18(2), buy and sell securities;
- (c) it may carry out any other financial operation linked with its objectives.

2. Without prejudice to the provisions of Article 23, the Bank shall not, in managing its investments, engage in any currency arbitrage not directly required to carry out its lending operations or fulfil commitments arising out of loans raised or guarantees granted by it.

3. The Bank shall, in the fields covered by this Article, act in agreement with the competent authorities or with the national central bank of the Member State concerned.

Article 22
(ex Article 24)

1. A reserve fund of up to 10 % of the subscribed capital shall be built up progressively. If the state of the liabilities of the Bank should so justify, the Board of Directors may decide to set aside additional reserves. Until such time as the reserve fund has been fully built up, it shall be fed by:

(a) interest received on loans granted by the Bank out of sums to be paid up by the Member States pursuant to Article 5;

(b) interest received on loans granted by the Bank out of funds derived from repayment of the loans referred to in (a);

to the extent that this income is not required to meet the obligations of the Bank or to cover its expenses.

2. The resources of the reserve fund shall be so invested as to be available at any time to meet the purpose of the fund.

Article 23
(ex Article 25)

1. The Bank shall at all times be entitled to transfer its assets in the currency of a Member State whose currency is not the euro in order to carry out financial operations corresponding to the task set out in Article 309 of the Treaty on the Functioning of the European Union, taking into account the provisions of Article 21 of this Statute. The Bank shall, as far as possible, avoid making such transfers if it has cash or liquid assets in the currency required.

2. The Bank may not convert its assets in the currency of a Member State whose currency is not the euro into the currency of a third country without the agreement of the Member State concerned.

3. The Bank may freely dispose of that part of its capital which is paid up and of any currency borrowed on markets outside the Union.

4. The Member States undertake to make available to the debtors of the Bank the currency needed to repay the capital and pay the interest on loans or commission on guarantees granted by the Bank for investments to be carried out in their territory.

Article 24
(ex Article 26)

If a Member State fails to meet the obligations of membership arising from this Statute, in particular the obligation to pay its share of the subscribed capital or to service its borrowings, the granting of loans or guarantees to that Member State or its nationals may be suspended by a decision of the Board of Governors, acting by a qualified majority.

Such decision shall not release either the State or its nationals from their obligations towards the Bank.

Article 25
(ex Article 27)

1. If the Board of Governors decides to suspend the operations of the Bank, all its activities shall cease forthwith, except those required to ensure the due realisation, protection and preservation of its assets and the settlement of its liabilities.

2. In the event of liquidation, the Board of Governors shall appoint the liquidators and give them instructions for carrying out the liquidation. It shall ensure that the rights of the members of staff are safeguarded.

Article 26
(ex Article 28)

1. In each of the Member States, the Bank shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under their laws; it may, in particular, acquire or dispose of movable or immovable property and may be a party to legal proceedings.

2. The property of the Bank shall be exempt from all forms of requisition or expropriation.

Article 27
(ex Article 29)

Disputes between the Bank on the one hand, and its creditors, debtors or any other person on the other, shall be decided by the competent national courts, save where jurisdiction has been conferred on the Court of Justice of the European Union. The Bank may provide for arbitration in any contract.

The Bank shall have an address for service in each Member State. It may, however, in any contract, specify a particular address for service.

The property and assets of the Bank shall not be liable to attachment or to seizure by way of execution except by decision of a court.

Article 28
(ex Article 30)

1. The Board of Governors may, acting unanimously, decide to establish subsidiaries or other entities, which shall have legal personality and financial autonomy.
2. The Board of Governors shall establish the Statutes of the bodies referred to in paragraph 1. The Statutes shall define, in particular, their objectives, structure, capital, membership, the location of their seat, their financial resources, means of intervention and auditing arrangements, as well as their relationship with the organs of the Bank.
3. The Bank shall be entitled to participate in the management of these bodies and contribute to their subscribed capital up to the amount determined by the Board of Governors, acting unanimously.
4. The Protocol on the privileges and immunities of the European Union shall apply to the bodies referred to in paragraph 1 in so far as they are incorporated under the law of the Union, to the members of their organs in the performance of their duties as such and to their staff, under the same terms and conditions as those applicable to the Bank.

Those dividends, capital gains or other forms of revenue stemming from such bodies to which the members, other than the European Union and the Bank, are entitled, shall however remain subject to the fiscal provisions of the applicable legislation.
5. The Court of Justice of the European Union shall, within the limits hereinafter laid down, have jurisdiction in disputes concerning measures adopted by organs of a body incorporated under Union law. Proceedings against such measures may be instituted by any member of such a body in its capacity as such or by Member States under the conditions laid down in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
6. The Board of Governors may, acting unanimously, decide to admit the staff of bodies incorporated under Union law to joint schemes with the Bank, in compliance with the respective internal procedures.

PROTOCOL (No 6)
ON THE LOCATION OF THE SEATS OF THE
INSTITUTIONS AND OF CERTAIN BODIES, OFFICES,
AGENCIES AND DEPARTMENTS OF THE EUROPEAN
UNION

THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES,

HAVING REGARD to Article 341 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 189 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community,

RECALLING AND CONFIRMING the Decision of 8 April 1965, and without prejudice to the decisions concerning the seat of future institutions, bodies, offices, agencies and departments,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community:

Sole Article

- (a) The European Parliament shall have its seat in Strasbourg where the 12 periods of monthly plenary sessions, including the budget session, shall be held. The periods of additional plenary sessions shall be held in Brussels. The committees of the European Parliament shall meet in Brussels. The General Secretariat of the European Parliament and its departments shall remain in Luxembourg.
- (b) The Council shall have its seat in Brussels. During the months of April, June and October, the Council shall hold its meetings in Luxembourg.
- (c) The Commission shall have its seat in Brussels. The departments listed in Articles 7, 8 and 9 of the Decision of 8 April 1965 shall be established in Luxembourg.
- (d) The Court of Justice of the European Union shall have its seat in Luxembourg.
- (e) The Court of Auditors shall have its seat in Luxembourg.
- (f) The Economic and Social Committee shall have its seat in Brussels.
- (g) The Committee of the Regions shall have its seat in Brussels.
- (h) The European Investment Bank shall have its seat in Luxembourg.
- (i) The European Central Bank shall have its seat in Frankfurt.
- (j) The European Police Office (Europol) shall have its seat in The Hague.

PROTOCOL (No 7)
ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN UNION

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

CONSIDERING that, in accordance with Article 343 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 191 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community ('EAEC'), the European Union and the EAEC shall enjoy in the territories of the Member States such privileges and immunities as are necessary for the performance of their tasks,

HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community:

CHAPTER I

PROPERTY, FUNDS, ASSETS AND OPERATIONS OF THE EUROPEAN UNION

Article 1

The premises and buildings of the Union shall be inviolable. They shall be exempt from search, requisition, confiscation or expropriation. The property and assets of the Union shall not be the subject of any administrative or legal measure of constraint without the authorisation of the Court of Justice.

Article 2

The archives of the Union shall be inviolable.

Article 3

The Union, its assets, revenues and other property shall be exempt from all direct taxes.

The governments of the Member States shall, wherever possible, take the appropriate measures to remit or refund the amount of indirect taxes or sales taxes included in the price of movable or immovable property, where the Union makes, for its official use, substantial purchases the price of which includes taxes of this kind. These provisions shall not be applied, however, so as to have the effect of distorting competition within the Union.

No exemption shall be granted in respect of taxes and dues which amount merely to charges for public utility services.

Article 4

The Union shall be exempt from all customs duties, prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles intended for its official use: articles so imported shall not be disposed of, whether or not in return for payment, in the territory of the country into which they have been imported, except under conditions approved by the government of that country.

The Union shall also be exempt from any customs duties and any prohibitions and restrictions on import and exports in respect of its publications.

CHAPTER II COMMUNICATIONS AND LAISSEZ-PASSER

Article 5 (ex Article 6)

For their official communications and the transmission of all their documents, the institutions of the Union shall enjoy in the territory of each Member State the treatment accorded by that State to diplomatic missions.

Official correspondence and other official communications of the institutions of the Union shall not be subject to censorship.

Article 6 (ex Article 7)

Laissez-passer in a form to be prescribed by the Council, acting by a simple majority, which shall be recognised as valid travel documents by the authorities of the Member States, may be issued to members and servants of the institutions of the Union by the Presidents of these institutions. These *laissez-passer* shall be issued to officials and other servants under conditions laid down in the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of other servants of the Union.

The Commission may conclude agreements for these *laissez-passer* to be recognised as valid travel documents within the territory of third countries.

CHAPTER III MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Article 7 (ex Article 8)

No administrative or other restriction shall be imposed on the free movement of Members of the European Parliament travelling to or from the place of meeting of the European Parliament.

Members of the European Parliament shall, in respect of customs and exchange control, be accorded:

- (a) by their own government, the same facilities as those accorded to senior officials travelling abroad on temporary official missions;
- (b) by the government of other Member States, the same facilities as those accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions.

Article 8
(ex Article 9)

Members of the European Parliament shall not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed or votes cast by them in the performance of their duties.

Article 9
(ex Article 10)

During the sessions of the European Parliament, its Members shall enjoy:

- (a) in the territory of their own State, the immunities accorded to members of their parliament;
- (b) in the territory of any other Member State, immunity from any measure of detention and from legal proceedings.

Immunity shall likewise apply to Members while they are travelling to and from the place of meeting of the European Parliament.

Immunity cannot be claimed when a Member is found in the act of committing an offence and shall not prevent the European Parliament from exercising its right to waive the immunity of one of its Members.

CHAPTER IV

REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES TAKING PART IN THE WORK OF THE INSTITUTIONS
OF THE EUROPEAN UNION

Article 10
(ex Article 11)

Representatives of Member States taking part in the work of the institutions of the Union, their advisers and technical experts shall, in the performance of their duties and during their travel to and from the place of meeting, enjoy the customary privileges, immunities and facilities.

This Article shall also apply to members of the advisory bodies of the Union.

CHAPTER V

OFFICIALS AND OTHER SERVANTS OF THE EUROPEAN UNION

Article 11

(ex Article 12)

In the territory of each Member State and whatever their nationality, officials and other servants of the Union shall:

- (a) subject to the provisions of the Treaties relating, on the one hand, to the rules on the liability of officials and other servants towards the Union and, on the other hand, to the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union in disputes between the Union and its officials and other servants, be immune from legal proceedings in respect of acts performed by them in their official capacity, including their words spoken or written. They shall continue to enjoy this immunity after they have ceased to hold office;
- (b) together with their spouses and dependent members of their families, not be subject to immigration restrictions or to formalities for the registration of aliens;
- (c) in respect of currency or exchange regulations, be accorded the same facilities as are customarily accorded to officials of international organisations;
- (d) enjoy the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their post in the country concerned, and the right to re-export free of duty their furniture and effects, on termination of their duties in that country, subject in either case to the conditions considered to be necessary by the government of the country in which this right is exercised;
- (e) have the right to import free of duty a motor car for their personal use, acquired either in the country of their last residence or in the country of which they are nationals on the terms ruling in the home market in that country, and to re-export it free of duty, subject in either case to the conditions considered to be necessary by the government of the country concerned.

Article 12

(ex Article 13)

Officials and other servants of the Union shall be liable to a tax for the benefit of the Union on salaries, wages and emoluments paid to them by the Union, in accordance with the conditions and procedure laid down by the European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure and after consultation of the institutions concerned.

They shall be exempt from national taxes on salaries, wages and emoluments paid by the Union.

Article 13
(ex Article 14)

In the application of income tax, wealth tax and death duties and in the application of conventions on the avoidance of double taxation concluded between Member States of the Union, officials and other servants of the Union who, solely by reason of the performance of their duties in the service of the Union, establish their residence in the territory of a Member State other than their country of domicile for tax purposes at the time of entering the service of the Union, shall be considered, both in the country of their actual residence and in the country of domicile for tax purposes, as having maintained their domicile in the latter country provided that it is a member of the Union. This provision shall also apply to a spouse, to the extent that the latter is not separately engaged in a gainful occupation, and to children dependent on and in the care of the persons referred to in this Article.

Movable property belonging to persons referred to in the preceding paragraph and situated in the territory of the country where they are staying shall be exempt from death duties in that country; such property shall, for the assessment of such duty, be considered as being in the country of domicile for tax purposes, subject to the rights of third countries and to the possible application of provisions of international conventions on double taxation.

Any domicile acquired solely by reason of the performance of duties in the service of other international organisations shall not be taken into consideration in applying the provisions of this Article.

Article 14
(ex Article 15)

The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure and after consultation of the institutions concerned, shall lay down the scheme of social security benefits for officials and other servants of the Union.

Article 15
(ex Article 16)

The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, and after consulting the other institutions concerned, shall determine the categories of officials and other servants of the Union to whom the provisions of Article 11, the second paragraph of Article 12, and Article 13 shall apply, in whole or in part.

The names, grades and addresses of officials and other servants included in such categories shall be communicated periodically to the governments of the Member States.

CHAPTER VI

PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF MISSIONS OF THIRD COUNTRIES ACCREDITED TO THE EUROPEAN UNION

Article 16

(ex Article 17)

The Member State in whose territory the Union has its seat shall accord the customary diplomatic immunities and privileges to missions of third countries accredited to the Union.

CHAPTER VII

GENERAL PROVISIONS

Article 17

(ex Article 18)

Privileges, immunities and facilities shall be accorded to officials and other servants of the Union solely in the interests of the Union.

Each institution of the Union shall be required to waive the immunity accorded to an official or other servant wherever that institution considers that the waiver of such immunity is not contrary to the interests of the Union.

Article 18

(ex Article 19)

The institutions of the Union shall, for the purpose of applying this Protocol, cooperate with the responsible authorities of the Member States concerned.

Article 19

(ex Article 20)

Articles 11 to 14 and Article 17 shall apply to the President of the European Council.

They shall also apply to Members of the Commission.

Article 20

(ex Article 21)

Articles 11 to 14 and Article 17 shall apply to the Judges, the Advocates-General, the Registrars and the Assistant Rapporteurs of the Court of Justice of the European Union, without prejudice to the provisions of Article 3 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union relating to immunity from legal proceedings of Judges and Advocates-General.

Article 21
(ex Article 22)

This Protocol shall also apply to the European Investment Bank, to the members of its organs, to its staff and to the representatives of the Member States taking part in its activities, without prejudice to the provisions of the Protocol on the Statute of the Bank.

The European Investment Bank shall in addition be exempt from any form of taxation or imposition of a like nature on the occasion of any increase in its capital and from the various formalities which may be connected therewith in the State where the Bank has its seat. Similarly, its dissolution or liquidation shall not give rise to any imposition. Finally, the activities of the Bank and of its organs carried on in accordance with its Statute shall not be subject to any turnover tax.

Article 22
(ex Article 23)

This Protocol shall also apply to the European Central Bank, to the members of its organs and to its staff, without prejudice to the provisions of the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank.

The European Central Bank shall, in addition, be exempt from any form of taxation or imposition of a like nature on the occasion of any increase in its capital and from the various formalities which may be connected therewith in the State where the bank has its seat. The activities of the Bank and of its organs carried on in accordance with the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank shall not be subject to any turnover tax.

PROTOCOL (No 8)
RELATING TO ARTICLE 6(2) OF THE TREATY ON
EUROPEAN UNION ON THE ACCESSION OF THE
UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND
FUNDAMENTAL FREEDOMS

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the 'European Convention') provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:

- (a) the specific arrangements for the Union's possible participation in the control bodies of the European Convention;
- (b) the mechanisms necessary to ensure that proceedings by non-Member States and individual applications are correctly addressed to Member States and/or the Union as appropriate.

Article 2

The agreement referred to in Article 1 shall ensure that accession of the Union shall not affect the competences of the Union or the powers of its institutions. It shall ensure that nothing therein affects the situation of Member States in relation to the European Convention, in particular in relation to the Protocols thereto, measures taken by Member States derogating from the European Convention in accordance with Article 15 thereof and reservations to the European Convention made by Member States in accordance with Article 57 thereof.

Article 3

Nothing in the agreement referred to in Article 1 shall affect Article 344 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

PROTOCOL (No 9)
ON THE DECISION OF THE COUNCIL RELATING
TO THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 16(4) OF THE
TREATY ON EUROPEAN UNION AND ARTICLE 238(2)
OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE
EUROPEAN UNION BETWEEN 1 NOVEMBER 2014
AND 31 MARCH 2017 ON THE ONE HAND, AND AS
FROM 1 APRIL 2017 ON THE OTHER

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

TAKING INTO ACCOUNT the fundamental importance that agreeing on the Decision of the Council relating to the implementation of Article 16(4) of the Treaty on European Union and Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union between 1 November 2014 and 31 March 2017 on the one hand, and as from 1 April 2017 on the other (hereinafter 'the Decision'), had when approving the Treaty of Lisbon,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Sole Article

Before the examination by the Council of any draft which would aim either at amending or abrogating the Decision or any of its provisions, or at modifying indirectly its scope or its meaning through the modification of another legal act of the Union, the European Council shall hold a preliminary deliberation on the said draft, acting by consensus in accordance with Article 15(4) of the Treaty on European Union.

PROTOCOL (No 10)
ON PERMANENT STRUCTURED COOPERATION
ESTABLISHED BY ARTICLE 42 OF THE TREATY ON
EUROPEAN UNION

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

HAVING REGARD TO Article 42(6) and Article 46 of the Treaty on European Union,

RECALLING that the Union is pursuing a common foreign and security policy based on the achievement of growing convergence of action by Member States,

RECALLING that the common security and defence policy is an integral part of the common foreign and security policy; that it provides the Union with operational capacity drawing on civil and military assets; that the Union may use such assets in the tasks referred to in Article 43 of the Treaty on European Union outside the Union for peace-keeping, conflict prevention and strengthening international security in accordance with the principles of the United Nations Charter; that the performance of these tasks is to be undertaken using capabilities provided by the Member States in accordance with the principle of a single set of forces,

RECALLING that the common security and defence policy of the Union does not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States,

RECALLING that the common security and defence policy of the Union respects the obligations under the North Atlantic Treaty of those Member States which see their common defence realised in the North Atlantic Treaty Organisation, which remains the foundation of the collective defence of its members, and is compatible with the common security and defence policy established within that framework,

CONVINCED that a more assertive Union role in security and defence matters will contribute to the vitality of a renewed Atlantic Alliance, in accordance with the Berlin Plus arrangements,

DETERMINED to ensure that the Union is capable of fully assuming its responsibilities within the international community,

RECOGNISING that the United Nations Organisation may request the Union's assistance for the urgent implementation of missions undertaken under Chapters VI and VII of the United Nations Charter,

RECOGNISING that the strengthening of the security and defence policy will require efforts by Member States in the area of capabilities,

CONSCIOUS that embarking on a new stage in the development of the European security and defence policy involves a determined effort by the Member States concerned,

RECALLING the importance of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy being fully involved in proceedings relating to permanent structured cooperation,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The permanent structured cooperation referred to in Article 42(6) of the Treaty on European Union shall be open to any Member State which undertakes, from the date of entry into force of the Treaty of Lisbon, to:

- (a) proceed more intensively to develop its defence capacities through the development of its national contributions and participation, where appropriate, in multinational forces, in the main European equipment programmes, and in the activity of the Agency in the field of defence capabilities development, research, acquisition and armaments (European Defence Agency), and
- (b) have the capacity to supply by 2010 at the latest, either at national level or as a component of multinational force groups, targeted combat units for the missions planned, structured at a tactical level as a battle group, with support elements including transport and logistics, capable of carrying out the tasks referred to in Article 43 of the Treaty on European Union, within a period of five to 30 days, in particular in response to requests from the United Nations Organisation, and which can be sustained for an initial period of 30 days and be extended up to at least 120 days.

Article 2

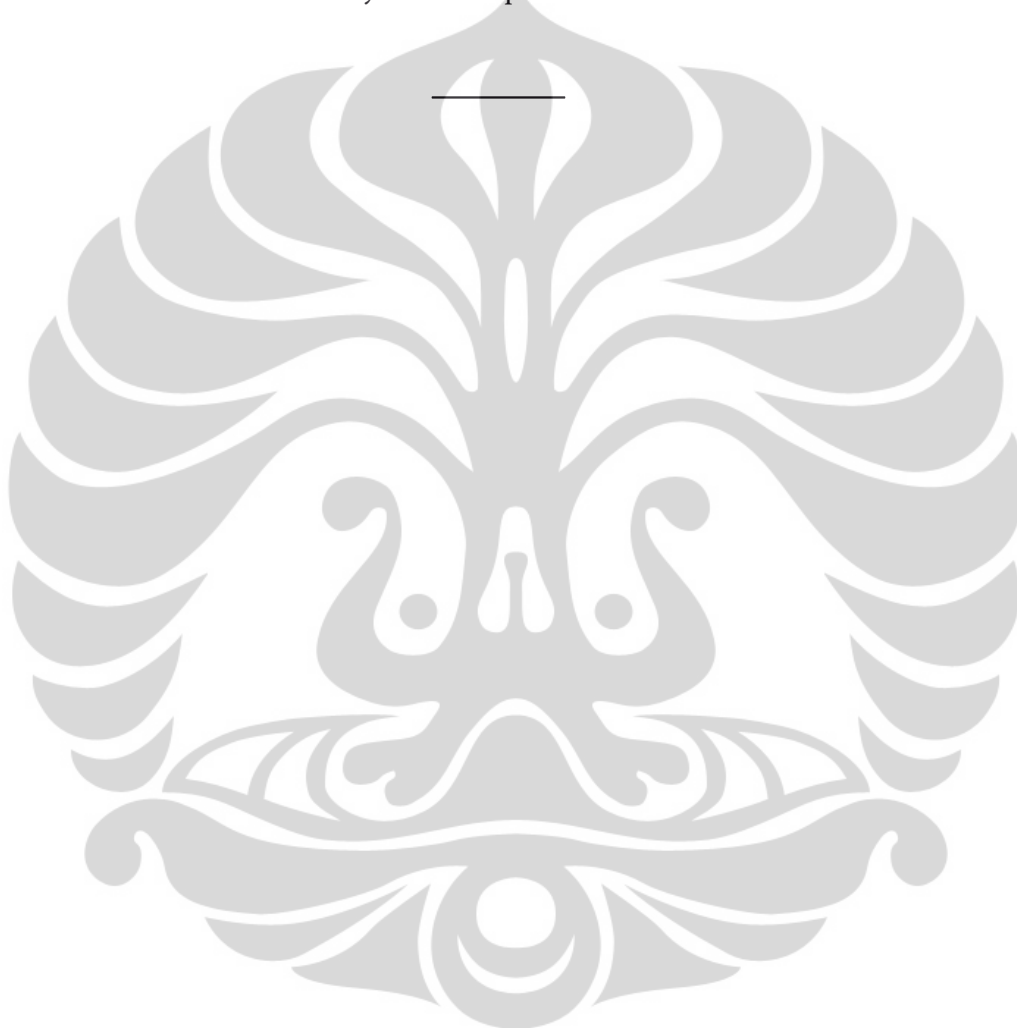
To achieve the objectives laid down in Article 1, Member States participating in permanent structured cooperation shall undertake to:

- (a) cooperate, as from the entry into force of the Treaty of Lisbon, with a view to achieving approved objectives concerning the level of investment expenditure on defence equipment, and regularly review these objectives, in the light of the security environment and of the Union's international responsibilities;
- (b) bring their defence apparatus into line with each other as far as possible, particularly by harmonising the identification of their military needs, by pooling and, where appropriate, specialising their defence means and capabilities, and by encouraging cooperation in the fields of training and logistics;
- (c) take concrete measures to enhance the availability, interoperability, flexibility and deployability of their forces, in particular by identifying common objectives regarding the commitment of forces, including possibly reviewing their national decision-making procedures;
- (d) work together to ensure that they take the necessary measures to make good, including through multinational approaches, and without prejudice to undertakings in this regard within the North Atlantic Treaty Organisation, the shortfalls perceived in the framework of the 'Capability Development Mechanism';

- (e) take part, where appropriate, in the development of major joint or European equipment programmes in the framework of the European Defence Agency.

Article 3

The European Defence Agency shall contribute to the regular assessment of participating Member States' contributions with regard to capabilities, in particular contributions made in accordance with the criteria to be established, *inter alia*, on the basis of Article 2, and shall report thereon at least once a year. The assessment may serve as a basis for Council recommendations and decisions adopted in accordance with Article 46 of the Treaty on European Union.



PROTOCOL (No 11)
ON ARTICLE 42 OF THE TREATY ON EUROPEAN
UNION

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

BEARING IN MIND the need to implement fully the provisions of Article 42(2) of the Treaty on European Union,

BEARING IN MIND that the policy of the Union in accordance with Article 42 shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States and shall respect the obligations of certain Member States, which see their common defence realised in NATO, under the North Atlantic Treaty and be compatible with the common security and defence policy established within that framework,

HAVE AGREED UPON the following provision, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

The European Union shall draw up, together with the Western European Union, arrangements for enhanced cooperation between them.

PROTOCOL (No 12)
ON THE EXCESSIVE DEFICIT PROCEDURE

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING TO lay down the details of the excessive deficit procedure referred to in Article 126 of the Treaty on the Functioning of the European Union,

HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The reference values referred to in Article 126(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union are:

- 3 % for the ratio of the planned or actual government deficit to gross domestic product at market prices;
- 60 % for the ratio of government debt to gross domestic product at market prices.

Article 2

In Article 126 of the said Treaty and in this Protocol:

- ‘government’ means general government, that is central government, regional or local government and social security funds, to the exclusion of commercial operations, as defined in the European System of Integrated Economic Accounts;
- ‘deficit’ means net borrowing as defined in the European System of Integrated Economic Accounts;
- ‘investment’ means gross fixed capital formation as defined in the European System of Integrated Economic Accounts;
- ‘debt’ means total gross debt at nominal value outstanding at the end of the year and consolidated between and within the sectors of general government as defined in the first indent.

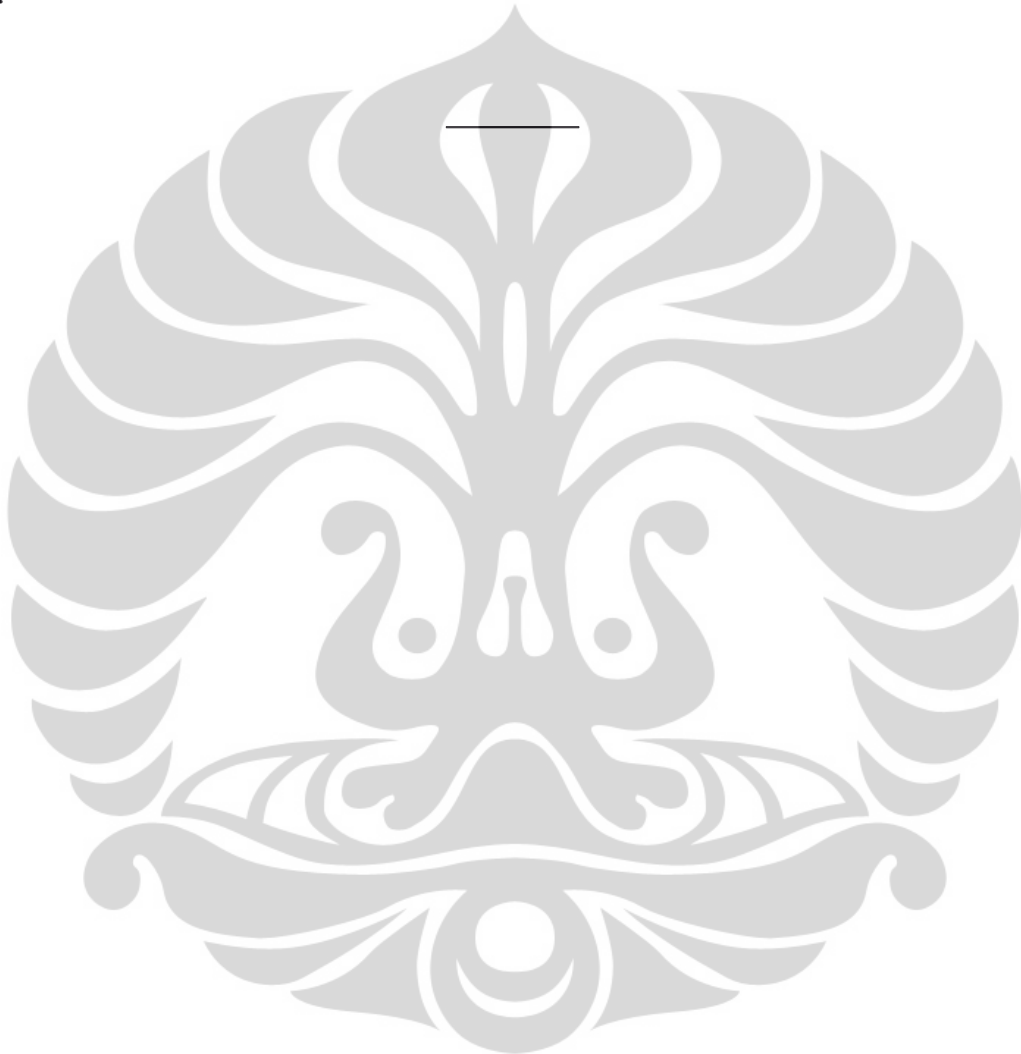
Article 3

In order to ensure the effectiveness of the excessive deficit procedure, the governments of the Member States shall be responsible under this procedure for the deficits of general government as

defined in the first indent of Article 2. The Member States shall ensure that national procedures in the budgetary area enable them to meet their obligations in this area deriving from these Treaties. The Member States shall report their planned and actual deficits and the levels of their debt promptly and regularly to the Commission.

Article 4

The statistical data to be used for the application of this Protocol shall be provided by the Commission.



PROTOCOL (No 13)
ON THE CONVERGENCE CRITERIA

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to lay down the details of the convergence criteria which shall guide the Union in taking decisions to end the derogations of those Member States with a derogation, referred to in Article 140 of the Treaty on the Functioning of the European Union,

HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The criterion on price stability referred to in the first indent of Article 140(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union shall mean that a Member State has a price performance that is sustainable and an average rate of inflation, observed over a period of one year before the examination, that does not exceed by more than 1 ½ percentage points that of, at most, the three best performing Member States in terms of price stability. Inflation shall be measured by means of the consumer price index on a comparable basis taking into account differences in national definitions.

Article 2

The criterion on the government budgetary position referred to in the second indent of Article 140(1) of the said Treaty shall mean that at the time of the examination the Member State is not the subject of a Council decision under Article 126(6) of the said Treaty that an excessive deficit exists.

Article 3

The criterion on participation in the Exchange Rate mechanism of the European Monetary System referred to in the third indent of Article 140(1) of the said Treaty shall mean that a Member State has respected the normal fluctuation margins provided for by the exchange-rate mechanism on the European Monetary System without severe tensions for at least the last two years before the examination. In particular, the Member State shall not have devalued its currency's bilateral central rate against the euro on its own initiative for the same period.

Article 4

The criterion on the convergence of interest rates referred to in the fourth indent of Article 140(1) of the said Treaty shall mean that, observed over a period of one year before the examination, a Member State has had an average nominal long-term interest rate that does not exceed by more

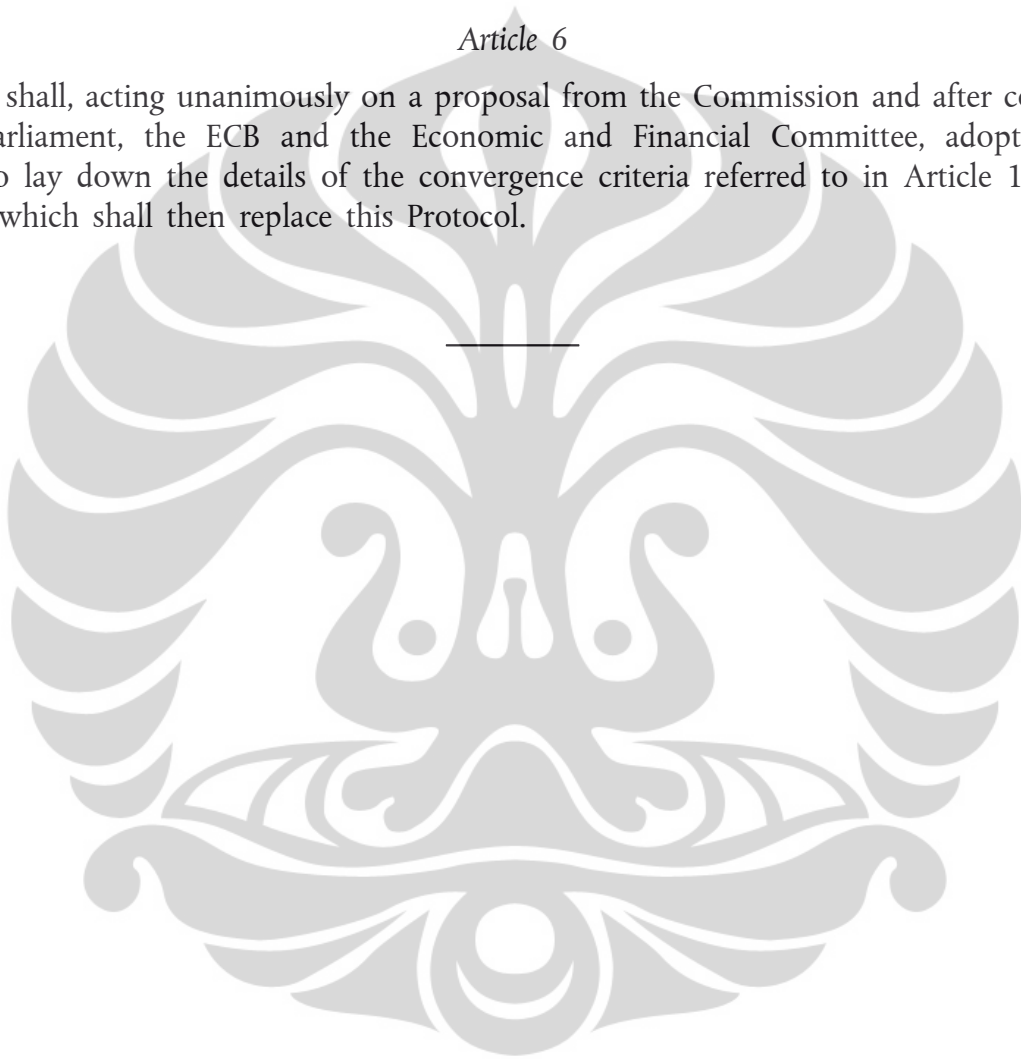
than two percentage points that of, at most, the three best performing Member States in terms of price stability. Interest rates shall be measured on the basis of long-term government bonds or comparable securities, taking into account differences in national definitions.

Article 5

The statistical data to be used for the application of this Protocol shall be provided by the Commission.

Article 6

The Council shall, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, the ECB and the Economic and Financial Committee, adopt appropriate provisions to lay down the details of the convergence criteria referred to in Article 140(1) of the said Treaty, which shall then replace this Protocol.



PROTOCOL (No 14)
ON THE EURO GROUP

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to promote conditions for stronger economic growth in the European Union and, to that end, to develop ever-closer coordination of economic policies within the euro area,

CONSCIOUS of the need to lay down special provisions for enhanced dialogue between the Member States whose currency is the euro, pending the euro becoming the currency of all Member States of the Union,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The Ministers of the Member States whose currency is the euro shall meet informally. Such meetings shall take place, when necessary, to discuss questions related to the specific responsibilities they share with regard to the single currency. The Commission shall take part in the meetings. The European Central Bank shall be invited to take part in such meetings, which shall be prepared by the representatives of the Ministers with responsibility for finance of the Member States whose currency is the euro and of the Commission.

Article 2

The Ministers of the Member States whose currency is the euro shall elect a president for two and a half years, by a majority of those Member States.

PROTOCOL (No 15)
ON CERTAIN PROVISIONS RELATING TO THE
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

RECOGNISING that the United Kingdom shall not be obliged or committed to adopt the euro without a separate decision to do so by its government and parliament,

GIVEN that on 16 October 1996 and 30 October 1997 the United Kingdom government notified the Council of its intention not to participate in the third stage of economic and monetary union,

NOTING the practice of the government of the United Kingdom to fund its borrowing requirement by the sale of debt to the private sector,

HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

1. Unless the United Kingdom notifies the Council that it intends to adopt the euro, it shall be under no obligation to do so.
2. In view of the notice given to the Council by the United Kingdom government on 16 October 1996 and 30 October 1997, paragraphs 3 to 8 and 10 shall apply to the United Kingdom.
3. The United Kingdom shall retain its powers in the field of monetary policy according to national law.
4. Articles 119, second paragraph, 126(1), (9) and (11), 127(1) to (5), 128, 130, 131, 132, 133, 138, 140(3), 219, 282(2), with the exception of the first and last sentences thereof, 282(5), and 283 of the Treaty on the Functioning of the European Union shall not apply to the United Kingdom. The same applies to Article 121(2) of this Treaty as regards the adoption of the parts of the broad economic policy guidelines which concern the euro area generally. In these provisions references to the Union or the Member States shall not include the United Kingdom and references to national central banks shall not include the Bank of England.
5. The United Kingdom shall endeavour to avoid an excessive government deficit.

Articles 143 and 144 of the Treaty on the Functioning of the European Union shall continue to apply to the United Kingdom. Articles 134(4) and 142 shall apply to the United Kingdom as if it had a derogation.

6. The voting rights of the United Kingdom shall be suspended in respect of acts of the Council referred to in the Articles listed in paragraph 4 and in the instances referred to in the first subparagraph of Article 139(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union. For this purpose the second subparagraph of Article 139(4) of the Treaty shall apply.

The United Kingdom shall also have no right to participate in the appointment of the President, the Vice-President and the other members of the Executive Board of the ECB under the second subparagraph of Article 283(2) of the said Treaty.

7. Articles 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18 to 20, 22, 23, 26, 27, 30 to 34 and 49 of the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank ('the Statute') shall not apply to the United Kingdom.

In those Articles, references to the Union or the Member States shall not include the United Kingdom and references to national central banks or shareholders shall not include the Bank of England.

References in Articles 10.3 and 30.2 of the Statute to 'subscribed capital of the ECB' shall not include capital subscribed by the Bank of England.

8. Article 141(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union and Articles 43 to 47 of the Statute shall have effect, whether or not there is any Member State with a derogation, subject to the following amendments:

- (a) References in Article 43 to the tasks of the ECB and the EMI shall include those tasks that still need to be performed in the third stage owing to any decision of the United Kingdom not to adopt the euro.
- (b) In addition to the tasks referred to in Article 46, the ECB shall also give advice in relation to and contribute to the preparation of any decision of the Council with regard to the United Kingdom taken in accordance with paragraphs 9(a) and 9(c).
- (c) The Bank of England shall pay up its subscription to the capital of the ECB as a contribution to its operational costs on the same basis as national central banks of Member States with a derogation.

9. The United Kingdom may notify the Council at any time of its intention to adopt the euro. In that event:

- (a) The United Kingdom shall have the right to adopt the euro provided only that it satisfies the necessary conditions. The Council, acting at the request of the United Kingdom and under the conditions and in accordance with the procedure laid down in Article 140(1) and (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, shall decide whether it fulfils the necessary conditions.
- (b) The Bank of England shall pay up its subscribed capital, transfer to the ECB foreign reserve assets and contribute to its reserves on the same basis as the national central bank of a Member State whose derogation has been abrogated.

- (c) The Council, acting under the conditions and in accordance with the procedure laid down in Article 140(3) of the said Treaty, shall take all other necessary decisions to enable the United Kingdom to adopt the euro.

If the United Kingdom adopts the euro pursuant to the provisions of this Protocol, paragraphs 3 to 8 shall cease to have effect.

10. Notwithstanding Article 123 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 21.1 of the Statute, the Government of the United Kingdom may maintain its 'ways and means' facility with the Bank of England if and so long as the United Kingdom does not adopt the euro.



PROTOCOL (No 16)
ON CERTAIN PROVISIONS RELATING TO DENMARK

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

TAKING INTO ACCOUNT that the Danish Constitution contains provisions which may imply a referendum in Denmark prior to Denmark renouncing its exemption,

GIVEN THAT, on 3 November 1993, the Danish Government notified the Council of its intention not to participate in the third stage of economic and monetary union,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

1. In view of the notice given to the Council by the Danish Government on 3 November 1993, Denmark shall have an exemption. The effect of the exemption shall be that all Articles and provisions of the Treaties and the Statute of the ESCB referring to a derogation shall be applicable to Denmark.
2. As for the abrogation of the exemption, the procedure referred to in Article 140 shall only be initiated at the request of Denmark.
3. In the event of abrogation of the exemption status, the provisions of this Protocol shall cease to apply.

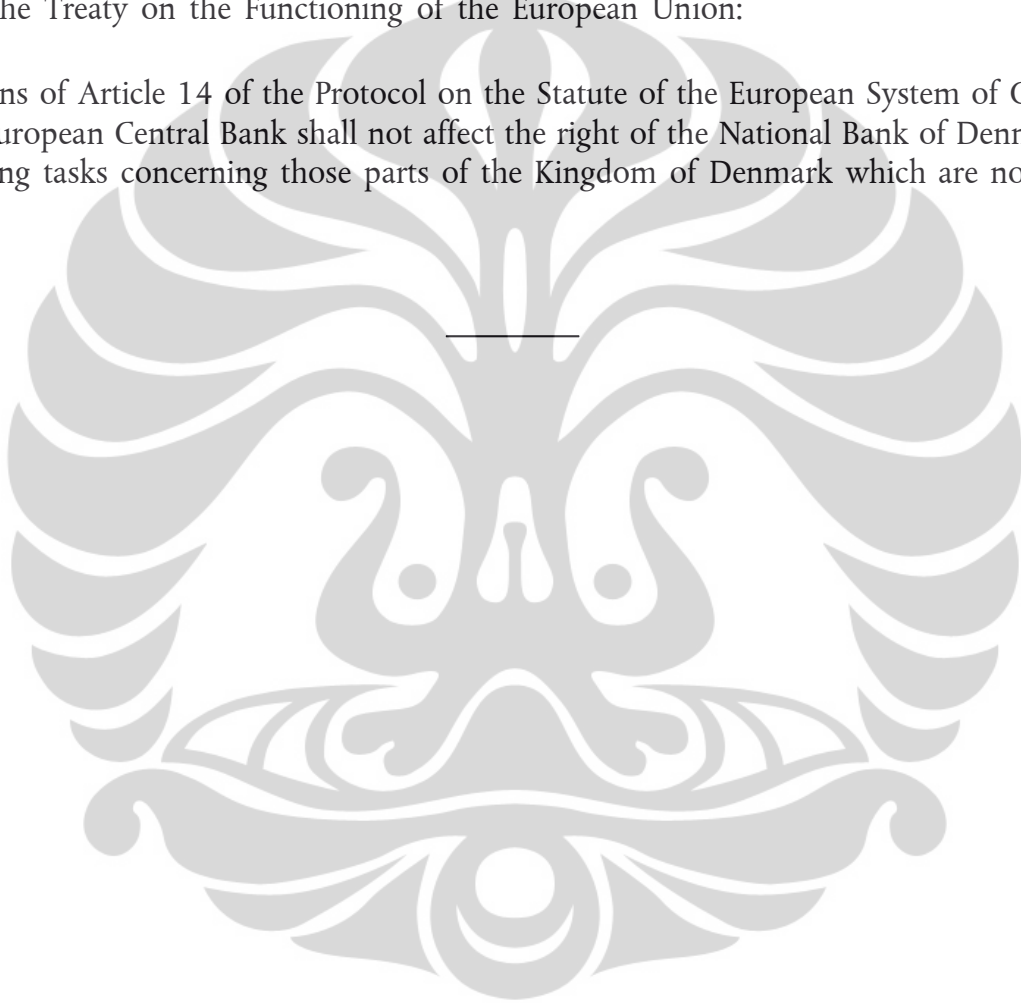
PROTOCOL (No 17)
ON DENMARK

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to settle certain particular problems relating to Denmark,

HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union:

The provisions of Article 14 of the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank shall not affect the right of the National Bank of Denmark to carry out its existing tasks concerning those parts of the Kingdom of Denmark which are not part of the Union.



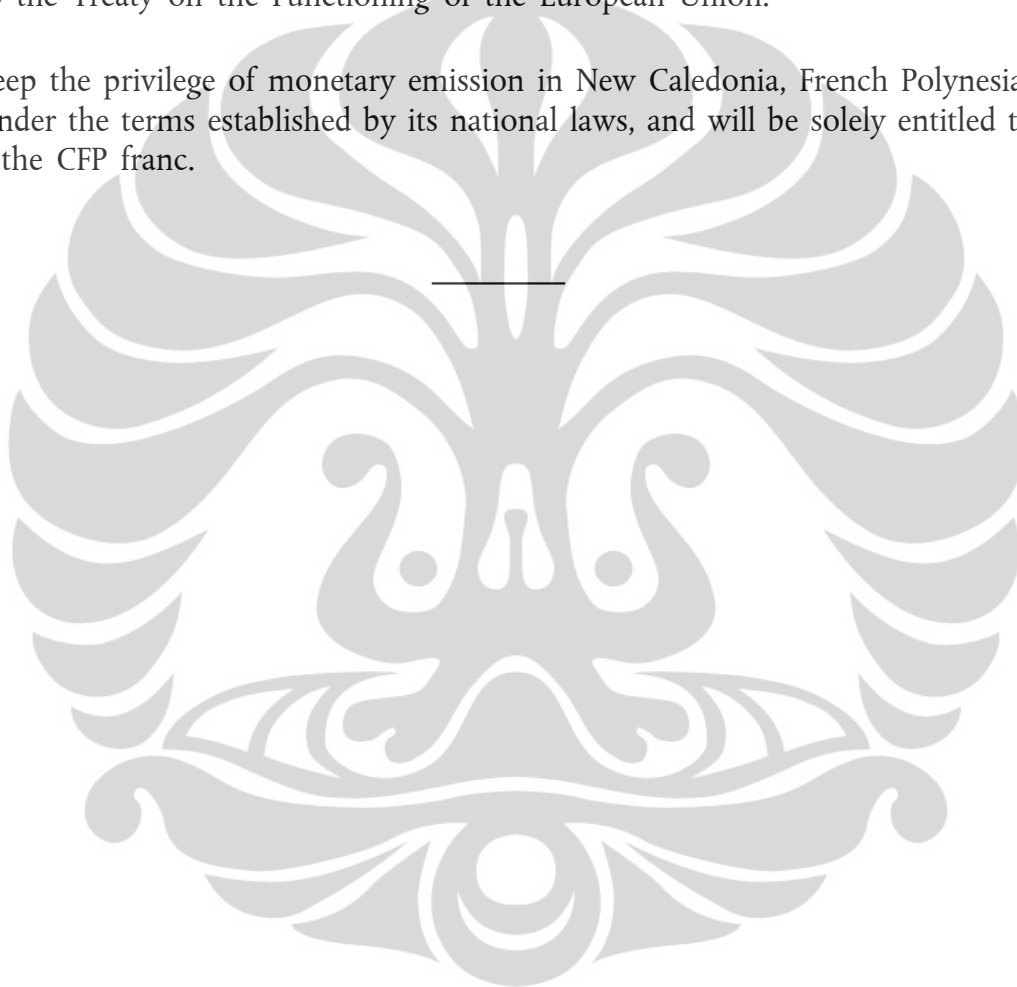
PROTOCOL (No 18)
ON FRANCE

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to take into account a particular point relating to France,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

France will keep the privilege of monetary emission in New Caledonia, French Polynesia and Wallis and Futuna under the terms established by its national laws, and will be solely entitled to determine the parity of the CFP franc.



PROTOCOL (No 19)
**ON THE SCHENGEN ACQUIS INTEGRATED INTO THE
FRAMEWORK OF THE EUROPEAN UNION**

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

NOTING that the Agreements on the gradual abolition of checks at common borders signed by some Member States of the European Union in Schengen on 14 June 1985 and on 19 June 1990, as well as related agreements and the rules adopted on the basis of these agreements, have been integrated into the framework of the European Union by the Treaty of Amsterdam of 2 October 1997,

DESIRING to preserve the Schengen *acquis*, as developed since the entry into force of the Treaty of Amsterdam, and to develop this *acquis* in order to contribute towards achieving the objective of offering citizens of the Union an area of freedom, security and justice without internal borders,

TAKING INTO ACCOUNT the special position of Denmark,

TAKING INTO ACCOUNT the fact that Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland do not participate in all the provisions of the Schengen *acquis*; that provision should, however, be made to allow those Member States to accept other provisions of this *acquis* in full or in part,

RECOGNISING that, as a consequence, it is necessary to make use of the provisions of the Treaties concerning closer cooperation between some Member States,

TAKING INTO ACCOUNT the need to maintain a special relationship with the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway, both States being bound by the provisions of the Nordic passport union, together with the Nordic States which are members of the European Union,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden shall be authorised to establish closer cooperation among themselves in areas covered by provisions defined by the Council which constitute the Schengen *acquis*. This cooperation shall be conducted within the institutional and legal framework of the European Union and with respect for the relevant provisions of the Treaties.

Article 2

The Schengen *acquis* shall apply to the Member States referred to in Article 1, without prejudice to Article 3 of the Act of Accession of 16 April 2003 or to Article 4 of the Act of Accession of 25 April 2005. The Council will substitute itself for the Executive Committee established by the Schengen agreements.

Article 3

The participation of Denmark in the adoption of measures constituting a development of the Schengen *acquis*, as well as the implementation of these measures and their application to Denmark, shall be governed by the relevant provisions of the Protocol on the position of Denmark.

Article 4

Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland may at any time request to take part in some or all of the provisions of the Schengen *acquis*.

The Council shall decide on the request with the unanimity of its members referred to in Article 1 and of the representative of the Government of the State concerned.

Article 5

1. Proposals and initiatives to build upon the Schengen *acquis* shall be subject to the relevant provisions of the Treaties.

In this context, where either Ireland or the United Kingdom has not notified the Council in writing within a reasonable period that it wishes to take part, the authorisation referred to in Article 329 of the Treaty on the Functioning of the European Union shall be deemed to have been granted to the Member States referred to in Article 1 and to Ireland or the United Kingdom where either of them wishes to take part in the areas of cooperation in question.

2. Where either Ireland or the United Kingdom is deemed to have given notification pursuant to a decision under Article 4, it may nevertheless notify the Council in writing, within three months, that it does not wish to take part in such a proposal or initiative. In that case, Ireland or the United Kingdom shall not take part in its adoption. As from the latter notification, the procedure for adopting the measure building upon the Schengen *acquis* shall be suspended until the end of the procedure set out in paragraphs 3 or 4 or until the notification is withdrawn at any moment during that procedure.

3. For the Member State having made the notification referred to in paragraph 2, any decision taken by the Council pursuant to Article 4 shall, as from the date of entry into force of the proposed measure, cease to apply to the extent considered necessary by the Council and under the conditions to be determined in a decision of the Council acting by a qualified majority on a proposal from the Commission. That decision shall be taken in accordance with the following criteria: the Council shall

seek to retain the widest possible measure of participation of the Member State concerned without seriously affecting the practical operability of the various parts of the Schengen *acquis*, while respecting their coherence. The Commission shall submit its proposal as soon as possible after the notification referred to in paragraph 2. The Council shall, if needed after convening two successive meetings, act within four months of the Commission proposal.

4. If, by the end of the period of four months, the Council has not adopted a decision, a Member State may, without delay, request that the matter be referred to the European Council. In that case, the European Council shall, at its next meeting, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, take a decision in accordance with the criteria referred to in paragraph 3.

5. If, by the end of the procedure set out in paragraphs 3 or 4, the Council or, as the case may be, the European Council has not adopted its decision, the suspension of the procedure for adopting the measure building upon the Schengen *acquis* shall be terminated. If the said measure is subsequently adopted any decision taken by the Council pursuant to Article 4 shall, as from the date of entry into force of that measure, cease to apply for the Member State concerned to the extent and under the conditions decided by the Commission, unless the said Member State has withdrawn its notification referred to in paragraph 2 before the adoption of the measure. The Commission shall act by the date of this adoption. When taking its decision, the Commission shall respect the criteria referred to in paragraph 3.

Article 6

The Republic of Iceland and the Kingdom of Norway shall be associated with the implementation of the Schengen *acquis* and its further development. Appropriate procedures shall be agreed to that effect in an Agreement to be concluded with those States by the Council, acting by the unanimity of its Members mentioned in Article 1. Such Agreement shall include provisions on the contribution of Iceland and Norway to any financial consequences resulting from the implementation of this Protocol.

A separate Agreement shall be concluded with Iceland and Norway by the Council, acting unanimously, for the establishment of rights and obligations between Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the one hand, and Iceland and Norway on the other, in domains of the Schengen *acquis* which apply to these States.

Article 7

For the purposes of the negotiations for the admission of new Member States into the European Union, the Schengen *acquis* and further measures taken by the institutions within its scope shall be regarded as an *acquis* which must be accepted in full by all States candidates for admission.

PROTOCOL (No 20)
ON THE APPLICATION OF CERTAIN ASPECTS OF
ARTICLE 26 OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING
OF THE EUROPEAN UNION TO THE UNITED
KINGDOM AND TO IRELAND

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to settle certain questions relating to the United Kingdom and Ireland,

HAVING REGARD to the existence for many years of special travel arrangements between the United Kingdom and Ireland,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The United Kingdom shall be entitled, notwithstanding Articles 26 and 77 of the Treaty on the Functioning of the European Union, any other provision of that Treaty or of the Treaty on European Union, any measure adopted under those Treaties, or any international agreement concluded by the Union or by the Union and its Member States with one or more third States, to exercise at its frontiers with other Member States such controls on persons seeking to enter the United Kingdom as it may consider necessary for the purpose:

- (a) of verifying the right to enter the United Kingdom of citizens of Member States and of their dependants exercising rights conferred by Union law, as well as citizens of other States on whom such rights have been conferred by an agreement by which the United Kingdom is bound; and
- (b) of determining whether or not to grant other persons permission to enter the United Kingdom.

Nothing in Articles 26 and 77 of the Treaty on the Functioning of the European Union or in any other provision of that Treaty or of the Treaty on European Union or in any measure adopted under them shall prejudice the right of the United Kingdom to adopt or exercise any such controls. References to the United Kingdom in this Article shall include territories for whose external relations the United Kingdom is responsible.

Article 2

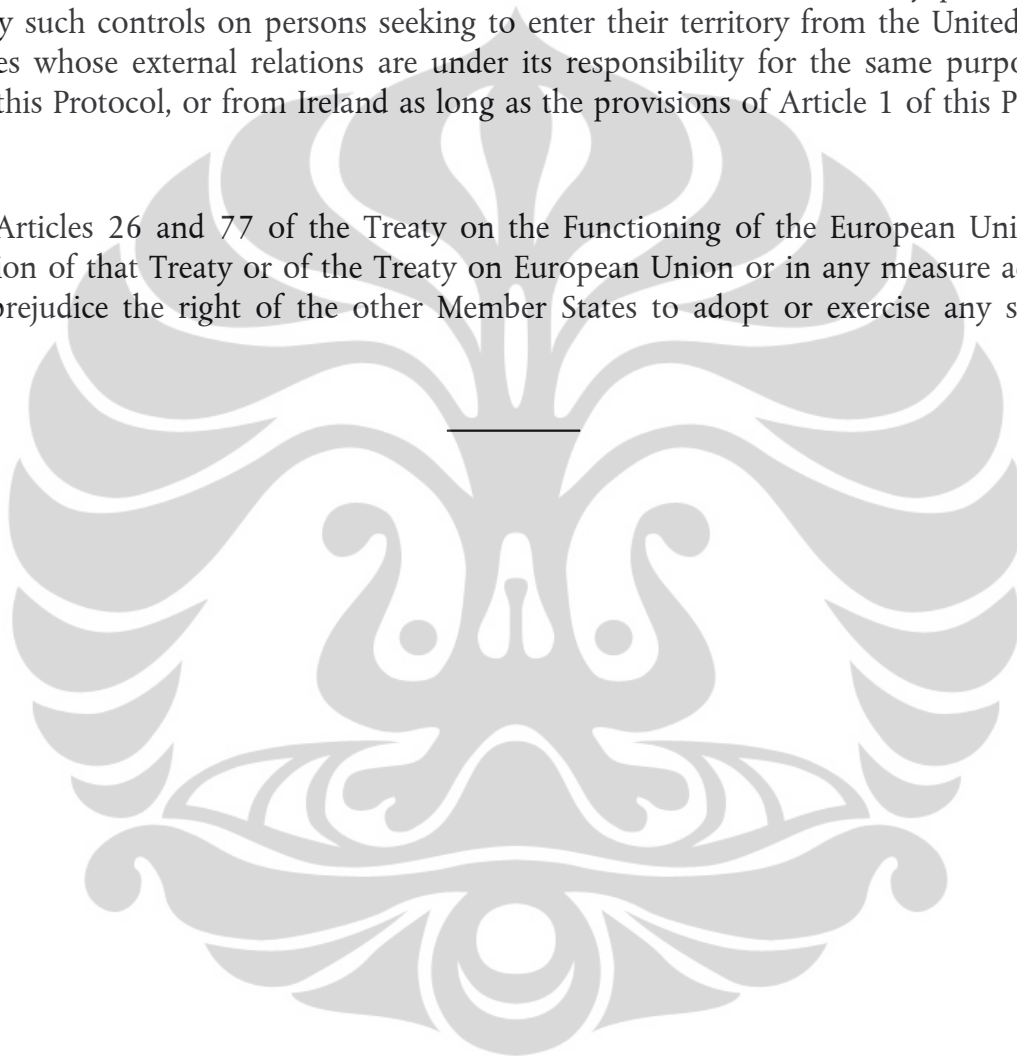
The United Kingdom and Ireland may continue to make arrangements between themselves relating to the movement of persons between their territories ('the Common Travel Area'), while fully respecting the rights of persons referred to in Article 1, first paragraph, point (a) of this Protocol.

Accordingly, as long as they maintain such arrangements, the provisions of Article 1 of this Protocol shall apply to Ireland under the same terms and conditions as for the United Kingdom. Nothing in Articles 26 and 77 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in any other provision of that Treaty or of the Treaty on European Union or in any measure adopted under them, shall affect any such arrangements.

Article 3

The other Member States shall be entitled to exercise at their frontiers or at any point of entry into their territory such controls on persons seeking to enter their territory from the United Kingdom or any territories whose external relations are under its responsibility for the same purposes stated in Article 1 of this Protocol, or from Ireland as long as the provisions of Article 1 of this Protocol apply to Ireland.

Nothing in Articles 26 and 77 of the Treaty on the Functioning of the European Union or in any other provision of that Treaty or of the Treaty on European Union or in any measure adopted under them shall prejudice the right of the other Member States to adopt or exercise any such controls.



PROTOCOL (No 21)
**ON THE POSITION OF THE UNITED KINGDOM AND
IRELAND IN RESPECT OF THE AREA OF FREEDOM,
SECURITY AND JUSTICE**

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to settle certain questions relating to the United Kingdom and Ireland,

HAVING REGARD to the Protocol on the application of certain aspects of Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union to the United Kingdom and to Ireland,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

Subject to Article 3, the United Kingdom and Ireland shall not take part in the adoption by the Council of proposed measures pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union. The unanimity of the members of the Council, with the exception of the representatives of the governments of the United Kingdom and Ireland, shall be necessary for decisions of the Council which must be adopted unanimously.

For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 2

In consequence of Article 1 and subject to Articles 3, 4 and 6, none of the provisions of Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, no measure adopted pursuant to that Title, no provision of any international agreement concluded by the Union pursuant to that Title, and no decision of the Court of Justice interpreting any such provision or measure shall be binding upon or applicable in the United Kingdom or Ireland; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the competences, rights and obligations of those States; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the Community or Union *acquis* nor form part of Union law as they apply to the United Kingdom or Ireland.

Article 3

1. The United Kingdom or Ireland may notify the President of the Council in writing, within three months after a proposal or initiative has been presented to the Council pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, that it wishes to take part in the adoption and application of any such proposed measure, whereupon that State shall be entitled to do so.

The unanimity of the members of the Council, with the exception of a member which has not made such a notification, shall be necessary for decisions of the Council which must be adopted unanimously. A measure adopted under this paragraph shall be binding upon all Member States which took part in its adoption.

Measures adopted pursuant to Article 70 of the Treaty on the Functioning of the European Union shall lay down the conditions for the participation of the United Kingdom and Ireland in the evaluations concerning the areas covered by Title V of Part Three of that Treaty.

For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

2. If after a reasonable period of time a measure referred to in paragraph 1 cannot be adopted with the United Kingdom or Ireland taking part, the Council may adopt such measure in accordance with Article 1 without the participation of the United Kingdom or Ireland. In that case Article 2 applies.

Article 4

The United Kingdom or Ireland may at any time after the adoption of a measure by the Council pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union notify its intention to the Council and to the Commission that it wishes to accept that measure. In that case, the procedure provided for in Article 331(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union shall apply *mutatis mutandis*.

Article 4a

1. The provisions of this Protocol apply for the United Kingdom and Ireland also to measures proposed or adopted pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union amending an existing measure by which they are bound.

2. However, in cases where the Council, acting on a proposal from the Commission, determines that the non-participation of the United Kingdom or Ireland in the amended version of an existing measure makes the application of that measure inoperable for other Member States or the Union, it may urge them to make a notification under Article 3 or 4. For the purposes of Article 3, a further period of two months starts to run as from the date of such determination by the Council.

If at the expiry of that period of two months from the Council's determination the United Kingdom or Ireland has not made a notification under Article 3 or Article 4, the existing measure shall no longer be binding upon or applicable to it, unless the Member State concerned has made a notification under Article 4 before the entry into force of the amending measure. This shall take effect from the date of entry into force of the amending measure or of expiry of the period of two months, whichever is the later.

For the purpose of this paragraph, the Council shall, after a full discussion of the matter, act by a qualified majority of its members representing the Member States participating or having participated in the adoption of the amending measure. A qualified majority of the Council shall be defined in accordance with Article 238(3)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

3. The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may determine that the United Kingdom or Ireland shall bear the direct financial consequences, if any, necessarily and unavoidably incurred as a result of the cessation of its participation in the existing measure.

4. This Article shall be without prejudice to Article 4.

Article 5

A Member State which is not bound by a measure adopted pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union shall bear no financial consequences of that measure other than administrative costs entailed for the institutions, unless all members of the Council, acting unanimously after consulting the European Parliament, decide otherwise.

Article 6

Where, in cases referred to in this Protocol, the United Kingdom or Ireland is bound by a measure adopted by the Council pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, the relevant provisions of the Treaties shall apply to that State in relation to that measure.

Article 6a

The United Kingdom and Ireland shall not be bound by the rules laid down on the basis of Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union which relate to the processing of personal data by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Chapter 4 or Chapter 5 of Title V of Part Three of that Treaty where the United Kingdom and Ireland are not bound by the rules governing the forms of judicial cooperation in criminal matters or police cooperation which require compliance with the provisions laid down on the basis of Article 16.

Article 7

Articles 3, 4 and 4a shall be without prejudice to the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union.

Article 8

Ireland may notify the Council in writing that it no longer wishes to be covered by the terms of this Protocol. In that case, the normal treaty provisions will apply to Ireland.

Article 9

With regard to Ireland, this Protocol shall not apply to Article 75 of the Treaty on the Functioning of the European Union.



PROTOCOL (No 22)
ON THE POSITION OF DENMARK

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

RECALLING the Decision of the Heads of State or Government, meeting within the European Council at Edinburgh on 12 December 1992, concerning certain problems raised by Denmark on the Treaty on European Union,

HAVING NOTED the position of Denmark with regard to Citizenship, Economic and Monetary Union, Defence Policy and Justice and Home Affairs as laid down in the Edinburgh Decision,

CONSCIOUS of the fact that a continuation under the Treaties of the legal regime originating in the Edinburgh decision will significantly limit Denmark's participation in important areas of cooperation of the Union, and that it would be in the best interest of the Union to ensure the integrity of the *acquis* in the area of freedom, security and justice,

WISHING therefore to establish a legal framework that will provide an option for Denmark to participate in the adoption of measures proposed on the basis of Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union and welcoming the intention of Denmark to avail itself of this option when possible in accordance with its constitutional requirements,

NOTING that Denmark will not prevent the other Member States from further developing their cooperation with respect to measures not binding on Denmark,

BEARING IN MIND Article 3 of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union:

PART I

Article 1

Denmark shall not take part in the adoption by the Council of proposed measures pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union. The unanimity of the members of the Council, with the exception of the representative of the government of Denmark, shall be necessary for the decisions of the Council which must be adopted unanimously.

For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 2

None of the provisions of Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, no measure adopted pursuant to that Title, no provision of any international agreement concluded by the Union pursuant to that Title, and no decision of the Court of Justice of the European Union interpreting any such provision or measure or any measure amended or amendable pursuant to that Title shall be binding upon or applicable in Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the competences, rights and obligations of Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the Community or Union *acquis* nor form part of Union law as they apply to Denmark. In particular, acts of the Union in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters adopted before the entry into force of the Treaty of Lisbon which are amended shall continue to be binding upon and applicable to Denmark unchanged.

Article 2a

Article 2 of this Protocol shall also apply in respect of those rules laid down on the basis of Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union which relate to the processing of personal data by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Chapter 4 or Chapter 5 of Title V of Part Three of that Treaty.

Article 3

Denmark shall bear no financial consequences of measures referred to in Article 1, other than administrative costs entailed for the institutions.

Article 4

1. Denmark shall decide within a period of six months after the Council has decided on a proposal or initiative to build upon the Schengen *acquis* covered by this Part, whether it will implement this measure in its national law. If it decides to do so, this measure will create an obligation under international law between Denmark and the other Member States bound by the measure.

2. If Denmark decides not to implement a measure of the Council as referred to in paragraph 1, the Member States bound by that measure and Denmark will consider appropriate measures to be taken.

PART II

Article 5

With regard to measures adopted by the Council pursuant to Article 26(1), Article 42 and Articles 43 to 46 of the Treaty on European Union, Denmark does not participate in the elaboration and the implementation of decisions and actions of the Union which have defence implications. Therefore

Denmark shall not participate in their adoption. Denmark will not prevent the other Member States from further developing their cooperation in this area. Denmark shall not be obliged to contribute to the financing of operational expenditure arising from such measures, nor to make military capabilities available to the Union.

The unanimity of the members of the Council, with the exception of the representative of the government of Denmark, shall be necessary for the acts of the Council which must be adopted unanimously.

For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

PART III

Article 6

Articles 1, 2 and 3 shall not apply to measures determining the third countries whose nationals must be in possession of a visa when crossing the external borders of the Member States, or measures relating to a uniform format for visas.

PART IV

Article 7

At any time Denmark may, in accordance with its constitutional requirements, inform the other Member States that it no longer wishes to avail itself of all or part of this Protocol. In that event, Denmark will apply in full all relevant measures then in force taken within the framework of the European Union.

Article 8

1. At any time and without prejudice to Article 7, Denmark may, in accordance with its constitutional requirements, notify the other Member States that, with effect from the first day of the month following the notification, Part I shall consist of the provisions in the Annex. In that case Articles 5 to 8 shall be renumbered in consequence.

2. Six months after the date on which the notification referred to in paragraph 1 takes effect all Schengen *acquis* and measures adopted to build upon this *acquis*, which until then have been binding on Denmark as obligations under international law, shall be binding upon Denmark as Union law.

ANNEX

Article 1

Subject to Article 3, Denmark shall not take part in the adoption by the Council of measures proposed pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union. The unanimity of the members of the Council, with the exception of the representative of the government of Denmark, shall be necessary for the acts of the Council which must be adopted unanimously.

For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Article 2

Pursuant to Article 1 and subject to Articles 3, 4 and 8, none of the provisions in Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, no measure adopted pursuant to that Title, no provision of any international agreements concluded by the Union pursuant to that Title, no decision of the Court of Justice of the European Union interpreting any such provision or measure shall be binding upon or applicable in Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the competences, rights and obligations of Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the Community or Union *acquis* nor form part of Union law as they apply to Denmark.

Article 3

1. Denmark may notify the President of the Council in writing, within three months after a proposal or initiative has been presented to the Council pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, that it wishes to take part in the adoption and application of any such proposed measure, whereupon Denmark shall be entitled to do so.

2. If after a reasonable period of time a measure referred to in paragraph 1 cannot be adopted with Denmark taking part, the Council may adopt that measure referred to in paragraph 1 in accordance with Article 1 without the participation of Denmark. In that case Article 2 applies.

Article 4

Denmark may at any time after the adoption of a measure pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union notify its intention to the Council and the Commission that it wishes to accept that measure. In that case, the procedure provided for in Article 331(1) of that Treaty shall apply *mutatis mutandis*.

Article 5

1. The provisions of this Protocol apply for Denmark also to measures proposed or adopted pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union amending an existing measure by which it is bound.

2. However, in cases where the Council, acting on a proposal from the Commission, determines that the non-participation of Denmark in the amended version of an existing measure makes the application of that measure inoperable for other Member States or the Union, it may urge it to make a notification under Article 3 or 4. For the purposes of Article 3 a further period of two months starts to run as from the date of such determination by the Council.

If, at the expiry of that period of two months from the Council's determination, Denmark has not made a notification under Article 3 or Article 4, the existing measure shall no longer be binding upon or applicable to it, unless it has made a notification under Article 4 before the entry into force of the amending measure. This shall take effect from the date of entry into force of the amending measure or of expiry of the period of two months, whichever is the later.

For the purpose of this paragraph, the Council shall, after a full discussion of the matter, act by a qualified majority of its members representing the Member States participating or having participated in the adoption of the amending measure. A qualified majority of the Council shall be defined in accordance with Article 238(3)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

3. The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may determine that Denmark shall bear the direct financial consequences, if any, necessarily and unavoidably incurred as a result of the cessation of its participation in the existing measure.

4. This Article shall be without prejudice to Article 4.

Article 6

1. Notification pursuant to Article 4 shall be submitted no later than six months after the final adoption of a measure if this measure builds upon the Schengen *acquis*.

If Denmark does not submit a notification in accordance with Articles 3 or 4 regarding a measure building upon the Schengen *acquis*, the Member States bound by that measure and Denmark will consider appropriate measures to be taken.

2. A notification pursuant to Article 3 with respect to a measure building upon the Schengen *acquis* shall be deemed irrevocably to be a notification pursuant to Article 3 with respect to any further proposal or initiative aiming to build upon that measure to the extent that such proposal or initiative builds upon the Schengen *acquis*.

Article 7

Denmark shall not be bound by the rules laid down on the basis of Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union which relate to the processing of personal data by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Chapter 4 or Chapter 5 of Title V of Part Three of that Treaty where Denmark is not bound by the rules governing the forms of judicial cooperation in criminal matters or police cooperation which require compliance with the provisions laid down on the basis of Article 16.

Article 8

Where, in cases referred to in this Part, Denmark is bound by a measure adopted by the Council pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, the relevant provisions of the Treaties shall apply to Denmark in relation to that measure.

Article 9

Where Denmark is not bound by a measure adopted pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, it shall bear no financial consequences of that measure other than administrative costs entailed for the institutions unless the Council, with all its Members acting unanimously after consulting the European Parliament, decides otherwise.

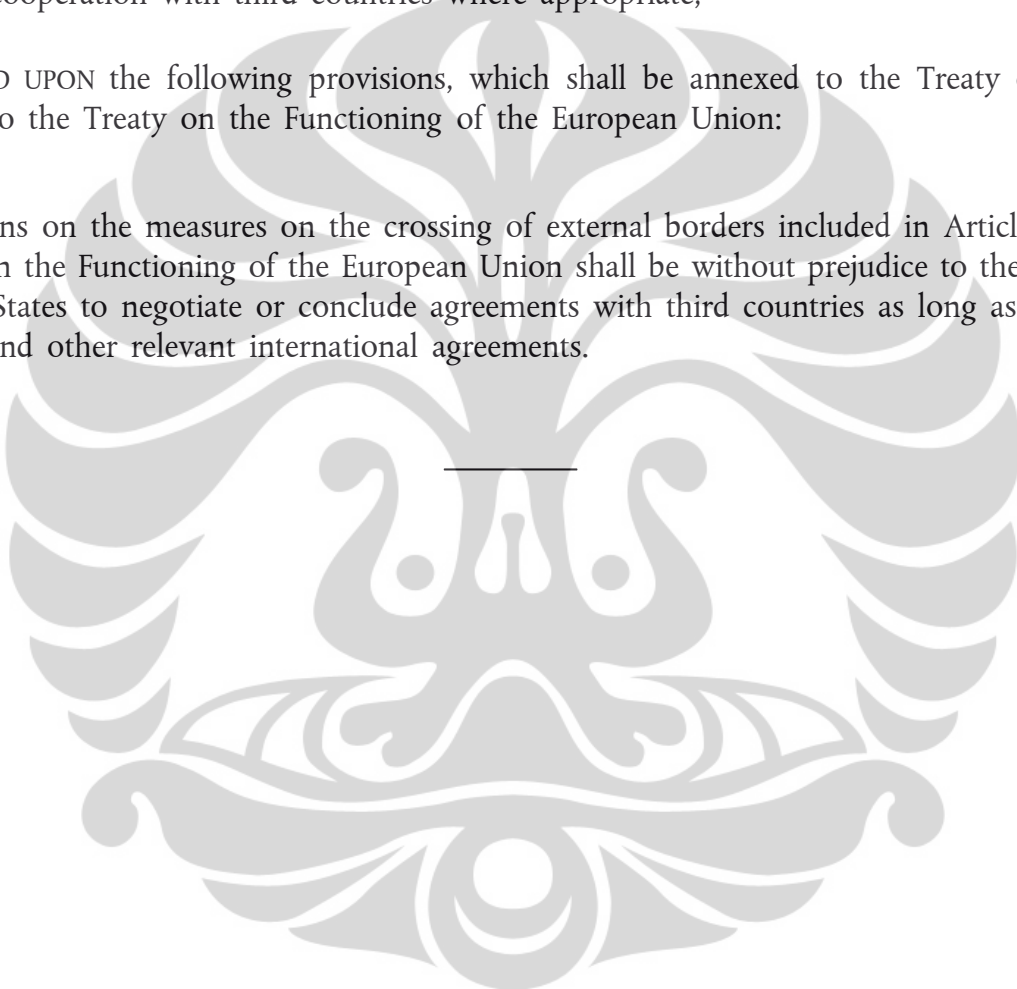
PROTOCOL (No 23)
ON EXTERNAL RELATIONS OF THE MEMBER STATES
WITH REGARD TO THE CROSSING OF EXTERNAL
BORDERS

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

TAKING INTO ACCOUNT the need of the Member States to ensure effective controls at their external borders, in cooperation with third countries where appropriate,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

The provisions on the measures on the crossing of external borders included in Article 77(2)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union shall be without prejudice to the competence of Member States to negotiate or conclude agreements with third countries as long as they respect Union law and other relevant international agreements.



PROTOCOL (No 24)
ON ASYLUM FOR NATIONALS OF MEMBER STATES
OF THE EUROPEAN UNION

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

WHEREAS, in accordance with Article 6(1) of the Treaty on European Union, the Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights,

WHEREAS pursuant to Article 6(3) of the Treaty on European Union, fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, constitute part of the Union's law as general principles,

WHEREAS the Court of Justice of the European Union has jurisdiction to ensure that in the interpretation and application of Article 6, paragraphs (1) and (3) of the Treaty on European Union the law is observed by the European Union,

WHEREAS pursuant to Article 49 of the Treaty on European Union any European State, when applying to become a Member of the Union, must respect the values set out in Article 2 of the Treaty on European Union,

BEARING IN MIND that Article 7 of the Treaty on European Union establishes a mechanism for the suspension of certain rights in the event of a serious and persistent breach by a Member State of those values,

RECALLING that each national of a Member State, as a citizen of the Union, enjoys a special status and protection which shall be guaranteed by the Member States in accordance with the provisions of Part Two of the Treaty on the Functioning of the European Union,

BEARING IN MIND that the Treaties establish an area without internal frontiers and grant every citizen of the Union the right to move and reside freely within the territory of the Member States,

WISHING to prevent the institution of asylum being resorted to for purposes alien to those for which it is intended,

WHEREAS this Protocol respects the finality and the objectives of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the status of refugees,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Sole Article

Given the level of protection of fundamental rights and freedoms by the Member States of the European Union, Member States shall be regarded as constituting safe countries of origin in respect of each other for all legal and practical purposes in relation to asylum matters. Accordingly, any application for asylum made by a national of a Member State may be taken into consideration or declared admissible for processing by another Member State only in the following cases:

- (a) if the Member State of which the applicant is a national proceeds after the entry into force of the Treaty of Amsterdam, availing itself of the provisions of Article 15 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, to take measures derogating in its territory from its obligations under that Convention;
- (b) if the procedure referred to Article 7(1) of the Treaty on European Union has been initiated and until the Council, or, where appropriate, the European Council, takes a decision in respect thereof with regard to the Member State of which the applicant is a national;
- (c) if the Council has adopted a decision in accordance with Article 7(1) of the Treaty on European Union in respect of the Member State of which the applicant is a national or if the European Council has adopted a decision in accordance with Article 7(2) of that Treaty in respect of the Member State of which the applicant is a national;
- (d) if a Member State should so decide unilaterally in respect of the application of a national of another Member State; in that case the Council shall be immediately informed; the application shall be dealt with on the basis of the presumption that it is manifestly unfounded without affecting in any way, whatever the cases may be, the decision-making power of the Member State.

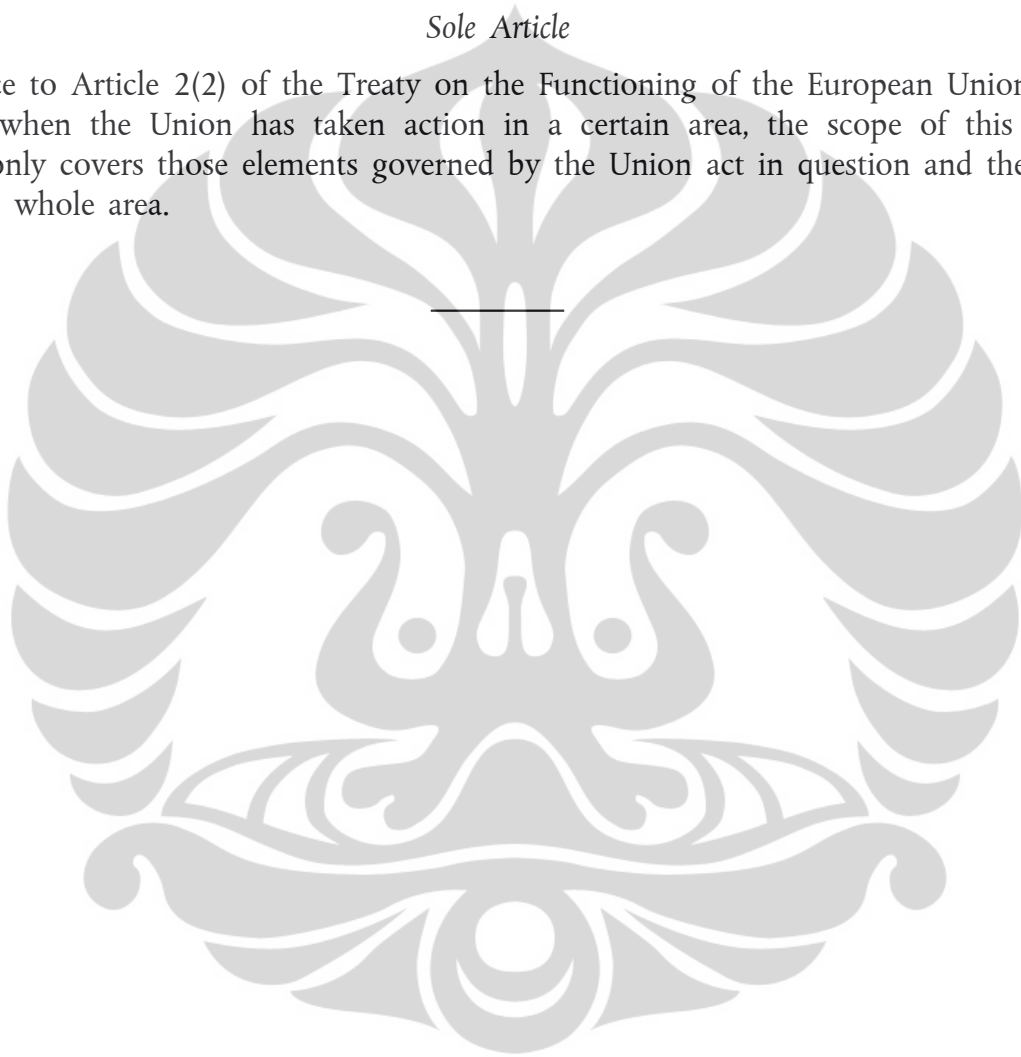
PROTOCOL (No 25)
ON THE EXERCISE OF SHARED COMPETENCE

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Sole Article

With reference to Article 2(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union on shared competence, when the Union has taken action in a certain area, the scope of this exercise of competence only covers those elements governed by the Union act in question and therefore does not cover the whole area.



PROTOCOL (No 26)
ON SERVICES OF GENERAL INTEREST

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

WISHING to emphasise the importance of services of general interest,

HAVE AGREED UPON the following interpretative provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

The shared values of the Union in respect of services of general economic interest within the meaning of Article 14 of the Treaty on the Functioning of the European Union include in particular:

- the essential role and the wide discretion of national, regional and local authorities in providing, commissioning and organising services of general economic interest as closely as possible to the needs of the users;
- the diversity between various services of general economic interest and the differences in the needs and preferences of users that may result from different geographical, social or cultural situations;
- a high level of quality, safety and affordability, equal treatment and the promotion of universal access and of user rights.

Article 2

The provisions of the Treaties do not affect in any way the competence of Member States to provide, commission and organise non-economic services of general interest.

PROTOCOL (No 27)
ON THE INTERNAL MARKET AND COMPETITION

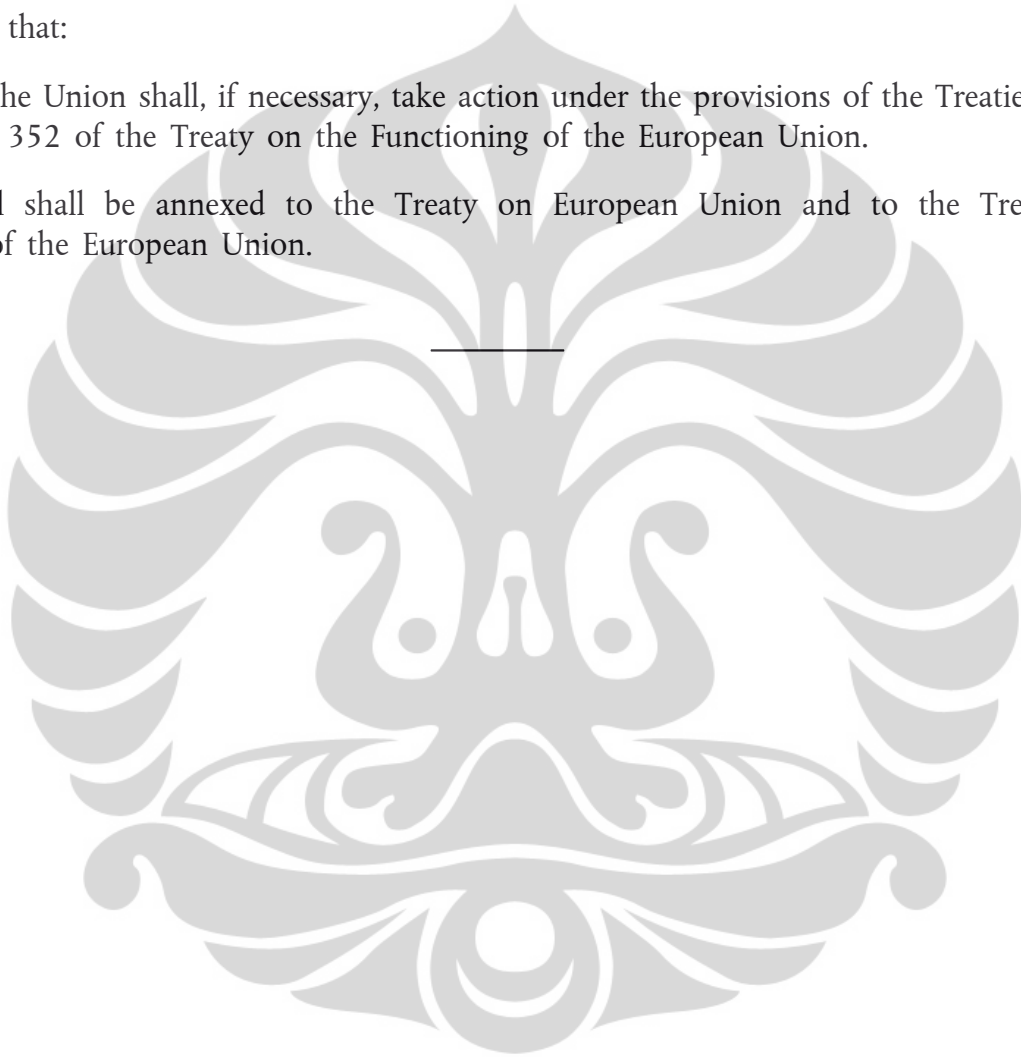
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

CONSIDERING that the internal market as set out in Article 3 of the Treaty on European Union includes a system ensuring that competition is not distorted,

HAVE AGREED that:

To this end, the Union shall, if necessary, take action under the provisions of the Treaties, including under Article 352 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

This protocol shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union.



PROTOCOL (No 28)
ON ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIAL
COHESION

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

RECALLING that Article 3 of the Treaty on European Union includes the objective of promoting economic, social and territorial cohesion and solidarity between Member States and that the said cohesion figures among the areas of shared competence of the Union listed in Article 4(2)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union,

RECALLING that the provisions of Part Three, Title XVIII, on economic, social and territorial cohesion as a whole provide the legal basis for consolidating and further developing the Union's action in the field of economic, social and territorial cohesion, including the creation of a new fund,

RECALLING that the provisions of Article 177 of the Treaty on the Functioning of the European Union envisage setting up a Cohesion Fund,

NOTING that the European Investment Bank is lending large and increasing amounts for the benefit of the poorer regions,

NOTING the desire for greater flexibility in the arrangements for allocations from the Structural Funds,

NOTING the desire for modulation of the levels of Union participation in programmes and projects in certain countries,

NOTING the proposal to take greater account of the relative prosperity of Member States in the system of own resources,

REAFFIRM that the promotion of economic, social and territorial cohesion is vital to the full development and enduring success of the Union,

REAFFIRM their conviction that the Structural Funds should continue to play a considerable part in the achievement of Union objectives in the field of cohesion,

REAFFIRM their conviction that the European Investment Bank should continue to devote the majority of its resources to the promotion of economic, social and territorial cohesion, and declare their willingness to review the capital needs of the European Investment Bank as soon as this is necessary for that purpose,

AGREE that the Cohesion Fund will provide Union financial contributions to projects in the fields of environment and trans-European networks in Member States with a per capita GNP of less than 90 % of the Union average which have a programme leading to the fulfilment of the conditions of economic convergence as set out in Article 126,

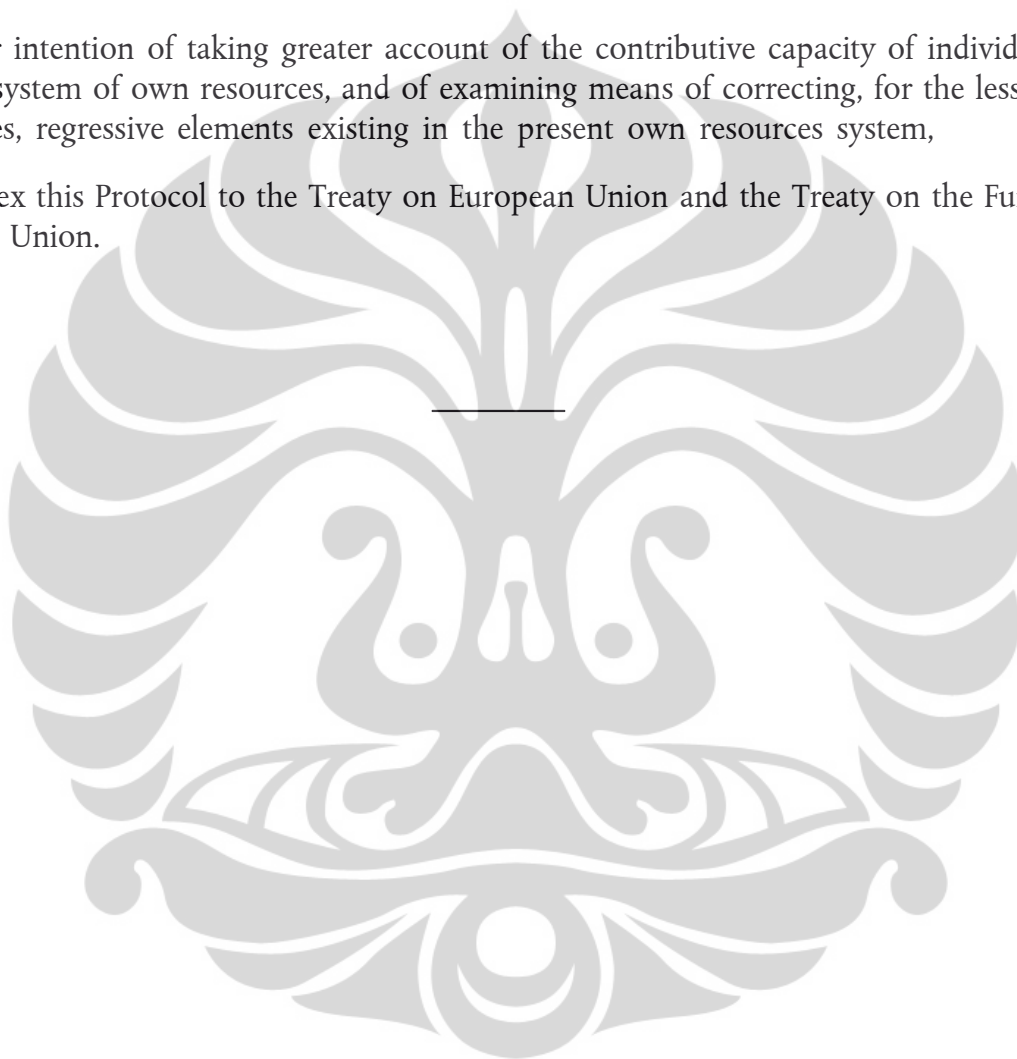
DECLARE their intention of allowing a greater margin of flexibility in allocating financing from the Structural Funds to specific needs not covered under the present Structural Funds regulations,

DECLARE their willingness to modulate the levels of Union participation in the context of programmes and projects of the Structural Funds, with a view to avoiding excessive increases in budgetary expenditure in the less prosperous Member States,

RECOGNISE the need to monitor regularly the progress made towards achieving economic, social and territorial cohesion and state their willingness to study all necessary measures in this respect,

DECLARE their intention of taking greater account of the contributive capacity of individual Member States in the system of own resources, and of examining means of correcting, for the less prosperous Member States, regressive elements existing in the present own resources system,

AGREE to annex this Protocol to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.



PROTOCOL (No 29)
ON THE SYSTEM OF PUBLIC BROADCASTING IN THE
MEMBER STATES

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

CONSIDERING that the system of public broadcasting in the Member States is directly related to the democratic, social and cultural needs of each society and to the need to preserve media pluralism,

HAVE AGREED UPON the following interpretive provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

The provisions of the Treaties shall be without prejudice to the competence of Member States to provide for the funding of public service broadcasting and in so far as such funding is granted to broadcasting organisations for the fulfilment of the public service remit as conferred, defined and organised by each Member State, and in so far as such funding does not affect trading conditions and competition in the Union to an extent which would be contrary to the common interest, while the realisation of the remit of that public service shall be taken into account.

PROTOCOL (No 30)
ON THE APPLICATION OF THE CHARTER OF
FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION
TO POLAND AND TO THE UNITED KINGDOM

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

WHEREAS in Article 6 of the Treaty on European Union, the Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union,

WHEREAS the Charter is to be applied in strict accordance with the provisions of the aforementioned Article 6 and Title VII of the Charter itself,

WHEREAS the aforementioned Article 6 requires the Charter to be applied and interpreted by the courts of Poland and of the United Kingdom strictly in accordance with the explanations referred to in that Article,

WHEREAS the Charter contains both rights and principles,

WHEREAS the Charter contains both provisions which are civil and political in character and those which are economic and social in character,

WHEREAS the Charter reaffirms the rights, freedoms and principles recognised in the Union and makes those rights more visible, but does not create new rights or principles,

RECALLING the obligations devolving upon Poland and the United Kingdom under the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union, and Union law generally,

NOTING the wish of Poland and the United Kingdom to clarify certain aspects of the application of the Charter,

DESIROUS therefore of clarifying the application of the Charter in relation to the laws and administrative action of Poland and of the United Kingdom and of its justiciability within Poland and within the United Kingdom,

REAFFIRMING that references in this Protocol to the operation of specific provisions of the Charter are strictly without prejudice to the operation of other provisions of the Charter,

REAFFIRMING that this Protocol is without prejudice to the application of the Charter to other Member States,

REAFFIRMING that this Protocol is without prejudice to other obligations devolving upon Poland and the United Kingdom under the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union, and Union law generally,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

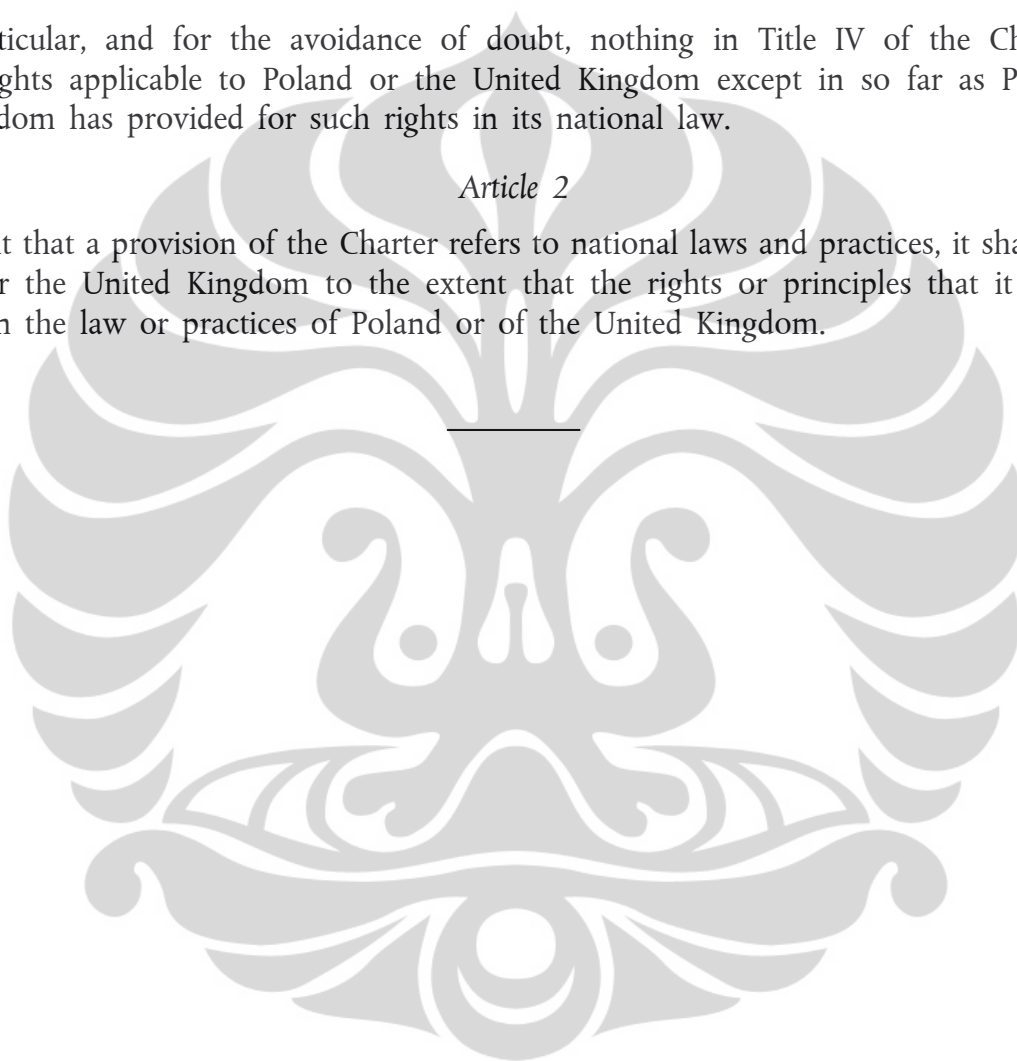
Article 1

1. The Charter does not extend the ability of the Court of Justice of the European Union, or any court or tribunal of Poland or of the United Kingdom, to find that the laws, regulations or administrative provisions, practices or action of Poland or of the United Kingdom are inconsistent with the fundamental rights, freedoms and principles that it reaffirms.

2. In particular, and for the avoidance of doubt, nothing in Title IV of the Charter creates justiciable rights applicable to Poland or the United Kingdom except in so far as Poland or the United Kingdom has provided for such rights in its national law.

Article 2

To the extent that a provision of the Charter refers to national laws and practices, it shall only apply to Poland or the United Kingdom to the extent that the rights or principles that it contains are recognised in the law or practices of Poland or of the United Kingdom.



PROTOCOL (No 31)
CONCERNING IMPORTS INTO THE EUROPEAN UNION OF
PETROLEUM PRODUCTS REFINED IN THE NETHERLANDS ANTILLES

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

BEING DESIROUS of giving fuller details about the system of trade applicable to imports into the European Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

This Protocol is applicable to petroleum products coming under the Brussels Nomenclature numbers 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffin wax, petroleum or shale wax and paraffin residues) and 27.14, imported for use in Member States.

Article 2

Member States shall undertake to grant to petroleum products refined in the Netherlands Antilles the tariff preferences resulting from the association of the latter with the Union, under the conditions provided for in this Protocol. These provisions shall hold good whatever may be the rules of origin applied by the Member States.

Article 3

1. When the Commission, at the request of a Member State or on its own initiative, establishes that imports into the Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles under the system provided for in Article 2 above are giving rise to real difficulties on the market of one or more Member States, it shall decide that customs duties on the said imports shall be introduced, increased or re-introduced by the Member States in question, to such an extent and for such a period as may be necessary to meet that situation. The rates of the customs duties thus introduced, increased or re-introduced may not exceed the customs duties applicable to third countries for these same products.

2. The provisions of paragraph 1 can in any case be applied when imports into the Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles reach two million metric tons a year.

3. The Council shall be informed of decisions taken by the Commission in pursuance of paragraphs 1 and 2, including those directed at rejecting the request of a Member State. The Council shall, at the request of any Member State, assume responsibility for the matter and may at any time amend or revoke them.

Article 4

1. If a Member State considers that imports of petroleum products refined in the Netherlands Antilles, made either directly or through another Member State under the system provided for in Article 2 above, are giving rise to real difficulties on its market and that immediate action is necessary to meet them, it may on its own initiative decide to apply customs duties to such imports, the rate of which may not exceed those of the customs duties applicable to third countries in respect of the same products. It shall notify its decision to the Commission which shall decide within one month whether the measures taken by the State should be maintained or must be amended or cancelled. The provisions of Article 3(3) shall be applicable to such decision of the Commission.

2. When the quantities of petroleum products refined in the Netherlands Antilles imported either directly or through another Member State, under the system provided for in Article 2 above, into a Member State or States of the European Union exceed during a calendar year the tonnage shown in the Annex to this Protocol, the measures taken in pursuance of paragraph 1 by that or those Member States for the current year shall be considered to be justified; the Commission shall, after assuring itself that the tonnage fixed has been reached, formally record the measures taken. In such a case the other Member States shall abstain from formally placing the matter before the Council.

Article 5

If the Union decides to apply quantitative restrictions to petroleum products, no matter whence they are imported, these restrictions may also be applied to imports of such products from the Netherlands Antilles. In such a case preferential treatment shall be granted to the Netherlands Antilles as compared with third countries.

Article 6

1. The provisions of Articles 2 to 5 shall be reviewed by the Council, by unanimous decision, after consulting the European Parliament and the Commission, when a common definition of origin for petroleum products from third countries and associated countries is adopted, or when decisions are taken within the framework of a common commercial policy for the products in question or when a common energy policy is established.

2. When such revision is made, however, equivalent preferences must in any case be maintained in favour of the Netherlands Antilles in a suitable form and for a minimum quantity of 21½ million metric tons of petroleum products.

3. The Union's commitments in regard to equivalent preferences as mentioned in paragraph 2 of this Article may, if necessary, be broken down country by country taking into account the tonnage indicated in the Annex to this Protocol.

Article 7

For the implementation of this Protocol, the Commission is responsible for following the pattern of imports into the Member States of petroleum products refined in the Netherlands Antilles. Member States shall communicate to the Commission, which shall see that it is circulated, all useful information to that end in accordance with the administrative conditions recommended by it.

ANNEX TO THE PROTOCOL

For the implementation of Article 4(2) of the Protocol concerning imports into the European Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles, the High Contracting Parties have decided that the quantity of 2 million metric tons of petroleum products from the Antilles shall be allocated among the Member States as follows:

Germany	625 000 metric tons
Belgo-Luxembourg Economic Union	200 000 metric tons
France	75 000 metric tons
Italy	100 000 metric tons
Netherlands	1 000 000 metric tons

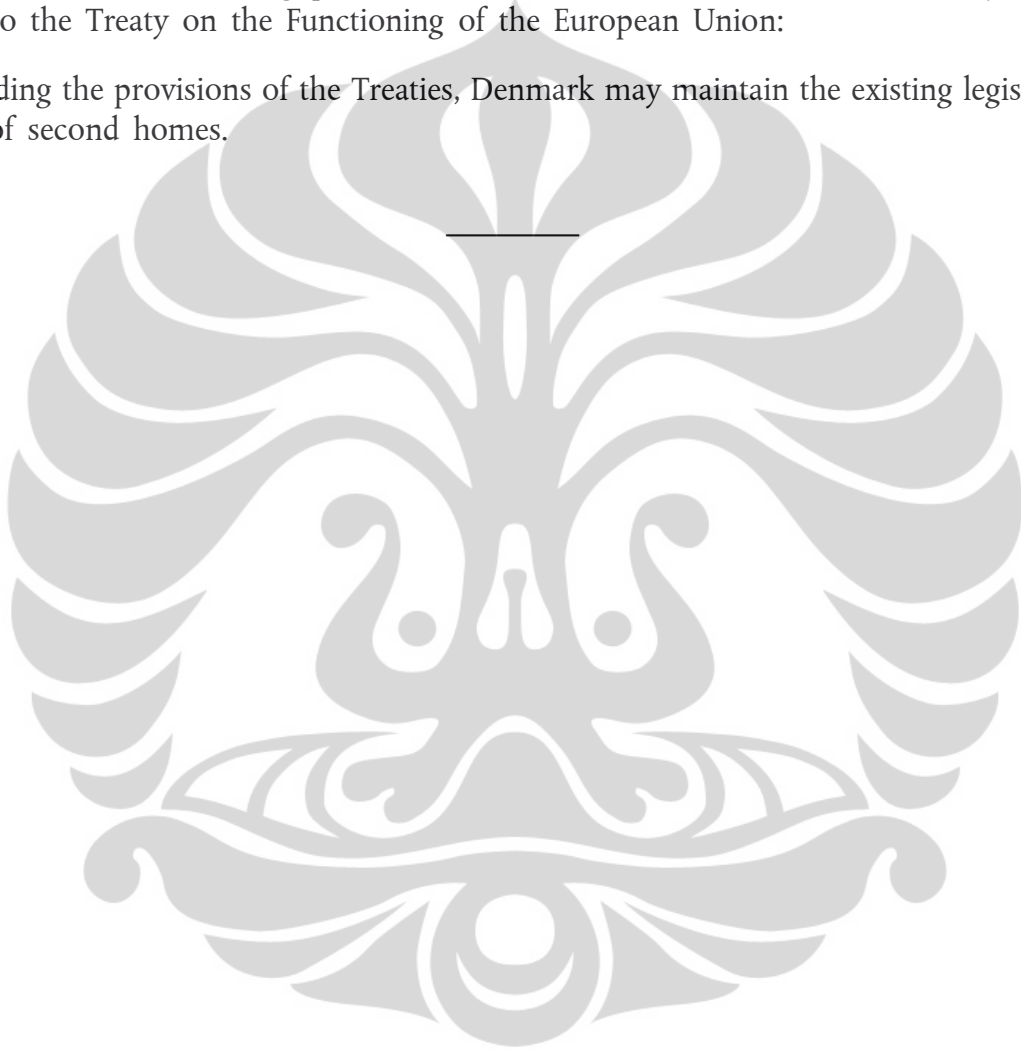
PROTOCOL (No 32)
ON THE ACQUISITION OF PROPERTY IN DENMARK

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to settle certain particular problems relating to Denmark,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Notwithstanding the provisions of the Treaties, Denmark may maintain the existing legislation on the acquisition of second homes.

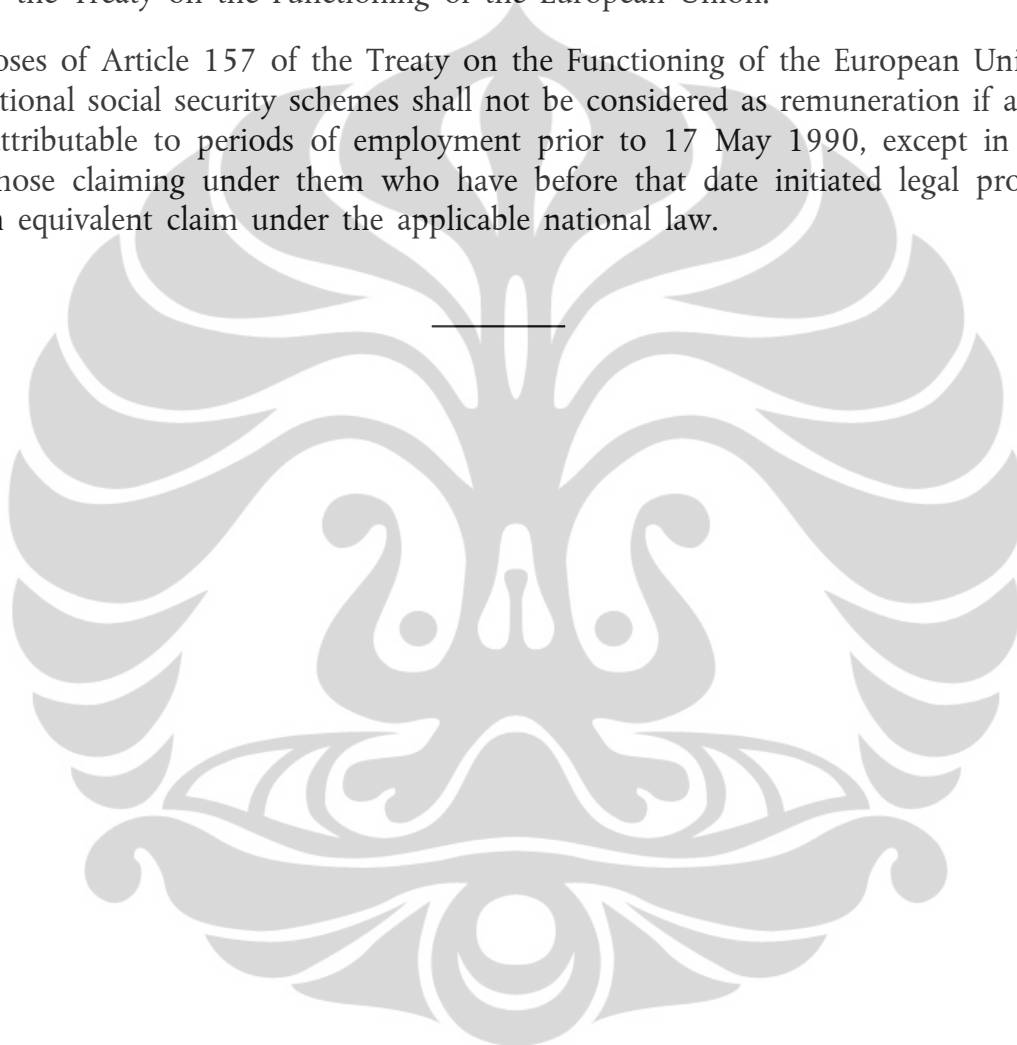


PROTOCOL (No 33)
CONCERNING ARTICLE 157 OF THE TREATY ON THE
FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

HAVE AGREED upon the following provision, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

For the purposes of Article 157 of the Treaty on the Functioning of the European Union, benefits under occupational social security schemes shall not be considered as remuneration if and in so far as they are attributable to periods of employment prior to 17 May 1990, except in the case of workers or those claiming under them who have before that date initiated legal proceedings or introduced an equivalent claim under the applicable national law.

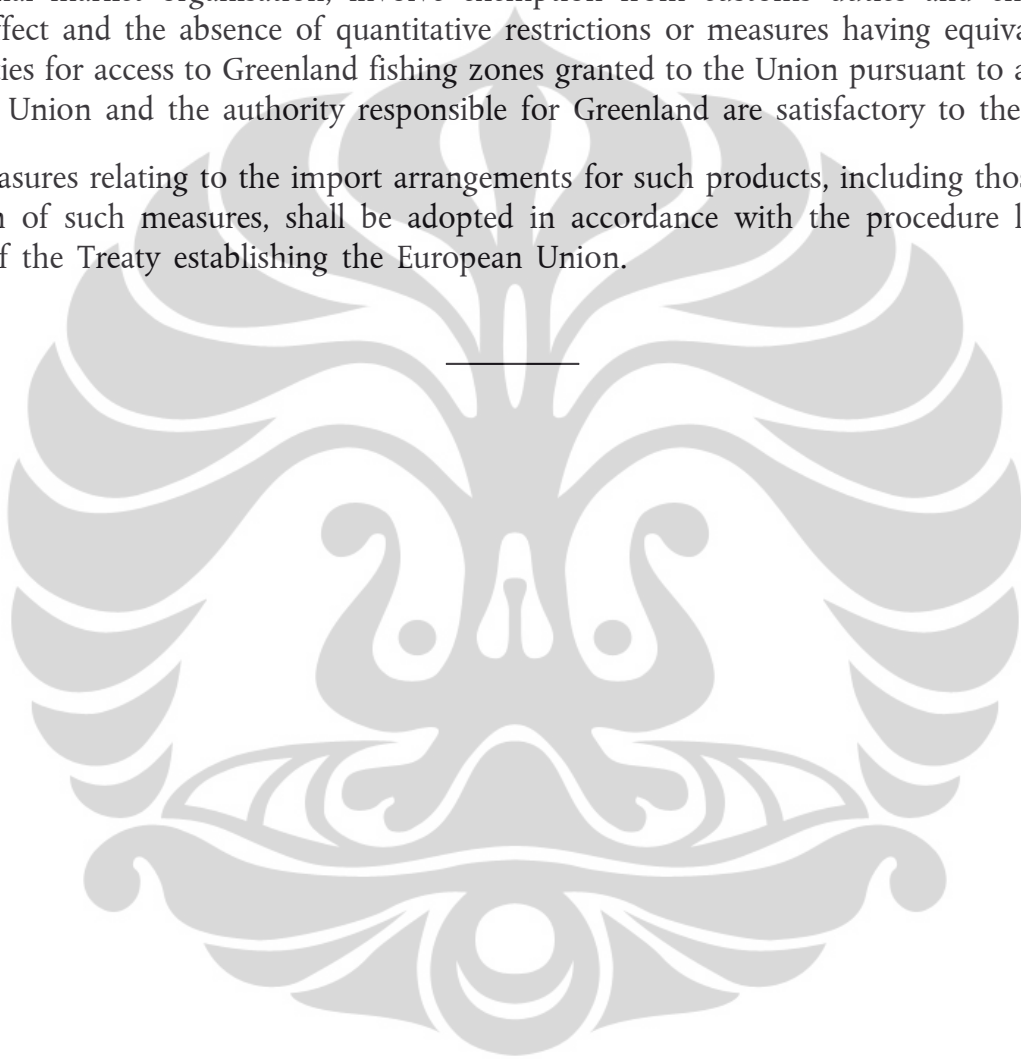


PROTOCOL (No 34)
ON SPECIAL ARRANGEMENTS FOR GREENLAND

Sole Article

1. The treatment on import into the Union of products subject to the common organisation of the market in fishery products, originating in Greenland, shall, while complying with the mechanisms of the internal market organisation, involve exemption from customs duties and charges having equivalent effect and the absence of quantitative restrictions or measures having equivalent effect if the possibilities for access to Greenland fishing zones granted to the Union pursuant to an agreement between the Union and the authority responsible for Greenland are satisfactory to the Union.

2. All measures relating to the import arrangements for such products, including those relating to the adoption of such measures, shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 43 of the Treaty establishing the European Union.

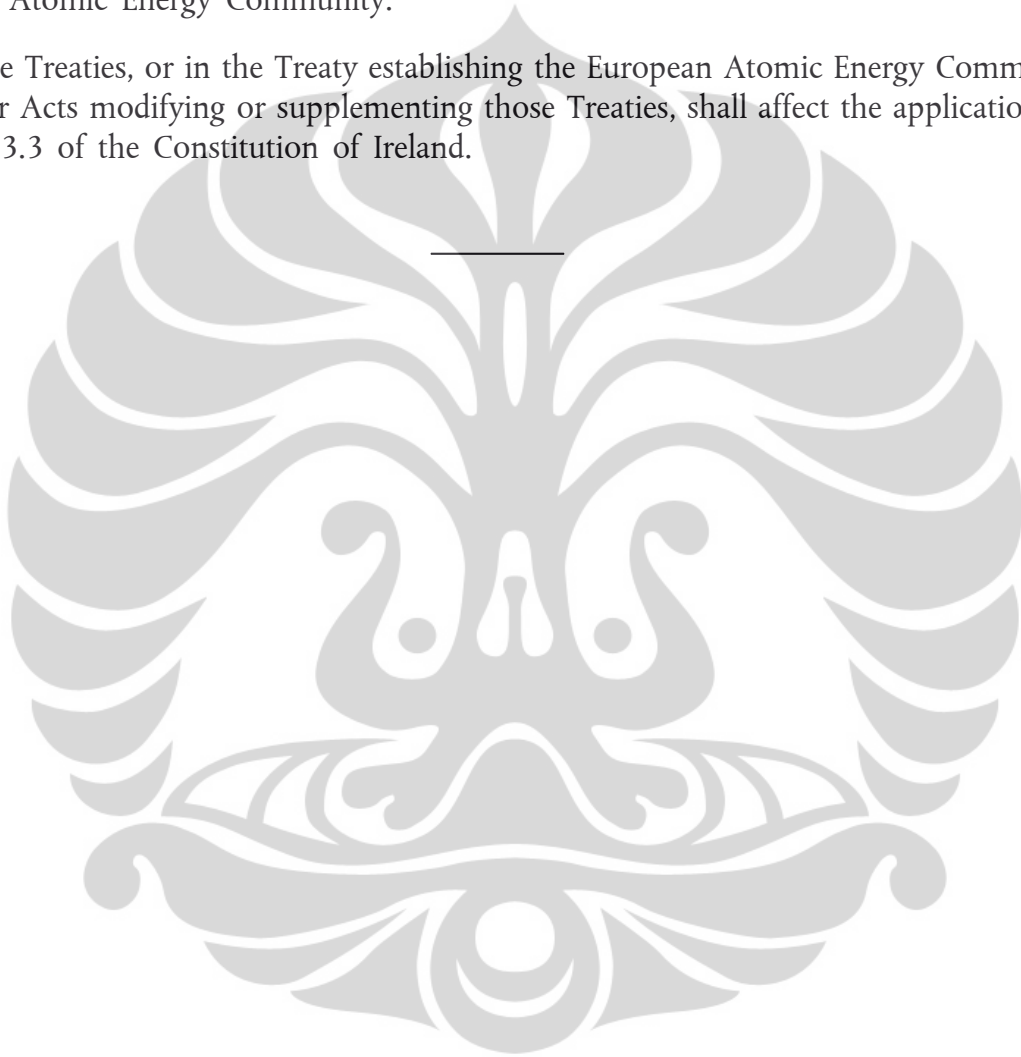


PROTOCOL (No 35)
ON ARTICLE 40.3.3 OF THE CONSTITUTION OF IRELAND

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

HAVE AGREED upon the following provision, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community:

Nothing in the Treaties, or in the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, or in the Treaties or Acts modifying or supplementing those Treaties, shall affect the application in Ireland of Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland.



PROTOCOL (No 36) ON TRANSITIONAL PROVISIONS

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

WHEREAS, in order to organise the transition from the institutional provisions of the Treaties applicable prior to the entry into force of the Treaty of Lisbon to the provisions contained in that Treaty, it is necessary to lay down transitional provisions,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community:

Article 1

In this Protocol, the words 'the Treaties' shall mean the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

TITLE I

PROVISIONS CONCERNING THE EUROPEAN PARLIAMENT

Article 2

In accordance with the second subparagraph of Article 14(2) of the Treaty on European Union, the European Council shall adopt a decision determining the composition of the European Parliament in good time before the 2009 European Parliament elections.

Until the end of the 2004-2009 parliamentary term, the composition and the number of representatives elected to the European Parliament shall remain the same as on the date of the entry into force of the Treaty of Lisbon.

TITLE II

PROVISIONS CONCERNING THE QUALIFIED MAJORITY

Article 3

1. In accordance with Article 16(4) of the Treaty on European Union, the provisions of that paragraph and of Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union relating to the definition of the qualified majority in the European Council and the Council shall take effect on 1 November 2014.

2. Between 1 November 2014 and 31 March 2017, when an act is to be adopted by qualified majority, a member of the Council may request that it be adopted in accordance with the qualified majority as defined in paragraph 3. In that case, paragraphs 3 and 4 shall apply.

3. Until 31 October 2014, the following provisions shall remain in force, without prejudice to the second subparagraph of Article 235(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

For acts of the European Council and of the Council requiring a qualified majority, members' votes shall be weighted as follows:

Belgium	12	Luxembourg	4
Bulgaria	10	Hungary	12
Czech Republic	12	Malta	3
Denmark	7	Netherlands	13
Germany	29	Austria	10
Estonia	4	Poland	27
Ireland	7	Portugal	12
Greece	12	Romania	14
Spain	27	Slovenia	4
France	29	Slovakia	7
Italy	29	Finland	7
Cyprus	4	Sweden	10
Latvia	4	United Kingdom	29
Lithuania	7		

Acts shall be adopted if there are at least 255 votes in favour representing a majority of the members where, under the Treaties, they must be adopted on a proposal from the Commission. In other cases decisions shall be adopted if there are at least 255 votes in favour representing at least two thirds of the members.

A member of the European Council or the Council may request that, where an act is adopted by the European Council or the Council by a qualified majority, a check is made to ensure that the Member States comprising the qualified majority represent at least 62 % of the total population of the Union. If that proves not to be the case, the act shall not be adopted.

4. Until 31 October 2014, the qualified majority shall, in cases where, under the Treaties, not all the members of the Council participate in voting, namely in the cases where reference is made to the qualified majority as defined in Article 238(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, be defined as the same proportion of the weighted votes and the same proportion of the number of the Council members and, if appropriate, the same percentage of the population of the Member States concerned as laid down in paragraph 3 of this Article.

TITLE III

PROVISIONS CONCERNING THE CONFIGURATIONS OF THE COUNCIL

Article 4

Until the entry into force of the decision referred to in the first subparagraph of Article 16(6) of the Treaty on European Union, the Council may meet in the configurations laid down in the second and third subparagraphs of that paragraph and in the other configurations on the list established by a decision of the General Affairs Council, acting by a simple majority.

TITLE IV

PROVISIONS CONCERNING THE COMMISSION, INCLUDING THE HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY*Article 5*

The members of the Commission in office on the date of entry into force of the Treaty of Lisbon shall remain in office until the end of their term of office. However, on the day of the appointment of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the term of office of the member having the same nationality as the High Representative shall end.

TITLE V

PROVISIONS CONCERNING THE SECRETARY-GENERAL OF THE COUNCIL, HIGH REPRESENTATIVE FOR THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY, AND THE DEPUTY SECRETARY-GENERAL OF THE COUNCIL*Article 6*

The terms of office of the Secretary-General of the Council, High Representative for the common foreign and security policy, and the Deputy Secretary-General of the Council shall end on the date of entry into force of the Treaty of Lisbon. The Council shall appoint a Secretary-General in conformity with Article 240(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

TITLE VI

PROVISIONS CONCERNING ADVISORY BODIES*Article 7*

Until the entry into force of the decision referred to in Article 301 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the allocation of members of the Economic and Social Committee shall be as follows:

Belgium	12	Spain	21
Bulgaria	12	France	24
Czech Republic	12	Italy	24
Denmark	9	Cyprus	6
Germany	24	Latvia	7
Estonia	7	Lithuania	9
Ireland	9	Luxembourg	6
Greece	12	Hungary	12

Malta	5	Slovenia	7
Netherlands	12	Slovakia	9
Austria	12	Finland	9
Poland	21	Sweden	12
Portugal	12	United Kingdom	24
Romania	15		

Article 8

Until the entry into force of the decision referred to in Article 305 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the allocation of members of the Committee of the Regions shall be as follows:

Belgium	12	Hungary	12
Bulgaria	12	Malta	5
Czech Republic	12	Netherlands	12
Denmark	9	Austria	12
Germany	24	Poland	21
Estonia	7	Portugal	12
Ireland	9	Romania	15
Greece	12	Slovenia	7
Spain	21	Slovakia	9
France	24	Finland	9
Italy	24	Sweden	12
Cyprus	6	United Kingdom	24
Latvia	7		
Lithuania	9		
Luxembourg	6		

TITLE VII

TRANSITIONAL PROVISIONS CONCERNING ACTS ADOPTED ON THE BASIS OF TITLES V AND VI OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION PRIOR TO THE ENTRY INTO FORCE OF THE TREATY OF LISBON

Article 9

The legal effects of the acts of the institutions, bodies, offices and agencies of the Union adopted on the basis of the Treaty on European Union prior to the entry into force of the Treaty of Lisbon shall be preserved until those acts are repealed, annulled or amended in implementation of the Treaties. The same shall apply to agreements concluded between Member States on the basis of the Treaty on European Union.

Article 10

1. As a transitional measure, and with respect to acts of the Union in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters which have been adopted before the entry into force of the Treaty of Lisbon, the powers of the institutions shall be the following at

the date of entry into force of that Treaty: the powers of the Commission under Article 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union shall not be applicable and the powers of the Court of Justice of the European Union under Title VI of the Treaty on European Union, in the version in force before the entry into force of the Treaty of Lisbon, shall remain the same, including where they have been accepted under Article 35(2) of the said Treaty on European Union.

2. The amendment of an act referred to in paragraph 1 shall entail the applicability of the powers of the institutions referred to in that paragraph as set out in the Treaties with respect to the amended act for those Member States to which that amended act shall apply.

3. In any case, the transitional measure mentioned in paragraph 1 shall cease to have effect five years after the date of entry into force of the Treaty of Lisbon.

4. At the latest six months before the expiry of the transitional period referred to in paragraph 3, the United Kingdom may notify to the Council that it does not accept, with respect to the acts referred to in paragraph 1, the powers of the institutions referred to in paragraph 1 as set out in the Treaties. In case the United Kingdom has made that notification, all acts referred to in paragraph 1 shall cease to apply to it as from the date of expiry of the transitional period referred to in paragraph 3. This subparagraph shall not apply with respect to the amended acts which are applicable to the United Kingdom as referred to in paragraph 2.

The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, shall determine the necessary consequential and transitional arrangements. The United Kingdom shall not participate in the adoption of this decision. A qualified majority of the Council shall be defined in accordance with Article 238(3)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may also adopt a decision determining that the United Kingdom shall bear the direct financial consequences, if any, necessarily and unavoidably incurred as a result of the cessation of its participation in those acts.

5. The United Kingdom may, at any time afterwards, notify the Council of its wish to participate in acts which have ceased to apply to it pursuant to paragraph 4, first subparagraph. In that case, the relevant provisions of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union or of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice, as the case may be, shall apply. The powers of the institutions with regard to those acts shall be those set out in the Treaties. When acting under the relevant Protocols, the Union institutions and the United Kingdom shall seek to re-establish the widest possible measure of participation of the United Kingdom in the *acquis* of the Union in the area of freedom, security and justice without seriously affecting the practical operability of the various parts thereof, while respecting their coherence.

PROTOCOL (No 37)
ON THE FINANCIAL CONSEQUENCES OF THE EXPIRY
OF THE ECSC TREATY AND ON THE RESEARCH
FUND FOR COAL AND STEEL

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

RECALLING that all assets and liabilities of the European Coal and Steel Community, as they existed on 23 July 2002, were transferred to the European Community on 24 July 2002,

TAKING ACCOUNT of the desire to use these funds for research in sectors related to the coal and steel industry and therefore the necessity to provide for certain special rules in this regard,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:

Article 1

1. The net worth of these assets and liabilities, as they appear in the balance sheet of the ECSC of 23 July 2002, subject to any increase or decrease which may occur as a result of the liquidation operations, shall be considered as assets intended for research in the sectors related to the coal and steel industry, referred to as the 'ECSC in liquidation'. On completion of the liquidation they shall be referred to as the 'assets of the Research Fund for Coal and Steel'.

2. The revenue from these assets, referred to as the 'Research Fund for Coal and Steel', shall be used exclusively for research, outside the research framework programme, in the sectors related to the coal and steel industry in accordance with the provisions of this Protocol and of acts adopted on the basis hereof.

Article 2

The Council, acting in accordance with a special legislative procedure and after obtaining the consent of the European Parliament, shall adopt all the necessary provisions for the implementation of this Protocol, including essential principles.

The Council shall adopt, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, measures establishing multiannual financial guidelines for managing the assets of the Research Fund for Coal and Steel and technical guidelines for the research programme of the Research Fund for Coal and Steel.

Article 3

Except as otherwise provided in this Protocol and in the acts adopted on the basis hereof, the provisions of the Treaties shall apply.







ANNEX I

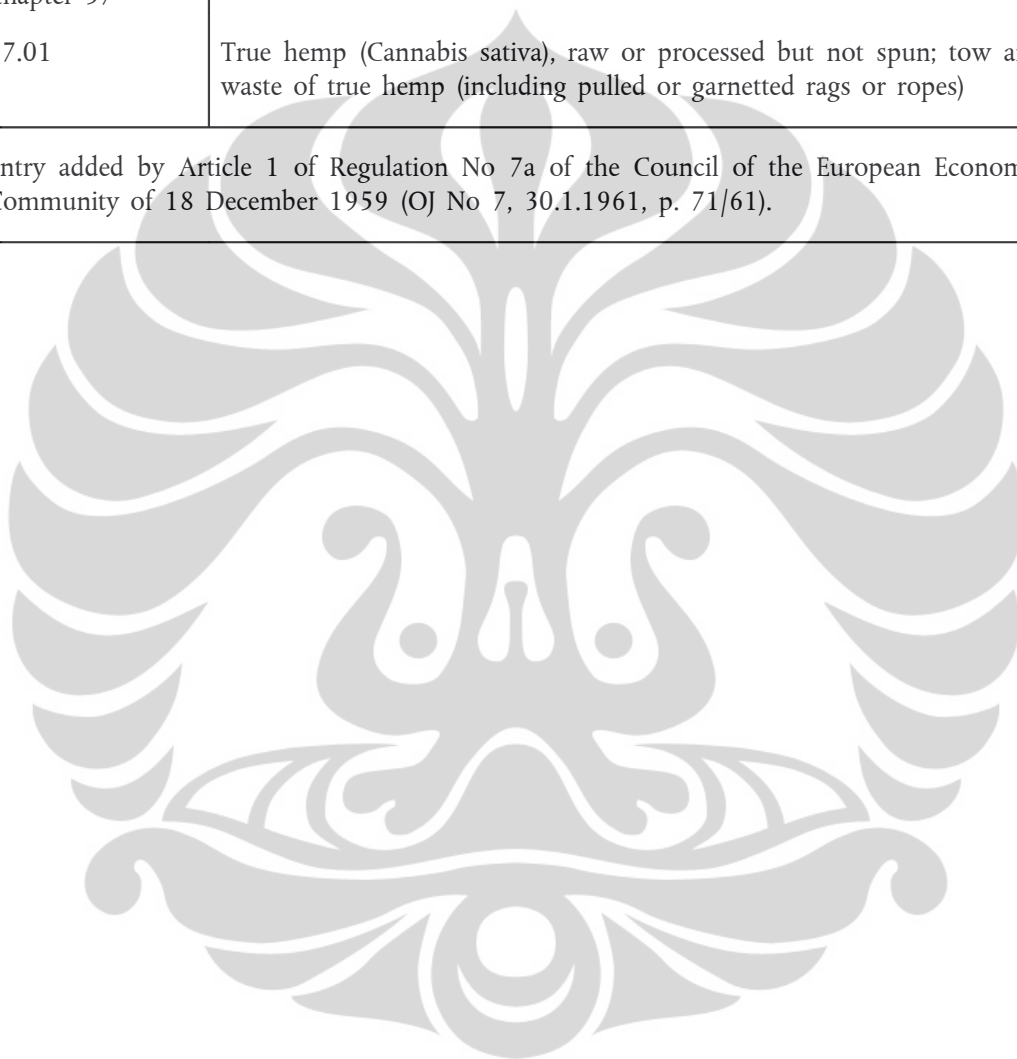
LIST REFERRED TO IN ARTICLE 38 OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION

(1) No in the Brussels nomenclature	(2) Description of products
Chapter 1	Live animals
Chapter 2	Meat and edible meat offal
Chapter 3	Fish, crustaceans and molluscs
Chapter 4	Dairy produce; birds' eggs; natural honey
Chapter 5	
05.04	Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof
05.15	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or Chapter 3, unfit for human consumption
Chapter 6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
Chapter 7	Edible vegetables and certain roots and tubers
Chapter 8	Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit
Chapter 9	Coffee, tea and spices, excluding maté (heading No 09.03)
Chapter 10	Cereals
Chapter 11	Products of the milling industry; malt and starches; gluten; inulin
Chapter 12	Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial and medical plants; straw and fodder
Chapter 13 ex 13.03	Pectin
Chapter 15	
15.01	Lard and other rendered pig fat; rendered poultry fat
15.02	Unrendered fats of bovine cattle, sheep or goats; tallow (including 'premier jus') produced from those fats
15.03	Lard stearin, oleostearin and tallow stearin; lard oil, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or prepared in any way
15.04	Fats and oil, of fish and marine mammals, whether or not refined
15.07	Fixed vegetable oils, fluid or solid, crude, refined or purified
15.12	Animal or vegetable fats and oils, hydrogenated, whether or not refined, but not further prepared

(1) No in the Brussels nomenclature	(2) Description of products
15.13	Margarine, imitation lard and other prepared edible fats
15.17	Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
Chapter 16	Preparations of meat, of fish, of crustaceans or molluscs
Chapter 17	
17.01	Beet sugar and cane sugar, solid
17.02	Other sugars; sugar syrups; artificial honey (whether or not mixed with natural honey); caramel
17.03	Molasses, whether or not decolourised
17.05 (*)	Flavoured or coloured sugars, syrups and molasses (including vanilla sugar or vanillin), with the exception of fruit juice containing added sugar in any proportion
Chapter 18	
18.01	Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted
18.02	Cocoa shells, husks, skins and waste
Chapter 20	Preparations of vegetables, fruit or other parts of plants
Chapter 22	
22.04	Grape must, in fermentation or with fermentation arrested otherwise than by the addition of alcohol
22.05	Wine of fresh grapes; grape must with fermentation arrested by the addition of alcohol
22.07	Other fermented beverages (for example, cider, perry and mead)
ex 22.08 (*)	Ethyl alcohol or neutral spirits, whether or not denatured, of any strength, obtained from agricultural products listed in Annex I, excluding liqueurs and other spirituous beverages and compound alcoholic preparations (known as 'concentrated extracts') for the manufacture of beverages
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Vinegar and substitutes for vinegar
Chapter 23	Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder
Chapter 24	
24.01	Unmanufactured tobacco, tobacco refuse
Chapter 45	
45.01	Natural cork, unworked, crushed, granulated or ground; waste cork

(1) No in the Brussels nomenclature	(2) Description of products
Chapter 54	
54.01	Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including pulled or garnetted rags)
Chapter 57	
57.01	True hemp (<i>Cannabis sativa</i>), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including pulled or garnetted rags or ropes)

(*) Entry added by Article 1 of Regulation No 7a of the Council of the European Economic Community of 18 December 1959 (OJ No 7, 30.1.1961, p. 71/61).



ANNEX II

OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES TO WHICH THE PROVISIONS OF PART FOUR OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION APPLY

- Greenland,
- New Caledonia and Dependencies,
- French Polynesia,
- French Southern and Antarctic Territories,
- Wallis and Futuna Islands,
- Mayotte,
- Saint Pierre and Miquelon,
- Aruba,
- Netherlands Antilles:
 - Bonaire,
 - Curaçao,
 - Saba,
 - Sint Eustatius,
 - Sint Maarten,
- Anguilla,
- Cayman Islands,
- Falkland Islands,
- South Georgia and the South Sandwich Islands,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Saint Helena and Dependencies,
- British Antarctic Territory,
- British Indian Ocean Territory,
- Turks and Caicos Islands,
- British Virgin Islands,
- Bermuda.



DECLARATIONS

**ANNEXED TO THE FINAL ACT OF THE INTERGOVERNMENTAL
CONFERENCE WHICH ADOPTED THE TREATY OF LISBON,**

signed on 13 December 2007



A. DECLARATIONS CONCERNING PROVISIONS OF THE TREATIES

1. Declaration concerning the Charter of Fundamental Rights of the European Union

The Charter of Fundamental Rights of the European Union, which has legally binding force, confirms the fundamental rights guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States.

The Charter does not extend the field of application of Union law beyond the powers of the Union or establish any new power or task for the Union, or modify powers and tasks as defined by the Treaties.

2. Declaration on Article 6(2) of the Treaty on European Union

The Conference agrees that the Union's accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms should be arranged in such a way as to preserve the specific features of Union law. In this connection, the Conference notes the existence of a regular dialogue between the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights; such dialogue could be reinforced when the Union accedes to that Convention.

3. Declaration on Article 8 of the Treaty on European Union

The Union will take into account the particular situation of small-sized countries which maintain specific relations of proximity with it.

4. Declaration on the composition of the European Parliament

The additional seat in the European Parliament will be attributed to Italy.

5. Declaration on the political agreement by the European Council concerning the draft Decision on the composition of the European Parliament

The European Council will give its political agreement on the revised draft Decision on the composition of the European Parliament for the legislative period 2009-2014, based on the proposal from the European Parliament.

6. Declaration on Article 15(5) and (6), Article 17(6) and (7) and Article 18 of the Treaty on European Union

In choosing the persons called upon to hold the offices of President of the European Council, President of the Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, due account is to be taken of the need to respect the geographical and demographic diversity of the Union and its Member States.

7. Declaration on Article 16(4) of the Treaty on European Union and Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference declares that the decision relating to the implementation of Article 16(4) of the Treaty on European Union and Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union will be adopted by the Council on the date of the signature of the Treaty of Lisbon and will enter into force on the day that Treaty enters into force. The draft decision is set out below:

Draft decision of the Council

relating to the implementation of Article 16(4) of the Treaty on European Union and Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union between 1 November 2014 and 31 March 2017 on the one hand, and as from 1 April 2017 on the other

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Whereas:

- (1) Provisions should be adopted allowing for a smooth transition from the system for decision-making in the Council by a qualified majority as defined in Article 3(3) of the Protocol on the transitional provisions, which will continue to apply until 31 October 2014, to the voting system provided for in Article 16(4) of the Treaty on European Union and Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, which will apply with effect from 1 November 2014, including, during a transitional period until 31 March 2017, specific provisions laid down in Article 3(2) of that Protocol.
- (2) It is recalled that it is the practice of the Council to devote every effort to strengthening the democratic legitimacy of decisions taken by a qualified majority,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Section 1

Provisions to be applied from 1 November 2014 to 31 March 2017

Article 1

From 1 November 2014 to 31 March 2017, if members of the Council, representing:

- (a) at least three quarters of the population, or
- (b) at least three quarters of the number of Member States

necessary to constitute a blocking minority resulting from the application of Article 16(4), first subparagraph, of the Treaty on European Union or Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, indicate their opposition to the Council adopting an act by a qualified majority, the Council shall discuss the issue.

Article 2

The Council shall, in the course of these discussions, do all in its power to reach, within a reasonable time and without prejudicing obligatory time limits laid down by Union law, a satisfactory solution to address concerns raised by the members of the Council referred to in Article 1.

Article 3

To this end, the President of the Council, with the assistance of the Commission and in compliance with the Rules of Procedure of the Council, shall undertake any initiative necessary to facilitate a wider basis of agreement in the Council. The members of the Council shall lend him or her their assistance.

Section 2

Provisions to be applied as from 1 April 2017

Article 4

As from 1 April 2017, if members of the Council, representing:

- (a) at least 55 % of the population, or
- (b) at least 55 % of the number of Member States

necessary to constitute a blocking minority resulting from the application of Article 16(4), first subparagraph, of the Treaty on European Union or Article 238(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, indicate their opposition to the Council adopting an act by a qualified majority, the Council shall discuss the issue.

Article 5

The Council shall, in the course of these discussions, do all in its power to reach, within a reasonable time and without prejudicing obligatory time limits laid down by Union law, a satisfactory solution to address concerns raised by the members of the Council referred to in Article 4.

Article 6

To this end, the President of the Council, with the assistance of the Commission and in compliance with the Rules of Procedure of the Council, shall undertake any initiative necessary to facilitate a wider basis of agreement in the Council. The members of the Council shall lend him or her their assistance.

Section 3

Entry into force

Article 7

This Decision shall enter into force on the date of the entry into force of the Treaty of Lisbon.

8. Declaration on practical measures to be taken upon the entry into force of the Treaty of Lisbon as regards the Presidency of the European Council and of the Foreign Affairs Council

In the event that the Treaty of Lisbon enters into force later than 1 January 2009, the Conference requests the competent authorities of the Member State holding the six-monthly Presidency of the Council at that time, on the one hand, and the person elected President of the European Council and the person appointed High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, on the other hand, to take the necessary specific measures, in consultation with the following six-monthly Presidency, to allow an efficient handover of the material and organisational aspects of the Presidency of the European Council and of the Foreign Affairs Council.

9. Declaration on Article 16(9) of the Treaty on European Union concerning the European Council decision on the exercise of the Presidency of the Council

The Conference declares that the Council should begin preparing the decision establishing the procedures for implementing the decision on the exercise of the Presidency of the Council as soon as the Treaty of Lisbon is signed, and should give its political approval within six months. A draft decision of the European Council, which will be adopted on the date of entry into force of the said Treaty, is set out below:

Draft decision of the European Council on the exercise of the Presidency of the Council

Article 1

1. The Presidency of the Council, with the exception of the Foreign Affairs configuration, shall be held by pre-established groups of three Member States for a period of 18 months. The groups shall be made up on a basis of equal rotation among the Member States, taking into account their diversity and geographical balance within the Union.

2. Each member of the group shall in turn chair for a six-month period all configurations of the Council, with the exception of the Foreign Affairs configuration. The other members of the group shall assist the Chair in all its responsibilities on the basis of a common programme. Members of the team may decide alternative arrangements among themselves.

Article 2

The Committee of Permanent Representatives of the Governments of the Member States shall be chaired by a representative of the Member State chairing the General Affairs Council.

The Chair of the Political and Security Committee shall be held by a representative of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.

The chair of the preparatory bodies of the various Council configurations, with the exception of the Foreign Affairs configuration, shall fall to the member of the group chairing the relevant configuration, unless decided otherwise in accordance with Article 4.

Article 3

The General Affairs Council shall ensure consistency and continuity in the work of the different Council configurations in the framework of multiannual programmes in cooperation with the Commission. The Member States holding the Presidency shall take all necessary measures for the organisation and smooth operation of the Council's work, with the assistance of the General Secretariat of the Council.

Article 4

The Council shall adopt a decision establishing the measures for the implementation of this decision.

10. Declaration on Article 17 of the Treaty on European Union

The Conference considers that when the Commission no longer includes nationals of all Member States, the Commission should pay particular attention to the need to ensure full transparency in relations with all Member States. Accordingly, the Commission should liaise closely with all Member States, whether or not they have a national serving as member of the Commission, and in this context pay special attention to the need to share information and consult with all Member States.

The Conference also considers that the Commission should take all the necessary measures to ensure that political, social and economic realities in all Member States, including those which have no national serving as member of the Commission, are fully taken into account. These measures should include ensuring that the position of those Member States is addressed by appropriate organisational arrangements.

11. Declaration on Article 17(6) and (7) of the Treaty on European Union

The Conference considers that, in accordance with the provisions of the Treaties, the European Parliament and the European Council are jointly responsible for the smooth running of the process leading to the election of the President of the European Commission. Prior to the decision of the European Council, representatives of the European Parliament and of the European Council will thus conduct the necessary consultations in the framework deemed the most appropriate. These consultations will focus on the backgrounds of the candidates for President of the Commission, taking account of the elections to the European Parliament, in accordance with the first subparagraph of Article 17(7). The arrangements for such consultations may be determined, in due course, by common accord between the European Parliament and the European Council.

12. Declaration on Article 18 of the Treaty on European Union

1. The Conference declares that, in the course of the preparatory work preceding the appointment of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy which is due to take place on the date of entry into force of the Treaty of Lisbon in accordance with Article 18 of the Treaty on European Union and Article 5 of the Protocol on transitional provisions and whose term of office will be from that date until the end of the term of office of the Commission in office on that date, appropriate contacts will be made with the European Parliament.

2. Furthermore, the Conference recalls that, as regards the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy whose term of office will start in November 2009 at the same time and for the same duration as the next Commission, he or she will be appointed in accordance with the provisions of Articles 17 and 18 of the Treaty on European Union.

13. Declaration concerning the common foreign and security policy

The Conference underlines that the provisions in the Treaty on European Union covering the Common Foreign and Security Policy, including the creation of the office of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the establishment of an External Action Service, do not affect the responsibilities of the Member States, as they currently exist, for the formulation and conduct of their foreign policy nor of their national representation in third countries and international organisations.

The Conference also recalls that the provisions governing the Common Security and Defence Policy do not prejudice the specific character of the security and defence policy of the Member States.

It stresses that the European Union and its Member States will remain bound by the provisions of the Charter of the United Nations and, in particular, by the primary responsibility of the Security Council and of its Members for the maintenance of international peace and security.

14. Declaration concerning the common foreign and security policy

In addition to the specific rules and procedures referred to in paragraph 1 of Article 24 of the Treaty on European Union, the Conference underlines that the provisions covering the Common Foreign and Security Policy including in relation to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the External Action Service will not affect the existing legal basis, responsibilities, and powers of each Member State in relation to the formulation and conduct of its foreign policy, its national diplomatic service, relations with third countries and participation in international organisations, including a Member State's membership of the Security Council of the United Nations.

The Conference also notes that the provisions covering the Common Foreign and Security Policy do not give new powers to the Commission to initiate decisions nor do they increase the role of the European Parliament.

The Conference also recalls that the provisions governing the Common Security and Defence Policy do not prejudice the specific character of the security and defence policy of the Member States.

15. Declaration on Article 27 of the Treaty on European Union

The Conference declares that, as soon as the Treaty of Lisbon is signed, the Secretary-General of the Council, High Representative for the common foreign and security policy, the Commission and the Member States should begin preparatory work on the European External Action Service.

16. Declaration on Article 55(2) of the Treaty on European Union

The Conference considers that the possibility of producing translations of the Treaties in the languages mentioned in Article 55(2) contributes to fulfilling the objective of respecting the Union's rich cultural and linguistic diversity as set forth in the fourth subparagraph of Article 3(3). In this context, the Conference confirms the attachment of the Union to the cultural diversity of Europe and the special attention it will continue to pay to these and other languages.

The Conference recommends that those Member States wishing to avail themselves of the possibility recognised in Article 55(2) communicate to the Council, within six months from the date of the signature of the Treaty of Lisbon, the language or languages into which translations of the Treaties will be made.

17. Declaration concerning primacy

The Conference recalls that, in accordance with well settled case law of the Court of Justice of the European Union, the Treaties and the law adopted by the Union on the basis of the Treaties have primacy over the law of Member States, under the conditions laid down by the said case law.

The Conference has also decided to attach as an Annex to this Final Act the Opinion of the Council Legal Service on the primacy of EC law as set out in 11197/07 (JUR 260):

*'Opinion of the Council Legal Service
of 22 June 2007*

It results from the case-law of the Court of Justice that primacy of EC law is a cornerstone principle of Community law. According to the Court, this principle is inherent to the specific nature of the European Community. At the time of the first judgment of this established case law (Costa/ENEL, 15 July 1964, Case 6/641 ⁽¹⁾) there was no mention of primacy in the treaty. It is still the case today. The fact that the principle of primacy will not be included in the future treaty shall not in any way change the existence of the principle and the existing case-law of the Court of Justice.

⁽¹⁾ "It follows (...) that the law stemming from the treaty, an independent source of law, could not, because of its special and original nature, be overridden by domestic legal provisions, however framed, without being deprived of its character as Community law and without the legal basis of the Community itself being called into question."

18. Declaration in relation to the delimitation of competences

The Conference underlines that, in accordance with the system of division of competences between the Union and the Member States as provided for in the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, competences not conferred upon the Union in the Treaties remain with the Member States.

When the Treaties confer on the Union a competence shared with the Member States in a specific area, the Member States shall exercise their competence to the extent that the Union has not exercised, or has decided to cease exercising, its competence. The latter situation arises when the relevant EU institutions decide to repeal a legislative act, in particular better to ensure constant respect for the principles of subsidiarity and proportionality. The Council may, at the initiative of one or several of its members (representatives of Member States) and in accordance with Article 241 of the Treaty on the Functioning of the European Union, request the Commission to submit proposals for repealing a legislative act. The Conference welcomes the Commission's declaration that it will devote particular attention to these requests.

Equally, the representatives of the governments of the Member States, meeting in an Intergovernmental Conference, in accordance with the ordinary revision procedure provided for in Article 48(2) to (5) of the Treaty on European Union, may decide to amend the Treaties upon which the Union is founded, including either to increase or to reduce the competences conferred on the Union in the said Treaties.

19. Declaration on Article 8 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference agrees that, in its general efforts to eliminate inequalities between women and men, the Union will aim in its different policies to combat all kinds of domestic violence. The Member States should take all necessary measures to prevent and punish these criminal acts and to support and protect the victims.

20. Declaration on Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference declares that, whenever rules on protection of personal data to be adopted on the basis of Article 16 could have direct implications for national security, due account will have to be taken of the specific characteristics of the matter. It recalls that the legislation presently applicable (see in particular Directive 95/46/EC) includes specific derogations in this regard.

21. Declaration on the protection of personal data in the fields of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation

The Conference acknowledges that specific rules on the protection of personal data and the free movement of such data in the fields of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation based on Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union may prove necessary because of the specific nature of these fields.

22. **Declaration on Articles 48 and 79 of the Treaty on the Functioning of the European Union**

The Conference considers that in the event that a draft legislative act based on Article 79(2) would affect important aspects of the social security system of a Member State, including its scope, cost or financial structure, or would affect the financial balance of that system as set out in the second paragraph of Article 48, the interests of that Member State will be duly taken into account.

23. **Declaration on the second paragraph of Article 48 of the Treaty on the Functioning of the European Union**

The Conference recalls that in that case, in accordance with Article 15(4) of the Treaty on European Union, the European Council acts by consensus.

24. **Declaration concerning the legal personality of the European Union**

The Conference confirms that the fact that the European Union has a legal personality will not in any way authorise the Union to legislate or to act beyond the competences conferred upon it by the Member States in the Treaties.

25. **Declaration on Articles 75 and 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union**

The Conference recalls that the respect for fundamental rights and freedoms implies, in particular, that proper attention is given to the protection and observance of the due process rights of the individuals or entities concerned. For this purpose and in order to guarantee a thorough judicial review of decisions subjecting an individual or entity to restrictive measures, such decisions must be based on clear and distinct criteria. These criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.

26. **Declaration on non-participation by a Member State in a measure based on Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union**

The Conference declares that, where a Member State opts not to participate in a measure based on Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Council will hold a full discussion on the possible implications and effects of that Member State's non-participation in the measure.

In addition, any Member State may ask the Commission to examine the situation on the basis of Article 116 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

The above paragraphs are without prejudice to the entitlement of a Member State to refer the matter to the European Council.

27. Declaration on Article 85(1), second subparagraph, of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference considers that the regulations referred to in the second subparagraph of Article 85(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union should take into account national rules and practices relating to the initiation of criminal investigations.

28. Declaration on Article 98 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference notes that the provisions of Article 98 shall be applied in accordance with the current practice. The terms 'such measures are required in order to compensate for the economic disadvantages caused by the division of Germany to the economy of certain areas of the Federal Republic affected by that division' shall be interpreted in accordance with the existing case law of the Court of Justice of the European Union.

29. Declaration on Article 107(2)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference notes that Article 107(2)(c) shall be interpreted in accordance with the existing case law of the Court of Justice of the European Union regarding the applicability of the provisions to aid granted to certain areas of the Federal Republic of Germany affected by the former division of Germany.

30. Declaration on Article 126 of the Treaty on the Functioning of the European Union

With regard to Article 126, the Conference confirms that raising growth potential and securing sound budgetary positions are the two pillars of the economic and fiscal policy of the Union and the Member States. The Stability and Growth Pact is an important tool to achieve these goals.

The Conference reaffirms its commitment to the provisions concerning the Stability and Growth Pact as the framework for the coordination of budgetary policies in the Member States.

The Conference confirms that a rule-based system is the best guarantee for commitments to be enforced and for all Member States to be treated equally.

Within this framework, the Conference also reaffirms its commitment to the goals of the Lisbon Strategy: job creation, structural reforms, and social cohesion.

The Union aims at achieving balanced economic growth and price stability. Economic and budgetary policies thus need to set the right priorities towards economic reforms, innovation, competitiveness and strengthening of private investment and consumption in phases of weak economic growth. This should be reflected in the orientations of budgetary decisions at the national and Union level in

particular through restructuring of public revenue and expenditure while respecting budgetary discipline in accordance with the Treaties and the Stability and Growth Pact.

Budgetary and economic challenges facing the Member States underline the importance of sound budgetary policy throughout the economic cycle.

The Conference agrees that Member States should use periods of economic recovery actively to consolidate public finances and improve their budgetary positions. The objective is to gradually achieve a budgetary surplus in good times which creates the necessary room to accommodate economic downturns and thus contribute to the long-term sustainability of public finances.

The Member States look forward to possible proposals of the Commission as well as further contributions of Member States with regard to strengthening and clarifying the implementation of the Stability and Growth Pact. The Member States will take all necessary measures to raise the growth potential of their economies. Improved economic policy coordination could support this objective. This Declaration does not prejudice the future debate on the Stability and Growth Pact.

31. Declaration on Article 156 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference confirms that the policies described in Article 156 fall essentially within the competence of the Member States. Measures to provide encouragement and promote coordination to be taken at Union level in accordance with this Article shall be of a complementary nature. They shall serve to strengthen cooperation between Member States and not to harmonise national systems. The guarantees and practices existing in each Member State as regards the responsibility of the social partners will not be affected.

This Declaration is without prejudice to the provisions of the Treaties conferring competence on the Union, including in social matters.

32. Declaration on Article 168(4)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference declares that the measures to be adopted pursuant to Article 168(4)(c) must meet common safety concerns and aim to set high standards of quality and safety where national standards affecting the internal market would otherwise prevent a high level of human health protection being achieved.

33. Declaration on Article 174 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference considers that the reference in Article 174 to island regions can include island States in their entirety, subject to the necessary criteria being met.

34. Declaration on Article 179 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference agrees that the Union's action in the area of research and technological development will pay due respect to the fundamental orientations and choices of the research policies of the Member States.

35. Declaration on Article 194 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference believes that Article 194 does not affect the right of the Member States to take the necessary measures to ensure their energy supply under the conditions provided for in Article 347.

36. Declaration on Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the negotiation and conclusion of international agreements by Member States relating to the area of freedom, security and justice

The Conference confirms that Member States may negotiate and conclude agreements with third countries or international organisations in the areas covered by Chapters 3, 4 and 5 of Title V of Part Three in so far as such agreements comply with Union law.

37. Declaration on Article 222 of the Treaty on the Functioning of the European Union

Without prejudice to the measures adopted by the Union to comply with its solidarity obligation towards a Member State which is the object of a terrorist attack or the victim of natural or man-made disaster, none of the provisions of Article 222 is intended to affect the right of another Member State to choose the most appropriate means to comply with its own solidarity obligation towards that Member State.

38. Declaration on Article 252 of the Treaty on the Functioning of the European Union regarding the number of Advocates-General in the Court of Justice

The Conference declares that if, in accordance with Article 252, first paragraph, of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Court of Justice requests that the number of Advocates-General be increased by three (eleven instead of eight), the Council will, acting unanimously, agree on such an increase.

In that case, the Conference agrees that Poland will, as is already the case for Germany, France, Italy, Spain and the United Kingdom, have a permanent Advocate-General and no longer take part in the rotation system, while the existing rotation system will involve the rotation of five Advocates-General instead of three.

39. Declaration on Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference takes note of the Commission's intention to continue to consult experts appointed by the Member States in the preparation of draft delegated acts in the financial services area, in accordance with its established practice.

40. Declaration on Article 329 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference declares that Member States may indicate, when they make a request to establish enhanced cooperation, if they intend already at that stage to make use of Article 333 providing for the extension of qualified majority voting or to have recourse to the ordinary legislative procedure.

41. Declaration on Article 352 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Conference declares that the reference in Article 352(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union to objectives of the Union refers to the objectives as set out in Article 3(2) and (3) of the Treaty on European Union and to the objectives of Article 3(5) of the said Treaty with respect to external action under Part Five of the Treaty on the Functioning of the European Union. It is therefore excluded that an action based on Article 352 of the Treaty on the Functioning of the European Union would only pursue objectives set out in Article 3(1) of the Treaty on European Union. In this connection, the Conference notes that in accordance with Article 31(1) of the Treaty on European Union, legislative acts may not be adopted in the area of the Common Foreign and Security Policy.

42. **Declaration on Article 352 of the Treaty on the Functioning of the European Union**

The Conference underlines that, in accordance with the settled case law of the Court of Justice of the European Union, Article 352 of the Treaty on the Functioning of the European Union, being an integral part of an institutional system based on the principle of conferred powers, cannot serve as a basis for widening the scope of Union powers beyond the general framework created by the provisions of the Treaties as a whole and, in particular, by those that define the tasks and the activities of the Union. In any event, this Article cannot be used as a basis for the adoption of provisions whose effect would, in substance, be to amend the Treaties without following the procedure which they provide for that purpose.

43. **Declaration on Article 355(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union**

The High Contracting Parties agree that the European Council, pursuant to Article 355(6), will take a decision leading to the modification of the status of Mayotte with regard to the Union in order to make this territory an outermost region within the meaning of Article 355(1) and Article 349, when the French authorities notify the European Council and the Commission that the evolution currently under way in the internal status of the island so allows.

B. DECLARATIONS CONCERNING PROTOCOLS ANNEXED TO THE TREATIES

44. Declaration on Article 5 of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union

The Conference notes that where a Member State has made a notification under Article 5(2) of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union that it does not wish to take part in a proposal or initiative, that notification may be withdrawn at any moment before the adoption of the measure building upon the Schengen *acquis*.

45. Declaration on Article 5(2) of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union

The Conference declares that whenever the United Kingdom or Ireland indicates to the Council its intention not to participate in a measure building upon a part of the Schengen *acquis* in which it participates, the Council will have a full discussion on the possible implications of the non-participation of that Member State in that measure. The discussion within the Council should be conducted in the light of the indications given by the Commission concerning the relationship between the proposal and the Schengen *acquis*.

46. Declaration on Article 5(3) of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union

The Conference recalls that if the Council does not take a decision after a first substantive discussion of the matter, the Commission may present an amended proposal for a further substantive re-examination by the Council within the deadline of 4 months.

47. Declaration on Article 5(3), (4) and (5) of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union

The Conference notes that the conditions to be determined in the decision referred to in paragraphs 3, 4 or 5 of Article 5 of the Protocol on the Schengen *acquis* integrated into the framework of the European Union may determine that the Member State concerned shall bear the direct financial consequences, if any, necessarily and unavoidably incurred as a result of the cessation of its participation in some or all of the *acquis* referred to in any decision taken by the Council pursuant to Article 4 of the said Protocol.

48. Declaration concerning the Protocol on the position of Denmark

The Conference notes that with respect to legal acts to be adopted by the Council acting alone or jointly with the European Parliament and containing provisions applicable to Denmark as well as provisions not applicable to Denmark because they have a legal basis to which Part I of the Protocol on the position of Denmark applies, Denmark declares that it will not use its voting right to prevent the adoption of the provisions which are not applicable to Denmark.

Furthermore, the Conference notes that on the basis of the Declaration by the Conference on Article 222, Denmark declares that Danish participation in actions or legal acts pursuant to Article 222 will take place in accordance with Part I and Part II of the Protocol on the position of Denmark.

49. Declaration concerning Italy

The Conference notes that the Protocol on Italy annexed in 1957 to the Treaty establishing the European Economic Community, as amended upon adoption of the Treaty on European Union, stated that:

‘THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

DESIRING to settle certain particular problems relating to Italy,

HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to this Treaty:

THE MEMBER STATES OF THE COMMUNITY

TAKE NOTE of the fact that the Italian Government is carrying out a ten-year programme of economic expansion designed to rectify the disequilibria in the structure of the Italian economy, in particular by providing an infrastructure for the less developed areas in Southern Italy and in the Italian islands and by creating new jobs in order to eliminate unemployment;

RECALL that the principles and objectives of this programme of the Italian Government have been considered and approved by organisations for international cooperation of which the Member States are members;

RECOGNISE that it is in their common interest that the objectives of the Italian programme should be attained;

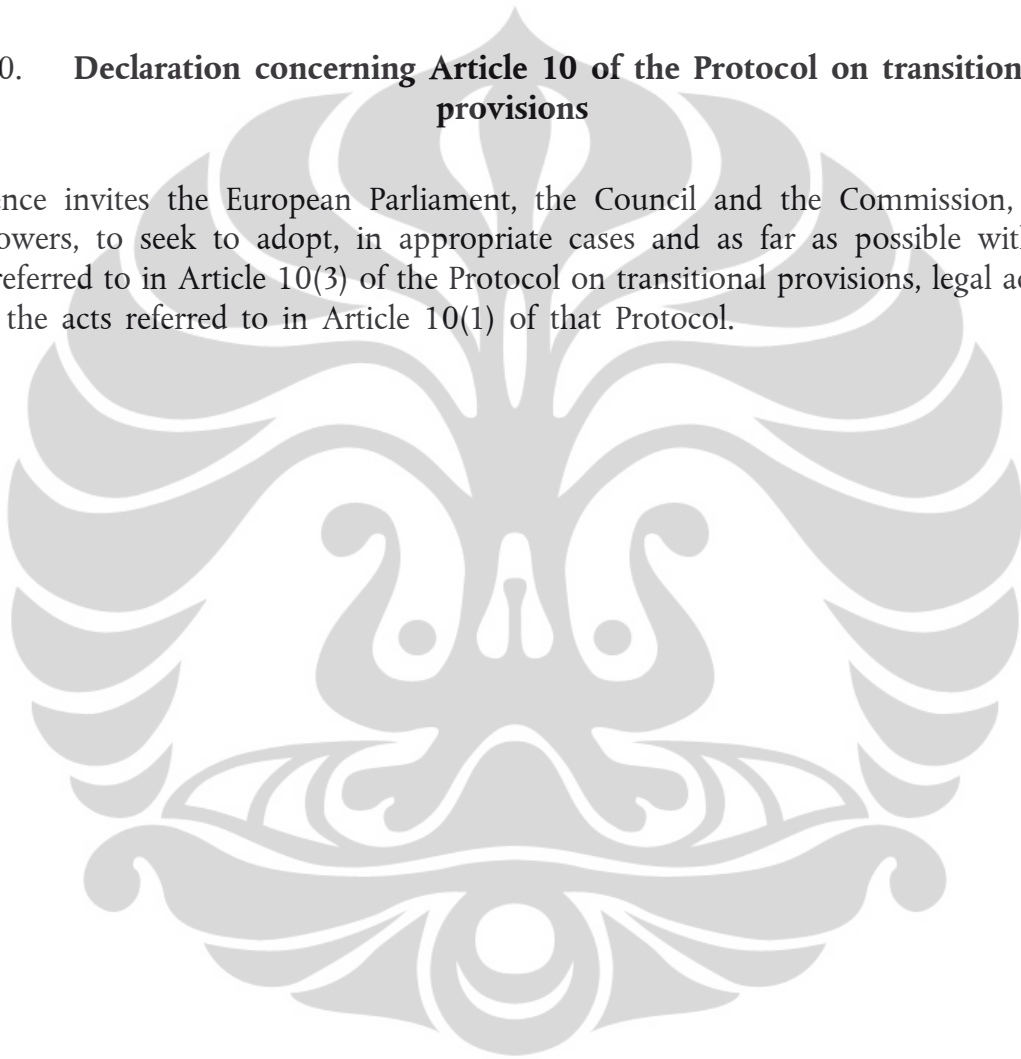
AGREE, in order to facilitate the accomplishment of this task by the Italian Government, to recommend to the institutions of the Community that they should employ all the methods and procedures provided in this Treaty and, in particular, make appropriate use of the resources of the European Investment Bank and the European Social Fund;

ARE OF THE OPINION that the institutions of the Community should, in applying this Treaty, take account of the sustained effort to be made by the Italian economy in the coming years and of the desirability of avoiding dangerous stresses in particular within the balance of payments or the level of employment, which might jeopardise the application of this Treaty in Italy;

RECOGNISE that in the event of Articles 109 H and 109 I being applied it will be necessary to take care that any measures required of the Italian Government do not prejudice the completion of its programme for economic expansion and for raising the standard of living of the population.’.

50. Declaration concerning Article 10 of the Protocol on transitional provisions

The Conference invites the European Parliament, the Council and the Commission, within their respective powers, to seek to adopt, in appropriate cases and as far as possible within the five-year period referred to in Article 10(3) of the Protocol on transitional provisions, legal acts amending or replacing the acts referred to in Article 10(1) of that Protocol.



C. DECLARATIONS BY MEMBER STATES

51. Declaration by the Kingdom of Belgium on national Parliaments

Belgium wishes to make clear that, in accordance with its constitutional law, not only the Chamber of Representatives and Senate of the Federal Parliament but also the parliamentary assemblies of the Communities and the Regions act, in terms of the competences exercised by the Union, as components of the national parliamentary system or chambers of the national Parliament.

52. Declaration by the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Lithuania, the Grand-Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic on the symbols of the European Union

Belgium, Bulgaria, Germany, Greece, Spain, Italy, Cyprus, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania, Slovenia and the Slovak Republic declare that the flag with a circle of twelve golden stars on a blue background, the anthem based on the 'Ode to Joy' from the Ninth Symphony by Ludwig van Beethoven, the motto 'United in diversity', the euro as the currency of the European Union and Europe Day on 9 May will for them continue as symbols to express the sense of community of the people in the European Union and their allegiance to it.

53. Declaration by the Czech Republic on the Charter of Fundamental Rights of the European Union

1. The Czech Republic recalls that the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union are addressed to the institutions and bodies of the European Union with due regard for the principle of subsidiarity and division of competences between the European Union and its Member States, as reaffirmed in Declaration (No 18) in relation to the delimitation of competences. The Czech Republic stresses that its provisions are addressed to the Member States only when they are implementing Union law, and not when they are adopting and implementing national law independently from Union law.

2. The Czech Republic also emphasises that the Charter does not extend the field of application of Union law and does not establish any new power for the Union. It does not diminish the field of application of national law and does not restrain any current powers of the national authorities in this field.

3. The Czech Republic stresses that, in so far as the Charter recognises fundamental rights and principles as they result from constitutional traditions common to the Member States, those rights and principles are to be interpreted in harmony with those traditions.

4. The Czech Republic further stresses that nothing in the Charter may be interpreted as restricting or adversely affecting human rights and fundamental freedoms as recognised, in their respective field of application, by Union law and by international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by the Member States' Constitutions.

54. Declaration by the Federal Republic of Germany, Ireland, the Republic of Hungary, the Republic of Austria and the Kingdom of Sweden

Germany, Ireland, Hungary, Austria and Sweden note that the core provisions of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community have not been substantially amended since its entry into force and need to be brought up to date. They therefore support the idea of a Conference of the Representatives of the Governments of the Member States, which should be convened as soon as possible.

55. Declaration by the Kingdom of Spain and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

The Treaties apply to Gibraltar as a European territory for whose external relations a Member State is responsible. This shall not imply changes in the respective positions of the Member States concerned.

56. Declaration by Ireland on Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice

Ireland affirms its commitment to the Union as an area of freedom, security and justice respecting fundamental rights and the different legal systems and traditions of the Member States within which citizens are provided with a high level of safety.

Accordingly, Ireland declares its firm intention to exercise its right under Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice to take part in the adoption of measures pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union to the maximum extent it deems possible.

Ireland will, in particular, participate to the maximum possible extent in measures in the field of police cooperation.

Furthermore, Ireland recalls that in accordance with Article 8 of the Protocol it may notify the Council in writing that it no longer wishes to be covered by the terms of the Protocol. Ireland intends to review the operation of these arrangements within three years of the entry into force of the Treaty of Lisbon.

57. Declaration by the Italian Republic on the composition of the European Parliament

Italy notes that, pursuant to Articles 10 and 14 of the Treaty on European Union, the European Parliament is to be composed of representatives of the Union's citizens; this representation is to be progressively proportional.

Italy likewise notes that on the basis of Article 9 of the Treaty on European Union and Article 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union, every national of a Member State is a citizen of the Union.

Italy therefore considers that, without prejudice to the decision on the 2009-2014 legislative period, any decision adopted by the European Council, at the initiative of the European Parliament and with its consent, establishing the composition of the European Parliament, must abide by the principles laid down out in the first subparagraph of Article 14.

58. Declaration by the Republic of Latvia, the Republic of Hungary and the Republic of Malta on the spelling of the name of the single currency in the Treaties

Without prejudice to the unified spelling of the name of the single currency of the European Union referred to in the Treaties as displayed on the banknotes and on the coins, Latvia, Hungary and Malta declare that the spelling of the name of the single currency, including its derivatives as applied throughout the Latvian, Hungarian and Maltese text of the Treaties, has no effect on the existing rules of the Latvian, Hungarian or Maltese languages.

59. Declaration by the Kingdom of the Netherlands on Article 312 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Kingdom of the Netherlands will agree to a decision as referred to in the second subparagraph of Article 312(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union once a revision of the decision referred to in the third paragraph of Article 311 of that Treaty has provided the Netherlands with a satisfactory solution for its excessive negative net payment position *vis-à-vis* the Union budget.

60. Declaration by the Kingdom of the Netherlands on Article 355 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The Kingdom of the Netherlands declares that an initiative for a decision, as referred to in Article 355(6) aimed at amending the status of the Netherlands Antilles and/or Aruba with regard to the Union, will be submitted only on the basis of a decision taken in conformity with the Charter for the Kingdom of the Netherlands.

61. Declaration by the Republic of Poland on the Charter of Fundamental Rights of the European Union

The Charter does not affect in any way the right of Member States to legislate in the sphere of public morality, family law, as well as the protection of human dignity and respect for human physical and moral integrity.

62. Declaration by the Republic of Poland concerning the Protocol on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in relation to Poland and the United Kingdom

Poland declares that, having regard to the tradition of social movement of 'Solidarity' and its significant contribution to the struggle for social and labour rights, it fully respects social and labour rights, as established by European Union law, and in particular those reaffirmed in Title IV of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

63. Declaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the definition of the term 'nationals'

In respect of the Treaties and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in any of the acts deriving from those Treaties or continued in force by those Treaties, the United Kingdom reiterates the Declaration it made on 31 December 1982 on the definition of the term 'nationals' with the exception that the reference to 'British Dependent Territories Citizens' shall be read as meaning 'British overseas territories citizens'.

64. Declaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the franchise for elections to the European Parliament

The United Kingdom notes that Article 14 of the Treaty on European Union and other provisions of the Treaties are not intended to change the basis for the franchise for elections to the European Parliament.

65. Declaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Article 75 of the Treaty on the Functioning of the European Union

The United Kingdom fully supports robust action with regard to adopting financial sanctions designed to prevent and combat terrorism and related activities. Therefore, the United Kingdom declares that it intends to exercise its right under Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice to take part in the adoption of all proposals made under Article 75 of the Treaty on the Functioning of the European Union.





TABLES OF EQUIVALENCES (*)

Treaty on European Union

Old numbering of the Treaty on European Union	New numbering of the Treaty on European Union
TITLE I — COMMON PROVISIONS	TITLE I — COMMON PROVISIONS
Article 1	Article 1
	Article 2
Article 2	Article 3
Article 3 (repealed) ⁽¹⁾	
	Article 4
	Article 5 ⁽²⁾
Article 4 (repealed) ⁽³⁾	
Article 5 (repealed) ⁽⁴⁾	
Article 6	Article 6
Article 7	Article 7
	Article 8
TITLE II — PROVISIONS AMENDING THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY WITH A VIEW TO ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY	TITLE II — PROVISIONS ON DEMOCRATIC PRINCIPLES
Article 8 (repealed) ⁽⁵⁾	Article 9
	Article 10 ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Replaced, in substance, by Article 7 of the Treaty on the Functioning of the European Union ('TFEU') and by Articles 13(1) and 21, paragraph 3, second subparagraph of the Treaty on European Union ('TEU').

⁽²⁾ Replaces Article 5 of the Treaty establishing the European Community ('TEC').

⁽³⁾ Replaced, in substance, by Article 15.

⁽⁴⁾ Replaced, in substance, by Article 13, paragraph 2.

⁽⁵⁾ Article 8 TEU, which was in force until the entry into force of the Treaty of Lisbon (hereinafter 'current'), amended the TEC. Those amendments are incorporated into the latter Treaty and Article 8 is repealed. Its number is used to insert a new provision.

⁽⁶⁾ Paragraph 4 replaces, in substance, the first subparagraph of Article 191 TEC.

(*) Tables of equivalences as referred to in Article 5 of the Treaty of Lisbon. The original centre column, which set out the intermediate numbering as used in that Treaty, has been omitted.

Old numbering of the Treaty on European Union	New numbering of the Treaty on European Union
	Article 11
	Article 12
TITLE III — PROVISIONS AMENDING THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY	TITLE III — PROVISIONS ON THE INSTITUTIONS
Article 9 (repealed) ⁽⁷⁾	Article 13
	Article 14 ⁽⁸⁾
	Article 15 ⁽⁹⁾
	Article 16 ⁽¹⁰⁾
	Article 17 ⁽¹¹⁾
	Article 18
	Article 19 ⁽¹²⁾
TITLE IV — PROVISIONS AMENDING THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY	TITLE IV — PROVISIONS ON ENHANCED COOPERATION
Article 10 (repealed) ⁽¹³⁾ Articles 27a to 27e (replaced) Articles 40 to 40b (replaced) Articles 43 to 45 (replaced)	Article 20 ⁽¹⁴⁾

⁽⁷⁾ The current Article 9 TEU amended the Treaty establishing the European Coal and Steel Community. This latter expired on 23 July 2002. Article 9 is repealed and the number thereof is used to insert another provision.

⁽⁸⁾ — Paragraphs 1 and 2 replace, in substance, Article 189 TEC;
— paragraphs 1 to 3 replace, in substance, paragraphs 1 to 3 of Article 190 TEC;
— paragraph 1 replaces, in substance, the first subparagraph of Article 192 TEC;
— paragraph 4 replaces, in substance, the first subparagraph of Article 197 TEC.

⁽⁹⁾ Replaces, in substance, Article 4.

⁽¹⁰⁾ — Paragraph 1 replaces, in substance, the first and second indents of Article 202 TEC;
— paragraphs 2 and 9 replace, in substance, Article 203 TEC;
— paragraphs 4 and 5 replace, in substance, paragraphs 2 and 4 of Article 205 TEC.

⁽¹¹⁾ — Paragraph 1 replaces, in substance, Article 211 TEC;
— paragraphs 3 and 7 replace, in substance, Article 214 TEC.
— paragraph 6 replaces, in substance, paragraphs 1, 3 and 4 of Article 217 TEC.

⁽¹²⁾ — Replaces, in substance, Article 220 TEC.
— the first subparagraph of paragraph 2 replaces, in substance, the first subparagraph of Article 221 TEC.

⁽¹³⁾ The current Article 10 TEU amended the Treaty establishing the European Atomic Energy Community. Those amendments are incorporated into the Treaty of Lisbon. Article 10 is repealed and the number thereof is used to insert another provision.

⁽¹⁴⁾ Also replaces Articles 11 and 11a TEC.

Old numbering of the Treaty on European Union	New numbering of the Treaty on European Union
TITLE V — PROVISIONS ON A COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY	TITLE V — GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION AND SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
	Chapter 1 — General provisions on the Union's external action
	Article 21
	Article 22
	Chapter 2 — Specific provisions on the common foreign and security policy
	Section 1 — Common provisions
	Article 23
Article 11	Article 24
Article 12	Article 25
Article 13	Article 26
	Article 27
Article 14	Article 28
Article 15	Article 29
<i>Article 22 (moved)</i>	Article 30
<i>Article 23 (moved)</i>	Article 31
Article 16	Article 32
Article 17 (moved)	<i>Article 42</i>
Article 18	Article 33
Article 19	Article 34
Article 20	Article 35
Article 21	Article 36
Article 22 (moved)	<i>Article 30</i>
Article 23 (moved)	<i>Article 31</i>
Article 24	Article 37

Old numbering of the Treaty on European Union	New numbering of the Treaty on European Union
Article 25	Article 38
	Article 39
Article 47 (<i>moved</i>)	Article 40
Article 26 (repealed)	
Article 27 (repealed)	
Article 27a (replaced) ⁽¹⁵⁾	Article 20
Article 27b (replaced) ⁽¹⁵⁾	Article 20
Article 27c (replaced) ⁽¹⁵⁾	Article 20
Article 27d (replaced) ⁽¹⁵⁾	Article 20
Article 27e (replaced) ⁽¹⁵⁾	Article 20
Article 28	Article 41
	Section 2 — Provisions on the common security and defence policy
Article 17 (<i>moved</i>)	Article 42
	Article 43
	Article 44
	Article 45
	Article 46
TITLE VI — PROVISIONS ON POLICE AND JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS (repealed) ⁽¹⁶⁾	
Article 29 (replaced) ⁽¹⁷⁾	
Article 30 (replaced) ⁽¹⁸⁾	
Article 31 (replaced) ⁽¹⁹⁾	

⁽¹⁵⁾ The current Articles 27a to 27e, on enhanced cooperation, are also replaced by Articles 326 to 334 TFEU.

⁽¹⁶⁾ The current provisions of Title VI of the TEU, on police and judicial cooperation in criminal matters, are replaced by the provisions of Chapters 1, 4 and 5 of Title IV (renumbered V) of Part Three of the TFEU.

⁽¹⁷⁾ Replaced by Article 67 TFEU.

⁽¹⁸⁾ Replaced by Articles 87 and 88 TFEU.

⁽¹⁹⁾ Replaced by Articles 82, 83 and 85 TFEU.

Old numbering of the Treaty on European Union	New numbering of the Treaty on European Union
Article 32 (replaced) ⁽²⁰⁾	
Article 33 (replaced) ⁽²¹⁾	
Article 34 (repealed)	
Article 35 (repealed)	
Article 36 (replaced) ⁽²²⁾	
Article 37 (repealed)	
Article 38 (repealed)	
Article 39 (repealed)	
Article 40 (replaced) ⁽²³⁾	Article 20
Article 40 A (replaced) ⁽²³⁾	Article 20
Article 40 B (replaced) ⁽²³⁾	Article 20
Article 41 (repealed)	
Article 42 (repealed)	
TITLE VII — PROVISIONS ON ENHANCED COOPERATION (replaced) ⁽²⁴⁾	TITLE IV — PROVISIONS ON ENHANCED COOPERATION
Article 43 (replaced) ⁽²⁴⁾	Article 20
Article 43 A (replaced) ⁽²⁴⁾	Article 20
Article 43 B (replaced) ⁽²⁴⁾	Article 20
Article 44 (replaced) ⁽²⁴⁾	Article 20
Article 44 A (replaced) ⁽²⁴⁾	Article 20
Article 45 (replaced) ⁽²⁴⁾	Article 20
TITRE VIII — FINAL PROVISIONS	TITLE VI — FINAL PROVISIONS
Article 46 (repealed)	
	Article 47

⁽²⁰⁾ Replaced by Article 89 TFEU.

⁽²¹⁾ Replaced by Article 72 TFEU.

⁽²²⁾ Replaced by Article 71 TFEU.

⁽²³⁾ The current Articles 40 to 40 B TEU, on enhanced cooperation, are also replaced by Articles 326 to 334 TFEU.

⁽²⁴⁾ The current Articles 43 to 45 and Title VII of the TEU, on enhanced cooperation, are also replaced by Articles 326 to 334 TFEU.

Old numbering of the Treaty on European Union	New numbering of the Treaty on European Union
Article 47 (replaced)	Article 40
Article 48	Article 48
Article 49	Article 49
	Article 50
	Article 51
	Article 52
Article 50 (repealed)	
Article 51	Article 53
Article 52	Article 54
Article 53	Article 55

Treaty on the Functioning of the European Union

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
PART ONE — PRINCIPLES	PART ONE — PRINCIPLES
Article 1 (repealed)	
	Article 1
Article 2 (repealed) ⁽²⁵⁾	
	Title I — Categories and areas of union competence
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5
	Article 6
	Title II — Provisions having general application

⁽²⁵⁾ Replaced, in substance, by Article 3 TEU.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
	Article 7
Article 3, paragraph 1 (repealed) ⁽²⁶⁾	
Article 3, paragraph 2	Article 8
Article 4 (moved)	Article 119
Article 5 (replaced) ⁽²⁷⁾	
	Article 9
	Article 10
Article 6	Article 11
Article 153, paragraph 2 (moved)	Article 12
	Article 13 ⁽²⁸⁾
Article 7 (repealed) ⁽²⁹⁾	
Article 8 (repealed) ⁽³⁰⁾	
Article 9 (repealed)	
Article 10 (repealed) ⁽³¹⁾	
Article 11 (replaced) ⁽³²⁾	Articles 326 to 334
Article 11a (replaced) ⁽³²⁾	Articles 326 to 334
Article 12 (moved)	Article 18
Article 13 (moved)	Article 19
Article 14 (moved)	Article 26
Article 15 (moved)	Article 27
Article 16	Article 14
Article 255 (moved)	Article 15
Article 286 (moved)	Article 16

⁽²⁶⁾ Replaced, in substance, by Articles 3 to 6 TFEU.

⁽²⁷⁾ Replaced by Article 5 TEU.

⁽²⁸⁾ Insertion of the operative part of the protocol on protection and welfare of animals.

⁽²⁹⁾ Replaced, in substance, by Article 13 TEU.

⁽³⁰⁾ Replaced, in substance, by Article 13 TEU and Article 282, paragraph 1, TFEU.

⁽³¹⁾ Replaced, in substance, by Article 4, paragraph 3, TEU.

⁽³²⁾ Also replaced by Article 20 TEU.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
	Article 17
PART TWO — CITIZENSHIP OF THE UNION	PART TWO — NON-DISCRIMINATION AND CITIZENSHIP OF THE UNION
<i>Article 12 (moved)</i>	Article 18
<i>Article 13 (moved)</i>	Article 19
Article 17	Article 20
Article 18	Article 21
Article 19	Article 22
Article 20	Article 23
Article 21	Article 24
Article 22	Article 25
PART THREE — COMMUNITY POLICIES	PART THREE — POLICIES AND INTERNAL ACTIONS OF THE UNION
	Title I — The internal market
<i>Article 14 (moved)</i>	Article 26
<i>Article 15 (moved)</i>	Article 27
Title I — Free movement of goods	Title II — Free movement of goods
Article 23	Article 28
Article 24	Article 29
Chapter 1 — The customs union	Chapter 1 — The customs union
Article 25	Article 30
Article 26	Article 31
Article 27	Article 32
<i>Part Three, Title X, Customs cooperation (moved)</i>	Chapter 2 — Customs cooperation
<i>Article 135 (moved)</i>	Article 33
Chapter 2 — Prohibition of quantitative restrictions between Member States	Chapter 3 — Prohibition of quantitative restrictions between Member States
Article 28	Article 34

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 29	Article 35
Article 30	Article 36
Article 31	Article 37
Title II — Agriculture	Title III — Agriculture and fisheries
Article 32	Article 38
Article 33	Article 39
Article 34	Article 40
Article 35	Article 41
Article 36	Article 42
Article 37	Article 43
Article 38	Article 44
Title III — Free movement of persons, services and capital	Title IV — Free movement of persons, services and capital
Chapter 1 — Workers	Chapter 1 — Workers
Article 39	Article 45
Article 40	Article 46
Article 41	Article 47
Article 42	Article 48
Chapter 2 — Right of establishment	Chapter 2 — Right of establishment
Article 43	Article 49
Article 44	Article 50
Article 45	Article 51
Article 46	Article 52
Article 47	Article 53
Article 48	Article 54
Article 294 (<i>moved</i>)	Article 55
Chapter 3 — Services	Chapter 3 — Services
Article 49	Article 56

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 50	Article 57
Article 51	Article 58
Article 52	Article 59
Article 53	Article 60
Article 54	Article 61
Article 55	Article 62
Chapter 4 — Capital and payments	Chapter 4 — Capital and payments
Article 56	Article 63
Article 57	Article 64
Article 58	Article 65
Article 59	Article 66
Article 60 (moved)	Article 75
Title IV — Visas, asylum, immigration and other policies related to free movement of persons	Title V — Area of freedom, security and justice
	Chapter 1 — General provisions
Article 61	Article 67 ⁽³³⁾
	Article 68
	Article 69
	Article 70
	Article 71 ⁽³⁴⁾
Article 64, paragraph 1 (replaced)	Article 72 ⁽³⁵⁾
	Article 73
Article 66 (replaced)	Article 74
Article 60 (moved)	Article 75
	Article 76

⁽³³⁾ Also replaces the current Article 29 TEU.

⁽³⁴⁾ Replaces the current Article 36 TEU.

⁽³⁵⁾ Also replaces the current Article 33 TEU.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
	Chapter 2 — Policies on border checks, asylum and immigration
Article 62	Article 77
Article 63, points 1 et 2, and Article 64, paragraph 2 ⁽³⁶⁾	Article 78
Article 63, points 3 and 4	Article 79
	Article 80
Article 64, paragraph 1 (replaced)	Article 72
	Chapter 3 — Judicial cooperation in civil matters
Article 65	Article 81
Article 66 (replaced)	Article 74
Article 67 (repealed)	
Article 68 (repealed)	
Article 69 (repealed)	
	Chapter 4 — Judicial cooperation in criminal matters
	Article 82 ⁽³⁷⁾
	Article 83 ⁽³⁷⁾
	Article 84
	Article 85 ⁽³⁷⁾
	Article 86
	Chapter 5 — Police cooperation
	Article 87 ⁽³⁸⁾
	Article 88 ⁽³⁸⁾
	Article 89 ⁽³⁹⁾

⁽³⁶⁾ Points 1 and 2 of Article 63 EC are replaced by paragraphs 1 and 2 of Article 78 TFEU, and paragraph 2 of Article 64 is replaced by paragraph 3 of Article 78 TFEU.

⁽³⁷⁾ Replaces the current Article 31 TEU.

⁽³⁸⁾ Replaces the current Article 30 TEU.

⁽³⁹⁾ Replaces the current Article 32 TEU.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Title V — Transport	Title VI — Transport
Article 70	Article 90
Article 71	Article 91
Article 72	Article 92
Article 73	Article 93
Article 74	Article 94
Article 75	Article 95
Article 76	Article 96
Article 77	Article 97
Article 78	Article 98
Article 79	Article 99
Article 80	Article 100
Title VI — Common rules on competition, taxation and approximation of laws	Title VII — Common rules on competition, taxation and approximation of laws
Chapter 1 — Rules on competition	Chapter 1 — Rules on competition
Section 1 — Rules applying to undertakings	Section 1 — Rules applying to undertakings
Article 81	Article 101
Article 82	Article 102
Article 83	Article 103
Article 84	Article 104
Article 85	Article 105
Article 86	Article 106
Section 2 — Aids granted by States	Section 2 — Aids granted by States
Article 87	Article 107
Article 88	Article 108
Article 89	Article 109
Chapter 2 — Tax provisions	Chapter 2 — Tax provisions

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 90	Article 110
Article 91	Article 111
Article 92	Article 112
Article 93	Article 113
Chapter 3 — Approximation of laws	Chapter 3 — Approximation of laws
<i>Article 95 (moved)</i>	Article 114
<i>Article 94 (moved)</i>	Article 115
Article 96	Article 116
Article 97	Article 117
	Article 118
Title VII — Economic and monetary policy	Title VIII — Economic and monetary policy
<i>Article 4 (moved)</i>	Article 119
Chapter 1 — Economic policy	Chapter 1 — Economic policy
Article 98	Article 120
Article 99	Article 121
Article 100	Article 122
Article 101	Article 123
Article 102	Article 124
Article 103	Article 125
Article 104	Article 126
Chapter 2 — monetary policy	Chapter 2 — monetary policy
Article 105	Article 127
Article 106	Article 128
Article 107	Article 129
Article 108	Article 130
Article 109	Article 131
Article 110	Article 132

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 111, paragraphs 1 to 3 and 5 (moved)	Article 219
Article 111, paragraph 4 (moved)	Article 138
	Article 133
Chapter 3 — Institutional provisions	Chapter 3 — Institutional provisions
Article 112 (moved)	Article 283
Article 113 (moved)	Article 284
Article 114	Article 134
Article 115	Article 135
	Chapter 4 — Provisions specific to Member States whose currency is the euro
	Article 136
	Article 137
Article 111, paragraph 4 (moved)	Article 138
Chapter 4 — Transitional provisions	Chapter 5 — Transitional provisions
Article 116 (repealed)	
	Article 139
Article 117, paragraphs 1, 2, sixth indent, and 3 to 9 (repealed)	
Article 117, paragraph 2, first five indents (moved)	Article 141, paragraph 2
Article 121, paragraph 1 (moved) Article 122, paragraph 2, second sentence (moved) Article 123, paragraph 5 (moved)	Article 140 ⁽⁴⁰⁾
Article 118 (repealed)	
Article 123, paragraph 3 (moved) Article 117, paragraph 2, first five indents (moved)	Article 141 ⁽⁴¹⁾

⁽⁴⁰⁾ — Article 140, paragraph 1 takes over the wording of paragraph 1 of Article 121.
— Article 140, paragraph 2 takes over the second sentence of paragraph 2 of Article 122.
— Article 140, paragraph 3 takes over paragraph 5 of Article 123.

⁽⁴¹⁾ — Article 141, paragraph 1 takes over paragraph 3 of Article 123.
— Article 141, paragraph 2 takes over the first five indents of paragraph 2 of Article 117.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
<i>Article 124, paragraph 1 (moved)</i>	Article 142
Article 119	Article 143
Article 120	Article 144
Article 121, paragraph 1 (moved)	<i>Article 140, paragraph 1</i>
Article 121, paragraphs 2 to 4 (repealed)	
Article 122, paragraphs 1, 2, first sentence, 3, 4, 5 and 6 (repealed)	
Article 122, paragraph 2, second sentence (moved)	<i>Article 140, paragraph 2, first subparagraph</i>
Article 123, paragraphs 1, 2 and 4 (repealed)	
Article 123, paragraph 3 (moved)	<i>Article 141, paragraph 1</i>
Article 123, paragraph 5 (moved)	<i>Article 140, paragraph 3</i>
Article 124, paragraph 1 (moved)	Article 142
Article 124, paragraph 2 (repealed)	
Title VIII — Employment	Title IX — Employment
Article 125	Article 145
Article 126	Article 146
Article 127	Article 147
Article 128	Article 148
Article 129	Article 149
Article 130	Article 150
Title IX — Common commercial policy (moved)	<i>Part Five, Title II, common commercial policy</i>
Article 131 (moved)	<i>Article 206</i>
Article 132 (repealed)	
Article 133 (moved)	<i>Article 207</i>
Article 134 (repealed)	
Title X — Customs cooperation (moved)	<i>Part Three, Title II, Chapter 2, Customs cooperation</i>

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 135 (moved)	Article 33
Title XI — Social policy, education, vocational training and youth	Title X — Social policy
Chapter 1 — social provisions (repealed)	
Article 136	Article 151
	Article 152
Article 137	Article 153
Article 138	Article 154
Article 139	Article 155
Article 140	Article 156
Article 141	Article 157
Article 142	Article 158
Article 143	Article 159
Article 144	Article 160
Article 145	Article 161
Chapter 2 — The European Social Fund	Title XI — The European Social Fund
Article 146	Article 162
Article 147	Article 163
Article 148	Article 164
Chapter 3 — Education, vocational training and youth	Title XII — Education, vocational training, youth and sport
Article 149	Article 165
Article 150	Article 166
Title XII — Culture	Title XIII — Culture
Article 151	Article 167
Title XIII — Public health	Title XIV — Public health
Article 152	Article 168
Title XIV — Consumer protection	Title XV — Consumer protection

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 153, paragraphs 1, 3, 4 and 5	Article 169
Article 153, paragraph 2 (moved)	Article 12
Title XV — Trans-European networks	Title XVI — Trans-European networks
Article 154	Article 170
Article 155	Article 171
Article 156	Article 172
Title XVI — Industry	Title XVII — Industry
Article 157	Article 173
Title XVII — Economic and social cohesion	Title XVIII — Economic, social and territorial cohesion
Article 158	Article 174
Article 159	Article 175
Article 160	Article 176
Article 161	Article 177
Article 162	Article 178
Title XVIII — Research and technological development	Title XIX — Research and technological development and space
Article 163	Article 179
Article 164	Article 180
Article 165	Article 181
Article 166	Article 182
Article 167	Article 183
Article 168	Article 184
Article 169	Article 185
Article 170	Article 186
Article 171	Article 187
Article 172	Article 188
	Article 189

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 173	Article 190
Title XIX — Environment	Title XX — Environment
Article 174	Article 191
Article 175	Article 192
Article 176	Article 193
	Titre XXI — Energy
	Article 194
	Title XXII — Tourism
	Article 195
	Title XXIII — Civil protection
	Article 196
	Title XXIV — Administrative cooperation
	Article 197
Title XX — Development cooperation (moved)	<i>Part Five, Title III, Chapter 1, Development cooperation</i>
Article 177 (moved)	Article 208
Article 178 (repealed) ⁽⁴²⁾	
Article 179 (moved)	Article 209
Article 180 (moved)	Article 210
Article 181 (moved)	Article 211
Title XXI — Economic, financial and technical cooperation with third countries (moved)	<i>Part Five, Title III, Chapter 2, Economic, financial and technical cooperation with third countries</i>
Article 181a (moved)	Article 212
PART FOUR — ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES	PART FOUR — ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES
Article 182	Article 198
Article 183	Article 199

⁽⁴²⁾ Replaced, in substance, by the second sentence of the second subparagraph of paragraph 1 of Article 208 TFEU.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 184	Article 200
Article 185	Article 201
Article 186	Article 202
Article 187	Article 203
Article 188	Article 204
	PART FIVE — THE UNION'S EXTERNAL ACTION
	Title I — General provisions on the Union's external action
	Article 205
Part Three, Title IX, <i>Common commercial policy (moved)</i>	Title II — Common commercial policy
Article 131 (<i>moved</i>)	Article 206
Article 133 (<i>moved</i>)	Article 207
	Title III — Cooperation with third countries and humanitarian aid
Part Three, Title XX, <i>Development cooperation (moved)</i>	Chapter 1 — development cooperation
Article 177 (<i>moved</i>)	Article 208 ⁽⁴³⁾
Article 179 (<i>moved</i>)	Article 209
Article 180 (<i>moved</i>)	Article 210
Article 181 (<i>moved</i>)	Article 211
Part Three, Title XXI, <i>Economic, financial and technical cooperation with third countries (moved)</i>	Chapter 2 — Economic, financial and technical cooperation with third countries
Article 181a (<i>moved</i>)	Article 212
	Article 213
	Chapter 3 — Humanitarian aid
	Article 214
	Title IV — Restrictive measures

⁽⁴³⁾ The second sentence of the second subparagraph of paragraph 1 replaces, in substance, Article 178 TEC.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
<i>Article 301 (replaced)</i>	Article 215
	Title V — International agreements
	Article 216
<i>Article 310 (moved)</i>	Article 217
<i>Article 300 (replaced)</i>	Article 218
<i>Article 111, paragraphs 1 to 3 and 5 (moved)</i>	Article 219
	Title VI — The Union's relations with international organisations and third countries and the Union delegations
<i>Articles 302 to 304 (replaced)</i>	Article 220
	Article 221
	Title VII — Solidarity clause
	Article 222
PART FIVE — INSTITUTIONS OF THE COMMUNITY	PART SIX — INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS
Title I — Institutional provisions	Title I — Institutional provisions
Chapter 1 — The institutions	Chapter 1 — The institutions
Section 1 — The European Parliament	Section 1 — The European Parliament
Article 189 (repealed) ⁽⁴⁴⁾	
Article 190, paragraphs 1 to 3 (repealed) ⁽⁴⁵⁾	
Article 190, paragraphs 4 and 5	Article 223
Article 191, first paragraph (repealed) ⁽⁴⁶⁾	
Article 191, second paragraph	Article 224
Article 192, first paragraph (repealed) ⁽⁴⁷⁾	
Article 192, second paragraph	Article 225
Article 193	Article 226

⁽⁴⁴⁾ Replaced, in substance, by Article 14, paragraphs 1 and 2, TEU.

⁽⁴⁵⁾ Replaced, in substance, by Article 14, paragraphs 1 to 3, TEU.

⁽⁴⁶⁾ Replaced, in substance, by Article 11, paragraph 4, TEU.

⁽⁴⁷⁾ Replaced, in substance, by Article 14, paragraph 1, TEU.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 194	Article 227
Article 195	Article 228
Article 196	Article 229
Article 197, first paragraph (repealed) ⁽⁴⁸⁾	
Article 197, second, third and fourth paragraphs	Article 230
Article 198	Article 231
Article 199	Article 232
Article 200	Article 233
Article 201	Article 234
	Section 2 — The European Council
	Article 235
	Article 236
Section 2 — The Council	Section 3 — The Council
Article 202 (repealed) ⁽⁴⁹⁾	
Article 203 (repealed) ⁽⁵⁰⁾	
Article 204	Article 237
Article 205, paragraphs 2 and 4 (repealed) ⁽⁵¹⁾	
Article 205, paragraphs 1 and 3	Article 238
Article 206	Article 239
Article 207	Article 240
Article 208	Article 241
Article 209	Article 242
Article 210	Article 243
Section 3 — The Commission	Section 4 — The Commission

⁽⁴⁸⁾ Replaced, in substance, by Article 14, paragraph 4, TEU.

⁽⁴⁹⁾ Replaced, in substance, by Article 16, paragraph 1, TEU and by Articles 290 and 291 TFEU.

⁽⁵⁰⁾ Replaced, in substance, by Article 16, paragraphs 2 and 9 TEU.

⁽⁵¹⁾ Replaced, in substance, by Article 16, paragraphs 4 and 5 TEU.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 211 (repealed) ⁽⁵²⁾	
	Article 244
Article 212 (moved)	Article 249, paragraph 2
Article 213	Article 245
Article 214 (repealed) ⁽⁵³⁾	
Article 215	Article 246
Article 216	Article 247
Article 217, paragraphs 1, 3 and 4 (repealed) ⁽⁵⁴⁾	
Article 217, paragraph 2	Article 248
Article 218, paragraph 1 (repealed) ⁽⁵⁵⁾	
Article 218, paragraph 2	Article 249
Article 219	Article 250
Section 4 — The Court of Justice	Section 5 — The Court of Justice of the European Union
Article 220 (repealed) ⁽⁵⁶⁾	
Article 221, first paragraph (repealed) ⁽⁵⁷⁾	
Article 221, second and third paragraphs	Article 251
Article 222	Article 252
Article 223	Article 253
Article 224 ⁽⁵⁸⁾	Article 254
	Article 255
Article 225	Article 256
Article 225a	Article 257

⁽⁵²⁾ Replaced, in substance, by Article 17, paragraph 1 TEU.

⁽⁵³⁾ Replaced, in substance, by Article 17, paragraphs 3 and 7 TEU.

⁽⁵⁴⁾ Replaced, in substance, by Article 17, paragraph 6, TEU.

⁽⁵⁵⁾ Replaced, in substance, by Article 295 TFEU.

⁽⁵⁶⁾ Replaced, in substance, by Article 19 TEU.

⁽⁵⁷⁾ Replaced, in substance, by Article 19, paragraph 2, first subparagraph, of the TEU.

⁽⁵⁸⁾ The first sentence of the first subparagraph is replaced, in substance, by Article 19, paragraph 2, second subparagraph of the TEU.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 226	Article 258
Article 227	Article 259
Article 228	Article 260
Article 229	Article 261
Article 229a	Article 262
Article 230	Article 263
Article 231	Article 264
Article 232	Article 265
Article 233	Article 266
Article 234	Article 267
Article 235	Article 268
	Article 269
Article 236	Article 270
Article 237	Article 271
Article 238	Article 272
Article 239	Article 273
Article 240	Article 274
	Article 275
	Article 276
Article 241	Article 277
Article 242	Article 278
Article 243	Article 279
Article 244	Article 280
Article 245	Article 281
	Section 6 — The European Central Bank
	Article 282
Article 112 (<i>moved</i>)	Article 283

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 113 (<i>moved</i>)	Article 284
Section 5 — The Court of Auditors	Section 7 — The Court of Auditors
Article 246	Article 285
Article 247	Article 286
Article 248	Article 287
Chapter 2 — Provisions common to several institutions	Chapter 2 — Legal acts of the Union, adoption procedures and other provisions
	Section 1 — The legal acts of the Union
Article 249	Article 288
	Article 289
	Article 290 ⁽⁵⁹⁾
	Article 291 ⁽⁵⁹⁾
	Article 292
	Section 2 — Procedures for the adoption of acts and other provisions
Article 250	Article 293
Article 251	Article 294
Article 252 (<i>repealed</i>)	
	Article 295
Article 253	Article 296
Article 254	Article 297
	Article 298
Article 255 (<i>moved</i>)	Article 15
Article 256	Article 299
	Chapter 3 — The Union's advisory bodies
	Article 300
Chapter 3 — The Economic and Social Committee	Section 1 — The Economic and Social Committee

⁽⁵⁹⁾ Replaces, in substance, the third indent of Article 202 TEC.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 257 (repealed) ⁽⁶⁰⁾	
Article 258, first, second and fourth paragraphs	Article 301
Article 258, third paragraph (repealed) ⁽⁶¹⁾	
Article 259	Article 302
Article 260	Article 303
Article 261 (repealed)	
Article 262	Article 304
Chapter 4 — The Committee of the Regions	Section 2 — The Committee of the Regions
Article 263, first and fifth paragraphs (repealed) ⁽⁶²⁾	
Article 263, second to fourth paragraphs	Article 305
Article 264	Article 306
Article 265	Article 307
Chapter 5 — The European Investment Bank	Chapter 4 — The European Investment Bank
Article 266	Article 308
Article 267	Article 309
Title II — Financial provisions	Title II — Financial provisions
Article 268	Article 310
	Chapter 1 — The Union's own resources
Article 269	Article 311
Article 270 (repealed) ⁽⁶³⁾	
	Chapter 2 — The multiannual financial framework
	Article 312
	Chapter 3 — The Union's annual budget

⁽⁶⁰⁾ Replaced, in substance, by Article 300, paragraph 2 of the TFEU.

⁽⁶¹⁾ Replaced, in substance, by Article 300, paragraph 4 of the TFEU.

⁽⁶²⁾ Replaced, in substance, by Article 300, paragraphs 3 and 4, TFEU.

⁽⁶³⁾ Replaced, in substance, by Article 310, paragraph 4, TFEU.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 272, paragraph 1 (moved)	Article 313
Article 271 (moved)	Article 316
Article 272, paragraph 1 (moved)	Article 313
Article 272, paragraphs 2 to 10	Article 314
Article 273	Article 315
Article 271 (moved)	Article 316
	Chapter 4 — Implementation of the budget and discharge
Article 274	Article 317
Article 275	Article 318
Article 276	Article 319
	Chapter 5 — Common provisions
Article 277	Article 320
Article 278	Article 321
Article 279	Article 322
	Article 323
	Article 324
	Chapter 6 — Combating fraud
Article 280	Article 325
	Title III — Enhanced cooperation
Articles 11 and 11a (replaced)	Article 326 ⁽⁶⁴⁾
Articles 11 and 11a (replaced)	Article 327 ⁽⁶⁴⁾
Articles 11 and 11a (replaced)	Article 328 ⁽⁶⁴⁾
Articles 11 and 11a (replaced)	Article 329 ⁽⁶⁴⁾
Articles 11 and 11a (replaced)	Article 330 ⁽⁶⁴⁾
Articles 11 and 11a (replaced)	Article 331 ⁽⁶⁴⁾
Articles 11 and 11a (replaced)	Article 332 ⁽⁶⁴⁾

⁽⁶⁴⁾ Also replaces the current Articles 27a to 27e, 40 to 40b, and 43 to 45 TEU.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Articles 11 and 11a (replaced)	Article 333 ⁽⁶⁴⁾
Articles 11 and 11a (replaced)	Article 334 ⁽⁶⁴⁾
PART SIX — GENERAL AND FINAL PROVISIONS	PART SEVEN — GENERAL AND FINAL PROVISIONS
Article 281 (repealed) ⁽⁶⁵⁾	
Article 282	Article 335
Article 283	Article 336
Article 284	Article 337
Article 285	Article 338
Article 286 (replaced)	Article 16
Article 287	Article 339
Article 288	Article 340
Article 289	Article 341
Article 290	Article 342
Article 291	Article 343
Article 292	Article 344
Article 293 (repealed)	
Article 294 (moved)	Article 55
Article 295	Article 345
Article 296	Article 346
Article 297	Article 347
Article 298	Article 348
Article 299, paragraph 1 (repealed) ⁽⁶⁶⁾	
Article 299, paragraph 2, second, third and fourth subparagraphs	Article 349
Article 299, paragraph 2, first subparagraph, and paragraphs 3 to 6 (moved)	Article 355

⁽⁶⁴⁾ Also replaces the current Articles 27a to 27e, 40 to 40b, and 43 to 45 TEU.

⁽⁶⁵⁾ Replaced, in substance, by Article 47 TEU.

⁽⁶⁶⁾ Replaced, in substance by Article 52 TEU.

Old numbering of the Treaty establishing the European Community	New numbering of the Treaty on the Functioning of the European Union
Article 300 (replaced)	Article 218
Article 301 (replaced)	Article 215
Article 302 (replaced)	Article 220
Article 303 (replaced)	Article 220
Article 304 (replaced)	Article 220
Article 305 (repealed)	
Article 306	Article 350
Article 307	Article 351
Article 308	Article 352
	Article 353
Article 309	Article 354
Article 310 (moved)	Article 217
Article 311 (repealed) ⁽⁶⁷⁾	
Article 299, paragraph 2, first subparagraph, and paragraphs 3 to 6 (moved)	Article 355
Article 312	Article 356
Final Provisions	
Article 313	Article 357
	Article 358
Article 314 (repealed) ⁽⁶⁸⁾	
⁽⁶⁷⁾ Replaced, in substance by Article 51 TEU.	
⁽⁶⁸⁾ Replaced, in substance by Article 55 TEU.	



CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE
EUROPEAN UNION

(2010/C 83/02)



The European Parliament, the Council and the Commission solemnly proclaim the following text as the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

Preamble

The peoples of Europe, in creating an ever closer union among them, are resolved to share a peaceful future based on common values.

Conscious of its spiritual and moral heritage, the Union is founded on the indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity; it is based on the principles of democracy and the rule of law. It places the individual at the heart of its activities, by establishing the citizenship of the Union and by creating an area of freedom, security and justice.

The Union contributes to the preservation and to the development of these common values while respecting the diversity of the cultures and traditions of the peoples of Europe as well as the national identities of the Member States and the organisation of their public authorities at national, regional and local levels; it seeks to promote balanced and sustainable development and ensures free movement of persons, services, goods and capital, and the freedom of establishment.

To this end, it is necessary to strengthen the protection of fundamental rights in the light of changes in society, social progress and scientific and technological developments by making those rights more visible in a Charter.

This Charter reaffirms, with due regard for the powers and tasks of the Union and for the principle of subsidiarity, the rights as they result, in particular, from the constitutional traditions and international obligations common to the Member States, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters adopted by the Union and by the Council of Europe and the case-law of the Court of Justice of the European Union and of the European Court of Human Rights. In this context the Charter will be interpreted by the courts of the Union and the Member States with due regard to the explanations prepared under the authority of the Praesidium of the Convention which drafted the Charter and updated under the responsibility of the Praesidium of the European Convention.

Enjoyment of these rights entails responsibilities and duties with regard to other persons, to the human community and to future generations.

The Union therefore recognises the rights, freedoms and principles set out hereafter.

TITLE I

DIGNITY*Article 1***Human dignity**

Human dignity is inviolable. It must be respected and protected.

*Article 2***Right to life**

1. Everyone has the right to life.
2. No one shall be condemned to the death penalty, or executed.

*Article 3***Right to the integrity of the person**

1. Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity.
2. In the fields of medicine and biology, the following must be respected in particular:
 - (a) the free and informed consent of the person concerned, according to the procedures laid down by law;
 - (b) the prohibition of eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons;
 - (c) the prohibition on making the human body and its parts as such a source of financial gain;
 - (d) the prohibition of the reproductive cloning of human beings.

*Article 4***Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment**

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

*Article 5***Prohibition of slavery and forced labour**

1. No one shall be held in slavery or servitude.
2. No one shall be required to perform forced or compulsory labour.
3. Trafficking in human beings is prohibited.

TITLE II
FREEDOMS

Article 6

Right to liberty and security

Everyone has the right to liberty and security of person.

Article 7

Respect for private and family life

Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and communications.

Article 8

Protection of personal data

1. Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.
2. Such data must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the consent of the person concerned or some other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of access to data which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified.
3. Compliance with these rules shall be subject to control by an independent authority.

Article 9

Right to marry and right to found a family

The right to marry and the right to found a family shall be guaranteed in accordance with the national laws governing the exercise of these rights.

Article 10

Freedom of thought, conscience and religion

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or in private, to manifest religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.
2. The right to conscientious objection is recognised, in accordance with the national laws governing the exercise of this right.

Article 11

Freedom of expression and information

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.
2. The freedom and pluralism of the media shall be respected.

Article 12

Freedom of assembly and of association

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association at all levels, in particular in political, trade union and civic matters, which implies the right of everyone to form and to join trade unions for the protection of his or her interests.
2. Political parties at Union level contribute to expressing the political will of the citizens of the Union.

Article 13

Freedom of the arts and sciences

The arts and scientific research shall be free of constraint. Academic freedom shall be respected.

Article 14

Right to education

1. Everyone has the right to education and to have access to vocational and continuing training.
2. This right includes the possibility to receive free compulsory education.
3. The freedom to found educational establishments with due respect for democratic principles and the right of parents to ensure the education and teaching of their children in conformity with their religious, philosophical and pedagogical convictions shall be respected, in accordance with the national laws governing the exercise of such freedom and right.

Article 15

Freedom to choose an occupation and right to engage in work

1. Everyone has the right to engage in work and to pursue a freely chosen or accepted occupation.
2. Every citizen of the Union has the freedom to seek employment, to work, to exercise the right of establishment and to provide services in any Member State.
3. Nationals of third countries who are authorised to work in the territories of the Member States are entitled to working conditions equivalent to those of citizens of the Union.

*Article 16***Freedom to conduct a business**

The freedom to conduct a business in accordance with Union law and national laws and practices is recognised.

*Article 17***Right to property**

1. Everyone has the right to own, use, dispose of and bequeath his or her lawfully acquired possessions. No one may be deprived of his or her possessions, except in the public interest and in the cases and under the conditions provided for by law, subject to fair compensation being paid in good time for their loss. The use of property may be regulated by law in so far as is necessary for the general interest.

2. Intellectual property shall be protected.

*Article 18***Right to asylum**

The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as 'the Treaties').

*Article 19***Protection in the event of removal, expulsion or extradition**

1. Collective expulsions are prohibited.

2. No one may be removed, expelled or extradited to a State where there is a serious risk that he or she would be subjected to the death penalty, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment.

TITLE III

EQUALITY

*Article 20***Equality before the law**

Everyone is equal before the law.

Article 21

Non-discrimination

1. Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited.
2. Within the scope of application of the Treaties and without prejudice to any of their specific provisions, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.

Article 22

Cultural, religious and linguistic diversity

The Union shall respect cultural, religious and linguistic diversity.

Article 23

Equality between women and men

Equality between women and men must be ensured in all areas, including employment, work and pay.

The principle of equality shall not prevent the maintenance or adoption of measures providing for specific advantages in favour of the under-represented sex.

Article 24

The rights of the child

1. Children shall have the right to such protection and care as is necessary for their well-being. They may express their views freely. Such views shall be taken into consideration on matters which concern them in accordance with their age and maturity.
2. In all actions relating to children, whether taken by public authorities or private institutions, the child's best interests must be a primary consideration.
3. Every child shall have the right to maintain on a regular basis a personal relationship and direct contact with both his or her parents, unless that is contrary to his or her interests.

Article 25

The rights of the elderly

The Union recognises and respects the rights of the elderly to lead a life of dignity and independence and to participate in social and cultural life.

*Article 26***Integration of persons with disabilities**

The Union recognises and respects the right of persons with disabilities to benefit from measures designed to ensure their independence, social and occupational integration and participation in the life of the community.

TITLE IV

SOLIDARITY

*Article 27***Workers' right to information and consultation within the undertaking**

Workers or their representatives must, at the appropriate levels, be guaranteed information and consultation in good time in the cases and under the conditions provided for by Union law and national laws and practices.

*Article 28***Right of collective bargaining and action**

Workers and employers, or their respective organisations, have, in accordance with Union law and national laws and practices, the right to negotiate and conclude collective agreements at the appropriate levels and, in cases of conflicts of interest, to take collective action to defend their interests, including strike action.

*Article 29***Right of access to placement services**

Everyone has the right of access to a free placement service.

*Article 30***Protection in the event of unjustified dismissal**

Every worker has the right to protection against unjustified dismissal, in accordance with Union law and national laws and practices.

*Article 31***Fair and just working conditions**

1. Every worker has the right to working conditions which respect his or her health, safety and dignity.
2. Every worker has the right to limitation of maximum working hours, to daily and weekly rest periods and to an annual period of paid leave.

Article 32

Prohibition of child labour and protection of young people at work

The employment of children is prohibited. The minimum age of admission to employment may not be lower than the minimum school-leaving age, without prejudice to such rules as may be more favourable to young people and except for limited derogations.

Young people admitted to work must have working conditions appropriate to their age and be protected against economic exploitation and any work likely to harm their safety, health or physical, mental, moral or social development or to interfere with their education.

Article 33

Family and professional life

1. The family shall enjoy legal, economic and social protection.
2. To reconcile family and professional life, everyone shall have the right to protection from dismissal for a reason connected with maternity and the right to paid maternity leave and to parental leave following the birth or adoption of a child.

Article 34

Social security and social assistance

1. The Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity, illness, industrial accidents, dependency or old age, and in the case of loss of employment, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices.
2. Everyone residing and moving legally within the European Union is entitled to social security benefits and social advantages in accordance with Union law and national laws and practices.
3. In order to combat social exclusion and poverty, the Union recognises and respects the right to social and housing assistance so as to ensure a decent existence for all those who lack sufficient resources, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices.

Article 35

Health care

Everyone has the right of access to preventive health care and the right to benefit from medical treatment under the conditions established by national laws and practices. A high level of human health protection shall be ensured in the definition and implementation of all the Union's policies and activities.

*Article 36***Access to services of general economic interest**

The Union recognises and respects access to services of general economic interest as provided for in national laws and practices, in accordance with the Treaties, in order to promote the social and territorial cohesion of the Union.

*Article 37***Environmental protection**

A high level of environmental protection and the improvement of the quality of the environment must be integrated into the policies of the Union and ensured in accordance with the principle of sustainable development.

*Article 38***Consumer protection**

Union policies shall ensure a high level of consumer protection.

TITLE V

CITIZENS' RIGHTS

*Article 39***Right to vote and to stand as a candidate at elections to the European Parliament**

1. Every citizen of the Union has the right to vote and to stand as a candidate at elections to the European Parliament in the Member State in which he or she resides, under the same conditions as nationals of that State.
2. Members of the European Parliament shall be elected by direct universal suffrage in a free and secret ballot.

*Article 40***Right to vote and to stand as a candidate at municipal elections**

Every citizen of the Union has the right to vote and to stand as a candidate at municipal elections in the Member State in which he or she resides under the same conditions as nationals of that State.

*Article 41***Right to good administration**

1. Every person has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the institutions, bodies, offices and agencies of the Union.

2. This right includes:
- (a) the right of every person to be heard, before any individual measure which would affect him or her adversely is taken;
 - (b) the right of every person to have access to his or her file, while respecting the legitimate interests of confidentiality and of professional and business secrecy;
 - (c) the obligation of the administration to give reasons for its decisions.
3. Every person has the right to have the Union make good any damage caused by its institutions or by its servants in the performance of their duties, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States.
4. Every person may write to the institutions of the Union in one of the languages of the Treaties and must have an answer in the same language.

Article 42

Right of access to documents

Any citizen of the Union, and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State, has a right of access to documents of the institutions, bodies, offices and agencies of the Union, whatever their medium.

Article 43

European Ombudsman

Any citizen of the Union and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State has the right to refer to the European Ombudsman cases of maladministration in the activities of the institutions, bodies, offices or agencies of the Union, with the exception of the Court of Justice of the European Union acting in its judicial role.

Article 44

Right to petition

Any citizen of the Union and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State has the right to petition the European Parliament.

Article 45

Freedom of movement and of residence

1. Every citizen of the Union has the right to move and reside freely within the territory of the Member States.
2. Freedom of movement and residence may be granted, in accordance with the Treaties, to nationals of third countries legally resident in the territory of a Member State.

*Article 46***Diplomatic and consular protection**

Every citizen of the Union shall, in the territory of a third country in which the Member State of which he or she is a national is not represented, be entitled to protection by the diplomatic or consular authorities of any Member State, on the same conditions as the nationals of that Member State.

TITLE VI

JUSTICE

*Article 47***Right to an effective remedy and to a fair trial**

Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has the right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid down in this Article.

Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal previously established by law. Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented.

Legal aid shall be made available to those who lack sufficient resources in so far as such aid is necessary to ensure effective access to justice.

*Article 48***Presumption of innocence and right of defence**

1. Everyone who has been charged shall be presumed innocent until proved guilty according to law.
2. Respect for the rights of the defence of anyone who has been charged shall be guaranteed.

*Article 49***Principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties**

1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national law or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of a criminal offence, the law provides for a lighter penalty, that penalty shall be applicable.

2. This Article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles recognised by the community of nations.

3. The severity of penalties must not be disproportionate to the criminal offence.

Article 50

Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offence

No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.

TITLE VII

GENERAL PROVISIONS GOVERNING THE INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE CHARTER

Article 51

Field of application

1. The provisions of this Charter are addressed to the institutions, bodies, offices and agencies of the Union with due regard for the principle of subsidiarity and to the Member States only when they are implementing Union law. They shall therefore respect the rights, observe the principles and promote the application thereof in accordance with their respective powers and respecting the limits of the powers of the Union as conferred on it in the Treaties.
2. The Charter does not extend the field of application of Union law beyond the powers of the Union or establish any new power or task for the Union, or modify powers and tasks as defined in the Treaties.

Article 52

Scope and interpretation of rights and principles

1. Any limitation on the exercise of the rights and freedoms recognised by this Charter must be provided for by law and respect the essence of those rights and freedoms. Subject to the principle of proportionality, limitations may be made only if they are necessary and genuinely meet objectives of general interest recognised by the Union or the need to protect the rights and freedoms of others.
2. Rights recognised by this Charter for which provision is made in the Treaties shall be exercised under the conditions and within the limits defined by those Treaties.
3. In so far as this Charter contains rights which correspond to rights guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the meaning and scope of those rights shall be the same as those laid down by the said Convention. This provision shall not prevent Union law providing more extensive protection.
4. In so far as this Charter recognises fundamental rights as they result from the constitutional traditions common to the Member States, those rights shall be interpreted in harmony with those traditions.

5. The provisions of this Charter which contain principles may be implemented by legislative and executive acts taken by institutions, bodies, offices and agencies of the Union, and by acts of Member States when they are implementing Union law, in the exercise of their respective powers. They shall be judicially cognisable only in the interpretation of such acts and in the ruling on their legality.
6. Full account shall be taken of national laws and practices as specified in this Charter.
7. The explanations drawn up as a way of providing guidance in the interpretation of this Charter shall be given due regard by the courts of the Union and of the Member States.

Article 53

Level of protection

Nothing in this Charter shall be interpreted as restricting or adversely affecting human rights and fundamental freedoms as recognised, in their respective fields of application, by Union law and international law and by international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by the Member States' constitutions.

Article 54

Prohibition of abuse of rights

Nothing in this Charter shall be interpreted as implying any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognised in this Charter or at their limitation to a greater extent than is provided for herein.

The above text adapts the wording of the Charter proclaimed on 7 December 2000, and will replace it as from the date of entry into force of the Treaty of Lisbon.





2010 SUBSCRIPTION PRICES (excluding VAT, including normal transport charges)

EU Official Journal, L + C series, paper edition only	22 official EU languages	EUR 1 100 per year
EU Official Journal, L + C series, paper + annual CD-ROM	22 official EU languages	EUR 1 200 per year
EU Official Journal, L series, paper edition only	22 official EU languages	EUR 770 per year
EU Official Journal, L + C series, monthly CD-ROM (cumulative)	22 official EU languages	EUR 400 per year
Supplement to the Official Journal (S series), tendering procedures for public contracts, CD-ROM, two editions per week	multilingual: 23 official EU languages	EUR 300 per year
EU Official Journal, C series — recruitment competitions	Language(s) according to competition(s)	EUR 50 per year

Subscriptions to the *Official Journal of the European Union*, which is published in the official languages of the European Union, are available for 22 language versions. The Official Journal comprises two series, L (Legislation) and C (Information and Notices).

A separate subscription must be taken out for each language version.

In accordance with Council Regulation (EC) No 920/2005, published in Official Journal L 156 of 18 June 2005, the institutions of the European Union are temporarily not bound by the obligation to draft all acts in Irish and publish them in that language. Irish editions of the Official Journal are therefore sold separately.

Subscriptions to the Supplement to the Official Journal (S Series — tendering procedures for public contracts) cover all 23 official language versions on a single multilingual CD-ROM.

On request, subscribers to the *Official Journal of the European Union* can receive the various Annexes to the Official Journal. Subscribers are informed of the publication of Annexes by notices inserted in the *Official Journal of the European Union*.

CD-Rom formats will be replaced by DVD formats during 2010.

Sales and subscriptions

Subscriptions to various priced periodicals, such as the subscription to the *Official Journal of the European Union*, are available from our commercial distributors. The list of commercial distributors is available at:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offers direct access to European Union legislation free of charge. The *Official Journal of the European Union* can be consulted on this website, as can the Treaties, legislation, case-law and preparatory acts.

For further information on the European Union, see: <http://europa.eu>

